LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2025



DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

JL. Soekarno-Hatta No.24 Kota Bima Kode Pos : 84111

EMAIL : dpad@bimakota.go.id

Website : https://perpus.bimakota.go.id

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

RINGKASAN EKSEKUTIF..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Kedudukan, Susunan Serta Tugas dan Fungsi Organisasi..... 2

1.3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD..... 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah..... 17

2.2. Rencana Kinerja Tahunan 19

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024..... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 23

3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 23

3.2. Realisasi Anggaran..... 46

BAB IV. PENUTUP..... 51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan laporan hasil akhir dari serangkaian penyelenggaraan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sebagaiman manifestasi dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disajikan beberapa hal antara lain perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja yang merupakan satu kesatuan instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.

Tentunya dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh Karena itu saran, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini pada tahun anggaran yang akan datang.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat membantu semua pihak dalam mengukur kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Raba-Bima, 3 Februari 2026

Kepala Dinas,



Ahmad Mufrad, S.Sos
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19681225 199310 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima berkewajiban meningkatkan minat baca masyarakat dan meningkatkan tata kelola arsip daerah dengan berkomitmen menyelenggarakan pelayanan prima dan pembinaan berkelanjutan. Salah satu wujud penerapan pelayanan prima dan pembinaan berkelanjutan tersebut adalah adanya pelayanan perpustakaan keliling yang telah menjangkau masyarakat pelosok dan pinggiran kota secara rutin dan berkala serta pembinaan perpustakaan dan pembinaan kearsipan yang rutin dan berkelanjutan demi meningkatkan kualifikasi tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga pengelola kearsipan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, DPAD Kota Bima mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu bentuk penerapan tata kelola pemerintah yang baik adalah adanya kewajiban DPAD Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan pengunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja DPAD Kota Bima Tahun 2025 ini mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini diharapkan dapat memberi informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Perpustakaa dan Arsip Daerah selama tahun 2025.

1.2 Kedudukan, Susunan, serta Tugas dan Fungsi Organisasi

1.2.1 Kedudukan Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yeng dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

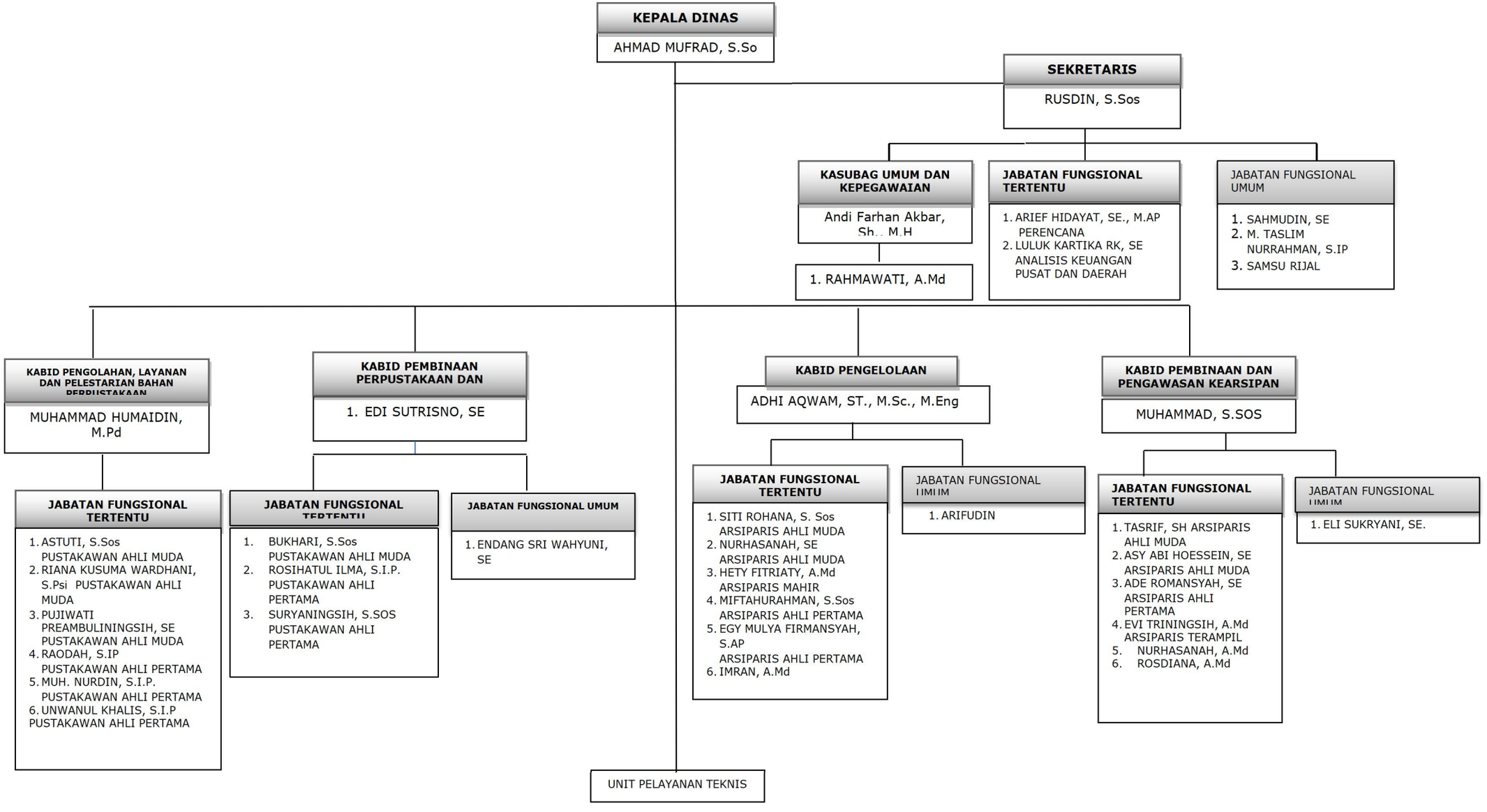
1.2.2 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
b. Unsur Sekretariat terdiri dari;
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional
c. Bidang Pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan,terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
f. Bidang Pengelolaan Arsip, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
g. Unit Pelayanan Teknis

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA
(PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 78 TAHUN 2021)



1.2.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

1.2.3.1. Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan dibidang perpustakaan dan arsip
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpustakaan dan arsip
c. Pelaksanakaan evaluasi dan pelaporan dibidang perpustakaan dan arsip;
d. Pelaksanaan administrasi dibidang perpustakaan dan arsip\
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3.2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan organisasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif kepada seluruh unit kerja dalam lingkungan dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program,penyusunan laporan dan evaluasi;
b. Pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana,tata usaha dan rumah tangga dilingkungan dinas;
c. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan
d. Pengelolaan urusan keuangan dan barang invetaris milik/kekayaan daerah dilingkungan dinas.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan Sub bagian umum dan kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.3.3. Sub bagian umum dan kepegawaian:

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas

a. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
b. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
c. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
d. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
e. Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan adminitrasi lingkup Dinas;
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2.3.4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2.3.5. Bidang Pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan

Bidang pengolahan, layanan,dan pelestarian bahan perpustakaan mempunyai tugas koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administratif bidang pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pengolahan,layanan, dan peletarian bahan perpustakaan mempunyai fungsi;

a. Pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengolahan bahan pustaka meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, seleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (local content) pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subyek, penyelesaaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi validasi, dan pemasukan data ke pangkalan data;
b. Pelakanaan pelayanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan ekstensi (Perpustakaan Keliling, Pojok Baca dan sejenisnya), promosi layanan,pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan perpustakaan serta pelaksaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
c. Pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konserfasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi,dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan ahli media melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan pustaka termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengolahan, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan. Dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan, Layanan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

1.2.3.6. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca

Bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca mempunyai tugas koordinasi dalam memfasilitasi dan memberikan pelayanan teknis serta administrasi bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan kegemaran membaca mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan implementasi norma standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan, dan pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi Pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis, kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, pemasyarakatan/sosialisasi, serta evaluasi pembinan tenaga perpustakaan;
c. Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian, dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, pemasyarakatan/sosialisasi, dan bimbingn teknis serta evaluasi kegemaran membaca; dan;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengem bangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

1.2.3.7. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pengawasan kearsipan

Untuk menyelenggarakan tugas bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kearsipan;
b. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kearsipan
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan
d. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan
e. Pelaksanaan sosialisasi kearsipan
f. Perencanaa, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan
g. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan kearsipan
h. Pelaksanaan perencaaan program pengawasan kearsipan
i. Pelaksanaan audit kearsipan
j. Pelaksanaan penilaian hasil pengaawasan kearsipan
k. Pelaksanaan monitoring hasil pengawasan kearsipan; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan.

1.3.5.8. Bidang Pengelolaan Arsip

Bidang pengelolaan arsip mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelakasanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud, bidang pengelolaan arsip mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis
b. Pelaksanaan alih media dan reproduksi arsip dinamis
c. Penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis pengelolaan arsip statis
d. Pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip

e. Pelaksanaan pengelolaan arsip
f. Pelaksanaan preservasi dan ;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pengelolaan Arsip membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Arsip.

2. Unit Pelaksana Teknis

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perpustakaan dan arsip.

1.3 isu-isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang mempunyai fungsi meningkatkan minat baca masyarakat dan meningkatkan tata kelola arsip di lingkup Pemerintah Kota Bima dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya minat kunjung masyarakat di perpustakaan daerah
2. Rendahnya perhatian pimpinan SKPD di lingkup Pemerintah Kota Bima terkait masalah penataan arsip dilingkungan kerjanya
3. Pengadaan koleksi melalui dana BOS dan atau dana DAK sekolah tidak berdasarkan kebutuhan bacaan siswa/i
4. Alokasi anggaran untuk kegiatan promosi dan publikasi perpustakaan daerah yang tidak memadai
5. Masih kurangnya sumber daya manusia yang profesional dibidang perpustakaan dan kearsipan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kedudukan, Susunan Serta Tugas dan Fungsi Organisasi

1.3. Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.4.. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

2.5.. Rencana Kinerja

2.6.. Penetapan Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kota Bima melalui peningkatan kualitas layanan dan kualitas koleksi perpustakaan serta dituntut untuk melakukan pembinaan tata kelola arsip daerah agar tercipta penyelenggaraan kearsipan yang berstandar nasional dan sesuai kaidah kearsipan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima 2025-2029. Adapun Visi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kota Bima yang Cerdas dan Berbudi Pekerti Luhur dan Amanah melalui Peningkatan Minat Baca dan Penataan Arsip yang Baik Sebagai Wahana Penguasan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi dengan Memberikan Layanan yang Inovatif, Berorientasi pada Kepuasan Pengguna"

Visi tersebut merupakan suatu cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagai lembaga kepustakaan dan kearsipan yang merupakan penggagas literasi dan gerakan sadar arsip. Selanjutnya untuk tewujudnya visi tersebut maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Menjadi Mitra Profesional bagi Masyarakat dengan Berperan sebagai Pendamping Proses Belajar Mandiri
2. Menjadi Pusat Akses Informasi bagi Masyarakat Global
3. Ikut Membentuk Masyarakat Global
4. Mengumpulkan, Mengelola dan Menyimpan semua Arsip Aktif serta Arsip Inaktif yang Ada Dilingkungan Pemerintah Kota Bima

Visi dan misi yang telah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran strategis serta indicator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya;

Tabel. 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		
			2025	2026	2027
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	1. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	20	20	21
		2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TkM)	70	70	71
2.	Terselenggaranya Pelayanan digitalisasi Kearsipan	1. Indeks Pengawasan Kearsipan	45	45	47
		2. Indeks Tingkat digitalisasi Kearsipan	45	45	47

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Dearah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 serta dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indicator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formula Pengukuran dan Tipe Perhitungan)
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai Berdasarkan Hasil IPLM yang di rilis Perpustakaan Nasional
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM)	Nilai Berdasarkan Hasil TKM yang di rilis Perpustakaan Nasional
2.	Terselenggaranya Pelayanan Digitalisasi Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai berdasarkan Hasil Audit Kearsipan Eksternal oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB
		Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai berdasarkan Hasil Audit Kearsipan Eksternal oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025 dijabarkan berdasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2025.

Tabel. 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM)	70
2.	Terselenggaranya Pelayanan Digitalisasi kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	45
		Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	45

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fung si dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan minat baca masyarakat kota bima dan meningkatkan tata kelola arsip;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan *punishment*

Perjanjian kinerja Dinas Perpustaaan dan Arsip Daerah Kota Bima pada tahun 2025 ini terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang dilaksanakan melalui 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 6.205.631028,-

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Indeks Literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	70
2.	Terselenggaranya Pelayanan Kearsipan	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	45
		Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	45

Tabel 2.5

Program dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.050.671.790	APBD
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	965.582.600	APBD dan APBN
3.	Program Pengelolaan Arsip	178.757.730	APBD
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	8.541.900	APBD
5.	Program Perizinan Penggunaan Arsip	2.077.000	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indkator kinerja, pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja.

3.1.1 Pengukuran Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja pada pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RENSTRA 2025-2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	2025		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Indeks Literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20	19,83	99,15
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	70	69,15	98,78
Terselenggaranya Pelayanan Kearsipan	Indeks Pengawasan Kearsipan	45	56,04	124,53
	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	45	45,82	101,82
Rara-rata Capaian (%)				106,07

Sumber : Hasil Analisis DPAD, 2025

Realisasi capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dikategorikan tinggi dengan nilai rata-rata 106,07 %. Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan

antara realisasi kinerja tahun berkenan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah tahun 2025.

3.1.2 Analisis Kinerja Sasaran

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Nilai Indeks Pembangunan Literasi masyarakat

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat provinsi sebagai upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan serta menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat
Rumus	:	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100 ((0,30 x 0.167) + (0,70 x 0.212)) x 100
Capain Kinerja	:	**19.83**
Capain Kinerja Tahun 2024	:	**69.03**
Capaian Meningkat/ Menurun/Tetap	:	**Menurun**
Keterangan Sebab Akibat	:	
Definisi Operasional	:	Komponen Pengukuran IPLM terdiri atas: 1. Dimensi 2. Variabel 3. Indikator Dimensi Penilaian terdiri dari **A.** Dimensi Kepatuhan : • Variabel Koleksi terdiri dari Indikator : - Jumlah keseluruhan bahan Perpustakaan dalam bentuk fisik yang dimiliki; - Jumlah keseluruhan bahan Perpustakaan dalam bentuk digital yang dimiliki; - Jumlah koleksi dari bahan Perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah koleksi dari bahan Perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir • Variabel Tenaga Perpustakaan terdiri dari Indikator : - Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma (D3) di bidang Ilmu

		Perpustakaan; - Jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki surat keputusan dari lembaga; - Jumlah tenaga Perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesianberkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir **B.** Dimensi Kinerja : • Variabel Pelayanan terdiri dari Indikator : - Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah pemustaka yang menggunakan layanan Perpustakaan, baik luring maupun daring dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah bahan Perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah akses atau penggunaan bahan Perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, termasuk unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data dalam 1 (satu) tahun terakhir • Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan terdiri dari Indikator: - Jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah kerja sama yang dilakukan Perpustakaan dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; - Jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di Perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital; - jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan Perpustakaan
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain ditandatangani oleh kepala dinas Perpustakaan dengan melengkapi Kop surat dan stempel resmi, Tempat dan tanggal, bulan, tahun penetapan; dan Rekapitulasi seluruh data Dimensi dan Variabel beserta Rincian Perhitungan hingga menghasilkan nilai IPLM.
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

IKK Outcome : Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat

- **Penjelasan IKK Outcome**

Konsep/Definisi	:	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat provinsi sebagai upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan serta menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat
Rumus	:	TKM = ((0.15 × Pra Membaca) + (0.50 × Saat Membaca) + (0.35 × Pasca Membaca)) × 100 **((0.15 × 63.41) + (0.50 × 68.24) + (0.35 × 72.62)) × 100**
Capain Kinerja	:	**69.15 (Sedang)**
Capain Kinerja Tahun 2024	:	**69.46 (Sedang)**
Capaian Meningkat/ Menurun/Tetap	:	**Menurun**
Keterangan Sebab Akibat	:	
Definisi Operasional	:	Tingkat Kegemaran Membaca yang selanjutnya disingkat TKM adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Komponen Pengukuran TKM terdiri atas: 1. Dimensi 2. Variabel 3. Indikator **Dimensi Penilaian terdiri dari** a. **Dimensi Pra Membaca** : - Variabel Motivasi Membaca; - Variabel Model Akses Membaca; - Variabel Pembelajaran Sosial; - Variabel Konseo Budaya Literasi. b. **Dimensi Saat Membaca** : - Variabel Perilaku Membaca; - Variabel Literasi Sosial: c. **Dimensi Pasca Membaca** : - Variabel Dampak; - Variabel Nilai Tambah:
Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain ditandatangani oleh kepala dinas Perpustakaan dengan melengkapi Kop surat dan stempel resmi, Tempat dan tanggal, bulan, tahun penetapan; dan Rekapitulasi

		seluruh data Dimensi dan Variabel beserta Rincian Perhitungan hingga menghasilkan nilai TKM
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel. 3.2

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Jangka Menegah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Awal Tahun Perencanaan Jangka Menengah (2025)	Realisasi per Tahun			Capaian %
			2025	2026	2027	
Meningkat nya Indeks Literasi masyarakat	1. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20	19,83	-	-	99,15
	2. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	70	69,15	-	-	98,78

Pada tahun 2025 ini adalah tahun pertama perencanaan berdasarkan RPD Kota Bima 2025-2029 dan dokumen RENSTRA Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja sasaran strategis I dengan menggunakan indikator sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RENSTRA 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis I dengan Indikator Pada RENSTRA 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Per Tahun							
		2025		2026		2027		2028	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Pembangunan Literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20	19,83	20	-		-		-
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	70	69,15	70	-		-		-

Sumber : Laporan Akhir IPLM,TKM 2025

Dilihat dari tabel di atas, realisasi dan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2024 untuk IPLM yaitu 69,03 % dan TKM yaitu 69,46 %dari target.

Pada tahun pertama Renstra Dinas Perpustakan dan Arsip Daerah Kota Bima, dari tabel di atas menunjukkan adanya Penurunan pada Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat kota bima dari hasil akhir renstra 2019-2024 yaitu dari nilai 69,03 pada tahun 2024 menurun menjadi 19,83 pada tahun 2025 dan dan dari nilai 69,46 pada tahun 2024 menurun menjadi 69,15 pada tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2025

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkat nya Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20	19,83	99,15
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	70	69,15	98,78
Rata-rata capaian (%)				

Sumber: Hasil Analisis DPAD, 2025

Sasaran strategis I tercapai dengan capaian kinerja berada pada kategori Tinggi dengan persentase capaian di bawah target sebanyak 99,15 %. Minat baca masyarakat Kota Bima dapat dikatakan baik, hal ini terlihat dari hasil survey minat baca masyarakat, jumlah kunjungan dan jumlah ketersediaan perpustakaan yang representatif.

Keberhasilan capaian tersebut tidak terlepas dari faktor pendukung diantaranya; (1) Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berintegritas sehingga tetap berinovasi mempertahankan nilai tingkat kegemaran membaca.

Analisis Capaian Indikator Kinerja
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKT
KOTA BIMA
TAHUN 2025

No	Dimensi	Nilai	Interpretasi	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kepatuhan	0.167	Nilai Kepatuhan lebih kecil dari Nilai Kinerja, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki kecukupan koleksi dan tenaga yang kurang, tetapi pelayanan dan pengelolaan yang lebih baik.	- Tingkatkan pengembangan koleksi dan tenaga perpustakaan dengan 17%. - Perkuat pelayanan dan pengelolaan dengan 26%.
1.1	Variabel Koleksi	0.206	Nilai Variabel Koleksi lebih kecil dari Nilai Variabel Tenaga Perpustakaan, menunjukkan bahwa koleksi perpustakaan kurang berkembang dibandingkan dengan kecukupan tenaga.	- Tingkatkan pengembangan koleksi dengan 12.7%. - Perkuat pengembangan tenaga perpustakaan dengan 20.6%.
1.2	Variabel Tenaga Perpustakaan	0.127	Nilai Variabel Tenaga Perpustakaan lebih besar dari Nilai Variabel Koleksi, menunjukkan bahwa kecukupan tenaga perpustakaan lebih baik dibandingkan dengan pengembangan koleksi.	- Perkuat pengembangan koleksi dengan 20.6%. - Tingkatkan pengembangan tenaga perpustakaan dengan 20.6%.
2	Kinerja	0.212	Nilai Kinerja lebih besar dari Nilai Kepatuhan, menunjukkan bahwa pelayanan dan pengelolaan perpustakaan lebih baik dibandingkan dengan kecukupan koleksi dan tenaga.	- Perkuat pelayanan dan pengelolaan dengan 21.2%. - Tingkatkan pengembangan koleksi dan tenaga perpustakaan dengan 21.2%.
2.1	Variabel Pelayanan	0.157	Nilai Variabel Pelayanan lebih kecil dari Nilai Variabel	- Tingkatkan pengembangan

			Penyelenggaraan/Pengelolaan, menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan kurang berkembang dibandingkan dengan pengelolaan.	pelayanan dengan 15.7%. - Perkuat pengembangan pengelolaan dengan 26.6%.
2.2	Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan	0.266	Nilai Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan lebih besar dari Nilai Variabel Pelayanan, menunjukkan bahwa pengelolaan perpustakaan lebih baik dibandingkan dengan pelayanan.	- Perkuat pengembangan pelayanan dengan 26.6%. - Tingkatkan pengembangan pengelolaan dengan 26.6%.
4	**Nilai IPLM**	**19.83**	**Nilai IPLM lebih kecil dari Nilai Kinerja, menunjukkan bahwa perpustakaan memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan.**	**- Tingkatkan kinerja dan pelayanan perpustakaan dengan 19.83%.** **- Perkuat pengembangan koleksi dan tenaga perpustakaan dengan 19.83%.**

Dari tabel di atas pencapaian IPLM Kota Bima sebesar **69,03** dan masuk dalam kategori **Sedang.**

Analisis Capaian Indikator Kinerja
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA (TKM) MASYARAKAT
KOTA BIMA
TAHUN 2025

No	Dimensi	Nilai	Interpretasi	Rekomendasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Pra Membaca	63.41 (sedang)	Tindak lanjut membaca cukup berkembang dan mulai menguatkan pemaknaan serta penguatan perilaku.	Perkuat tindak lanjut: klub baca, diskusi/resensi sederhana, tantangan berbagi bacaan, dan aktivitas refleksi (ringkas, tidak membebani).
2.	Saat Membaca	68.24 (Rendah)	Kesiapan membaca sudah muncul, namun belum konsisten dan belum merata pada	Perkuat kesiapan membaca: akses bahan bacaan relevan, pendampingan pemilihan bacaan, serta program

			populasi.	literasi keluarga/sekolah (rencana baca mingguan, pojok baca aktif).
3.	Pasca Membaca	72.62 (Sedang)	Aktivitas membaca cukup intens dan menunjukkan keterlibatan yang relatif baik.	Perkuat pelaksanaan membaca: fasilitator/relawan, kegiatan membaca interaktif, ruang baca publik/TBM aktif, dan agenda rutin (15–30 menit membaca harian).
4.	**Nilai TKM**	**69.15 (Sedang)**	**Indeks komposit menunjukkan perilaku membaca relatif berkembang dan mulai stabil pada populasi.**	**Integrasikan siklus Pra–Saat–Pasca dalam program daerah: target partisipasi, penguatan ekosistem bacaan, serta monitoring berbasis data per wilayah.**

Tabel 3.6
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi capaian	Capaian %
1.	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase perpustakan yang representatif**	3%	3 %	100
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang representatif	1%	1%	100
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan stansar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100

		Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya			
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	1 Layanan	100
	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	100 Eksemplar	0 Eksemplar	0
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	100
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	1 Orang	14
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	1250 Eksemplar	542 Eksemplar	43
	Pengembangan dan pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information	1 Layanan	1 Layanan	100

		Technology Service Management)			
No	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja program (outcome) / Kegiatan (output)**	**Target 2024**	**Realisasi capaian**	**Capaian %**
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lokus Gemar Membaca*	*48 Lokus*	*44 Lokus*	*92*
	Pengembangan literasi berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	4 Perpustakaan	133
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	6 Orang	100
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada satuan pendidikan dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	5 Lokus	5 Lokus	100

Pencapaian sasaran strategis II:

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraaan kearsipan.-- Rumus Pengukuran : sesuai Perka ANRI No. 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan nilai bobot pengawasan internal 40% dan eksternal 60%, nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulai dari nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal. Nilai komposit terdiri atas dimensi : 1. Kebijakan kearsipan 2. Organisasi kearsipan 3. SDM kearsipan 4. Pengelolaan arsip 5. Pendanaan Nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan yang diperoleh obyek pengawasan terdiri atas : 1) Nilai > 90 - 100 dengan katergori AA (sangat memuaskan) 2) Nilai > 80 - 90 dengan kategori A (memuaskan) 3) Nilai > 70 - 80 dengan kategori BB (sangat baik) 4) Nilai > 60 - 70 dengan kategori B (baik) 5) Nilai > 50 - 60 dengan kategori CC (cukup) 6) Nilai > 30 - 50 dengan kategori C (kurang) 7) Nilai 0 - 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Tabel. 3.7

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis II Terhadap Target Jangka Menengah

REKAPITULASI NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2025

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT	NILAI ASPEK
1.	Aspek Kebijakan	1100	920	15%	**12,55**
2.	Aspek Pembinaan	1900	900	25%	**11,84**
3.	Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun	800	550	10%	**6,88**
4.	Aspek Pengelolaan Arsip Statis	2200	980	30%	**13,36**
5.	Aspek Sumber Daya Kearsipan	2400	1370	20%	**11,42**
TOTAL NILAI STANDAR/NILAI/NILAI AKHIR		**8400**	**4720**	**100%**	**56,04 CC (CUKUP)**

Pengukuran kinerja sasaran strategi II dengan menggunakan indikator sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RENSTRA 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis II dengan Indikator Pada Renstra 2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi Per Tahun					
		2025		2026		2027	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Terselenggaranya Pelayanan Digitalisasi	Nilai Hasil pengawasan Kearsipan	45	56,04	45	-	48	-
	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	45	45,82	45	-	48	-

Kearsipan							

Sumber : Laporan Realisasi Program/Kegiatan DPAD 2025

Dari tabel di atas terlihat pencapaian dari indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan sudah memenuhi target dari lima aspek yang dinilai dari target 45 terealisasi 56,04 dengan nilai aspek Cukup, sedangkan pencapaian Nilai Tingkat Digitalisasi arsip dari target 45 terealisasi 45,82 dengan nilai aspek kurang. Tapi jika dilihat dari capaian target Kota bima sudah melebihi dari target.

Analisis Capaian Indikator Kinerja
Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip

Pada era revolusi industri 4.0, perkembangan arsip menghadapi tantangan berat untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan budaya masyarakat yang mengkehendaki segala sesuatu yang fleksibel dan cepat. Tantangan ini merupakan tuntutan untuk dilaksanakannya revolusi arsip melalui sistem digitalisasi. Digitalisasi Arsip diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan konvensional dalam hal kearsipan seperti menyangkut: kelestarian wujud fisik arsip (kertas atau media lain), efisiensi tempat pemberkasan atau penyimpanan arsip, efisiensi penataletakan arsip, efisiensi perpindahan arsip, dan lain sebagainya.

Selain itu, Digitalisasi Arsip merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi Arsip yang dilakukan merupakan alih media/ perubahan wujud fisik arsip konvensional menjadi arsip elekronik atau dinamakan alih media.

Pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik, dijelaskan bahwa arsip elektronik merupakan arsip yang diciptakan yaitu dibuat dan diterima dalam format elektronik atau arsip hasil alih media, sedangkan alih media arsip elektronik merupakan kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lain dalam rangka memudahkan akses arsip.

REKAPITULASI NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP ASKE
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2025

NO	ASPEK	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT	NILAI ASPEK
A	Digitisasi Arsip	100	70		
B	Implementasi Aplikasi Srikandi/Aplikasi Selain Srikandi	600	360		
C	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	100	50		
D	Sumber Daya Pengelolaan Arsip Elektronik	300	240		
	TINGKAT DIGITALISASI ARSIP ASKE	**1100**	**720**	**70%**	**45,82 C (KURANG)**

Tabel 3.11
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program(outcome) / Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi capaian	Capaian %
1.	**Program Pengelolaan Arsip**	**Persentase jumlah arsip yang diolah**	**100%**		
	Pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Dinamis yang telah dikelola*	*250 Arsip*	*173 Arsip*	*69*
	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	69 Berkas	69
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	104 Berkas	69
	Pengawasan Arsip Dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	3 Laporan	1 Laporan	33
	Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/kota	Jumlah arsip statis yang telah dikelola	10 Arsip	211 Arsip	2110
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	211 arsip	2110
	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengguna yang memanfaatkan simpul jaringan infomasi kearsipan nasional JIKN*	*50 Pengguna*	*50 Pengguna*	*100*
	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	50 Pengguna	100
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	100
No	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator kinerja program(outcome) / Kegiatan (output)**	**Target 2025**	**Realisasi capaian**	**Capaian %**

2.	**Program perlindungan dan penyelamatan arsip**	**Persentasi perlindungan arsip**	**100 %**	**0**	**0**
	Pemusnahan Arsip dilingkungan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip yang dimusnahkan yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun*	100 Arsip	0 Arsip	*0*
	Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	120 Arsip	*120*
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase tersedianya perizinan penggunaan Arsip	1	0	*0*
	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Dikabupaten /Kota	Tersedianya pelayanan izin pengguanaan arsip bersifat tertutup	1 Arsip	0	*0*
	Penyediaan daftar dan Penetapan Izin PenggunaanArsip Yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1 arsip	0	*0*

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung, berikut ini factor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain; (1) tersedianya sumber daya pegawai yang cukup memadai; dan (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Faktor penghambat sehingga beberapa kegiatan tidak mencapai target anatara lain; (1) program kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan; dan (2) pemotongan pagu anggaran oleh Bappeda yang menyebabkan penghapusan program kegiatan penunjang tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas.

3.1.3 Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur

Salah satu penunjang tercapainnya sasaran strategis dan indikator kinerja adalah efisiensi penggunaan SDM yang tersedia. SDM yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima berada pada kategori kurang, karena ketersediaan staf yang terbatas dan minim sehingga beberapa kepala seksi dan kasubag tidak memiliki staf Pegawai Negeri.

Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan indikator dinas yang tertuang dalam dokumen RENSTRA 2025-2029. Sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima hingga akhir tahun 2029 , digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	5	10,86 %
2.	S1	29	63,04 %
3.	Diploma 3	7	15,21%
4.	SMA / sederajat	5	10,86
Total		46	100%

Sumber: DPAD Kota Bima Tahun 2025

Tabel 3.13
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	6	13,04
2.	Golongan III	24	52,17
3.	Golongan II	-	-
4.	Golongan I	-	-
5.	P3K Golongan IX	2	4,34
6	P3K Golongan VII	4	8,69
7	P3k Golongan V	2	4,34
8	P3K PW	8	17,39
Total		46	100%

Sumber : DPAD Kota Bima Tahun 2024

Tabel 3.14
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2,78%
2.	Eselon III	5	13,89%
3.	Eselon IV	1	2,78%
4.	Non-Eselonering	39	84,78%
Total		46	100%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2024

Berdasarkan profil SDM aparatur di atas pada table 3.12 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan diketahui bahwa pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar adalah Strata 1 yaitu 29 orang (63,04%), selanjutnya 7 orang (15,21%) memiliki tingkat pendidikan D.III dan

SMA/Sederajat, dan lainnya berpendidikan Strata 2. Selanjutnya pada tabel 3.13, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bima 52,17% atau sebanyak 24 orang adalah Golongan III, 6 orang (13,04%) Golongan IV, dan sisanya 16 orang adalah pegawai golongan Non Golongan

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Perpustakaan Daerah Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang Perpustakaan dan Kerasipan, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2025 sebesar **Rp. 6.205.631.026,00** (Enam Milyar Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluhsatu Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar **Rp. 5.520.770.808,00** (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah), atau **88,96** % (Delapan Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Enam Persen). Anggaran ini terdiri dari belanja operasional dan belanja modal. Dari target belanja operasional sebesar **Rp. 6.136.043.026,00** Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima merealisasikan sebesar **Rp. 5.453.258.266,00** atau sebesar **90,33** % Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 69.588.000,00** direalisasikan sebesar **Rp.** 67.512.542**,00** atau sebesar **97,17%.** Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15
Rekapitulasi Belanja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Operasional	6.136.043.026,00	**5.520.770.808,00**	88,96
2.	Belanja Modal	69.588.000,00	67.512.542**,00**	97,17
Jumlah		**6.205.631.026,00**	5.588.283.350,00	90,05

Sumber: Laporan Keuangan DPAD T.A. 2025

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% (Persen)
1.	Meningkatnya indeks literasi masyarakat	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**965.582.600**	**745.251.173**	**77**
		PengelolaanPerpustakaan Daerah Kabupaten/Kota	*441.245.900*	*318.299.368*	*72*
		Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	27.981.000	15.919.534	57
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.456.800	56.640.373	70
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	29.751.000	28.627.800	96
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	101.468.400	70.612.716	70
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.444.000	5.863.800	91
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.082.000	499.000	3

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% (Persen)
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	154.081.900	130.036.145	84
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	25.980.800	10.100.000	39
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*524.336.700*	*226.915.298*	*43*
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1.620.400	1.361.400	84
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	206.057.900	198.675.107	96
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	316.658.400	226.915.298	72
2.	Meningkatnya tata kelola arsip	**Program Pengelolaan Arsip**	**178.757.730**	**140.376.582**	**79**
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	144.131.990	111.527.892	77
		Penciptaan Penggunaan Arsip Dinamis	19.454.125	18.245.548	94
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	11.711.665	7.421.350	63
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	112.966.200	85.860.994	76
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*11.667.740*	*7.492.600*	*64*
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip	11.667.740	7.492.600	64

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% (Persen)
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*22.958.000*	*21.356.090*	*93*
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	6.444.000	6.356.000	99
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	16.514.000	14.998.090	91
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	**8.541.900**	**5.862.100**	**69**
		Pemusnahan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di BAwah 10 Tahun	*8.541.900*	*5.862.100*	*69*
		Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	8.541.900	5.862.100	69
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	2.077.000	**0**	**0**
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*2.077.000*	*0*	*0*
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	2.077.000	0	0

Sumber: Laporan Keuangan DPAD T.A. 2025

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.17

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
DPAD Kota Bima Tahun 2024

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12.871.000	12.008.000	93,30
		Penyusnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.847.000	2.789.000	97,96
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.834.000	2.606.000	91,95
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.551.000	2.418.000	94,79
		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1.331.000	1.250.000	93,91
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	814.000	761.000	93,49
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.494.000	2.184.000	87,57
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.211.343.458,70	3.849.322.245	91,40
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.073.499.458,70	3.719.314.245	91,31
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	134.322.000	128.720.000	95,83
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kuangan Akhir Tahun SKPD	1.722.000	644.000	37,40

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1.800.000	644.000	35,78
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*35.000.000*	*35.000.000*	*100*
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	35.000.000	35.000.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	281.633.100	252.369.764	89,61
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.417.600	13.881.600	96,28
		Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	73.789.000	63.181.144	96,28
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.243.500	41.750.467	92,28
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.113.000	1.008.000	90,57
		Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.532.000	8.931.219	77,45
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	129.700.000	118.615.334	91,45
		Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5.838.000	5.002.000	85,68
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.684.327,30	221.414.385	94,75
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	11.000.000	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.134.327,30	105.864.385	89,61
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.550.000	104.550.000	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*294.140.000*	*259.166.559*	*88,11*

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	68.510.000	55.155.839	80,51
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	74.800.000	57.509.000	76,88
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.400.000	25.040.000	94,85
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.430.000	121.461.720	97,61

Sumber: Laporan Keuangan DPAD T.A. 2025

Rata-rata realisasi keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2024 adalah 97,02% merupakan capaian yang sangat memuaskan. Efisiensi penggunaan anggaran ini didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. SDM yang berkompeten dan berintegritas sehingga dapat meningkatkan kinerja melalui manajemen waktu kerja yang baik.
2. Sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan tak terduga dalam kegiatan penggunaan anggaran.
3. Komitmen kinerja yang berorientasi pada output dan outcome yang baik.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima tahun 2025 merupakan media yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi internal melalui Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis serta rangkuman indikator kinerja Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang telah disusun dalam LKIP Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima tahun 2025, kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota termasuk kategori sangat baik dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar -------%. Sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan, sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan mempertahankan kinerja saat ini. Indikator kinerja kegiatan dan indikator sasaran juga akan disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal tidak dapat terelakan sepanjang tahun 2025. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan kinerja aparatur, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Kota Bima Tahun 2025-2029.

Raba-Bima, 3 Februari 2026

Kepala Dinas,

Ahmad Mufrad, S.Sos
Pembina Utama Tk.I (IV/b)
NIP. 19681225 199310 1 001

PEMERINTAH KOTA BIMA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatuilahi wabarakaatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKB dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian sasaran strategis serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPPKB. Capaian kinerja tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kontribusi DPPKB dalam meningkatkan kualitas penduduk serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam laporan ini akan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pada tahun-tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif dalam proses penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan kritik yang membangun akan sangat kami hargai untuk perbaikan di masa depan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Kota Bima, 19 Januari 2026
Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Bima

H. ICHWANUL MUSLIMIN, SP MM
NIP. 19720229 200501 1 005

DAFTAR ISI

Halaman judul i
KataPengantar..... ii
Daftar isi iii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar belakang. 1
1.2. Maksud, Tujuan dan Landasan Hukum 2
1.3. Struktur Organisasi 8
1.4. Permasalahan Yang Dihadapi 6

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 14

2.1. Rencana Kerja Tahunan 16
2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
2.3. Rencana Kerja Tahunan..... 18
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 28

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31
3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Atau .. Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan 37
3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 56
3.4 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 41
3.5 Realisasi Anggaran 74

BAB IV. PENUTUP..... 100
4.1 Kesimpulan 100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu upaya untuk mewujudkan Pemerintah yang baik (*Good Governance*) maka pada tatanan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satu implementasi untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab maka setiap instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan amanat dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah. LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari penggunaan anggaran dan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Laporan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat. Laporan ini disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan, yaitu selama satu tahun. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2025, merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kota Bima. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); yang melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga .

LKIP sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM

1.2.1 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan. Langkah dari tata kelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bima melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima (DPPKB), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

LKIP diperlukan sebagai alat pertanggung jawaban Dinas PP dan KB Kota Bima atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta atas penggunaan berbagai sumber daya Pemerintah, sedangkan yang menjadi tujuan Penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

a. untuk memberikan informasi mengenai kinerja Dinas PP dan KB Kota Bima Tahun 2025;
b. sebagai media evaluasi kinerja Dinas PP dan KB Kota Bima Tahun 2025 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
c. sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan program pembangunan dan perencanaan kinerja di masa datang;
d. sebagai media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) untuk menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas PP dan KB Kota Bima.

1.2.2 Landasan Hukum

LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4188) ;
- Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah j.o Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**;**
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE).
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Derah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
- Peraturan Walikota Bima Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 310) .

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 104 Tahun 20121 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima terdiri dari :

1. **Kepala Dinas**.

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Untuk menyelenggarakan tugas sebgaimana dimaksud diatas, kepala dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
2. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
3. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kualitas penduduk;
4. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas penduduk dan keluarga berencana;
6. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. pelaksanaan Pelayanan KB;
9. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
10. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. pengelolaan urusan ASN; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, yakni :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

   Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan:

   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran
   b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
   c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat , kenaikan pangkat , pemberhentian dan pensiun pegawai
   d. Pelaksanaaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga , keamanan dan kebersihan
   e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara
   f. Pelaksanaan urusan kepegawaian disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
   g. Penyusunan laporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran
   b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program
   c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   f. Pemantuan dan evaluasi pelaksanaan porgram dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   g. Penyusunan lapporan di bidang perencanaan dan keuangan
   h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan , pengelolaan penerimaan negara bukan pajak , pengujian dan penerbitan surat perintah membayar
   i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya , daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang keluarga berencana mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana;
2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana;
3. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
4. pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
5. pelaksanaan Pelayanan KB;
6. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;
7. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;

Bidang Keluarga Berencana membawahi dan mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional.

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

1. perumusan Kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

2. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berancana;
3. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi kelurarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berancana;
4. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
5. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
6. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi dan mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksakan penyiapan perumusan kebiajak teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

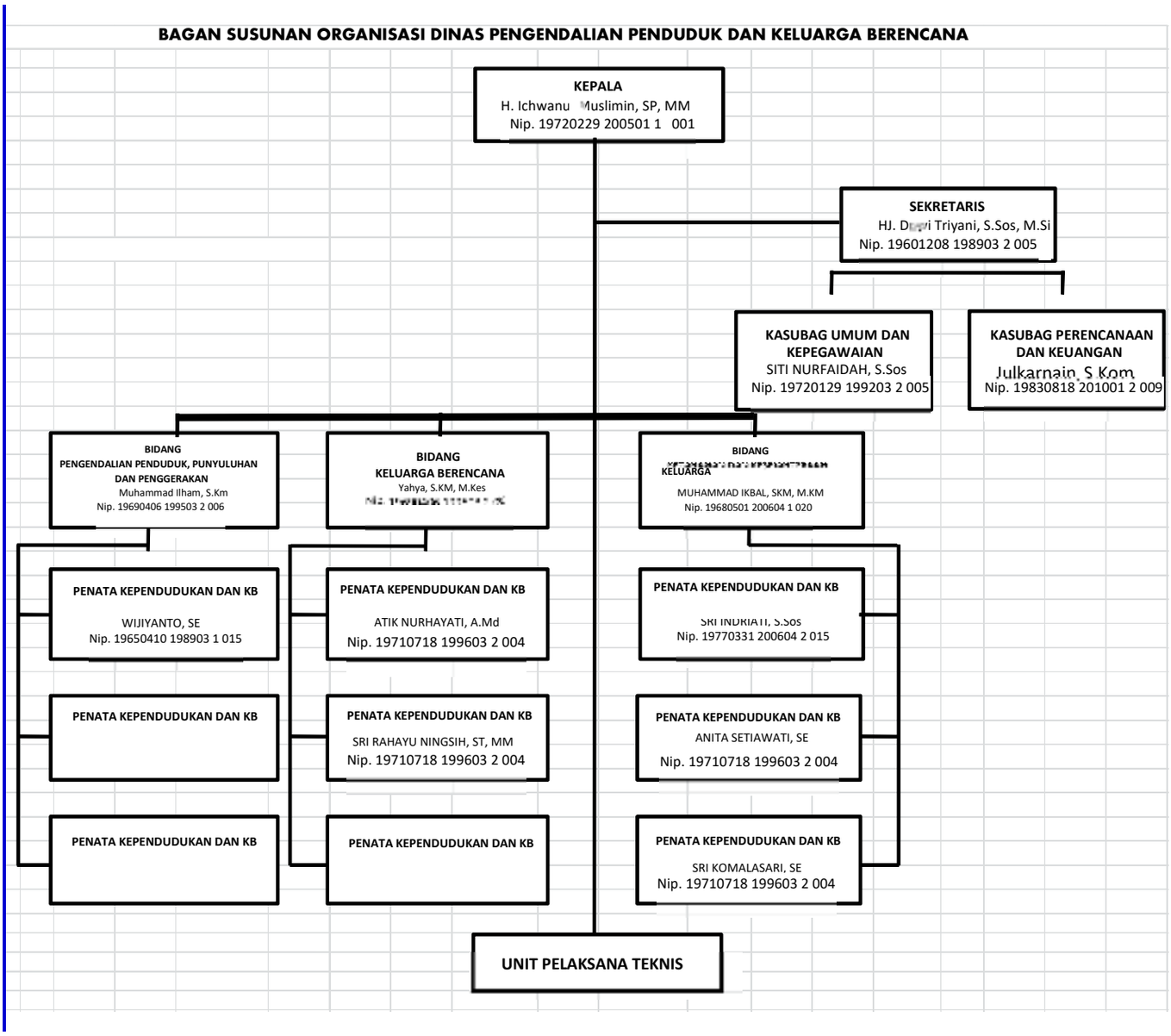
Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
4. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
5. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
6. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
7. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional.

- Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berikut bagan susunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima :



1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang besar dalam hal pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencaana Kota Bima menemui kendala yang tidak sedikit. Kendala dan permasalahan tersebut dirangkum dan dirumuskan menjadi isu strategis yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Bima Tahun 2025 - 2029. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun, isu – isu strategis ini dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKB. Isu strategis tersebut, antara lain :

- Bagaimana menekan Angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*/TFR) diwilayah kota Bima (Tahun 2024 di angka 2.27)

- Menekan angka *Unmet need* yang masih tinggi (Tahun 2024 di angka 9.2 %)
- Angka prevalensi *Stunting* masih tinggi (10,4)
- Menekan angka putus pake (DO) akseptor KB yang masih tinggi
- Masih tingginya cakupan PUS yang usia istrinya dibawah 20 Tahun
- Masih rendahnya kesertaan KB Pria
- Kualitas data dan informasi keluarga harus lebih akurat
- Bagaimana memberdayakan masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana dikota Bima
- Upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA) agar lebih optimal

Sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025 - 2029, permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuan Strategis OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia Kota Bima dan meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat. Hal ini selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang pada dasarnya bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, termasuk umur harapan hidup. Ketika angka kelahiran terkendali, sumber daya dapat dialokasikan lebih baik untuk layanan kesehatan dan pendidikan.

Salah satu akar masalah pengendalian penduduk di Kota Bima adalah angka kelahiran total yang masih tinggi. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* (TFR) yaitu rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya jika ia mengikuti pola kelahiran tertentu. Angka kelahiran total Kota Bima Tahun 2024 adalah 2.27 artinya rata-rata jumlah anak dalam keluarga di Kota Bima pada Tahun 2024 adalah 2-3 orang. Dibandingkan Angka TFR nasional sebesar 2.11, maka TFR Kota Bima masih harus ditingkatkan lagi.

Selain itu akar masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Bima adalah angka *Unmeet Need* yang masih tinggi yaitu 9.2 di Tahun 2024, dibandingkan dengan angka *Unmeet Need* Propinsi NTB *sebesar 5.9,* Kota Bima masih berada dibawah Propinsi NTB meskipun dibandingkan secara Nasional (11.1) Angka *Unmeet Need* Kota Bima lebih rendah. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan dini yang masih tinggi. Pernikahan dini cenderung menurunkan median usia perkawinan pertama (MUKP). MUKP Kota Bima adalah 21,0, sedangkan secara nasional nilai MUKP Tahun 2024 adalah 22.3. Meski masih berada diatas MUKP Prpoinsi NTB yang berada di angka 20,9, MUKP Kota Bima masih harus ditingkatkan lagi.

Selain yang telah dijabarkan diatas permasalahan lainnya adalah masih tinggi angka *stunting* di Kota Bima. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (di bawah usia lima tahun) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hal ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengampu keluarga beresiko *stunting.* Keluarga beresiko *stunting,* berdasarkan data sekitar 10,17 %. Keluarga Beresiko Stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih factor resiko stunting. Kategori Keluarga beresiko *stunting* yaitu keluarga miskin yang didalamnya terdapat remaja putri, calon pengantin, ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan.

Perkembangan program keluarga berencana di Kota Bima secara umum cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Permasalahan utama yang dirasakan oleh DPPKB adalah :

- Pengetahuan masyarakat terhadap program Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi masih kurang dan belum merata;
- Jumlah peserta KB baru yang masih rendah sekitar 9,39 persen (2.239) dari jumlah PUS (23.833);
- Kurangnya Sumber Daya Lini Lapangan, seperti Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB) masih kurang dengan jumlah sebanyak 36 orang sedangkan di Kota Bima ada 41 kelurahan

- Masih tingginya Prevalensi *Stunting* Kota Bima yaitu 28.40 (Sumber : SGI Tahun 2024)
- Masih tingginya angka pernikahan dini, yang ditandai dengan perkawinan pada usia muda.
- Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
- Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
- Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) belum optimal.
- Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas kelompok ketanahan (BKB, BKL, BKR dan UPPKA) yang masih harus ditingkatkan lagi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas. Dalam penyelesaian mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dan kegiatan penyelengaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Visi Pembangunan Daerah Kota Bima sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat Dan Berkelanjutan. Kota Bima yang Maju berarti memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pembangunan yang merata, serta tingkat kemajuan ekonomi yang baik. Kota Bima yang Bermartabat, merujuk kepada nilai-nilai yang dianut yang menunjukkan eksistensi atau identitas kita sebagai masyarakat bima yang *maja labo dahu* (Malu dan Takut). Kota Bima Berkelanjutan berarti bahwa segala aktivitas pembangunan kota ini tetap harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan agar segala keindahan dan manfaatnya masih dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Misi Kota Bima disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi ini merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan, dan agar visi tersebut dapat diwujudkan maka ditunjang dengan mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan daerah sebagai berikut:

MISI I

Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya

MISI II

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing

MISI III

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

MISI IV

Mewujudkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

MISI V

Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan

Menelaah visi dan misi serta program Walikota dan Wakil Walikota terpilih ini ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut.

Penetapan Visi dalam Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana berbasis pada posisi dan peran DPPKB dalam mendukung pencapaian misi ke-2, misi dalam RPJMD yang menjadi basis tersebut adalah misi **meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing** sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual.

Terkait dengan hal ini, DPPKB Kota Bima diharapkan memposisikan perannya untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang lebih maju sehingga mampu berdaya saing, serta mampu mendukung upaya perwujudan dan pembangunan keluarga sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota.

Adapun tujuan, sasaran jangka menengah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Jangka Menengah DPPKB Kota Bima

	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Porgram	Target Kinerja Tah			
							2025	2026	2027	20
u		Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	Laju pertumbuhan penduduk	Pengendalian Penduduk	Terkendalinya Angka Kelahiran	Penurunan Angka kelahiran total atau *Total Fertilite Rate* (TFR)	2.27	2.26	2.25	2.2
						penurunan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 Tahun) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	23.60/1000	22.00/1000	20,8/1000	19.8/ 0

				Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah kesertaan ber KB melalui peningkatan Akses dan kulaitas penyelenggaran keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai standar pelayanan	Persentase penuruunan *Unmet Need*	9.00	8.90	8.70	8,5
						Persentase peningkatan angka pemakaian kontrasepsi modern *atau Modern Contraceptive Prevalance Rate* (MCPR)	65,oo%	66,oo%	67,00%	68,0
		Meningkatnya kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Pemberdayaann dan peningkatan keluarga sehajtera	Memperkuat ketahanan, kesejahteraan dan karakter keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	66	67.20	68.40	69.

2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) Tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi DPPKB Kota Bima..

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama DPPKB Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Formulasi Penjelasan Indikator Kerja Utama DPPKB Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	**Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang**	Laju Pertumbuhan Penduduk	Cara menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah dengan menggunakan rumus : $r = \left\{\left(\frac{P_t}{P_0}\right) X \left(\frac{1}{t}\right) - 1\right\} x\ 100$ r = Laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah Penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan Po Pt = P0 + (B – D) + (Mi – Mo) B *(birth)* = Jumlah kelahiran selama periode 0 – t D *(Deadt)*= Jumlah kematian selama periode 0 – t
2	**Meningkatnya Kualitas Keluarga**	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
			Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula iBangga: iBangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang spesifik dan dapat diukur yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK harus relevan, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah.

Berikut adalah indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2025-2029 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Formulasi Penjelasan Indikator Kinerja Kunci Utama DPPKB Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	**TERWUJUDNYA PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG**	Penurunan Angka Kelahiran Total atau *Total Fertilite Rate* / TFR	Rumus Perhitungan : *Total Fertility Rate*/TFR Kabupaten/Kota ---------- Target Fertility Rate/TFR Kabaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
			Penjelasan: Angka Kelahiran Total atau *Total Fertilite Rate* / TFR adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun), jika ia mengalami pola fertilitas (angka kelahiran menurut umur) yang berlaku pada suatu periode tertentu.
2		Penurunan Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	Rumus : 〖ASFR〗(15-19)=K_(15-19)/P_(15-19) × 1000 Keterangan : Jumlah Kelahiran Dari Wanita kelompok Usia 15-19 dibagi dengan Jumlah wanita usia 15-19 tahun. (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 Tahun.
3		Persentase Penurunan *Unmet Need*	Proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Rumus Perhitungan : Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota ----------

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
			Target Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan x 100%
4		Persentase Peningkatan Angka pemakaian kontrasepsi modern (MCPR)	Alat kontrasepsi modern dibedakan atas 3 (tiga) yaitu kontrasepsi hormonal ynag terdiri dari PIL, SUuntik, Implan/AKBK (alat kontraspesi bawah kulit) 2. IUD/AKDR (Alat kontrasepsi Dalam Rahim), 3. Kontrasepsi mantap yaitu tubektomi dan vasektomi Rumus Perhitungan : Banyaknya Peserta KB aktif modern ---------- Banyaknya pasangan usia subur (PUS) x 00% Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL. Peserta KB adalah semua PUS yang menjadi AKseptor KB
5	**Meningkatnya kualitas keluarga**	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
			kesehatan kelaurga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula iBangga: iBangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100

2.3 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPPKB Kota Bima Tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPPKB Kota Bima Tahun 2025 – 2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahunan DPPKB Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang**	Penurunan Angka Kelahiran Total atau *Total Fertilite Rate* / TFR	2.27
		Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)	23,60/1000
		Persentase penurunan *Unmet Need*	9.00
		Persentase Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (MCPR)	65%
2	**Meningkatnya Kualitas Keluarga**	Indeks Pembangunan Keluarga	66

2.4. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota Bima sebagai pemberi amanah dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima sebagai penerima amanah atas kinerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. wujud nyata komitmen antara Walikota Bima dan Kepala DPPKB Kota Bima untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
4. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
5. sebagai dasar bagi Walikota Bima untuk melakukan monitoring, dan evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Perangkat Daerah
6. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian/Penetapan Kinerja ini adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan dan ditambah anggaran dari setiap indikator kinerja. Penetapan / Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Bima dapat dilihat dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a	:	**Hj. SUHARNI, SE**
Jabatan	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a	:	**Drs. H.MUKHTAR,MH**
Jabatan	:	Pj. Wali Kota Bima

Selaku atasan pihak pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. H.MUKHTAR,MH	Hj. SUHARNI
	NIP 19720528 199303 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BIMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	*2*	*3*		*4*
1.	Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.74
2.	Meningkatnya Kualitas Keluarga	2	Indeks Pembangunan Keluarga	66

PROGRAM	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.625.887.340,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	83.888.000,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	1.730.561.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	815.888.000,00
JUMLAH	7.256.224.340,00

Kota Bima, 6 Januari 2025

Pihak Kedua

DRS MUKHTAR, MH

Pihak Pertama

Hj Suharni, SE
Nip. 19720528 199303 2 005

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Insransi Pemerintah Tahun 2025 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima.

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat. Program ini memiliki tujuan untuk merencanakan kehidupan baik dari dalam kandungan, Balita, remaja, memasuki pernikahan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Gerakan Pembangunan Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bima merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan menggembirakan tidak saja dari kalangan Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PP dan KB Kota Bima Tahun 2025 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas PP dan KB Kota Bima Tahun 2025. Kerangka Pengukuran Kinerja di Dinas PP dan KB Kota Bima Kota Bima dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569).

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Pengukuran Kinerja dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian sasaran dilakukandengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

1. Indikator bermakna positif , artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecilrealisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \text{x } 100\ \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \text{x } 100\ \%$$

Berikut ini disajikan tabel skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Nomor	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≥	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran indikator -indikator merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran -sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima , disajikan sebagai berikut :

1. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. membandingkan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencaaan strategis organisasi;
4. membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja)

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Pengukuran Capaian Sasaran Dinas

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja kunci yang harus dilaksanakan. Capaian indikator sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Sasaran Strategis, Indikator Sasaran, Target, Realisasi Dan Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.74	1.37	54.01
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	66	71.1	107.72

Dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, hasil pengukuran/ realisasi Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Dan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci		Target	Capaian	%
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	1	Penurunan Angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR)	2.27	2.23	101.76
	2	Penurunan Angka kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	23.60/ 1000	16.1/1000	131.78
	3	Persentase Penurunan *Unmet Need*	9.00	12.5	72
	4	Persentase Peningkatan angka pemakaian kontrasepsi modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (MCPR	65%	61.5	94.61
Meningkatnya Kualitas Keluarga	5	Indeks Pembangunan Keluarga	66	71.1	107.72

3.1.2 Analisis Capaian Sasaran Dinas

3.1.2.1 Sasaran 1 : Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang

A. Indikator Kinerja Utama :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu (Sumber : BPS). Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti meningkatnya kebutuhan pelayanan dasar, tekanan terhadap lapangan

kerja serta menurunnya kualitas hidup masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima memiliki peran strategis dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Bima pada Tahun 2024 tercatat sebanyak 165.113 jiwa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 161.362 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima pada Tahun 2024 adalah sebesar 1,57 (BPS,2024), seperti yang disajikan dalam table 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Bima Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk
1	Rasanae Barat	31	**0.46**
2	Mpunda	34,8	**1.1**
3	Rasanae Timur	20,3	**2.28**
4	Raba	41,1	**1.61**
5	Asakota	37,9	**2.54**
	Kota Bima	165,1	**1.57**

Sumber : BPS Kota Bima, 2024

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima pada Tahun 2024 tercatat sebesar 1.57, Angka ini menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan Tahun 2023 di angka 0.76.

Hasil pengukuran dari indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.74	1.37	54.01

Sumber : BPS Kota Bima

Indikator laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025 sebesar 1.37 (sumber:BPS Kota Bima), untuk indikator laju pertumbuhan penduduk yang di targetkan Tahun 2025 adalah 0.74, sehingga realisasinya 54.01 % dari target yang ditetapkan.

Cara menghitung laju pertumbuhan penduduk adalah dengan menggunakan rumus :

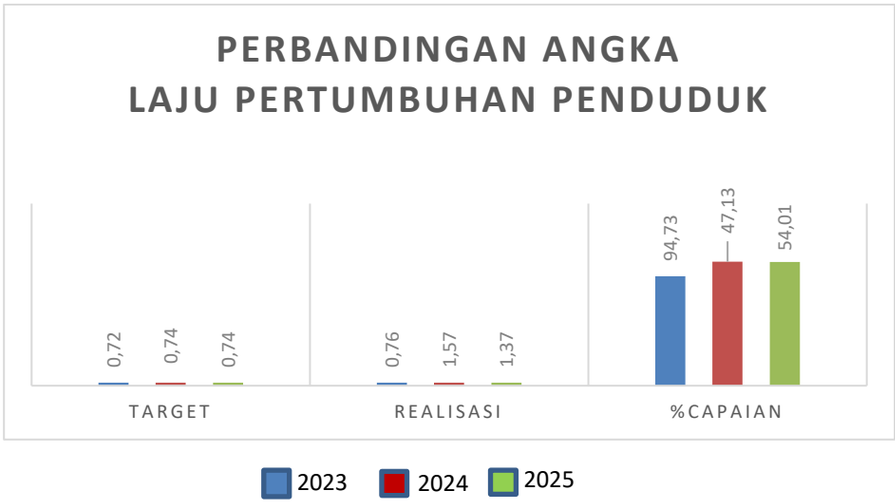
$$r = \left\{\left(\frac{P_t}{P_0}\right) X \left(\frac{1}{t}\right) - 1\right\} x\ 100$$

r = Laju pertumbuhan penduduk
Pt = Jumlah Penduduk pada tahun t
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar
t = selisih tahun Pt dengan Po
Pt = P0 + (B – D) + (Mi – Mo)
B *(birth)* = Jumlah kelahiran selama periode 0 – t
D *(Deadt)* = Jumlah kematian selama periode 0 – t

Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2025 DPPKB Kota Bima untuk capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Laju Pertumbuhan Penduduk	0.72	0.76	94,73	0.74	1.57	47,13	0.74	1.37	**54.01**



Tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2025 menurun sehingga capaian kinerjanya meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 (1.57). Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima Tahun 2025 di angka 1.37 masih lebih tinggi angka laju pertumbuhan penduduk Indonesia yaitu di angka 1.09 (Sumber : BPS) sedangkan dibandingkan dengan capaian Propinsi NTB angka laju pertumbuhan penduduk di angka 1.58 (sumber : BPS Prop NTB) lebih tinggi capaian kota Bima. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Laju pertumbuhan penduduk sebesar 54.01 % masuk dalam kategori capaian rendah.

Adapun perbandingan capaian kinerja laju pertumbuhan penduduk sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Laju Pertumbuhan Penduduk	0.62	1.37	45.25

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, DPPKB Kota Bima telah melaksanakan berbagai program, antara lain:

- Pelayanan dan penyuluhan Keluarga Berencana
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi
- Pembinaan Kampung KB
- Edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja
- Advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kependudukan

2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

Pengukuran iBangga meliputi 3 dimensi, 11 indikator dan 17 variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Ketenteraman
   Indikator :
   a. ibadah;
   b. legalitas Keluarga;
   c. jaminan kesehatan;
   d. keharmonisan Keluarga
2. Dimnesi Kemandirian
   Indikator :
   a. pemenuhan kebutuhan dasar;
   b. jaminan keuangan;
   c. keberlangsungan pendidikan;
   d. kesehatan Keluarga;
   e. akses media *online*/daring.
3. Dimensi Kebahagiaan.
   Indikator:
   a. interaksi Keluarga;
   b. interaksi sosial.

Setelah dilakukan penghitungan atau pengukuran iBangga, maka akan dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar

antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut : iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 berdasarkan hasil pemutakhitan Pendataan Keluarga Tahun 2025 seperti disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Indeks Pembangunan Keluarga

Kota	iBangga	Dimensi		
		Ketentraman	Kemandirian	Kebahagian
BIMA	71.1	86.6	62.0	64.7

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

Adapun indikator (variabel) penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai berikut :

Tabel 3.9
Indikator Penyusun iBangga

Dimensi Ketentraman							
Menjalankan Ibadah	Memiliki akta nikah	Anak 0-17 memiliki akta lahir	Memiliki jamkes	PUS ber KB modern	Tidak ada konflik keluarga	KK tidak cerai hidup	Tidak menikah dini
90.6	99.9	93.4	88.7	61.5	95.5	89.5	94.2

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

Dimensi Kemandirian								
Memiliki penghasilan	Lansia memenuhi kebutu	Disabilitas memenuhi	Makan beragam	Rumah layak	Memiliki tabungana	Anak 7-18 tidak putu	Tidak ada/ disabilitas	Akses media

	han dasar	kebutu han dasar				s sekol ah		onli ne
69.8	62.8	56.5	41.9	71.3	39.2	88.1	85.2	86. 0

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

Dimensi Kebahagian			
Interaksi	ayah melakukan pengasuhan	Rekreasi	Interaksi Sosial
49.6	72.5	87.1	82.4

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

Hasil pengukuran dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran Strategis 1	**Indikator Kinerja**		**Target**	**Capaian**	**%**
Meningkatnya Kualitas Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga	66	71.1	107.72

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 adalah di angka 71.1 berarti termasuk iBangga yang baik (**tangguh**) karena nilainya di atas 70. Keluarga yang tangguh berarti keluarga tersebut mampu:

- Memenuhi kebutuhan dasar (ekonomi, pendidikan, kesehatan).
- Menjaga keharmonisan dan komunikasi antaranggota keluarga.
- Mengatasi masalah atau tantangan hidup dengan bijak.
- Memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anggota keluarga.
- Membentuk karakter dan nilai moral yang baik.

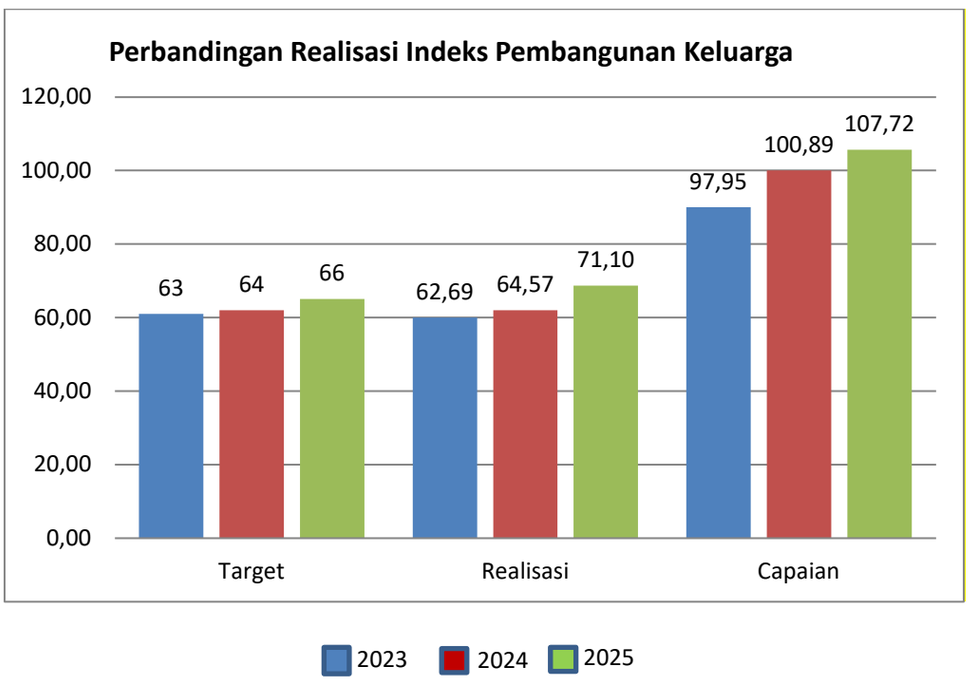
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 adalah di angka 71.1, capaian kinerja untuk indikator Indeks Pembangunan Keluarga

Kota Bima Tahun 2025 yang di targetkan adalah 66, dengan realisasi di angka 71.7 atau 107.72 % dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga pada tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2025 untuk capaian kinerja indeks pembangunan keluarga Kota Bima meningkat dari Tahun 2024 sebagaimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capa
Indeks Pembangunan Keluarga	63	62.69	97.95	64	64.57	100.89	66	71.10	107.

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25



Tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 (64.57). Untuk capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun 2025 yaitu

71.1 jika dibandingkan dengan target nasional Tahun 2025 di angka 64.1 berati capaian iBangga Kota Bima Tahun 2025 lebih tinggi dari target nasional. Apabila dibandingkan dengan capaian propinsi NTB di angka 63.7 maka capaian kota Bima lebih tinggi dari capaian propinsi NTB, sedangkan bila dibandingkan dengan capaian nasional di angka 67.3 maka capaian iBangga Kota Bima lebih tinggi dari pada capaian nasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga sebesar 107.72 % masuk dalam kategori capaian **sangat tinggi**.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Kinerja Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga	70.6	71.1	100.70%

B. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang spesifik dan dapat diukur yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK harus relevan, mudah dipahami, dan dapat digunakan untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi masalah.

1. **Penurunan Angka Kelahiran Total Atau *Total Fertility Rate* / TFR**

Angka Kelahiran Total atau *Total Fertilite Rate* / TFR adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun), jika ia mengalami pola fertilitas (angka kelahiran menurut umur) yang berlaku pada suatu periode tertentu.

Hasil perhitungan Angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR) berdasarkan hasil pemutakhitan pendataan keluarga tahun 2025 seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate* / TFR)

KOTA	TFR	ASFR						
		15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
BIMA	2.23	16.1	80.3	117.2	117.4	78.0	32.0	5.0

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

$$ASFR_i = \frac{B_i}{F_{mi}} \times K$$

B_i = Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 1 tahun

F_{mi} = Jumlah penduduk wanita pada pertengahan tahun dalam kelompok umur i.

K = Konstanta (=1000)

TFR=$5\sum_i^7 ASFR\ i$

Penjelasan:

TFR adalah jumlah kelahiran hidup laki2 dan perempuan hingga akhir masa reproduksi

Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun).

Angka kelahiran total adalah Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber: BPS, Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya.

$$TFR = 5\sum_{i=1}^{7} ASFRi$$

TFR = 5 x (16.1+80.3+117.2+117.4+78.0+32.0+5.0)

TFR = 5 x 446

TFR = 2.23. TFR sebesar **2.23** berarti rata-rata jumlah anak dari wanita usia 15-49 tahun adalah 2-3 anak selama masa usia suburnya.

Hasil pengukuran dari indikator kinerja Penurunan Angka kelahiran total atau *total Ferrtility rate* (TFR) disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Penurunan Angka Kelahiran Total Atau *Total Fertility Rate* / TFR

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1	Penurunan Angka kelahiran total atau *total fertility rate* (TFR)	2.27	2.23	101.79

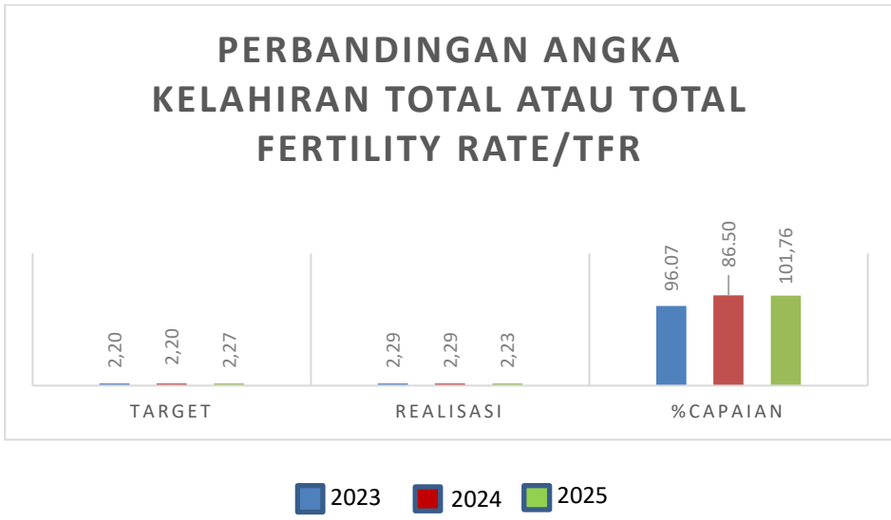
Indikator Penurunan Angka Kelahiran Total Atau *total fertility Rate* / TFR merupakn indikator bermakna negatif (menurun) artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya.

Angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* Tahun 2025 adalah sebesar 2.23 berarti rata-rata jumlah anak dari wanita usia 15-49 tahun adalah 2-3 anak selama masa usia suburnya. Tingkat capaian kinerja untuk indikator Penurunan Angka Kelahiran total (TFR) yang di targetkan **2.27** , dengan realisasi sebesar **2.23** atau **101.76** % dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja Penurunan Angka kelahiran total Atau *Total Fertility Rate*/TFR) pada tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2025 DPPKB Kota Bima untuk capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Penurunan Angka kelahiran total Atau *Total Fertility Rate*/TFR)

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penurunan Angka kelahiran total	**2,20**	**2,29**	96.07	**2.00**	**2.27**	86.50	**2.27**	**2.23**	101.76

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(total fertility rate/TFR)									



Tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja Penurunan Angka kelahiran total atau *Total Fertiliry Rate* (TFR) pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 (TFR 2.27). Untuk capaian Penurunan Angka kelahiran total atau *Total Fertiliry Rate* (TFR) pada Tahun 2025 yaitu 2.23 jika dibandingkan dengan target nasional masih lebih rendah yaitu 2.12. Capaian TFR 2025 untuk Kota Bima sebesar 2.23 lebih tinggi dari capaian propinsi NTB sebesar 2.36 sedangkan dibandingkan dengan capaian nasional masih lebih rendah capaian kota Bima, karena capaian nasional sebesar 2,12. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Penurunan Angka kelahiran total atau *total fertility rate*/TFR sebesar 101.76 % masuk dalam kategori capaian **sangat tinggi**.

Adapun perbandingan capaian kinerja Penurunan Angka kelahiran total atau *Total fertilite Rate* (TFR) sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.16
Realisasi Kinerja Pencapaian Penurunan Angka Kelahiran Total Atau *Total Fertility Rate* / TFR Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Penurunan Angka kelahiran total atau *Total fertilite Rate* (TFR)	2.25	2.23	100.89%

2. **Penurunan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)**

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) adalah Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membedakan fertilitas umur muda.

Tabel 3.17
Angka Kelahiran Remaja (*Age Specific Fertility Rate* / ASFR 15-19)

Kota	ASFR 15-19 Tahun
Bima	16.1

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

$$ASFR_i = \frac{B_i}{F_{mi}} \times K$$

B_i = Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur 1 tahun

F_{mi} = Jumlah penduduk wanita pada pertengahan tahun dalam kelompok umur i.

K = Konstanta (=1000)

Berikut capaian indikator kinerja penurunan Angka kelahiran remaja (usia 15-19 tahun) atau *Age Specific fertility rate* (ASFR 15-19) disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Penurunan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	1	Penurunan Angka kelahiran Remaja (Usia 15-19 tahun) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	23.60/1000	16.1/1000	131.58

Indikator Penurunan Angka kelahiran Remaja (Usia 15-19 tahun) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) merupakan indikator bermakna negatif (menurun) artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya

Tingkat capaian kinerja untuk indicator penurunan angka kelahiran remaja (usia 15-19 Tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) Tahun 2025 yang ditargetkan sebesar 23.6/1000, terealisasi sebesar 16.1/1000 atau 131.58% sedangkan untuk tahun 2024 tingkat capaian kinerja untuk indicator presentase angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 Tahun ($ASFR_{15-19}$) terealisir sebesar 25.4 /1000 atau 96,82 dari target yang ditetapkan. ASFR pada kelompok usia 15-19 tahun tahun 2025 yaitu sebesar 16.1/1000 artinya ada 16 bayi yg dilahirkan per 1.000 wanita usia 15-19 tahun pada Tahun 2025.

Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran strategis ini pada tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2025 DPPKB Kota Bima mengalami peningkatan capaian kinerja sebagaimana ditunjukan dalam table di bawah ini :

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Penurunan Angka kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19	37/1000	22.2/1000	140,00%	36/1000	25.4/1000	129.44	23.6/1000	16.1/1000	131.58

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)									

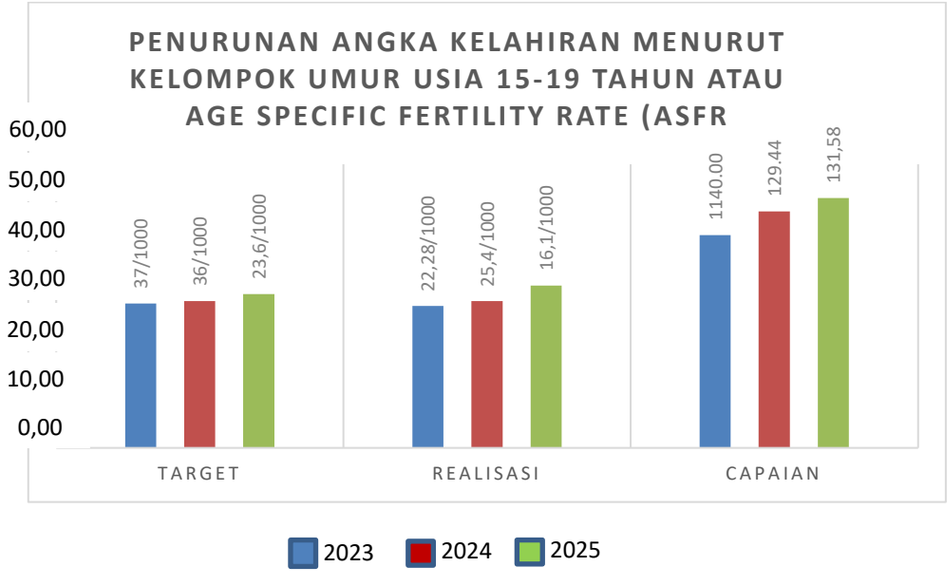


Table dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun pada Tahun 2025 mengalami peningkatan capaian, dimana capaian untuk tahun 2024 sebesar 25.4/1000. Pencapaian indikator kinerja Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 Tahun 2025 sebesar 16.1/1000 dari target yang ditetapkan sebesar 23.6/1000 atau 131.58% . Capaian Kota Bima sebesar 16.1 lebih tinggi daripada capaian Propinsi NTB sebesar 25.5 dan dari capaian Nasional sebesar 20.6 bahkan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 19.4 maka capaian Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun di Kota Bima pada Tahun 2025 melebihi target nasional di angka 19.4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun 2025 sebesar 131.58 % masuk dalam kategori capaian **sangat tinggi .**

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2025- 2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini,

Tabel 3.20
Realisasi Kinerja Pencapaian Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19 Tahun) Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh seimbang	Penurunan Angka kelahiran menurut kelompok umur usia 15-19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15- 19 Tahun)	18.90/1000	16.1/1000	114.81

3. **Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR)**

Alat kontrasepsi modern dibedakan atas 3 (tiga) yaitu kontrasepsi hormonal ynag terdiri dari PIL, SUuntik, Implan/AKBK (alat kontraspesi bawah kulit) 2. IUD/AKDR (Alat kontrasepsi Dalam Rahim), 3. Kontrasepsi mantap yaitu tubektomi dan vasektomi. Pengamatan pada wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB IUD, Implant, MOP, MOW, Suntik, Pil, Kondom dan MAL. Peserta KB adalah semua PUS yang menjadi AKseptor KB. Rumus Perhitungannya sebagai berikut :

$$mCPR = \frac{\sum Jumlah \text{ Peserta KB Yang menggunakan alat kontrasepsi modern)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \text{ X } 100\%$$

Berikut hasil perhitungan Peserta KB Aktif Modern Tahun 2025 sebagaimana yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate*/McPR) Tahun 2025

KOTA	McPR	METODE KONTRASEPSI							
		MOW / Steril Wanita	MOP / Steril Pria	IUD/Spiral/AKDR	Implant	Suntik	Pil	Kondom	MAL
BIMA	61.5	1.5	0.1	4.5	27.8	27.1	0.1	0.1	0.1

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK -25

Tabel 3.22
Jumlah Pasangan Usia Subur Kota Bima Tahun 2025

Nomor	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur
1	Rasanae Barat	4239
2	Rasanae Timur	3163
3	Asakota	5339
4	Raba	5736
5	Mpunda	4770
	Jumlah	23247

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK -25

Tingkat capaian kinerja untuk indicator persentase pemakaian kontrasepsi modern / McPR yang ditargetkan sebesar 65,00% terealisasi sebesar 61.5 atau 94,61 %.

Tabel 3.23
Capaian Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR)

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%

Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1	Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR)	65 %	61.5	94.61

Pencapaian kinerja indicator presentase pemakaian Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 62.5 %. Berikut Tren capaian sasaran kinerja persentase pemakaian Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* Tahun 2025 dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukan dalam table di bawah ini.

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern Atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR	69	56.93	82.46	69,00	62.5	90.57	65%	61.5	94.61

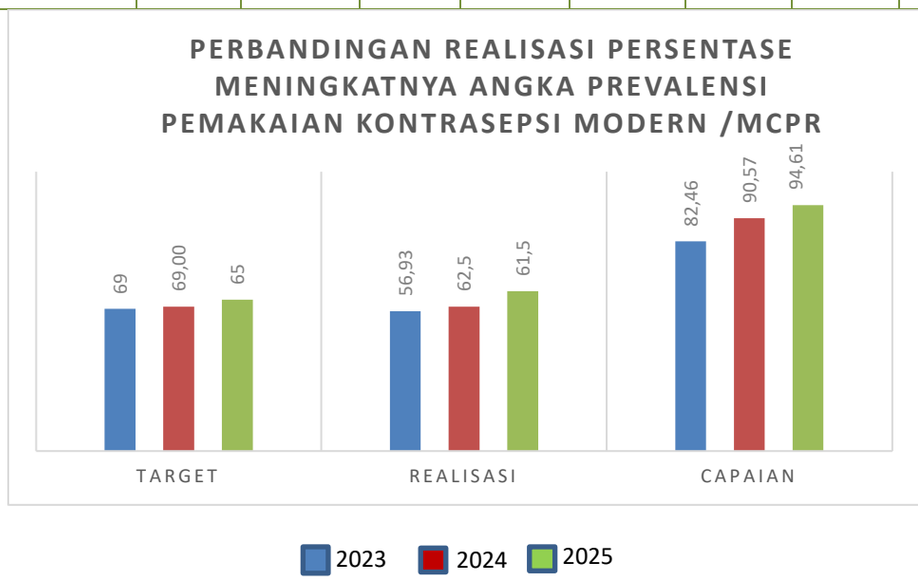


Table dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator persentase peningkatan Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern / McPR pada Tahun 2025 mengalami peningkatan capaian dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 94.61 %, sedangkan untuk tahun 2024 sebesar 62.5% atau 90.57 % dari target 69,00. Pencapaian indicator sasaran strategis meningkatnya Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/mCPR Tahun 2025 untuk Kota Bima sebesar 61.5 % lebih tinggi dari capaian prorinsi NTB sebesar 51.9% dan capaian nasional sebesar 60.8%, tetapi jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 61.8, maka capaian Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi/mCPR Tahun 2025 untuk Kota Bima masih lebih rendah di bandingkan dengan target nasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR) sebesar 94.61% masuk dalam kategori capaian " **sangat tinggi".**

Adapun perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 3.25
Realisasi Kinerja Capaian Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsi Modern Aatau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna Kontrasepsis Modern Atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR)	69%	61.5	89.13

4. **Persentase Penurunan *Unmet Need***

Unmet need adalah kondisi ketika seseorang (biasanya pasangan usia subur) tidak ingin hamil atau ingin menunda kehamilan, tetapi belum menggunakan alat/metode kontrasepsi atau proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmetneed) yaitu* Ingin Anak di Tunda (IAT) dan *Unmetneed* Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)).

Proporsi pasangan usia subur (PUS) dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meskipun mereka menyatakan ingin menunda atau menjarangkan anak. Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB (Statistik Rutin).Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmetneed Ingin Anak di Tunda (IAT) dan Unmetneed Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)). Perhitungan : Jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin ber KB dibagi dengan jumlah pasangan usia subur di kali 100 % (Sumber:Permendagri Nomro 86 Tahun 2017)

Rumus Perhitungan :

Jumlah PUS Tak Ber KB (Iat dan Tial)

---------- X 100%

Jumlah PUS

Hasil perhitungan *Unmet Need* Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Data *Unmet Need* Kota Bima Tahun 2025

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur	*Unmet Need* KB	Kategori				
				Using for limiting	*Using for spacing*	*Met need*	*Unmet need for limiting*	*Unmet need for spacing*
1	Kota Bima	23.247	12.5	25.9	35.7	26.0	8.8	3.6

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK -25

$$Unmet\ Need = \frac{PUS\ Bukan\ Pesera\ \ KB\ (IAD+TIAL)}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \text{ X } 100\%$$

Keterangan :

Using for limiting = Menggunakan alat kontrasepsi dengan tujuan tidak ingin punya anak lagi.

Using for spacing = Menggunakan alat kontrasepsi untuk menjarangkan atau menunda kehamilan.

Met need = Kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi.

Unmet need for limiting = Tidak ingin punya anak lagi, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.

Unmet need for spacing = Inginmenundakehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bawah *unmet need* Kota Bima pada Tahun 2025 sebesar 12.5% dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 23.247 PUS. Capaian Persentase Penurunan *Unmet Need* Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.27
Capaian Persentase Penurunan *Unmet Need*

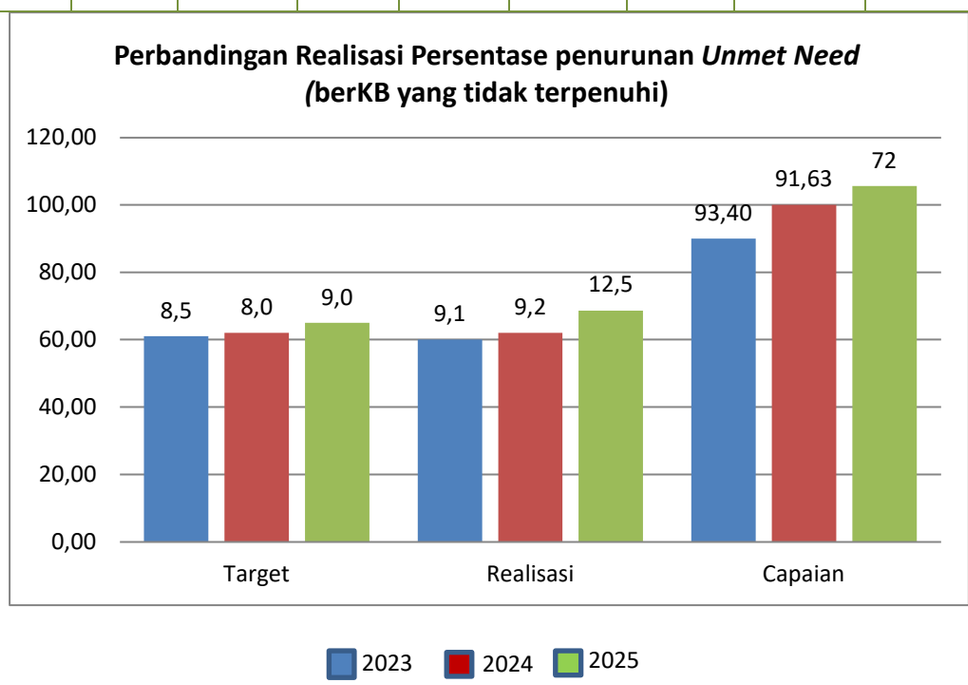
Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang	1	Persentase penurunan *Unmet Need (*berKB yang tidak terpenuhi)	9.00	12.5	72%

Indikator Persentase penurunan *Unmet Need (*berKB yang tidak terpenuhi) merupakan indikator bermakna negatif (menurun) artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya

Tingkat capaian kinerja untuk indikator menurunnya persentase penurunan *unmet need* (kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi) pada Tahun 2025 yang di targetkan 9.00 %, terealisasi sebesar 12.5% atau 72% dari target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja indicator Persentase penurunan *Unmet Need (k*ebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi) Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2024 capaian Persentase penurunan *Unmet Need (*berKB yang tidak terpenuhi) sebesar 9.2%, adapun capaian kinerja sebagaimana ditunjukan dalam table di bawah ini.

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penurunan *Unmet Need*
Dalam Pencapaian Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase penurunan *Unmet Need (*berKB yang tidak terpenuhi)	8.5	9.1	93,40	**8.0**	9.2	91.63	**9.0**	12.5	72



Tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator Persentase penurunan *Unmet Need (*ber KB yang tidak terpenuhi) pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 9.2%, untuk tahun 2025 angka unmet need Kota Bima berada di angka 12.5 %, sedangkan target nasional *unmet need* tahun 2025 adalah sebesar 10.5 artinya untuk *unmet need* kota Bima belum mencapai target nasional. Jika dibandingkan dengan capaian Propinsi NTB *unmet need* diangka 7.7%, *unmeet Need* Kota Bima masih lebih rendah dan capaian secara nasional angka *unmet need* sebesar 13.4% jika dibandingkan dengan *unmet need* Kota Bima masih lebih tinggi capaian Kota Bima. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran menurunnya Persentase kebutuhan ber-KB (*unmet need*) sebesar 12.5 % atau 72 % yang berarti masuk dalam kategori capaian "**sedang".**

Adapun perbandingan capaian kinerja Persentase kebutuhan ber-KB (*unmet need*) sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 3.29
Realisasi Kinerja Capaian Persentase penurunan *Unmet Need* Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Persentase penurunan *Unmet Need (*berKB yang tidak terpenuhi)	8.0	12.5	64

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama Tahun 2025 DPPKB Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatan/sub kegiatan yang dijabarkan kedalam kegiatan pokok sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut.

Tabel 3.30
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	**Program Pengendalian Penduduk**	**123.800.000**
	Kegiatan : Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	123.800.000
	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	61.400.000
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	62.400.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	**2.101324.000**
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	618.440.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	212.670.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	91.000.000
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000
	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	189.770.000
	Kegiatan : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*434.802.000*
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	246.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas	188.802.000

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
	Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	
	Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*895.802.000*
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	847.825.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.610.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.767.000
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*152.280.000*
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	68.280.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	84.000.000

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Keluarga

Indikator Kinerja :

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator dari sasaran strategis yang ke dua adalah Indeks Pembangunan Keluarga.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.

Pengukuran iBangga meliputi 3 dimensi, 11 indikator dan 17 variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Ketenteraman

   Indikator :

e. ibadah;
f. legalitas Keluarga;
g. jaminan kesehatan;
h. keharmonisan Keluarga

2. Dimnesi Kemandirian

   Indikator :

   f. pemenuhan kebutuhan dasar;
   g. jaminan keuangan;
   h. keberlangsungan pendidikan;
   i. kesehatan Keluarga;
   j. akses media *online*/daring.

3. Dimensi Kebahagiaan.

   Indikator:

   c. interaksi Keluarga;
   d. interaksi sosial.

Setelah dilakukan penghitungan atau pengukuran iBangga, maka akan dapat diklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut : iBangga yang kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40. iBangga yang cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40 – 70. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 berdasarkan hasil pemutakhitan Pendataan Keluarga Tahun 2025 seperti disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.31
Indeks Pembangunan Keluarga

Kota	iBangga	Dimensi		
		Ketentraman	Kemandirian	Kebahagian
BIMA	71.1	86.6	62.0	64.7

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25

Adapun indikator (variabel) penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebagai berikut :

Tabel 3.32
Indikator Penyusun iBangga

Dimensi Ketentraman							
Menjalankan Ibadah	Memiliki akta nikah	Anak 0-17 memiliki akta lahir	Memiliki jamkes	PUS ber KB modern	Tidak ada konflik keluarga	KK tidak cerai hidup	Tidak menikah dini
90.6	99.9	93.4	88.7	61.5	95.5	89.5	94.2

Dimensi Kemandirian								
Memiliki penghasilan	Lansia memenuhi kebutuhan dasar	Disabilitas memenuhi kebutuhan dasar	Makan beragam	Rumah layak	Memiliki tabungan a	Anak 7-18 tidak putus sekolah	Tidak ada/ disabilitas	Akses media online
69.8	62.8	56.5	41.9	71.3	39.2	88.1	85.2	86.0

Dimensi Kebahagian			
Interaksi	ayah melakukan pengasuhan	Rekreasi	Interaksi Sosial
49.6	72.5	87.1	82.4

Hasil pengukuran dari indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.33
Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran Strategis 1	Indikator Kinerja		Target	Capaian	%
Meningkatnya Kualitas Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga	66	71.1	107.72

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 adalah di angka 71.1 berarti termasuk iBangga yang baik (**tangguh**) karena nilainya di atas 70. Keluarga yang tangguh berarti keluarga tersebut mampu:

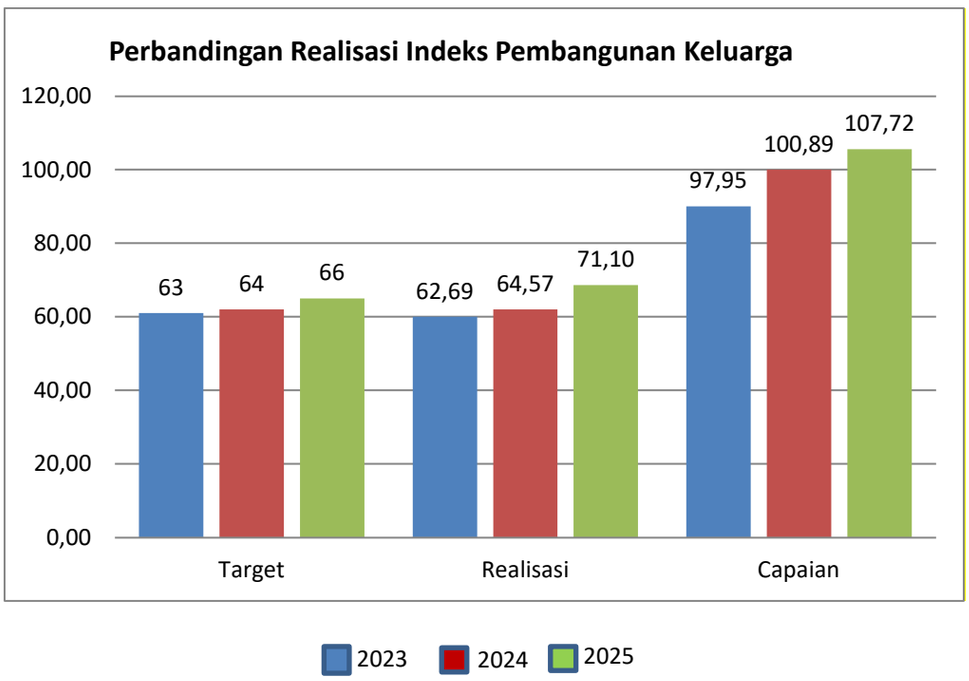
- Memenuhi kebutuhan dasar (ekonomi, pendidikan, kesehatan).
- Menjaga keharmonisan dan komunikasi antaranggota keluarga.
- Mengatasi masalah atau tantangan hidup dengan bijak.
- Memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anggota keluarga.
- Membentuk karakter dan nilai moral yang baik.

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 adalah di angka 71.1, capaian kinerja untuk indikator Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bima Tahun 2025 yang di targetkan adalah 66, dengan realisasi di angka 71.7 atau 107.72 % dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja indeks pembangunan keluarga pada tahun sebelumnya, maka pada Tahun 2025 untuk capaian kinerja indeks pembangunan keluarga Kota Bima meningkat dari Tahun 2024 sebagaimana ditunjukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capa
Indeks Pembangunan Keluarga	63	62.69	97.95	64	64.57	100.89	66	71.10	107.

Sumber : Hasil Pemutakhiran PK-25



Tabel dan grafik diatas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 (64.57). Untuk capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) pada Tahun 2025 yaitu 71.1 jika dibandingkan dengan target nasional Tahun 2025 di angka 64.1 berati capaian iBangga Kota Bima Tahun 2025 lebih tinggi dari target nasional. Apabila dibandingkan dengan capaian propinsi NTB di angka 63.7 maka capaian kota Bima lebih tinggi dari capaian propinsi NTB, sedangkan bila dibandingkan dengan capaian nasional di angka 67.3 maka capaian iBangga Kota Bima lebih tinggi dari pada capaian nasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga sebesar 107.72 % masuk dalam kategori capaian **sangat tinggi**.

Adapun perbandingan capaian kinerja Indeks Pembangunan Keluarga atau iBangga Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra DPPKB tahun 2025-2029 adalah sebagaimana disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 3.35
Realisasi Kinerja Pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga Terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target di Akhir Tahun Perencanaan Jangka menengah (2029)	Realisasi sampai Tahun 2025	% Capaian
Terwujudnya Penduduk Tumbuh Seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga	70.6	71.1	100.70%

Tabel 3.36
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis II	Jumlah Anggaran
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.020.900.000
	Kegiatan : Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1.020.900.000
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	181.200.000
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan	839.700.000

	Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	

3.1.3 Capaian Kinerja Eselon III dan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana

Dinas Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tatakerja Dinas terdiri dari tiga bidang dan secretariat, berikut akan ditampilkan capaian kinerja eselon III dan Jabatan Fungsional (JF) Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan Tahun 2025.

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Eselon III dan JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana Bidang Pengendalian Penduduk

BIDANG	Program /Kegiatan/Sub Keg.	Indikator prog/keg	Target	Capaian	% Capaian
Bidang Pengendalian Penduduk	**Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan KB**	Persentase Penurunan Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate*/TFR	2.27	2.23	101.79
		Penurunan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	23.6/1000	16.1/1000	146.58 %
	Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase Keterpaduan Kebijakan Propinsi dengan Kebijakan	100%	100 %	100%

		Pemerintah Kota Bima			
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan data keluarga	2 laporan	2 laporan	100
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	2 laporan	2 laporan	100

Data diatas menunjukan pencapaian kinerja program dibidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakkan memenuhi target yang ditetapkan. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan KB terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Indikator Penurunan angka kelahiran total atau *total fertility rate* / TFR dengan target pada Tahun 2025 di angka 2.27, realisasi 2.23 sehingga capaiannya sebesar 101.79%. Indikator kedua yaitu Penurunan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19) dengan target 23.6/100, realisasi sebesar 16.1/100 sehingga capaiannya mencapai 146.5 %. Pencapaian ini dikarenakan intensifnya kegiatan pembinaan dan Konseling terhadap seluruh pasangan usia subur, terpenuhinya fasilitas Kb diseluruh faskes / klinik KB yang ada pada lima kecamatan. Kelompok kerja Pembantu penyuluh Keluarga berencana desa/kelurahan (PPKBD) dan sub PPKBD di lima kecamatan yang saat ini berjumlah 41 orang dan sub PPKBD berjumlah 246 orang dengan rasio satu kelurahan satu orang PPKBD dan dua orang sub PPKBD persatu kelurahan. Saat ini telah ditetapkan sebanyak 41 kampung KB di 41 kelurahan yang ada. Berikut Capaian Kinerja Eselon III dan JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana Bidang Pembinaan KB

Tabel.3.38
Capaian Kinerja Eselon III dan JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana Bidang Pembinaan KB

BIDANG	Program /kegiatan/Sub Keg	Indikator prog/keg	Target	Capaian	Realisasi (%)

Pembinaan KB	**Program Keluarga Berencana**	Persentase Penurunan *Unmet Need*	9.0	12.5	72
	Kegiatan ; Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang Menggunakan Alat Kontrasepsi	65%	61.5%	94.61
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Pengelolaan Operasional dan Sarana DI Balai Penyuluhan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 lap	12 lap	100
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam, rakor kel, minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam, rakor kel,	10 Laporan	10 Laporan	100
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangun	1 Dok	1 Dok	100

		an Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Advokasi program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholders dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 organisasi	2 organisasi	50
	Kegiatan: Pendayagunaan Teanag Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB				
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 org	360 org	100

	Fasilitasi Pelaksanaa Penyuluhan, Penggerakan. Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB)	10 Laporan	10 Laporan	100
	Kegiatan : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR)	65%	61.5%	94.61

		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 lap	2 lap	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	54%	55.30 %	102.40
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2495	2495	100
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 unit	80 Unit	100

	Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	100
	Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Lap	16 Lap	100
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	16 Kampung	16 Kampung	100

		Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

Data diatas menunjukan pencapaian kinerja program dibidang Keluarga Berencana memenuhi target yang ditetapkan. Program Pembinaan keluarga berencana terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Indicator program keluarga berencana yaitu Persentase Peningkatan Angka Prevalensi Pengguna *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (McPR) mencapai 61.5 % dengan jumlah pemakaian kontrasepsi modern sebesar 13. 520 dari jumlah pasangan usia subur sebanyak 23.247 PUS. Untuk jumlah peserta KB Aktif di Tahun 2025 sebanyak 13.607 (Sumber : SIGA BKKBN, 2025) . Peningkatan median usia perkawinan (MUKP) yang di targetkan 21.10, pada Tahun 2025 meningkat menjadi 22.10. Untuk indikator peningkatan pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) yang di targetkan 54% , realisasi pada Tahun 2025 sebesar 55.30 % atau 102.40 %, dengan jumlah pemakai MKJP sejumlah 13.520 orang. Indikator Penurunan *Unmet Need* di Kota Bima target tahun 2025 sebesar 9.0, realisasi sebesar 12.5% sehingga capaiannya sebesar 72 %. Capaian *Unmet Need* Tahun 2025 menurun disebabkan karena pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang alat kontrasepsi masih rendah dan belum merata, selain itu PUS yang ingin hamil atau tidak ingin hamil anak lagi tetapi tidak memakai alat kontrasepsi sehingga meningkatkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi.

Tabel 3.39
Capaian Kinerja Eselon III dan JF PKKB Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

BIDANG KS	Program /Kegiatan/Sub Keg	Indikator prog/keg	Target (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)
Kabid.Ketahanan dan Kesga	**Program Peningkatan dan Kesejahteraan Keluarga**	Indeks Pembangunan Keluarga	66	71.1	107.72

	Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan KehidupanMenuju Keluarga Berkualitas	32	32	100
JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berancana	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Kader	360 Kader	100

Data diatas meninjukan tingkat capaian kegiatan pada bidang Keluarga Sejahtera mencapai 100%. Program dan kegiatan bidang ketahanan dan kesejahteraan terutama melalui kegiatan Pelatihan kelompok Remaja,

Mahasiswa dan Masyarakat untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para remaja, pembinaan terlaksananya kegiatan KIE tentang KRR dan Pendewasaan Usia Perkawikan (PUP), serta bidang bidang Keluarga Sejahtera telah melakukan kegiatan ketahanan masyarakat berbasis BKB, BKR, BKL, dan PIK-R. Untuk jumlah keluarga beresiko stunting yang di intervensi pada Tahun 2025 sejumlah 2.385 dengan target sebanyak 1340 keluarga.

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Meningkatnya cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif, Pencapaian akseptor KB aktif tambahan, meningkatnya penggunaan kontasepsi modern, serta menurunnya angka *Drop Out*/ Ketidak Kerlangsungan KB pada Tahun 2025 menandakan tingginya kesadaran masyarakat terutama pasangan usia subur akan pentingnya program keluarga berencana yang pada akhirnya dapat menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal antara lain :

- Adanya kuantitas dan kualitas pelayanan KB yang semakin baik.
- Adanya garis komando dan garis koordinasi yang jelas
- Adanya pembagian tugas yang jelas di jajaran DPPKB .
- Adanya penyediaan alat dan obat kontrasespsi yang selalu ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Klinik KB).
- Adanya segmentasi sasaran yang jelas, sehingga mengetahui siapa dan dimana PUS yang belum ber-KB
- Kemampuan dan kapasitas tenaga lini terdepan yaitu Penyuluh KB yamg semakin baik
- Adanya Koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan gerakan orang tua asuh cegah stunting (Genting) sehingga keluarga yang memiliki balita beresiko stunting mendapatkan edukasi dan bantuan lain untuk pemberdayaan keluarga di mana akan diprioritas dan kepada keluarga berisiko stunting yang miskin serta optimalisasi peran orang tua asuh
- Adanya kerjasama dengan stakeholder (mitra kerja) yang ada seperti Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Dinas Kesehatan, Kepala KUA Kecamatan serta institusi-institusi Kelurahan yang ada seperti PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka ikut menyukseskan pengelolaan program keluarga berencana.

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga telah dilakukan pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR, serta BKL. Selain itu pada Tahun 2025 dilakukan orientasi BKB, BKR, BKL bagi kader dan berbagai kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga, dan melakukan advokasi/KIE dalam rangka meningkatkan pencapaian program dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dimasing-masing kelurahan, sehingga program KB merupakan kebutuhan bagi masyarakat.

Dengan pencapaian tersebut, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun anggaran 2025 dapat dikatakan jarang terjadi atau dengan kata lain kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Hanya saja untuk kinerja kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) yang masih tinggi di angka 12.5 %, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang alat kontrasepsi masih rendah, termasuk mitos dan salah persepsi mengenai efek samping kontrasepsi, persepsi masyarakat jika alat kontrasepsi kualitas rendah dikarenakan gratis sehingga masyarakat lebih memilih memakai dari praktek mandiri, selain itu masih rendahnya kepersetaan KB pria, kurangnya dukungan suami serta pengaruh sosial budaya, sehingga pasangan usia subur enggan menggunakan kontrasepsi. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan kelurahan sehingga Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda dapat diberikan pelayanan KB serta dengan mengintensifkan pelayanan KIE serta promosi KB.

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan sumberdaya yang ada pada DPPKB Kota Bima, dapat dikatakan efisien karena dengan anggaran yang terbatas, dapat menghasilkan pencapaian kinerja yang sangat tinggi. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia, masih belum cukup tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik.

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥1

√ Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.

√ Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Realisasi Anggaran yang telah digunakan Tahun 2025 dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.40
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran Yang Tersedia (Rp)	Realisasi Anggaran Yang digunakan (Rp)	Realisasi (%)
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	8.020.866.314,00	6.969.507.654,00	86.89
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	4.774.842.314,00	4.266.925.994,00	88.52
2.	Program Pengendalian Penduduk	123.800.000,00	96.892.140,00	78.27
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.101.324.000,00	1.771.556.721,00	84.31
4.	Program Pemberdayaan danPeningkatan Keluarga Sejahtera	1.020.900.000,00	874.132.799,00	85,62

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam yang telah dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.41
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)	
	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program : Pengendalian Penduduk	Persentase Penurunan Angka Kelahiran Total Atau *Total Fertilyti Rate* /TFR	101.79	
			Penurunan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	146,58	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase Keterpaduan Kebijakan propinsi dengan Kebijakan Pemkot Bima	100	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100	
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100	

	Meningkatnya Jumlah Kesertaan Ber-Kb Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Program : Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Penurunan *Unmet Need*	91.63	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi	91.60	

	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)	
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Pengelola Data	100	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi	50	
		Promosi KIE Porgaram Bangga Kencana melalui media masaa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100	
		Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholder dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	

	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)	
	Meningkatnya Jumlah Kesertaan Ber-Kb Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Peningkatan Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (MCPR)	91.60	
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah organisasi yang mengikuit Pembinaan IMP dan program Bangga Kencana	100	
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana	100	

		serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana Penunjang Pelayanan KB	100	
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB Dan Kesehatan Reproduksi Di Faskes	100	

	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)	
	Meningkatnya Jumlah Kesertaan Ber-Kb Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100	
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Porgram Bangga Kencana	100	
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan engelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	100	

Y AS	TERWUJUDNYA KELUARGA SEJAHTERA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	107.72
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100

Berdasarkan tabel 3.41 di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima selama Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian kinerja rata-rata 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukan efisiensi anggaran sangat tinggi, yaitu pada Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dengan tingkat efisiensi 1.25, selain itu pada program pengendalian penduduk dengan tingkat efisiensi 1.30, hal ini terjadi karena kegiatan dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu serta kerjasama dari semua pihak di DPPKB Kota Bima . Sehubungan dengan pengelolaan anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar penggunaan sumberdaya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima cukup efisiensi dan telah sesuai dengan aturan (prosedur) administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin tidak terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

3.4 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025 telah melaksanakan 13 kegiatan yang tercakup dalam 4 program yaitu :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Seluruh program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai indicator – indicator sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun 2025-2029 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja indikator -indokator tersebut diatas sebesar Rp. 8.020.866.314,.

Berdasarkan data Tahun anggaran 2025 pada program kegiatan utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima yang ditujukan untuk secara langsung mencapai target kinerja tersebut sebesar Rp. 7.027.112.670, atau 87.71%- Selain telah melakukan efisiensi dari sisi

anggaran, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima telah melaksanakan kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa tahun 2025 dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima terdapat 4 (empat) indikator yang realisasinya termasuk capaian **sangat tinggi.** Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal

yaitu :

1. Kerjsama yang baik antara seluruh komponen DPPKB Kota Bima dalam pelaksanaan kegiatan dan Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA DPPKB Kota Bima Tahun Anggaran 2025.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya penyediaan alat dan obat kontrasespsi yang selalu ada pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ada (Klinik KB).
4. Adanya Koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan gerakan orang tua asuh cegah stunting (Genting) sehingga keluarga yang memiliki balita beresiko stunting mendapatkan edukasi dan bantuan lain untuk pemberdayaan keluarga
5. Adanya kerjasama dengan stakeholder (mitra kerja) yang ada seperti Kantor Kementerian Agama Kota Bima, Dinas Kesehatan, Kepala KUA Kecamatan serta institusi-institusi Kelurahan yang ada seperti PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka ikut menyukseskan pengelolaan program keluarga berencana

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi DPPKB Kota Bima sehingga masih ada satu indicator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah masih tingginya angka *Unmet Need*, penyebabnya masih kurangnya pengetahuan Pasangan usia subur tentang alat kontrasepsi, selain karena mitos dan larangan agama. Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima.

Tabel 3.42

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

ıran tegis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)
dnya uk g	Laju Pertumbuhan Penduduk	Program : Pengendalian Penduduk	Persentase Penurunan Angka Kelahiran Total	107.72
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota	Persentase Keterpaduan Kebijakan propinsi dengan Kebijakan Pemkot Bima	100
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pelaporan Data	100
		Program : Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Penurunan *Unmet Need*	91.63

		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsi	91.60
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Pengelola Data	100
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Laporan Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi	50
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional	100

ıran tegis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Laporan Pertemuan Koordinasi	50
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Peningkatan Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalance Rate* (MCPR)	91.60
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah organisasi yang mengikuit Pembinaan IMP dan program Bangga Kencana	100
		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	Jumlah Laporan penguatan Penyuluhan , penggerakan pelayanan dan pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	100

ıran tegis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Peserta Penggerakan Akseptor MKJP	100
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana Penunjang Pelayanan KB	100

s	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan KB Dan Kesehatan Reproduksi Di Faskes	100
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Porgram Bangga Kencana	100
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang dibina	100

aran tegis	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Capaian Kinerja (%)
-KATNY UALITAS GA	INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	107.72
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		107.72
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Unit sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan da Kesejahteraan Keluarga	100
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	100

		BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	

3.5 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk mendukung sasaran strategis yang telah diperjanjikan maka dilaksanakan 4 (empat) program dengan 13 Kegiatan dan 42 sub kegiatan, dan realisasi keuangan untuk masing – masing program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.43
Realisasi Anggaran Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
	8.020.866.314,00	6.969.507.654,00	86.89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.774.842.341,00	4.226.925.320,00	88.52
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*24.700.000*	*23.690.000*	95.91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.844.000	5.744.000	98.29
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.162.000	2.910.000	92.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.812.000	2.792.000	99.29
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	985.000	902.000	91.57
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.043.000	1.043.000	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.060.400	5.721.600,00	94.41
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.793.600	4.577.600	95.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*3.530.204.938*	*3.056.569.717*	86.58
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.482.638	2.902.099.617	86.05
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.220.000	147.055.800	97.89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.210.300	3.210.300	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.110.000	2.110.000	100
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.182.000	2.094.000	95.97

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*5.448.700*	*2.797.700*	51.35
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.968.500	1.385.500	46.67
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.480.200	1.412.200	56.94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*12.960.400*	*10.710.000*	82.64
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.620.400	1.620.000	99.98
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.340.000	9.090.000	80.16
Administrasi Umum Perangkat Daerah	*295.647.696*	*270.591.000*	91.52
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.300.000	2.000.000	86.96
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.034.000	184.912.201	98.34
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.702.000	8.940.789	92.15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.170.000	18.073.100	94.28
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.441.496	56.664.910	74.13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*424.557.580*	*383.150.049*	90.25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	87.054.690	86.856.374	99.77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	337.502.890	300.706.400	89.10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*481.323.000*	*479.417.328*	99.60
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	151.803.000	151.064.828	99.51

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.520.000	13.867.000	95.50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.000.000	314.485.500	99.84
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	123.800.000	96.892.140	78.27
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	123.800.000	96.892.140	78.27
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	61.400.000	34.659.900	56.45
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	62.400.000	62.232.240	99.73
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.101.324.000	1.771.556.721	84.31
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*618.440.000*	*432.381.986*	69.91
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	212.670.000	143.474.641	67.46
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	91.000.000	63.511.002	69.79
Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	125.000.000	124.378.000	99.50

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	189.770.000	101.018.343	53.23
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*434.802.000*	*410.345.694*	94.38
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	246.000.000	246.000.000	100
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB	188.802.000	164.345.694	87.05
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*895.802.000*	*818.309.069*	91.35
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.600.000	12.127.600	96.25
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	847.825.000	779.190.620	91.90
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.610.000	10.530.560	99.25
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.767.000	16.460.280	66.46
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan	*152.280.000*	*110.519.981*	72.58

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Pembinaan Terpadu Kampung KB	68.280.000	60.233.553	88.22
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	84.000.000	50.286.428	59.86
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.020.900.000	874.132.799	85.62
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.020.900.000	874.132.799	85.62
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	181.200.000	34.532.799	19.06
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	839.700.000	839.600.000	99.99

Realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 6.969.507.654,-** atau **86.89%** dari pagu anggaran sebesar **Rp. 8.020.866.314,-** dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2024 yaitu sebesar Rp. **8.369.254.442,00** atau 90.25 % dari pagu anggaran sebesar **Rp. 9.273.538.293,00,-**Tahun 2024, maka realisasi anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2.64%.

.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Media ini juga dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi selama Tahun Anggaran 2025

. Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dengan memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada, maka pencapaian indicator kinerja Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima, dari 4 (empat) dari 5 (lima) indicator kinerja kunci termasuk capaian sangat tinggi dan hanya satu indicator yang belum memenuhi target yang ditetapkan
2. Keberhasilan yang dimaksud di atas adalah capaian kinerja yang lebih besar dari target, baik itu target Tahun 2025, target RPJMD maupun target nasional.
3. Adapun Indikator kinerja kunci yang termasuk capaian tinggi adalah Penurunan Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR), Penurunan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) atau *Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19), ,, Persentase peningkatan angka pemakaian kontrasepsi modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (MCPR) dan Indeks Pembangunan Keluarga, sedangkan indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah Persentase Penurunan *Unmet Need.*
4. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang sebagai berikut :
    a. Optimalisasi Pelayanan KB khususnya Pasca Salin dan pada pelayanan yang bersifat momentum
    b. Peningkatan Kesertaan KB Pria

c. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di sekolah SMP dan SMA bekerjasama dengan KEMENANG tentang pendewasaan usia perkawinan
d. Optimalisasi Manajemen Data
e. Memperbaiki kualitas data sasaran dan keterpenuhan kebutuhan alokon dimasing-masing wilayah

5. Realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 6.696.507.654,00- atau 86.89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.020.866.314,00

Akhirnya, semoga LKIP ini dapat menjadi media informasi yang transparan dan akuntabel serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Kota Bima, 19 Januari 2026
Kepala DPPKB Kota Bima

H. ICHWANUL MUSLIMIN, SP.MM
NIP. 19720229 200501 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dapat berjalan dengan baik. Penyusunan Dokumen LKIP BPBD Kota Bima ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terhadap apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 dalam pelaksanaan sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 - 2029. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan terutama kepada para pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, saran dan masukan sangat kami hargai untuk bahan perbaikan. Akhirnya kami berharap semoga laporan LKIP ini dapat memberikan manfaat terutama dalam menyusun Renstra untuk lima tahun mendatang serta mendukung kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yang lebih baik.

Kota Bima, 9 Maret 2026

Kepala Pelaksana BPBD

Kota Bima,



A. Faruk, S.ST. Par.M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 197807222010011011

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 4
A. LATAR BELAKANG 4
B. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM 5
C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 7
UNSUR PENGARAH 7
KEPALA PELAKSANA 8
SEKRETARIAT 8
BIDANG-BIDANG 10
D. ASPEK STRATEGIS 14
E. STRUKTUR ORGANISASI 17
F. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
A. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH DALAM RPJMD KOTA BIMA TAHUN 2025-2030. 19
A.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD Kota Bima Tahun 2025 – 2029 19
A.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas 42
B. RENCANA STRATEGIS BPBD KOTA BIMA TAHUN 2025-2029 42
B.1. Tujuan dan Indikator Tujuan 43
B.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 44
B.4 Program dan Indikator Kinerja Program 49
B.5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. 50
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI 58
C.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 58
C.2. Indikator Kinerja Kunci 59
C.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 65
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 65
A.1. Pengukuran Capaian Tujuan dan Sasaran Organisasi 65

A.3. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Dan Sub Kegiatan 74
A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alaternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 122
B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 126
B.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan sasaran 130
B.2. Analisis Efisiensi Program, Kegiatan dan sub kegiatan 131
BAB IV PENUTUP 133
A. KESIMPULAN 133
B. SARAN 134

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahuai bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya,saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan setrategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang memberikan peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga alasan tersebut dapat diterapkan maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat. Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan seta cita-cita bangsa.Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban pelakasanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai perwujudan pertangguang jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian Kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima tahun 2025 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun pertama dari periode RPJMD Tahun 2025 -2029.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN LANDASAN HUKUM

1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP BPBD Kota Bima Tahun 2025 adalah Sebagai penjabaran dari Tujuan dan sasaran BPBD yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP BPBD Kota Bima Tahun 2025 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan kegiatan BPBD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Taun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 258);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2024 Nomor 259);
18 Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025 (Bertia daerah kota Bima tahun 2024 Nomor 891);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025.

C. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (BPBD) sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio). (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008).
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sebagai Lembaga Teknis Daerah diposisikan sebagai institusi yang melaksanakan penanggulangan bencana daerah, membantu WaliKota Bima dalam:
   a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
   b. Perumusan dan penyusunan kebijakan program pengembangan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
   c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
   d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan keterampilan teknis dan manajemen sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
   e. Pengolaan dan pemberian Bantuan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
   f. Pemetaan kawasan Rawan Bencana;
   g. Pembinaan terhadap seluruh perangkat.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima mempunyai tugas :

UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio), mempunyai tugas **:**

1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam hal penanggulangan bencana;
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi:
   a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b) Pemantauan;
c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD (Sekretaris Daerah – ex-officio) (Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008). Kepala Pelaksana mempunyai tugas **:**

a. Menetapkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Membuat perumusan kebijakan teknis Bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan;
d. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasi tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
e. Memberikan petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada staf;
f. Memeriksa hasil kerja staf;
g. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencanayang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
h. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
i. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
j. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
k. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
l. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
n. melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota;
o. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.
p. Membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.

SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sekretariat mempunyai tugas :

a. Menyusun program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing -masing Bidang dan Sekretariat;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan Sub Bagian masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf ;
e. Memeriksa hasil kerja staf ;
f. Memeriksa pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf ;
j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
e. Memeriksa hasil kerja staf;
f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
h. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
i. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
j. Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;

k. Melakukan upaya-upaya penigkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

BIDANG-BIDANG

1.1 Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing- masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis seta pengawasan kepada staf;
e. Memeriksa hasil kerja staf;
f. Melakukan serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana;
g. Melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna;
h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pencegahan dan Kesipsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Penata Penanggulangan Bencana dan Analis Kebencanaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana yang memiliki tugas dan fungsi sesuai Permen PANRB Nomor 87 tahun 2021 dan Permen PANRB tahun 88 tahun 2021, disamping Kelompok pelaksana atau Fungsional umum dan P3K.

1.2. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas :

a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Kepala Seksi di lingkungan Bidang Kedaruratan dan

Logistik sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
e. Memeriksa hasil kerja staf;
f. Melakukan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
g. Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;
i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Pada Bidang Kedaruratan dan Logistik memiliki Kelompok Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan Analis Penanggulangan Bencana yang bertanggung Jawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD, disamping Pelaksana atau Fungsional Umum dan Tenaga P3K.

1.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. Menyusun laporan hasil kegiatan bidang berdasarkan laporan hasil masing-masing Kepala Seksi dilingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas staf sesuai dengan bidangnya masing-masing;
d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada staf;
e. Memeriksa hasil kerja staf;
f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam hal penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang

pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;

h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja staf;

i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang di berikan oleh Pimpinan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Penata Penanggulangan Bencana dan Analis Kebencanaan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala disamping Kelompok pelaksana atau Fungsional umum dan P3K.

Dalam melaksanakan tugasnya BPBD didukung oleh 37 pegawai yang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 20 orang PPPK. Jumlah pegawai, pendidikan, golongan dan jabatannya sesuai tabel berikut;

1. Jumlah ASN dan Non ASN Badan penanggulangan Bencana berjumlah 37 orang dengan rincian sesuai table berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	17	45,95
2	PPPK	20	54, 05
	Total	**37**	**100**

2. Susunan Pegawai berdasarkan:

a. Golongan:

Tabel 1.2

Susunan Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
		PNS	PPPK
1	Golongan IV	4	-
2	Golongan III	12	-
3	Golongan II	1	-
4	Golongan I	-	-
5	Golongan IX	-	10

6	Golongan V	-	2
7	Non Golongan	-	8
	Total	**17**	**20**

b. Jabatan

Tabel 1.3.

Susunan Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Jabatan Fungsional	32
4	Jabatan Struktural	1
	Total	**37**

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 1.4.

Susunan Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai	Jumlah	%
1	S3	0	0
2	S2	3	8,11
3	S1	26	70,27
4	D3	0	0
5	SMA/Sederajat	8	21,62
6	SMP/Sederajat	0	0
7	SD/Sederajat	0	0
	Total	**37**	**100**

Disamping sumber daya manusia keberhasilan dan kegagalan suatu kegiatan dipengaruhi juga oleh sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan Prasarana pendukung kantor antara lain terlihat pada tabel pada Lampiran LKIP ini.

D. ASPEK STRATEGIS

Sebagai lembaga Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dituntut untuk dapat mewujudkan *Good Governance* atau *Kepemerintahan yang baik.* Pengertian Kepemerintahan yang baik (*good governance*), dapat diidentifikasi dengan indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000) mengajukan karakteristik *good governance,* sebagai berikut :

- *Participation ;* Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- *Rule of law* ; Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
- *Transparancy* ; Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
- *Responsive* ; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stake holders.
- *Consensus Orientation* ;*Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- *Equity* ; Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- *Effectiveness and effeciency* ; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- *Accountability* ; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat *(civil society)* bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- *Strategic vision* ; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut diatas merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya. Disamping itu, institusi *governance* harus efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan fasilitas dan peluang ketimbang melakukan kontrol serta melaksanakan peraturan perundang-undanganan yang berlaku.

Selain hal di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dihadapkan pada isu – isu strategis yang harus disikapi, isu strategis yang dimaksud antara lain :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
8. Adaptasi Perubahan Iklim

a. Permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai berikut:

1. Letak geografis Kota Bima berada diantara lempeng Eurosia dan Sesar naik di bagian utara yang menyebabkan rawan terjadinya gempa Bumi;
2. Gunung Tambora berada di barat Kota Bima dan Gunung sangiang Api terletak Timur laut Kota Bima;
3. Terdapat potensi Bencana,, banjir, tanah longsor, kekeringan/kekurangan air Bersih, angin putting beliung, kebakaran Pemukiman, Konflik sosial, wabah penyakit, tsunami, dll);
4. Wilayah pemukiman Kota Bima dikelilingi 60 % perbukitan dan dilalui oleh 2 sungai besar;
5. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Belum terbangun Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Kapasitas SDM yang masih kurang baik kwantitas maupun kwalitas pada organisasi pemerintah maupun pada level masyarakat;
8. Ilegal Loging atau pembalakan hutan secara masif;

9. Masih minimnya upaya - upaya PRB dalam hal mitigasi bencana;
10. Pesatnya perkembangan pembangunan menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air dan ruang terbuka hijau;
11. Masih kurangnya penelitian dan hasil riset di Bidang penanggulangan bencana;
12. Belum terimplementasi secara maksimal rencana penanggulangan bencana secara terpadu terintegrasi;
13. Belum maksimalnya implementasi penataan ruang sesuai dengan Rencana dan Kajian Risiko Bencana Daerah.

b. Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut:

1. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral;
2. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Masih minimnya barang persediaan / stok untuk memenuhi kebutuhan saat tanggap darurat;
5. Belum optimalnya pengelolaan barang logistik dan pergudangan;
6. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan belum terpusat saat keadaan darurat.

c. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana

Permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut:

1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
2. Koordinasi yang masih kurang dalam hal penanganan PB;
3. Perencanaan dan Pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum terintegrasi dalam PRB;
4. Koordinasi pinilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang belum terpusat;

5. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang bersumber dari anggaran daerah.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki Tugas Pokok dan Fungsi Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2010 Tanggal 28 Juli tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima terdiri dari : (Skema Struktur Organisasi Terlampir):

1. UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah terdiri dari**:**

1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD;
2) Unsur pengarah terdiri dari ketua dan anggota;
3) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD;
4) Unsur pengarah beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari atas:
   A. 5 (lima) orang pejabat pemerintah daerah, yaitu:
      1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
      2. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
      3. Kepala BAPPEDA;
      4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
      5. Kepala Dinas Kesehatan.
   B. 4 (empat) orang dari masyarakat professional di daerah.

2. UNSUR PELAKSANA

Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
   2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3. Fungsioanal Umum

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

3.1. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2. Fungsioanal Umum

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

4.1. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1. Fungsioanal Umum

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

5.1. Kelompok Jabatan Fungsional

5.2. Fungsioanal Umum

F. SISTEMATIKAN PENYUSUNAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar Belakang, Isu Strategis dan Struktur Organisasi;
2. BAB II – Perencanaan Kinerja, memuat ringkasan / ikhtisar perjanjian kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025;
3. BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran;
4. BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Struktur organisasi BPBD Kota Bima
2. Perjanjian Kinerja Eselon II
3. Perjanjian Kinerja Eselon III

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH DALAM RPJMD KOTA BIMA TAHUN 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan ditata dengan memperhatikan kondisi eksisting, melakukan komunikasi dan kolaborasi dalam menentukan arah kebijakan, serta fleksibel dalam mempertimbangkan ide-ide dalam pencapaian tujuan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks. Strategi dan arah kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan yang terjadi dan selanjutnya akan dikonversi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator didalam RPD dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan.

A.1. Strategi dan Arah Kebijakan PD Kota Bima Tahun 2025 – 2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah kongkrit BPBD Kota Bima dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Terkait hal tersebut maka perlu dilakukan analisis terhadap kondisi obyektif internal dan eksternal yang berpengaruh selama periode Renstra. Penentuan alternatif strategi yang tepat sesuai kebutuhan tersebut adalah analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Alat analisis ini merupakan rujukan utama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan prinsip perencanaan publik, alat analisis ini sederhana, mudah tetapi memiliki hasil yang kuat apabila dilaksanakan sesuai prosedur teoritik. Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal diperoleh identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

Tabel 2.1. SWOT ANALYSIS	
INTERNAL FACTOR	
STRENGHT	
	1.Sudah disusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2028 2.Adanya tim tanggap darurat yang sudah terlatih 3.Terbentuknya kelurahan tangguh bencana di 38 kelurahan se Kota Bima 4.Sudah terdapat peta rawan bencana dalam Perda RTRW Kota Bima tahun 2024-2044 5.Adanya Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima yang menjadi Mitra BPBD 6.Semakin tingginya kepedulian Satuan Pendidikan dan lembaga lainnya untuk kesiapsiagaan bencana (Latihan Evakuasi dan Simulasi Bencana)
WEAKNESS	
	1.Terbatasnya anggaran untuk program mitigasi dan tanggap darurat 2.Keterbatasan dalam pengembangan teknologi mitigasi bencana 3.Belum optimalnya sistem peringatan dini bencana 4.Kurangnya kegiatan simulasi bencana untuk mengedukasi masyarakat 5.Belum semua rencana kontijensi bencana dapat disusun 6.Belum terjalinya koordinasi dan sinkronisasi secara optimal dengan lembaga /OPD terkait, termasuk pada aspek penyediaan data-data teknis kebencanaan; 7.Proporsi pegawai /SDM masih perlu peningkatan baik secara kualitas dan kuantitas; 8.Masih terbatasnya sarana prasarana/peralatan penunjang kebencanaan 9. Sosialisasi keberadaan BPBD masih perlu ditingkatkan, terkait dengan tupoksi, terutama kepada pemangku kepentingan dan Kelompok Sasaran dan masyarakat 10.Pelatihan-Pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan masih sangat lemah 11. Belum tersedianya Kebijakan yang mengatur mekanisme pemberian Bantuan kepada korban bencana

12. Belum tersedianya Kebijakan yang mengatur perbaikan infrastruktur dasar pasca bencana

13. Tingkat ketangguhan kelurahan masih berada pada level pratama dan madya

EKSTERNAL FACTOR

OPPORTUNITIES

1.adanya dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi untuk penanggulangan bencana

2.Kerjasama dengan lembaga/organisasi internasional (NGO)

3.Terdapat Dana CSR yang bisa diakses untuk penanganan Bencana

4.Pesatnya dan dukungan kemajuan Teknologi Informasi di wilayah Kota Bima yang mendukung pengelolaan data berbasis digital

THREATS

1.kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang meningkatkan intensitas bencana

2.Kurangnya koordinasi antar wilayah untuk menghadapi ancaman bencana lintas wilayah

3.Infrastuktur yang tidak tahan terhadap bencana

4.Kota Bima berada pada daerah Ring of Fire dan berada pada Wilayah Cekungan yang dilalui oleh 2 Sungai Besar, Sungai Padolo dan Sungai Melayu

5.Masih Kurangnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam hal penanggulangan bencana di Kota Bima

ANALYSIS

		INTERNAL FACTOR	
		STRENGHT	**WEAKNESS**
EKSTERNAL FACTOR	**OPPORTUNITIES**	**Strategi SO** Memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah pusat dan propinsi untuk medukung program mitigasi	**Strategi WO** Memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah pusat dan propinsi untuk medukung program mitigasi dan

		dan penanggulangan bencana	penanggulangan bencana
		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penguatan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan teknologi modern yang sudah diterapkan diwilayah lain dengan bantuan pusat/propinsi
		Meningkatkan pengadaan peralatan tim tanggap darurat dan penggunaan teknologi modern untuk pemantauan bencana	Membentuk forum koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk menangani bencana yang bersifat lintas wilayah
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Melaksanakan simulasi per bencana secara berkala dengan bantuan pusat/propinsi dan memperbanyak kegiatan edukasi mitigasi bencana
		Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Melakukan Penguatan Kelurahan Tangguh dan Kelembagaan FPRB sebagai Mitra PB
			Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan bencana
			Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
	THREATS	**Strategi ST**	**Strategi WT**
		Mendorong program rehabilitasi lingkungann (reboisasi,pengelolaan DAS dan konservasi lahan kritis)	Mendorong program rehabilitasi lingkungann (reboisasi,pengelolaan DAS dan konservasi lahan kritis)
		Meningkatkan koordinasi antar wilayah dg membentuk forum koordinasi untuk menangani bencana yang bersifat lintas wilayah	Mengembangkan kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana seperti konstruksi tahan gempa dan banjir serta penguatan lereng

		Mengembangkan kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana seperti konstruksi tahan gempa dan banjir serta penguatan lereng	Meningkatkan koordinasi antar wilayah dg membentuk forum koordinasi untuk menangani bencan yang bersifat lintas wilayah
STRATEGI **Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui perkuatan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rekonstruksi serta rehabilitasi pasca bencana**			

Berdasarkan analisis diatas maka dapat ditetapkan strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima 2025 – 2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD		Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra		Ket
1	UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana	1	Pengembangan kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1	Optimalisasi Fungsi BPBD dan penanggulangan bencana baik pra, saat dan pasca bencana	
2	Perban Nomor 3 Tahun 2025 Tentang tata letak dan fungsi rambu papan informasi sebagai media edukasi mitigasi risiko bencana.				2	Memaksimalkan pelaksanaan aturan dan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Bima. dengan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan website, media sosial, serta platform PPID	

3	**PP No. 21 Tahun 2008** tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				3	Peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta mempererat koordinasi dan komunikasi dengan OPD	
					4	Penguatan Kelembagaan Forum PRB sebagai mitra BPBD dalam upaya - upaya pengurangan risiko bencana.	
	Perka BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian risiko Bencana			Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	5	Mendorong revisi dan penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis Kajian Risiko Bencana, dengan memastikan integrasi aspek pengurangan risiko bencana dalam penataan ruang.	
					6	Percepatan legalisasi penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dengan menjadikan Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar penyusunan. Sehingga RPB dapat segera diterapkan secara efektif sebagai acuan terpadu dalam upaya penanggulangan bencana di daerah.	
	Permendagri No. 101/2018 tentang				7	Mendorong pengesahan Dokumen Kajian Risiko	

	Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Bencana Daerah					Bencana Kota Bima. Upaya ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan risiko bencana, meningkatkan kepastian dalam perencanaan pembangunan, dan memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor di wilayah rawan bencana.	
					8	Memperbaharui kebijakan terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah berbasis pengurangan risiko bencana. Menjadikan Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagai acuan utama dalam perumusan dan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di Kota Bima	
		2	Peningkatan kapasitas stakeholder pada masa tanggap darurat	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	1	Pengembangan dan Penguatan struktur serta mekanisme sistem informasi kebencanaan daerah melalui penyusunan regulasi daerah yang mendukung, serta memanfaatkan teknologi informasi seperti website resmi, media sosial, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap instansi, khususnya di BPBD Kota	

						Bima.	
					2	Menguatkan dan memaksimalkan fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Bima melalui pengembangan sistem pendataan bencana daerah yang terintegrasi dengan sistem pendataan bencana nasional, guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan respons penanggulangan bencana.	
					3	Peningatan kapasitas dan profesionalisme personel penanggulangan bencana (PB) Kota Bima melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian profesi PB.	
					4	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelatihan kesiapsiagaan bencana melalui program pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan penanggulangan bencana (PB) yang dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.	
	Peraturan Kepala BNPB No. 17 Tahun 2011 Tentang: Pedoman Logistik dan				5	Meningkatkan pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan daerah yang memadai dan sesuai dengan standar operasional untuk	

	Peralatan Penanggulangan Bencana					mendukung kinerja Satgas Penanggulangan Bencana Kota Bima, guna memastikan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi bencana, serta memperkuat ketahanan logistik di daerah.	
					6	Menyusun kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan daerah dengan melakukan inventarisasi terhadap peralatan dan logistik yang telah ada, serta identifikasi kebutuhan yang masih kurang untuk kegiatan penanggulangan bencana. Perlu disusun SOP khusus untuk memastikan penggunaan dan pengerahan logistik dan peralatan kebencanaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.	
					7	Evaluasi terhadap ketersediaan dan kapasitas gudang logistik yang representatif dan memenuhi standar operasional, untuk mendukung efektivitas penanggulangan bencana. Menyusun dan mengimplementasikan SOP pengelolaan gudang	

						logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Kota Bima, yang dikelola oleh BPBD dan Dinas Sosial.	
			Pengembangan kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	8	Optimalsasi strategi pemenuhan pangan daerah untuk kondisi darurat bencana dengan merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, melalui pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan yang berkelanjutan.	
					9	Memperbarui Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bima dengan mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana, berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah disusun.	
	Permendikbud 33/2019 tentang satuan Pendidikan Aman Bencana				10	Menyusun strategi agar semua sekolah dan madrasah melaksanakan program Sekolah aman bencana, meningkatkan pemahaman melalui diskusi dan FGD dengan daerah lain yang telah berhasil membentuk SMAB.	

					11	Meningkatkan pemahaman dan kapasitas rumah sakit dan puskesmas di Kota Bima untuk menjadi Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana (RSAB) dengan Sosialisasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan kepada personel rumah sakit dan tenaga medis untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.	
			Pengembangan kebijakan pembangunan berbasis mitigasi bencana	Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	12	Meningkatkan mitigasi struktural terhadap bencana banjir di Kota Bima dengan melaksanakan program pembangunan pengendali banjir berupa sumur resapan dan biopori yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) serta Peraturan Pengelolaan Air Tanah.	
					13	Menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan daerah tangkapan air di Kota Bima. Kebijakan ini akan mencakup upaya rehabilitasi dan konservasi lahan, penanaman vegetasi, serta pengaturan penggunaan lahan di	

						kawasan tangkapan air, guna menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan ketersediaan air yang optimal.	
					14	Restorasi sungai dengan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan restorasi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar pihak terkait.	
					15	Menyusun kebijakan dan peraturan daerah terkait penguatan lereng untuk pengurangan frekuensi dan dampak bencana tanah longsor, dengan mengacu pada indikator dan arahan aturan zonasi pengembangan mitigasi bencana pada kawasan rawan gerakan tanah/ longsor.	
					16	Memperkuat aturan daerah yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan air permukaan sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana	

						kekeringan. Melalui optimalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan, termasuk perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya air.	
					17	Mengembangkan dan memperkuat aturan daerah mengenai pengelolaan dan pemantauan ekosistem di area hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), Penguatan aturan ini akan mencakup pengelolaan sumber daya alam, penanaman vegetasi, serta pembatasan aktivitas yang dapat merusak ekosistem di kawasan hulu DAS	
					18	Memperkuat sistem perizinan bangunan dengan memastikan penerapan bangunan tahan gempa dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sesuai dengan aturan zonasi gempa bumi dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	
					19	Menyusun kebijakan dan peraturan daerah terkait pemeliharaan serta peningkatan ketahanan tanggul, embung, waduk,	

						dan taman kota di daerah rawan banjir. Kebijakan ini harus didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disusun, dengan fokus pada revitalisasi dan penguatan struktur bangunan tersebut sebagai upaya mitigasi bencana banjir.	
					20	Menyusun kebijakan dan peraturan daerah terkait pengurangan aktivitas di area Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mitigasi bencana tanah longsor, dengan fokus pada konservasi vegetatif di daerah rawan longsor. Kebijakan ini akan didasarkan pada hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disusun, dan melibatkan penguatan aturan mengenai pengelolaan kawasan hulu DAS, penanaman vegetasi, serta pembatasan aktivitas yang dapat merusak ekosistem.	
		3		Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	1	Menyusun rencana kontijensi untuk bencana tanah longsor yang terintegrasi dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan	

						Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini akan menjadi pedoman operasional pada masa krisis dan dapat segera diterapkan pada tahap tanggap darurat bencana. Penyusunan rencana ini melibatkan koordinasi antar lembaga terkait seperti BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan instansi lainnya untuk memastikan kesiapan dan respons yang cepat dan efektif saat terjadinya bencana tanah longsor	
					2	Pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan dan membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk bencana kebakaran hutan dan lahan, dengan sistem dan prosedur yang terstruktur dengan baik. Sistem ini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga perlu mendorong sosialisasi	

						serta uji simulasi sistem peringatan dini kepada masyarakat secara berkala.	
					3	Pemerintah Kota Bima perlu menyusun rencana kontijensi untuk bencana banjir bandang yang terintegrasi dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, khususnya untuk daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Proses penyusunan rencana ini melibatkan koordinasi lintas sektor, termasuk BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, serta instansi terkait lainnya, untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana banjir bandang	
					4	Pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan dan membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk bencana banjir bandang, dengan sistem dan prosedur yang terstruktur dengan baik. Sistem ini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan	

						kesadaran masyarakat terhadap bahaya banjir bandang.	
					5	Pemerintah Kota Bima perlu menyusun rencana kontijensi untuk bencana kekeringan yang terintegrasi dan disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana. Rencana kontijensi ini harus memuat langkah-langkah operasional yang dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi pedoman operasi pada tahap tanggap darurat bencana.	
					6	Pemerintah Kota Bima perlu membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini untuk bencana kekeringan dengan sistem dan prosedur yang efektif, yang dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Pengembangan sistem peringatan dini ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk	

						meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kekeringan.	
					7	Pemerintah Kota Bima perlu membangun dan mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif untuk bencana longsor, dengan sistem dan prosedur yang terstruktur dengan baik untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Bima perlu mendorong sosialisasi serta melakukan uji simulasi sistem peringatan dini secara berkala kepada masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem dalam memberikan respons cepat dan optimal terhadap potensi bencana longsor.	
					8	Pemerintah Kota Bima perlu mengembangkan dan membangun sistem peringatan dini yang efektif untuk bencana banjir dengan prosedur yang jelas dan sistem yang terstruktur dengan baik. Sistem ini harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk	

						meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya banjir, serta untuk memastikan respons cepat dalam mengurangi dampak bencana. Selain itu, Pemerintah Kota Bima perlu mendorong sosialisasi yang luas dan melakukan uji simulasi sistem peringatan dini secara berkala kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sistem dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, sehingga sistem dapat berfungsi dengan optimal dalam menghadapi potensi banjir.	
					9	Penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas sebagai mekanisme yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi yang terlibat dalam penetapan status darurat bencana. Penyusunan SOP ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk BPBD, instansi terkait lainnya, dan pemangku kepentingan lokal, agar proses penetapan status darurat bencana dapat berjalan sesuai prosedur	

						yang telah disepakati dan menjamin respons yang cepat dan terkoordinasi.	
					10	Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasi Tanggap Darurat Bencana sebagai mekanisme yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan bencana. SOP ini mencakup, namun tidak terbatas pada, pelaksanaan kegiatan kaji cepat bencana, operasi pencarian dan penyelamatan, serta pengerahan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Penerapan SOP yang konsisten dan terstandarisasi akan memastikan koordinasi yang lebih baik antar instansi, mempercepat respons, dan meningkatkan efektivitas operasi tanggap darurat dalam merespon bencana. Pemerintah Kota Bima juga perlu memastikan bahwa seluruh instansi yang terlibat mendapatkan pelatihan	

						yang memadai terkait implementasi SOP ini, sehingga dapat diterapkan dengan baik dalam situasi darurat	
					11	Pemerintah Kota Bima, melalui BPBD, perlu meningkatkan kapasitas dan memperkuat mekanisme operasi Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk pelaksanaan kaji cepat bencana. Peningkatan kapasitas personil TRC ini harus fokus pada keterampilan dalam mengidentifikasi dan menilai kebutuhan pasca bencana secara cepat dan akurat, guna memberikan respons bantuan yang tepat sasaran.	
			Rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	12	Peningkatan kapasitas personil dalam pelaksanaan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pelatihan intensif untuk personil yang terlibat dalam respon	

						bencana, serta memperkuat mekanisme kaji kebutuhan pasca bencana untuk memastikan tindakan yang cepat, tepat sasaran, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Selain itu, BPBD harus memastikan bahwa personil memiliki keterampilan yang memadai dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, baik di tingkat lokal maupun lintas sektoral, guna memastikan proses penyelamatan dan pertolongan berjalan efektif dan efisien	
					13	Penguatan kebijakan dan mekanisme perbaikan darurat bencana dengan mendorong aksi cepat tanggap untuk mengatasi kerusakan akibat bencana. Hal ini mencakup penyusunan rencana perbaikan darurat yang terintegrasi dengan prosedur penanganan bencana yang sudah ada. Aksi cepat tanggap harus memastikan bahwa infrastruktur vital, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dapat	

						segera diperbaiki agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas normal secepat mungkin. BPBD perlu bekerja sama dengan instansi terkait serta sektor swasta untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan, serta memastikan bahwa mekanisme koordinasi berjalan efektif.	
					14	Penyusunan perencanaan pemulihan pelayanan dasar pemerintah pasca bencana yang komprehensif dan terintegrasi. Perencanaan ini harus dapat mengakomodasi seluruh ancaman bencana yang mungkin terjadi, serta memperhatikan kebutuhan dan peran pemerintah, komunitas, dan sektor swasta dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan listrik dapat segera dipulihkan setelah bencana. Penyusunan perencanaan pemulihan ini juga harus melibatkan pemangku kepentingan	

						lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dalam jangka panjang.	
				Adaptasi perubahan iklim		Penguatan Early warning system dan jalur evakuasi bencana dan Koordinasi dan penyediaan Sarana Penanggulangan banjir, sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan.	

A.2. Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, Berdasarkan telaah atas isu strategis di atas, maka dirumuskan Prioritas pembangunan Kota Bima tahun 2025 yakni:

1. Kebijakan Penurunan Stunting
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
4. Dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis
5. Dukungan terhadap Program Koperasi Merah Putih

Program prioritas yang berkaitan dengan urusan yang ditangani BPBD adalah pada urusan **Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat** adalah pada prioritas ke 2 yaitu **Penerapan Standar Pelayanan Minimal.**

B. RENCANA STRATEGIS BPBD KOTA BIMA TAHUN 2025-2029

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategic lokal, nasional dan global.

Rencana strategis adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, dengan demikian tahun 2025 ini merupakan tahun ke 1 dari pelaksanaan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Kota Bima.

B.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima ditetapkan berdasarkan RPJMD Kota Bima tahun 2025-2029 dimana tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal, eksternal dan kedudukan, tugas dan fungsinya. Tujuan BPBD pada lima tahun ke depan yaitu Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana.

Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan bencana daerah tahun 2025-2029 antara lain pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula Indikator	Target Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Perhitungan dengan 71 indikator Ketahanan Daerah sesuai Perka BNPB No 2 Tahun 2012 (menggunakan hasil penilaian	0,71	0,73	0,74	0,75	0,76

			mandiri)					

B.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah BPBD Kota Bima telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dengan 2 (dua) indikator yaitu 1). Indikator Sasaran Indek Ketahanan Daerah (IKD) dan 2). Indeks Ketahanan Masyarakat (IKM) sebagai berikut :

Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator sasaran BPBD Kota Bima Tahun 2025-2029

No	Sasaran Stategis	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Target Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Perhitungan dengan 71 indikator Ketahanan Daerah (Perka BNPB No 2 Tahun 2012)	0,71	0,73	0,74	0,75	0,76

Dalam Penilaian indeks ketahanan Daerah atau Indeks Kapasitas Daerah (IKD), terdapat 7 prioritas dan 71 indikator yang digunakan. Setiap indikator yang digunakan dalam penilaian memiliki 4 pertanyaan yang saling berkaitan yang artinya jika

pertanyaan diatasnya dijawab tidak maka pertanyaan dibawahnya akan bernilai tidak juga. Sedangkan jika terdapat jawaban iya dari pertanyaan dalam 71 indikator tersebut maka jawaban tersebut harus mampu dibuktikan dalam bentuk dokumen verifikasi sesuai dengan masing-masing pertanyaan. Adapun rincian pertanyaan perprioritas adalah sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
    - Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
    - Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD;
    - Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB;
    - Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan;
    - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
    - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana;
    - Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD;
    - Penguatan Forum PRB;
    - Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
2. Prioritas 2 : Pengkajian Resiko dan Perencanaan Terpadu
    - Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
    - Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD;
    - Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB;
    - Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan;
    - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
    - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana;
    - Peningkatan Kapabilitas dan Tata Kelola BPBD;
    - Penguatan Forum PRB;
    - Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.

3. Prioritas 3 : Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
    - Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
    - Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya;
    - Komunikasi bencana lintas lembaga;
    - Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana;
    - Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional;
    - Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB;
    - Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan;
    - Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah;
    - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah;
    - Pengelolaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah;
    - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik;
    - Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana;
    - Pemenuhan Kebutuhan Pangan untuk Kondisi Bencana.
4. Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Prioritas
    - Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana;
    - Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana;
    - Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana;
    - Penguatan 4 Modul Safety Hospital pada Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana pada Daerah Berisiko;
    - Replikasi Mandiri Destana ke Desa Tetangga;
5. Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
    - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori;

- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air;
- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai;
- Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan;
- Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir;
- Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Hasil Restorasi lahan gambut di Daerah Berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan.

6. Prioritas 6 : Perkuatan kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
   - Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi melalui perencanaan kontijensi, Kota Bima yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap;
   - Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami melalui perencanaan kontijensi Tsunami Kota Bima yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat;
   - Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir melalui perencanaan kontijensi bencana banjir yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat sehingga dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana;
   - Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana gerakan tanah melalui perencanaan kontijensi bencana gerakan tanah yang disinkronkan dengan Prosedur Tetap;
   - Memasang sistem peringatan dini untuk semua potensi bencana yang kemudian di uji coba secara berkala;
   - Membangun dan menginisiasi pengembangan system peringatan dini dan sarana prasarananya yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya;
   - Penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan melalui perencanaan kontijensi bencana kekeringan yang disinkronkan dengan

Prosedur Tetap dan dapat dijalankan pada masa krisis dan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana.

7. Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
    - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori;
    - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air;
    - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai;
    - Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan;
    - Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan;
    - Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir;
    - Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Hasil Restorasi lahan gambut di Daerah Berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam proses pengisian jawaban IKD juga dibutuhkan peran serta dari berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), relawan kebencanaan, masyarakat, TNI, POLRI dan LSM dalam menjawab sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adapun tahapan penilaian IKD Kota Bima dapat dilihat melalui gambar di bawah ini :

Gambar 2.1 Tahapan Penilaian IKD Kota Bima



Ada 4 tahapan Dalam penilaian IKD, Tahapan pertama melakukan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan kemudian melakukan FGD untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak, jika jawabannya ya, maka pertanyaan dilanjutkan pada pertanyaan berikutnya dengan melampirkan bukti dukung sesuai pertanyaan yang ada dalam instrumen penilaian, setelah penilaian di Daerah rampung maka tahap selanjutnya adalah mengirim dokumen dukung untuk diverifikasi oleh BPBD Provinsi NTB secara on line, dan tahap terakhir diverifikasi oleh BNPB, kemudian hasil akhir penilaian akan dikeluarkan oleh BNPB melalui surat pemberitahuan secara resmi.

B.4 Program dan Indikator Kinerja Program

Program penanggulangan bencana merupakan satu satunya program yang dilakukan BPBD Kota Bima untuk mengakomodir kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka melaksanakan kebijakan penangulangan Bencana di Kota Bima, selain Program Penunjang Urusan Pemerintah yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diperbaharui melalui Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menanggulangi bencana. Penanggulangan bencana dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan. mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat. dan pemulihan akibat bencana, maka untuk menyelesaikan tugas – tugas penanggulangan bencana tersebut diperlukan kolaborasi dari berbagai sektor agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam meminimalisir risiko akibat bencana yang tentunya dalam komando dan koordinasi BPBD sebagai leading sektor dalam penanggulangan Bencana.

Indikator kinerja program penanggulangan bencana yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja BPBD Kota Bima adalah *Persentase peningkatan upaya Penanggulang*an *bencana* dengan target capaian mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Berikut disajikan Program dan Indikator Kinerja Program BPBD Kota Bima tahun 2025-2029

Tabel 2.5 Program dan Indikator Kinerja Program BPBD kota Bima tahun 2025 - 2029

No	Program	Sasaran Program	Formula Hitung	Indikator Sasaran Program	Target Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Upaya penanggulangan bencana	=(15 % SP 1) + (45 % SP 2)+ (15 % SP 3) + (25 SP4)	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan bencana	66,92	76,98	81,16	91,18	95,21

Untuk mengukur tingkat capaian indikator kinerja program penanggulangan Bencana adalah dengan Rumusan sebagai berikut :

Porsentase Peningkatan upaya Penanggulangan Bencana = (15 % SP 1) + (45 % SP 2)+ (15 % SP 3)+(25 SP4)

Keterangan :

SP 1 = Capaian Kinerja Standar pelayanan 1 /pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

SP 2 = Capaian Kinerja Standar pelayanan 2 /pada Bidang Pencegaha dan Kesiapsiagaan

SP 3 = Capaian Kinerja Standar pelayanan 3 /pada Bidang Kedaruaratan dan Logistik

SP 4 = Capaian Kinerja Standar pelayanan 4 /pada Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

B.5 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Dalam rangka memaksimalkan upaya – upaya penanggulangan Bencana Selama tahun 2025, BPBD Kota Bima melaksanakan beberapa kegiatan dan Sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja Instansi antara lain sebagai berikut :

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan informasi bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Pelayanan informasi di Kota Bima dilakukan pada daerah rawan bencana untuk bencana- bencana prioritas seperti banjir, banjir bandang, Angin Kencang, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Tsunami, Kekeringan/Kekurangan Air Bersih, Kebakaran Pemukiman hutan dan lahan, Epidemi/Wabah dan Bencana Sosial.

Untuk mengukur Capaian kinerja kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota adalah dengan menghitung Jumlah Warga masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana dibandingkan dengan Jumlah masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana, dimana di Kota Bima ini.

Indikator Kegiatan ini adalah Persentase Pelayanan Informasi Bencana dengan target sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.6 Indikator Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Formula Hitung	Indikator Sasaran Program	Target Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota.	Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga masyarakat yang memperoleh informasi rawan bencana dibagi dengan Jumlah masyarakat yang berada pada wilayah rawan	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	64,34	65,72	86,48	68,44	76,78

			bencana x 100 % (Perwali Kota Bima No 89 Tahun 2019)						

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

1.1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana (*Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota)*

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan adalah upaya pelayanan minimal yang dilakukan pada tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko jika terjadi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (PK1);
2. Penyusunan Rencana Kontigensi (PK2);
3. Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan (PK3);
4. Gladi kesiapsiagaan bencana (PK4);
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarpras (PK5);
6. Penyediaan peralatan perlindungan (PK6).

Perhitungan Target dan Capaian dalam Kegiatan ini merupakan capaian dari unsur pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan sampai pada lima tahun perencanaan RPJMD. Indikator Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan adalah Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana dengan target sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2. 7 Indikator Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Formula Hitung	Indikator Sasaran Program	Target Tahun Ke				
					1	2	3	4	5
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Pelayanan PK = (PK 1 + PK 2 +PK 3 + PK 4 + PK 5 + PK 6)/PKn Ket : 1. Pelayanan PK : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2 PK1 = Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (dengan Bobot 0,30) 3. PK2 = Penyusunan Rencana Kontigensi (dengan Bobot 0,15) 4. PK3 = Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan (dengan Bobot 0,10) 5. PK4 = Gladi kesiapsiagaan (dengan bobot 0,15) 6. PK5 = Pengendalian operasi dan penyediaan sarpras (dengan bobot 0,15) 7. PK6 = Penyediaan peralatan perlindungan (dengan bobot 0,15) 8. PKn = Kondisi Pelayanan Pencegahan minimal (Total keseluruhan Bobotnya PK1-PK6 =1)	Persentase pelayanan informasi rawan bencana	64,34	65,72	86,48	68,44	76,78

Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana adalah :

2.1. Penyusunan Rencana Kontijensi

2.2. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

2.3. Penyediaan Peraatan Perlindunghan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota

2.4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

2.5. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana (*Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota)*

Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah upaya yang dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi melalui upaya:

a. pencarian dan penyelamatan korban;

b. pertolongan darurat; dan/atau

c. evakuasi korban.

Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah : Persentase Peningkatan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana dengan **Target Kinerja** : 100 %

Formulasi Perhitungan :

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana

$$= \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap darurat bencana}}{\text{Jumlah Kejadian bencana}} \times 100\%$$

Kecepatan respon dalam formulasi diatas adalah kecepatan dan ketepatan waktu respon dari penetapan darurat bencana hingga sampai lokasi pencarian penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi korban, sementara jumlah kejadian bencana dihitung dari total kejadian bencana selama 1 tahun.

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :

3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

3.2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

3.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Kita perlu menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya bencana - bencana besar yang melanda negeri ini, begitu juga di Kota Bima, Banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tahun 2016 yang lalu menjadikan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh warga masyarakat, trauma yang cukup mendalam yang dialami masyarakat menjadikan Kota Bima harus bahu membahu untuk membangkitkan kembali kehidupan masyarakat dan pemerintahnya. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak karena Bencana adalah urusan semua pihak.

Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain :

a. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah.

Khususnya Kota Bima, telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kota Bima dan Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana yang kemudian menerbitkan Peraturan Walikota Bima sebagai aturan pelaksanaannya. Peraturan Walikota Bima yang telah diterbitkan antara lain :

1. Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2015 tentang Anggaran penanggulangan bencana sebesar minimal 1 % dari Belanja langsung APBD Kota Bima
2. Peraturan Walikota Bima Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman peran Dunia Usaha dalam Penangulangan Bencana di Kota Bima
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Kota Bima
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan air Hujan

b. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Barat dan FPRB Nusa Tenggara Timur, serta FPRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima.

c. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. begitu juga

perhatian daerah Kota Bima dalam menganggarkan pendanaan untuk kegiatan kebencanaan.

Aspek aspek yang diuraikan di atas menjadi komponen pembentuk dalam formulasi perhitungan pencapaian indikator kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana, sehingga Formulasi perhitungan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana adalah Jumlah realisasi Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana yang dikalikan dengan bobot masing – masing komponen tersebut yang telah ditetapkan kemudian dibagi dengan jumlah total target masing – masing komponen sampai dengan 3 tahun masa Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana adalah persentasen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana dengan ***target 39,52 %***

Rumusan Formulasi

Realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana adalah (20 % x Jumlah Regulasi pendukung) + (20 % x Jumlah Dokumen tatakelola Kelembagaan) + (20 % x Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan) + (20 % x Fasilitasi pengumpulan data penduduk)+ (20 % x Jumlah Dokumen Jitu pasna).

Sub Kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana antara lain :

4.1. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

4.2. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

4.3. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

4.4. Penyusunan Regulasi Penanggulanggan Bencana Kabupaten/Kota

4.5. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

C.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Penanggulangan bencana daerah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi, Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ini ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima yang akhirnya dapat mendukung tercapainya kinerja daerah.

Definisi operasional dan rumus perhitungan pencapaian Indikator Kinerja Utama telah diuraikan pada bagian Indikator Tujuan dan Indikator sasaran Organisasi pada bagian awal Bab II ini.

Penjelasan Tentang Indikator Kinerja Utama Badang Penanggulangan Bencana Daearah Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Utama Badang Penanggulangan Bencana Daearah Kota Bima Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan Sd tahun 2029	Sasaran Stategis	Indikator Sasaran	Target Tahun Ke				
						1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,76	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,71	0,73	0,74	0,75	0,76

C.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja kunci adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu kementerian dalam negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan.

BPBD sebagai penanggung jawab dalam Urusan Penanggulangan Bencana memegang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana sehingga dalam melaksanakan fungsinya harus memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Bencana dengan indikator dan target capain sebagai berikut :

1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Konsep/Definisi	**Mengukur jangkauan layanan informasi rawan bencana**	**Target Tahun ke**				
		1	**2**	**3**	**4**	**5**
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	64,34	65,72	66,48	68,44	76,78
Satuan Hasil	: Persentase (%)					
Definisi Operasional	: ▪ Pembilang warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik. ▪ Penyebut seluruh warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen Kajian Rawan Bencana (KRB)					
Data Pendukung	: ▪ Pembilang					
	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan penyampaian					

	informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta.					
	Sumber Data : BPBD, Kantor Satpol-PP. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target kegiatan penyampaian informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta. Sumber Data : BPBD, Kantor Satpol-PP					
Regulasi	: ▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota					

2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Konsep/Definisi	:	Mengukur jangkauan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Target Tahun ke				
			1	2	3	4	5
Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	1,30	2,05	2,35	3,47	3,98
Satuan Hasil	:	Persentase (%)					
Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan.					
Data Pendukung	:	▪ Pembilang					
		Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat realisasi kegiatan informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan,. Sumber Data : Kantor BPBD					

	▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta di kawasan rawan bencana. Sumber Data : Kantor BPBD					
Regulasi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota					

3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Konsep/Definisi	: Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Target Tahun ke				
		1	2	3	4	5
Rumus	: $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Satuan Hasil	: Persentase (%)					
Definisi Operasional	: ▪ Pembilang Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. ▪ Penyebut Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana.					
Data Pendukung	: ▪ Pembilang					
	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat uraian Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana antara lain yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.					

	Sumber Data : Kantor BPBD ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang jumlah warga negara yang menjadi korban bencana. Sumber Data : Kantor BPBD						
Regulasi	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota						

4. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n ---------- Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n x 100%	Persen	16,67	100	100	100	100	100	100

5. Persentase penanganan pra bencana

5	Persentase penanganan pra bencana	Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n ---------- Jumlah target kegiatan prabencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n	Persen	90	58,33	80	90	90	90	90

6. Persentase penanganan pasca bencana

6	Persentase penanganan pasca bencana	Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n ---------- Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P x 100%	Persen	45	60	70	80	90	100	100

7. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n --- Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n	Persen	65	70	75	80	85	90	95

C.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

Pada prinsipnya Penetapan Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selama Tahun 2024. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan maupun di tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Perjanjian Kinerja

BPBD Kota BimaTahun 2025 adalah diuraikan dalam ikhtisar berikut dan Secara lengkap Perjanjian kinerja Eselon II, III Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025 dan perubahannya dapat dilihat pada lampiran LKIP ini.

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tahun : 2025

No.	**Sasaran Strategis/Sasaran Program**	**Indikator Program / Indikator Kinerja Utama**	**Target**
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,71
2	Meningkatnya Upaya penanggulangan bencana	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	64,64 %
3	Tertibnya Tatakelola Pemerintahan	Nilai Sakip	BB

PROGRAM **ANGGARAN**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 4.683.301.983,00

2. Program Penanggulangan Bencana 665.533,00

TOTAL 5.356.866.283,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah hasil pengukuran dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang dianalisa dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Renstra BPBD Kota Bima. Disamping itu juga dapat menganalisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusinya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A.1. Pengukuran Capaian Tujuan dan Sasaran Organisasi

Tujuan BPBD Kota Bima adalah Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana, sama dengan sasaran organisasi dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), maka untuk mengukur Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan menghitung Kenaikan angka Indeks ketahanan daerah (IKD).

A.1.1. Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2025

Berdasarkan hasil penilaian Mandiri terhadap Indek Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025. Untuk mengukur Capaian Indeks Ketahanan daerah, pada Bab sebelumnya telah menguraikan cara pengukurannya yaitu dengan menjawab 284 pertanyaan yang terbagi kedalam 71 indikator serta 7 Prioritas. Berdasarkan hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kota Bima masih masuk dalam kategori yang memiliki Ketahanan ***Sedang*** dalam menghadapi ancaman bencana dengan nilai indeks sebesar 0,68. Nilai Sedang tersebut menunjukan masih banyaknya hal yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan di Kota Bima untuk bisa mencapai ketahanan Tinggi dalam menghadapi ancaman bencana. Berikut disajikan Capaian Nilai Indek Ketahanan Daerah Tahun 2025.

Tabel 3.1 Nilai IKD Kota Bima tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
			2025	2025	2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indek Ketahanan Daerah (IKD)	0,71	0,68	95,77 %

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi kinerja indikator kinerja Tujuan BPBD Kota Bima tahun 2025 sebesar 0,68 dari target 0,71, yang berarti capaian kinerja Sasaran BPBD Kota Bima tahun 2025 sebesar 95,77 %, komponen yang tidak bisa dimaksimalkan sesuai target antara lain :

Prioritas 1 : Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

- Belum maksimalnya Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD;
- Belum Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Forum PRB;
- Belum Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan;
- Belum legalnya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai pedoman dalam meningkatkan koordinasi penanggulangan bencana lintas sektor;
- Belum maksimalnya penggunaan Data kajian risiko Kajian Risiko Bencana sebagai basis data perencaan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Prioritas 4 : Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Prioritas

- Program Peningkatan Kapasitas Dasar Satuan Pendidikan Aman Bencana belum mencapai 50 % dari 75 % sekolah yang pernah mendapat sosialisasi SPAB;
- Belum semua rumah sakit daerah rawan bencana perencanaan kegiatan/program rumah sakit aman bencana sudah berdasarkan pada 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.;
- Belum ada Replikasi Mandiri Kelurahan tangguh bencana di Kelurahan Tetangga.

Prioritas 5 : Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

- Bertambahnya daerah terbangun dan kurangnya Penerapan Sumur Resapan dan Biopori;
- Semakin berkurangnya Daerah Tangkapan Air untuk mengurangi Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir.

Prioritas 7 : Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana,

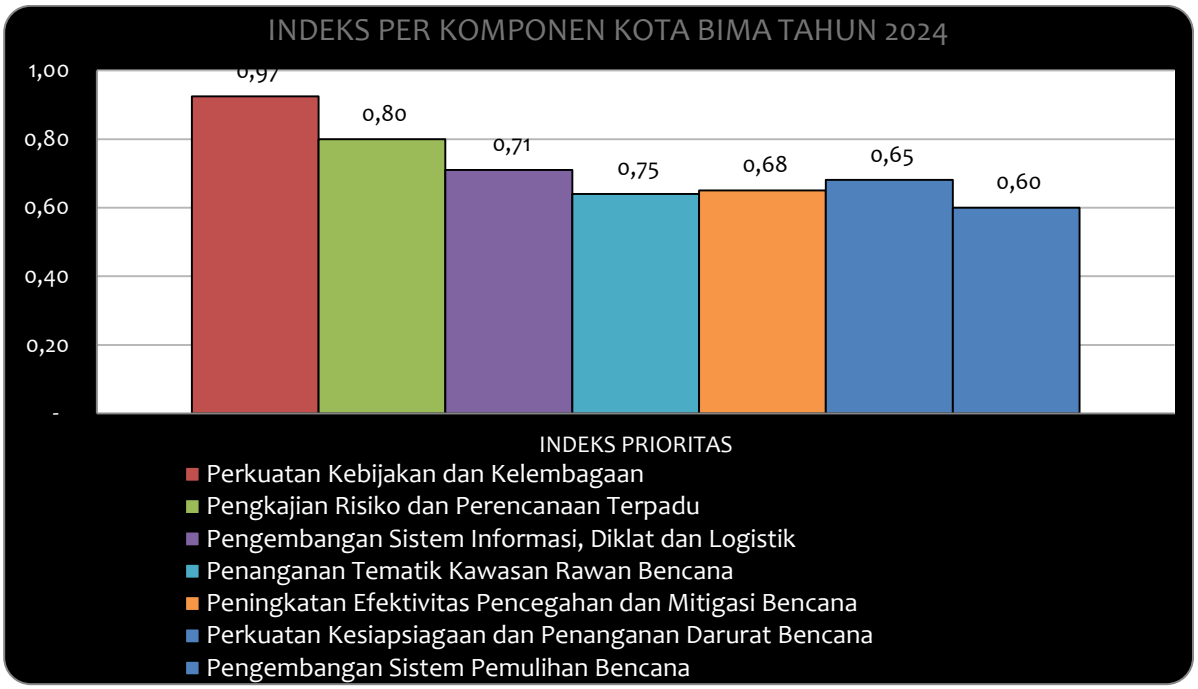
- Belum adanya kesepakatan - kesepakatan daerah yang telah mempertimbangkan prinsip-prinsip risiko bencana jangka panjang (*slow onset*).

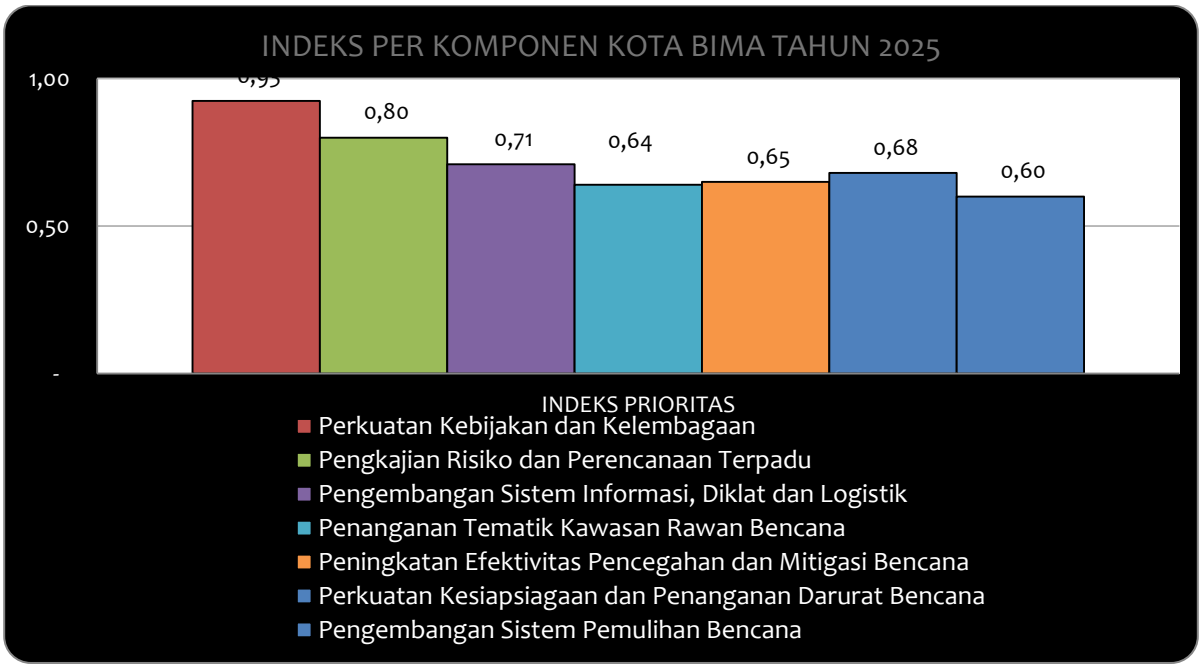
Di beberapa indikator penilaian indek ketahanan daerah tahun 2025 mengalami kenaikan pada beberapa prioritas namun secara total disetiap prioritas nilai indeksnya tetap, yang mengalami kenaikan secara signifikan hanya pada prioritas ke 6 yaitu Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Bima melalui kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Rencana kontijensi Gempa Bumi, rencana kontingensi bencana banjir, rencana kontingensi bencana banjir Bandang, dan Rencana kontingensi bencana kekeringan, meskipun 2 (dua) diantara rencana kontingensi tersebut belum dilegalisasi.

Gambaran kenaikan dan penurunan nilai indeks ketahanan daerah dapat dilihat pada diagram batang yang tersaji pada perbandingan capaian indikator Tujuan dan Sasaran dengan tahun sebelumnya.

A.1.2. Perbandingan Capaian Indikator Tujuan dan sasaran tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Berikut disajikan indeks perkomponen tahun 2024 dan indeks perkomponen tahun 2025 sebagai perbandingan capaian dari tahun sebelumnya.





Berdasarkan perbandingan 2 (dua) diagram batang di atas dapat dijelaskan bahwa nilai indek per prioritas atau per komponen menunjukkan bahwa indeks komponen 1 perkuatan kebijakan dan kelembagaan memiliki nilai indek paling tinggi yaitu 0,93 namun mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 0,97 akibat tidak tersedianya dokumen Rencana penanggulangan Bencana yang legal sehingga koordinasi lintas sektor kurang maksimal dan masih kurangnya penggunaan data kajian risiko bencana dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara nilai indeks pada komponen 2 dan 3 tidak mengalami perubahan nilai total yaitu sebesar 0,80 untuk indeks pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dan sebesar 0,71 untuk komponen pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, meskipun kedua komponen tersebut tidak mengalami perubahan pada nilai totalnya dari tahun sebelumnya namun pada masing – masing indikatornya terdapat perubahan terutama mengalami penurunan pada pertanyaan 71 dan pertanyaan 95, dan mengalami kenaikan pada pertanyaan 56

Pada komponen prioritas ke 4 yaitu Penanganan tematik kawasan rawan bencana mengalami penurunan yang cukup drastis karena pada tahun 2025 semakin berkurangnya sosialisasi dan simulasi bencana di tingkat sekolah melalui program Satuan Pendidikan Aman bencana dan begitu juga dengan Rumah sakit aman Bencana.

Komponen prioritas yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah pada komponen 5 yaitu perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana mengalami kenaikan karena terdapat kenaikan ketersediaan dokumen rencana kontingensi sebagai dasar pelaksanaan dalam kesiapsiagaan bencana dan penanganan darurat.

secara keseluruhan nilai IKD pada tahun 2025 turun 1 point dari nilai IKD tahun 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh kesiapsiagaan Kota Bima dalam menghadapi ancaman bencana, baik dari sisi regulasi terkait kebencanaan, kesiapan lembaga kebencanaan, kemampuan personil, alat pendukung, dan anggaran, serta peran serta BUMN, swasta, relawan kebencanaan dan masyarakat.

A.1.3. Perbandingan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran tahun 2025 dengan capaian kinerja kabupaten/Kota lain di Provinsi NTB.

Pada tahun 2025 ini adalah tahun pertama periode perencanaan lima tahunan BPBD Kota Bima. Sebagaimana telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis BPBD Kota Bima Tahun 2025-2029 bahwa target kinerja Tujuan dan Sasaran yaitu Nilai Indek Ketahanan Daerah Kota Bima sampai dengan tahun 2029 adalah sebesar 0,76. Di bawah ini disajikan Capaian Sasaran Strategis indikator Indek Ketahanan Daerah sampai dengan tahun 2025.

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis indikator Indek Ketahanan Daerah sampai dengan Tahun 2025

No	Sasaran	Target sd tahun	Target	Realisasi	Capaian kinerja	Capaian kinerja dari Renstra sd tahun
		2029	2025	2025	2025	2029
1	2	3	4	5	7	8
1	Meningkatnya ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana	0,76	0,71	0,68	75,77 %	89,47%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Tujuan dan sasaran strategis sampai dengan tahun 2025 sebesar 89,47 % jika dibandingkan dengan target kinerja sasaran strategis yang akan dicapai sampai pada lima tahun ke depan di tahun 2029, hal ini capaiannya masih rendah namun masih ada waktu yang cukup untuk melakukan optimalisasi kebijakan dan upaya – upaya pengurangan risiko bencana dengan menaikkan tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana agar terlaksana sesuai target yang diharapkan.

Untuk membandingkan capaian nilai IKD Kota Bima dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Nusa Tenggara Barat, maka perlu menggunakan data capaian yang telah diverifikasi dan dipublis oleh BNPB melalui surat Nomor : B-47/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 dan melalui portal https://inarisk.bnpb.go.id/admin. Berikut disajikan perbandingan hasil capaian IKD Kota Bima dengan Kab/Kota Lain di Wilayah NTB.

Tabel. 3.3 Nilai IKD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat tahun 2025

NO	Kab./Kota di Provinsi NTB	IRB
1	Bima	0,45
2	Dompu	0,45
3	Kota Bima	0,60
4	Kota Mataram	0,43
5	Lombok Barat	0,73
6	Lombok Tengah	0,50
7	Lombok Timur	0,56
8	Lombok Utara	0,73
9	Sumbawa	0,45
10	Sumbawa Barat	0,57

Berdasarkan Tabel.. di atas Nilai IKD Kota Bima sesuai hasil verifikasi BNPB sebesar 0,60 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Nilai IKD kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kota Bima berada pada posisi tertinggi ke dua setelah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara. Capaian Nilai IKD tertinggi adalah Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yaitu sebesar 0,73 disusul Kota Bima, setelah itu berturut – turut Kabupaten Subawa Barat, Kab Lombok Timur, Kab Bima, Kab Dompu, Kab Sumbawa dan terakhir Kota Mataram dengan nilai 0,43.

Surat BNPB Nomor : B-47/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 perihal Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.



A.2. Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 50.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bahwa Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Bima hanya memiliki satu program utama yaitu Program Penanggulangan Bencana disamping program Penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi keseluruhan implementasi dari tugas pokok dan fungsi kebencanaan yang diemban BPBD. Untuk mengukur capaian kinerja kebencanaan yang dilakukan BPBD melalui program ini adalah dengan indikator Persentase peningkatan upaya Penanggulangan bencana, berikut disajikan capaian kinerja program penanggulangan bencana tahun 2025.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian kinerja 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan bencana	66,92 %	58,96 %	88,11 %

Sumber data: Data olahan BPBD Kota Bima.

Berdasarkan tabel di atas bahwa target kinerja program penanggulangan bencana sebesar 66,92 % sementara realisasinya sebesar 58,96 %, sehingga capaian kinerja program penanggulangan bencana sebesar 88,11 %. hal ini didukung oleh terlaksananya kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana serta kegiatan Penataan sistem dasar penanggualngan bencana. Capaian tersebut tidak tercapai 100 % karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi secara normal akibat adanya sub kegiatan yang tidak bisa 100 % dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2025, disamping adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun 2025 yang terpaksa mengurangi sebagian aktivitas yang mempengaruhi output sub kegiatan dan secara berjenjang berpengaruh terhadap capaian outcome program penanggulangan bencana. Uraian capaian kegiatan dan sub kegiatan dapat dijelasakan pada bagian lain setelah bagian ini.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian indikator program penanggulangan bencana mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut disajikan tabel perbandingan capaian indikator program penanggulangan bencana tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.5 Perbandingan capaian indikator program penanggulangan bencana tahun 2025 dengan capaian tahun sebelumnya

No	Program	Target	Target	Realisasi	Realisasi	Capaian kinerja	Capaian kinerja
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	**Program Penanggulangan Bencana**	64,64 %	66,92%	64,25 %	58,96 %	99,40 %	88,11 %

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pada tahun 2024 realisasi kinerja program penanggulangan bencana sebesar 64,25 % dengan capaian sebesar 99,40 % mengalami penurunan di tahun 2025 sebesar 58,96 % atau sebesar 88,11 % dari target tahun 2025. Uraian

capaian kinerja kegiatan, sub kegiatan dan kendala serta permasalahannya dapat diuraikan secara rinci pada penjelasan capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan di bawah ini.

A.3. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan Dan Sub Kegiatan

A.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota adalah upaya pelayanan minimal yang dilakukan oleh BPBD sebagai implementasi aturan terkait SPM sub Urusan bencana dalam rangka mendukung tercapainya indikator kinerja daerah

Untuk menghitung capaian kinerja kegiatan ini adalah dengan membandingkan antara Jumlah masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana dengan jumlah penduduk yang mendapatkan informasi rawan bencana. Jumlah masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana sama dengan Jumlah penduduk Kota Bima yaitu sebanyak 111.760 orang, yaitu jumlah penduduk yang wajib mendapatkan informasi kebencanaan yang berada pada umur 15 – 64 tahun, sementara realisasi jumlah penduduk yang mendapatkan informasi rawan bencana sebanyak 56.550 orang

Capaian kinerja Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Realisasi dan Capaian kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota Tahun 2024

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian kinerja
			2025	2025	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	64,34 %	50,60 %	78,28 %

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi kinerja kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota adalah sebesar 50,60 % dari target sebesar 64,64 % yang berarti bahwa capaian kinerja kegiatan adalah sebesar 78,28 % lebih kecil dari target kinerja yang tertuang dalam rencana kinerja.

Adapun sub kegiatan yang mempengaruhi capaian dari kegiatan ini adalah Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota. Pada Sub Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota memuat antara lain Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota, sub kegiatan ini memastikan bahwa pekerjaan ini idealnya dapat melakukan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota kepada masyarakat yang berada di wilayah yang berpotensi terjadinya bencana terhadap seluruh jenis risiko yang paling berpotensi terjadi di Kota Bima, tentunya dasar pelaksanaanya mengacu pada Dokumen kajian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun output dari Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah warga negara termasuk rentan dikawasan rawan bencana yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun.

Salah satu media yang digunakan dalam penyampaian informasi kebencanaan adalah dengan aplikasi Sistem Inforrmasi Rawan Bencana (Si IwaN) yang secara tidak langsung berkontribusi dalam penyebarluasan informasi kebencanaan. Selain Aplikasi tersebut media penyebaran informasiyang digunakan adalah media sosial berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, Media online, Spanduk, yang didukung penuh oleh data yang bersumber dari kerjasama antara BMKG Bima dan BPBD yang tertuang dalam MoU kedua belah pihak yang berpedoman pada peraturan Wali Kota Bima Nomor tahun 2023 tentang Penyebaran informasi kebencanaan di kota Bima. Selain itu Kegiatan Sosialisasi dan edukasi ini juga didukung oleh Kiprah besar dari Forum Pengurangan risiko Bencana dimana tahun 2025 ini melakukan sosialisasi tatap muka kepada civitas Sekolah melalui Program Satuan pendidikan Aman bencana baik melalui sosialisasi dan simulasi bencana maupun melakukan Pelatihan SPAB kepada Perwakilan dari tenaga kependidikan di seluruh sekolah dasar di Kota Bima, yang diharapkan mampu mereplikasikan ilmu yang diperolehnya dari diklat ini pada tempat kerja masing masing. Disamping itu juga terdapat beberapa instansi vertikal maupun lembaga swasta yang telah melakukan sosialisasi kepada pegawainya terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan melibatkan BPBD Kota Bima sebagai narasumber pada kegiatan ini

Namun secara umum capaian indikator kegiatan ini masih sangat rendah karena sebagian besar aktivitas pada sub kegiatan ini dihapus untuk memenuhi efisiensi. Berikut disajikan Capaian Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota.

Tabel 3.6 Capaian Sub kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota	111.760 orang	56.550 orang	50,60 %

Realisasi dari sub kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota adalah 56.550 orang dari target sebesar 111.760 orang. Ini berarti realisasinya sebesar 50,60 %. Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang mendukung pelayanan minimum urusan kebencanaan, sehingga seharusnya target penyampaian informasi rawan bencana harus menyasar ke seluruh penduduk yang berada pada wilayah rawan bencana, akan tetapi karena keterbatasan sumber daya yang tersedia maka realisasi kinerja sub kegiatan ini masih jauh dari target, untuk itu perlu dilakukan inovasi dalam penyampain informasi kepada masyarakat terutama dengan menggunakan kearifan lokal untuk menjangkau pada masyarakat yang masih gagap teknologi. Media penyampaian informasi yang digunakan selama tahun 2025 adalah : Sosialisasi kepada masyarakat melalui tatap muka, Pamflet, Spanduk, Media On line, Sosial Media Facebook, WA Group dan sosial media lainnya termasuk ketersediaan PUSDALOP BPBD sebagai pusat informasi dan pengendalian operasi penanggulangan bencana di Kota Bima.

Kegiatan sosialisasi tatap muka pada tahun ini sasarannya adalah kepada Anggota Tim Siaga Becana Kelurahan yang berada di seluruh Kelurahan se Kota Bima, sebagai

ajang saling koordinasi dan penguatan informasi kebencanaan dari hulu hingga ke hilir karena TSBK merupakan garda terdepan bersama dengan TRC BPBD dalam melakukan respon kebencanaan di Wilayahnya. Berikut disajikan dokumentasi kegiatan Sosialisasi Sub kegiatan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan bencana kabupaten/Kota Tahun 2025 melalui berbagai media termasuk tatap muka.

Penyerahan Pamflet



Spanduk Himbauan Untuk Kesiapsiagaan Bencana



Gambar 3.2 Sosialisasi kesiapsiagaan bencana secara Tatap muka

A.3.2. Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan adalah upaya pelayanan minimal yang dilakukan pada tahapan pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam rangka mengurangi risiko jika terjadi bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi :

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (PK1);
2. Penyusunan Rencana Kontigensi (PK2);
3. Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan (PK3);
4. Gladi kesiapsiagaan (PK4);
5. Pengendalian operasi dan penyediaan sarpras (PK5);
6. Penyediaan peralatan perlindungan (PK6).

Perhitungan Target dan Capaian dalam Kegiatan ini merupakan akumulasi capaian dari 6 (6) unsur pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan tahun 2025 yang dibandingkan dengan target pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan tahun 2025

Formulasi perhitungan

Pelayanan PK = (PK 1 + PK 2 +PK 3 +PK 4 + PK 5 + PK 6)/PKn

Ket :

2. Pelayanan PK : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2 PK1 = Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (dengan Bobot 0,30)

3. PK2 = Penyusunan Rencana Kontigensi (dengan Bobot 0,15)
4. PK3 = Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan (dengan Bobot 0,10)
5. PK4 = Gladi kesiapsiagaan (dengan bobot 0,15)
6. PK5 = Pengendalian operasi dan penyediaan sarpras (dengan bobot 0,15)
7. PK6 = Penyediaan peralatan perlindungan (dengan bobot 0,15)
8. PKn = Kondisi Pelayanan Pencegahan minimal (Total keseluruhan Bobotnya PK1-PK6 =1)

Tabel 3.7 Realisasi kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Tahun 2025

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	60,81 %	58,87%	96,81 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sebesar 58,87 % dari target sebesar 60,81 % atau capaian kinerja kegiatan ini hanya sebesar 96,81 %. Sub Kegiatan yang mempengaruhi capaian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi

Dokumen Rencana Kontijensi merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Dokumen ini hanya berumur 2 (Dua) tahun, jika pada jangka waktu selama 2 tahun tersebut tidak terjadi bencana seperti yang diasumsikan sesuai dengan potensinya, maka dokumen ini harus dilakukan pemutakhiran kembali.

Tahapan penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi dilakukan setelah menyusun Dokumen kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana sebagai dasar untuk menentukan prioritas penyusunan sesuai dengan tingkat risiko ancaman bencana yang ada di daerah.

Pada tahun ini BPBD Kota Bima ditargetkan menyusun 2 (Dua) dokumen Rencana Kontinjensi yaitu Dokumen Rencana Kontinjensi bencana Banjir bandang dan Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami. Capaian pelaksanaan Sub kegiatan penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Capaian Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1	Penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi	2 Dok	1 Dok	50 %

Berdasarkan tabel diatas bahwa realisasi kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana kontinjensi sebesar 1 dokumen dari target 2 Dokumen yang berarti capain kinerja sebesar 50 %, pada tahap draf 2 dokumen tersebut telah selesai namun baru 1 dokumen yang telah melalui tahapn legalisasi. Dokumen Rencana kontinjensi ini harus sampai pada tahap legalisasi hukum minimal dengan peraturan walikota bima dengan harapan dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana operasi jika terjadi bencana dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam penyusunannya karena menyangkut kesiapan berbagai sektor dalam kesiapsiagaan bencana baik kesiapan personil, peralatan, logistik maupun kesiapan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penanganan Darurat bencana. Dokumen Rencana kontingensi yang dihasilkan adalah Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kontinjensi bencana tsunami di Kota Bima tahun 2025.

Gambar 3.3 Penyusunan Rencana Kontingensi bencana Tsunami dan Bencana Banjir Bandang tahun 2025.



b. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Setelah selesai menyusun Dokumen Rencana kontinjensi, langkah selanjutnya adalah mengujicoba dokumen tersebut melalui Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana untuk memastikan dan mengevaluasi kesiapan sumber daya yang ada di Daerah dalam menghadapi jika terjadi situasi darurat bencana.

Capaian Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Sub kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	940 Orang	940 Orang	100 %

Pada tahun 2025 ini Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dapat terlaksana 100 % dari taget. Pelaksanaan gladi kesiapasiagaan terhadap bencana kepada 940 orang dapat terlaksana sesuai target. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, kegiatan 1 (satu) kali sedianya dilaksanakan pada momentum peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional tanggal 26 april 2025, namun mengalami kendala pelaksaan karena bertepatan dengan pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Pemerintah Kota Bima tepatnya Kegiatan pawai Budaya yang dilakukan secara besar – besaran sehingga tidak memungkinkan jika dibarengi kegiatan tersebut pada waktu yang bersamaan. Meskipun demikian capaian target ini dapat tertutupi dengan adanya kegiatan yang dilakukan bersama dengan Forum PRB yang melakukan simulasi bencana di tingkat Sekolah Dasar di SDN 25 Kota Bima, sehingga kegiatan gladi kesiapsiagaan dapat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Berikut disajikan Dokumentasi Gladi Kesiapsiagaan bencana/ Apel Siaga di Kota Bima tahun 2025.

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Apel Siaga Kota Bima Tahun 2025



c. Penyediaan Peralatan Perlindung dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota

Alat pelindung diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh orang yang berada di lokasi bencana untuk melindungi tubuh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya dan kecelakaan saat menjalankan tugas kemanusiaan. Penyediaan peralatan pelindung diperuntukkan baik bagi TRC dan relawan kebencanaan yang melaksanakan tugas di Lapangan maupun bagi masyarakat yang menjadi korban bencana.

d. Pada tahun 2025 melalui sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota ini dapat menyediakan sejumlah paket peralatan perlindungan seperti 50 pices jas hujan, 1 unit mesin canshow, 50 buah pengeruk sampah, 150 lembar sarung, 50 unit sekop, 10 unit senter kepala, 11 unit senter tangan, 50 set sepatu boot, 50 buah slaber, 150 lembar terpal dan 150 lembar tikar. Ketersediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan mendukung pencapaian indikator peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapasiagaan bencana. Berikut disajikan secara lengkap jumlah penyediaan Peralatan Perlindung dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota tahun 2025 yang disediakan melalui APBD Kota Bima.

Tabel 3.10 Jumlah Peralatan Perlindung dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Harga
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Jas Hujan	50	Pcs	8.500.000,00
2	Mesin chainshau	1	Unit	13.510.000,00
3	Pengeruk sampah	50	buah	5.500.000,00
4	Sarung	150	Lembar	18.000.000,00
5	Sekop	50	Buah	7.500.000,00
6	Selimut	150	lembar	18.000.000,00
7	Senter kepala	10	Buah	3.500.000,00
8	Senter Tangan	11	Buah	1.980.000,00
9	Sepatu boot	50	Set	8.500.000,00
10	Sleber	50	Buah	2.500.000,00
11	Terpal	150	Lembar	37.500.000,00
12	Tikar	150	lembar	15.000.000,00
	JUMLAH			**139.990.000,00**

d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima telah mengembangkan akses komunikasi dan pengembangan sistem peringatan dini dengan tersedianya PUSDALOP BPBD Kota Bima sebagai pusat pengendalian operasi kebencanaan, di sinilah informasi peringatan dini dapat diolah. Sistem peringatan dini seperti banjir yang di pasang dibagian hulu dan hilir menjadi sumber informasi yang valid yang kemudian didukung dengan informasi dari relawan sebagai penyanding data lapangan. Dengan adanya peringatan dini bencana, maka masyarakat dapat melakukan respon yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Sarana dan Prasarana Peringatan dini yang

mendukung kerja PUSDALOP dijelaskan pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3. 11 Sarana Prasarana Peringatan Dini

NO	JENIS	VOLUME	KONDISI	LOKASI PENEMPATAN
1	Sirene Tanda Longsor	1 unit	Kurang terawat	Kel PenanaE Kota Bima
2	Handy Talky	27 unit	Beberapa Kurang terawat	Tersebar di Kota Bima
3	Kamera Pemantau Tinggi Muka Air Sungai	2 unit	Kurang terawat	Kel Lampe dan Ntobo Kota Bima
4	Alat Ukur Curah Hujan Otomatis	1 unit	Baik	Kel Lelamase Kota Bima
5	Radar Hujan	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima
6	Pusdalops (Yang dilengkapi dengan peralatan kerja yang cukup memadai)	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima
7	Repeater	1 unit	Kurang bisa maksimal karena frekuensi yang terpasang terlalu tinggi berada mendekati frekuensi Radio lain. Sehingga perangkat pendukung lainnya tidak bisa berfungsi maksimal	Doronae Kab. Bima (Pengadaan tahun 2023)
8	RIG	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima
9	SSB	1 unit	Baik	Kantor BPBD Kota Bima

Aktivitas yang dilakukan melalui Sub Kegiatan ini adalah melakukan pemantauan harian terhadap kondisi potensi bencana yang terjadi di Wilayah kerja dengan memperhatikan perkembangan informasi prakiraan cuaca dari BMKG secara berkala. Petugas pusdalop tetap

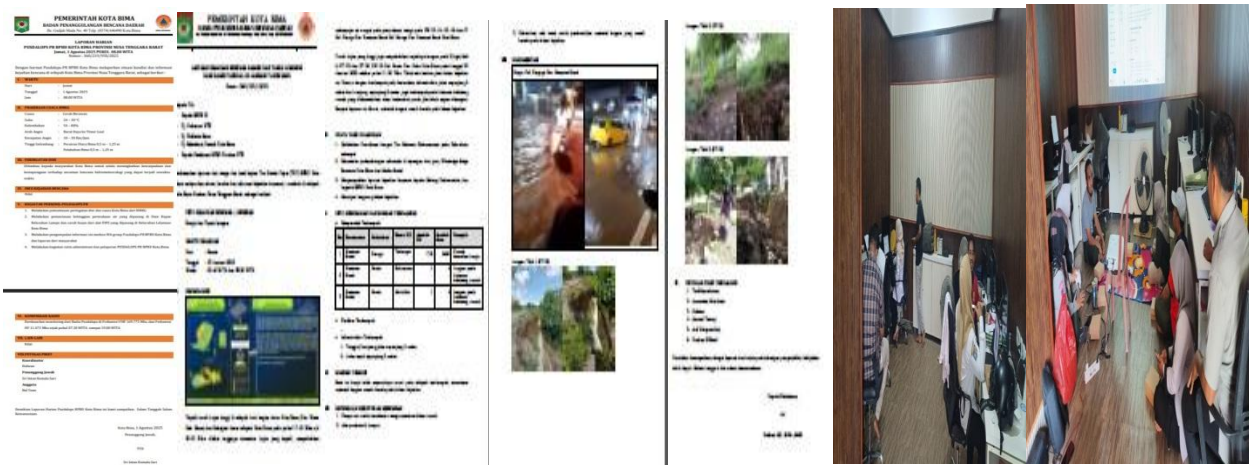
melakukan piket 24 jam terutama pada saat musim penghujan. Berikut disajikan capaian kinerja sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 3.12 Realisasi sub. kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	*2*	*4*	*5*	*6*
1	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dok	12 Dok	100 %

Pada Tahun 2025 realisasi dari sub kegiatan ini sebesar 12 dokumen dari target sebanyak 12 dokumen yang ditetapkan. Artinya realisasi dari sub kegiatan ini sebesar 100 %. Dokumentasi pelaksanaan piket pusdalop dan Hasil pemantauan terhadap kondisi kebencanaan harian dapat dilihat pada dokumentasi dan Laporan Harian POSDALOP PB BPBD Kota Bima dibawah ini :

Gambar 3. 5 Laporan Harian Pusdalop PB dan Dokumentasi Aktivitas hariannya



e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota pada tahun 2025 ini tujuannya untuk melatih personil TRC yang ada di BPBD seluruhnya, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur BPBD dalam menjalankan tupoksinya secara maksimal baik sebelum bencana, saat bencana pada masa tanggap darurat maupun pasca bencana.

Capaian Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	1 kawasan	1 kawasan	100 %

Realisasi dari Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota adalah 1 kawasan dari target 1 kawasan yang berarti capaian kinerja sub kegiatan ini 100 %, realisasi kinerja 1 kawasan yang dimaksud pada sub kegiatan ini adalah pada wilayah kerja namun diwakili oleh personil TRC BPBD yang akan bertugas dalam melakukan respon darurat bencana maupun sebelum darurat bencana itu terjadi. Bimbingan teknis juga dilakukan oleh Forum PRB bekerjasama dengan BPBD Kota Bima terkait Program Satuan Pendidikan Aman Bencana pada 30 Tenaga kependidikan di Wilayah Kota Bima yang mewakili Sekolah Dasar di wilayah Kota Bima dan Pelatihan pengelolaan sampah non organik yang diikuti oleh Kelompok pengelola sampah Kel Jatiwangi Kota Bima, dimana 2 kegiatan tersebut sangat mendukung tercapaianya target sub kegiatan ini. Dokmentasi Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota dapat dilihat pada dokumentasi gambar di bawah ini.

Gambar 3.6 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota.



A.3.3. Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Jumlah Kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2025 yang telah mengeluarkan Surat Penetapan status bencana dengan Surat Keputusan Walikota Bima sebanyak 1 Penetapan dengan waktu respon Kurang dari 24 Jam. Berikut disajikan Jumlah penetapan status darurat dan Waktu respon darurat bencana tahun 2025.

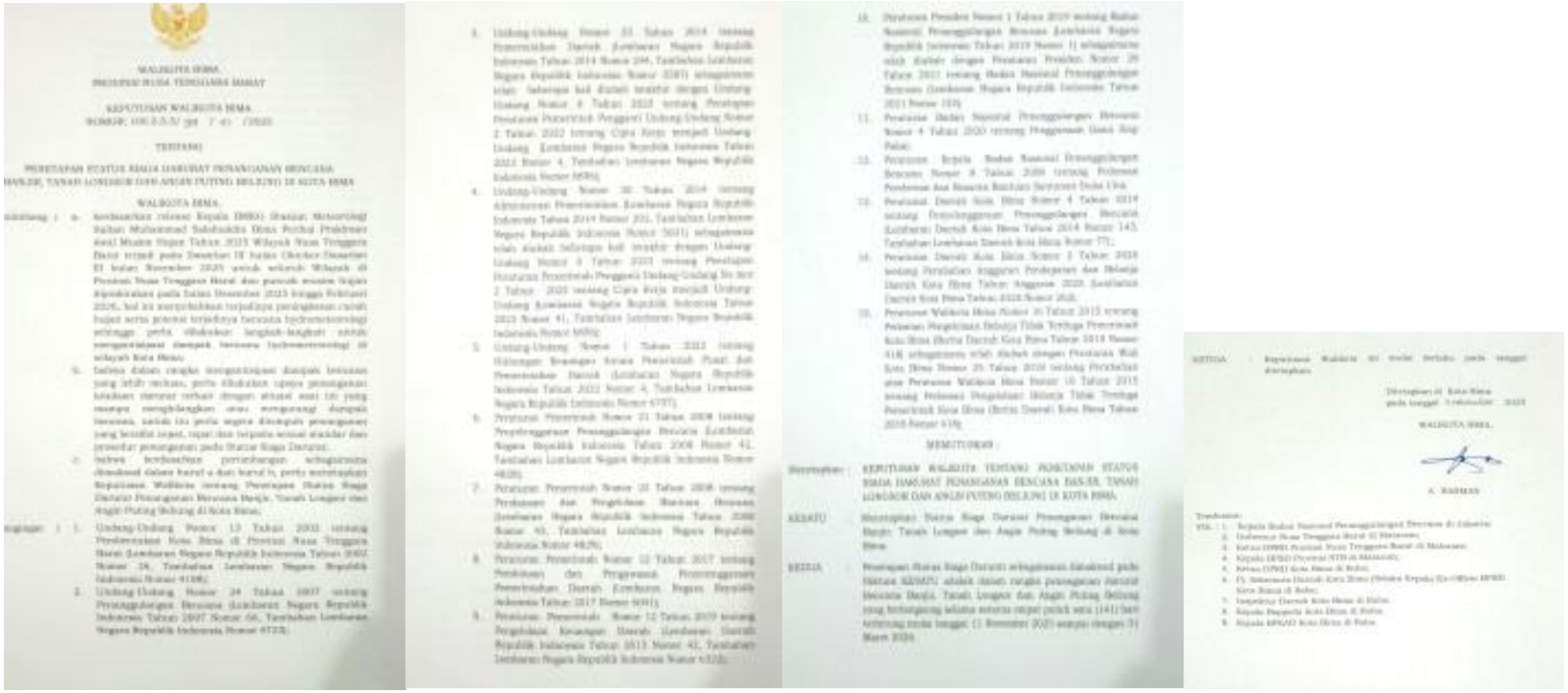
Tabel 3.13 Jumlah penetapan status darurat dan Waktu respon darurat bencana Tahun 2025

NO	JENIS PENETAPAN DARURAT BENCANA/SIAGA DARURAT BENCANA DAN KEJADIAN BENCANA	WAKTU RESPON	KET
1	*2*	*3*	*4*
1	Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 100.3.3.3/911 / X1 /2025 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kota Bima Tahun 2025	20 Jam (Kurang dari 24 Jam untuk setiap jenis bencana)	SK ini berlaku selama seratus empat puluh satu (141) hari terhitung mulai tanggal 11

			November 2025 sampai dengan 31 Maret 2026.
	Total	**1 PENETAPAN**	

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah kecepatan respon bencana yang kurang dari 24 jam sebanyak 1 kali berlaku selama seratus empat puluh satu (141) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2025 sampai dengan 31 Maret 2026.dan jumlah kejadian bencana yang dtetapkan status daruratnya sebanyak 1 kali maka dapat disimpulkan bahwa respon time darurat bencana adalah 100 %. Selain kejadian bencana di atas yang ditetapkan statusnya, ada juga kejadian bencana dalam skala kecil yang tidak dikeluarkan status kedaruratannya. Jumlah kejadian bencana keseluruhan selain yang ditetapkan statusnya dapat dijelaskan pada bagian capaian Sub Kegiatan, yang akan diuraikan pada bagian lain sebagai pendukung kegiatan ini.

Berikut Gambar 3.7 Surat Keputusan Walokta Bima Nomor: 100.3.3.3/911 / X1 /2025 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor Dan Angin Puting Beliung Di Kota Bima



Berikut disajikan Capaian kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Tabel 3.18 Capaian kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	2	4	5	6
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas Realisasi Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada tahun 2025 sebesar 100 % dari target sebesar 100 %, sehingga capaian kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah sebesar 100 %. Dalam melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sangat didukung dengan ketersediaan peralatan dan sarana prasaran pendukung disamping personil yang cakap, sistem peringatan dini serta penggunaan teknologi informasi yang mutakhir dan manajemen pengelolaan sumber daya yang mumpuni.

Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah :

a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Respon cepat darurat bencana adalah merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dari serangkaian tindakan dalam keadaan darurat bencana, sub kegiatan respon cepat ini terkait dengan pengkajian cepat terhadap kejadian bencana. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran permasalahan sebagai dampak buruk akibat terjadinya peristiwa ancaman bencana. Pengkajian secara cepat dan tepat menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa dilakukannya kegiatan pengkajian cepat adalah untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

Untuk pelaksanaan kegiatan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan menjadi sangat penting artinya sebagai bentuk respon cepat dari pemerintah kabupaten/kota. Informasi yang dihasilkan dari pengkajian cepat situasi dan kebutuhan menjadi bahan masukan pemerintah kabupaten/kota dalam menetapkan status keadaan darurat bencana dan untuk menentukan tindakan lebih lanjut atas situasi keadaan darurat bencana yang terjadi. Selain itu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa kegiatan pengkajian cepat merupakan hal penting sebagai bentuk implementasi dari kegiatan respon cepat dan sangat mendukung kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten/kota untuk dilaksanakan.

Indikator Capaian Kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat, Berdasarkan Tabel 3.18. di atas terdapat 3 Surat keputusan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bima selama tahun 2025 sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 100 %.

Berikut disajikan Dokumentasi kegiatan Kaji Cepat untuk respon banjir dan tanah Longsor.

Gambar 3.8 Dokumentasi kegiatan Kaji Cepat untuk respon banjir dan tanah longsor.



b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia (berdasarkan Undang – undang RI No 29 tahun 2024).

Tujuan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13 TAHUN 2010 tentang Pedoman pencarian dan Evakuasi adalah :

a. Menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau yang dikhawatirkan akan hilang akibat bencana.
b. Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana.
c. Memindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

Pelaksana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana adalah Tim reaksi cepat yang terdiri dari gabungan BPBD, Tim SAR, Relawan dan Masyarakat yang terlatih dalam bidang Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

Selama tahun 2025 terdapat 4 jenis bencana yang terjadi yaitu Bencana banjir, Gerakan Tanah, Kekeringan/Kekurangan air Bersih, dan Angin kencang, baik yang berskala besar maupun skala kecil yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, berikut disajikan Jenis Bencana dan Jumlah Korban terdampak Bencana Tahun 2025.

Tabel 3.19 Jenis Bencana dan Jumlah Korban terdampak Bencana Tahun 2025

NO	JENIS BENCANA	WARGA TERDAMPAK	
		KK	JIWA
1	Banjir	1.842	6.692
2	Gerakan Tanah	4	14
3	Kekeringan/kekurangan air bersih	2.056	5.382
4	Angin Kencang/Cuaca Ekstrim	21	62
	Total	**3.923**	**12.150**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat **3.923** KK dan 12.150 Jiwa yang terdampak akibat bencana selama tahun 2025, bencana yang terjadi selama tahun 2025 semuanya adalah bencana hidrometeorologi yang pada umumnya terjada beberapa tahun terakhir ini. Korban terdampak bencana banjir paling banyak dibandingkan 4 jenis kejadian bencana lainnya, kemudian disusul korban terdampak bencana Kekurangan Air bersih, karena 2 jenis bencana tersebut merupakan bencana yang paling sering terjadi akibat rusaknya hutan karena terjadinya pembalakan liar secara masif, disamping terjadinya cuaca ekstrim global, sehingga terjadi juga bencana angin kencang/cuaca ekstrim dan bencana Gerakan tanah

c. Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan kepala BNPB No 4 Tahun 2018 bahwa Logistik adalah barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan turunannya dalam rangka penanggulangan bencana.

Indikator Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelematan dan Evakuasi Korban Bencana Kab./Kota adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana target sebanyak Jumlah korban bencana yang terdampak yang memerlukan bantuan darurat. Dengan demikian maka pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana menjadi penting untuk mempertahankan hidup bagi korban selama masa tanggap darurat bencana.

Selama tahun 2025 Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik adalah sebanyak terdapat **3.923** KK dan 12.150 Jiwa. Bentuk logistik yang telah didistribusi adalah seperti Makanan siap saji/Nasi Bungkus, Bahan makanan, Terpal, Tikar, Selimut, pakaian bayi, sarung, peralatan memasak, distribusi Air bersih, dll. Berikut disajikan Jumlah Korban yang memperoleh bantuan Logistik tahun 2025.

Tabel 3.20 Jumlah Korban yang memperoleh bantuan Logistik tahun 2025

No	Jenis Bencana	Jumlah Korban		Jumlah Korban yang mendapat distribusi logistik	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Banjir	1.842	6.692	1.842	6.692
2	Gerakan Tanah	4	14	4	14
3	Kekeringan/kekurangan air bersih	2.056	5.382	2.056	5.382
4	Angin Kencang/Cuaca Ekstrim	21	62	21	62
	Total	**3.923**	**12.150**	**3.923**	**12.150**

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah Korban yang memperoleh bantuan Logistik sebanding dengan jumlah korban bencana keseluruhan, yang berarti bahwa seluruh korban bencana telah mendapat bantuan logistik selama masa tanggap darurat bencana.

Gambar 3.9

Kegiatan Manajemen Logistik dan Pergudangan



Gambar 3.10

Pendropingan Air Bersih



Dalam rangka memenuhi capaian kinerja baik kinerja Kegiatan, Program maupun kinerja Organisasi tentunya sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik swasta, masyarakat dan pemerintah, maka melalui koordinasi dan kerjasama yang cukup baik dengan stakeholder tersebut sehingga beberapa bantuan kebencanaan bisa diperoleh ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Bantuan logistik dan peralatan yang bersumber dari BPBD Propinsi dan APBD Kota Bima dalam rangka mendukung penanganan bencana di Kota Bima termasuk persiapan untuk kegiatan dapur umum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.21 Bantuan peralatan dan logistik yang bersumber dari BNPB Tahun 2025

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Satuan	Ket
1	2	3	4	5
1	Kantong Jenazah	15	Lembar	Baik
2	Selimut	40	Lembar	Baik
3	Matras/ Tikar	200	Lembar	Baik
4	Pampers Bayi	3	Dus	Baik
5	Pampers Dewasa	1	Dus	Baik
6	Kain/ Sarung	50	Lembar	Baik
7	Beras	8	Karung	Baik
8	Gula	1	Karung	Baik
9	Air Gelas	440	Dus	Baik
10	Garam	34	Bungkus	Baik
11	Gula	60	Kg	Baik
12	Kecap	170	Botol	Baik
13	Kertas Nasi	136	Pak	Baik
14	Masako	170	Pak	Baik
15	Mie Goreng	440	Dus	Baik
16	Minyak Goreng	170	Ltr	Baik
17	Plastik Merah Besar	136	Pak	Baik
18	Saos	170	Bks	Baik

Gambar 3.9 Dokumentasi Serah Terima Logistik Tahun 2025





A.3.4. Capaian Kinerja Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Kita perlu menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius sejak terjadinya bencana - bencana besar yang melanda negeri ini, begitu juga di Kota Bima, Banjir bandang yang melanda Kota Bima pada tahun 2016 yang lalu menjadikan sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh warga masyarakat, trauma yang cukup mendalam yang dialami masyarakat menjadikan Kota Bima harus bahu membahu untuk membangkitkan kembali kehidupan masyarakat dan pemerintahnya. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak karena Bencana adalah urusan semua pihak.

Secara periodik, Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain :

d. Legislasi

Dari sisi legislasi, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Produk hukum di bawahnya antara lain Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Kepala Kepala Badan, serta peraturan daerah.

Khususnya Kota Bima, telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kota Bima dan

Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang kemudian menerbitkan Peraturan Walikota Bima sebagai aturan pelaksanaannya. Peraturan Walikota Bima yang telah diterbitkan antara lain :

1. Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2015 tentang Anggaran penanggulangan bencana sebesar minimal 1 % dari Belanja langsung APBD Kota Bima
2. Peraturan Walikota Bima Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman peran Dunia Usaha dalam Penangulangan Bencana di Kota Bima
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 62 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Kota Bima
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan air Hujan
5. Peraturan Walikota Bima Tahun 2024 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana
6 Peraturan Walikota Bima Nomor 31 tahun 2025 tentang Rencana Kontinjensi Bencana tsunami di Kota Bima tahun 2025
7. Peraturan Walikota Bima Nomor 32 tahun 2025 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Bandang di Kota Bima tahun 2025

a. Kelembagaan

Kelembagaan dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Secara formal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sementara itu, focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dari sisi non formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaran penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal, kita mengenal Forum PRB Yogyakarta dan Forum PRB Nusa Tenggara Barat dan FPRB Nusa Tenggara Timur, serta FPRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima.

b. Pendanaan

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. begitu juga perhatian daerah Kota Bima dalam menganggarkan pendanaan untuk kegiatan kebencanaan.

Aspek aspek yang diuraikan di atas menjadi komponen pembentuk dalam formulasi perhitungan pencapaian indikator kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana, sehingga Formulasi perhitungan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana adalah Jumlah realisasi Sub Kegiatan yang mendukung terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana yang dikalikan dengan bobot masing – masing komponen tersebut yang telah ditetapkan kemudian dibagi dengan jumlah total target masing – masing komponen sampai dengan 3 tahun masa Rencana Pembangunan Daerah.

Realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana adalah (20 % x Jumlah Regulasi pendukung) + (20 % x Jumlah Dokumen tatakelola Kelembagaan) + (20 % x Jumlah Dokumen Kerjasama Kelembagaan) + (20 % x Jumlah Fasilitasi pengumpulan data penduduk) + (20 % x Jumlah Dokumen Jitu pasna)

Realisasi Sub Kegiatan pendukung kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana tahun 2024 dapat disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.21 Realisasi Sub Kegiatan pendukung kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	REALISASI
1	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	1 dokumen
2	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota	1 dokumen
3	Penanganan pasca bencana kab/kota	1 dokumen

Penjelasan Tabel di atas akan diuraikan pada capaian Sub Kegiatan Pendukung kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tahun 2025 di bagian lain setelah ini.

Hasil perhitungan Realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana tahun 2025 setelah dimasukkan dalam Formulasi Perhitungan dapat dilihat pada perhitungan berikut :

= (0,2*1/6) + (0,2*1/7) + (0,2*1/6) + (0,2*1/6) + (0,2*1/7)

= 0,10 + 0,12 +0,67 + 0 +0,12

= 0,3952

= 39,52 %

Realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana *Tahun 2025 sebesar 39,52 %, maka realisasi dan capaian kinerja* kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana tahun *2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.*

Tabel 3.22 Realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana *Tahun 2025*

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	2	4	5	6
1	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana	39,52 %	39,52 %	100 %

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana *Tahun 2025 sebesar 39,52 % dari target sebesar 39,52 % sehingga capaian* Kinerja kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana *Tahun 2025 sebesar 100 %*

Sub kegiatan yang mendukung kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana antara lain :

a. Sub kegiatan Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota

Pada Sub Kegiatan ini, penguatan kelembagaan Penanggulangan bencana dilakukan pada Forum Pengurangan risiko Bencana “Mbojo Ma Tenggo Kota Bima dengan memberikan dukungan Dana Hibah untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Bencana di daerah. Dalam hal ini BPBD melakukan Monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Forum PRB selama tahun 2025 minimal 1 kali 1 tahun.

Beberapa output kegiatan yang dihasilkan melalui dana hibah pada FPRB Kota bima yang menggunakan akun kegiatan ini adalah

1. Terlaksananya Pelatihan SPAB bagi guru SDN sebagai perwakilan masing masing sekolah se Kota bima sebanyak 30 sekolah termasuk melakukan Simulasi kebencanaan di SDN 25 kota Bima sebagai rangkaian dari pelatihan tersebut
2. Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah di kelurahan Jatibaru Kota Bima
3. Terlaksananya sosialisasi pengelolaan samaph di kelurahan jatibaru dan Kel Panggi Kota Bima
4. Terlaksananya Pelatihan Kelompok Pengelola Sampah di kelurahan Jatibaru Kota Bima sebagai tindak lanjut dari sosialisasi awal saat pembentukan kelompok
5. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Program BISA yang dicanangkan pemerintah Kota Bima
6. Melakukan inisiasi gotong royong bersama pemerintah Kota Bima di 2 lokasi pada waktu yang berbeda yaitu di Kelurahan Nae dan di Pasar Amahami Kelurahan Dara Kota bima.
7. Bekerjasama dengan 2 (Dua) media on line dalam rangka penyebaran informasi kebencanaan dan giat – giat kebencanaan yang dilakukan oleh FPRB dan BPBD Kota Bima.
8. Memberikan penguatan kapasitas kepada Anggota FPRB sebagai upaya untuk melangsungkan berjalannya organisasi.
9. Terlaksananya koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam upaya – upaya pengurangan risiko bencana di kota Bima
10. Bersama dengan BPBD Kota Bima melakukan penggalangan dana untuk bantuan bencana Banjir bandang Kota Mataram dan melakukan pendropingan bantuan langsung ke Kota Mataram NTB.

    Berikut disajikan realisasi sub kegiatan Penguatan kelembagaan bencana kab./kota *Tahun 2025.*

Tabel 3.23

Realisasi sub. kegiatan Penguatan kelembagaan bencana kab./kota *Tahun 2025*

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	2	3	4	5
1	Penguatan kelembagaan bencana kab./kota	1 Dok.	1 dok	100 %

Pada Tahun 2025 realisasi dari sub kegiatan ini sebanyak 1 dokumen dari target sebanyak 1 dokumen. Ini berarti capaian kinerja sub kegiatan Penguatan kelembagaan bencana kab./kota *Tahun 2025* sebesar 100 %. Kelembagaan bencana yang dikuatkan adalah FPRB Mbojo ma Tenggo Kota Bima sesuai perjanjian Hibah antara BPBD Kota Bima dengan FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima. Berikut disajikan Naskah Perjanjian Hibah BPBD Kota Bima dengan FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima Tahun 2025 dan Surat Keputusan Walikota Bima Tentang Pembentukan Pengurus FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima tahun 2024-2029.

Gambar 3. 10 Naskah Perjanjian Hibah BPBD Kota Bima dengan FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BIMA
DENGAN
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA " MBOJO MA TENGGO" KOTA BIMA
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DAERAH

NOMOR : 900.3.7.1 / 32 / HMP / VI / 2025
NOMOR : 07/FPRB MM / VI / 2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. A. RAHMAN : Walikota Bima, yang berkedudukan di jalan Soekarno Hatta Raba Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. ANWAR ARMAN : Ketua Harian Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima yang berkedudukan di Lingkungan Tolodara RT 02 / RW 01 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Hibah Daerah dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
TUJUAN DAN BESARAN
Pasal 1

Pemberian Hibah kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana "Mbojo Ma Tenggo" Kota Bima bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional dan



pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Bima dalam bentuk kegiatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Pasal 2

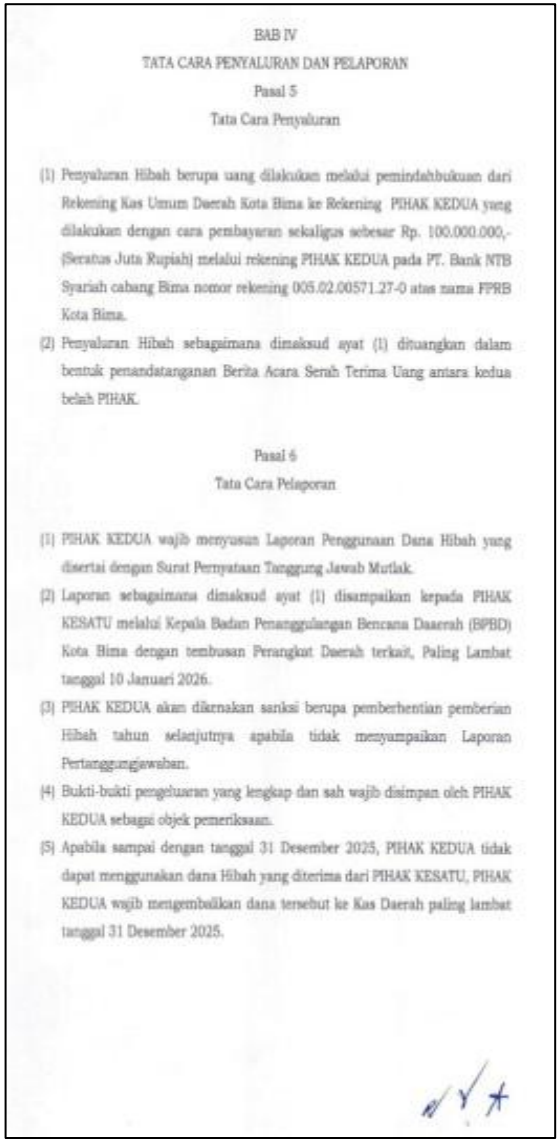
PIHAK KESATU memberikan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- *(seratus juta rupiah)* dengan rincian penggunaan sesuai proposal rencana kegiatan nomor : 011/FPRB-MM/V/2024

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Pemberian Hibah Kepada Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima diperuntukan bagi operasional dan kegiatan yang dapat mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4

(1) Hak PIHAK KESATU :
   a. Menerima Permohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan.
   b. Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas pemberian Hibah.
   c. Menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA
(2) Hak PIHAK KEDUA :
   a. Menerima Hibah sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
   b. Memanfaatkan Hibah sesuai dengan usulan tertulis dalam Proposal dan Naskah Perjanjian Hibah.
(3) Kewajiban PIHAK KESATU :
   memberikan Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA
   a. Memberikan Laporan Kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disertai bukti-bukti penggunaan anggaran atas realisasi dan penggunaan Dana Hibah kepada Pemerintah Kota Bima melalui PIHAK KESATU serta bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja hibah.
   b. Menandatangani Pakta Integritas



BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN
Pasal 5
Tata Cara Penyaluran

(1) Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Bima ke Rekening PIHAK KEDUA yang dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) melalui rekening PIHAK KEDUA pada PT. Bank NTB Syariah cabang Bima nomor rekening 005.02.00571.27-0 atas nama FPRB Kota Bima.
(2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Uang antara kedua belah PIHAK.

Pasal 6
Tata Cara Pelaporan

(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daaerah (BPBD) Kota Bima dengan tembusan Perangkat Daerah terkait, Paling Lambat tanggal 10 Januari 2026.
(3) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian pemberian Hibah tahun selanjutnya apabila tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.
(4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan.
(5) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, PIHAK KEDUA tidak dapat menggunakan dana Hibah yang diterima dari PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

BAB V

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan dan/atau kekuasaan salah satu PIHAK, sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka PIHAK tersebut memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya hal dimaksud.

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) adalah :

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan, perang, huru hara, dan lain-lain yang terjadi bukan atas kemauan manusia atau kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh pemerintah.

b. Terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan/moneter.

BAB VI

SANKSI - SANKSI

Pasal 8

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Perjanjian Hibah ini, maka PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini, akan diatur kemudian pada perjanjian tambahan (addendum) dan atas kesepakatan dari para PIHAK.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup oleh karenanya sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
ANWAR ARMAN	A. RAHMAN

Gambar. 11 Surat Keputusan Walikota Bima Tentang Pembentukan Pengurus FPRB Mbojo Matenggo Kota Bima tahun 2024-2029.



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/[illegible]/[illegible]/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOTA BIMA PERIODE 2024-2029

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan ketangguhan Kota Bima dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu, perlu dilakukan upaya pengurangan risiko bencana secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan semua pihak berasaskan kemanusiaan sehingga diperoleh hasil yang optimal dan terukur secara berlanjut;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pasal 16 ayat (3), perlu dibentuk Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima Periode 2024-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pengurus Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima Periode 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik



KETIGA : Struktur kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) [illegible] Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Dengan mulai berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Bima Nomor 188.45/316/360/VIII/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal [illegible] Agustus 2024.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 15 September 2024

WALIKOTA BIMA,

Tembusan:
Yth. 1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Pj. Gubernur NTB di Mataram;
3. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB di Mataram;
4. Ketua DPRD Kota Bima di Raba;
5. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
6. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba;
7. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba;
8. Kepala Bagian Hukum SETDA Kota Bima di Raba;
9. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

b. Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota

Dalam rangka mendukung upaya – upaya penanggulangan bencana, peningkatan relasi kerjasama multi pihak dalam penanggulangan bencana sangatlah penting, mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab semua baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi, Pers maupun Masyarakat. Output Sub Kegiatan Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pada tahun 2025 antara lain adanya Perjanjian Kerjasama antara BPBD Kota Bima dengan PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Bima Tentang Kerjasama Pelatihan Dan Penanggulangan Bencana Nomor: 004/PKS/PLNNPS-BM/XII/2025 NOMOR: 26.03.03/ PKS-PB/XII/BPBD/2025. Realisasi sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.24 Realisasi sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/Kota *Tahun 2025*

NO	Sub Kegiatan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian kinerja 2025
1	2	3	4	5
1	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota	1 Dok	1 dok	100 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan pencampaian dari sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/kota adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 100 %. Perjanjian Kerjasama antara BPBD Kota Bima dengan PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Bima bertujuan antara lain :

1. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing PIHAK, mengingat terjadinya bencana tidak bisa diprediksi dan PLTMG BIMA merupakan salah satu objek vital dan strategis dalam rangka mendukung ketenagalistrikan di system tambora (Pulau Sumbawa) khususnya kota Bima.
2. Untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelatihan tanggap darurat bencana yang ada di lingkungan kerja PLTMG BIMA.
3. Untuk melakukan upaya bersama dalam emergency respon maupun pemulihan pasca bencana di lingkungan kerja PLTMG BIMA.

Gambar 3.12 Perjanjian Kerjasama antara BPBD Kota Bima dengan PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Bima Tentang Kerjasama Pelatihan Dan Penanggulangan Bencana.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PLN NUSANTARA POWER SERVICES
UNIT PLTMG BIMA

DENGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA

TENTANG

KERJASAMA PELATIHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Nomor : 084/PKS/PLNNPS-BIM/XII/2025
Nomor : 26.01.03/PKS-PB/XII/BPBD/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) bertempat di Kota Bima, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. ANDY PUJA KUSUMA, selaku MANAGER UNIT dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG BIMA berkedudukan di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. A. FARUK, S.ST.Par.,M.Si selaku KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Kota Bima Nomor : 800.1.3.3/SEKRETARIAT/VII/2025 berkedudukan Jl. Gajah Mada No.51 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing – masing terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang - undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang memiliki tugas utama menjalankan usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Pemerintah Kota Bima yang antara lain memiliki tugas dan kewenangan serta bertanggung jawab atas pelayanan Penanggulangan Bencana.
3. Bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Hal 1 dari 6



3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Daerah Kota Bima No.04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
7. Peraturan Walikota Kota Bima no.6 Tahun 2021, Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
8. Kesepakatan Bersama Antara PEMERINTAH KOTA BIMA dengan PT. PLN NUSANTARA POWER SERVICES UNIT PLTMG BIMA TENTANG KESIAPSIAGAAN PENANGANAN KONDISI DARURAT NOMOR : 030.3.7.1 / 084 / 03 / 2025, NOMOR : 001 / MOU / PLNNPS-BIM / XII / 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan dan penanggulangan bencana di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyebutkan beberapa hal sebagaimana tercantum sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Sebagaimana dimaksud pada pasal 9 tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pasal 20 dan 21 tentang peran Lembaga usaha.

PASAL 2
TUJUAN

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama adalah :

1. Untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana sesuai Tugas dan kewenangan masing-masing. PIHAK, mengingat terjadinya bencana tidak bisa diprediksi dan PLTMG BIMA merupakan salah satu objek vital dan strategis dalam rangka mendukung ketenagalistrikan di sistem Sambora (Pulau Sumbawa) khususnya kota Bima.
2. Untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelatihan tanggap darurat bencana yang ada di lingkungan kerja PLTMG BIMA.
3. Untuk melakukan upaya bersama dalam emergency respon maupun pemulihan pasca bencana di lingkungan kerja PLTMG BIMA.

Hal 2 dari 6



PASAL 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk ruang lingkup kegiatan pelatihan penanggulangan bencana di lingkungan kerja PLTMG BIMA dan wilayah kerja BPBD Kota Bima sebagai berikut:

(1) PIHAK KEDUA wajib melampirkan data personil tanggap kebencanaan kepada PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA wajib mengenakan Identitas Personil dan Memakai Protokol K3 dari Pihak Pertama, kecuali dalam kondisi Emergency pada saat memasuki lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
(3) PIHAK PERTAMA memperkenalkan aturan masuk bagi PIHAK KEDUA pada saat penanggulangan kebencanaan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.
(4) Tim Penanggulangan bencana dari PIHAK KEDUA akan difasilitasi oleh Tim kebencanaan dari PIHAK PERTAMA pada saat terjadi bencana di wilayah kerja PIHAK PERTAMA.
(5) PIHAK KEDUA melakukan training (In Class) dan praktek (Out Class) tentang penanggulangan bencana yang dilakukan setiap 6 bulan sekali.
(6) PIHAK KEDUA melakukan kegiatan training dilapangan minimal 1 (satu) kali dalam setahun tentang cara menghadapi dan penanggulangan saat terjadi situasi bencana di area PLTMG Bima.
(7) PARA PIHAK sepakat bahwa biaya yang dikeluarkan saat pelatihan penanggulangan bencana di PLTMG Bima disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan.
(8) Semua alat pendukung kelancaran kegiatan disediakan oleh PIHAK KEDUA
(9) PARA PIHAK sepakat membentuk Tim Koordinasi yang bertugas sebagai Media Komunikasi antara PARA PIHAK dengan susunan sebagai berikut :

a) Koordinator Tim Penanggulangan Keadaan Darurat PIHAK PERTAMA yaitu :
   1. Control Control Room PLTMG Bima (0823-1471-8688)
   2. Andy Puja Kusuma / Manager Unit PLTMG Bima (0812-9999-7117)
   3. Jovianysah / TL Administrasi (0852-9981-6252)
   4. Adhe Chandra / TL Rendal Opnar & I&T (0822-3247-1604)
   5. Udi Amriadie / Staff K3 (0853-1721-9215)

b) Koordinator penanggulangan bencana PIHAK KEDUA yaitu :
   1. A. Faruk, S.ST.Par.,M.Si. / Kepala Pelaksana BPBD (0813-2993-9276)
   2. Muhammad Guntur, S.Ag.,M.Pd / Sekretaris BPBD (0853-4256-0386)
   3. Irvinawan Muslimin, ST.,M.Eng / Plt. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD (0812-3745-085)
   4. Nasaruddin, S.Sos / Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD (0813-5366-6910)
   5. Samsuriadar, ST / Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD (0858-8944-8054)
   6. Ahmad Gafar, SE / Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD (0852-4544-8054)
   7. Ridwan, S.sos / Analis Bencana BPBD (0823-3954-6671)
   8. Mirzafuddin, SE / Analis Bencana BPBD (0812-3747-036)

Hal 3 dari 6

PLN
Nusantara Power Services

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Apabila Perjanjian Kerja Sama hendak diubah/diakhiri oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi tanggung jawab masing masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala informasi, dokumentasi dan atau pengetahuan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini tidak bisa diungkapkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Pasal ini tidak berlaku terhadap :
   a. Pemberitahuan kepada Direktur, petugas, atau karyawan dari PIHAK yang secara langsung terlibat dengan informasi rahasia tersebut berdasarkan kesepakatan bersama ini dengan ketentuan mereka juga bersedia menjaga kerahasiaan informasi rahasia tersebut.
   b. Informasi yang merupakan Informasi Publik sepanjang informasi yang terkait tentang masalah kebencanaan.
   c. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau Peraturan yang berlaku.
(3) Bahwa kepada Pihak ketiga manapun yang mendapatkan izin dari Pihak yang memiliki Dokumen serta mereka tunduk dan patuh atas klausul kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PLN
Nusantara Power Services

PASAL
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian kerja sama ini mengenai atau sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan melalui pos tercatat, melalui perusahaan ekspedisi / kurir intern dari masing-masing **PIHAK** ke alamat yang disebutkan dibawah ini:

PIHAK PERTAMA
PT. PLN NUSANTARA POWER SERVICES Unit PLTMG BIMA
di Kelurahan Kole Kecamatan Asakota Kota Bima Nusa Tenggara Barat Untuk Perhatian : Manajer Unit

PIHAK KEDUA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BIMA
Jl. Gajah Mada No.31 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima Untuk Perhatian : Kepala Pelaksana

(2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui / tercatat pada masing – masing **PIHAK**.

PASAL 7
LAIN – LAIN

(1) **PARA PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagian ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen/Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PLN
Nusantara Power Services

(4) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(5) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka persiapan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban **PARA PIHAK** secara proporsional.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan dibubuhi cap dari PARA PIHAK, serta mulai berlaku pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
KEPALA PELAKSANA BPBD KOTA BIMA	**MANAJER UNIT PLTMG BIMA**
A. HARIS, S.ST., Par., M.Si	ANDY PUJA YUDUMA
NIP. 19780712 201001 1 011	NO. 00158A480

c. Sub kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota adalah Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dengan target kinerja 1 Dokumen.

Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota dilaksanakan setelah terjadinya bencana. Ketika bencana telah usai, perhatian harus difokuskan pada pemulihan dan pembangunan kembali agar masyarakat yang terdampak dapat kembali hidup normal dan bahkan lebih tangguh dari pada sebelumnya. Maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang akan menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dengan melibatkan semua Tim dari berbagai Instansi terkait. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan perhitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor. Analisis dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat dari akibat bencana dan impilkasi umumnya terhadap aspek-aspek fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata pemerintahan.

Langkah selanjutnya setelah Rencana aksi disusun adalah melakukan koordinasi untuk memperoleh pembiayaan dalam penanganan pasca bencana dengan mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi baik melalui Dana APBD, APBD Prov dan APBN (melalui dana Bantuan Sosial pasca bencana berpola hibah).

Selama tahun 2025 output yang dihasilkan pada sub kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota adalah 1 (Satu) Dokumen Laporan Pengkajian dan tinjauan lapangan terhadap kerusakan infrastruktur pasca bencana yang terjadi selama 1 tahun yang dikoordinasikan langsung kepada Dinas PUPR Kota Bima dan Dinas PUPR Provinsi NTB dan BWS Wilayah NTB. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap infrastruktur yang rusak tidak diusulkan ke BNPB karena kategori kerusakannya hanya berupa kerusakan sedang hingga ringan saja. Berikut disajikan Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota.

Tabel 3.25 Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota Tahun 2025

NO	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
		2025	2025	2025
1	2	3	4	5
1	Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota	1 Dok.	1 dok	100 %

Berdasarkan tabel diatas bahwa Realisasi Sub Kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota pada tahun 2025 adalah 1 Dokumen dari target 1 Dokumen yang berarti bahwa Capaian kinerja Sub Kegiatan Koordinasi penanganan pasca bencana kab/kota sebesar 100 %.

Gambar 3.13 Dokumentasi Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan pasca bencana kab./kota

Kerusakan Jembatan gantung yang menghubungkan antara kelurahan Paruga dan Dara akibat banjir pada hari Sabtu pada tanggal 08 November 2025



Material lumpur yang memasuki rumah dan area Lokasi Relokasi Oi Fo'o Akibat banjir pada tanggal 12 Desember 2025



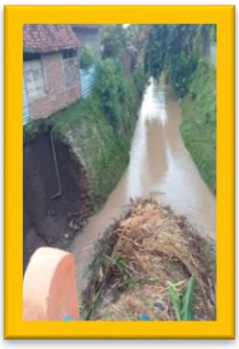
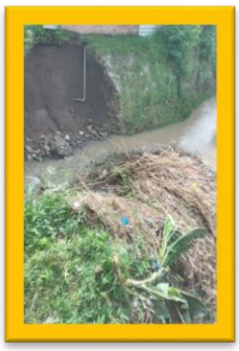
Atap Rumah dengan ukuran 7x3 M2 An. Bapak Ruslinsyah RT. 01. RW. 01 Kel. Nae dan Atap Kos-kosan dengan ukuran 7x18 M2 An. Bapak Kikin Rizky RT. 01. RW. 01 Kel. Nae terbawa angin kencang yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2025



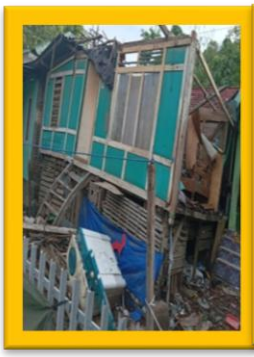

Akibat genangan banjir, lapangan sepak bola Kelurahan Kumbe dan Jalan Lintas Sape Bima tertimbun lumpur menyebabkan kemacetan pada ruas jalan




Peningkatan debit air sungai kendo pada tangal 23 Desember 2025 menyebabkan pengikisan dan kerusakan serius pada tanggul sungai di area Jembatan Penanae RT 01 RW 01 dan tergerusnya tanah pekarangan an Ardiansyah H. Abdullah

hujan yang disertai angin kencang pada tanggal 08 Desember 2025 menyebabkan robohnya atap dan sebagian dinding rumah panggung 9 tiang milik Bapak Tajudin RT. 022 RW. 008 Lingkungan Songgela, Kelurahan Ule Kecamatan Asakota




B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BPBD Kota Bima sebagai penanggung jawab dalam Urusan Penanggulangan Bencana memegang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat memiliki perhitungan yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan atau sasaran dari suatu program telah tercapai. IKK membantu untuk mengukur dan memantau kinerja secara objektif dan terukur dalam rangka mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan urusan Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam pencapaian Standar Pelayanan Umum Sub Urusan Bencana, dan melaksanakan urusan penanganan kebencanaan terdapat 7 Indikator Pencapaian Pelayanan sebagai berikut termuat dalam tabel indikator dan Capaian indikator Kinerja Kunci berikut :

NO	INDIKATOR	SAT	BASE LINE	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	KET	
				2025			
1	2	3	6	7	8		
1	Indek Risiko Bencana	Angka	91,31	90,17	148,17	Rumus : R = H X V/C	R : Disaster Risk: Risiko Bencana H : Hazard Threat: Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu V : Vulnerability: Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana

							C : Adaptive Capacity: Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu.
1.	Persentase Pelayanan informasi rawan bencana	Persen	62,41	64,34	50,60	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di bagi Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan di bagi 100 %	▪ Pembilang warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan **p**apan informasi publik. ▪ Penyebut seluruh warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen Kajian Rawan Bencana
2	Persentase	Persen	1,01	1,3	1,39	Jumlah warga	▪ Pembilang

	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dbagi Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan x 100%	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan. ▪ Penyebut Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi	▪ Pembilang
						Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana x 100%	Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
							▪ Penyebut

							Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana
4	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	16,67	100	50	Kemajuan pekerjaan dokumen kebencanaan yang disusun pada thn n ---------- Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n x 100%	
5	Persentase penanganan pra bencana	Persen	90	58,33	77,78	Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n ---------- Jumlah target kegiatan prabencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n x 100%	
6	Persentase penanganan pasca bencana	Persen	45	60	70,37	Jumlah kegiatan pascabencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n ----------	

						Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P x 100%	
7	Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	65	70	100	Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n ---------- Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n x 100 %	

Berdasarkan tabel di atas bahwa pada indikator Kinerja Kunci IKK 1, yaitu Indek Risiko Bencana pada tahun 2025 sebesar 148,17, angka indeks ini nilainya cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka indek tahun 2024, karena nilai ini diperoleh dengan menggunakan parameter bahaya dan kerentanan yang telah dimutakhirkan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan nialai IRB tahun sebelumnya. Namun angka ini cukup tinggi yang artinya jika terjadi suatu bencana maka akan menyebabkan tingginya risiko yang ditimbulkan dari dampak bencana tersebut, sehingga untuk mengurangi risiko bencana

tersebut yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai indek ketahanan daerah agar masyarakat yang terdampak bencana memiliki daya lenting yang tinggi dalam menghadapi ancaman bencana.

Pada Capaian IKK 2, yaitu Persentase Pelayanan informasi rawan bencana, capaian indikator ini adalah sebesar 50,60 % dari target 64,64 % atau capaian sebesar 78,28 %, hal ini beraarti capaiannya masih kurang dari target hal ini dipengaruhi oleh kurangnya media penyebaran yang digunakan dalam penyampaian informasi rawan bencana mengingat tingginya jumlah penduduk yang berada di daerah rawan bencana sehingga perlu dukungan stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan capaian ini karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya. Berikut disajikan capaian layanan informasi rawan bencana Sesuai Target Yang Ditetapkan Di Kota Bima Tahun 2025.

Tabel 3.26 Jumlah Warga Negara (Usia 15-64 Tahun) Yang Memperoleh
Layanan Informasi Rawan Bencana Sesuai Target Yang Ditetapkan Di Kota Bima Tahun 2025

JUMLAH WARGA NEGARA (USIA 15-64 TAHUN) YANG MEMPEROLEH
LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN
DI KOTA BIMA TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH WARGA NEGARA (USIA 15-64 TAHUN) YANG MEMPEROLEH LAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA SESUAI TARGET YANG DITETAPKAN				TOTAL	KETERANGAN
		SOSIALISASI TATAP MUKA	SOSIALISASI MELALUI MEDIA SOSIAL DAN WAHANA MULTIMEDIA	PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN RAMBU EVAKUASI	PAPAN INFORMASI PUBLIK		
(1.)	(2.)	(3.)	(4.)	(5.)	(6.)	(7.) = 3+4+5+6	
1	RASANAE BARAT		7.158		4.145	56.550	Dokumentasi kegiatan dan daftar hadir peserta dilampirkan
2	RASANAE TIMUR		4.657		2.696		
3	RABA		9.492		5.495		

4	MPUNDA		5.375		4.581		
5	ASAKOTA		5.753		4.898		
Jumlah		2.300	32.435		21.815		

Dokumentasi pelayanan informasi rawan bencana melalui sosialisasi tatap muka dan penyebaran informasi lainnya disajikan berikut :

Gambar 3.14 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana berupa Sosialisasi tatap muka dengan Masyarakat di daerah rawan bencana.









Capaian IKK 3 yaitu Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sebesar 1,39 % dari target 1,30 % atau capaian sebesar 106,92 % yang berarti melebihi dari target, hal ini sangat dipengaruhi adanya dungunan stakeholder lain dalam melaksanakan pelatihan dan simulasi kebencanaan untuk kesiapsiagaan bencana seperti Instansi vertikal, swasta dan perbangkan serta lembaga pendidikan termasuk Forum PRB Mbojo Ma Tenggo yang mendukung kerja – kerja kesiapsiagaan bencana dan pengurangan risiko bencana. Jadi, berdasarkan perhitungan ini, persentase warga di kawasan rawan bencana yang telah memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bahwa cakupan layanan masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana, sehingga mungkin diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan penyebaran informasi dan kesiapsiagaan bencana seperti edukasi, pelatihan simulasi, atau penyuluhan mitigasi. Berikut disajikan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

JUMLAH WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA DI KOTA BIMA TAHUN 2025

No	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Keterangan
			Pelatihan Pencegahan	Gladi Kesiapan Terhadap Bencana	Total	
1	RasanaE Barat	BNI	35		35	Pelatihan dan Sosialisasi
2	RasanaE Barat	BSI	25		25	Pelatihan dan Sosialisasi
3	RasanaE Timur	SDN 07 Oi Mbo	120		120	Pelatihan dan Sosialisasi

4	Raba	Kel. Penaraga	40		40	Pelatihan dan Sosialisasi
5	Raba	Kel. Rabangodu Selatan	50		50	Pelatihan dan Sosialisasi
6	Raba	Kel. Rabangodu Utara	40		40	Pelatihan dan Sosialisasi
7	Raba	Kel. Nitu	35		35	Pelatihan dan Sosialisasi
8	Raba	BPBD kota Bima	150		150	FGD Renkon
9	Raba	BPBD kota Bima	50		50	Rapat Koordinasi
10	Raba	Kantor Dikpora kota Bima	30		30	SPAB
11	Raba	BPBD kota Bima	50		50	Studi dan Sosialisasi kpd Anak Paud
12	Mpunda	Apel Siaga (Kantor Walikota Bima)		940	940	Gladi
13	Mpunda	Pengadilan Negeri Raba Bima	45		45	pelatihan dan Sosialisasi
14	Mpunda	SDN 10 Penatoi	150		150	pelatihan dan Sosialisasi
15	Mpunda	SMKN3 Kota Bima	30		30	Diklat SPAB
16	Mpunda	Kel Panggi	25		25	Sosialisasi Awal Pengelolaan sampah
17	Mpunda	Rumah Makan Tepi Sungai	30		30	Pertemuan FPRB/ Terkait SPAB
18	Mpunda	SDN 25 Kota Bima		200	200	
19	Asakota	Sori Nehe (Kolo)	60		60	Pelatihan
20	Asakota	SO Tampela Jatiwangi	45		45	pelatihan dan Sosialisasi
21	Asakota	Jatibaru Barat	40		40	pelatihan dan Sosialisasi
22	Asakota	Jatibaru Timur	50		50	pelatihan dan Sosialisasi
23	Asakota	Kel Jatiwangi	30		30	Sosialisasi Awal Pengelolaan sampah
24	Asakota	Kel Jatiwangi	30		30	Pelatihan Pengelolaan sampah
Jumlah			1.160	1.140	2.300	

Sumber Data : BPBD Kota Bima tahun 2025

Capaian IKK 4 adalah Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100 % dari target 100 % artinya capaian indikator ini sebesar 100 %, artinya semua

pelayanan darurat bencana dapat diselesaikan tepat waktu kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Selama tahun 2025 kejadian bencana Kota Bima hanya dalam skala kecil sehingga tidak sampai menetapkan status darurat bencana, hanya pernah mengeluarkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Uraian capaian indikator IKK 2, IKK 3, dan IKK 4 secara rinci dapat dilihat pada penjelasan capaian Indikator Kegiatan pada Program Penanggulangan Bencana pada penjelasan awal bab ini.

Capaian IKK 5 adalah Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal adalah sebesar 50 % dari target 100 %, pada tahun ini BPBD menargetkan penyusunan regulasi kebencanaan sebanyak 2 Dokumen namun yang bisa diselesaikan sampai dengan akhir tahun dan dilegalkan hanya 1 dokumen sj, yaitu Penyusunan Dokumen Persturan Walikota Bima tentang Rencana Kontingensi Bencana Banjir bandang tahun 2025, uraian tentang penjelasan rinci capaian indikator ini dapat dilihat pada penjelasan capaian kegiatan Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan bencana pada sub kegiatan penyusunan rencana kontingensi

Capaian IKK 6 adalah Persentase penanganan pra bencana adalah 77,78 % dari target 58,33 atau sebesar 133,34 %, capaian ini cukup tinggi dibandingkan dengan angka target, hal ini disebabkan semakin tingginya singkronisasi dokumen perencanaan atau jumlah sub kegiatan yang ditargetkan terlaksana pada dokumen Renja tahun berjalan dapat menjadi dokumen pelaksanaan anggaran dan tereaisasi sd akhir tahun 2025.

Capaian IKK 7 adalah Persentase penanganan pasca bencana sebesar 70,37 dari target 60 %, atau sebesar 117,28 %, capaian ini jauh lebih besar dari target, hal ini disebabkan karena tingkat koordinasi antar stakeholder terkait kebencanaan cukup baik sepeti Dinas PUPR, BWS NT I Wilah NTB, Dinas Perkim, DLH, Dinas Sosial, Dinas pertanian, dinas ketahanan pangan dan stakeholder penanggulangan bencana lainnya. Selama tahun 2025 jumlah Kegiatan penanganan pasca bencana yang dapat ditangani sebanyak 19 item pekerjaan dari 27 item pekerjaan dan 8 item pekerjaan yang belum bisa ditangani. Tabel realisasi penanganan pasca bencana dapat dilihat pada tabel.... pada awal pada uraian capaian sub kegiatan koordinasi penanganan pasca bencana pada awal bab ini.

Capaian IKK 8. Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah sebesar 100 % dari target 70 % artinya capaian Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana cukup tinggi sebesar 142,86

%, Penjelasan terkait jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana tahun 2025 dapat dilihat pada uraian capaian sub kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana pada bagian awal bab ini.

A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alaternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada umumnya, dalam menjalankan roda organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, ada beberapa faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran utama yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor – faktor penentu keberhasilan antara lain :

a. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Stakeholder terkait kebencanaan serta Dunia Usaha untuk melibatkan diri dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

Keberadaan program JICA untuk program pengendalian banjir yang merupakan program kerjasama pemerintah Pusat dengan Bank dunia sejak tahun 2024 hingga 2025 ini sangat memberikan dampak posotif bagi pengurangan risiko bencana terutama banjir dan banjir bandang termasuk program Nufrep dalam pembangunan drainase primer dan Sungai – sungai kecil. Meskipun terjadi hujan yang ekstrim di beberapa kejadian namun aliran air sungai sungai besar seperti sungai padolo dan sungai melayu yang biasanya mengalami luapan namun di tahun 2025 tidak mengalami luapan yang menyebabkan genangan di beberapa titik di wilayah Hilir.

Selain itu kerjasama Program JICA dan NUFREP, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya juga terus inten dilakukan seperti Dinas teknis terkait, BMKG, TNI/POLRI, SAR, Forum PRB Mbojo Ma Tenggo Kota Bima dan TSBK dalam penanggulangan bencana sangat bagus sehingga mendukung kelancaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Termasuk kerjasama dengan Dunia Usaha dan Kerjasama dan dukungan dari BPBD Provinsi NTB dan BNPB sehingga beberapa bantuan kebencanaan bisa diperoleh ditengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

b. Perencanaan Organisasi yang sesuai dengan tuntutan paradigma Organisasi

Selain unsur kepemimpinan, unsur perencanaan yang baik dalam organisasi memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keberhasilan organisasi, Dokumen Perencanaan yang strategis dan penilaian yang tepat ke depan akan memberikan dampak ketepatan dalam pengambilan arah kebijakan – kebijakan organisasi. Dokumen Perencanaan yang telah disusun BPBD Kota Bima adalah seperti Rencana Strategis Periode 2025-2029, Rencana kerja tahun 2025. Dokumen – dokumen tersebut dapat memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Bima baik sebagai fungsi Pelaksana penanggulangan bencana maupun sebagai fungsi koordinasi dan Komando dalam Penanggulangan bencana di Kota Bima.

c. Sumber daya manusia yang mumpuni

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD didukung oleh 37 pegawai yang terdiri dari 17 orang Pegawai Negeri Sipil, dan 20 orang PPPK sehingga total pegawai sebanyak 37 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai BPBD didominasi oleh pegawai pada tingkat pendidikan Sarjana S1 sebesar 26 Orang atau 70,27 %, kemudian Tenaga dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 8 orang atau 21,62% , tenaga dengan pendidikan S2 sebanyak 3 orang atau 8,11 % dari total pegawai. Berdasarkan penempatan pegawai pada jabatannya, Jabatan Struktural pada BPBD Kota Bima ada 1 jabatan yang masih lowong yaitu pada jabatan kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Pada jabatan pelaksana terutama di Sekretariat masih sangat kurang untuk kwalifikasi operator komputer mahir sehingga pekerjaan – pekerjaan pada tataran teknis sangat terkendala mengingat makin tingginya penggunaan Informasi teknologi. Pada penempatan tenaga fungsional kebencanaan cukup terpenuhi sehingga cukup memberikan sumbangsih bagi keberhasilan BPBD sehingga tercapai indikator target yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun ada beberapa capaian yang masih minim karena penyebab lainnya. Kontribusi keberhasilan diwujudkan masing-masing bidang pada capaian kegiatan terutama dengan bertambahnya jumlah pegawai dari Pengadaan PNS dan PPPK.

d. Penerapan teknologi yang memadai

Penguasaan teknologi yang memadai akan berdampak besar terhadap penyelesaian pekerjaan – pekerjaan yang diemban. BPBD Kota Bima dalam menjalankan tugasnya telah menggunakan teknologi informasi yang cukup memadai seperti ketersediaan Wifi, peralatan

kumputerisasi yang memadai, SIPD, Penggunaan WA group Kebencanaan,dan penggunaan Early Worning System (EWS) yang berbasis IT dan peralatan pendukung lainnya menjadi faktor pendukung keberhasilan BPBD dalam mencapai tujuan.

e. Dukungan Lembaga Kemasyarakatan dan Dunia Usaha

Dukungan Lembaga kemasyarakatan seperti Forum PRB Mbojo Matenggo Kota Bima yang didalammnya memiliki unsur Perguruan tinggi , Lembaga Masyarakat, PMI, FTSB - TSBK, dan Lembaga yang peduli terhadap penanggulangan lainnya. Lembaga tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan kegiatan - kegiatan prioritas Penanggulangan bencana rangka menuju kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Dan dukungan Dunia Usaha seperti Lembaga Perbankan, Baznas Kota Bima dan Instansi vertikal lainnya.

1.1. Faktor – Faktor yang menyebabkan kegagalan organisasi.

a. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Pada uraian tentang keberhasilan BPBD, Sumberdaya yang mumpuni cukup tersedia pada struktur organisasi BPBD, namun pada tugas - tugas khusus seperti Pengoperasi komputer, pengelola gudang dan Operator Pusdalops termasuk tenaga maintenance peralatan EWS dan Tenaga Kebencanaan lainnya belum memiliki tenaga yang bersertifikat keahlian untuk menyelesaikan tugas - tugas secara profesional

b. Ego Sektoral masih sangat tinggi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima selain sebagai fungsi pelaksana penanggulangan bencana, juga memiliki fungsi koordinasi. Sebagai organisasi yang memiliki fungsi koordinasi dibidang penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih baik dengan stakeholder terkait mengingat pekerjaan penanggulangan bencana memerlukan kerjasama yang baik antara tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Dunia Usaha baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana untuk program rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana.

c. Dukungan Penganggaran

Kurangnya dukungan anggaran untuk membiayai sub kegiatan terkait pemenuhan SPM menyebabkan kurangnya capaian kinerja SPM seperti Pelayanan Informasi Rawan Bencana dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana.

e. Fasilitas Sarana Prasarana Pendukung masih kurang memadai

Dalam rangka meningkatkan pelayanan bencana, fasilitas sarana prasarana pendukung sangat diperlukan. Berdasarkan analisa kebutuhan sarana prasarana pendukung saat bencana, porsentase ketersediaan sarana prasarana penunjang saat bencana selama tahun 2024 sebesar 80%, ini berarti ketersediaannya cukup memadai, sarana prasarana yang masih kurang diantaranya adalah, Gudang Logistik yang kurang luas, Alat berat seperti eksavator ampibi, Perahu karet masih kurang, Sistem Peringatan Dini untuk semua bencana masih terbatas, Gedung kantor yang bocor pada saat musim penghujan maka perlu perbaikan berat terutama bagian atap.

f. Kurangnya monitoring dan evaluasi kinerja organisasi secara berkala

Dalam melaksanakan roda pemerintahan sangat dibutuhkan adanya evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar segera diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi agar bisa segera mengambil langkah – langkah penyelesaian masalah yang dihadapi.

1.2. Solusi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima untuk mengurangi ketidakberhasilan di atas adalah :

a. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang ada dengan menugaskan tenaga P3K yang baru ditempatkan pada pelayanan dan pemanfaatan teknologi IT yang mumpuni dan memanfaatkan Sumberdaya Forum PRB Kota Bima, TSBK dan lembaga lainnya untuk secara bersama – sama berkolaborasi pada kegiatan Penguranagan Risiko Bencana, maupun kegiatan Kedaruratan bencana.

b. Tetap Terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk mengajukan Proposal batuan sarana dan prasarana kepada BNPB maupun Kementerian dalam Negeri.

c. Mengupayakan bantuan dari BNPB dan BPBD Provinsi untuk menambah fasilitas sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk bantuan Logistik bencana maupun kerjasama untuk Pengurangan risiko bencana.

d. Memprioritaskan pelayanan dan mengutamakan pelayanan untuk kemanusiaan untuk menjaga loyalitas dan kepercayaan publik

B. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya mencapai 100%, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dalam APBD dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk penghematan dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi Belanja BPBD Kota Bima Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja BPBD Kota Bima

Tahun Anggaran 2025

No.	Komponen	Tahun 2025 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	**Belanja Daerah**			
05.01	**Belanja Operasi**	**5.269.003.283,00**	**4.946.622.811,00**	**93,88**
05.01.01	Belanja Pegawai	3.526.393.583,00	3.242.641.254,00	91,95
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	1.642.609.700,00	1.603.981.557,00	97,64
05.01.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
05.02	**Belanja Modal**	**87.863.000,00**	**86.638.000,00**	**98,60**
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.863.000,00	86.638.000,00	98,60
	Jumlah Belanja	**5.356.866.283,00**	**5.033.260.811,00**	**93,95**
	SUPLUS/ (DEFISIT)	**(5.356.866.283,00)**	**(5.033.260.811,00)**	**93,95**

Untuk melihat realisasi Anggaran BPBD Kota Bima secara rinci, berikut disajikan Realisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

Tabel. 3.25 Realisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025	Realisasi Anggaran 2025	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran 2025
1	2	3	4	5	6
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.683.301.983,00**	**4.367.863.278,00**	**315.438.705,00**	**93,26**
a	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**34.402.500,00**	**32.285.500,00**	**2.117.000,00**	**93,85**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.025.000,00	3.025.000,00	-	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.217.000,00	3.217.000,00	-	100,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.877.000,00	1.877.000,00	-	100,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.207.000,00	1.207.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.207.000,00	1.207.000,00	-	100,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.793.000,00	7.776.000,00	17.000,00	99,78
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.076.500,00	13.976.500,00	2.100.000,00	86,94
b	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.710.842.283,00**	**3.425.169.854,00**	**285.672.429,00**	**92,30**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.526.393.583,00	3.242.641.254,00	283.752.329,00	91,95
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	168.094.000,00	166.173.900,00	1.920.100,00	98,86
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.340.000,00	2.340.000,00	-	100,00
4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.799.000,00	2.799.000,00	-	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.259.100,00	10.259.100,00	-	100,00
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	956.600,00	956.600,00	-	100,00

c	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**840.000,00**	**840.000,00**	**-**	**100,00**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	840.000,00	840.000,00	-	100,00
d	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**33.058.900,00**	**33.003.900,00**	**55.000,00**	**99,83**
1	Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	27.000.000,00	26.945.000,00	55.000,00	99,80
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.058.900,00	6.058.900,00	-	100,00
e	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**93.635.800,00**	**89.759.857,00**	**3.875.943,00**	**95,86**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.207.100,00	3.207.100,00	-	100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.840.000,00	29.751.557,00	88.443,00	99,70
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.575.000,00	3.575.000,00	-	100,00
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.749.700,00	9.749.700,00	-	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.256.000,00	7.543.000,00	3.713.000,00	67,01
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.008.000,00	35.933.500,00	74.500,00	99,79
f	**Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**64.292.000,00**	**63.150.000,00**	**1.142.000,00**	**98,22**
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	64.292.000,00	63.150.000,00	1.142.000,00	98,22
g	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**203.666.950,00**	**182.956.170,00**	**20.710.780,00**	**89,83**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.053.350,00	11.043.000,00	10.350,00	99,91
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.363.600,00	63.663.170,00	20.700.430,00	75,46
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.250.000,00	108.250.000,00	-	100,00
h	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**542.563.550,00**	**540.697.997**	**1.865.553,00**	**99,15**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	152.228.750,00	152.216.197,00	12.553,00	99,99

2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.334.800,00	388.481.800,00	1.853.000,00	99,53
B.	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**673.564.300,00**	**665.397.533,00**	**8.166.767,00**	**98,79**
a	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**48.779.700,00**	**47.995.700,00**	**784.000,00**	**98,39**
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	48.779.700,00	47.995.700,00	784.000,00	98,39
b	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**179.533.600,00**	**175.869.100,00**	**3.664.500,00**	**97,96**
1	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	33.073.400,00	33.073.400,00	-	100,00
2	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	110.750.600,00	108.804.600,00	1.946.000,00	98,24
3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	26.893.000,00	25.557.000,00	1.336.000,00	95,03
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	8.816.600,00	8.434.100,00	382.500,00	95,66
C	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**305.895.200,00**	**302.604.600,00**	**3.290.600,00**	**98,92**
1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	8.158.800,00	7.472.800,00	686.000,00	91,59
2	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.613.900,00	1.595.000,00	18.900,00	98,83
3	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	296.122.500,00	293.536.800,00	2.585.700,00	99,13
d	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**139.355.800,00**	**138.928.133,00**	**427.667,00**	**99,69**
1	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	10.678.900,00	10.675.900,00	3.000,00	99,97
2	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	28.676.900,00	28.252.233,00	424.667,00	98,52
3	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
	Jumlah	**5.356.866.283,00**	**5.033.260.811,00**	**323.605.472,00**	**93,95**

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar serapan anggaran masing – masing sub kegiatan rata – rata berada pada capaian di atas 90 % hanya terdapat 1 (satu) Sub kegiatan yang memiliki capaian keuangannya berada pada capaian dibawah 70 % yaitu sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan pagu Rp 11.256.000,00, realisasi sebesar Rp 7.543.000,00 dan capaian keuangan sebesar 67,11 % namun capaian Kinerjanya sub kegiatan ini sebesar 100 % yang berarti sub Kegiatan ini dapat dilakukan secara efektif.

B.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan sasaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran merupakan hasil perbandingan antara Alokasi Angaran dikalikan dengan Capaian Tujuan setelah dikurangi dengan realisasi Anggaran dibagi dengan Alokasi Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/202, Nilai tertinggi efisiensi adalah 20% (dua puluh persen) dan nilai terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen).

Rumus Perhitungan Efisiensi.

$$E_{RO=} \frac{\sum_{i}^{n}=1((AAROi\ x\ CROi) - RAROi)}{\sum_{i}^{n}=1((AAROi)} \text{ x } 100\%$$

Keterangan :

E_{RO} = *Efisiensi output*

$AAROi$ = *Alokasi Anggaran*

$CROi$ = *Capaian output*

$RAROi$ = *Realisasi anggaran*

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Perhitungan Efisiensi Penggunaan anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	OP	COP Per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA X COP	(AA X COP) - RA	Efisiensi
1	2	3	4	5	(6) = (4) X (3)	(7) = (6) - (5)	8
Tujuan	Meningkatnya ketahanan daerah	0,96	5.356.866.283,00	5.033.260.811,00	5.142.591.631,68	109.330.820,68	0,02
Sasaran	Meningkatnya ketahanan daerah	0,96	5.356.866.283,00	5.033.260.811,00	5.142.591.631,68	109.330.820,68	0,02

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian kinerja Tujuan dalam Meningkatnya ketahanan daerah sebesar 95,77 % atau 0,96 dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.033.260.811,00 dapat melakukan efisisensi dengan angka 0,02
2. Begitu juga Pencapaian kinerja Sasaran dalam Meningkatnya ketahanan daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana sebesar sebesar 95,77 % atau 0,96 dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.033.260.811,00 dapat melakukan efisisensi dengan angka 0,02
3. Pencapaian kinerja tujuan maupun Sasaran dalam Meningkatnya Indeks ketahanan daerah pada angka 0,02 menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program masih dalam kategori efisien.

B.2. Analisis Efisiensi Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Untuk melihat Perhitungan efisiensi dalam penggunaan sumber daya baik capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan secara rinci pada tabel berikut

Tabel 3.27 Perhitungan efisiensi capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan

No	Program/ Kegiatan	COP Per Program /Keg	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA X COP	(AA X COP) - RA
1	2	3	4	5	(6) = (4) X (3)	(7) = (6) - (5)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,00	4.683.301.983,00	4.367.863.278,00	4.683.301.983,00	315.438.705,00
a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,00	34.402.500,00	32.285.500,00	34.402.500,00	2.117.000,00
b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,94	3.710.842.283,00	3.425.169.854,00	3.488.191.746,02	63.021.892,02
c	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
d	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,00	33.058.900,00	33.003.900,00	33.058.900,00	55.000,00

e	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,00	93.635.800,00	89.759.857,00	93.635.800,00	3.875.943,00
f	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1,00	64.292.000,00	63.150.000,00	64.292.000,00	1.142.000,00
g	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	203.666.950,00	182.956.170,00	203.666.950,00	20.710.780,00
h	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,00	542.563.550,00	540.697.997,00	542.563.550,00	1.865.553,00
B.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,88	673.564.300,00	665.397.533,00	592.736.584,00	(72.660.949,00)
a	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	0,79	48.779.700,00	47.995.700,00	38.535.963,00	(9.459.737,00)
b	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0,97	179.533.600,00	175.869.100,00	174.147.592,00	(1.721.508,00)
C	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	305.895.200,00	302.604.600,00	30.589.520.000,00	30.286.915.400,00
d	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100,00	139.355.800,00	138.928.133,00	13.935.580.000,00	13.796.651.867,00
	Jumlah Program		5.356.866.283,00	5.033.260.811,00	5.276.038.567,00	242.777.756,00
	Jumlah Kegiatan		5.356.866.283,00	5.033.260.811,00	49.198.435.001,02	44.165.174.190,02
	Efisiensi Program		∑((AA X COP) - RA)/ ∑(AA)			0,05
	Efisiensi Kegiatan		∑((AA X COP) - RA)/ ∑(AA)			8,24

Berdasarkan tabel analisis efisiensi program dan kegiatan di atas, bahwa pada pelaksanaan program mendapat nilai efisiensi sebesar 0,05 sedangan pada pelaksanaan kegiatan mendapat nilai efisiensi sebesar 8,24 artinya kedua pelaksanaan program maupun kegiatan rata rata masih dapat menggunakan sumber daya organisasi secara efisien karena nilai efisiensi berada pada nilai yang positif.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima, Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (performance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu bertemu (Cushway,1994).

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja. Tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja Tujuan dan Kinerja Sasaran meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap bencana (IKD) adalah dengan angka indeks sebesar 0,68 dari target 0,71 yang berarti capaian sebesar 95,77 % atau capaian kinerja dari target renstra sebesar 89,47%;
2. Realisasi Kinerja Sasaran Program penanggulangan bencana adalah sebesar 58,96 % dari target 66,92 % yang berarti capaian sebesar 88,11 %;
3. Realisasi Kinerja keuangan sebesar Rp. 5.033.260.811,00 dari pagu sebesar Rp. 5.356.866.283,00 atau 93,95 %, dengan rincian realisasi belanja Operasi sebesar Rp. 4.946.622.811,00 dari pagu sebesar Rp. 5.269.003.283 atau capaian keuangan sebesar 93,88 % dan relaisasi Belanja Modal sebesar 86.638.000,00 dari pagu sebesar 87.863.000,00 capaian keuangan sebesar 98,60 %;

4. Secara umum efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dapat dilakukan, yang dibuktikan dengan nilai analisis efisiensi penggunaan anggaran berada pada angka 0,02 pada pelaksanaan tujuan dan sasaran, 0,05 pada pelaksanaan program dan angka 8,24 pada pelaksanaan kegiatan. Artinya BPBD Kota Bima mampu menerapkan efisiensi sumber daya yang digunakan dalam mencapai out put maupun outcome yang diharapkan.

B. SARAN

1. Lakip ini diharapkan dapat menjadi gambaran keberhasilan/kegagalan BPBD dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2025, sehingga menjadi bahan pelajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya;
2. Penyempurnaan dan pengisian Personil di BPBD bisa terus ditingkatkan terutama tenaga yang memiliki ketrampilan yang mumpuni agar pekerjaan – pekerjaan baik administrasi, keuangan maupun teknis penanggulangan bencana bisa segera diselesaikan sesuai target waktu yang ditetapkan;
3. Kerjasama dari semua komponen baik internal BPBD, maupun stakeholder terkait lainnya untuk terus meningkatkan koordinasi menjadi salah satu faktor keberhasilan BPBD dalam melaksanakan semua program yang telah ditetapkan.

Bima, 9 Maret 2026
Kepala Pelaksana,



A. FARUK.S.ST.Par, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19780722 201001 1 011

LAMPIRAN

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2025



DINAS KESEHATAN
KOTA BIMA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kota Bima selama tahun 2025. Selain itu,laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (goodgovernance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan kinerja Dinas Kesehatan KotaBima Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bima serta Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025-2029. Pada laporan kinerja ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun 2025.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2025 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun 2026

Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada para pihak atas perhatian, bantuan,maupun asupan serta kontribusinya dalam penyusunan laporankinerja Dinas Kesehatan Kota Bima ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita bersama untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan Kota Bima mendapatkan rahmat, hidayat, dan ridho-Nya, Amin.

Raba-Bima, Februari 2026
Kepala Dinas Kesehatan

Ahmad, S.Sos.,M. Kes
Pembina Utama Muda
Nip. 1968614 19883 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR 1
RINGKASAN EKSEKUTIF 3
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Ruang Lingkup 5
C. Aspek Strategis 13
1. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan 13
2. Aspek Sarana Kesehatan 14
3. Aspek Pembiayaan Kesehatan 15
BAB II PERENCANAAN KINERJA 24
a. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (untuk baba 2 A diambil dari cascading visi misi tujuan dan sasaran RPJMD, DI TAMBAH TUJUAN OPD DAN SASARAN OPD) 24
b. Indikator Kinerja Utama 26
c. Perjanjian Kinerja 26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 31
A. CAPAIAN KINER A DINAS KESEHATAN KOTA BIMA 32
B. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Eselon II 34
1. Evaluasi Tujuan Strategis .....
2. Evaluasi Sasaran Strategis .....
C. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Untuk Eselon III dan Jabatan Fungsional. .....
D. Realisasi Anggaran ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV PENUTUP 78

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kesehatan Kota Bima melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima berdasarkan Perda Kota Bima No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bima. Adapun uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bima No.90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sertaTata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bima. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Bima didukung oleh 1672 pegawai baik yang berada di lingkup dinas kesehatan maupun yang di puskesmas dan jaringannya.

Untuk melaksanakan pembangunan dibidang kesehatan selama 2020 hingga 2025, Dinas Kesehatan didukung beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jaringannya. UPT tersebut terdiri dari: 7 Puskesmas, 1 Labkesda dan 1 Rumah Sakit, sedangkan jaringannya terdiri dari 38 Puskesmas Pembantu (Pustu) prima dan 15 puskesmas kelilling yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Bima. Sedangkan pihak swasta yang turut berperan serta dalam pembangunan kesehatan adalah Apotek yang saat ini berjumlah 58 buah, Rumah Sakit Umum 4 sarana, Dokter praktek swasta 65, Balai pengobatan/klinik 13 sarana, Toko obat sebanyak 5 sarana, Praktek Bidan 10 sarana, dan Laboratorium 1 sarana. Demikian juga dengan Posyandu yang merupakan swadaya masyarakat diseluruh Kota Bima yang berjumlah 175 pos.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dari pembangunan bidang kesehatan selama 2025 dialokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dana DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau), Dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) dan BLUD. Oleh karena itu, penetapan kinerja yang telah diputuskan diawal tahun diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Kesehatan.

Isu strategis yang dijadikan landasan dalam penetapan arah kebijakan indikator kinerja dinas kesehatan antara lain :

1. Bagaimana mengkatnya Kualitas pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari segi akses, fasilitas dan jenis layanan.
2. Bagaimana meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dalam mendukung

pencapaian kinerja dengan penggerakan sasaran yang optimal.

Dengan isu-isu tersebut Dinas Kesehatan dituntut untuk dapat mengembangkan kegiatan yang berdaya ungkit untuk kinerja, sehingga tujuan dan sasaran strategis bisa tercapai dengan skala positif sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan menetapkan sasaran strategis sebagaimana yang tersebut didalam Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kota Bima untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di Kota Bima.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bima yaitu sebagai berikut :

“Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat”. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Kota Bima menunjukan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Bima dalam Periode 2025-2029. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Bima. Dalam Penetapan kinerja tersebut menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima, Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran serta program dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Pada Tahun 2025, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 1 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Dari indikator sasaran yang diukur.

Adapun persentase pengukuran kinerja berdasarkan kriteria interval capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 diatas diketahui bahwa, dari sejumlah indikator utama program pada Dinas Kesehatan yang telah mencapai target adalah Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

Jika dilihat kesesuaian dan relevansi antara rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terlihat sangat logis dan relevan. Hanya saja pencapaian sasaran dan penentuan angka sasaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bima ini

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, berisi penjelasan hal umum tentang Dinas Kesehatan Kota Bima baik Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta aspek strategis antara lain sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana serta peluang dan tantangan.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menguraikan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025-2029.

BABIII : Akuntabilitas Kinerja,menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bima selama tahun 2025.

BAB IV : Penutup, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran tahun 2025 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya dan diperlukan pemahaman bersama dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan sebagai bagian dari pemerintah Kota Bima, melainkan harus dilaksanakan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bima yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima;
2. Menjadikan Dinas Kesehatan Kota Bima sebagai instansi pemerintah yang akuntabel,sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Mendorong Dinas Kesehatan sebagai instansi Pemerintah Kota Bima untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baikdan benar (good governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Kesehatan KotaBima.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat Kota Bima dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Dalam perencanaan pembangunan daerah memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerahdan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Salah satu wujud dalam menerapkan pemerintahan yang akuntabel tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Kesehatan untuk menyusun laporan kinerja, yang disusun dengan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perubahan Nomen klatur pada sub kegiatan Program pada indikator kinerja Dinas Kesehatan mengacu pada Kepmendagri Nomor 900 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah

dialokasikan untuk masing-masing OPD. Kemudian setiap OPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebihlanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kesehatan Kota Bima sebagai unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat EselonII diwajibkan untuk menyusun Laporan KinerjaI nstansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Bima periode tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai denganVisi,Misi,Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKIP Kota Bima merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan pembangunan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bima melalui kompilasi dari seluruh kegiatan strategis dari *sub unit kerja* yang ada.

Sasaran penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kota Bima adalah sebagai Laporan Kegiatan Strategis dari Dinas Kesehatan Kota Bima yang diwujudkan oleh berbagai unit kerja yang ada didalamnya, berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025-2029.

Oleh karena itu LKIP ini memuat Formulir Perjanjian Kinerja (FPK), Formulir Pengukuran Kinerja (FPK) dan Formulir Capaian Kinerja Dinas

Kesehatan Kota Bima. LKIP Dinas Kesehatan Kota Bima disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil yaitu PANCASILA;
2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
3. Landasan Operasional:
    a. TAP MPR No.IV/MPR/1999 tentangvGBHN;
    b. Undang-undang No.4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
    c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
    d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I - 5 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
    e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    f. Undang-undang Nomo 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
    g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    h. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danDaerah;
    i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indononesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

j. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;

k. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten/ Kota sebagai Daerah Otonom;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

o. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);

r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah;

s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja danTata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

(Peraturan Daerah KotaBima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

t. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
u. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
v. Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM:
w. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2045;
x. Peraturan Walikota Bima No. 34 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Bima;
y. Peraturan Walikota Bima No. 90 tahun 2021 tentang Rincian Tugasdan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Bima.
z. Keputusan Walikota Bima Nomor 100.3.3.3/77/II/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal Pmerintahan Kota Bima.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan tahun 2025 adalah capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) dengan Kepala Daerah.

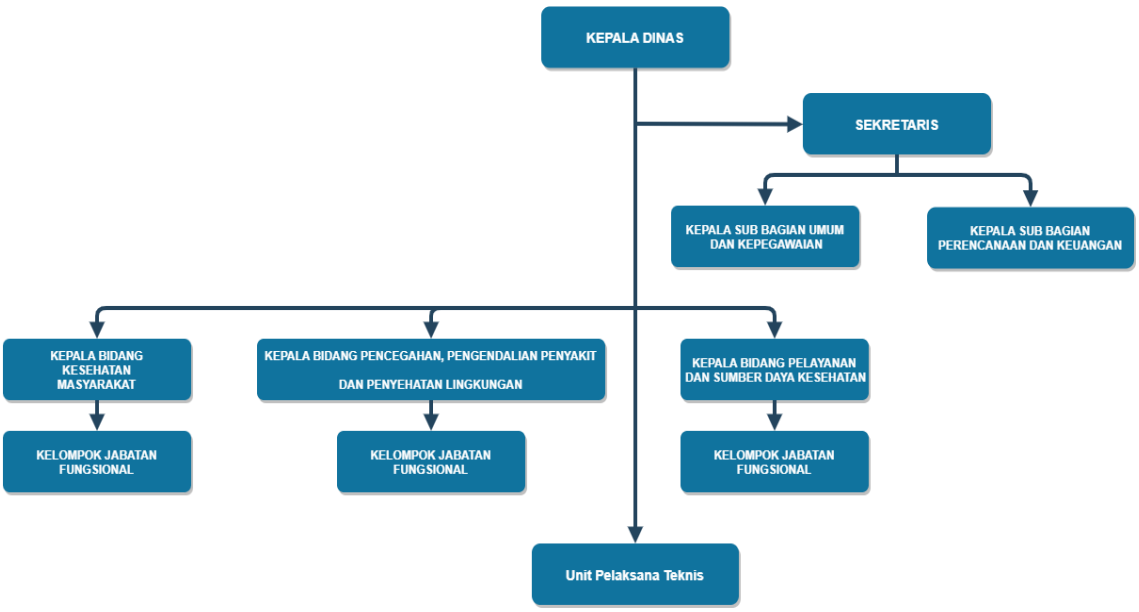
Guna memberikan gambaran tentang ruang lingkup kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima, berikut disampaikan gambaran singkat tentang kedudukan dan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Bima,yaitu

sebagai berikut:

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Dinas Kesehatan, (1) Dinas Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara lengkap Bagan Struktur Organisasi Dinas kesehatan Dapat dilihat pada pada gambar berikut:



2. Tugas Pokokdan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan beserta tugaspokok dan fungsinya,dengan rincian sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kesehatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
   1) Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah

Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

2) Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
3) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidangkesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalianpenyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas; Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yangdiberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

1) Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2) Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
   b. Pengelolaan urusan keuangan;
   c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
   d. Pengelolaan urusan ASN;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3) Sekretariat, membawahi:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
      - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
      - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah/negara;
      - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;

- Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- Melaksanakan kegiatan urusan pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.

- Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang kesehatan;
- Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- Melaksanakan administrasi di bidang keuangan meliputi urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.

Bidang Kesehatan Mayarakat mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

b. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang kesehatan keluarga,gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaanmasyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
c. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan.

D. Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
c. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bimbingan teknis dansupervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahandan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidangsurveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

E. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
c. Pelaksanaan kegiatan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

Selanjutnya,Unit Pelaksana Teknis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Unit Pelaksana Teknis) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di

bidang kesehatan.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. BLUD Puskesmas Paruga;
2. BLUD Puskesmas Mpunda;
3. BLUD Puskesmas Penanae;
4. BLUD Puskesmas Rasanae Timur;
5. BLUD Puskesmas Kumbe;
6. BLUD Puskesmas Kolo;
7. BLUD Puskesmas Jatibaru.dan
8. Labkesda Kota Bima
9. RSUD Kota Bima.

C. Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Bima. Adapun aspek-aspek strategis tersebut antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun 2025 sebanyak 1.672 orang tersebar di Dinas Kesehatan Kota Bima dan UPT Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bima. Distribusi pegawai menurut jenis pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1:

Distribusi Tenaga Kesehatan pada Lingkup Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025

JENIS TENAGA	UNIT KERJA										JML
	RSUD KOTA BIMA	PKM PARUGA	PKM MPUNDA	PKMP ENANAE	PKM RASTIM	PKMK OLO	PKMJ ATIBA RU	PKM KUMBE	LAB KESDA	DIKES	
Dokter spesialis	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Dokter	18	6	5	6	5	4	3	2	1	-	49
Dokter gigi	2	2	2	0	1	1	3	2	-	-	13
Bidan	93	43	49	48	21	24	41	25	-	0	344
Perawat	223	38	52	44	20	26	37	33	6	5	484
Perawat gigi/ teknisi gigi	6	4	3	2	3	1	4	1	0	0	24
Farmasi	5	0	1	2	2	1	3	0	0	1	15
Apoteker	31	7	5	3	2	2	3	2	0	9	65
Kesmas	30	8	12	7	6	8	15	10	0	34	130
Sanitarian	3	3	4	2	1	3	5	1	0	6	28
Nutrisionis	13	5	5	8	2	3	4	2	0	6	48
Fisioterapi	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Radiografer	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Teknisi Elektromedis	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7
Analis (pranatalabkes)	13	4	5	3	3	4	4	3	17	-	56
Refraksionisoptisien	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Teknis Transfusi Darah	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Penata Anastesi	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fisikawan Medis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Kardiovaskuler	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Perekam medis	9	2	4	2	2	4	3	1	0	0	27
Staf umum	106	17	12	14	22	9	16	10	18	71	214
Pejabat Struktural	4	2	2	2	2	2	2	2	2	7	19
Jumlah	618	143	161	143	93	92	143	94	46	139	1.672

Sumber Data: Kepegawaian Dikes Kota Bima Tahun 2025

2. Aspek Sarana Kesehatan

Adapun jumlah sarana kesehatan yang ada di Kota Bimata hun 2025, yang mendukung program pelayanan kesehatan dimasyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2:

Sarana Kesehatan Di Kota Bima Tahun 2025

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1	RUMAH SAKIT UMUM	4
2	PUSKESMAS RAWAT INAP	1
3	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	6
4	PUSKESMAS KELILING	15
5	PUSKESMAS PEMBANTU PRIMA	38
6	LABKESDA	1
7	IFK	1
8	PRAKTEK BIDAN	10
9	POSYANDU	175
10	BALAI PENGOBATAN/KLINIK	13
11	PRAKTIK DOKTER PERORANGAN	65
12	LABORATORIUM KLINIK SWASTA	1
13	PEDAGANG BESAR FARMASI	1
14	APOTEK	58
15	TOKO OBAT	5

Sumber Data: Bidang Yankes Dikes Kota BimaTahun 2025

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 berasal dari berbagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Adapun rincian anggaran kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3:

Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN (Rp)	
		2024	2025
1	*2*	*3*	*4*
	PENDAPATAN DAERAH		
1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp. 16.157.395.971**	**Rp. 37.730.006.919**
	Retribusi Daerah	Rp. **16.157.395.971**	Rp. **37.730.006.919**
	Lain-lain PAD yang sah		
	Jumlah Pendapatan	**Rp. 16.157.395.971**	**Rp. 37.730.006.919**
2.	**BELANJA DAERAH**		
	BELANJA OPERASI	Rp. 137.497.153.113	**Rp. 122.130.858.348**
	Belanja Pegawai	Rp. 75.843.660.069	Rp. 84.025.826.262
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 61.415.993.044	Rp. 37.860.032.086
	Belanja Hibah	Rp. 237.500.000	Rp. 245.000.000
	BELANJA MODAL	Rp. 30.241.506.345	Rp. 8.733.416.387
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 14.134.208.308	Rp. 4.162.744.599
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 9.359.798.039	Rp 4.570.671.788
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Iruigasi		Rp 0
	Belanja Modal Aset Lainnya		Rp 0
	Jumlah Belanja	**Rp. 167.738.659.460**	**Rp. 130.864.274.735**
	Total Surplus/(Defisit)	**Rp. 167.738.659.460**	**(Rp. 130. 155.239.735)**

Sumber Data: Subag. Perencanaan dan Keuangan Dikes Kota Bima Tahun 2025

D. Permasalahan Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dinas kesehatan kota bima dalam pelayanan kesehatan terdapat beberapa masalah yaitu:

1. Kualitas Layanan Kesehatan Yang Masih Rendah

Dalam melaksanakan tugas Pelayanannya, Dinas Kesehatan Kota Bima terdapat beberapa permasalahan pelayanan yang belum mencapai target, yaitu sebagai berikut :

1. Rasio Sebaran Nakes yang Tidak Merata
   Permasalahan rasio sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata terjadi disebabkan beberapa hal yaitu pertama tidak adanya regulasi yang jelas tentang distribusi penempatan tenaga kesehatan pada semua layanan kesehatan. Kemudian kedua disebabkan oleh adanya rotasi atau mutasi tenaga kesehatan tidak ada rekomendasi dinas kesehatan.
2. Kondisi Alat Kesehatan Pada Layanan Kesehatan belum Sesuai Standar
   Permasalahan yang terjadi di Dinas kesehatan kota bima yaitu kondisi alat Kesehatan pada layanan Kesehatan belum sesuai standar disebabkan kurangnya pemahaman tenaga Kesehatan terhadap KMK yang berlaku terkait alat Kesehatan dan Perencanaan alat kesehatan yang kurang optimal.
3. Penyediaan obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan
   Masalah penyediaan obat yang tidak sesuai dengan kebutuhan disebabkan pertama belum ada dukungan anggaran yang bersumber dari dana DAU untuk pengadaan Obat - Obatan. Kemudian kedua disebabkan oleh pola penyakit yang berubah setiap tahun.
4. Pelayanan Rumah Sakit yang belum memenuhi harapan masyarakat Kota Bima.
   Masalah Pelayanan rumah sakit yang belum memenuhi harapan masyarakat disebabkan pertama masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mengikuti pelatihan pelayanan publik di Rumah Sakit. Kemudian kedua, adanya beberapa fasilitas pelayanan di Rumah Sakit yang masih terbatas. Dan ketiga, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi sistem informasi kesehatan di Rumah Sakit.
5. Masih terdapat masyarakat kota bima yang belum memiliki jaminan Kesehatan.
   Masalah tersebut terjadi disebabkan adanya verifikasi dan validasi data penduduk belum optimal yang dilakukan oleh dinas terkait (dukcapil dan dinsos)
6. Fasilitas Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) di kelurahan belum tersedia.
   Masalah belum tersedianya Fasilitas Penanganan Penyakit Tidak Menular (PTM) di kelurahan tersebut terjadi karena belum terlaksananya revitalisasi pustu di setiap kelurahan dan juga belum optimalnya penempatan tenaga kesehatan disetiap pustu.

2. Kualitas Kesehatan Masyarakat yang masih rendah

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan kota bima terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi diantaranya :

1. Tingginya angka kesakitan untuk penyakit KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, Urinefro).

   Data Pasien Penyakit KJSU di Kota Bima baik yang rawat jalan maupun rawat inap mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2020 sebanyak 908 kasus, Sedangkan di tahun 2021 sebanyak 1.126, tahun 2022 sebanyak 1.339 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 2.089 kasus, dan pada tahun 2024 sebanyak 2.944 kasus.

   Tingginya angka kesakitan untuk penyakit KJSU terjadi karena beberapa hal, 1). belum semua sasaran dilakukan skreening (KJSU), 2). Kepatuhan pengobatan penderita KJSU tidak sesuai standar, 3). Prasarana pendukung pemeriksaan belum optimal, 4). Ketrampilan petugas dalam melakukan pemeriksaan perlu ditingkatkan, 5). Pola hidup masyarakat yang tidak sehat.

2. Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak yang masih rendah

   Kesehatan ibu dan anak masih rendah terjadi di kota bima karena beberapa hal, 1). masih tingginya AKI/AKB dan stunting, BBLR, Gizi kurang, Gizi buruk, 2). masih ada kasus pernikahan dini, 3). pelayanan kesehatan ibu dan anak belum memenuhi standar, 4). kesadaran ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan di usia awal kehamilan masih rendah, dan 5). kepatuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan Ibu dan Anak masih kurang.

   Adapun Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) tiap tahunnya dapat di lihat pada table 1.4 berikut

Tabel 1.4

Data Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kota Bima

No	Tahun	Kematian Ibu		Kematian Bayi	
		Jumlah	AKI	Jumlah	AKB
1	2020	3	90/100.000 KH	14	4/1000 KH
2	2021	6	192/100.000 KH	19	6/1000 KH
3	2022	3	98/100.000 KH	16	5/1000 KH
4	2023	5	177/100.000 KH	19	6/1000 KH
5	2024	2	86/100.000 KH	25	11/1000 KH
6	2025	4	187/100.000 KH	27	13/1000 KH

Sumber: Bidang Kesmas 2025

Angka kematian ibu sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai

Penyebab kematian ibu sebesar 50% karena tidak terdeteksinya komplikasi pada ibu hamil yang disebabkan oleh status sosial ibu seperti hamil diluar nikah, istri siri dan single parent. penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko.

3. Angka stunting yang masih tinggi

   Tingginya angka stunting di kota bima karena beberapa factor yaitu 1). Kurangnya pengetahuan ibu,pola asuh, sosial ekonomi, sanitasi yang buruk, 2). Adanya penyakit penyerta/komplikasi, 3). Partisipasi masyarakat maupun lintas sektor untuk memantau tumbang di posyandu masih rendah, 4). Penanganan stunting belum terintegrasi dengan baik antar dinas terkait/TPPS KOta Bima.

4. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil serta belum optimalnya peningkatan gizi bayi dan balita.

   Kasus gizi buruk di kota Bima yang sudah dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2020 terdapat 795 kasus dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 810 kasus dan pada 1045. Kemudian Pada tahun 2023 jumlah kasus mengalami penurunan yaitu 1014 kasus. Kondisi tersebut terjadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu,pola asuh, sosial ekonomi, dan sanitasi yang buruk.

   Adapun kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program penurunan angka gizi buruk yaitu adanya kegiatan penjaringan kasus secara berkala, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita

5. Penanganan Penyakit Menular yang belum terintegrasi

Penanganan penyakit menular belum terintegrasi terjadi disebabkan pertama, kurangnya koordinasi dan integrasi program yang baik, keduabkurangnya dukungan lintas sektor dalam memberantas penyakit menular, dan ketiga terbatasnya logistik (obat -obatan,BMHP).

Dalam 5 (lima) tahun terakhir profil kesehatan masyarakat Kota Bima, angka kesakitan atau morbiditas masih didominasi oleh penyakit infeksi yang lama seperti ISPA, Diare, DBD, TBC, Kusta dan penyakit infeksi seperti HIV/AIDS.

a). ISPA (Pneumonia Balita)

Penderita Ispa kota bima yang ditemukan dan ditangani tiap tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 penderita ISPA sebanyak 320 dan 317 kasus, Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 795 kasus. Pada tahun 2023 penderita ISPA (Pneumonia Balita) terjadi penurunan sebesar 725 kasus dan paada tahun 2024 terjadi penurunan lagi sebesar 569 kasus.. Faktor resiko terjadinya ISPA (Pneumonia Balita) di Kota Bima yaitu kepadatan rumah serta perilaku yang tidak bersih dan sehat ibu, sehingga memudahkan terjadinya penularan infeksi virus

b). DBD

Kasus DBD di kota Bima tiap tahunnya terjadi Fluktuatif. Pada Tahun 2020 terjadi sebanyak 252 kasus DBD kemudian pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus yaitu 138 kasus dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus yaitu sebanyak 232 dan pada tahun 2023 sebanyak 272 kasus. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan kasus DBD yang terjadi yaitu sebanyak 83 kasus. Penanganan tiap tahunnya terrhadap kasus DBD selalu memenuhi target 100 %.

c). TB BTA (+)

Porsentase penderita TB BTA (+) diperoleh dari menbandingkan Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun dengan Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun.

Beberapa Faktor masih tingginya kasus Penderita TBC di kota kota bima disebabkan beberapa hal antara lain: Penemuan penderita aktif massif belum optimal, Penderita TBC tidak membawa kembali dahak kepada petugas pemeriksa , Penderita TBC enggan rutin minum obat, Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya penyakit TBC,Masih tingginya stigma negatif masyarakat terhadap penyakit TBC, Masih rendahnya keterlibatan DPM dan Klinik dalam pelaporan penyakit TBC, Ketersediaan catridg TCM dan pot sputum yang terbatas, dan keterlibatan lintas sektor

yang masih kurang.

d). Penyakit Kusta

Penderita kusta diperoleh dari jumlah pasien baru kusta positif (kusta kering dan kusta basah) yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun. penyakit ini merupakan infeksi pada saraf dan kulit yang disebabkan oleh Mycobacterium Leprae. Faktor yang mempengaruhi penularannya kontak langsung dengan penderita yang belum mengonsumsi obat.

Jumlah kasus penderita kusta di kota bima mengalami Flukluatif. Pada tahun 2020 sebanyak 25 kasus dan pada tahun 2021 sebesar 32 kasus. sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 kasus penderita kusta mengalami penurunan yaitu sebnayak 10 dan 9 kasus, dan pada tahun 2024 kasus penderita kusta mengalami kenaikan sebesar 19 kasus. Penularan kusta di kota bima disebabkan banyak faktor yaitu penderita kusta selalu mengasingkan diri. Kemudian pederita kusta sering tidak mau berobat sehingga mudah terjadi penularan dimasyarakat, dan masih kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat dalam memptivasi pengobatan pasien.

e). HIV/AIDS

Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah kasus penyakit HIV/AIDS yang ditangani di satu wilayah kerja sampai periode waktu tertentu dengan jumlah kasus penyakit HIV/AIDS yang ditemukan di satu wilayah kerja sampai periode waktu tertentu.

Dari tahun ke tahun porsentase HIV/AIDS selalu memenuhi target. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program pencegahan dan penanggulangan penyakit menula, dengan kegiatan antara lain: Sosialisasi terkait HIV-AIDS, kegiatan zero survey, dan pemeriksaan spesimen.
Akselerasi pengendalian HIV-AIDS selain dengan kegiatan di atas juga dilakukan melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun), dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan kasus, serta peningkatan pengetahuan komprehensif.

5. Belum optimalnya penanganan kompikasi saat persalinan dan pasca persalinan.

Masalah tersebut bisa terjadi karena tingkat kepatuhan tenaga Kesehatan terhadap SOP masih kurang, Respon time sistem rujukan masih kurang, Kompetensi tenaga Kesehatan yang masih kurang, dan Fasilitas di fasilitas Kesehatan yang belum optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut harus dilakukan peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan, . melakukan Pendampingan, monitoring dan evaluasi ke tenaga Kesehatan

di semua fasilitas Kesehatan Tingkat pertama. Kemudian melakukan penguatan respon sistim rujukan dan pengadaan fasilitas difasilitas layanan Kesehatan.

6. Masih rendahnya imunisasi dasar lengkap

Masih rendahnya imunisasi dasar lengkap karena adanya masih ada kelompok masyarakat yang menolak imunisasi, adanya reaksi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), dan ketersediaan logistik tidak memadai. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut melakukan komunikasi, edukasi dan informasi, konseling dan Kerjasama lintas sektor.

7.Masih tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Masih tingginya bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di kota bima karena masih tingginya jumlah ibu hamil dengan resiko tinggi (KEK, Anemia, PEnyakit Penyerta dan kasus prematur). Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan bimbingan teknik, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor.

3. Perilaku Hidup Bersih Sehat Masyarakat Yang Masih Rendah

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat terdapat bebarapa kendala antara lain:

1. Masih terdapat lingkungan kumuh

Masih terdapatnya lingkungan kumuh karena beberapa hal, yaitu 1). Kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah dengan aman masih kurang, 2). Kemudian masih banyak masyarakat yg belum melakukan penanganan limbah cair, 3). Ketersediaan tempat sampah di Tempat Tempat Umum masih kurang, 4).Pengetahuan masyarakat tentang sanitasi lingkungan masih rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan melalui KIE (Konsultasi, Informasi, Edukasi) penanganan sampah secara mandiri dengan metode bank sampah. Kemudian melakukan KIE penanganan limbah cair di RT dan RW dan melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menyediakan tempat sampah di tempat tempat umum (TTU).

2. Kurangnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi masyarakat.

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat adalah salah satu masalah mendasar dalam pembangunan bidang kesehatan di Kota Bima Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat tahun 2024 adalah 46 dari target nasional 80 %. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) belum dipahami dan dilaksanakan dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan masyarakat yang berbasis lingkungan (penyakit menular) masih tinggi.

3. Fasilitas publik yang belum menyediakan prasarana penunjang perilaku hidup sehat bersih

Belum tersediannya tempat sampah di fasilitas public dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat bisa menimbulkan masalah Kesehatan Masyarakat.

D. Sistimatika Penyusunan

Penyusuna Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi penjelasan hal umum tentang Dinas Kesehatan Kota Bima baik Kedudukan,Tugas,Fungsi danStruktur Organisasi serta aspek strategis antara lain sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana sertapeluangdan tantangan.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Menguraikan penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025-2029.

BABIII: Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bima selama tahun 2025.

BAB IV : Penutup

Menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran tahun 2025 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencaan kinerja memuat perjanjian kinerja, dimana perjanjian kinerja yang dimaksud adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Rencana Kinerja merupakan upaya penjabaran operasional dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima,serta merujuk pada Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan. Rencana Kinerja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang: (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (3) Program/kegiatan; serta (4) Anggarannya.

a. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

1) Tujuan Strategis Dinas Kesehtan KotaBima

Tujuan strategis merupakan turunan dari sasaran strategis pemerintah kota bima, yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Bima yaitu: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Derajat Kesehatan Masyarakat adalah merupakan tolok ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan kesehatan. Dengan berbagai upaya yang bekesinambungan, terpadu dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan dibidang kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka kesakitan maupun angka kecacatan dan ketergantungan serta meningkatkan status gizi masyarakat.

2) Sasaran Strategis DinasKesehatan

Sasaran Strategis adalah merupakan langkah guna pencapaian tujuan stategis. Dinas kesehatan kota bima menetapkan sasaran strategis adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat.

T Tabel 2.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bima

RPJMD KOTA BIMA 2025-2029				RENSTRA DINAS KESEHATAN 2025-2029		Target Kinerja				
				Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan					
VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	73.88	74.18	74.47	74.76	75.06
				Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	98	98,5	90	90,5	100

b. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2025 terdapat Sasaran Strategis yang membawahi 4 program Dinas kesehatan kota bima. Adapun sasaran dan indikator Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (Eselon II)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	URAIAN DAN FORMULA PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan kualitas Kesehatan Masyarakat	Presentase Pemenuhan SPM	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan dengan Nilai100% Rumus perhitungan Persentase Pemenuhan SPM Sebagai berikut: Persentase Pemenuhan SPM = Jumlah Capaian SPM / Target SPM X 100%

c. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan indikator Strategis Dinas kesehatan pada tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diuraikan dalam dokumen perjanjian kerja berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) tahun 2025 terdapat Sasaran strategis dengan indikator kinerja 4 program. Adapun sasaran dan indiktor kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima tahun

2025 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan kualitas Kesehatan Masyarakat Sasaran Meningkatnya Kepuasaan Pelayanan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang didukung oleh 4 (empat) program, adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program adalah sebagai berikut :
   a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota;
   c. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
   d. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain :
   a. Pemberian Ijin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
   b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
   c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota.
3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

   Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain :
   a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mkro Obat Tradisional (UMOT);
   b. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
   c. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;

d. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM);
e. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan;
f. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Industri Rumah Tangga Daerah Kabupaten/Kota.

4).Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran tersebutantara lain :

a. Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan
c. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota Pengembangan.

Dalam mewujudkan indikator sasaran tersebut, anggaran yang /dibutuhkan dalam menjalankan 4 (empat) program kegiatan adalah sebesar **Rp. 41.380.595.546,-**

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas Kesehatan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase Pemenuhan SPM Kesehatan	Persen	98
	- Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata Skor INM	Persen	92
	- Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar	Persen	100
	- Terlaksananya Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	Persen	95,5
.	- Terlaksananya Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase UKBM yang dibina	Persen	100

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 89.472.678.156
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 39.673.161.646
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 698.047.900
4.	Program Program sedian Farmasi, Alat kesehatan, dan Makanan Minuman.	Rp.481.208.000
5.	Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 528.178.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Kesehatan Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Berikut interval capaian indicator kinerja yang dapat dilihat pada table 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Interval Capaian Indikator Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
I	≥90 %	Sanga tBaik
II	75%s/d 90%	Baik
III	65%s/d 75%	Cukup Baik
IV	50%s/d 65%	Kurang Baik
V	≤50 %	Tidak Baik

Sumber Data: Permendagri 54 tahun 2010

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA BIMA

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditanda tangani. Capaian kinerja Organisasi diukurmulai dari Capaian Kinerja Tujuan, Capaian Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program dan Capaian Kinerja kegiatan.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

a) Pencapaian Tujuan Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima

Tujuan Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indicator angka harapan hidup. Target dan capaian dari tujuan dimaksud dijelaskan dalam tabel 3.2 tersebut dibawah ini:

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Organisasi Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	73.88	73.45	99.41%.	Sangat Baik

Sumber Data: BPS Kota Bima Tahun 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Umur Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup . Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan aspek kesehatan, terus meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 Umur Harapan Hidup Kota Bima

ditargetkan sebesar 73,88 tahun, dengan capaian realisasi sebesar 73,45 tahun. Dengan demikian, capaian indikator Umur Harapan Hidup mencapai sekitar **99,42 %** dari target yang telah ditetapkan atau berkategori Sangat Baik. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut menunjukkan kinerja yang cukup tinggi dan berada pada jalur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, UHH Kota Bima mengalami peningkatan yang positif. Pada tahun 2024, capaian Umur Harapan Hidup tercatat sebesar 73,15 tahun, dengan target sebesar 71.11. Terjadi peningkatan Umur Harapan Hidup sebesar 0,30 tahun pada periode 2024–2025, yang menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas kesehatan dan usia harapan hidup masyarakat.

b) Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025

Untuk mengukur keberhasilan dari implementasi renstra Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025, telah ditetapkan target untuk masing masing indikator kinerja sasaran yang dapat dilihat pada table 3.3 tersebut dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Analisis Keberhasilan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Persen	98	102	105,47%	Sangat Baik	Terdapat 7 Indikator SPM yang berkategori Sangat Baik, 2 Indikator Berkategori Baik, dan 3 indikator berkategori Cukup Baik

SumberData:Subag Perencanaan dan Keuangan Dikes Kota BimaTahun 2025

Dari tabel diatas, dapat dilihat capaian dari sasaran dan indikator kinerja menunjukkan hasil kinerja sangat baik untuk indikator Presentase pemenuhan SPM Kesehatan. Hal ini dapat tercapai karena Secara kumulatif

angka Presentase Pemenuhan SPM Kesehatan kota bima telah mencapai 100% dengan kategori sangat baik. Hal itu terjadi karena didukung oleh adanya beberapa jenis layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memiliki nilai kategori Sangat Baik, yaitu seperti: 1. Layanan anak Pendidikan Usia Dasar sebesar 47.318 (173,77%), 2. Orang terduga TBC sebesar (162,50%). 3. Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 6.183 (122,05), 4. Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar sebesar 486 (112,76%), 5. Layanan Penderita Diabetes Militus Usia >= 15 tahun sebesar 3.080 (98,84%), 6. Layanan Jumlah Penderita Hipertensi Usia >= 15Tahun sebesar 7..963 (95.30%), 7. Layanan Jumlah orang usia 15 -59 tahun kab/kota yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 95.464 (92.17%).

B. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran Capaian kinerja mulai dari Capaian Kinerja Sasaran, Capaian kinerja Program, Kegiatan serta capaian sub kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Analisis hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya serta dengan Target

a. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Setelah disajikan capaian kinerja Program dan Kegiatan tersebut diatas, berikut akan disajikan tabel perbandingan Sasaran Dinas Kesehatan antara tahun 2024 dengan tahun 2025 seperti pada table 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Tahun

2024 dan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	97.5	98	102	105,47%	Sangat Baik

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 100 % bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 97,5%, hal ini dapat diketahui dengan adanya beberapa Indikator layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah melebihi target yang ditetapkan atau telah mencapai angka diatas 100% dengan kategori Sangat Baik, seperti indikator :1). Layuanan Jumlah anak Pendidikan Usia Dasar sebesar 47.318 (173,77%), 2). Layanan Jumlah Orang terduga TBC sebesar (162,50%). 3). Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 6.183 (122,05), 4. Layanan jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar sebesar 486 (112,76%), 5). Layanan Jumlah Penderita Diabetes Militus Usia >= 15 tahun sebesar 3.080 (98,84%), 6). Layanan Jumlah Penderita Hipertensi Usia >=15 Tahun sebesar 7.963 (95.30%), 7). Layanan Jumlah orang usia 15 -59 tahun kab/kota yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 95.464 (92.17%).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta sub kegiatanTahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun perbandingan Capaian Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Program / Indikator Kegiatan / Indikator Sub Kegiatan	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori
1	**Terlaksananya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Rata-Rata skor INM (Indikator Nasional Mutu)**	**91,67**	**92**	**92**	**100%**	Sangat Baik
1	*Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK*	*82.3*	*82,5*	*46,29*	*56,10%*	*Kurang Baik*
		Cakupan fasilitas kesehatan yang memiliki obat,vaksin, dan BMHP sesuai standar	*80*	80	100% (8 Faskes)	100%	Sangat Baik
1	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	3	10 Unit	6 Unit	60%	Cukup Baik
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	7	7	7	100%	Sangat Baik

3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	1	1	100%	Sangat Baik
4	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	68,57	70 Paket	68 Paket	97,14 %	Sangat baik
5	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	9 paket	9 Paket	100%	Sangat Baik
3	*Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota*	*Jumlah Angka Kematian Ibu*	2	2	4	100%	Sangat Baik
		Cakupan Antenatal Care sesuai Standar (ANC 6 kali)	66,23	80 %	66%	82,5%	baik
		Presentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan pelayanan Lengkap	70,02	88%	69%	142%	Sangat Baik
		Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	95,18	91	98,08 %	107%	Sangat Baik
		Cakupan Balita yang di Pantau pertumbuhan dan perkembangannya	92,39	50%	72%	144%	Sangat Baik

		Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	28,4	28,5	28,4	99%	Sangat baik
		Cakupan layanan Kesehatan lanjut usia yang mandiri	89.96%	92%	98,08 %	107%	Sangat Baik
		Prevalensi Obesitas >18 Tahun	42,8	1,30%	49,2	49,2	Sangat baik
		Prevalensi depresi di umur ≥15 th	**0,80 %**	1.30	2.49	191%	Sangat baik
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko KLB	100%	100%	100%	100%	Sangat baik
		Persentase Pelayanan Kesehatan dalam pengurangan Risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal dalam wilayah Berpotensi bencana	100%	100%	100%	100%	Sangat baik
		Cakupan Kabupaten /Kota dengan Eliminasi Malaria	100%	80%	100%	100%	Sangat Baik
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	80%	80%	84,4%	84,4%	Baik
		Cakupan Calon Jamaah Haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	99,86 %	98,60%	99,99 %	99,99%	Sangat Baik
		Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan kesehatan Nasional	88,57 %	80%	88,48 %	88,48%	Sangat Baik

		Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	67,48 %	90	80,3%	80,3%	Sangat Baik
		Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosisi	98,0%	98	91,0%	91,0%	Sangat Baik
		Cakupan ODHIV mengalami supresi Virus (Viral Land <50 kopi/m	67%	80%	100% (19 Orang)	100%	Sangat Baik
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,20	0,20	0,20	100%	Sangat Baik
6	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81,90	3.111	2.331	74,93%	Cukup Baik
7	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	82	3.092	2.126	68.76%	Cukup Baik
8	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81,21	2.899	2.098	72.37%	Cukup Baik
9	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85,42	11.861	9.518	80.55%	Baik
10	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah AnakUsia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35,94	27.231	47.318	173,77 %	Sangat Baik
11	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	75%	103.576	95.464	92,17%	Sangat Baik

12	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90,81	16.930	13.551	80,04%	Baik
13	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	97,70	8.356	7.963	95,30%	Sangat Baik
14	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	3.116	3.080	98,84%	Sangat Baik
15	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120,94	431	580	134%	Sangat Baik
16	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	213,75	2.568	4.173	162,5%	Sangat Baik
17	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	105	5.066	6.183	122%	Sangat Baik
18	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik

19	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
20	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	12 dokumen	12 dokumen	100%	Sangat Baik
21	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	12 dokumen	12 dokumen	100%	Sangat Baik
22	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Baik
23	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
24	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa	22.195	22.639	31.276	138%	Sangat Baik
25	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	1 Dokumen	1 Dokume	100%	Sangat Baik
26	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	12 dokumen	12 dokumen	100%	Sangat Baik

27	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	80	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Baik
28	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
29	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
30	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	310	528	424	80%	Baik
31	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	90,70	19	42	221%	Sangat Baik
32	Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100	950	1.604	168,8%	Sangat Baik
3	*Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas*	*Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi*	100	100	100	100%	Sangat Baik

	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna*	75	75	75	100%	Sangat Baik
33	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	4	4	100%	Sangat Baik
34	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	100	9 Fasilitas	9 Fasilitas	100%	Sangat Baik
35	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
2	**Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	**100**	Sangat Baik
4	*Tersedianya Pemberian izin Praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota*	*Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar*	*100*	100%	100%	100%	Sangat Baik
36	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	*Sangat Baik*

37	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Tersedianya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	*Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar*	*90*	*100*	*100*	*100%*	*Sangat baik*
38	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
39	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	140	785	785	100%	Sangat baik
40	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	1 dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
5	*Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	*Persentase Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi*	*100*	*100*	*100*	*100%*	*Sangat Baik*

41	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	69,12	90	116	128%	Sangat Baik
3	**Terlaksannya Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman**	**Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar**	**100%**	**95,5%**	**96%**	**96%**	**Sangat baik**
6	*Tersedianya Pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Sarann Produksi Umot yang Memiliki izin*	*100*	*40 Fasilitas*	*63 fasilitas*	*157%*	*Sangat Baik*
42	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Baik
7	*Tersedianya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan miniman tertentu yang dapat diproduksi oleh*	*Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	*100*	110 sarana SPPIRT	*95*	*86%*	*Baik*

	industri Rumah Tangga						
43	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	1 dokumen	1 dokumen	100%	Sangat Baik
8	*Tersedianya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dari sentra Makanan Jajanan*	*Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*	*50 sarana PIRT*	*60 sarana PIRT*	*60 sarana PIRT*	*100%*	*Sangat Baik*
44	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*100*	1 Dokumen	1 dokumen	*100%*	*Sangat Baik*

9	*Tersedianya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Post Market pada Prosuksi dan Produk Makanan Minuman Insdustri Rumah TAngga*	*Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diawasi*	*100*	*36 produk dan 110 sarana PIRT*	*36 produk dan 110 sarana PIRT*	*100%*	*Sangat baik*
45	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	100	100	100%	Sangat Baik
4	**Terlaksananya PRogram Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**Persentase UKBM yang di bina**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**Sangat baik**
10	*Tersedianya Advokasi Pemberdayaan , Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota*	*Jumlah Pakta Integritas yang disepakati*	*33%*	*4*	*3*	*90 %*	*Sangat Baik (1 dokumen tidak dilaksnakan tidak ada anggaran . Kegiatan orentasi ILP petugas puskesmas*
46	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	4 dokumen	3 Dokumen	75 %	Baik

11	*Terselenggaranya Pelaksanaan sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota*	*Jumlah OPD yang Melaksanakan Germas*	*100*	*- 14 OPD - 5 KEcamatan - 41 Keluraha n*	*14 OPD - 5 KEcamatan - 41 Kelurahan*	*100*	*Sangat Baik*
47	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	4 dokumen	4 dokumen	100%	Sangat Baik
12	*Terselenggaranya Pengembangan dan Pelaksanaan Upay Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupatne/kota*	*Jumlah UKBM yang Dilakukan Supervisi dan Pembinaan*	*100*	*174*	*174*	*100%*	*Sangat Baik*
48	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	2 dokumen	1 dokumen	50 %	Kurang Baik

Sumber : Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Adapun persentase pengukuran kinerja berdasarkan kriteria interval capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025 diatas diketahui bahwa, dari sejumlah 4 program, 12 kegiatan dan 48 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan, mayoritas kinerja yang dicapai telah memenuhi kategori Sangat Baik sebanyak 41 sub kegiatan (85,41%), 3 sub kegiatan (6,25%) dengan kategori kinerja Baik, 4 sub kegiatan (8,48%) dengan kategori kinerja cukup baik, 1 kegiatan (2,08%) dengan kategori kinerja Kurang Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Rencana Strategis

Perbandingan Realisasi Kinerja SasaranTahun 2025 dengan Target Akhir Renstra dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis dengan Target Akhir Rencana Strategis

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	102,84	105,47%

Sumber : Sub bag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa untuk realisasi sasaran yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Nilai Interval Konversi Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Masyarakat tahun 2025 dengan Capaian berada pada kriteria Sangat baik (105,47%) dari target akhir Renstra. Hal ini terjadi karena adanya beberapa Indikator layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah melebihi target yang ditetapkan atau telah mencapai diatas 100% dengan kategori **Sangat Baik**, seperti indikator :1). Layuanan Jumlah anak Pendidikan Usia Dasar sebesar 47.318 (173,77%), 2). Layanan Jumlah Orang terduga TBC sebesar (162,50%). 3). Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 6.183 (122,05), 4. Layanan jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar sebesar 486 (112,76%), 5). Layanan Jumlah Penderita Diabetes Militus Usia >= 15 tahun sebesar 3.080 (98,84%), 6). Layanan Jumlah Penderita Hipertensi Usia >=15 Tahun sebesar 7.963 (95.30%), 7). Layanan Jumlah orang usia 15 -59 tahun kab/kota yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 95.464 (92.17%). Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa factor utama yaitu, pelaksananaan kegiatan pelayanan dasar sesuai ketentuan SPM, optimalisasi pemanfaatan suberdaya dan dukungan pendanaan, koordinasi lintas program dan lintas sector berjalan efektif, serta peningkatan kualitas pendataan dan pelaporan kinerja secara akurat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Standar Nasional dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan
Tahun 2024 dibanding Capaian Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Target Nasional /propinsi	Realisasi Nasional/Provinsi
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	97.5	102,84	-	-

4. Bench Mark

Guna menilai tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 ada baiknya disandingkan dengan capaian kinerja Kabupaten/Kota Lain. Berikut ditampilkan tabel sandingan data kinerja baik Tujuan maupun sasaran Dinas Kesehatan . Berikut ditampilkan data pada tabel 3.8 dan 3.9

Tabel 3.8

Tujuan Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 dengan kabupaten Lombok Barat Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kota Bima			Kabupatan Lombok Barat
			Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Realisasi 2025
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	73.88	73.45	99.41%	73.03

Sumber Data: BPS Kota BimaTahun 2025

Tabel 3.9
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 dengan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kota Bima	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Bima	Kabupaten Dompu
			Jumlah Capaian 2025				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyaraka	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	102,84	103,83%	92,87	90.30%	97,85%

Sumber Data : SPM Kab/Kota NTB

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja SPM

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja SPM yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10

Analisis Keberhasilan, Kegagalan SPM Kesehatan Tahun 2025

No	Layanan SPM	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.111	2.331	74,93%	Data sasaran dari Pusdatin yang tinggi, sementara jumlah ibu hamil ril cenderung menurun setiap tahunnya menyebabkan capaian menurun.
2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.092	2.126	68.76%	Data sasaran dari Pusdatin yang tinggi, sementara jumlah ibu bersalin ril cenderung menurun setiap tahunnya

No	Layanan SPM	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						menyebabkan capaian ikut menurun.
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.899	2.098	72.37%	Data sasaran dari Pusdatin yang tinggi, sementara jumlah ibu hamil, bersalin hingga bayi baru lahir ril cenderung menurun setiap tahunnya menyebabkan capaian ikut menurun
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.861	9.518	80.55%	1. Sasaran terlalu tinggi. Mobilisas/perpindahan sasaran ke daerah lain
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan	27.231	47.318	173,77 %	Adanya program pemerintah Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada lingkungan sekolah

No	Layanan SPM	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kesehatan Sesuai Standar				menyebabkan sasaran siswa meningkat.
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103.576	95.464	92,17%	Adanya penguatan pelayanan di Posbindu dan puskesmas serta edukasi Kesehatan, dan pemanfaatan teknologi (aplikasi ASIK CKG).
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.930	13.551	80,04%	1. Sasaran masih menggunakan data Pusdatin, sehingga masih ada Puskesmas yang belum mencapai target 2. Sasaran lansia yang berkunjung ke Puskesmaas hanya sebagian saja dari sasaran yang datang (kunjungan ulang) 3. Pemberdayaan lansia yang belum optimal sehingga produktivittas lansia untuk berkunjung ke posyandu kurang.

No	Layanan SPM	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.356	7.963	95,30%	Kesadaran penderita akan risiko hipertensi mendorong mereka untuk mencari pengobatan, dukungan keluarga di lingkungan terdekat meningkatkan kepatuhan pasien dan menjalani pengobatan dan gaya hidup sehat
9.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.116	3.080	98,84%	Ketidakpatuhan pasien dalam pengobatan, pola makan serta kurangnya pengetahuan pasien tentang bahaya Diabetes Militus
10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang	431	580	134%	• Penjaringan ODMK melalui kegiatan screening di posyandu, instansi maupun Lembaga Pendidikan (UKBM/Lembaga). • Adanya pelayanan Mobile Clinick Bersama tim RSJ.

No	Layanan SPM	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				• Pelaksanaan Kunjungan rumah untuk memantau kepatuhan minum obat dan Tingkat kemandirian
11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.568	4.173	162,5%	1. Penguatan Sistem Deteksi dan Skrining Masif: Kemenkes RI meningkatkan deteksi secara aktif, terutama melalui penggunaan alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang lebih akurat dibandingkan mikroskop konvensional. 2. Perbaikan Sistem Pelaporan: Adanya perbaikan dalam sistem informasi TB Nasional yang meminimalisir pelaporan ganda dan memastikan kasus di fasyankes swasta terlaporkan. 3.Kerja Sama Lintas Sektor dan Kader: Peran aktif kader kesehatan dalam melacak kontak erat di masyarakat, termasuk di daerah padat penduduk, meningkatkan angka skrining. 4.Tingginya Faktor Risiko: Peningkatan riwayat kontak erat dengan pasien TB,

No	Layanan SPM	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						serta tingginya angka diabetes, malnutrisi, dan merokok di masyarakat meningkatkan jumlah individu yang harus diperiksa (suspek)
12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.066	6.183	122%	Screening populasi kunci tepat sasaran

Data: Diolah Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Dikes 2025

6. Nilai Efisiensi Kinerja

Tabel 3.11
Efisiensi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Efisiensi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata Rata skor INM	92	92	100%	Efisien
Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	*82,5*	*46,29*	*56,10 %*	Tidak Efisien
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	6	60%	Tidak Efisien
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7	7	100%	Efisien
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	Efisien
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	68 paket	97,14%	Tidak Efisien

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	9 Paket	9 paket	100%	Efisien
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angka Kematian Ibu*	2	4	100%	Efisien
	Cakupan Antenatal Care sesuai Standar (ANC 6 kali)	80 %	66%	82,5%	Tidak Efisien
	Presentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan pelayanan Lengkap	88%	69%	142%	Efisien
	Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap	91	98,08%	107%	Efisien
	Cakupan Balita yang di Pantau pertumbuhan dan perkembangannya	50	72%	144%	Efisien
	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	28,5	28,4	99%	Efisien
	Cakupan layanan Kesehatan lanjut usia yang mandiri	92%	98,08%	107%	Efisien
	Prevalensi Obesitas >18 Tahun	1,30%	49,2	49,2	Tidak efisien
	Prevalensi depresi di umur ≥15 th	1.30	2.49	191%	Efisien
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko KLB	100%	100%	100%	Efisien
	Persentase Pelayanan Kesehatan dalam pengurangan Risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal dalam wilayah Berpotensi bencana	100%	100%	100%	Efisien
	Cakupan Kabupaten /Kota dengan Eliminasi Malaria	100%	100%	100%	Efisien

	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	80%	84,4%	84,4%	Tidak Efisien
	Cakupan Calon Jamaah Haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Efisien
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98,60%	99,99%	99,99%	Efisien
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan kesehatan Nasional	80%	88,48%	88,48%	Tidak Efisien
	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90	80,3%	80,3%	Tidak Efisien
	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosisi	98	91,0%	91,0%	Tidak Efisien
	Cakupan ODHIV mengalami supresi Virus (Viral Land <50 kopi/m	80%	100% (19 Orang)	100%	Efisien
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,20	0,20	100%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3111	2.331	74.%	Tidak Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.092	2.126	68.76%	Tidak Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2.899	2.098	72.37%	Tidak Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.861	9.518	80.55%	Tidak Efisien
Polaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27.231	47.318	173,77 %	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103.576	95.464	92,17%	Tidak Efisien

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.930	13.551	80,04%	Tidak Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	8.356	7.963	95.30%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	3.116	3.080	98.84%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	431	580	134%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2.568	4.173	162,5%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.066	6.183	122%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 dokumen	1 dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	12 dokumen	100%	Efisien

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 dokumen	4 dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	12 dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22.639	31.276	138%	Tidak Efisien
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 dokumen	1 dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	12 dokumen	100%	Efisien
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	1Dokumen	1Dokumen	100%	Efisien
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	100%	Tidak Efisien
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 dokumen	1 Dokumen	100%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	528	424	80%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODHIV	Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	19	42	221%	Efisien
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	950	1604	168%	Efisien
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan	*Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi*	100	100	100	Efisien

Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota					
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	4	100%	Efisien
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Faskes	9 Faskes	100%	Efisien
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Efisien
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar**	**100**	**100**	**100**	Efisien
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar*	100%	100%	100%	Efisien
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan PrktikTenaga kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Efisien
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1Dokumen	100%	Efisien
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar*	*100*	*100%*	*100%*	Efisien
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Efisien

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	785	785	100%	Efisien
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1Dokumen	100%	Efisien
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi*	*100*	*100%*	*100%*	Efisien
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 orang	116 Orang	100%	Efisien
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar**	**95,5%**	**96%**	**96%**	Tidak efisien
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) se-Kota Bima	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Sarann Produksi Umot yang Memiliki izin*	*40 Fasilitas*	*63 fasilitas*	*157%*	Efisien
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 dokumen	100%	Efisien
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	110	*95*	*86%*	Tidak efisien

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 dokumen	100%	Efisien
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*	*60*	*60*	*100%*	Efisien
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan Makanan Jajanan dan	1	1 dokumen	100%	Efisien
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diawasi*	*36 produk dan 110 sarana PIRT*	*36 produk dan 110 sarana PIRT*	*100%*	Efisien
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	100	100%	Efisien
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase UKBM yang di bina**	**100**	**100**	**100%**	Efisien

Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pakta Integritas yang disepakati*	*4*	*3*	*90 %*	Tidak Efisien
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 dokumen	3 Dokumen	75%	Tidak Efisien
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah OPD yang Melaksanakan Germas*	*- 14 OPD - 5 KEcamatan - 41 Kelurahan*	*- 14 OPD - 5 KEcamatan - 41 Kelurahan*	*100*	Efisien
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Efisien
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah UKBM yang Dilakukan Supervisi dan Pembinaan*	*174*	*174*	100%	Efisien
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1 Dokumen	100%	Tidak Efisien

Sumber Data : Subag Perencanaan dan Keuangan

C. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Dinas Kesehatan 2025 sebesar Rp 130,864,274,735 untuk melaksanakan berbagai upaya dalam mencapai kineja yang sebelumnya telah disajikan. Dinas Kesehatan telah berupaya untuk memanfaatkan anggara secara efisien untuk mleaksanakan upata yang efektif untuk mencapai kinerja tersebut. Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.12
Realisasi Capaian Anggaran Dinas Kesehatan Kota BimaTahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran		
		Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian %
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata Rata skor INM	RP. 28.658.811.345	RP.28.011.301.097	97,74
Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	Rp. 7.334.944.337	RP 7.179.039.709	97,87
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Rp 2,697,164,600	Rp 2,654,483,951	98,41

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Rp 1,797,211,200	Rp 1,751,044,000	97,43
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Rp 138,970,000	Rp 130,913,814	94.20
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Rp 2,587,362,537	Rp 2,533,526,294	97,91
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 114,176,000	Rp 109,071,650	95,25
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Angka Kematian Ibu*	RP. 20.262.494.008	RP.19.825.888.099	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp 133,256,400	Rp 97,822,800	73.40

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 50,100,000	Rp 48,610,000	97.02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 238,699,900	Rp 136,755,450	57.29
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 17,891,900	Rp 8,263,900	46.18
Polaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 43,163,000	Rp 37,065,000	85.87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 424,498,524	Rp 405,971,780	95.63%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Rp 8,193,300	Rp 8,093,300	98.77%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	Rp 201,488,760	Rp 200,508,512	99.51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Sesuai standar	Rp 192,820,000	Rp 176,505,675	91.53

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Rp 7,480,000	Rp 6,500,000	86.89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp 1,001,079,400	Rp 1,001,079,400	100%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp 36,960,000	Rp 36,715,000	99.33
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Rp 29,700,000	Rp 29,670,000	99.89%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Rp 9,774,000	Rp 3,729,000	38.15%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 471,995,936	Rp 434,131,022	91.97%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 13,402,900	Rp 13,002,900	97.01%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 534,928,800	Rp 519,078,100	97.03%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 67,642,000	Rp 67,198,660	99.34%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Rp 32,840,000	Rp 12,179,800	37.08
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Rp 271,976,200	Rp 201,332,780	74.02%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 16,250,967,800	Rp 16,213,259,400	99.76%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/ Nasional yang Didistribusikan	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	100%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Rp 39,483,200	Rp 19,369,200	43.05%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 12,110,000	Rp 11,990,000	99.00%

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Rp 69,000,000	Rp 68,862,020	99.80%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODHIV	Jumlah Orang orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Rp 30,342,388	Rp 22,184,400	73.11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Rp 65,199,600	Rp 38,510,000	59.06
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	- *Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi* - *Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna*	RP. 1.061.373.000	RP. 1.006.373.289	94,81
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Rp 160,009,200	Rp 155,813,789	97.37%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Rp 811,363,800	Rp 782,580,500	96.45%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp 90,000,000	Rp 67,979,000	75.53%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai standar**	RP. 698.047.900	Rp 659.724.747	94,50
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar*	RP. 10.291.000	Rp 10.131.000	98,44
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan PrktikTenaga kesehatan	Rp 2,191,000	Rp 2,031,000	92.69
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 8,100,000	Rp 8,100,000	100%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar*	RP. 25.267.800	Rp 22.454.597	88,86
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2,700,000	Rp 0	0%
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Rp 5,917,800	Rp 5,917,800	100%

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 16,650,000	Rp 16,536,797	99.32
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi*	RP. 662.489.100	Rp 627.139.150	94,66
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Rp 662,489,100	Rp 627,139,150	94.66%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar**	RP. 481.208.000	Rp 476.098.900	98,93%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) se-Kota Bima	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Sarann Produksi Umot yang Memiliki izin*	RP. 110.984.000	Rp 110.440.000	99,50
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 110,940,000	Rp 110,440,000	99.54%

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	RP. 214.380.000	Rp 213.186.000	99,44
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 214,380,000	Rp 213,186,000	99.44
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*	Rp 340.000	Rp 340.000	100
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan Makanan Jajanan dan	Rp 340,000	Rp 340,000	100%

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah sarana Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang diawasi*	Rp 155.548.000	Rp 152.132.900	97,80
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Rp 155,548,000	Rp 152,132,900	97.80%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Persentase UKBM yang di bina**	Rp 466.825.000	Rp 245.000.000	52,48
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pakta Integritas yang disepakati*	Rp 336.720.000	Rp 245.000.000	72,76
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 336,720,000	Rp 309,269,000	91.84%
Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif	*Jumlah OPD yang Melaksanakan Germas*	Rp 77.593.000	Rp 75.349.000	97,10

Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 77,593,000	Rp 75,349,000	97.10%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah UKBM yang Dilakukan Supervisi dan Pembinaan*	Rp 52.512.000	Rp 36.343.300	69.20
Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 52,512,000	Rp 36,343,300	69.20%

Data efisiensi kinerja diatas dapat diperoleh hasil bahwa dari 48 sub kegiatan sebanyak 40 (83,33%) dengan kriteria Efisien, sebanyak 8 sub kegiatan (16,6%) dengan kriteria Tidak Efektif.

BAB IV
PEN UTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan sarana akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawabandan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima. Dokumen ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukanlangkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

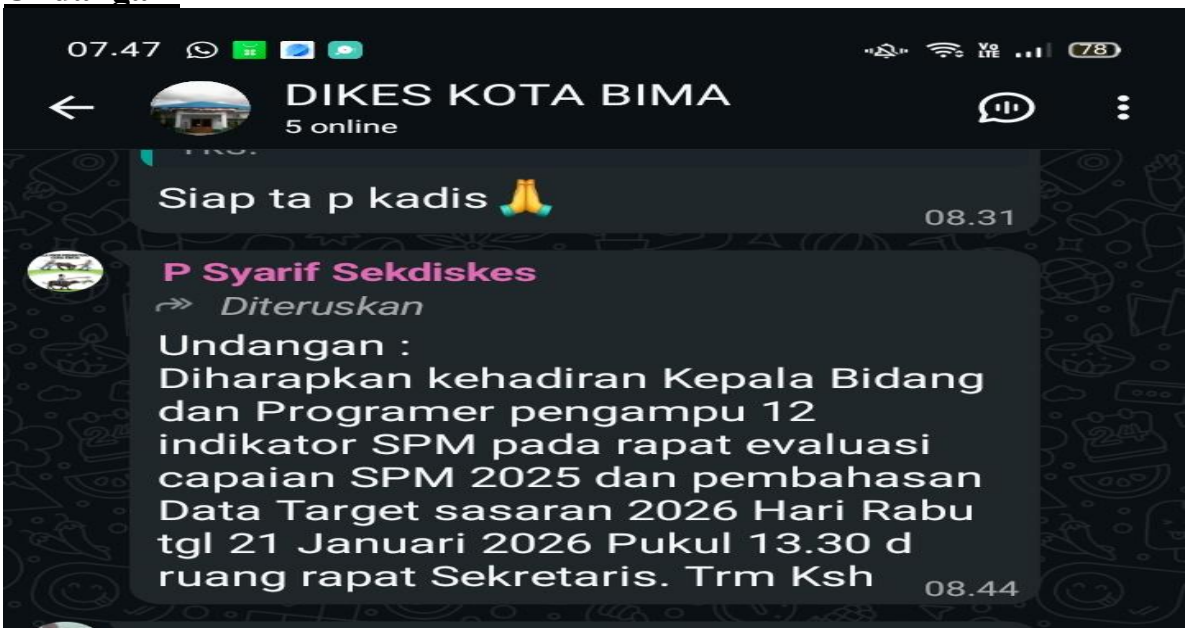
Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 sudah mencapai target sesuai Rencana Strategis;
2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 sebesar 102,84%, dengan kategori kinerja Sangat Baik;
3. Capaian kinerja 4 Program masuk kategori Sangat Baik;
4. Capaian Sub kegiatan sebesar 85,41% masuk kategori kinerja sangat baik., sub kegiatan sebesar 6,25% masuk berkatergori Baik, Sub kegiatan berkinerja Cukup Baik sebesar 8,48%,dan sub kegiatan berkinerja kurang baik sebesar 2,08% dari 48 sub kegiatan. Adapun sub kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Kinerja kurang baik karena terdapat 1 (satu) pelaksanaan kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu pertemuan pokjanal posyandu di kelurahan tidak ada realisasi anggarannya.
5. Efektivitas maupun Efisiensi Kegiatan melebihi 50% dari jumlah kegiatan dan sub kegiatan

Strategi dan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja Dinas Kesehatan tidak lepas dari keterpaduan antar program baik dalam proses perencanaan, kolaborasi kegiatan berbasis partisipasi masyarakat sehingga dukungan lintas sektor dapat lebih optimal serta sistem pencatatan pelaporan terpadu berbasis aplikasi yang memudahkan langkah monitoring evaluasi keberhasilan maupun hambatan program. Ketersediaan SDMK yang terampil dalam pelaksanaan kegiatan serta keterpaduan antar kegiatan perlu dioptimalkan.

FOTO RAPAT EVALUASI KINERJA TAHUN 2025 DAN PENETAPAN TARGET 2026

Undangan



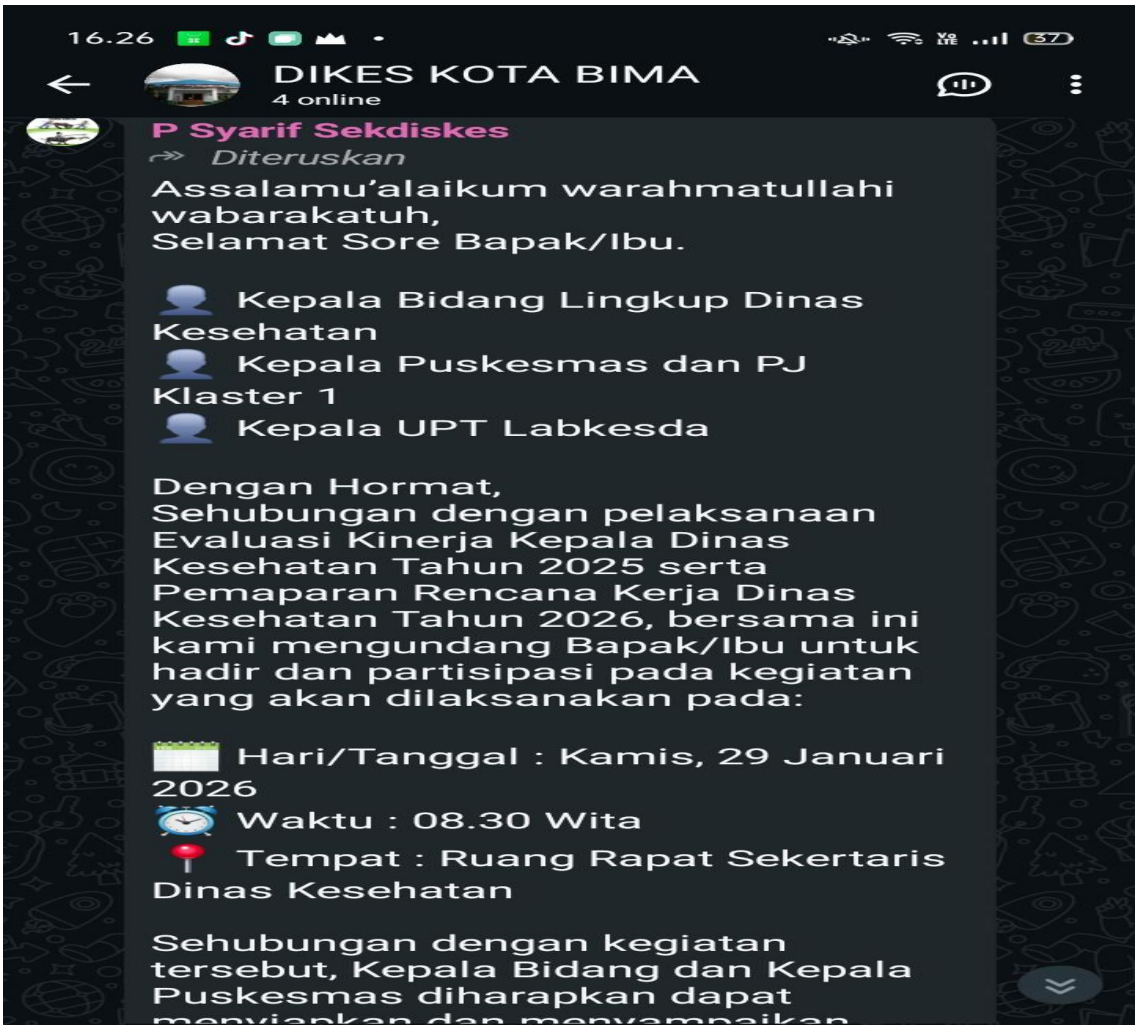


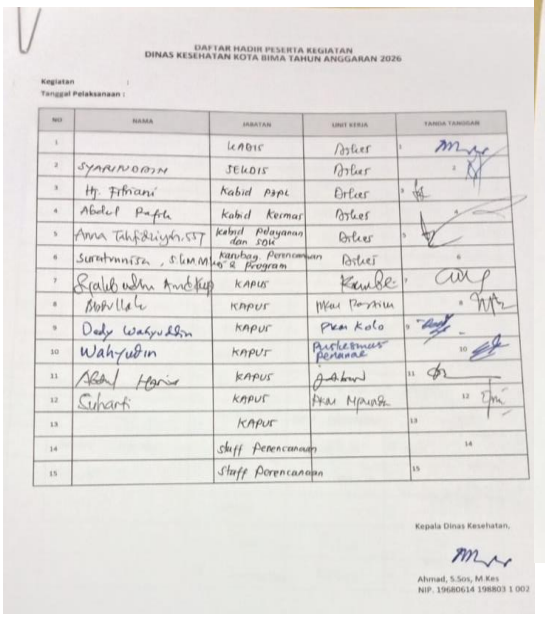
Foto Rapat







Daftar Hadir



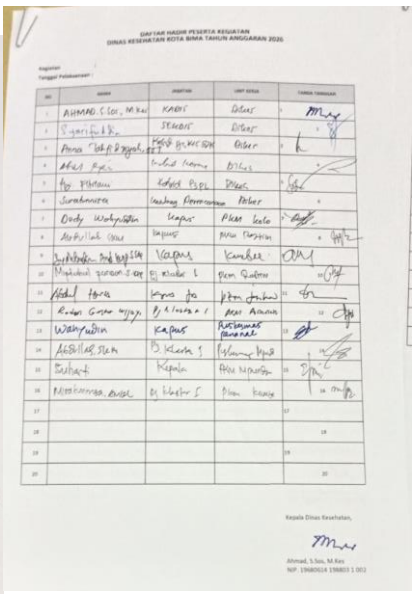
DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2026

Kegiatan :
Tanggal Pelaksanaan :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGGAN
1		KADIS	Dinkes	1
2	SYAHRUDDIN	SEKDIS	Dinkes	2
3	Hj. Fitriani	Kabid PAPL	Dinkes	3
4	Abdul Rafik	Kabid Kesmas	Dinkes	4
5	Anna Tahfiziyah, SST	Kabid Pelayanan dan SDK	Dinkes	5
6	Suratmansa, S.Sos, M.Si	Kantbag Perencanaan & Program	Dinkes	6
7	Sri Lestari, Amd.Kep	KAPUS	Kawalo	7
8	Buhaludin	KAPUS	Mpili Parsiam	8
9	Dedy Wahyudin	KAPUS	Pkm Kalo	9
10	Wahyudin	KAPUS	Puskesmas Penanae	10
11	Abdul Hariw	KAPUS	Asakota	11
12	Suharti	KAPUS	Pkm Mpunda	12
13		KAPUS		13
14		Staff Perencanaan		14
15		Staff Perencanaan		15

Kepala Dinas Kesehatan,

Ahmad, S.Sos, M.Kes
NIP. 19680614 198803 1 002



DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN
DINAS KESEHATAN KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2026

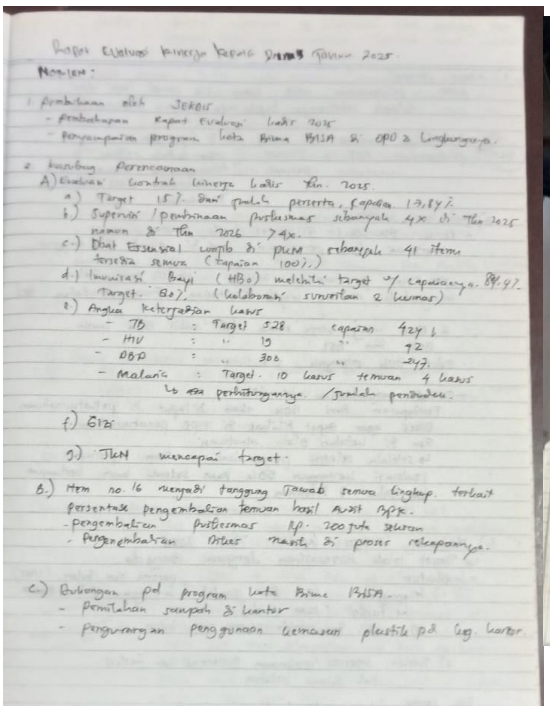
Kegiatan :
Tanggal Pelaksanaan :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGGAN
1	AHMAD, S.Sos, M.Kes	KADIS	Dinkes	1
2	Syarifuddin	SEKDIS	Dinkes	2
3	Hj. Fitriani	Kabid PAPL	Dinkes	3
4	Abdul Rafik	Kabid Kesmas	Dinkes	4
5	Anna Tahfiziyah, SST	Kabid Pelayanan dan SDK	Dinkes	5
6	Suratmansa, S.Sos, M.Si	Kantbag Perencanaan & Program	Dinkes	6
7	Dedy Wahyudin	Kapus	Pkm Kalo	7
8	Buhaludin	Kapus	Mpili Parsiam	8
9	Syahruddin, Amd.Kep, S.Kep	Kapus	Kawalo	9
10	Muhammad Zainuddin, S.Kep	Ka. Ruang I	Pkm Kalo	10
11	Abdul Hariw	Kapus ga	Pkm Asakota	11
12	Rosdiana Ginsa, Amd.Keb	Bd. Ruang I	Pkm Asakota	12
13	Wahyudin	Kapus	Puskesmas Penanae	13
14	Aisyiah, S.Kep	Ka. Ruang I	Pkm Mpunda	14
15	Suharti	Kapus	Pkm Mpunda	15
16	Nurhamsa, Amd.Keb	Bd. Ruang I	Pkm Kawalo	16
17				17
18				18
19				19
20				20

Kepala Dinas Kesehatan,

Ahmad, S.Sos, M.Kes
NIP. 19680614 198803 1 002

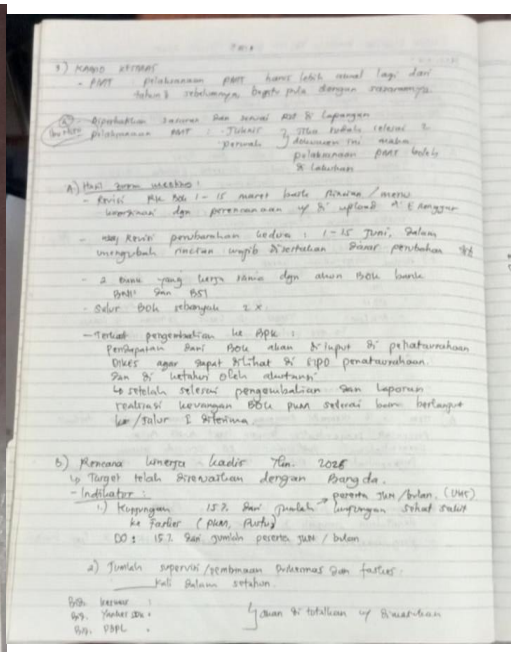
Notulen Rapat



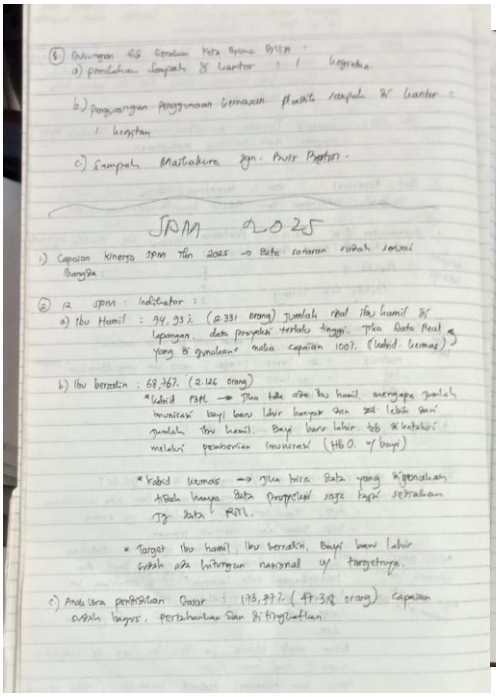
Rapat Evaluasi Kinerja Kerja Dinas Tahun 2025

Notulen :

1. Pembahasan oleh JEKDIS
   - pembahasan Rapat Evaluasi Kadis 2025
   - Penyampaian program kota Bima BISA di OPD & Lingkungannya.
2. Kantbag Perencanaan
   A) Evaluasi Capaian kinerja Kadis Thn. 2025
      a.) Target 15 Dari jumlah peserta, capaian 13,8 x
      b.) Supervisi / pembinaan puskesmas sebanyak 4x di Thn 2025 namun di Thn 2026 7 4x.
      c.) Obat Esensial wajib di PKM sebanyak 41 item tersedia semua (capaian 100%)
      d.) Imunisasi Bayi (HB0) melebihi target yg capaiannya 89,47 Target 80% (kolaborasi surveilans 2 kemas)
      e.) Angka kejadian kasus
         - TB : Target 528 capaian 424
         - HIV : " 19 " 72
         - DBD : " 306 " 247
         - Malaria : Target 10 kasus temuan 4 kasus
         Ket perbandingannya / jumlah penduduk.
      f.) GIZI
      g.) JKN mencapai target
   B.) Item no. 16 mengenai tanggung jawab semua lingkup terkait persentase pengembalian temuan hasil Audit BPK.
      - pengembalian puskesmas Rp. 200 juta lebih
      - pengembalian Dinkes masih di proses selanjutnya.
   C.) Hubungan pd program kota Bima BISA.
      - Pemilahan sampah di kantor
      - pengurangan penggunaan kemasan plastik pd lingkup kantor



3) KABID KESMAS
   - PAPT pelaksanaan PAPT harus lebih aktual lagi dari tahun2 sebelumnya bagaimana dengan rencananya
   - Sosialisasi pelaksanaan PAPT : Jumlah Jiwa total sasaran di pernah dilaksanakan PAPT belum di laksanakan
   A) Hasil zoom meeting :
   - Revisi RPK BOK 1 - 15 maret harus fisik / manual koordinasi dgn perencanaan yg di upload di E anggar
   - ada Revisi pembahasan jadwal : 1 - 15 Juni, Dalam mengajukan rincian usulan di setujui Dasar penilaian
   - 2 bank yang kerja sama dgn akun BOK bantu Bank Sulsel BSI
   - Salur BOK sebanyak 2 x
   - Terkait pengembalian ke APK :
     Pertanyaan dari BOK akan di input di pelaporan Dikes agar dapat di lihat di OPD penanggungjawab dan di ketahui oleh atasannya
     ke setelah selesai pengesahan dan laporan realisasi keuangan BOK pun selesai baru berangkat ke / salur ke Provinsi
   B) Rencana kinerja kadis Thn. 2026
   ke Target telah disesuaikan dengan Renstra dll.
   - Indikator :
      1) Kunjungan 15% dari jumlah sasaran → perorang jam / bulan (UHC)
         ke Faskes (pkm, Rsud)
         DO : 15% dari jumlah peserta JKN / bulan
      2) Jumlah supervisi / pembinaan puskesmas dan faskes :
         Kali dalam setahun
   Bidang kesmas :
   Bid. Yankes ibu :
   Bid. PAPL :
   Lanjut di setiap yg disesuaikan



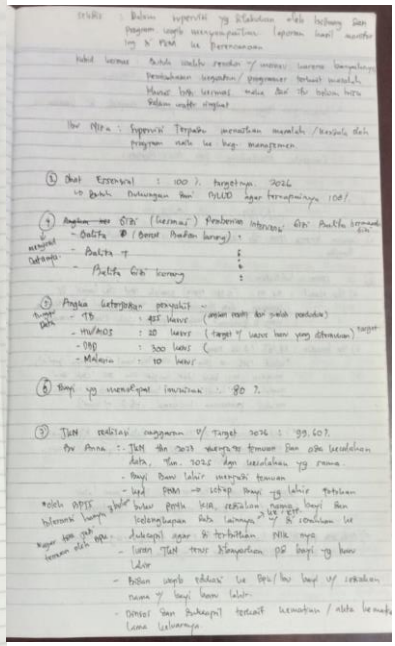


Foto Molnitoring di Puskesmas se Kota Bima Tahun 2025






Selamat Datang
DI PUSKESMAS MPUNDA KOTA BIMA




PUSKESMAS PARUGA
MINI LOKAKARYA (MINILOK) BULANAN
PUSKESMAS PARUGA



LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAPPEDA KOTA BIMA

TAHUN 2025






TAHUN ANGGARAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bima Tahun 2025 (alokasi anggaran tahun 2025 telah dapat terselesaikan. LKIP BAPPEDA sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan dan capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP ini dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang kemudian disesuaikan Kembali dengan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025-2029 setelah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2025-2029.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2025 berorientasi pada pencapaian visi dan misi dalam RENSTRA BAPPEDA Kota Bima tahun 2024 – 2026 yang berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 yang kemudian disesuaikan Kembali berdasarkan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2025-2029. Hasil penilaian capaian kinerja pada tahun 2025 yang telah dievaluasi akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Kota Bima di tahun selanjutnya.

Penyusunan laporan kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa laporan yang telah disusun tidak terlepas dari kekurangan sehingga terus harus dilakukan penyempurnaan dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja BAPPEDA Kota Bima khususnya dan kegiatan Pembangunan di Kota Bima pada umumnya.

Raba-Bima, Januari 2026
Kepala BAPPEDA,

Dr. Rusliman, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19730409 199211 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis perencanaan daerah Pemerintah Kota Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders). Oleh karenanya langkah strategis perlu segera diwujudkan dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan operasional yang nyata, produktif, efisien, efektif dan responsif dalam memecahkan berbagai permasalahan serta tantangan di Kota Bima.

Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerja Bappeda Kota Bima diperlukan adanya Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah guna lebih mengetahui kemampuan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Bappeda Kota Bima dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, informasi yang disajikan bukan hanya berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, tetapi juga harus memuat kekurangan-kekurangan yang masih dijumpai sehingga dapat dirumuskan solusi perbaikan di masa mendatang. Keberhasilan dan kekurangan tersebut terumuskan dalam pengukuran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hasil identifikasi kekurangan serta keberhasilan tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional., secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima telah dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2025 - 2029.

Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima di tahun 2025 adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang diukur dengan **Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah** yang ditargetkan diangka **80,25%** dan dapat direalisasikan sebesar **87%** atau capaian kinerja sebesar **108,41%** dan capaian ini dikategorikan sangat berhasil karena tingkat keberhasilan melampaui 100%. Keberhasilan pencapaian ini tidak terlepas dari perencanaan yang terstruktur dan sistematis dalam pengimplementasian strategi pencapaian sasaran strategis perangkat Bappeda serta dukungan, komitmen, konsistensi dan kerja keras semua unsur sumberdaya yang ada di Bappeda Kota Bima. Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima pada umumnya dan Bappeda Kota Bima khususnya. Untuk itu Bappeda Kota Bima berupaya meningkatkan pencapaian kinerjanya dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Bima.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

IKHTISAR EKSEKUTIF II

DAFTAR ISI III

DAFTAR TABEL IV

DAFTAR GAMBAR VI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.1. Dasar Hukum 2
1.3. Kedudukan dan Susunan Organisasi 3
1.3.1. Kedudukan Organisasi 3
1.3.2. Susunan Organisasi 3
1.3.3. Tugas dan Fungsi Organisasi 4
1.4 Sumber Daya Manusia 8
1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana 10
1.6. Keuangan 11
1.7. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi 11
1.8. Sistematika Penulisan 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

2.1. Perencanaan Strategis 14
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Bima 2025-2029 14
2.1.2. Visi dan Misi Jangka Menengah Perangkat Daerah 20
2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 25
2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 29
2.3. Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 59

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025 60
3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan 60
3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 60
3.2. Analisis Capaian Kinerja 61
3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 62
3.2.1.1. Perbandingan Capain Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 62
3.2.1.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Program Bappeda Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 116
3.2.1.3. perbandingan antara target dan realisasi kegiatan dan sub Kegiatan bappeda tahun 2025 dengan tahun sebelumnya 122
3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 S.d. Tahun 2025 136
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 139
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 139
3.2.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan 143
3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 144
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 169

BAB IV PENUTUP 181

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 8
Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 8
Tabel 1. 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering 9
Tabel 1. 4. Daftar Tabel Inventaris Bappeda Tahun 2024 10

Tabel 2. 1.Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Bima tahun 2025 - 2029 18
Tabel 2. 2. Perumusan Penjelasan Misi 21
Tabel 2. 3.Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda 23
Tabel 2. 4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 27
Tabel 2. 5.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah 28
Tabel 2. 6. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Bima 29
Tabel 2. 7. Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2025 (Eselon II) 32
Tabel 2. 8. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2025 (Eselon II) 34
Tabel 2. 9.Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 (Eselon II) 35
Tabel 2. 10.Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 (Eselon II) 37
Tabel 2. 11. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Eselon III) 39
Tabel 2. 12. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Eselon III) 40
Tabel 2. 13. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Eselon III) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, perekonomian dan Infrastruktur 42
Tabel 2. 14. Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Eselon III) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, perekonomian dan Infrastruktur 44
Tabel 2. 15. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Eselon IV) Kasubag Umum dan Kepegawaian 46
Tabel 2. 16.Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Eselon IV) 50
Tabel 2. 17.Penetapan Target,Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan BAPPEDA 53

Tabel 3. 1.Skala Nilai Peringkat Kinerja 59
Tabel 3. 2 Penjelasan Hasil perhitungan Keberhasilan Pencapaian 59
Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 60
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 61
Tabel 3. 5. Perbandingan Capain Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025 62
Tabel 3. 6. Persentase Keselarasan Muatan RKPD Tahun 2025 dengan Muatan RPJMD Tahun 2025-2029 64
Tabel 3. 7. Persentase Keselarasan Muatan Perubahan RKPD Tahun 20225 dengan Muatan RPJMD Tahun 2025-2029 66
Tabel 3. 8. Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Renja 2025 dan RKPD 2025 69
Tabel 3. 9. Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Renja Perubahan 2025 dan RKPD Perubahan 2025 73
Tabel 3. 10.Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Rencana kerja Anggaran (RKA) 2025 dan Renja Tahun 2025 79
Tabel 3. 11.Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Rencana kerja Anggaran (RKA) 2025 dan Renja Tahun 2025 86
Tabel 3. 12. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah 95
Tabel 3. 13.Hasil Musrembang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD 103

Tabel 3. 14.Hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti 104
Tabel 3. 15. Capaian Kinerja Program Bappeda Tahun 2025 117
Tabel 3. 16. Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 (Program Prioritas) 123
Tabel 3. 17.Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Norma,Standar,..... 132
Tabel 3. 18. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 139
Tabel 3. 19. Tabel Perbandingan IPPN dan Indeks Kualitas Perencanaan 143
Tabel 3. 20. Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025 144
Tabel 3. 21. Efisensi Anggaran Program, Kegiatan dam Sub Kegiatan Tahun 2025 146
Tabel 3. 22. Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2025..... 168
Tabel 3. 23. Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima 168
Tabel 3. 24. Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2025 169
Tabel 3. 25. Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji Bappeda Tahun 2025 170

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan 4
Gambar 1. 2. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 8
Gambar 1. 3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 9
Gambar 1. 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering 9
Gambar 1. 5.Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelaksanaan tugas Bappeda pada tahun 2024 12
Gambar 2. 1. Program dan Kegiatan Bappeda Kota Bima Tahun 2023..... 26
Gambar 3. 1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 sd 2023 136
Gambar 3. 2. Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2022 sd 2023 137
Gambar 3. 3. Mekanisme Pengukuran Keselarasan (Integrasi,SInkronisasi dan Sinergitas) 141
Gambar 3. 4. Mekanisme Perhitungan Keselarasan Integrasi dan SInkronisasi 141

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban BAPPEDA Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD.Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025 pada tahap awal mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Tahun 2024–2026 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. RPD tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024–2026 dan diturunkan menjadi Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025–2029, dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis BAPPEDA melalui penyusunan Renstra BAPPEDA Tahun 2025–2029. Renstra tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja Perubahan BAPPEDA Tahun 2025 yang mengacu pada RKPD Perubahan Tahun 2025.

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan substansi terhadap tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA Kota Bima sebagaimana tercantum dalam RPD maupun RPJMD. Oleh karena itu, indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja BAPPEDA tetap sama dan dinilai masih relevan serta selaras dengan arah kebijakan dan tujuan pembangunan daerah.

1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029
15. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026.
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025;

1.3. Kedudukan dan Susunan Organisasi

1.3.1. Kedudukan Organisasi

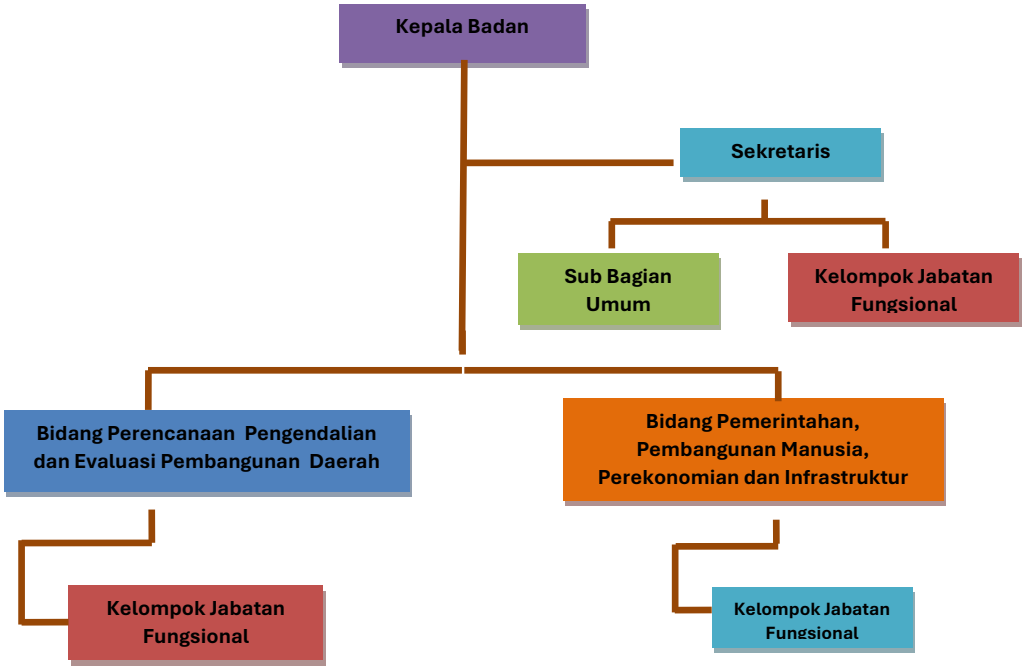
Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   a. Sub Koordinator Bidang Pemerintahan
   b. Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
4. Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastuktur ,terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   a. Sub Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
   b. Sub Koordinator Bidang Ekonomi
   c. Sub Koordinator Bidang SDA dan Lingkungan Hidup

   Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Bima adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini.



Gambar 1. 1. Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

1.3.3. Tugas dan Fungsi Organisasi

A. *Kepala Badan*

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi, pengkajian, penelitian, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengembangan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan.
Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
2) Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
3) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
6) Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
7) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RPD, RKPD dan LKPJ);
8) Pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan

peraturan Perundang- undangan;

9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;
10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. *Sekretariat*

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

1) Kordinasi penyusunan program dan anggaran;
2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga,barang milik Negara/daerah;
4) Pembinaan aparatur;
5) Pengelolaan urusan kepegawaian;
6) Pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja dan anggaran secretariat berdasarakan rencana program badan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
3. Megkoordinasikan penyusunan program kerja Badan;
4. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Badan;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secretariat; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan laindiberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
2. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
3. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketata usahaan;
4. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

C. *Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang*

1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
    a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
    b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
    c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
    d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
    e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
    f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
    g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
    h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
    i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
    j. menyajikan dan mengamankan data dan informasi pembangunan daerah
    k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
    l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
    m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;.
    n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
    o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
    p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional:

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

   a. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

D. *Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur*

1. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

   a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
   e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
   f. mengoordinasikan sinergitas dan harrnonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/kota;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harrnonisasi kegiatan Kernenterian/Lernbaga di kabupaten/kota;
   h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
   i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersarna kerjasarna antar daerah; dan
   j. mengoordinasikan pernbinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah; dan
   k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional:

4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang• undangan;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

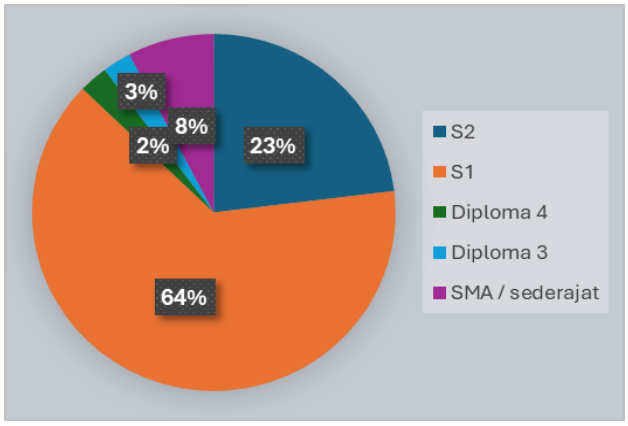
1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia BAPPEDA Kota Bima hingga akhir tahun 2025, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. 1.Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S2	9	27%
2.	S1	21	61%
3.	Diploma 4	1	3%
4.	Diploma 3	1	3%
5.	SMA / sederajat	2	6%
Total		33	100%

Sumber: BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025

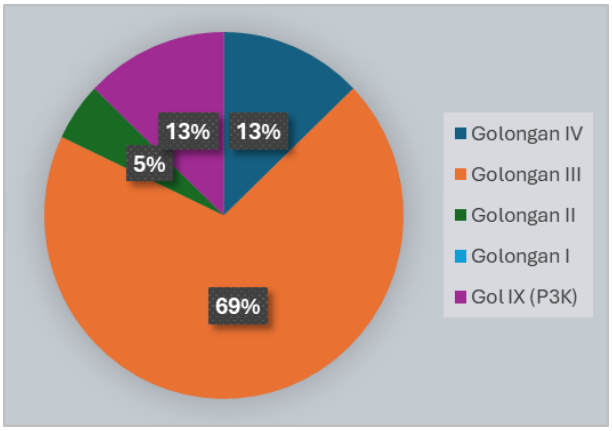


Gambar 1. 2. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1. 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	5	9%
2.	Golongan III	27	85%
3.	Golongan II	2	6%
4.	Golongan I		
5	Gol IX (P3K)	5	
Total		39	100%

Sumber : BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025

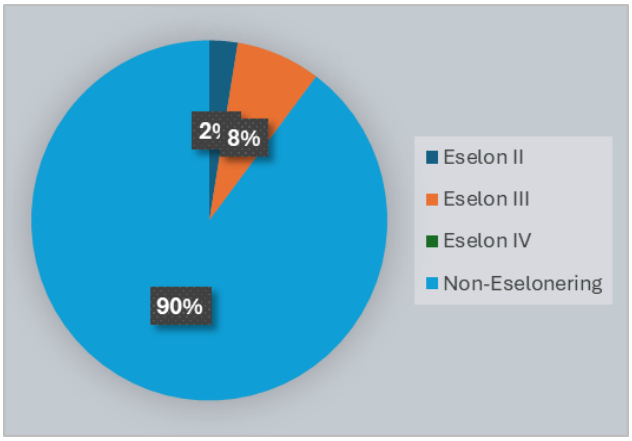


Gambar 1. 3. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	3%
2.	Eselon III	3	9%
3.	Eselon IV		0%
4.	Non-Eselonering	35	88%
Total		39	100%

Sumber : BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025



Gambar 1. 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

Berdasarkan profil SDM aparatur di atas diketahui bahwa pegawai BAPPEDA Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 25 orang (64%) adalah Strata 1, selanjutnya 9 orang (23%) memiliki tingkat pendidikan Strata 2, dan lainnya berpendidikan D.IV, D.III dan SMA/sederajat. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai BAPPEDA Kota Bima terdiri dari golongan III yaitu sebanyak 27 orang, golongan IV sebanyak 5 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan golongan IX(P3K) sebanyak 5 orang, sebagian besar kualitas Sumber Daya Manusia di BAPPEDA Kota Bima sudah cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber

daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran juga menjadi hal penting bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Bima. Untuk kondisi sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran Bappeda pada tahun 2025 sudah cukup memadai dengan adanya baru yang berada dalam kompleks kantor Walikota Bima. Disamping itu juga fasilitas ruang rapat yang dimiliki Bappeda juga cukup memadai dalam menunjang intensitas kegiatan rapat koordinasi yang cukup tinggi dilaksanakan oleh bidang-bidang. Adapun gambaran kondisi sarana dan prasarana Bappeda Kota Bima sebagaiman ditunjukan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 4. Daftar Tabel Inventaris Bappeda Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	Meja 1/2 Biro	15
2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	12
3	Meja Rapat Pejabat Eselon III	5
4	Kursi Biasa	13
5	Sepeda Motor	20
6	Exhause Fan	1
7	Camera Video	5
8	Rak Kayu	1
9	Meja Rapat	12
10	Televisi	9
11	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	3
12	Papan Nama Instansi	1
13	Kursi Tamu	1
14	Lemari Es	4
15	Camera Electronic	2
16	P.C Unit	10
17	Monitor	1
18	Global Positioning System	1
19	Meja Kerja Kayu	8
20	Filing Cabinet Besi	16
21	Alat Kantor Lainnya	1
22	Kursi Kayu	4
23	Sofa	2
24	Lap Top	27
25	A.C. Split	10
26	Layar Film/Projector	3
27	Gordyin/Kray	9
28	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23
29	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	3
30	Peralatan Personal Komputer lainnya	1
31	Palu	2
32	Rol Meter	1
33	A.C. Window	4
34	Overhead Projector	1
35	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
36	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23
37	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	25
38	Brangkas	1
39	Mainframe (Komputer Jaringan)	2
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
42	Sound System	2

Sumber: Data BMD Bappeda 2025

1.6. Keuangan

Pada tahun 2025 Bappeda Kota Bima memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.702.025.460 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. Rp 7.702.025.460dengan rincian belanja pegawai (gaji dan TPP) sebesar Rp 4.954.540.588,00 belanja barang jasa sebesar Rp. 2.747.484.872,00 dan belanja modal sebesar Rp.0 Dukungan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bima lebih khusus untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung yang meliputi 3 (tiga) program, 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan.

1.7. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang dihadapi

BAPPEDA sebagai OPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pembinaan perencanaan pembangunan daerah dihadapkan beberapa permasalahan dan isu strategis. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Pada tahun 2025, isu strategis Bappeda dapat dirumuskan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. 5.Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelaksanaan tugas Bappeda pada tahun 2025

Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2025– 2029

1.8. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Bima tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif — Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala- kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dalam ringkasan eksekutif ini juga dijelaskan langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. BAB I Pendahuluan — Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, kondisi sumber daya manusia, kondisi saran dan prasarana, kondisi keuangan, isu strategis serta sistematika penulisan LKIP.

3.	BAB II Perencanaan Kinerja	Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.
4.	BAB III Akuntabilitas Kinerja	Bab ini menyajikan metodelogi pengukuran kinerja, uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.
5.	BAB IV Penutup	Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
6.	Lampiran	Lampiran-lampiran pendukung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bima merupakan bagian dari upaya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Laporan Kinerja BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis BAPPEDA Kota Bima Tahun 2024–2026, yang memuat tujuan, sasaran, serta program strategis BAPPEDA sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda tahun 2024-2026 pada awalnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dasar penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Bappeda. Tujuan dan sasaran BAPPEDA tersebut dirumuskan selaras dengan Visi dan Misi Kota Bima Tahun 2024–2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024–2026, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian arah pembangunan daerah secara keseluruhan. Seiring dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru, dilakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang berlaku. Selanjutnya dokumen perencanaan jangka menengah Bappeda yang baru Rencana Strategis BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, serta program BAPPEDA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bima Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025–2029.

Hasil penelaahan dari dokumen RPD Kota Bima Tahun 2024 – 2026 dan dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan substansi dalam tujuan dan sasaran strategis Bappeda. Hal ini disebabkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPD 2024-2026 masih sejalan dan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD terbaru. Dengan demikian, indikator kinerja, target, serta arah pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam LKIP tetap relevan dan mencerminkan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, tanpa memerlukan penyesuaian yang bersifat mendasar.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD Kota Bima 2025-2029

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bima pada masa transisi tahun 2025 diawali dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Instruksi tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024–2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah pada periode transisi pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022, Bab V dokumen RPD tidak memuat visi dan misi kepala daerah sebagaimana terdapat dalam dokumen RPJMD. Namun demikian, Bab V RPD tetap memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan

dicapai dalam kurun waktu **Tahun 2024–2026**, sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama tiga tahun masa transisi.

Selanjutnya, seiring dengan terpilih dan dilantiknya kepala daerah definitif, arah pembangunan daerah diselaraskan kembali dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025–2029. Perumusan visi dan misi tersebut disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi Kepala Daerah menggambarkan kondisi ideal Kota Bima yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sebagai representasi dari cita-cita bersama masyarakat Kota Bima. Visi tersebut dirumuskan secara realistis, terukur, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan pembangunan, serta dinamika lingkungan strategis di tingkat regional maupun nasional. Sementara itu, **misi Kepala Daerah** merupakan penjabaran operasional dari visi yang memuat upaya-upaya strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Misi disusun dalam bentuk pernyataan umum yang mencerminkan langkah-langkah pembangunan daerah yang terarah, sistematis, dan terintegrasi lintas sektor. Misi ini menjadi pedoman utama dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

Dalam **RPJMD Kota Bima Tahun 2025–2029**, visi dan misi Kepala Daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam **tujuan dan sasaran pembangunan daerah** yang dilengkapi dengan **indikator kinerja yang terukur**. Hal ini dimaksudkan agar pencapaian visi dan misi dapat dievaluasi secara objektif melalui sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Daerah tidak hanya berfungsi sebagai komitmen politik, tetapi juga menjadi instrumen perencanaan pembangunan yang operasional dan akuntabel, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima selama periode Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil analisis dari identifikasi permasalahan daerah, maka diperoleh 6 isu trategis dalam perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan yaitu:

1. Peningkatan Keamanan, kehidupan beragama dan berbudaya
   Konsep pembangunan yang memberikan kepastian rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Bima dalam menjalankan kehidupan beragama dan sosial serta dalam pengembangan budaya dan kearifan lokal. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain:
   a. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban
   b. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, anti diskriminasi SARA, gotong royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan local
2. Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat
   Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara

berkelanjutan. Berbagai variabel yang dapat mengilustrasikan isu ini antara lain :

a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan, serta output kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kota Bima
b. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting
c. Mempromosikan budaya hidup sehat bagi masyarakat segala usia
d. Memberikan cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah
e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana sekolah, tenaga pendidik, serta output pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bima
f. Meningkatkan minat baca masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana perpustakaan yang representative
g. Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak
h. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja dengan pelatihan keterampilan kerja
i. Menumbuhkan potensi pemuda yang berprestasi dan mampu berperan dalam semua sektor pembangunan

3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan public
   a. Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
   b. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
   c. Peningkatan nilai SAKIP dan LPPD.
   d. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
   e. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4. Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi Pengembangan Infrastruktur dan pemanfaatan Teknologi Informasi
   a. Pemantapan infrastruktur yang ramah lingkungan pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa.
   b. Percepatan pengembangan transportasi massal orang dan transportasi barang yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiata serta simpul-simpul trasnportasi.
   c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
   d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan yang terintegrasi sesuai dengan karakter wilayah, untuk mewujudkan 100% terlayani sistem sanitasi perkotaan.
   e. Penyediaan sarana prasarana umum (RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Makam, dll) yang berkualitas dan merata.
   f. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik serta mengintegrasikan dengan sumber air baku sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
   g. Percepatan pengembangan jaringan jalan dan infrasruktur perkotaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   a. Pengelolaan persampahan yang terintegrasi
   b. Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam menjaga ketahan air, pangan dan energi
   c. Melatih dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.

d. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencan antara lain command center, jaringan pemadaman kebakaran, pos tangga darurat dan lain sebagainya.
e. Penguatan Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) dan Kelurahan Siaga Bencana (KSB)

6. Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif
   a. Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan.
   b. Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas lokal unggulan yan mampu berdaya saing dan berkelanjutan.
   c. Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk lokal berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
   d. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
   e. Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuhkembangnya ekonomi lokal dan UMKM.
   f. Mendorong berkembangnya ekonomi digital melalui ekonomi kreatif

Enam isu trategis tersebut dikembangkan menjadi tujuan dan sasaran untuk perbaikan terhadap perencanaan pembangunan selama tiga tahun kedepan, mulai dari tahun 2025 yang akan dikerjakan oleh Penjabat Walikota sampai dengan tahun 2029 di Kota Bima.

Tabel 2. 1.Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kota Bima tahun 2025 - 2029

Permasalahan Daerah	Isu KLHS	Isu Nasional	Isu Regional Provinsi NTB	Isu Strategi Pembangunan Kota Bima
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat belum optimal - Angka Pelanggaran Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan (K3) yang masih tinggi - Nilai agama, budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal	Kurangnya Kepastian Hukum, serta lemahnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Geopolitik dan Geoekonomi	Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah	Peningkatan Keamanan, Kehidupan Beragama Dan Berbudaya
- Rendahnya Nilai Indeks RB	Lemahnya Kapasitas Kelembagaan, Birokrasi dan belum optimalnya pelayanan public	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- Masih rendahnya kualitas Sumber daya Manusia Kota Bima - Umur Harapan Hidup Masyarakat Kota Bima yang masih rendah - Rata-rata Lama Sekolah yang masih rendah - Kontribusi perempuan di dalam proses pembangunan masih rendah - Daya saing SDM Kota Bima yang masih rendah - Sedikitnya masyarakat Kota Bima yang	Masih Rendahnya Taraf Kesehatan Masyarakat Masih Rendahnya Kualitas maupun kuantitas Pendidikan	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan dan pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan bermartabat

Permasalahan Daerah	Isu KLHS	Isu Nasional	Isu Regional Provinsi NTB	Isu Strategi Pembangunan Kota Bima
berprestasi di Tingkat Nasional				
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup - Meningkatnya suhu perkotaan - Indeks risiko bencana pada level sedang	Degradasi LingkunganHidup, Perubahan Iklim dan Mitigasi bencana	Krisis Lingkungan	Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- Belum optimalnya pelayana infrastruktur wilayah - Kumuh kawasan perkotaan	Belum Optimalnya Konektivitas dan infrastruktur Dasar Wilayah Kurangnya Daya Saing Wilayah			Pengembangan Infrastruktur dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Adanya Peningkatan Indeks Gini periode 2019-2022 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang masih lebih tinggi daripada Provinsi NTB - Rendahnya tingkat pendapatan, produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam Masyarakat - Masih ada kemiskinan ekstrem di Kota Bima	Masih Tingginya angka Pengangguran dan kurangnya Kualitas Tenaga Kerja Masih tingginya angka Kemiskinan	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif Rendahnya Produktivitas	Penurunan Tingkat Kemiskinan Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	Percepatan penanggulangan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif

Sumber: Bappeda kota Bima (Hasil Analisis), 2025

2.1.2. Visi dan Misi Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi Pembangunan Kota Bima tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan"**. Visi ini memiliki tiga kata kunci yaitu: Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Masing-masing kata kunci ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

a. **Maju:**

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pembangunan yang merata, serta tingkat kemajuan ekonomi yang baik. Membangun daerah yang maju dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya, meningkatkan inovasi dan mendorong kolaborasi.

Prinsip membangun daerah yang maju meliputi:

- Partisipatif
- Terpadu
- Menghargai keanekaragaman
- Mengintegrasikan tata ruang dengan pembangunan
- Menggunakan lahan secara efisien
- Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah yang maju juga harus memenuhi indikator keberhasilan, seperti: Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks gini ratio (pemerataan penghasilan), Angka pengangguran rendah, dan Angka kemiskinan rendah.

b. **Bermartabat:**

Daerah yang bermartabat adalah daerah yang masyarakatnya memiliki martabat, yaitu masyarakat yang berdaya, berpendidikan, dan memiliki akses kesehatan yang memadai. Kata bermartabat juga merujuk kepada nilai-nilai yang kita anut yang menunjukkan eksistensi atau identitas kita sebagai masyarakat Bima yang Maja Labo Dahu.

Untuk mewujudkan daerah yang bermartabat, Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai program, seperti: Mengurangi angka pengangguran, Meningkatkan kualitas pendidikan, Membangun infrastruktur yang memadai, Menyediakan layanan kesehatan yang mutakhir, serta Meningkatkan daya saing masyarakat.

c. **Berkelanjutan:**

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Pembangunan ini juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan generasi masa depan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah: (1) Memaksimalkan sumber daya alam, (2) Tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, (3) Tidak ada pemborosan dalam penggunaan SDA, (4) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan, dan (5) Meningkatkan useable resources.

Tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

- Menjamin keutuhan lingkungan hidup;
- Menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan;
- Membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil;
- Melindungi hak-hak generasi mendatang.

Untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 Misi:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
4. Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
5. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 2. Perumusan Penjelasan Misi

No	Misi	Pokok-Pokok Misi	Penjelasan
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya	Berketahanan sosial, Religius, Berbudaya	• **Berketahanan sosial** adalah kondisi suatu Masyarakat yang mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan sosial juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan kekuatan dan kelebihan daerah/masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. • Masyarakat **religius** adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai keagamaan dan spiritual, serta saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda keyakinan. Nilai-nilai keagamaan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ritual ibadah. • Masyarakat **berbudaya** adalah masyarakat yang memiliki norma, nilai, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh kebudayaan yang dapat diwariskan yaitu: adat istiadat, kebiasaan, hukum adat, pakaian adat, rumah adat tradisional, alat musik tradisional, tarian adat tradisional, lagu daerah, makanan khas.
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing	Sumber daya manusia yang Maju, Berdaya Saing	Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan, baik itu pembangunan nasional, daerah, maupun desa/kelurahan. SDM yang berkualitas dapat mendorong kemajuan dan kemandirian daerah. **SDM yang Maju** adalah SDM yang berkualitas dan memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang tinggi. Ciri-ciri SDM yang maju adalahyaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif, mampu mengatasi masalah, terampil dan berpengetahuan, serta memiliki kesehatan dan gizi yang optimal. Sementara **SDM yang berdaya saing** adalah SDM yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan karakter yang unggul sehingga mampu bersaing dan berkontribusi dalam Pembangunan.
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional	Tata kelola pemerintahan yang bersih, Pemerintahan yang profesional	**Tata kelola pemerintahan yang bersih** adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dapat dicapai dengan: • *Membangun integritas,* Membangun integritas yang tinggi dalam pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. • *Memastikan transparansi* Pemerintahan yang transparan memberikan akses terbuka bagi publik untuk memperoleh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan penggunaan sumber daya publik. • *Menjamin akuntabilitas* Para pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada publik dan lembaga-lembaga pengawas. • *Melakukan evaluasi kinerja* Melakukan evaluasi teratur terhadap kinerja pemerintah dan lembaga-lembaga publik. • *Memanfaatkan teknologi* Perkembangan teknologi telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. • *Melibatkan masyarakat* MelibaStkan masyarakat dalam proses perbaikan dan pembangunan. • *Menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis* Pemerintahan yang bersih selalu memberlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

No	Misi	Pokok-Pokok Misi	Penjelasan
			Pemerintahan yang profesional adalah pemerintahan yang mampu menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan baik, tepat waktu, dan berintegritas tinggi. Pemerintahan yang profesional dapat diwujudkan melalui berbagai strategi, seperti reformasi birokrasi, meritokrasi ASN, penegakan hukum, dan peningkatan akuntabilitas.
4	Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan	Ketahanan ekologi, Pembangunan terintegrasi, Pembangunan berkelanjutan	**Ketahanan ekologi** adalah kemampuan ekosistem untuk bertahan dan pulih dari gangguan. Ketahanan ekologi juga dapat diartikan sebagai kemampuan ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan. **Pembangunan berketahanan ekologi** adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Pembangunan ini juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. **Pembangunan terintegrasi** adalah pendekatan pembangunan yang menggabungkan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. **Pembangunan berkelanjutan** adalah proses pembangunan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Untuk mewujudkan pembangunan berketahanan ekologi, terintegrasi dan berkelanjutan dapat dilakukan antara lain dengan: • Menata ruang yang mempertimbangkan aspek perubahan iklim • Menguatkan instrumen pengendali iklim • Menguatkan kapasitas *stakeholders* • Melakukan koordinasi multi sektor dan jenjang • Melakukan perlindungan sosial terhadap masyarakat yang terdampak • Mengimplementasikan aksi ketahanan iklim nasional.
5	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan	Ekonomi inklusif, Pembangunan berkeadilan dan merata, Ekonomi berkelanjutan	**Ekonomi inklusif** adalah konsep pembangunan ekonomi yang memberikan kesempatan dan akses yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. **Pembangunan berkeadilan dan merata** adalah pembangunan yang dilakukan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. **Ekonomi berkelanjutan** adalah sistem ekonomi yang bertujuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Ekonomi berkelanjutan juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Peran pemerintah untuk membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan antara lain: (1) menyediakan infrastruktur yang memadai, (2) menyediakan jaring pengaman sosial yang memadai, (3) mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung ekonomi inklusif, serta (4) mendukung lembaga keuangan berbasis komunitas.

Sumber : RPJMD Kota Bima Tahun 2025 - 2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima, Bappeda perlu menetapkan tujuan dan sasarannya. Tujuan dan sasaran Bappeda merupakan turunan dari Misi Ketiga Pemerintah Kota Bima yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan profesional.

Disamping itu, penetapan tujuan dan sasaran ini juga perlu dilakukan agar program dan kegiatan serta sumber daya yang dimiliki dapat terarah dan fokus pada hasil yang diinginkan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan hasil merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran Bappeda Kota Bima digambarkan pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2. 3.Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2025	2026
Meningkatkan kualitas perencana-an pem -bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Indeks kualitas Perencana-an Pem -bangunan daerah	Angka	80,25	81,25	82,25	83,25	84,25

Sumber: Hasil Analisa 2025

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah juga dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Tujuan jangka menengah Bappeda adalah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akan dicapai melalui sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja indeks kualitas perencanaan Pembangunan daerah. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan indikator kinerja utama Bappeda yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan dan penganggaran daerah disusun secara selaras, sinergis, serta didukung oleh mekanisme pengendalian dan monitoring evaluasi (monev) yang efektif. Secara lebih spesifik, indikator tersebut diformulasikan sebagai berikut:

Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah :
(45%*Aspek Integrasi) + (35%*Aspek Sinergi) + (20%*Aspek Monev)

Indeks ini dibangun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu **Aspek Integrasi/Keselarasan**, **Aspek Sinergi**, serta **Aspek Pengendalian dan Monitoring Evaluasi**, yang masing-masing memiliki bobot sesuai tingkat kontribusinya terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1. **Aspek Integrasi/Keselarasan** merupakan komponen utama dalam pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan bobot sebesar **45 persen**, yang mencerminkan tingkat keterpaduan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Aspek ini menilai sejauh mana perencanaan pembangunan tahunan disusun selaras dengan arah, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. yang menggambarkan tingkat konsistensi dan keterpaduan antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Aspek ini diukur melalui keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD/RPD pada tingkat program (indikator & target), keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD pada tingkat program,

kegiatan, dan subkegiatan (indicator & target), serta keselarasan RKA Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah pada tingkat subkegiatan (target). Tingginya capaian pada aspek ini menunjukkan bahwa perencanaan tahunan telah disusun secara konsisten dengan arah dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Pengukuran aspek ini dilakukan melalui tiga variabel utama.

a. Variabel pertama adalah rata2 **Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD dan persentase keselarasan muatan RKPD-P dengan RPJMD tapada tingkat program**, dengan bobot **30 persen**. Variabel ini menggambarkan konsistensi antara program pembangunan tahunan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

b. Variabel kedua adalah rata rata **Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD dan Persentase Keselarasan muatan Renja-P dengan muatan RKPD-P**, yang memiliki bobot terbesar yaitu **40 persen**. Variabel ini menilai tingkat kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah terhadap prioritas, sasaran, serta program yang telah ditetapkan dalam RKPD demikian juga untuk renja perubahan, dan RKPD Perubahan untuk memastikan keterpaduan perencanaan lintas perangkat daerah.

c. Variabel ketiga adalah rata-rata **Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja dan Persentase Keselarasan muatan RKA-P Perangkat Daerah dengan muatan Renja _P**, dengan bobot **30 persen**. Variabel ini mengukur kesesuaian penganggaran terhadap perencanaan, khususnya pada tingkat subkegiatan, sehingga alokasi anggaran yang disusun dalam RKA benar-benar mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD begitu juga dengan keselarasan antara RKA Perubahan dengan Renja Perubahan.

Secara keseluruhan, capaian Aspek Integrasi/Keselarasan menunjukkan kualitas konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah. Semakin tinggi nilai pada aspek ini, semakin baik tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

2. **Aspek Sinergi** memiliki bobot sebesar **35 persen**, yang menilai tingkat keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta partisipasi pemangku kepentingan. Aspek ini diukur melalui rasio alokasi anggaran yang mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD dan APBD, serta persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD. Aspek ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan sumber daya ke prioritas pembangunan serta mengakomodasi aspirasi masyarakat secara proporsional. Pengukuran Aspek Sinergi dilakukan melalui dua variabel utama dengan bobot yang seimbang.

   a. Variabel pertama adalah **Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD pada APBD**, dengan bobot **25 persen**. Variabel ini menunjukkan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam mengarahkan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga perencanaan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga didukung secara nyata melalui penganggaran.

   b. Variabel kedua adalah **Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD**, dengan bobot **25 persen**. Variabel ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sekaligus

menunjukkan sejauh mana aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian Aspek Sinergi menunjukkan efektivitas keterpaduan antara kebijakan perencanaan, penganggaran, dan partisipasi masyarakat. Semakin tinggi nilai pada aspek ini, semakin kuat sinergi antar aktor dan instrumen pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

3. **Aspek Pengendalian dan Monitoring Evaluasi (Monev)** merupakan bagian penting dalam pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan bobot sebesar 20 persen, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap proses serta hasil perencanaan pembangunan daerah. Aspek ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana serta hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan kebijakan periode berikutnya. Aspek Pengendalian dan Monev diukur melalui persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

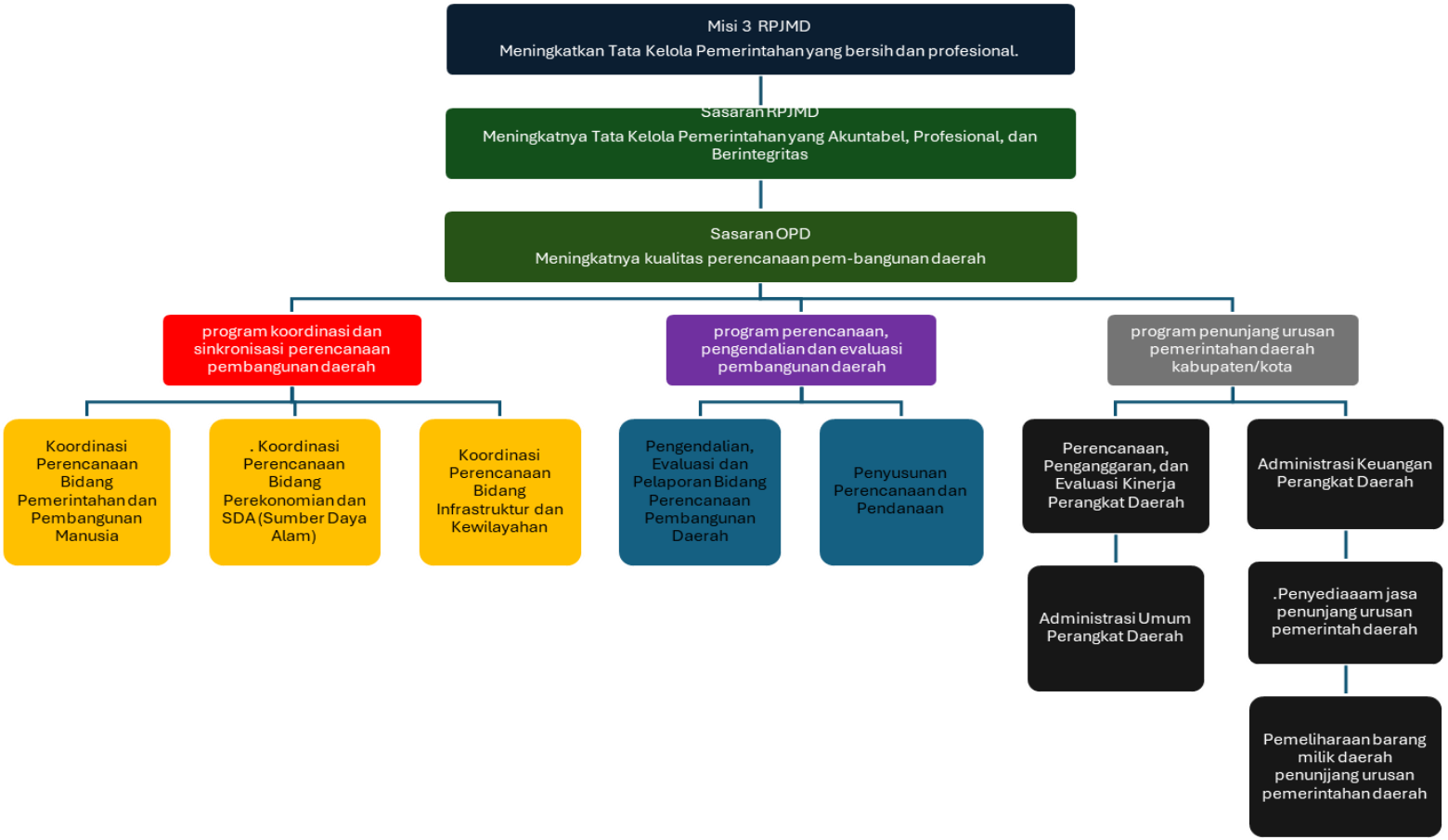
   Pengukuran aspek ini dilakukan melalui satu variabel utama, yaitu **Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monitoring evaluasi yang dilaksanakan**, dengan bobot **100 persen**. Variabel ini mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari proses pengendalian dan monev ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, baik dalam bentuk perbaikan perencanaan, penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan, maupun penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Tingginya capaian pada aspek ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan monev telah berjalan secara efektif dan berfungsi sebagai umpan balik (feedback) dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Aspek Pengendalian dan Monev berperan strategis dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Strategi merupakan langkah taktis yang mencakup program sebagai prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bappeda yang tertuang dalam RPJMD berubah menyesuaikan dengan aturan/pedoman tersebut Hal itu berimplikasi pada dilakukannya perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Bima juga pada tahun 2025.

Adapun strategi yang mencakup program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah Bappeda Kota Bima tahun 2025 sebagaimana ditunjukan dalam gambar 2.1 dan tabel 2.3 berikut ini.



Gambar 2. 1. Program dan Kegiatan Bappeda Kota Bima Tahun 2025

Tabel 2. 4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik
		Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Tabel 2. 5.Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,25	81,25	82,25	83,25	84,25
	Sasaran Program	Indikator Program					
1.	Meningkatnya keselarasan program,kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95	95,25	95,50	95,75	96
		Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95	95,25	95,50	95,75	96
		Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam	95	95,25	95,50	95,75	96

		dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan					
2.	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	95	95,25	95,50	95,75	96
	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	65	65,25	65,50	65,75	66

Sumber : Renstra Bappeda Tahun 2025-2029

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Bappeda Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	= Aspek integrasi (45%) + Aspek Sinergi (35%) + Aspek Monev (20%)

Sumber: Renstra Tahun 2025-2029

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, selaras dan konsisten secara substantif antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga dimaknai sebagai perumusan program pembangunan harus benar-benar terukur dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian visi misi daerah maupun tujuan dan sasaran seluruh perangkat daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah juga dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) disusun untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan keterpaduan, sinergi, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh.

1. Aspek Integrasi/Keselarasan

Aspek integrasi/keselarasan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keterpaduan antar dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah agar pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan. Indikator pada aspek ini meliputi:

- Rata-rata Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (program,indicator dan target) dan Persentase keselarasan muatan RKPD-P dengan muatan RPJMD (program,indicator dan target), yang menggambarkan sejauh mana program pembangunan tahunan telah mengacu dan selaras dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

- Rata-rata Persentase keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program,kegiatan dan sub kegiatan termasuk keselarasan indicator dan target) dan Persentase keselarasan muatan Renja-P Perangkat Daerah dengan muatan RKPD-P (program,kegiatan dan sub kegiatan termasuk keselarasan indicator dan target) , yang menunjukkan konsistensi perencanaan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan rencana pembangunan daerah tahunan termasuk juga keselarasan antara Renja Perubahan dan RKPD Perubahan.
- Rata-rata Persentase keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (subkegiatan dan target) dan Persentase keselarasan muatan RKA-P Perangkat Daerah dengan muatan Renja-P (subkegiatan dan target), yang mencerminkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Termasuk juga keselarasan antara RKA Perubahan dan Renja Perubahan.

Melalui indikator-indikator tersebut, BAPPEDA memastikan tidak terjadinya tumpang tindih maupun penyimpangan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

2. Aspek Sinergi

Aspek sinergi digunakan untuk mengukur tingkat keterpaduan dan kolaborasi antar perangkat daerah serta antara kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Indikator pada aspek ini meliputi:

- Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memfokuskan sumber daya anggaran pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
- Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD, sebagai indikator partisipasi masyarakat dan efektivitas mekanisme perencanaan partisipatif dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Indikator aspek sinergi ini memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya bersifat sektoral, tetapi juga terkoordinasi, partisipatif, dan sejalan dengan kebijakan pembangunan.

3. Aspek Pengendalian dan Monitoring Evaluasi (Monev)

Aspek pengendalian dan monitoring evaluasi (monev) bertujuan untuk mengukur efektivitas tindak lanjut atas hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator pada aspek ini adalah:

- Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang dilaksanakan, yang menggambarkan sejauh mana hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.

  Indikator ini menegaskan peran BAPPEDA dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah bersifat adaptif, berbasis kinerja, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu pada RPJMD, IKU, dan anggaran atau DPA.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. ADISAN**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.A.RAHMAN, S.E.**
Jabatan : Walikota Bima

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 21 Februari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
H. A. RAHMAN, S.E	Drs. ADISAN
	NIP. 19650729 200501 1 004

Gambar 2. 2. Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda (Eselon II) Tahun 2025

Tabel 2. 7. Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2025 (Eselon II)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	**Sasaran Strategis Perangkat Daerah**		
1.	Meningkatknya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,25%
B.	**Sasaran Program/Capaian Program**		
1.	Meningkatnya keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan	Persentase keselarasan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
		Persentase keselarasan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
		Persentase keselarasan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%
2.	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perekonomian	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	95,00%
3.	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pengendalain dan monev yang ditindaklanjuti	95,00%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 706.431.000	APBD
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.443.420.200	APBD
	J U M L A H	**Rp 2.149.851.300**	

Kota Bima, 21 Februari 2025

Walikota,

H. A. RAHMAN, S.E

Kepala,

Drs. ADISAN

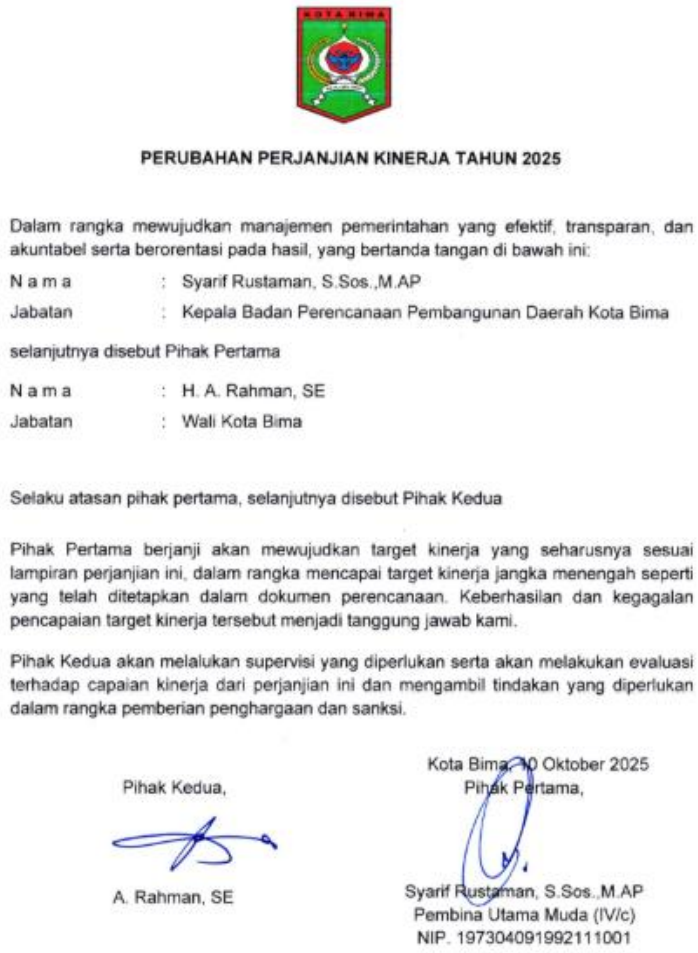
NIP. 19650729 200501 1 004

Pada perjanjian kinerja tahun 2025 target realisasi indikator Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima adalah sebesar 80,25%%. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada periode penilaian ini dilakukan dalam kondisi belum tersedianya data baseline kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan dan penyempurnaan formula perhitungan capaian IKU, khususnya pada indikator yang mengukur aspek integrasi, sinergi, serta pengendalian dan monitoring evaluasi (monev) perencanaan pembangunan daerah.

Formula perhitungan IKU BAPPEDA yang baru dirancang untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif dan proporsional, dengan mempertimbangkan bobot aspek dan bobot variabel secara terintegrasi. Dalam formula ini, capaian masing-masing variabel dihitung berdasarkan persentase realisasi, kemudian dikalikan dengan bobot variabel, dan selanjutnya diakumulasi sesuai bobot aspek yang telah ditetapkan. Perubahan metodologi pengukuran ini menyebabkan data capaian pada periode sebelumnya tidak dapat digunakan secara langsung sebagai pembanding (baseline) karena perbedaan pendekatan dan struktur penghitungan kinerja.

Oleh karena itu, penetapan target IKU BAPPEDA dilakukan melalui pendekatan normatif dan rasional, dengan menggunakan target ideal (expected performance) sebagai acuan awal. Target capaian pada masing-masing variabel ditetapkan berdasarkan tingkat kesesuaian dan keterlaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah yang diharapkan, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, praktik perencanaan yang berlaku, serta kapasitas aktual perangkat daerah.

Sebagaimana tercantum dalam tabel, aspek Integrasi diberikan bobot terbesar, yaitu sebesar 45 persen, mengingat peran strategis BAPPEDA dalam memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Aspek Sinergi diberikan bobot 35 persen untuk menilai tingkat keterpaduan prioritas pembangunan daerah dan nasional serta efektivitas perencanaan partisipatif. Sementara itu, aspek Pengendalian dan Monitoring Evaluasi (Monev) diberikan bobot 20 persen sebagai ukuran efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, capaian IKU BAPPEDA yang diperoleh merupakan capaian awal (initial performance) yang berfungsi sebagai baseline kinerja baru untuk periode penilaian selanjutnya. Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja secara berkelanjutan, penyesuaian target pada tahun berikutnya, serta penyempurnaan sistem pengukuran kinerja agar semakin akurat, objektif, dan akuntabel.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : H. A. Rahman, SE
Jabatan : Wali Kota Bima

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,

A. Rahman, SE

Pihak Pertama,

Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197304091992111001

Gambar 2. 3. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Bappeda (Eselon II) Tahun 2025

Tabel 2. 8. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2025 (Eselon II)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah			
1.	Meningkatknya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,25%
B. Sasaran Program/Capaian Program			
1.	Meningkatnya keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan	Persentase keselarasan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
		Persentase keselarasan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
		Persentase keselarasan program/kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%
2.	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perekonomian	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	95,00%
3.	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil pengendalain dan monev yang ditindaklanjuti	95,00%

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	419.788.000	APBD
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.222.573.772	APBD
	J U M L A H	**Rp**	**1.642.361.772**	

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Wali Kota,

A. Rahman, SE

Kepala,

Syarif Rustaman, S.Sos ,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197304091992111001

Dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, tidak terdapat perubahan terhadap indikator kinerja maupun target kinerja yang telah disepakati. Seluruh indikator dan target kinerja tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perubahan yang terjadi hanya terbatas pada aspek anggaran, yang disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyesuaian alokasi anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran, maupun perubahan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian anggaran tersebut tidak mempengaruhi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dengan demikian, Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tetap konsisten dalam mengukur pencapaian kinerja berdasarkan indikator dan target yang sama, sementara perubahan anggaran merupakan bagian dari upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap mendukung pencapaian sasaran kinerja secara efektif dan akuntabel.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **AHMAD, ST.**

Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **Drs. ADISAN**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004

Kota Bima, 21 Februari 2025
Pihak Pertama,

AHMAD, ST.
NIP. 19710323 201001 1 006

Gambar 2. 4.Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 (Eselon II)

Tabel 2. 9.Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 (Eselon II)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A. Sasaran Program/Capaian Program			
1.	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100%
B. Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan			
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
2.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
4.	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat	100%
5.	Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Terwujudnya layanan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah yang memadai	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Terpenuhnya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 102.478.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.112.752.403	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 15.762.000	APBD
4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Rp. 7.935.300	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 520.284.380	APBD
6.	Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 199.114.000	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 72.220.000	APBD
	JUMLAH	**Rp 6.030.546.083**	

Kepala,

Drs. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004

Kota Bima, 21 Februari 2025
Plt. Sekretaris,

AHMAD, ST.
NIP. 19710323 201001 1 006



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ririn Kurniawati, ST.,MT

Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP	Ririn Kurniawati, ST.,MT
Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina (IV/a)
NIP. 19730409199211100 1	NIP. 197712222002122005

Gambar 2. 5.Penetapan Perubahan
Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 (Eselon II)

Tabel 2. 10.Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris Tahun 2025 (Eselon II)

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	A. Sasaran Program/Capaian Program		
1.	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100%
B.	Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan		
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3.	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
4.	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat	100%
5.	Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Terwujudnya layanan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah yang memadai	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Terpenuhnya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp 83.823.000	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.185.761.888	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 14.031.000	APBD
4.	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Rp. 14.280.000	APBD
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 545.633.800	APBD
6.	Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 145.400.000	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 70,734,000	APBD
	JUMLAH	**Rp 6.059.663.688**	

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Kepala,

Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197304091992111001

Sekretaris,

Ririn Kurniawati, ST.,MT
Pembina (IV/a)
NIP. 197712222002122005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD SURYANSYAH, SE.,M.AP**

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADISAN**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 21 Februari 2025

Pihak Kedua,

Drs. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004

Pihak Pertama,

AHMAD SURYANSYAH, SE.,M.AP
NIP. 19800705 200901 1 010

Gambar 2. 6. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Eselon III) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel 2. 11. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Eselon III) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A. Sasaran Program/Capaian Program			
1.	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	95,00%
B. Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan			
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal Standar Pedoman Ketentuan)	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	95,00%
2.	Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD dan APBD	Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD dan APBD	70,00%
		Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKPD dan APBD	70,00%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3.	Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	Personates hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	70,00%



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG P2EPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BIMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ahmad Suryansyah, SE.,M.AP

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196507292005011004

Pihak Pertama,

Ahmad Suryansyah, SE.,M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 198007052009011010

Gambar 2. 7. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Eselon III) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tabel 2. 12. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Eselon III) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A. Sasaran Program/Capaian Program			
1.	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	95,00%
B. Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan			
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal Standar Pedoman Ketentuan)	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	95,00%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD dan APBD	Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD dan APBD	70,00%
3.	Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	70,00%

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan perencanaan dan pendanaan		Rp 336.910.000	APBD
2.	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah		Rp 82.878.000	APBD
		JUMLAH	Rp 419.788.000	

Kepala,

Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196507292005011004

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Kepala Bidang P2EPD,

Ahmad Suryansyah, SE.,M.AP
Pembina (IV/a)
NIP. 198007052009011010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARTA SHABRAN KHARJA, ST.,M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. ADISAN**
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004

Kota Bima, 21 Februari 2025
Pihak Pertama,

MARTA SHABRAN KHARJA, ST.,M.Si
NIP. 19820313 201001 1 019

Gambar 2. 8 Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Eselon III) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, perekonomian dan Infrastruktur

Tabel 2. 13. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Eselon III) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, perekonomian dan Infrastruktur

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	A. Sasaran Program/Capaian Program		
1.	Meningkatnya keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan	Persentase keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
		Persentase keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
		Persentase keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%
	B. Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan		
1.	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program, kegiatan, dan sub kegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (sub kegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
2.	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program, kegiatan, dan sub kegiatan) bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (sub kegiatan) bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
3.	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program, kegiatan, dan sub kegiatan) bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (sub kegiatan) bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Rp 513.657.200	APBD
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Rp 431.289.900	APBD
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Rp 513.657.200	APBD
		J U M L A H	Rp 1.443.420.200	

Kepala,

Drs. ADISAN
NIP. 19650729 200501 1 004

Kota Bima, 21 Februari 2025
Kepala Bidang P2MPI,

MARTA SHABRAN KHARJA, ST.,M.Si
NIP. 19820313 201001 1 019

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG P2MPI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Marta Shabran Kharja, ST.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197304091992111001

Pihak Pertama,

Marta Shabran Kharja, ST.,M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198203132010011019

Gambar 2. 9. Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Eselon III) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, perekonomian dan Infrastruktur

Tabel 2. 14. Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Eselon III) Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, perekonomian dan Infrastruktur

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	A. Sasaran Program/Capaian Program		
1.	Meningkatnya keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan	Persentase keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
		Persentase keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
		Persentase keselarasan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%
	B. Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan		
1.	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program, kegiatan, dan sub kegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (sub kegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00%
2.	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program, kegiatan, dan sub kegiatan) bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (sub kegiatan) bidang perekonomian dan sumber daya alam	95,00%
3.	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (program, kegiatan, dan sub kegiatan) bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (sub kegiatan) bidang infrastruktur dan kewilayahan	95,00%

No	Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Rp 282.346.245	APBD
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Rp 620.982.545	APBD
3.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Rp 309.244.982	APBD
		JUMLAH	**Rp 1.212.573.772**	

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Kepala,

Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197304091992111001

Kepala Bidang P2MPI,

Marta Shabran Kharja, ST.,M.Si
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 198203132010011019

Dalam **Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III**, **tidak terdapat perubahan terhadap indikator kinerja maupun target kinerja** yang telah ditetapkan. Seluruh indikator dan target kinerja tetap mengacu pada Perjanjian Kinerja awal yang telah disepakati. Adapun perubahan yang terjadi hanya pada **aspek anggaran**, yang disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan kegiatan, termasuk kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran. Perubahan anggaran tersebut **tidak mempengaruhi indikator dan target kinerja** yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III. Dengan demikian, pelaksanaan Perjanjian Kinerja tetap berjalan secara konsisten dan akuntabel, dengan fokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : **AHMAD, ST.**

Jabatan : Kasubag Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : **Drs. ADISAN**

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 21 Februari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Drs. ADISAN	AHMAD, ST.
NIP. 19650729 200501 1 004	NIP. 19710323 201001 1 006

Gambar 2. 10. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Eselon IV)

Tabel 2. 15. Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Eselon IV)
Kasubag Umum dan Kepegawaian

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan		
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
2.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3.	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
4.	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat	100%
5.	Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Terwujudnya layanan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah yang memadai	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Terpenuhnya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%

B.	Sasaran Sub Kegiatan/Capaian Sub Kegiatan		
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
8.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Org/bln
9.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen
10.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
11.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan
12.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen
13.	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
14.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
15.	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
16.	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
17.	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
18.	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
19.	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen

20.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
21.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
22.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
23.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
24.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan
25.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
26.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
27.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
28.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit
29.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp. 26.796.000	APBD
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 9.197.000	APBD
3.	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Rp. 4.550.000	APBD
4.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.500.000	APBD
5.	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Rp. 6.350.000	APBD
6.	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan standar realisasi kinerja SKPD	Rp. 15.700.000	APBD
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 16.730.000	APBD
8.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RP. 4.954.540.588	APBD
9.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Rp. 140.602.000	APBD
10.	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 27.711.600	APBD
11.	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp. 37.690.700	APBD
12.	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.992.000	APBD
13.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 14.225.000	APBD
14.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 2.100.000	APBD
15.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 10.860.000	APBD
16.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.320.000	APBD
17.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 5.400.000	APBD

No	Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
18.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp. 1.643.000	APBD
19.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Rp. 6.988.000	APBD
20.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Rp. 6.531.800	APBD
21.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Rp. 73.113.000	APBD
22.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)		Rp. 148.469.000	APBD
23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp. 317.520.000	APBD
24.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Rp. 22.180.000	APBD
25.	Penyediaan jasa surat menyurat		Rp. 69.350.000	APBD
26.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		RP. 14.600.000	APBD
27.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp. 39.270.000	APBD
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp. 62.804.000	APBD
29.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Rp. 7.930.000	APBD
		J U M L A H	Rp 6.059.663.688	

Kepala,

Drs. ADISAN

NIP. 19650729 200501 1 004

Kota Bima, 21 Februari 2025

Kasubag Umum,

AHMAD, ST.

NIP. 19710323 201001 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ahmad, ST

Jabatan : Kasubag Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

N a m a : Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP	Ahmad, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197304091992111001	NIP. 197103232010011006

Gambar 2. 11.Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Eselon IV)

Tabel 2. 16.Penetapan Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 (Eselon IV)

\	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Sasaran Kegiatan/Capaian Kegiatan		
1.	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
2.	Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%
3.	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
4.	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat	100%
5.	Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
6.	Terwujudnya layanan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah yang memadai	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7.	Terpenuhnya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%

B.	Sasaran Sub Kegiatan/Capaian Sub Kegiatan		
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
8.	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Org/bln
9.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen
10.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
11.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan
12.	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dokumen
13.	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen
14.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
15.	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
16.	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
17.	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen
18.	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
19.	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
20.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
21.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
22.	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
23.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan

24.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan
25.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
26.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
27.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
28.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit
29.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Rp. 26.796.000	APBD
2.	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 9.197.000	APBD
3.	Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD	Rp. 4.550.000	APBD
4.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.500.000	APBD
5.	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Rp. 6.350.000	APBD
6.	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan standar realisasi kinerja SKPD	Rp. 15.700.000	APBD
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 16.730.000	APBD
8.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	RP. 4.954.540.588	APBD
9.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Rp. 140.602.000	APBD
10.	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 27.711.600	APBD
11.	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp. 37.690.700	APBD
12.	Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Rp. 10.992.000	APBD
13.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp. 14.225.000	APBD
14.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 2.100.000	APBD
15.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp. 10.860.000	APBD
16.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 1.320.000	APBD
17.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 5.400.000	APBD
18.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 1.643.000	APBD
19.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 6.988.000	APBD
20.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp. 6.531.800	APBD
21.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp. 73.113.000	APBD
22.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp. 148.469.000	APBD

23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp. 317.520.000	APBD
24.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Rp. 22.180.000	APBD
25.	Penyediaan jasa surat menyurat		Rp. 69.350.000	APBD
26.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		RP. 14.600.000	APBD
27.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp. 39.270.000	APBD
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp. 62.804.000	APBD
29.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		Rp. 7.930.000	APBD
		J U M L A H	Rp 6.059.663.688	

Kota Bima, 10 Oktober 2025

Kepala,	Kasubag Umum,
Syarif Rustaman, S.Sos.,M.AP	Ahmad, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)	Penata Tk.I (III/d)
NIP. 197304091992111001	NIP. 197103232010011006

Tabel 2. 17.Penetapan Target,Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan BAPPEDA Kota Bima Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target Renja Tahun 2025
PERENCANAAN			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**100%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target Renja Tahun 2025
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/bln
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteram n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen
Monitoring, Evaluasi dan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,	1

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target Renja Tahun 2025
Penilaian Kinerja Pegawai		Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			1 paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya layanan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan mum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Meningkatnya keselarasan program,kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan**	**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**95,00**
		Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	**95,00**
		Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen	**95,00**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target Renja Tahun 2025
		perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah**	4 laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	4 laporan

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target Renja Tahun 2025
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Terwujudnya Keselarasan target kinerja dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95,00%
		Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95,00%
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 laporan
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 laporan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4 Dokumen
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan**	**Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)**	**95,00**
		Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	**65,00**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terwujudnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal Standar Pedoman Ketentuan)	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	95,00%
		Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	70,00%
		Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RKPD	70,00%
		Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	70,00%
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2024 - 2029	2 berita acara

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target Renja Tahun 2025
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acaraforum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	2 berita acara
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrembang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrembang kabupaten/kota	2 berita acara
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Dokumen RKPD 2023 Kota Bima	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	6 Dokumen
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengendalian dan evaluasi	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	65,00%
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi capaian IKU Kota Bima 2022	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2 laporan
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi capaian IKU Perangkat Daerah	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4 laporan

Sumber: Hasil analisa 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima telah melakukan penilaian atas kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Bappeda Kota Bima dengan Walikota Bima tahun 2025. Penilaian ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data kinerja yang pada akhirnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran dan penilaian kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator. Adapun kerangka yang digunakan dalam menghitung kinerja yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut: % capaian kinerja = (realisasi kinerja/target kinerja) X 100%. Indikator Kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja yang menggunakan perhitungan diatas adalah sebagai berikut: Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan skala pengukuran dan predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3. 1.Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 2 Penjelasan Hasil perhitungan Keberhasilan Pencapaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Target	**Keterangan**
1.	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	80,25%	Semakin besar nilai persentase capaian Indeks kualitas perencanaan, maka capaian kinerja semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan)
	Indikator Program		
1.	Persentase Keselarasan muatan	95%	Semakin besar nilai persentase Keselarasan muatan

No.	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
	RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)		RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program) maka semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan suatu program)
2.	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	95%	Semakin besar nilai Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD, maka semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan suatu program)
3.	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	95%	Semakin besar nilai Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti maka semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan suatu program)
4.	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95%	Semakin besar nilai persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia, maka capaian kinerja semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan suatu program)
5.	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95%	Semakin besar nilai persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam, maka capaian kinerja semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan suatu program)
6.	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95%	Semakin besar nilai persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan, maka capaian kinerja semakin baik (penilaian efektifitas dan efisiensi dari proses perencanaan suatu program)

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Bappeda memiliki peran untuk mendukung pencapaian tujuan ke-3 dalam RPJMD yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan cara meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Pengukuran capaian target kinerja tujuan dilakukan sama dengan proses dan penilaian yang dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran karena rumusan tujuan dan indikator tujuan sekaligus menjadi sasaran strategis Bappeda. Adapun realisasi kinerja tujuan Bappeda pada tahun 2025 mencapai 87% dari target 80,25% atau dengan tingkat capaian 108,41% sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. 3. Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunandaerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	%	80,25	87	108,41

Sumber: Hasil Analisa

3.1.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Sebagaimana dijelaskan pada sub bagian sebelumnya bahwa tujuan Perangkat Daerah Bappeda langsung menjadi sasaran strategis Bappeda. Oleh karena itu, uraian capaian kinerja

sasaran strategis tahun 2025 ini akan lebih difokuskan pada penyajian capaian 3 aspek yaitu **aspek keselarasan, aspek sinergi dan aspek pengendalian,monitoring dan evaluasi**. Forrmula yang digunakan untuk pengukuran capaian indikator sasaran strategis yaitu:

Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah :
(45%*Aspek Integrasi) + (35%*Aspek Sinergi) + (20%*Aspek Monev)

Capaian tersebut secara teknis pelaksanaan dan pengendaliannya terdistribusi ke dalam 2 bidang yaitu Bidang Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Bidang Pemerintahan,Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastuktur.

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Metodologi (Formula indikator)	2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	**Tahun 2024:** Indeks dihitung dengan formula 50% capaian sasara pemerintah daerah + 30% capaian sasaran Perangkat Daerah + 20% Capaian program perangkat daerah	98,5	102,307	103,86	-	-	-
		Tahun 2025: Indeks dihitung dengan formula 45% Aspek Integritas+35% Aspek Sinergi +20% Aspek Monev	-	-	-	80,25	87	108,4
		Data						
		Tahun 2024						
		Capaian sasaran daerah		100,95		-	-	-
		Capaian sasaran perangkat daerah		102,04		-	-	-
		Capaian program daerah		106,08		-	-	-
		Tahun 2025						
		Aspek Keselarasan/Integrasi	-	-	-	95%	99	104,2
		Aspek Sinergi	-	-	-	70%	71	101,43
		Aspek Monev	-	-	-	65%	88	135,38

Sumber: Hasil Analisa

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Secara teknis, Persentase Capaian Target pada Laporan Kinerja menggunakan dua jenis rumus dengan mempertimbangkan karakteristik komponen realisasi yang dihadapi. Apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin **tinggi/rendah** realisasi, menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin **baik/buruk**, hubungan

baik/buruk realisasi capaian menunjukkan hubungan linear, perhitungan capaian kinerja dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian target = (Realisasi/Rencana) x

Apabila kondisi capaian realisasi mencerminkan semakin **tinggi/rendah** realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin **buruk/baik** atau mempunyai hubungan **terbalik**, maka dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase pencapaian target = {Rencana –(Realisasi-Rencana)}/Rencana x 100%

Untuk mengukur capaian kinerja pada tujuan dan sasaran strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja dengan berbagai perbandingan sebagai berikut.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

3.2.1.1. Perbandingan Capain Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

Tabel 3. 5. Perbandingan Capain Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025				Sumber Data
				Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria/ Kategori	
1.	Meningkatkan kualitas perencana-an pem-bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	80,25	87	108,4	Sangat Baik	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah & Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur.
1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	80,25	87	108,4	Sangat Baik	Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah & Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perekonomian dan Infrastruktur.

1. Penilaian Aspek Integritas/Keselarasan terdiri dari penilaian antara lain:
   a. Persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPD/RPJMD dan muatan RKPD-P dengan RPJMD

      Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah transisi. RPD 2024-2026 tersebut menjadi acuan utama dalam penetapan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara berkesinambungan. Selanjutnya, setelah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, RKPD 2025 dilakukan penyesuaian dan penyelarasan agar sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta program prioritas Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025-2029. Proses penyelarasan ini dilakukan tanpa mengubah substansi arah

pembangunan, melainkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan dan keterpaduan perencanaan antara dokumen jangka menengah transisi dengan RPJMD yang baru.

Selanjutnya prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD 2025 juga telah disusun dengan mengacu pada tahapan pencapaian RPJMD 2025-2029, sehingga pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor perencanaan jangka menengah. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai instrumen operasional yang memastikan kesinambungan, keterpaduan, dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah dari tahun ke tahun, oleh karena itu, seluruh muatan dalam RKPD 2025 telah diselaraskan secara utuh dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program prioritas yang tercantum dalam RPJMD 2025 - 2029. Keselarasan tersebut tercermin pada konsistensi program pembangunan dalam RKPD 2025 yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029. Setiap program yang direncanakan dalam RKPD 2025 merupakan bagian dari strategi pencapaian target kinerja daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2025, baik dari sisi substansi kebijakan maupun indikator kinerja yang digunakan.

Melalui keselarasan antara RKPD 2025 dan RPJMD ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keselarasan RKPD 2025 dengan RPJMD 2025-2029 tercermin pada konsistensi program pembangunan yang. Selain itu, prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2025 juga disusun berdasarkan tahapan pencapaian target RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan tahunan tetap berada dalam koridor perencanaan jangka menengah daerah. Tingkat keselarasan program,indikator dan target yang termuat dalam RKPD 2025 dan RPJMD 2025-2029 mencapai 100 %.

Tabel 3. 6. Persentase Keselarasan Muatan RKPD Tahun 2025 dengan Muatan RPJMD Tahun 2025-2029

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			SELARAS			TIDAK SELARAS			PERSENTASE		
		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DIKPORA	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DIKES	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR	10	10	10	10	10	10	-	-	-	100	100	100
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DISPERKIMTAN	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOLPP	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKER	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3A	7	7	7	7	7	7	-	-	-	100	100	100
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DISKETAPANG	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DISPERKIMTAN	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DLH	10	10	10	10	10	10	-	-	-	100	100	100
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DPPKB	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DIKOMINFO	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKOPERINDAG	6	6	6	6	6	6	-	-	-	100	100	100
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DIKPORA	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DISKOMINFO	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS ARSIP	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DISPAR	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			SELARAS			TIDAK SELARAS			PERSENTASE		
		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS ARSIP	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS ARSIP	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DISKANLUT	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPAR	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISPERTANIAN	7	7	7	7	7	7	-	-	-	100	100	100
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKOPERINDAG	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DISKOPERINDAG	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
4.02 - SEKRETARIAT DPRD	SETWAN	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
5.01 - PERENCANAAN	BAPPEDA	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
5.02 - KEUANGAN	BPKAD	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
5.03 - KEPEGAWAIAN	BKPSDM	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BRIDA	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
7.01 - KECAMATAN	KECAMATAN	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	6	6	6	6	6	6	-	-	-	100	100	100
RATA-RATA											100	100	100

Sumber:Hasil analisa

Hasil keselarasan muatan RKPDTahun 2025 dengan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut : persentase keselarasan program + persentase keselarasan indicator) + (persentase keselarasa target)/3 = (100% +100% + 100%)/3 = 100%

Tabel 3. 7. Persentase Keselarasan Muatan Perubahan RKPD Tahun 20225 dengan Muatan RPJMD Tahun 2025-2029

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			SELARAS			TIDAK SELARAS			PERSENTASE		
		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DIKPORA	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DIKES	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR	10	10	10	10	10	10	-	-	-	100	100	100
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DISPERKIMTAN	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOLPP	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINSOS	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DISNAKER	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3A	7	7	7	7	7	7	-	-	-	100	100	100
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DISKETAPANG	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DISPERKIMTAN	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DLH	10	10	10	10	10	10	-	-	-	100	100	100
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DPPKB	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DISHUB	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DIKOMINFO	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DISKOPERINDAG	6	6	6	6	6	6	-	-	-	100	100	100
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DIKPORA	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DISKOMINFO	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS ARSIP	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DISPAR	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS ARSIP	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS ARSIP	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DISKANLUT	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100

URUSAN	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			SELARAS			TIDAK SELARAS			PERSENTASE		
		PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DISPAR	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DISPERTANIAN	7	7	7	7	7	7	-	-	-	100	100	100
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DISKOPERINDAG	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DISKOPERINDAG	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
4.02 - SEKRETARIAT DPRD	SETWAN	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
5.01 - PERENCANAAN	BAPPEDA	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
5.02 - KEUANGAN	BPKAD	4	4	4	4	4	4	-	-	-	100	100	100
5.03 - KEPEGAWAIAN	BKPSDM	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BKPSDM	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	100	100
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BRIDA	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	100
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	3	3	3	3	3	3	-	-	-	100	100	100
7.01 - KECAMATAN	KECAMATAN	5	5	5	5	5	5	-	-	-	100	100	100
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	6	6	6	6	6	6	-	-	-	100	100	100
RATA-RATA											100	100	100

Sumber: Hasil Analisa

Hasil keselarasan muatan Perubahan RKPDTahun 2025 dengan RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut : persentase keselarasan program + persentase keselarasan indicator) + (persentase keselarasa target)/3 = (100% +100% + 100%)/3 = 100%

Keselarasan muatan RKPD dan RPJMD = (persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD) +(Persentase keselarasan muatan perubahan RKPD dan RPJMD)/2 = (100% +100%)/2 = **100%**

b. Persentase Keselarasan muatan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dengan RKPD 2025 dan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD 2025

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan. Oleh karena itu, seluruh muatan Renja telah diselaraskan secara menyeluruh dengan RKPD 2025, baik dari aspek program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Keselarasan tersebut tercermin pada kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja yang sepenuhnya mengacu pada program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Selain kesesuaian nomenklatur, indikator kinerja dan target yang tercantum dalam Renja juga disusun selaras dengan indikator dan target dalam RKPD, sehingga arah pelaksanaan dan pengukuran kinerja pembangunan dapat dilakukan secara konsisten dan terukur.

Penetapan target dan indikator dalam Renja 2025 dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD 2025, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, Renja berfungsi sebagai instrumen operasional perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RKPD 2025.

Melalui keselarasan antara Renja 2025 dan RKPD 2025 ini, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat keselarasan antara muatan Renja 2025 dengan RKPD 2025 mencapai 100%.

Tabel 3. 8. Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Renja 2025 dan RKPD 2025

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam RKPD			∑ Dalam Renja			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	12	86	3	12	86	3	3	3	12	12	12	86	86									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2	6	9	2	6	9	2	2	2	6	6	6	9	9									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	5	21	83	5	21	83	5	5	5	21	21	21	83	83									100	100	100	100	100	100	100	100
	RSUD Kota Bima	2	3	6	2	3	6	2	2	2	3	3	3	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Paruga	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	30	30									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Mpunda	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Penanae	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Rasanae Timur	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Kolo	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	30	30									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Jatibaru	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	30	30									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Kumbe	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	58	10	19	58	10	10	10	19	19	19	58	58									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	14	33	4	14	33	4	4	4	14	14	14	33	33									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	33	2	9	33	2	2	2	9	9	9	33	33									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	12	41	2	12	41	2	2	2	12	12	12	41	41									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	43	2	12	43	2	2	2	12	12	12	43	43									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	6	15	68	6	15	68	6	6	6	15	15	15	68	68									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam RKPD			∑ Dalam Renja			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	5	16	41	5	16	41	5	5	5	16	16	16	41	41									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	UPT Balai Latihan Kerja	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	19	45	8	19	45	8	8	8	19	19	19	45	45									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	48	4	14	48	4	4	4	14	14	14	48	48									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	54	9	17	54	9	9	9	17	17	17	54	54									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	40	5	14	40	5	5	5	14	14	14	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	19	48	10	19	48	10	10	10	19	19	19	48	48									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	3	12	31	3	12	31	3	3	3	12	12	12	31	31									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3	7	32	3	7	32	3	3	3	7	7	7	32	32									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	5									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1	2	5	1	2	5	1	1	1	2	2	2	5	5									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6	14	39	6	14	39	6	6	6	14	14	14	39	39									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3	5	7	3	5	7	3	3	3	5	5	5	7	7									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UPT Sarana Distribusi Perdagangan	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	UPT PLUT-KUMKM	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	32	6	12	32	6	6	6	12	12	12	32	32									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	9	37	2	9	37	2	2	2	9	9	9	37	37									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	12	12									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	16	40	4	16	40	4	4	4	16	16	16	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4	14	43	4	14	43	4	4	4	14	14	14	43	43									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam RKPD			∑ Dalam Renja			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	12	12									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian	7	19	43	7	19	43	7	7	7	19	19	19	43	43									100	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	3	18	65	3	18	65	3	3	3	18	18	18	65	65									100	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	2	16	55	2	16	55	2	2	2	16	16	16	55	55									100	100	100	100	100	100	100	100
PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	58	3	14	58	3	3	3	14	14	14	58	58									100	100	100	100	100	100	100	100
KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	13	72	4	13	72	4	4	4	13	13	13	72	72									100	100	100	100	100	100	100	100
KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	40	2	11	40	2	2	2	11	11	11	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	9	45	2	9	45	2	2	2	9	9	9	45	45									100	100	100	100	100	100	100	100
INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	3	11	46	3	11	46	3	3	3	11	11	11	46	46									100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN	Kecamatan RasanaE Barat	4	9	25	4	9	25	4	4	4	9	9	9	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Paruga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sarae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Tanjung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Pane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan RasanaE Timur	8	13	25	8	13	25	8	8	8	13	13	13	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nungga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lelamase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dodu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lampe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kodo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kumbe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Fo'o	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Mbo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam RKPD			∑ Dalam Renja			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Kecamatan Asakota	5	11	25	5	11	25	5	5	5	11	11	11	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Melayu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatiwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ule	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Mpunda	5	12	27	5	12	27	5	5	5	12	12	12	27	27									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penatoi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lewirato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sadia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Mande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Panggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sambinae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Manggemaci	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Monggonao	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Santi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Matakando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Raba	5	10	24	5	10	24	5	5	5	10	10	10	24	24									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabadompu Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabadompu Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rontu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penaraga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penanae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ntobo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam RKPD			∑ Dalam Renja			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Kelurahan Kendo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nitu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	38	6	11	38	6	6	6	11	11	11	38	38									100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata																								100	100	100	100	100	100	100	100

P = PROGRAM IP = INDIKATOR PROGRAM TP = TARGET PROGRAM

K = KEGIATAN IK = INDIKATOR PROGRAM TK = TARGET KEGIATAN

S = SUB KEGIATAN ISK = INDIKATOR SUB KEGIATAN TSK = TARGET SUB KEGIATAN

Hasil keselarasan muatan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan RKPD 2025 adalah rata-rata dari keselarasan program,indicator program, target program, kegiatan, indikator kegiatan, target kegiatan, sub kegiatan dan target kegiatan adalaha sebesar **100%**.

Tabel 3. 9. Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Renja Perubahan 2025 dan RKPD Perubahan 2025

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Perubahan RKPD			∑ Dalam Renja perubahan			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	12	86	3	12	86	3	3	3	12	12	12	86	86									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2	6	9	2	6	9	2	2	2	6	6	6	9	9									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	5	21	83	5	21	83	5	5	5	21	21	21	83	83									100	100	100	100	100	100	100	100
	RSUD Kota Bima	2	3	6	2	3	6	2	2	2	3	3	3	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Paruga	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	30	30									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Mpunda	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Perubahan RKPD			∑ Dalam Renja perubahan			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Puskesmas Penanae	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Rasanae Timur	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Kolo	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	30	30									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Jatibaru	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	30	30									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Kumbe	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	29	29									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	58	10	19	58	10	10	10	19	19	19	58	58									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	14	33	4	14	33	4	4	4	14	14	14	33	33									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	33	2	9	33	2	2	2	9	9	9	33	33									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	12	41	2	12	41	2	2	2	12	12	12	41	41									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	43	2	12	43	2	2	2	12	12	12	43	43									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	6	15	68	6	15	68	6	6	6	15	15	15	68	68									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	5	16	41	5	16	41	5	5	5	16	16	16	41	41									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	UPT Balai Latihan Kerja	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	19	45	8	19	45	8	8	8	19	19	19	45	45									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	48	4	14	48	4	4	4	14	14	14	48	48									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	54	9	17	54	9	9	9	17	17	17	54	54									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	40	5	14	40	5	5	5	14	14	14	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	19	48	10	19	48	10	10	10	19	19	19	48	48									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Perubahan RKPD			∑ Dalam Renja perubahan			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	3	12	31	3	12	31	3	3	3	12	12	12	31	31									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3	7	32	3	7	32	3	3	3	7	7	7	32	32									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	5									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1	2	5	1	2	5	1	1	1	2	2	2	5	5									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6	14	39	6	14	39	6	6	6	14	14	14	39	39									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3	5	7	3	5	7	3	3	3	5	5	5	7	7									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	4	4									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UPT Sarana Distribusi Perdagangan	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	UPT PLUT-KUMKM	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	32	6	12	32	6	6	6	12	12	12	32	32									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	9	37	2	9	37	2	2	2	9	9	9	37	37									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	12	12									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	16	40	4	16	40	4	4	4	16	16	16	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4	14	43	4	14	43	4	4	4	14	14	14	43	43									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	12	12									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian	7	19	43	7	19	43	7	7	7	19	19	19	43	43									100	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	3	18	65	3	18	65	3	3	3	18	18	18	65	65									100	100	100	100	100	100	100	100
SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	2	16	55	2	16	55	2	2	2	16	16	16	55	55									100	100	100	100	100	100	100	100
PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	58	3	14	58	3	3	3	14	14	14	58	58									100	100	100	100	100	100	100	100
KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	13	72	4	13	72	4	4	4	13	13	13	72	72									100	100	100	100	100	100	100	100
KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	40	2	11	40	2	2	2	11	11	11	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	9	45	2	9	45	2	2	2	9	9	9	45	45									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Perubahan RKPD			∑ Dalam Renja perubahan			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	3	11	46	3	11	46	3	3	3	11	11	11	46	46									100	100	100	100	100	100	100	100
KECAMATAN	Kecamatan RasanaE Barat	4	9	25	4	9	25	4	4	4	9	9	9	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Paruga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sarae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Tanjung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Pane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan RasanaE Timur	8	13	25	8	13	25	8	8	8	13	13	13	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nungga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lelamase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dodu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lampe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kodo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kumbe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Fo'o	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Mbo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Asakota	5	11	25	5	11	25	5	5	5	11	11	11	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Melayu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatiwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ule	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Mpunda	5	12	27	5	12	27	5	5	5	12	12	12	27	27									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penatoi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lewirato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Perubahan RKPD			∑ Dalam Renja perubahan			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Kelurahan Sadia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Mande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Panggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sambinae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Manggemaci	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Monggonao	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Santi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Matakando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Raba	5	10	24	5	10	24	5	5	5	10	10	10	24	24									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabadompu Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabadompu Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rontu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penaraga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penanae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ntobo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kendo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nitu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	38	6	11	38	6	6	6	11	11	11	38	38									100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata																								100	100	100	100	100	100	100	100

P = PROGRAM IP = INDIKATOR PROGRAM TP = TARGET PROGRAM

K = KEGIATAN IK = INDIKATOR PROGRAM TK = TARGET KEGIATAN

S = SUB KEGIATAN ISK = INDIKATOR SUB KEGIATAN TSK = TARGET SUB KEGIATAN

Hasil keselarasan muatan Perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD 2025 adalah dari rata-rata : persentase keselarasan program, indikator program,target program,kegiatan,indikator kegiatan,target kegiatan,sub kegiatan dan target kegiatan Adalah **100%**.

Keselarasan muatan Renja 2025 dan RKPD 2025 adalah hasil dari rata-rata keselarasan muatan Renja 2025 dan RKPD 2025 dan Renja Perubahan 2025 dan RKPD Perubahan 2025 adalah **100%.** Sementara hasil keselarasan muatan Renja dan RKPD untuk setiap sub sektor Adalah 100%.

c. Persentase keselarasan muatan RKA 2025 dengan Renja 2025 dan muatan RKA P 2025 dan Renja Perubahan 2025

Persentase keselarasan muatan RKA Tahun 2025 dengan Renja Tahun 2025 serta muatan RKA Perubahan Tahun 2025 dengan Renja Perubahan Tahun 2025 menunjukkan tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah. Keselarasan ini tercermin dari kesesuaian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta alokasi anggaran yang disusun dalam RKA dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa muatan RKA Tahun 2025 telah disusun secara selaras dengan Renja Tahun 2025, demikian pula RKA Perubahan Tahun 2025 yang telah menyesuaikan secara penuh terhadap Renja Perubahan Tahun 2025. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap menjaga ketercapaian target kinerja, efisiensi anggaran, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan tingkat keselarasan yang tinggi, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan dan perubahan anggaran Tahun 2025 telah mendukung implementasi perencanaan secara efektif dan akuntabel, serta memperkuat integrasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

Tabel 3. 10.Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Rencana kerja Anggaran (RKA) 2025 dan Renja TAHUN 2025

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	12	86	3	12	86	3	3	3	12	12	12	81	81	-	-	-				5	5	100	100	100	100	100	100	94,186	94,186
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2	6	9	2	6	9	2	2	2	6	6	6	8	8	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	88,889	88,889
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	5	21	83	5	21	83	5	5	5	21	21	21	81	81	-	-	-				2	2	100	100	100	100	100	100	97,59	97,59
	RSUD Kota Bima	2	3	6	2	3	6	2	2	2	3	3	3	6	6	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Paruga	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	23	23	-	-	-				7	7	100	100	100	100	100	100	76,667	76,667
	Puskesmas Mpunda	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	25	25	-	-	-				4	4	100	100	100	100	100	100	86,207	86,207
	Puskesmas Penanae	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	23	23	-	-	-				7	7	100	100	100	100	100	100	76,667	76,667
	Puskesmas Rasanae Timur	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	22	22	-	-	-				7	7	100	100	100	100	100	100	75,862	75,862
	Puskesmas Kolo	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	20	20	-	-	-				10	10	100	100	100	100	100	100	66,667	66,667
	Puskesmas Jatibaru	3	4	30	3	4	30	3	3	3	4	4	4	19	19	-	-	-				11	11	100	100	100	100	100	100	63,333	63,333
	Puskesmas Kumbe	3	4	29	3	4	29	3	3	3	4	4	4	19	19	-	-	-				10	10	100	100	100	100	100	100	65,517	65,517
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	58	10	19	58	10	10	10	19	19	19	57	57	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	98,276	98,276
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	14	33	4	14	33	4	4	4	12	12	12	22	22	-	-	-	2	2	2	11	11	100	100	100	85,714	85,714	85,714	66,667	66,667

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
DAN KAWASAN PERMUKIMAN																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	33	2	9	33	2	2	2	9	9	9	33	33	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	12	41	2	12	41	2	2	2	12	12	12	39	39	-	-	-				2	2	100	100	100	100	100	100	95,122	95,122
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	43	2	12	43	2	2	2	12	12	12	38	38	-	-	-				5	5	100	100	100	100	100	100	88,372	88,372
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	6	15	66	6	15	66	6	6	6	15	15	15	64	64	-	-	-				2	2	100	100	100	100	100	100	96,97	96,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	5	16	41	5	16	41	5	5	5	16	16	16	40	40	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	97,561	97,561

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	UPT Balai Latihan Kerja	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	66,667	66,667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	19	45	8	19	45	8	8	8	19	19	19	43	43	-	-	-				2	2	100	100	100	100	100	100	95,556	95,556
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	48	4	14	48	4	4	4	14	14	14	45	45	-	-	-				3	3	100	100	100	100	100	100	93,75	93,75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	54	9	17	54	9	9	9	16	16	16	48	48	-	-	-	1	1	1	6	6	100	100	100	94,118	94,118	94,118	88,889	88,889
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	40	5	14	40	5	5	5	14	14	14	40	40	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	19	48	10	19	48	10	10	10	19	19	19	46	46	-	-	-				2	2	100	100	100	100	100	100	95,833	95,833
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	3	12	31	3	12	31	3	3	3	12	12	12	30	30	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	96,774	96,774
URUSAN PEMERINTAH	Dinas Komunikasi, Informatika dan	3	7	33	3	7	33	3	3	3	7	7	7	33	33	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
AN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Statistik																														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	5	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		1	2	5	1	2	5	1	1	1	2	2	2	5	5	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6	14	39	6	14	39	6	6	6	14	14	14	30	30	-	-	-				9	9	100	100	100	100	100	100	76,923	76,923
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3	5	7	3	5	7	3	3	3	4	4	4	4	4	-	-	-	1	1	1	3	3	100	100	100	80	80	80	57,143	57,143
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	75	75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UPT Sarana Distribusi Perdagangan	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	UPT PLUT-KUMKM	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	32	6	12	32	6	6	6	12	12	12	32	32	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	9	37	2	9	37	2	2	2	9	9	9	37	37	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		3	6	12	3	6	12	3	3	3	5	5	5	8	8	-	-	-	1	1	1	4	4	100	100	100	83,333	83,333	83,333	66,667	66,667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	16	40	4	16	40	4	4	4	15	15	15	39	39	-	-	-	1	1	1	1	1	100	100	100	93,75	93,75	93,75	97,5	97,5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4	14	43	4	14	43	4	4	4	14	14	14	5	5	-	-	-				38	38	100	100	100	100	100	100	11,628	11,628
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	11	11	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	91,667	91,667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian	7	19	43	7	19	43	7	7	7	19	19	19	42	42	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	97,674	97,674
SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	3	18	65	3	18	65	3	3	3	17	17	17	63	63	-	-	-	1	1	1	2	2	100	100	100	94,444	94,444	94,444	96,923	96,923
SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	2	16	55	2	16	55	2	2	2	15	15	15	53	53	-	-	-	1	1	1	2	2	100	100	100	93,75	93,75	93,75	96,364	96,364
PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	58	3	14	58	3	3	3	14	14	14	54	54	-	-	-				4	4	100	100	100	100	100	100	93,103	93,103
KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	13	72	4	13	72	4	4	4	13	13	13	71	71	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	98,611	98,611
KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	40	2	11	40	2	2	2	11	11	11	40	40	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
PENDIDIKAN DAN		1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
PELATIHAN																															
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	9	45	2	9	45	2	2	2	9	9	9	45	45	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	3	11	46	3	11	46	3	3	3	10	10	10	44	44	-	-	-	1	1	1	2	2	100	100	100	90,909	90,909	90,909	95,652	95,652
KECAMATAN	Kecamatan RasanaE Barat	4	9	25	4	9	25	4	4	4	9	9	9	25	25	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Paruga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sarae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Tanjung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Pane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan RasanaE Timur	4	13	24	4	13	24	4	4	4	13	13	13	24	24	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nungga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lelamase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dodu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lampe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kodo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kumbe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Fo'o	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Mbo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Asakota	5	11	25	5	11	25	5	5	5	10	10	10	24	24	-	-	-	1	1	1	1	1	100	100	100	90,909	90,909	90,909	96	96
	Kelurahan Kolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Melayu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatiwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ule	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Kelurahan Jatibaru Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Mpunda	5	12	27	5	12	27	5	5	5	12	12	12	27	27	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penatoi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lewirato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sadia	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Mande	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Panggi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sambinae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Manggemaci	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Monggonao	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Santi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Matakando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Raba	4	10	24	4	10	24	4	4	4	10	10	10	23	23	-	-	-				1	1	100	100	100	100	100	100	95,833	95,833
	Kelurahan Rabadompu Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabadompu Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rontu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penaraga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penanae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ntobo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kendo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nitu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja			∑ Dalam RKA			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	38	6	11	38	6	6	6	11	11	11	38	38	-	-	-						100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata																								100,00	100,00	100,00	99,04	99,04	99,04	94,01	94,01
		Rata-Rata																						98,14							

P = PROGRAM
K = KEGIATAN
S = SUB KEGIATAN
IP = INDIKATOR PROGRAM
IK = INDIKATOR PROGRAM
ISK = INDIKATOR SUB KEGIATAN
TP = TARGET PROGRAM
TK = TARGET KEGIATAN
TSK = TARGET SUB KEGIATAN

Sumber : Hasil analisa

Hasil Perhitungan Rata-Rata Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Program, kegiatan dan subkegiatan) adalah **98,14%.** Sementara hasil keselarasan muatan RKA PD dengan Renja utuk setiap sub sektor Adalah : Sub Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 98,81%, Sub Sektor Perekonomian & Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 94,75% dan sub sektor Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 97,78%.

Tabel 3. 11.Persentase keselarasan program, Kegiatan, Sub Kegiatan, target dan indikator Rencana kerja Anggaran (RKA) 2025 dan Renja Tahun 2025

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3	12	86	3	12	86	3	3	3	12	12	12	81	81							5	5	100	100	100	100	100	100	94,186	94,186
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2	6	9	2	6	9	2	2	2	6	6	6	8	8							1	1	100	100	100	100	100	100	88,889	88,889

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	5	21	83	5	21	83	5	5	5	21	21	21	81	81							2	2	100	100	100	100	100	100	97,59	97,59
	RSUD Kota Bima	1	3	6	1	3	6	1	1	1	3	3	3	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima	1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Puskesmas Paruga	3	4	30	3	4	30	3	3	3	3	3	3	23	23				1	1	1	7	7	100	100	100	75	75	75	76,667	76,667
	Puskesmas Mpunda	3	4	29	3	4	29	3	3	3	3	3	3	25	25				1	1	1	4	4	100	100	100	75	75	75	86,207	86,207
	Puskesmas Penanae	2	4	29	2	4	29	2	2	2	3	3	3	22	22				1	1	1	7	7	100	100	100	75	75	75	75,862	75,862
	Puskesmas Rasanae Timur	2	4	29	2	4	29	2	2	2	4	4	4	22	22							7	7	100	100	100	100	100	100	75,862	75,862
	Puskesmas Kolo	3	4	30	3	4	30	3	3	3	3	3	3	20	20				1	1	1	10	10	100	100	100	75	75	75	66,667	66,667
	Puskesmas Jatibaru	3	4	30	3	4	30	3	3	3	3	3	3	19	19				1	1	1	11	11	100	100	100	75	75	75	63,333	63,333
	Puskesmas Kumbe	3	4	29	3	4	29	3	3	3	3	3	3	19	19				1	1	1	10	10	100	100	100	75	75	75	65,517	65,517
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	19	58	10	19	58	10	10	10	19	19	19	57	57							1	1	100	100	100	100	100	100	98,276	98,276
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4	14	33	4	14	33	4	4	4	12	12	12	22	22				2	2	2	11	11	100	100	100	85,714	85,714	85,714	66,667	66,667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1				1	1	1			100	100	100	0	0	0	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	Satuan Polisi Pamong Praja	2	9	33	2	9	33	2	2	2	9	9	9	33	33									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2	12	41	2	12	41	2	2	2	12	12	12	39	39							2	2	100	100	100	100	100	100	95,122	95,122
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	12	43	2	12	43	2	2	2	12	12	12	38	38							5	5	100	100	100	100	100	100	88,372	88,372
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	6	15	66	6	15	66	6	6	6	15	15	15	64	64							2	2	100	100	100	100	100	100	96,97	96,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	5	16	41	5	16	41	5	5	5	16	16	16	40	40							1	1	100	100	100	100	100	100	97,561	97,561
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	UPT Balai Latihan Kerja	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2							1	1	100	100	100	100	100	100	66,667	66,667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	19	45	8	19	45	8	8	8	17	17	17	43	43				2	2	2	2	2	100	100	100	89,474	89,474	89,474	95,556	95,556

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
PERLINDUNGAN ANAK																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	4	14	48	4	14	48	4	4	4	14	14	14	45	45							3	3	100	100	100	100	100	100	93,75	93,75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	9	17	54	9	17	54	9	9	9	16	16	16	48	48				1	1	1	6	6	100	100	100	94,118	94,118	94,118	88,889	88,889
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	14	40	5	14	40	5	5	5	14	14	14	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	19	48	4	19	48	4	4	4	17	17	17	46	46				2	2	2	2	2	100	100	100	89,474	89,474	89,474	95,833	95,833
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	3	12	31	3	12	31	3	3	3	12	12	12	30	30							1	1	100	100	100	100	100	100	96,774	96,774
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3	7	33	3	7	33	3	3	3	7	7	7	33	33									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		1	1	5	1	1	5	1	1	1	1	1	1	5	5									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG		1	2	5	1	2	5	1	1	1	2	2	2	5	5									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
PERSANDIAN																															
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6	14	39	6	14	39	6	6	6	13	13	13	30	30				1	1	1	9	9	100	100	100	92,857	92,857	92,857	76,923	76,923
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		3	5	7	3	5	7	3	3	3	5	5	5	4	4							3	3	100	100	100	100	100	100	57,143	57,143
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		2	2	4	2	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3							1	1	100	100	100	100	100	100	75	75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	UPT Sarana Distribusi Perdagangan	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	UPT PLUT-KUMKM	1	2	6	1	2	6	1	1	1	2	2	2	6	6									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	12	32	6	12	32	6	6	6	12	12	12	32	32									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	9	37	2	9	37	2	2	2	9	9	9	37	37									100	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	8	8							4	4	100	100	100	100	100	100	66,667	66,667
URUSAN	Dinas Kelautan dan	4	1	40	4	16	40	4	4	4	1	1	1	3	39				1	1	1	1	1	100	100	100	93,7	93,7	93,7	97,5	97,5

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan		6								5	5	5	9													5	5	5		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3	14	43	3	14	43	3	3	3	14	14	14	5	5							38	38	100	100	100	100	100	100	11,628	11,628
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		3	6	12	3	6	12	3	3	3	6	6	6	11	11							1	1	100	100	100	100	100	100	91,667	91,667
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian	7	19	43	7	19	43	7	7	7	19	19	19	42	42							1	1	100	100	100	100	100	100	97,674	97,674
SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	3	18	65	3	18	65	3	3	3	17	17	17	63	63				1	1	1	2	2	100	100	100	94,444	94,444	94,444	96,923	96,923
SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	2	16	55	2	16	55	2	2	2	15	15	15	53	53				1	1	1	2	2	100	100	100	93,75	93,75	93,75	96,364	96,364
PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	14	58	3	14	58	3	3	3	14	14	14	54	54							4	4	100	100	100	100	100	100	93,103	93,103
KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4	13	72	4	13	72	4	4	4	13	13	13	71	71							1	1	100	100	100	100	100	100	98,611	98,611
KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	11	40	2	11	40	2	2	2	11	11	11	40	40									100	100	100	100	100	100	100	100
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		1	2	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2	9	45	2	9	45	2	2	2	8	8	8	45	45				1	1	1			100	100	100	88,889	88,889	88,889	100	100
INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	3	11	46	3	11	46	3	3	3	10	10	10	44	44				1	1	1	2	2	100	100	100	90,909	90,909	90,909	95,652	95,652
KECAMATAN	Kecamatan RasanaE Barat	4	9	25	4	9	25	4	4	4	9	9	9	25	25									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Paruga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Kelurahan Dara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sarae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Tanjung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Pane	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan RasanaE Timur	4	10	23	4	10	23	4	4	4	10	10	10	23	23									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nungga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lelamase	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Dodu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Lampe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kodo	1		1	1		1	1	1	1	0	0	0	1	1									100	100	100	91	91	91	100	100
	Kelurahan Kumbe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Fo'o	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Oi Mbo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Asakota	4	11	25	4	11	25	4	4	4	10	10	10	24	24				1	1	1	1	1	100	100	100	91	91	91	96	96
	Kelurahan Kolo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Melayu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatiwangi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ule	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Jatibaru Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Mpunda	5	12	27	5	12	27	5	5	5	11	11	11	27	27				1	1	1			100	100	100	92	92	92	100	100
	Kelurahan Penatoi	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	20	20	20	100	100
	Kelurahan Lewirato	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sadia	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Mande	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan	Perangkat Daerah	∑ Dalam Renja P			∑ Dalam RKA P			Selaras								Tidak Selaras								Persentase							
		P	K	SK	P	K	SK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK	P	IP	TP	K	IK	TK	SK	TSK
	Kelurahan Panggi	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Sambinae	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Manggemaci	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Monggonao	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Santi	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Matakando	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kecamatan Raba	4	10	18	4	10	18	4	4	4	10	10	10	17	17							1	1	100	100	100	100	100	100	94,444	94,444
	Kelurahan Rabadompu Barat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabadompu Timur	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Utara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rabangodu Selatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rontu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penaraga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Penanae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Ntobo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Kendo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Nitu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
	Kelurahan Rite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									100	100	100	100	100	100	100	100
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	11	38	6	11	38	6	6	6	10	10	10	38	38				1	1	1			100	100	100	90,909	90,909	90,909	100	100
Rata-rata																								100,00	100,00	100,00	95,34	95,34	95,34	93,98	93,98
		Rata-Rata																						96,75							

P = PROGRAM
K = KEGIATAN
S = SUB KEGIATAN

IP = INDIKATOR PROGRAM
IK = INDIKATOR PROGRAM
ISK = INDIKATOR SUB KEGIATAN

TP = TARGET PROGRAM
TK = TARGET KEGIATAN
TSK = TARGET SUB KEGIATAN

Hasil Perhitungan Rata-Rata Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Program, kegiatan dan subkegiatan) adalah **96,75%,** jadi rata-rata persentase keselarasan muatan RKA dan Renja serta RKA-P dan Renja P Adalah sebesar 97,44%.

Sementara persentase keselarasan muatan RKA-P dengan Renja -P untuk setiap sub sektor Adalah : Sub Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 97,45%, Sub Sektor Perekonomian & Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 95,1% dan sub sektor Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 93,1%.

Jadi rata-rata capaian keselasaran muatan RKA dan Renja untuk setiap sektor Adalah: Sub Sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 98,13%, Sub Sektor Perekonomian & Sumber Daya Alam (SDA) sebesar 94,93 % dan sub sektor Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 95,43%.

2. Penilaian Aspek Sinergi dinilai berdasarkan antara lain:

a. Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD

Alokasi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sebagai instrumen utama untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah. Penganggaran dilakukan secara terarah dengan mengutamakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan Prioritas Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD. Pembangunan Kota Bima pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ditujukan untuk **"Penguatan nilai-nilai dasar masyarakat dan Penguatan Infrastruktur Kenyamanan Kota",** dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 maka pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Pembangunan Kota Bima diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan perkotaan;
2. Penguatan sistem pengendalian banjir;
3. Pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
5. Percepatan penurunan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pengoptimalan Pelaksanaan Program pendukung Penerapan SPM Kesehatan, dan Pendidikan yang mendukung peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, juga menjadi prioritas pembangunan Kota Bima pada tahun 2025.

Selain itu, alokasi anggaran dalam RKPD juga disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Prioritas pendanaan diberikan kepada program strategis dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, alokasi anggaran dalam RKPD berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembiayaan, tetapi juga sebagai alat pengendali dan pendorong pencapaian Prioritas Daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dengan pengalokasian anggaran yang selaras dengan Prioritas Daerah, RKPD Tahun 2025 diharapkan mampu mendorong pencapaian target pembangunan daerah secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Adapun Persentase alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebesar 92,34%.

Tabel 3. 12. Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
1	Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Angka Kemiskinan, Perluasan Kesempatan Kerja (PD1)	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	590.000.000	0,07
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	45.000.000	0,01
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0,00

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	35.023.200	0,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	134.564.100	0,02
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	459.100.000	0,06
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.873.400	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.749.752.091	0,46
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	15.000.000	0,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	242.000.000	0,03
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	132.622.933	0,02
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	467.690.000	0,06
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	579.268.980	0,07
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.399.299.035	0,17
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	42.132.100	0,01
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.340.350.008	0,65
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan	21.543.103.160	2,62
2	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Kesehatan (PD2)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	52.722.223.550	6,40
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	173.006.501.927	21,01
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	716.468.250	0,09
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	5.886.955.901	0,71
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	64.927.484.924	7,88
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	467.533.050	0,06
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	452.699.100	0,05

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	481.633.200	0,06
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kesehatan	84.568.548.264	10,27
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	2.632.700.000	0,32
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial	170.136.000	0,02
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial	0	0,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial	1.031.624.800	0,13
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial	2.772.053.702	0,34
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial	207.460.000	0,03
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Sosial	5.934.219.060	0,72
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.111.132.550	0,26
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	337.460.600	0,04
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73.543.200	0,01
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	283.150.000	0,03
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	562.431.200	0,07
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.313.700.865	0,52
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	71.000.000	0,01
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.283.725.000	0,40
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	804.000.000	0,10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.441.100.465	0,66
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	11.842.000	0,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	274.570.000	0,03
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja	189.952.400	0,02

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja	134.311.000	0,02
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Tenaga Kerja	3.523.958.886	0,43
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	334.870.100	0,04
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.395.800	0,01
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79.744.400	0,01
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.622.900	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.380.758.966	0,65
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur (PD3)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	62.774.100	0,01
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	11.570.140.386	1,40
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	53.460.000	0,01
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Perhubungan	5.383.552.638	0,65
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	968.882.000	0,12
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	692.575.500	0,08
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.315.766.602	1,01
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	18.700.000	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	103.982.000	0,01
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	23.000.000	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	610.000.000	0,07
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	85.000.000	0,01
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	7.400.928.343	0,90
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.141.587.841	0,14
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.261.764.464	0,15

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	491.761.079	0,06
4	Peningkatan kualitas lingkungan, pembangunan rendah karbon serta mitigasi bencana (PD4)	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	343.500.000	0,04
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	419.071.244	0,05
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup	1.683.430.400	0,20
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	251.586.660	0,03
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	214.000.000	0,03
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup		0,00
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup	53.265.000	0,01
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	65.000.000	0,01
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup	4.874.603.542	0,59
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Lingkungan Hidup	12.580.807.031	1,53
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	550.731.700	0,07
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	114.621.600	0,01
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	1.415.019.600	0,17
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Satuan Polisi Pamong Praja	8.141.137.329	0,99
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	826.218.900	0,10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.819.998.683	0,71
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	892.830.197	0,11
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.940.368.580	0,60
5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (PD5)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	677.045.300	0,08

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.382.896.600	0,17
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.009.253.850	0,12
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.947.000	0,02
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.726.781.092	0,21
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.557.947.265	0,55
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	204.000.000	0,02
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	250.500.000	0,03
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	292.843.900	0,04
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	16.332.700	0,00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	6.081.361	0,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	13.127.018.150	1,59
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	2.513.454.250	0,31
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah	30.418.662.832	3,69
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD	9.361.000.000	1,14
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD	19.766.825.113	2,40
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	693.836.500	0,08
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.674.335.200	0,20
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.929.213.100	0,72
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.552.386.089	0,67
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	958.926.694	0,12

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.848.156.404	0,22
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14.085.619.650	1,71
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.061.714.000	0,13
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.788.728.213	0,70
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	817.553.000	0,10
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.372.000.000	0,17
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.467.758.784	0,42
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat	566.108.500	0,07
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat	256.130.600	0,03
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat	10.529.248.042	1,28
6	Daerah aman dan kompetitif (PD6)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan	561.725.400	0,07
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	58.847.700	0,01
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	130.339.600	0,02
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Ketahanan Pangan	4.122.714.857	0,50
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	2.629.965.060	0,32
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	1.001.670.000	0,12
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian	250.872.394	0,03
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian	30.968.000	0,00
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Pertanian	24.639.900	0,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian	454.628.920	0,06
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pertanian	15.076.130.164	1,83

No	Prioritas Daerah	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Persentase Dari anggaran APBD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6,00*
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	350.000.000	0,04
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	388.000.000	0,05
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	360.000.000	0,04
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.904.933.933	0,47
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.520.777.100	0,18
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.206.203.202	1,72
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.890.723.900	0,84
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.342.375.686	0,28
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	217.085.001	0,03
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.509.562.430	0,43
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.461.649.864	1,15
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.116.800	0,03
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	857.979.046	0,10
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.370.211.671	1,50
				823.556.428.302,00	92,34

b. Persentase hasil musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD 2026

Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan salah satu masukan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai bentuk perencanaan pembangunan yang partisipatif. Usulan yang dihimpun dari Musrenbang Kecamatan mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat di tingkat wilayah, sehingga menjadi bahan pertimbangan utama dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi dengan arah kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah, sebagian besar usulan hasil Musrenbang Kecamatan telah diakomodir dalam RKPD Tahun 2026. Pengakomodiran tersebut dilakukan melalui integrasi usulan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah yang relevan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD Tahun 2026 menunjukkan tingkat keterpaduan antara aspirasi masyarakat dengan perencanaan pembangunan daerah. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sekaligus menjaga konsistensi dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses Musrenbang Kecamatan tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi bagian integral dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 guna memastikan pembangunan daerah berjalan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.Untuk tahun 2025 capaian usulan musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD 2026 mencapai 49,47%.

Tabel 3. 13.Hasil Musrembang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD

No	Kecamatan	Jumah Usulan Musrembang Kecamatan	Jumlah Usulan Terakomodir dalam RKPD	Usulan Tidak Terakomodir	Peresentase Usulan Terakomodir	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Kecamatan Rasanae Barat	18	10	8	55,56%	
2	Kecamatan Asakota	17	7	10	41,18%	
3	Kecamatan Mpunda	52	19	33	36,54%	
4	Kecamatan Rasanae Timur	24	15	9	62,50%	
5	Kecamatan Raba	79	43	36	54,43%	
		190	**94**	**96**	**49,47%**	

3. Penilaian Aspek Pengendalian,Monitoring dan Evaluasi

a. Persentase hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti

Monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara berkala setiap triwulan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan peningkatan kinerja pembangunan daerah. Pelaksanaan Monev bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil Monev yang diperoleh setiap triwulan telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, penyesuaian strategi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tindak lanjut tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada triwulan berikutnya. Dengan pelaksanaan Monev secara rutin dan tindak lanjut yang konsisten terhadap hasil evaluasi, diharapkan capaian kinerja pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Adapun persentase hasil monev perangkat daerah yang ditindaklanjuti adalah sebesar 88,42%.

Tabel 3. 14.Hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Triwulan I	**17**	**14**	**3**	**82,35**	
		Kesehatan				
	1	Perlunya optimalisasi pelaksanaan kebijakan meliputi optimalisasi fasilitas yang ada, kemitraan dengan fisilitas kesehatan swasta, pembangunan dan perluasan Rumah Sakit dan memperkuat fasilitas layanan primer	√			
		Tenaga Kerja				
	2	Perlu adanya penguatan regulasi berkaitan dengan ketenagakerjaan, sosialisasi & pendampingan teknis bagi perusahaan kecil dan menengah, digitalisasi pelaporan dan kepatuhan, pemberian insentif bagi perusahaan yang patuh, serta pemberian sanksi administratif untuk perusahaan yang tidak patuh				
		Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak				
	3	penguatan kapasitas SDM Perangkat Daerah, penguatan data terpilah dan analisis gender dan mendorong peningkatan alokasi program strategis gender	√			
		Komunikasi dan Informatika				

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4	pemetaan dan audit infrastruktur Teknologi Informsi dan Komunikasi seluruh Perangkat Daerah, Mengeluarkan Kebijakan penggunaan internet tepusat dengan melakukan kemitraan dengan ISP lokal atau BAKTI Kominfo				
		Penanamann Modal				
	5	melakukan penyederhanaan dan percepat proses perizinan, melakukan perbaikan infrastruktur dasar dan penunjang, memberikan insentif daerah dan meningkatkan promoso investasi dan banding daerah	√			
		Kepemudaan dan Olahraga				
	6	Perlunya melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pemuda (pendataan by name by address), kemudahan akses permodalan dan insentif usaha pemuda, dan mengintegrasikan program dalam dokumen perencanaan dan APBD	√			
	7	Perlu melakukan revitalisasi forum dan organisasi kepemudaan lokal, modernisasi dan rebranding organisasi kepemudaan, dan mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dalam program daerah				
	8	Upaya yang dapat dilakukan meliputi melakukan pembinaan atlet berbasis sekolah dan komunitas, Revitaliasi fasilitas olahraga yang memadai, dan memperbanyak kejuaraan dan kompetisi daerah	√			
		Kearsipan				
	9	Perlunya optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program kearsipan yang meliputi pengimplementasian pengelolaan arsip sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, digitalisasi arsip secara bertahap, pembangunan infrastruktur arsip, dan peningkatan kompetensi dan ketersediaan arsiparis				
		Pariwisata				
	10	Upaya yang dapat dilakukan meliputi mendorong peningkatan kunjungan wisata dengan membuat kelender eventa pariwisata tahunan dan promosi pada destinasi unggulan, peningkatan mutu dan sertifikasi akomodasi, serta meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung	√			

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	11	Perlunya optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program pariwisata yang meliputi pengembangan destinasi unggulan, memperluas dan optimalisasi sumber PAD dari sektor pariwisata, legalitas dan pendataan pelaku usaha wisata, promosi terpadu dan digitalisasi wisata, serta melakukan kemitraan dengan swasta dan komunitas.	√			
		Perindustrian				
	12	Perlunya optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program perindustrian yang meliputi mempermudah akses legalitas dan perizinan uasha, pembangunan sentra IKM dan inkubator bisnis dan digitalisasi dan akses pasar	√			
	13	Pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) dengan melakukan Upaya yang dapat dilakukan melalui memperkuat SDM dan Sarana Pengawasan, memanfaatkan teknologi untuk E-Monitoring dan berkolaborasi dengan lembaga lain dan komunitas industri	√			
	14	hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan usaha industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dengan melakukan optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program perindustrian yang meliputi Peningkatan kapasitas SDM dan Tim Pengawas IPUI, integrasi pengawasan IPUI dalam sistem pengendalian industri daerah, digitalisasi data dan pelaporan IPUI, serta memperluas pendekatan pembinaan daripada sekadar penindakan	√			
		Perencanaan dan Keuangan				
	15	Rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan : Upaya yang dapat dilakukan antara lain menganalisis kebutuhan pegawai berbasis beban kerja, optimalisasi rekrutmen CPNS/P3K untuk jabatan teknis, realokasi atau redistribusi pegawai, serta perencanaan belanja pegawai yang proporsional				
		Penelitian dan Pengembangan				

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	16	Persentase hasil penelitian yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan : Perlunya optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program Penelitian dan Pengembangan yang meliputi mengintegrasikan hasil penelitian ke siklus perencanaan daerah, memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah dengan akademisi, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian terapan dan memperkuat fungsi BRIDA				
		Kesatuan Bangsa dan Politik				
	17	Persentase penurunan Angka konflik sosial : Perlunya optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan program Kesatuan bangsa dan politik yang meliputi memperkuat sistem deteksi dini dan respon cepat konflik, memperkuat kolaborasi pemerintah daerah – TNI/Polri – Masyarakat Sipil dan mengintegrasikan penanganan konflik dengan program pembangunan inkklusif	√			
2	Triwulan III	**2**	**2**	**2**	**100**	
		Satuan Polisi Pamong Praja				
		Dilakukan perbaikan pada proses penetapan target dan realisasi SPM trantibumlinmas	√			
		Melaksanakan pelatihan berkala bagi personel tentang penegakan hukum, skill patroli, dan pengelolaan konflik untuk peningkatan kapasitas	√			
3	Triwulan IV	**76**	**68**	**8**	**89,47**	
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga				
	1	Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun	√			
	2	Penyusunan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada	√			
		Dinas Kesehatan				
	1	Meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan terkait pelatihan sesuai kompetensi	√			
	2	Pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan sanitarian kit	√			
	3	Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia				

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	1	Peningkatan kapasitas SDM	√			
	2	Memaksimalkan anggaran pemeliharaan	√			
		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
	1	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran	√			
	2	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD				
		Satuan Polisi Pamong Praja				
	1	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran	√			
	2	Berkoordinasi dengan unsur terkait	√			
	3	Peningkatan SDM untuk segera menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	√			
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
	1	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran	√			
	2	Berkoordinasi dengan unsur terkait	√			
	3	Peningkatan SDM untuk segera menyelesaikan pekerjaan tepat waktu	√			
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	1	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran	√			
	2	Berkoordinasi dengan unsur terkait	√			
	3	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD	√			
		Dinas Sosial				

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1	Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme Meningkatkan jumlah dan mutu layanan kesejahteraan sosial pada PMKS	√			
	2	Memperluas cakupan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat	√			
		Dinas Tenaga Kerja				
	1	Meningkatkan kemitraan dengan industri dan lembaga pelatihan swasta Digitalisasi layanan ketenagakerjaan				
	2	Revitalisasi BLK agar lebih kompetitif dan relevan	√			
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	1	Meningkatkan komitmen lintas sektor	√			
	2	Sosialisasi terhadap regulasi yang terkait	√			
		Dinas Ketahanan Pangan				
	1	Membentuk tim pelaksana kegiatan Rapat teknis pelaksana kegiatan Koordinasi penyusunan Peta kerentanan dan kerawanan pangan	√			
	2	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD	√			
		Dinas Lingkungan Hidup				
	1	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada	√			
	2	Mewujudkan penyusunan perwali sebagai aturan turunan dari Perda tentang pengelolaan sampah Menyusun Perda tentang Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH)				
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Optimalisasi sistem pelayanan publik dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi	√			
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	1	Memperluas jaringan dan tempat pelayanan KB di seluruh kecamatan dan Kelurahan sehingga PUS	√			

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD	√			
		Dinas Perhubungan				
	1	Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yang tertuang di Dokumen Renstra	√			
	2	Mengoptimalkan agar RKPD, DPA selaras dengan Renstra, namun dengan tetap memperhatikan kuota anggaran dan skala prioritas kebutuhan organisasi	√			
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Optimalisasi sistem pelayanan publik dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi	√			
		Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan bentuk pendidikan dan pelatihan	√			
	3	Penambahan jumlah aparatur dengan bidang ilmu dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksi				
	4	Meningkatkan Bimtek dan Diklat untuk pelaku UMKM dan IKM	√			
		Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	1	Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur khususnya di bidang pelayanan penanaman modal Peningkatan fungsi pengendalian penanaman modal di wilayah Kota Bima	√			
	2	Penguatan potensi lokal melalui jalinan komunikasi dengan investor				
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat				
	3	Mengoptimalisasi SDM yang tersedia	√			
		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah				
	1	Upaya peningkatan kinerja aparatur	√			
	2	Pembangunan budaya kerja yang kondusif	√			
	3	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat	√			
	4	Mengoptimalisasi SDM yang tersedia	√			
		Dinas Perikanan dan Kelautan				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal Pembinaan/sosialisasi/pendampingan pada pengeolah dan pemasar dalam hal menjaga kualitas dan mutu ikan segar Mendorong Poklahsar untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan dan mengembangkan produksi hasil perikanan	√			
	2	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat	√			
		Dinas Pertanian				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
	3	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat	√			
		Sekretariat Daerah				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
	3	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat	√			
		Sekretariat DPRD				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal	√			

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		maupun eksternal				
	2	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan fungsional	√			
	3	Pengadaan tenaga ahli fraksi dan tim pakar untuk kelengkapan dalam membantu fraksi dan kelengkapan dalam merumuskan berbagai kebijakan publik				
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
	3	Mengoptimalisasi SDM yang tersedia	√			
		Badan Riset dan Inovasi Daerah				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	1	Melaksanakan konsolidasi dan pengauatan kelembagaan terhadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pada seluruh kelurahan	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Mengembangkan fungsional analis kepegawaian yang telah dimiliki serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional analis kepagawaian yang diharapkan	√			
	3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
		Inspektorat				

No	Periode Monev	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yg di TL	Rekomendasi yg tidak di TL	Persentase rekomendasi yg dilaksanakan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	√			
	3	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan fungsional	√			
		Kecamatan				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
	3	Melakukan koordinasi dengan PD lain terkait supaya kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan Optimalisasi SDM yang tersedia	√			
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	1	Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal	√			
	2	Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja	√			
	3	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan	√			
JUMLAH TOTAL		**95**	**84**	**13**	**88,42**	

Hasil Capaian Aspek Integrasi/Keselarasan

Hasil perhitungan aspek sinergi dihitung dari capaian keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RKPD selaras dengan muatan RPJMD. Hasil pengukuran **Aspek Integrasi/Keselarasan** menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah

telah dilaksanakan secara terpadu dan konsisten antar dokumen perencanaan. Capaian ini mencerminkan tingkat kesesuaian yang tinggi antara muatan **RPJMD/RPD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, hingga RKA Perangkat Daerah**, baik pada level program, kegiatan, maupun subkegiatan. Keselarasan antara **RKPD dengan RPJMD/RPD** menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tahunan telah berada dalam koridor kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dengan persentase keselarasan sebesar **100%** lebih tinggi dari target yg ditetapkan yaitu 95%. Program-program prioritas yang ditetapkan dalam RKPD secara umum telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD/RPD.

Selanjutnya, keselarasan **Renja Perangkat Daerah dengan RKPD** menunjukkan bahwa perencanaan pada tingkat perangkat daerah telah disusun secara konsisten dan terintegrasi, sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini mendukung keterpaduan pelaksanaan pembangunan lintas perangkat daerah. Persentase keselarasan Renja Perangkat Daerah dengan RKPD untuk tahun 2025 mencapai **100%** lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 95%..

Adapun keselarasan antara **RKA Perangkat Daerah dengan Renja** menegaskan bahwa proses penganggaran telah mendukung perencanaan yang telah ditetapkan, khususnya pada tingkat subkegiatan. Dengan demikian, alokasi anggaran yang disusun telah mencerminkan kebutuhan riil untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah. Persentase keselarasan RKA Perangkat Daerah dengan Renja tahun 2025 sebesar **97,44%** lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 95%. Selanjutnya Aspek Integrasi/Keselarasan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Aspek Integrasi/Keselarasan =

[30% x Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD] + [40% x Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD] + [30% x Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja Perangkat Daerah)]

Aspek Integrasi/Keselarasan =
(30% x 100%) + (40% x 100%) + (30% x 97,44%) = 0,3 + 0,4 + 0,29 = **0,99**

Secara keseluruhan, capaian **Aspek Integrasi/Keselarasan** berada pada nilai **0,99** atau 99% menunjukkan bahwa kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berada pada kategori **baik**, serta mendukung terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil Capaian Aspek Sinergi

Hasil capaian **Aspek Sinergi** menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah telah diarahkan secara optimal untuk mendukung keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah, prioritas nasional, serta aspirasi masyarakat. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang selaras, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Persentase alokasi anggaran yang mendukung pencapaian **Prioritas Daerah** dalam RKPD dan APBD sebesar 92,34% lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 70%, hal menunjukkan bahwa kebijakan penganggaran telah difokuskan pada program dan kegiatan strategis daerah. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif untuk mendorong pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Adapun persentase **hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD** menunjukkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tingginya tingkat akomodasi usulan Musrenbang mencerminkan bahwa perencanaan pembangunan telah disusun secara partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di tingkat kewilayahan. Persentase hasil musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD sebesar 49,47% masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 70%.

Secara keseluruhan, capaian Aspek Sinergi dihitung dengan formula sebagai berikut:
Aspek Sinergi = (50% x persentase alokasi anggaran untuk mendukung prioritas daerah dalam RKPD dan APBD) +(50% x persentase hasil musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD)
Aspek Sinergi = (50% x 92,34%) +(50% x 49,47%) = 0,46+ 0,25 = **0,71**

Aspek sinergi berada pada kategori **baik**, yaitu **0,71** yang menunjukkan terwujudnya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, kebijakan nasional, dan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hasil Capaian Aspek Pengendalian dan Monitoring Evaluasi (Monev)

Capaian Aspek Pengendalian dan Monitoring Evaluasi (Monev) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian serta pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari tingginya persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah. Rekomendasi yang dihasilkan melalui proses pengendalian dan monev telah menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan serta memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Selain itu, hasil pengendalian dan monev juga dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyusunan perencanaan pada periode berikutnya. Dengan demikian, pelaksanaan monev tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian Aspek Pengendalian dan Monev berada pada kategori **baik** dengan nilai 88,42% atau 0,88 lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 65% hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan evaluasi telah berkontribusi efektif dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya dilakukan perhitungan **Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan menggunakan formula sebagai berikut :

Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah =
(45% x Aspek Integrasi/Keselarasan) + (35% x Aspek Sinergi) + (20% Aspek Monev)

Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah =
(45% x 0,99) + (35% X 0,71) + (20% x 0,88) = 0,87 = 87 %

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2025, untuk tujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Indeks kualitas perencananan pembangunan daerah terealisasi sebesar 87 % dari target 80,25% atau dengan capaian kinerja 108,4% dan masuk kategori Sangat Tinggi.

3.2.1.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Program Bappeda Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Analisa untuk Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Program Bappeda Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 15. Capaian Kinerja Program Bappeda Tahun 2025

Tahun 2024						Tahun 2025					
Program	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian	Program	Indikator	Formula	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	98,5	104,24	105,83	**PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Rata-rata persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD dan keselarasan RKPD-P dan RPJMD (Program,Indikator & Target)**	**rata-rata keselarasan program,indikator dan target antara RKPD dengan RPJMD dan Perubahan RKPD dengan RPJMD**	**95**	**100**	**105,26**
		Data:						Data:			
		Rata-rata capain target sasaran perangkat daerah		102,4				Tabel sanding keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD (program,indikator dan target) % keselarasan muatan RKPD dg RPJMD $=\frac{\text{jumlah}\frac{\text{program,indikator}}{\text{target}}\text{RKPD yg selaras dg RPJMD}}{\text{jumlah}\frac{\text{Program}}{\text{Indikator}}\text{/target RPJMD}} x\ 100\%$	95	100	105,26
		Rata-rata capain target program perangkat daerah		106,08				Tabel sanding keselarasan muatan Perubahan RKPD dengan RPJMD (Program, indikator dan target) % keselarasan muatan RPerubahan KPD dg RPJMD $=\frac{\text{jumlah}\frac{\text{program,indikator}}{\text{target}}\text{Perubahan RKPD yg selaras dg RPJM}}{\text{jumlah}\frac{\text{Program}}{\text{Indikator}}\text{/target RPJMD}}$	95	100	105,26
	Persentase hasil evaluasi dokumen yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen evaluasi perencanaan yang tepat/jumlah keseluruhan dokumen evaluasi yang harus disusun	98,5	98,5	100		**Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti**	**= (Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan/ Jumlah rekomendasi yang dihasilkan) *100%**	**65**	**88,42**	**136,03**
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia**		**98,5**	**110,24**	**111,92**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**=rata-rata persentase keselarasan keselarasan program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target anatara Renja dan RKPD dan Renja P dan RKPD-P bidang pemerintahan & pembangunan manusia**	**95**	**100**	**105,26**
		Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program sektor pemerintahan	98,5	104,67	106,26			*Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $=\frac{\text{jumlah}\frac{P}{K}\text{/SK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{jumlah}\frac{P}{K}\text{/SK RKPD}} x\ 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $=\frac{\text{Jumlah Indikator}\frac{P}{K}\text{/SK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{jumlah Indikator}\frac{P}{K}\text{/SK RKPD}} x\ 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $=\frac{\text{Jumlah Target}\frac{P}{K}\text{/SK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{jumlah Target}\frac{P}{K}\text{/SK RKPD}} x\ 100\%$			
		Data:									
		Rata-rata capain target sasaran daerah sektor pemerintahan		120,14				*Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $=\frac{\text{jumlah}\frac{P}{SK}\text{Renja-P yg selaras dg RKPD}}{\text{jumlah}\frac{P}{K}\text{/SK RKPD}} x\ 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $=\frac{\text{jumlah}\frac{\text{Indikator}}{SK}\text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{jumlah}\frac{\text{Indikator}}{SK}\text{RKPD-P}} x\ 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $=\frac{\text{jumlah Target}\frac{P}{SK}\text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{jumlah Target}\frac{P}{SK}\text{RPJMD-P}} x\ 100\%$			
		Rata-rata capain target sasaran perangkat daerah sektor pemerintahan		95,09							
		Rata-rata capain target sasaran program sektor pemerintahan		98,77							

Tahun 2024						Tahun 2025					
		Rata-rata capaian target sasaran daerah,	98,5	115,81	117,57			rata-rata keselarasan muatan RKA dengan Renja dan RKA P denga Renja P (program,kegiatan,sub kegiatan, indikator dan target) Bidang Pemerintahan dan PM =	95	98,13	103,30
		sasaran PD dan Program sektor pembangunan manusia						*Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah} \sum \text{ISK RKA yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah} \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah Indikator} \sum \text{ISK RKA yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Indikator} \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah Target} \sum \text{ISK RKA yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Target} \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ *Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah} \sum_{SK} \text{RKA-P yg selaras dg Renja-P}}{\text{Jumlah} \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah} \sum_{SK}^{\text{Indikator}} \text{RKA-P yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Indikator} \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah Target} \sum_{SK} \text{RKA-P yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Target} \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$			
		Data:									
		Rata-rata capain target sasaran daerah sektor pembangunan manusia		109,52							
		Rata-rata capain target sasaran perangkat daerah sektor pembangunan manusia		112,49							
		Rata-rata capain target sasaran program sektor pembangunan manusia		125,41							
								Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95	99,07	104,28
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan SDA		98,5	101,27	102,81	Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		=rata-rata persentase keselarasan keselarasan program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target anatara Renja dan RKPD dan Renja P dan RKPD-P bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	95	100	105,26
		Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program sektor perekonomian	98,5	105,24	106,84			*Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah} \sum \text{ISK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{Jumlah} \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah Indikator} \sum \text{ISK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{Jumlah Indikator} \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah Target} \sum \text{ISK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{Jumlah Target} \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ *Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah} \sum_{SK} \text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{Jumlah} \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah} \sum_{SK}^{\text{Indikator}} \text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{Jumlah} \sum_{SK}^{\text{Indikator}} \text{RKPD-P}} \times 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{\text{Jumlah Target} \sum_{SK} \text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{Jumlah Target} \sum \text{RPJMD-P}} \times 100\%$			
		Data:									
		Rata-rata capain target sasaran daerah sektor Perekonomian		97,65							
		Rata-rata capain target sasaran perangkat daerah sektor Perekonomian		120,96							
		Rata-rata capain target sasaran		92,10							
		Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program sektor Sumber Daya Alam	98,5	97,3	98,78			rata-rata keselarasan muatan RKA dengan Renja dan RKA P dengan Renja P (program,kegiatan,sub kegiatan, indikator dan target) Bidang Perekonomian dan SDA=	95	94,93	99,92

Tahun 2024						Tahun 2025				
		Data:					$\text{Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah } \sum \text{ISK RKA yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah } \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{ISK RKA yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Target } \sum \text{ISK RKA yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Target } \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah } \sum \text{RKA-P yg selaras dg Renja-P}}{\text{Jumlah } \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{RKA -P yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Target } \sum \text{RKA-P yg selaras dg Renja}}{\text{Jumlah Target } \sum \text{ISK Renja}} \times 100\%$			
		Rata-rata capain target sasaran daerah sektor Sumber Daya Alam (SDA)		97,44						
		Rata-rata capain target sasaran perangkat daerah sektor Sumber Daya Alam (SDA)		91,65						
		Rata-rata capain target sasaran program sektor Sumber Daya Alam (SDA)		102,81						
							Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95	97,46	102,59
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Infrastruktur dan	Rata-rata capaian target sasaran daerah, sasaran PD dan Program sektor Infrastruktur	98,5	94,37	95,81	Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	=rata-rata persentase keselarasan keselarasan program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target anatara Renja dan RKPD dan Renja P dan RKPD-P bidang infrastruktur dan kewilayahan	96	100	105,26
		Data:					$\text{Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah } \sum \text{ISK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{Jumlah } \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{ISK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$			
		Rata-rata capain target sasaran daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan		80			$\text{Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Target } \sum \text{ISK Renja yg selaras dg RKPD}}{\text{Jumlah Target } \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan} = \frac{\text{Jumlah } \sum \text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{Jumlah } \sum \text{ISK RKPD}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{Jumlah Indikator } \sum \text{RKPD-P}} \times 100\%$ $\text{Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan} = \frac{\text{Jumlah Target } \sum \text{Renja-P yg selaras dg RKPD-P}}{\text{Jumlah Target } \sum \text{RPJMD-P}} \times 100\%$			
		Rata-rata capain target sasaran perangkat daerah sektor Infrastruktur dan kewilayahan		91,79						
		Rata-rata capain target sasaran program sektor Infrastruktur dan kewilayahan		111,32						
							rata-rata keselarasan muatan RKA dengan Renja dan RKA P dengan Renja P (program,kegiatan,sub kegiatan, indikator dan target) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan=	96	96,43	100,46

Tahun 2024						Tahun 2025				
							Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan $= \frac{Jumlah \sum^{P} IKK\ RKA\ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah \sum^{P} IKK\ Renja} \times 100\%$			
							Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan $= \frac{Jumlah\ Indikator \sum^{P} IKK\ RKA\ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Indikator \sum^{P} IKK\ Renja} \times 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{Jumlah\ Target \sum^{P} IKK\ RKA\ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Target \sum^{P} IKK\ Renja} \times 100\%$ *Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan* $= \frac{Jumlah \sum^{P}_{KK} RKA-P\ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah \sum^{P} IKK\ Renja} \times 100\%$ *Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{Jumlah\ Indikator \sum^{P}_{KK} RKA-P\ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Indikator \sum^{P} IKK\ Renja} \times 100\%$ *Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan* $= \frac{Jumlah\ Target \sum^{P}_{KK} RKA-P\ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Target \sum^{P} IKK\ Renja} \times 100\%$			
							Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95	97,71	102,86

Sumber : Hasil Analisa 2026

I. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 3 indikator kinerja yang berbeda dari tahun 2024.

a. Pada tahun 2024, indikator kinerja subsektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia difokuskan pada **persentase kesesuaian capaian kinerja subsektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran menunjukkan capaian sebesar 111,92%, yang berarti kinerja subsektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah melampaui target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada subsektor tersebut berjalan secara efektif serta mampu memberikan hasil yang lebih baik dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja diarahkan pada **Persentase Keselarasan Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**. Indikator ini menitikberatkan pada aspek kualitas dan konsistensi perencanaan, khususnya kesesuaian muatan dokumen perencanaan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, target keselarasan ditetapkan sebesar 95%, dengan realisasi mencapai 99,07%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 104,28%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia telah disusun secara optimal dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, serta mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan.
b. Pada tahun 2024, indikator kinerja sektor Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) difokuskan pada **persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Perekonomian dan SDA** terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran menunjukkan capaian sebesar 102,81%, yang berarti kinerja sektor perekonomian dan SDA telah melampaui target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor tersebut berjalan efektif serta memberikan hasil yang lebih baik dari yang ditargetkan. Sementara itu, indikator yang digunakan pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja diarahkan pada **Persentase Keselarasan Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Perekonomian dan SDA**. Indikator ini menitikberatkan pada aspek kualitas dan konsistensi perencanaan, khususnya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, target keselarasan ditetapkan sebesar 95%, dengan realisasi mencapai 97,46% atau dengan capaian sebesar 102,59,% tingkat keselarasan. Capaian ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA telah tersusun dengan sangat baik dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
c. Pada tahun 2024, indikator kinerja subsektor Infrastruktur dan Kewilayahan difokuskan pada **persentase kesesuaian capaian kinerja subsektor infrastruktur dan Kewilayahan** terhadap target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran menunjukkan capaian sebesar 95,81%, lebih rendah dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada subsektor tersebut berjalan secara optimal karna belum 100% mencapai target yangg ditetapkan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator kinerja yang digunakan pada tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pengukuran kinerja diarahkan pada **Persentase Keselarasan Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**. Indikator ini menitikberatkan pada aspek kualitas dan konsistensi perencanaan, khususnya kesesuaian muatan dokumen perencanaan dengan arah kebijakan dan sasaran

pembangunan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, target keselarasan ditetapkan sebesar 95%, dengan realisasi mencapai 97,81%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 102,86%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah disusun secara optimal dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, serta mampu melampaui target kinerja yang ditetapkan.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari 2 indikator kinerja yang berbeda dari tahun 2024. Pada Tahun 2024 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah difokuskan pada pencapaian kinerja perangkat daerah dan kepatuhan dokumen evaluasi terhadap ketentuan. Indikator ***Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah*** menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 104,24% dari target 98,5%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 105,8%. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar perangkat daerah tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

Sementara itu, indikator ***Persentase hasil evaluasi dokumen yang sesuai ketentuan*** pada Tahun 2024 terealisasi 98,5%, sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai regulasi.

Memasuki Tahun 2025, indikator program mengalami perubahan yang lebih menitikberatkan pada kualitas keselarasan perencanaan dan efektivitas tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi. Indikator ***Rata-rata persentase keselarasan muatan RKPD dengan RPJMD dan Perubahan RKPD*** menunjukkan realisasi sebesar 100% dari target 95%, dengan capaian kinerja mencapai 105,26%. Hal ini menandakan meningkatnya konsistensi dan integrasi antara dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Selanjutnya, indikator ***Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti*** pada Tahun 2025 memperlihatkan kinerja yang sangat signifikan. Dengan target 65%, realisasi mencapai 88,42%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 136,03%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun indikator kinerja Tahun 2024 dan 2025 berbeda, kinerja program pada kedua tahun tersebut sama-sama menunjukkan realisasi yang melampaui target. Tahun 2024 menegaskan keberhasilan pada aspek pencapaian kinerja dan kepatuhan dokumen, sedangkan Tahun 2025 menunjukkan penguatan pada aspek keselarasan perencanaan dan efektivitas tindak lanjut hasil evaluasi, yang menandakan arah peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan daerah.

3.2.1.3. perbandingan antara target dan realisasi kegiatan dan sub Kegiatan bappeda tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi kegiatan dan sub Kegiatan bappeda tahun 2025 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 16. Target,Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 (Program Prioritas)

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2024			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
PERENCANAAN									
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia**	**98,5**	**98,5**	**98,5**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**95,0**	**99,07**	**104,28**
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Iperekonomian dan SDA	**98,5**	**98,5**	**98,5**		**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)**	**95,0**	**97,46**	**102,59**
	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor Infrastruktur dan Kewilayahan	**98,5**	**98,5**	**98,5**		**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**95,0**	**97,71**	**102,86**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	98,5	98,5	98,5	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,0	100,0	105,3
						Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95,0	98,1	103,3
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	4	4	100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah**	4	4	100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	**Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah**	4	4	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100
Asistensi	Jumlah Perangkat				Asistensi	Jumlah Perangkat			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2024			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	98,5	98,5	98,5	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95	100	105,26
						Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95	94,93	99,92
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	4	4	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan			

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2024			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	4	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	98,5	98,5	98,5	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	100	105,26
						Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95	95,43	100,45
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	4	100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	4	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	4	100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	4	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	4	100
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	4	100	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	4	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	4	100	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	4	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah**	**98,5**	**98,5**	**98,5**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)**	**95**	**100**	**105,26**
	Persentase hasil evaluasi dokumen yang sesuai ketentuan	**98,5**	**98,5**	**98,5**		**Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti**	**65**	**88,42**	**136,03**

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2024			Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	**98,5**	**98,5**	**98,5**	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	95	100	105,26
						Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	70	92,34	131,91
						Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RKPD	70	92,34	131,91
						Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	70	49,47	70,67
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2024 - 2029	1	2	200	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan dan Hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2024 - 2029	1	1	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acaraforum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	2	2	100	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acaraforum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	2	2	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrembang kabupaten/kota	2	2	100	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita acara musrembang kabupaten/kota	2	2	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	6	6	100	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan	4	4	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	**98,5**	**98,5**	**98,5**	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	65,00	88,42	136,03
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2	2	100	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	2	2	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	4	100	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	4	4	100

Sumber : Hasil Analisa 2025

I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Persentase keselrasan ini dihitung dari rata-rata persentase keselarsan muatan Renja (program,kegiatan,sub kegiatan,masing-masing indikator dan target) dengan RKPD dan persentase keselarasan muatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan. Hasil keselarsan muatan Renja dengan RKPD untuk sub sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah 100%, sementara persentase keselrasana muatan Renja Perubahan dan RKPD-P adalah 100 jadi rata-rata keselarsan muatan Renja dan RKPD adalah 100% dari target 95% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 105,26%.

b. Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Persentase keselrasan ini dihitung dari rata-rata persentase keselarsan muatan RKA (program,kegiatan,sub kegiatan,masing-masing indikator dan target) dengan Renja dan persentase keselarasan muatan RKA Perubahan dengan Renja Perubahan. Hasil keselarsan muatan RKA dengan Renja untuk sub sektor Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah 98,81%, sementara persentase keselrasana muatan RKA Perubahan dan Renja-P adalah 97,45 jadi rata-rata keselarsan muatan RKA dan Renja adalah 98,13% dari target 95% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 103,29%.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki 6 sub kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:

a. Koordinas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan hasil koordinasi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.138.500 dari pagu anggaran sebesar Rp. 32.933.700,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 67,22%.

c. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 22.861.560 dari pagu anggaran sebesar Rp. 29.332.560,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 77,94%.

d. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yaitu 4 laoran. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.580.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 38.276.300 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 79,89%.

e. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Dari sub kegiatan ini output jumlah laporan hasil koordinasi Perangkat Daerah yang dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 89.527.004 dari pagu anggaran sebesar Rp 124.422.423,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 71,95%.

f. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.136.162 dari pagu anggaran sebesar Rp. 43.163.262 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 86,04%.

g. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 4 dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia berdasarkan jumlah perangkat daerah. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 8.755.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.218.000,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 61,58%.

II.Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Persentase keselrasan ini dihitung dari rata-rata persentase keselarsan muatan Renja (program,kegiatan,sub kegiatan,masing-masing indikator dan target) dengan RKPD dan persentase keselarasan muatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan. Hasil keselarsan muatan Renja dengan RKPD untuk sub sektor Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) adalah 100%, sementara persentase keselrasana muatan Renja Perubahan dan RKPD-P adalah 100 jadi rata-rata keselarsan muatan Renja dan RKPD adalah 100% dari target 95% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 105,26%.

b. Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Persentase keselrasan ini dihitung dari rata-rata persentase keselarsan muatan RKA (program,kegiatan,sub kegiatan,masing-masing indikator dan target) dengan Renja dan persentase keselarasan muatan RKA Perubahan dengan Renja Perubahan. Hasil keselarsan muatan RKA dengan Renja untuk sub sektor Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) adalah 94,75%, sementara persentase keselrasana muatan RKA

Perubahan dan Renja-P adalah 95,1 jadi rata-rata keselarsan muatan RKA dan Renja adalah 98,13% dari target 94,93% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 99,92%.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) memiliki 6 sub kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 30.570.969 dari pagu anggaran sebesar Rp. 61.966.257,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 49,33%.

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 17.008.973 dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.270.773,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 88,26%.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

   Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 4 dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian berdasarkan jumlah perangkat daerah. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.640.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.188.900,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 74,98%.

d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

   Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 414.874.796 dari pagu anggaran sebesar Rp. 469.459.825,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 88,37%.

e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

   Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan Perangkat Daerah yang melakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 37.925.790 dari pagu anggaran sebesar Rp. 51.826.790,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 73,18%.

f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 4 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.598.000 dari pagu anggaran sebesar Rp 8.270.000,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 67,69%.

III. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan kewilayahan.

Persentase keselrasan ini dihitung dari rata-rata persentase keselarsan muatan Renja (program,kegiatan,sub kegiatan,masing-masing indikator dan target) dengan RKPD dan persentase keselarasan muatan Renja Perubahan dengan RKPD Perubahan. Hasil keselarsan muatan Renja dengan RKPD untuk sub sektor Infrastruktur dan kewilayahan adalah 100%, sementara persentase keselrasan muatan Renja Perubahan dan RKPD-P adalah 100 jadi rata-rata keselarsan muatan Renja dan RKPD adalah 100% dari target 95% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 105,26%.

b. Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Persentase keselrasan ini dihitung dari rata-rata persentase keselarsan muatan RKA (program,kegiatan,sub kegiatan,masing-masing indikator dan target) dengan Renja dan persentase keselarasan muatan RKA Perubahan dengan Renja Perubahan. Hasil keselarsan muatan RKA dengan Renja untuk sub sektor Infrastruktur dan kewilayahan adalah 97,77%, sementara persentase keselrasana muatan RKA Perubahan dan Renja-P adalah 93,08 jadi rata-rata keselarsan muatan RKA dan Renja adalah 98,13% dari target 95,43% yang ditetapkan, dengan tingkat capaian sebesar 100,45%.

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan memiliki 6 sub kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:

a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 51.044.820 dari pagu anggaran sebesar Rp. Rp58.239.120 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 87,65%.

b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar

Rp. 125.386.302 dari pagu anggaran sebesar Rp. Rp135.203.902 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 92,74%.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 5 dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur berdasarkan jumlah perangkat daerah koordinasi yaitu 4 dokumen. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.375.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.180.900,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 81,44%.

d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan koordinasi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 51.837.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 72.895.800,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 71,11%.

e. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah jumlah laporan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yaitu 4 laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.120.860 dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.584.760,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 78,64%.

f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 4 dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.577.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.140.500,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 61,01%.

IV. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan memiliki 4 indikator kinerja yaitu:

a. Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemenuhan NSPK menjadi dasar penting dalam menjamin kualitas perencanaan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional. Semakin tinggi persentase pemenuhan NSPK, semakin baik kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan dan semakin kuat dasar pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 3. 17.Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Norma,Standar, Prosedur dan Ketentuan

No	Jenis Dokumen Perencanaan	Dasar NSPK (Permendagri/Peraturan Teknis)	Jumlah Komponen NSPK yang Dipersyaratkan	Komponen NSPK yang Terpenuhi	Komponen NSPK yang Belum Terpenuhi	Persentase Pemenuhan NSPK (%)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	RPJMD	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	**32**	**32**	0	100	
		Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029					
		Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional					
		Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029					
2	RKPD	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	**32**	**32**	0	100	
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026					

No	Jenis Dokumen Perencanaan	Dasar NSPK (Permendagri/Peraturan Teknis)	Jumlah Komponen NSPK yang Dipersyaratkan	Komponen NSPK yang Terpenuhi	Komponen NSPK yang Belum Terpenuhi	Persentase Pemenuhan NSPK (%)	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	Renstra OPD	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	**32**	**32**	0	100	
4	Renja OPD	Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	**32**	**32**	0	100	
						100	

Sumber: Bappeda 2025

b. Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD

Indikator ini menggambarkan tingkat komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD dan diimplementasikan melalui APBD. Alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah berjalan selaras, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD dan APBD tercatat sebesar 92,34%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran daerah telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas

daerah. Meskipun belum sepenuhnya mencapai 100%, capaian tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

c. Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasi Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD

Indikator ini digunakan untuk mengukur keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Persentase alokasi anggaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional mencerminkan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa RKPD dan APBD telah disusun dengan memperhatikan sinergi pusat dan daerah. Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional yang tercantum dalam RKPD dan APBD mencapai 92,34%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan sebagian besar anggaran daerah untuk mendukung pelaksanaan agenda dan sasaran pembangunan nasional. Hal tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pembangunan nasional. Meskipun belum mencapai 100%, capaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung prioritas nasional, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

d. Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD

Indikator ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Persentase hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD menunjukkan sejauh mana usulan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin baik kualitas perencanaan yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ersentase hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD tercatat sebesar 49,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari usulan yang disampaikan melalui Musrenbang Kecamatan telah dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut mencerminkan adanya proses perencanaan yang partisipatif, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pemenuhan seluruh usulan masyarakat. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, ketersediaan anggaran, serta kesesuaian usulan dengan kewenangan dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan terdiri dari 4 sub kegiatan antara lain :

a. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 1 berita acara yaitu berita acara RKPD dan berita acara RPJPD. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 23.159.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.189.000,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 85,18%100%.

b. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 2 berita acara yaitu berita acara Forum perangkat daerah RKPD. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 28.073.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 45.143.000,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 62,19%.

c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 2 berita acara yaitu berita acara Musrenbang. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 71.805.600 dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.319.000 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 91,68%.

d. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 6 Dokumen yaitu dokumen RKPD Perubahan 2024 dan dokumen RKPD 2025. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 161.135.332 dari pagu anggaran sebesar Rp. 186.259.000 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 86,51%.

V. **Kegiatan Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** memiliki 1 indikatro kinerja yaitu:

a. Persentase hasil monintoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya

Persentase hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya tercatat sebesar 88,42%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi telah dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Hal tersebut mencerminkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui mekanisme umpan balik, meskipun masih terdapat sebagian rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti karena keterbatasan waktu, sumber daya, maupun penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat sebagian kecil rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, penyesuaian terhadap dinamika kebijakan, serta perlunya pendalaman lebih lanjut terhadap rekomendasi yang bersifat strategis dan lintas sektor. Ke depan, upaya peningkatan capaian indikator ini akan dilakukan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil evaluasi secara lebih optimal dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 2 Laporan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 21.020.000 dari pagu anggaran sebesar Rp 27.409.000 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 76,69%.

b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dari sub kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 4 Laporan yaitu berupa laporan triwulan. Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 50.352.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 55.469.000,00 persentase realisasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah 90,78%.

3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 S.d. Tahun 2025



Gambar 3. 1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 sd 2025

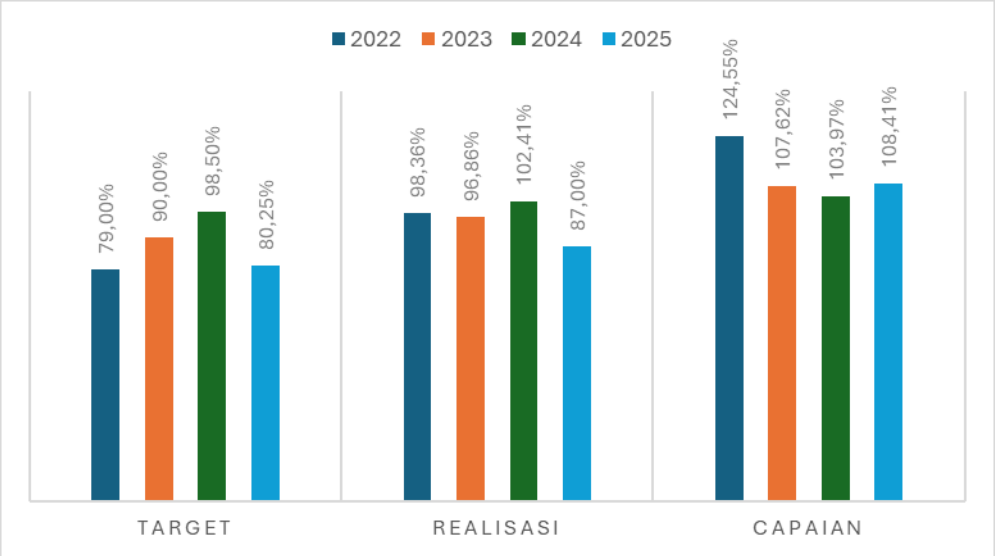
Berdasarkan grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d. 2025, terlihat bahwa capaian kinerja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, capaian kinerja mencapai 124,55%, yang merupakan capaian tertinggi. Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan, dukungan kebijakan yang masih berkelanjutan, serta efektivitas perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan target kinerja.

Pada tahun 2023, capaian kinerja menurun menjadi 107,62%. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pembangunan, peningkatan target kinerja yang lebih menantang, serta dinamika pelaksanaan program/kegiatan yang memerlukan adaptasi terhadap kondisi dan regulasi yang berkembang. Meskipun demikian, capaian kinerja tetap melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2024, capaian kinerja kembali menurun menjadi 103,97%. Penurunan ini dipengaruhi oleh semakin kompleksnya tantangan pelaksanaan program, keterbatasan sumber daya, serta fokus pada konsolidasi dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan agar lebih tepat sasaran. Namun, kinerja tetap berada pada kategori tercapai karena realisasi masih di atas 100 persen.

Pada tahun 2025, capaian kinerja mengalami peningkatan kembali menjadi 108,41%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja yang didorong oleh penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta hasil tindak lanjut evaluasi dan monitoring kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Kesimpulannya, meskipun terjadi penurunan capaian kinerja pada periode 2023–2024, secara umum kinerja tetap terjaga dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebagai hasil dari upaya perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.



Gambar 3. 2. Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2022 sd 2025

Tabel 3. 13. Perbandingan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2022 S.d. Tahun 2025

No.	Tujun/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capain Kinerja (%)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1.	Meningkatkan kualitas perencana-an pem -bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	79%	90%	98,50%	80,25%	98,36%	96,86%	102,41%	87%	124,55%	107,62	103,97	108,41%
1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	79%	90%	98,50%	80,25%	98,36%	96,86%	102,41%	87%	124,55%	107,62	103,97	108,41%
	Rata-Rata Capaian										**125,00%**	**107,62**	**103,97**	**108,41%**

Sumber : Hasil Analisa 2025

Berdasarkan Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2022 s.d. Tahun 2025, dapat dilihat bahwa kinerja pada tujuan "Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah" yang diukur melalui Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan capaian yang berfluktuasi namun tetap berada di atas target setiap tahunnya. Pada tahun 2022, target kinerja ditetapkan sebesar 79% dengan realisasi 98,36%, sehingga capaian kinerja mencapai 124,55%. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berjalan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 2023, target kinerja meningkat menjadi 90% dengan realisasi 96,86%, menghasilkan capaian kinerja sebesar 107,62%. Penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya target kinerja yang lebih menantang serta adanya penyesuaian kebijakan dan proses perencanaan pembangunan, namun kinerja tetap melampaui target.

Pada tahun 2024, target kembali dinaikkan menjadi 98,50%, dengan realisasi 102,41%, sehingga capaian kinerja tercatat sebesar 103,97%. Penurunan capaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja di tengah peningkatan standar kualitas perencanaan, namun secara umum indikator tetap tercapai dengan baik.

Sementara itu, pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 80,25% dengan realisasi 87%, sehingga capaian kinerja meningkat menjadi 108,41%. Peningkatan capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja yang didorong oleh penguatan koordinasi, peningkatan kualitas dokumen perencanaan, serta tindak lanjut hasil evaluasi dan monitoring pada tahun-tahun sebelumnya.Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah selama periode 2022–2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, karena seluruh capaian berada di atas 100%, yang menandakan bahwa target kinerja berhasil dicapai bahkan dilampaui setiap tahunnya.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Tabel 3. 18. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2024	Target Akhir Renstra (2023)	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan kualitas perencana-an pem - bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	87%	80,25%	80,25%	108,41%
1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pem- bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	87%	80,25%	80,25%	18,41%

Target akhir Renstra Bappeda Kota Bima tahun 2025 adalah sebesar 80,25%, dari tabel 3.13. diatas dapat dilihat bahwa Tingkat capain kinerja Bappeda Kota Bima melebihi target akhir Renstra yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 108,41%.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Bappeda apabila dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya karena sampai saat ini belum ada standar baku baik dari Kemendagri maupun dari Bappenas tentang tata cara pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan

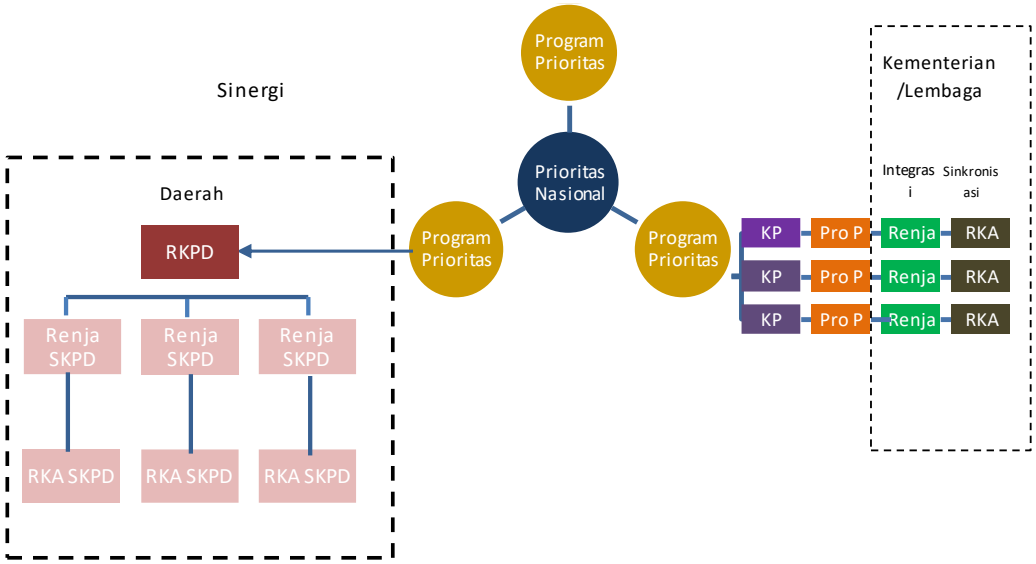
juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara karena masing-masing Bappeda baik di Kota/Kabupaten maupun Propinsi dalam menentukan rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda.

Sebagai alternatif perbandingannya adalah membandingkan Penetapan formula perhitungan indeks kualitas perencanaan Pembangunan daerah Bappeda Kota Bima melalui pendekatan perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mengukur tingkat keterpaduan (integrasi, sinkronisasi dan sinergi) perencanaan pembangunan nasional, termasuk konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk mencapai sasaran/target prioritas nasional. Melalui IPPN dapat diketahui Tingkat kualitas dari perencanaan Pembangunan nasional serta pengendalian dan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pedoman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Laporan Kinerja 2021 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional IPPN adalah merupakan Indikator kemeterian Bappenas yang pertama, yang disusun dengan tujuan untuk mengukur kinerja Kementerian Bappenas yang bersifat inisiatif strategis/Prakarsa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan percepatan pelaksanaan rencana Pembangunan yang berimplikasi pada penguatan peran Bappenas melalui :

a. Pengukuran kualitas perencanaan dan pengendalian Pembangunan nasional;
b. Pengukuran kualitas perencanaan Kementerian/Lembaga dan daerah dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan kurang;
c. Penyusunan indeks yang akan yang akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

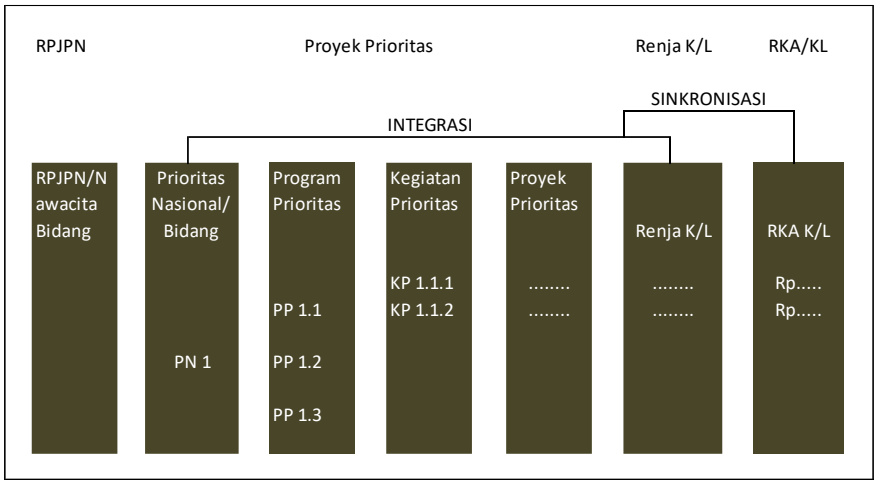
Untuk mengukur integrasi dan sinkronisasi dilakukan pemetaan dari Prioritas Nasional (PN) ke Program Prioritas (PP) kemudian ke Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas dan Renja serta RKA K/L. Sedangkan sinergitas dapat dilihat dari PN-PP-RKPD-Renja SKPD-RKA SKPD, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 3. Mekanisme Pengukuran Keselarasan (Integrasi,SInkronisasi dan Sinergitas)

Sumber : Pedoman No.5 Tahun 2021 Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Bappenas

Untuk pemetaan proses integrasi dan sinkronisasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 4. Mekanisme Perhitungan Keselarasan Integrasi dan SInkronisasi

Sumber : Pedoman No.5 Tahun 2021 Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Bappenas

Aspek integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan dalam/antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L. Aspek integrasi terdiri dari 3(tiga) unsur yaitu:

a. Keselarasan RKP dengan RPJMN

Persentase keselarasan RPJMN dan RKP = (Jumlah sasaran PN/PP/KP yang sesuai dengan sasaran Pokok RPJMN sesuai substansinya/Jumlah total sasaran pokok RPJMN sesuai substansinya) x 100%

b. Keselarasan Renja K/L dengan sasaran PN,PP,KP dalam RKP
   Persentase keselarasan Renja K/L dengan RKP = (Jumlah sasaran output progyek prioritas Renja K/L yang sesuai dengan sasaran KP di RKP sesuai substansinya/Jumlah total sasaran KP dalam RKP sesuai substansinya) x 100%
c. Keselarasan RPJMN/Renja K/L dengan Renstra K/L diukur hanya untuk satu tahun pertama.

Aspek sinkronisasi ditujukan untu mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN,PP dan KP dalam RKP baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi.Pengukuran aspek sinkronisasi diukur melalui keselarasan muatan RKA K/L dan mengidentifikasi kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian PN,PP dan KP dalam RKP. Dimana persentase keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L = (Jumlah rincian output prioritas KP/PP sesuai PN dalam Renja K/L yang dianggarkan dalam RKA K/L /Jumlah total sasaran kegiatan K/L yang dianggarkan dalam K/L) x 100%.

Aspek sinergi ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah dan daerah dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran prioritas nasional dan menghitung dukungan sasaran/program daerah yang dianggarkan dalam APBD. Sinergi diperoleh melalui perhitungan antara lain:

1. Perhitungan keselarasan perencanaan pusat dan daerah
   Persentase keselarasan sasaran utama pembangunan propinsi dengan sasaran utama pembangunan nasional = (jumlah propinsi yang sasaran utama pembangunannya selaras dengan sasaran utama pembangunan nasional / jumlah total propinsi) x 100%.
2. Perhitungan keselarasan perencanaan dana alokasi khusus (DAK) fisik
3. Perhitungan keselarasan perencanaan PN/PP/KP/ProPP di pusat dan daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional adalah indikator yang bersifat komposit dan perhitungannya menggunakan pembobotan dari aspek-aspek pembentuknya dan setiap aspek memiliki kamus indicator masing-masing. Metode perhitungan IPPN dihitung dengan 2 tahap, tahap pertama adalah mengukur capaian setiap aspek (Integrasi,Sinkronisasi dan sinergi) dan tahap kedua adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap aspeknya (Integrasi : 45%, Sinkronisasi 35% dan sinergi 20%). Demikian halnya dengan formula indeks kualitas perencanaan diperoleh dengan 2 tahap, tahap pertama adalah mengukur capaian rata-rata dari indikator sasaran strategis Kota, OPD dan Program prioritas OPD, kemudian tahap kedua adalah mengukur pembobotan dari rata-rata capaian setiap indikator kinerja (Sasaran Kota : 50%, Sasaran OPD 30% dan capaian program OPD; 20%).

Perbandingan hasil Indeks Perencanaan pembangunan Nasional tahun 2022 (untuk IPPN tahun 2023 belum rilis) dengan nilai indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Bima tahun 2023 :

Tabel 3. 19. Tabel Perbandingan IPPN dan Indeks Kualitas Perencanaan

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)				Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2022	85	93,78	110,33%	78,97	98,36	124,55
2023			Belum rilis	90	96,859	107,62
2024			Belum rilis	98,5	102,307	103,86
2025			Belum rilis	80,25	87	108,41

Sumber : Pemukhtahiran Laporan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2022

3.2.5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Bappeda Kota Bima di tahun 2025, antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk untuk mendukung pelaksanaan program program prioritas yang mendukung capaian sasaran Pembangunan daerah;
2. Kurangnya kordinasi antar instansi terkait;
3. Kurangnya keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia yang ada untuk bisa merumuskan dan melaksanakan program Pembangunan yang efektif;
4. Kebijakan kebijakan politik yang tidak konsisten dengan tujuan dan sasaran Pembangunan yang ingin dicapai;
5. Kota Bima belum secara optimal dalam pendampingan kegiatan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya potensial daerah
6. Kota Bima belum mempunyai wadah untuk menampung dan memasarkan sumber sumber daya potensial daerah
7. Kota Bima belum memiliki branding yang menonjolkan identitas untuk memasarkannilai-nilai yang dimiliki daerah dan kurang dalam memanfaatkan momentum event-event sebagai media promosi pengenalan potensi daerah.
8. Inkonsistensi data sebagai basis intervensi program-program yang akan implementasikan dilapangan.
9. Sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah tidak dapat dilakukan secara optimal karena regulasi perencanaan dan penganggaran dari pemerintah pusat yang selalu berubah-ubah.
10. Masih adanya ketidaksepahaman terkait perencanaan dan penganggaran antara otoritas institusi perencanaan dan pemegang otoritas penganggaran, sehingga sangat sulit untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
11. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.
12. Kurangnnya pemantauan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program yang dilaksanakan.

Meskipun dengan adanya faktor-faktor penghambat kinerja tersebut, pada tahun 2025 Bappeda Kota Bima tetap dapat meraih target kinerja yang baik. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan nasional;
2. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
3. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Kota Bima;
4. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan;
5. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan;
6. Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pengampu Program.

Dari hasil kinerja masing-masing bidang yang berhasil mencapai kinerja sasaran strategis, Bappeda memberikan penghargaan kepada bidang-bidang yang telah mendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja baik capaian kinerja sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program serta juga memberikan penghargaan kepada Sekretariat sebagai pendukung dalam pencapaian sasaran strategis Bappeda.

3.2.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik (91.04%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3. 20. Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No			Kinerja			Anggaran		
	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Kinerja perencanaan pembangunan daerah Meningkat	Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	95,00%			7.702.025.460	7.011.880.136	91,04%
	BELANJA OPERASI					7.702.025.460	7.011.880.136	91,04%
	Belanja pegawai					4.954.540.588,00	4.669.818.500,00	
	Belanja gaji dan tunjangan ASN					4.954.540.588,00	4.669.818.500,00	94%
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					0,00	0,00	0
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00	0,00	0
	Belanja Barang Jasa					2.747.484.872,00	2.342.061.636,00	85%
	Belanja Barang Jasa					1.014.802.000,00	825.443.100,00	81,34
	Belanja Jasa					835.425.000,00	696.298.971,00	83,34

No			Kinerja			Anggaran		
	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Belanja Pemeliharaan					22.530.000,00	21.525.000,00	95,53
	Belanja Perjalanan Dinas					874.727.872,00	798.794.565,00	91,32
	BELANJA MODAL					0,00	0,00	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0,00	0,00	0
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					0,00	0,00	0
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					0,00	0,00	0
	Belanja Modal Komputer					0,00	0,00	0
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					0	0	0
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					0	0	99,9
	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					0	0	99,88
Total Belanja						7.702.025.460,00	7.011.880.136,00	91,04%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja BappedaTahun 2025

Selanjutnya dilakukan perhitungan efisiensi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK 02/2017. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran kemudian dibagi dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dikali dengan 100%.

Rumus Efisensi :

$$\text{Efisiensi (E)} = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi)}$$

Keterangan :

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
Cki : Capaian Keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran i

Batas maksimal nilai efisiensi yang ditetapkan adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Berikut dapat dilihat pada tabel 3.16 efisiensi penggunaan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025.

Tabel 3. 21. Efisensi Anggaran Program, Kegiatan dam Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	5	URUSAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				7.702.025.460																7.971.922.554											
	5.01	PERENCANAAN																															
PERENCANAAN						7.702.025.460																1.216.340.333	1.565.888.907	1.690.669.629	2.538.981.267	7.011.880.136	8,13 %	13,35 %	23,78 %	59,28 %	91,04 %	#DIV/0!	
1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 %	Satuan	6.059.663.688	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	100	100	100	100	100,0	1.137.978.619	1.382.116.399	1.310.271.599	1.844.010.851	5.674.377.468	10,57 %	22,81 %	21,62 %	93,64 %	93,64	6,36	Efisien
	5.01.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Satuan	83.823.000	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	100	100	100	100	100	20.138.000	5.040.000	11.175.000	44.758.000	81.111.000	24,02 %	6,01 %	13,33 %	53,40 %	96,76	3,24	Efisien
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	26.796.000	1	1	1	1	4	1	1		2	4	25	25		50	100	10.598.000	-	6.625.000	9.235.000	26.458.000	39,55 %	0,000 %	24,72 %	34,46 %	98,74	1,26	Efisien
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	9.197.000	1				1	1				1	100	-	-		100	-	-	-	7.369.500	7.369.500	0,00 %	0,000 %	0,00 %	80,13 %	80,13	19,87	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen	4.550.000			1		1				1	1	-	-	-	1	100	-	-	4.550.000	-	4.550.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00	-	Efisien
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	4.500.000	1				1	1				1	100	-	-		100	4.500.000	-	-	-	4.500.000	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00	-	Efisien
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen	6.350.000			1		1					-	0	-	-	1	100	-	-	-	6.065.000	6.065.000	0,00%	0,00%	0,00%	95,51%	95,51	4,49	Efisien
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	Laporan	15.700.000				1	1					-	0	1			100	-	-	-	15.628.500	15.628.500	0,00%	0,00%	0,00%	99,54%	99,54	0,46	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/RATA2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/RATA2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																														
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	16.730.000	1	1	1	3	6	1	1	1	3	6	17	17	17	50	100	5.040.000	5.040.000	-	6.460.000	16.540.000	30,13%	30,13%	0,00%	38,61%	98,86	1,14	Efisien
	5.01.1.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**Satuan**	**5.185.761.888**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.049.356.303**	**1.069.996.303**	**1.069.163.903**	**1.675.673.891**	**4.864.190.400**	**20,24%**	**20,63%**	**20,62%**	**32,31%**	**93,80**	**6,20**	**Efisien**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Org/bln	Rp4.954.540.588	29	29	29	29	116	29	29	29	29	116	25	25	25	25	100	1.049.356.303	1.049.356.303	1.049.356.303	1.521.749.591	4.669.818.500	21,18%	21,18%	21,18%	30,71%	94,25	5,75	Efisien
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	Rp140.602.000	1				1	1				1	100	-	-		100	-	-	-	112.510.000	112.510.000	0,00%	0,00%	0,00%	80,02%	80,02	19,98	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan	Rp27.711.600				1	1				1	1	0	-	-	1	100	-	-	-	27.711.600	27.711.600	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00	-	Efisien
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jummlah laporan Pengelolaan dan penyiapan laporan bahan tanggapan pemeriksaan	1	laporan	14.225.000,00		1			1		1			1		1			100	-	-	4.172.400	6.927.600	11.100.000	0,00%	0,00%	29,33%	48,70%	78,03	21,97	Tidak Efisien
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4	laporan	Rp37.690.700	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	10.840.000	15.635.200	5.635.900	32.111.100	0,00%	28,76%	41,48%	14,95%	85,20	14,80	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen	Rp10.992.000				1	1				1	1	-	-	-	100	100	-	9.800.000	-	1.139.200	10.939.200	0,00%	89,16%	0,00%	10,36%	99,52	0,48	Efisien
	5.01.1.2.06	**Administrasi Barang Milik Daertah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Administrasi Barang Milik Daertah Pada Perangkat Daerah**			**Rp 14.280.000**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**3.000.000**	**4.200.000**	**6.808.900**	**14.008.900**	0,00%	21,01%	29,41%	47,68%	**98,10**	**1,90**	**Efisien**
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	Rp2.100.000	1				1	1				1	100				100	-	-	-	2.100.000	2.100.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00	-	Efisien
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	Rp10.860.000		1			1		1			1		100			100	-	3.000.000	4.200.000	3.388.900	10.588.900	0,00%	27,62%	38,67%	31,21%	97,50	2,50	Efisien
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan penyusunan laporan	1	Laporan	Rp1.320.000			1		1					-				100	100	-	-	-	1.320.000	1.320.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00	-	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			barang milik daerah pada SKPD																														
	5.01.1.2.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah**			**14.031.000,00**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**-**	**1.200.000**	**8.238.000**	**9.438.000**	**0,00%**	**0,00%**	**8,55%**	**58,71%**	**67,27**	**32,73**	Tidak Efisien
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	dokumen	1.643.000,00		1			1		1			1		100			100	-	-	-	790.200	790.200	0,00%	0,00%	0,00%	48,09%	48,09	51,91	Tidak Efisien
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Kegiatan	Rp5.400.000		1			1		1			1		100			100	-	-	-	5.400.000	5.400.000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00	-	Efisien
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	laporan	6.988.000,00				1	1					-				100	100	-	-	1.200.000	2.047.800	3.247.800	0,00%	0,00%	17,17%	29,30%	46,48	53,52	Tidak Efisien
	5.01.1.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum**	**100%**	**Satuan**	**Rp 545.633.800**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**38.684.316**	**286.226.596**	**163.874.196**	**25.005.660**	**513.790.768**	**7,09%**	**52,46%**	**30,03%**	**4,58%**	**94,16**	**5,84**	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			Perangkat Daerah																														
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	6.531.800,00		1			1		1			1	0	100	-		100	-	-	-	4.550.000	4.550.000	0,00%	0,000%	0,00%	69,66%	69,66	30,34	Tidak Efisien
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	148.469.000,00		1			1		1			1	0	100	-		100	18.802.000	85.632.000	18.802.000	10.491.000	133.727.000	12,66%	57,688%	12,66%	7,07%	90,07	9,93	Efisien
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	73.113.000,00		1			1		1			1	0	100	-		100	3.950.000	59.472.400	3.950.000	3.525.700	70.898.100	5,40%	81,34%	5,40%	4,82%	96,97	3,03	Efisien
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	317.520.000,00	1	1	1	1	4	1	1			2	25	25	-		100	15.932.316	141.122.196	141.122.196	6.438.960	304.615.668	5,02%	44,445%	44,45%	2,03%	95,94	4,06	Efisien
	5.01.1.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**Satuan**	**Rp 145.400.000**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**26.800.000**	**-**	**36.805.000**	**63.849.400**	**127.454.400**	**18,43%**	**0,000%**	**25,31%**	**43,91%**	**87,66**	**12,34**	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	69.350.000,00		1			1		1			1	0	100	-		100	26.800.000	-	26.800.000	9.650.000	63.250.000	38,64%	0,000%	38,64%	13,91%	91,20	8,80	Efisien
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	39.270.000,00				1	1					-	0	-	-	100	100			10.005.000	19.680.400	29.685.400	0,00%	0,000%	25,48%	50,12%	75,59	24,41	Tidak Efisien
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	22.180.000,00				1	1					-	0	-	-	100	100	-	-	-	20.924.000	20.924.000	0,00%	0,000%	0,00%	94,34%	94,34	5,66	Efisien
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan	14.600.000,00				1	1					-	0	-	-	100	100	-	-	-	13.595.000	13.595.000	0,00%	0,000%	0,00%	93,12%	93,12	6,88	Efisien
	5.01.1.2.09	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**Satuan**	**Rp 70.734.000**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**25**	**25**	**25**	**25**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**3.000.000**	**17.853.500**	**23.853.500**	**19.677.000**	**64.384.000**	4,24%	25,24%	33,72%	27,82%	**91,02**	**8,98**	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	62.804.000,00	3	3	3	2	11	3	3	3	2	11	27	27	27	18	100	3.000.000	17.853.500	17.853.500	17.747.000	56.454.000	4,78%	28,43%	28,43%	28,26%	89,89	10,11	Efisien
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	7.930.000,00	3	3	2	2	10	3	3	3	1	10	30	30	30	10	100	-	-	6.000.000	1.930.000	7.930.000	0,00%	0,00%	75,66%	24,34%	100,00	-	Efisien
B	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/ RPD (Program)	95	persen	419.788.000,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100	100	100	100	100	47.400.000	14.221.600	118.987.200	174.936.132	355.544.932	11,29%	3,39%	28,34%	41,67%	84,70	15,30	Efisien
			Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang dilaksanakan	65	persen	419.788.000,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100	100	100	100	100	47.400.000	14.221.600	118.987.200	174.936.132	355.544.932	11,29%	3,39%	28,34%	41,67%	84,70	15,30	Tidak Efisien
I.	**5.01.02.2.01**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan**	**95**	**persen**	**Rp 336.910.000**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**95,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**47.400.000**	**14.221.600**	**106.027.200**	**116.524.132**	**284.172.932**	**14,07%**	**4,22%**	**31,47%**	**34,59%**	84,35	15,65	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/RATA2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/RATA2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			daerah																														
			Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	**70**	**persen**	**Rp 336.910.000**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**47.400.000**	**14.221.600**	**106.027.200**	**116.524.132**	**284.172.932**	**14,07%**	**4,22%**	**31,47%**	**34,59%**	84,35	15,65	**Efisien**
			Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	**70**	**persen**	**Rp 336.910.000**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**47.400.000**	**14.221.600**	**106.027.200**	**116.524.132**	**284.172.932**	**14,07%**	**4,22%**	**31,47%**	**34,59%**	84,35	15,65	**Efisien**
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	berita acara	27.189.000,00	1	1			2	1	1			2	50	50			100	-	-	20.000.000	3.159.000	23.159.000	0,00%	0,00%	73,56%	11,62%	85,18	14,82	Efisien
		Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	berita acara	45.143.000,00	1				1	1				1	100				100	16.200.000	-	-	11.873.000	28.073.000	35,89%	0,00%	0,00%	26,30%	62,19	37,81	Tidak Efisien
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	berita acara	78.319.000		2			2		2			2	0	100			100	-	-	71.805.600	-	71.805.600	0,00%	0,00%	91,68%	0,00%	91,68	8,32	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	4	dokumen	186.259.000	1	1	2		4	1	1	2		4	25	25,00			100,00	31.200.000	14.221.600	14.221.600	101.492.132	161.135.332	16,75%	7,64%	7,64%	54,49%	86,51	13,49	Efisien
II.	**5.01.02.03**	**Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya**	**98,5%**	**Satuan**	**82.878.000**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**-**	**12.960.000**	**58.412.000**	**71.372.000**	**0,00%**	**0,00%**	**15,64%**	**70,48%**	86,12	13,88	**Efisien**
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2	Laporan	27.409.000			1		1			1		1				1	100	-	-	12.960.000	8.060.000	21.020.000	0,00%	0,00%	47,28%	29,41%	76,69	23	Tidak Efisien
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan		1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25			100	-	-	-	50.352.000	50.352.000	0,00%	0,00%	0,00%	90,78%	90,78	9,22	Efisien
C.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan**	**95**	**Persen**	**1.222.573.772**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**30.961.714**	**169.550.908**	**261.410.830**	**520.034.284**	**981.957.736**	**2,53%**	**13,87%**	**21,38%**	**42,54%**	**80,32**	**19,68**	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor pemerintahan dan pembangunan manusia																														
			Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	95	Persen	1.222.573.772	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	30.961.714	169.550.908	261.410.830	520.034.284	981.957.736	2,53 %	13,87 %	21,38 %	42,54 %	80,32	19,68	Efisien
			Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegi	95	Persen	1.222.573.772	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	30.961.714	169.550.908	261.410.830	520.034.284	981.957.736	2,53 %	13,87 %	21,38 %	42,54 %	80,32	19,68	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/RATA2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/RATA2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			atan) sektor infrastruktur dan kewilayahan																														
I.	**5.01.03.2.01**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**95**	**Persen**	**282.346.245,00**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**16.124.000**	**66.306.724**	**64.117.000**	**64.450.502**	**210.998.226**	**5,71 %**	**23,48 %**	**22,71 %**	**22,83 %**	**74,73**	25,27	Tidak Efisien
			Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**95**	Persen	282.346.245,00	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	100	16.124.000	66.306.724	64.117.000	**64.450.502**	210.998.226	**5,71 %**	**23,48 %**	**22,71 %**	**22,83 %**	**74,73**	25,27	Tidak Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	32.933.700,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	6.040.000	9.066.000	-	7.032.500	22.138.500	18,34%	27,53%	0,00%	21,35%	67,22	32,78	Tidak Efisien
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	29.332.560,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	1.388.000	11.403.120	1.388.000	8.682.440	22.861.560	4,73%	38,888%	4,73%	29,60%	77,94	22,06	Tidak Efisien
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Dokumen	38.276.300	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	-	25.278.000	5.302.000	30.580.000	0,00%	0,000%	66,04%	13,85%	79,89	20,11	Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	124.422.423,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	8.696.000	33.661.600	8.696.000	38.473.404	89.527.004	6,99%	27,05%	6,99%	30,92%	71,95	28,05	Tidak Efisien
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	43.163.262	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	12.176.004	20.000.000	4.960.158	37.136.162	0,00%	28,21%	46,34%	11,49%	86,04	13,96	Efisien
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	4	Dokumen	14.218.000,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-		8.755.000	-	8.755.000	0,00%	0,00%	61,58%	0,00%	61,58	38,42	Tidak Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			Pembangunan Manusia																														
II.	**5.01.03.02**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**95**	**Persen**	**Rp620.982.545**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**9.437.714**	**52.347.684**	**49.643.364**	**402.189.766**	**513.618.528**	**1,52%**	**8,43%**	**7,99%**	**64,77%**	**82,71**	**17,29**	**Efisien**
			Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya	**95**	**Persen**	Rp620.982.545	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	**100**	9.437.714	52.347.684	49.643.364	402.189.766	513.618.528	**1,52%**	**8,43%**	**7,99%**	**64,77%**	**82,71**	**17,29**	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			Alam (SDA)																														
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	61.966.257,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	9.437.714	10.237.714	10.237.714	657.827	30.570.969	15,23%	16,52%	16,52%	1,06%	49,33	50,67	Tidak Efisien
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	19.270.773,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	800.000	-	16.208.973	17.008.973	0,00%	4,15%	0,00%	84,11%	88,26	11,74	Efisien
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	4	Dokumen	10.188.900,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	-	7.640.000	-	7.640.000	0,00%	0,00%	74,98%	0,00%	74,98	25,02	Tidak Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																														
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	469.459.825,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	19.889.650	31.765.650	363.219.496	414.874.796	0,00%	4,24%	6,77%	77,37%	88,37	11,63	Efisien
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	51.826.790,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	21.420.320	-	16.505.470	37.925.790	0,00%	41,33%	0,00%	31,85%	73,18	26,82	Tidak Efisien
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	4	Dokumen	8.270.000,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	-		5.598.000	5.598.000	0,00%	0,00%	0,00%	67,69%	67,69	32,31	Tidak Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																														
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Keselarasan program/kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan**	**95**	**Persen**	**Rp319.244.982**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**95**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**5.400.000**	**50.896.500**	**147.650.466**	**53.394.016**	**257.340.982**	**1,69%**	**15,94%**	**46,25%**	**16,73%**	**80,61**	**19,39**	**Efisien**
			Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**95**	**Persen**	Rp319.244.982	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	100	100	100	100	**100**	5.400.000	50.896.500	147.650.466	**53.394.016**	257.340.982	**1,69%**	**15,94%**	**46,25%**	**16,73%**	**80,61**	**19,39**	**Efisien**

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	Rp58.239.120	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	28.516.500	20.000.000	2.528.320	51.044.820	0,00%	48,96%	34,34%	4,34%	87,65	12,35	Efisien
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	Rp135.203.902	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	11.580.000	82.281.606	31.524.696	125.386.302	0,00%	8,56%	60,86%	23,32%	92,74	7,26	Efisien
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastru	4	dokumen	18.180.900,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	-	-	3.375.000	3.375.000	0,00%	0,00%	0,00%	18,56%	18,56	81,44	Tidak Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			ktur																														
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Laporan	72.895.800,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	10.800.000	30.648.000	10.389.000	51.837.000	0,00%	14,82%	42,04%	14,25%	71,11	28,89	Tidak Efisien
		Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	25.584.760,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	5.400.000	-	14.720.860	-	20.120.860	21,11%	0,00%	57,54%	0,00%	78,64	21,36	Tidak Efisien
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokume	4	dokumen	9.140.500,00	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	25	25	25	25	100	-	-	-	5.577.000	5.577.000	0,00%	0,00%	0,00%	61,01%	61,01	38,99	Tidak Efisien

NO	KODE	URUSAN/BIDANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/SUBKEGIATAN (OUTPUT)	TARGET TAHUN 2025		ANGGARAN 2025	TARGET 2025					REALISASI FISIK RENJA BAPPEDA TAHUN 2025					CAPAIAN KINERJA 2025					REALISASI ANGGARAN 2025 s/d				REALISASI TA. 2025	CAPAIAN ANGGARAN					TINGKAT EFISIENSI	
							TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL/ RATA 2	TWI	TW II	TW III	TW IV		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
1	*2*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*
			n Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																														
Rata-rata Capaian Kinerja																					**100,0**										**91,04 %**		
Predikat Kinerja																					**Tinggi**										**Sedang**	**8,96**	**Efisien**
Total anggaran dari seluruh program						**7.702.025.460**																				**7.011.880.136**							
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)																															**91,04 %**		
Predikat Kinerja dari seluruh program																															**Sedang**		

Sumber: Hasil Analisa 2025

Tabel 3. 22. Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	REALISASI ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja setiap sektor	80,32 %
2		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	84,70%
4		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tercapainya Indikator Kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah	93,64 %

Sumber: Hasil Analisa 2025

Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung berdasarkan Tabel 3.23, realisasi anggaran pada program utama dan program pendukung dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah menunjukkan hasil yang baik.

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah mencatat realisasi anggaran sebesar 80,32%, dengan capaian kinerja berupa meningkatnya kesesuaian capaian kinerja setiap sektor. Selanjutnya, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 84,70%, yang berkontribusi terhadap meningkatnya kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah. Sementara itu, Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menunjukkan realisasi anggaran tertinggi, yaitu 93,64%, yang mendukung tercapainya indikator kinerja layanan penunjang perangkat daerah.

Secara umum, meskipun realisasi anggaran pada masing-masing program belum mencapai 100 persen, seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran. Sisa anggaran yang tidak terserap merupakan hasil dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui pengendalian belanja, penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Tabel 3. 23. Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima

NO.	SASARAN	INDIKATOR	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah	108,41%	91,04%	8,96%

Sumber: Hasil Analisa 2025

Berdasarkan Tabel 3.24 Analisis Efisiensi Capaian Sasaran Strategis Bappeda Kota Bima, dapat diketahui bahwa sasaran strategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang diukur melalui Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah berhasil mencapai kinerja sebesar 108,41%, atau melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,04%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 8,96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pencapaian kinerja yang optimal dapat diraih tanpa harus menyerap seluruh alokasi anggaran, mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, kinerja Bappeda Kota Bima dalam mencapai sasaran strategis tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi output dan outcome, tetapi juga dari sisi pengelolaan anggaran yang berorientasi pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2025 sebesar Rp.7.011.880.136 atau mencapai 91,04% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 7.702.025.460. Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Rincian anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 4.954.540.588 dan terealisasi sebesar Rp. 4.669.818.500,00 atau mencapai 94,25 %, selanjutnya alokasi anggaran untuk belanja non-gaji sebesar Rp. 2.747.484.872,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.342.061.636,00 atau mencapai 85,24%.

Alokasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 1.642.361.772,00,- yang terdiri dari Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 1.337.502.668,- atau mencapai 81,44%, sedangkan untuk alokasi anggaran program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 6.059.663.688 dapat terealisasi sebesar Rp. 5.674.377.468 atau mencapai 93,64%.

Realisasi anggaran terendah pada Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 981.957.736 atau hanya mencapai 80,32% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.222.573.772. Program ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.346.245,00 dapat direalisikan sebesar Rp. 210.998.226 atau mencapai 74,73%, koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp620.982.545 dapat direalisasikan sebesar Rp. 513.618.528 atau mencapai 82,71%, koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp319.244.982 dapat direalisasikan sebesar Rp. 257.340.982 atau mencapai 80,61%. Sementara untuk penyerapan anggaran tertinggi untuk program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 355.544.932 atau mencapai 84,70% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 419.788.000,00. Program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp336.910.000 dapat direalisasikan sebesar Rp. 284.172.932 atau mencapai 84,35%, selanjutnya kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 71.372.000 atau mencapai 86,12% dari total anggaran sebesar Rp. 82.878.000.

Tabel 3. 24. Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bappeda Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.954.540.588,00	Rp. 4.669.818.500,00	94,25%

Tabel 3. 25. Realisasi Anggaran Belanja Non Gaji Bappeda Tahun 2025

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	PERENCANAAN		**7.702.025.460,00**	**7.009.950.136,00**	**692.075.324,00**	**91,01**
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**6.059.663.688,00**	**5.672.447.468,00**	**387.216.220,00**	**93,64**
I	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**83.823.000,00**	**81.111.000,00**	**2.712.000,00**	97
	1	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**26.796.000,00**	**26.458.000,00**	338.000,00	99
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.642.000,00	1.590.000,00	52.000,00	97
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.184.000,00	2.153.000,00	31.000,00	99
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.090.000,00	2.080.000,00	10.000,00	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.060.000,00	11.815.000,00	245.000,00	98
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.820.000,00	8.820.000,00	-	100
	2	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	**9.197.000,00**	**7.369.500,00**	1.827.500,00	80
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	35.000,00	0,00	35.000,00	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	792.000,00	0,00	792.000,00	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.370.000,00	7.369.500,00	1.000.500,00	88
	3	**Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00	2.100.000,00	-	100
	4	**Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100
	5	**Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD**	**6.350.000,00**	**6.065.000,00**	285.000,00	96
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.450.000,00	2.450.000,00	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.900.000,00	3.615.000,00	285.000,00	93
	6	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**15.700.000,00**	**15.628.500,00**	71.500,00	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000.000,00	11.953.500,00	46.500,00	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	3.675.000,00	25.000,00	99
	7	**Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**16.730.000,00**	**16.540.000,00**	**190.000,00**	99
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	1.060.000,00	190.000,00	85
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.480.000,00	15.480.000,00	-	100
II	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**5.185.761.888,00**	**4.864.190.400,00**	**321.571.488,00**	94
	8	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**4.954.540.588,00**	**4.669.818.500,00**	**284.722.088,00**	94
		Belanja Gaji Pokok PNS	1.931.581.211,00	1.922.048.520,00	9.532.691,00	100
		Belanja Gaji Pokok PPPK	276.659.225,00	272.276.765,00	4.382.460,00	98
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.872.775,00	122.611.974,00	260.801,00	100
		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	34.717.592,00	33.647.929,00	1.069.663,00	97

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	68.390.000,00	63.080.000,00	5.310.000,00	92
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	225.005.000,00	224.460.000,00	545.000,00	100
		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	38.803.000,00	38.120.000,00	683.000,00	98
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	35.319.250,00	34.160.000,00	1.159.250,00	97
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.270.000,00	2.725.000,00	545.000,00	83
		Belanja Tunjangan Beras PNS	84.271.051,00	84.224.460,00	46.591,00	100
		Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.436.320,00	20.036.200,00	1.400.120,00	93
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	63.034.362,00	26.211.215,00	36.823.147,00	42
		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.589.827,00	512.993,00	3.076.834,00	14
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.199,00	28.717,00	482,00	98
		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.638,00	4.904,00	1.734,00	74
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	201.964.487,00	135.765.585,00	66.198.902,00	67
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30.118.789,00	17.351.115,00	12.767.674,00	58
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.496.254,00	3.979.351,00	516.903,00	89
		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	656.700,00	579.810,00	76.890,00	88
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	13.488.762,00	11.938.127,00	1.550.635,00	89
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.970.012,00	1.739.352,00	230.660,00	88
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	698.590.711,00	656.666.466,00	41.924.245,00	94
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	77.498.928,00	59.988.622,00	17.510.306,00	77
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	449.510.269,00	410.655.500,00	38.854.769,00	91
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	49.866.960,00	48.786.576,00	1.080.384,00	98
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	465.727.314,00	438.033.488,00	27.693.826,00	94
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	51.665.952,00	40.185.831,00	11.480.121,00	78
	9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.602.000,00	112.510.000,00	28.092.000,00	80
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.502.000,00	6.490.000,00	12.000,00	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	6.300.000,00	6.300.000,00	-	100
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	127.800.000,00	99.720.000,00	28.080.000,00	78
	10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.711.600,00	27.711.600,00	0,00	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	514.500,00	514.500,00	-	100
		Belanja Alat/Bahn untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.037.100,00	7.037.100,00	-	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100
		Belanja Lembur	9.360.000,00	9.360.000,00	-	100
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100
	11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.225.000,00	11.100.000,00	3.125.000,00	78
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.100.000,00	11.100.000,00	-	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00	-

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	37.690.700,00	32.111.100,00	5.579.600,00	85
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.347.000,00	3.340.000,00	7.000,00	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.016.000,00	975.000,00	41.000,00	96
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.577.700,00	23.476.100,00	2.101.600,00	92
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00	-
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.320.000,00	4.320.000,00	-	100
	13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.992.000,00	10.939.200,00	52.800,00	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	462.000,00	460.000,00	2.000,00	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.030.000,00	9.029.200,00	800,00	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00	1.450.000,00	50.000,00	97
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**14.280.000,00**	**14.008.900,00**	**271.100,00**	98
	14	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000	2.100.000	-	100
	15	**Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD**	**10.860.000,00**	**10.588.900,00**	**271.100,00**	98
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.760.000,00	2.680.000,00	80.000,00	97
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.100.000,00	7.908.900,00	191.100,00	98
	16	**Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**	**1.320.000,00**	**1.320.000,00**	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00	1.320.000,00	-	100
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**14.031.000,00**	**9.438.000,00**	**4.593.000,00**	67
	17	**Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**	**1.643.000,00**	**790.200,00**	**852.800,00**	48
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	543.000,00	0,00	543.000,00	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.100.000,00	790.200,00	309.800,00	72
	18	**Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**		100
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100
	19	**Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**	**6.988.000,00**	**3.247.800,00**	**3.740.200,00**	46
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.000	0	40.000,00	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.148.000,00	2.148.000	-	100
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.100.000,00	1.099.800	200,00	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	0	3.700.000,00	-
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**545.633.800,00**	**513.790.768,00**	**31.843.032,00**	94
	20	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**6.531.800,00**	**4.550.000,00**	**1.981.800,00**	70
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.531.800,00	4.550.000,00	1.981.800,00	70
	21	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				

No	Program/Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				
		Belanja modal personel computer				
		Belanja modal peralatan personel computer				
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				
	22	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	**148.469.000,00**	**133.727.000,00**	**14.742.000,00**	90
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	31.100.000,00	30.430.000,00	670.000,00	98
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	20.000.000,00	18.912.000,00	1.088.000,00	95
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55.750.000,00	46.075.000,00	9.675.000,00	83
		Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.619.000,00	38.310.000,00	3.309.000,00	92
	23	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**73.113.000,00**	**70.898.100,00**	2.214.900,00	97
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.113.000,00	70.898.100,00	2.214.900,00	97
	24	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**317.520.000,00**	**304.615.668,00**	**12.904.332,00**	96
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	280.000,00	0,00	280.000,00	-
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	299.960.000,00	287.935.668,00	12.024.332,00	96
		Belanja Bperjalanan Dinas Dalam Kota	17.280.000,00	16.680.000,00	600.000,00	97
VI	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**145.400.000,00**	**127.454.400,00**	**17.945.600,00**	88
	25	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**69.350.000,00**	**63.250.000,00**	**6.100.000,00**	91
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000,00	0,00	50.000,00	-
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	-
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.700.000,00	63.250.000,00	2.450.000,00	96
	26	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**39.270.000,00**	**29.685.400,00**	9.584.600,00	76
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.270.000,00	29.685.400,00	9.584.600,00	76
	27	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**22.180.000,00**	**20.924.000,00**	**1.256.000,00**	94
		Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	89
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.930.000,00	6.924.000,00	6.000,00	100
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00	6.000.000,00	250.000,00	96
	28	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**14.600.000,00**	**13.595.000,00**	1.005.000,00	93
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	13.595.000,00	1.005.000,00	93
VII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**70.734.000,00**	**62.454.000,00**	**8.280.000,00**	88
	29	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**62.804.000,00**	**56.454.000,00**	**6.350.000,00**	90
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.584.000,00	41.488.500,00	4.095.500,00	91
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.720.000,00	13.288.500,00	1.431.500,00	90
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000,00	1.677.000,00	823.000,00	67
	30	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**7.930.000,00**	**6.000.000,00**	1.930.000,00	76
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.930.000,00	6.000.000,00	1.930.000,00	76
B	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**		**419.788.000,00**	**355.544.932,00**	**64.243.068,00**	85

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
I	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**336.910.000,00**	**284.172.932,00**	**52.737.068,00**	84
	1 **Pelaksanaan Konsultasi Publik**	**27.189.000,00**	**23.159.000,00**	**4.030.000,00**	85
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	641.000,00	641.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	443.000,00	443.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.610.000,00	1.610.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda benda pos	100.000,00	100.000,00	-	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.155.000,00	7.155.000,00	-	100
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	240.000,00	210.000,00	30.000,00	88
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	50
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100
	2 **Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah**	**45.143.000,00**	**28.073.000,00**	**17.070.000,00**	62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	772.000,00	772.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.251.000,00	1.251.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.115.000,00	2.590.000,00	525.000,00	83
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.675.000,00	12.330.000,00	345.000,00	97
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	280.000,00	280.000,00	-	100
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.550.000,00	2.050.000,00	15.500.000,00	12
	Belanja Sewa Taman	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	50
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	-	100
	3 **Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota**	**78.319.000,00**	**71.805.600,00**	**6.513.400,00**	92
	Belanja Bahan bahan bangunan dan konstruksi	129.000,00	125.000,00	4.000,00	97
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	870.000,00	870.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	560.000,00	560.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.415.000,00	2.415.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda pos	100.000,00	100.000,00	-	100
	Belanja Makanan dan minuman rapat	13.770.000,00	13.680.000,00	90.000,00	99
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	400.000,00	400.000,00	-	100
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.600.000,00	9.300.000,00	4.300.000,00	68
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.100.000,00	8.350.000,00	750.000,00	92
	Belanja sewa peralatan umum	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertemuan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100
	Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	2.200.000,00	800.000,00	73
	Belanja perjalanan dinas biasa	25.000.000,00	24.430.600,00	569.400,00	98
	4 **Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota**	**186.259.000,00**	**161.135.332,00**	**25.123.668,00**	87
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis	3.163.000,00	3.120.000,00	43.000,00	99

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Kantor				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.076.000,00	4.076.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.340.000,00	14.337.300,00	2.700,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.075.000,00	36.050.000,00	25.000,00	100
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.100.000,00	47.400.000,00	14.700.000,00	76
	Belanja Lembur	2.465.000,00	2.465.000,00	-	100
	Belanja perjalanan dinas biasa	50.000.000,00	46.127.032,00	3.872.968,00	92
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	14.040.000,00	7.560.000,00	6.480.000,00	54
II	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**82.878.000,00**	**71.372.000,00**	**11.506.000,00**	86
	5 **Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota**	**27.409.000,00**	**21.020.000,00**	**6.389.000,00**	77
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	562.000,00	562.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	952.000,00	938.000,00	14.000,00	99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.620.000,00	2.620.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.000,00	0,00	50.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.195.000,00	8.170.000,00	25.000,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	160.000,00	0,00	160.000,00	-
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.790.000,00	2.250.000,00	1.540.000,00	59
	Belanja Perjalanan Dinas dalam kota	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100
	6 **Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**55.469.000,00**	**50.352.000,00**	**5.117.000,00**	91
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	901.000,00	901.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.558.000,00	2.558.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.130.000,00	13.250.000,00	4.880.000,00	73
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.000.000,00	24.763.000,00	237.000,00	99
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.480.000,00	6.480.000,00	-	100
C	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.222.573.772,00**	**981.957.736,00**	**240.616.036,00**	80
I	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**282.346.245,00**	**210.998.226,00**	**71.348.019,00**	75
	1 **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Pemerintahan**	**32.933.700,00**	**22.138.500,00**	**10.795.200,00**	67
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.743.000,00	8.616.000,00	127.000,00	99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.080.000,00	4.376.000,00	3.704.000,00	54
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.700,00	346.500,00	4.200,00	99

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.800.000,00	8.800.000,00	-	100
	2 **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**29.332.560,00**	**22.861.560,00**	**6.471.000,00**	78
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.601.000,00	2.368.000,00	233.000,00	91
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.160.000,00	3.150.000,00	10.000,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	840.000,00	0,00	840.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.201.560,00	17.343.560,00	1.858.000,00	90
	3 **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**	**38.276.300,00**	**30.580.000,00**	**7.696.300,00**	80
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.637.000,00	4.169.000,00	1.468.000,00	74
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.644.000,00	4.580.000,00	64.000,00	99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.593.300,00	3.792.000,00	801.300,00	83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	0,00	700.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	898.000,00	0,00	898.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.639.000,00	12.639.000,00	-	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.085.000,00	5.400.000,00	2.685.000,00	67
	4 **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**124.422.423,00**	**89.527.004,00**	**34.895.419,00**	72
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.645.000,00	3.247.000,00	398.000,00	89
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.663.000,00	4.102.000,00	1.561.000,00	72
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.382.800,00	5.080.000,00	1.302.800,00	80
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.864.000,00	8.760.000,00	4.104.000,00	68
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	23.450.000,00	16.100.000,00	7.350.000,00	69
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.417.623,00	52.238.004,00	20.179.619,00	72
	5 **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**43.163.262,00**	**37.136.162,00**	**6.027.100,00**	86
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	714.000,00	305.000,00	409.000,00	43
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.088.000,00	272.000,00	816.000,00	25
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.892.100,00	440.000,00	1.452.100,00	23
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.119.162,00	36.119.162,00	-	100
	6 **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**	**14.218.000,00**	**8.755.000,00**	**5.463.000,00**	62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	652.000,00	600.000,00	52.000,00	92
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	775.000,00	775.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.991.000,00	1.980.000,00	11.000,00	99
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50
II	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**620.982.545,00**	**513.618.528,00**	**107.364.017,00**	83
	7 **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**61.966.257,00**	**30.570.969,00**	**31.395.288,00**	49
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.112.000,00	1.109.000,00	3.000,00	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.875.000,00	1.132.000,00	743.000,00	60
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.915.200,00	1.534.800,00	380.400,00	80
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.720.000,00	5.695.000,00	27.025.000,00	17
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.004.057,00	21.100.169,00	903.888,00	96
	8 **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**19.270.773,00**	**17.008.973,00**	**2.261.800,00**	88
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	476.000,00	429.000,00	47.000,00	90
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	320.000,00	320.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.101.900,00	2.098.100,00	3.800,00	100
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.461.000,00	2.250.000,00	2.211.000,00	50
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.911.873,00	11.911.873,00	-	100
	9 **Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**	**10.188.900,00**	**7.640.000,00**	**2.548.900,00**	75
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	140.000,00	140.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	472.000,00	390.000,00	82.000,00	83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	108.900,00	0,00	108.900,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.608.000,00	2.250.000,00	2.358.000,00	49
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.860.000,00	4.860.000,00	-	100
	10 **Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**469.459.825,00**	**414.874.796,00**	**54.585.029,00**	88
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.407.000,00	900.000,00	507.000,00	64

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.024.000,00	480.000,00	544.000,00	47
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.970.000,00	660.000,00	1.310.000,00	34
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.380.000,00	3.600.000,00	5.780.000,00	38
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	-
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.480.000,00	0,00	26.480.000,00	-
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.520.000,00	6.760.000,00	6.760.000,00	50
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	386.480.000,00	381.011.971,00	5.468.029,00	99
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.058.825,00	18.222.825,00	3.836.000,00	83
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100
11	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**51.826.790,00**	**37.925.790,00**	**13.901.000,00**	73
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.534.000,00	0,00	2.534.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.527.000,00	0,00	3.527.000,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.432.000,00	1.800.000,00	Rp4.632.000,00	28
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.125.790,00	36.125.790,00	-	100
12	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**	**8.270.000,00**	**5.598.000,00**	**2.672.000,00**	68
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	484.000,00	419.000,00	65.000,00	87
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	608.000,00	344.000,00	264.000,00	57
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.330.000,00	1.595.000,00	735.000,00	68
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.608.000,00	0,00	1.608.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.240.000,00	3.240.000,00	-	100
III	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**319.244.982,00**	**257.340.982,00**	**61.904.000,00**	81
13	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**58.239.120,00**	**51.044.820,00**	**7.194.300,00**	88
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	594.000,00	594.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.168.000,00	680.000,00	488.000,00	58
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan cetak	951.500,00	0,00	951.500,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.725.000,00	7.850.000,00	3.875.000,00	67
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.975.620,00	36.520.820,00	454.800,00	99
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.825.000,00	5.400.000,00	1.425.000,00	79
14	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**135.203.902,00**	**125.386.302,00**	**9.817.600,00**	93
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	726.000,00	622.000,00	104.000,00	86
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	1.360.000,00	680.000,00	680.000,00	50

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Cover				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan cetak	770.400,00	272.100,00	498.300,00	35
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	-
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	-
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	95.000.000,00	94.017.000,00	983.000,00	99
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.027.502,00	29.795.202,00	1.232.300,00	96
15	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**	**18.180.900,00**	**3.375.000,00**	**14.805.900,00**	19
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	98.000,00	0,00	98.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	408.000,00	0,00	408.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	524.900,00	0,00	524.900,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.375.000,00	3.375.000,00	5.000.000,00	40
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.775.000,00	0,00	8.775.000,00	-
16	**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**	**72.895.800,00**	**51.837.000,00**	**21.058.800,00**	71
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	556.000,00	440.000,00	116.000,00	79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	744.000,00	616.000,00	128.000,00	83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	849.800,00	0,00	849.800,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.050.000,00	3.925.000,00	6.125.000,00	39
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	43.280.000,00	34.840.000,00	8.440.000,00	80
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.616.000,00	6.616.000,00	-	100
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	50
17	**Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**25.584.760,00**	**20.120.860,00**	**5.463.900,00**	79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.000,00	0,00	20.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	720.000,00	360.000,00	360.000,00	50
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	183.900,00	0,00	183.900,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	-
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.760.860,00	19.760.860,00	-	100
18	**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**	**9.140.500,00**	**5.577.000,00**	**3.563.500,00**	61
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	492.000,00	492.000,00	-	100
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	136.000,00	0,00	136.000,00	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	166.500,00	0,00	166.500,00	-
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.261.000,00	0,00	3.261.000,00	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.085.000,00	5.085.000,00	-	100

Sumber: Laporan Keuangan Akhir Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari Rencana Strategis Bappeda Kota Bima tahun 2025-2029. Capaian kinerja yang berhasil pada tahun 2025 tidak terlepas dari kerja sama dan partisipasi semua pihak. Berdasarkan uraian penyajian evaluasi kinerja pada Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran strategis Bappeda meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator indeks kualitas perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 adalah sebesar **108,41%** Dimana target indeks kualitas perencanaan Pembangunan daerah tahun 2024 sebesar 80,25% dan terealisasi sebesar **87%** dengan kriteria capaian "**Sangat Tinggi**". Capain indeks kualitas perencanaan Pembangunan daerah untuk tahun 2025 naik sebesar 4,44% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 103,97%.
2. Efisiensi anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Bappeda pada tahun 2025 mencapai 8,96%.
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih belum sepenuhnya dinput oleh setiap perangkat daerah secara tepat waktu.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD;
2. Pengalokasian anggaran yang lebih memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
3. Pengembangan keterampilan bagi staf Bappeda untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan dan manajemen Pembangunan;
4. Penguatan system pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kinerja program-program Pembangunan dan mengidentifikasi resiko penghambat capaian program.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

INSPEKTORAT KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2025



TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bima ini untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Bima tahun anggaran 2025 kepada pihak yang berkepentingan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini, Inspektorat Kota Bima dalam melaksanakan tugasnya di masa mendatang akan lebih terarah dan tepat sasaran

Kota Bima, Februari 2026
Plt. Inspektur Daerah Kota Bima,



Adhie Aulia, ST, M.Ec.Dev
NIP. 19740712 200604 1 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 4
C. SARANA DAN PRASARANA 6
D. ISU STRATEGIS. 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2030 10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BIMA 13
C. PERJANJIAN KINERJA 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17
   1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 17
   2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya Dan Beberapa Tahun Terakhir 22
   3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain 30
   4. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 32
   5. Capaian Kinerja Eselon II dan Eselon III lingkup Inspektorat Kota Bima 33
   6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan 37
   7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 37
   8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 45

B. REALISASI ANGGARAN 47

BAB IV PENUTUP 51

A. KESIMPULAN 51
B. SARAN 51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perumusan Isu strategis berdasarkan Permasalahan 8
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 - 2030 12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Bima 13
Tabel 2.3 Ikhtisar Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Kuantitas Target Capaian Pemerintah Kota Bima 16
Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 17
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 17
Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 18
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025 22
Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2025 24
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Target Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dengan Target Kinerja Inspektorat Kota Malang 30
Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Target Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dengan Target RPJMD Kota Bima 32
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Eselon II 34
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Eselon III (Sekretaris) 34
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Wilayah I) 35
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Wilayah II) 35
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Investigasi) 36
Tabel 3.13 Faktor Pendorong dan Penghambat 37
Tabel 3.14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Penggunaan Sumber Daya 38
Tabel 3.15 Analisis Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja 46
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 47

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan laporan tersebut yang menggambarkan kinerja Inspektorat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun yang menjadi dasar hukumnya sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi Pemerintah.
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan	:	Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja	:	Pada sub bab ini jabarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2030 sebagai arah untuk mewujudkan kinerja organisasi, selain itu diurakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Inspektorat Kota Bima sebagai landasan yang diperkuat dengan pernyataan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025

Bab III : Akuntabiltas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025;
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya Dan Beberapa Tahun Terakhir;
3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain;
4. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Capaian Kinerja Eselon II dan Eselon III lingkup Inspektorat Kota Bima
6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan
7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menyajikan perbandingan antara pendapatan/belanja yang ditetapkan (target/pagu) dengan realisasi yang benar-benar terjadi dalam satu periode pelaporan.

Bab IV Penutup	:	Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah ini di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima adalah:

1. Tugas

   Inspektorat Kota Bima mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

2. Fungsi

   Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Perencanaan program pengawasan
   b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
   c. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah
   d. Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan
   e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Struktur Organisasi

Adapun Struktur organisasi Inspektorat Kota Bima per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris
   a. Kepala Sub Bagian Umum

b. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan pelaporan

3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Investigasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengara urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat.

a. Jabatan Fungsional Auditor
b. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

Inspektorat merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Inspektorat Kota Bima per Desember 2025 berjumlah 61 personil, dengan komposisi sebagai berikut :

3. Menurut Jabatan/Eselon

- Inspektur /IIb : 1 orang
- Sekretaris/IIIa : 1 orang
- Inspektur Pembantu/IIIa : 2 orang
- Kepala Sub Bagian/IVa : 1 orang
- Pejabat Fungsional Tertentu/Khusus : 52 orang
- Fungsioal Umum : 8 orang
- P3K : 13 orang

- P3K Paruh Waktu : 6 orang

4. Menurut Tingkat Pendidikan :
   - S 3 : 0 orang
   - S 2 : 11 orang
   - S 1 : 59 orang
   - D 3/Sarjana Muda : 2 orang
   - SLTA : 1 orang
   - SMP : 0 orang
5. Menurut Golongan/Ruang
   - Golongan IV/c : 0 orang
   - Golongan IV/b : 3 orang
   - Golongan IV/a : 8 orang
   - Golongan III/d : 25 orang
   - Golongan III/c : 7 orang
   - Golongan III/b : 3 orang
   - Golongan III/a : 16 orang
   - Golongan II/d : 2 orang
   - Golongan II/c : 0 orang
   - Golongan II/b : 0 orang
   - Golongan II/a : 0 orang
   - Golongan IX : 6 orang
   - Golongan X : 7 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM di Inspektorat Kota Bima Belum cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

C. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Inspektorat Kota Bima memerlukan prasarana pendukung. Sampai saat ini Inspektorat Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri dan menempati eks Kantor Walikota Bima di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2 Kota Bima.

Sarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;

b. Fasilitas komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer;
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipasangin dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

D. ISU STRATEGIS.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Isu strategis berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dibagi dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan serta hukum dan tata kelola kelembagaan. Secara umum Kota Bima menghadapi tantangan yang cukup besar dalam Upaya pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang belum mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa isu nasional dari indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum dicapai adalah indeks prilaku anti korupsi (IPAK) terjadi peningkatan sehingga menyebabkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Isu strategis lainnya adalah isu dari Inspektorat Kota Bima yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 - 2029 adalah :

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik :

- Nilai maturitas SPIP yang masih rendah
- Belum menerapkan Manajemen Risiko
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Masih rendah
- Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Tabel 1.1. Perumusan Isu strategis berdasarkan Permasalahan

Permasalahan	Isu Strategis
1. Belum menerapkan Menejemen Risiko (MR) 2. Menurunnya skor maturitas SPIP 2. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) masih rendah 3. Kapabilitas APIP perlu ditingkatkan 4. Temuan hasil pengawasan masih ada dan terus berulang	Menurunnya skor SPIP Terintegrasi Lingkup Pemerintah Kota Bima

Tantangan dan peluang pelayanan Inspektorat

- **Faktor Internal**

1. Kekuatan
   a. Telah Tersusun Risk register untuk sasaran strategis pemerintah daerah
   b. Telah tersusun perwali tentang kebijakan pengendalian kecurangan
   c. Telah menggunakan PKPT berbasis resiko
   d. Pemerintah Kota Bima sudah memiliki E sakip untuk mengumpulkan data kinerja OPD
   e. Telah tersusun perwali tentang kebijakan pengendalian kecurangan
   f. Telah ada tim saber pungli
   g. Telah tersusun perwali tentang kebijakan pengendalian Gravitasi
2. Kelemahan
   a. Tidak dilakukan monev Menejemen Risiko (MR)
   b. Rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia
   c. Rendahnya komitmen perangkat daerah dalam penerapan Menejemen Risiko
   d. Kurang optimalnya sosialisasi terkait Menejemen Risiko
   e. Evaluasi capaian kinerja belum memberi rekomendasi perbaikan kinerja
   f. Target kinerja yang disusun tidak realistis
   g. Pencapaian kinerja bersifat sektoral
   h. Dokumen perencanaan belum menjadi arah untuk pencapaian kinerja
   i. Masih terdapat ASN yang terjerat kasus hukum
   j. Pembelajaran anti korupsi belum diperoleh seluruh ASN
   k. Pemanfaatan saluran pengaduan dan WBS belum optimal

l. Temuan pengawasan masih tinggi

- **Tantangan**
  a. Belum adanya insetif bagi daerah yang mengelola Menejemen Risiko dengan baik.
  b. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan birokrasi
  c. Membuat raport penerapan Menejemen Risiko untuk seluruh perangkat Daerah
  d. Memanfaatkan E Sakip untuk melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja secara kolaboratif.
- **Peluang**
  a. Mandatory spanding anggaran sebesar 1 % dari total APBD
  b. Komitmen BPKP dalam peningkatan penyelenggaraan Menejemen Risiko (MR) melalui perka BPKP No. 4/2021 tentang Menejemen Risiko (MR)
  c. Pemerintah Kota Bima berkomitmen menyusun RPJMD Kolaboratif
  d. Adanya perjanjian kerjasama antara kemendagri, kepolisian dan kejaksaan
  e. Membuat roadmap dan rencana aksi pengendalian kecurangan dan gratifikasi
  f. Membuat prioritas anggaran pada kegiatan – kegiatan yang mengarah pada peningkatan penetapan manejemen risiko
  g. Membuat roadmap dan rencana aksi pengendalian kecurangan
  h. Pengawasan dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko strategi dan risiko operasional perangkat daerah

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2030

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Bima telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2025 – 2030 tentunya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana kinerja merupakan upaya penjabaran operasional dari sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima, serta merujuk pada Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima. Rencana Kinerja disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : (1) Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2) Indikator kinerja sasaran dan target capaiannya; (3) program/kegiatan; serta (4) anggarannya.

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

a. Tujuan Strategi Inspektorat Kota Bima

Tujuan strategis merupakan turunan dari sasaran strategis Pemerintah Kota Bima yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Bima **Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah**.

Adapun tujuan strategis Inspektorat Kota Bima adalah meningkatnya skor setiap elemen Indeks Reformasi Birokrasi dengan indikator tujuan adalah skor Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dinyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

b. Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima

Sasaran strategis merupakan rumusan penjabaran dari tujuan strategis yang menggambarkan kondisi atau hasil akhir spesifik, terukur, dan berorientasi jangka

menengah (3-5 tahun) yang ingin dicapai organisasi. Ini menjadi komitmen kinerja, penghubung visi-misi dengan program kerja, serta tolak ukur keberhasilan dampak (*outcome*) pemerintah.

Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota Bima adalah meningkatkan skor SPIP Terintegrasi lingkup pemerintah Kota Bima dengan indikator sasaran :

1) Skor Maturitas SPIP
2) Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)
3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

1) Skor Maturitas SPIP

   Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan atau kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi

   Penilaian ini mengukur efektivitas pengelolaan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan pada aturan, dengan skala 0 (belum ada) hingga 5 (optimum).

   Berikut adalah rincian mengenai maturitas SPIP:

   - **Tujuan Penilaian:** Memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, meningkatkan kualitas kinerja, serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi.
   - **Komponen Penilaian (5 Unsur SPIP) :** Penilaian berdasarkan 5 unsur menurut PP No. 60 Tahun 2008, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern

2) Skor Manajemen Risiko Indeks

   Manajemen Risiko Indeks berfungsi untuk menilai seberapa baik organisasi mengelola risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan dengan tujuan meningkatkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai sasaran.

3) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

   Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi basis data dan acuan untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Bima Tahun 2025 - 2030

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya skor setiap Elemen Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya skor SPIP terintegrasi lingkup pemerintah Kota Bima	Skor maturitas SPIP	• Membangun komitmen melalui pakta integritas untuk semua Perangkat Daerah • Memanfaatkan unsur penyusun komponen maturitas untuk melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja secara kolaboratif • melakukan evaluasi SPIP yang dapat memberikan rekomendasi perbaikan kinerja dan dapat ditindaklanjuti	• Evaluasi kinerja secara berkala yang disertai dengan area intervensi • Mempersiapkan/merencanakan dengan baik komponen penyusun SPIP seperti efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan,keamanan atas aset dan ketaatan pada aturan
			Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	• Membuat prioritas anggaran pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan penerapan Menejemen Risiko. • Membuat roadmap dan rencana aksi pengendalian kecurangan • Pengawasan dilakukan dengan tujuan mengurangi risiko strategis dan risiko operasional Perangkat Daerah • Membuat kegiatan Monev Manajemen Risiko secara berkala dalam dokumen perencanaan • Membuat kegiatan bimtek	• Evaluasi Manajemen Risiko secara berkala • Mengirim ASN untuk meningkatkan kompetensi ke balai diklat atau pelatihan setiap tahunnya
			Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	• Membuat roadmap dan rencana aksi pengendalian kecurangan dan gratifikasi • Membuat agen perubahan untuk mempromosikan gerakan anti korupsi • Sosialisasi anti korupsi dan pemanfaatan saluaran pengaduan dan WBS	• Menetapkan sistem high risk di pengendalian prioritas • Penerapan Whistle Blowing System (WBS) pada setiap kasus pengaduan • Penyuluhan anti korupsi. • Menetapkan agen perubahan

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BIMA

Bahwa untuk mewujudkan mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kota Bima telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperkuat dengan pernyataan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 (terlampir) sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Bima

No	Kepala Dinas	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Target %
1.	Eselon II	Meningkatnya skor SPIP terintegrasi lingkup pemerintah Kota Bima	Skor maturitas SPIP	Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi meliputi tiga (3) komponen Penilaian, yaitu sebagai berikut: 1. Komponen Penetapan Tujuan (bobot 40%) 2. Komponen Penyelenggaraan Struktur dan Proses (bobot 30%) 3. Komponen Pencapaian Tujuan (bobot 30%) Mekanisme Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi diawali dengan Penilaian Mandiri (PM) oleh masing – masing perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima dan kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas (PK) oleh Inspektorat Kota Bima atas PM masing – masing Perangkat Daerah kemudian dilakukan evaluasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Penilaian dilakukan melalui website e-Integrity (https://spipterintegrasi.bpkp.go.id). Skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai.	2,87

No	Kepala Dinas	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Target %
				Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pengurangan nilai maturitas hasil PM oleh penjamin kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi.	
			Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Penilaian Manajemen Risiko Indeks meliputi tiga (3) komponen Penilaian, yaitu sebagai berikut: 1. Komponen Perencanaan (bobot 40%) 2. Komponen Kapabilitas (bobot 30%) 3. Komponen Hasil (bobot 30%). Skor akhir MRI diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5.	2,72
			Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi meliputi tiga (3) komponen Penilaian, yaitu sebagai berikut: 1. Komponen Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi (bobot 48%) 2. Komponen Penerapan Strategi Pencegahan (bobot 36%)	2,35

No	Kepala Dinas	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Target %
				3. Komponen Penanganan Kejadian Korupsi (bobot 16%) Skor akhir IEPK diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5.	

C. PERJANJIAN KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkanya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari dari suatu tujuhan dan sasaranstategis instansi pemerintah.

Pada tahun 2025, Inspektorat Kota Bima telah menetapkan rencana kerja tahunan dengan mengacu kepada sasaran strategis pemerintah daerah yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator Kinerja Indeks RB. Untuk menunjang tercapainya sasaran strategis dan indikator kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima tersebut, maka Inspektorat Kota Bima mendukung dengan beberapa sasaran strategis tentunya ditunjang dengan program dan kegiatan yang relefan. Adapun program dan kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Program Utama yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2025 tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur input yang harus dipenuhi dan mempunyai tolak ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun rencana strategis dan rencana kinerja tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Inspektorat Kota Bima.

Pada prinsipnya Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini akan menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Bima selama tahun 2025. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap program dan kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan.

Adapun ikhtisar sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas capaian kinerja pemerintah Kota Bima yang merupakan kewenangan Inspektorat Kota Bima yang hendak dilaksanakan dalam tahun 2025 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Ikhtisar Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Dan Kuantitas Target Capaian Pemerintah Kota Bima

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	*2*	*3*	*4*
	Meningkatnya Skor SPIP lingkup Pemerintah Kota Bima	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,72
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,35
		Skor Maturitas SPIP	2,87

	Program	Anggaran	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.170.632.691	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 618.946.700	APBD
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 266.332.200	APBD
	J U M L A H	**Rp 12.055.911.591**	**APBD**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka memberikan gambaran tingkat capaian target kinerja dari masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun rencana kerja tahun anggaran 2025 maka diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis guna mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun indikator dari sasaran organisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya skor SPIP terintegrasi lingkup pemerintah Kota Bima	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,72
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,35
		Skor Maturitas SPIP	2,87

Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran startegis Inspektorat Kota Bima tahun 2025 sebagai berikut :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Skor SPIP terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,72	2,79	102,57
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,35	2,45	104,26
		Skor Maturitas SPIP	2,87	2,92	101,74

Adapun faktor pendukung yang menyebabkan terlampauinya target tahun 2025 pada Indikator Manajemen Risiko Indkes (MRI) adalah telah dilakukan penyusunan risk register dan RTP untuk risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis pemerintah daerah dan risiko operasional perangkat daerah.

Pada tahun 2025 capaian maturitas SPIP mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan walaupun capaian ini masih dalam kategori berkembang setidaknya ada kenaikan dari faktor2 pendukung tersebut. Adapun faktor pendukung yang menyebabkan nilai maturitas SPIP naik adalah adanya semangat kerja dari OPD maupun dari Inspektorat itu sendiri dalam memenuhi aspek – aspek pendukung seperti efektifitas dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan atas aset dan ketaatan pada aturan.

Pada Tahun 2025 capaian nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,45 dari target sebesar 2,35. Sehingga capaian persentase dari sasaran ini sebesar 104,26 %. Yang membuat sasaran kinerja ini di Tahun 2025 kelihatan naik itu disebabkan karena adanya perubahan dari target indikator yang dicapai artinya target di turunkan dari target sebelumnya.

Tabel 3.3 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Meningkatnya kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	61 orang/bulan	100
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100
	3 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	**Tersedianya Pemenuhan Layanan Administrasi Barang Milik Daertah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daertah Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
	2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tercapainya pemenuhan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	100
	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	100
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tercapainya Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanfor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4 paket	100
	4 Fasiltasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100
	6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
	7 Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100**
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tercapainya Penurunan Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan**	**Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan**	**10,36%**	**13,74%**	**132,63%**
	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Tercapainya penurunan Temuan (Materil)**	**Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)**	**98%**	**41,77%**	**42,62%**
	1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	21 Laporan	100
	2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100
	3 Reviu Laporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	34 Laporan	100

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
	4 Reviu Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100
	5 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tersedianya Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	100
	6 Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100
	2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Terlaksananya capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**16,22%**	**7,58%**	**46,73%**
	1 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	7 Laporan	100
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Tercapainya Nilai Kapabilitas Apip**	**Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP**	**3 Level**	**3 Level**	**100**
	1 Pendampingan dan Asistensi	**Terlaksananya capaian OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3**	**Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3**	**49 %**	**49 %**	**100**
	1 Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	4 OPD	4 OPD	100
	2 Pendampingan, Asistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terpenuhinya Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan , asistensi verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	8 OPD	8 OPD	100
	3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahn dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahn dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
	4 Pendampingan, Assitensi dan Verifikasi penegakan integritas	Terpenuhinya Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	4 OPD	4 OPD	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari ketiga program tersebut semuanya tercapai 100%, bahkan ada yang lebih. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki target tahun 2025 yaitu 100%, realisasi kinerja tahun 2025 yaitu 100%, dan capaian kinerja tahun 2025 yaitu 100. Program Penyelenggaraan Pengawasan memiliki target tahun 2025 yaitu 10,36%, realisasi kinerja tahun 2025 yaitu 13,74% melebihi target, dan capaian kinerja tahun 2025 yaitu 132,63%. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi memiliki target tahun 2025 yaitu level 3, realisasi kinerja tahun 2025 yaitu level 3, dan capaian kinerja tahun 2025 yaitu 100.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya Dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya Skor SPIP terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,00	3,00	3,00	2,72	2,475	2,473	2,673	2,79	82,50	82,43	89,10	102,57
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,00	3,00	3,00	2,35	2,544	2,544	2,448	2,282	84,80	84,80	81,60	97,11
		Skor Maturitas SPIP	3,00	3,00	3,00	2,87	3,00	2,97	2,84	2,92	100,00	99,00	94,67	101,74

1) Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Trend Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada 4 Tahun Terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2022 memperoleh Nilai 2,475 dari target 3,00 dan capaian sebesar 82,50%. Pada Tahun 2023 turun menjadi 2,473 dari target nilai 3,00 dan capaian sebesar 82,43%. Kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan peroleh nilai 2,673, walaupun tidak mencapai target 3,00 dan capaian sebesar 89,10%. Pada Tahun 2025 capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks sebesar 2,79 dari target sebesar 2,72. Ini berarti capaian sasaran kinerja melampaui target sebesar 102,57%. Capaian sasaran kinerja ini walaupun mengalami kenaikan tapi masih dalam kategori berkembang.

Adapun faktor pendukung yang menyebabkan Kenaikan nilai Manajemen Risiko untuk tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah telah dilakukan penyusunan risk register dan RTP untuk risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis pemerintah daerah dan risiko operasional perangkat daerah. Cuman bedanya dengan tahun 2024 pada tahun 2025 semua OPD sudah memberlakukan risk register sedangkan pada Tahun 2024 Risk Register masih dilakukan Sebagian OPD. Di tahun 2023 terjadi penurunan dari tahun 2022 ini disebabkan karena belum dilakukan penyusunan risk register dan RTP untuk risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis pemerintah daerah dan risiko operasional perangkat daerah.

2) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Trend Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada 4 Tahun Terakhir mengalami penurunan yaitu pada Tahun 2022 memperoleh Nilai 2,544 dari target 3,00 dan capaian sebesar 84,67%. Tahun 2023 turun menjadi 2,448 dari target 3,00 dan capaian sebesar 81,67%. kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 2,282 dari target 3,00 dan capaian sebesar 76,00%. Pada Tahun 2025 capaian nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,45 dari target sebesar 2,35. Sehingga capaian persentase dari sasaran ini sebesar 104,26%.

Adapun faktor yang menyebabkan Penurunan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) selama 3 tahun terakhir ini disebabkan karena pilar penanganan kejadian korupsi di kota bima masih rendah ini artinya kejadian korupsi masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaanya menjadi faktor pengurang efektifitas pengendalian korupsi. Sehingga adanya ASN atau kepala daerah yang terjerat kasus hukum sangat berpengaruh terhadap nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Pada tahun 2025 kalau dilihat dari capaian yang diperoleh sebenanrya hampir sama dengan capaian tahun sebelum – belumnya dalam arti nilai capaian mengalami penurunan atau tetap. Yang membuat sasaran kinerja ini di Tahun 2025 kelihatan naik itu disebabkan karena adanya perubahan dari target indikator yang dicapai artinya target di turunkan dari target sebelumnya.

3) Maturitas SPIP

Dilihat dari Tabel di atas dapat di jelaskan realisasi Maturitas SPIP 4 tahun terakhir mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurun dalam pencapaian Maturitas SPIP baru pada Tahun 2025 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2022 realisasi maturitas SPIP sebesar 3,00 atau berkembang dari target terdefinisi (3,80) dan capaian sebesar 78,95%, Pada tahun 2023 terealisasi berkembang (2,972) dari target terdefinisi (3,80) dan capaian sebesar 78,16%. Pada tahun 2024 indikator Level/Nilai hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB terhadap Maturitas SPIP Kota Bima. Dari Target Level/Nilai hasil Quality Assurance terdefinisi (3,80) terealisasi berkembang (2,84) atau tercapai sebesar 74,74%. hal tersebut menunjukan tidak tercapainya target. Pada tahun 2025 realisasi maturitas SPIP sebesar 2,92 (berkembang) dari target 2,87 (berkembang), hal tersebut menunjukan trend kenaikan dan tercapainya target sebesar 101,74%.

Adapun faktor tidak tercapainya target dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 lebih disebabkan oleh beberapa faktor baik internal OPD maupun dari Inspektorat sendiri. Salah satu fungsi Inspektorat Kota Bima adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan SPIP dimana didalamnya terdapat lingkungan pengendalian sebagai salah satu unsur SPIP. Beberapa faktor internal OPD antara lain tidak tersedia petunjuk teknis dan atau Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan, belum maksimal penerapan dari Standar operasional prosedur atas program dan kegiatan yang telah ada, kurangnya penerapan penegakan integritas dan nilai etika. Pada tahun 2025 capaian maturitas SPIP mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan walaupun capaian ini masih dalam kategori berkembang setidaknya ada kenaikan dari faktor2 pendukung tersebut. Adapun faktor pendukung yang menyebabkan nilai maturitas SPIP naik adalah adanya semangat kerja dari OPD maupun dari Inspektorat itu sendiri dalam memenuhi aspek – aspek pendukung seperti efektifitas dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan atas aset dan ketaatan pada aturan.

Tabel 3.5 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024-2025

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**			**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	**100**
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang/ bulan	56 orang/ bulan	100	61 orang/ bulan	61 orang/ bulan	100	100
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daertah Pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
		3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**100**

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
				Perangkat Daerah							
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannnya	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	100
		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-	-
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	0 dokumen	-	-	-	-	-
		4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	100	6 orang	6 orang	100	100
		5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100	100
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	100	100
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	4 paket	100	3 paket	3 paket	100	100
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket perakatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	100	100
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 paket	15 paket	100	-	-	-	-
		5	Fasiltasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	100
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100	100
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100	100
		8	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	100
	6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 Unit	100	-	-	-	-
	7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
	2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
	3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	100
	8		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**100%**	**100%**	**100**	**-**
	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100	100
	2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100	100
	3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 unit	1 unit	100	-	-	-	-
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan**	**-**	**-**	**-**	**10,36%**	**13,74%**	**132,63 %**	**-**
	1		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)**	**-**	**-**	**-**	**98%**	**41,77%**	**42,62%**	**-**
	1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	21 Laporan	100	21 Laporan	21 Laporan	100	100
	2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100	100
	3		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	34 Laporan	100	34 Laporan	34 Laporan	100	100
	4		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100	-
	5		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100	100
	6		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	100
	2		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**-**	**-**	**-**	**16,22%**	**7,58%**	**46,73%**	**-**
	1		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan	100	100

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTCOME)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP**	**-**	**-**	-	**3 Level**	**3 Level**	**100**	**-**
	1	**Pendampingan dan Asistensi**		**Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3**	**-**	**-**	-	**49 %**	**49 %**	100	**-**
		1	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	4 OPD	4 OPD	100	4 OPD	4 OPD	100	100
		2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	8 OPD	8 OPD	100	8 OPD	8 OPD	100	100
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahn dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	100
		4	Pendampingan, Assitensi dan Verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	4 OPD	4 OPD	100	4 OPD	4 OPD	100	100

Berdasarkan tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024-2025 tersebut, dapat diketahui secara keseluruhan, sebagian besar program, kegiatan, dan sub-kegiatan menunjukkan tingkat capaian kinerja yang sangat tinggi dan stabil, yakni mencapai 100% baik pada tahun 2024 maupun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan target telah sesuai dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Kesimpulan lain yang dapat diketahui dari tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024-2025 adalah :

- Pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami peningkatan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang mana pada tahun 2024 sebanyak 56 orang/bulan menjadi 61 orang/bulan pada tahun 2025, hal ini dipengaruhi oleh bertambhnya jumlah ASN di tahun 2025, dan untuk capaian kinerjanya sama-sama mencapai 100%.
- Pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian memiliki target target dan realisasi tahun

2024 yaitu 1 dokumen, sedangkan tahun 2025 tidak ada sub kegiatan tersebut.

- Pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian tahun 2024 tidak dapat direalisasikan dan pada tahun 2025 tidak ada sub kegiatan tersebut.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada tahun 2024 memiliki target dan realisasi 4 paket, dan tahun 2025 mengalami pengurangan menjadi 3 paket. Namun capaian di tahun 2024 dan 2025 mencapai 100%.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pada tahun 2024 meiliki target dan realisasi 15 paket, namjun pada tahun 2025 sub kegiatan tersebut tidak ada.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD pada tahun 2024 tidak ada sub kegiatan tersebut, namun pada tahun 2025 target sub kegiatan tersebut yaitu 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen, dengan capaian kinerja 100%.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada tahun 2024 memiliki target dan realisasi yaitu 2 unit, dengan capaian 100%. Namun di tahun 2025 sub kegiatan tersebut tidak ada.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada tahun 2024 memiliki target dan realisasi yaitu 1 unit, dengan capaian kinerja 100%. Namun di tahun 2025 sub kegiatan tersebut tidak ada.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan pada indikator Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan tahun 2025 memiliki target 10,36% dan realisasi 13,74%, dengan capaian melebihi target yaitu 132,63%.
- Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal pada indikator Persentase Penurunan Jumlah Temuan

Pengawasan (Materil) tahun 2025 memiliki target 98%, realisasi 41,77%, capaian kinerja 42,62%, hal ini menunjukkan masih banyaknya temuan material yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.

- Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada indicator Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu memiliki target 16,22%, realisasi 7,58%, capaian kinerja 46,73%, hal ini menunjukkan perlunya peningkatan capaian tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut.

3. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Daerah Lain

Perbandingan antara realisasi kinerja Inspektorat Kota Bima dengan daerah lain dilakukan untuk menilai sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain yang setara atau lebih unggul. Adapun daerah yang menjadi pembanding yaitu Inspektorat Kota Malang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Target Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dengan Target Kinerja Inspektorat Kota Malang

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Inspektorat Kota Bima	Realisasi Kinerja Inspektorat Kota Bima	Target Kinerja Inspektorat Kota Malang	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Bima dengan Inspektorat Kota Malang Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Skor SPIP terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,72	2,79	3,41	81,82
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,35	2,45	2,91	84,19
		Skor Maturitas SPIP	2,87	2,92	3,40	85,88

Berdasarkan data tabel perbandingan capaian kinerja antara Inspektorat Kota Bima dan Inspektorat Kota Malang tahun 2025, berikut adalah uraian kesimpulannya:

- Keberhasilan Melampaui Target Internal

  Inspektorat Kota Bima menunjukkan performa yang sangat positif secara internal. Hal ini dibuktikan dengan realisasi kinerja yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan untuk ketiga indikator:

  - Skor Manajemen Risiko (MRI): Realisasi 2,79 (Target 2,72).
  - Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK): Realisasi 2,45 (Target 2,35).
  - Skor Maturitas SPIP: Realisasi 2,92 (Target 2,87).

- Perbandingan Antar Wilayah (Benchmarking)

  Meskipun berhasil melampaui target internalnya sendiri, capaian Inspektorat Kota Bima masih berada di bawah capaian Inspektorat Kota Malang. Jika dipersentasekan, rata-rata capaian Kota Bima terhadap Kota Malang berada di angka 81% hingga 85%.

- Analisis per Indikator

  - Capaian Tertinggi: Terdapat pada Skor Maturitas SPIP (85,88% terhadap Kota Malang), yang menunjukkan bahwa tata kelola internal Kota Bima sudah mulai mendekati standar Kota Malang.
  - Capaian Terendah: Ada pada Skor Manajemen Risiko (81,82% terhadap Kota Malang). Ini mengindikasikan bahwa sektor manajemen risiko adalah area yang paling membutuhkan akselerasi lebih lanjut untuk menyamai standar Kota Malang.

Inspektorat Kota Bima telah menunjukkan kinerja yang efektif dan melampaui ekspektasi internal. Namun, untuk mencapai level keunggulan seperti Kota Malang, masih diperlukan upaya strategis untuk menutup celah (gap) sekitar 14-18%, terutama dalam penguatan sistem manajemen risiko.

4. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan pencapaian realisasi tahun 2025 dengan target RPD menunjukkan peningkatan indikator sasaran strategis pada Inspektorat Kota Bima. Meningkatnya pencapaian target pada tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan pada point 2 di atas (Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya Dan Beberapa Tahun Terakhir)

Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada tahun 2025 dengan target RPJMD sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Target Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dengan Target RPJMD Kota Bima

No	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Inspektorat	Realisasi Kinerja Inspektorat	Target RPJMD Kota Bima	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dengan Target RPJMD Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya Skor SPIP terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima	Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,72	2,79	2,72	102,57
		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,35	2,45	-	-
		Skor Maturitas SPIP	2,87	2,92	Berkembang	Berkembang

Keterangan : skor 2-3 = Berkembang

Berdasarkan tabel perbandingan capaian target kinerja inspektorat dengan RPJMD Kota Bima tahun 2025 di atas, dapat ketahui :

- Keberhasilan Melampaui Target Internal

  Secara keseluruhan, Inspektorat Kota Bima menunjukkan performa yang sangat positif. Hal ini dibuktikan dengan seluruh realisasi kinerja yang berhasil melampaui

target yang telah ditetapkan:

- Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI): Realisasi mencapai 2,79, melampaui target sebesar 2,72.
- Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK): Realisasi mencapai 2,45, melampaui target sebesar 2,35.
- Skor Maturitas SPIP: Realisasi mencapai 2,92, melampaui target sebesar 2,87.

- Kinerja Terhadap Target RPJMD

  Jika dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima:

  - Efektivitas Tinggi: Pada indikator Skor MRI, capaian kinerja mencapai 102,57%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko di lingkungan pemerintah sudah berjalan sangat baik dan melampaui ekspektasi perencanaan daerah.
  - Status Berkembang: Untuk Skor Maturitas SPIP, realisasi kinerja berada pada kategori "Berkembang", yang selaras dengan target yang ditetapkan oleh RPJMD.

- Analisis Keselarasan Program

  Terdapat keselarasan yang baik antara target internal Inspektorat dengan target RPJMD Kota Bima (khususnya pada skor MRI yang memiliki angka target identik yaitu 2,72). Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan sinkron antara tujuan organisasi dengan tujuan besar pemerintah kota.

Inspektorat Kota Bima telah berhasil menjalankan tugasnya secara optimal pada tahun 2025. Sasaran untuk "Meningkatnya Skor SPIP terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima" telah tercapai dengan status melebihi target (rata-rata capaian di atas 100%).

5. Capaian Kinerja Eselon II dan Eselon III lingkup Inspektorat Kota Bima

Adapun capaian kinerja Eselon II dan Eselon III dan Eselon IV di lingkup Inspektorat Kota Bima dapat diukur dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

a. Capaian Kinerja Eselon II

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Eselon II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Skor SPIP terintegrasi lingkup Pemerintah Kota Bima	Meningkatnya nilai maturitas SPIP	2,87	2,92	101,74
		Meningkatnya nilai manajemen risiko indeks (MRI)	2,72	2,79	102,57
		Meningkatnya nilai Indeks Efektivitas Pengendalian korupsi (IEPK)	2,35	2,45	104,26

b. Capaian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran serta Sarana dan Prasarana Pemerintah	Persentase administrasi perkantoran tersedia.	100%	100%	100%
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Inspektorat	Persentase Ketersedian laporan kinerja dan keuangan inspektorat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtantif,penjenjangan, dan Profesi	22 Orang	22 Orang	100%

c. Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Wilayah I)

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Wilayah I)

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terlaksananya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	11	11	100
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2	2	100
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	15	15	100
4	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	1	100

d. Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Wilayah II)

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Wilayah II)

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terlaksananya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	4	100
2	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	5	100
3	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	20	20	100
4	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	6	6	100

e. Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Investigasi)

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Eselon III (Inspektur Pembantu Investigasi)

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Program Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Reviu DAK Non Fisik dan DAK Fisik	4	4	100
2	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	APIP : 1 KAPIP : 4/5	APIP : 1 KAPIP : 4/5	100
3	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1 Dok	1 Dok	100
4	Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penjaminan Kulaitas (PK) atas Proses Pelaksanaan dan Hasil Peninlaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegritas dan Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP.	4 Laporan	4 Laporan	100
5	Terlaksananya Kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	4	4	100
6	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan pemberantasan koropsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	APIP : 1 KAPIP : 4/5	APIP : 1 KAPIP : 4/5	100

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Faktor keberhasilan capaian kinerja dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya ungkit besar untuk meraih target-target yang ditetapkan sehingga realisasi dari program kegiatan yang lebih besar lebih besar dari target yang ditetapkan.

Faktor –faktor keberhasilan pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Kota Bima salah satunya didukung oleh SDM yang memadai ditengah keterbatasan anggaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya *goodwill* seluruh pimpinan OPD guna mendukung pencapaian indikator kinerja Inspektorat ini.

Tabel 3.13 Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak lanjut yang diperlukan
Adanya dokumen perencanaan dengan indiKator kinerja yang terukur	Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas	Dalam melaksanakan kegiatan sub kegiatan agar mengacu pada Anggaran Kas yang telah disusun
Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat kordinasi pengendalian pembangunan	Pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja khususnya pada kinerja keuangan	Perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU) serta meningkatkan kualitas pelaporan dengan mengisi permasalahan dan tindak lanjut secara benar
Tingginya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bima dan BAPPEDA Kota untuk meningkatkan kinerja	Adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja	Meningkatnya kordinasi dengan perangkat daerah/ instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya berikut disajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta kinerja atas capaian program dan kegiatan terhadap capaian anggaran program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Penggunaan Sumber Daya

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
UNSUR PENGAWASAN								**12.055.911.591,00**	**11.531.300.311,00**	**96%**	**96%**	**Efisien**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100**	**11.170.632.691,00**	**10.680.112.311,00**	**96%**	**96%**	**Efisien**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan**	**100%**	**100%**	**100**	**25.489.000,00**	**25.319.000,00**	**99%**	**99%**	**Efisien**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	4.780.000,00	4.720.000,00	99%	99%	Efisien
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.077.000,00	3.022.000,00	98%	98%	Efisien
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.213.000,00	3.194.000,00	99%	99%	Efisien
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.213.000,00	3.213.000,00	100%	100%	Efisien
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.213.000,00	3.202.000,00	100%	100%	Efisien
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100	4.780.000,00	4.766.000,00	100%	100%	Efisien

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100	3.213.000,00	3.202.000,00	100%	100%	Efisien
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan**	**100%**	**100%**	**100**	**9.025.914.091,00**	**8.552.399.215,00**	**95%**	**95%**	**Efisien**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 orang/bulan	61 orang/bulan	100	8.781.188.091,00	8.357.719.215,00	95%	95%	Efisien
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	233.520.000,00	183.540.000,00	79%	79%	Efisien
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	4.780.000,00	4.760.000,00	100%	100%	Efisien
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	3.213.000,00	3.190.000,00	99%	99%	Efisien
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	3.213.000,00	3.190.000,00	99%	99%	Efisien
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang**	**100%**	**100%**	**100**	**11.206.000,00**	**9.582.000**	**86%**	**86%**	**Efisien**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
				Milik Daertah Pada Perangkat Daerah								
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	3.213.000,00	3.182.000,00	99%	99%	Efisien
		2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	3.213.000,00	3.211.000,00	100%	100%	Efisien
		3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100	4.780.000,00	3.189.000,00	67%	67%	Efisien
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**100**	**405.758.400,00**	**405.405.158,00**	**100%**	**100%**	**Efisien**
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	100	402.545.400	402.202.158,00	100%	100%	Efisien
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	100	3.213.000,00	3.203.000,00	100%	100%	Efisien
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**100%**	**100**	**1.409.605.900**	**1.403.513.430,00**	**100%**	**100%**	**Efisien**
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	6.825.000,00	6.820.500,00	100%	100%	Efisien

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	3 paket	100	626.370.000,00	624.483.050,00	100%	100%	Efisien
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4 paket	100	69.259.500,00	69.150.000,00	100%	100%	Efisien
		4	Fasiltas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	200	63.430.000,00	63.405.000,00	100%	100%	Efisien
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	536.641.600,00	532.625.880,00	99%	99%	Efisien
		6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	15.385.000,00	15.365.000,00	100%	100%	Efisien
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	1 paket	1 paket	100	91.694.800,00	91.664.000,00	100%	100%	Efisien
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100**	**169.834.300**	**161.309.249,00**	**95%**	**95%**	**Efisien**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100	29.436.800,00	29.360.000,00	100%	100%	Efisien
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	35.997.500,00	35.349.249,00	98%	98%	Efisien
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100	104.400.000,00	96.600.000,00	93%	93%	Efisien

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
	7	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**100%**	**100**	**122.825.000,00**	**122.679.259,00**	**100%**	**100%**	**Efisien**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100	106.620.000,00	106.474.259,00	100%	100%	Efisien
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	1 unit	100	16.205.000,00	16.205.000,00	100%	100%	Efisien
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan**	**10,36%**	**13,74%**	**132,63%**	**618.946.700,00**	**612.508.000**	**99%**	**99%**	**Efisien**
	1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)**	**98%**	**41,77%**	**42,62%**	**529.846.700,00**	**523.678.000,00**	**99%**	**99%**	**Efisien**
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	21 Laporan	100	17.100.000,00	17.100.000,00	100%	100%	Efisien
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100	10.800.000,00	10.800.000,00	100%	100%	Efisien
		3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	34 Laporan	100	353.550.000,00	353.385.000,00	100%	100%	Efisien
		4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	100	13.500.000,00	13.500.000,00	100%	100%	Efisien

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	100	99.076.700,00	98.940.000,00	100%	100%	Efisien
		6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	100	35.820.000	29.953.000,00	84%	84%	Efisien
	2		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**16,22%**	**7,58%**	**46,73%**	**89.100.000**	**88.830.000,00**	**100%**	**100%**	**Efisien**
		1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	7 Laporan	100	89.100.000,00	88.830.000,00	100%	100%	Efisien
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP**	**3 Level**	**3 Level**	**100**	**266.332.200,00**	**238.680.000**	**90%**	**90%**	**Efisien**
	1		**Pendampingan dan Asistensi**	**Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3**	**49 %**	**49 %**	**100**	**266.332.200,00**	**238.680.000**	**90%**	**90%**	**Efisien**
		1	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	4 OPD	4 OPD	100	61.200.000,00	60.345.000,00	99%	99%	Efisien
		2	Pendampingan, Asistensi verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	8 OPD	8 OPD	100	14.580.000,00	14.040.000,00	96%	96%	Efisien

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)/ Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja Anggaran	Rasio Efisiensi	Tingkat Efisiensi
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahn dan pemberantasan korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	127.449.600,00	102.968.000,00	81%	81%	Efisien
		4	Pendampingan, Assitensi dan Verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	4 OPD	4 OPD	100	63.102.600,00	61.327.000,00	97%	97%	Efisien

Keterangan :

- Sangat Efisien (Optimal) : Jika Rasio efisiensi berada dibawah 50% atau mendekati 50%
- Efisien : Jika realisasi anggaran berada dibawah 100% dari anggaran yang ditetapkan, namun target kinerja tercapai
- Tidak Efisien : Jika realisasi anggaran melebihi anggaran yang ditetapkan (diatas 100%)

Berdasarkan Tabel 3.14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Penggunaan Sumber Daya di atas, dapat diketahui semua program, kegiataan dan sub kegiatan yang ada di Inspektorat Kota Bima memiliki tingkat efisiensi anggaran yang sangat baik yaitu **Efisien**.

- Tingkat Efisiensi Anggaran yang Sangat Baik

  Secara keseluruhan, seluruh program dan kegiatan pada Unsur Pengawasan dikategorikan "Efisien". Hal ini dikarenakan realisasi anggaran berada di bawah pagu yang ditetapkan (rata-rata serapan 90% - 100%), namun target kinerja fisik tetap berhasil dicapai sepenuhnya (100%).
- Capaian Kinerja Fisik yang Optimal

  Hampir seluruh indikator kinerja program, kegiatan, maupun sub-kegiatan mencapai angka 100%. Beberapa poin penting di antaranya:
  - Program Penunjang Urusan Pemerintah: Berhasil menyelenggarakan administrasi perkantoran, keuangan, dan kepegawaian dengan capaian target fisik 100%.
  - Program Penyelenggaraan Pengawasan: Menunjukkan performa luar biasa pada indikator "Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan" yang mencapai 132,63%, jauh melampaui target awal sebesar 10,36%.
  - Kapabilitas APIP: Berhasil mempertahankan target Level 3 dengan rasio efisiensi anggaran sebesar 90%.
- Analisis Penghematan Sumber Daya

  Instansi menunjukkan kemampuan manajemen anggaran yang baik, di mana terdapat penghematan (selisih anggaran) tanpa mengurangi output kerja. Contoh signifikan terlihat pada:
  - Administrasi Barang Milik Daerah: Realisasi anggaran hanya 86%, namun pelayanan tetap tercapai 100%.
  - Kerjasama Pengawasan Internal: Realisasi anggaran hanya 84%, namun target tetap tercapai 100%.
  - Koordinasi Pencegahan Korupsi: Mencapai efisiensi tertinggi dengan penggunaan anggaran hanya sebesar 81% dari target.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja kinerja dilihat dari sisi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025. Inspektorat Kota Bima melaksanakan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebagai pendukung indicator kinerja

inspektorat Kota Bima. Program yang menunjang keberhasilan kinerja yaitu (1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan (3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 3.15 Analisis Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Program	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja	Penunjang Keberhasilan	Penunjang Kegagalan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	- Komitmen untuk memberikan pelayanan administrasi perkantoran secara optimal - Membuat laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan - Membuat laporan keuangan sesuai ketentuan - Memaksimalkan capaian pelayanan administrasi barang milik daertah pada perangkat daerah - Memaksimalkan capaian pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah - Memaksimalkan capaian pelayanan administrasi perkantoran - Memaksimalkan capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah - Melakukan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah secara optimal	-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	10,36%	13,74%	132,63%	Penyelesaian rekomendasi tindak lanjut temuan secara maksimal	-
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level 3	Level 3	100%	Meningkatkan nilai kapabilitas APIP	-

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2025 Inspektorat Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari Dana APBD II dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima Tahun 2025

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Capaian Anggaran 2025 (%)
UNSUR PENGAWASAN					**12.005.911.591,00**		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**11.170.632.691,00**	**10.680.112.311,00**	**96%**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Evaluasi Kinerja Sesuai Ketentuan**	**25.489.000,00**	**25.319.000,00**	**99%**
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.780.000,00	4.720.000,00	99%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.077.000,00	3.022.000,00	98%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.213.000,00	3.194.000,00	99%
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.213.000,00	3.213.000,00	100%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.213.000,00	3.202.000,00	100%
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.780.000,00	4.766.000,00	100%
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.213.000,00	3.202.000,00	100%
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan**	**9.025.914.091,00**	**8.552.399.215,00**	**95%**
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.781.188.091,00	8.357.719.215,00	95%
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	233.520.000,00	183.540.000,00	79%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.780.000,00	4.760.000,00	100%
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.213.000,00	3.190.000,00	99%

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Capaian Anggaran 2025 (%)
		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.213.000,00	3.190.000,00	99%
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daertah Pada Perangkat Daerah**	**11.206.000,00**	**9.582.000**	**86%**
		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.213.000,00	3.182.000,00	99%
		2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.213.000,00	3.211.000,00	100%
		3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	4.780.000,00	3.189.000,00	67%
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**405.758.400,00**	**405.405.158,00**	**100%**
		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	402.545.400	402.202.158,00	100%
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.213.000,00	3.203.000,00	100%
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.409.605.900**	**1.403.513.430,00**	100%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.825.000,00	6.820.500,00	100%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	626.370.000,00	624.483.050,00	100%
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	69.259.500,00	69.150.000,00	100%
		4	Fasiltas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	63.430.000,00	63.405.000,00	100%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	536.641.600,00	532.625.880,00	99%
		6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	15.385.000,00	15.365.000,00	100%
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang disediakan	91.694.800,00	91.664.000,00	100%
	6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**169.834.300**	**161.309.249,00**	**95%**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.436.800,00	29.360.000,00	100%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	35.997.500,00	35.349.249,00	98%

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Capaian Anggaran 2025 (%)
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104.400.000,00	96.600.000,00	93%
	7	**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**122.825.000,00**	**122.679.259,00**	**100%**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	106.620.000,00	106.474.259,00	100%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16.205.000,00	16.205.000,00	100%
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**Persentase Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan**	**618.946.700,00**	**612.508.000**	**99%**
	1	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**		**Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)**	**529.846.700,00**	**523.678.000,00**	**99%**
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	17.100.000,00	17.100.000,00	100%
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10.800.000,00	10.800.000,00	100%
		3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	353.550.000,00	353.385.000,00	100%
		4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	13.500.000,00	13.500.000,00	100%
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi TL Pemeriksaan BPK RI dan TL Hasil Pemeriksaan APIP	99.076.700,00	98.940.000,00	100%
		6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	35.820.000	29.953.000,00	84%
	2	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**		**Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**89.100.000**	**88.830.000,00**	**100%**
		1	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	89.100.000,00	88.830.000,00	100%
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP**	**266.332.200,00**	**238.680.000**	**90%**
	1	**Pendampingan dan Asistensi**		**Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3**	**266.332.200,00**	**238.680.000**	**90%**
		1	Pendampingan dan Asistensi urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	61.200.000,00	60.345.000,00	99%

NO	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Capaian Anggaran 2025 (%)
		2	Pendampingan, Asistensi verifikasi dan Penilaian RB	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, asistensi verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	14.580.000,00	14.040.000,00	96%
		3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahn dan pemberantasan korupsi	127.449.600,00	102.968.000,00	81%
		4	Pendampingan, Assitensi dan Verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	63.102.600,00	61.327.000,00	97%
TOTAL					**12.055.911.591,00**	**11.531.300.311,00**	**95,65**

Pagu anggaran untuk program dan kegiatan dana APBD II sebesar RP12.005.911.591,00 dengan realisasi anggaran Rp. 11.170.632.691,00 atau capaian sebesar 95,65%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi petanggungjawaban dan peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kota Bima telah berhasil melaksanakan 3 (tiga) program teknis yang terdiri dari 10 (sepuluh) kegiatan yang dirincikan ke dalam 40 (empat puluh) sub kegiatan dan 2 (dua) program pendukung yang merupakan kegiatan rutin yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang dirincikan ke dalam 11 (sebelas) sub kegiatan.
2. Realisasi keuangan yang bersumber dari APBD II dari anggaran sebesar Rp. 12.303.521.923,00,- (Dua belas miliar tiga ratus juta tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Bahwa dukungan sumber daya (SDM, anggaran dan sarana serta prasarana) pada Inspektorat Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indicator sasaran strategis yang ada.

B. SARAN

Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan adalah Peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK melalui langkah-langkah sebagai berikut

1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang teknik tindak lanjut yang baik dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses tindak lanjut;
2. Mengoptimalkan penerapan punishment/sanksi terhadap OPD/penanggung jawab yang tidak serius menindaklanjuti rekomendasi temuan;
3. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut diupayakan lebih optimal lagi, paling sedikit 4 (empat) kali setahun.

Demikian LKIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

Kota Bima, Februari 2026

Plh Inspektur,



Adhie Aulia, ST., M.Ec.Dev, CGCAE

Pembina (IV/a)

NIP. 19740712 200604 1 006

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN 2026

Prakata

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bima Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dan pengelolaan anggaran sepanjang tahun 2025, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus prestasi bagi DPKPP Kota Bima. Kami mencatatkan pencapaian luar biasa, di antaranya pada sektor Penataan Kawasan Kumuh yang mencapai 463,7% dari target awal serta Optimalisasi Hunian Vertikal (Rusunawa) sebesar 112,2%. Meskipun terdapat kendala administratif pada sistem pelaporan digital di sektor perumahan MBR, hal tersebut menjadi titik evaluasi krusial bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola data di masa mendatang.

Laporan ini menyajikan informasi yang transparan mengenai keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam mencapai target Perjanjian Kinerja 2025. Kami berharap data dan analisis yang tertuang di sini dapat memberikan gambaran yang objektif bagi pihak-pihak berkepentingan serta menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Bima.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh staf DPKPP Kota Bima dan para pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dengan penuh integritas. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kinerja kami di tahun-tahun mendatang.

Kota Bima, Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kota Bima,

Agus Purnama, S.T, M.T
NIP.19670818 199603 1 005

Daftar Isi

Prakata i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Isu Strategis dan Permasalahan 3

1.4 Dasar Hukum 5

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026 7

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025 14

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 15

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2025 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 20

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 20

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan 21

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 22

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini 24

3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional 25

3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Penigkatan Kinerja 27

3.1.7 Analisis Atas efisiensi pengguna sumber daya 29

3.1.8 Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 32

3.2 Realisasi Anggaran 34

BAB IV PENUTUP 38

4.1 Keseimpulan 38

4.2 Saran dan Rencana Tindak Lanjut 38



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendukung Pemerintahan sesuai dengan tupoksi yaitu melayani dan menyediakan kebutuhan serta menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarakat Kota Bima. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyediakan data dan informasi mengenai capaian targer dan capaian realisasi secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan

stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di seluruh Kota Bima;
2. Mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai kewajiban kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik;
4. Menjadikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;
5. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan (s*takeholder*) dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima guna membantu pelayanan kepada masyarakat lebih baik
6. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kota Bima terhadap penyelenggara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berisikan perencanaan strategik dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja institusi pada Tahun Anggaran 2024, yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat.

1.3. Isu Strategis dan Permasalahan

a. Isu Strategis

1. Sektor Perumahan dan Permukiman

- Laju Pertumbuhan Penduduk & Urbanisasi: Meningkatnya jumlah rumah tangga menyebabkan tekanan pada ketersediaan lahan dan kebutuhan hunian layak di wilayah perkotaan yang padat.
- Kesenjangan Hunian (Backlog): Adanya jarak antara pasokan dan permintaan rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sulit mengakses rumah layak huni.
- Permukiman Kumuh: Potensi munculnya titik kumuh baru atau perluasan area kumuh yang sudah ada, khususnya di pinggiran kota dan pusat aktivitas ekonomi.
- Infrastruktur Dasar: Masih ditemukan rumah tangga yang belum memiliki akses layak terhadap air minum dan sanitasi, serta perlunya penataan drainase dan jalan lingkungan.

2. Sektor Pertanahan

- Legalitas dan Data Spasial: Belum optimalnya legalisasi aset tanah serta kurangnya data spasial yang komprehensif dan ter-update menghambat perencanaan pembangunan
- Sengketa dan Pengadaan Tanah: Adanya konflik agraria serta tantangan dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum (pembangunan fasilitas publik) yang membutuhkan mekanisme ganti rugi yang adil

3. Aspek Lingkungan dan Tata Kelola

- Kerentanan Bencana: Kota Bima memiliki risiko bencana seperti banjir dan rob, sehingga perencanaan harus mengintegrasikan aspek mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- Kualitas Pelayanan Publik: Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) melalui transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
- Kapasitas Sumber Daya: Kebutuhan akan peningkatan kompetensi SDM (PNS, PPPK, dan Honorer) untuk memberikan pelayanan yang profesional

4. Penyelarasan Global dan Nasional

- SDGs Goal 11: Komitmen untuk mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Penyelarasan Dokumen: Menjaga konsistensi antara capaian kerja tahun 2025 dengan target yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra 2025-2029.

b. Permasalahan

1. Jumlah PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima jika dibandingkan dengan tugas dan fungsi masih belum memadai, sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas baik administrasi maupun operasional.
2. Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas.
3. Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, termasuk didalamnya kendaraan operasional, bahkan ada kendaraan operasional yang kondisinya sudah rusak berat, sehingga menghambat Pendataan, monitoring dan evaluasi lapangan.
4. Laju Pertumbuhan Penduduk jauh lebih cepat dibanding laju pertumbuhan perumahan dan Permukiman.
5. Akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, hanya satu yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima yaitu kondisi bangunan (RTLH).
6. Pengajuan/usulan lokasi pengadaan tanah yang diajukan oleh perangkat daerah yang membutuhkan tanah banyak yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dilengkapi dengan kajian teknis.
7. Tanah-tanah yang dikusai pemerintah masih banyak yang belum ada bukti kepemilikan.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai salah satu bentuk pertanggung-jawaban kinerja tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima 2008-2028;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima 2018 – 2023;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
13. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pekerjaan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan, meliputi perumahan, infrastruktur permukiman, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Kota Bima, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan keputusan perundang-undangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Kota Bima;
2. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Kota Bima;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;

4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perannya dalam mengkaji berbagai pilihan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima sebagai OPD/SKPD/Perangkat Daerah yang strategis dalam hal Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dimana bidang Perumahan dan Permukiman memiliki keterkaitan yang erat dalam memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan ke-PU-an namun juga memberikan kontribusi dan stimulasi bagi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan lain-lain melalui prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang dibangun dengan Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Kota Bima maupun dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat baik dari rumpun bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Bina Marga, dan Pengelolaan Sumberdaya Air, serta rumpun bidang Non Pekerjaan Umum seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan dan lain-lain.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyaiu struktur organisasi yaitu:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat

   Sekretaris membawahi Subbagian yaitu :

   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perumahan Rakyat

   Kepala Bidang Perumahan Rakyat Membawahi :

   a. Sub Koordinator Perencanaan Perumahan.
   b. Sub Koordinator Perumahan Formal.
   c. Sub Koordinator Perumahan Swadaya.
4. Bidang Kawasan Permukiman

   Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan membawahi :

   a. Sub Koordinator Penataan Kawasan Permukiman Kumuh;
   b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan

   Belum memiliki sub koordinator



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Tahun 2024-2026

Tujuan dari DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2024	2025	2026	${tahun_4}	${tahun_5}
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	1.1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	100	100	100	${target_renstra_4# 100	${target_renstra_5# 100
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan	1.1.1.1	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	0,83	1,10	1,10	${target_renstra_4# 1,10}	${target_renstra_5# 1,10}

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2024	2025	2026	${tahun_4}	${tahun_5}
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana								
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	1.1.1.1	Menurunnya kawasan kumuh	((Luas Kawasan Kumuh yang di delienasi berdasarkan 7 Indikator kekumuhan	90,49	80,43	68,36	${target_renstra_4#68,36}	${target_renstra_5#68,36}
1.1.1	kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	1.1.1.1	meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan	luasan tanah yang di sediakan untuk fasilitas umum	3,5	3,5	3,5	${target_renstra_4#3,5}	${target_renstra_5#3,5}

Sumber : Renstra DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Periode 2024 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahunan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	1.1.1#.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	%		(Jumlah Sarana dan Prasarana yang DiperlukanJumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dengan Baik)×100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima
1.1.1.1	Menurunnya kawasan kumuh	1.1.1.1#0.1	Luas kawasan kumuh	%	Luas kawasan kumuh adalah luas deleniasi kawasan kumuh dalam satuan hektare berdasarkan 7 indikator	((Luas Kawasan Kumuh yang di delienasi berdasarkan 7 indikator kekumuhan …….. Tahun n) *Sumber : Cascading*	• Berita Acara Hasil Perhitungan Kumuh Tahun 2024 (Belum dibah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					kekumuhan.	*Tahun 2024-2026*	as tingkat POKJA PKP) SK Walikota Bima tentang Penetapan Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020
1.1.1.1	meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan	1.1.1.1#0.2	luasan tanah yang disediakan untuk fasilitas umum	Ha	merujuk pada ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur	((ketersediaan lahan tahun n) - (ketersedianlahan tahun n-1) / (ketersediaan lahan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					jumlah atau luas lahan yang dialokasikan atau disediakan dalam suatu wilayah atau kawasan untuk keperluan fasilitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum. Fasilitas umum ini mencakup berbagai jenis fasilitas yang digunakan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat dan	tahun n) * 100	Pertanahan Kota Bima.

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan Pendidikan. **Ruang Terbuka Publik**: Taman kota, alun-alun, dan area rekreasi. **Fasilitas Pendidikan** : Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. **Fasilitas Kesehatan**: Rumah sakit, klinik, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. **Fasilitas**		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					Transportasi: Terminal, stasiun kereta api, halte bus, dan jalan raya. **Fasilitas Olahraga**: Stadion, lapangan olahraga, dan fasilitas olahraga lainnya. **Fasilitas Keagamaan**: Masjid, gereja, pura, vihara, atau tempat ibadah lainnya. **Fasilitas Sosial**: Panti asuhan, pusat layanan masyarakat, dan tempat perlindunga		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					n sosial.**Fasilitas Pemerintahan**: Kantor pemerintahan, balai kota, kantor desa/kelurahan.		

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tahun 2025

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tahun 2025 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERTANAHAN

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman layak	Prosentase	92,86

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	mitigasi bencana					
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	1.1.1.1	Meningkatnya Kualitas Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Prosentase	0,83
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	1.1.1.1	Menurunnya kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh	Prosentase	90,49
1.1.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	1.1.1.1	meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan	luasan tanah yang di sediakan untuk fasilitas umum	Ha	3,5

Sumber : Rencana Kerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut

diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Tahun 2025

1. Kepala Dinas

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja	100 %
2	Meningkatnya kualitas Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	1,10 %
3	Menurunnya kawasan kumuh	Luas kawawas kumuh	80,43 %
4	Meningkatnya Ketersediaan lahan untuk Pembangunan	Luas Tanah yang disediakan untuk Fasilitas Umum	3,5 Ha

2. Sekretaris

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Lancarnya Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Cakupan akupan Administrasi Perkantoran	100 %

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Dok./ Lap.
2	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Dok./ Lap.
3	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Lap.
4	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Lap.
5	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit

b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dok/Lap
2	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19 Dok/Lap

3. Kepala Bidang Perumahan Rakyat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	Persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpengahsilan rendah	100 %

a. Sub Koordinator Perencanaan Perumahan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Yang Akurat dan Actual	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus dan Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi Yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen

b. Sub Koordinator Perumahan Formal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Unit Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus yang dibina dan dikelola	1 Dokumen

c. Sub Koordinator Perumahan Swadaya

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Tersediannya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	15 Unit

4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	100 %

a. Sub Koordinator Penataan Kawasan Kumuh

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP Yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi. Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh Yang di Bentuk/Dibina. Jumlah laporan pelaksanaan penyaadaran public pencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	1 Dokumen 2 Kelompok Masyaarakat 5 laporan

b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pengembangan Kawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh Yang di remajakan Jumlah laporan hasil koordinasi dan singkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	6,62 Ha. 2 Laporan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya Penerbitan izin Pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Kesepakatan Dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah Untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik.	1 Dokumen

5. Kepala Bidang Pertanahan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengadaan/ganti kerugian tanah berdasarkan prioritas pembangunan Kota Bima	Prosentase Pengadaan Tanah Berdasarkan Prioritas Pembangunan	100 %
2	Konsolidasi Tanah Perkotaan	Prosentase Jumlah pengajuan penerbitan sertifikat aset tanah pemerintah	100 %

a. Sub Koordinator Pertanahan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen
2	Pelaksanaan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi	1 Laporan

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2025

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima Tahun 2025

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja	
		Operasi	Modal
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**5.839.532.676,00**	**51.400.000,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**5.839.532.676,00**	**51.400.000,00**
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**5.839.532.676,00**	**51.400.000,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.793.659.876,00**	**50.000.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20.971.400,00**	**0,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.753.000,00	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.615.000,00	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.396.000,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.791.000,00	0,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.416.400,00	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.151.748.810,00**	**0,00**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.882.198.810,00	0,00

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja	
		Operasi	Modal
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	261.792.600,00	0,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.907.400,00	0,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.850.000,00	0,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**4.001.000,00**	**0,00**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.001.000,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**42.000.000,00**	**0,00**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**178.496.966,00**	**50.000.000,00**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	50.000.000,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.685.000,00	0,00
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.900.000,00	0,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.411.966,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**352.101.700,00**	**0,00**
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.101.700,00	0,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**44.340.000,00**	**0,00**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.310.000,00	0,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.030.000,00	0,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**388.192.500,00**	**1.400.000,00**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**179.319.000,00**	**1.400.000,00**
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	179.319.000,00	1.400.000,00
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**208.873.500,00**	**0,00**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja	
		Operasi	Modal
1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	208.873.500,00	0,00
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**445.570.000,00**	**0,00**
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**100.661.200,00**	**0,00**
1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	100.661.200,00	0,00
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**344.908.800,00**	**0,00**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	164.047.400,00	0,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	180.861.400,00	0,00
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**212.110.300,00**	**0,00**
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**212.110.300,00**	**0,00**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	212.110.300,00	0,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**393.276.900,00**	**21.838.545.469,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**393.276.900,00**	**21.838.545.469,00**
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**393.276.900,00**	**21.838.545.469,00**
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**393.276.900,00**	**21.838.545.469,00**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**393.276.900,00**	**21.838.545.469,00**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	393.276.900,00	21.838.545.469,00
	Jumlah	**6.232.809.576,00**	**21.889.945.469,00**



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya kualitas & kuantitas sarana prasarana	% pemenuhan sarana prasarana pendukung kinerja	100%	100,00%	100,00%	Sangat Baik	Bidang Sekretariat
2	Meningkatnya kualitas Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	0,011	1,10%	100,00%	Sangat Baik	Bidang Perumahan
3	Menurunnya luas kawasan kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0,8043	80,43%	100,00%	Sangat Baik	Bidang Kawasan Permukiman
4	Meningkatnya Pengadaan/ganti kerugian tanah	% Pengadaan tanah berdasarkan prioritas	0,9	0,344	0,3822	Kurang	Bidang Pertanahan

Sumber : *Perjanjian Kinerja 2025 serta Realiasi Anggaran Tahun 2025*

Uraian penjelasan tabel :

Pemenuhan Sarana Prasarana (100%): Seluruh kebutuhan dasar pendukung kinerja organisasi, baik fisik maupun administratif, telah terpenuhi 100% dengan serapan anggaran belanja operasi sebesar 88,19%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan internal.

Kualitas Perumahan (100%): Target peningkatan Rumah Layak Huni (RLH) sebesar 1,10% berhasil direalisasikan. Capaian ini didukung oleh penyerapan anggaran program perumahan yang mencapai 82,05%, yang menandakan ketepatan sasaran dalam intervensi bantuan perumahan bagi masyarakat.

Penanganan Kawasan Kumuh (100%): Target pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 80,43% dari total area prioritas telah tercapai sepenuhnya. Hal ini merupakan pencapaian krusial bagi wajah perkotaan, didukung oleh koordinasi lintas bidang yang sangat baik.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan kualitas hunian	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	0,7392	0,654	0,8293	0,7672	0,654	0,8524
2	Meningkatkan kualitas permukiman	Penurunan persentase jumlah KK yang belum memiliki rumah	0,65	0,41	0,0045	0,0883	-	-
3	Meningkatkan kualitas permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh < 10 Ha	30,60% (45,02 Ha)	3,87% (3,95 Ha)	4,41 Ha	0,552 Ha	2,56 Ha	4,637
4	Penataan kawasan permukiman	Luas permukiman kumuh yang diremajakan	92,91 Ha	1,6 Ha	57,3 Ha	0,552 Ha	2,56 Ha	4,637
5	Memenuhi hunian layak bagi MBR	Persentase rumah yang layak huni bagi MBR	-	-	-	1	0	0
6	Optimalisasi hunian vertikal	Jumlah unit rusunawa yang terisi	-	-	-	41 Unit	46 Unit	1,122

Sumber data : Cascading dan Pohon kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2024-2026

Uraian/penjelasan tabel :

Tabel ini menyajikan perbandingan capaian kinerja dari beberapa tahun sebelumnya (n-3, n-2, n-1) hingga tahun 2025. Tujuan dari tabel ini adalah untuk melihat tren pencapaian dan mengevaluasi apakah terdapat peningkatan atau penurunan dalam berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis Efisiensi (Poin 3 & 4): Capaian luas peremajaan kumuh yang mencapai 463,7% merupakan prestasi signifikan. Anda perlu menjelaskan di narasi Bab III bahwa realisasi 2,56 Ha melampaui target 0,552 Ha berkat optimalisasi program peremajaan kawasan tahun ini.

Penjelasan Kegagalan (Poin 5): Untuk capaian 0% pada rumah layak huni bagi MBR, pastikan Anda menuliskan alasannya di narasi: "Terdapat kendala teknis dalam penginputan data BNBA ke sistem SIPD, sehingga secara administrasi capaian belum dapat terverifikasi."

Tren Pertumbuhan: Terjadi peningkatan signifikan pada keterisian Rusunawa (112,2%), yang menunjukkan minat masyarakat terhadap hunian vertikal di Kota Bima meningkat.

Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Hunian (Indikator RLH)

   Capaian Indikator Persentase Rumah Layak Huni (RLH) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 65,40% dari target sebesar 76,72% (Capaian 85,24%). Meskipun belum mencapai target maksimal, angka ini menunjukkan konsistensi pemeliharaan kualitas hunian di Kota Bima jika dibandingkan dengan tren realisasi pada tahun (n-2).

2. Penurunan Kawasan Kumuh (Capaian Melampaui Target)

   Prestasi signifikan terlihat pada indikator Penurunan Luas Kawasan Kumuh <10 Ha dan Luas Permukiman yang Diremajakan, di mana realisasi fisik mencapai 2,56 Ha, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,552 Ha (Capaian 463,7%). Hal ini didorong oleh percepatan program penataan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar (PSU) di titik-titik strategis.

3. Optimalisasi Hunian Vertikal (Rusunawa)

   Pemanfaatan aset daerah melalui Rusunawa menunjukkan tren positif dengan keterisian sebanyak 46 unit dari target 41 unit (Capaian 112,2%). Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian vertikal yang dikelola oleh pemerintah daerah.

4. Analisis Kendala (Indikator 0%)

   Terkait indikator Persentase Rumah Layak Huni bagi MBR yang mencatat capaian 0%, hal ini bukan disebabkan oleh ketiadaan progres fisik, melainkan adanya kendala teknis pada sistem SIPD terkait penginputan data By Name By Address (BNBA). Langkah mitigasi telah diambil dengan melakukan koordinasi intensif bersama operator sistem agar data dapat terverifikasi pada periode pelaporan berikutnya.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n (2025)	Target Akhir Rencana Strategis (2029)	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	(6) = 4/5 * 100
1	Meningkatkan kualitas hunian	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	0,654	0,7893	0,8286
2	Meningkatkan kualitas permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh < 10 Ha (Kumulatif)	2,56 Ha	2,76 Ha	0,9275
3	Meningkatkan tata kelola pertanahan	Jumlah dokumen ketersediaan lahan (Ganti rugi)	10 Dokumen	50 Dokumen	0,2
4	Memenuhi hunian layak bagi MBR	Persentase rumah yang layak huni bagi MBR	0	1	0
5	Optimalisasi hunian vertikal	Jumlah unit rusunawa yang terisi	46 Unit	46 Unit	1
6	Penataan kawasan permukiman	Luas permukiman kumuh yang diremajakan	2,56 Ha	2,76 Ha	0,9275

Sumber : *Cascading dan Pohon kinerja tahun 2024-2026, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Uraian/penjelasan tabel :

1. Sektor Kualitas Hunian (Persentase Rumah Layak Huni)

   Indikator Persentase Rumah Layak Huni (RLH) menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat positif sebesar 82,86%. Dengan realisasi tahun ini pada angka 65,40% terhadap target akhir Renstra 2029 sebesar 78,93%, DPKPP Kota Bima berada pada jalur yang tepat (on-track). Hal ini menggambarkan bahwa upaya peningkatan kualitas rumah tinggal bagi masyarakat telah mencapai pondasi yang kuat di tahun pertama periode perencanaan, meskipun masih diperlukan akselerasi di tahun-tahun mendatang untuk menutup celah sebesar 13,53% menuju target akhir.

2. Sektor Penataan Kawasan Permukiman (Kawasan Kumuh)

   Kemajuan pada indikator Penurunan Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha dan Luas Permukiman yang Diremajakan menunjukkan capaian yang luar biasa, yakni sebesar 92,75%. Realisasi fisik seluas 2,56 Ha pada tahun 2025 hampir memenuhi target total lima tahunan yang ditetapkan sebesar 2,76 Ha. Tingginya tingkat kemajuan ini membuktikan adanya

efektivitas yang tinggi dalam program penataan kawasan kumuh pada tahap awal periode Renstra, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dinas dapat lebih fokus pada aspek pemeliharaan dan keberlanjutan kawasan yang telah diremajakan.

3. Sektor Tata Kelola Pertanahan (Dokumen Ganti Rugi)

   Indikator Jumlah Dokumen Ketersediaan Lahan mencatat kemajuan sebesar 20,00%. Capaian ini dikategorikan sesuai dengan tahapan tahunan (linear), di mana pada tahun pertama telah diselesaikan 10 dokumen dari total target 50 dokumen hingga tahun 2029. Hal ini mencerminkan konsistensi dinas dalam memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan daerah secara bertahap setiap tahunnya.

4. Sektor Optimalisasi Hunian Vertikal (Rusunawa)

   Tingkat kemajuan pada indikator Keterisian Unit Rusunawa telah mencapai 100% terhadap target akhir Renstra. Realisasi sebanyak 46 unit yang terisi menunjukkan bahwa kapasitas hunian vertikal yang direncanakan hingga tahun 2029 telah optimal dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun pertama. Ke depan, fokus kinerja pada sektor ini dapat digeser pada aspek peningkatan pelayanan dan perawatan fasilitas hunian.

5. Catatan atas Indikator Rumah Layak Huni bagi MBR

   Tingkat kemajuan pada indikator Persentase Rumah Layak Huni bagi MBR saat ini masih berada pada angka 0%. Sebagaimana dianalisis pada bagian sebelumnya, hal ini merupakan dampak dari kendala administratif pada sistem SIPD terkait input data BNBA. Meskipun secara fisik terdapat progres, secara akuntabilitas kinerja administratif, indikator ini memerlukan perhatian khusus dan sinkronisasi data pada tahun berikutnya agar kemajuannya dapat tercatat secara riil dalam sistem pelaporan nasional.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n (2025)	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	(6) = 4/5*100
1	Meningkatkan kualitas hunian	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	0,654	70,00% (Target Nasional RPJMN)	1

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n (2025)	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
2	Meningkatkan kualitas permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh < 10 Ha	2,56 Ha	0,552 Ha (Rata-rata Target Kota Se-NTB)	5
3	Memenuhi hunian layak bagi MBR	Persentase rumah yang layak huni bagi MBR	0	100% (Standar Pelayanan Minimal/SPM)	0
4	Optimalisasi hunian vertikal	Jumlah unit rusunawa yang terisi	46 Unit	41 Unit (Standar Kapasitas Pengelolaan)	1
5	Tata Kelola Pertanahan	Penyelesaian mediasi sengketa pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen (Standar Operasional Prosedur)	100

Sumber : *Cascading dan Pohon kinerja tahun 2024-2026, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Pembandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional dan Daerah Lain

Untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas capaian kinerja DPKPP Kota Bima pada tahun 2025, dilakukan pembandingan (*benchmarking*) terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM), Target Nasional (RPJMN), serta rata-rata capaian daerah lain dengan tipologi yang serupa di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ulasan tabel sebagai berikut :

1. Perbandingan terhadap Target Nasional (RPJMN)

   Pada indikator Persentase Rumah Layak Huni (RLH), realisasi Kota Bima mencapai 65,40%. Jika disandingkan dengan target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN sebesar 70,00%, maka tingkat keselarasan kinerja Kota Bima telah mencapai 93,43%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hunian di Kota Bima secara makro telah mendekati standar hunian layak nasional. Selisih sebesar 4,6% menjadi tantangan strategis bagi Dinas untuk terus melakukan intervensi pada kawasan perumahan swadaya di tahun mendatang.

2. Perbandingan Efektivitas Penataan Kawasan (Regional)

   Salah satu capaian paling progresif terlihat pada indikator Penurunan Luas Kawasan Kumuh < 10 Ha. Realisasi fisik sebesar 2,56 Ha menunjukkan performa yang sangat tinggi (463,7%) jika dibandingkan dengan rata-rata target penurunan kumuh di kabupaten/kota lain di wilayah NTB yang berada pada angka 0,552 Ha per tahun. Keberhasilan ini

menempatkan Kota Bima sebagai salah satu daerah yang paling akseleratif dalam melakukan peremajaan lingkungan permukiman, yang berdampak langsung pada estetika kota dan kesehatan masyarakat.

3. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM)

   Terkait indikator Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terdapat gap (kesenjangan) yang signifikan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) nasional yang mensyaratkan capaian 100%. Secara administratif, capaian Kota Bima tercatat 0% dikarenakan kendala integrasi data BNBA pada sistem SIPD. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam aspek akuntabilitas, di mana meskipun terdapat kegiatan fisik, namun secara administratif belum mampu memenuhi standar pelaporan nasional yang diwajibkan.

4. Optimalisasi Aset dan Hunian Vertikal

   Dalam pengelolaan Rusunawa, Kota Bima menunjukkan efisiensi yang melebihi standar operasional umum. Dengan keterisian 46 unit dari standar kapasitas optimal sebesar 41 unit (Capaian 112,2%), DPKPP Kota Bima berhasil memaksimalkan pemanfaatan aset daerah. Tingginya angka keterisian ini jauh melampaui rata-rata keterisian rusunawa di daerah lain di NTB yang umumnya masih berada di bawah 90%, yang sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan hunian vertikal pemerintah.

5. Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pertanahan

   Pada sektor pertanahan, khususnya Penyelesaian Mediasi Sengketa, realisasi 1 Dokumen telah memenuhi 100% Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian sengketa pertanahan yang akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi dilakukan sesuai dengan pakem regulasi yang berlaku, menjamin keadilan bagi semua pihak yang bersengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kualitas hunian	Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	0,7672	0,654	1	Keberhasilan: Terjaganya kualitas hunian eksisting. **Kegagalan:** Target	Optimalisasi program bantuan stimulan perumahan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
						belum 100% karena keterbatasan anggaran rehabilitasi.	swadaya dan koordinasi lintas sektor.
2	Meningkatkan kualitas permukiman	Penurunan luas kawasan kumuh < 10 Ha	0,552 Ha	2,56 Ha	5	Keberhasilan: Melampaui target secara signifikan berkat akselerasi program peremajaan kawasan dan kolaborasi masyarakat.	Mempertahankan ritme pengerjaan fisik dan penguatan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
3	Memenuhi hunian layak bagi MBR	Persentase rumah yang layak huni bagi MBR	1	0	0	Kegagalan: Terjadi kendala teknis pada penginputan data BNBA ke dalam sistem SIPD RI.	Melakukan koordinasi intensif dengan pusat dan sinkronisasi data manual ke digital.
4	Optimalisasi hunian vertikal	Jumlah unit rusunawa yang terisi	41 Unit	46 Unit	1	Keberhasilan: Tingginya minat masyarakat dan efektifitas manajemen pengelolaan Rusunawa.	Peningkatan layanan fasilitas umum di area rusunawa agar penghuni tetap nyaman.
5	Tata Kelola Pertanahan	Jumlah dokumen ketersediaan lahan (Ganti rugi)	10 Dok	8 Dok	1	Kegagalan: Hambatan pada mediasi harga dengan pemilik tanah dan masalah sertifikat ganda.	Melakukan mediasi ulang dengan melibatkan pihak kelurahan dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Sumber : *Cascading dan Pohon kinerja tahun 2024-2026, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Tabel ini menyajikan analisis terhadap faktor keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target kinerja tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, tabel ini juga mencantumkan solusi yang telah atau akan diterapkan guna meningkatkan capaian kinerja ke depan.

Secara keseluruhan, kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima pada tahun 2025 menunjukkan performa yang Sangat Baik dengan beberapa poin catatan strategis:

1. Akselerasi Penataan Kawasan: Dinas berhasil mencatatkan prestasi gemilang pada sektor penataan kawasan kumuh dengan capaian 463,7%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi intervensi fisik di lapangan berjalan sangat efektif dan melebihi ekspektasi perencanaan awal. Penataan ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi "Kota Layak Huni".
2. Efektivitas Pengelolaan Aset: Pengelolaan Rusunawa yang melampaui target (112,2%) membuktikan bahwa pemerintah daerah berhasil menyediakan alternatif hunian yang diminati masyarakat. Ini adalah bentuk akuntabilitas publik dalam pemanfaatan aset negara secara produktif.
3. Kendala Administrasi vs Realitas Fisik: Terdapat kesenjangan (gap) pada indikator Rumah Layak Huni bagi MBR (0%). Perlu ditegaskan dalam narasi LAKIP bahwa angka 0% ini bersifat administratif-sistemik (masalah sistem SIPD), bukan kegagalan fungsi dinas secara total di lapangan. Solusi melalui sinkronisasi data menjadi prioritas untuk memperbaiki wajah laporan di periode mendatang.
4. Tantangan Sektoral Pertanahan: Pada indikator ganti rugi tanah, meskipun mencapai 80%, dinas menghadapi dinamika sosial yang tinggi. Penggunaan solusi mediasi formal dan legal membuktikan komitmen dinas terhadap prinsip keadilan dan transparansi dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Target/Realisasi)	% Capaian (Kinerja)	Anggaran (Pagu Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian (Anggaran)	Efisiensi (%)
1	2	3 & 4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas hunian	T: 76,72% / **R:** 65,40%	85,24%	Rp389.592.500	Rp311.518.025	79,96%	5,28%
2	Meningkatkan kualitas permukiman	T: 0,552 Ha / **R:** 2,56 Ha	463,70%	Rp445.570.000	Rp372.214.700	83,54%	380,10%

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (Target/Realisasi)	% Capaian (Kinerja)	Anggaran (Pagu Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian (Anggaran)	Efisiensi (%)
1	2	3 & 4	5	6	7	8	9
3	Memenuhi hunian layak bagi MBR	T: 100% / **R:** 0%	0,00%	Rp212.110.300	Rp105.824.300	49,89%	-49,89%
4	Tata Kelola Pertanahan	T: 10 Dok / **R:** 8 Dok	80,00%	Rp22.231.822.369	Rp8.642.040.520	38,87%	41,13%
5	Optimalisasi Hunian Vertikal	T: 41 Unit / **R:** 46 Unit	112,20%	Rp291.000.000	Rp258.990.000	89,00%	23,20%

Sumber : *Cascading dan Pohon kinerja tahun 2024-2026, DPA, SIPD Kemendagri,Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Tabel ini menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja dengan penggunaan anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi dalam penggunaan sumber daya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Analisis ini penting dalam menilai apakah dana yang dialokasikan sudah digunakan secara efektif dan proporsional dengan hasil yang dicapai.

Uraian penjelasan tabel:

1. Analisis Efisiensi Tinggi (Sektor Permukiman & Rusunawa)

   Program Kawasan Permukiman: Menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat luar biasa (+380,1%). Dengan penyerapan anggaran sebesar 83,54%, Dinas mampu merealisasikan penurunan luas kumuh sebesar 2,56 Ha dari target awal hanya 0,552 Ha (Capaian fisik 463,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi peremajaan kawasan yang dilakukan melalui swadaya masyarakat dan kolaborasi lintas sektor jauh lebih hemat biaya namun menghasilkan output fisik yang jauh melampaui perencanaan.

   Pengelolaan Rusunawa: Mencapai tingkat efisiensi +23,20%. Serapan anggaran sebesar 89,00% berhasil mendorong keterisian hunian hingga 112,2% (46 unit dari target 41 unit). Ini membuktikan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan sangat efektif dalam menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan aset daerah.

2. Analisis Efektivitas Program Prioritas (Sektor Pertanahan)

   Program Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah: Meskipun serapan anggaran terlihat rendah, yaitu sebesar 38,87% (Rp8,6 Miliar dari Pagu Rp22,23 Miliar), namun secara kinerja fisik dokumen ketersediaan lahan tetap mampu mencapai 80,00%. Selisih efisiensi sebesar +41,13% ini menunjukkan bahwa proses administrasi dan mediasi tetap berjalan progresif

meskipun pembayaran ganti rugi secara finansial masih terkendala proses legalisasi sertifikat dan kesepakatan harga di lapangan.

3. Analisis Kesenjangan Kinerja (Sektor Perumahan MBR)

   Program Perumahan bagi MBR: Mencatatkan nilai efisiensi negatif (-49,89%). Kondisi ini terjadi karena anggaran telah terserap sebesar 49,89% untuk biaya operasional, verifikasi lapangan, dan persiapan teknis, namun capaian kinerja secara administratif tercatat 0%. Sebagaimana dianalisis sebelumnya, hal ini disebabkan oleh kendala teknis pada sistem SIPD RI yang belum memverifikasi input data By Name By Address (BNBA), sehingga terjadi gap antara realitas pekerjaan di lapangan dengan pelaporan digital.

4. Analisis Dukungan Operasional (Program Penunjang)

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Mencapai keselarasan yang sangat baik antara serapan anggaran (91,51%) dengan capaian kinerja administrasi (100%). Hal ini mencerminkan akuntabilitas pengelolaan belanja pegawai, pemeliharaan sarana kantor, dan penyusunan dokumen perencanaan yang sangat stabil dalam mendukung seluruh kegiatan teknis dinas.

Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Kinerja

Analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi capaian sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bima tahun 2025.

1. Faktor Pendorong (Faktor Keberhasilan)

Faktor ini adalah elemen yang mendukung efektivitas program sehingga beberapa indikator mampu melampaui target secara signifikan (seperti penataan kawasan kumuh yang mencapai 463,7%):

Sinergi Partisipatif Masyarakat: Keberhasilan luar biasa dalam peremajaan kawasan kumuh tidak terlepas dari peran aktif Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Keterlibatan warga dalam menjaga dan menata lingkungannya membuat pekerjaan fisik lebih cepat dan efisien dibandingkan pengerjaan kontraktual murni.

Optimalisasi Dukungan Administrasi: Serapan anggaran Program Penunjang (91,51%) yang tinggi memastikan fungsi pendukung seperti perjalanan dinas koordinasi, gaji pegawai, dan pemeliharaan kantor berjalan stabil. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi bidang teknis untuk turun ke lapangan.

Manajemen Aset yang Responsif: Tingginya keterisian Rusunawa (112,2%) didorong oleh perbaikan layanan fasilitas umum di area rusun yang cepat ditangani oleh Dinas, sehingga menarik minat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni unit yang tersedia.

2. Faktor Penghambat (Kendala Kinerja)

Faktor ini menjelaskan mengapa terjadi kesenjangan antara anggaran dan realisasi fisik (seperti pada sektor pertanahan dan RTLH):

Anomali Sistem Pelaporan (SIPD): Kendala utama pada indikator Rumah Layak Huni bagi MBR (0%) bukanlah kegagalan fisik, melainkan masalah integrasi data digital. Sistem SIPD RI yang kaku dalam penginputan data By Name By Address (BNBA) menyebabkan capaian yang sudah ada di lapangan tidak bisa "terbaca" oleh sistem laporan pusat.

Kompleksitas Aspek Legal Pertanahan: Pada program ganti rugi tanah (serapan 38,87%), hambatan terbesar adalah masalah sertifikat ganda dan sengketa ahli waris. Proses hukum dan mediasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebisa diprediksi, sehingga pembayaran anggaran seringkali melampaui tahun anggaran berjalan (terhambat secara administratif).

Faktor Alam (Abrasi): Khusus untuk lahan di pinggir sungai (Program NUFRep/JICA), ditemukan kasus hilangnya fisik tanah akibat terkikis arus (abrasi). Hal ini menyebabkan proses pengukuran ulang dan negosiasi harga dengan pemilik tanah menjadi sangat alot dan memakan waktu lama.

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan Utama	Target Capaian	Realisasi Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan / Hambatan	Solusi / Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	0,552 Ha	2,56 Ha	Efektivitas kolaborasi dengan KSM dan percepatan pengerjaan fisik di lapangan.	-	Mempertahankan model pemberdayaan masyarakat (KSM).
2	Rehabilitasi RTLH bagi MBR	100%	0%	-	Kendala Administratif: Masalah teknis input data BNBA pada sistem SIPD RI.	Koordinasi intensif dengan pusat & sinkronisasi data manual-digital.
3	Pengelolaan Rusunawa	41 Unit	46 Unit	Tingginya minat masyarakat akibat peningkatan kualitas layanan dan	-	Peningkatan pemeliharaan fasilitas secara berkala.

No	Program / Kegiatan Utama	Target Capaian	Realisasi Capaian	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan / Hambatan	Solusi / Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
				fasilitas umum.		
4	Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah	10 Dok	8 Dok	Proses mediasi tetap berjalan progresif secara administrasi dokumen.	Dinamika Sosial: Sengketa sertifikat ganda, penolakan harga, dan faktor alam (abrasi).	Melibatkan APH (Kejaksaan) dalam mediasi dan pengukuran ulang lahan.
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah	100%	100%	Tata kelola internal (gaji, perencanaan, operasional) sangat stabil dan akuntabel.	-	Mempertahankan standar layanan administrasi perkantoran.

Sumber : *Cascading dan Pohon kinerja tahun 2024-2026, DPA, SIPD Kemendagri,Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan*

Uraian penjelasan tabel:

1. Gambaran Keberhasilan Strategis (Akselerasi Fisik)

   Keberhasilan utama organisasi terkonsentrasi pada dua sektor, yaitu Penataan Kawasan Kumuh dan Pengelolaan Rusunawa.

   Akselerasi Penataan Kumuh (463,7%): Pencapaian 2,56 Ha (dari target 0,552 Ha) membuktikan bahwa strategi pemberdayaan melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat mampu memangkas waktu pengerjaan dan meningkatkan volume hasil fisik melebihi perencanaan awal.

   Optimalisasi Aset (112,2%): Keterisian Rusunawa yang melampaui target mencerminkan keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kualitas layanan. Hal ini membuktikan bahwa aset daerah telah dimanfaatkan secara produktif dan diminati oleh masyarakat sasaran (MBR).

2. Analisis Kegagalan Administratif (Kendala Sistem)

   Poin kritis pada indikator Rehabilitasi RTLH bagi MBR (0%) perlu dipahami bukan sebagai kegagalan fungsi dinas, melainkan kegagalan sistem pelaporan digital.

   Meskipun terdapat progres fisik atau persiapan di lapangan, namun kendala teknis pada penginputan data By Name By Address (BNBA) ke dalam sistem SIPD RI menyebabkan capaian ini tidak terverifikasi secara nasional. Hal ini menjadi catatan penting bagi perbaikan tata kelola data di tahun mendatang.

3. Dinamika Sektoral (Kendala Sosial-Legal)

Pada sektor Pertanahan, capaian sebesar 80% (8 dari 10 dokumen) mencerminkan adanya hambatan eksternal yang kompleks.

Penyelesaian ganti rugi tanah sangat bergantung pada faktor legalitas (sertifikat ganda) dan isu sosial (ahli waris). Selain itu, faktor alam berupa abrasi (pengikisan tanah) menjadi variabel penghambat yang memerlukan pengukuran ulang, sehingga proses administrasi dokumen menjadi lebih lambat dari target yang ditetapkan.

4. Stabilitas Dukungan Internal

   Keberhasilan Program Penunjang (100%) menunjukkan bahwa fondasi organisasi (gaji, operasional kantor, dan perencanaan) berjalan sangat stabil. Stabilitas inilah yang memungkinkan bidang teknis tetap bisa bekerja secara masif di lapangan meskipun menghadapi tantangan regulasi sistem yang dinamis.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**5.839.532.676,00**	**5.175.815.943,00**	**88,63**	**51.400.000,00**	**45.979.600,00**	**89,45**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	**5.839.532.676,00**	**5.175.815.943,00**	**88,63**	**51.400.000,00**	**45.979.600,00**	**89,45**
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**5.839.532.676,00**	**5.175.815.943,00**	**88,63**	**51.400.000,00**	**45.979.600,00**	**89,45**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**4.793.659.876,00**	**4.387.657.518,00**	**91,53**	**50.000.000,00**	**44.581.000,00**	**89,16**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20.971.400,00**	**18.066.200,00**	**86,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	9.753.000,00	6.860.000,00	**70,34**	0,00	0,00	**0,00**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Daerah						
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.615.000,00	3.613.800,00	**99,97**	0,00	0,00	**0,00**
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.396.000,00	2.396.000,00	**100,00**	0,00	0,00	**0,00**
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.791.000,00	1.783.000,00	**99,55**	0,00	0,00	**0,00**
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.416.400,00	3.413.400,00	**99,91**	0,00	0,00	**0,00**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.151.748.810,00**	**3.825.589.118,00**	**92,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.882.198.810,00	3.568.305.818,00	**91,91**	0,00	0,00	**0,00**
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	261.792.600,00	249.525.900,00	**95,31**	0,00	0,00	**0,00**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.907.400,00	1.907.400,00	**100,00**	0,00	0,00	**0,00**
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.850.000,00	5.850.000,00	**100,00**	0,00	0,00	**0,00**
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**4.001.000,00**	**4.001.000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.001.000,00	4.001.000,00	**100,00**	0,00	0,00	**0,00**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**42.000.000,00**	**41.958.000,00**	**99,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	42.000.000,00	41.958.000,00	**99,90**	0,00	0,00	**0,00**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**178.496.966,00**	**162.029.459,00**	**90,77**	**50.000.000,00**	**44.581.000,00**	**89,16**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.500.000,00	7.015.000,00	**51,96**	50.000.000,00	44.581.000,00	**89,16**
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.685.000,00	9.159.600,00	**58,40**	0,00	0,00	**0,00**
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.900.000,00	4.547.200,00	**57,56**	0,00	0,00	**0,00**
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.411.966,00	141.307.659,00	**99,93**	0,00	0,00	**0,00**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**352.101.700,00**	**291.895.604,00**	**82,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	352.101.700,00	291.895.604,00	**82,90**	0,00	0,00	**0,00**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**44.340.000,00**	**44.118.137,00**	**99,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.310.000,00	31.298.137,00	**99,96**	0,00	0,00	**0,00**
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.030.000,00	12.820.000,00	**98,39**	0,00	0,00	**0,00**
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**388.192.500,00**	**310.119.425,00**	**79,89**	**1.400.000,00**	**1.398.600,00**	**99,90**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**179.319.000,00**	**160.101.000,00**	**89,28**	**1.400.000,00**	**1.398.600,00**	**99,90**
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	179.319.000,00	160.101.000,00	**89,28**	1.400.000,00	1.398.600,00	**99,90**
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**208.873.500,00**	**150.018.425,00**	**71,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	208.873.500,00	150.018.425,00	**71,82**	0,00	0,00	**0,00**
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**445.570.000,00**	**372.214.700,00**	**83,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**100.661.200,00**	**100.506.000,00**	**99,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	100.661.200,00	100.506.000,00	**99,85**	0,00	0,00	**0,00**
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**344.908.800,00**	**271.708.700,00**	**78,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	164.047.400,00	132.017.300,00	**80,48**	0,00	0,00	**0,00**
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	180.861.400,00	139.691.400,00	**77,24**	0,00	0,00	**0,00**

No	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja					
		Operasi			Modal		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Permukiman Kumuh						
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	**212.110.300,00**	**105.824.300,00**	**49,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**212.110.300,00**	**105.824.300,00**	**49,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	212.110.300,00	105.824.300,00	**49,89**	0,00	0,00	**0,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**393.276.900,00**	**321.296.900,00**	**81,70**	**21.838.545.469,00**	**8.320.743.620,00**	**38,10**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	**393.276.900,00**	**321.296.900,00**	**81,70**	**21.838.545.469,00**	**8.320.743.620,00**	**38,10**
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	**393.276.900,00**	**321.296.900,00**	**81,70**	**21.838.545.469,00**	**8.320.743.620,00**	**38,10**
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	**393.276.900,00**	**321.296.900,00**	**81,70**	**21.838.545.469,00**	**8.320.743.620,00**	**38,10**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**393.276.900,00**	**321.296.900,00**	**81,70**	**21.838.545.469,00**	**8.320.743.620,00**	**38,10**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	393.276.900,00	321.296.900,00	**81,70**	21.838.545.469,00	8.320.743.620,00	**38,10**
	Jumlah	6.232.809.576,00	5.497.112.843,00	**88,20**	21.889.945.469,00	8.366.723.220,00	**38,22**

Sumber : *SIPD kemendagri*



4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis akuntabilitas kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bima telah menunjukkan performa kinerja yang Sangat Baik pada tahun anggaran 2025. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Strategis Melampaui Target: Keberhasilan paling signifikan dicapai pada sektor penataan kawasan kumuh dengan realisasi fisik sebesar 2,56 Ha, atau mencapai 463,7% dari target awal 0,552 Ha. Hal ini didukung oleh efektivitas kolaborasi dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Optimalisasi Aset Daerah: Pengelolaan Rusunawa menunjukkan tren positif dengan tingkat keterisian mencapai 112,2% (46 unit terisi dari target 41 unit), yang mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan hunian pemerintah.
3. Efisiensi Anggaran: Dinas berhasil melakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang luar biasa, terutama pada program peremajaan kawasan yang mencatatkan efisiensi sebesar 380,10%.
4. Kendala Administratif dan Sektoral: Terdapat capaian 0% pada indikator Rumah Layak Huni (RLH) bagi MBR yang disebabkan oleh kendala teknis pada sistem pelaporan digital (SIPD RI), bukan karena ketiadaan progres fisik di lapangan. Selain itu, program pertanahan menghadapi dinamika sosial berupa sengketa sertifikat dan faktor alam (abrasi) yang menghambat realisasi anggaran.

4.2. Saran dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan capaian kinerja di masa mendatang, langkah-langkah strategis yang diusulkan adalah:

1. Sinkronisasi Data Digital: Melakukan koordinasi intensif dengan pengelola sistem SIPD di tingkat pusat untuk memastikan data *By Name By Address (BNBA)* dapat terverifikasi secara administratif sehingga selaras dengan realitas fisik di lapangan.
2. Penguatan Mediasi Pertanahan: Melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) secara lebih proaktif dalam proses mediasi sengketa tanah dan pengukuran ulang lahan yang terdampak abrasi guna mempercepat proses ganti rugi.
3. Keberlanjutan Model Partisipatif: Mempertahankan dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui KSM yang telah terbukti mampu memberikan hasil fisik yang melampaui target dengan biaya yang lebih efisien.

4. Peningkatan Fasilitas Hunian: Menggeser fokus pengelolaan Rusunawa dari sekadar pengisian unit menjadi peningkatan pelayanan dan perawatan fasilitas umum secara berkala untuk menjaga kenyamanan penghuni.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah dan sumber daya yang dikelola selama tahun 2025.

Kota Bima, Maret 2026

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bima,

Agus Purnama, S.T, M.T

NIP.19670818 199603 1 005

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (BAKESBANGPOL)
KOTA BIMA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki kewajiban menyusun LKIP sesuai dengan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sesuai dengan tugas dan fungsi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada.

Laporan ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Selain itu LKIP dapat juga dimanfaatkan untuk penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKIP ini.

Kota Bima, Januari 2026

Kepala Bakesbangpol
Kota Bima

Muhammad Natsir, M.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
Nip.19731025 200501 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Kota Bima Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan viai, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mempunyai 1 sasaran strategis secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Presentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	25	14	56

Hasil capaian 1 sasaran strategis, bahwa persentase capaian sasaran tersebut sebesar 56%,. Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025 dikategorikan berhasil.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 8.574.074.148,- dari total anggaran sebesar Rp. 9.179.455.576,- sehingga capaian realisasi 93,41%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi 2
1.3 Aspek Strategis Organisasi 5
1.4 Isu - isu Strategis dan Permasalahan yang di hadapi .. 6
1.5 Landasan Hukum 7
1.6 Sistematika Penulisan 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA 10
2.1 Rencana Strategis 10
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025..... 12
2.3 Rencana Kerja Tahunan 13
2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2025. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 16
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 16
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian tahun 2025 dengan Tahun 2024 17
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Renstra SKPD… 26
3.1.4 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 29
3.1.5 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya … 31
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja 31
3.1.7 Capaian Kinerja Eselon III dan IV 39
3.2 Realisasi Anggaran 45
BAB IV PENUTUP 50
4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 53
4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah 53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Bakesbangpol Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2025 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Bima 2025–2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Mengngah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Bakesbangpol ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Bakesbangpol selama tahun 2025.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum Pemerintah dan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mempunyai fungsi :

a. Merumuskan dan menetapkan Visi Misi, rencana strategis serta program kerja badan dan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;
b. Melakukan penyediaan penyelenggaraan pemilihan umum;
c. Melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga;
d. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;

e. Melakukan pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;

f. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan bangsa, Politik dan Pengkajian Masalah Strategis;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

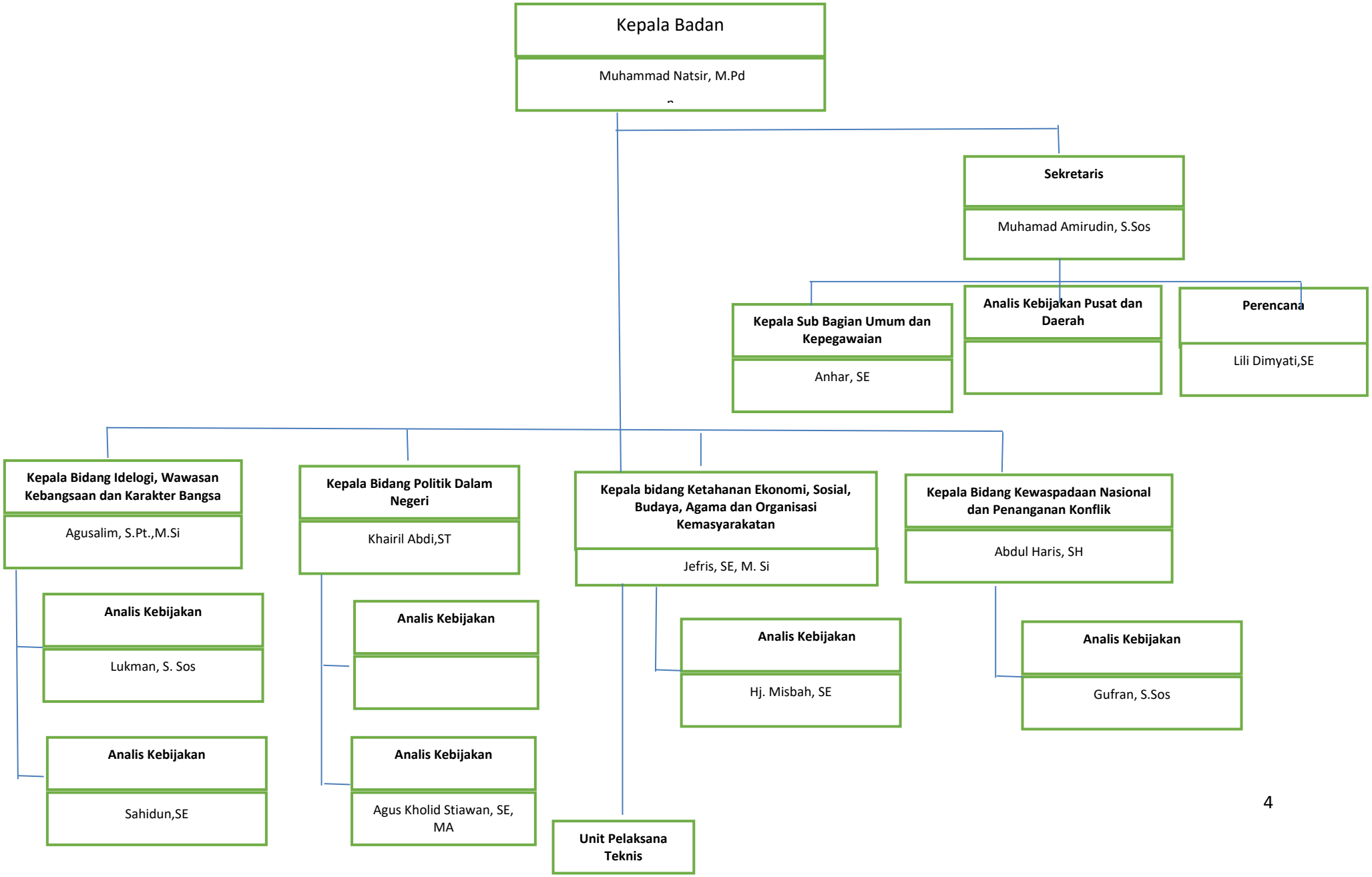
1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Perencanaan;
   c. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
   a. Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa , terdiri dari :
      - Analis Kebijakan;
      - Analis Kebijakan.
   b. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari :
      - Analis Kebijakan;
      - Analis Kebijakan.
   c. Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
      - Analis Kebijakan;
      - Analis Kebijakan.
   d. Bidang Kewaspadaan Nasioanal dan Penanganan Konflik, yang terdiri dari:
      - Analis Kebijakan;
      - Analis Kebijakan.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BIMA



1.3 Aspek Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata cara Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.Khususnya yang menyangkut urusan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, adalah merupakan aspek strategis organisasi yang tidak dimiliki oleh organisasi/instansi pemerintah lainnya. Kegiatan pelayanan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sangat dibutuhkan demi terciptanya Kondusifitas Daerah. Adapun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, antara lain:

a. Pembinaan atau sosialisasi pemahaman tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan kepada pelajar, mahasiswa, aparatur sipil negara, organisasi profesi dan kemasyarakatan serta partai politik.
b. Pembinaan forum kerukunan umat beragama
c. Pelaksanaan kegiatan penguatan dan penghayatan budaya bangsa
d. Pengoordinasian forum pembauran kebangsaan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, budaya dan agama.
e. Pengoordinasian hasil pemetaan potensi rawan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Daerah.
f. Pembinaan atau sosialisasi tentang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi Daerah, pemilihan umum atau pemilihan umum kepala Daerah, dan pemantauan situasi politik dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga asing.

g. Pelaksanaan mediasi sengketa atau konflik organisasi kemasyarakatan.

h. Pelayanan penerbitan surat keterangan lapor, verifikasi keanggotaan, lembaga dan aktivitas organisasi kemasyarakatan.

i. Pengoordinasian fungsi lembaga vertikal dalam penyelenggaraan pemilihan umum

j. Pemantauan dan monitoring pelaksanaan pemilihan umum dan instansi lainnya.

k. Pelaksanaan fasilitasi deteksi dini dan cegah dini terhadap masyarakat dalam rangka ikut serta menjaga kondusifitas wilayah.

l. Pelaksanaan fasilitasi bantuan hibah keuangan Partai Politik.

m. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah tingkat kota.

n. Pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat.

o. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan intelijen bagi aparatur sipil negara.

p. Pelaksanaan pemetaan kerawanan konflik di Daerah.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan, harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Pelayanan Prima kepada masyarakat sehingga dapat Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, pendidikan politik, serta wawasan kebangsaan.

1.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

a. Masih tingginya tingkat kriminalitas dan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan keindahan di Kota Bima.Hal ini terjadi disebabkan karena faktor lingkungan, tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat Kota Bima yang masih rendah;
b. Masyarakat Kota Bima mudah di pengaruhi (profokasi);
c. Bacaan,harian-harian, film jelek merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografik, buku – buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawan, penuh dengan kejadian berdarah;

d. Kurangnya porsi anggaran dana APBD untuk Badan Kesbangpol yang berakibat pada minimnya program prioritas yang dapat di laksanakan karena anggaran APBD sebagian besar digunakan untuk mendukung hal-hal yang bersifat operasional;
e. Kurangnya Kesadaran lembaga sosial masyarakatan untuk mendaftarkan organisasinya ke Badan Kesbangpol Kota bima.

1.5. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomr 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permepan Nomor 53 Tahun 2014, penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, yaitu: membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

C. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuaidengan dokumen Perjanjian Kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

A. Visi, Misi, Sasaran dan Strategis Kebijakan

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan politik dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Badan Kesatuan Bangsa dan politik juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan di masyarakat dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun telah merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran sampai tahun 2025 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima 2025-2029. Adapun visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

” Menciptakan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang aman,tentram dan sejahtera”.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam 3 (tiga) uraian misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran strategis.

Rumusan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima adalah:

1. Meningkatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan;
2. Mendorong terwujudnya ketahanan masyarakat Kota Bima;
3. Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Kota Bima

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			TARGET		
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Presentase Penurunan Angka Konflik Sosial	25%	33%	35%	37%	39%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn (n-1)} - \text{Jumlah Konflik Sosial Thn n}}{\text{Jumlah Konflik Sosial Thn (n-1)}} \times 100\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bakesbangpol Kota Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	25%

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yanglebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada awal tahun 2025 terdiri dari 1 (Satu) sasaran strategis dan 1 (Satu) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (Enam) program dengan total anggaran sebesar Rp.9.179.455.576,-

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	25%

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.202.804.854	APBD
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 479.967.000	APBD
3. Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.418.155.560	APBD
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.350.212.725	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 89.056.000	APBD
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.639.259.437	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kerja dengan realisasi indikator input, output, outcome dan benefit dari setiap kegiatan serta rencana kerja dan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran. Laporan kinerja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang di cerminkan dari perolehan indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretansi keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Bahwa pada Tahun 2025 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 sasaran dimana sasaran tersebut masuk kategori berhasil sebagimana tersaji pada Tabel 3.1.1 . Adapun rincian pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat tabel 3.1.1 .

Tabel 3. 1.1. Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	25	14

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024

Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan awal periode Rencana Strategis (2025-2029) selain itu juga dikarenakan perbedaan target capaian kinerja yang akan di capai dengan Rencana Strategis Periode sebelumnya.

Tabel 3.1.2.1 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	25	14	56

Kategori keberhasilan pencapaian Sasaran Bakesbangpol Kota Bima sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 menunjukkan bahwa sasaran Bakesbangpol dengan capaian kinerja 56 %

Tabel 3.1.2.2 Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja tahun 2025 dengan tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	%	4,76	3,33	101,93	25	14	56

Tabel 3.1.2.3
Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 dengan tahun 2024
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bima

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	• **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa**	**100%**	**100%**	**100%**	**88%**
	• **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**	**6 Kelompok**	**6 Kelompok**	**8 Kelompok**	**7 Kelompok**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	305 Orang	305 Orang	345 Orang	120 Orang
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanPelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	80 Orang	80 Orang	100 Orang	100 Orang
	• Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	35	35 Orang	73 Orang	35 Org
	• Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	-	-	70 Org	-
	• **Program Peningkatan Peran Partai**	**Persentase Elemen Masyarakat yang**	**100%**	**100%**	**100%**	**80%**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	**mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**				
	• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik***	**Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi**	**3 Elemen Masyarakat**	**3 Elemen Masyarakat**	**5 Elemen Masyarakat**	**4 Elemen Masyarakat**
	• Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	129 Orang	129 Orang	150 Orang	75 Orang

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Daerah, serta pemantau situasi politik	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	101422 Orang	101422 Orang	200 Orang	200 Orang
	• **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**90%**	**88,59%**	**90%**	**87%**
	• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan***	**Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang**	**134 dari 149 Kelompok**	**132dari 149 Kelompok**	**134 dari 149 Kelompok**	**130 dari 149 Kelompok**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**				
	• Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	150 Orang	150 Orang	100 Orang
	• **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**65%**	**69%**	**69%**	**69%**
	• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**28 dari 43 Kelompok**	**30 dari 43 Kelompok**	**30 dari 43 Kelompok**	**30 dari 43 Kelompok**
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
	• **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Konflik Sosial yang tertangani**	**67%**	**3,33%**	**78%**	**17,14%**
	• **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Konflik Sosial yang ditangani**	**60 Konflik Sosial**	**2 Konflik Sosial**	**35 dari 45 Konflik Sosial**	**6 dari 35 Konflik Sosial**
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan	2820 Orang	2820 Orang	3653 Orang	2500 Orang

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70 Orang	50 Orang	163 Orang	163 Orang
	• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	-	-	18 Lap	30 Lap

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Tahun 2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
	• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

Dari Tabel 3.1.2.4 dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Tahun 2025 adalah % dan capaian kinerja pada Tahun 2025 dengan demikian dapat dikatakan sasaran strategis dikategorikan berhasil.

Tabel 3.1.2.5. Rekapitulasi Konflik Sosial Tahun 2025-2029

No	Waktu Kejadian (Tahun)	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	2025	6	

Adapun Upaya-upaya dalam rangka penurunan konflik sosial di masyarakat yaitu dengan cara di bentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),Forum Konflik Sosial (FPK) yang melakukan rapat koordinasi secara intens telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari makin menurunnya presentase konflik sosial di Kota Bima dan harus memiliki strategis yang khusus untuk mensiasati potensi konflik yang mungkin terjadi.Menurunya konflik Sosial akan mengakibatkan Konduksifitas Daerah yang terjaga. dan Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dari indikator “Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial” pada tahun 2025 adalah sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebesar 25% atau dengan persentase capaian kinerja 56 %.

Capaian yang demikian dapat ditunjukan oleh peran serta aparatur dan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pengkajian masalah strategis dan Forum kewaspadaan Dini Masyarakat dalam mengantisipasi gejala konflik .

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra 2025-2029 pada tahun berkenaan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1.3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Inikator Kinerja (IKU)	Target Akhir Renstra (2029)	Realisasi s/d Tahun 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian a/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	39%	3,33%	25%	14%	56%

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar Provinsi NTB/Nasional/Daerah Lain

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025			Realisasi 2025		
			Kota Bima	Kabupaten Bima	Provinsi NTB	Kota Bima	Kabupaten Bima	Provinsi NTB
1.	Meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial	25	-	-		-	-

Potensi disintegrasi bangsa di Indonesia sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan kompleks yang terjadi dan apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik menjadi upaya memisahkan diri dari NKRI. Kondisi ini dipengaruhi pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulanginya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan. Penanganan konflik bukan saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan atau Pemerintah akan tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat termaksud tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Peran serta masyarakat dalam penangulan konflik bahkan sangat penting terutama dalam upaya penyelesaian secara damai. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematik dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum,pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan,penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan system peringatan dini. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam meningkatnya Stabilitas Politik dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan ketentuan meliputi 1 (Satu) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Adapun perbandingan capaian dari indikator “Persentase Penurunan Angka Konflik Sosial” sampai dengan tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 dimana target Renstra tahun 2025 sebesar 25 % sedangkan capaian sampai saat ini sudah 56 %. Dengan demikian apabila melihat trend dan rencana kinerja tahunan 2025 maka target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tahun 2025 sudah maksimal. Upaya lain yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai indikator tersebut dengan melaksanakan beberapa kegiatan; yang lain yang sangat mendukung pencapaian tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada tahun 2025. Adapun laporan hasil kegiatan pendukung yaitu :

1. **Termonitoringnya Koordinasi Pencegahan Terorisme**

Terorisme akan selalu menjadi acaman serius. Untuk menghadapinya tentu harus dilakukakan secara serius. Sebagaian media, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, salah satu upaya mencegah adalah dengan mengelar kegiatan Forum Diskusi, dialog masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa kelompok teroris melancarkan propagandanya karena tak terlihat secara kasat mata. Paham radikal terus merasuk ke ruang public, bahkan mungkin telah mencoba menyusup mengarah ke anggota keluarga kita, sehingga perlu upaya pecegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam upaya pencegahan terorisme dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, tokoh seminar dan sebagainya, dalam hal ini BNPT menjadi partner dalam menjalankan dan membantu mensosialisasikan program-program pencegahan terorisme.

2. **Termonitoringnya Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Bima**

FKUB memiliki tugas untuk melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; Menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat dengan cara melakukan koordinasi secara rutin antar umat beragama. Pada tahun 2025 di laporkan bahwa telah dilakukan rapat koordinasi sebanyak 2 kali dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu 1 kali FKUB telah terbukti mampu menjadi media yang efektif untuk meningkatkan dialog antar umat beragama dan menekan terjadinya konflik, khususnya dalam hal membantu pemerintah memelihara dan memgendalikan kerukunan antar umat beragama. Bagi FKUB telah diupayakan pembentukan secretariat bersama serta bantuan dana operasional bagi terlaksananya peran FKUB yang anggotanya notabene adalah tokoh-tokoh agama yang berperan efektif untuk mendekati umat beragama dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar umat beragama. Walaupun masih terjadi konflik didalam masyarakat namun masalah tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan.Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik akan terus mendorong terwujudnya kerukunan di masyarakat dengan pemberdayaan FKUB.

3. Termonitoringnya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kota Bima

Salah satu permasalahan bangsa yang menjadi atensi akhir-akhir ini adalah terjadi konflik sosial di masyarakat, sehingga di perlukan upaya yang komprehensif dalam pecegahan, penanganan dan pasca konflik. Untuk itu perlu mengambil langkah-langkah penanganan diantaranya melalui Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Pada tahun 2025 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melakukan rapat koordinasi membahas konflik social yang terjadi di Kota Bima sebanyak 3 Kali sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 6 kali mengalami penurunan hal ini menunjukkan konflik sosial pada tahun 2025 mengalami penurunan.

3.1.4 *Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.*

Dalam laporan ini diuraikan analisa keberhasilan terhadap kinerja Badan Kesbangpol melalui metode analisa internal, yaitu penilaian secara mandiri oleh Badan Kesbangpol Kota Bima terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberikan penjelasan lebih lanjut tentang : efektifitas dan efisiensi suatu kegiatan dan efektifitas pencapaian sasaran.

Dalam evaluasi ini juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang menimbulkan kegagalan, serta langkah-langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

a. Efektifitas Individual Kegiatan

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indicator, outcome, benefit dan impact dari kegiatan yang bersangkutan.

Efektifitas kegiatan dibagi atas 2 (dua) macam yaitu : Efektifitas individual kegiatan dan Efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Efektifitas individual kegiatan adalah suatu kegiatan mencapai tingkat autcome/benefit/input yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas terkait

dengan pencapaian sasaran merupakan kemampuan suatu kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis. Selama Tahun 2025 Badan Kesbangpol Kota Bima melaksanakan 11 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa 38 Sub Kegiatan (93,41 %) telah dilaksanakan secara efektif.

b. Kegiatan Yang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata autcome/benefit/impact 80% atau lebih. Selama tahun 2025 kegiatan yang telah diaksanakan secara efektif adalah sebanyak 38 Sub kegiatan atau 93,41 %

Dalam laporan ini kegiatan dikatagorikan tidak efektif apabila hanya mampu mencapai rata-rata indicator autcome/benefit/impact kurang dari 80%. Selama tahun 2028 dari 38 Sub Kegiatan tidak terdapat kegiatan yang dikategorikan tidak efektif

Belum tercapainya sasaran strategis tersebut secara memuaskan antara lain disebabkan karena :

- Estimasi dalam proses perencanaan yang kurang akurat.
- Dukungan pendanaan pada dua sasaran strategis tersebut belum optimal.
- Dukungan Unit kerja lain masih belum optimal.
- Sumber daya manusia/aparatur pengelola kegiatan masih kurang memadai.

3.1.5. Analisis atas efisien Penggunaan Sumber Daya

Analisa atas efisinesi penggunaan sumber daya diuraikan lewat dua analisa yaitu

1. Analisa Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menyempurnakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indicator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standart efisiensi. Dalam laporan ini standart efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana anggaran yaitu : Bila angka capaian efisiensi sama atau

lebih besar dari standar efisiensi maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

a. Analisa Pencapaian Sasaran

Dalam laporan ini sasaran dianggap tercapai apabila realisasi indicator-indikator kinerja sasaran berhasil diwujudkan rata-rata 93,41% atau lebih.

Selama Tahun 2025 dari 1 (Satu) sasaran strategis yang ingin diwujudkan Badan Kesbangpol sebanyak 1 (Satu) sasaran strategis telah berhasil dicapai 93,41 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis didukung oleh personil yang memadai, anggaran / biaya yang cukup, komunikasi lintas sektoral yang berjalan dengan baik serta dukungan masyarakat/peserta kegiatan. Untuk keberhasilan suatu program/kegiatan agar tercapai sasaran strategis diharapkan dukungan yang baik dari personil, ketersediaan dana/anggaran yang memadai, koordinasi lintas sektoral berjalan baik dan mekanisme pencairan dana yang tepat waktu dan jelas peruntukannya.

3.1.6 Analisa Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja/Kegiatan

Pencapaian sasaran strategis tersebut telah didukung oleh pelaksanaan sejumlah program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.6
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian %
	• **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa**	**100%**	**88%**	**88**
	• **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**	**8 Kelompok**	**7 Kelompok**	**88**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian %
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	120 Orang	35
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanPelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	100 Orang	100
	• Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	73 Org	35 Orang	48
	• Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	-	-
	• **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**100%**	**80%**	**80**
	• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan***	**Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi**	**5 Elemen Masyarakat**	**4 Elemen Masyarakat**	**80**

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian %
	Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik				
	• Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	75 Orang	50
	• Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	200 Orang	200 Orang	100
	• **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**90%**	**87%**	**97**
	• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	**Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**134 dari 149 Kelompok**	**130 dari 149 Kelompok**	**97**
	• Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas,	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi	150 Orang	100 Orang	67

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian %
	pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
	• **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**69%**	**69%**	**100**
	• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**30 dari 43 Kelompok**	**30 dari 43 Kelompok**	**100**
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	100
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	100
	• **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	**78%**	**13,3 %**	17
	• Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	**35 dari 45 Konflik Sosial**	**6 dari 45 Konflik Sosial**	17
	• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	3653 Orang	2500 Orang	94

NO.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi Capaian	Capaian %
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
	• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	163 Orang	100
	• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, s serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Lap	30 Lap	167
	• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100

Tabel. 3.1.7
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	• **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	***479.967.000***
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan)	***479.967.000***
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	25.640.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanPelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32.700.000
	Pembentukan Paskibraka	419.282.000
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2.345.000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.418.155.560
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik	1.418.155.560

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	1.337.749.160
	Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	80.406.400
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.350.212.725
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.350.212.725
	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	1.350.212.725
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	89.056.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	89.056.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	36.963.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	52.092.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.639.259.437
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	1.639.259.437

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan/Sub.Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I	Jumlah Anggaran (Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	322.203.337
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	92.427.400
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.927.700
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota	1.133.881.000

Pelaksanaan demokrasi indonesia saat ini sedang berjalan menuju demokrasi yang dewasa, dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di indonesia.

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsng. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarkat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut. Oleh karena itu, indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tersebut di atas, maka dapat diperoleh capaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Pengukuran kinerja tersebut di atas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2024.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

3.1.7 Capaian Kinerja Eselon III dan IV

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima diukur dari Penetapan Kinerja Eselon III dan IV dapat di Jelaskan sebagai berikut:

Berbagai Program dan Kegiatan yang mendukung pencapian kinerja eselon III dan IV Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bima tahun 2025 sebagai berikut :

- **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

  yaitu sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai persentase Potensi Konflik yang dapat di cegah pada tahun 2025 dari target 25% dan yang terealisasi 14 %. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

  a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial, *Sub Kegiatan* Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota

  Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan Keamanan dan Ketertiban melalui rapat- rapat koordinasi diikuti oleh Muspida dalam

menyamakan persepsi dan sharing pengalaman, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi.Pada tahun 2025 di lakukan 3 Kali rapat koordinasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah potensi konflik yang terjadi selama tahun 2025.

b. *Sub Kegiatan* Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan ini dilakukan untuk menfasilitasi anggota FKDM dan FKDP yang berjumlah 12 Orang FKDM dan 20 FKDP dalam upaya menyikapi beberapa insiden yang terjadi di Kota Bima serta menjaring isu-isu trategis sehingga bisa disusun upaya antisipasi sejak dini terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas Keamanan dan Ketertiban. Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan 3 kali rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah .Kegiatan ini dilakukan dalam upaya Penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kota Bima. Konflik tidak boleh di biarkan menjadi liar dan kemudian merusak tatanan kehidupan di masyarakat karena itu seharusnya kita mampu mengendalikan konflik sehingga dapat menjadi kekuatan yang mencerahkan dan bukan kekuatan yang menghancurkan oleh karena itu maka di bentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) yang bertugas meredam potensi konflik sekaligus membentengi masyarakat dari masuknya paham-paham yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial sebanyak 2 kali.Dengan dilakukan kegiatan ini kita mengetahui jumlah penanganan konflik social pada tahun 2025.

- **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Upaya-upaya dalam rangka pemantapan wawasan kebangsaan telah menunjukkan capaian yang positif dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk kegiatan Pusat Studi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di beberapa perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya peran masyarakat dalam mengembangkan wawasan kebangsaan melalui sosialisasi 4 (empat) konsensus dasar bangsa Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan. Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa pada tahun 2025 dari target 100% dan yang terealisasi 100%. Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
  b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanKegiatan ini dilakukan dalam upaya dengan meningkatnya pemahaman terhadap 4 (empat) Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh berbagai komponen masyarakat, termasuk di Kalangan Tenaga Pendidik dan Siswa SMA/MAN/SMK yang ada di Kota Bima, pada tahun 2025 sebanyak 120 Orang Siswa SMA/MAN/SMK dan tenaga pendidik yang telah mengikuti kegiatan tersebut.

- **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

  Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu melakukan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tahun 2025 Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
  a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan rapat koordinasi antar umat beragama, pada tahun 2025 dilakukan 2 kali rapat koordinasi fkub, yang di hadiri oleh 100 orang peserta
  b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoyika, pada tahun 2025 dilakukan 1 kali, yang di hadiri oleh 50 orang peserta.

- **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2025 Dalam Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
  Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penyuluhan kepada LSM/Ormas dan yayasan sehingga terwujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran Ormas dan Lembaga kemasyarakatan sehingga terjadi toleransi dalam bermasyarakat.Pada Tahun 2025 jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan sebanyak 100 orang.
- **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya partisipasi politik masyarakat Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mencapai Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik**.** Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik.

Sasaran yang ingin di capai dari program ini yaitu meningkatnya Program tersebut dilaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut yaitu :

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meverifikasi proses administrasi bantuan keuangan kepada partai politik.Tim verifikasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Walikota Bima. Partai yang telah menyampaikan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik sebanyak 12 partai politik, hasil verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik akan menjadi rekomendasi tim kepada walikota Bima untuk penyaluran bantuan bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2025.Rekomendasi ini menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan keuangan guna kelancaran kegiatan partai politik khususnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Dana ini menjadi penunjang kegiatan pendidikan 2025 politik dan operasional secretariat partai politik, sesuai permendagri tersebut partai dapat menggunakan dana bantuan untuk pendidikan politik sebesar 60% dan untuk menunjang kegiatan sekretariat sebesar 40%.

Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya. Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan

agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.

Urgensi pendidikan politik 2024 adalah kunci kesuksesan dan keberhasilan pelaksaan pemilihan umum nantinya. Etika dan norma menjadi pedoman untuk ditaati bersama oleh setiap calon. Berkaca pada kepemimpinan masa kholifah yang penuh kesederhanaan dan benar-benar mengabdi kepada rakyatnya adalah pemimpin yang akan membawa kepada kesejahteraan hal ini perlu menjadi doktrin kepada masyarakat kita, memberi bukti melalui tindakan dan bukan menjual janji belaka.

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp.9.179.455.576,- dan terealisasi sebesar Rp.8.574.074.148,- atau sebesar 93,41 %. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja lansung. Dari target belanja tidak langsung sebesar Rp.3.535.639.145,- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima merealisasikan sebesar Rp.3.293.054.339,- atau sebesar 93,14 % Adapun belanja langsung, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.643.816.431,- direalisasikan sebesar Rp. 5.281.019.809,- atau sebesar 93,57 %.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.1

Rekapitulasi Belanja BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	3.535.639.145,-	3.293.054.339,-	93,14
2	Belanja Langsung	5.643.816.431,-	5.281.019.809,-	93,57
Jumlah		9.179.455.576,-	8.574.074.148,-	93,41

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.2

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BAKESBANGPOL Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Meningkatnya kesadaran dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	• **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	***479.967.000***	**471.711.940**	**98,28**
		• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan)***	***479.967.000***	**471.711.940**	**98,28**
		• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	25.640.000	22.500.000	87,75

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
		• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah KebangsaanPelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32.700.000	28.810.000	88,10
		• Pembentukan Paskibraka	419.282.000	419.056.940	99,95
		• Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2.345.000	2.345.000	100
		• **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**1.418.155.560**	**1.211.569.300**	**85,43**
		• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,Serta Pemantauan Situasi Politik***	**1.418.155.560**	**1.211.569.300**	**85,43**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		• Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	1.337.749.160	1.337.748.000	99,99
		• Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik,Etika budaya politik,Peningkatan demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan,Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantau situasi politik	80.406.400	73.821.300	91,81
		• **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**1.350.212.725**	**1.257.755.390**	**93,15**
		• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	**1.350.212.725**	**1.257.755.390**	**93,15**
		• Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah	**1.350.212.725**	**1.257.755.390**	93,15
		• **Program Pembinaan dan Pengembangan**	**89.056.000**	**78.818.300**	**88,50**

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
		• ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	**89.056.000**	**78.818.300**	88,50
		• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	52.092.000	49.552.900	95,13
		• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	36.963.000	29.265.400	79,23
		• **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**1.639.259.437**	**1.597.894.180**	97,48
		• Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik Sosial	**1.639.259.437**	**1.597.894.180**	**97,48**
		• Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi	322.203.337	311.370.080	96,64

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
		• Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	92.247.400	90.247.400	97,83
		• Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.927.700	86.427.700	95,05
		• Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/Kota	1.133.881.000	1.109.489.000	97,85

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.2.3

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rutin

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun 2025

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.015.600**	**52.680.600**	**98**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.983.700	22.983.700	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.833.300	4.833.300	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.824.300	2.824.300	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.224.700	889.700	40
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.491.600	3.491.600	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.658.000	15.658.000	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.535.639.142**	**3.293.054.339**	**93**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.317.810.745	3.077.625.939	93
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.240.000	203.840.000	99
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.820.400	4.820.400	100
		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.384.000	3.384.000	100
		Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosi Realisasi Anggaran	3.384.000	3.384.000	100

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**237.625.499**	**235.984.290**	**99**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	1.714.000	1.714.000	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.140.000	79.514.850	99
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	19.093.499	19.093.200	99
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.417.000	12.262.000	91
		Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	123.261.000	123.260.240	99
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**133.308.299**	**131.468.063**	**99**
		Penyediaan jasa Surat Menyurat	31.534.000	31.534.000	100
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	26.624.299	24.784.063	93
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.150.000	75.150.000	**100**
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**242.216.311**	**242.137.746**	**99**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.476.311	72.475.841	99
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.240.000	150.161.905	99

BAB IV PENUTUP

4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dengan memperhatikan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis dalam tahun 2025 sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator kinerja program keduanya menunjukan pencapaian target yang sangat baik. Hal itu menunjukan segala upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima secara umum dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima yang dilaksanakan oleh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima tidak lepas dari sinergitas antara masyarakat, *stakeholders* dan OPD Pemerintah Kota Bima yang terkait langsung dengan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima. Untuk itu koordinasi antar lini harus terus ditingkatkan sehingga hasil pencapaian tujuan dan kinerja organisasi pada tahun yang akan datang akan semakin baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Dengan memperhatikan paparan data dalam laporan ini dimulai dari Bab I sampai dengan Bab III akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima pada tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, beberapa rekomendasi terhadap laporan LKIP tahun sebelumnya juga menjadi perhatian dalam menentukan tindaklanjut untuk upaya perbaikan.

Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil

hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan pada awal penyusunan kegiatan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan simultan sebagai upaya untuk antisipasi dan pemecahan masalah atau hambatan yang dapat mempengaruhi jalannya kinerja instansi.
3. Memperkuat koordinasi, sinergi dan komunikasi internal dan eksternal sehingga terjadi kesamaan persepsi dan gerak dalam menjalankan visi dan misi instansi.
4. Pemantapan Tugas Intelijen Daerah yang telah dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta mendorong tumbuhnya kader-kader Intelijen yang mampu melakukan deteksi dini serta dapat mengeliminir setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Intelijen melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
5. Perlu penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, semoga dapat memberikan gambaran yang memadai tentang Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima Tahun Anggaran 2025 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kota Bima, Januari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bima,

PEMERINTAH KOTA KOTA BIMA BADAN KESBANGPOL B I M A

MUHAMMAD NATSIR, M.Pd
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Jalan Karantina Kelurahan Jatiwangi
Kecamatan Asakota – NTB Email :
disperternakkobi@gmail.com
Website: pertanian.bimakota.go.id
Telp. 0374-44085 Fax: 0374-44085






KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan hasil akhir dari serangkaian penyelenggaraan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Bima sebagai manifestasi dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan penyelenggara pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Dinas Pertanian Kota Bima sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disajikan beberapa hal antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang merupakan satu kesatuan instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Pertanian Kota Bima.

Tentunya dalam penyusunan laporan ini mungkin masih terdapat kesalahan atau kekeliruan, oleh karena itu saran, masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini pada tahun anggaran yang akan datang.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat membantu semua pihak dalam memandang kinerja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Raba-Bima, Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,

Abdul Najir, S.Pt, M.M.
NIP. 19741124 200312 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK iv
DAFTAR LAMPIRAN v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Umum Organisasi 2
C. Isu Strategis 11
D. Aspek Stratejik Organisasi 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23
A. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 24
B. Rencana Kinerja 29
C. Perjanjian Kinerja 30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
A. Capaian Kinerja Organisasi 34
B. Realisasi Anggaran 69

BAB IV PENUTUP 75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2025	10
Tabel 2	Produksi dan Konsumsi Daging NTB Tahun 2024 dan 2025	15
Tabel 3	Strategi dan Kebijakan SKPD	17
Tabel 4	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kota Bima	26
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025	30
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025	31
Tabel 7	Program dan Pagu Anggaran Urusan Pertanian	32
Tabel 8	Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025	34
Tabel 9	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Tahun 2025	36
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025 Terhadap Target Renstra (Ton)	42
Tabel 11	Perbandingan Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Kota Bima dengan Realisasi Provinsi dan Nasional	43
Tabel 12	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Perkebunan Tahun 2025	50
Tabel 13	Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2025 Terhadap Target Renstra (Ton)	52
Tabel 14	Perbandingan Produksi Komoditi Utama Tanaman Perkebunan Kota Bima dengan Target Provinsi dan Nasional (Ton)	53
Tabel 15	Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 2025	57
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Hasil Peternakan Tahun 2025 Terhadap Target Renstra (Ton)	59
Tabel 17	Perbandingan Produksi Hasil Peternakan Kota Bima dengan Target Provinsi dan Nasional (Ton)	59
Tabel 18	Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025	62
Tabel 19	Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2025	70

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	35
Grafik 2	Perkembangan luas tanam komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2020 -2025	40
Grafik 3	Perkembangan luas panen komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2020 -2025.....	41
Grafik 4	Perkembangan produktivitas komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2020 -2025.....	41
Grafik 5	Perkembangan produksi komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2020 -2025.....	42
Grafik 6	Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020 -2025 (Ton)	43
Grafik 7	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2020 - 2025	51
Grafik 8	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2020 -2025 (Tanaman Tahunan)	53
Grafik 9	Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2020 - 2025 (Tanaman Semusim)	54
Grafik 10	Capaian Produksi Peternakan Tahun 2025	58
Grafik 11	Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2020 - 2025.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Bima..... 99

Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Bima..... 100

Lampiran 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Bima.....104

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Suatu keniscayaan bagi instansi pemerintah untuk mengembangkan akuntabilitas baik dalam kerangka *external accountability* maupun *internal accountability*. Instansi pemerintah adalah penerima kewenangan dan pengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Dalam perspektif demikian, instansi pemerintah sudah seharusnya menyampaikan informasi kinerjanya kepada publik. Sedangkan *internal accountability* adalah kegiatan instansi pemerintah berakuntabilitas dalam bingkai relasi kewenangan struktur birokrasi. Pada perspektif ini, instansi pemerintah harus menyampaikan informasi kinerjanya kepada Walikota sebagai kepala pemerintahan Kota Bima.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan serta

sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025. Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran Kinerja Pokok Dinas Pertanian Kota Bima pada Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKIP Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Laporan Kinerja di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam rencana strategis Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025-2029.

LKIP Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Terkait dengan hal tersebut, LKIP Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pertanian Kota Bima dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025.

Selain itu LKIP tahun 2025 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025-2029.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pertanian Kota Bima adalah salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pelaksanaan roda pemerintahan Kota Bima yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Dinas Pertanian Kota Bima memiliki Potensi Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, organisasi dan tatalaksana.

Perincian tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Bima ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah

Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183. Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima No. 88), kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

1. Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tupoksi

1.1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Bima (berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 77 Tahun 2021 Pada BAB III Pasal 3 ayat (1) terdiri dari :

1). Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pertanian

2). Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

3). Unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri dari :

1. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari atas Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Penyuluhan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

4). Unit Pelaksana Teknis Dinas

1.2. Kedudukan

Dinas Pertanian Kota Bima merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (BAB II Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perwali Nomor 77 Tahun 2021).

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi (BAB IV Pasal 4 ayat (1) Perwali Nomor 77 Tahun 2021)

1. a. Dinas Pertanian Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

b. Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
b. Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
c. Pengembangan prasarana pertanian;
d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis pertanian;
l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. a. **Sekretariat** mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Subagian Umum

A. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian; barang milik daerah; ketatausahaan;

rumah tangga, keamanan, dan kebersihan; urusan pengelolaan keuangan; dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. a. **Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

4. a. **Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan dan Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
2. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
3. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
5. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
6. Pengawasan obat hewan;
7. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
8. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
9. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
10. Pemberian rekomendasi izin di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

12. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Peternakan dan Kesehatan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan.

5. a. **Bidang Perkebunan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
6. Penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
7. Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
8. Pemberian rekomendasi izin usaha teknis di bidang perkebunan;
9. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perkebunan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

6. a. **Bidang Penyuluhan**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
    1. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
    2. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
    3. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
    4. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
    5. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
    6. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
    7. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
    8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Penyuluhan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan.

7. a **Bidang Prasarana dan Sarana**, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
   b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:
      1. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
      2. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
      3. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
      4. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
      5. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
      6. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
      7. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
      8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
   c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
   d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

8. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

   UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pertanian.

2. Sumber Daya Organisasi

a). Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Keadaan Pegawai Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024

No	URAIAN	Jumlah Pegawai							
		Berdasarkan Jenis Kelamin			Berdasarkan Pendidikan				
		L	P	JML	S2	S1	D4	D3	SMA/SMK/SPP
1	Struktural	19	23	42	3	33	1	4	1
2	Fungsional	16	34	50	-	40	4	1	5
3	PPPK	18	12	30	-	15	-	2	13
4	PPPK PW	12	8	20		13	-	3	4
	Jumlah	65	77	142	3	101	5	10	23

Pegawai berdasarkan jabatan dan tugas adalah sebagai berikut :

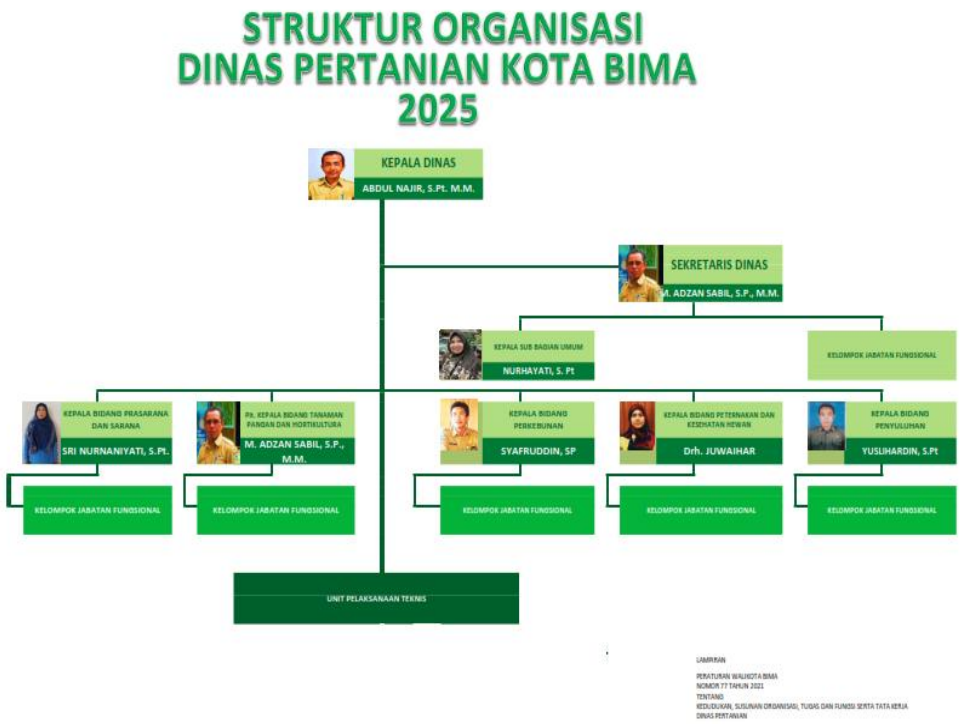
1. Jabatan struktural eselon II : 1 orang
2. Jabatan struktural eselon III : 6 orang
3. Jabatan struktural eselon IV : 13 orang
4. Jabatan fungsional : 50 orang
5. Staf PNS : 22 orang
6. PPPK : 30 orang
7. PPPK Paruh Waktu : 20 orang

orang Jumlah : 142 orang

b). Sumber Daya Sarana dan Prasarana

1. Sarana
   - Kendaraan dinas : Roda 4 : 2 unit
     Roda 2 : 70 unit
     Roda 3 : 1 unit
   - Perlengkapan kantor : Meubelair dan Peralatan Elektronik
2. Prasarana
   - Kantor Puskeswan : 2 unit
   - Kantor Unit Pelayanan IB : 1 unit
   - Kantor BPP : 4 unit
   - Gedung Rumah Potong Hewan : 1 unit

3. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tahun 2025



C. ISU STRATEGIS

1. Isu-Isu Pembangunan Bidang Pertanian

Persoalan ancaman dan kerawanan pangan dunia beberapa tahun terakhir selain berkaitan sangat erat dengan pertumbuhan penduduk juga sensitif terhadap perubahan iklim global. Ketidakstabilan ketahanan pangan, cenderung memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi maupun gejolak politik. Dalam hal ini, krisis pangan akan terjadi manakala tidak ada upaya-upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. Isu Strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura daerah mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani :

1. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam;
2. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim;

3. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis dan industrialisasi pertanian;
5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian;
6. Pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar regional dan internasional.

Pembangunan pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Barat pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode jangka menengah periode 2025-2030. Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah masih rendahnya kontribusi tanaman bahan makanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Tukar Petani (NTP). Dua permasalahan mendasar tersebut disebabkan beberapa permasalahan pokok yang muncul akibat masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, yaitu :

1. Masih banyak alih fungsi lahan pertanian;
2. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian;
3. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksploitasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan;
4. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
5. Tingkat kehilangan hasil (*losses*) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
6. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
7. Belum optimalnya kelembagaan petani;
8. Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani dan minat petani muda.
9. Sarana produksi (Benih Jagung) masih didatangkan dari Pulau Jawa.

Berbagai permasalahan mendasar dan permasalahan pokok tersebut menjadi isu strategis pada periode mendatang, mengingat permasalahan tersebut diperkirakan masih akan dihadapi dalam pelaksanaan

pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam periode mendatang.

Kedepannya, isu strategis harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan

2. Isu-Isu Pembangunan Bidang Perkebunan

Propinsi NTB telah merumuskan program pembangunan perkebunan berdimensi global, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing masyarakat.

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi wilayah dan nasional. Secara ekologis berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, dan secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan salah satu komoditas pertanian yang pertumbuhannya positif terhadap pendapatan devisa negara adalah komoditas perkebunan.

Komoditas perkebunan secara ekonomi mampu bertahan pada saat krisis ekonomi terutama peluangnya dibidang ekspor, sementara itu kebijakan dasar pembangunan perkebunan mengarah kepada upaya menggerakkan dan memfasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui pemberdayaan dan penguatan hilir guna memperoleh nilai tambah dan daya saing dengan dukungan partisipasi masyarakat, beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan di wilayah NTB yang saat ini dibudidayakan antara lain kopi, kakao, tembakau, jambu mete dan kelapa. Komoditas yang dibudidayakan ini, tentunya perlu didukung oleh upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas komoditas perkebunan, serta meningkatkan nilai tambah dari produk-produk perkebunan tersebut.

Secara garis besar, masalah-masalah pembangunan perkebunan yang dihadapi saat ini mencakup dua kelompok permasalahan. Selain permasalahan struktural yang berkaitan dengan program pelaksanaan pembangunan perkebunan, juga permasalahan fungsional yang terkait dengan aspek pembangunan perkebunan, yang meliputi aspek budidaya dan produktivitas, kemampuan dan pemantapan SDM petani dan petugas lapangan, penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kemitraan, oleh karenanya perlu lebih memperhatikan aspek-aspek kewilayahan dan sumber daya secara keseluruhan.

3) Isu-Isu Pembangunan Bidang Peternakan

Isu-isu strategis pembangunan sub sektor peternakan Provinsi NTB adalah sebagai berikut:

a. Banyaknya produk impor akibat perdagangan bebas;
b. Meningkatnya permintaan pangan asal ternak sebagai pemenuhan sumber protein;
c. Manajemen pengelolaan RPH;
d. Budidaya, pakan, kesehatan hewan;
e. Pemasaran, manajemen usaha dan kapasitas SDM;
f. Belum bisa bersaing di pasar regional/nasional industri olahan;
g. NTB menjadi objek daerah tujuan wisata regional, nasional dan internasional (mendukung KEK Mandalika untuk pelaksanaan Moto-GP 2024).

Dalam kerangka pengembangan ekonomi wilayah peran sub sektor peternakan memiliki kaitan yang kuat di hulu dan hilir. Namun dekimian peran strategis tersebut belum mampu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaataan peluang ekonomi yang dapat membawa perubahan dan dinamisasi kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat peran strategis pemerinth daerah Provinsi NTB untuk mewujudkan swasembada daging dan telur adalah mengatasi masalah ditingkat usaha tani melalui penyerataan usaha kelompok dan mendukung masyarakat terhadap akses pembiayaan serta mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi serta swasta pada usaha penggemukan budidaya dan pengolahan hasil komoditas startegis seperti sapi, kambing dan unggas.

Tabel 2. Produksi Daging dan Telur NTB Tahun 2024 dan 2025

Komoditi	Produksi Daging (Kg/tahun)	
	2024	2025*
Sapi	10.917,03	11.271,46
Kerbau	469,73	496,30
Kuda	15,32	15,31
Babi	77,48	81,51
Domba	0,50	0,51
Kambing	299,10	401,28
Kelinci	1,74	1,85
Ayam Ras Petelur	4.494,27	4.313,70
Ayam Ras Pedaging	48.817,01	46.067,50
Buras	6.920,18	7.170,30
Itik	437,3	455,17
Puyuh	25,45	28,91
TOTAL PRODUKSI DAGING	**72.666,99**	**58.439,22**
Telur Ayam Ras Petelur	47.782,60	46.005,67
Telur Ayam Buras	5.758,23	5.966,80
Telur Itik	4.067,56	4.234,54
Telur Puyuh	200,63	227,83
TOTAL PRODUKSI TELUR	**57.809,02**	**56.434,84**

Keterangan: *) Angka sementara

Sumber Data : Buku Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025– Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI

Perkembangan usaha pembibitan dalam mengembangkan usaha budidaya sub sektor peternakan bibit merupakan komponen terpenting yang mempengaruhi keberlanjutan usaha penggemukan sapi potong berbasis kelompok membutuhkan bibit sebanyak 50-60 ekor dengan skala kepemilikan 2–3 ekor/orang yang dilaksanakan dalam kurun waktu 90–180 hari dengan asumsi pertambahan bobot badan yang diharapkan 0,5–0,7 kg, sehingga di akhir massa penggemukan peternak dapat memperoleh keuntungan dengan bobot.

4) Peluang

Melihat beberapa isu yang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa peluang yang ada, antara lain :

a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah;
b. Adanya program diklat bagi petugas;
c. Adanya sistim koordinasi yang mulai membaik;
d. Adanya kewenangan perencanaan dari bawah (bottom up);
e. Mulai membaiknya kinerja dari petugas lapangan;
f. Adanya kelembagaan petani/peternak (kelompok tani ternak) yang dinamis dan maju;
g. Mulai adanya kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil;

h. Tersedianya tenaga kerja terampil dan mekanisasi pertanian;
i. Adanya potensi sumber daya alam yang memungkinkan pengembangan agribisnis;
j. Adanya pasar yang mendorong peningkatan produksi dan pendapatan petani/peternak;
k. Tersedianya sarana produksi yang mendorong penerapan paket teknologi anjuran;
l. Minat masyarakat untuk berusaha tani cukup tinggi.
m. Persentase lahan sawah 2.804 Ha merupakan irigasi dengan IP 1-3 untuk pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan.
n. Pangsa pasar besar. Hal ini ditunjang oleh posisi Kota Bima sebagai kota transit yang berada pada segi tiga emas pariwisata (Bali–Komodo–Tanah Toraja);
o. Jalur transportasi lancar, ditunjang oleh adanya sarana terminal dan pelabuhan laut.
p. Jalur telekomunikasi lancar, baik melalui telepon rumah maupun telepon seluler;
q. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan membawa konsekwensi terhadap meningkatnya jumlah permintaan akan produk-produk pertanian, baik produk mentah maupun olahan untuk pasar domestik, regional, nasional maupun eksport.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Merujuk pada misi RPJMD Kota 2025-2030 yaitu **" Mewujudkan Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045"** merupakan acuan dasar bagi penyusunan Visi dan Misi Dinas Pertanian Kota Bima dan prioritas Dinas Pertanian Kota Bima terletak pada aspek ekonomi dalam upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

TUJUAN	STRATEGI
1. Meningkatnya Produksi Pertanian	1. Peningkatan produksi pertanian - Pengembangan pemupukan berimbang dan pengembangan pupuk organik; - Pengembangan Alsintan Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan; - Pengendalian OPT; - Pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat; - Pengembangan infrastruktur peternakan; - Pengembangan infrastruktur perkebunan - Pengembangan pakan ternak; - Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan - Pengembangan kelembagaan perbenihan sebagai sentra-sentra produksi. - Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani ternak 3. Penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan. 4. Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pertanian 5. Mendorong berkembangnya usahatani yang berorientasi agribisnis dengan menghasilkan komoditi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang memiliki daya saing tinggi dan berorientasi pasar 6. Membangun sistem pemasaran dengan mendekatkan produsen dengan konsumen 7. Mengembangkan sumberdaya alam yang tersedia dengan memaksimalkan adopsi teknologi

TUJUAN	STRATEGI
	8. Mengembangkan kawasan/sentra pertanian perkotaan berdasarkan hirarki kekotaan sebagai pusat pelayanan, aksebilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah 9. Mendorong kawasan pertanian berbasis agro-industri serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah disekitarnya 10. Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana peternakan. 11. Meningkatkan penerapan teknologi budidaya, panen dan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan; 12. Meningkatkan daya dukung lahan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; 13. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan serta fasilitasi terhadap akses modal dan pasar; 14. Menciptakan sistem produksi hasil perkebunan berkelanjutan dan lestari serta memiliki keunggulan kompetitif untuk dipasarkan

b. Kebijakan

Strategi	Kebijakan
1. Peningkatan produksi pertanian - Pengembangan pemupukan berimbang dan pengembangan pupuk organik; - Pengembangan Alsintan Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan; - Pengendalian OPT; - Pendistribusian bibit unggul kepada masyarakat; - Pengembangan infrastruktur peternakan; - Pengembangan infrastruktur perkebunan - Pengembangan pakan ternak; - Peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular. 2. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan - Pengembangan kelembagaan perbenihan sebagai sentra- sentra produksi. - Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani ternak 3. Penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan. 4. Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana pertanian 5. Mendorong berkembangnya usahatani yang berorientasi agribisnis dengan menghasilkan komoditi pertanian tanaman pangan dan peternakan yang memiliki daya saing tinggi dan berorientasi pasar 6. Membangun sistem pemasaran dengan mendekatkan produsen dengan konsumen 7. Mengembangkan sumberdaya	1. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan usaha budidaya masyarakat petani dan peternak 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan peternak dalam pemanfaatan dan penerapan usaha budidaya sesuai anjuran 3. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi yang spesifik lokasi dan ramah lingkungan 4. - Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dibidang pertanian dan peternakan - Peningkatan optimalisasi lahan dan perbaikan sumber daya air - Peningkatan rehabilitasi sarana dan prasarana dibidang pertanian dan peternakan 5. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil-hasil pertanian tanaman pangan dan peternakan 6. Peningkatan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk bahan makanan asal hewan 7. Peningkatan penyediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 8. Penumbuhan dan pengembangan kawasan/sentra peternakan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal berbasis agrobisnis-agroindustri yang berdaya saing di pasar lokal maupun regional; 9. Peningkatan kualitas SDM peternak, penyediaan sarana prasarana produksi. 10. Memfasilitasi ketersediaan teknologi budidaya, sarana prasarana dan permodalan usaha, panen dan pascapanen; 11. Pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengembangan kawasan/sentra perkebunan

alam yang tersedia dengan memaksimalkan adopsi teknologi 8. Mengembangkan kawasan/sentra pertanian perkotaan berdasarkan hirarki kekotaan sebagai pusat pelayanan, aksebilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi wilayah 9. Mendorong kawasan pertanian berbasis agro-industri serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah disekitarnya 10. Pemetakan/pengumpulan data tentang kebutuhan sarana dan prasarana peternakan. 11. Meningkatkan penerapan teknologi budidaya, panen dan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan; 12. Meningkatkan daya dukung lahan dengan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; 13. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perkebunan serta fasilitasi terhadap akses modal dan pasar; 14. Menciptakan sistem produksi hasil perkebunan berkelanjutan dan lestari serta memiliki keunggulan kompetitif untuk dipasarkan	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD 2025-2030

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 yang merupakan acuan dan tolok ukur pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) tahunan. RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMN tahun 2024-2026.

Kebijakan pembangunan nasional dibidang pertanian difokuskan pada tiga program utama, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis, dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Ketiga program utama tersebut diarahkan untuk :

1. Meningkatkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada kemampuan produksi, keragaman bahan pangan dan kelembagaan pangan yang bersumber pada budaya lokal;
2. Mengembangkan sistem agribisnis yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif produk-produk daerah dan keunggulan komparatif sumberdaya alam dan sumber daya manusia; serta;
3. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan penguatan modal dan peningkatan pendapatan.

Pembangunan pertanian harus dilakukan melalui pendekatan sistem agribisnis, yaitu keseluruhan kinerja sistem usaha yang saling terkait, saling bergantung dan saling mempengaruhi mulai dari sub sistem hulu, sub sistem usaha tani (*off farm*), sub sistem hilir (*on farm*) dan sub sistem penunjang yang dikembangkan secara simultan, serasi dan seimbang.

B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2030

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun, disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Potensi tersebut menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kota Bima, maka visi Kota Bima adalah :

"***Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang Maju dan Efisien Menuju Masyarakat Kota Bima yang Sejahtera***"

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- ***Terwujudnya Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan***. Mencakup harapan atau cita-cita yang ingin dicapai satu tahun ke depan pada komoditi tanaman pangan berupa padi, jagung, kedelai juga sayur-sayuran, serta komoditi peternakan berupa sapi, kambing, ayam, dan ternak lainnya.
- ***Maju dan Efisien Menuju Masyarakat Kota Bima yang Sejahtera***. Mengandung makna penggunakan teknologi, inovasi, peningkatan kualitas SDM, dan sistem modern pada bidang Pertanian adalah usaha terbaik bagi pengelolaan sektor tersebut, sementara efisien mengandung arti bahwa pengelolaan sumber daya (lahan, air, tenaga kerja, modal) dilakukan secara optimal sehingga biaya lebih hemat dengan hasil yang lebih maksimal. Menuju Masyarakat Kota Bima yang sejahtera mengandung arti meningkatnya pendapatan petani dan peternak, Ketersediaan pangan, dan Kesejahteraan dan kualitas hidup Masyarakat petani yang akan dicapai.

b. Misi

Peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian dan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usaha komoditas unggulan bernilai ekonomis tinggi yang mampu bersaing dengan menunmbuh kembangkan sentra-sentra produksi melalui pengembangan sarana dan prasarana, penerapan teknologi serta menumbuh kembangkan usaha-usaha agribisnis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan hasil produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi".

2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan serta sasaran program dan kegiatan pembangunan pertanian Kota Bima adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Terjaminnya ketercukupan pangan masyarakat

b. Sasaran

Meningkatnya Produksi Pertanian

Tabel 4. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD DINAS PERTANIAN KOTA BIMA

Misi ke 4 : *"Mewujudkan Ketahanan Ekologi Yang Terintegrasi Dan Berkelanjutan"*

No.	Indikator		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2024)	Target Capaian					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2029)	FORMULA
				2025	2026	2027	2028	2029		
				TARGET						
1.	*Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian*		9,46%	9,46%	9,47%	9,48%	9,49%	9,50%	9,50%	=(PRODUKSI TAHUN BERJALAN - PRODUKSI TAHUN SEBELUMNYA)/PRODUKSI TAHUN SEBELUMNYA*100%
	Padi (GKP)	Ton	20.326,00	20.823,99	21.323,76	21.835,53	22.359,59	22.917,72	23.467,74	
	Jagung (PK)	Ton	58.593,00	65.442,52	72.974,96	81.243,02	90.317,86	100.252,83	112.283,17	
	Kedelai (BK)	Ton	105,00	107,10	109,24	111,43	113,66	115,93	118,25	
	Kacang Tanah (BK)	Ton	49,00	49,98	50,98	52,00	53,04	54,10	55,18	
	Kacang Hijau (BK)	Ton	21,00	21,04	21,08	21,13	21,17	21,21	21,25	
	Tomat	Ton	2,40	2,40	2,41	2,41	2,42	2,42	2,43	
	Cabai	Ton	57,70	57,82	57,93	58,05	58,16	58,28	58,40	
	Tembakau	Ton	70,00	91,00	113,75	138,66	166,25	198,01	257,41	
	Mete	Ton	148,00	149,18	150,68	152,33	153,86	154,01	155,55	
	Kelapa	Ton	17,00	17,02	17,19	17,36	17,53	17,71	17,89	
	Daging	Ton	1.189,00	1.379,24	1.599,92	1.855,91	2.142,76	2.470,76	2.915,50	
	Telur	Ton	908,56	1.053,93	1.222,56	1.418,17	1.645,07	1.908,29	2.175,45	

3. Kebijakan dan Program

Pada Tahun 2025 Dinas Pertanian Kota Bima dalam mengemban tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

Meningkatnya Produksi Pertanian					
	03	**27**	**02**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**
	03	**27**	**02**	**2.01**	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**
	03	27	02	02.01	0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
	03	27	02	02.01	0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
	03	**27**	**02**	**02.02**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**
	03	27	02	02.02	0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
	03	**27**	**02**	**02.03**	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
	03	27	02	02.03	0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
	03	27	02	02.03	0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan,Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
	03	**27**	**02**	**02.05**	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**
	03	27	02	02.05	0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
	03	**27**	**03**		**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
	03	**27**	**03**	**2.01**	**Pengembangan Prasarana Pertanian**
	03	27	03	2.01	0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	03	**27**	**04**		**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**
	03	**27**	**04**	**2.01**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**
	03	27	04	2.01	0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
	03	27	04	2.01	0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

	03	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**
	03	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
	03	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**
	03	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
	03	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan
	03	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**
	03	27	05	2. 01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**
	03	27	05	2	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	03	27	05	2	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
	03	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**
	03	**27**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
	03	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
	03	**27**	**07**			**PENYULUHAN PERTANIAN**
	03	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**
	03	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
	03	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
	03	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

C. RENCANA KINERJA

Dinas Pertanian Kota Bima telah melaksanakan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang didukung oleh 18 (delapan belas) kegiatan dan 7 (tujuh) program guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025.

Untuk merealisasikan sejumlah kegiatan tersebut tentu diperlukan sumber dana sebagai salah satu prasyarat keberhasilan suatu rencana. Dana tersebut juga merupakan salah satu unsur *input* yang harus dipenuhi dan mempunyai tolok ukur tersendiri. Dengan demikian mudah dipahami bahwa dalam menyusun Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja Tahunan, tidaklah terlepas dari sistem penganggaran pada organisasi Dinas Pertanian Kota Bima.

Pada prinsipnya Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima selama tahun 2025. Target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Tujuan adalah hasil yang akan diwujudkan dalam jangka waktu menengah, sedangkan sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan untuk kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Utama	Kegiatan Utama	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian	9,46%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.914.535.080,00
						Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	59.653.000,0
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	8.004.100,00
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	939.554.850,00
						Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	8.990.100,00
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Paka	27.916.300,00
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.182.623.500,00
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	17.755.387,00
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.068.045,00
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	24.534.255,00
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	61.714.700,00
						Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	25.963.800,00
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	43.530.000,00
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	19.960.000,00
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	14.086.000,00

				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	84.479.700,00
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	337.217.120,00
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	95.431.000,00
Jumlah							**8.467.257.482,00**

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2030, disusunlah Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Bima yang merupakan perjanjian kerja (kontrak kerja) antara pimpinan dengan bawahan dalam hal ini Walikota sebagai pengambil kebijakan dengan pimpinan SKPD sebagai pelaksanan kebijakan yang akan dijadikan tolak ukur dalam pengukuran kinerja Pemerintah Kota Bima.

Dinas Pertanian Kota Bima telah membuat perjanjian kinerja tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Perjanjian kinerja Dinas Pertanian tahun 2025 disusun didasarkan pada Rencana Kinerja 2025 yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Bima yang telah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bima yang merupakan

penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah tahun 2025-2030, dan adapun perjanjian kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terjaminnya ketercukupan pangan masyarakat	**Indeks Ketahanan Pangan**	**Meningkatnya produksi pertanian**	**Persentase pertumbuhan produksi pertanian**	**9,46**	**9,47**	**9,48**	**9,49**	**9,50**

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Pertanian

Adalah upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima dalam menjamin ketersediaan bahan pangan masyarakat dengan cara melaksanakan intensifikasi tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan peernakan ditengah kondisi lahan pertanian yang semakin berkurang. Peningkatan produksi Pertanian di sub sistem hulu diharapkan mampu mendongkrak peningkatan pendapatan petani di Kota Bima dan pada akhirnya mampu meningkatkan Indeks Daya Beli Masyarakat atas komoditi dan atau produk pertanian. Sedangkan pengembangan pada sub sistem hilir dititikberatkan pada pengolahan produk hasil pertanian (bahan baku) sehingga diharapkan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya dengan penerapan inovasi dan teknologi serta prosedur dan standar yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut diatas, jumlah anggaran program/kegiatan yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tahun 2025 adalah Rp. 22.390.597.091,00 dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 21.059.342.032,00 atau sebesar 94,05%

Guna menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan penganggarannya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima. Uraian program tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Program dan Pagu Anggaran Urusan Pertanian yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.923.339.609,00	APBD
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.305.346.090,00	APBD dan DBH- CHT
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.247.208.075,00	APBD dan DBH-CHT
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	135.692.097,00	APBD
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	24.521.000,00	APBD
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	36.346.000,00	APBD
7	Program Penyuluhan Pertanian	718.144.220,00	APBD dan DBHCHT
	Jumlah	**22.390.597.091,00**	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Rekapitulasi Capaian Indikator Sasaran PK

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal, baik data primer maupun sekunder.

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025 dengan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun anggaran, komponen yang diukur kinerjanya adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Adapun sasaran strategis Dinas Pertanian Kota Bima yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pertanian, meningkatnya produksi perkebunan, dan meningkatnya produksi peternakan dengan beberapa indikator yang dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 8. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	***Meningkatnya Produksi Pertanian***	***Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian***	***%***	***9,46%***	***9,12%***	***96,40***
		- Padi (GKP)	Ton	20.823,99	20.744,00	99,62%
		- Jagung (PK)	Ton	65.442,52	62.739,00	95,87%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
		- Kedelai (BK)	Ton	107,10	124,00	115,78%
		- Kacang Tanah (BK)	Ton	49,98	170,00	340,14%
		- Kacang Hijau (BK)	Ton	21,04	36,00	171,09%
		'- Tomat	Ton	2,40	53,40	2220,56%
		'- Cabai	Ton	57,82	19,80	34,25%
		'- Tembakau	Ton	91,00	154,54	169,82%
		'- Mete	Ton	149,18	148,00	99,21%
		'- Kelapa	Ton	17,02	17,00	99,90%
		'- Daging	Ton	1.379,24	2.316,88	167,98%
		'-Telur	Ton	1.053,93	2.392,60	227,02%

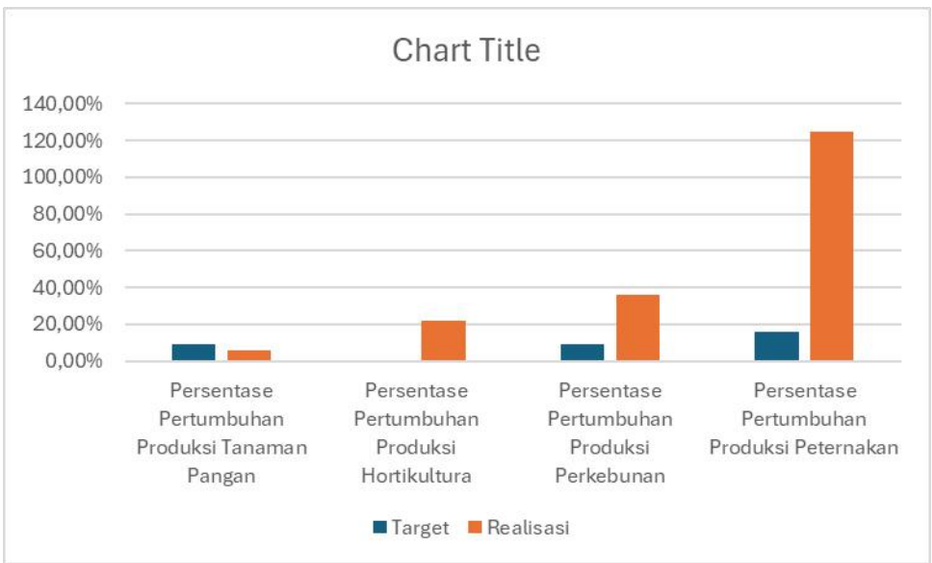
Jika di lakukan penggolongan pada tiap tiap komoditi maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 9. Pengukuran Capaian Kinerja Masing masing Komoditas Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	***Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan***	***Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan***	**%**	**9,29%**	**5,97%**	**64,26%**
		- Padi (GKP)	Ton	20.823,99	20.744,00	
		- Jagung (PK)	Ton	65.442,52	62.739,00	
		- Kedelai (BK)	Ton	107,10	124,00	
		- Kacang Tanah (BK)	Ton	49,98	170,00	
		- Kacang Hijau (BK)	Ton	21,04	36,00	
		Jumlah		**86.444,63**	**83.813,00**	
2.	***Meningkatnya Produksi Hortikultura***	***Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura***	**%**	**0,2%**	**21,8%**	**10.898,5%**
		'- Tomat	Ton	2,40	53,40	
		'- Cabai	Ton	57,82	19,80	
		Jumlah		**60,22**	**73,20**	
3.	***Meningkatnya Produksi Perkebunan***	***Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan***	**%**	**9,45%**	**35,97%**	**380,77%**
		'- Tembakau	Ton	91,00	154,54	
		'- Mete	Ton	149,18	148,00	
		'- Kelapa	Ton	17,02	17,00	
		Jumlah		257,20	319,54	
4.	***Meningkatnya Produksi Peternakan***	***Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan***	**%**	**16,00%**	**124,52%**	**778,26%**
		'- Daging	Ton	1.379,24	2.316,88	
		'-Telur	Ton	1.053,93	2.392,60	
		Jumlah		2.433,17	4.709,48	

Tabel 8 menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kota Bima dikatakan baik karena sebesar 96,40% dari target yang telah ditetapkan.

Adapaun Realisasi persentase pertumbuhan produksi masing masing, komoditi Tanaman Pangan pada tahun 2025 sebesar 5,97% dengan target sebesar 9,29%, itu berarti capaiannya hanya 64,26% hal tersebut dikarenakan penurunan luas tanam yang pada tahun 2024 seluas 3.093 Ha menjadi 2.967 Ha atau sekitar 126 Ha, sementara untuk komoditi Hortikultura mengalami peningkatan sebanyak 10.898,5% dengan realisasi persentase pertumbuhan produksi sebesar 21,8% dari target 0,2%, realisasi persentase pertumbuhan produksi perkebunan tahun 2025 sebesar 35,97% melebihi target 9,45% dengan capaian sebesar 380,77%, untuk realisasi persentase pertumbuhan produksi peternakan tahu 2025 ini sebesar 124,52% juga melebihi target 16,00%.



Grafik 1. Persentase Pertumbuhan Sektor Pertanian Tahun 2025

Lebih rinci dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi peningkatan produksi pertanian sebesar 88.915,22 ton dari target 89.195,22 ton atau 9,12% dari target 9,46% dengan capaian sebesar 96,37%.
2. Untuk komoditi padi target produksi sebesar 20.823,99 dengan realisasi sebesar 20.744,00 Terdapat peningkatan produksi sebesar 7.428,56 ton jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang hanya sebesar 418,00 Ton.
3. Realisasi produksi jagung tahun 2025 sebesar 62.739,00 ton lebih kecil dari target dengan besar 65.442,52 ton, namun jika dibandingkan dengan produksi tahun 2024 mengalami peningkatan produksi sebesar 4.146,00 ton atau 7,08 %.
4. Realisasi produksi Kedelai tahun 2025 sebesar 124,00 ton lebih besar dari target yang hanya 107,10 ton, jika dibandingkan dengan

tahun 2024 produksi kedelai juga mengalami kenaikan 19,00 ton atau 18,10%.

5. Realisasi produksi Kacang Tanah tahun 2025 sebesar 170,00 ton lebih besar dari target yang hanya 49,98 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Kacang Tanah juga mengalami kenaikan 121,00 ton atau 246,94 %.

6. Realisasi produksi Kacang Hijau tahun 2025 sebesar 36,00 ton lebih besar dari target yang hanya 21,04 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Kacang Tanah juga mengalami kenaikan 15,00 ton atau 71,43 %.

7. Realisasi produksi Tomat tahun 2025 sebesar 53,40 ton lebih besar dari target yang hanya 2,40 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Tomat juga mengalami kenaikan 51,00 ton atau 2.125,00 %.

8. Realisasi produksi Cabai tahun 2025 sebesar 19,80 ton lebih kecil dari target yaitu 57,82 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Cabai mengalami penurunan sebanyak 37,90 ton atau 65,68 %.

9. Realisasi produksi Tembakau tahun 2025 sebesar 154,54 ton lebih besar dari target yang hanya 91,00 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi tembakau mengalami peningkatan produksi sebesar 84,54 ton atau 120,76 %.

10. Realisasi produksi Mete tahun 2025 sebesar 148,00 ton lebih kecil sedikit dari target yaitu 149,18 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi mete tidak mengalami peningkatan produksi.

11. Realisasi produksi Kelapa tahun 2025 sebesar 17,00 ton lebih kecil sedikit dari target yang sebesar 17,02 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi kelapa tidak mengalami peningkatan produksi.

12. Realisasi produksi Daging tahun 2025 sebesar 2.316,88 ton lebih besar dari target yang sebesar 1.379,24 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Daging mengalami peningkatan produksi sebesar 94,86 ton atau 1.599,92 %.

13. Realisasi produksi Daging tahun 2025 sebesar 2.316,88 ton lebih besar dari target yang sebesar 1.379,24 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Daging 2025 mengalami peningkatan produksi sebesar 1.127,88 ton atau 94,86 %.

14. Realisasi produksi Telur tahun 2025 sebesar 2.392,60 ton lebih besar dari target yang sebesar 1.053,93 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2024 produksi Telur 2025 mengalami peningkatan produksi yang signifikan yaitu sebesar 1.484,04 ton atau 163,34 %.

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Pertanian

Sasaran ini diterjemahkan kedalam indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi pertanian.

a. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Bima pada sasaran strategis meningkatnya produksi tanaman pangan merupakan akumulasi dari produksi 12 (dua belas) komoditi utama pertanian dalam satuan ton. Persentase pertumbuhan produksi pertanian pada tahun 2025, dari target sebesar 9,46% yang terealisasi sebesar 9,12% Secara rinci capaian indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi		Satuan
				2025	%	
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	3 Laporan	3 Laporan	100,0	Laporan
		Jumlah Kelompok Tani yang melakukan Kegiatan Diversifikasi Komoditi DBHCHT	16	16	100,0	Klp
		Jumlah sarana pertanian yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka diversifikasi tembakau	9	9	100,0	paket
		Jumlah sarana pertanian yang diberikan kepada masyarakat	6	7	116,7	paket
		Jumlah Pengadaan Bibit Tanaman untuk Diversifikasi Tembakau	5	6	120,0	paket
2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Laporan	1 Laporan	100,0	laporan
		Jumlah petani yang mengikut1 Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian (On The Spot)	30	40	133,3	Orang
		jumlah kegiatan koordinasi penyusunan PROKSI MANTAP	2	2	100,0	Kegiatan
		Jumlah petani yang mengalami peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	18	55	305,6	orang
	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2	2	100,0	laporan
		Jumah pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Kegiatan IB	1	1	100,0	laporan
		Jumlah Pelaksanaan Monitoring,	1	1	100,0	laporan

		Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan				
	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil	4	4	100,0	laporan
		Jumlah Bantuan bibit dan pakan ternak untuk mendukung kegiatan budidaya tembakau	7	2	28,6	paket
		Jumlah Bantuan bibit dan pakan ternak yang diserahkan kepada masyarakat	5	6	120,0	paket
		Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Skala Kecil	1	1	100,0	laporan
		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Benih/Bibit Ternak pada Pelaku Usaha Peternakan	1	1	100,0	laporan
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit hijauan	2	2	100,0	laporan
		Pendataan dan pemetaan potensi sebaran dan pengembangan benih/bibit hijauan pakan ternak	1	1	100,0	laporan
		Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan ternak benih/bibit ternak dan HPT	1	1	100,0	Laporan
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	4 Laporan	100,0	Laporan
		Pengawasan dan pemantauan Produksi Benih/Bibit Ternak, Produksi bahan pakan/Pakan dan HPT	1	1	100,0	Laporan
		Pendataan Potensi HPT dan Bahan Pakan Lokal Ternak	1	1	100,0	Laporan
		Jumlah peternak yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Usaha Peternakan	50	50	100,0	orang
		Jumlah Sarana prasarana makan dan minum mendukung kegiatan penertiban ternak	4	3	75,0	Paket
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung	23	21	91,3	dokumen
		Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun untuk mendukung budidaya tembakau	7	7	100,0	Paket
		Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun untuk mendukung Kegiatan Penertiban Ternak	1	0	0,0	Paket
		Jumlah jasa perencanaan pembangunan pagar untuk mendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian	2	1	50,0	Paket

		Lainnya				
		Jumlah jasa pengawasan pembangunan pagar untuk mendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3	2	66,7	paket
		Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	10	11	110,0	paket
	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada	5	5	100,0	Wilayah
		Jumlah Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis	1	1	100,0	Laporan
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	5	100,0	Wilayah
		Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis	1	1	100,0	Laporan
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	1	100,0	Laporan
		Jumlah Penyediaan bahan pendukung dan Perabot pendukung Pelayanan Jasa medik veteriner	1	1	100,0	Paket
		Jumlah Penyediaan obat-obatan pendukung Pelayanan Jasa medik veteriner	1	1	100,0	Paket
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produks Hewan	1	1	100,0	Laporan
		Jumlah wilayah pengawasan dan pemeriksaan hewan idul qurban	41	41	100,0	Kecamatan
		Jumlah Pengawasan dan pemeriksaan hewan dan bahan asal hewan (ternak besar/kecil) di TPH	1	1	100,0	Laporan
		Jumlah penertiban tempat pemotongan hewan besar diluar RPHR Kota Bima	1	1	100,0	Laporan
	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap usaha	25	21	84,0	Unit Usaha
		Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan cara produksi pangan olahan	25	21	84,0	Unit Usaha
		Jumlah UMKM Olahan Hasil Peternakan	25	21	84,0	Unit Usaha
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20	21	105,0	Dokumen
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan dan Investasi pertanian Mendukung Pelaku Usaha di Wilayah Pengembangan Komoditas Tembakau	60	50	83,3	pelaku usaha

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66	66	100,0	Ha
		Jumlah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman pangan dan Hortikultura	66	66	100,0	Ha
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman	2	2	100,0	Ha
		Jumlah Petani yang mengikuti Bimtek mitigasi kekeringan	20	26	130,0	orang
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47	49	104,3	unit
		Jumlah penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan manajemen agribisnis tembakau manajemen agribisnis tembakau	160	0	0,0	Orang
		Jumlah Penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan diversifikasi budidaya ternak bagi petani tembakau dan penyuluh pendamping	130	130	100,0	orang
		Jumlah penyuluh yang mendapatkan Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	48	49	102,1	orang
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16	16	100,0	unit
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan pasca panen tembakau	100	105	105,0	orang
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan penentuan grade/tingkatan kualitas bahan baku tembakau	100	105	105,0	orang
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan sosialisasi pengembangan tembakau	100	105	105,0	orang
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan penerapan PHT dan Pengendalian OPT	160	170	106,3	orang
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan pembuatan pestisida nabati	100	100	100,0	orang
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik padat pada budidaya tembakau	100	100	100,0	orang
		Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan admnistrasi kelompok bagi petani tembakau	50	50	100,0	orang
		Jumlah kelompok tani yang mengikuti Lomba PPL, Petani tembakau dan	27	0	0,0	kelompok

		Kelompok Tani tembakau				
		Jumlah Pelaksanaan Pekan Daerah (PEDA)	1	1	100,0	Kegiatan
		Pemutakhiran data kelembagaan petani	1	1	100,0	Laporan
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	3	100,0	unit
		Jumlah petani yang mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian bagi Petani Tembakau	150	148	98,7	orang
		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengembangan tembakau varietas unggul baru bagi petani tembakau	100	100	100,0	orang
		Penguatan pendataan identifikasi data potensi wilayah pertanian di kecamatan	1	1	100,0	Laporan
		Jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian Tingkat kecamatan yang tersusun	5	5	100,0	Laporan

Sumber : Laporan Kinerja Tahunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025

Berdasarkan pengukuran kinerja Tabel 10, dapat dilihat pencapaian indikator sasaran peningkatan produksi pertanian sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi tahun 2025, dari target sebesar 3 Laporan yang terealisasi sebesar 3 Laporan atau sebesar 100,00%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori **Berhasil**.

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada umlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi tahun 2025 adalah :

   1.1. Jumlah Kelompok Tani yang melakukan Kegiatan Diversifikasi Komoditi DBHCHT, target sebesar 16 Klp yang terealisasi sebesar 16 Klp. Realisasi dari target mencapai sebesar 100,0 % dan ini masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

   1.2. Jumlah sarana pertanian yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka diversifikasi tembakau, target sebesar 9 paket yang terealisasi sebesar 9 paket. Realisasi dari target mencapai sebesar 100 % dan masuk dalam kategori **Berhasil**.

   1.3. Jumlah sarana pertanian yang diberikan kepada masyarakat, target sebesar 6 paket yang terealisasi sebesar 7 paket. Realisasi dari target mencapai sebesar 116,7 % dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil**.

1.4. Jumlah Pengadaan Bibit Tanaman untuk Diversifikasi Tembakau , target sebesar 5 paket yang terealisasi sebesar 6 paket. Realisasi dari target mencapai sebesar 120,00% dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil.**

2. Pada indikator kinerja Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian tahun 2025 dari target sebesar 1 Laporan yang terealisasi sebesar 1 Laporan atau sebesar 100,00%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori **Berhasil.**

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian tahun 2025 adalah :

   2.1. Jumlah petani yang mengikut Kegiatan Bimbingan Teknis Pendampingan Penggunaan Sarana Produksi Pertanian (On The Spot). Target sebesar 30 orang yang terealisasi sebesar 40 orang, realisasi dari target mencapai sebesar 133,3 % dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil**.

   2.2. jumlah kegiatan koordinasi penyusunan PROKSI MANTAP. Target sebesar 2 kegiatan yang terealisasi sebesar 2 kegiatan. Realisasi dari target mencapai sebesar 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

   2.3. Jumlah petani yang mengalami peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Target sebesar 18 orang yang terealisasi sebesar 55 orang, realisasi dari target mencapai sebesar 305,6 % dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil.**

3. Pada indikator kinerja Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Organisme tahun 2025 dari target sebanyak 2 Laporan yang terealisasi sebanyak 2 Laporan atau pencapaian 100,00%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori Berhasil.

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Peningkatan Kualitas SDG tahun 2025 adalah :

   3.1. Jumlah pelaksanaan Pemetaan dan Pendataan Lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Kegiatan IB, Target sebesar 1 laporan yang terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100 % dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil.**

   3.2. Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Inseminasi Buatan, Target sebesar 1 laporan yang terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100 % dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil.**

4. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil, tahun 2025 dari target sebanyak 4 Laporan yang terealisasi sebanyak 4 Laporan atau pencapaian

100,00%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori **Berhasil**.

Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil tahun 2025 adalah :

4.1. Jumlah Bantuan bibit dan pakan ternak untuk mendukung kegiatan budidaya tembakau, Target sebanyak 7 paket pekerjaan yang terealisasi 2 paket, realisasi dari target 28,6 % dan ini masuk dalam kategori **tidak Berhasil.**

4.2. Jumlah Bantuan bibit dan pakan ternak yang diserahkan kepada masyarakat, Target sebanyak 5 paket pekerjaan yang terealisasi 6 paket, realisasi dari target 120,00% dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil.**

4.3. Jumlah pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Skala Kecil, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

4.4. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Peredaran Benih/Bibit Ternak pada Pelaku Usaha Peternakan, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

5. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit tahun 2025 dari target sebanyak 2 Laporan yang terealisasi sebanyak 2 Laporan atau pencapaian 100,00%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori **Berhasil**.

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit, tahun 2025 adalah :

   5.1. Pendataan dan pemetaan potensi sebaran dan pengembangan benih/bibit hijauan pakan ternak, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

   5.2. Pengawasan peredaran bahan pakan/pakan ternak benih/bibit ternak dan HPT, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

6. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan HPT, Bahan Pakan/Pakan, tahun 2025 dari target sebanyak 4 Laporan yang terealisasi sebanyak 4 Laporan atau pencapaian 100,00%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam kategori **Berhasil**.

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit ternak dan HPT, Bahan

Pakan/Pakan 2025 adalah :

6.1. Pengawasan dan pemantauan Produksi Benih/Bibit Ternak, Produksi bahan pakan/Pakan dan HPT, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil**.

6.2. Pendataan Potensi HPT dan Bahan Pakan Lokal Ternak, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil**.

6.3. Jumlah peternak yang mengikuti Pelatihan Pengelolaan Usaha Peternakan, Target sebanyak 50 orang dan terealisasi 50 orang, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil**.

6.4. Jumlah Sarana prasarana makan dan minum mendukung kegiatan penertiban ternak, Target sebanyak 4 paket dan terealisasi 3 paket, realisasi dari target 75,0% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

7. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, Target sebanyak 23 paket dan terealisasi 21 paket, realisasi dari target 91,3% masuk dalam kategori **Berhasil.**

Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Lainnya 2025 adalah :

7.1. Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun untuk mendukung budidaya tembakau, Target sebanyak 7 paket dan terealisasi 7 paket, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

7.2. Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun untuk mendukung Kegiatan Penertiban Ternak, Target sebanyak 1 paket namu tidak ada realisasi , dan masuk dalam kategori **tidak Berhasil.**

7.3. Jumlah jasa perencanaan pembangunan pagar untuk mendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, Target sebanyak 2 paket namun terealisasi sebanyak 1 paket, realisasi dari target 50,00% dan ini masuk dalam kategori **cukup Berhasil**.

7.4. Jumlah jasa pengawasan pembangunan pagar untuk mendukung Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Target sebanyak 3 paket namun terealisasi sebanyak 2 paket, realisasi dari target 66,7% dan ini masuk dalam kategori **cukup Berhasil**.

7.5. Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun, Target sebanyak 10 paket namun terealisasi sebanyak 11 paket, realisasi dari target

110,00% dan ini masuk dalam kategori **sangat Berhasil**.

8. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan, Target sebanyak 5 wilayah dan terealisasi 5 wilayah, realisasi dari target 100,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan 2025 adalah :

   8.1 Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis , realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

9. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Target sebanyak 5 wilayah dan terealisasi 5 wilayah, realisasi dari target 100,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**

   Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis 2025 adalah :

   9.1 Jumlah laporan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis , realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

10. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**

    Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2025 adalah :

    10.1 Jumlah Penyediaan bahan pendukung dan Perabot pendukung Pelayanan Jasa medik veteriner, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

    10.2. Jumlah Penyediaan obat-obatan pendukung Pelayanan Jasa medik veteriner, realisasi dari target 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil**

11. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**

    Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 2025 adalah :

    11.1. Jumlah wilayah pengawasan dan pemeriksaan hewan idul qurban, Target sebanyak 41 Kelurahan dan terealisasi 41 Kelurahan, realisasi dari target 100% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

    11.2. Jumlah Pengawasan dan pemeriksaan hewan dan bahan asal hewan (ternak besar/kecil) di TPH, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil**

11.3. Jumlah penertiban tempat pemotongan hewan besar diluar RPHR Kota Bima, Target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, realisasi dari target 100% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

12. Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan, Target sebanyak 25 unit usaha dan terealisasi 21 unit usaha , realisasi dari target 84,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**
13. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian, Target sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 21 dokumen , realisasi dari target 105,00% masuk dalam kategori **Sangat Berhasil.**
14. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Target sebanyak 66 Ha dan terealisasi 66 Ha, realisasi dari target 100,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**
15. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Target sebanyak 2 Ha dan terealisasi 2 Ha, realisasi dari target 100,00% masuk dalam kategori **Berhasil.**
16. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa, Target sebanyak 47 unit dan terealisasi 49 unit, realisasi dari target 104,3 % masuk dalam kategori **Sangat Berhasil.** Yang termasuk dalam pengukuran indikator kinerja pada Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 2025 adalah :

    16.1. Jumlah penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan manajemen agribisnis tembakau manajemen agribisnis tembakau, Target sebanyak 160 orang dan tidak terealisasi atau 0,00% dan ini masuk dalam kategori **Tidak Berhasil.**

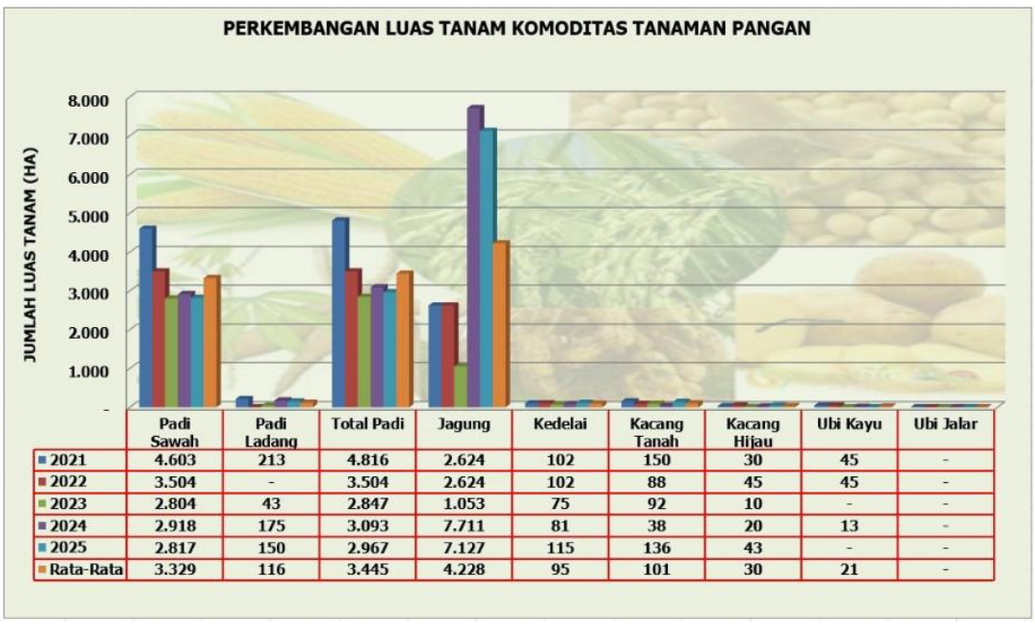
    16.2. Jumlah Penyuluh dan petani yang mengikuti pelatihan diversifikasi budidaya ternak bagi petani tembakau dan penyuluh pendamping, Target sebanyak 130 orang dan terealisasi sebanyak 130 orang tidak terealisasi atau 100,00% dan ini masuk dalam kategori **Berhasil.**

    16.3. Jumlah penyuluh yang mendapatkan Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian, Target sebanyak 48 orang dan terealisasi sebanyak 49 orang tidak terealisasi atau 102,1 0% dan ini masuk dalam kategori **Sangat Berhasil.**
17. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, Target sebanyak 16 unit dan terealisasi 16 unit, realisasi dari target 100,00 % masuk dalam kategori **Berhasil.**
18. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Target sebanyak 3 unit dan terealisasi 3 unit, realisasi dari target 100,00 % masuk dalam kategori **Berhasil**

b. Perbandingan Realisasi Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi peningkatan produksi pertanian yang dibangun oleh komoditi tanaman pangan secara keseluruhan sangat bervariasi dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya komoditi jagung yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup berarti setiap tahunnya.

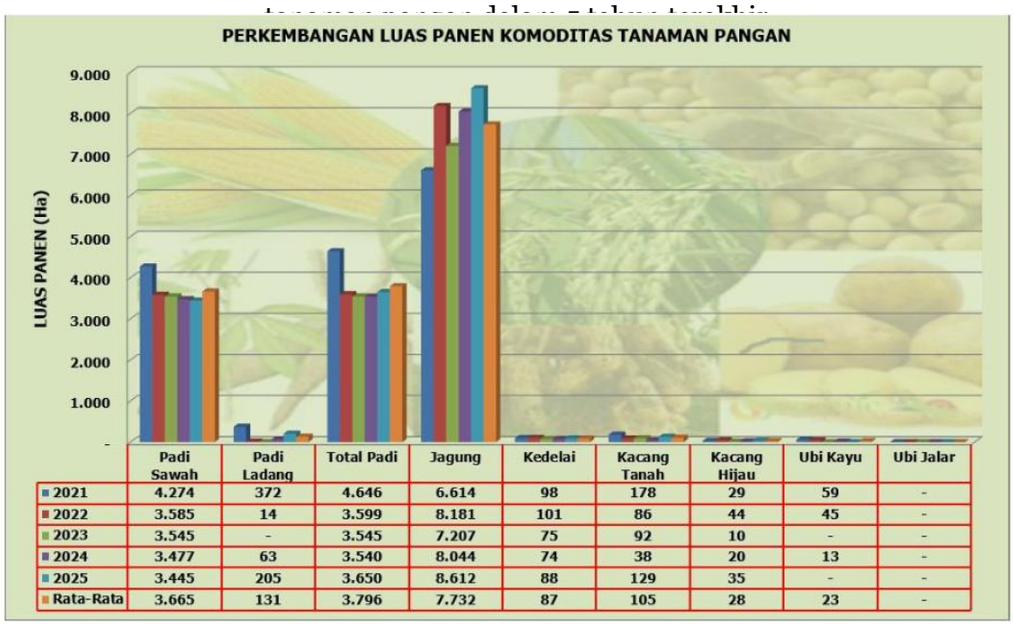
1. Perkembangan capaian realisasi luas tanam komoditas tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir.



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2021	4.603	213	4.816	2.624	102	150	30	45	-
2022	3.504	-	3.504	2.624	102	88	45	45	-
2023	2.804	43	2.847	1.053	75	92	10	-	-
2024	2.918	175	3.093	7.711	81	38	20	13	-
2025	2.817	150	2.967	7.127	115	136	43	-	-
Rata-Rata	3.329	116	3.445	4.228	95	101	30	21	-

Grafik 2. Perkembangan luas tanam komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2021 -2025

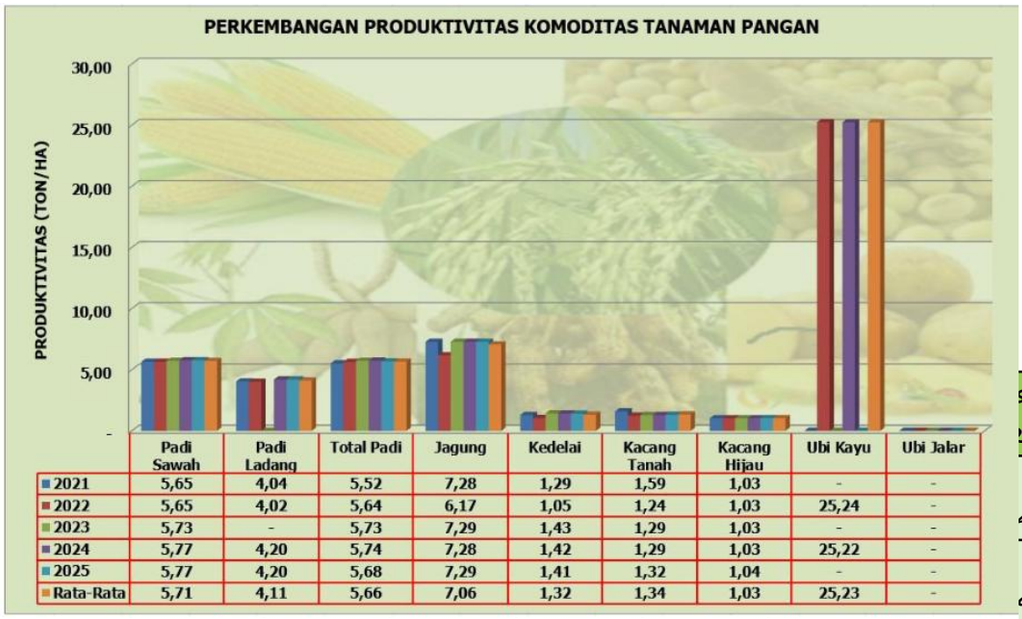
2. Perkembangan capaian realisasi luas panen komoditas tanaman pangan dalam 5 tahun terakhir



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2021	4.274	372	4.646	6.614	98	178	29	59	-
2022	3.585	14	3.599	8.181	101	86	44	45	-
2023	3.545	-	3.545	7.207	75	92	10	-	-
2024	3.477	63	3.540	8.044	74	38	20	13	-
2025	3.445	205	3.650	8.612	88	129	35	-	-
Rata-Rata	3.665	131	3.796	7.732	87	105	28	23	-

Grafik 3. Perkembangan luas panen komoditi tanaman pangan di Kota Bima Tahun 2021 -2025

3. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima dalam 5 tahun terakhir



	Padi Sawah	Padi Ladang	Total Padi	Jagung	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Ubi Kayu	Ubi Jalar
2021	5,65	4,04	5,52	7,28	1,29	1,59	1,03	-	-
2022	5,65	4,02	5,64	6,17	1,05	1,24	1,03	25,24	-
2023	5,73	-	5,73	7,29	1,43	1,29	1,03	-	-
2024	5,77	4,20	5,74	7,28	1,42	1,29	1,03	25,22	-
2025	5,77	4,20	5,68	7,29	1,41	1,32	1,04	-	-
Rata-Rata	5,71	4,11	5,66	7,06	1,32	1,34	1,03	25,23	-

Kedelai	141	132	107	105		

afik 4. Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2021-2025

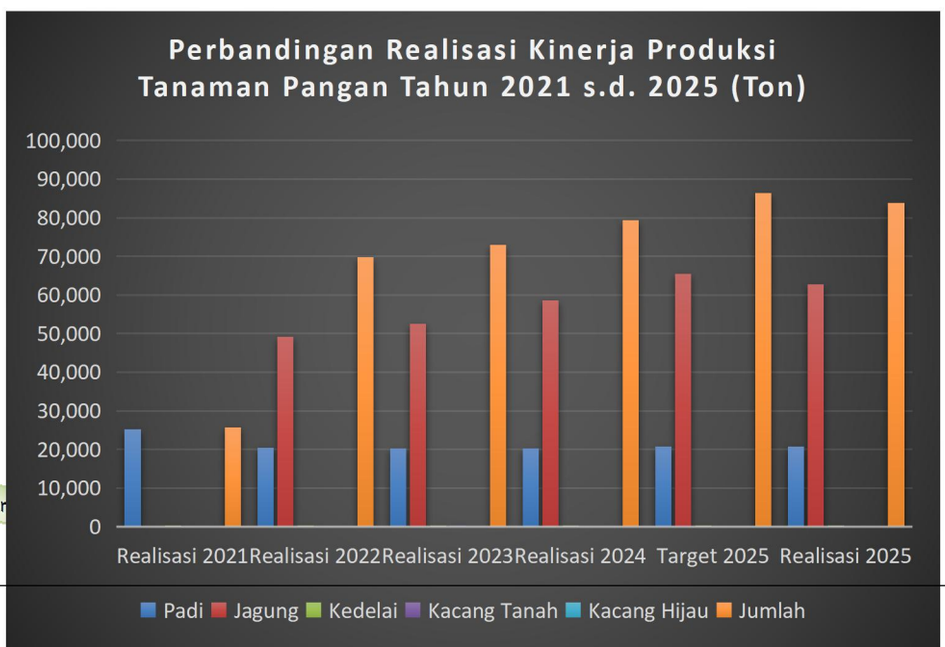
c. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

Secara keseluruhan realisasi komoditi tanaman pangan khususnya komoditi jagung pada tahun 2025 sangat tinggi. Selain ditunjang dengan cuaca yang memadai, pasokan pupuk, penyebaran benih dan mekanisasi sangat mendukung melalui bantuan pemerintah kepada kelompok tani dikarenakan animo dan permintaan pasar yang sangat tinggi.

Tabel 11. Realisasi Kinerja Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025 Terhadap Target Renstra (Ton)

					107,10	124,00
Kacang Tanah	242	3	119	49	49,98	170,00
Kacang Hijau	31	47	10	21	21,04	36,00
Jumlah	**25.758**	**69.835**	**73.051**	**79.422**	**86.445**	**83.813**

Tabel di atas menunjukan bahwa komoditi pertanian nampak sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Tahun 2021 akumulasi realisasi produksi 5 (lima) komoditi pertanian tanaman pangan sebesar 25.758 ton sementara pada akhir tahun 2025 realisasi produksi mencapai 83.813 ton. Nampak terjadi peningkatan produksi sebesar 58.055 ton atau terjadi peningkatan sebesar 2,25% dalam rentang waktu 5 tahun. Perlu menjadi catatan bahwa produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan khususnya sangat fluktuatif dan rentan terhadap pengaruh eksternal seperti kondisi pasar (*supply demand*) dan cuaca seperti fenomena *El Nino* yang melanda Indonesia pada tahun 2024 yang mengakibatkan kekeringan dan termasuk perubahan kebijakan dan dukungan/bantuan pemerintah akibat terjadinya pandemi covid-19 semenjak akhir Desember 2019. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap pergeseran animo masyarakat terhadap komoditi yang diusahakan.



Grafik 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021 s.d. 2025 (Ton)

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Regional Dan Nasional

Perbandingan indikator kinerja Dinas Pertanian Kota Bima untuk 3 (tiga) komoditi utama tanaman pangan "Pajale" (padi-jagung-kedelai) dibandingkan dengan target regional (provinsi) dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Perbandingan Produksi Komoditi Utama Tanaman Pangan Kota Bima dengan Realisasi Provinsi dan Nasional

Komoditi (Ton)	Realisasi Kota Bima (Ton)	Realisasi Provinsi (Ton)	% Thdp Realisasi Provinsi	Target Nasional	% Thdp Realisasi Nasional
Padi	20.744,00	1.453.408	1,42	32.83.000	0,632
Jagung	62.739,00	1.176.435	5,33	23.000.000	0,273
Kedelai	124,00	8.271,9	1,49	671.000	0,018
Jumlah	**83.607,00**	**2.638.114,90**	**8,24**	**26.954.000,00**	**0,923**

Sumber Data Produksi NTB: Proksimantap NTB MT. 2022/2025; Renstra kementerian Pertanian 2025-2030

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi produksi 3 (tiga) komoditi strategis utama sub sektor tanaman pangan Kota Bima menyumbang 8,24% terhadap target produksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 0,92% terhadap target produksi nasional. Sumbangan terbesar diperoleh dari komoditi jagung sebesar 5,33% untuk Provinsi dan 0,27% untuk nasional.

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB mencanangkan target produksi jagung menembus 1.176.435 ton. Dari target itu, Kota Bima menyumbang 5,33% atau sebesar 62.739,00 ton dengan luas panen 8.612 ha, ini berarti bahwa tiap 1 hektar lahan sawah di Kota Bima menyumbangkan 7,29 ton untuk produksi jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat

e. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Pertanian*" tahun 2025 belum mencapai target. Dari target peningkatan produksi pertanian sebesar 9,46 % mampu terealisasi 9,12%. Dari semua komoditi perrtanian ada yang mengalami penurunan dan peningkatan produksi yang cukup berarti sepanjang tahun 2025. Kecenderungan produksi pertanian sepanjang tahun 2025

analisis keberhasilan dan kegagalannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Porsentase pertumbuhan produksi pertanian pada tahun 20254, dari target sebesar 9,46 % yang terealisasi sebesar 9,12%. Realisasi dari target yang ditetapkan masuk dalam* ***kategori berhasil****.*

   Meskipun pertumbuhan produksi pertanian komoditi tanaman pangan tidak banyak menyumbang kenaikan namun hal tersebut masih dikatakan berhasil mengingat faktor alih fungsi lahan yang sangat tinggi dikarenakan wilayah perkotaan memiliki masalah urbanisasi yg cukup tinggi, hal tersebut akan berbanding lurus dengan jumlah produksi. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dari data mengalami kenaikan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya intervensi Pemerintah baik dalam hal penyaluran bantuan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman, maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani dan para pelaku usaha yang dilaksanakan melalui kegiatan penanganan pasca panen, pembinaan penggunaan sarana pendukung produksi pertanian, pembinaan dan monitoring serangan organisme pengganggu tumbuhan, pembinaan penangkar benih tanaman pangan, serta monitoring serangan hama penyakit tanaman di Kota Bima. Jika dilihat per komoditi pertanian dan alasan kenaikannya adalah sebagai berikut :

a. Padi tidak mengalami peningkatan Produktivitas, malah terjadi penurunan dikarenakan laju alih fungsi lahan yang tinggi, produktivitas tanaman padi sawah masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,77 ton/Ha sama halnya dengan produktivitas tanaman padi ladang yang tidak mengalami pergeseran perubahan.

   Jika ditilik dari sisi Produksi komoditi padi mengalami peningkatan produksi sebesar 2,06 % dari tahun sebelumnya, jika dilihat dari luas tanam mengalami penurunan seluas 126 ha dan luas panen mengalami kenaikan seluas 110 ha, faktor yang menyebabkan berkurangnya luas tanam komoditi tanaman padi adalah petani sudah kurang berminat lagi dengan menanam padi di lahan tegalan (MH), mereka lebih memanfaatkan komoditi jagung untuk ditanam karena pasarnya yang menjanjikan. Ditahun-tahun sebelumnya, luas tanam untuk padi tegalan adalah seluas 200-250 ha dan di 2 (dua) tahun terakhir sudah mulai berkurang, ditahun 2025 hanya tersisa seluas 150 ha. Faktor lainnya adalah, semakin berkurangnya suplesi air irigasi yang diakibatkan oleh kondisi iklim dan semakin berkurangnya sumber mata air serta kondisi jaringan irigasi yang

kurang baik terutama sekali pada MK2, sehingga petani yang mengalami hal tersebut lebih memilih alih komoditi dari menanam padi ke tanaman palawija. Upaya yang tengah dilakukan dalam usaha peningkatan produksi tanaman padi adalah melalui usaha peningkatan produktivitas tanaman. Pelaksanaan sistem budidaya terus didorong untuk dilaksanakan sesuai anjuran dan usaha meminimalisir sistem pertanaman tradisoinal, penggunaan pupuk yang belum berimbang, pengendalian hama yang belum memenuhi unsur 6T dan masih adanya beberapa petani yang belum menggunakan benih unggul. Semua ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman petani tentang beberapa hal tersebut diatas dalam upaya menunjang peningkatan produksi usaha tani mereka. Produktivitas maksimal di Kota Bima hanya terjadi di beberapa tempat, seperti di areal penangkaran benih padi milik petani di Kelurahan Jatibaru, Jatibaru Timur dan Jatiwangi, serta di areal pertanaman yang cukup mendapat pasokan air irigasi seperti di Kelurahan Nungga, Dodu, Ntobo dan Kendo. Ini tentu perlu mendapat perhatian semua pihak agar upaya peningkatan produktivitas tanaman padi dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang telah ditentukan.

b. Komoditi jagung mengalami peningkatan produksi sebesar 7,08 % atau 4.146,00 Ton dari tahun sebelumnya, kalau dilihat dari luas panen mengalami peningkatan seluas 110 ha, peningkatan tersebut banyak dipengaruhi oleh oleh kondisi iklim (hujan) yang cukup, dimana jagung mendapatkan curahan hujan dan matahari yang bisa dikatakan sangat cukup. Produksi jagung juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan produktivitas tanaman jagung. Upaya tersebut dilaksanakn melalui usaha untuk terus meningkatkan pemahaman petani tentang pelaksanaan sistem budidaya sesuai anjuran, penggunaan pupuk berimbang, pengendalian hama secara terpadu dan penggunaan benih unggul baru yang bersertifikat. Proses budidaya tanaman jagung sebagian besar dilaksanakan oleh petani pada musim hujan (MH) dengan menggunakan benih hibrida, petani dalam melakukan usahanya lebih memilih benih jagung hibrida yang memiliki produktivitas tinggi. Disamping itu pengendalian hama yang memenuhi unsur 6T seperti serangan ulat daun juga memberikan kontribusi besar dalam peningkatan produksi tersebut.

c. Komoditi kedelai mengalami peningkatan produksi sebesar 18,10 % atau 19,00 Ton dari tahun sebelumnya, kalau dilihat dari luas panen mengalami kenaikan seluas 14 Ha dari tahun sebelumnya. Peningkatan luas panen pada komoditi kedelai seluas

14 ha dari tahun sebelumnya tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya animo masyarakat untuk menanam komoditi kedelai, ini dikarenakan oleh harga yang cukup menggiurkan, namun terkendala juga pada kurangnya akses pasar untuk komoditi tersebut sehingga petani terkadang mengalami kesulitan ketika ingin menjual produknya dan juga kesulitan dalam memperoleh benih unggul ketika dibutuhkan.

d. Komoditi kacang tanah mengalami peningkatan yang sangat baik di tahun 2025 dengan jumlah produksi sebesar 340,14%% atau 170,00 Ton dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan luas panen sebesar 91 Ha, dimana pada tahun 2024 luas panen komoditi kacang tanah hanya sebesar 38 Ha. Peningkatan luas panen tersebut disebabkan oleh naiknya permintaan pasar terhadap komoditi tersebut, karena petani menggunakan musim tanam MKII untuk ditanami komoditi jagung dan tanaman kacang tanah.

e. Komoditi kacang hijau tingkat produktivitasnya mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,01 ton/Ha, meski luas panennya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. luas panen kacang hijau sebesar 20 Ha tahun 2024, naik menjadi 35 Ha ditahun 2025.

2. Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dilakukan dengan melaksanakan pengawasan, pembinaan dan monitoring pada aspek-aspek penggunaan sarana pendukung produksi pertanian dalam upaya peningkatan produksi dan peningkatan kualitas hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Pada aspek peningkatan produksi, pengawasan, pembinaan dan monitoring tersebut dilaksanakan pada sentra produksi tanaman hortikultura seperti lokasi buah-buahan dan sayur- sayuran, sementara untuk sentra produksi tanaman pangan seperti di lokasi/areal sentra produksi padi, jagung dan kedelai. Pada aspek peningkatan kualitas hasil produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilakukan melalui beberapa upaya peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha, seperti dalam hal penanganan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura, monitoring dan evaluasi penggunaan serta ketersediaan alat dan mesin pascapanen

3. Pelaksanaan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura. Pemenuhan dan pemanfaatan yang benar terhadap sarana

produksi menjadi hal penting dalam upaya peningkatan produksi, karena itu ketersediaan dan pemanfaatan benih unggul berkualitas, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian perlu mendapat perhatian serius.

Pada tahun 2025, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura melaksanakan pendampingan terhadap ketersediaan dan penggunaan sarana produksi tersebut melalui beberapa kegiatan seperti :

a. Penambahan Luas Areal Tanam Sayur-Sayuran sebanyak 2 Ha;
b. Penambahan Luas Areal Tanam Buah-Buahan seperti Jambu Kristal 800 batang pohon, Bibit Jambu Jamaika 800 batang pohon,Bibit Alpukat 800 batang pohon, dan Klengkeng sebanyak 800 batang pohon.
c. Penyediaan Bibit Cabai sebanyak 1.000 Pohon dan Bibit Tomat sebanyak 1.000 Pohon;
d. Pelaksanaan Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 3 Kali;
e. Pembinaan dan Monitoring Lokasi Penumbuhan Sentra Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran sebanyak 4 Kali;
f. Pendampingan dan Pembinaan kelompok penangkar benih padi sebanyak 1 Kali;
g. Pembinaan dan Monitoring Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 3 Kali;
h. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Alat Pascapanen sebanyak 3 Kali;
i. Pendampingan Penyaluran Bantuan Pemerintah Perluasan Areal Tanaman Sayur-Sayuran sebanyak 1 Kali;
j. Penyusunan CPCL Pengembangan Sentra Hortikultura TA 2025 sebanyak 1 Dokumen
k. Penentuan CPCL Sarana Produksi Pertanian TA. 2025 sebanyak 1 Dokumen.
l. Penentuan CPCL Bantuan Alat dan Mesin Pasca Panen TA. 2025 sebanyak 1 Dokumen.
m. Penentuan CPCL Bantuan Bibit Tanaman untuk Diversifikasi Tembakau TA. 2025 sebanyak 1 Dokumen.

4. Untuk pencapaian produksi komoditi hortikultura dapat disampaikan sebagai berikut :

Uraian	Produksi			
	2024	2025	%	Lebih/kurang

Tomat	2,40	3,40	2.125,00 %	51,00
Cabai	57,70	19,80	-65,68 %	-37,90
	60,10	**73,20**	**10898,50**	**13,1**

Tabel 12. Pencapaian Produksi Tanaman Hortikultura di Kota Bima Tahun 2025

Komoditi hortikultura yaitu tomat, mengalami kenaikan produksi dari tahun sebelumnya sebesar 51,00 ton atau mengalani kenaikan sebesar 2.125 %

Tanaman Hortikultura lainnya yaitu cabai mengalami penurunan produksi di tahun ini sebesar 65,68% atau sebesar 37,90 Ton. Peningkatan produksi ini juga disebabkan oleh adanya peningkatan luas tanam dan panen dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, ditambah lagi sering terjadinya inflasi pada 2 (dua) komoditi tersebut yang akhirnya mengakibatkan masyarakat dengan kesadaran tinggi mulai menanam tanaman ini sebagai konsumsi rumah tangga yang menjanjikan penghasilan.

Produksi Tanaman Tomat. Produksi tomat tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2.125,00 % dimana pada tahun 2024 produksi tomat di Kota Bima sebesar 2,40 ton dan pada tahun 2025 sebesar 53,40 ton. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambah luas panen tanaman tomat dari tahun sebelumnya. Adanya fluktuasi harga pada komoditi tomat yang berkisar Rp. 20.000 – Rp. 50.000 per kilogram dibulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Peningkatan produksi ini juga disebabkan oleh adanya peningkatan luas tanam dan panen dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan, berupa pendampingan Peningkatan Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Berikut akan dibahas pertumbuhan produksi perkebunan, dimana komoditi yang menjadi objek adalah Tembakau , Mete dan Kelapa.

Dinas Pertanian Kota Bima untuk sub sektor perkebunan diperoleh dengan menjumlahkan produksi 3 (tiga) komoditi utama sub sektor perkebunan yaitu tembakau, mete dan kelapa. Tahun 2025, capaian produksi komoditi tembakau sebesar 154,54 ton dari yang ditargetkan 91,00 ton atau mengalami peningkatan sebesar 63 ton dengan capaian sebesar 169,82%. Secara rinci capaian produksi komoditi perkebunan dapat disampaikan sebagai

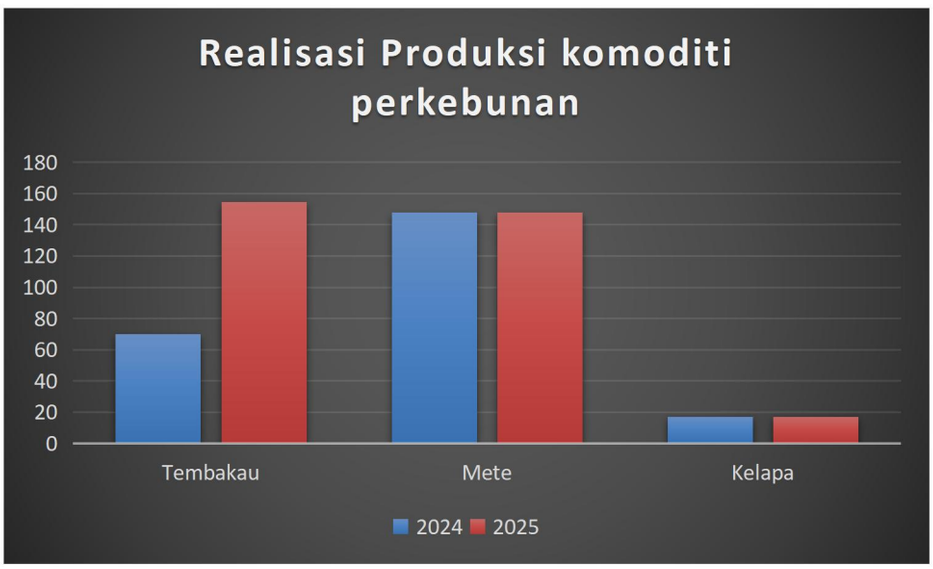
Uraian	Produksi			
	2024	2025	%	Lebih/kurang
Tembakau	70,00	154,54	120,76 %	84,54
Mete	148,00	148,00	0,00 %	0,00

Kelapa	17,00	17,00	0,00%	0,00
	235,00	319,54	120,76	84,54

T

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Produksi komoditi perkebunan secara umum dapat dikatakan meningkat sebesar 120,76& dengan kenaikan signifikan terjadi pada komoditi tembakau sebanyak 84,54 ton dari tahun 2024.

Grafik 7. Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan Tahun 2024- 2025

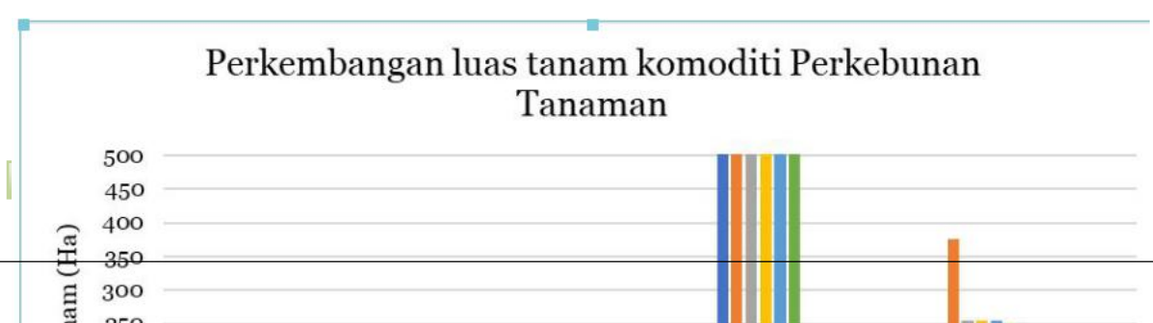


Grafik 7 . Perkembangan Produksi Komoditi perkebunan Tahun 2024- 2025

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan produksi komoditi perkebunan yang paling dominan adalah tembakau dengan kenaikan 84,54 ton di tahun 2025 .

Pencatatan luas tanam, produktivitas dan tingkat produksi tanaman perkebunan selama beberapa tahun ini sedikit mengalami kendala dalam memperoleh data yang valid dan akurat yang dikarenakan oleh PPL WKPP/mantri statistik tidak melaporkan secara rutin dan tepat waktu tentang luas tanam serta luas panen yang terjadi di wilayah kerjanya.

a). Perkembangan capaian realisasi luas tanam komoditas perkebunan tanaman tahunan dalam 5 tahun terakhir.



Untuk tanaman tahunan seperti contoh Kelapa dan Jambu mete

Grafik 8.Perkembangan luas tanam komoditi Perkebunan Tanaman Tahunan.

b) Perkembangan capaian realisasi luas tanam komoditas perkebunan tanaman musiman dalam 5 tahun terakhir



	2021	2022	2023	2024	2025	Rerata
Tebu	0	0	0	0	0	0
Kapas	0	0	0	0	0	0
Wijen	7	7	3	0	0	3,4
Tembakau Rakyat	6	8	16	54	94,5	35,7
Jarak Kepyar	0	0	0	0	0	0

Grafik 9. Perkembangan Luas tanam komoditi perkebunan tanaman musiman di Kota Bima Tahun 2021-2025.

f. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

Secara keseluruhan realisasi komoditi perkebunan pada tahun

2025 cukup tinggi. Hal ini dikarenakan adanya penambahan luas lahan terutama pada tanaman tembakau serta Pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber air irigasi untuk lahan tadah hujan yang potensial untuk pengembangan tanaman perkebunan serta memaksimalkan sentra produksi tanaman perkebunan.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Komoditi Perkebunan Tahun selama 5 tahun terakhir (2021-2025)

Komoditi	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
Tembakau	3,9	2,05	17,82	70,00	91,00	154,54
Jambu Mente	134,51	138,77	147,52	148,00	149,18	148,00
Kelapa	15,06	16,2	17,06	17,00	17,02	17,00
Jumlah	153,47	157,02	182,4	235,00	257,20	319,54

Tabel di atas menunjukan bahwa dari 3 (tiga) komoditi tanaman perkebunan secara keseluruhan tahun 2025 realisasinya yang paling tinggi pada 5 tahun terakhir. Tembakau menjadi komoditi dengan peningkatan produksi yang sangat signifikan dikarenakan kegiatan pada Bidang Perkebunan pada tahun 2025 dengan memanfaatkan dana APBD yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), yang digunakan untuk peningkatan mutu hasil tembakau dengan cara menambah luas lahan penanaman tembakau, memberikan bantuan sarana dan prasarana yang menunjang bagi komoditi tembakau seperti bibit, pupuk, obat-obatan, irigasi tanah dangkal (irdal), alat perajang, kerata sorong, pressbox dan alat-alat penunjang budidaya tembakau lainnya.

Kelapa cenderung tidak mengalami kenaikan dan penurunan produksi pada akhir tahun Renstra. Perlu menjadi catatan bahwa komoditi tanaman pertanian khususnya komoditi perkebunan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal seperti kondisi pasar (*supply demand*) dan cuaca termasuk perubahan kebijakan dan dukungan/bantuan pemerintah. Faktor-faktor tersebut tentunya akan berkontribusi terhadap pergeseran animo masyarakat terhadap komoditi yang diusahakan. Faktor lain adalah masih rendahnya animo masyarakat dalam mengusahakan komoditi perkebunan sebagai akibat dari masih rendahnya harga dari beberapa komoditi tersebut, untuk komoditi perkebunan lahannya masih bersaing dengan komoditi tanaman pangan (padi dan jagung) sehingga perlu upaya khusus dalam pemberdayaan petani untuk membentuk kawasan khusus untuk produksi tanaman perkebunan.

g. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Standar Regional Dan Nasional

Perbandingan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian Kota Bima untuk 3 (tiga) komoditi utama tanaman perkebunan dibandingkan dengan target regional (provinsi) dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Produksi Komoditi Utama Tanaman Perkebunan Kota Bima dengan Target Provinsi dan Nasional (Ton)

Komoditi (Ton)	Realisasi Kota Bima(Ton)	Realisasi Provinsi (Ton)	% Thdp Realisasi Provinsi	Target Nasional (Ton)	% Thdp Realisasi Nasional
Tembakau	154,54	16.951,82	0,91%	234.139	0,07%
Jambu Mente	148,00	11.747,60	1,26%	148.381	0,10%
Kelapa	17,00	48.003	0,04%	2.997.012	0,0006%
Jumlah	**319,54**	**76.702,42**	**0,42%**	**3.602.242**	**0,009%**

Tabel di atas menunjukkan bahwa posisi produksi 3 (tiga) komoditi perkebunan Kota Bima hanya menyumbang 0,42% terhadap target produksi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 0,009%terhadap target produksi nasional dari sub sektor tanaman perkebunan. Sumbangan terbesar diperoleh dari komoditi mete sebesar 1,26% untuk target Provinsi dan 0,10% untuk target Nasional.

Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan tidak mengalami peningkatan atau penurunan karena produksi tahun 2024 dan 2025 komoditi kelapa sebesar 17 ton, demikian juga dengan komoditi jambu mete dari tahun 2024 hingga 2025 tetap sebesar 148 ton . Peningkatan luas tanam dan produksi pada tanaman perkebunan semusim seperti tembakau rakyat dari luas tanam seluas 54 Ha pada tahun 2024 menjadi 94,5 Ha pada tahun 2025, hal ini sangat berpengaruh terhadap peningatan produksi tembakau tersebut dari 70 ton pada tahun 2024 menjadi 154,54 ton pada tahun 2024 atau terjadi peningkatan 120,76 % dari tahun sebelumnya.

Jika dilihat per komoditi perkebunan baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim tidak ada peningkatan dan penurunannya yang signifikan dan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Komoditi kelapa dalam tidak mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun sebelumnya.
2. Produksi kopi pada tahun 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya seluas 5 Ha. Hal tersebut lebih disebabkan karena faktor budidaya yang kurang intensif oleh petani, karena tanaman kopi belum dijadikan sebagai tanaman komoditi utama dalam berusahatani oleh petani.

   Komoditi tanaman kopi yang memberikan hasil yang agak lama mebuat petani tidak terlalu intensif mengusahakannya dibandingkan

dengan tanaman semusim yang memiliki peluang pasar yang bagus seperti tanaman jagung. Hal ini merupakan salah satu sebab kenapa tanaman kopi tidak bertambah luas tanamnya pada tahun 2025 ini.

3. Produksi tanaman kapuk dari pada tahun 2025 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1 ton demikian pula pada tahun 2024.
4. Komoditi Lontar tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1 ton. Luas tanam komoditi ini juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2024 yaitu seluas 7 Ha pada dua tahun terakhir. Penurunan luas tanam ini disebabkan semakin bertambahnya tanaman yang sudah tidak menghasilkan didilakukan penebangan oleh pemiliknya sementari upaya penanaman kembali tanaman baru tidak dilakukan. Sehingga menyembabkan tidak terjadi penambahan jumlah produksi. Pada beka areal tanaman yang ditebang sering juga dialihfungsikan menjadi tempat mendirikan bangunan / pemukiman bagi pemiliknya. Dari tanaman lontar nilai jual yang dapat dihasilkan oleh petani yaitu dari buah lontar dan minuman dari lontar.
5. Komoditi Jambu mete pada tahun 2025 tidak mengalami peningkatan atau penurunan produksi dari tahun sebelumnya yaitu stagnan di angka 148 ton. Kenaikan atau penurunan produksi dapat disebabkan oleh faktor iklim yang mendukung, juga disebabkan oleh peningkatan luas tanaman dari tahun sebelumnya dan bertambahnya jumlah tanaman yang sudah menghasilkan. Upaya peningkatan produksi pada komoditi jambu mete masih dapat ditingkatkan seiring terjaminnya pasar dan bagusnya harga pasar ditingkat petani, harga pasar ditingkat petani saat ini sekitar Rp. 16.500 - Rp. 20.000, kalau harga dapt ditingkatkan di atas Rp. 20.000, petani akan berusahatani jambu mete secara intensif. Oleh karena itu penngkatan mutu hasil tanaman jambu mete akan terus dilakukan.
6. Komoditi Asam pada tahun 2025 tidak mengalami peningkatan atau penurunan produksi, hal ini lebih disebabkan faktor iklim dan cuaca yang tidak terlalu menguntungkan untuk pembungaan dan pembuahan, karena asam tidak terlalu intensif diusahakan oleh petani.
7. Komoditi Kemiri pada tahun 2025 tidak mengalami peningkatanatau penurunan produksi. Hal ini lebih disebabkan faktor iklim dan cuaca yang tidak menguntungkan untuk pembungaan dan pembuahan kemiri, karena kemiri tidak terlalu intensif diusahakan oleh petani.
8. Komoditi Pinang pada tahun 2025 tidak mengalami peningkatan atau penurunan produksi. Hal ini lebih disebabkan faktor iklim dan cuaca yang menguntungkan untuk pembungaan dan pembuahan

pinang, karena kemiri tidak terlalu intensif diusahakan oleh petani.

9. Komoditi Wijen yang merupakan komoditi perkebunan tanaman semusim pada tahun 2024 mengalami penurunan produksi malah tidak berproduksi sama sekali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih terdapat 2 ton produksi sementara untuk tahun 2024 sama sekali tidak ada produksi wijen di Kota Bima.

10. Komoditi Tembakau rakyat, yang merupakan tanaman semusin yang menjadi komoditi primadona pada 2 (dua) tahun terakhir, pada tahun 2024 mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, yaitu dari 70,00 ton pada tahun 2024 menjadi 154,54 ton di tahun 2025, atau mengalami peningkatan sebesar 120,76 %. peningkatan produksi ini disebabkan karena bertambahnya luas tanam dan luas panen tanaman tembakau pada tahun 2025 yaitu dari 54 Ha menjadi 94,5 Ha. Pertambahan luas tanam tanaman tembakau pada tahun 2025 karena adanya dukungan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mana peruntukannya adalah untuk meningkatkan mutu hasil tembakau dan upaya untuk mendapatkan mitra petani dangan perusahaan pembeli tembakau sehingga hasil panen tembakau rakyat dapat semuanya diserap oleh pasar. Serta pendampingan yang intens dari aparat pada bidang perkebunan, PPL dangan tenaga pendamping dari perusahaan mitra petani.

Upaya peningkatan produksi tanaman perkebunan terus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima melalui perbanyakan benih/bibit yang akan disalurkan kepada masyarakat dan juga melalui perbanyakan sentra-sentra produksi tanaman perkebunan.

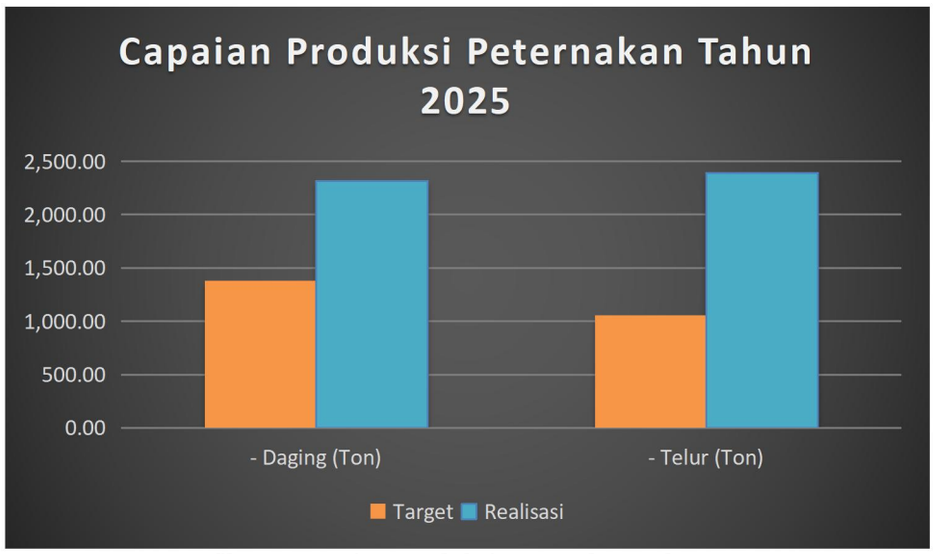
Dinas Pertanian Kota Bima untuk sub sektor Peternakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. pada sub sektor peternakan diperoleh dengan menjumlahkan produksi 2 (dua) komoditi utama sub sektor peternakan yaitu produksi daging dan telur. Tahun 2025, capaian produksi hasil peternakan sebesar 4.709,48 ton dari yang ditargetkan 2.433,17 ton atau capaiannya sebesar 778,26%. Produksi telur merupakan produksi peternakan yang mengalami peningkatan yang cukup siginiffikan dengan peningkatan produksi telur dari target 1.053,93 ton menjadi 2.392,60 ton. Secara rinci capaian indikator dis baik berupa pakan maupun sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 15. Target dan Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produksi Peternakan Tahun 2025

Uraian	Target	Realisasi	% Capaian
- Daging (Ton)	1.379,24	2.316,88	167,98%
- Telur (Ton)	1.053,93	2.392,60	227,02%
JUMLAH	**2.433,17**	**4.709,48**	**778,26%**

Tabel di atas menunjukkan Produksi telur merupakan penyumbang terbesar capaian peningkatan produksi peternakan dengan capaian 227,02% hampir sama dengan realisasi Daging yang mengalami peningkatan diatas 100% dan dapat dikatakan **SANGAT BERHASIL.**



Grafik 10. Capaian Produksi Peternakan Tahun 2025

h. Perbandigan Realisasi Terhadap Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi produksi peternakan secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.



Grafik 11. Perkembangan Produksi Hasil Peternakan Tahun 2021-2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan produksi hasil peternakan menunjukkan kecenderuangan peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi produksi telur merupakan penyumbang

tertinggi atas peningkatan produksi sub sektor peternakan. Hal ini nampak pada tahun 2025 bahwa peningkatan produksi telur cukup signifikan dengan meningkatnya animo dan perhatian pemerintah terhadap budidaya telur akibat meningkatnya tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat serta meningkatnya permintaan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Peningkatan produksi telur juga ditopang oleh peningkatan populasi ternak ayam, tercatat pada tahun 2024 populasi ayam sebesar 1.189.230 ekor meningkat menjadi 1.215.371 ekor pada tahun 2025. Produksi daging juga mengalami peningkatan didorong oleh tingginya permintaan sapi Bali sebagai ternak unggulan di Kota Bima, selain untuk memenuhi kebutuhan lokal sebagian sapi Bali ini akan dikirim keluar daerah di mana terdapat permintaan tinggi untuk suplai sapi potong ke daerah lain. Pada tahun 2025 Kota Bima mengirim sebanyak 2.517 ekor sapi ke daerah lain sesuai dengan kuota yang yang telah disepakati dengan Pemerintah Provinsi. Populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, untuk ternak sapi pada tahun 2024 populasinya sebesar 27.698 naik menjadi 28.146 pada tahun 2025, kerbau dari 613 menjadi 618 dan kuda dari 1.448 pada tahun 2024 menjadi 1.593 pada tahun 2025

i. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Hasil Peternakan Tahun 2024 Terhadap Target Renstra (Ton)

Komoditi	Realisasi 2025	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Daging	2.316,88	1.379,24	1.599,92	1.855,91	2.142,76	2.470,76
Telur	2.392,60	1.053,93	1.222,56	1.418,17	1.645,07	1.908,29
Jumlah	**4.709,48**	**2.433,17**	**2.822,48**	**3.274,07**	**3.787,83**	**4.379,05**

Secara keseluruhan, total realisasi kedua komoditi jauh melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa kinerja produksi atau capaian program pada tahun 2025 sangat baik karena melampaui target yang direncanakan. Baik komoditi daging maupun telur pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga total capaian juga berada di atas target. Ini menunjukkan bahwa realisasi produksi atau kinerja program pada tahun tersebut sangat optimal.

j. Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Target Standar Regional dan Nasional

Perbandingan indikator kinerja sasaran Dinas Pertanian Kota Bima untuk 2 (dua) komoditi utama hasil peternakan dibandingkan dengan target regional (provinsi) dan target nasional dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan Produksi Hasil Peternakan Kota Bima dengan Target Provinsi dan Target Nasional (Ton)

Komoditi (Ton)	Realisasi Kota Bima (Ton)	Target Provinsi (Ton)	% Thdp Target Provinsi	Target Nasional (Ton)	% Thdp Target Nasional
Daging	2.316,88	15.366,10	15,08%	4.900.000	0,047%
Telur	2.392,60	57.506,44	4,16%	6.800.000	0,035%
Jumlah	**4.709,48**	**72.872,54**	**19,24%**	**11.700.000,00**	**0,08%**

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi daging Kota Bima menyumbang 15,08% dari target produksi daging di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan telur sebesar 4,16%. Untuk skala Nasional Kota Bima menyumbang 0,047% dan 0,035% untuk produksi telur dalam memenuhi target produksi komoditas hasil peternakan di Indonesia.

k. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator

Pencapaian sasaran strategis "*Meningkatnya Produksi Peternakan*" dengan indikator kinerja meningkatnya produksi peternakan sudah melampaui target yang ditentukan yaitu capaian sebesar 227,02%. Hal tersebut dimungkinkan karena (1) Permintaan Pasar yang Tinggi: Meningkatnya permintaan pasokan sapi dari luar daerah terutama di Pulau Jawa dengan harga yang lebih tinggi memotivasi peternak untuk terus meningkatkan produksi (2) Peningkatan populasi ternak: Populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda) mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, untuk ternak sapi pada tahun 2024 populasinya sebesar 27.698 naik menjadi 28.146 pada tahun 2025, kerbau dari 613 menjadi 618 dan kuda dari 1.448 pada tahun 2024 menjadi 1.593 pada tahun 2025 (3) Terkendalinya penyakit ternak: Penanganan penyakit secara langsung ketika ada gejala penyakit pada ternak seperti penyakit scabies dan helmianthiasis,, bidang Peternakan dan Kesehatan hewan melakukan pengobatan langsung dan diberikan perawatan hingga sembuh. Untuk pencegahan penyakit Dinas Pertanian melakukan vaksinasi sebanyak 4.787 dosis untuk pencegahan penyakit AT/SE dan vaksinasi sebanyak 7.000 dosis untuk pencegahan penyakit PMK. (4). Pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis: Program makan bergizi gratis mendorong lonjakan kebutuhan akan komoditas peternakan khususnya daging dan telur ayam, potensi ini mendorong peternak dan pengusaha untuk meningkatkan produksinya.

.

3. Pencapaian Kinerja Rencana Strategis Organisasi

Mulai dari visi sampai dengan kegiatan terdapat hubungan turunan, sehingga turunan dengan yang diturunkan selaras dan mempunyai hubungan logis dan semua komponen di dalam renstra dapat diukur capaian kinerjanya. Komponen yang diukur kinerjanya hanya sasaran dan kegiatan. Akumulasi pencapaian sasaran, otomatis akan diwujudkan tujuan, akumulasi pencapaian tujuan tersebut bila berhasil maka secara otomatis berarti misi diemban dengan baik, dan bila misi dapat diemban dengan baik maka visi dapat diwujudkan. Semua komponen tersebut mempunyai kaitan logis dan sebagai strateginya adalah pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian tahun 2025 sesuai sasaran yang telah ditetapkan sudah mengacu pada sasaran dan target yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2025 sampai dengan 2029 dalam upaya pencapaian visi organisasi.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Oleh karenanya perumusan dan pencapaian indikator kinerja kegiatan diarahkan untuk pencapaian sasaran strategis. Artinya indikator kinerja kegiatan selaras dan mempunyai kaitan logis dengan indikator kinerja sasaran dan akumulasi pencapaian indikator kinerja kegiatan menghasilkan pencapaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dari 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan yang dilaksanakan, secara keseluruhan kegiatan tersebut efektif dalam menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditentukan dan telah dilaksanakan dengan baik dan efisien.

4. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima

Dalam menunjang pencapaian tujuan Dinas Pertanian Kota Bima pada tahun 2025 telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan. Adapun jumlah programnya adalah sebanyak 7 (tujuh) yang ditunjang oleh kegiatan sebanyak 19 (sembilan belas) dan sub kegiatan sebanyak 43 (empat puluh tiga). Dan tingkat capaian program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2025

Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
	1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Produksi Pertanian	I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9,28	%	5,97	64,33%
			Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	9,45	%	35,97	380,63%
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	16,00	%	124,52	778,25%
	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	2	Laporan	2	100,00%
	1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	3	Laporan	3	100,00%
	1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1	Laporan	1	100,00%
	2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1	Laporan	1	100,00%
	2.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2	Dokumen	2	100,00%

Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
	3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	6	Laporan	6	100,00%
	3.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil	4	Laporan	4	100,00%
	3.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit hijauan Pakan Ternak yang beredar	2	Laporan	2	100,00%
	4	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	4	Laporan	4	100,00%
	4.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4	Laporan	4	100,00%
	II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50	%	50	100,00%
	1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	23	Paket	21	91,30%
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung lainnya	23	Dokumen	21	91,30%
	III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	58,36	%	16,32	27,96%

Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
	1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2	Laporan	2	100,00%
	1.1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5	Wilayah	5	100,00%
	1.2	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Wilayah	5	100,00%
	2	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50	%	67,8	135,60%
	2.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	Laporan	1	100,00%
	3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	50	%	50	100,00%
	3.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produks Hewan	1	Laporan	1	100,00%
	3.2	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap usaha produk hewan	25	Unit Usaha	21	84,00%
	IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100	%		0,00%
	1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20	Dokumen	8	40,00%

Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
	1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20	Dokumen	8	40,00%
	V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	%	100	100,00%
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100	%	100	100,00%
	1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	68	Ha	183	269,12%
	1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66	Ha	181	274,24%
	1.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2	Ha	2	100,00%
	V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20	%	20	100,00%
	1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	47	Unit	47	100,00%
	1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47	Unit	49	104,3%
	1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16	Kelompok	16	100,00%

Sasaran Strategis	No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian
	1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3	Unit	3	100,00%

5. Perbandigan Realisasi Kinerja Terhadap Target Renstra Secara keseluruhan realisasi Program kegiatan Dinas Pertanian dapat disajikan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025		Realisai Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	
					Kinerja	Pendanaan	Kinerja	Pendanaan
Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGA DAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	9,28	9,28	4.305.346.090,0	5,97	4.021.811.628,00
			Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	9,45	9,45		35,97	
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	16,00	16,00		124,52	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian*	*2 Laporan*	*2 Laporan*	*3.478.938.690,00*	*2 Laporan*	3.295.036.709,00
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	3 Laporan	3 Laporan	3.337.398.690,00	3 Laporan	3.161.401.899,00

		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 laporan	1 Laporan	141.540.000,00	1 Laporan	133.634.810,00
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	1 Laporan	4.242.300,00	1 Laporan	982.299,00
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	2 Dokumen	4.242.300,00	2 Dokumen	982.299,00
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	6 Laporan	6 Laporan	713.569.400,00	6 Laporan	699.013.350,00
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/tanaman Skala Kecil	4 laporan	4 laporan	708.622.400,00	4 laporan	696.353.350,00
		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit hijauan Pakan Ternak yang beredar	2 laporan	2 laporan	4.947.000,00	2 laporan	2.660.000,00

		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis*	*4 laporan*	*4 laporan*	*54.925.700,00*	*4 laporan*	*26.779.270,00*
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 laporan	41 laporan	*54.925.700,00*	4 laporan	26.779.270,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	58,36	58,36	135.692.097,00	58,36	116.442.497,00
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2 Laporan	2 Laporan	68.298.842,00	2 Laporan	*59.037.242,00*
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	5 Wilayah	11.348.747,00	5 Wilayah	7.744.147,00

		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Wilayah	5 Wilayah	56.950.095,00	5 Wilayah	51.293.095,00
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani*	*50%*	*50%*	*20.692.755,00*	*67,8%*	17.919.755,00
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	*20.692.755,00*	1 Laporan	17.919.755,00
		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya*	*50%*	*50%*	*46.700.500,00*	*50%*	39.485.500,00
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produks Hewan*	1 Laporan	1 Laporan	*14.000.600,00*	1 Laporan	10.247.600,00
		Pengawasan Unit usaha Produk Hewan	*Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap usaha*	*25 unit usaha*	*25 unit usaha*	*32.699.900,00*	25 Unit Usaha	29.237.900,00
		PROGRAM PERIZINAN PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100%	100%	36.346.000,00	40%	27.832.333,00

		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian*	20 Dokumen	20 Dokumen	36.346.000,00	15 Dokumen	27.832.333,00
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	20 Dokumen	36.346.000,00	15 Dokumen	27.832.333,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100	100	24.521.000,00	100	21.885.765,00
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100	100		100	
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	68 Ha	68 Ha	24.521.000,00	183 Ha	21.885.765,00
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66 Ha	66 Ha	16.794.500,00	181 Ha	14.376.265,00
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	2 Ha	7.726.500,00	2 Ha	7.509.500,00

		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50%	50%	3.297.208.075,00	50%	3.245.225.652,00
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	*23 Paket*	*23 Paket*	3.297.208.075,00	21 Paket	3.245.225.652,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung lainnya	23 Dokumen	23 Dokumen	3.297.208.075,00	21 Dokumen	3.245.225.652,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20%	20%	718.144.220,00	20%	556.130.427,00
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	*47 unit*	*47 unit*	718.144.220,00	*47 unit*	556.130.427,00
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 unit	47 unit	366.295.700,00	49 unit	276.904.700,00
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 kelompok	16 kelompok	282.760.720,00	16 kelompok	221.590.775,00
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	3 Unit	69.087.800,00	3 unit	57.634.952,00
JUMLAH KESELURUHAN						**8.463.587.482,00**		**7.989.328.302,00**

6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab dari berhasil dicapainya beberapa sasaran strategis yang telah ditentukan dipengaruhi oleh banyak faktor, dan faktor-faktor tersebut antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya komitmen yang baik beberapa stakeholder yang tergabung dalam rumpun hijau dalam melahirkan beberapa program/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani serta peningkatan kualitas sumber daya petani dan aparatur pemerintah;
2. Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mempertahankan status lahan pertanian dalam upaya mempertahankan luas tanam pertanian;
3. Adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang penebangan liar pohon/tanaman dalam upaya melestarikan sumber-sumber mata air yang dapat dipergunakan sebagai sumber air irigasi pertanian, perkebunan dan kebutuhan peternakan;
4. Adanya partisipasi dan komitmen dari para penyuluh dan tenaga teknis dinas untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dan ternak dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
5. Ketersediaan anggaran yang cukup dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan;

Penyebab dari gagal dicapainya beberapa sasaran strategis yang telah ditentukan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Akibat laju pembangunan daerah perkotaan yang begitu pesat, pada beberapa lokasi, lahan-lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun mengalami penyusutan karena masih tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;
2. Tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian;
3. Masih kurangnya kesadaran petani dan peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai anjuran;
4. Rendahnya mutu genetik/kualitas ternak terutama ternak besar (sapi, kerbau) sehingga produksi daging yang dihasilkan kurang optimal dalam memenuhi permintaan pasar;
5. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur, petani dan peternak;

6. Sarana transportasi bagi tenaga teknis lapangan yang masih terbatas.

6. Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam laporan ini adalah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam menunjang pencapaian sasaran yang diinginkan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Pertanian Kota Bima berjumlah 139 orang dengan uraian sebagai berikut :

1.	Jabatan struktural eselon II	:	1 orang
2.	Jabatan struktural eselon III	:	6 orang
3.	Jabatan struktural eselon IV	:	13 orang
4.	Jabatan fungsional	:	77 orang
5.	Staf PNS	:	21 orang
6.	Staf Non PNS	:	32 orang
7.	THL PPL/Drh./SMD	:	15 orang
	Jumlah	:	165 orang

Sedangkan dukungan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Bima adalah dengan uraian sebagai berikut :

1.	Lahan Sawah Irigasi	:	2.073 Ha
2.	Lahan Sawah Tadah Hujan	:	349 Ha
3.	Tegal / Kebun	:	5.897 Ha
4.	Ladang/ Huma	:	1.299 Ha
5.	Perkebunan	:	10 Ha
6.	Sementara Tidak Diusahakan	:	5 Ha
7.	Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat	:	2.397 Ha
8.	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	:	6 Ha
9.	Hutan Negara	:	8265 Ha
9.	Lain-lain	:	107 Ha
	Jumlah	:	20.408 Ha

7. Evaluasi Kinerja Proram/Kegiatan

Evaluasi yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal, yaitu penilaian secara mandiri oleh Dinas Pertanian terhadap pengukuran kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan guna memberi penjelasan lebih lanjut tentang :

- Efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan
- Efektivitas pencapaian sasaran

Dalam evaluasi ini dilakukan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Dalam evaluasi juga diuraikan mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan faktor-faktor yang

menimbulkan kegagalan, serta langkah perbaikan (pemecahan masalah) yang akan dilakukan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

1. Efektivitas Individual Kegiatan

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektivitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome, benefit* dan *impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektivitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu: (a) Efektivitas individual kegiatan; (b) Efektivitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Efektivitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target outcome/benefict/impact yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas terkait dengan pencapaian sasaran merupakan kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya.

Selama tahun 2025 Dinas Pertanian melaksanakan 18 (delapan) kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan 94,05% telah dilaksanakan secara efektif.

1) Kegiatan yang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *outcome/benefit/ impact* 100% atau lebih. Selama tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif adalah sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan.

2) Kegiatan yang Kurang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan kurang efektif apabila hanya mampu mencapai angka rata- rata indikator *outcome/benefit/impact* <100% s.d 80%. Selama tahun 2025 tidak ada kegiatan yang kurang efektif.

3) Kegiatan yang Tidak Efektif

Dalam laporan ini, kegiatan dikategorikan tidak efektif apabila hanya mampu mencapai angka rata-rata indikator *outcome/benefit/impact kurang* dari 80%. Selama tahun 2025 ada 1 (satu) kegiatan yang tidak efektif.

4) Kegiatan yang Tidak Diketahui Efektivitasnya

Kegiatan yang tidak diketahui efektivitasnya adalah kegiatan yang tidak mempunyai indikator *outcome/benefit/ impact*, karena pengelola kegiatan belum mampu merumuskan *outcome/benefit/impact* dari kegiatan tersebut. Selama tahun 2025 tidak terdapat kegiatan yang tidak diketahui efektivitasnya.

2. Efisiensi Kegiatan

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Angka capaian efisiensi diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input. Angka capaian efisiensi tersebut kemudian dibandingkan dengan standar efisiensi. Dalam laporan ini standar efisiensi yang dipakai adalah indeks efisiensi target/rencana/ anggaran, yaitu 1 (satu). Bila angka capaian efisiensi sama atau lebih besar dari standar efisiensi, maka kegiatan yang bersangkutan dianggap efisien. Sebaliknya bila angka capaian efisiensi lebih kecil dari standar efisiensi, maka kegiatan tersebut dianggap tidak efisien.

Selama tahun 2025, dari sejumlah 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan, semua kegiatan (100,00%) telah dapat dilaksanakan dengan efisien, dan tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2025, kegiatan Dinas Pertanian Kota Bima dibiayai dengan dana keseluruhan sebesar Rp. **22.390.597.091,00** dengan realisasi sebesar Rp. **21.059.342.032,00** atau 94,05%. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai realisasi 100%. Selisih dana sebesar Rp. **1.331.255.059,00** atau **5,95%** telah dikembalikan ke kas daerah.

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2025 untuk mendanai 7 (tujuh) program yang menyebar di 18 (delapan belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan, secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 19. Penyerapan Anggaran Per Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
a.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**13.927.009.609,00**	**13.070.013.730,00**	**856.995.879,00**	**93,84**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**33.888.100,00**	**31.736.347,00**	**2.151.753,00**	**93,65**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.309.500,00	7.689.252,00	620.248,00	92,54
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.778.600,00	3.620.000,00	158.600,0	95,80
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.118.000,00	3.934.000,00	184.000,00	95,53
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.476.000,00	1.307.857,00	168.143,00	88,61
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.498.000,00	1.305.000,00	193.000,00	87,12
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	605.000,00	537.000,00	68.000,00	88,76
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.103.000,00	13.343.238,00	759.762,00	94,61

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.029.828.826,00**	**12.196.268.487,00**	**833.560.339,00**	**93,60**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.782.470.726,00	11.964.172.844,00	818.297.882,00	93,60
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	244.440.000,00	229.526.500,00	14.913.500,00	93,90
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.097.000,00	996.000,00	101.000,00	90,79
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	670.100,00	576.000,00	94.100,00	85,96
2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.151.000,00	997.143,00	153.857,00	86,63
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.356.000,00**	**5.311.000,00**	**45.000,00**	**99,16**
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.356.000,00	5.311.000,00	45.000,00	99,16
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**11.148.100,00**	**10.626.671,00**	**521.429,00**	**95,32**
4.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.148.100,00	10.626.671,00	521.429,00	95,32
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**347.498.583,00**	**332.785.701,00**	**14.712.882,00**	**95,76**
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi	2.221.000,00	2.102.991,00	118.009,00	94,69

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.285.800,00	136.638.104,00	647.696,00	99,53
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.142.500,00	9.318.443,00	3.824.057,0	70,90
5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100.821.283,00	90.753.188,00	10.068.095,00	90,01
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.124.000,00	92.115.175,00	8.825,00	99,99
5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.904.000,00	1.857.800,00	46.200,00	97,57
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**395.020.000,00**	**393.329.665,00**	**1.690.335,00**	**99,57**
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.000.000,00	92.793.665,00	206.335,00	99,78
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	302.020.000,00	300.536.000,00	1.484.000,00	99,51
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**104.270.000,00**	**99.955.859,00**	**4.314.141,00**	**95,86**
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.940.000,00	88.625.859,00	4.314.141,00	95,36
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.330.000,00	11.330.000,00	0,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
b.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**4.251.676.090,00**	**4.021.811.628,00**	**229.864.462,00**	**94,59**
8	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.478.938.690,00	3.295.036.709,00	183.901.981,00	94,71
8.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3.337.398.690,00	3.161.401.899,00	175.996.791,00	94,73
8.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	141.540.000,00	133.634.810,00	7.905.190,00	94,41
9	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**4.242.300,00**	**982.299,00**	**3.260.001,00**	**23,15**
9.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4.242.300,00	982.299,00	3.260.001,00	23,15
10	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**713.569.400,00**	**699.013.350,00**	**14.556.050,00**	**97,96**
10.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	708.622.400,00	696.353.350,00	12.269.050,00	98,27

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
10.2	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	4.947.000,00	2.660.000,00	2.287.000,00	53,77
11	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**54.925.700,00**	**26.779.270,00**	**28.146.430,00**	**48,76**
11.1	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	54.925.700,00	26.779.270,00	28.146.430,00	48,76
c.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**3.297.208.075,00**	**3.245.225.652,00**	**51.982.423,00**	**98,42**
13	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.297.208.075,00	3.245.225.652,00	51.982.423,00	98,42
13.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3.297.208.075,00	3.245.225.652,00	51.982.423,00	98,42
d.	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**135.692.097,00**	**116.442.497,00**	**19.249.600,00**	**85,81**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
14	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**68.298.842,00**	**59.037.242,00**	**9.261.600,00**	**86,44**
14.1	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	11.348.747,00	7.744.147,00	3.604.600,0	68,24
14.2	"Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah	56.950.095,00	51.293.095,00	5.657.000,00	90,07
15	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**20.692.755,00**	**17.919.755,00**	**2.773.000,00**	**86,60**
15.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	20.692.755,00	17.919.755,00	2.773.000,00	86,60
16	**Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**46.700.500,00**	**39.485.500,00**	**7.215.000,00**	**84,55**
16.1	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	14.000.600,00	10.247.600,00	3.753.000,00	73,19
16.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	32.699.900,00	29.237.900,00	3.462.000,00	89,41
e. **PROGRAM**		**24.521.000,00**	**21.885.765,00**	**2.635.235,00**	**89,25**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
17	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**24.521.000,00**	**21.885.765,00**	**2.635.235,00**	**89,25**
17.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	16.794.500,00	14.376.265,00	2.418.235,00	85,60
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	7.726.500,00	7.509.500,00	217.000,00	97,19
f.	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**36.346.000,00**	**27.832.333,00**	**8.513.667,0**	**76,58**
18	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**36.346.000,00**	**27.832.333,00**	**8.513.667,0**	**76,58**
18.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	36.346.000,00	27.832.333,00	8.513.667,0	76,58

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
g.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**718.144.220,00**	**556.130.427,00**	**162.013.793,00**	**77,44**
1	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**718.144.220,00**	**556.130.427,00**	**162.013.793,00**	**77,44**
19.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	366.295.700,00	276.904.700,00	89.391.000,00	75,60
19.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	282.760.720,00	221.590.775,0	61.169.945,00	78,37
19.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	69.087.800,00	57.634.952,00	11.452.848,00	83,42
TOTAL		**22.390.597.091,00**	**21.059.342.032,00**	**1.331.255.059,00**	**94,05**

Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2025 seperti yang tertera pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa secara garis besar tata kelola keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif serta telah meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan anggaran yang merugikan keuangan negara. Berikut dapat ditampilkan analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana pada Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2025. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Tabel Capaian Program dan Realisasi Anggaran.

No	Program	Capaian Program	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5,97 35,97 124,52	4.251.676.090,00	4.021.811.628,00
2	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100,00%	3.297.208.075,00	3.245.225.652,00
3	PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	27,96%	135.692.097,00	116.442.497,00
4	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100%	24.521.000,00	21.885.765,00
5	PERIZINAN USAHA PERTANIAN	40%	36.346.000,00	27.832.333,00
6	PENYULUHAN PERTANIAN	100%	718.144.220,00	556.130.427,00

Rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:
E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluara
CKi : Capaian keluaran i

* Rumus berdasarkan PMK No.214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Aggaran Negara/Lembaga.

*Batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

E = ((4.251.676.090x 0,96) – 4.021.811.628))+((3.297.208.075 x 1) - 3.245.225.652))+((135.692.097 x0,27)- 116.442.497))+ ((24.521.000 x 1)- 21.885.765))+((36.346.000 x 0,40)- 27.832.333))+((718.144.220 x 1)- 556.130.427)) X100%

(4.251.676.090x 0,96)+(3.297.208.075 x 1)+(135.692.097 x 0,27)+(24.521.000 x 1)+(36.346.000 x 0,40)+(718.144.220 x 1)

E = 2,24%

Berdasarkan perhitungan diatas bahwa Dinas Pertanian Kota Bima melakukan efisiesi anggaran sebesar 7,95%, ini masih termasuk dalam batas maksimal 20% dan batas minimal – 20% yang diharuskan oleh PMK No. 214 Tahun 2017.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima di masa-masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Total Belanja Daerah dalam APBD Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 sebesar Rp. 22.390.597.091,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 21.059.342.032,00 atau 94,05%. Total realisasi belanja yang mencapai 94,05% sampai dengan berakhirnya tahun anggaran menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun hal tersebut tidak mempengaruhi pencapaian sasaran dan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima secara signifikan.

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kota Bima Tahun Anggaran 2025 mencapai 103,85% yakni sebesar Rp. 244.103.500,00 dari target Rp 235.050.000,00. Pencapaian ini disumbang oleh beberapa unit potensi PAD yang mampu dimaksimalkan oleh Dinas Pertanian Kota Bima.

Walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 ternyata masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Oleh karena itu penyempurnaan strategi dimasa yang akan datang perlu dilaksanakan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka perencanaan jangka menengah daerah yang disusun mampu mewadahi setiap aspirasi seluruh masyarakat. Dengan menyempurnakan mekanisme perencanaan berbasis partisipasi masyarakat diharapkan Rencana Kinerja Tahunan melalui berbagai program dan kegiatan

benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, sehingga sasaran yang diharapkan dapat tercapai semaksimal mungkin.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2025 ini, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan sangat diharapkan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang.

Raba-Bima, Januari 2026
Kepala Dinas Pertanian Kota Bima,



ABDUL NAJIR, S.Pt,M.M.
NIP. 19741124 200312 1 007

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA BIMA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL KOTA BIMA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah Tuhan yang maha kuasa, Dinas Sosial Kota Bima dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Dinas Sosial Kota Bima atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), baik yang bersifat administrasi maupun substantif dalam tahun 2025.

Dalam laporan ini diuraikan mengenai deskripsi umum tentang organisasi, permasalahan yang dihadapi sesuai TUPOKSI, Perencanaan Kinerja, dan Laporan Kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama Tahun 2025. Oleh karena deksripsi dokumen LKIP ini sebagai perwujudan sikronisasi TUPOKSI SKPD, permasalahan SKPD dan Perencanaan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja yang diukur sesuai standar yang ditetapkan pada Dinas Sosial Kota Bima untuk anggaran Tahun 2025.

Demikian penyusunan laporan kami buat dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih.

Bima, Januari 2026
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,

H. Lalu Sukarsana, S.IP
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Ringkasan Eksekutif iii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Data umum organisasi 1
B. Aspek stratejik organisasi 1
C. Struktur organisasi 2
D. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangakat Daerah 4
E. Sumber daya organisasi 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
A. Rencana stratejik organisasi 6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial 11
C. Perjanjian Kinerja.....12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....14
B. Realisasi Keuangan ……..38

BAB IV PENUTUP 40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2025, diantaranya; *Pertama*, bahwa Dinas Sosial Kota Bima telah berhasil melaksanakan 4 (empat) program teknis yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang dirincikan ke dalam 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dan 1 (satu) program pendukung yang merupakan kegiatan rutin yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dirincikan ke dalam 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan yang ditetapkan sehingga berpengaruh pada peningkatan pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan; *Kedua*, bahwa jumlah anggaran dalam rangka peningkatan pencapaian anggaran pada Tahun 2025 sudah baik, dengan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar **Rp. 7.931.532.127,00**,- (*Tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 7.090.295.299,00,-** (*Tujuh miliar Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau capaian sebesar 89,39 %. Serta dana dari APBN dan Dekonsentrasi bidang Kesejahteraan Sosial mencapai sebesar **Rp. 25.854.255.000**.- (*Dua Puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) ,- dengan realisasi **Rp. 25.854.255.000**.- (*Dua Puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*),- *Ketiga b*ahwa dukungan sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) pada Dinas Sosial Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indikator sasaran strategis yang ada. Oleh karenanya dukungan sumber daya untuk peningkatan pencapaian indikator sasaran tersebut sangat mendukung peningkatan pencapaian indikator sasaran strategis tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Kedudukan Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2017 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Bima adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

B. ASPEK STRATEJIK DINAS SOSIAL

1. Lingkungan Intern

a. Daya dukung fasilitas seperti kantor, gudang tempat penitipan stock barang bantuan bencana/tanggap darurat bencana dan daya pendukung laptop/komputer.
b. Tugas pokok dan fungsi instansi yang merupakan dasar pokok dalam melaksanakan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kota Bima.
c. Jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sebanyak 42 orang.
d. Terdapat 1 (satu) unit mobil operasional dinas, 1 (satu) unit mobil tangki, 1 (satu) unit mobil dapur umum, 1 (satu) unit mobil rescue dan 60 (enam puluh) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu unit) motor trail.

2. Lingkungan Eksternal

a. Tersedianya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Yayasan, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Orsos, LSM, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
b. Tersedianya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di 41 Kelurahan di Kota Bima untuk melakukan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pelayanan pengaduan kesejahteraan sosial serta melakukan pendampingan penerimaan bantuan sosial bagi penerima manfaat.
c. Tersedianya potensi usaha ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan, kualitas dan modal usaha serta pangsa pasar sehingga pengembangan usaha ekonomi kerakyatan masyarakat dapat ditingkatkan.
d. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan masih kurang, sehingga masih perlu dimotivasi dan dibimbing agar masyarakat merasa terpanggil untuk melaksanakan pembangunan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Sosial Kota Bima Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

   Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Bima mempunyai fungsi:

   a. perumusan kebijakan bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sosial;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum permasalahan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bima dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kemiskinan	8,67 %	Menurunnya porsentase atau jumlah kemiskinan	Pelayanan terhadap keluarga miskin	Kondisi data yang kurang valid	Pelayanan terhadap keluarga miskin cenderung bias dan memicu konflik sosial.
Korban Bencana Alam dan bencana Sosial	540 Jiwa	Tertangani jumlah korban bencana alam dan bencana sosial	Pelayanan tanggap darurat terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Penanganani korban bencana menjadi kewenangan lintas sektor	Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial

E. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Bima memiliki 35 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 7 orang yang berstatus PPPK dengan kualifikasi sebagai berikut:

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jenis Kelamin		Golongan		
		SLTA	D2	D3	S1	S2	Pria	Wanita	II	III	IV
1	Dinas Sosial Kota Bima	5	0	1	34	2	21	21	7	29	6

Selain itu terdapat 13 orang tenaga honorer yang mendukung kegiatan-kegiatan kedinasan. Selain itu untuk mendukung kegiatan di Tingkat Kecamatan terdapat 5 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta 38 orang pendamping PKH dan untuk menyukseskan program di tingkat Kelurahan Dinas Sosial Kota Bima memiliki mitra kerja yakni 50 orang tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEJIK DINAS SOSIAL

Untuk mencapai optimalisasi kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama 5 (Lima) Tahun kerja dengan melihat potensi dan daya dukung baik internal maupun ekternal. Untuk itu dalam menyusun rencana strategis dinas sosial harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial merupakan penjabaran strategis operasional dari sasaran strategis Kota Bima tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima yang ringkasan adalah sebagai berikut.

Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029

Adapun visi Kota Bima untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah ***" Terwujudnya Kota Bima yang maju, Bermartabat dan Berkelanjutan "***

Visi ini memiliki tiga kata kunci yaitu: Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan. Masing-masing kata kunci ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

Maju: Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pembangunan yang merata, serta tingkat kemajuan ekonomi yang baik. Membangun daerah yang maju dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya, meningkatkan inovasi dan mendorong kolaborasi. Prinsip membangun daerah yang maju meliputi:

- Partisipatif
- Terpadu
- Menghargai keanekaragaman
- Mengintegrasikan tata ruang dengan pembangunan
- Menggunakan lahan secara efisien

• Meningkatkan swadaya masyarakat

Pembangunan daerah yang maju juga harus memenuhi indikator keberhasilan, seperti: Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks gini ratio (pemerataan penghasilan), Angka pengangguran rendah, dan Angka kemiskinan rendah.

Bermartabat:

Daerah yang bermartabat adalah daerah yang masyarakatnya memiliki martabat, yaitu masyarakat yang berdaya, berpendidikan, dan memiliki akses kesehatan yang memadai. Kata bermartabat juga merujuk kepada nilai-nilai yang kita anut yang menunjukkan eksistensi atau identitas kita sebagai masyarakat Bima yang Maja Labo Dahu.

Untuk mewujudkan daerah yang bermartabat, Pemerintah Daerah dapat melakukan berbagai program, seperti: Mengurangi angka pengangguran, Meningkatkan kualitas pendidikan, Membangun infrastruktur yang memadai, Menyediakan layanan kesehatan yang mutakhir, serta Meningkatkan daya saing masyarakat.

Berkelanjutan:

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan. Pembangunan ini juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan generasi masa depan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah: (1) Memaksimalkan sumber daya alam, (2) Tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, (3) Tidak ada pemborosan dalam penggunaan SDA, (4) Tidak ada polusi dan dampak lingkungan, dan (5) Meningkatkan useable resources. Tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

• Menjamin keutuhan lingkungan hidup;

• Menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan;

• Membangun bangsa yang sejahtera, demokratis, dan adil;

• Melindungi hak-hak generasi mendatang.

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka Sebagai perangkat dinas yang mengurusi bidang sosial dalam 5 (lima) tahun (2025-2029) periode RPJMD adalah sebagai Berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan secara umum pelaksanaan program atau kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bima yaitu :

"Menurunnya Tingkat Kemiskinan".

b. Sasaran

Adapun sasaran Dinas Sosial Kota Bima :

- Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bima memiliki tugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Koban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas (Cacat), Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), Korban Penyalagunaan Napza, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Keluarga Rentan, Eks. Pengidap Penyakit Kusta,dan Penduduk di Daerah Rawan Bencana.

Adapun hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	84%	85 %	86 %	87%	88%

2. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

1. Membangun sistem informasi yang baik dan transparan
2. Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Kebijakan

Kebijakan pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup:

1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.

3. Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat
4. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi serta mendata permasalahan sosial secara dini.

Adapun sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Dinas Sosial Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : ***Terwujudnya Kota Bima yang maju, Bermartabat dan Berkelanjutan*.**							
Tujuan		**Sasaran**		**Strategi**		**Kebijakan**	
(1)		**(2)**		**(3)**		**(4)**	
MISI V	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan						
I.	Menurunnya angka kemiskinan	1.	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	1.	Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui rehabilitasi pasca bencana	1.	Memberikan bantun kepada korban bencana pada masa tanggap darurat
		2.	Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.	Membangun sistem informasi yang baik dan transparan	1.	Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
						2.	Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.
						3.	Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial
				2.	Memberikan bantuan sosial bagi PPKS.	4.	Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat
				3.	Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	5.	Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL

Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bima telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperkuat dengan pernyataan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (terlampir) sebagai berikut :

No.	Kepala Dinas	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator	Target
1.	Esselon II	1. Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	1. Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah korban bencana yang menpatkan perlindungan sosial **dibagi** Total korban bencana	100%
		2. Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	Jumlah PPKS yg mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial **dibagi** Total PPKS	84 %

C. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bima maka semua ASN yeng menduduki esselon di lingkup Dinas Sosial Kota Bima harus memiliki Perjanjian Kinerja atas Indikator Kinerja masing-masing program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja (lampiran). Perjanjian Kinerja Dinas Sosial esselon II adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	1. Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %
2.	Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	84 %

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. 5.216.649.827	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	2. 147.533.200	
3.	Program Rehabilitasi Sosial	3. 810.800.00	
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4. 1.248.562.100	
5.	Program Penanganan Bencana	5. 507.986.200	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan program dalam rangka pencapian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur RENSTRA mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial yang mengaju pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan- kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA) berupa : input, output, dan outcome. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya dan juga mengukur seberapa efektifnya kegiatan – kegiatan tersebut sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan Organisasi:

Menurunnya angka kemiskinan.

Adapun indikator dari tujuan organisasi yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan target 7,82 %. Berikut tabel capaian tujuan organisasi Dinas Sosial Kota Bima :

Table Capaian Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya angka kemiskinan	1. Persentase angka kemiskinan	7,82 %

Pencapaian Sasaran Strategis :

Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adapun pengukuran kinerja dalam pencapaian Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bima, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. **Membandingkan antara tujuan dan realisasi kinerja Tahun ini**

a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target(%)	Realisasi	Capaian(%)
Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka kemiskinan	7,82	8,12	91,58
Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100	100	100
Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	84	84,60	100,71

Adapun tingkat pencapaian PPKS yang ditangani bahwa pada tahun 2025 terdapat 60.999 (84,60%) orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan jaminan kesejahteraan social dari jumlah 72.101 jiwa PPKS yang ada di Kota Bima. Dimana capaian tersebut melebihi target dari 84 % pada tahun

2025. Hal ini terjadi karena adanya perubahan perhitungan data dimana data sebelumnnya menggunakan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi sekarang terjadi perubahan perhitungan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data yang digunakan saat ini adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan INPRES Nomor 4 tahun 2024 dan Permensos nomor 3 tahun 2025 bahwasannya penyaluran bansos menggunakan peringkat kesejahteraan (DESIL) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara bidang statistik/ BPS sehingga berpengaruh kepada komposisi dan profil data kemiskinan di Kota Bima. Adapun jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penanganannya tertuang dalam tabel di bawah ini :

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JML PMKS	JML YG MENDAPATKAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1	*2*	*3*	*4*
1	Anak Balita Terlantar	0	0
2	Anak Terlantar	603	361
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	0	0
4	Anak Nakal	0	0
5	Anak jalanan	0	0
6	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus	0	0
7	Anak yang berhadapan dengan hukum	0	0
8	Anak dengan kedisablitasan (ADK)	0	0
9	Penyandang Disabilitas	1018	542
10	Penyandang Disabilitas berat	0	0
11	Lanjut Usia Terlantar	801	581
12	Koban Tindak Kekerasan	0	0
13	Tuna Susila	0	0
14	Gelandangan	47	47
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0

16	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	0	0
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	0	0
18	Korban Penyalagunaan Napza	20	20
19	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	26	4
20	Kelompok minoritas	23	1
21	Korban trafficking	0	0
22	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	407	52
23	Keluarga Fakir Miskin	68.616	58.752
24	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	0	0
25	Korban Bencana Alam	396	396
26	Korban Bencana Sosial	144	144
	Total	**72.101**	**60.999**

b. Sasaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SASARAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Meningkatnya Keberdayaan sosial Sosial**	**Persentase PSKS yang diberdayakan**	**30**	**%**	**22,5**	**%**	**75**
A	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya pembinaan pelaksana Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah**	**Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan**	**6**	**dok**	**6**	**dok**	**100,00**
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6	dok	6	dok	100,00
B	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PSKS yang terlatih**	**15**	**%**	**12,5**	**%**	**83,33**
	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	25	Orang	100,00
	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20	lembaga	20	lembaga	100,00

II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Meningkatnya Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**	**60**	**%**	**60,45**	**%**	**100,75**
A	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani**	**40**	**%**	**44,73**	**%**	**111,82**
	1	Penyedian Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190	orang	190	orang	100,00
	2	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	220	Orang	220	Orang	100,00
	3	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Orang	8	Orang	100,00
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7	orang	7	orang	100,00
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	121	Orang	121	Orang	100,00
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang	50	Orang	100,00

	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	10	orang	100,00
	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	457	orang	457	orang	100,00
	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	22	orang	22	orang	100,00
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	5	orang	80,00
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	orang	4	orang	100,00
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	orang	11	orang	100,00

B	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani**	**50**	**%**	**42,16**	**%**	**84,32**
	1	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	12	orang	12	orang	100,00

	2	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35	Orang	35	Orang	100,00
	3	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Orang	3	Orang	100,00
	4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25	Orang	25	Orang	100,00
	5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Orang	16	Orang	00,00
	6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	5	orang	100,00
	7	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Orang	4	Orang	100,00
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS**	**Persentase PMKS (Fakir Miskin)yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**80**	**%**	**80**	**%**	**100,00**
A	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**		**Meningkatnya pelayanan pemeliharaan anak-anak terlantar**	**Persentase anak-anak terlantar yang ditangani**	**25**	**%**	**25**	**%**	**100,00**
	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5	orang	5	orang	100,00
	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	orang	10	orang	100,00
	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang	10	Orang	100,00
B	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin yang ada di daerah**	**Persentase data DTKS yang tervalidasi**	**90**	**%**	**90**	**%**	**100,00**

	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	68.616	Jiwa	68.616	Orang	100,00
	2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240	KK	240	KK	100,00
	3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	300	orang	300	orang	100,00
	4	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	7	usulan	7	usulan	100,00
IV	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Meningkatnya Penanganan Bencana**	**Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
A	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang tertangani**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
	1	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	100	orang	100,00
	2	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50	orang	50	orang	100,00
	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5	unit	0	unit	00,00
	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Orang	200	Orang	100,00
	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang	0	Orang	00,00

B	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase kampung siaga bencana yng terbentuk**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100,00**
	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kel	1	Kel	100,00
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	Orang	36 orang	Orang	100,00

Secara umum Dinas Sosial Kota Bima selama Tahun 2025 telah berhasil. Keberhasilan pencapain target tersebut sangat didukung oleh adanya beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bima yang bersumber dari APBD II, diantaranya 4 program yg terdiri dari 8 kegiatan bidang teknis yang didukung oleh 35 sub kegiatan dan 6 kegiatan rutin dengan didukung oleh 28 sub kegiatan sebagai penunjangnya. Selain dukungan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD II juga terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi, diantaranya Program Rehabilitasi sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta rehabilitasi Penyandang disabilitas terlantar, anak dan Lanjut Usia terlantar, Program Perlindungan dan jaminan Sosial terhadap fakir miskin dan Program Penanganan Bencana bagi korban bencana alam dan bencana sosial. Oleh karena kedepan diharapkan dukungan dana pendampingan dari APBD II terhadap program-program tersebut sangat membantu pencapain target pelayanan. Beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi, antara lain :

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1.	Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas	179	Orang	2.097.720.000	APBN
2.	Bantuan Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal	87	Orang	1.026.160.000	APBN
3.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	11	LKSA	125.000.000	APBD I
4.	Program ATENSI Bagi Penyandang Disabilitas	80	Orang	96.000.000	APBN
5.	Program ATENSI Bagi Lansia	70	Orang	84.000.000	APBN
6.	Program ATENSI Bagi Anak	15	Orang	18.000.000	APBN
7.	Program ATENSI Bagi Korban NAPZA	20	Orang	24.000.000	APBN
8.	Program ATENSI Bagi Perempuan rawan Sosial Ekonomi	5	Orang	6.000.000	APBN
9.	Kegiatan Kearifan Lokal Berbasis Masyarakat	4	Kelurahan	200.000.000	APBN
10.	Program Keluarga Harapan (PKH)	8.329	KPM	22.177.375.000	APBN
T O T A L				**25.854.255.001**	

2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun berjalan dengan Tahun sebelumnya dan beberapa Tahun terakhir**

Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target(%)	Realisasi	Capaian 2025	Capaian 2024
Tujuan: Menurunnya Tingkat kemiskinan	Persentase penduduk miskin	7,82	8,12	96,30	98,26
Sassaran : Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100	100	100	100
Sasaran : Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	84	84,60	100,71	87,73

Adapun deskripsi secara khusus mengenai perbandingan tingkat pencapaian realisasi indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2024 terdapat 75.078 pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dari jumlah 101.873 orang PPKS yang ada di Kota Bima atau 73,70 % dari target 84 % sehingga tingkatan capaian mencapai 87,73 %. Pada tahun 2025 jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 60.999 PPKS dari 72.101 jumlah PPKS dengan persentase 84,60 % dari target 84 %. Sehingga tingkatan capaian sebesar 100,71. Kondisi menurunnya jumlah PPKS pada tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan

perhitungan data dimana data sebelumnnya menggunakan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi sekarang terjadi perubahan perhitungan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data yang digunakan saat ini adalah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Berdasarkan INPRES Nomor 4 tahun 2024 dan Permensos nomor 3 tahun 2025 bahwasannya penyaluran bansos menggunakan peringkat kesejahteraan (DESIL) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara bidang statistik/ BPS sehingga berpengaruh kepada komposisi dan profil data kemiskinan di Kota Bima. Pencapaian target tahun 2025 didukung pula oleh adanya dukungan anggaran dari Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang bersumber dari Dana APBN, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) regular yang bersumber dari Dana APBN, Bantuan Sosial Tunai (BST) KESRA yang bersumber dari Dana APBN dan Program Jaminan Sosial terhadap Penyandang disabilitas, Anak dan Lanjut Usia. Oleh karena kedepannya diharapkan dukungan dana pendampingan dari APBD II terhadap program-program tersebut sangat membantu pencapain target pelayanan.

a. Program dan Kegiatan

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DINAS SOSIAL KOTA BIMA

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Target Program / Kegiatan / Sub Kegiatan2024	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
	2 Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	8 dokumen	100	8 laporan	8 laporan	100
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	42 orang/bulan	100	36 orang/bulan	36 orang/bulan	100
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
	3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket

	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 laporan	160 laporan	70 laporan	160 laporan	160 laporan	70 laporan
	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100	22 unit	22 unit	100
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100	300 unit	300 unit	100
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							

	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	100	17 unit	17 unit	100
	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	22 unit	100	25 unit	25 unit	100
	3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang diberdayakan**	**30 %**	**22,5%**	**83,33**	**30%**	**25%**	**60 %**
	1 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan**	**6** dokumen	**6** dokumen	**100**	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen
	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 dokumen	6 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
	2 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS yang terlatih**	**15%**	**12,50%**	**83,33**	**30%**	**30%**	**83,33%**
	1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	100	50 Orang	50 Orang	100
	2 Peningkatan Kemampuan Potensi SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 lembaga	20 lembaga	100			
III	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial**	**60%**	**60,45 %**	100,75	**50%**	**50%**	**100%**

	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani**	**40%**	**44,73%**	**111,82%**	**40%**	**39,15%**	**97,87**
	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190 orang	190 orang	100	260 orang	260 orang	100
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan5 Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	220 orang	220 orang	100	250 orang	250 orang	100
	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang	8 orang	100	26 orang	26 orang	100
	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	12 orang	100	12 orang	12 orang	100
	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	180 orang	100	180 orang	180 orang	100
	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	**100**	100
	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	**100**	5 orang	5 orang	**100**

	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	457 orang	457 orang	**100**	457 orang	457 orang	**100**
	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 orang	22 orang	**100**	3 orang	3 orang	**100**
	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	**80**	10 orang	8 orang	**80**
	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	4 orang	**100**	15 orang	15 orang	**100**
	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	11 orang	**100**	8 orang	8 orang	**100**
	2	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**50%**	**42,16%**	**84,32**	**50%**	**50%**	**46,18%**
	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	12 orang	100	15 orang	15 orang	100
	2	Penyediaan Sandang	Jumlah PMKS lainnya yang mendapatkan bantuan sandang	35 orang	35 orang	100	35 orang	35 orang	100
	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	3 orang	100	4 orang	4 orang	100
	4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang	100	50 orang	50 orang	100

	5 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	16 orang	100	30 orang	00	00
	6 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	100
	7 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100	5 orang	5 orang	100
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**80%**	80%	100	**80%**	**80%**	**80%**
	1 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	**Persentase anak-anak terlantar yang ditangani**	**25%**	**25%**	**100**	**25%**	**30%**	**26,66**
	1 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100	20 orang	20 orang	100
	2 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	100	8 orang	8 orang	100
	3 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	100	20 orang	20 orang	100
	2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Data DTKS yang tervalidasi**	**90 %**	**90%**	**100**	**90 %**	**90 %**	**100**
	1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	66.789 orang	66.789 orang	100	104.651 orang	104.651 orang	100
	2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	7 usulan	7 usulan	100	33.530 KK	33.530 KK	100

	3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240 KK	240 KK	100	3.098 KK	3.060 KK	98,77
	4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	300 orang	100	5 orang	5 orang	100
V	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat**	**100%**	100%	100	**100%**	**100%**	**100%**
	1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**
	1 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100	100 orang	100 orang	100
	2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	100
	3 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 unit	0	0	2 unit	0	0
	4 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	150 orang	100	380 orang	380 orang	100
	5 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 orang	100	35 orang	00	00
	2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk**	**100%**	**100%**	**100**	**20%**	**100%**	**100%**

	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kelurahan	1 kelurahan	100	1 kelurahan	1 kelurahan	100
	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	36 orang	100	40 orang	40 orang	100

3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Bahwa perbandingan pencapaian realisasi Tahun 2025 dengan target RPJMD menunjukkan peningkatan indikator sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota Bima. Bahwa meningkatnya pencapaian target pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah anggaran, baik yang bersumber dari APBD II, APBN, dan dekonsentrasi. Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2025 dengan target pada RPJMD sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi Kinerja tahun 2025	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	100 %	100,00 %
2.	Terpenuhinya jaminan Kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	84 %	84,60 %	100,71 %

4. **Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada).**

Bahwa realisasi kinerja Tahun 2025 sudah memenuhi target nasional yang ada. Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2025 dengan target Nasional sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional	Realisasi Kinerja tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terpenuhinya perlindungan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial	100,00%	100,00%
2.	Terpenuhinya jaminan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial	80,00%	84,60%

5. Capaian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Sosial Kota Bima

Adapun capaian kinerja eselon III dan eselon IV di lingkup Dinas Sosial Kota Bima dapat diukur dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

5.1. Capaian Kinerja Eselon II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	30%	22,50%	75%
2	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	60%	60,45%	100,75%
3	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Persentase PMKS (Fakir Miskin)yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	80%	100%
4	Meningkatnya Penanganan Bencana	Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk	100%	100%	100%

5.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Pengembangan PSKS yang ada Didaerah	Persentase PSKS yang terlatih	15%	12,50%	83,33%
2	Terlaksananya verifikasi dan validasi data fakir miskin yang ada di daerah	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	90%	90%	100%

b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 %	100%	100%
2	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kampung siaga bencana yang terbentuk	100 %	100 %	100 %

c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terlayani	40%	44,73 %	111,82%
2	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	50%	42,16%	84,32%
3	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	25%	25%	100%

5.3 Capaian Kinerja Fungsional

a. Penggerak Swadaya Masyarakat (Jaminan Sosial)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6 dokumen	6 dokumen	100

b. Penyuluh Sosial (Perlindungan Sosial)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	200 orang	100,00
2	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	100 orang	100,00
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 unit	0	00,00
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	150 Orang	100,00
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang	20 Orang	100,00
6	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kelurahan	1 kelurahan	100,00
7	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	36 orang	36 orang	100,00

c. Penyuluh Sosial (Penanganan Fakir Miskin)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	66.789 orang	66.789 orang	100
2	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	240 KK	240 KK	98,77
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	300 orang	100
4	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	7 usulan	7 usulan	100

d. Penyuluh Sosial (Pemberdayaan Kelembagaan Sosial)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	25 orang	100
2	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 lembaga	20 lembaga	100

e. Penyuluh Sosial (Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	300 orang	100

f. Penggerak Swadaya Masyarakat (Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190 orang	190 orang	100
2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	220 orang	220 orang	100
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 orang	8 orang	100
4	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7 orang	7 Orang	100
5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	121 orang	121 orang	100
6	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	50orang	100
7	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	100
8	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	457 orang	457 orang	100
9	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 orang	22 orang	100
10	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100

11	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 orang	4 orang	100
12	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	11 orang	11orang	100
13	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	5 orang	100
14	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	100
15	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	100

g. Penggerak Swadaya Masyarakat (Rehabilitasi PPKS Lainnya)

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	12 orang	100
2	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35 Orang	100
3	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 orang	3 orang	100
4	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 orang	25 orang	100
5	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	16 Orang	100
6	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	5 orang	5 orang	100
7	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	100

6. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.**

Sasaran strategis Dinas Sosial adalah **"Terpenuhinya Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagin Korban Bencana'.** Hal ini dimaksud adalah Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga komunitas dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditujukan kepada :

1. Anak Balita terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan
4. Anak Nakal
5. Anak Jalanan
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
7. Anak yang berhdapan dengan hukum
8. Anak dengan Kedisalitasan (ADK)
9. Penyandang Disabilitas
10. Penyandang Disabilitas Berat
11. Lanjut Usia Terlantar
12. Korban Tindak Kekerasan
13. Tuna Sosila
14. Gelandangan
15. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
16. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
17. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
18. Korban Penyalahgunaan Napza
19. Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA)
20. Kelompok Minoritas
21. Korban Trafficking
22. Perempuan rawan Sosial Ekonomi
23. Keluarga Fakir Miskin
24. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
25. Korban Bencana Alam
26. Korban Bencana Sosial

Adapun Indikator Sasaran Strategis DInas Sosial adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang mendapatkanjaminan kesejahteraan social thn N}}{\text{Total PPKS thn N}} \text{ x } 100$$

Pada tahun 2025 data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebanyak 72.101 PPKS dimana sebanyak 60.999 PPKS yang mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial atau sebesar 100,71%.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja tersebut sangat didukung oleh kemampuan SDM yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima yang berjumlah 42 PNS, 24 Tenaga Honor, 5 TKSK, 38 orang pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 55 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Selain itu dukungan jumlah anggaran yang bersumber dari APBN, dan dekonsentrasi Tahun 2025 meningkat dibanding dengan Tahun sebelumnnya.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya dalam rangka pencapaian keberhasilan kinerja sasaran dengan melakukan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya, berikut kinerja atas capaian program dan kegiatan terhadap capaian anggaran program dapat dilihat dengan tabel efisiensi di bawah ini :

No.	Sasaran	Capaian Kinerja (CK)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100,00**	**5.216.649.827,00**	**4.855.934.399**	**93,09**	**0,93**	**Efisien**
A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100,00**	**104.129.000,00**	**99.553.300**	**95,61**	**0,96**	**Efisien**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	32.511.000	32.483.900	99,92	1,00	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	5.904.000,00	5.904.000	100,00	1,00	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	5.904.000,00	5.541.000	93,85	0,94	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100,00	2.481.000,00	2.481.000	100,00	1,00	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100,00	2.600.000,00	2.240.000	86,15	0,86	Efisien
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	43.124.000,00	39.310.400	91,16	0,91	Efisien
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	11.605.000,00	11.593.000	99,90	1,00	Efisien
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**4.156.191.316,00**	**3.862.679.949**	**92,94**	**0,93**	**Efisien**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	3.998.209.616,00	3.705.400.949	92,68	0,93	Efisien
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	19.660.100,00	19.332.400	98,33	0,98	Efisien
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	119.726.000,00	119.351.000	99,69	1,00	Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	8.672.600,00	8.672.600	100,00	1,00	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00	9.923.000,00	9.923.000	100,00	1,00	Efisien
C	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**408.726.900,00**	**403.642.600**	**98,76**	**0,99**	**Efisien**
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	39.689.300,00	37.048.100	93,35	0,93	Efisien
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00	45.611.600,00	45.611.600	100,00	1,00	Efisien
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	41.615.000,00	40.731.000	97,88	#NAME?	Efisien

4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	28.359.000,00	28.359.000	100,00	1,00	Efisien
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00	20.000.000,00	20.000.000	100,00	1,00	Efisien
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	193.200.000,00	191.640.900	99,19	0,99	Efisien
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100,00	40.252.000,00	40.252.000	100,00	1,00	Efisien
9	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	16.490.000,00	13.500.000	81,87	0,82	Efisien
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	7.490.000,00	4.500.000	60,08	0,60	Efisien
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	9.000.000,00	9.000.000	100,00	1,00	Efisien
D	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100,00**	**292.406.300,00**	**259.793.478**	**88,85**	**0,89**	**Efisien**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	62.056.800,00	59.681.800	96,17	0,96	Efisien
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	92.110.500,00	81.045.678	87,99	0,88	Efisien
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00	138.239.000,00	119.066.000	86,13	0,86	Efisien
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	238.706.311,00	216.765.072	90,81	0,91	Efisien
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	198.226.311,00	177.665.072	89,63	0,90	Efisien
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	14.580.000,00	14.580.000	100,00	1,00	Efisien
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	25.900.000,00	24.520.000	94,67	0,95	Efisien
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	100,00	147.533.200,00	144.633.100	98,03	0,98	Efisien
A	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	100,00	15.213.200,00	13.445.100	88,38	0,88	Efisien
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100,00	15.213.200,00	13.445.100	88,38	0,88	Efisien
B	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	100,00	132.320.000,00	131.188.000	99,14	0,99	Efisien
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	112.320.000,00	111.288.000	99,08	0,99	Efisien

2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	20.000.000,00	19.900.000	99,50	1,00	Efisien
III	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	100,00	810.800.800,00	737.570.950	90,97	0,91	Efisien
A	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	100,00	670.281.000,00	607.651.150	90,66	0,91	Efisien
1	Penyediaan Permakanan	100,00	85.965.400,00	83.872.700	97,57	0,98	Efisien
2	Penyediaan Sandang	100,00	311.263.500,00	258.630.900	83,09	0,83	Efisien
3	Penyediaan Alat Bantu	100,00	45.964.900,00	45.964.900	100,00	1,00	Efisien
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100,00	8.080.800,00	8.080.600	100,00	1,00	Efisien
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100,00	41.432.000,00	40.564.400	97,91	0,98	Efisien
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100,00	11.844.100,00	11.842.000	99,98	1,00	Efisien
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,dan Kartu Identitas Anak	100,00	4.514.100,00	4.514.100	100,00	1,00	Efisien
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100,00	714.000,00	597.000	83,61	0,84	Efisien
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	100,00	6.980.000,00	6.978.000	99,97	1,00	Efisien
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	100,00	128.800.800,00	122.049.150	94,76	0,95	Efisien
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100,00	17.721.400,00	17.721.400	100,00	1,00	Efisien
12	Pemberian Layanan Rujukan	100,00	7.000.000,00	6.836.000	97,66	0,98	Efisien
B	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	100,00	140.519.800,00	129.919.800	92,46	0,92	Efisien
1	Penyediaan Permakanan	100,00	15.720.000,00	6.260.000	39,82	0,40	Efisien
2	Penyediaan Sandang	100,00	10.524.000,00	10.524.000	100,00	1,00	Efisien
3	Penyediaan Alat Bantu	100,00	7.500.000,00	7.500.000	100,00	1,00	Efisien

4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100,00	90.632.000,00	90.182.000	99,50	1,00	Efisien
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100,00	7.598.700,00	7.198.700	94,74	0,95	Efisien
6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	100,00	3.035.100,00	3.035.100	100,00	1,00	Efisien
7	Pemberian Layanan Rujukan	100,00	5.510.000,00	5.220.000	94,74	0,95	Efisien
IV	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	100,00	1.248.562.100,00	896.291.650	71,79	0,72	Efisien
A	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	100,00	27.190.800,00	8.750.100	32,18	0,32	Efisien
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	100,00	11.719.000,00	4.343.500	37,06	0,37	Efisien
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	100,00	9.847.800,00	4.406.600	44,75	0,45	Efisien
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	-	5.624.000,00	-	-	-	Tidak Efisien
B	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	100,00	1.221.371.300,00	887.541.550	72,67	0,73	Efisien
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	211.054.300,00	201.041.750	95,26	0,95	Efisien
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	19.429.200,00	18.430.200	94,86	0,95	Efisien
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	100,00	826.709.300,00	506.581.100	61,28	0,61	Tidak Efisien
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100,00	164.178.500,00	161.488.500	98,36	0,98	Efisien
V	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	100,00	507.986.200,00	455.865.200	89,74	0,90	Efisien
A	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	100,00	290.985.000,00	249.879.000	85,87	0,86	Efisien
1	Penyediaan Makanan	100,00	59.720.000,00	34.379.000	57,57	0,58	Efisien
2	Penyediaan Sandang	100,00	138.630.000,00	134.090.000	96,73	0,97	Efisien
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	10.805.000,00	-	-	-	Tidak Efisien
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	100,00	66.970.000,00	66.570.000	99,40	0,99	Efisien
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	100,00	14.860.000,00	14.840.000	99,87	1,00	Efisien

B	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat TerhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	100,00	217.001.200,00	205.986.200	94,92	0,95	Efisien
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100,00	5.972.500,00	5.972.500	100,00	1,00	Efisien
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100,00	211.028.700,00	200.013.700	94,78	0,95	Efisien
Jumlah			7.931.532.127,00	7.090.136.617	89,39	0,89	Efisien

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variable capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggran keluaran dengan capaian keluaran. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisien adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Sosial masuk dalam ketegori ***Efisien***. Untuk dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2025.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan sumber anggaran dari APBD II pada Dinas Sosial Kota Bima tahun 2025 telah melaksanakan 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari 37 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
I	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**147.533.200,00**	**144.633.100,00**	**98,03**
A	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**15.213.200,00**	**13.445.100,00**	**88,38**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15.213.200	13.445.100	88,38
B	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**132.320.000,00**	**131.188.000,00**	**99,14**
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	112.320.000	111.288.000	99,08
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.900.000	99,50
II	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**810.800.800,00**	**737.570.950,00**	**90,97**
A	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**670.281.000,00**	**607.651.150,00**	**90,66**
1	Penyediaan Permakanan	85.965.400	83.872.700	97,57
2	Penyediaan Sandang	311.263.500	258.630.900	83,09
3	Penyediaan Alat Bantu	45.964.900	45.964.900	100,00
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.080.800	8.080.600	100,00
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	41.432.000	40.564.400	97,91
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	11.844.100	11.842.000	99,98
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,dan Kartu Identitas Anak	4.514.100	4.514.100	100,00
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	714.000	597.000	83,61
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	6.980.000	6.978.000	99,97
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	128.800.800	122.049.150	94,76
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	17.721.400	17.721.400	100,00
12	Pemberian Layanan Rujukan	7.000.000	6.836.000	97,66
B	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**140.519.800,00**	**129.919.800,00**	**92,46**

1	Penyediaan Permakanan	15.720.000	6.260.000	39,82
2	Penyediaan Sandang	10.524.000	10.524.000	100,00
3	Penyediaan Alat Bantu	7.500.000	7.500.000	100,00
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	90.632.000	90.182.000	99,50
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	7.598.700	7.198.700	94,74
6	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.035.100	3.035.100	100,00
7	Pemberian Layanan Rujukan	5.510.000	5.220.000	94,74
III	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.248.562.100,00**	**896.291.650,00**	**71,79**
A	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**27.190.800,00**	**8.750.100,00**	**32,18**
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	11.719.000	4.343.500	37,06
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	9.847.800	4.406.600	44,75
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	5.624.000	-	-
B	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.221.371.300,00**	**887.541.550,00**	**72,67**
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	211.054.300	201.041.750	95,26
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	19.429.200	18.430.200	94,86
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	826.709.300	506.581.100	61,28
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	164.178.500	161.488.500	98,36
IV	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**507.986.200,00**	**455.865.200,00**	**89,74**
A	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**290.985.000,00**	**249.879.000,00**	**85,87**
1	Penyediaan Makanan	59.720.000	34.379.000	57,57
2	Penyediaan Sandang	138.630.000	134.090.000	96,73
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.805.000	-	-
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	66.970.000	66.570.000	99,40
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	14.860.000	14.840.000	99,87
B	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat TerhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**217.001.200,00**	**205.986.200,00**	**94,92**
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	5.972.500	5.972.500	100,00

2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	211.028.700	200.013.700	94,78
Jumlah		**7.931.532.127,00**	**7.090.136.617**	**89,39**

Selain itu terdapat beberapa program yang bersumber dari APBN dan APBD I yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain:

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	*2*	*3*		*4*	*5*
1.	Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas	179	Orang	2.097.720.000	APBN
2.	Bantuan Permakanan Lanjut Usia Keluarga Tunggal	87	Orang	1.026.160.000	APBN
3.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	11	LKSA	125.000.000	APBD I
4.	Program ATENSI Bagi Penyandang Disabilitas	80	Orang	96.000.000	APBN
5.	Program ATENSI Bagi Lansia	70	Orang	84.000.000	APBN
6.	Program ATENSI Bagi Anak	15	Orang	18.000.000	APBN
7.	Program ATENSI Bagi Korban NAPZA	20	Orang	24.000.000	APBN
8.	Program ATENSI Bagi Perempuan rawan Sosial Ekonomi	5	Orang	6.000.000	APBN
9.	Kegiatan Kearifan Lokal Berbasis Masyarakat	4	Kelurahan	200.000.000	APBN
10.	Program Keluarga Harapan (PKH)	8.329	KPM	22.177.375.000	APBN
T O T A L				**25.854.255.001**	

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari Dana APBD II, dekonsentrasi dan pembantuan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Dana APBD II

Pagu Anggaran untuk program dan kegiatan dana APBD II sebesar **Rp. 7.931.532.127,00**,- (*Tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 7.090.295.299,00,-** (*Tujuh miliar Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau capaian sebesar 89,39 %.. Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.216.649.827,00	4.855.934.399,00	93,85
2.	Pemberdayaan Sosial	147.533.200,00	144.633.100,00	98,03
3.	Rehabilitasi Sosial	810.800.800,00	737.570.950,00	90,97
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.248.562.100,00	896.291.650,00	71.78
5.	Penanganan Bencana	507.986.200,00	455.865.200,00	89,74
	Jumlah	**7.931.532.127,00**	**7.090.295.299,00**	**89,39**

2. Dana Dekonsentrasi dan APBN Non Dekonsentrasi

Pada Tahun anggaran 2025 melalui Dinas Sosial Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari dana APBN dan Dekonsentrasi sebesar **Rp. 25.854.255.000**.- (*Dua Puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) ,- dengan realisasi **Rp. 25.854.255.000**.- (*Dua Puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) atau 100 %. Selain itu terdapat pula bantuan barang tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Bima telah berhasil melaksanakan 4 (empat) program teknis yang terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yang dirincikan ke dalam 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan dan 1 (satu) program pendukung yang merupakan kegiatan rutin yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan yang dirincikan ke dalam 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.
2. Realisasi keuangan yang bersumber dari APBD II dari anggaran sebesar **Rp. 7.931.532.127,00**,- (*Tujuh miliar Sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh tujuh rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 7.090.295.299,00,-** (*Tujuh miliar Sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau capaian sebesar 89,39 %. Serta dana dari APBN dan Dekonsentrasi bidang Kesejahteraan Sosial mencapai sebesar **Rp. 25.854.255.000**.- (*Dua Puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*) ,- dengan realisasi **Rp. 25.854.255.000**.- (*Dua Puluh lima miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Bahwa dukungan sumber daya (SDM, anggaran dan sarana serta prasarana) pada Dinas Sosial Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indikator sasaran strategis yang ada.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai di tahun 2025 adalah :

1. Peraturan Walikota Bima Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial

2. Dinas Sosial dituntut untuk melaksanakan percepatan pencapaian target kinerja dalam penanganan PMKS maupun peningkatan kemampuan PSKS.

Oleh karenanya dukungan sumber daya untuk peningkatan pencapaian indikator sasaran tersebut sangat mendukung peningkatan pencapaian indikator sasaran strategis tersebut.

2. Langkah Kedepan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang, beberapa Langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

a. Menerbitkan regulasi bidang kesejahteraan social sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme pegawai baik di dalam pelayanan dalam masyarakat maupun dalam peningkatan SDM.
b. Lebih meningkatkan jumlah dan mutu layanan kesejahteraan sosial pada PMKS sesuai dengan regulasi yang ada.
c. Memperluas cakupan sosialisasi dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan social sehingga percepatan penanganan PMKS akan terlaksana dengan baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang dapat kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



H. Lalu Sukarsana, S.IP
Pembina Utam Muda, (IV/c)
NIP. 19660704 198608 1 003

LKIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Sebagai Sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peneteapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adapun maksud disusunnya LKIP ini adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu Organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandate.
3. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
4. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Kota Bima, Januari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Taufikrahman, S. Pd, M. A. P

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 19691217 199403 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Gambaran Umum SKPD 4
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 5
1.3 Sumber Daya,Sarana dan Prasarana 16
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 195
2.1 Perencanaaan Kinerja Jangka Menengah 196
2.2 Indikator Kinerja Utama (Iku) 207
2.3 Rencana Kinerja Tahunan 238
2.4 Program Dan Kegiatan Tahun 2025 .....
2.5 Perjanjian Kinerja .....
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Pencapaian Kinerja Tujuan .....
3.2 Pencapaian Kinerja berdasarkan pencapaian Sasaran Strategis .....
3.3 Realisasi Anggaran .....
3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan .....
BAB IV PENUTUP 59
4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 59
4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang

tersebut menyatakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah: *"Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Ketenagakerjaan"* dimana Tugas dan Fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 adalah sebagai :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi Misi Daerah;
b) Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
c) Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;
d) Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan Peran sarana dan prasarana Perangkat Daerah;
e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

1) Sekretariat mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta renacna strategis Dinas;
   b. penyusunan bersma program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
   c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat;
   d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
   e. pembinaan dan pengendalian administrasian keuangan dan kepegawaian Dinas;
   f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan;
   g. Penyelenggaraan kehumasan Sekretariat;
   h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
   i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala; dan
   j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Pelakanaan urusan recana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawaian;
   c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
   f. Pelaksanaan urusan kepegawian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
   g. Penyusunan laporan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
   h. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
   i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan gungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyusu
   b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
   c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang tenaga kerja;
   d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang tenaga kerja;
   e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang tenaga kerja;
   f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja;
   g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
   h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
   i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
   j. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan gungsinya.

C. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga

1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerjadan perluasan kerja.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi:
   a. Pelaksana tugas dibidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   b. Pelaksana penempatan tenaga kerja;
   c. Pelaksana penyelenggara bimbingan lembaga pelatihan kerja;
   d. Pelaksana pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
   e. Pelaksana penyelenggaara informasi pasar kerja dan bursa kerja;
   f. Pelaksana pemberian rekomendasi dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaa tenaga kerja;
   g. Pelaksana pengembangan dan perluasan kerja; dan
   h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi:

   a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
   b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
   c. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja mepunyai tugas melaksanakan tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Seksi Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga kerja;
   b. Pelaksana pengolahan data pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
   c. Pelaksana pembina dan pengembangan lembaga pelatihan kerja;
   d. Pelaksana operasional pemasaran program, hasil produksi dan lulusaan pelatihan;
   e. Pelaksana fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan;
   f. Pelaksana operasional program pemagangan;
   g. Pelaksana operasional standarisasi produktivitas;
   h. Pelaksana operasional pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas;

i. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengn tugas dan fungsinya.

b. Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

1) Seksi informasi pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;

b. Pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;

c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja:

d. Pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;

e. Pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;

f. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan kelompok tugas kerja:

g. Pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara;

h. Pelaksanaan operasional penertiban danpengendalian izin pendirian serta pembinaanLembaga Bursa Kerja Khusus;

i. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair);

j. Pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, peyandang cacat dan usia lanjut;

k. Pelaksanaan operasional verifiksasi dan dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

l. Pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja; dan

m. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja

1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri, pendayagunaan tenaga kerja serta pengembangan dan penyerbaluasan informasi teknologi tepat guna

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud, seksi pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan dan pelaksana pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   b. Pelaksanaan pengolahan data pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   c. Pelaksanaan operasional bina produktivitas dan pendayagunaan tenaga kerja;
   d. Pelaksanaan opersional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
   e. Pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri;
   f. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja;
   g. Pelaksanaan operasional pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Hubungan Industrial

1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
   a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang hubungan Industrial;
   b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
   c. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan inndustrial, perundingan dan pembuatan kesepkatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
   d. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
   e. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
   f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
   g. Pelaksanaan dan pendataan,verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
   h. Pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama;
   i. Penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan;
   j. Pelaksanaan pembinaan dan persyaratan kerja;
   k. Pelaksanaan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha;

l. Pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
n. Pembuatan dsn penempatan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
p. Pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;
q. Pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;
r. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
s. Pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
t. Pemrosesan pencabutan izin opersional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
u. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
v. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
w. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
y. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
z. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
aa. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang hubungan Industrial, membawahi:

a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
b. Seksi Norma Kerja; dan
c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dan persyaratan Kerja mempunyai tugas pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Persyaratan Kerja;
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,seksi peny elesaian Perselisihan hubungan Industrial dan Persyaratan kerja mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
c. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan;
d. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan kerja;
f. Pelaksanaan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial;
g. Pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
h. Fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta *lock out* (penutupan perusahaan);
i. Pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja;
j. Pembuatan dan penempatan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
k. Fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa pekerja serta *lock out;*
l. Pelaksaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
m. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakejaan;
n. Pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian diluar pengadilan;
o. Penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran dan pengusulan formasi serta pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator, dan arbiter;
p. Pelaksanaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggran (DPPA);
q. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

u. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
v. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
w. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan bahan rencana kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan;
x. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjan Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
y. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum;
z. Pelaksanaan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
aa. Penyiapan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK);
ab. Penyiapan berkas-berkas untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksnaaan Upah Minimum Kota (UMK);
ac. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah;
ad. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D);
ae. Pelaksanaan pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR);
af. Pemberian bimbinganaplikasi pengupahan di perusahaan;
ag. Pelaksanaanpembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);
ah. Pelaksanaan inventarisasi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
aj. Pemantauan Pelaksanaan Perjanjina Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
ak. Peneliatian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);
al. Pelaksana pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
am. Pelaksanaan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama;
an. Pendaftaran dan pendataan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
ao. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit;

ap. Perencanaan dan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;

aq. Pelaksanaan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;

ar. Penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusaan pemberi kerja dengan prusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

as. Penyiapan bahan dalam rangka pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

at. pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

au. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

av. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI);

aw. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

ax. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

ay. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Norma Kerja

1) Seksi Norma Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan norma kerja

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;

c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus;

d. Penyiapan bahan pengkajian teknis dalam rangka penyempurnaan norma kerja;

e. Penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan;

f. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data laporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;

g. Pelaksanaan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja;

i. Penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan.

j. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
k. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
l. Pelaksanaan sistem pengendalian intern(SPI);
m. Pelaksanaan standarpelayanan minimal (SPM);
n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Seksi jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi jaminan sosial tenaga mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan danpengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
   b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
   c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT);
   d. Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
   e. Pelaksanaan koordinasi dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja(Jamsostek);
   f. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
   g. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
   h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI);
   i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
   j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
   k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tuga membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

b. Kelompok Jabatan Funsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang di tunjuk.

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasrkan ketentuan perundang-undangan.

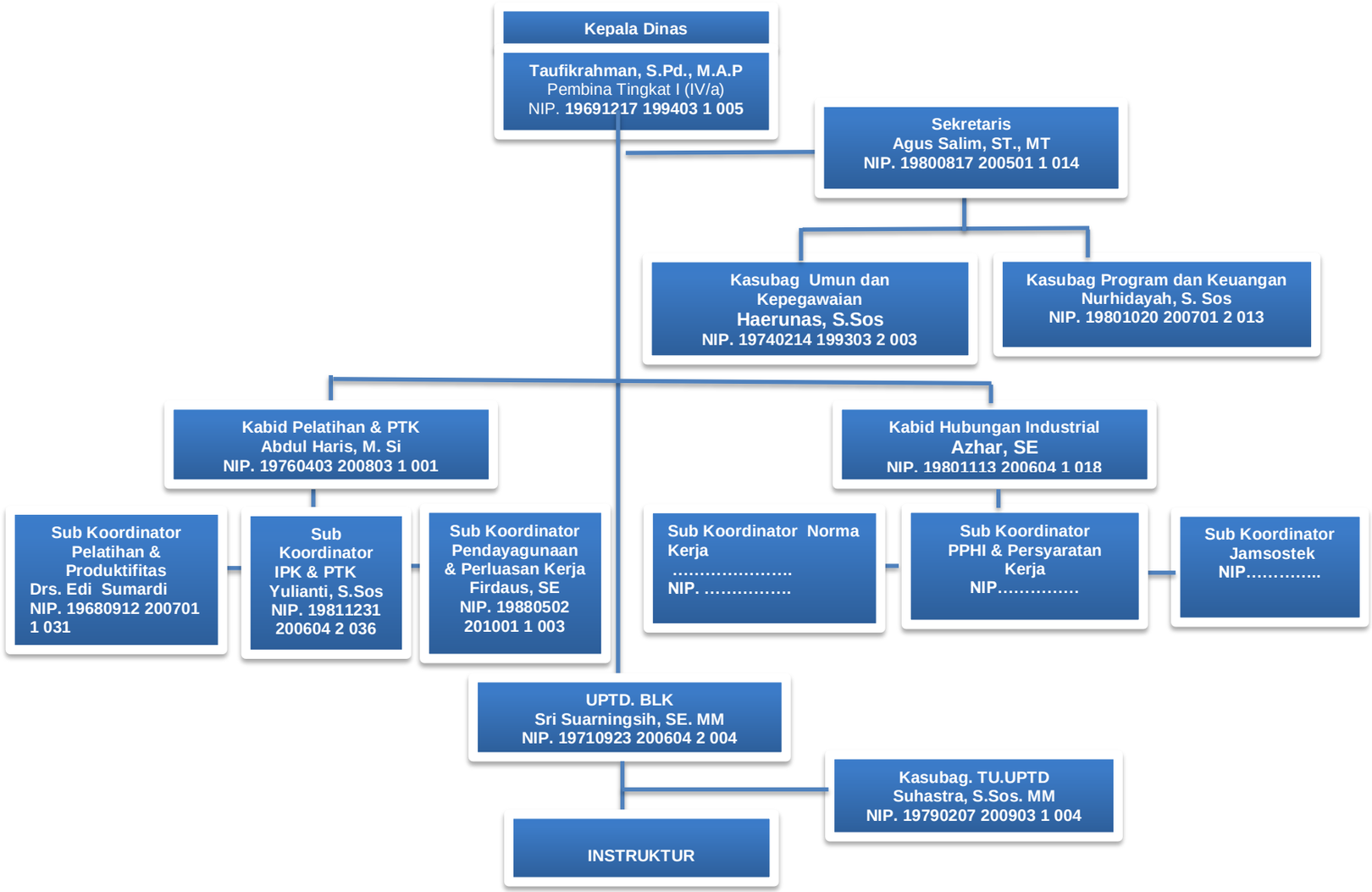
e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
   1) Kasubag Umum dan Kepegawaian.
   2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
   1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
   2) Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
   3) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
4. Bidang Hubungan Industria, membawahi:
   1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
   2) Seksi Norma Kerja
   3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional


Kepala Dinas
Taufikrahman, S.Pd., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/a)
NIP. 19691217 199403 1 005
Sekretaris
Agus Salim, ST., MT
NIP. 19800817 200501 1 014
Kasubag Umun dan Kepegawaian
Haerunas, S.Sos
NIP. 19740214 199303 2 003
Kasubag Program dan Keuangan
Nurhidayah, S. Sos
NIP. 19801020 200701 2 013
Kabid Pelatihan & PTK
Abdul Haris, M. Si
NIP. 19760403 200803 1 001
Kabid Hubungan Industrial
Azhar, SE
NIP. 19801113 200604 1 018
Sub Koordinator Pelatihan & Produktifitas
Drs. Edi Sumardi
NIP. 19680912 200701 1 031
Sub Koordinator IPK & PTK
Yulianti, S.Sos
NIP. 19811231 200604 2 036
Sub Koordinator Pendayagunaan & Perluasan Kerja
Firdaus, SE
NIP. 19880502 201001 1 003
Sub Koordinator Norma Kerja
……..
NIP. ……..
Sub Koordinator PPHI & Persyaratan Kerja
NIP……..
Sub Koordinator Jamsostek
NIP……..
UPTD. BLK
Sri Suarningsih, SE. MM
NIP. 19710923 200604 2 004
Kasubag. TU.UPTD
Suhastra, S.Sos. MM
NIP. 19790207 200903 1 004
INSTRUKTUR

1.3 Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Berdasarkan Eselon

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH (ORG)
1	Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekretaris	III/a	1
4	Kepala Bidang	III/b	2
3	Kepala Sub.Bagian/Kepala Kepala Seksi	IV/a	2
4	Kepala Sub Bagian	IV/b	1
Jumlah			*7*

1.3.2 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Berdasarkan Golongan/Ruang

	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I/ IVb	1 Orang
2	Pembina / IVa	4 Orang
3	Penata Tkt. 1/ III d	10 Orang
4	Penata / III c	2 Orang
5	Penata Muda Tkt I /III b	1
6	Penata Muda / III a	2
Jumlah		*20*

1.3.3 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1	S2	6 Orang
2	S1	16 Orang
4	SMA	Orang
5	SMP	Orang
Jumlah		*22 Orang*

Tabel 1.3.4 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan adanya dukungan Sarana dan prasarana yang memadai disamping dukungan sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, antara lain :

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Kursi rapat			100
2	Lemari Kayu			1
3	Kursi Kayu			1
4	Meja KAyu			4
5	Kursi Putar			2
6	Meja ½ Biro			25
7	Panci			1
8	Oven/gas			3
9	Mixer			2
10	Laptop		1	14
11	Berangkas			1
12	Piling Kabinet Besi			9
13	PC		1	10
14	Kunci Pas			1
15	Kunci Momen			2
16	Sound Sytem			1
17	Printer		1	14
18	Peralatan Cetak Lain			2
19	Kipas Angin			3
20	Kursi Kerja			9
21	Sepeda Motor			3
22	LCD			1
23	Scaner			1
24	Mesin Kompresor			2
25	Meja Komputer			2
26	Lemari Buku Arsip			2
27	Meja Kerja Kayu			3
28	Tag Kombinasi			1
29	Tangga Alumunium			1
30	Mobil			1
31	Motor			3
32	Lemari Buku Arsip Dinamis			2

33	Kursi Tamu			1
34	Kompor Gas			2
35	Bangku Tunggu			1
36	Mesin Bor Tangan			1
37	Perkakas Bengkel			80
38	Kursi Pejabat			2
39	Meja Pejabat			2
40	AC			9

1.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Dalam perencanaan pembangunan isu strategis adalah kondisi yang harus dikedepankan, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2025 disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan Kota Bima serta permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPD Kota Bima Tahun 2025-2025.

Masalah angka pengangguran terbuka yang masih tinggi merupakan salah satu masalah yang krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima. Pada kurun waktu tahun 2020-2022 Angka Pengangguran Terbuka Kota Bima mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 jumlah pengangguran 4.391 orang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 3.687 orang terus menurun menjadi 3.652 pada tahun 2022. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,42% terus menurun pada tahun 2021 menjadi 3,56% , naik kembali menjadi 3,73% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 turun menjadi 3,26%.

Di samping itu permasalahan yang dihadapi pada urusan tenaga kerja ini adalah perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh baru 164 perusahaan dari 978 perusahaan yang terdaftar

Beberapa permasalahan di Kota Bima yang perlu ditangani di tahun 2025-2025 berdasarkan pendekatan Urusan Pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Adanya Kesenjangan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan peningkatan jumlah pencari kerja :
   - ❖ Lapangan Kerja Masih Terbatas
   - ❖ Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelatihan Kurang Memadai
   - ❖ Kurikulum Belum mengikuti Pasar Kerja
   - ❖ Minimnya Lapangan Kerja untuk Tenaga Kerja Kurang Terampil
2. Kualitas Tenaga Kerja Yang Masih Rendah
   - ❖ Jumlah Penduduk yang S1,S2, dan S3 masih rendah karena biaya dan kesadaran
   - ❖ Sumber Daya Instruktur Masih Kurang
   - ❖ Sarana dan Prasarana Tidak Memadai
   - ❖ Karakter Pencari Kerja Yang Tidak Produktif
   - ❖ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pelatihan

3. Rendahnya Daya Saing, Produktivitas Kerja dan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Kota Bima Masih didominasi oleh keterbatasan keahlian (Low Skill)

Berdasarkan telaah atas isu strategis pada prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029, maka isu-isu strategis prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Keamanan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya
2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Bermartabat.
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Insfraktruktur dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Bekelanjutan Melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tingkat Penggaguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan Melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.

Isu strategis adalah permasalahan utama dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bima dan Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Kota Bima
- Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, Ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang
- Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAAN KINERJA JANGKA MENENGAH

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan harmonisasi hubungan industrial dan membuka lapangan kerja serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Untuk mewujudkan hal tersebut di Kota Bima, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menyusun perencanaan strategis dengan menetapkan tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kota Bima mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029. Visi Pemerintah Kota Bima, yaitu: "***Mewujudkan Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan.***

Sementara misi yang terkait dengan Ketenagakerjaan merujuk pada Misi II adalah ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju dan Berdaya Saing*** dan Misi ke V yang ingin dicapai oleh Kota Bima adalah ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Iknlusif Yang Berkeadilan, Merata dan Berkelanjutan*** Sementara tujuannya, yaitu Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM, Meningkatnya Daya saing sumber daya manusia di kota bima, dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Pemerintah Kota Bima di bidang ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menindaklanjuti dan merumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah mengacu pada sasaran strategis Daerah Kota Bima, yaitu: meningkatnya kesempatan kerja. Sementara sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang ditetapkan adalah: (1) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan (2) Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja di bidang ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029. Berikut akan disajikan tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima:

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS TENAGA KERJA adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, sedangkan sasaran adalah kondisi spesifik dan terukur yang menggambarkan pencapaian tujuan, baik jangka menengah maupun jangka pendek melalui program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, yang serta merta menampilkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai ukuran kuatitatif yang spesifik untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran suatu program atau kegiatan, dan Target Kinerja adalah nilai spesifik dari indicator kinerja yang dicapai agar suatu tujuan dianggap berhasil.

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah TahunPeriode Rencana Strategis

	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2025	2025	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan kerja	1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja	96,72	97	98
1.1.1		1.1.1.1	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja Yang sesuai Dengan Norma Kerja, Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja	Porsentase Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja Secara Penuh	17,19	20	25

2.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dari uraian di atas maka untuk dapat mengukur Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 1.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025

DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya kesempatan Kerja	1.1.1#.1	Tingkat Penggangguran Terbuka		Meningkatnya Penurunan Tingkat Penganggguran Terbuka		BPS, Dinas Sosial, DUK Capil
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	1.1.1.1#0.1	Tingkat Pertisipasi Angkatan kerja	porsentase	Tingkat Penganggguran Terbuka adalah merupakan rasio jumlah penganggguran terbuka terhadap Angkatan Kerja yang dinyatakan dalam persentase.	$\frac{\sum Angkatan\ Kerja\ yang\ terserap}{\sum Angkatan\ Kerja} x\ 100\ \%$	BPS, Dinas Sosial, DUK Capil

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, Keselamatan dankesehatan kerja	1.1.1.1#0.3	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	prosentase	Persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja secara penuh, dimana norma kerja terdiri dari aturan-aturan yang meliputi: (1) waktu kerja, (2) pengupahan, (3) pemberian tunjangan hari raya, (4) bonus/gratifikasi, (5) fasilitas perusahaan, (6) jaminan social tenaga kerja, (7) program pensiun, (8) perangkat hubungan industrial, (9) program pelatihan, dan (10)	$\frac{\sum \text{Persentase perusahaan yang harmonis/ kondusif}}{\sum \text{Perusahaan}} \times 100\,\%$	Data WLKP, Survey lapangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. Rencana strategis disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dirinci lebih lanjut dalam bentuk rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahunnya.

Secara rinci substansi rencana kinerja tahunan diuraikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pertisipasi Angkatan kerja	Prosentase	96,72
1.1.1		1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, Keselamatan dankesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	Prosentase	17,19

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yanglebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga Mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar ***Rp. 4.913.050.395 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Piluh Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)***.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.4 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengganguran Terbuka	3,27
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pertisipasi Angkatan kerja	96,72
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, Keselamatan dankesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	17,19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS TENAGA KERJA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS TENAGA KERJA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS TENAGA KERJA.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.2 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Timgkat Penganggur an Terbuka	3,20	3,27	97,85 %	Sangat Tingi	BPS
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	97	96,72	100 %	Sangat Tinggi	BPS
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatn ya perlindunga n tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan , dan kesehatan kerja	20	17,19	116 %	Sangat Tingi	WLKP

Target realisasi tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Disnaker Kota Bima Tahun 2025 adalah 3,55 % dan terealisasi sebesar 3,27 % artinya mengalami penurunan sebesar 0,38 %, Capaian kinerja tujuan tahun 2025 sebesar 97,85 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 terutama terkait target tujuan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel 3.1.3 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2018-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran Kota Bima sebesar 4,18% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,39%. Pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 4,42%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sedikit menjadi 3,56%, kemudian naik sedikit di tahun 2022 menjadi 3,73%. Sementara itu, pada tahun 2023 mengalami penurunan tipis sebesar 3,57% dan terus mengalami penurunan diTahun 2025 menjadi 3,27 %

Angka pengangguran terbuka Kota Bima tahun 2018-2025 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 Angka Pengangguran Terbuka Kota Bima 2.089 orang. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan Angka Pengangguran Terbuka sebanyak 1.673 orang dan berlanjut pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 629 orang menjadi 4.391 orang angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2021 angka pengangguran Kota Bima mengalami penurunan sebanyak 701 orang. Pada tahun 2022 terjadi penurunan angka pengangguran terbuka sebanyak 40 orang dengan jumlah pengangguran terbuka mencapai 3.650 dan terus berlanjut pada tahun 2023 sebanyak 3.252 orang dan menurun di 2025 sebanyak 2.844

3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,56	3,73	3,57	3,55	3,27	97,85 %
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	69	78	80	96,72	100 %
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	16,77	18,92	21,98	20	17,19	116 %

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja						

Sementara itu, Usia Angkatan Kerja Kota Bima mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah Usia Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2018 sebesar 122.780 orang, pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 1,88% menjadi 125.094 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,99% menjadi 133.836 orang. Sementara pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan 2,48% menjadi 137.158 orang dan 2022 meningkat menjadi 140.440 orang atau 2,39%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan usia angkatan kerja menjadi 116.600 atau turun sebanyak 16,98%. Begitupun di Tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase 3,27 %

Begitupun dengan persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh baru mencapai 8,27%,sementara pada tahun 2019 tingkat penerapan mencapai 11,08% atau mengalami kenaikan sebesar 2,81% dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 15,33% atau mengalami kenaikan 4,25% dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun 2021 dan 2022 tren persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 16,77% pada tahun 2021 dan sebesar 18,92% pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali pada 21,98%.dan pada Tahun 2025 mengalami penurunan dengan persentase 17,19 %.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA periode 2025-2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Penggangguran Terbuka	3,27	3,55	92,1 %
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,72	97	99,7 %
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	17,19	20	85,95 %

3.1.6 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain(Disnaker Prov NTB)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Keja	Tingkat Pengganguran Terbuka	3,27	3,17	103 %
1.1.1.1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,4	96,72	99,6 %
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	17,19	75	22,92 %

3.1.7 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Keja	Tingkat Pengganguran Terbuka	3,55	3,27	97,85 %		Peningkatan Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenag Kerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	97	96,72	100 %		Peningkatan Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenag Kerja
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	20	17,19	116 %	100 %	Meningkatnya perusahaan yang melaksanakan UMK

Dari tabel 3.1.7 di atas, pencapaian sasaran strategis yang diraih oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bima terdapat indikator-indikator Yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran strategis Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi, Tidak tercapainya target pada sasaran ini karena paket-paket pelatihan bagi pencari kerja tidak dapat dilaksanakan dengan Maksimal. Kedepan, dalam meningkat target kinerja yang belum tercapai yaitu mengoptimalkan kolaborasi BLK serta LPKS dalam melatih pencari kerja sehingga mereka memiliki sertifikat kompetensi sebagai salah satu syarat wajib di dunia kerja, meningkatkan kualitas/kapasitas instruktur dengan melakukan upgrading instruktur baik di BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, meningkatkan sarana dan prasanara pelatihan kerja.

Untuk menilai tingkat penerapan norma kerja menggunakan format wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Pasal 6 ayat (2).

Berdasarkan format wajib lapor ketenagakerjaan, aspek yang dinilai terdiri dari 10 item kuesioner yang terdiri dari: (1) pengupahan, (2) tunjangan hari raya keagamaan, (3) bonus/gratifikasi, (4) fasilitas perusahaan, (5) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (6) program pensiun, (7) perangkat hubungan industrial, (8) rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang, (9) program pelatihan, dan (10) perencanaan kebutuhan latihan bagi pekerja menurut kejuruan.

3.1.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi
1	2	5	6	7	8
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	4,384,054,595.00	4,160,248,715.00	94.90%	50.01
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58,997,400.00	58,613,400.00	99.35%	50.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6,882,000.00	6,882,000.00	100%	50.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7,014,000.00	7,014,000.00	100%	50.00
5	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2,504,000.00	2,504,000.00	100%	50.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2,504,000.00	2,504,000.00	100%	50.00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,824,000.00	4,440,000.00	92.04%	50.00
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,224,000.00	27,224,000.00	100%	50.00
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,461,988,359.00	2,439,900,601.00	99%	49.74
10	Penyediaan Gaji dan			99%	

	Tunjangan ASN	2,278,442,159.00	2,262,573,001.00		49.23
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39,799,200.00	38,670,600.00	97%	49.58
12	Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129,500,000.00	124,410,000.00	96%	49.82
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,458,000.00	7,458,000.00	100%	50.00
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1,892,000.00	1,892,000.00	100%	50.00
15	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,897,000.00	4,897,000.00	100%	50.00
16	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10,380,000.00	9,882,000.00	95%	49.47
17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	4,722,000.00	4,440,000.00	94%	49.93
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	5,658,000.00	5,442,000.00	96%	49.53
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,537,000.00	22,737,000.00	82%	48.27
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	22,737,000.00	22,737,000.00	82%	(4.88)
21	Administrasi UmumPerangkat Daerah	274,128,800.00	251,693,230.00	91.82%	50.01
22	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	33,856,800.00	33,856,800.00	100%	50.00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	191,152,030.00	95.58%	50.01
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	40,272,000.00	26,685,000.00	66%	49.01

	Elektronik pada SKPD				
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624,750,236.00	599,313,247.00	95%	47.56
26	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	50.00
27	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	115,923,000.00	115,483,225.00	99%	48.43
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	498,827,236.00	473,830,022.00	94%	47.37
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,254,000.00	264,408,933.00	85%	49.34
30	Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	72,000,000.00	65,565,000.00	91%	49.83
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,054,000.00	40,233,933.00	53%	47.14
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163,200,000.00	158,610,000.00	97%	49.52
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,200,000.00	158,610,000.00	97%	49.52
34	Penyediaan Jasa Pewmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39,000,000.00	31,475,240.00	80%	47.79
35	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15,240,000.00	6,063,000.00	39%	44.98
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9,010,000.00	3,275,000.00	36%	47.58
37	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	120,620,000.00	78,000,501.00	64%	47.40
38	Penataan Organisasi			50%	

		3,324,000.00	1,684,000.00		46.69
39	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	3,324,000.00	1,684,000.00	50%	46.69
40	Peyusunan Rencana Tenaga Kerja	11,842,400.00	11,640,000.00	98%	49.26
41	Fasilitasi Penyusunan Rencana tenaga Kerja Mikro	11,842,400.00	11,640,000.00	98%	49.26
42	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	511,543,000.00	460,131,500.00	89%	47.33
43	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	76,227,000.00	75,970,880.00	99%	48.32
44	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	511,543,000.00	460,131,500.00	89%	47.33
45	Proses pelaksanan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berdasarkan klaster Kompetensi	341,523,000.00	340,111,500.00	99%	48.52
46	Pengadaan Sarana Pelatihan Kab/Kota	170,020,000.00	120,020,000.00	70%	47.89
47	Program Penempatan Tenaga Kerja	172,502,400.00	165,032,400.00	95%	48.24
48	Pelayanan antar Kerja di daerah Kab/Kota	86,713,000.00	80,693,000.00	93%	49.85
49	Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan BagiPencari Kerja	54,340,000.00	51,090,000.00	94%	49.95
50	Perluasan Kesempatan Kerja	32,373,000.00	29,603,000.00	91%	48.78
51	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	53,702,400.00	52,752,400.00	98%	49.41
52	Job Fair/Bursa Kerja	53,702,400.00	52,752,400.00	98%	49.41
53	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	32,087,000.00	31,587,000.00	98%	48.87
54	Peningkatan Perlindungan dan Kompetenmsi calon Pekerja Migran (PMI)	32,087,000.00	31,587,000.00	98%	48.87
55	Program Hubungan Industrial			83%	

		168,253,000.00	140,559,283.00		48.37
56	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	107,809,000.00	85,599,200.00	79%	48.74
57	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37,420,000.00	18,210,000.00	48%	46.54
58	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70,389,000.00	67,389,200.00	95%	48.06
59	Pencegahan dan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kota/Kab	60,444,000.00	54,960,083.00	90%	47.42
60	Pencegahan Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	6,969,000.00	6,705,000.00	96%	49.45
61	Penyelesaian Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	22,314,000.00	21,410,000.00	95%	47.50
62	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	31,161,000.00	26,845,083.00	86%	49.57

3.9.1 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.1.1				**Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota**				menunjang	
1.1.1.1.1	Meningktan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	3,38 %	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.1.1	Meningkatkan Kesempatan	Meningkatnya Partisipasi	3,27 &	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan hasil Laporan	1 Dok	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
	Kerja	angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembangunan BLK sebagai wadah penyediaan tenaga ketrja terampil serta peningkatan akses permodalan			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
1.1.1.1.1.2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,72 %	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan hasil Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Dok	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					Dokumen RKA SKPD				
1.1.1.1.3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Presentase Perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	17,19 %	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA SKPD dan hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1				Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan	4 laporan	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.1.1.1.3.1.1				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1.2				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang Yang menerima GAji dan Tunjangan ASN	21 orang	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1.3				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang menerima GAji dan Tunjangan ASN	21 orang	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1.4				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2				Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian?verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2.1				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	4 Lap	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Tahun SKPD	Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
1.1.1.1.3.2.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penhyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Hasil laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	2 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2.3				Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2.4				**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.3.3				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik	1 Dok	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Barang Milik daerah SKPD	Daerah SKPD				
1.1.1.1.3.3				Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	4 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.3.1				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.3.3.2				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Yang Menghadiri Sosialisssi Peraturan Perundang undangan	50 Org	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4				**Administrasi UmumPerangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.4.1				Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	12 paket	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.1				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 Lap	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					SKPD				
1.1.1.1.4.2				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.1				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		10 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.2				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang disediakan	10 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.3				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.4				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang disediakam	2 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5				**Penyediaan Jasa Penunjang**				menunjan	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Urusan Pemerintahan Daerah				g	
1.1.1.1.5.1				Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	12 lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.3				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.4				Penyediaan Jasa Pewmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas,atau Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.1.1.1.5.1.5				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perijinannya	4 unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	12 unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.2				Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.2.1				**Penataan Organisasi**				menunjang	
1.1.1.1.5.2.2				Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Lap	100 %	menunjang	
				Peyusunan Rencana Tenaga Kerja				menunjang	
				Fasilitasi Penyusunan Rencana tenaga	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu	50 org	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Kerja Mikro	Menyusun RTK Mikro				
1.1.1.1.5.2.3				**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.2.4				**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				menunjang	
1.1.1.1.5.3				Pembinaan Lembaga Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.3.1				**Program Penempatan Tenaga Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.4				**Pelayanan antar Kerja di daerah Kab/Kota**				menunjang	
1.1.1.1.5.4.1				Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan BagiPencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan Penhyuluhan dan Bimbingan Jabatan	400 org	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.4.2				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui program Perluasan	120 org	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					Kesempatan kerja				
1.1.1.1.5.4.3				**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.5				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan dari Job Fair/Bursa kerja	200 org	75 %	menunjang	
1.1.1.1.5.5.1				**Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota**				menunjang	
1.1.1.1.5.5.2				Peningkatan Perlindungan dan Kompetenmsi calon Pekerja Migran (PMI)	Jumlah CPMI yang Dilindungi dan di Tingkatkan Kompetensinya	100 org	50 %	menunjang	
1.1.1.1.5.5.3				**Program Hubungan Industrial**				menunjang	
1.1.1.1.5.5.4				**Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk**				menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota					
1.1.1.1.5.5.5				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan Perusahaan Yang Terkait Dengan Hubungan industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.6				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	JumlaH Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar sebagai Peserta	4 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.6.1				**Pencegahan dan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan**				menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Penutupan Perusahaan di Daerah Kota/Kab					
1.1.1.1.5.6.2				Pencegahan Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan Yang DiCegah	15 Perkara	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.6.3				Penyelesaian Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Diselesaikan	15 Perkara	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.7				Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan	Terlaksananya Program JAminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas kesejahteraan	200 org	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Pekerja	Pekerja				
1.1.1.1.5.7.1				**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan**				menunjang	
1.1.1.1.5.7.2				Penyediaaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.7.3				**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.8				**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**				menunjang	
1.1.1.1.5.8.1				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetnsi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 org	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.8.2				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan	12 Unit	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					Kerja				

3.1.9 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota**	**4.384.054.595**	**4.160.248.715**	**94.90%**
1.1.1.1.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.997.400**	**58.613.400**	**99.35%**
1.1.1.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.882.000	6.882.000	100 %
1.1.1.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.014.000	7.014.000	100%
1.1.1.1.1.1.3	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.504.000	2.504.000	100%
1.1.1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	2.504.000	2.504.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	DPA SKPD			
1.1.1.1.3.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.824.000	4.440.000	92,04%
1.1.1.1.3.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.224.000	27.224.000	100%
1.1.1.1.3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.461.988.359	2.439.900.601	99%
1.1.1.1.3.1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.278.442.159	2.262.573.001	99 %
1.1.1.1.3.1.4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.799.200	38.670.600	97 %
1.1.1.1.3.2	Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.500.000	124.410.000	96 %
1.1.1.1.3.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.458.000	7.458.000	100 %
1.1.1.1.3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1.892.000	1.892.000	100 %
1.1.	Penyusunan Pelaporan	4.897.000	4.897.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.2.3	Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
1.1.1.1.3.2.4	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	10.380.000	9.882.000	95 %
1.1.1.1.3.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	4.722.000	4.440.000	94 %
1.1.1.1.3.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	5.658.000	5.442.000	96 %
1.1.1.1.3.3.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	27.537.000	22.737.000	82 %
1.1.1.1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	22.737.000	22.737.000	82 %
1.1.1.1.4.1	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	274.128.800	251.693.230	91.82%
1.1.1.1.4.2	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	33.856.800	33.856.800	100 %
1.1.1.1.4.2.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	191.152.030	95.58%
1.1.1.1.4.2.2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.272.000	26.685.000	66 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.4.2.3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	624.750.236	599.313.247	95%
1.1.	Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100 %
1.1.1.1.5	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	115.923.000	115.483.225	99 %
1.1.1.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	498.827.236	473.830.022	94 %
1.1.1.1.5.1.1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	310.254.000	264.408.933	85 %
1.1.1.1.5.1.2	Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	72.000.000	65.565.000	91 %
1.1.1.1.5.1.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.054.000	40.233.933	53%
1.1.1.1.5.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000	158.610.000	97 %
1.1.1.1.5.1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	163.200.000	158.610.000	97 %
1.1.1.1.5.1.6	Penyediaan Jasa Pewmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	39.000.000	31.475.240	80 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dinas jabatan			
1.1.1.1.5.2	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15.240.000	6.063.000	39 %
1.1.1.1.5.2.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.010.000	3.275.000	36 %
1.1.1.1.5.2.2	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	120.620.000	78.000.501	64 %
1.1.1.1.5.2.3	**Penataan Organisasi**	3.324.000	1.684.000	50 %
1.1.1.1.5.2.4	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	3.324.000	1.684.000	50 %
1.1.1.1.5.3	**Peyusunan Rencana Tenaga Kerja**	11.842.400	11.640.000	98 %
1.1.1.1.5.3.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana tenaga Kerja Mikro	11.842.400	11.640.000	98 %
1.1.1.1.5.4	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	511.543.000	460.131.500	89 %
1.1.1.1.5.4.	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	76.227.000	75.970.880	99 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
1.1.1.1.5.4.2	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	511.543.000	460.131.500	89 %
1.1.1.1.5.4.3	Proses pelaksanan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berdasarkan klaster Kompetensi	341.523.000	340.111.500	99 %
1.1.1.1.5.4.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kab/Kota	170.020.000	120.020.000	70 %
1.1.1.1.5.4.3	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	172.502.400	165.032.400	95 %
1.1.1.1.5.5	**Pelayanan antar Kerja di daerah Kab/Kota**	86.713.000	80.693.000	93 %
1.1.1.1.5.5.1	Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan BagiPencari Kerja	54.340.000	51.090.000	94 %
1.1.1.1.5.5.2	Perluasan Kesempatan Kerja	32.373.000	29.603.000	91 %
1.1.1.1.5.5.3	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	53.702.400	52.752.400	98 %
1.1.1.1.5.5.	Job Fair/Bursa Kerja	53.702.400	52.752.400	98 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4				
1.1.1.1.5.5.5	**Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota**	32.087.000	31.587.000	98 %
1.1.1.1.5.6	Peningkatan Perlindungan dan Kompetenmsi calon Pekerja Migran (PMI)	32.087.000	31.587.000	98 %
1.1.1.1.5.6.1	**Program Hubungan Industrial**	168.253.000	140.559.283	83 %
1.1.1.1.5.6.2	**Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	107.809.000	85.599.200	79 %
1.1.1.1.5.6.3	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37.420.000	18.210.000	48 %
1.1.1.1.5.7	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70.389.000	67.389.200	95 %
1.1.1.1.5.7.1	**Pencegahan dan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah**	60.444.000	54.960.083	90 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kota/Kab			
1.1.1.1.5.72	Pencegahan Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	6.969.000	6.705.000	96 %
1.1.1.1.5.73	Penyelesaian Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	22.314.000	21.410.000	95 %
1.1.1.1.5.8	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	31.161.000	26.845.083	86 %

IV

PENUTUP

4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025. LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 memiliki nilai strategis karena penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025.

Berdasarkan sasaran strategis RPJMD, tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan satu tujuan yaitu: Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,55% dan realisasi 3,57% dengan tingkat capaian 99,44%.

Sementara itu, pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan 2 sasaran strategis dengan masing masing satu indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dibandingkan dengan Target Perencanaan Jangka menengah sampai tahun 2025, pencapaian sasaran Dinas Tenaga kerja Kota Bima adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari target 75% terealisasi 78,09% dengan tingkat capaian 104,12%.
- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dengan indikator kinerja persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh dari target 25% terealisasi 21,98% dengan tingkat capaian 87,92%.

Capaian sasaran strategis I dan II terhadap target jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima masing-masing sebesar 104,12% dan 87,92%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebesar 96,02%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Tenaga

Kerja Kota BimaTahun 2025 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan dan hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik.

4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimalisasi Anggaran untuk bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

LKIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

PEMERINTAH KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Sebagai Sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 disusun berdasarkan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peneteapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adapun maksud disusunnya LKIP ini adalah :

1. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
2. Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu Organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandate.
3. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.
4. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Kota Bima, Januari 2026

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Taufikrahman, S. Pd, M. A. P
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19691217 199403 1005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Gambaran Umum SKPD 4
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 5
1.3 Sumber Daya,Sarana dan Prasarana 16
1.4 Isu Strategis dan Permasalahan 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 195
2.1 Perencanaaan Kinerja Jangka Menengah 196
2.2 Indikator Kinerja Utama (Iku) 207
2.3 Rencana Kinerja Tahunan 238
2.4 Program Dan Kegiatan Tahun 2025 .....
2.5 Perjanjian Kinerja .....
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1 Pencapaian Kinerja Tujuan .....
3.2 Pencapaian Kinerja berdasarkan pencapaian Sasaran Strategis .....
3.3 Realisasi Anggaran .....
3.4 Pengukuran Kinerja Keuangan .....
BAB IV PENUTUP 59
4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 59
4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah 60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum SKPD

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai:

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah: *"Membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan di Bidang Ketenagakerjaan"* dimana Tugas dan Fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 adalah sebagai :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi Misi Daerah;
b) Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan Walikota;
c) Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan;
d) Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan Peran sarana dan prasarana Perangkat Daerah;
e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan; dan
f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

1) Sekretariat mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta renacna strategis Dinas;
   b. penyusunan bersma program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
   c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat;
   d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
   e. pembinaan dan pengendalian administrasian keuangan dan kepegawaian Dinas;
   f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan;
   g. Penyelenggaraan kehumasan Sekretariat;
   h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
   i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala; dan
   j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi.

Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Pelakanaan urusan recana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawaian;
   c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
   f. Pelaksanaan urusan kepegawian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
   g. Penyusunan laporan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

h. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan gungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program;
   c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang tenaga kerja;
   d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang tenaga kerja;
   e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang tenaga kerja;
   f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja;
   g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
   h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
   i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; dan
   j. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan gungsinya.

C. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga

1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerjadan perluasan kerja.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi:
   a. Pelaksana tugas dibidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   b. Pelaksana penempatan tenaga kerja;
   c. Pelaksana penyelenggara bimbingan lembaga pelatihan kerja;
   d. Pelaksana pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja;
   e. Pelaksana penyelenggaara informasi pasar kerja dan bursa kerja;

f. Pelaksana pemberian rekomendasi dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaa tenaga kerja;
g. Pelaksana pengembangan dan perluasan kerja; dan
h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi:

a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
b. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
c. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.

1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja mepunyai tugas melaksanakan tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Seksi Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga kerja;
   b. Pelaksana pengolahan data pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
   c. Pelaksana pembina dan pengembangan lembaga pelatihan kerja;
   d. Pelaksana operasional pemasaran program, hasil produksi dan lulusaan pelatihan;
   e. Pelaksana fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan;
   f. Pelaksana operasional program pemagangan;
   g. Pelaksana operasional standarisasi produktivitas;
   h. Pelaksana operasional pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas;
   i. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengn tugas dan fungsinya.

b. Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

1) Seksi informasi pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
   b. Pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;

c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja:
d. Pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
e. Pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
f. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan kelompok tugas kerja:
g. Pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara;
h. Pelaksanaan operasional penertiban danpengendalian izin pendirian serta pembinaanLembaga Bursa Kerja Khusus;
i. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair);
j. Pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, peyandang cacat dan usia lanjut;
k. Pelaksanaan operasional verifiksasi dan dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
l. Pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja; dan
m. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja

1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas mempersiapakan bahan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri, pendayagunaan tenaga kerja serta pengembangan dan penyerbaluasan informasi teknologi tepat guna
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud, seksi pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan dan pelaksana pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   b. Pelaksanaan pengolahan data pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
   c. Pelaksanaan operasional bina produktivitas dan pendayagunaan tenaga kerja;
   d. Pelaksanaan opersional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja;
   e. Pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri;
   f. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja;

g. Pelaksanaan operasional pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Hubungan Industrial

1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang hubungan Industrial;

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

c. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan inndustrial, perundingan dan pembuatan kesepkatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;

d. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;

e. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;

f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial;

g. Pelaksanaan dan pendataan,verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;

h. Pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama;

i. Penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan;

j. Pelaksanaan pembinaan dan persyaratan kerja;

k. Pelaksanaan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha;

l. Pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

n. Pembuatan dsn penempatan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;

o. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;

p. Pendaftaran dan pengusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;

q. Pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;

r. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;

s. Pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
t. Pemrosesan pencabutan izin opersional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
u. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
v. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
w. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
y. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
z. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
aa. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang hubungan Industrial, membawahi:

a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
b. Seksi Norma Kerja; dan
c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja

1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dan persyaratan Kerja mempunyai tugas pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Persyaratan Kerja;
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,seksi peny elesaian Perselisihan hubungan Industrial dan Persyaratan kerja mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;
   b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
   c. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan;
   d. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
   e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan kerja;
   f. Pelaksanaan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial;

g. Pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
h. Fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta *lock out* (penutupan perusahaan);
i. Pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja;
j. Pembuatan dan penempatan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
k. Fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa pekerja serta *lock out;*
l. Pelaksaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
m. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakejaan;
n. Pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian diluar pengadilan;
o. Penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran dan pengusulan formasi serta pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator, dan arbiter;
p. Pelaksanaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggran (DPPA);
q. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
u. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
v. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan;
w. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan bahan rencana kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan;
x. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjan Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
y. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum;

z. Pelaksanaan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);

aa. Penyiapan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK);

ab. Penyiapan berkas-berkas untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksnaaan Upah Minimum Kota (UMK);

ac. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah;

ad. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D);

ae. Pelaksanaan pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR);

af. Pemberian bimbinganaplikasi pengupahan di perusahaan;

ag. Pelaksanaanpembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB);

ah. Pelaksanaan inventarisasi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

aj. Pemantauan Pelaksanaan Perjanjina Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

ak. Peneliatian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);

al. Pelaksana pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

am. Pelaksanaan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama;

an. Pendaftaran dan pendataan Perjanjian Kerja Bersama (PKB);

ao. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit;

ap. Perencanaan dan pelaksanaan sidang-sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit;

aq. Pelaksanaan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit;

ar. Penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusaan pemberi kerja dengan prusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

as. Penyiapan bahan dalam rangka pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;

at. pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

au. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

av. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI);

aw. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

ax. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

ay. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Norma Kerja

1) Seksi Norma Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan norma kerja

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;

b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja;

c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus;

d. Penyiapan bahan pengkajian teknis dalam rangka penyempurnaan norma kerja;

e. Penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan;

f. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data laporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;

g. Pelaksanaan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan;

h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja;

i. Penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan.

j. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);

k. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);

l. Pelaksanaan sistem pengendalian intern(SPI);

m. Pelaksanaan standarpelayanan minimal (SPM);

n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1. Seksi jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi jaminan sosial tenaga mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan danpengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
   b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja;
   c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT);
   d. Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
   e. Pelaksanaan koordinasi dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja(Jamsostek);
   f. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
   g. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
   h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI);
   i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
   j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
   k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tuga membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

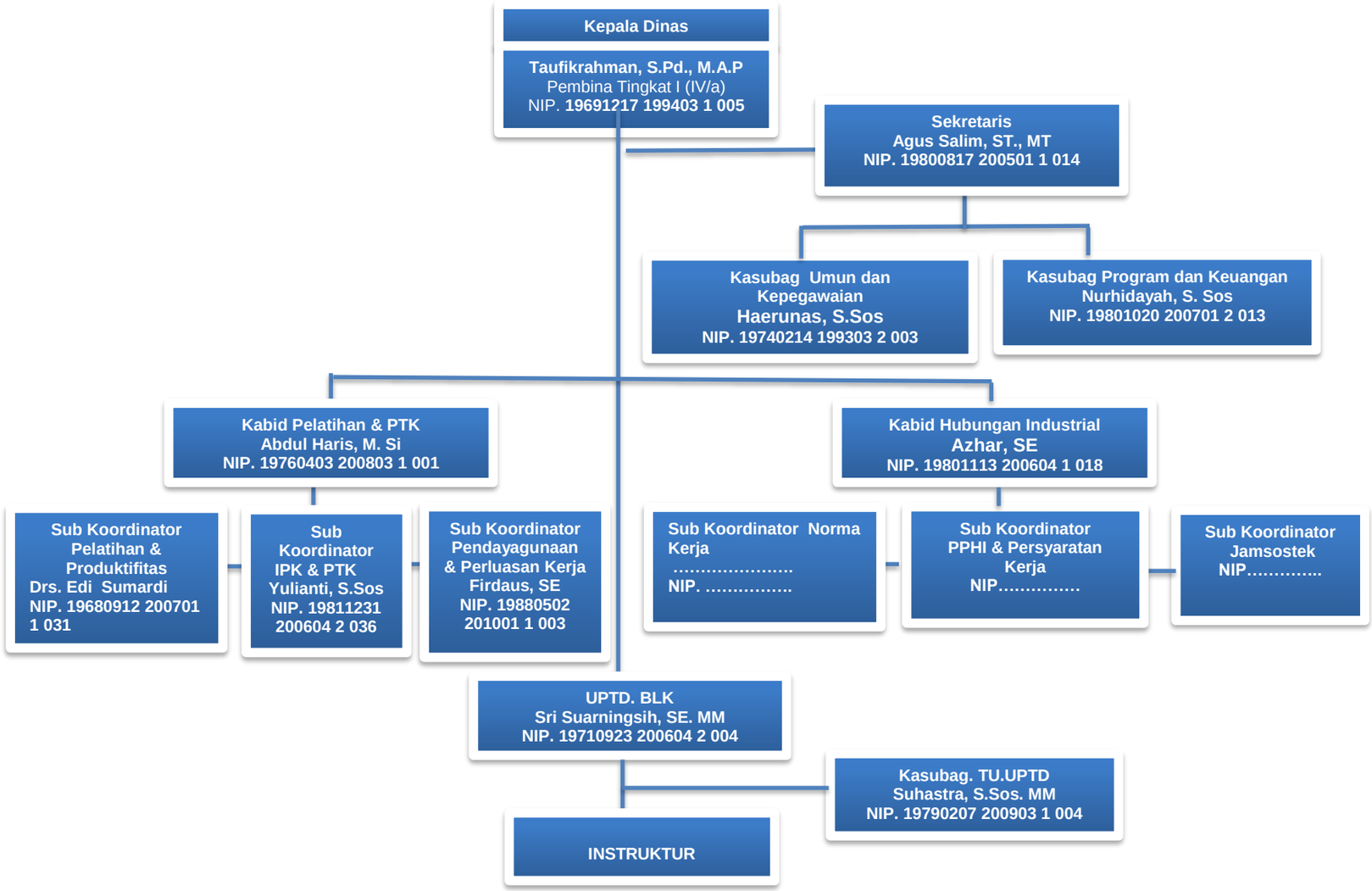
a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
b. Kelompok Jabatan Funsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang di tunjuk.
d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasrkan ketentuan perundang-undangan.
e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
    1) Kasubag Umum dan Kepegawaian.
    2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
    1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
    2) Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
    3) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
4. Bidang Hubungan Industria, membawahi:
    1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
    2) Seksi Norma Kerja
    3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional


Kepala Dinas
Taufikrahman, S.Pd., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/a)
NIP. 19691217 199403 1 005
Sekretaris
Agus Salim, ST., MT
NIP. 19800817 200501 1 014
Kasubag Umun dan Kepegawaian
Haerunas, S.Sos
NIP. 19740214 199303 2 003
Kasubag Program dan Keuangan
Nurhidayah, S. Sos
NIP. 19801020 200701 2 013
Kabid Pelatihan & PTK
Abdul Haris, M. Si
NIP. 19760403 200803 1 001
Kabid Hubungan Industrial
Azhar, SE
NIP. 19801113 200604 1 018
Sub Koordinator Pelatihan & Produktifitas
Drs. Edi Sumardi
NIP. 19680912 200701 1 031
Sub Koordinator IPK & PTK
Yulianti, S.Sos
NIP. 19811231 200604 2 036
Sub Koordinator Pendayagunaan & Perluasan Kerja
Firdaus, SE
NIP. 19880502 201001 1 003
Sub Koordinator Norma Kerja
……..
NIP. ……..
Sub Koordinator PPHI & Persyaratan Kerja
NIP……..
Sub Koordinator Jamsostek
NIP……..
UPTD. BLK
Sri Suarningsih, SE. MM
NIP. 19710923 200604 2 004
Kasubag. TU.UPTD
Suhastra, S.Sos. MM
NIP. 19790207 200903 1 004
INSTRUKTUR

1.3 Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3.1 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Berdasarkan Eselon

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH (ORG)
1	Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekretaris	III/a	1
4	Kepala Bidang	III/b	2
3	Kepala Sub.Bagian/Kepala Kepala Seksi	IV/a	2
4	Kepala Sub Bagian	IV/b	1
Jumlah			*7*

1.3.2 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Berdasarkan Golongan/Ruang

	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I/ IVb	1 Orang
2	Pembina / IVa	4 Orang
3	Penata Tkt. 1/ III d	10 Orang
4	Penata / III c	2 Orang
5	Penata Muda Tkt I /III b	1
6	Penata Muda / III a	2
Jumlah		*20*

1.3.3 Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1	S2	6 Orang
2	S1	16 Orang
4	SMA	Orang
5	SMP	Orang
Jumlah		*22 Orang*

Tabel 1.3.4 Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat diperlukan adanya dukungan Sarana dan prasarana yang memadai disamping dukungan sumber daya manusia (aparatur). Beberapa dukungan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, antara lain :

NO	SARANA DAN PRASARANA	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Kursi rapat			100
2	Lemari Kayu			1
3	Kursi Kayu			1
4	Meja KAyu			4
5	Kursi Putar			2
6	Meja ½ Biro			25
7	Panci			1
8	Oven/gas			3
9	Mixer			2
10	Laptop		1	14
11	Berangkas			1
12	Piling Kabinet Besi			9
13	PC		1	10
14	Kunci Pas			1
15	Kunci Momen			2
16	Sound Sytem			1
17	Printer		1	14
18	Peralatan Cetak Lain			2
19	Kipas Angin			3
20	Kursi Kerja			9
21	Sepeda Motor			3
22	LCD			1
23	Scaner			1
24	Mesin Kompresor			2
25	Meja Komputer			2
26	Lemari Buku Arsip			2
27	Meja Kerja Kayu			3
28	Tag Kombinasi			1
29	Tangga Alumunium			1
30	Mobil			1
31	Motor			3
32	Lemari Buku Arsip Dinamis			2

33	Kursi Tamu			1
34	Kompor Gas			2
35	Bangku Tunggu			1
36	Mesin Bor Tangan			1
37	Perkakas Bengkel			80
38	Kursi Pejabat			2
39	Meja Pejabat			2
40	AC			9

1.4 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Dalam perencanaan pembangunan isu strategis adalah kondisi yang harus dikedepankan, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa yang akan datang. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan Kota Bima serta permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPD Kota Bima Tahun 2025-2029

Masalah angka pengangguran terbuka yang masih tinggi merupakan salah satu masalah yang krusial yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima. Pada kurun waktu tahun 2020-2022 Angka Pengangguran Terbuka Kota Bima mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 jumlah pengangguran 4.391 orang kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 3.687 orang terus menurun menjadi 3.652 pada tahun 2022. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,42% terus menurun pada tahun 2021 menjadi 3,56% , naik kembali menjadi 3,73% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 turun menjadi 3,26%, dan ditahun 2024 terjadi kenaikan tipis 3,27 %

Di samping itu permasalahan yang dihadapi pada urusan tenaga kerja ini adalah perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, dimana jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh baru 157 perusahaan dari 913 perusahaan yang terdaftar

Beberapa permasalahan di Kota Bima yang perlu ditangani di tahun 2025-2026 berdasarkan pendekatan Urusan Pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Adanya Kesenjangan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan peningkatan jumlah pencari kerja :
   - ❖ Lapangan Kerja Masih Terbatas
   - ❖ Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelatihan Kurang Memadai
   - ❖ Kurikulum Belum mengikuti Pasar Kerja
   - ❖ Minimnya Lapangan Kerja untuk Tenaga Kerja Kurang Terampil
2. Kualitas Tenaga Kerja Yang Masih Rendah
   - ❖ Jumlah Penduduk yang S1,S2, dan S3 masih rendah karena biaya dan kesadaran
   - ❖ Sumber Daya Instruktur Masih Kurang
   - ❖ Sarana dan Prasarana Tidak Memadai
   - ❖ Karakter Pencari Kerja Yang Tidak Produktif
   - ❖ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum dijadikan sebagai dasar penentuan sasaran pelatihan

3. Rendahnya Daya Saing, Produktivitas Kerja dan Kesempatan Kerja Tenaga Kerja Kota Bima Masih didominasi oleh keterbatasan keahlian (Low Skill)

Berdasarkan telaah atas isu strategis pada prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029, maka isu-isu strategis prioritas Pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Keamanan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya
2. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing dan Bermartabat.
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan,Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
4. Pengembangan Insfraktruktur dan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Bekelanjutan Melalui Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
6. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tingkat Penggaguran Terbuka dan Ketimpangan Pendapatan Melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.

Isu strategis adalah permasalahan utama dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bima dan Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Kota Bima
- Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, Ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang
- Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAAN KINERJA JANGKA MENENGAH

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dan harmonisasi hubungan industrial dan membuka lapangan kerja serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. Untuk mewujudkan hal tersebut di Kota Bima, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menyusun perencanaan strategis dengan menetapkan tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Tenaga Kerja Kota Bima mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029. Visi Pemerintah Kota Bima, yaitu: "***Mewujudkan Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan.***

Sementara misi yang terkait dengan Ketenagakerjaan merujuk pada Misi II adalah ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju dan Berdaya Saing*** dan Misi ke V yang ingin dicapai oleh Kota Bima adalah ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Iknlusif Yang Berkeadilan, Merata dan Berkelanjutan*** Sementara tujuannya, yaitu Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM, Meningkatnya Daya saing sumber daya manusia di kota bima, dan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Pemerintah Kota Bima di bidang ketenagakerjaan, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menindaklanjuti dan merumuskan dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah mengacu pada sasaran strategis Daerah Kota Bima, yaitu: meningkatnya kesempatan kerja. Sementara sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang ditetapkan adalah: (1) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan (2) Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sasaran strategis, indikator dan target kinerja di bidang ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029. Berikut akan disajikan tentang Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima:

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS TENAGA KERJA adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, sedangkan sasaran adalah kondisi spesifik dan terukur yang menggambarkan pencapaian tujuan, baik jangka menengah maupun jangka pendek melalui program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen seperti Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan, yang serta merta menampilkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja sebagai ukuran kuatitatif yang spesifik untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran suatu program atau kegiatan, dan Target Kinerja adalah nilai spesifik dari indicator kinerja yang dicapai agar suatu tujuan dianggap berhasil.

Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TENAGA KERJA KOTA BIMA

		RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN					SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
		2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
Memperluas kesempatan kerja di Kota Bima berbasis peningkatan kualitas SDM	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26	3,25	3,20	3,18	3,17	1. Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96	97	98	99	100
Menigkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Bima	Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas Berkualifikasi Berpendidikan tinggi	23,60	23,77	23,94	24,10	24,27	2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Presentase Perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	17,19	20	21	22	23
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,32	5,37	5,42	5,48							

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dari uraian di atas maka untuk dapat mengukur Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis sebagaimana dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 1.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN RUMUS PERHITUNGAN DAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Penggaguran Terbuka	$\frac{\sum \text{Pengangguran Terbuka}}{\sum \text{Angkatan Kerja}} \times 100\% \ \frac{(2844 \times 100\%)}{86914}$ Tingkat Pengangguran Terbuka adalah merupakan rasio jumlah penggangguran terbuka terhadap angkatan kerja yang dinyatakan dalam persentase	3,27 %	Kepala Dinas
2	Menigkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Bima	Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas Berkualifikasi Berpendidikan tinggi	Penduduk 15 Tahun keatas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jengjang perguruan tinggi dari indicator ini mencapai 100%(seluruh penduduk berusia 15 tahun keatas diwilayah/daerah tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi) jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, SI, S2, S3 $\frac{\sum \text{Penduduk usia 15 tahun keatas yang berijazah pendidikan tinggi di daerah} \times 100\%}{\sum \text{Penduduk usia 15 tahun keatas didaerahnya}}$	23,60	Kepala Dinas
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\sum PDRB(t) - PDB(t-1) \times 100\%}{PDB\ (t-1)}$ Ket : R =Tingkat Pertumbuhan	5,26	Kepala Dinas
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PENJELASAN RUMUS PERHITUNGAN DAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB

1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\sum \square\square\square\square\square\square\square\square\square}{\sum \textbf{\textit{Penduduk Usia 15 tahun ke atas}}}$ x 100% $\frac{(86914 \times 100\%)}{840701}$ TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.	96,72 %	Kepala Dinas
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	$\frac{\sum \textbf{\textit{Perusahaan yang melaksanakan norma kerja secara penuh}}}{\textbf{\textit{Total perusahaan}}}$ **x 100%** $\frac{157 \times 100}{913}$ Persentase perusahaan yang melaksanakan norma kerja secara penuh, dimana norma kerja terdiri dari aturan-aturan yang meliputi: (1) waktu kerja, (2) pengupahan, (3) pemberian tunjangan hari raya, (4) bonus/gratifikasi, (5) fasilitas perusahaan, (6) jaminan social tenaga kerja, (7) program pensiun, (8) perangkat hubungan industrial, (9) program pelatihan, dan (10) perencanaan kebutuhan	17,19 %	Kepala Dinas

DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja adalah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan pada satu tahun tertentu. Rencana strategis disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan dirinci lebih lanjut dalam bentuk rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahunnya.

Secara rinci substansi rencana kinerja tahunan diuraikan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.1.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TENAGA KERJA KOTA BIMA

	RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN										
INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
	2025	2026	2027	2028	2029			2025	2026	2027	2028	2029
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,26	3,25	3,20	3,18	3,17	2. Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96	97	98	99	100
Proporsi Penduduk 15 Tahun keatas Berkualifikasi Berpendidikan tinggi	23,60	23,77	23,94	24,10	24,27	2. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Presentase Perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	17,19	20	21	22	23
Pertumbuhan Ekonomi	5,26	5,32	5,37	5,42	5,48							

2.1.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yanglebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga Mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama. Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar ***Rp. 4.913.050.395 (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Lima Piluh Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)***.

Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.4 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Pertisipasi Angkatan kerja	96,72
2	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, Keselamatan dankesehatan kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	17,19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS TENAGA KERJA selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS TENAGA KERJA yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS TENAGA KERJA.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.2 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel 3.1.3 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun n

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Timgkat Penganggur an Terbuka	3,20	3,27	97,85 %	Sangat Tingi	BPS
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	97	96,72	100 %	Sangat Tinggi	BPS
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindunga n tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan , dan kesehatan kerja	20	17,19	116 %	Sangat Tingi	WLKP

Target realisasi tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Disnaker Kota Bima Tahun 2025 adalah 3,55 % dan terealisasi sebesar 3,27 % artinya mengalami penurunan sebesar 0,38 %, Capaian kinerja tujuan tahun 2025 sebesar 97,85 %. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2025 terutama terkait target tujuan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel 3.1.3 di atas Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima Tahun 2018-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran Kota Bima sebesar 4,18% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 2,39%. Pada tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi 4,42%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sedikit menjadi 3,56%, kemudian naik sedikit di tahun 2022 menjadi 3,73%. Sementara itu, pada tahun 2023 mengalami penurunan tipis sebesar 3,57% dan terus mengalami penurunan diTahun 2025 menjadi 3,27 %

Angka pengangguran terbuka Kota Bima tahun 2018-2025 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 Angka Pengangguran Terbuka Kota Bima 2.089 orang. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan Angka Pengangguran Terbuka sebanyak 1.673 orang dan berlanjut pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 629 orang menjadi 4.391 orang angka pengangguran terbuka. Pada tahun 2021 angka pengangguran Kota Bima mengalami penurunan sebanyak 701 orang. Pada tahun 2022 terjadi penurunan angka pengangguran terbuka sebanyak 40

orang dengan jumlah pengangguran terbuka mencapai 3.650 dan terus berlanjut pada tahun 2023 sebanyak 3.252 orang dan menurun di 2025 sebanyak 2.844

3.1.4 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,56	3,73	3,57	3,55	3,27	97,85 %
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75	69	78	80	96,72	100 %
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan	16,77	18,92	21,98	20	17,19	116 %

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kerja	kerja						

Sementara itu, Usia Angkatan Kerja Kota Bima mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah Usia Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2018 sebesar 122.780 orang, pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 1,88% menjadi 125.094 orang. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan sebesar 6,99% menjadi 133.836 orang. Sementara pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan 2,48% menjadi 137.158 orang dan 2022 meningkat menjadi 140.440 orang atau 2,39%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan usia angkatan kerja menjadi 116.600 atau turun sebanyak 16,98%. Begitupun di Tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase 3,27 %

Begitupun dengan persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh baru mencapai 8,27%,sementara pada tahun 2019 tingkat penerapan mencapai 11,08% atau mengalami kenaikan sebesar 2,81% dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 15,33% atau mengalami kenaikan 4,25% dibandingkan dengan tahun 2019. Di tahun 2021 dan 2022 tren persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh terus mengalami kenaikan yaitu mencapai 16,77% pada tahun 2021 dan sebesar 18,92% pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali pada 21,98%.dan pada Tahun 2025 mengalami penurunan dengan persentase 17,19 %.

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA periode 2025-2025 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkat	Tingkat	3,27	3,55	92,1 %

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
.1	nya Kesempatan Kerja	Penggangura n Terbuka			
1.1.1.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,72	97	99,7 %
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	17,19	20	85,95 %

3.1.6 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.6 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain(Disnaker Prov NTB)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Keja	Tingkat Pengganguran Terbuka	3,27	3,17	103 %
1.1.1.1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,4	96,72	99,6 %
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	17,19	75	22,92 %

3.1.7 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.7 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Kesempatan Keja	Tingkat Pengganguran Terbuka	3,55	3,27	97,85 %		Peningkatan Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenag Kerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.1	Meningkatnya Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	97	96,72	100 %		Peningkatan Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenag Kerja
1.1.1.1	Meningkatnya Perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja	20	17,19	116 %	100 %	Meningkatnya perusahaan yang melaksanakan UMK

Dari tabel 3.1.7 di atas, pencapaian sasaran strategis yang diraih oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bima terdapat indikator-indikator Yang belum mencapai target dengan uraian sebagai berikut :

Sasaran strategis Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja dengan indikator Porsentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi, Tidak tercapainya target pada sasaran ini karena paket-paket pelatihan bagi pencari kerja tidak dapat dilaksanakan dengan Maksimal. Kedepan, dalam meningkat target kinerja yang belum tercapai yaitu mengoptimalkan kolaborasi BLK serta LPKS dalam melatih pencari kerja sehingga mereka memiliki sertifikat kompetensi sebagai salah satu syarat wajib di dunia kerja, meningkatkan kualitas/kapasitas instruktur dengan melakukan upgrading instruktur baik di BLK dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, meningkatkan sarana dan prasanara pelatihan kerja.

Untuk menilai tingkat penerapan norma kerja menggunakan format wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan, Pasal 6 ayat (2).

Berdasarkan format wajib lapor ketenagakerjaan, aspek yang dinilai terdiri dari 10 item kuesioner yang terdiri dari: (1) pengupahan, (2) tunjangan hari raya keagamaan, (3) bonus/gratifikasi, (4) fasilitas perusahaan, (5) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (6) program pensiun, (7) perangkat hubungan industrial, (8) rencana pekerja yang dibutuhkan dalam 12 bulan yang akan datang, (9) program pelatihan, dan (10) perencanaan kebutuhan latihan bagi pekerja menurut kejuruan.

3.1.8 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Efisiensi
1	2	5	6	7	8
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	4,384,054,595.00	4,160,248,715.00	94.90%	50.01
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58,997,400.00	58,613,400.00	99.35%	50.00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6,882,000.00	6,882,000.00	100%	50.00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7,014,000.00	7,014,000.00	100%	50.00
5	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2,504,000.00	2,504,000.00	100%	50.00
6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	2,504,000.00	2,504,000.00	100%	50.00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,824,000.00	4,440,000.00	92.04%	50.00
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27,224,000.00	27,224,000.00	100%	50.00
9	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,461,988,359.00	2,439,900,601.00	99%	49.74
10	Penyediaan Gaji dan			99%	

	Tunjangan ASN	2,278,442,159.00	2,262,573,001.00		49.23
11	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39,799,200.00	38,670,600.00	97%	49.58
12	Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129,500,000.00	124,410,000.00	96%	49.82
13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,458,000.00	7,458,000.00	100%	50.00
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1,892,000.00	1,892,000.00	100%	50.00
15	Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4,897,000.00	4,897,000.00	100%	50.00
16	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	10,380,000.00	9,882,000.00	95%	49.47
17	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	4,722,000.00	4,440,000.00	94%	49.93
18	Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	5,658,000.00	5,442,000.00	96%	49.53
19	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27,537,000.00	22,737,000.00	82%	48.27
20	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	22,737,000.00	22,737,000.00	82%	(4.88)
21	Administrasi UmumPerangkat Daerah	274,128,800.00	251,693,230.00	91.82%	50.01
22	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	33,856,800.00	33,856,800.00	100%	50.00
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000.00	191,152,030.00	95.58%	50.01
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis	40,272,000.00	26,685,000.00	66%	49.01

	Elektronik pada SKPD				
25	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624,750,236.00	599,313,247.00	95%	47.56
26	Pengadaan Mebel	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	50.00
27	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	115,923,000.00	115,483,225.00	99%	48.43
28	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	498,827,236.00	473,830,022.00	94%	47.37
29	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310,254,000.00	264,408,933.00	85%	49.34
30	Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	72,000,000.00	65,565,000.00	91%	49.83
31	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,054,000.00	40,233,933.00	53%	47.14
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163,200,000.00	158,610,000.00	97%	49.52
33	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163,200,000.00	158,610,000.00	97%	49.52
34	Penyediaan Jasa Pewmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39,000,000.00	31,475,240.00	80%	47.79
35	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15,240,000.00	6,063,000.00	39%	44.98
36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9,010,000.00	3,275,000.00	36%	47.58
37	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	120,620,000.00	78,000,501.00	64%	47.40
38	Penataan Organisasi			50%	

		3,324,000.00	1,684,000.00		46.69
39	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	3,324,000.00	1,684,000.00	50%	46.69
40	Peyusunan Rencana Tenaga Kerja	11,842,400.00	11,640,000.00	98%	49.26
41	Fasilitasi Penyusunan Rencana tenaga Kerja Mikro	11,842,400.00	11,640,000.00	98%	49.26
42	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	511,543,000.00	460,131,500.00	89%	47.33
43	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	76,227,000.00	75,970,880.00	99%	48.32
44	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	511,543,000.00	460,131,500.00	89%	47.33
45	Proses pelaksanan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berdasarkan klaster Kompetensi	341,523,000.00	340,111,500.00	99%	48.52
46	Pengadaan Sarana Pelatihan Kab/Kota	170,020,000.00	120,020,000.00	70%	47.89
47	Program Penempatan Tenaga Kerja	172,502,400.00	165,032,400.00	95%	48.24
48	Pelayanan antar Kerja di daerah Kab/Kota	86,713,000.00	80,693,000.00	93%	49.85
49	Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan BagiPencari Kerja	54,340,000.00	51,090,000.00	94%	49.95
50	Perluasan Kesempatan Kerja	32,373,000.00	29,603,000.00	91%	48.78
51	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	53,702,400.00	52,752,400.00	98%	49.41
52	Job Fair/Bursa Kerja	53,702,400.00	52,752,400.00	98%	49.41
53	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	32,087,000.00	31,587,000.00	98%	48.87
54	Peningkatan Perlindungan dan Kompetenmsi calon Pekerja Migran (PMI)	32,087,000.00	31,587,000.00	98%	48.87
55	Program Hubungan Industrial			83%	

		168,253,000.00	140,559,283.00		48.37
56	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	107,809,000.00	85,599,200.00	79%	48.74
57	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37,420,000.00	18,210,000.00	48%	46.54
58	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70,389,000.00	67,389,200.00	95%	48.06
59	Pencegahan dan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kota/Kab	60,444,000.00	54,960,083.00	90%	47.42
60	Pencegahan Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	6,969,000.00	6,705,000.00	96%	49.45
61	Penyelesaian Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	22,314,000.00	21,410,000.00	95%	47.50
62	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	31,161,000.00	26,845,083.00	86%	49.57

3.9.1 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.9 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.1.1				**Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota**				menunjang	
1.1.1.1.1	Meningktan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	3,38 %	**Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.1.1	Meningkatkan Kesempatan	Meningkatnya Partisipasi	3,27 &	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan hasil Laporan	1 Dok	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
	Kerja	angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembangunan BLK sebagai wadah penyediaan tenaga ketrja terampil serta peningkatan akses permodalan			Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
1.1.1.1.1.2	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	96,72 %	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan hasil Laporan Koordinasi Penyusunan	1 Dok	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					Dokumen RKA SKPD				
1.1.1.1.3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Presentase Perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh	17,19 %	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA SKPD dan hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA SKPD dan hasil Laporan Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD	1 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1				Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja	Jumlah laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan	4 laporan	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
1.1.1.1.3.1.1				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1.2				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah orang Yang menerima GAji dan Tunjangan ASN	21 orang	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1.3				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Yang menerima GAji dan Tunjangan ASN	21 orang	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.1.4				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2				Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian?verifikasi Keuangan SKPD	60 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2.1				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	4 Lap	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Tahun SKPD	Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
1.1.1.1.3.2.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Penhyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Hasil laporan Koordinasi Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	2 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2.3				Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.2.4				**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.3.3				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik	1 Dok	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Barang Milik daerah SKPD	Daerah SKPD				
1.1.1.1.3.3				Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	4 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.3.3.1				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.3.3.2				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Yang Menghadiri Sosialisssi Peraturan Perundang undangan	50 Org	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4				**Administrasi UmumPerangkat Daerah**				menunjang	
1.1.1.1.4.1				Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	12 paket	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.1				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	60 Lap	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					SKPD				
1.1.1.1.4.2				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.1				**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		10 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.2				Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel Yang disediakan	10 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.3				Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pralatan dan mesin lainnya yang disediakan	5 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.4.2.4				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang disediakam	2 Unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5				**Penyediaan Jasa Penunjang**				menunjan	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Urusan Pemerintahan Daerah				g	
1.1.1.1.5.1				Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat menyurat	12 lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pemyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	12 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.3				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.4				Penyediaan Jasa Pewmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas,atau Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
1.1.1.1.5.1.5				Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perijinannya	4 unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.1.6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	12 unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.2				Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.2.1				**Penataan Organisasi**				menunjang	
1.1.1.1.5.2.2				Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Lap	100 %	menunjang	
				Peyusunan Rencana Tenaga Kerja				menunjang	
				Fasilitasi Penyusunan Rencana tenaga	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu	50 org	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Kerja Mikro	Menyusun RTK Mikro				
1.1.1.1.5.2.3				**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.2.4				**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**				menunjang	
1.1.1.1.5.3				Pembinaan Lembaga Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.3.1				**Program Penempatan Tenaga Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.4				**Pelayanan antar Kerja di daerah Kab/Kota**				menunjang	
1.1.1.1.5.4.1				Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan BagiPencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang mendapatkan Penhyuluhan dan Bimbingan Jabatan	400 org	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.4.2				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Yang Diberdayakan melalui program Perluasan	120 org	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					Kesempatan kerja				
1.1.1.1.5.4.3				**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.5				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pekerjaan dari Job Fair/Bursa kerja	200 org	75 %	menunjang	
1.1.1.1.5.5.1				**Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota**				menunjang	
1.1.1.1.5.5.2				Peningkatan Perlindungan dan Kompetenmsi calon Pekerja Migran (PMI)	Jumlah CPMI yang Dilindungi dan di Tingkatkan Kompetensinya	100 org	50 %	menunjang	
1.1.1.1.5.5.3				**Program Hubungan Industrial**				menunjang	
1.1.1.1.5.5.4				**Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk**				menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota					
1.1.1.1.5.5.5				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan Perusahaan Yang Terkait Dengan Hubungan industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.6				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	JumlaH Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah,dan LKS Bipartit) dan Pekerja Yang Terdaftar sebagai Peserta	4 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.6.1				**Pencegahan dan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan**				menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Penutupan Perusahaan di Daerah Kota/Kab					
1.1.1.1.5.6.2				Pencegahan Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan Yang DiCegah	15 Perkara	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.6.3				Penyelesaian Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan Yang Diselesaikan	15 Perkara	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.7				Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan	Terlaksananya Program JAminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas kesejahteraan	200 org	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
				Pekerja	Pekerja				
1.1.1.1.5.7.1				**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenaga Kerjaan**				menunjang	
1.1.1.1.5.7.2				Penyediaaan Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaaan Jasa pelayanan Umum Kantor	12 Lap	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.7.3				**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**				menunjang	
1.1.1.1.5.8				**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**				menunjang	
1.1.1.1.5.8.1				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetnsi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	100 org	100 %	menunjang	
1.1.1.1.5.8.2				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan	12 Unit	100 %	menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)
					Kerja				

3.1.9 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1	**Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota**	**4.384.054.595**	**4.160.248.715**	**94.90%**
1.1.1.1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.997.400**	**58.613.400**	**99.35%**
1.1.1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.882.000	6.882.000	100 %
1.1.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	7.014.000	7.014.000	100%
1.1.1.1.1.3	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	2.504.000	2.504.000	100%
1.1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	2.504.000	2.504.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	DPA SKPD			
1.1.1.1.3.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.824.000	4.440.000	92,04%
1.1.1.1.3.1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.224.000	27.224.000	100%
1.1.1.1.3.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.461.988.359	2.439.900.601	99%
1.1.1.1.3.1.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.278.442.159	2.262.573.001	99 %
1.1.1.1.3.1.4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.799.200	38.670.600	97 %
1.1.1.1.3.2	Pelaksanaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.500.000	124.410.000	96 %
1.1.1.1.3.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.458.000	7.458.000	100 %
1.1.1.1.3.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	1.892.000	1.892.000	100 %
1.1.	Penyusunan Pelaporan	4.897.000	4.897.000	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.3.2.3	Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
1.1.1.1.3.2.4	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	10.380.000	9.882.000	95 %
1.1.1.1.3.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	4.722.000	4.440.000	94 %
1.1.1.1.3.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan LAPORAN Barang Milik Daerah SKPD	5.658.000	5.442.000	96 %
1.1.1.1.3.3.2	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	27.537.000	22.737.000	82 %
1.1.1.1.4	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	22.737.000	22.737.000	82 %
1.1.1.1.4.1	**Administrasi UmumPerangkat Daerah**	274.128.800	251.693.230	91.82%
1.1.1.1.4.2	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	33.856.800	33.856.800	100 %
1.1.1.1.4.2.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	191.152.030	95.58%
1.1.1.1.4.2.2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	40.272.000	26.685.000	66 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.4.2.3	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	624.750.236	599.313.247	95%
1.1.	Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	100 %
1.1.1.1.5	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	115.923.000	115.483.225	99 %
1.1.1.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	498.827.236	473.830.022	94 %
1.1.1.1.5.1.1	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	310.254.000	264.408.933	85 %
1.1.1.1.5.1.2	Penyediaaan Jasa Surat Menyurat	72.000.000	65.565.000	91 %
1.1.1.1.5.1.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.054.000	40.233.933	53%
1.1.1.1.5.1.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.200.000	158.610.000	97 %
1.1.1.1.5.1.5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	163.200.000	158.610.000	97 %
1.1.1.1.5.1.6	Penyediaan Jasa Pewmeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	39.000.000	31.475.240	80 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dinas jabatan			
1.1.1.1.5.2	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15.240.000	6.063.000	39 %
1.1.1.1.5.2.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	9.010.000	3.275.000	36 %
1.1.1.1.5.2.2	Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	120.620.000	78.000.501	64 %
1.1.1.1.5.2.3	**Penataan Organisasi**	3.324.000	1.684.000	50 %
1.1.1.1.5.2.4	Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana	3.324.000	1.684.000	50 %
1.1.1.1.5.3	**Peyusunan Rencana Tenaga Kerja**	11.842.400	11.640.000	98 %
1.1.1.1.5.3.1	Fasilitasi Penyusunan Rencana tenaga Kerja Mikro	11.842.400	11.640.000	98 %
1.1.1.1.5.4	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	511.543.000	460.131.500	89 %
1.1.1.1.5.4.	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	76.227.000	75.970.880	99 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
1.1.1.1.5.4.2	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	511.543.000	460.131.500	89 %
1.1.1.1.5.4.3	Proses pelaksanan pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berdasarkan klaster Kompetensi	341.523.000	340.111.500	99 %
1.1.1.1.5.4.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kab/Kota	170.020.000	120.020.000	70 %
1.1.1.1.5.4.3	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	172.502.400	165.032.400	95 %
1.1.1.1.5.5	**Pelayanan antar Kerja di daerah Kab/Kota**	86.713.000	80.693.000	93 %
1.1.1.1.5.5.1	Penyuluhan Dan Bimbingan Jabatan BagiPencari Kerja	54.340.000	51.090.000	94 %
1.1.1.1.5.5.2	Perluasan Kesempatan Kerja	32.373.000	29.603.000	91 %
1.1.1.1.5.5.3	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	53.702.400	52.752.400	98 %
1.1.1.1.5.5.	Job Fair/Bursa Kerja	53.702.400	52.752.400	98 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4				
1.1.1.1.5.5.5	**Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota**	32.087.000	31.587.000	98 %
1.1.1.1.5.6	Peningkatan Perlindungan dan Kompetenmsi calon Pekerja Migran (PMI)	32.087.000	31.587.000	98 %
1.1.1.1.5.6.1	**Program Hubungan Industrial**	168.253.000	140.559.283	83 %
1.1.1.1.5.6.2	**Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota**	107.809.000	85.599.200	79 %
1.1.1.1.5.6.3	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	37.420.000	18.210.000	48 %
1.1.1.1.5.7	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70.389.000	67.389.200	95 %
1.1.1.1.5.7.1	**Pencegahan dan Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah**	60.444.000	54.960.083	90 %

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kota/Kab			
1.1.1.1.5.72	Pencegahan Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	6.969.000	6.705.000	96 %
1.1.1.1.5.73	Penyelesaian Perselisihan Hubungan, mogok kerja dan Penutupoan Perusahaan yang Berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1(satu) daerah Kab/Kota	22.314.000	21.410.000	95 %
1.1.1.1.5.8	Pengembangan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	31.161.000	26.845.083	86 %

IV

PENUTUP

4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025. LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2025 memiliki nilai strategis karena penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025.

Berdasarkan sasaran strategis RPJMD, tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan satu tujuan yaitu: Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 3,55% dan realisasi 3,57% dengan tingkat capaian 99,44%.

Sementara itu, pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan 2 sasaran strategis dengan masing masing satu indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Dibandingkan dengan Target Perencanaan Jangka menengah sampai tahun 2025, pencapaian sasaran Dinas Tenaga kerja Kota Bima adalah sebagai berikut:

- Sasaran 1 yaitu: Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari target 75% terealisasi 78,09% dengan tingkat capaian 104,12%.
- Sasaran 2 yaitu Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dengan indikator kinerja persentase perusahaan yang menerapkan norma kerja secara penuh dari target 25% terealisasi 21,98% dengan tingkat capaian 87,92%.

Capaian sasaran strategis I dan II terhadap target jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima masing-masing sebesar 104,12% dan 87,92%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah sebesar 96,02%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Tenaga

Kerja Kota BimaTahun 2025 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan dan hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik.

4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimalisasi Anggaran untuk bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) SEKRETARIAT DAERAH T.A. 2025



SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah memiliki kewajiban menyusun LKIP sesuai dengan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Bima terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Bima. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan

terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Kota Bima, 17 Januari 2026

Sekretaris Daerah
Kota Bima,

Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680828 199203 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Bima berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029.

Hasil capaian 9 sasaran strategis, bahwa rata-rata persentase capaian sasaran berhasil. Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2025 dikategorikan berhasil sebesar 100 %.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 46.754.904.107,00 dari total anggaran sebesar Rp. 50.142.238.281,00 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.387.334.174,00 atau 6,76%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GRAFIK ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud Dan Tujuan 2
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bima 3
1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah 5
1.4.1 Sumber Daya Manusia 5
1.4.2 Sumber Daya Aset/Modal 8
1.5 Aspek Strategis 9
1.6 Landasan Hukum 10
1.7 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA **13**
2.1 Rencana Strategi Tahun 2025-2029 13
2.1.1 Visi 14
2.1.2 Misi 15
2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Sekretariat Daerah 15
2.2 Perjanjian Kinerja 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **20**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 20
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 21
3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 466
3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 65
3.2 Realisasi Anggaran 66
BAB IV PENUTUP **80**
4.1 Kesimpulan 80
4.2 Saran 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran Sekretariat Daerah 16
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan 18
Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Tahun 2025 189
Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja 20
Tabel 3. 2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 20
Tabel 3. 3. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2025.....21
Tabel 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 46
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra Tahun 2025 – 2029 542
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dengan Wilayah lain di Indonesia 40
Tabel 3. 7 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima 666
Tabel 3. 8 Produk hukum yang diterbitkan.....54
Tabel 3. 9 Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2025 58
Tabel 3. 10 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 66

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan 7

Grafik 1. 2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan 7

Grafik 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarakan eselonering 8

Grafik 3. 1 Grafik kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti 488

Grafik 3. 2 Nilai SAKIP Kota Bima 500

Grafik 3. 3. Nilai LPPD Kota Bima 2017-2023 511

Grafik 3. 4 Produk Hukum Daerah yang diterbitkan 55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas umum penyelenggaraan negara, meliputi : azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, dan azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kota Bima dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kota Bima. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang

pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan Tahun sebelumnya. LKIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir Tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2025. LKIP merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP Setda Tahun 2025 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Setda Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Bima dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu Tahun Anggaran 2025 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Setda Kota Bima pada tahun yang akan datang.

1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Bima

Sekretariat Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah

   Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
   1) Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   3) Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
   1) Bagian Perekonomian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   2) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Asisten Administrasi Umum
   1) Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
   2) Bagian Umum

a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

a. Sub Bagian Protokol;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Sumber Daya Perangkat Daerah

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2025 sebanyak 128 orang.

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian :

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari :

1. Golongan IVd : 1 (satu) orang
2. Golongan IVc : 4 (empat) orang
3. Golongan IVb : 4 (empat) orang
4. Golongan IVa : 9 (sembilan) orang
5. Golongan III : 113 (seratus tiga belas) orang
6. Golongan II : 2 (dua) orang
7. PPPK : 87 (delapan puluh tujuh) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari :

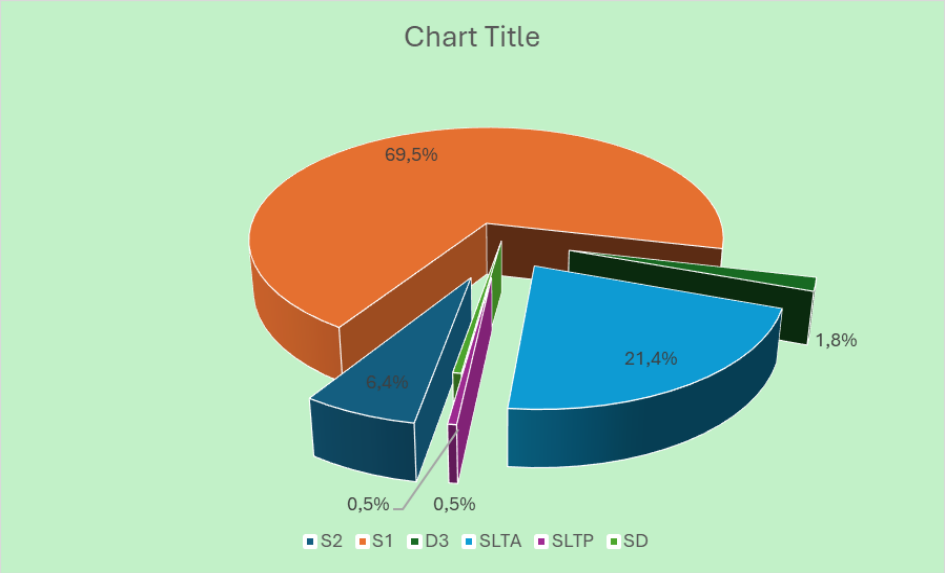
1. Eselon IIa : 1 (satu) orang
2. Eselon IIb : 5 (Lima) orang
3. Eselon III a : 9 (sembilan) orang
4. Eselon IV a : 2 (dua) orang
5. Kel. Fungsional : 62 (dua puluh tiga) orang
6. Pelaksana : 141 (delapan puluh delapan) orang

C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 3 (S3) : -
2. Strata 2 (S2) : 14 (empat belas) orang
3. Strata 1 (S1) : 153 (seratus lima puluh tiga) orang
4. Sarjana Muda : 4 (empat) orang
5. SLTA : 47 (empat puluh tujuh) orang
6. SMP : 1 (satu) orang
7. SD : 1 (satu) orang

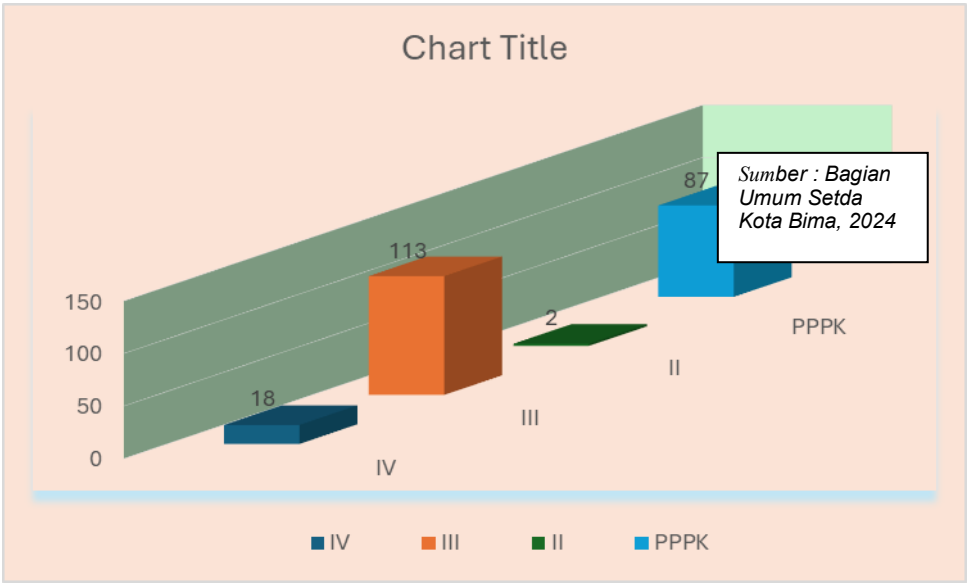
Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2025, keadaan pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bima dapat dilihat pada grafik dibawah berikut :

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



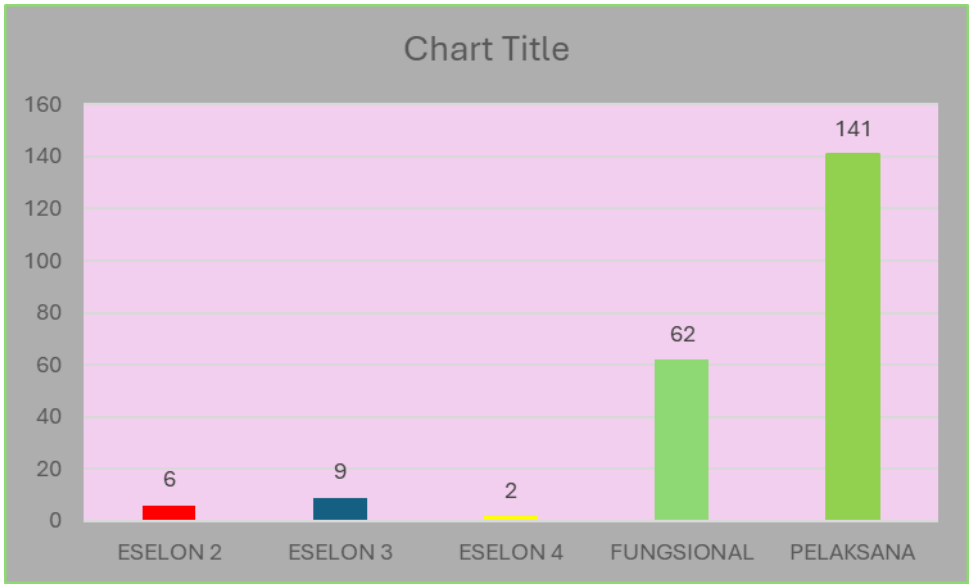
Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah berdasarkan Pendidikan

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan



Grafik 1. 2 Jumlah pegawai berdasarkan golongan

c. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering



Grafik 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarakan eselonering

1.4.2 Sumber Daya Aset/Modal

Kantor Sekretariat Daerah Kota Bima terletak di Jalan Soekarno-Hatta Raba, Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Sekretariat Daerah pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan Internet, dan mesin faksimili;

3. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

1.5 Aspek Strategis

Bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (*Kekuatan dan Kelemahan*) serta Lingkungan Eksternal (*Peluang dan Tantangan*) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan *Visi, Misi, Tujuan, Sasaran* serta

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang berupa *Kebijakan, Program dan Kegiatan* dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Nilai yang terkandung dari pengertian serta karakteristik *good governance* tersebut merupakan nilai-nilai yang universal sifatnya dan sesuai dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi semacam ini diwajibkan bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatan keputusan, baik itu pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat untuk bertanggung jawab kepada publik.

1.6 Landasan Hukum

LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima disusun berdasarkan landasan hukum, antara lain;

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.7 Permasalahan Yang Sedang Dihadapi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan sekretariat yang begitu besar dan luas dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian, dan kepala bagian ini akan bertanggung jawab kepada asisten dan asisten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah langsung.

Adapun Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bima, antara lain :

1. Bidang Administrasi Pemerintahan
   - Indeks SAKIP dan LKIP masih rendah.
2. Bidang Perencanaan
   - Proses perencanaan pembangunan belum berbasis kinerja
   - Integrasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan baik
   - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD kurang berkualitas
3. Bidang Keuangan
   - Penetapan target PAD belum sesuai potensi
   - Proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum optimal
   - Pelatihan dan sosialisasi tentang sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih kurang
4. Bidang Pengawasan
   - Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Tahun 2025 - 2029

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan 2029.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Sekretariat Daerah Kota Bima, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2025-2029;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima antara tahun 2025-2029;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bima guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang organisasi, tujuan - tujuan organisasi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Visi tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, dikarenakan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Beberapa persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi:

- Berorientasi ke depan
- Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini
- Mengekspresikan kreatifitas
- Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat

Visi Sekretariat Daerah Kota Bima sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029 juga merupakan visi Kepala Daerah yang akan digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan roda penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan selama (3) tiga tahun kedepan.

Visi Kepala Daerah Kota Bima periode 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Kota Bima yang MAJU, BERMARTABAT dan BERKELANJUTAN"**.

2.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban/dilaksanakan suatu organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi dapat dikatakan sebagai suatu koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kegiatan atau strategi operasionalnya, sehingga tidak menyimpang dari visi yang disepakati. Dalam mencapai visinya, Sekretariat Daerah Kota Bima telah menetapkan misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan dan merumuskan langkah selanjutnya.

Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Memantapkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
3. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran Sekreariat Daerah

Dalam rangka penjabaran visi dan misi tersebut, maka setiap misi perlu ditetapkan tujuan dan sasaran serta indikator kinerjanya sehingga

pelaksanaan setiap misi akan terukur secara jelas pada setiap tahapan dan setiap waktu pelaksanaan. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Bima adalah sebagaimana disajikan dalam tabel. 2.1. berikut ini.

Tabel 2. 1 Sasaran Sekretariat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator
1	*2*	*3*
1.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah
5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu
6.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan
7.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik
9.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah:

a. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
e. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Daerah Kota Bima memiliki 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama. Untuk pencapaian sejumlah Indikator tersebut tentu diperlukan sumber anggaran sebagai salah satu prasyaratan keberhasilan suatu rencana. Oleh karenanya jumlah anggaran sangat menentukan keberhasilan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencapaian target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi dalam upaya mencapai misi dan visinya. Sedangkan target kinerja dalam tingkat kegiatan digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	*2*	*3*	
1.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai Sakip	68,48
3.	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	2,7
4.	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah	100
5.	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	30,41%
7.	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	Porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	100%
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	100%
9.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	73,48

Tabel 2. 3 Program dan Anggaran Tahun 2025

No.	Program	Anggaran
1	*2*	*3*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.905.639.413,00
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	12.912.521.175,00
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.324.077.693,00
	JUMLAH	50.142.238.281,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kota Bima. Untuk memudahkan dalam menilai kinerja dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	91% ≤100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2025 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 9 (Sembilan) sasaran strategis dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagimana tersaji pada Tabel 3.2 .

Tabel 3.2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Sangat Tinggi	8	88,89
2.	Tinggi	0	0
3.	Sedang	0	0

4.	Rendah	0	0
5.	Sangat Rendah	0	0
6.	Belum Rilis	1	11,11
Jumlah		**9**	**100**

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bahwa pada Tahun 2025 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 9 sasaran dimana semua sasaran masuk kategori berhasil sebagaimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	68,48	67,28	98,25%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Nilai	2,70	Belum Rilis	-	Belum Rilis
4	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	92,25	92,25%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	30,41	100	100,00%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah	Porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
	bidang protokol dan komunikasi pimpinan	komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti					
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	indeks	73,48	71,40	97,17%	Sangat Tinggi
		Rata-Rata Capaian				**Undefined**	

Kategori keberhasilan pencapaian Sasaran Sekretariat daerah sebagaimana tersaji dalam tabel 3.3 menunjukkan bahwa 9 sasaran Sekretariat daerah kategori Sangat Tinggi (berhasil).

Perbandingan target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dengan membandingkan capaian 2 tahun sebelumnya (n-2) secara lebih rinci berdasarkan sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dapat kita lihat penyajiannya pada Tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3. 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Sasaran 1 - Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	**Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Ekonomi**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	5	Dokumen	Kabag Ekonomi
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	Kabag Ekonomi
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	Kabag Ekonomi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Ekonomi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Ekonomi
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Ekonomi**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	Kabag Ekonomi
Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	Kabag Ekonomi

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	Kabag Ekonomi
Sasaran 2 - Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	**Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan**	**100**	**%**	**29,52**	**%**	**30,41**	**%**	**60,72**	**%**	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag LPBJ**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72	Dokumen	72	Dokumen	72	Dokumen	72	Dokumen	Kabag LPBJ
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	Kabag LPBJ
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46	Orang	46	Orang	46	Orang	46	Orang	Kabag LPBJ
Sasaran 3 - Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	**Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan**	**92**	**%**	**92**	**%**	**100**	**%**	**92,25**	**%**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Adm. Pembangunan**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Adm. Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Adm. Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Adm. Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Adm. Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Adm. Pembangunan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Adm. Pembangunan + Kabag Umum**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	221	Orang/bulan	221	Orang/bulan	221	Orang/bulan	221	Orang/bulan	Kabag Umum
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	Kabag Umum
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Kabag Adm. Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	18	Laporan	Kabag Adm. Pembangunan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Adm. Pembangunan**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Kabag Adm. Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	Kabag Adm. Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	Kabag Adm. Pembangunan
Sasaran 4 - Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	**Nilai SAKIP**	**67,42**	**Nilai**	**67,10**	**Nilai**	**68,48**	**Nilai**	**67,28**	**Nilai**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Penataan Organisasi	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Organisasi**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	Kabag Organisasi
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Kabag Organisasi
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	Kabag Organisasi
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	Kabag Organisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	Kabag Organisasi
Sasaran 5 - Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	**Nilai LPPD**	**27,10**	**Nilai**	**2,44**	**Nilai**	**2,70**	**Nilai**	**Belum Rilis**	**Nilai**	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
	dan Kesejahteraan Rakyat									
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Pemerintahan**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	21	Dokumen	Kabag Pemerintahan
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	Kabag Pemerintahan
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	Kabag Pemerintahan
Sasaran 6 - Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	**Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Hukum**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690	Dokumen	690	Dokumen	690	Dokumen	690	Dokumen	Kabag Hukum
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	Kasus	2	Kasus	2	Kasus	2	Kasus	Kabag Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85	Dokumen	85	Dokumen	85	Dokumen	85	Dokumen	Kabag Hukum
Sasaran 7 - Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	**Persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Prokopim**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900	Laporan	900	Laporan	900	Laporan	900	Laporan	Kabag Prokopim
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	Kabag Prokopim

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Kabag Prokopim
Sasaran 8 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	**Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	Kabag Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Kabag Umum
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket, 57 Jenis	1	Paket, 57 Jenis	1	Paket, 57 Jenis	1	Paket, 57 Jenis	Kabag Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket, 24 Jenis	1	Paket, 24 Jenis	1	Paket, 24 Jenis	1	Paket, 24 Jenis	Kabag Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	Kabag Umum
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Kabag Umum
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	Laporan	54	Laporan	54	Laporan	54	Laporan	Kabag Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelenggaraan Pembangunan**									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	Kabag Umum
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	unit	30	unit	30	unit	30	unit	Kabag Umum
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	unit	0	unit	0	unit	0	unit	Kabag Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	Kabag Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Kabag Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Kabag Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	Kabag Umum
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	28	Unit	28	Unit	28	Unit	28	Unit	Kabag Umum

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211	Unit	211	Unit	211	Unit	211	Unit	Kabag Umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	10	Unit	10	Unit	10	Unit	Kabag Umum
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3	Unit	3	Unit	3	Unit	Kabag Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	Kabag Umum
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Kabag Umum
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Orang	Kabag Umum
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	2	Orang/Bulan	Kabag Umum
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Umum**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Kabag Umum
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Kabag Umum
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	Kabag Umum
Sasaran 9 - Meningkatnya pengamalan ajaran agama	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)**	**78,95**	**Indeks**	**72,04**	**Indeks**	**73,48**	**Indeks**	**71,40**	**Indeks**	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100**	**%**	**Kabag Kesra**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	13	Dokumen	Kabag Kesra
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	Kabag Kesra
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	Kabag Kesra

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023		REALISASI 2024		TARGET DAN REALISASI 2025				PENANGGUNG JAWAB
		REALISASI 2023	SATUAN	REALISASI 2024	SATUAN	TARGET 2025	SATUAN	REALISASI 2025	SATUAN	
	Kearsipan, Trantibum Linmas									

Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

dengan Tahun Sebelumnya dan Target Renstra Tahun 2025 – 2029

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
Sasaran 1 - Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	**Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Program Perekonomian Dan Pembangunan	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	***Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dokumen
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Laporan
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Program Perekonomian Dan Pembangunan	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	***Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dokume

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja										n
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dokumen
Sasaran 2 - Meningkatkan akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	**Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan**	**100**	**29,52**	**30,41**	**60,72**	**31,32**	**32,26**	**33,23**	**34,22**	**34,22**	**%**
Program Perekonomian Dan Pembangunan	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	***Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72	72	72	72	72	72	72	72	72	Dokumen
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36	36	36	36	36	36	36	36	36	Dokumen
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46	46	46	46	46	46	46	46	46	Orang
Sasaran 3 - Meningkatkan kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	**Porsentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai aturan**	**92**	**92**	**100**	**92,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokume

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
Perangkat Daerah	Perangkat Daerah										n
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokumen
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	120	120	120	120	120	120	120	120	Orang/bulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Laporan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	***Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dokume

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
	Penyusunan Program Pembangunan Daerah										n
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Laporan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	Laporan
Sasaran 4 - Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	**Nilai SAKIP**	**68,40**	**67,10**	**68,48**	**67,28**	**68,48**	**68,48**	**68,48**	**68,48**	**68,48**	**%**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penataan Organisasi	***Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dokumen
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Laporan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dokumen
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dokumen
Sasaran 5 - Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	**Nilai LPPD**	**2,70**	**2,44**	**2,70**	**Belum Rilis**	**2,80**	**2,90**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**Nilai**
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Administrasi Tata Pemerintahan	***Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21	21	21	21	21	21	21	21	21	Dokumen
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Dokumen
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Dokumen
Sasaran 6 - Meningkatnya harmonisasi dan	**Persentase rancangan produk hukum**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	**daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah**										
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	***Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690	690	690	690	690	690	690	690	690	Dokumen
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Kasus
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85	85	85	85	85	85	85	85	85	Dokumen
Sasaran 7 - Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	**Persentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	***Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900	900	900	900	900	900	900	900	900	Laporan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Laporan
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Laporan
Sasaran 8 - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	**Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Dokumen
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket, 57 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket, 24 Jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										Dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Laporan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Unit
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30	30	30	30	30	30	30	30	30	unit
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	unit
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Laporan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	24	24	24	24	24	24	24	24	Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28	28	28	28	28	28	28	28	28	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211	211	211	211	211	211	211	211	211	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Unit
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Orang/Bulan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Orang
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Orang/Bulan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	TARGET 2025	REALISASI 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	SATUAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	***Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Paket
Sasaran 9 - Meningkatnya pengamalan ajaran agama	**Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Indeks)**	**78,95**	**72,04**	**73,48**	**71,40**	**73,85**	**74,22**	**74,59**	**74,96**	**75,34**	**Indeks**
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	***Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	***Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**%**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13	13	13	13	13	13	13	13	13	Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Dokumen
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dokumen

Tabel 3. 6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dengan Wilayah lain di Indonesia

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target OPD 2025	Realisasi OPD 2025	± Kota Mataram 2025	± Kota Denpasar 2025	± Kota Surabaya 2025
1	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	±100	±100	±100
2	Nilai SAKIP	Nilai	68,48	67,28	±72,11	±80,00	±85,00
3	Nilai LPPD	Nilai	2,70	Belum Rilis	±3,37	±3,77	±3,65
4	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	±100	±100	±100
5	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	92,25	±90	±96	±98
6	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	30,41	60,72	±85	±92	±95
7	Porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	%	100	100	±88	±95	±97
8	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	100	100	±85	±92	±94
9	Indeks kerukunan umat beragama	indeks	73,48	71,40	±78,40	±85,20	±82,50

Sumber : Data diolah Sekretariat Daerah 2025 dan Browsing Internet 2025

Berdasarkan Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dengan Wilayah lain di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan perekonomian yang ditetapkan telah ditindaklanjuti dengan baik, tercermin

dari realisasi sebesar 100% yang sesuai dengan target. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi koordinasi dan fasilitasi kebijakan perekonomian berjalan optimal.

Dibandingkan dengan daerah pembanding (Kota Mataram, Denpasar, dan Surabaya) yang juga mencapai ±100%, kinerja indikator ini berada pada level yang sama, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat kesenjangan (gap) kinerja.

2. Nilai Sakip

Realisasi nilai SAKIP sebesar 67,28 masih berada di bawah target (68,48) dan menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja OPD belum optimal. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam perencanaan kinerja, pengukuran indikator, serta keterkaitan antara program dan outcome.

Jika dibandingkan dengan daerah pembanding, capaian ini masih tertinggal dari Kota Mataram (±72,11), Kota Denpasar (±80,00), dan Kota Surabaya (±85,00). Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pada siklus manajemen kinerja, terutama dalam penyelarasan perencanaan dan pelaporan berbasis hasil. Jika dibandingkan dengan daerah pembanding, terdapat gap sebagai berikut:

Dengan Kota Mataram (±72,11) → selisih ±4,83 poin (±6,7%)

Dengan Kota Denpasar (±80,00) → selisih ±12,72 poin (±15,9%)

Dengan Kota Surabaya (±85,00) → selisih ±17,72 poin (±20,8%)

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan signifikan untuk mencapai level kinerja yang lebih tinggi.

3. Nilai LPPD

Nilai LPPD belum dapat dibandingkan karena realisasi tahun 2025 belum dirilis. Namun demikian, target yang ditetapkan sebesar 2,70 masih berada di bawah capaian daerah pembanding seperti Kota Mataram (±3,37), Kota Denpasar (±3,77), dan Kota Surabaya (±3,65).

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara perencanaan, target kinerja masih relatif rendah dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada aspek pelayanan publik, tata kelola urusan pemerintahan, dan capaian indikator makro daerah. Jika dibandingkan dengan daerah pembanding:

Kota Mataram (±3,37) → gap ±0,67 (±19,9%)

Kota Denpasar (±3,77) → gap ±1,07 (±28,4%)

Kota Surabaya (±3,65) → gap ±0,95 (±26,0%)

Hal ini menunjukkan bahwa secara target pun masih tertinggal dari daerah dengan kinerja tinggi.

4. Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah

Capaian indikator ini telah mencapai ±100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses pembentukan produk hukum daerah telah mengikuti mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan daerah pembanding, capaian ini juga setara sehingga tidak terdapat kesenjangan kinerja. Ke depan, fokus dapat diarahkan pada peningkatan kualitas substansi produk hukum, bukan hanya kepatuhan terhadap prosedur.

5. Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu

Realisasi sebesar 92,25% menunjukkan bahwa sebagian besar OPD telah menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu, meskipun belum mencapai target 100%. Hal ini menandakan masih adanya OPD yang belum disiplin dalam pelaporan.

Dibandingkan dengan daerah pembanding, capaian ini masih di bawah Kota Denpasar (±96%) → -3,75% dan Kota Surabaya (±98%) → -5,75%, serta sedikit di atas Kota Mataram (±90%) → +2,25% (lebih baik). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaporan, serta optimalisasi sistem pelaporan berbasis digital.

6. Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan

Realisasi indikator ini sebesar 60,72%, jauh melampaui target 30,41%, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam penggunaan mekanisme pengadaan barang/jasa. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas belanja daerah.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan daerah pembanding seperti Kota Mataram (±85%), Kota Denpasar (±92%), dan Kota Surabaya (±95%), capaian ini masih tertinggal cukup jauh. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi perencanaan pengadaan dan peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan elektronik.

7. Porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti

Capaian indikator ini telah mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan di bidang protokol dan komunikasi pimpinan telah ditindaklanjuti dengan baik.

Namun jika dibandingkan dengan daerah pembanding, meskipun secara angka sudah maksimal, perlu dipastikan bahwa kualitas tindak lanjut juga sebanding dengan daerah lain seperti Kota Denpasar (±95%) dan Kota Surabaya (±97%) yang menunjukkan konsistensi tinggi dalam implementasi kebijakan.

8. Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik

Realisasi indikator ini mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dibandingkan dengan daerah pembanding, capaian ini lebih tinggi dari Kota Mataram (±85%), Kota Denpasar (±92%), dan Kota Surabaya (±94%). Kondisi ini menjadi keunggulan yang perlu dipertahankan melalui pengelolaan aset yang konsisten dan berkelanjutan.

9. Indeks kerukunan umat beragama

Realisasi indeks sebesar 71,40 masih berada di bawah target 73,48, yang menunjukkan bahwa tingkat kerukunan umat beragama belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya interaksi sosial lintas agama dan kegiatan yang mendukung toleransi.

Dibandingkan dengan daerah pembanding, capaian ini masih tertinggal dari Kota Mataram (±78,40), Kota Denpasar (±85,20), dan Kota Surabaya (±82,50). Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran forum kerukunan umat beragama serta peningkatan kegiatan sosial lintas agama.

3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025

Pengukuran Kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisi kinerja masing-masing Sasaran dan Indikator Sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kota Bima

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah	Persentase kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	**100,00%**	100	100	**100,00%**
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	68,48	67,10	**98,04%**	68,48	67,28	**98,25%**
3	Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah	Nilai LPPD	Nilai	2,80	Belum Rilis		2,70	Belum Rilis	
4	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	%	100	100	**100,00%**	100	100	**100,00%**
5	Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan	Persentase OPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu	%	100	92,00	**92,00%**	100	92,25	**92,25%**
6	Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadadaan	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui	%	29,52	29,52	**100,00%**	30,41	30,41	**100,00%**

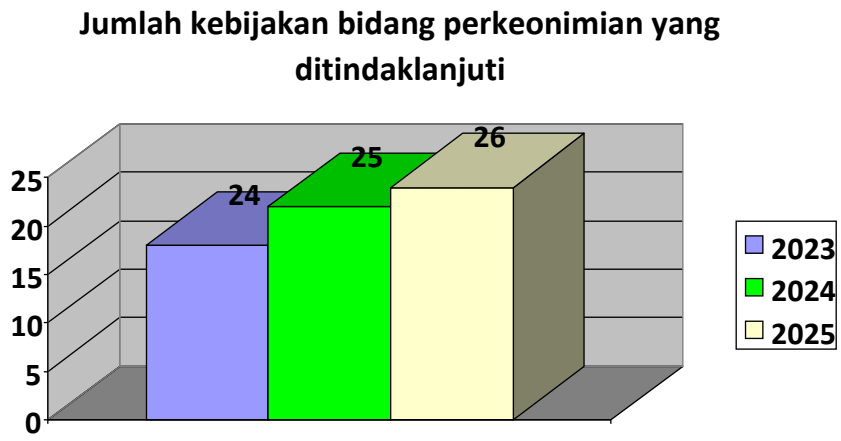
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Pengadaan							
7	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan	porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komukasi pimpinan yang ditindaklanjuti	%	**100**	100	**100**	100	100	**100,00%**
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam keadaan baik	%	**100**	100	**100**	100	100	**100,00%**
9	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	80	72,04	**90,05%**	73,48	71,40	**97,17%**
TOTAL									

Dari Tabel 3. 4 untuk Tahun 2025 belum dapat diketahui Rata-rata Capaian Kinerja karena ada satu indikator kinerja yaitu Nilai LPPD yang ***Belum Rilis***. Secara garis besar sasaran strategis dikategorikan berhasil. Adapun Analisis Keberhasilan untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

3.1.2.1. Sasaran I : Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis 1 Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Perekonomian Daerah dengan indikator

Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori sangat tinggi. Capaian dapat terwujud dengan terlaksananya semua kebijakan bidang perekonomian. Untuk lebih jelasnya jumlah kebijakan tahun 2023, 2024 dan 2025 dapat dilihat dalam grafik 3. 1.



Grafik 3. 1 Grafik kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bima dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengendalian perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kerjasama daerah;
2. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan koordinasi secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian;

3. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Bima.

Faktor penghambat dalam pencapaian indeks perekonomian adalah sebagai berikut:

10. Jumlah SDM di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Bima belum ideal dari sisi kuantitas;
11. Masih adanya kegiatan di beberapa OPD yang tumpang tindih dengan OPD lainnya sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak optimal untuk meningkatkan perekonomian Kota Bima;

Keberhasilan ini karena sasaran tersebut ditunjang dengan program perekonomian dan pembangunan.

3.1.2.2. Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Untuk Capaian sasaran Strategis 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja *dengan indikator Nilai Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* Kota Bima pada Tahun 2025 memperoleh nilai 67,28 dengan capaian kinerja 98,25 % masuk kategori tinggi. Khusus Tahun 2025 nilai SAKIP Kota Bima diperoleh sebesar 67,28 poin dengan kenaikan jumlah

poin sebanyak 0,18 poin dibanding Nilai SAKIP Tahun 2024 dengan nilai 67,10 poin.

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bima ketika dibandingkan dengan target RJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2025 - 2029 untuk Tahun 2025 sebesar 68,48 dengan realisasi kinerja Sasaran indikator sebesar 67,28 dengan peringkat B, maka capain kinerjanya adalah 98,25 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja

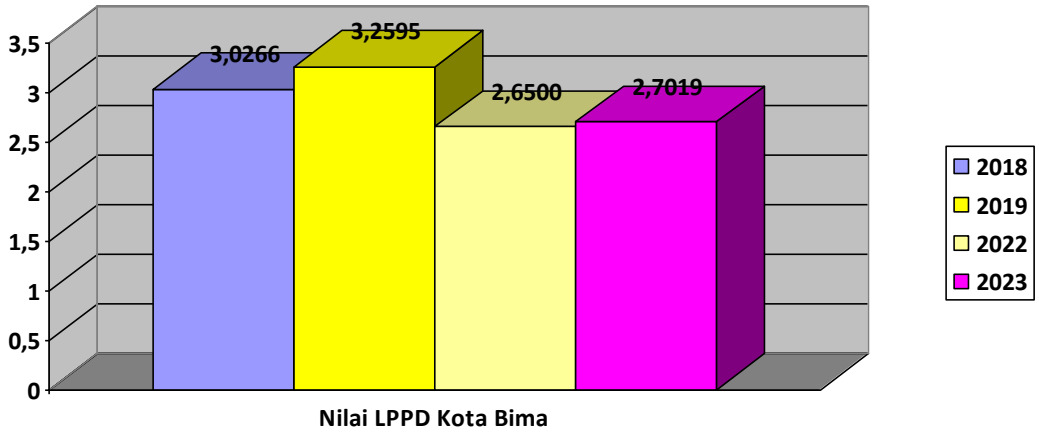
Adapun daftar rincian peningkatan nilai SAKIP selama 5 Tahun terakhir sebagaimana Grafik 3.1.



Grafik 3. 2 Nilai SAKIP Kota Bima

3.1.2.3. Sasaran III : Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis 3 Meningkatnya Fasilitasi Perumusan Kebijakan pemerintahan umum Daerah dengan indikator Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum memperoleh hasil (belum rilis).



Grafik 3. 3. Nilai LPPD Kota Bima 2018-2023

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan

3. Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementrian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai LPPD adalah sebagai berikut :

1. Internal
   a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya;
   b. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
2. Eksternal
   a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
   b. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;

c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;

d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang benar;

e. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

3.1.2.4. Sasaran IV : Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk Capaian sasaran Strategis 4 Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator *Persentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan makanisme pembentukan produk hukum daerah* mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori berhasil.

Adapun Upaya yang dilakukan atas capaian tersebut adalah meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang memprakarsai rancangan produk hukum, sehingga dalam proses pembentukan produk hukum tidak terlalu mendapatkan kendala yang signifikan, dan dapat

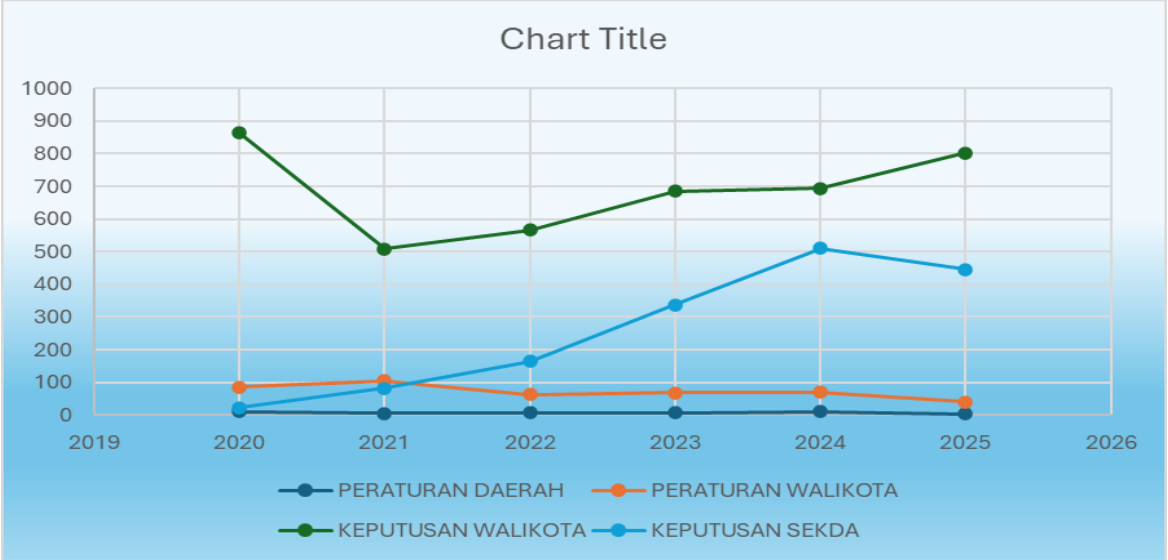
diundangkan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Bima (Pembentukan Perda) dan melaksanakan sesuai SOP dan Tata Naskah Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan pembentukan produk hokum tersebut.

Disamping koordinasi, upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kota Bima adalah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah NTB dan Biro Hukum Setda Provinsi NTB sebagai upaya penyelerasan dan harmonisasi substansi pengaturan produk hukum daerah.

Pemerintah Kota *Bima* pada Tahun 2025 menargetkan rancangan Peraturan Daerah yang akan disahkan sebanyak 10 Peraturan Daerah (Perda) dengan realisasi sebanyak 10 Perda yang sudah diundangkan. Realisasi capaian Produk Hukum yang diterbitkan dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel 3.8. Produk hukum yang diterbitkan

TAHUN	PERATURAN DAERAH	PERATURAN WALIKOTA	KEPUTUSAN WALIKOTA	KEPUTUSAN SEKDA
1	*2*	*3*	*4*	5
2020	11	85	863	23
2021	6	105	508	83
2022	8	63	566	165
2023	8	68	685	338
2024	10	70	695	511
2025	4	40	802	446



Grafik 3. 4 Produk Hukum Daerah yang di terbitkan

3.1.2.5. Sasaran V : Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan

Untuk capaian sasaran strategis 5 Meningkatnya kepatuhan OPD terhadap laporan pelaksanaan pembangunan dengan indikator *Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan tepat waktu* mendapatkan capaian kinerja sebesar 92,25%. Capaian ini belum mencapai target yang diharapkan karena terkendala dari beberapa kegiatan pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan di lapangan, selain itu juga bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan OPD terhadap penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan adalah kuantitas sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga dapat mempengaruhi ketepatwaktuan dalam penyusunan laporan.

Faktor pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi kepada Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara rutin dan intensif;
2. Mengatasi kendala-kendala yang mempengaruhi keterlambatan progress pelaksanaan pekerjaan terutama pekerjaan fisik di lapangan yang mengakibatkan target pelaksanaan tidak tercapai;
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan PPTK. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan setiap bulan dan setiap triwulan;
4. Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan;
5. Fasilitasi kepada PPTK maupun admin Pelaporan OPD/Unit Kerja tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam aplikasi pelaporan secara real time atau tepat waktu;
6. Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
7. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah mengenai evaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran, yang dilakukan per triwulan.

Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator Sasaran Tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, diantaranya :

1. Keterlambatan progress pekerjaan fisik dilapangan

2. Tidak adanya target yang ditentukan oleh masing-masing perangkat daearh sehingga proses pelaksanaan pekerjaan kegiatan kerap kali dilakukan bersamaan diakhir tahun.
3. Keterlambatan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan progres fisik dan keunagan.

3.1.2.6. Sasaran VI : Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator Sasaran strategis terhadap target hasil dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka-angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnan, kemunduran, atau bahkan kegagalan kinerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target, atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2025. Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna, sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan indikator rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa melalui ULP, ini merupakan indikator yang cara mengukurnya dilakukan dengan menghitung jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan dibagi total belanja modal dan operasional dikali seratus porsen.

Dalam hal ini dalam mengukur rasio belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan formula Indikatornya adalah jumlah nilai belanja modal dan operasional yang melalui pengadaan dibagi total belanja modal dan operasional dikali seratus porsen dan diperoleh hasil 60,72 % melebihi target yang ditetapkan di tahun 2025 yaitu 30,41 %.

Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.	**30,41%**	**60,72%**	**199,67%**

Persentase OPD yang melakukan pengadaan barang dan jasa melalui ULP, Indikator Prosentase PBJ yang tepat waktu ukuran ini merupakan indikator yang cara mengukurnya dilakukan dengan menghitung jumlah paket pekerjaan/tender yang dimasukkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke UKPBJ.

Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2025 berjalan lancar, tender sampai dengan semester 2 sejumlah 26 paket tender, semua tender diproses dan dapat diselesaikan dengan baik oleh UKPBJ.

Dalam hal ini formula Indikatornya adalah jumlah paket pekerjaan/tender yang diproses UKPBJ dibagi dengan jumlah paket pekerjaan/tender yang dimasukkan Organisiasi Perangkat Daerah (OPD) ke UKPBJ adalah 100% dan diperoleh hasil 100%

Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa tepat waktu.	**100%**	**100%**	**100%**

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baik Tender maupun Pengadaan Langsung melalui LPSE dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan melaui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).

Pemerintah Kota Bima telah mengeluarkan Surat Edaran Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik sebagai dasar penerapan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah Kota Bima. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses

pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Layanan ini dilaksanakan oleh LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional, yang secara nasional dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun beberapa tugas LKPP termasuk mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik dan menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

Tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
4. Mendukung proses monitoring dan audit
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time

Formula indikator kinerja utama Persentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada LPSE, Website resmi Pemkot, website resmi OPD dan papan pengumuman adalah Jumlah OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka

dan online dibagi seluruh PD yang ada dilingkup Pemerintah Kota Bima (34 Perangkat Daerah) dikalikan 100%.

Jika Jumlah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Bima adalah 34 OPD dan semua (34 OPD) tersebut telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di sirup.lkpp.go.id maka formula perhitungan 34 OPD dibagi 34 OPD dikalikan 100% diperoleh hasil 100 %, maka capaian indikator kinerja utama 2 ini adalah 100% karena Pemerintah Kata Bima melalui Surat Edaran Walikota Bima Tahun 2021 sudah mewajibkan pada seluruh Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kata Bima menerapkan proses pengadaan barang/jasa pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi dari LPSE. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE menfasilitasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi :

1. PA/KPA untuk mengumumkan rencana umum pengadaan
2. Pokmil untuk menayangkan pengumuman pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa.
3. Pokmil/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik

4. Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE

Capaian Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase OPD yang mempublikasikan RUP secara terbuka dan online pada situs LPSE LKPP, SiRUP LKPP dan Web resmi Pemkot Bima	**100 %**	**100%**	**100%**

Secara garis besar capaian Sasaran Strategis Sekretais Daerah yang ke 6 yaitu Meningkatnya akuntabilitas Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara online meperoleh capain kinerja sebesar 100%. Sebagai pembanding pengadaan barang dan jasa dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.9. Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2025

Tahun	Tender	Pengadaan Langsung	Total
1	*2*	*3*	*4*
2024	46	459	505
2025	26	403	429

Tahun	Pengadaan Online	Pengadaan non online
1	*2*	*3*
2017	109	785
2018	71	721
2019	775	-
2020	357	-
2021	423	-

Tahun	Pengadaan Online	Pengadaan non online
2022	506	-
2023	464	-
2024	505	-
2025	429	-

3.1.2.7. Sasaran VII : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah

Untuk Capaian sasaran Strategis ke 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana Perkantoran Lingkup Sekertariat Daerah dengan indikator Persentase Sarana dan Prasaran dalam kondisi baik mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori Sangat Tinggi.

3.1.2.8. Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan

Untuk Capaian sasaran Strategis ke 8 Meningkatnya pelaksanaan kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan dengan indikator porsentase kebijakan daerah bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang ditindaklanjuti mendapatkan capaian kinerja sebesar 100 % atau masuk kategori Sangat Tinggi.

3.1.2.9. Meningkatnya pengamalan ajaran agama

Untuk Capaian sasaran Strategis 9 Meningkatnya Pengamalan ajaran Agama dengan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama

mendapatkan capaian kinerja sebesar 71,40 atau masuk kategori tinggi dengan porsentase kinerja sebesar 97,17%.

Capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah yang ke 9 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengamalan Ajaran Agama dengan indikator Skor Rata-rata Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dengan target di Tahun 2024 sebesar 80 (kategori tinggi) memperoleh realisasi nilai indeks di tahun 2024 sebesar 72,04 (kategori Tinggi) dengan porsentase capaian kinerja perangkat Daerah sebesar 90,05%.

Terdapat perbedaan target nilai IKUB di Tahun 2024 sebesar (80) dengan target IKUB di tahun 2025 sebesar (73,48). Adanya perubahan target IKUB di tahun 2025 karena mengikuti target RPJMD Kota Bima 2025-2029. Sehingga dengan adanya perbedaan target sesuai RPJMD Kota Bima yang baru, meskipun nilai IKUB yang diperoleh di tahun 2025 sebesar (71,40) lebih rendah dari nilai IKUB ditahun 2024 sebesar (72,04) namun didapat kenaikan nilai porsentase kinerja sebesar 97,17% lebih tinggi 7,12% jika dibandingkan porsentase kinerja IKUB di tahun 2024 sebesar 90,05%.

Faktor lain penyebab turunnya nilai IKUB juga disebabkan oleh kurangnya upaya pembinaan, Pelaksanaan serta kepentingan politik, SDM yang terbatas dan pengaruh media social akan tetapi Fasilitasi sarana dan prasarana terhadap kerukunan umat beragama tidak mengurangi hak dasar masing-masing dalam melaksanakan kewajiban agamanya (toleransi). Jadi kesimpulannya, Terdapat hubungan antara

pendidikan agama, pendapatan, aktif bersosialisasi, kearifan lokal, dan kesetaraan peran Pemerintah Daerah terhadap sikap rukun umat beragama walaupun faktor non-keagamaan lebih berdampak seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun).

3.1.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.1.3.1. Anggaran

Untuk mencapai target Sembilan indikator yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kota Bima menganggarkan belanja langsung tahun 2025 sebesar Rp 50.142.238.281,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 46.754.904.107,00 atau 93,24 %. Hal tersebut menunjukan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bima telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.387.334.174,00 atau 6,76 %.

3.1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kinerja, Sekretariat Daerah Kota Bima didukung dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional roda empat dan roda dua, peralatan kantor dan perlengkapan kantor. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang pesat dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jumlah anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan sebesar Rp. 50.142.238.281,00. *(Lima Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)* dengan realisasi sebesar Rp. 46.754.904.107,00 *(Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Seratus Tujuh Rupiah)*. Sehingga bila dihitung capaiannya sebesar 93,24 %.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**34.905.639.413,00**	**32.894.858.725,00**	**96,75**
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**9.139.400,00**	**9.139.400,00**	**100,00**
	a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.322.300,00	1.322.300,00	100,00
	a.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.965.200,00	1.965.200,00	100,00
	a.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.965.200,00	1.965.200,00	100,00
	a.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.921.500,00	1.921.500,00	100,00
	a.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.965.200,00	1.965.200,00	100,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**18.881.068.640,00**	**17.599.865.712,00**	**93.21**
	b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.246.842.640,00	16.990.500.812,00	93.11
	b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	631.001.000,00	606.139.900,00	96,06
	b.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.286.500,00	1.286.500,00	100,00
	b.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.938.500,00	1.938.500,00	100,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**20.844.100,00**	**20.803.400,00**	**99,80**
	c.1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20.844.100,00	20.803.400,00	99.80
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**1.935.246.666,00**	**1.926.229.261,00**	**99,53**
	d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.721.260,00	69.700.760,00	99,97
	d.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.291.190,00	81.291.190,00	100,00
	d.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	96.189.100,00	94.903.400,00	98,66
	d.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
	d.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.392.150.250,00	1.391.159.640,00	99,93
	d.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.894.866,00	289.174.866,00	97,73
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1.375.642.000,00**	**1.308.962.950,00**	**95,15**
	e.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
	e.2 Pengadaan Mebel	1.375.642.000,00	1.308.962.950,00	95,15
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3.466.364.470,00**	**3.426.235.913,00**	**98,84**
	f.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	257.127.000,00	249.284.000,00	96,95
	f.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.336.779.207,00	1.308.827.127,00	97.91
	f.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.872.458.263,00	1.868.124.786,00	99.77
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2.906.502.000,00**	**2.883.982.084,00**	**99.23**
	g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	453.920.000,00	453.758.194,00	99.96
	g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	759.180.000,00	739.801.065,00	97.45
	g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.015.000,00	201.915.000,00	99.95

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
	g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.445.347.000,00	1.442.524.325,00	99.80
	g.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.040.000,00	45.983.500,00	99.88
	h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**1.258.849.985,00**	**875.027.824,00**	**69.51**
	h.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	597.849.985,00	244.816.409,00	40.95
	h.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00
	h.3 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.000.000,00	179.211.815,00	99.56
	h.4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	369.999.600,00	92.50
	i. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**1.810.944.252,00**	**1.672.282.437,00**	**92.34**
	i.1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	922.750.825,00	874.693.848,00	94.79
	i.2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	725.690.527,00	643.604.589,00	88.69
	i.3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	162.502.900,00	153.984.000,00	94.76
	j. Penataan Organisasi	**435.951.800,00**	**419.031.100,00**	**96.12**
	j.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	276.087.800,00	261.369.100,00	94.67
	j.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	52.245.000,00	50.603.000,00	96.86
	j.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	48.345.000,00	48.206.000,00	99.71
	j.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	28.750.000,00	28.643.000,00	99.63
	j.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	30.524.000,00	30.210.000,00	98.97
	k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**2.805.086.100,00**	**2.753.298.644,00**	**98.15**
	k.1 Fasilitasi Keprotokolan	1.485.806.000,00	1.484.561.825,00	99.92
	k.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	881.727.700,00	877.934.419,00	99.57
	k.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	437.552.400,00	390.802.400,00	89.32
2	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**12.912.521.175,00**	**11.569.860.894,00**	**89.60**
	a. Administrasi Tata Pemerintahan	**2.149.020.175,00**	**1.925.006.258,00**	**89.58**
	a.1 Penataan Administrasi Pemerintahan	1.530.251.000,00	1.345.894.321,00	87.95
	a.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	339.109.225,00	317.368.207,00	93.59
	a.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	279.659.950,00	261.743.730,00	93.59

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
	Daerah			
	b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**9.841.645.700,00**	**8.783.127.550,00**	**89.24**
	b.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8.895.264.800,00	7.914.542.550,00	88.97
	b.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	181.817.000,00	149.745.000,00	82.36
	b.3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	764.563.900,00	718.840.000,00	94.02
	c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**921.855.300,00**	**861.727.086,00**	**93.48**
	c.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	366.820.800,00	319.339.046,00	87.06
	c.2 Fasilitasi Bantuan Hukum	315.552.000,00	315.444.556,00	99.97
	c.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	239.482.500,00	226.943.484,00	94.76
3	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**2.324.077.693,00**	**2.290.184.488,00**	**98.54**
	a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**300.095.420,00**	**295.604.012,00**	**98.50**
	a.1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	38.578.330,00	38.426.892,00	99.61
	a.2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	170.931.590,00	166.929.620,00	97.66
	a.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	52.880.400,00	52.571.400,00	99.42
	a.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	28.855.100,00	28.835.100,00	99.93
	a.5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	8.850.000,00	8.841.000,00	99.90
	b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**1.275.759.263,00**	**1.275.195.900,00**	**99.96**
	b.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.497.713,00	44.488.000,00	99.98
	b.2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1.163.138.550,00	1.162.994.900,00	99.99
	b.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	68.123.000,00	67.713.000,00	99.40
	c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	**697.034.400,00**	**668.932.598,00**	**95.97**
	c.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	161.030.000,00	159.902.700,00	99.30
	c.2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	254.600.400,00	248.339.070,00	97.54
	c.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	281.404.000,00	260.690.828,00	92.64
	d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**51.188.610,00**	**50.451.978,00**	**98.56**
	d.1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	18.449.732,00	18.128.100,00	98.26

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	2	3	4	5
	d.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
	d.3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	32.738.878,00	32.323.878,00	98.73
Total		**50.142.238.281,00**	**46.754.904.107,00**	**93.24**

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**49.941.811.742,00**	**50.142.238.281,00**	**46.754.904.107,00**	**3.387.334.174,00**	**93.24**
Sekreatriat Daerah						**49.941.811.742,00**	**50.142.238.281,00**	**46.754.904.107,00**	**3.387.334.174,00**	**93.24**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**33.546.834.448**	**34.905.639.413,00**	**32.894.858.725,00**	**2.010.780.688,00**	**96,75**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**100**	**Porsen**	**100**	**100,00**	**13.104.600,00**	**9.139.400,00**	**9.139.400,00**	**0,00**	**100,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,00	Dokumen	1,00	100,00	1.889.000,00	1.322.300,00	1.322.300,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.807.400,00	1.965.200,00	1.965.200,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.807.400,00	1.965.200,00	1.965.200,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.793.400,00	1.921.500,00	1.921.500,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	2.807.400,00	1.965.200,00	1.965.200,00	0,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**19.520.496.407,00**	**18.881.068.640,00**	**17.599.865.712,00**	**1.281.202.928,00**	**93.21**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	120,00	Orang/bulan	120,00	100,00	18.884.949.807,00	18.246.842.640,00	16.990.500.812,00	1.256.341.828,00	93.11

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
	Tunjangan ASN									
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3,00	Dokumen	3,00	100,00	630.939.400,00	631.001.000,00	606.139.900,00	24.861.100,00	96,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,00	Laporan	1,00	100,00	1.837.800,00	1.286.500,00	1.286.500,00	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18,00	Laporan	18,00	100,00	2.769.400,00	1.938.500,00	1.938.500,00	0,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**10,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**15.334.100,00**	**20.844.100,00**	**20.803.400,00**	**40.700,00**	**99.80**
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6,00	Dokumen	6,00	100,00	15.334.100,00	20.844.100,00	20.803.400,00	40.700,00	99.80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**1.650.576.476,00**	**1.935.246.666,00**	**1.926.229.261,00**	**9.017.405,00**	**99,53**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	63.889.100,00	69.721.260,00	69.700.760,00	20.500,00	99,97
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	94.704.975,00	81.291.190,00	81.290.595,00	595,00	100,00
Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	1,00	Paket	1,00	100,00	74.391.900,00	96.189.100,00	94.903.400,00	1.285.700,00	98,66

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan									
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00	Laporan	12,00	100,00	1.068.757.250,00	1.392.150.250,00	1.391.159.640,00	990.610,00	99,93
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,00	Laporan	54,00	100,00	348.833.251,00	295.894.866,00	289.174.866,00	6.720.000,00	97,73
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**411.430.000,00**	**1.375.642.000,00**	**1.308.962.950,00**	**66.679.050,00**	**95,15**
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0,00	Unit	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30,00	unit	30,00	100,00	411.430.000,00	1.375.642.000,00	1.308.962.950,00	66.679.050,00	95,15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**3.502.119.980,00**	**3.466.364.470,00**	**3.426.235.913,00**	**40.128.557,00**	**98,84**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,00	Laporan	4,00	100,00	295.564.000,00	257.127.000,00	249.284.000,00	7.843.000,00	96,95
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	100,00	1.412.983.200,00	1.336.779.207,00	1.308.827.127,00	27.952.080,00	97.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	100,00	1.793.572.780,00	1.872.458.263,00	1.868.124.786,00	4.333.477,00	99.77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**1.580.257.000,00**	**2.906.502.000,00**	**2.883.982.084,00**	**22.519.916,00**	**99.23**

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Daerah										
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24,00	Unit	24,00	100,00	448.790.000,00	453.920.000,00	453.758.194,00	161.806,00	99.96
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	Unit	28,00	100,00	651.100.000,00	759.180.000,00	739.801.065,00	19.378.935,00	97.45
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211,00	Unit	211,00	100,00	201.210.000,00	202.015.000,00	201.915.000,00	100.000,00	99.95
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10,00	Unit	10,00	100,00	210.097.000,00	1.445.347.000,00	1.442.524.325,00	2.822.675,00	99.80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ipelihara/Direhabilitasi	3,00	Unit	3,00	1000,00	69.060.000,00	46.040.000,00	45.983.500,00	56.500,00	99.88
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**0,00**	**100,00**	**1.198.849.985,00**	**1.258.849.985,00**	**875.027.824,00**	**383.822.161,00**	**69.51**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	100,00	537.849.985,00	597.849.985,00	244.816.409,00	353.033.576,00	40.95
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	1,00	Paket	1,00	100,00	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	100,00

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan									
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10,00	Orang	10,00	100,00	180.000.000,00	180.000.000,00	179.211.815,00	788.185,00	99.56
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	Orang/Bulan	2,00	100,00	400.000.000,00	400.000.000,00	369.999.600,00	30.000.400,00	92.50
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**1.981.514.900,00**	**1.810.944.252,00**	**1.672.282.437,00**	**138.661.815,00**	**92.34**
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	1.010.008.000,00	922.750.825,00	874.693.848,00	48.056.977,00	94.79
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	809.004.000,00	725.690.527,00	643.604.589,00	82.085.938,00	88.69
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00	162.502.900,00	162.502.900,00	153.984.000,00	8.518.900,00	94.76
Penataan Organisasi	**Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**399.378.000,00**	**435.951.800,00**	**419.031.100,00**	**16.920.700,00**	**96.12**
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,00	Dokumen	10,00	100,00	178.477.000,00	276.087.800,00	261.369.100,00	14.718.700,00	94.67
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1,00	Laporan	1,00	100,00	56.513.000,00	52.245.000,00	50.603.000,00	1.642.000,00	96.86
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2,00	Dokumen	2,00	100,00	53.580.000,00	48.345.000,00	48.206.000,00	139.000,00	99.71
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	4,00	Dokumen	4,00	100,00	53.785.000,00	28.750.000,00	28.643.000,00	107.000,00	99.63

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2,00	Dokumen	2,00	100,00	57.023.000,00	30.524.000,00	30.210.000,00	314.000,00	98,97
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**3.273.773.000,00**	**2.805.086.100,00**	**2.753.298.644,00**	**51.787.456,00**	**98.15**
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900,00	Laporan	900,00	100,00	2.091.060.000,00	1.485.806.000,00	1.484.561.825,00	1.244.175,00	99.92
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10,00	Laporan	10,00	100,00	786.512.500,00	881.727.700,00	877.934.419,00	3.793.281,00	99.57
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12,00	Laporan	12,00	100,00	396.200.500,00	437.552.400,00	390.802.400,00	46.750.000,00	89.32
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**14.042.298.150,00**	**12.912.521.175,00**	**11.569.860.894,00**	**1.342.660.281,00**	**89,60**
Administrasi Tata Pemerintahan	**Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**1.910.756.750,00**	**2.149.020.175,00**	**1.925.006.258,00**	**224.013.917,00**	**89,58**
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	21,00	Dokumen	21,00	100,00	1.017.006.000,00	1.530.251.000,00	1.345.894.321,00	184.356.679,00	87,95
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6,00	Dokumen	6,00	100,00	459.549.850,00	339.109.225,00	317.368.207,00	21.741.018,00	93,59
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4,00	Dokumen	4,00	100,00	434.200.900,00	279.659.950,00	261.743.730,00	17.916.220,00	93,59
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**18,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**10.913.958.400,00**	**9.841.645.700,00**	**8.783.127.550,00**	**1.058.518.150,00**	**89,24**
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13,00	Dokumen	13,00	100,00	9.833.985.500,00	8.895.264.800,00	7.914.542.550,00	980.722.250,00	88.97
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	3,00	Dokumen	3,00	100,00	219.139.100,00	181.817.000,00	149.745.000,00	32.072.000,00	82.36

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2,00	Dokumen	2,00	100,00	860.833.800,00	764.563.900,00	718.840.000,00	45.723.900,00	94.02
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**1.217.583.000,00**	**921.855.300,00**	**861.727.086,00**	**60.128.214,00**	**93.48**
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690,00	Dokumen	690,00	100,00	547.504.000,00	366.820.800,00	319.339.046,00	47.481.754,00	87.06
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2,00	Kasus	2,00	100,00	325.922.000,00	315.552.000,00	315.444.556,00	107.444,00	99.97
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85,00	Dokumen	85,00	100,00	344.157.000,00	239.482.500,00	226.943.484,00	12.539.016,00	94.76
Program Perekonomian Dan Pembangunan	**Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**2.352.679.144**	**2.324.077.693,00**	**2.290.184.488,00**	**33.893.205,00**	**98.54**

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**413.378.600,00**	**300.095.420,00**	**295.604.012,00**	**4.491.408,00**	**98.50**
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5,00	Dokumen	5,00	100,00	63.726.300,00	38.578.330,00	38.426.892,00	151.438,00	99.61
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4,00	Laporan	4,00	100,00	229.394.700,00	170.931.590,00	166.929.620,00	4.001.970,00	97.66
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8,00	Dokumen	8,00	100,00	68.815.000,00	52.880.400,00	52.571.400,00	309.000,00	99.42
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	50.442.600,00	28.855.100,00	28.835.100,00	20.000,00	99.93
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1,00	Dokumen	1,00	100,00	1.000.000,00	8.850.000,00	8.841.000,00	9.000,00	99.90
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	**Persentase Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**0,00**	**1.204.211.244,00**	**1.275.759.263,00**	**1.275.195.900,00**	**563.363,00**	**99.96**
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1,00	Dokumen	1,00	100,00	71.938.100,00	44.497.713,00	44.488.000,00	9.713,00	99.98
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6,00	Laporan	6,00	100,00	984.053.000,00	1.163.138.550,00	1.162.994.900,00	143.650,00	99.99
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16,00	Laporan	16,00	100,00	148.220.144,00	68.123.000,00	67.713.000,00	410.000,00	99.40
Pengelolaan Pengadaan	**Persentase Pelaksanaan**	**154,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**638.101.000,00**	**697.034.400,00**	**668.932.598,00**	**28.101.802,00**	**95.97**

URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	Target Kinerja (2025)	Satuan	Realisasi Capaian (2025)	Capaian (%)	PAGU 2025	PAGU PERUBAHAN 2025	Realisasi	Sisa Anggaran	Porsentase
Barang dan Jasa	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**									
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72,00	Dokumen	72,00	100,00	61.919.000,00	161.030.000,00	159.902.700,00	1.127.300,00	99.30
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36,00	Dokumen	36,00	100,00	184.486.000,00	254.600.400,00	248.339.070,00	6.261.330,00	97.54
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46,00	Orang	46,00	100,00	391.696.000,00	281.404.000,00	260.690.828,00	20.713.172,00	92.64
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	**Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100,00**	**Porsen**	**100,00**	**100,00**	**96.988.300,00**	**51.188.610,00**	50.451.978,00	736.632,00	98.56
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4,00	Dokumen	4,00	100,00	29.270.000,00	18.449.732,00	18.128.100,00	321.632,00	98.26
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4,00	Dokumen	4,00	100,00	67.718.300,00	32.738.878,00	32.323.878,00	415.000,00	98.73
						49.941.811.742,00	**50.142.238.281,00**	**46.754.904.107,00**	**3.387.334.174,00**	**93,24**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2025. Hasil dari penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai feedback dalam perencanaan periode berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Sebagai Penutup dari laporak kinerja Sekretariat daerah Kota Bima tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian Kinerja yang Signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil Analisis pencapaian indikator sekretariat Daerah sangat tinggi.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 46.754.904.107,00 atau 93,24% dari total anggaran sebesar Rp. 50.142.238.281,00 sehingga Sekretariat Daerah Kota Bima melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 3.387.334.174,00 atau 6,76% dari total anggaran.

4.2 Saran

Meskipun kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima tahun 2025 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Sekretariat Daerah Kota Bima secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Sekretariat Daerah Kota Bima pada awal tahun; dan
3. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

Lampiran 1

CASCADING PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BIMA

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RAPBD)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	**Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**	**Indeks Perencanaan Pembangunan Derah**	**Indeks Perencanaan Pembangunan Derah**	**IKU =(45%*Aspek Integrasi) + (35%*Aspek Sinergi) + (20%*Aspek Monev)** **Aspek Integritas =** Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program) (30%) + Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) (40%) + Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) (30%) **Aspek Sinergi**= Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD (50%) + Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD (50%) **Aspek Monev =** Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditaksanakan (100%)	**80,25%**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Meningkatnya keselarasan program,kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan**	**Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**=rata-rata persentase keselarasan keselarasan program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target anatara Renja dan RKPD dan Renja P dan RKPD-P bidang pemerintahan & pembangunan manusia** ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah \frac{P}{SK} RKPD-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{Indikator\ P}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah \frac{Indikator\ P}{SK} RKPD-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} RPJMD-P} x\ 100\%$ **rata-rata keselarasan muatan RKA dengan Renja dan RKA P dengan Renja P (program,kegiatan,sub kegiatan, indikator dan target) Bidang Pemerintahan dan PM =** ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{SK} RKA-P\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} RKA-P\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} Renja-P} x\ 100\%$	**Tabel sanding keselarasan Renja dg RKPD, Renja P dengan RKPD-P, RKA dengan Renja dan RKA-P dengan Renja -P (bidang pemerintahan dan pembangunan manusia)**	**95,00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia**	**Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**(Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja yang Selaras dengan RKPD/Total program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD) x 100%**	**Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Manusia**	**95**	**282.346.245**
													Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**(Jumlah sub kegiatan dlm RKA yg sesuai dg Renja/Total sub kegiatan dalam RKPD) x 100%**		**95**	
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	4 Dokumen	32.933.700
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	29.332.560
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	38.276.300
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	124.422.423
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	43.163.262
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	14.218.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DAPIL)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
								Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	**=rata-rata persentase keselarasan keselarasan program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target anatara Renja dan RKPD dan Renja P dan RKPD-P bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam** ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{Indikator \frac{P}{SK}}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah \frac{Indikator \frac{P}{SK}}{SK} RKPD-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} RPJMD-P} x\ 100\%$ **rata-rata keselarasan muatan RKA dengan Renja dan RKA P dengan Renja P (program,kegiatan,sub kegiatan, indikator dan target) Bidang Perekonomian dan SDA=** ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ \ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{SK} RKA-P\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah \frac{P}{SK} Renja-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{Indikator \frac{P}{SK}}{SK} RKA-P\ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah \frac{Indikator \frac{P}{SK}}{SK} Renja-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} RKA-P\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja-p}{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} Renja-P} x\ 100\%$	**Tabel sanding keselarasan Renja dg RKPD, Renja P dengan RKPD-P, RKA dengan Renja dan RKA-P dengan Renja -P (bidang Perekonomian & SDA)**	**95,00**	**Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)**	**(Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan Renja yang Selaras dengan RKPD/Total program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD) x 100%**	**Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**	**95,0%**	**620.982.672**
													Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	**(Jumlah sub kegiatan dlm RKA yg sesuai dg Renja/Total sub kegiatan dalam Renja) x 100%**		**95,0%**	
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	61.966.257
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	19.270.900
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	10.188.900
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	469.459.825
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	51.826.790
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	8.270.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DAPBD)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
								Persentase Keselarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	**=rata-rata persentase keselarasan keselarasan program,kegiatan,sub kegiatan,indikator dan target anatara Renja dan RKPD dan Renja P dan RKPD-P bidang infrastruktur dan kewilayahan** ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ Renja\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD}{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ RKPD} x\ 100\%$ ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{Indikator P}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah \frac{Indikator P}{SK} RKPD-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} Renja-P\ \ yg\ selaras\ dg\ RKPD-P}{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} RPJMD-P} x\ 100\%$ **rata-rata keselarasan muatan RKA dengan Renja dan RKA P dengan Renja P (program,kegiatan,sub kegiatan, indikator dan target) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan=** ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Indikator \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK}/SK\ RKA\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja}{Jumlah\ Target \frac{P}{K}/SK\ Renja} x\ 100\%$ ***Keselarasan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{P}{SK} RKA-P\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah \frac{P}{SK} Renja-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Indikator program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah \frac{Indikator P}{SK} RKA-P\ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah \frac{Indikator P}{SK} Renja-P} x\ 100\%$ ***Keselarasan Target program/kegiatan/sub kegiatan*** $= \frac{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} RKA-P\ \ yg\ selaras\ dg\ Renja-P}{Jumlah\ Target \frac{P}{SK} Renja-P} x\ 100\%$	**Tabel sanding keselarasan Renja dg RKPD, Renja P dengan RKPD-P, RKA dengan Renja dan RKA-P dengan Renja -P (bidang Infrastruktur dan Kewilayahan)**	**95,00**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**		**Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**95,0%**	**319.244.982**
													Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			**95,0%**	
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	58.239.120
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	135.203.902
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan	18.180.900
												Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	72.895.800
												Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	25.584.760
												Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4 Laporan	9.140.500

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DARI)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
						PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Meningkatnya keselarasan dalam dokumen perencanaan**	**Rata-rata persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD dan keselarasan RKPD-P dan RPJMD (Program,Indikator & Target)**	**rata-rata keselarasan program,indikator dan target antara RKPD dengan RPJMD dan Perubahan RKPD dengan RPJMD** % keselarasan muatan RKPD dg RPJMD $=\frac{Jumlah\frac{program,indikator,target}{RKPD\ yg\ selaras\ dg\ RPJMD}}{Jumlah\frac{Program,indikator}{target\ RPJMD}} x\ 100\%$ % keselarasan muatan RPerubahan KPD dg RPJMD $=\frac{Jumlah\frac{program,indikator,target}{Perubahan\ RKPD\ yg\ selaras\ dg\ RPJM}}{Jumlah\frac{Program,indikator}{target\ RPJMD}}$	**Tabel sanding keselarasan RKPD dengan RPJMD dan keselarasan RKPD-P dengan RPJMD**	**95,00**	**Penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**=(Jumlah NSPK yang telah dipenuhi dalam dokumen perencanaan/Jumlah NSPK yang seharusnya dipenuhi) x 100%**	**Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal Standar Pedoman Ketentuan)**	**95,0%**	**336.910.000**
													Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	**= Total Belanja u prioritas daerah/Total Belanja Daerah) x 100% (dalam RKPD)**	**Tercapainya persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD**	**70,0%**	
													Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dalam RKPD	**=Total Belanja u prioritas nasional/Total Belanja Daerah) x 100% (dalam RKPD)**	**Tercapainya persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas Nasional dalam RKPD**	**70,0%**	
													Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	**=(Jumlah usulan musrembang yang di akomodir dalam RKPD/Total usulan musrembang kecamatan) x 100%**	**Tercapainya persentase hasil musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD**	**70,0%**	
												Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		Terlaksananya Konsultasi Publik	1 berita acara	27.189.000
												Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 berita acara	45.143.000
												Pelaksanaan musrembang kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	2 berita acara	78.319.000
												Koodinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota/kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen	186.259.000
							Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	**Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti**	**= (Jumlah Rekomendasi yang dilaksanakan/ Jumlah rekomendasi yang dihasilkan) *100%**	**Berita acara kesepakatan tindak lanjut hasil rekomendasi yang ditandatangani oleh Bappeda dan Perangkat Daerah pelaksana**	**65,00**	**Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah**	**Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya**		**Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi**	**65,0%**	**82.878.000**
										Dokumen laporan monev triwulan yang memuat rekomendasi		Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	2 laporan	27.409.000
												Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 laporan	55.469.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DARI)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daerah**	**Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan**	$\frac{Persentase\ capaian\ indikator\ Kinerja\ Kegiatan}{jumlah\ kegiatan}$x100%			**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		**Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas**	**A**	**83.823.000**
												Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8 dokumen	26.796.000
												Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	9.197.000
												Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	4.550.000
												Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	4.500.000
												Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.350.000
												Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan standar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.700.000
												Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	16.730.000
												Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**5.168.075.888**
												Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	29 Org/bln	4.954.540.588
												Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	140.602.000
												Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	27.711.600

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (RARU)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
												Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanj	1 dokumen	3.000.000
												Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	22.299.700
												Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	19.922.000
												Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100%**	**14.280.000**
												Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.100.000
												Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian	1 Laporan	10.860.000
												Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Bima, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.320.000
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian pada perangkat daerah**	**100%**	**14.031.000**
												pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1 dokumen	1.643.000
												Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	5.400.000
												Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	6.988.000
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**545.633.800**
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	6.531.800
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 paket	148.469.000
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket	73.113.000
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	317.520.000

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IKU OPD (LAMA)	IKU OPD	FORMULA IKU	TARGET IKU	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA	*EVIDENCE*	TARGET PROGRAM	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	TARGET KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (DARI)	ANGGARAN
4	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*		*17*	*18*	*19*
												Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terwujudnya layanan jasa penunjangurusan pemerintahan daerah yang memadai**	**100%**	**145.400.000**
												Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	69.350.000
												Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	39.270.000
												Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	22.180.000
												Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	14.600.000
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah**		**Terpenuhnya kebutuhan pemanfaatan barang milik daerah**	**100%**	**70.734.000**
												Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	62.804.000
												Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	7.930.000

Lampiran 2

POHON KINERJA

ıtegis Daerah

Ultimate Outcome

TUJUAN RPJMD 2025-2029
Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima

SASARAN RPJMD
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas

INDIKATOR SASARAN
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)

ısan/Sub Urusan

Intermediate Outcome

TUJUAN OPD
Meningkatkan kualitas perencana-an pem -bangunan daerah

SASARAN OPD
Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah

INDIKATOR OPD
Indeks kualitas Perencanaan Pembangunan daerah

tikal

Intermediate Outcome

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya keselarasan program,kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan

SASARAN PROGRAM
Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan

INDIKATOR PROGRAM
Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

INDIKATOR PROGRAM
Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

INDIKATOR PROGRAM
Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan

INDIKATOR PROGRAM
Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)

INDIKATOR PROGRAM
Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang dilaksanakan

Intermediate Outcome	Intermediate Outcome	Intermediate Outcome	Intermediate Outcome	Intermediate Outcome
KINERJA Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Manusia **INDIKATOR HASIL** Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	**KINERJA** Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam **INDIKATOR HASIL** Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	**KINERJA** Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan **INDIKATOR HASIL** Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**KINERJA** Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal Standar Pedoman Ketentuan) Tercapainya persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas daerah dalam RKPD Tercapainya persentase hasil musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD **INDIKATOR HASIL** Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	**KINERJA** Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi **INDIKATOR HASIL** Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya

Kinerja Operasional	Kinerja Operasional	Kinerja Operasional	Kinerja Operasional	Kinerja Operasional
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Konsultasi Publik	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		

Raba-Bima, October 2025

Kepala Bappeda

Syarif Rustaman, S.Sos.M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19730409 199211 1 001

Lampiran 3

PROSES BISNIS ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BIMA
TAHUN 2025



ESELON III	SASARAN PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			SASARAN PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya keselarasan program,kegiatan dan sub kegiatan setiap sektor dalam dokumen perencanaan			Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	
	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti
	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	65,00%
FUNGSIONAL	SASARAN KEGIATAN				
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Manusia	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya keselarasan target kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan NSPK (Normal Standar Pedoman Ketentuan) Tercapainya persentase hasil musrembang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi
	95,00%	95,00%	95,00%	98,50%	98,50%
OPD					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Pelaksanaan musrembang kabupaten/kota	Koodinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota/kabupaten	0,985	Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksanaanya Musrenbang Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas
	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1 berita acara	2 berita acara	4 dokumen	0,985	4 kerjasama	A
	Rp32.933.700,00	Rp29.332.560,00	Rp38.276.300,00	Rp124.422.423,00	Rp43.163.262,00	Rp14.218.000,00	Rp61.966.257	Rp19.270.900	Rp10.188.900	Rp469.459.825	Rp51.826.790	Rp8.270.000	Rp58.239.120	Rp135.203.902	Rp18.180.900	Rp72.895.800	Rp25.584.760	Rp9.140.500	Rp57.602.400	Rp259.643.800	Rp170.385.000	Rp156.187.900	Rp0	Rp132.126.120

Kota Bima, Oktober 2025
Kepala Bappeda

Syarif Rustaman, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730409 199211 1 001

Lampiran 4

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BIMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW				Program	Indikator Program	Target Tahunan	Target				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Target				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target		Target				Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
				I	II	III	IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV			Nilai	Satuan	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
																													282.346.245	**241.264.800**	**44.805.000**	**22.813.300**	**10.422.200**
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pem-bangunan daerah	Indeks kualitas Perencanaa n Pembangun an daerah	80,25%	80,25%	80,25%	80,25%	80,25%	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan program/kegiat an/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	95%	95%	95%	95%	95%	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia**	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95%	95%	95%	95%	95%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1	1	1	1	32.933.700	72.232.700	1.167.000	200.000	200.000
																Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan	95%	95%	95%	95%	95%	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	1	1	1	1	29.332.560	29.908.000	545.000	1.530.000	0
																						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	Laporan	1	1	1	1	38.276.300	31.804.000	5.585.000	2.052.300	300.000
																						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1	1	1	1	124.422.423	59.088.000	14.874.000	10.651.000	6.970.200
																						Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	1	1	1	1	43.163.262	30.170.100	16.749.000	6.589.000	1.512.000
																						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	Laporan	1	1	1	1	14.218.000	18.062.000	5.885.000	1.791.000	1.440.000
																													620.982.672	**142.233.100**	**487.806.100**	**27.203.000**	**1.269.000**
									Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor perekonomian	95%	95%	95%	95%	95%	**Koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Su b kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	95%	95%	95%	95%	95%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1	1	1	1	61.966.257	67.349.200	4.345.000	0	0
																Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	95%	95%	95%	95%	95%	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	1	1	1	1	19.270.900	15.250.000	9.599.100	1.961.000	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW				Program	Indikator Program	Target Tahunan	Target				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Target				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target		Target				Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
				I	II	III	IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV			Nilai	Satuan	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
																						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	Laporan	1	1	1	1	10.188.900	12.156.900	1.647.000	0	0
																						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1	1	1	1	469.459.825	8.305.000	462.509.000	3.480.000	0
																						Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	1	1	1	1	51.826.790	30.663.000	8.240.000	20.932.000	1.269.000
																						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	Laporan	1	1	1	1	8.270.000	8.509.000	1.466.000	830.000	0
																														319.244.982	**43.580.400**	**257.488.100**	**41.106.500**	**10.815.000**
									Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) sektor infrastruktur	95%	95%	95%	95%	95%	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dan Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan kewilayahan	95%	95%	95%	95%	95%	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4	Dokumen	1	1	1	1	58.239.120	18.994.000	12.850.000	13.566.000	1.475.000
																Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan Renja (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	95%	95%	95%	95%	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	1	1	1	1	135.203.902	6.506.400	130.212.500	3.125.000	940.000
																						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	Laporan	1	1	1	1	18.180.900	2.648.000	4.732.900	5.800.000	5.000.000
																						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD	4	Dokumen	1	1	1	1	72.895.800	2.556.000	99.502.300	3.303.000	2.375.000
																						Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	1	1	1	1	25.584.760	7.748.000	6.667.900	11.512.500	0
																						Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	Laporan	1	1	1	1	9.140.500	5.128.000	3.522.500	3.800.000	1.025.000
																														336.910.000	**273.730.000**	**55.183.000**	**87.774.000**	**0**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW				Program	Indikator Program	Target Tahunan	Target				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Target				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target		Target				Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
				I	II	III	IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV			Nilai	Satuan	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
								PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD (Program)	95%	95%	95%	95%	95%	**Penyusunan perencanaan dan pendanaan**	Persentase Pemenuhan NSPK dalam Dokumen perencanaan pembangunan daerah	95%	95%	95%	95%	95%	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	berita acara	1	1			27.189.000	38.189.000	0	0	0
											Ranwal RKPD 2025, Ranwal RPJPD 2025-2045,	Penetapan RKPD, Rancangan Akhir RPJPD, Evaluasi	Penetapan RKPD Perubahan, Penetapan RPJPD,	Ranwal RPJMD, Evaluasi Capaian RKPD TW 3, Laporan		Persentase alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	70%	70%	70%	70%	70%	Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	berita acara	1				45.143.000	55.523.000	6.350.000	0	0
																Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	70%	70%	70%	70%	70%	Pelaksanaan musrembang kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	berita acara		2			78.319.000	88.333.000	48.833.000	2.895.000	0
																0						Koodinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kota/kabupaten	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4	dokumen	1	1	2		186.259.000	91.685.000	0	84.879.000	0
																														82.878.000	**87.280.000**	**7.550.000**	**13.968.000**	**0**
									Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang dilaksanakan	65	65	65	65	65	**Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah**	Persentase hasil monev yang ditindaklanjuti dalam perencanaan selanjutnya	65%	65%	65%	65%	65%	Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan			1		27.409.000	22.864.000	2.550.000	8.475.000	0
																						Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	Laporan	1	1	1	1	55.469.000	64.416.000	5.000.000	5.493.000	0
																														83.823.000	**24.427.000**	**0**	**0**	**10.900.000**
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	**Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	25	25	25	25	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	1	1	1	1	26.796.000	0	0	0	0
																						Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	dokumen	1				9.197.000	3.197.000	0	0	0
																						Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	dokumen			1		4.550.000	0	0	0	4.550.000
																						Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	dokumen	1				4.500.000	4.500.000	0	0	0
																						Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	dokumen			1		6.350.000	0	0	0	6.350.000
																						Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan standar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan				1	15.700.000	0	0	0	0
																						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	laporan	1	1	1	3	16.730.000	16.730.000	0	0	0
																														5.168.075.888	**4.248.763.409**	**20.082.000**	**734.367.400**	**182.549.079**
															Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	Org/bln	29	29	29	29	4.954.540.588	4.148.884.109	0	664.287.400	141.369.079

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW				Program	Indikator Program	Target Tahunan	Target				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Target				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target		Target				Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
				I	II	III	IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV			Nilai	Satuan	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
																						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	dokumen	1				140.602.000	64.222.000	6.000.000	70.080.000	300.000
																						Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan				1	27.711.600	27.711.600	0	0	0
																						Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokumen		1			3.000.000	0	2.100.000	0	12.125.000
																						Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	4	laporan	1	1	1	1	22.299.700	7.945.700	4.320.000	0	25.425.000
																						Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	dokumen				1	19.922.000	0	7.662.000	0	3.330.000
																														14.280.000	**0**	**5.520.000**	**0**	**8.760.000**
															Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	1				2.100.000	0	2.100.000	0	0
																						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan		1			10.860.000	0	2.100.000	0	8.760.000
																						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan			1		1.320.000	0	1.320.000	0	0
																														14.031.000	**8.791.000**	**0**	**0**	**5.240.000**
															Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket		1			0	0	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW				Program	Indikator Program	Target Tahunan	Target				Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Tahunan	Target				Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target		Target				Anggaran	Rencana Anggaran Kas			
				I	II	III	IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV				Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV			Nilai	Satuan	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV		Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV
																						pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen		1			1.643.000	1.643.000	0	0	0
																						Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen		1			5.400.000	5.400.000	0	0	0
																						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen				1	6.988.000	1.748.000	0	0	5.240.000
																														545.633.800	**149.684.800**	**47.420.000**	**74.214.000**	**274.315.000**
															Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket		1			6.531.800	6.531.800	0	0	0
																						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket		1			0	0	0	0	0
																						Penyediaan Bahan Logistik Kantor								148.469.000	56.673.000	0	21.811.000	69.985.000
																						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket		1			73.113.000	30.000.000	0	13.743.000	29.370.000
																						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	1	1	1	1	317.520.000	56.480.000	47.420.000	38.660.000	174.960.000
																														145.400.000	**93.636.000**	**14.600.000**	**18.264.000**	**18.900.000**
															Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan		1			69.350.000	65.700.000	0	0	3.650.000
																						Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan				1	39.270.000	25.000.000	0	14.270.000	0
																						Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan				1	22.180.000	2.936.000	0	3.994.000	15.250.000
																						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	laporan				1	14.600.000	0	14.600.000	0	0
																														70.734.000	**31.500.000**	**7.930.000**	**18.354.000**	**12.950.000**
															Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit	3	3	3	2	62.804.000	31.500.000	0	18.354.000	12.950.000
																						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	3	3	2	2	7.930.000	0	7.930.000	0	0
	TOTAL																													**7.684.339.587**				

Bima, Oktober 2025
KEPALA BAPPEDA ,

Sarifudin Rahmanan, S.Sos.M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP Nip.19730409 199211 1 001

Lampiran 7

MATRIKS SANDING KESELARASAN MUATAN RKPD TAHUN 2025 DENGAN RPJMD 2025-2029

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-12			
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka)	82	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka)	82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			**1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka)	70	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Satuan Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka)	70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru (Angka)	0,9	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru (Angka)	0,9	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	teknis lainnya pada Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.â€	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah (%)	100	Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.â€	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	100	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhi sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%)	95,5	Terpenuhi sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%)	95,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang dibina (%)	100	Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang dibina (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (%)	81,39	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (%)	81,39	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Menigkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%)	71,28	Menigkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%)	71,28	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%)	34,28	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%)	34,28	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%)	98,77	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	bersih Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	98,77	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	64,21	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	64,21	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	50	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	50	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata (%)	60	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata (%)	60	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%)	62,85	meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%)	62,85	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%)	22,29	meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%)	22,29	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya (%)	99,92	meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya (%)	99,92	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Porsentase Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang efisien (%)	100	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Porsentase Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang efisien (%)	100	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan prasarana dasar perumahan.	Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana dan/ Terdampak Relokasi (%)	98,10	melalui pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan	Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana dan/ Terdampak Relokasi (%)	98,10	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%)	65,42		Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%)	65,42	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman	memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	88,45	Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman	yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	88,45	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase penanganan Rumah Tangga yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%)	97,63		yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%)	97,63	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.	memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	99,51	kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.	yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	99,51	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan	Persentase Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%)	4	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan	aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%)	4	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Mengkatnya nilai sakip	Nilai SAKIP OPD (%)	67	Mengkatnya nilai sakip	Nilai SAKIP OPD (%)	67	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%)	75	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%)	75	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana (%)	66,92	Meningkatnya upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana (%)	66,92	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit) (%)	80,49	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit)	80,49	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	50	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%)	60	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapatkan	60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	80,25	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penanganan Bencana	non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	Meningkatnya Penanganan Bencana	dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100		dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						
	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	1	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkat nya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi	meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka)	50	Meningkat nya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi	meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terlatih (%)	200	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terlatih (%)	200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	93,5	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	93,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkat nya cakupan perlindung an dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%)	48	Meningkat nya cakupan perlindung an dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%)	48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta (%)	8,11	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta (%)	8,11	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan (%)	13		Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan (%)	13	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi (%)	11,75	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi (%)	11,75	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%)	0,050	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%)	0,050	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%)	100		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%)	100,00	kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%)	100,00	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak (%)	100	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak (%)	69,05	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak (%)	69,05	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak (%)	0,054	Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak (%)	0,054	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani (%)	100		Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya diversifkasi dan ketahanan pangan masyarkat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	88,5	Meningkatnya diversifkasi dan ketahanan pangan masyarkat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	88,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penanganan kerwanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	24	Meningkatnya penanganan kerwanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar (%)	90	Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan	persyaratan keamanan dan mutu pangan segar (%)	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong	Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan / Dokumen)	0	Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong	(Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan / Dokumen)	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Jumlah peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Jumlah peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Indeks)	41,4	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Indeks)	41,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Publik (%)	15	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Publik (%)	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen)	12	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen)	12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Meningkatnya Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Jumlah Pokmas Sadar terhadap Lingkungan	Persentase Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah pelatihan dan sosialisasi (%)	50	Meningkatnya Jumlah Pokmas Sadar terhadap Lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup setelah pelatihan dan sosialisasi (%)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kota (Angka)	75	Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat	75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani (Angka)	30	Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani (Angka)	30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Sampah yang tertangani.	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	70	Meningkatnya Sampah yang tertangani.	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya tertib administrasi pendaftaran kependudukan	cakupan pendaftaran penduduk kepemilikan KTP (Angka)	99,53	Meningkatnya tertib administrasi pendaftaran kependudukan	cakupan pendaftaran penduduk kepemilikan KTP (Angka)	99,53	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		persentase kepemilikan KIA (%)	67,97		persentase kepemilikan KIA (%)	67,97	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persentase kepemilikan KIA (%)	71,96	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persentase kepemilikan KIA (%)	71,96	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun (%)	99,06	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun (%)	99,06	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	99,17	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	99,17	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase kepuasan masyarakat (nilai IKM) (%)	91,45	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase kepuasan masyarakat (nilai IKM) (%)	91,45	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	15		kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	15	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	7,32	Persentase pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	7,32	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat kependudukan Kota Bima (Dokumen)	2	meningkatnya kualitas profil kependudukan	agregat kependudukan Kota Bima (Dokumen)	2	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan data profil kependudukan	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun (%)	2	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan data profil kependudukan	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun (%)	2	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terkendalinya Angka Kelahiran	Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2,20	Terkendalinya Angka Kelahiran	Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2,20	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%)	0,023		tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%)	0,023	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar Pelayanan	PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%)	8,30	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai	PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%)	8,30	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga	Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%)	48	Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga	Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%)	48	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar (Unit)	2.805	Terlaksananya penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar (Unit)	2.805	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
		Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	90		Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tersedianya pengelolaan pelayaran	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	100	Tersedianya pengelolaan pelayaran	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik (Poin)	77,65	Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik (Poin)	77,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE (Indeks)	2,50	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE (Indeks)	2,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatanya Produktifitas dan Sumber Daya Pengelola Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Pengurus /Keanggotan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	26,35	Meningkatanya Produktifitas dan Sumber Daya Pengelola Usaha Koperasi	/Keanggotan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	26,35	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usah (%)	100	Meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi	dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usah (%)	100	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	80,00	Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	80,00	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%)	56,59	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%)	56,59	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (%)	5	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%)	8	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%)	8	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM) (%)	5	Meningkatnya Realisasi Investasi	Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM) (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	2	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	5	Meningkatnya daya saing kepemudaan	pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	5	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Poin)	3,00	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Poin)	3,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Poin)	1	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Poin)	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%)	10	Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%)	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	50	Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Perpustakaan yang telah terakreditasi (Perpustakaan)	6	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Perpustakaan yang telah terakreditasi (Perpustakaan)	6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Bertambahnya arsip yang diolah (Berkas)	186	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Bertambahnya arsip yang diolah (Berkas)	186	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Bertambahnya perlindungan dan penyelamatan arsip (Arsip)	125	meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Bertambahnya perlindungan dan penyelamatan arsip (Arsip)	125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Bertambahnya perijinan penggunaan arsip (Layanan)	1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Bertambahnya perijinan penggunaan arsip (Layanan)	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.488,24	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.488,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	913,62	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	913,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masayarakat	Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH)	53,21	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masayarakat	Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH)	53,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (%)	1,24	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (%)	1,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan ODTW (%)	10	Meningkatnya Kualitas daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan ODTW (%)	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%)	100	Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat (%)	30	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat (%)	30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	8,21	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	8,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan (Angka)	29,46		Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan (Angka)	29,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	54,70		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	54,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	52	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	58,36	Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	58,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	100		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian (%)	100	Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming) dan berusaha tani lebih	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	10	pertanian sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi (%)	0	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi (%)	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya			Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota Bima (%)	100	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Persediaan/ Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pelayana, perlindungan konsumen dan kemetrologian			Meningkatnya Pelayana, perlindungan konsumen dan kemetrologian				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pelayanan, perlindungan konsumen dan kemetrologian	perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	0,15	Meningkatnya Pelayanan, perlindungan konsumen dan kemetrologian	dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	0,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tersedianya Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri			Tersedianya Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase terlaksananya Penyusunan Data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Profil Sentra IKM	Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri (%)	100	Persentase terlaksananya Penyusunan Data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Profil Sentra IKM	Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	100	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%)	100	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD			4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.01 - PERENCANAAN			5.01 - PERENCANAAN						
	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjut	Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%)	65	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjut	Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%)	65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%)		Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	80,25	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	95	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan	95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	95	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan	95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02 - KEUANGAN			5.02 - KEUANGAN						
	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik (%)	100	Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate (%)	100	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (%)	7	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (%)	7	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.03 - KEPEGAWAIAN			5.03 - KEPEGAWAIAN						
	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian	Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka)	70,01	Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian	Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka)	70,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%)	25	Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%)	25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional	Jumlah Inovasi daerah yang mendapat pengahrgaan tingkat provinsi dan nasional (Angka)	4	Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional	pengahrgaan tingkat provinsi dan nasional (Angka)	4	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	10	Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	10	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	18		Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	18	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						
	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan (%)	10,36	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan (%)	10,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (Level)	3	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (Level)	3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01 - KECAMATAN			7.01 - KECAMATAN						
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rasanae Timur	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rasanae Timur	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Asakota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Asakota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mpunda	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	97	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mpunda	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Raba	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Raba	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Rasanae Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	100	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Rasanae Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Asakota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Asakota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mpunda	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	98,10	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mpunda	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	98,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Raba	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Raba	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	76	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	15	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	15	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamata Mpunda	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	91,5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamata Mpunda	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	91,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	15	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	70	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur	Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	9	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota	Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	9	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (%)	90	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda	Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (%)	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman (%)	5	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae Barat	keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatanÃ rasanaeÃ barat (%)	5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae	gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mendapatkan Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mendapatkan Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%)	88	Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%)	88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	80	Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	91	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	69	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani (%)	78	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani (%)	78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS

Lampiran 8

MATRIKS SANDING KESELARASAN MUATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 DENGAN RPJMD 2025-2029

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						
	1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka)	82	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima (Angka)	82	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			**1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka)	70	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Satuan Pendidikan Berorientasi Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Angka)	70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru (Angka)	0,9	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru (Angka)	0,9	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	teknis lainnya pada Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.â€	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah (%)	100	Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Perangkat Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.â€	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Meningkatnya Fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar dari Kementerian Kesehatan	rata-rata skor INM (Angka)	92	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	100	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhi sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%)	95,5	Terpenuhi sedian Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar (%)	95,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang dibina (%)	100	Terpenuhinya Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM yang dibina (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (%)	81,39	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai SAKIP OPD (%)	81,39	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Menigkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%)	71,28	Menigkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik (%)	71,28	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%)	34,28	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan (%)	34,28	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak (%)	98,77	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	bersih Jaringan Perpipaan Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	98,77	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	64,21	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik (%)	64,21	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	50	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kab/kota yangmenerbitkan PersetujuanBangunan Gedung (%) (%)	50	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata (%)	60	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata (%)	60	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%)	62,85	meningkatnya aksesbilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap (%)	62,85	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%)	22,29	meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart (%)	22,29	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya (%)	99,92	meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya (%)	99,92	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Porsentase Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang efisien (%)	100	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Porsentase Tersedianya layanan administrasi perkantoran yang efisien (%)	100	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan prasarana dasar perumahan.	Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana dan/ Terdampak Relokasi (%)	98,10	melalui pembangunan rumah baru, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan penyediaan dukungan	Persentase Penanganan RTLH Korban Bencana dan/ Terdampak Relokasi (%)	98,10	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%)	65,42		Persentase Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Khusus (%)	65,42	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman	memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	88,45	Meningkatnya Kualitas dan Kelayakan Kawasan Permukiman	yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	88,45	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase penanganan Rumah Tangga yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%)	97,63		yang mengalami penurunan kualitas lingkungan (%)	97,63	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.	memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	99,51	kawasan permukiman kumuh untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.	yang tidak memiliki akses terhadap rumah layak huni dan terjangkau (%)	99,51	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan	Persentase Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%)	4	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memadai pada Kawasan Perumahan	aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan perumahan. (%)	4	Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Mengkatnya nilai sakip	Nilai SAKIP OPD (%)	67	Mengkatnya nilai sakip	Nilai SAKIP OPD (%)	67	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%)	75	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3) (%)	75	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana (%)	66,92	Meningkatnya upaya Penanggulangan Bencana	Persentase Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana (%)	66,92	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit) (%)	80,49	Peningkatan Kualitas Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit)	80,49	Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	50	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan (%)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial (%)	60	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapatkan	60	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	80,25	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial PMKS	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penanganan Bencana	non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100	Meningkatnya Penanganan Bencana	dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (%)	100		dan/ atau non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	1	Terlaksananya kegiatan rutin penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkat nya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi	meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka)	50	Meningkat nya Kesesuaian antara Rencana Tenaga Kerja dengan Realisasi	meningkatnya kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi (Angka)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terlatih (%)	200	Meningkatnya Kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja terlatih (%)	200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	93,5	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	93,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkat nya cakupan perlindung an dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%)	48	Meningkat nya cakupan perlindung an dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 (%)	48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta (%)	8,11	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta (%)	8,11	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan (%)	13		Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan (%)	13	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi (%)	11,75	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi (%)	11,75	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%)	0,050	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan (%)	0,050	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%)	100		Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%)	100,00	kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase lembaga layanan keluarga yg aktif (%)	100,00	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak (%)	100	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak (%)	69,05	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak (%)	69,05	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak (%)	0,054	Meningkatnya Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak (%)	0,054	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani (%)	100		Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani (%)	100	Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya diversifkasi dan ketahanan pangan masyarkat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	88,5	Meningkatnya diversifkasi dan ketahanan pangan masyarkat	Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	88,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penanganan kerwanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	24	Meningkatnya penanganan kerwanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan segar (%)	90	Meningkatnya Pengawasan mutu dan keamanan Pangan	persyaratan keamanan dan mutu pangan segar (%)	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong	Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan / Dokumen)	0	Meningkatnya Pengelolaan tanah kosong	(Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi (Laporan / Dokumen)	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Jumlah peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Jumlah peraturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Indeks)	41,4	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (Indeks)	41,4	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	94	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Publik (%)	15	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Luas RTH Publik (%)	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen)	12	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Limbah B3 (Dokumen)	12	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Meningkatnya Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH (%)	58	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Jumlah Pokmas Sadar terhadap Lingkungan	Persentase Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah pelatihan dan sosialisasi (%)	50	Meningkatnya Jumlah Pokmas Sadar terhadap Lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup setelah pelatihan dan sosialisasi (%)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kota (Angka)	75	Meningkatnya Kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	masyarakat/sekolah/dunia usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat	75	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani (Angka)	30	Meningkatnya Penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani (Angka)	30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Sampah yang tertangani.	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	70	Meningkatnya Sampah yang tertangani.	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya tertib administrasi pendaftaran kependudukan	cakupan pendaftaran penduduk kepemilikan KTP (Angka)	99,53	Meningkatnya tertib administrasi pendaftaran kependudukan	cakupan pendaftaran penduduk kepemilikan KTP (Angka)	99,53	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		persentase kepemilikan KIA (%)	67,97		persentase kepemilikan KIA (%)	67,97	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persentase kepemilikan KIA (%)	71,96	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	persentase kepemilikan KIA (%)	71,96	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL			2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun (%)	99,06	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-17 tahun (%)	99,06	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	99,17	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan (%)	99,17	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase kepuasan masyarakat (nilai IKM) (%)	91,45	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase kepuasan masyarakat (nilai IKM) (%)	91,45	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	15		kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sma (%)	15	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	7,32	Persentase pengelolaan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	7,32	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya kualitas profil kependudukan	Jumlah dokumen profil kependudukan dan agregat kependudukan Kota Bima (Dokumen)	2	meningkatnya kualitas profil kependudukan	agregat kependudukan Kota Bima (Dokumen)	2	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan data profil kependudukan	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun (%)	2	Persentase lembaga pemerintah dan non pemerintah yang memanfaatkan data profil kependudukan	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun (%)	2	Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terkendalinya Angka Kelahiran	Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2,20	Terkendalinya Angka Kelahiran	Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) (Angka)	2,20	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%)	0,023		tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun (%)	0,023	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai Standar Pelayanan	PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%)	8,30	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Sesuai	PERSENTASE PENURUNAN (UNMET NEED) (%)	8,30	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga	Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%)	48	Memperkuat Ketahanan, Kesejahteraan dan Karakter Keluarga	Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan upaya pemberdayaan ekonomi (%)	48	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar (Unit)	2.805	Terlaksananya penyelengaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Sesuai Standar (Unit)	2.805	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
		Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	90		Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tersedianya pengelolaan pelayaran	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	100	Tersedianya pengelolaan pelayaran	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik (Poin)	77,65	Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik (Poin)	77,65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE (Indeks)	2,50	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE (Indeks)	2,50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)		Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatanya Produktifitas dan Sumber Daya Pengelola Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Pengurus /Keanggotan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	26,35	Meningkatanya Produktifitas dan Sumber Daya Pengelola Usaha Koperasi	/Keanggotan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	26,35	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usah (%)	100	Meningkatnya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi	dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usah (%)	100	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	80,00	Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	80,00	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%)	56,59	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran (%)	56,59	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (%)	5	Meningkatnya kerjasama investasi	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%)	8	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) (%)	8	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Realisasi Investasi	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM) (%)	5	Meningkatnya Realisasi Investasi	Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM) (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang	2	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	2	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	5	Meningkatnya daya saing kepemudaan	pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	5	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Poin)	3,00	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Poin)	3,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Poin)	1	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (Poin)	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
	2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%)	10	Terlaksananya Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Kebudayaan (%)	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	50	Terlaksananya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	50	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
	2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Perpustakaan yang telah terakreditasi (Perpustakaan)	6	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Perpustakaan yang telah terakreditasi (Perpustakaan)	6	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Bertambahnya arsip yang diolah (Berkas)	186	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Bertambahnya arsip yang diolah (Berkas)	186	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Bertambahnya perlindungan dan penyelamatan arsip (Arsip)	125	meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Bertambahnya perlindungan dan penyelamatan arsip (Arsip)	125	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Bertambahnya perijinan penggunaan arsip (Layanan)	1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Bertambahnya perijinan penggunaan arsip (Layanan)	1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kualitas Penyajian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Prangkata Daerah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.488,24	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.488,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	913,62	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	913,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masayarakat	Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH)	53,21	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masayarakat	Angka Konsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun (Kg/KAP/TH)	53,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (%)	1,24	Meningkatnya Produk Olahan Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (%)	1,24	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kualitas daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan ODTW (%)	10	Meningkatnya Kualitas daya tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan ODTW (%)	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%)	100	Meningkatnya pemasaran pariwisata melalui promosi	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat (%)	30	Meningkatnya kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat (%)	30	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	8,21	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian yang memadai	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Angka)	8,21	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan (Angka)	29,46		Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan (Angka)	29,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	54,70		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Angka)	54,70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	52	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian yang memadai	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	52	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	58,36	Menurunnya kejadian dan kasus penyakit menular hewan ternak	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	58,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	100		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian (%)	100	Meningkatnya pelayanan teknis perizinan pertanian	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better farming) dan berusaha tani lebih	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	10	pertanian sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik (better	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi (%)	0	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi (%)	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya			Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota Bima (%)	100	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya	Persediaan/ Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kota	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pelayana, perlindungan konsumen dan kemetrologian			Meningkatnya Pelayana, perlindungan konsumen dan kemetrologian				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pelayanan, perlindungan konsumen dan kemetrologian	perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	0,15	Meningkatnya Pelayanan, perlindungan konsumen dan kemetrologian	dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan (%)	0,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tersedianya Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri			Tersedianya Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Persentase terlaksananya Penyusunan Data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Profil Sentra IKM	Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri (%)	100	Persentase terlaksananya Penyusunan Data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Profil Sentra IKM	Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	100	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%)	100	Meningkatnya Pelaksanaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.02 - SEKRETARIAT DPRD			4.02 - SEKRETARIAT DPRD						
	4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.01 - PERENCANAAN			5.01 - PERENCANAAN						
	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Tercapainya indikator kinerja layanan Penunjang Perangkat Daera	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjut	Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%)	65	Meningkatnya hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjut	Pengendalian dan Monev yang ditindaklanjuti (%)	65	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%)		Meningkatnya keselarasan program dalam dokumen perencanaan	Persentase capaian kinerja perangkat daerah (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	80,25	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan	program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	95	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan	95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan (%)	95	kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan	95	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02 - KEUANGAN			5.02 - KEUANGAN						
	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik (%)	100	Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate (%)	100	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (%)	7	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (%)	7	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.03 - KEPEGAWAIAN			5.03 - KEPEGAWAIAN						
	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian	Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka)	70,01	Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian	Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN (Angka)	70,01	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%)	25	Meningkatnya ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan	persentase peningkatan ASN yang telah memiliki sertifikat sesuai ketentuan (%)	25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional	Jumlah Inovasi daerah yang mendapat pengahrgaan tingkat provinsi dan nasional (Angka)	4	Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional	pengahrgaan tingkat provinsi dan nasional (Angka)	4	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	10	Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	Jumlah Riset yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	10	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	18		Jumlah Inovasi yang memberi Kontribusi pada Peningkatan Kinerja (Angka)	18	Bidang Penelitian Dan Pengembangan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			6.01 - INSPEKTORAT DAERAH						
	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kabupaten/ Kota (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan (%)	10,36	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan	Peningkatan Penyelesaian rekomendasi TL temuan (%)	10,36	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (Level)	3	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	Nilai Kapabilitas APIP (Level)	3	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01 - KECAMATAN			7.01 - KECAMATAN						
	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rasanae Timur	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rasanae Timur	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Asakota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Asakota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mpunda	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	97	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Mpunda	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Raba	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Pelayanan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Raba	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	Kesesuaian program antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Rasanae Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	100	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Rasanae Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Asakota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Asakota	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mpunda	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	98,10	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Mpunda	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	98,10	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Raba	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Raba	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25		Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	80,25	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	76	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	76	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS

No.	RJMD TAHUN 2025			PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SELARAS/TIDAK SELARAS		
	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN		Program	Indikator	Target
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	15	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Rasanae Timur	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	15	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Asakota	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamata Mpunda	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	91,5	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamata Mpunda	Persentase Pemberdayaan Masyarakat (%)	91,5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	15	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Raba	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	70	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Rasanae Timur	Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	70	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota	Jumlah Kasus Gangguan Keamanan Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	9	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Asakota	Ketertiban dan ketentraman di Wilayah Kecamatan (Angka)	9	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (%)	90	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Mpunda	Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (%)	90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman (%)	5	umum 3 Pilar (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) Kecamatan Raba	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman (%)	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae Barat	keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah kecamatanÂ rasanaeÂ barat (%)	5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Babinsa, Babinkamtibmas, dan Lurah) di Kecamatan Rasanae	gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah	5	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mendapatkan Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mendapatkan Peningkatan wawasan Kebangsaan di tingkat Kecamatan (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%)	88	Meningkatnya Pemahaman tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa (%)	88	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	80	Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	91	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)	91	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	69	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS
	DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				SELARAS	SELARAS	SELARAS
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani (%)	78	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang tertangani (%)	78	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	SELARAS	SELARAS	SELARAS

Lampiran 3

MATRIKS SANDING KESELARASAN MUATAN RENJA 2025 DENGAN RKPD 2025

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pendidikan, Pemuda dan			228.361.425.477,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			228.361.425.477,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			225.728.725.477,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			225.728.725.477,00				
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			225.728.725.477,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			225.728.725.477,00				
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	173.006.501.927,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	173.006.501.927,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	378.359.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	378.359.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.992.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.992.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.203.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.203.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.876.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.876.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.090.500,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.090.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	86.422.100,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	86.422.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	178.775.500,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	178.775.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	170.813.487.727,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	170.813.487.727,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	170.632.902.827,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	170.632.902.827,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.597.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.597.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.883.900,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.883.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.564.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.564.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.320.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.320.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.220.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.220.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	40.490.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	40.490.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.560.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.560.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.430.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.500.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	331.956.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	331.956.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	34.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	34.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	244.200.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	244.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.600.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	38.156.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	38.156.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.146.599.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.146.599.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	285.254.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	285.254.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.230.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.230.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.995.700,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.995.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114.300.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	430.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	430.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	146.820.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	146.820.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	165.958.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	165.958.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.058.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.058.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.900.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	129.650.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	129.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	49.800.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	49.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.850.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	71.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	71.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	-	52.722.223.550,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	-	52.722.223.550,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	20.653.275.000,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	20.653.275.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.003.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.003.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									selaras		
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	100.000.000,00		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	78.000.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	78.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.050.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	20.000.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.863.520.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.863.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	8.700.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	8.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	18.600.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	18.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	7.840.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	7.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	2.091.115.000,00		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	2.091.115.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	14.186.279.100,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	14.186.279.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3.718.671.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3.718.671.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									selaras		
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	2.695.000.000,00		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	2.695.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	111.715.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	111.715.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	473.829.100,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	473.829.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	82.500.000,00		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	9.800.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	9.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	38.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	38.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	6.224.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	6.224.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	26.000.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	26.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	23.260.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	23.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	15.943.343.450,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	15.943.343.450,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	10.010.857.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	10.010.857.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	52.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	52.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	768.785.500,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	768.785.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	238.180.950,00		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	238.180.950,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.594.670.000,00		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.594.670.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	56.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	18.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	18.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	23.500.000,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	23.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	0,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									selaras		
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	180.650.000,00		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	180.650.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.939.326.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.939.326.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	46.300.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	46.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	1.761.050.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	1.761.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	8.970.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	8.970.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	12.430.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	12.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	11.500.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	11.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	12.600.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	12.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	86.476.000,00		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	86.476.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.632.700.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.632.700.000,00				
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.632.700.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.632.700.000,00				
4	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	252.700.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	252.700.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	227.700.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	227.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat									selaras		
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	180.700.000,00		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	180.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	32.000.000,00		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penegunan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	25.000.000,00		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
5	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.380.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.380.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	32.000.000,00		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	32.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	248.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	248.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									selaras		
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	198.000.000,00		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	198.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	50.000.000,00		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1.600.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.600.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	500.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									selaras		
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
					,	Dinas Kesehatan			117.581.333.359,00	Dinas Kesehatan			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	-	179.566.976,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	-	179.566.976,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.965.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.965.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	13.818.754,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	13.818.754,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	16.150.572,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	16.150.572,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	69.132.650,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	69.132.650,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	-	70.331.310.738,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	-	70.331.310.738,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 0	70.067.947.238,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 0	70.067.947.238,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	222.964.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	222.964.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	30.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	30.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	-	24.999.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	-	24.999.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.999.800,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.999.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	-	201.786.900,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	-	201.786.900,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	134.825.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	134.825.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	56.462.200,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	56.462.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5.499.700,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5.499.700,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	-	472.871.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	-	472.871.300,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.358.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.358.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.003.300,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.003.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.510.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.510.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	360.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	360.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	-	344.849.300,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	-	344.849.300,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	134.849.300,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	134.849.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	-	604.920.450,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	-	604.920.450,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	604.920.450,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	604.920.450,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	141.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	141.550.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	141.550.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	141.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-	10.464.381.760,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-	10.464.381.760,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1.745.315.013,00		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1.745.315.013,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 0	1.603.615.013,00		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 0	1.603.615.013,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	40.000.000,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	337.076.800,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	337.076.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	36.900.000,00		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	36.900.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	4.800.225.934,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	4.800.225.934,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	1.801.386.800,00		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	1.801.386.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Faslilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	84 Paket	74.662.200,00		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	84 Paket	74.662.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3654 Orang	250.754.700,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3654 Orang	250.754.700,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3485 Orang	26.100.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3485 Orang	26.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3293 Orang	137.625.000,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3293 Orang	137.625.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13108 Orang	15.500.000,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13108 Orang	15.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18510 Orang	25.486.700,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18510 Orang	25.486.700,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137914 Orang	24.752.600,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137914 Orang	24.752.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18772 Orang	15.000.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18772 Orang	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9975 Orang	92.445.100,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9975 Orang	92.445.100,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3785 Orang	7.000.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3785 Orang	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	8.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4069 Orang	216.303.400,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4069 Orang	216.303.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	66.555.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	66.555.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	25.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	25.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	712.972.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	712.972.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.126.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.126.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	330.939.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	330.939.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	53.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	53.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									selaras		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22195 Orang	17.272.441,00		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22195 Orang	17.272.441,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									selaras		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	27.450.100,00		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	27.450.100,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	278.980.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	278.980.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	14.663.600.775,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	14.663.600.775,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									selaras		
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	13 Paket	12.450.000,00		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	13 Paket	12.450.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	17.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	17.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	27.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	27.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	752 Orang	17.300.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	752 Orang	17.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29 Orang	21.500.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29 Orang	21.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									selaras		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	48.455.000,00		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	48.455.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	-	894.539.700,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	-	894.539.700,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit	149.762.000,00		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit	149.762.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	681.027.700,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	681.027.700,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	63.750.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	63.750.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	-	467.533.050,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	-	467.533.050,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	-	18.500.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	-	18.500.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	-	47.242.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	-	47.242.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.918.000,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.918.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	31.324.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	31.324.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	-	401.791.050,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	-	401.791.050,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	401.791.050,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	401.791.050,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	-	452.699.100,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	-	452.699.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	-	86.598.100,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	-	86.598.100,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	86.598.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	86.598.100,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	-	192.387.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	-	192.387.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	192.387.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	192.387.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	2.500.000,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	171.214.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	171.214.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									selaras		
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	171.214.000,00		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	171.214.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	-	309.891.600,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	-	309.891.600,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	309.891.600,00		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	309.891.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	-	76.094.800,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	-	76.094.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	76.094.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	76.094.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	42.995.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	42.995.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	RSUD Kota Bima			33.316.565.179,00	RSUD Kota Bima			33.316.565.179,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.316.565.179,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.316.565.179,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			33.316.565.179,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			33.316.565.179,00				
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.265.872.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.265.872.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	12.265.872.800,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	12.265.872.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	12.265.872.800,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	12.265.872.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	21.050.692.379,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	21.050.692.379,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.029.196.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.029.196.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3.983.000.000,00		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3.983.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	104.550.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	104.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	6.241.646.000,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	6.241.646.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.700.000.000,00		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.700.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.021.496.379,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.021.496.379,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	9.021.496.379,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	9.021.496.379,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			117.581.333.359,00	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	-	10.464.381.760,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	-	10.464.381.760,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	25.200.000,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	25.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	1.148.199.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	1.148.199.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Paruga			117.581.333.359,00	Puskesmas Paruga			117.581.333.359,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	58.201.300,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	58.201.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	18.294.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	18.294.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	10.800.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	10.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	43.200.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	43.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	7.000.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	383.098.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	383.098.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	28.850.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	28.850.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	201.716.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	201.716.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	11.850.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	11.850.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	15.850.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	15.850.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	1.519.128.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	1.519.128.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	362.611.884,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	362.611.884,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	7.400.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	7.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	6.000.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	22.080.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	22.080.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	110.100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	110.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	19.957.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	19.957.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Mpunda			117.581.333.359,00	Puskesmas Mpunda			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	877 Orang	9.480.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	877 Orang	9.480.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang	30.765.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang	30.765.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										selaras		
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										selaras		
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7024 Orang	33.250.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7024 Orang	33.250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										selaras		
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30374 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30374 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										selaras		
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4331 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4331 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										selaras		
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2360 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2360 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										selaras		
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										selaras		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	121 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	121 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										selaras		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	988 Orang	11.050.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	988 Orang	11.050.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										selaras		
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	15.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	15.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	275.444.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	275.444.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42.900.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42.900.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	32.282.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	32.282.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	96.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	96.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	2.412.764.092,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	2.412.764.092,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										selaras		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	208.549.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	208.549.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										selaras		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	8.100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	8.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	6.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										selaras		
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	9.300.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	9.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										selaras		
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	6.000.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										selaras		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	4.008.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	4.008.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										selaras		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	187.240.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	187.240.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	31.974.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	31.974.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Penanae			117.581.333.359,00	Puskesmas Penanae			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	10.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	31.000.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	31.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang	36.309.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang	36.309.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5794 Orang	71.600.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5794 Orang	71.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31313 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31313 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3573 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3573 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2433 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2433 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1014 Orang	16.660.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1014 Orang	16.660.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1111 Orang	7.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1111 Orang	7.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	282.849.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	282.849.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	16.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	16.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.645.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.645.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	147.550.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	147.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.977.997.992,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.977.997.992,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										selaras		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	215.246.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	215.246.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										selaras		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										selaras		
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										selaras		
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										selaras		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak										selaras		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	60.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Rasanae Timur			117.581.333.359,00	Puskesmas Rasanae Timur			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										selaras		
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										selaras		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	6.000.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	20.610.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	20.610.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										selaras		
								Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita										selaras		
								Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	21.493.800,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	21.493.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar										selaras		
								Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1246 Orang	20.000.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1246 Orang	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif										selaras		
								Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5388 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5388 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut										selaras		
								Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	768 Orang	8.083.800,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	768 Orang	8.083.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										selaras		
								Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	4.400.000,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	4.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										selaras		
								Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang	4.400.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang	4.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										selaras		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	10.735.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	10.735.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										selaras		
								Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	13.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	13.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										selaras		
								Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	2.500.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	144.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	144.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.384.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.384.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	86.722.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	86.722.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.485.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.485.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	865.793.348,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	865.793.348,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas										selaras		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	115.064.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	115.064.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										selaras		
								Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis										selaras		
								Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)										selaras		
								Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi										selaras		
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	120.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	120.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Kolo			117.581.333.359,00	Puskesmas Kolo			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	10.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74 Orang	13.000.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74 Orang	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71 Orang	18.210.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71 Orang	18.210.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 Orang	6.200.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 Orang	6.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2570 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2570 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	2.600.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	2.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	83 Orang	5.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	83 Orang	5.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	2.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	2.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	96.991.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	96.991.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.874.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.874.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	52.238.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	52.238.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.782.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.782.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	40.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	40.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	432.471.815,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	432.471.815,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	43.547.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	43.547.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Jatibaru			117.581.333.359,00	Puskesmas Jatibaru			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	8.100.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	8.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	531 Orang	24.300.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	531 Orang	24.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2001 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2001 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2230 Orang	25.100.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2230 Orang	25.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19269 Orang	30.100.000,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19269 Orang	30.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2748 Orang	7.690.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2748 Orang	7.690.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 Orang	6.000.000,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	6.000.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	9.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	9.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	8.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	8.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	3.000.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	3.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.030.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.030.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12.371.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12.371.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	175.160.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	175.160.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	22.042.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	22.042.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.340.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.340.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91.450.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91.450.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.689.278.950,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.689.278.950,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	154.453.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	154.453.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Kumbe			117.581.333.359,00	Puskesmas Kumbe			117.581.333.359,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00				
	1	02			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00				
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	500.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	9.072.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	9.072.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	13.150.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	13.150.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	169 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	169 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	26.000.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	26.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6442 Orang	6.150.000,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6442 Orang	6.150.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	740.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	740.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	13.000.000,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	13.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	1.800.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	1.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	8.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	9.100.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	9.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	3.100.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	3.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	335 Dokumen	110.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	335 Dokumen	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	940.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	940.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142 Dokumen	7.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179 Dokumen	14.647.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179 Dokumen	14.647.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	438 Dokumen	68.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	438 Dokumen	68.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57 Dokumen	113.932.388,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57 Dokumen	113.932.388,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	100.122.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	100.122.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	300.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	300.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	250.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.000.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	300.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	DINAS KESEHATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			51.595.684.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			51.595.684.700,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.595.684.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.595.684.700,00				
	1	03			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			51.595.684.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			51.595.684.700,00				
35	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.370.211.671,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.370.211.671,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	104.800.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	104.800.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.906.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.906.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.341.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.341.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.447.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.447.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.766.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.766.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.159.900,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.159.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.138.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.138.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29.041.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29.041.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.262.058.613,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.262.058.613,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.653.666.613,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.653.666.613,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	533.810.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	533.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.818.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.818.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.810.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.810.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.114.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.114.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	23.840.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	23.840.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	82.188.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	82.188.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	82.188.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	82.188.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.425.656.191,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.425.656.191,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.449.950,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.449.950,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	188.534.878,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	188.534.878,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	21.645.363,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	21.645.363,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.005.026.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.005.026.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	340.070.417,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	340.070.417,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26.457.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26.457.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	263.922.017,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	263.922.017,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.690.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.690.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.155.438.150,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.155.438.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	276.750.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	276.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									selaras		
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	507.003.150,00		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	507.003.150,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	115.460.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	115.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	256.225.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	256.225.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
36	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	-	1.520.777.100,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	-	1.520.777.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	-	1.265.016.100,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	-	1.265.016.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	126.357.600,00		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	126.357.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									selaras		
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	222.972.800,00		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	222.972.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam									selaras		
							Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	233.200.000,00		Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	233.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									selaras		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	231.458.700,00		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	231.458.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	250.750.000,00		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	250.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	200.277.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	200.277.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	-	255.761.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	-	255.761.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									selaras		
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	255.761.000,00		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	255.761.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
37	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	-	14.206.203.202,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	-	14.206.203.202,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	-	14.206.203.202,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	-	14.206.203.202,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	345.738.000,00		Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	345.738.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Orang	84.549.200,00		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Orang	84.549.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	163.028.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	163.028.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	8.618.379.000,00		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	8.618.379.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	849.825.502,00		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	849.825.502,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 SR	4.144.683.500,00		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 SR	4.144.683.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
38	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	6.890.723.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	6.890.723.900,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	6.890.723.900,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	6.890.723.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									selaras		
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	275.164.000,00		Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	275.164.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									selaras		
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	6.615.559.900,00		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	6.615.559.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
39	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	2.342.375.686,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	2.342.375.686,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	2.342.375.686,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	2.342.375.686,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									selaras		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.342.375.686,00		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.342.375.686,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
40	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	217.085.001,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	217.085.001,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	217.085.001,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	217.085.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan									selaras		
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	217.085.001,00		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	217.085.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
41	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	3.509.562.430,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	3.509.562.430,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	3.509.562.430,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	3.509.562.430,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									selaras		
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.509.562.430,00		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.509.562.430,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
42	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	9.461.649.864,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	9.461.649.864,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	9.461.649.864,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	9.461.649.864,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan									selaras		
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	125.919.200,00		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	125.919.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	248.751.404,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	248.751.404,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	6.794.355.000,00		Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	6.794.355.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	140.624.500,00		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	140.624.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	1.235.862.660,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	1.235.862.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan									selaras		
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	23.460.000,00		Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	23.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									selaras		
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	441.377.100,00		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	441.377.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	451.300.000,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	451.300.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
43	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	-	219.116.800,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	-	219.116.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	-	111.166.800,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	-	111.166.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									selaras		
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	111.166.800,00		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	111.166.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	-	107.950.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	-	107.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	107.950.000,00		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	107.950.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
44	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	-	857.979.046,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	-	857.979.046,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	-	613.195.356,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	-	613.195.356,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	292.314.716,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	292.314.716,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	253.921.740,00		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	253.921.740,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	66.958.900,00		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	66.958.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	77.883.290,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	77.883.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									selaras		
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	77.883.290,00		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	77.883.290,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	166.900.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	166.900.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selaras	Selaras	Selaras
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	166.900.400,00		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	166.900.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
					,	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			7.423.824.223,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			7.423.824.223,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.361.050.123,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.361.050.123,00				
	1	04			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.361.050.123,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.361.050.123,00				
45	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.340.350.008,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.340.350.008,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.754.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.754.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.494.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.494.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.016.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.016.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.624.400,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.624.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.236.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.236.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.383.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.383.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.501.362.908,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.501.362.908,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4.269.262.108,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4.269.262.108,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	215.980.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	215.980.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.700.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.700.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.420.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.420.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.838.200,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.838.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.838.200,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.838.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	33.600.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	33.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	33.600.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	33.600.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	273.932.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	273.932.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.712.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.712.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.220.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.220.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	402.222.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	402.222.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	402.222.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	402.222.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.640.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.640.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.940.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.940.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	64.700.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	64.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
46	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	579.268.980,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	579.268.980,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	296.283.080,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	296.283.080,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	54.525.600,00		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	54.525.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	241.757.480,00		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	241.757.480,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	75.924.600,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	75.924.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									selaras		
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	75.924.600,00		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	75.924.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	207.061.300,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	207.061.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	207.061.300,00		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	207.061.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
47	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.399.299.035,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.399.299.035,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	79.903.700,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	79.903.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	79.903.700,00		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	79.903.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	69.525.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	69.525.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	19.000.000,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	19.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	49.525.000,00		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	49.525.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.249.870.335,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.249.870.335,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	1.000.000,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	149.495.135,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	149.495.135,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									selaras		
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	1.099.375.200,00		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	1.099.375.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
48	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	42.132.100,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	42.132.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	42.132.100,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	42.132.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.000.000,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	1.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	40.132.100,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	40.132.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.774.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.774.100,00				
	2	10			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			62.774.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			62.774.100,00				
49	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	62.774.100,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	62.774.100,00		selaras	selaras	selaras
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.774.100,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.774.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	62.774.100,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	62.774.100,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
					,	Satuan Polisi Pamong Praja			9.556.156.929,00	Satuan Polisi Pamong Praja			9.556.156.929,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.556.156.929,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.556.156.929,00				
	1	05			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			9.556.156.929,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			9.556.156.929,00				
50	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.141.137.329,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.141.137.329,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.571.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.571.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.026.778.629,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.026.778.629,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.890.178.629,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.890.178.629,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	132.600.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	132.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.546.669.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.546.669.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	2.546.669.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	2.546.669.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	321.570.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	321.570.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.044.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.044.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.540.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.540.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	275.985.700,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	275.985.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.997.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.997.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.989.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.989.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	188.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	188.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.890.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.890.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.560.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.560.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
51	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-		1.415.019.600,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.415.019.600,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-		485.960.100,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	485.960.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	128.115.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	128.115.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	116.050.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	116.050.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional										selaras		
								Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas										selaras		
								Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan										selaras		
								Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	241.794.000,00		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	241.794.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum										selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-		929.059.500,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	929.059.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)										selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	247.723.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	247.723.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	681.336.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	681.336.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-		0,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah										selaras		
								Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				6.646.217.583,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			6.646.217.583,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.646.217.583,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.646.217.583,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				6.646.217.583,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			6.646.217.583,00				
52	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		5.819.998.683,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.819.998.683,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		33.203.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.203.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.382.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.382.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.135.100,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.135.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.415.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.415.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.218.700,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.218.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.182.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.182.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.868.700,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.868.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	-	4.665.312.683,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	-	4.665.312.683,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.545.981.943,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.545.981.943,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	113.433.450,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	113.433.450,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	897.290,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	897.290,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	21.626.300,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	21.626.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.679.500,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.679.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.946.800,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.946.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-	3.464.700,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-	3.464.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	964.700,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	964.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										selaras		
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	315.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	315.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	415.551.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	415.551.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.977.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.977.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405.574.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405.574.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	365.840.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	365.840.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	286.060.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	286.060.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.680.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.680.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
53	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	85 Persen	826.218.900,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	85 Persen	826.218.900,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100 % 5 Dokumen	589.084.200,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100 % 5 Dokumen	589.084.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	7.271.200,00		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	7.271.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	289.719.200,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	289.719.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	180.231.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	180.231.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	26.475.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	26.475.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									selaras		
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	22.387.000,00		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	22.387.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	33.000.000,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	33.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	30.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	30.998.000,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	30.998.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	20.998.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	20.998.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.467.500,00	Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.467.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	25.467.500,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	25.467.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan	135.906.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan	135.906.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	55.150.000,00		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	55.150.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	80.756.000,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	80.756.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Kegiatan 1 Laporan	44.763.200,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Kegiatan 1 Laporan	44.763.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	16.975.100,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	16.975.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	12.788.100,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	12.788.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	10.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
					,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			5.833.198.777,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			5.833.198.777,00				
	1				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.833.198.777,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.833.198.777,00				
	1	05			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			5.833.198.777,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			5.833.198.777,00				
54	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-	4.940.368.580,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-	4.940.368.580,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	-	4.048.118.580,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	-	4.048.118.580,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.897.118.580,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.897.118.580,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	130.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	130.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	50.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	38.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	38.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 Dokumen	3.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	222.940.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	222.940.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.440.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.440.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	-	15.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	-	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	15.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	15.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	313.300.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	313.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.800.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	177.010.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	177.010.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	147.010.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	147.010.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
55	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	-	892.830.197,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	-	892.830.197,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	-	30.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	-	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	30.000.000,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	0,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	-	294.625.250,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	-	294.625.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	57.625.250,00		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	57.625.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	35.000.000,00		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									selaras		
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	27.000.000,00		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	45.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	75.000.000,00		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	30.000.000,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	257.458.947,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	257.458.947,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	30.507.900,00		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	30.507.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	12.841.500,00		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	12.841.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12000 Orang	214.109.547,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12000 Orang	214.109.547,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	310.746.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	310.746.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	14.263.200,00		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	14.263.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.050.200,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.050.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	113.080.300,00		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	113.080.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	166.352.300,00		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	166.352.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
						Dinas Sosial			10.115.493.562,00	Dinas Sosial			10.115.493.562,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.115.493.562,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.115.493.562,00				
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.115.493.562,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.115.493.562,00				
56	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.934.219.060,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.934.219.060,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	81.338.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	81.338.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.144.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.144.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.816.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.816.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	17.965.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	17.965.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.665.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.665.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.312.695.790,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.312.695.790,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.126.136.590,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.126.136.590,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.423.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.423.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	122.400.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	122.400.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.063.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.063.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	612.774.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	612.774.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.530.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.530.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.112.900,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.112.900,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.300.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.300.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.805.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.805.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.618.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.618.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										selaras		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material										selaras		
								Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.936.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.936.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	251.840.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	251.840.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	30.631.100,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	30.631.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	77.922.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	77.922.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	67.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	67.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.922.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.922.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	358.207.270,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	358.207.270,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.228.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.228.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.697.170,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.697.170,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	224.282.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	224.282.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	491.282.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	491.282.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	233.122.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	233.122.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21.160.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21.160.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	237.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	237.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
57	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	-		170.136.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	-	170.136.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-		20.000.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	-		150.136.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	-	150.136.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.136.000,00		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.136.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	20.000.000,00		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
58	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	-		0,00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-		0,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										selaras		
								Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
59	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-		1.031.624.800,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	1.031.624.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-		806.552.500,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	806.552.500,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan										selaras		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	210.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	210.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	335.020.500,00		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	335.020.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu										selaras		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	96.153.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	96.153.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga										selaras		
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	23.280.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	23.280.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial										selaras		
								Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	65.340.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	65.340.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat										selaras		
								Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.839.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.839.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									selaras		
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000,00		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	7.500.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	7.500.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.420.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.420.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	225.072.300,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	225.072.300,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.236.500,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.236.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	8.750.000,00		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	8.750.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	10.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	169.897.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	169.897.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA									selaras		
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13.050.000,00		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13.050.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.178.800,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.178.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.960.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.960.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
60	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	2.772.053.702,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	2.772.053.702,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	-	55.200.000,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	-	55.200.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	16.367.000,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	16.367.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	16.922.000,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	16.922.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	21.911.000,00		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	21.911.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	-	2.716.853.702,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	-	2.716.853.702,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	172.162.900,00		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	172.162.900,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	45.000.000,00		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	45.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									selaras		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	2.478.623.302,00		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	2.478.623.302,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	21.067.500,00		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	21.067.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
61	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	-	207.460.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	-	207.460.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	91.740.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	91.740.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.365.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.365.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	44.650.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	44.650.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									selaras		
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	4.750.000,00		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	4.750.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	13.175.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	13.175.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.800.000,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.800.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	115.720.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	115.720.000,00	DINAS SOSIAL	Selaras	Selaras	Selaras
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	6.255.000,00		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	6.255.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	109.465.000,00		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	109.465.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
					,	Dinas Tenaga Kerja			4.134.634.286,00	Dinas Tenaga Kerja			4.134.634.286,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.134.634.286,00				
	2	07			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.134.634.286,00				
62	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.523.958.886,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.523.958.886,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	58.997.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	58.997.400,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.882.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.882.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.111.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.111.400,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.014.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.014.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.438.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.438.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.504.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.504.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.824.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.824.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.224.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.224.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		2.907.450.660,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.907.450.660,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.801.104.460,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.801.104.460,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	39.799.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	39.799.200,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	52.300.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	52.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7.458.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7.458.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.892.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.892.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.897.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.897.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-		10.380.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.380.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										selaras		
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.722.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.722.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.658.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.658.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		27.537.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	27.537.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	27.537.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	27.537.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		152.743.826,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	152.743.826,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.856.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.856.800,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	88.887.026,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	88.887.026,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		70.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										selaras		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		163.506.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.506.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		130.020.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	130.020.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	12.240.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	12.240.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	66.600.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	66.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	3.324.000,00	Penataan Organisasi	-	-	3.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	3.324.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	3.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
63	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	-	11.842.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	-	11.842.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	-	11.842.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	-	11.842.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									selaras		
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	11.842.000,00		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	11.842.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
64	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	-	274.570.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	-	274.570.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	56.227.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	56.227.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									selaras		
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	56.227.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	56.227.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
65	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	-	189.952.400,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	-	189.952.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	98.913.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	98.913.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	54.340.000,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	54.340.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	44.573.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	44.573.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	53.702.400,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	53.702.400,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	53.702.400,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	53.702.400,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	37.337.000,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	37.337.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									selaras		
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	37.337.000,00		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	37.337.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
66	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	134.311.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	134.311.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	105.409.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	105.409.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									selaras		
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	35.020.000,00		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	35.020.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	70.389.000,00		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	70.389.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28.902.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28.902.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	6.969.000,00		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	6.969.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	14.964.000,00		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	14.964.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									selaras		
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	6.969.000,00		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	6.969.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
						UPT Balai Latihan Kerja			4.134.634.286,00	UPT Balai Latihan Kerja			4.134.634.286,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.134.634.286,00				
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.134.634.286,00				
67	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.523.958.886,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.523.958.886,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.506.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.506.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.452.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.452.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
68	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	274.570.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	274.570.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	218.343.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	218.343.000,00	DINAS TENAGA KERJA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	118.323.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	118.323.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	100.020.000,00		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	100.020.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7.683.631.215,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7.683.631.215,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.683.631.215,00				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.683.631.215,00				
69	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.253.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.253.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.705.800,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.705.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.658.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.658.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.258.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.258.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.162.500,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.162.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.572.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.572.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.111.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.111.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.784.800,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.784.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.593.751.365,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.593.751.365,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.422.479.465,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.422.479.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.933.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.933.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.138.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.138.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2				,		NON URUSAN			7.683.631.215,00	NON URUSAN			7.683.631.215,00				
	2	08			,		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.683.631.215,00				
70	2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi										selaras	selaras
	2				,		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.683.631.215,00				
	2	08			,		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.683.631.215,00				
71	2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12.990.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12.990.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.797.300,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.797.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.145.400,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.145.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.980.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.980.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.040.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.07	0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
								Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.040.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.040.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	168.348.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	168.348.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.748.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.748.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	178.395.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	178.395.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120.110.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120.110.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.765.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.765.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13.520.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13.520.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
72	2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	-	2.111.132.550,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	-	2.111.132.550,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	-	40.787.900,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	-	40.787.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	02	2.01	0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.787.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.787.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	-	989.880.100,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	-	989.880.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									selaras		
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	989.880.100,00		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	989.880.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	-	1.080.464.550,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	-	1.080.464.550,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	134.783.800,00		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	134.783.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	593.241.350,00		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	593.241.350,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	352.439.400,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	352.439.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
73	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	337.460.600,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	337.460.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	-	80.287.300,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	-	80.287.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.540.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.540.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	48.747.300,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	48.747.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	-	257.173.300,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	-	257.173.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	168.116.300,00		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	168.116.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	89.057.000,00		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	89.057.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
74	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	-	73.543.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	-	73.543.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	-	73.543.200,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	-	73.543.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	54.646.100,00		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	54.646.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18.897.100,00		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18.897.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
75	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	-	283.150.000,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	-	283.150.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	154.917.250,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	154.917.250,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	54.456.750,00		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	54.456.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.460.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.460.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	128.232.750,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	128.232.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	3.780.000,00		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	3.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	102.927.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	102.927.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	21.525.650,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	21.525.650,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
76	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	-	562.431.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	-	562.431.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	-	79.960.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	-	79.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA										selaras		
								Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	10.000.000,00		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA										selaras		
								Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	69.960.000,00		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	69.960.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	-	223.703.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	-	223.703.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	146.423.000,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	146.423.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK										selaras		
								Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	77.280.000,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	77.280.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	-	258.768.200,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	-	258.768.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota										selaras		
								Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	162.644.200,00		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	162.644.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/										selaras		
								Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	96.124.000,00		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	96.124.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
					,	Dinas Ketahanan Pangan				4.873.627.557,00	Dinas Ketahanan Pangan			4.873.627.557,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.873.627.557,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.873.627.557,00				
	2	09			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.873.627.557,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.873.627.557,00				
77	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	4.122.714.857,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	4.122.714.857,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20.125.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20.125.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.575.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.575.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.655.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.655.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.040.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.040.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	695.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	695.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	576.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	576.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.584.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.584.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.624.784.057,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.624.784.057,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.496.200.057,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.496.200.057,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	124.940.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	124.940.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.764.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.764.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	880.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	880.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	750.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	750.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	30.251.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	30.251.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										selaras		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	826.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	826.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.645.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.645.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	6.779.200,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	6.779.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	-	137.512.620,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	-	137.512.620,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.358.600,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.358.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.821.600,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.821.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.547.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.547.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	50.359.920,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	50.359.920,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	53.128.980,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	53.128.980,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	44.140.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	44.140.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									selaras		
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	4.489.200,00		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	4.489.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.499.780,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.499.780,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	141.273.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	141.273.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.904.700,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.904.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.531.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.531.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.837.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	114.890.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	114.890.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	14.680.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	14.680.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.270.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.270.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.940.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.940.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
78	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	-	561.725.400,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	-	561.725.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	-	175.994.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	-	175.994.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	18.658.200,00		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	18.658.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	52.827.200,00		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	52.827.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	59.437.000,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	59.437.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									selaras		
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	45.071.600,00		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	45.071.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	-	275.651.400,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	-	275.651.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal									selaras		
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	2.373.100,00		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	2.373.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	188.890.000,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	188.890.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	48.341.100,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	48.341.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	36.047.200,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	36.047.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	-	110.080.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	-	110.080.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									selaras		
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	16.800.000,00		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	16.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	93.280.000,00		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	93.280.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
79	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	58.847.700,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	58.847.700,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	20.000.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									selaras		
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	20.000.000,00		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	38.847.700,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	38.847.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									selaras		
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	3.847.700,00		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	3.847.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
80	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	-	130.339.600,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	-	130.339.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	-	130.339.600,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	-	130.339.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.001.300,00		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.001.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	66.204.600,00		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	66.204.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									selaras		
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	42.133.700,00		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	42.133.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
					.	Dinas Lingkungan Hidup			20.485.263.877,00	Dinas Lingkungan Hidup				20.485.263.877,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.485.263.877,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.485.263.877,00				
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			20.485.263.877,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			20.485.263.877,00				
81	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12.580.807.031,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12.580.807.031,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	118.260.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	118.260.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.592.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.592.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.110.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.110.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.700.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.700.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.240.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.150.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.155.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.155.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	29.313.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	29.313.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	11.575.615.932,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	11.575.615.932,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	11.392.923.280,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	11.392.923.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	161.435.052,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	161.435.052,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.424.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.424.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	12.833.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	12.833.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	310.261.550,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	310.261.550,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.773.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.773.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.250.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	26.011.250,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	26.011.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.227.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.227.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	332.306.599,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	332.306.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	16.641.599,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	16.641.599,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.680.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	242.985.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	242.985.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	244.362.650,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	244.362.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	112.500.900,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	112.500.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	62.540.250,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	62.540.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	21.836.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	21.836.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.485.500,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.485.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
82	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	-	343.500.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	-	343.500.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	-	143.500.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	-	143.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									selaras		
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	143.500.000,00		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	143.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	-	200.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang										selaras		
								Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
83	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	419.071.244,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	419.071.244,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	191.193.294,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	191.193.294,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									selaras		
								Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	35.174.760,00		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	35.174.760,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	75.541.970,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	75.541.970,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									selaras		
								Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	80.476.564,00		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	80.476.564,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	69.467.950,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	69.467.950,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									selaras		
								Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	29.491.900,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	29.491.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									selaras		
								Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	39.976.050,00		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	39.976.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	158.410.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	158.410.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.410.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.410.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi									selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	30.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi									selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	30.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota									selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	37.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	30.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
84	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	-	1.683.430.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	-	1.683.430.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	-	1.683.430.400,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	-	1.683.430.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									selaras		
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									selaras		
								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Ha	1.600.000.000,00		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Ha	1.600.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	12.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									selaras		
								Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22,1 Unit	51.430.400,00		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22,1 Unit	51.430.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	2	11	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	-	251.586.660,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	-	251.586.660,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	-	251.586.660,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	-	251.586.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	06	2.01	0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									selaras		
								Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	176.586.660,00		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	176.586.660,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0009		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									selaras		
								Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	75.000.000,00		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
86	2	11	08				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	-	214.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	-	214.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	08	2.01			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	-	214.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	-	214.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	08	2.01	0002		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									selaras		
								Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	38.000.000,00		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	08	2.01	0005		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									selaras		
								Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	176.000.000,00		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	176.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
87	2	11	09				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	-	53.265.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	-	53.265.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	-	53.265.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	-	53.265.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	09	2.01	0001		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									selaras		
								Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	53.265.000,00		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	53.265.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
88	2	11	10				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	-	65.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	-	65.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	-	65.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	-	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	10	2.01	0004		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
								Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	65.000.000,00		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
89	2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	-	4.874.603.542,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	-	4.874.603.542,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01			Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	-	4.859.603.542,00	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	-	4.859.603.542,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	11	2.01	0004		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									selaras		
								Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	50.000.000,00		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	40.586.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	40.586.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	53 Unit	661.270.300,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	53 Unit	661.270.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									selaras		
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	250 Ton	29.526.953,00		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	250 Ton	29.526.953,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									selaras		
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	4.028.220.089,00		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	4.028.220.089,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	-	15.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Selaras	Selaras	Selaras
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									selaras		
							Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	15.000.000,00		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.885.392.166,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.885.392.166,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.885.392.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.885.392.166,00				
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.885.392.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.885.392.166,00				
90	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.380.758.966,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.380.758.966,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.609.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.609.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.082.800,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.082.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.158.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.158.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.095.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.095.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.212.200,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.212.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.236.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.236.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.273.800,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.273.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.549.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.549.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.571.200.758,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.571.200.758,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.307.409.708,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.307.409.708,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	151.865.450,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	151.865.450,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	105.840.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	105.840.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.078.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.078.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.007.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.007.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	256.769.084,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	256.769.084,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.992.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.992.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.408.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.408.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.600.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.769.084,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.769.084,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	430.586.374,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	430.586.374,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.686.374,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.686.374,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.593.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.593.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	75.258.750,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	75.258.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.160.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.175.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.175.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
91	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	334.870.100,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	334.870.100,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	61.535.100,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	61.535.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	23.724.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	23.724.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	7.545.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	7.545.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	30.265.800,00		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	30.265.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	273.335.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	273.335.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	273.335.000,00		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	273.335.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
92	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	76.395.800,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	76.395.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.179.100,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.179.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.451.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.451.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	55.711.000,00		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	55.711.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	12.016.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	12.016.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.216.700,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.216.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	7.216.700,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	7.216.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
93	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	79.744.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	79.744.400,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	13.547.400,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	13.547.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.894.100,00		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.894.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	8.653.300,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	8.653.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.408.200,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.408.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	4.408.200,00		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	4.408.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	47.773.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	47.773.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	35.810.200,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	35.810.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	7.752.300,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	7.752.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.996.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.996.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	1.214.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	1.214.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	14.015.800,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	14.015.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	14.015.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	14.015.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
94	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	13.622.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	13.622.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	13.622.900,00	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	13.622.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Selaras	Selaras	Selaras
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.473.800,00		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.473.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									selaras		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	6.149.100,00		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	6.149.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			9.661.247.865,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			9.661.247.865,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00				
95	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	-	33.290.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	-	33.290.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.350.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.350.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.300.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.390.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.390.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.985.324.969,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.985.324.969,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.729.324.969,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.729.324.969,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	235.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	235.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	-	18.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	-	18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2				,	NON URUSAN				9.661.247.865,00	NON URUSAN			9.661.247.865,00				
	2	14			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00				
96	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian												
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00				
	2	14			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00				
97	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										selaras		
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.640.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	54.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	54.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2				,	NON URUSAN			9.661.247.865,00	NON URUSAN			9.661.247.865,00				
	2	14			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00				
98	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00				
	2	14			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00				
99	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	196.945.496,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	196.945.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	837.600.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	837.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	237.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	237.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	168.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	168.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	0,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2				,	NON URUSAN			9.661.247.865,00	NON URUSAN			9.661.247.865,00				
	2	14			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00				
100	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00				
	2	14			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			9.661.247.865,00				
101	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	95.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	95.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
102	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	-	71.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	-	71.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	71.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	71.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									selaras		
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.000.000,00		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
103	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	-	3.283.725.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	-	3.283.725.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	-	703.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	-	703.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	148.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	148.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									selaras		
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	75.000.000,00		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									selaras		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	250.000.000,00		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	248.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	248.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									selaras		
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	123.000.000,00		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	123.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	125.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	-	2.050.241.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	-	2.050.241.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									selaras		
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	477.649.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	477.649.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	1.544.692.000,00		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	1.544.692.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.300.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	282.484.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	282.484.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	252.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	252.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	26.734.000,00		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	26.734.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
104	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	804.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	804.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	-	804.000.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	-	804.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Selaras	Selaras	Selaras
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas									selaras		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	48.000.000,00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									selaras		
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	755.000.000,00		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	755.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan									selaras		
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	1.000.000,00		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
					,	Dinas Perhubungan			17.007.153.024,00	Dinas Perhubungan			17.007.153.024,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.007.153.024,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.007.153.024,00				
	2	15			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			17.007.153.024,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			17.007.153.024,00				
105	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.383.552.638,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.383.552.638,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.192.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.192.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.598.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.598.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	198.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	198.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	198.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	198.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	198.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	198.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.372.267.663,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.372.267.663,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.180.931.663,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.180.931.663,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	188.050.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	188.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	198.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	198.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.890.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	198.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	198.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.841.775,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.841.775,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.760.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.599.520,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.599.520,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.044.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.044.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.628.255,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.628.255,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.810.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.831.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.831.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	113.742.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	113.742.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	61.495.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	61.495.200,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.594.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.594.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	460.420.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	460.420.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	270.760.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	270.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	36.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	153.660.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	153.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
106	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	-	11.570.140.386,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	-	11.570.140.386,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	-	937.820.000,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	-	937.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	937.820.000,00		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	937.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	-	9.588.791.886,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	-	9.588.791.886,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	5.058.090.800,00		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	5.058.090.800,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	4.530.701.086,00		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	4.530.701.086,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	163.661.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	163.661.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									selaras		
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	163.661.000,00		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	163.661.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	290.228.500,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	290.228.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	290.228.500,00		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	290.228.500,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	573.679.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	573.679.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	66.228.000,00		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	66.228.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	14.131.000,00		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	14.131.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji									selaras		
							Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	127.320.000,00		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	127.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	366.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	366.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	15.960.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	15.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.960.000,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
107	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	53.460.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	53.460.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	53.460.000,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	53.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									selaras		
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	53.460.000,00		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	53.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
					,	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			10.431.724.102,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			10.431.724.102,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.431.724.102,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.431.724.102,00				
	2	16			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.977.224.102,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.977.224.102,00				
108	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	8.315.766.602,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	8.315.766.602,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96.300.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.300.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	55.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	-	5.656.966.602,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	-	5.656.966.602,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.469.166.602,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.469.166.602,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	179.520.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	179.520.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	453.800.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	453.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.800.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.064.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.064.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	155.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	155.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.880.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.880.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	44.700.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	44.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.700.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
109	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	-	968.882.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	-	968.882.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	-	968.882.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	-	968.882.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									selaras		
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	703.382.000,00		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	703.382.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	30.000.000,00		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									selaras		
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	20.500.000,00		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	20.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									selaras		
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	15.000.000,00		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									selaras		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	200.000.000,00		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
110	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	-	692.575.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	-	692.575.500,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	-	692.575.500,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	-	692.575.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	15.000.000,00		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									selaras		
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	363.816.200,00		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	363.816.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	52.807.700,00		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	52.807.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									selaras		
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	164.463.200,00		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	164.463.200,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	46.488.400,00		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	46.488.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			204.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			204.000.000,00				
111	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	204.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	204.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	-	204.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	-	204.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									selaras		
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	34.000.000,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									selaras		
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	90.000.000,00		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									selaras		
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	40.000.000,00		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									selaras		
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			250.500.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			250.500.000,00				
112	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	-	250.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	-	250.500.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	-	110.500.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	-	110.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	65.000.000,00		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000,00		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	7.500.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	-	140.000.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	-	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Selaras	Selaras	Selaras
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	140.000.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	140.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
						Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			9.733.923.276,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			9.733.923.276,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.241.610.343,00				
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.241.610.343,00				
113	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	95.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	95.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	14.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	14.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	22.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	22.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	5.803.967.776,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.803.967.776,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	5.616.807.776,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	5.616.807.776,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	164.160.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	164.160.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	12.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-		-	54.757.164,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	54.757.164,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah										selaras		
								Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.000.000,00		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	12.757.164,00		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	12.757.164,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		-	61.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	61.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										selaras		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	13.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										selaras		
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.000.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	12.475.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	12.475.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	220.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	220.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.000.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	350.586.503,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	350.586.503,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	54.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	54.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	215.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	215.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.310.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.310.700,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	35.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	31.310.700,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	31.310.700,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
114	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	18.700.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	18.700.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	18.700.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	18.700.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	18.700.000,00		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	18.700.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
115	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	103.982.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	103.982.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	103.982.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	103.982.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	103.982.000,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	103.982.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
116	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	23.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	23.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23.000.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	23.000.000,00		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	23.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
117	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	610.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	610.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	610.000.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	610.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro										selaras		
								Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	22.000.000,00		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	22.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan										selaras		
								Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	588.000.000,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	588.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
118	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	85.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	85.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	85.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro										selaras		
								Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	85.000.000,00		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	85.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.492.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.492.312.933,00				
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			857.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			857.312.933,00				
119	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	15.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	15.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	15.000.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan										selaras		
								Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	15.000.000,00		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
120	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	242.000.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	242.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	32.000.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	32.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat										selaras		
								Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	32.000.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	32.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	189.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	189.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	105.000.000,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan										selaras		
								Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	69.000.000,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	69.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										selaras		
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.000.000,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi										selaras		
								Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	21.000.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	21.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
121	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	132.622.933,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	132.622.933,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	132.622.933,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	132.622.933,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	132.622.933,00		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	132.622.933,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			635.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			635.000.000,00				
122	3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	590.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	590.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	02	2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	590.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	590.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	31	02	2.01	0001		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									selaras		
								Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	65.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0003		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
123	3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	45.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	45.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	45.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	45.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	31	04	2.01	0002		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	45.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						,	UPT Sarana Distribusi Perdagangan			9.733.923.276,00	UPT Sarana Distribusi Perdagangan			9.733.923.276,00				
	3					,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.492.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.492.312.933,00				
	3	30				,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			857.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			857.312.933,00				
124	3	30	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.500.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.500.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	30	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	36.190.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	36.190.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	333.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	333.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						,	UPT PLUT-KUMKM			9.733.923.276,00	UPT PLUT-KUMKM			9.733.923.276,00				
	2					,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.241.610.343,00				
	2	17				,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.241.610.343,00				
125	2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	17	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	55.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.066.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.066.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.343.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.343.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	94.368.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	94.368.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.409.312.791,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.409.312.791,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.409.312.791,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.409.312.791,00				
	2	18			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.409.312.791,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.409.312.791,00				
126	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.749.752.091,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.749.752.091,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96.865.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96.865.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.802.100,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.802.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.161.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.161.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.966.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.966.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.121.700,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.121.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.168.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.168.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.170.500,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.170.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	42.475.700,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	42.475.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	-	3.235.884.021,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	-	3.235.884.021,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.113.281.121,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.113.281.121,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.216.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.216.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras	selaras	selaras
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.530.700,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.530.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.856.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.856.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	199.854.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	199.854.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.714.400,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.714.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.643.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.643.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	161.332.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	161.332.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	-	171.327.970,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	-	171.327.970,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	130.476.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	130.476.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.851.870,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.851.870,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	-	45.820.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	-	45.820.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.820.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.820.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
127	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
128	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	35.023.200,00		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	35.023.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
129	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.100,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.100,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.100,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	19.677.100,00		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	19.677.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	14.206.000,00		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	14.206.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
130	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	459.100.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	459.100.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	459.100.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	459.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	459.100.000,00		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	459.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
131	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	30.873.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	30.873.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	30.873.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	30.873.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Selaras	Selaras	Selaras
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	30.873.400,00		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	30.873.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
					,	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.918.682.112,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.918.682.112,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.918.682.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.918.682.112,00				
	2	23			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.603.424.151,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.603.424.151,00				
132	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	-	5.886.955.901,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	-	5.886.955.901,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	-	40.958.639,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	-	40.958.639,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.972.889,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.972.889,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.604.250,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.604.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.721.300,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.721.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.095.100,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.095.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	28.529.800,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	28.529.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.908.463.690,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.908.463.690,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.768.347.090,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.768.347.090,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.274.400,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.274.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.476.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.476.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.365.800,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.365.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	-	30.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										selaras		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	-	378.278.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	-	378.278.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.988.200,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.988.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.369.700,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.369.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.665.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.665.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										selaras		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										selaras		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.580.600,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.580.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	261.005.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	261.005.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.669.900,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.669.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										selaras		
								Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	293.709.622,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	293.709.622,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129.509.622,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129.509.622,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	157.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	157.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	235.545.450,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	235.545.450,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										selaras		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	83.510.250,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	83.510.250,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										selaras		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	67.187.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	67.187.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	62.320.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	62.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.527.700,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.527.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
133	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	-	716.468.250,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	-	716.468.250,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	-	620.255.850,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	-	620.255.850,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan										selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	19.540.800,00		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	19.540.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	7.212.500,00		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	7.212.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	24.911.800,00		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	24.911.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	6.228.000,00		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	6.228.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	16.037.550,00		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	16.037.550,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	18.455.200,00		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	18.455.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	6.582.800,00		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	6.582.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									selaras		
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	521.287.200,00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	521.287.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	-	96.212.400,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	-	96.212.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	17.118.600,00		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	17.118.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	61.586.200,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	61.586.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	17.507.600,00		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	17.507.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			315.257.961,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			315.257.961,00				
134	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	-	292.843.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	-	292.843.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	104.917.150,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	104.917.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	20.017.200,00		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	20.017.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	4.532.000,00		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	4.532.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	80.367.950,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	80.367.950,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	7.429.100,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	7.429.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									selaras		
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	7.429.100,00		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	7.429.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	180.497.650,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	180.497.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									selaras		
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	46.780.000,00		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	46.780.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	133.717.650,00		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	133.717.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
135	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	-	16.332.700,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	-	16.332.700,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10	-	-	12.332.700,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10	-	-	12.332.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									selaras		
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	1.000.000,00		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	1.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									selaras		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	11.332.700,00		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	11.332.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	4.000.000,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									selaras		
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	2.000.000,00		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									selaras		
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	2.000.000,00		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
136	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	6.081.361,00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	6.081.361,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	6.081.361,00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	6.081.361,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	3.081.361,00		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	3.081.361,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	3.000.000,00		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
					,	Dinas Kelautan dan Perikanan			5.002.933.933,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			5.002.933.933,00				
	3				,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.002.933.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.002.933.933,00				
	3	25			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.002.933.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.002.933.933,00				
137	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.904.933.933,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.904.933.933,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.180.200.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.180.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.980.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.980.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	27.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	20.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		301.523.933,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	301.523.933,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	8.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	8.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	10.200.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	10.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	282.823.933,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	282.823.933,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		40.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.800.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.800.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		97.700.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	97.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		178.330.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	178.330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										selaras		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	110.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	110.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	22.330.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	22.330.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-		51.380.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	51.380.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD										selaras		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	51.380.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	51.380.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
138	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-		350.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	350.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-		260.000.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	260.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap										selaras		
								Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	130.000.000,00		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap										selaras		
								Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	130.000.000,00		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	130.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	70.000.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	70.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	27.000.000,00		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	27.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	23.000.000,00		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	23.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	20.000.000,00		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT									selaras		
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
139	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	388.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	388.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	152.000.000,00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	152.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	120.000.000,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	120.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	20.000.000,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									selaras		
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	12.000.000,00		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	236.000.000,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	236.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	88.000.000,00		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	88.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	18.000.000,00		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	100.000.000,00		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									selaras		
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	18.000.000,00		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
140	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	360.000.000,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	360.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	100.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	80.000.000,00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	80.000.000,00		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	80.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	180.000.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	180.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	90.000.000,00		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	90.000.000,00		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	90.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
					,	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			9.269.173.801,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			9.269.173.801,00				
	2				,	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			665.353.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			665.353.300,00				
	2	22			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			665.353.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			665.353.300,00				
141	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	- Persen	550.731.700,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	- Persen	550.731.700,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	100 Persen	94.436.300,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	100 Persen	94.436.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									selaras		
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	94.436.300,00		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	94.436.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	-	456.295.400,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	-	456.295.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400,00		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									selaras		
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	237.978.000,00		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	237.978.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
142	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Persen	114.621.600,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Persen	114.621.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	6 Objek	94.877.600,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	6 Objek	94.877.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	94.877.600,00		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	94.877.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	-	19.744.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	-	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
143	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.708.707.117,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.708.707.117,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.785.786.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.785.786.877,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	0,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	156.130.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	156.130.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3				,	NON URUSAN			8.603.820.501,00	NON URUSAN			8.603.820.501,00				
	3	26			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.603.820.501,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.603.820.501,00				
144	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.708.707.117,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.708.707.117,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.597.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.597.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	19.580.200,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	19.580.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.596.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.596.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.785.786.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.785.786.877,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.592.796.877,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.592.796.877,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.910.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.910.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.286.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.286.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.594.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.594.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	86.360.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	86.360.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	70.926.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	70.926.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.880.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.880.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	171.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	171.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	156.130.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	156.130.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.349.700,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.349.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3				,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.603.820.501,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.603.820.501,00				
	3	26			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8.603.820.501,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8.603.820.501,00				
145	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	-	1.141.587.841,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	-	1.141.587.841,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	-	39.250.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	-	39.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	39.250.000,00		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	39.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	-	621.188.000,00	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	-	621.188.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	64.362.000,00		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	64.362.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	556.826.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	556.826.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	-	481.149.841,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	-	481.149.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	481.149.841,00		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	481.149.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
146	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	-	1.261.764.464,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	-	1.261.764.464,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	-	1.261.764.464,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	-	1.261.764.464,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	1.075.656.464,00		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	1.075.656.464,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	116.357.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	116.357.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
147	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	-	491.761.079,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	-	491.761.079,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	-	362.787.600,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	-	362.787.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	169.540.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	169.540.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	108.400.000,00		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	108.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	84.847.600,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	84.847.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	-	128.973.479,00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	-	128.973.479,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	128.973.479,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	128.973.479,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
					,	Dinas Pertanian			19.468.874.438,00	Dinas Pertanian			19.468.874.438,00				
	3				,	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			19.468.874.438,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			19.468.874.438,00				
	3	27			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			19.468.874.438,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			19.468.874.438,00				
148	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	15.076.130.164,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	15.076.130.164,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	95.818.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	95.818.800,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	30.160.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	30.160.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4.899.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4.899.800,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	3.320.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	3.320.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.019.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.019.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	1.174.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	1.174.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	6.429.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	6.429.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	47.817.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	47.817.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas	124 orang	14.032.779.070,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas	124 orang	14.032.779.070,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	13.767.237.770,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	13.767.237.770,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	261.447.200,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	261.447.200,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.569.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.569.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	898.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	898.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1.627.100,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1.627.100,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	-	5.394.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	-	5.394.000,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	5.394.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	5.394.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	-	38.187.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	-	38.187.000,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	38.187.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	38.187.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum	-	328.651.294,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum	-	328.651.294,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	696.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	696.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	30.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	22.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	22.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	73.235.294,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	73.235.294,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	200.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2.720.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2.720.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas	-	494.730.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas	-	494.730.000,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	100.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	394.730.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	394.730.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang	-	80.570.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang	-	80.570.000,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	74.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	74.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	6.570.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	6.570.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
149	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100% Persen	2.629.965.060,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100% Persen	2.629.965.060,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	14 Laporan	2.540.061.860,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	14 Laporan	2.540.061.860,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									selaras			
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	2.480.061.860,00		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	2.480.061.860,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									selaras			
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	60.000.000,00		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	2 Laporan	22.506.950,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	2 Laporan	22.506.950,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									selaras			
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	22.506.950,00		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	22.506.950,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	100% Persen	32.879.950,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	100% Persen	32.879.950,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									selaras			
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 0	20.289.850,00		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 0	20.289.850,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									selaras			
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan Laporan	12.590.100,00		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan Laporan	12.590.100,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar	85% Persen	34.516.300,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar	85% Persen	34.516.300,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									selaras			
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 dokumen Laporan	34.516.300,00		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 dokumen Laporan	34.516.300,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	85% Persen	0,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	85% Persen	0,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									selaras			
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	128 Ekor	0,00		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	128 Ekor	0,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
150	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	60% Persen	1.001.670.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	60% Persen	1.001.670.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	25 Unit	1.001.670.000,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	25 Unit	1.001.670.000,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									selaras			
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	1.001.670.000,00		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	1.001.670.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
151	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0,14% Persen	250.872.394,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0,14% Persen	250.872.394,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit	100% Persen	131.519.664,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit	100% Persen	131.519.664,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									selaras			
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah	17.755.450,00		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah	17.755.450,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras			
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 Laporan	113.764.214,00		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 Laporan	113.764.214,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50% Persen	35.010.230,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50% Persen	35.010.230,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									selaras			
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	35.010.230,00		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	35.010.230,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	25% Persen	84.342.500,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	25% Persen	84.342.500,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									selaras			
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	52.078.700,00		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	52.078.700,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									selaras			

No	Kode						RKPD TAHUN 2025			RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	32.263.800,00		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	32.263.800,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
152	3	27	05				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	-	30.968.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	-	30.968.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	-	30.968.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	-	30.968.000,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	05	2.01	0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
								Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	10.968.000,00		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	10.968.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0002		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
								Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	20.000.000,00		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	20.000.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
153	3	27	06				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	50% Persen	24.639.900,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	50% Persen	24.639.900,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01			Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Ijin Usaha	24.639.900,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Ijin Usaha	24.639.900,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	06	2.01	0002		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									selaras		
								Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	24.639.900,00		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	24.639.900,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
154	3	27	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20% Persen	454.628.920,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20% Persen	454.628.920,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	62 Unit	454.628.920,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	62 Unit	454.628.920,00	DINAS PERTANIAN	Selaras	Selaras	Selaras
	3	27	07	2.01	0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									selaras		
								Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	86.999.900,00		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	86.999.900,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0002		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									selaras		
								Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	269.394.220,00		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	269.394.220,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0003		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	98.234.800,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	98.234.800,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
					,		Sekretariat Daerah			46.059.135.232,00	Sekretariat Daerah			46.059.135.232,00				
	4				,		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			46.059.135.232,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			46.059.135.232,00				
	4	01			,		SEKRETARIAT DAERAH			46.059.135.232,00	SEKRETARIAT DAERAH			46.059.135.232,00				
155	4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	30.418.662.832,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	30.418.662.832,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	12.504.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	12.504.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.648.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.648.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.001.375.641,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.001.375.641,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.365.803.141,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.365.803.141,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	630.939.500,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	630.939.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.843.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.843.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.790.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	15.334.200,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	15.334.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.526.736.376,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.526.736.376,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.889.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.889.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.710.075,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.710.075,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.391.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.391.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										selaras		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										selaras		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	942.147.050,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	942.147.050,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	351.598.251,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	351.598.251,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										selaras		
								Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										selaras		
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.773.715.880,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.773.715.880,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	295.564.900,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	295.564.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	769.888.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	769.888.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.708.262.180,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.708.262.180,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.584.473.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.584.473.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										selaras		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	450.630.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	450.630.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										selaras		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	653.470.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	653.470.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	201.210.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	201.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.097.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.097.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.066.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.066.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	100 persen	1.182.399.585,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	100 persen	1.182.399.585,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	521.399.585,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	521.399.585,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										selaras		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.173.972.900,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.173.972.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah										selaras		
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.010.008.000,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.010.008.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah										selaras		
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.462.000,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.462.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah										selaras		
								Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	449.378.250,00	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	449.378.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	197.265.950,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	197.265.950,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	63.128.300,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	63.128.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										selaras		
								Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	63.065.650,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	63.065.650,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana										selaras		
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	62.904.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	62.904.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	63.014.350,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	63.014.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	2.698.773.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	2.698.773.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.816.060.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.816.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	541.582.500,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	541.582.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan										selaras		
								Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	341.130.500,00		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	341.130.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
156	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	13.127.018.150,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	13.127.018.150,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.125.476.750,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.125.476.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	500.229.550,00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	500.229.550,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	278.515.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	278.515.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	346.731.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	346.731.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	9.833.985.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	9.833.985.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	219.139.100,00			3 Dokumen	219.139.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	860.833.800,00			2 Dokumen	860.833.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.087.583.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.087.583.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah										selaras		
								Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	511.435.000,00			690 Dokumen	511.435.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum										selaras		
								Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	274.232.000,00			2 Kasus	274.232.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan										selaras		
								Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	301.916.000,00			85 Dokumen	301.916.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
157	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	2.513.454.250,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	2.513.454.250,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	448.378.600,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	448.378.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	73.726.300,00			5 Dokumen	73.726.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	249.394.700,00			4 Laporan	249.394.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	68.815.000,00			8 Dokumen	68.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	55.442.600,00			1 Dokumen	55.442.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1.000.000,00			1 Dokumen	1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.254.984.750,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.254.984.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	73.706.250,00			1 Dokumen	73.706.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	1.034.053.000,00			6 Laporan	1.034.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	147.225.500,00			16 Laporan	147.225.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	698.102.600,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	698.102.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	225.814.100,00			72 Dokumen	225.814.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	150.096.500,00			36 Dokumen	150.096.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa										selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	322.192.000,00			46 Orang	322.192.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	111.988.300,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	111.988.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	33.286.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	33.286.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	77.701.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	77.701.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
					,	Sekretariat DPRD				29.127.825.113,00	Sekretariat DPRD			29.127.825.113,00				
	4				,	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				29.127.825.113,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			29.127.825.113,00				
	4	02			,	SEKRETARIAT DPRD				29.127.825.113,00	SEKRETARIAT DPRD			29.127.825.113,00				
158	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		19.766.825.113,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.766.825.113,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-		17.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		14.992.862.113,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.992.862.113,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.765.362.113,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.765.362.113,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		600.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	600.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		805.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	805.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.726.213.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.726.213.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	426.213.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	426.213.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	950.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	395.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	395.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	100.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	525.000.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	525.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									selaras		
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	100.000.000,00		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	350.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	500.000.000,00	Layanan Administrasi DPRD	-	-	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	500.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
159	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	9.361.000.000,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	9.361.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang	12 Dokumen	1.261.000.000,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang	12 Dokumen	1.261.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	700.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	7.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	630.000.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	175.000.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	27.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									selaras		
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	27.500.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	17.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	17.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	3.200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	2.000.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									selaras		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	200.000.000,00		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.515.000.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.515.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									selaras		
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.500.000.000,00		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	180.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	175.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	175.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	1.400.000.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	Selaras	Selaras	Selaras
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.400.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
					,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			8.419.304.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			8.419.304.800,00				
	5				,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.419.304.800,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.419.304.800,00				
	5	01			,	PERENCANAAN			8.419.304.800,00	PERENCANAAN			8.419.304.800,00				
160	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	-	132.126.620,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	-	132.126.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.714.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.714.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.050.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.050.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	5.405.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	5.405.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.482.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.482.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.265.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.265.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.856.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.856.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	98.353.620,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	98.353.620,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.854.787.100,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.854.787.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5				,	NON URUSAN			8.419.304.800,00	NON URUSAN			8.419.304.800,00				
	5	01			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.419.304.800,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.419.304.800,00				
161	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
	5				,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.419.304.800,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.419.304.800,00				
	5	01			,	PERENCANAAN			8.419.304.800,00	PERENCANAAN			8.419.304.800,00				
162	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.140.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.140.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.021.700,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.021.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.819.400,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.819.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	7.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	7.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	-	10.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	-	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	525.808.280,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	525.808.280,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.285.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.285.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.352.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.352.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.240.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.240.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.173.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.173.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	282.758.080,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	282.758.080,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	179.660.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	179.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	98.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	98.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.590.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.590.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.320.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	33.350.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	33.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	-	173.850.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	-	173.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.490.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.360.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
163	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	98.60 98,6 persen Persen	693.836.500,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	98.60 98,6 persen Persen	693.836.500,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	98,6 Persen	537.648.600,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	98,6 Persen	537.648.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									selaras		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	23.825.900,00		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	23.825.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	57.602.400,00		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	57.602.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	285.835.300,00		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	285.835.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	170.385.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	170.385.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	-	156.187.900,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	-	156.187.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	40.932.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	40.932.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	115.255.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	115.255.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
164	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	-	1.674.335.200,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	-	1.674.335.200,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	573.754.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	573.754.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	75.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	60.303.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	60.303.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	74.633.200,00		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	74.633.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	190.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	190.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	116.015.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	116.015.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	57.803.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	57.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	-	544.107.800,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	-	544.107.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	131.076.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	131.076.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	112.265.500,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	112.265.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	21.172.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	21.172.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	135.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	124.569.900,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	124.569.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	20.023.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	20.023.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	556.473.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	556.473.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	190.876.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	190.876.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	100.499.400,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	100.499.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	49.201.400,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	49.201.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	114.714.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	114.714.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	77.473.500,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	77.473.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	23.707.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	23.707.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			22.445.088.837,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			22.445.088.837,00				

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5				,	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			22.445.088.837,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			22.445.088.837,00				
	5	02			.	KEUANGAN			22.445.088.837,00	KEUANGAN			22.445.088.837,00				
165	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	14.085.619.650,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	14.085.619.650,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	78.316.950,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	78.316.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.805.950,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.805.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.118.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.118.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.279.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.279.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.039.900,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.039.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.951.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.951.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.683.900,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.683.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	14.437.800,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	14.437.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	12.740.846.166,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	12.740.846.166,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	11.313.036.578,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	11.313.036.578,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.961.332,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.961.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.919.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.919.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	169.796.456,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	169.796.456,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	28.379.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	28.379.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.752.800,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.752.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	799.394.759,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	799.394.759,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.446.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.446.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	353.330.050,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	353.330.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	67.113.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	67.113.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.504.809,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.504.809,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	204.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	204.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	204.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	204.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	334.338.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	334.338.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	143.061.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	143.061.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.830.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.830.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.846.900,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.846.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	132.519.675,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	132.519.675,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	73.298.875,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	73.298.875,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	57.220.800,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	57.220.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
166	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	-	5.552.386.089,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	-	5.552.386.089,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	-	1.553.438.350,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	-	1.553.438.350,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.815.250,00		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.815.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	36.428.050,00		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	36.428.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	49.589.500,00		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	49.589.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	189.267.200,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	189.267.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	182.840.000,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	182.840.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	159.863.400,00		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	159.863.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	707.670.650,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	707.670.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	196.964.300,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	196.964.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	-	577.052.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	-	577.052.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	49.127.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	49.127.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	87.304.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	87.304.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									selaras		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	66.846.000,00		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	66.846.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	136.121.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	136.121.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									selaras		
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	108.218.000,00		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	108.218.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	129.436.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	129.436.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	-	485.077.062,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	-	485.077.062,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	24.695.700,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	24.695.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									selaras		
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	26.659.000,00		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	26.659.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	154.119.000,00		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	154.119.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	104.162.481,00		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	104.162.481,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	163.054.481,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	163.054.481,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	12.386.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	12.386.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	-	2.757.750.377,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	-	2.757.750.377,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.757.750.377,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.757.750.377,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	179.068.300,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	179.068.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	179.068.300,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	179.068.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
167	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	958.926.694,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	958.926.694,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	958.926.694,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	958.926.694,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									selaras		
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	74.192.950,00		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	74.192.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	58.149.850,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	58.149.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.387.600,00		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.387.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	261.258.700,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	261.258.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	106.219.894,00		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	106.219.894,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.383.260,00		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.383.260,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.720.400,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.720.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	78.958.140,00		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	78.958.140,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	127.647.950,00		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	127.647.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	29.951.450,00		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	29.951.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	10.056.500,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	10.056.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
168	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	-	1.848.156.404,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	-	1.848.156.404,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	1.848.156.404,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	1.848.156.404,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	22.247.600,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	22.247.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	66.393.650,00		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	66.393.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	41.179.450,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	41.179.450,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	353.847.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	353.847.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	197.659.300,00		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	197.659.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	172.336.900,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	172.336.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	19.950.000,00		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	19.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	22.590.000,00		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	22.590.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	682.094.704,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	682.094.704,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	50.368.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	50.368.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	145.409.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	145.409.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	74.080.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	74.080.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			7.667.995.213,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			7.667.995.213,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.667.995.213,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.667.995.213,00				
	5	03				KEPEGAWAIAN			6.850.442.213,00	KEPEGAWAIAN			6.850.442.213,00				
169	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	5.788.728.213,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	5.788.728.213,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	47.857.100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	47.857.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.830.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.877.100,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.877.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.431.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.431.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.844.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.844.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.134.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.134.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.741.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.741.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.830.855.113,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.830.855.113,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.673.030.113,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.673.030.113,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	131.527.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	131.527.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.603.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.603.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.695.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.695.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	57.750.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	57.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	27.750.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	27.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	471.502.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	471.502.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	35.712.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	35.712.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	69.940.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	69.940.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	24.190.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	24.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.700.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	77.320.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	77.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	198.640.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	198.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30.680.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30.680.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	181.444.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	181.444.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	44.590.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	44.590.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.244.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.244.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.610.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.610.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168.640.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	98.300.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	98.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	38.340.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	38.340.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
170	5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	-	1.061.714.000,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	-	1.061.714.000,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	-	412.670.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	-	412.670.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	02	2.01	0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.220.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0004		Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	276.150.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	276.150.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0007		Evaluasi Pemberhentian ASN									selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0011		Pengelolaan Data Kepegawaian									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	60.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	40.300.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	40.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	-	228.208.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	-	228.208.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	169.430.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	169.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN										selaras		
								Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	58.778.000,00		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	58.778.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	-	270.471.000,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	-	270.471.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN										selaras		
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	255.471.000,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	255.471.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	-	150.365.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	-	150.365.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	55.645.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	55.645.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai										selaras		
								Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	25.000.000,00		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN										selaras		
								Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	23.000.000,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	23.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	46.720.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	46.720.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				817.553.000,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			817.553.000,00				
171	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	-	817.553.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	-	817.553.000,00		selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	-	15.000.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-	802.553.000,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-	802.553.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Selaras	Selaras	Selaras
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	802.553.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	802.553.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
						Badan Riset dan Inovasi Daerah				4.839.758.784,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah			4.839.758.784,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4.839.758.784,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.839.758.784,00				
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				4.839.758.784,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			4.839.758.784,00				
172	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.467.758.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.467.758.784,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										selaras		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		-	2.533.946.984,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.533.946.984,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										selaras		
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.371.146.984,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.371.146.984,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	127.800.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	127.800.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		-	57.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	57.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										selaras		
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.500.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	573.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	573.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										selaras		
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	53.311.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	53.311.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	53.311.800,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	53.311.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
173	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	-	1.372.000.000,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	-	1.372.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	-	265.000.000,00	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	-	265.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	40.000.000,00		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	40.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	50.000.000,00		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	-	1.107.000.000,00	Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	-	1.107.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Selaras	Selaras	Selaras
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	87.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	87.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	400.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	25.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	25.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	75.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	75.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	200.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	100.000.000,00		Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	50.000.000,00		Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	70.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
					,	Inspektorat			11.351.487.142,00	Inspektorat			11.351.487.142,00				
	6				,	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.351.487.142,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.351.487.142,00				
	6	01			,	INSPEKTORAT DAERAH			11.351.487.142,00	INSPEKTORAT DAERAH			11.351.487.142,00				
174	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	10.529.248.042,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	10.529.248.042,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	13.339.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	13.339.200,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	9.522.205.142,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	9.522.205.142,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	9.391.088.342,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	9.391.088.342,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	125.400.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	125.400.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-		5.716.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5.716.800,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										selaras		
								Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		122.622.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	122.622.400,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya										selaras		
								Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										selaras		
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										selaras		
								Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	101.905.600,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	101.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		613.412.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	613.412.200,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.750.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.750.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.927.800,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.927.800,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.828.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.828.800,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										selaras		
								Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										selaras		
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										selaras		
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		159.572.300,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	159.572.300,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.704.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.704.800,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.416.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.416.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	127.451.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	127.451.500,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	82.380.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	82.380.000,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	58.540.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	58.540.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.840.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.840.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
175	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	-	566.108.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	-	566.108.500,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	-	548.108.500,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	-	548.108.500,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	107.115.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	107.115.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	89.475.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	89.475.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	163.010.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	163.010.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12.600.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12.600.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									selaras		
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	63.136.300,00		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	63.136.300,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	112.772.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	112.772.200,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	18.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	18.000.000,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	18.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	18.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
176	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	-	256.130.600,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	-	256.130.600,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	-	256.130.600,00	Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	-	256.130.600,00	INSPEKTORAT	Selaras	Selaras	Selaras
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	133.980.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	133.980.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	27.000.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	27.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	43.250.600,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	43.250.600,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	51.900.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	51.900.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kecamatan RasanaE Barat			12.526.588.727,00	Kecamatan RasanaE Barat			12.526.588.727,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
177	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	8.841.808.277,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	8.841.808.277,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	31.903.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	31.903.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.700.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.700.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.760.600,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.760.600,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.360.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.360.600,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.933.385.777,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.933.385.777,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.659.395.777,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.659.395.777,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	270.469.400,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	270.469.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.520.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.520.600,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	198.055.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	198.055.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.281.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.281.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.274.700,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.274.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	601.763.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	601.763.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	287.472.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	287.472.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	264.291.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	264.291.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	76.700.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	76.700.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.700.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.700.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
178	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	50.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	50.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	50.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
179	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	14.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	14.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	-	125.921.700,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	-	125.921.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	125.921.700,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	125.921.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
180	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	-	68.400.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	-	68.400.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	-	68.400.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	-	68.400.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	68.400.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	68.400.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Paruga			12.526.588.727,00	Kelurahan Paruga			12.526.588.727,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
181	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	589.506.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	589.506.100,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Dara			12.526.588.727,00	Kelurahan Dara			12.526.588.727,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	601.201.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	601.201.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Sarae			12.526.588.727,00	Kelurahan Sarae			12.526.588.727,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	650.505.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	650.505.900,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Tanjung			12.526.588.727,00	Kelurahan Tanjung			12.526.588.727,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	594.434.550,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	594.434.550,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Nae			12.526.588.727,00	Kelurahan Nae			12.526.588.727,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
185	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	537.163.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	537.163.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Pane			12.526.588.727,00	Kelurahan Pane			12.526.588.727,00				

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.526.588.727,00				
186	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	453.647.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	453.647.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
					,	Kecamatan RasanaE Timur			14.063.385.292,00	Kecamatan RasanaE Timur			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
187	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7				,	NON URUSAN			14.063.385.292,00	NON URUSAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.063.385.292,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.063.385.292,00				
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
189	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7				,	NON URUSAN			14.063.385.292,00	NON URUSAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.063.385.292,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.063.385.292,00				
190	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
191	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	-	9.158.695.092,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	-	9.158.695.092,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.829.695.092,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.829.695.092,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	325.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	325.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	185.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	185.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.033.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.033.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	745.033.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	745.033.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
192	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	15.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
193	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	130.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	130.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
194	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	33.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	33.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	33.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Nungga			14.063.385.292,00	Kelurahan Nungga			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	454.361.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	454.361.600,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Lelamase			14.063.385.292,00	Kelurahan Lelamase			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
196	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	509.154.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	509.154.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Dodu			14.063.385.292,00	Kelurahan Dodu			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	505.053.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	505.053.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Lampe			14.063.385.292,00	Kelurahan Lampe			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
198	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.033.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.033.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Kodo			14.063.385.292,00	Kelurahan Kodo			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
199	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	410.655.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	410.655.700,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Kumbe			14.063.385.292,00	Kelurahan Kumbe			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	529.994.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	529.994.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Oi Fo'o			14.063.385.292,00	Kelurahan Oi Fo'o			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
201	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.950.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.950.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Oi Mbo			14.063.385.292,00	Kelurahan Oi Mbo			14.063.385.292,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.063.385.292,00				
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	392.703.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	392.703.900,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
					,	Kecamatan Asakota			12.962.840.465,00	Kecamatan Asakota			12.962.840.465,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.894.513.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.894.513.464,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.300.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.300.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.575.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.575.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.002.328.290,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.002.328.290,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.522.474.690,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.522.474.690,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	473.553.600,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	473.553.600,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.575.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.575.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.725.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.725.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	36.537.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	36.537.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	36.537.500,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	36.537.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	251.286.785,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	251.286.785,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.482.185,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.482.185,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.098.500,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.098.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.706.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.706.100,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	127.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	127.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	424.849.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	424.849.900,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	209.073.010,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	209.073.010,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.346.250,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.346.250,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	154.430.640,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	154.430.640,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	173.210.989,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	173.210.989,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	152.710.989,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	152.710.989,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	20.500.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	20.500.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	39.783.900,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	39.783.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	39.783.900,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	39.783.900,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.104.600,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.104.600,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	38.679.300,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	38.679.300,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
205	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.129.600,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.129.600,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	30.715.600,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	30.715.600,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	130.281.550,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	130.281.550,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	130.281.550,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	130.281.550,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
206	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	46.790.800,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	46.790.800,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	46.790.800,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	46.790.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.790.800,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.790.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
207	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	3.150.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	3.150.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	3.150.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	3.150.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	3.150.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	3.150.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Kolo			12.962.840.465,00	Kelurahan Kolo			12.962.840.465,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	623.642.198,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	623.642.198,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Melayu			12.962.840.465,00	Kelurahan Melayu			12.962.840.465,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				
209	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.656.120,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.656.120,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Jatiwangi			12.962.840.465,00	Kelurahan Jatiwangi			12.962.840.465,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				
210	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	728.792.082,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	728.792.082,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
						Kelurahan Ule			12.962.840.465,00	Kelurahan Ule			12.962.840.465,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01				KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				
211	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	667.193.625,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	667.193.625,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
						Kelurahan Jatibaru			12.962.840.465,00	Kelurahan Jatibaru			12.962.840.465,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01				KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.818.030,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.818.030,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
						Kelurahan Jatibaru Timur			12.962.840.465,00	Kelurahan Jatibaru Timur			12.962.840.465,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00				
	7	01				KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			12.962.840.465,00				
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	KECAMATAN ASAKOTA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.373.496,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.373.496,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
						Kecamatan Mpunda			17.910.868.587,00	Kecamatan Mpunda			17.910.868.587,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01				KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
214	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	-	13.238.587.177,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	-	13.238.587.177,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.602.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.602.200,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.016.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.016.400,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.005.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.005.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.580.800,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.580.800,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	11.813.107.477,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	11.813.107.477,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.246.971.377,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.246.971.377,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	556.935.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	556.935.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.295.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.295.600,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.905.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.905.500,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	436.321.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	436.321.800,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.491.400,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.491.400,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.822.200,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.822.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.301.400,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.301.400,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.406.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.406.800,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.500.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.500.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.800.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.800.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	877.703.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	877.703.400,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	338.277.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	338.277.400,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.626.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.626.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	480.800.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	480.800.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100.852.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100.852.300,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	61.282.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	61.282.500,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.149.800,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.149.800,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	28.420.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	28.420.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
215	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	65.800.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	65.800.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	-	44.920.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	-	44.920.000,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	31.000.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	31.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.920.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.920.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	20.880.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	20.880.000,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.880.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.880.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	-	14.132.300,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	-	14.132.300,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.132.300,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.132.300,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.500.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	-	129.423.950,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	-	129.423.950,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	129.423.950,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	129.423.950,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
217	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	25.488.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	25.488.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	25.488.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	25.488.000,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.488.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.488.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
218	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	-	12.930.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	-	12.930.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	12.930.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	12.930.000,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	12.930.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	12.930.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Penatoi			17.910.868.587,00	Kelurahan Penatoi			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
219	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	76.130.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	76.130.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	402.060.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	402.060.700,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Lewirato			17.910.868.587,00	Kelurahan Lewirato			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
220	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	378.775.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	378.775.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Sadia			17.910.868.587,00	Kelurahan Sadia			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	19.605.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	19.605.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	414.197.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	414.197.800,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Mande			17.910.868.587,00	Kelurahan Mande			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
222	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	54.888.350,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	54.888.350,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	415.801.310,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	415.801.310,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Panggi			17.910.868.587,00	Kelurahan Panggi			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	364.374.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	364.374.600,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Sambinae			17.910.868.587,00	Kelurahan Sambinae			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	66.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	66.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	346.900.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	346.900.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Manggemaci			17.910.868.587,00	Kelurahan Manggemaci			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	58.969.950,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	58.969.950,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.938.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.938.500,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Monggonao			17.910.868.587,00	Kelurahan Monggonao			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	73.425.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	73.425.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.692.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.692.400,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Santi			17.910.868.587,00	Kelurahan Santi			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	51.600.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	51.600.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	369.011.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	369.011.400,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kelurahan Matakando			17.910.868.587,00	Kelurahan Matakando			17.910.868.587,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			17.910.868.587,00				
228	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	-	4.424.507.160,00	KECAMATAN MPUNDA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	92.737.150,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	92.737.150,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	383.600.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	383.600.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
					,	Kecamatan Raba			21.255.804.771,00	Kecamatan Raba			21.255.804.771,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
229	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	-	15.534.063.872,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	-	15.534.063.872,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	7.475.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	7.475.300,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	615.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	615.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.395.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.395.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.220.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.220.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.121.400,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.121.400,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.030.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.030.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.093.900,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.093.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.028.229.609,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.028.229.609,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.564.665.609,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.564.665.609,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	459.144.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	459.144.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.420.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.420.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	295.719.963,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	295.719.963,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.090.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.090.600,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	66.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	66.000.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	218.629.363,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	218.629.363,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.135.448.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.135.448.000,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	203.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	203.400.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	839.861.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	839.861.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.191.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.191.000,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	57.191.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	57.191.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7					NON URUSAN			21.255.804.771,00	NON URUSAN			21.255.804.771,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			21.255.804.771,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			21.255.804.771,00				
230	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.534.063.872,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.534.063.872,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.191.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.191.000,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01				KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
231	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	-	47.766.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	-	47.766.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	47.766.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	47.766.000,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	47.766.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	47.766.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
232	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	31.274.900,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	31.274.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	66.658.300,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	66.658.300,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	135.494.100,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	135.494.100,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	135.494.100,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	135.494.100,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
233	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	26.825.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	26.825.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	26.825.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	26.825.000,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26.825.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26.825.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
						Kelurahan Rabadompu Barat			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabadompu Barat			21.255.804.771,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01				KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
234	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	515.042.050,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	515.042.050,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
						Kelurahan Rabadompu Timur			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabadompu Timur			21.255.804.771,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01				KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
235	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	521.232.749,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	521.232.749,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
						Kelurahan Rabangodu Utara			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabangodu Utara			21.255.804.771,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01				KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan											

No	Kode						RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	563.527.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	563.527.700,00	KECAMATAN RABA			
					,		Kelurahan Rabangodu Selatan			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabangodu Selatan			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
237	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	507.303.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	507.303.800,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Rontu			21.255.804.771,00	Kelurahan Rontu			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
238	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	460.156.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	460.156.700,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Penaraga			21.255.804.771,00	Kelurahan Penaraga			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
239	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	498.202.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	498.202.500,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Penanae			21.255.804.771,00	Kelurahan Penanae			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
240	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	490.294.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	490.294.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Ntobo			21.255.804.771,00	Kelurahan Ntobo			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
241	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.422.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.422.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Kendo			21.255.804.771,00	Kelurahan Kendo			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
242	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	422.415.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	422.415.100,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Nitu			21.255.804.771,00	Kelurahan Nitu			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
243	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
								Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	406.501.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	406.501.400,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
					,		Kelurahan Rite			21.255.804.771,00	Kelurahan Rite			21.255.804.771,00				
	7				,		UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00				
	7	01			,		KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.255.804.771,00				
244	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	KECAMATAN RABA	Selaras	Selaras	Selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	436.623.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	436.623.700,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.530.871.107,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.530.871.107,00				
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.530.871.107,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.530.871.107,00				
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.530.871.107,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.530.871.107,00				
245	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	4.557.947.265,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	4.557.947.265,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	-	20.777.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	-	20.777.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.358.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.358.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.246.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.246.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.283.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.283.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.653.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.653.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.245.900,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.245.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.991.300,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.991.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.942.455.644,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.942.455.644,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.738.080.644,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.738.080.644,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	194.640.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	194.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.245.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.245.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.245.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.245.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.245.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.245.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	35.700.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	35.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	35.700.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	35.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	241.453.021,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	241.453.021,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.762.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.762.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	83.554.700,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	83.554.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	11.455.821,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	11.455.821,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.640.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	140.040.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	140.040.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	-	129.801.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	-	129.801.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	5.865.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	5.865.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.536.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	107.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	107.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	187.760.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	187.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	77.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	77.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.760.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.760.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
246	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	-	677.045.300,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	-	677.045.300,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	-	677.045.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	-	677.045.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	60.650.500,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	60.650.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	50.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									selaras		
							Jumlah Paskibraka	73 Orang	400.000.000,00		Jumlah Paskibraka	73 Orang	400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	45.000.000,00		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	52.000.000,00		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	52.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	69.394.800,00		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	69.394.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
247	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	1.382.896.600,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	1.382.896.600,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	-	1.382.896.600,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	-	1.382.896.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.277.792.600,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.277.792.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									selaras		

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	105.104.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	105.104.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
248	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.009.253.850,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.009.253.850,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.009.253.850,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.009.253.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.009.253.850,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.009.253.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
249	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	176.947.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	176.947.000,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	176.947.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	176.947.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	76.947.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	76.947.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
250	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	-	1.726.781.092,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	-	1.726.781.092,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	-	1.726.781.092,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	-	1.726.781.092,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Selaras	Selaras	Selaras
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	485.564.800,00		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	485.564.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	114.921.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	114.921.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	33.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	33.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.093.295.292,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.093.295.292,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
						J U M L A H			**823.556.428.302,00**				**823.556.428.302,00**				

Lampiran 6

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2025

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			246.902.344.121,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			246.902.344.121,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			243.974.365.221,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			243.974.365.221,00				
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			243.974.365.221,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			243.974.365.221,00				
1	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	206.214.569.371,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	206.214.569.371,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	129.610.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	129.610.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.919.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.919.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									-		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.407.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.407.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.020.100,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.020.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.407.600,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.407.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	31.948.400,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	31.948.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	31.430.300,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	31.430.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	212.768.051.640,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	212.768.051.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	204.592.526.771,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	204.592.526.771,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.214.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.214.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.196.800,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.196.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.386.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.386.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.840.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.239.300,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.239.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	63.359.900,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	63.359.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.239.300,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.239.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.035.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.035.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.493.100,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.493.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	299.427.300,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	299.427.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	208.071.400,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	208.071.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.882.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.882.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	13.149.300,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	13.149.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.017.056.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.017.056.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.314.400,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.314.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.456.200,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.456.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.480.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	267.322.600,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	267.322.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	244.102.300,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	244.102.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	167.204.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	167.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.304.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.268.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.268.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	53.897.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	53.897.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	24.986.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	24.986.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	61.600.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	61.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
2	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	100 42 47 50 54 60 64 67 75 77 80 87 93 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	37.759.795.850,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	100 42 47 50 54 60 64 67 75 77 80 87 93 Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	37.759.795.850,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-		21.170.319.300,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-		21.170.319.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	2.224.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	2.224.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									selaras		
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	0,00		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	75.306.500,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	75.306.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.600.147.600,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.600.147.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	84.509.500,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	84.509.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.874.550.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.874.550.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	44.478.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	44.478.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.750.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.750.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	11.865.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	11.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	136.212.650,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	136.212.650,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	15.568.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	15.568.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0,00		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	8.951.263.500,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	8.951.263.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	888.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	888.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									selaras		
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	66.703.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	66.703.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	372.326.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	372.326.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	18.370.000,00		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	18.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	19.453.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	19.453.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	7.853.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	7.853.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	14.146.800,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	14.146.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	25.213.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	25.213.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	7.143.500,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	7.143.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	7.044.234.400,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	7.044.234.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	2.046.840.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	2.046.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	11.771.100,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	11.771.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	276.640.800,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	276.640.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	204.013.600,00		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	204.013.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.078.510.000,00		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.078.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	39.200.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	39.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	11.130.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	11.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	13.726.900,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	13.726.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									selaras		
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	68.509.300,00		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	68.509.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.539.749.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.539.749.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	18.920.600,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	18.920.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	2.414.250.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	2.414.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	3.806.500,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	3.806.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	5.889.100,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	5.889.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	66.711.800,00		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	66.711.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
3	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.927.978.900,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.927.978.900,00				
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.927.978.900,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.927.978.900,00				
4	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	194.618.200,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	194.618.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	144.238.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	144.238.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	81.910.600,00		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	81.910.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	18.673.000,00		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	18.673.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	119.714.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	119.714.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	94.034.600,00		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	94.034.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
5	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.733.360.700,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.733.360.700,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	35.000.000,00		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	459.232.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	459.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									selaras		
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	338.360.700,00		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	338.360.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									selaras		
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	60.000.000,00		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.300.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.800.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
						Dinas Kesehatan			129.581.852.631,00	Dinas Kesehatan			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	100 Persen	124.451.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	100 Persen	124.451.900,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.136.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.136.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.911.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.911.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.808.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.808.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	8.359.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	8.359.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.719.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.719.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	48.513.100,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	48.513.100,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	100 Persen	78.627.534.627,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	100 Persen	78.627.534.627,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 Orang/bulan	75.537.556.693,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 Orang/bulan	75.537.556.693,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	344.580.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	344.580.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.011.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.011.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	29.253.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	29.253.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	100 Persen	15.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	100 Persen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	100 Persen	159.611.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	100 Persen	159.611.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.052.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.052.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	116.100.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	116.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	26.864.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	26.864.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	3.446.500,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	3.446.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100 Satuan	310.909.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100 Satuan	310.909.100,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.625.200,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.625.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.300.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.487.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.487.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.940.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.940.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	126.841.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	126.841.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	21.987.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	21.987.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.550.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	100 Persen	472.553.040,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	100 Persen	472.553.040,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472.392.040,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472.392.040,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	142.260.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	142.260.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	105.555.561,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	105.555.561,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.236.043,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.236.043,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	59,4 Persen	7.296.395.837,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	59,4 Persen	7.296.395.837,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	50.000,00		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	50.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 0	60.000,00		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 0	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	43 Unit	2.697.164.600,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	43 Unit	2.697.164.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	0,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1.797.211.200,00		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1.797.211.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	119.800.000,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	119.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	2.587.362.537,00		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	2.587.362.537,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	86.176.000,00		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	86.176.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3111 Orang	134.106.400,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3111 Orang	134.106.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	100.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2899 Orang	78.290.000,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2899 Orang	78.290.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14343 Orang	108.000,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14343 Orang	108.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27231 Orang	43.163.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27231 Orang	43.163.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103576 Orang	424.498.524,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103576 Orang	424.498.524,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16930 Orang	100.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16930 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10243 Orang	194.176.360,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10243 Orang	194.176.360,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2531 Orang	192.820.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2531 Orang	192.820.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	7.480.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	7.480.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2568 Orang	1.159.658.176,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2568 Orang	1.159.658.176,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4941 Orang	36.960.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4941 Orang	36.960.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	29.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	29.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	3.774.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	3.774.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	447.805.936,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	447.805.936,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.402.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.402.900,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	535.185.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	535.185.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.832.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.832.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									selaras		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22639 Orang	8.840.000,00		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22639 Orang	8.840.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									selaras		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	0,00		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	261.876.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	261.876.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	16.246.136.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	16.246.136.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									selaras		
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	7.500.000,00		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	31.243.200,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	31.243.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	12.110.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	12.110.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	528 Orang	24.000.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	528 Orang	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	22.200.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	22.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									selaras		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	950 Orang	28.100.000,00		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	950 Orang	28.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100 Persen	727.040.600,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100 Persen	727.040.600,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 Unit	143.006.000,00		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 Unit	143.006.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	476.180.200,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	476.180.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	75.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	90 Persen	621.749.400,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	90 Persen	621.749.400,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	100 Persen	18.500.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	100 Persen	18.500.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	2.191.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	2.191.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	8.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	8.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	95 Persen	47.241.800,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	95 Persen	47.241.800,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	2.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	2.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.917.800,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.917.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	16.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	16.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	662.345.050,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	662.345.050,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	586.190.600,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	586.190.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
9	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	95,5 undefined	459.008.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	95,5 undefined	459.008.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	40 Sarana	110.940.000,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	40 Sarana	110.940.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	110.940.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	110.940.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	110 sarana SPPIRT	214.380.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	110 sarana SPPIRT	214.380.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	214.380.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	214.380.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	60 sarana PIRT	340.000,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	60 sarana PIRT	340.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	340.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	340.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	110 sarana PIRT 36 Produk	133.348.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	110 sarana PIRT 36 Produk	133.348.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									selaras		
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	133.348.000,00		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	133.348.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
10	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	7 Dokumen	358.668.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	7 Dokumen	358.668.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	347.370.000,00		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	347.370.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	14 OPD 41 Kelurahan 5 Kecamatan	91.543.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	14 OPD 41 Kelurahan 5 Kecamatan	91.543.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	77.593.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	77.593.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	174 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	174 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	12.512.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	12.512.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						RSUD Kota Bima			215.380.970.424,00	RSUD Kota Bima			215.380.970.424,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			215.380.970.424,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			215.380.970.424,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			215.380.970.424,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			215.380.970.424,00				
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.067.207.047,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.067.207.047,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	14.416.716.411,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	14.416.716.411,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	19.067.207.047,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	19.067.207.047,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
12	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	196.313.763.377,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	196.313.763.377,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	201.161.952.798,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	201.161.952.798,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.836.608.060,00		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.836.608.060,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	57.850.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	57.850.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	20.349.726.910,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	20.349.726.910,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	154.425.868.582,00		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	154.425.868.582,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.756.071.675,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.756.071.675,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	10.643.709.825,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	10.643.709.825,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			129.581.852.631,00	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
13	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	59,4 Persen 82,5 Persen	7.296.395.837,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	59,4 Persen 82,5 Persen	7.296.395.837,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	14.799.500,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	14.799.500,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.630.677.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.630.677.000,00	DINAS KESEHATAN			
						Puskesmas Paruga			129.581.852.631,00	Puskesmas Paruga			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
14	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	3.277.982.849,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	3.277.982.849,00	DINAS KESEHATAN			
15	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	30.336.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	30.336.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2241 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2241 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	551 Orang	29.200.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	551 Orang	29.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19647 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19647 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3211 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3211 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1943 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1943 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	487 Orang	16.250.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	487 Orang	16.250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	872 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	872 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	341.858.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	341.858.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.600.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	176.049.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	176.049.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	189.573.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	189.573.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	9.882.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	9.882.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	31.344.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	31.344.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.014.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.014.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
16	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	32 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	32 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	15.042.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	15.042.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Mpunda			129.581.852.631,00	Puskesmas Mpunda			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
17	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	471.974.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	471.974.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
18	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Persen 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Persen 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang	34.400.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang	34.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2475 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2475 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	75.700.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	75.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21696 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21696 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3546 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3546 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2146 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2146 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	14.200.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	14.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	467.395.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	467.395.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	34.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	34.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.750.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.750.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	185.002.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	185.002.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	3.193.155.398,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	3.193.155.398,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	220.490.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	220.490.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	10.399.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	10.399.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	538 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	538 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	29.440.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	29.440.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
19	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	100 Persen	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	100 Persen	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.873.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.873.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Penanae			129.581.852.631,00	Puskesmas Penanae			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.787.772.332,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.787.772.332,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	58.080.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	58.080.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2945 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2945 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	38.200.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	38.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25813 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25813 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4219 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4219 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2553 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2553 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	8.050.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	8.050.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1437 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1437 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	678.054.561,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	678.054.561,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.900.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.900.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.950.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.950.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	226.092.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	226.092.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	219.446.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	219.446.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	15.866.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	15.866.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1437 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1437 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.736.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.736.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	0 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	0 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
22	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	40 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	40 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	10.948.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	10.948.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Rasanae Timur			129.581.852.631,00	Puskesmas Rasanae Timur			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
23	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.160.548.095,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.160.548.095,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
24	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	33.400.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	33.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	8.000.000,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	30.000.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7438 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7438 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	6.000.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	736 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	736 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	15.100.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	15.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	182 Orang	6.450.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	182 Orang	6.450.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	303 Orang	1.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	303 Orang	1.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236.405.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236.405.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	61.123.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	61.123.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	114.230.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	114.230.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	303 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	303 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.040.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	250.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	9.990.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
25	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	20 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	20 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	8.981.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	8.981.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Kolo			129.581.852.631,00	Puskesmas Kolo			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	569.404.737,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	569.404.737,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116 Orang	30.060.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116 Orang	30.060.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109 Orang	16.800.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109 Orang	16.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3868 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3868 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	12.400.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	12.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	5.300.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	5.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	171 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	171 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	109.176.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	109.176.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.150.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.150.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	46.211.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	46.211.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	100.421.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	100.421.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.089.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.089.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	600.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
28	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	5 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	5 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2.667.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2.667.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Jatibaru			129.581.852.631,00	Puskesmas Jatibaru			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
29	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.554.563.360,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.554.563.360,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
30	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	9.200.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	9.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	596 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	596 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	559 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	559 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	55.800.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	55.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19955 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19955 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3262 Orang	12.000.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3262 Orang	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1973 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1973 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	42.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	495 Orang	9.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	495 Orang	9.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	869 Orang	5.550.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	869 Orang	5.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	344.910.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	344.910.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.600.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.032.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.032.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	162.963.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	162.963.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	12.473.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	12.473.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	590 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	590 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	869 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	869 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	40.040.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	40.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	8.469.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	8.469.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
31	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	30 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	30 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	13.923.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	13.923.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Kumbe			129.581.852.631,00	Puskesmas Kumbe			129.581.852.631,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00				
32	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	679.804.129,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	679.804.129,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
33	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	20.040.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	20.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	18.400.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	18.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5159 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5159 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	843 Orang	7.800.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	843 Orang	7.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	14.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	14.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128 Orang	11.300.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128 Orang	11.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	210 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	210 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	155.368.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	155.368.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	6.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	6.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	51.623.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	51.623.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	82.143.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	82.143.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.782.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.782.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.960.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.960.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.890.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.890.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
34	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	13 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	13 Posyandu	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1.919.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1.919.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			74.312.663.668,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			74.312.663.668,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.312.663.668,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.312.663.668,00				
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			74.312.663.668,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			74.312.663.668,00				
35	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.681.586.346,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.681.586.346,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.041.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.041.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.586.100,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.586.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.291.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.291.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.308.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.308.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.322.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.322.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.390.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.390.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	25.631.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	25.631.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.225.957.901,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.225.957.901,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.431.881.969,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.431.881.969,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	385.471.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	385.471.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7.878.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7.878.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.878.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.878.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.657.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.657.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.231.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.231.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.655.200,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.655.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18.464.400,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18.464.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.395.893.880,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.395.893.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.305.880,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.305.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	105.605.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	105.605.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	39.423.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	39.423.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	456.854.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	456.854.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	311.228.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	311.228.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.653.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.653.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	261.327.080,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	261.327.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	26.025.160,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	26.025.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	947.296.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	947.296.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133.479.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133.479.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									selaras		
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	375.531.957,00		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	375.531.957,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	34.433.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	34.433.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.203.500,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.203.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
36	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	41913 Meter	1.470.992.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	41913 Meter	1.470.992.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	345 Meter	1.362.113.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	345 Meter	1.362.113.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	98.082.000,00		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	98.082.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									selaras		
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,22 KM	231.404.000,00		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,22 KM	231.404.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam									selaras		
							Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	0,00		Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									selaras		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,125 KM	601.694.000,00		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,125 KM	601.694.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	575.000,00		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	575.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	119.361.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	119.361.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	1650 Meter	393.295.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	1650 Meter	393.295.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									selaras		
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,65 KM	419.876.000,00		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,65 KM	419.876.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
37	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.548.212.891,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.548.212.891,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.601.314.588,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.601.314.588,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	7 Lembaga	119.419.000,00		Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	7 Lembaga	119.419.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	34.139.000,00		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	34.139.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	228.500.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	228.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	11.997.876.270,00		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	11.997.876.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.287.057.621,00		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.287.057.621,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	350 SR	1.881.221.000,00		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	350 SR	1.881.221.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
38	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	38 Rumah Tangga	951.398.880,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	38 Rumah Tangga	951.398.880,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	100 Rumah Tangga	1.028.980.080,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	100 Rumah Tangga	1.028.980.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									selaras		
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	433.403.880,00		Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	433.403.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									selaras		
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	517.995.000,00		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	517.995.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
39	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	6.609.116.051,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	6.609.116.051,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	6.106.366.551,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	6.106.366.551,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									selaras		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	6.609.116.051,00		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	6.609.116.051,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
40	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	232.416.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	232.416.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	279.510.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	279.510.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan									selaras		
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	232.416.000,00		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	232.416.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
41	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	5 2 Kawasan Kawasan	25.603.489.300,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	5 2 Kawasan Kawasan	25.603.489.300,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	2 Kawasan 5 Kawasan	21.664.617.498,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	2 Kawasan 5 Kawasan	21.664.617.498,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									selaras		
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	25.603.489.300,00		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	25.603.489.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
42	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	2.90 KM	12.561.975.100,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	2.90 KM	12.561.975.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	2.90 KM	37.723.706.400,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	2.90 KM	37.723.706.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan									selaras		
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	142.278.500,00		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	142.278.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	377.177.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	377.177.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Panjang Jalan yang Dibangun	3.00 KM	2.943.854.500,00		Panjang Jalan yang Dibangun	3.00 KM	2.943.854.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.70 KM	4.091.259.500,00		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.70 KM	4.091.259.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.20 KM	4.025.815.000,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.20 KM	4.025.815.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan									selaras		
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	33.410.000,00		Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	33.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									selaras		
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	297.099 KM	440.091.000,00		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	297.099 KM	440.091.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.70 KM	508.089.600,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.70 KM	508.089.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
43	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	25.28 5,57 % %	106.515.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	25.28 5,57 % %	106.515.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	7 Badan Usaha	89.406.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	7 Badan Usaha	89.406.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									selaras		
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	58.670.000,00		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	58.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen	86.519.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen	86.519.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	47.845.000,00		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	47.845.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
44	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	5 Dokumen	546.962.100,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	5 Dokumen	546.962.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	2 Dokumen	444.702.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	2 Dokumen	444.702.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.073.800,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.073.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235.115.000,00		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235.115.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	28.845.800,00		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	28.845.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	77.883.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	77.883.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									selaras		
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	59.115.000,00		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	59.115.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	265.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	265.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	171.812.500,00		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	171.812.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
						Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			30.289.840.504,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			30.289.840.504,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.980.376.735,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.980.376.735,00				
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.980.376.735,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.980.376.735,00				
45	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.486.655.935,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.486.655.935,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	16.687.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	16.687.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.192.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.192.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.217.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.217.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	954.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	954.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	736.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	736.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.857.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.857.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.001.889.094,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.001.889.094,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.699.708.269,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.699.708.269,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	171.952.800,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	171.952.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.264.800,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.264.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.898.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.898.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.588.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.588.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.055.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.055.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.351.433,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.351.433,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.746.500,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.746.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.729.700,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.729.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.411.966,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.411.966,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	412.102.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	412.102.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	412.102.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	412.102.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.340.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.340.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	26.180.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	26.180.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.650.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.650.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
46	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	472.740.500,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	472.740.500,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	301.520.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	301.520.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.467.000,00		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.467.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									selaras		
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	0,00		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	290.758.000,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	290.758.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	226.273.500,00		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	226.273.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
47	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.873.930.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.873.930.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	0,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	146.013.500,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	146.013.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	100.661.200,00		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	100.661.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.044.374.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.044.374.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	1.565.607.400,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	1.565.607.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	207.661.400,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	207.661.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									selaras		
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	0,00		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
48	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	1.147.050.300,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	1.147.050.300,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	706.139.000,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	706.139.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.147.050.300,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.147.050.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.309.463.769,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.309.463.769,00				
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			22.309.463.769,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			22.309.463.769,00				
49	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	22.309.463.769,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	22.309.463.769,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.862.857.369,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.862.857.369,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	22.309.463.769,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	22.309.463.769,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
						Satuan Polisi Pamong Praja			10.155.859.314,00	Satuan Polisi Pamong Praja			10.155.859.314,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.155.859.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.155.859.314,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			10.155.859.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			10.155.859.314,00				
50	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.078.149.314,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.078.149.314,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.495.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.495.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.359.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.359.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.866.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.866.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.406.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.406.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.894.659.652,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.894.659.652,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.545.620.614,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.545.620.614,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.110.500,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.110.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.243.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.243.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.392.455.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.392.455.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	201.890.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	201.890.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	1.643.788.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	1.643.788.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	389.974.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	389.974.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.717.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.717.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	171.280.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	171.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.477.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.477.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.675.300,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.675.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	196.570.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	196.570.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.180.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.180.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	157.080.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	157.080.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.630.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.630.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
51	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.077.710.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.077.710.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	423.237.200,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	423.237.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.066.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.066.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	115.467.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	115.467.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									selaras		
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									selaras		
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	172.049.000,00		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	172.049.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.000.000.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	220.487.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	220.487.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	542.640.500,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	542.640.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
						Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.720.939.873,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.720.939.873,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.720.939.873,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.720.939.873,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			8.720.939.873,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			8.720.939.873,00				
52	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.124.132.098,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.124.132.098,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.320.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.320.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.866.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.866.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.577.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.577.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.103.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.103.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	950.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	950.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	871.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	871.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.593.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.593.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	100 Persen	6.335.750.783,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	100 Persen	6.335.750.783,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.961.739.638,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.961.739.638,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	141.478.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	141.478.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	886.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	886.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.989.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.989.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	735.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	735.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	19.478.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	19.478.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.592.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.592.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.127.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.127.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 Persen	972.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 Persen	972.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	700.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	350.562.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	350.562.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.241.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.241.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.035.460,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.035.460,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.370.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.370.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.276.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.276.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	414.912.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	414.912.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.186.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.186.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.913.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.913.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	453.045.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	453.045.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.502.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.502.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	289.337.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	289.337.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.260.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.260.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.805.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.805.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
53	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	80 Persen	1.596.807.775,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	80 Persen	1.596.807.775,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	1 Dokumen 80 %	872.381.775,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	1 Dokumen 80 %	872.381.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	4.730.000,00		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	4.730.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	200.239.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	200.239.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	117.602.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	117.602.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	15.304.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	15.304.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									selaras		
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	11.859.000,00		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	11.859.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	24.083.775,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	24.083.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	1.018.048.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	1.018.048.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	20.811.000,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	20.811.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.940.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.940.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.458.000,00	Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.458.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	13.005.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	13.005.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan 640 orang	141.753.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan 640 orang	141.753.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	35.532.000,00		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	35.532.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	28 Desa/Kelurahan	66.355.000,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	28 Desa/Kelurahan	66.355.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	92.614.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	92.614.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	61.604.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	61.604.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	6.212.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	6.212.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	10.848.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	10.848.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	446.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	446.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4.850.231.147,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4.850.231.147,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.850.231.147,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.850.231.147,00				
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			4.850.231.147,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			4.850.231.147,00				
54	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB Level	4.286.566.347,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB Level	4.286.566.347,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	48.385.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	48.385.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.498.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.498.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.510.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.510.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.510.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.510.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7.793.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7.793.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.007.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.007.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100 Persen	3.725.184.991,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100 Persen	3.725.184.991,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.493.008.247,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.493.008.247,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	168.094.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	168.094.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.340.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	2.799.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	2.799.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.259.100,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.259.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	956.600,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	956.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.181.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.181.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	840.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	27.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	27.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6.058.900,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6.058.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	148.731.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	148.731.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.207.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.207.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.410.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.410.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.575.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.749.700,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.749.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.628.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.628.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	36.008.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	36.008.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	100 %	25.450.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	100 %	25.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.450.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	325.739.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	325.739.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.053.350,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.053.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.363.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.363.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	386.888.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	386.888.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	126.048.750,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	126.048.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.985.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.985.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
55	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	66,92 %	563.664.800,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	66,92 %	563.664.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	64,34 % undefined undefined	72.773.200,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	64,34 % undefined undefined	72.773.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	0,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	71902 Orang	48.779.700,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	71902 Orang	48.779.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	60,81 %	282.457.200,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	60,81 %	282.457.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	0,00		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1800 Orang	33.605.400,00		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1800 Orang	33.605.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									selaras		
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	0,00		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	110.750.600,00		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	110.750.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	26.361.000,00		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	26.361.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	8.816.600,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	8.816.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	292.912.750,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	292.912.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	5.463.800,00		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	5.463.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	29797 Orang	2.985.900,00		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	29797 Orang	2.985.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	29797 Orang	187.546.000,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	29797 Orang	187.546.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-		221.107.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-		221.107.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	10.678.900,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	10.678.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	28.676.900,00		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	28.676.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
						Dinas Sosial			10.796.987.228,00	Dinas Sosial			10.796.987.228,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.796.987.228,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.796.987.228,00				
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.796.987.228,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.796.987.228,00				
56	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.172.229.928,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.172.229.928,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	98.002.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	98.002.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.652.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.652.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.481.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.481.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	37.508.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	37.508.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.605.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.605.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.233.161.923,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.233.161.923,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.962.264.717,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.962.264.717,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.660.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.660.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.726.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.726.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.923.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.923.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	596.424.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	596.424.500,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.689.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.689.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.611.600,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.611.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.615.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.615.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.359.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.359.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	193.200.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	193.200.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	40.252.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	40.252.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	48.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	48.800.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.490.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.490.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	448.761.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	448.761.400,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.056.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.056.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.110.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.110.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	133.739.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	133.739.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	317.930.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	317.930.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	202.726.311,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	202.726.311,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.580.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.580.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.900.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.900.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
57	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	50 Persen	147.533.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	50 Persen	147.533.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen 20 Dokumen	21.800.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen 20 Dokumen	21.800.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	15.213.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	15.213.200,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	30 persen	150.136.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	30 persen	150.136.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	112.320.000,00		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	112.320.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20.000.000,00		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
58	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	5 Persen	0,00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	5 Persen	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal									selaras		
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
59	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	918.590.800,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	918.590.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen	941.186.500,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen	941.186.500,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	85.965.400,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	85.965.400,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	311.263.500,00		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	311.263.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	45.964.900,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	45.964.900,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	8.080.800,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	8.080.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	40.982.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	40.982.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	12.294.100,00		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	12.294.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									selaras		
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.514.100,00		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.514.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	714.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	714.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.980.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.980.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	128.800.800,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	128.800.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	17.721.400,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	17.721.400,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen 60 persen	354.930.300,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen 60 persen	354.930.300,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	152.810.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	152.810.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.524.000,00		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.524.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	7.500.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	7.500.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	61.332.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	61.332.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA									selaras		
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7.598.700,00		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7.598.700,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.035.100,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.035.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.510.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.510.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
60	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 Persen	4.239.762.100,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 Persen	4.239.762.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	30 persen	45.940.000,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	30 persen	45.940.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11.719.000,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11.719.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	9.847.800,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	9.847.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.624.000,00		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.624.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	90 persen	2.685.127.400,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	90 persen	2.685.127.400,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	115.054.300,00		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	115.054.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	19.429.200,00		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	19.429.200,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									selaras		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	3.913.909.300,00		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	3.913.909.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	164.178.500,00		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	164.178.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
61	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	100 Persen	318.871.200,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	100 Persen	318.871.200,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen	244.666.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen	244.666.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	59.720.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	59.720.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	43.540.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	43.540.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									selaras		
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	10.805.000,00		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	10.805.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	37.745.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	37.745.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.860.000,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.860.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen 4 Kampung	127.480.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen 4 Kampung	127.480.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	5.972.500,00		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	5.972.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	146.228.700,00		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	146.228.700,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
						Dinas Tenaga Kerja			7.035.039.166,00	Dinas Tenaga Kerja			7.035.039.166,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.035.039.166,00				
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.035.039.166,00				
62	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.143.791.266,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.143.791.266,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	54.612.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	54.612.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.064.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.064.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.734.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.878.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.878.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.915.332.002,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.915.332.002,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.667.628.386,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.667.628.386,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	42.180.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	42.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	145.920.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	145.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.734.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.734.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	8.391.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	8.391.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.330.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.330.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.054.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.276.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.276.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	29.920.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	29.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	197.846.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	197.846.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.360.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.360.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	132.370.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	132.370.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.624.742.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.624.742.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									selaras		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.642.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.642.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.520.100.000,00		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.520.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.075.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.075.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.860.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.390.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.390.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	104.777.780,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	104.777.780,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	12.725.100,00	Penataan Organisasi	-	-	12.725.100,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	12.725.100,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	12.725.100,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
63	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	96 Persen	7.066.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	96 Persen	7.066.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	10 % 15 %	11.854.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	10 % 15 %	11.854.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									selaras		
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	7.066.000,00		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	7.066.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
64	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	35 45uta Persen Rupiah	255.992.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	35 45uta Persen Rupiah	255.992.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	37.024.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	37.024.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									selaras		
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	3.312.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	3.312.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
65	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	93 %	95.289.500,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	93 %	95.289.500,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 Orang	109.745.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 Orang	109.745.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	20.581.000,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	20.581.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	26.964.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	26.964.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	58.275.500,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	58.275.500,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	33.832.500,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	33.832.500,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	37.324.000,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	37.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									selaras		
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	13.912.000,00		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	13.912.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
66	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	532.900.400,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	532.900.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	138.699.600,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	138.699.600,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									selaras		
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	40.266.000,00		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	40.266.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	37.422.600,00		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	37.422.600,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	469.673.800,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	469.673.800,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	3.387.000,00		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	3.387.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	14.872.000,00		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	14.872.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									selaras		
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2000 Orang	436.952.800,00		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2000 Orang	436.952.800,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
						UPT Balai Latihan Kerja			7.035.039.166,00	UPT Balai Latihan Kerja			7.035.039.166,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.035.039.166,00				
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.035.039.166,00				
67	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.143.791.266,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.143.791.266,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.728.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.728.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
68	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	255.992.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	255.992.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	327.144.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	327.144.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	252.680.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	252.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	0,00		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6.892.948.168,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6.892.948.168,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.892.948.168,00				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.892.948.168,00				
69	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.582.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.582.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.153.800,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.153.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.030.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.687.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.687.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.650.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.456.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.456.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.164.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.164.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.960.292.973,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.960.292.973,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.747.223.907,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.747.223.907,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	166.610.200,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	166.610.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.263.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.263.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.046.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.046.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.525.900,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.525.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2					NON URUSAN			6.892.948.168,00	NON URUSAN			6.892.948.168,00				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			6.892.948.168,00				
70	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.892.948.168,00				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.892.948.168,00				
71	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	13.588.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	13.588.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.316.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.316.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	32.978.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	32.978.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.432.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.432.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	29.535.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	29.535.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	46.910.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	46.910.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	177.348.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	177.348.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.748.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.748.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.250.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	356.595.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	356.595.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	83.266.311,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	83.266.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.504.850,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.504.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	20.300.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	20.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
72	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9.59 %	1.887.422.300,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9.59 %	1.887.422.300,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	54.84 %	85.736.000,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	54.84 %	85.736.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	49.129.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	49.129.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5250 org	1.289.880.100,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5250 org	1.289.880.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									selaras		
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	1.242.498.000,00		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	1.242.498.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	39.33 %	833.051.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	39.33 %	833.051.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	46.582.400,00		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	46.582.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	409.479.900,00		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	409.479.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 0	139.733.000,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 0	139.733.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
73	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0.091 %	294.699.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0.091 %	294.699.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	50 kasus	89.433.800,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	50 kasus	89.433.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.135.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.135.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	36.992.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	36.992.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 %	267.645.200,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 %	267.645.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	84.202.200,00		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	84.202.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	135.370.000,00		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	135.370.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
74	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100 %	35.944.800,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100 %	35.944.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	59.313.000,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	59.313.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	27.239.000,00		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	27.239.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.705.800,00		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.705.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
75	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	69.05 %	165.403.600,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	69.05 %	165.403.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	143.040.300,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	143.040.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	2.558.000,00		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	2.558.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.956.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.956.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	122.575.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	122.575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	1.800.000,00		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	104.875.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	104.875.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	5.214.000,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	5.214.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
76	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0.107 %	638.618.800,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0.107 %	638.618.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	55 kasus	91.865.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	55 kasus	91.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA									selaras		
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									selaras		
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	91.865.000,00		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	91.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100 %	383.273.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100 %	383.273.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	190.509.400,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	190.509.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									selaras		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	151.920.000,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	151.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 lembaga	267.457.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 lembaga	267.457.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	95.026.800,00		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	95.026.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/									selaras		
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	109.297.600,00		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	109.297.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
						Dinas Ketahanan Pangan			4.621.382.003,00	Dinas Ketahanan Pangan			4.621.382.003,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.621.382.003,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.621.382.003,00				
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.621.382.003,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.621.382.003,00				
77	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.855.107.533,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.855.107.533,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	24.162.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	24.162.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.951.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.951.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.196.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.196.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.684.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.684.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	581.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	581.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	580.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	580.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.533.300,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.533.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.462.796.737,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.462.796.737,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.302.509.333,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.302.509.333,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	127.185.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	127.185.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.413.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.413.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.008.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.008.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.783.400,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.783.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.955.500,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.955.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	3.471.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	3.471.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	470.100,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	470.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.903.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.903.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	226.899.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	226.899.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.940.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.940.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.024.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.024.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.543.900,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.543.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.985.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.985.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	65.120.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	65.120.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	60.209.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	60.209.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7.905.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7.905.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									selaras		
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1.595.700,00		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1.595.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	151.635.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	151.635.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48.144.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48.144.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.431.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.431.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11.527.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11.527.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	206.967.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	206.967.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	37.580.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	37.580.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	9.800.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	9.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.200.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.340.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.340.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
78	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	137 3599 88,5 gram/kap/hari kka/kap/hari Persen	598.204.770,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	137 3599 88,5 gram/kap/hari kka/kap/hari Persen	598.204.770,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	100 Persen	104.753.700,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	100 Persen	104.753.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	7.306.300,00		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	7.306.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	17.092.400,00		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	17.092.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	46.935.500,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	46.935.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									selaras		
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	6.294.500,00		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	6.294.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	75 Persen	420.460.910,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	75 Persen	420.460.910,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal									selaras		
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1.751.800,00		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1.751.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	358.890.000,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	358.890.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	39.861.270,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	39.861.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	13.000.000,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	2205,83 Persen 67,6 Gram/kap/hari	171.531.100,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	2205,83 Persen 67,6 Gram/kap/hari	171.531.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									selaras		
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10.794.000,00		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10.794.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	96.279.000,00		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	96.279.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
79	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	24 Persen	104.636.800,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	24 Persen	104.636.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	10 Kelurahan	45.895.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	10 Kelurahan	45.895.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									selaras		
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	26.334.100,00		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	26.334.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	100 Kelurahan	100.275.500,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	100 Kelurahan	100.275.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.281.000,00		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.281.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	11.107.200,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	11.107.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									selaras		
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	34.142.800,00		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	34.142.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.771.700,00		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.771.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
80	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	90 Persen	63.432.900,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	90 Persen	63.432.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	80 KomoditiPersen	79.539.200,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	80 KomoditiPersen	79.539.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.863.300,00		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.863.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	19.891.900,00		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	19.891.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									selaras		
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	37.677.700,00		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	37.677.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
						Dinas Lingkungan Hidup			33.692.252.467,00	Dinas Lingkungan Hidup			33.692.252.467,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.692.252.467,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.692.252.467,00				
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			33.692.252.467,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			33.692.252.467,00				
81	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.545.872.469,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.545.872.469,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	96.377.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	96.377.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.688.231,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.688.231,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.524.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.051.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.051.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.247.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.247.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.780.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.780.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.658.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.658.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	32.870.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	32.870.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12.273.967.787,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12.273.967.787,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	11.356.349.244,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	11.356.349.244,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	180.032.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	180.032.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.504.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.504.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.823.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.823.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	361.691.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	361.691.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.497.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.497.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.250.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.538.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.538.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	102.240.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	102.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	429.704.009,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	429.704.009,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	18.658.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	18.658.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.872.140,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.872.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.960.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	274.643.263,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	274.643.263,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	720.953.150,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	720.953.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	57.086.311,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	57.086.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	88.635.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	88.635.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.690.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.690.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.273.480,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.273.480,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
82	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	58 Persen	245.018.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	58 Persen	245.018.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	118.232.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	118.232.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									selaras		
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	109.462.500,00		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	109.462.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	1 Dokumen	190.270.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	1 Dokumen	190.270.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									selaras		
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	58.833.000,00		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	58.833.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	76.722.500,00		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	76.722.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
83	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	43,50/94 Persen	276.000.448,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	43,50/94 Persen	276.000.448,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	206.971.500,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	206.971.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									selaras		
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	28.345.188,00		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	28.345.188,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	61.496.860,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	61.496.860,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	67.552.000,00		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	67.552.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	90.818.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	90.818.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	40.622.260,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	40.622.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	18.083.340,00		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	18.083.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	61.894.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	61.894.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.276.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.276.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	28.624.800,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	28.624.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
84	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	15 Persen	5.073.788.625,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	15 Persen	5.073.788.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	78 persen	4.872.628.201,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	78 persen	4.872.628.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	36.428.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	36.428.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									selaras		
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Ha	4.992.380.625,00		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Ha	4.992.380.625,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									selaras		
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha Unit	44.980.000,00		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha Unit	44.980.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
85	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	50 Persen	136.897.400,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	50 Persen	136.897.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	176 izin	78.275.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	176 izin	78.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									selaras		
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	124.105.000,00		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	124.105.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	12.792.400,00		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	12.792.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
86	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	60 persen	112.139.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	60 persen	112.139.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	3 Pokmas	121.970.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	3 Pokmas	121.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									selaras		
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	112.139.000,00		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	112.139.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
87	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	80 persen	25.318.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	80 persen	25.318.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	3 Entitas 80 persen	40.580.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	3 Entitas 80 persen	40.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	25.318.000,00		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	25.318.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
88	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	30 Persen	11.944.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	30 Persen	11.944.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	25 usaha 65 persen	22.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	25 usaha 65 persen	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	11.944.000,00		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	11.944.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
89	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	75 70 Persen Persen	15.265.274.525,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	75 70 Persen Persen	15.265.274.525,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	174.600 M3 70 Persen 7 Persen	6.015.205.824,00	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	174.600 M3 70 Persen 7 Persen	6.015.205.824,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									selaras		
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	143.979.000,00		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	143.979.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	19.645.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	19.645.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	9.054.671.800,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	9.054.671.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	100.220.000,00		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	100.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									selaras		
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	6.120 Ton	176.936.600,00		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	6.120 Ton	176.936.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									selaras		
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	5.769.822.125,00		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	5.769.822.125,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	260 Izin	0,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	260 Izin	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									selaras		
							Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	0,00		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.436.736.843,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.436.736.843,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.436.736.843,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.436.736.843,00				
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.436.736.843,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.436.736.843,00				
90	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.175.901.943,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.175.901.943,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.148.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.148.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.109.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.109.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.856.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.856.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	909.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	909.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.638.800,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.638.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.526.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.526.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.364.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.364.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.668.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.668.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.588.149.125,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.588.149.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.120.422.500,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.120.422.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	119.975.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	119.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.550.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.220.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.220.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.104.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.104.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	259.747.284,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	259.747.284,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.160.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.965.620,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.965.620,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.175.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.175.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83.884.542,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83.884.542,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	397.267.681,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	397.267.681,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.750.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.567.681,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.567.681,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244.815.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244.815.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	57.415.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	57.415.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.440.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.440.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
91	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	151.150.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	151.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	75.538.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	75.538.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	13.249.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	13.249.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	4.914.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	4.914.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	19.291.000,00		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	19.291.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	156.428.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	156.428.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	113.696.000,00		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	113.696.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
92	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	38.045.900,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	38.045.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.181.900,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.181.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.452.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	26.371.900,00		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	26.371.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	6.898.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	6.898.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.214.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.214.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	3.324.000,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	3.324.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
93	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	65.110.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	65.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	12.625.000,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	12.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.224.000,00		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.224.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	3.531.000,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	3.531.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	11.987.000,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	11.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	8.757.000,00		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	8.757.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	69.709.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	69.709.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	34.506.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	34.506.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	4.152.000,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	4.152.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.056.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.056.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	4.215.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	4.215.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.975.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	3.669.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	3.669.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
94	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	6.529.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	6.529.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	9.273.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	9.273.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.626.000,00		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.626.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									selaras		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	2.903.000,00		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	2.903.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
						Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			8.000.866.314,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			8.000.866.314,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00				
95	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	100 Persentase	37.996.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	100 Persentase	37.996.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.978.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.978.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.162.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.162.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.911.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.911.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	985.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	985.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.043.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.043.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.101.200,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.101.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.026.200,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.026.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.598.735.244,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.598.735.244,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.372.482.638,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.372.482.638,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	146.060.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	146.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.336.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.336.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.110.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.182.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.182.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	12 bulan	7.494.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	12 bulan	7.494.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.968.500,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.968.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.480.200,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.480.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.620.400,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.620.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2					NON URUSAN			8.000.866.314,00	NON URUSAN			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.000.866.314,00				

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
96	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00				
97	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.160.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.160.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	37.986.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	37.986.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.702.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.702.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2					NON URUSAN			8.000.866.314,00	NON URUSAN			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.000.866.314,00				
98	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00				
99	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.170.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.170.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	76.441.496,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	76.441.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	542.184.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	542.184.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	52.843.950,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	52.843.950,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.012.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.012.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	85.394.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	85.394.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	14.520.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	14.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2					NON URUSAN			8.000.866.314,00	NON URUSAN			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.000.866.314,00				
100	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00				
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00				
101	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
102	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	undefined undefined	103.800.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	undefined undefined	103.800.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	83.888.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	83.888.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									selaras		
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.400.000,00		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	62.400.000,00		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	62.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
103	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	9,00 Persentase	2.702.190.530,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	9,00 Persentase	2.702.190.530,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	100 persentase	703.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	100 persentase	703.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	212.670.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	212.670.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	91.000.000,00		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	91.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									selaras		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	189.770.000,00		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	189.770.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persentase	248.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persentase	248.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									selaras		
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	246.000.000,00		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	246.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	111.195.130,00		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	111.195.130,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	100 Persentase	497.077.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	100 Persentase	497.077.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									selaras		
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	847.825.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	847.825.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	689.083.400,00		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	689.083.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	24.767.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	24.767.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persentase	282.484.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persentase	282.484.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	68.280.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	68.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									selaras		
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	84.000.000,00		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	84.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
104	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	1.020.900.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	1.020.900.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	100 Persentase	815.888.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	100 Persentase	815.888.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas									selaras		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	181.200.000,00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	181.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									selaras		
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	839.700.000,00		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	839.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan									selaras		
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	0,00		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
						Dinas Perhubungan			18.369.723.010,00	Dinas Perhubungan			18.369.723.010,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.369.723.010,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.369.723.010,00				
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			18.369.723.010,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			18.369.723.010,00				
105	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.639.722.110,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.639.722.110,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.298.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.298.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	216.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	216.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.980.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.648.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.648.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.644.592.557,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.644.592.557,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.277.841.210,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.277.841.210,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	184.330.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	184.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	804.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	804.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.680.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.680.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.397.700,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.397.700,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.200.312.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.200.312.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	384.887.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	384.887.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.876.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.876.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	92.381.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	92.381.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	164.928.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	164.928.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	352.777.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	352.777.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57.960.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.307.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.307.200,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46.980.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	338.740.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	338.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	183.830.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	183.830.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.522.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
106	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	100 Persen	11.702.600.900,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	100 Persen	11.702.600.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	100 Persen	1.002.448.000,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	100 Persen	1.002.448.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.604.000,00		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.604.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	100 Persen	4.857.177.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	100 Persen	4.857.177.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	5.088.400.000,00		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	5.088.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	5.449.538.900,00		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	5.449.538.900,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	175.830.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	175.830.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									selaras		
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	57.000.000,00		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	57.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	247.547.500,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	247.547.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	83.456.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	83.456.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	743.342.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	743.342.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	69.298.000,00		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	69.298.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	13.920.000,00		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	13.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji									selaras		
							Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	49.524.000,00		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	49.524.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	500.550.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	500.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	253.800.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	253.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.310.000,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
107	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	27.400.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	27.400.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	52.710.000,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	52.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									selaras		
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	27.400.000,00		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	27.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			9.413.440.346,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			9.413.440.346,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.413.440.346,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.413.440.346,00				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.931.855.546,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.931.855.546,00				
108	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	7.791.105.546,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	7.791.105.546,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	31.941.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	31.941.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.358.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.358.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.844.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.058.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.058.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	722.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	722.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.250.400,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.250.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	12 Bulan	4.994.366.916,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	12 Bulan	4.994.366.916,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.709.403.546,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.709.403.546,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	196.358.800,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	196.358.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.844.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.065.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.065.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	611.332.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	611.332.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.599.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.599.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.159.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.159.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.794.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.794.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.673.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.673.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	35.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.276.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.276.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.210.365.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.210.365.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	174.100.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	174.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.143.295.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.143.295.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.940.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.632.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.632.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	215.632.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	215.632.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.473.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.473.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106.745.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106.745.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
109	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	77,65 POIN	922.433.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	77,65 POIN	922.433.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	12 Laporan	1.266.277.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	12 Laporan	1.266.277.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									selaras		
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	671.879.000,00		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	671.879.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	24.298.000,00		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	24.298.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									selaras		
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	119.710.000,00		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	119.710.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									selaras		
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	8.072.000,00		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	8.072.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									selaras		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	98.474.900,00		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	98.474.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
110	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	2.5 INDEKS	218.316.100,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	2.5 INDEKS	218.316.100,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	25 Dokumen	303.753.000,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	25 Dokumen	303.753.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	7.331.000,00		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	7.331.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	32.839.000,00		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	32.839.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									selaras		
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	60.212.000,00		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	60.212.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	16.157.000,00		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	16.157.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									selaras		
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	95.252.100,00		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	95.252.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	6.525.000,00		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	6.525.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			276.448.800,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			276.448.800,00				
111	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3 anka	276.448.800,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3 anka	276.448.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	82 Persentase	254.534.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	82 Persentase	254.534.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									selaras		
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	38.539.800,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	38.539.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									selaras		
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	78.683.000,00		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	78.683.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									selaras		
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	127.891.000,00		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	127.891.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									selaras		
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	22.685.000,00		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	22.685.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	8.650.000,00		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	8.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			205.136.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			205.136.000,00				
112	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	1 POIN	205.136.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	1 POIN	205.136.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	33 Dokumen	169.540.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	33 Dokumen	169.540.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	63.540.000,00		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	63.540.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	19.234.000,00		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	19.234.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	36.203.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	36.203.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	8.326.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	8.326.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	3 Dokumen	104.840.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	3 Dokumen	104.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	77.833.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	77.833.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
						Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			8.372.674.612,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			8.372.674.612,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.416.491.112,00				
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.416.491.112,00				
113	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	91.464.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	91.464.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.348.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.348.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.200.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.916.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.916.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.399.952.370,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.399.952.370,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	4.935.736.276,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	4.935.736.276,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	187.680.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	187.680.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.932.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.932.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.932.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.932.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	15.468.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	15.468.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.468.000,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.468.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	0,00		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	65.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	10.175.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	10.175.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	228.107.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	228.107.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.734.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.734.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	200.214.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	200.214.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	47.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	47.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	18.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	18.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.635.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.635.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	182.800.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	182.800.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.200.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.732.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.732.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	39.992.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	39.992.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	179.293.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	179.293.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
114	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	19.440.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	19.440.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	19.440.000,00		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	19.440.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
115	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	48.310.200,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	48.310.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.537.200,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.537.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	48.310.200,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	48.310.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
116	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	57.200.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	57.200.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	16.200.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	16.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	57.200.000,00		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	57.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
117	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	60.872.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	60.872.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	132.630.200,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	132.630.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	14.760.000,00		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	14.760.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	46.112.200,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	46.112.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
118	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	571.069.600,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	571.069.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	516.209.600,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	516.209.600,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro									selaras		
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	571.069.600,00		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	571.069.600,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			956.183.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			956.183.500,00				
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			487.543.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			487.543.500,00				
119	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									selaras		
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
120	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	256.226.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	256.226.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	168.866.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	168.866.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									selaras		
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	205.466.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	205.466.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	64.800.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	64.800.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									selaras		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	43.200.000,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	43.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									selaras		
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	7.560.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	7.560.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
121	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	78.192.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	78.192.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	136.980.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	136.980.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									selaras		
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	78.192.000,00		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	78.192.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			468.640.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			468.640.000,00				
122	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	460.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	460.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	565.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	565.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	60.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	400.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
123	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	8.640.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	8.640.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	17.280.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	17.280.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	8.640.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	8.640.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						UPT Sarana Distribusi Perdagangan			8.372.674.612,00	UPT Sarana Distribusi Perdagangan			8.372.674.612,00				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			956.183.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			956.183.500,00				
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			487.543.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			487.543.500,00				
124	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.514.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.514.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.476.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.476.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.200.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.190.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.190.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.745.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.745.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	105.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	105.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						UPT PLUT-KUMKM			8.372.674.612,00	UPT PLUT-KUMKM			8.372.674.612,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.416.491.112,00				
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.416.491.112,00				
125	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	692.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	692.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.907.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.907.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.144.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.144.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.262.036,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.262.036,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	89.976.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	89.976.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.090.505.149,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.090.505.149,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.090.505.149,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.090.505.149,00				
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.090.505.149,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.090.505.149,00				
126	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 persen	3.911.902.349,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 persen	3.911.902.349,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 persen	77.311.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 persen	77.311.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.924.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.924.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.573.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.573.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.512.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.512.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.559.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.559.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.762.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.762.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	17.065.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	17.065.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	70 persen	3.511.582.282,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	70 persen	3.511.582.282,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.286.394.549,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.286.394.549,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.308.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.308.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.051.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.051.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 persen	204.519.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 persen	204.519.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.508.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.508.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.237.100,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.237.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.167.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.167.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	97.486.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	97.486.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	50 persen	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	50 persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	50 persen	387.903.700,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	50 persen	387.903.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.082.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.082.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.421.700,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.421.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	75 persen	43.610.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	75 persen	43.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	37.400.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	37.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.210.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
127	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
128	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5 persen	17.604.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5 persen	17.604.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	1871 pelaku usaha	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	1871 pelaku usaha	35.023.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	17.604.000,00		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	17.604.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
129	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	8 persen	85.297.200,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	8 persen	85.297.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	2373 pelaku usaha	134.564.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	2373 pelaku usaha	134.564.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	67.159.100,00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	67.159.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	10.533.900,00		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	10.533.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	7.604.200,00		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	7.604.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
130	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5 persen	43.342.800,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5 persen	43.342.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	170 pelaku usaha	84.867.500,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	170 pelaku usaha	84.867.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	43.342.800,00		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	43.342.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
131	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 persen	32.358.800,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 persen	32.358.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	55.069.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	55.069.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	32.358.800,00		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	32.358.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.105.714.598,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.105.714.598,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.105.714.598,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.105.714.598,00				
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.916.337.968,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.916.337.968,00				
132	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	undefined undefined	4.950.755.368,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	undefined undefined	4.950.755.368,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	100 persen	19.036.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	100 persen	19.036.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.847.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.847.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.834.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.834.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.331.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.331.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	814.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	814.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.494.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.494.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	36 Orang / Bulan	4.189.154.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	36 Orang / Bulan	4.189.154.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.988.583.030,70		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.988.583.030,70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.322.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.322.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.722.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.722.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.800.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	1 Paket	40.600.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	1 Paket	40.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	undefined undefined	383.527.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	undefined undefined	383.527.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.417.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.417.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.789.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.789.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.243.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.243.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.113.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.113.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.532.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.532.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	129.700.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	129.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.838.000,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.838.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	328.716.597,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	328.716.597,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.134.237,30		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.134.237,30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	104.550.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	104.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	453.110.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	453.110.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	68.510.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	68.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.800.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	26.400.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	26.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	124.430.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	124.430.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
133	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	6 Perpustakaan	965.582.600,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	6 Perpustakaan	965.582.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	12 Perpustakaan	421.302.900,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	12 Perpustakaan	421.302.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	27.981.000,00		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	27.981.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	68.636.800,00		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	68.636.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	29.751.000,00		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	29.751.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	101.468.400,00		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	101.468.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	10.164.000,00		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	10.164.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	15.082.000,00		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	15.082.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	154.081.900,00		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	154.081.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									selaras		
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	23.480.800,00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	23.480.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	1000 orang	272.695.500,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	1000 orang	272.695.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	1.620.400,00		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	1.620.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	206.057.900,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	206.057.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	327.258.400,00		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	327.258.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			189.376.630,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			189.376.630,00				
134	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	186 undefined Berkas undefined	178.757.730,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	186 undefined Berkas undefined	178.757.730,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	170.586.275,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	170.586.275,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	19.454.125,00		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	19.454.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	11.711.665,00		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	11.711.665,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	112.966.200,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	112.966.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	19.232.740,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	19.232.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									selaras		
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	11.667.740,00		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	11.667.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	42.267.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	42.267.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									selaras		
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	6.444.000,00		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	6.444.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	16.514.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	16.514.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
135	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	100 Persen	8.541.900,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	100 Persen	8.541.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	12.264.900,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	12.264.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									selaras		
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	0,00		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	8.541.900,00		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	8.541.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									selaras		
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	0,00		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									selaras		
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0,00		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
136	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	2.077.000,00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	2.077.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	3.442.000,00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	3.442.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	0,00		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	2.077.000,00		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	2.077.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
						Dinas Kelautan dan Perikanan			4.739.896.787,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			4.739.896.787,00				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.739.896.787,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.739.896.787,00				
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.739.896.787,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.739.896.787,00				
137	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.218.432.487,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.218.432.487,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	30.831.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	30.831.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.846.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.846.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.768.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.768.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.723.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.723.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.788.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.788.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.878.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.878.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.499.800,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.499.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.401.300,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.401.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.656.438.385,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.656.438.385,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.382.929.797,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.382.929.797,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.115.900,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.115.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.329.100,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.329.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.378.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.378.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	250.441.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	250.441.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.296.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.296.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	7.140.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	7.140.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	148.300.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	148.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	81.805.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	81.805.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.675.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.675.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.967.990,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.967.990,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.119.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.119.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.421.490,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.421.490,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	608.405.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	608.405.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134.997.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134.997.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.830.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.830.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	255.995.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	255.995.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	3	25	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	0,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
138	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	160.225.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	160.225.200,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	182.255.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	182.255.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									selaras		
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	105.822.000,00		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	105.822.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									selaras		
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	34.875.000,00		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	34.875.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17.582.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17.582.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	4.121.000,00		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	4.121.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	4.959.200,00		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	4.959.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	5.867.900,00		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	5.867.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.463.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.463.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT									selaras		
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	4.580.100,00		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	4.580.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
139	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	141.168.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	141.168.500,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	92.169.900,00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	92.169.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	37.275.000,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	37.275.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5.714.900,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5.714.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									selaras		
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	7.963.000,00		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	7.963.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	136.849.600,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	136.849.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	6.414.000,00		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	6.414.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	33.591.000,00		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	33.591.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	6.328.800,00		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	6.328.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	35.495.800,00		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	35.495.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									selaras		
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	8.386.000,00		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	8.386.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
140	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	220.070.600,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	220.070.600,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	306.071.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	306.071.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	127.942.500,00		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	127.942.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	70.464.000,00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	70.464.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	44.394.500,00		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	44.394.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	109.704.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	109.704.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	34.937.200,00		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	34.937.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	12.796.400,00		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	12.796.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			7.702.417.007,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			7.702.417.007,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.223.848.984,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.223.848.984,00				
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			5.223.848.984,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			5.223.848.984,00				
141	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	10 %	351.175.410,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	10 %	351.175.410,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	1 Kegiatan	94.436.300,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	1 Kegiatan	94.436.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									selaras		
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	92.683.300,00		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	92.683.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	10 %	403.751.400,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	10 %	403.751.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	141.335.400,00		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	141.335.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									selaras		
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	117.156.710,00		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	117.156.710,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
142	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	50 %	71.636.600,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	50 %	71.636.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2 Objek	90.392.600,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2 Objek	90.392.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	51.892.600,00		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	51.892.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan	19.744.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
143	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 Persen %	4.801.036.974,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 Persen %	4.801.036.974,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	32.773.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.817.900,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.817.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.466.140,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.466.140,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.869.200,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.869.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.448.970.390,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.448.970.390,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.969.892.584,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.969.892.584,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.363.750,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.363.750,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.877.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.877.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.840.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.840.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.215.800,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.215.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	503.016.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	60.452.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	60.452.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	75.684.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	75.684.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.016.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.016.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.995.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.995.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	230.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	143.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	143.700.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	153.780.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	153.780.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	31.836.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	31.836.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.110.560,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.110.560,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.900.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.900.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3					NON URUSAN			2.478.568.023,00	NON URUSAN			2.478.568.023,00				
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.478.568.023,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.478.568.023,00				
144	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 Persen %	4.801.036.974,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 Persen %	4.801.036.974,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	32.773.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.448.970.390,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.448.970.390,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	0,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	503.016.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	230.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	153.780.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	153.780.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.478.568.023,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.478.568.023,00				
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.478.568.023,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.478.568.023,00				
145	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	10 Persen	887.097.443,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	10 Persen	887.097.443,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	2 Lokasi	27.130.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	2 Lokasi	27.130.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.566.200,00		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.566.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	2 Kawasan	588.188.000,00	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	2 Kawasan	588.188.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.878.200,00		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.878.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	597.998.200,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	597.998.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	100 Persen	305.649.841,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	100 Persen	305.649.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	256.654.843,00		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	256.654.843,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
146	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	100 %	1.333.408.025,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	100 %	1.333.408.025,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	8 Kegiatan	977.190.464,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	8 Kegiatan	977.190.464,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	35.600.550,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	35.600.550,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	265.975.975,00		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	265.975.975,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	1.031.831.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	1.031.831.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
147	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	30 %	258.062.555,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	30 %	258.062.555,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	80 Orang	336.227.600,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	80 Orang	336.227.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	73.731.900,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	73.731.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	63.482.400,00		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	63.482.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	6.577.320,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	6.577.320,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	2 Orang	117.273.479,00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	2 Orang	117.273.479,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	114.270.935,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	114.270.935,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
						Dinas Pertanian			22.020.595.491,00	Dinas Pertanian			22.020.595.491,00				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.020.595.491,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.020.595.491,00				
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			22.020.595.491,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			22.020.595.491,00				
148	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	13.805.180.979,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	13.805.180.979,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	41.907.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	41.907.800,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen Dokumen	8.309.500,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen Dokumen	8.309.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.778.600,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.778.600,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.761.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.761.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.476.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.476.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	844.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	844.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	605.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	605.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.443.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.443.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	100 Persen	13.142.327.702,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	100 Persen	13.142.327.702,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	12.782.470.726,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	12.782.470.726,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	244.440.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	244.440.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.097.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.097.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	670.100,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	670.100,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.151.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.151.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	100 Persen	10.164.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	100 Persen	10.164.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.356.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.356.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	100 Persen	21.807.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	100 Persen	21.807.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	11.148.100,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	11.148.100,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian	100 Persen	415.808.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian	100 Persen	415.808.400,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	531.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	531.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.513.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.513.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.652.500,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.652.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	72.276.453,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	72.276.453,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	92.124.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	92.124.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	1.904.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	1.904.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	452.350.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	452.350.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.850.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.850.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	82.580.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	82.580.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	68.200.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	68.200.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.580.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.580.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
149	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	29,46 54,70 8,21 persen persen persen	4.200.509.120,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	29,46 54,70 8,21 persen persen persen	4.200.509.120,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	2 Laporan	2.974.188.080,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	2 Laporan	2.974.188.080,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									selaras		
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.130.993.320,00		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.130.993.320,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									selaras		
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	141.540.000,00		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	141.540.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	8.004.100,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	8.004.100,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									selaras		
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	4.242.300,00		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	4.242.300,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	6 Laporan	948.544.950,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	6 Laporan	948.544.950,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									selaras		
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 0	810.190.800,00		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 0	810.190.800,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									selaras		
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	4.947.000,00		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	4.947.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	4 Laporan	27.916.300,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	4 Laporan	27.916.300,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									selaras		
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	108.595.700,00		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	108.595.700,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	15 ekor	0,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	15 ekor	0,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									selaras		
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15 Ekor	0,00		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15 Ekor	0,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
150	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50% Persen	3.099.678.075,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50% Persen	3.099.678.075,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	23 Paket	4.064.357.075,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	23 Paket	4.064.357.075,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									selaras		
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	23 dokumen Laporan	3.099.678.075,00		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	23 dokumen Laporan	3.099.678.075,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
151	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	58,36 Persen	135.692.097,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	58,36 Persen	135.692.097,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2 Laporan	119.823.432,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2 Laporan	119.823.432,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									selaras		
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	11.348.747,00		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	11.348.747,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 wilayah Laporan	56.950.095,00		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 wilayah Laporan	56.950.095,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50 Persen	24.534.255,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50 Persen	24.534.255,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									selaras		
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	20.692.755,00		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	20.692.755,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	50 persen	87.678.500,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	50 persen	87.678.500,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									selaras		
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	32.699.900,00		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	32.699.900,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									selaras		
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	25 Unit Usaha	14.000.600,00		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	25 Unit Usaha	14.000.600,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
152	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100 100 persen Persen	24.521.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100 100 persen Persen	24.521.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	68 Ha	34.046.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	68 Ha	34.046.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66 Ha	16.794.500,00		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66 Ha	16.794.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	7.726.500,00		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	7.726.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
153	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100 Persen	36.870.000,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100 Persen	36.870.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Dokumen	43.530.000,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Dokumen	43.530.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									selaras		
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	36.870.000,00		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	36.870.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
154	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10 Persen	718.144.220,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10 Persen	718.144.220,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	1 Laporan	517.127.820,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	1 Laporan	517.127.820,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	366.295.700,00		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	366.295.700,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	282.760.720,00		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	282.760.720,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	69.087.800,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	69.087.800,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
						Sekretariat Daerah			48.542.538.281,00	Sekretariat Daerah			48.542.538.281,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			48.542.538.281,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			48.542.538.281,00				
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			48.542.538.281,00	SEKRETARIAT DAERAH			48.542.538.281,00				
155	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	33.772.739.413,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	33.772.739.413,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	13.104.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	13.104.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.322.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.322.300,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.921.500,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.921.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.520.496.407,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.520.496.407,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.246.842.640,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.246.842.640,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	631.481.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	631.481.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.286.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.286.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.938.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.938.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	18.644.100,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	18.644.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.650.576.476,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.650.576.476,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.721.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.721.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.291.190,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.291.190,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88.109.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88.109.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.318.757.250,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.318.757.250,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	287.449.866,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	287.449.866,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	411.430.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	411.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									selaras		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	1.249.130.000,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	1.249.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.502.119.980,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.502.119.980,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	244.511.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	244.511.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.451.849.667,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.451.849.667,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.897.618.263,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.897.618.263,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.580.257.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.580.257.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	453.920.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	453.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	669.180.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	669.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	171.980.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	171.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	946.717.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	946.717.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.040.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.198.849.985,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.198.849.985,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	537.849.985,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	537.849.985,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.981.514.900,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.981.514.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	922.750.825,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	922.750.825,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	725.690.527,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	725.690.527,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	399.378.000,00	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	399.378.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	112.045.800,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	112.045.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	30.787.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	30.787.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	28.945.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	28.945.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	28.750.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	28.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30.524.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30.524.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	3.273.773.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	3.273.773.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.400.166.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.400.166.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	809.817.700,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	809.817.700,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									selaras		
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	446.302.400,00		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	446.302.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
156	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	12.818.921.175,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	12.818.921.175,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.910.756.750,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.910.756.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	1.552.556.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	1.552.556.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	324.967.125,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	324.967.125,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	258.197.050,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	258.197.050,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	8.948.264.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	8.948.264.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	181.817.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	181.817.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	764.563.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	764.563.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.217.583.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.217.583.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									selaras		
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	342.050.800,00		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	342.050.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									selaras		
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	208.162.000,00		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	208.162.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan									selaras		
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	238.342.500,00		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	238.342.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
157	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	1.950.877.693,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	1.950.877.693,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	413.378.600,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	413.378.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	43.487.910,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	43.487.910,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	129.493.789,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	129.493.789,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	71.120.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	71.120.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	35.795.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	35.795.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	699.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	699.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.204.211.244,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.204.211.244,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	42.085.713,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	42.085.713,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	792.488.750,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	792.488.750,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	115.784.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	115.784.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	638.101.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	638.101.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	181.030.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	181.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	204.600.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	204.600.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	285.904.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	285.904.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	96.988.300,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	96.988.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	18.040.701,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	18.040.701,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	30.346.130,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	30.346.130,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
						Sekretariat DPRD			24.527.700.598,00	Sekretariat DPRD			24.527.700.598,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			24.527.700.598,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			24.527.700.598,00				
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			24.527.700.598,00	SEKRETARIAT DPRD			24.527.700.598,00				
158	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.902.230.098,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.902.230.098,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.758.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.758.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.983.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.983.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.998.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.998.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.439.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.439.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.716.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.716.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.785.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.785.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.236.098.735,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.236.098.735,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.681.671.958,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.681.671.958,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	280.413.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	280.413.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.146.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.146.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	735.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	735.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	499.239.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	499.239.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	399.525.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	399.525.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	760.684.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	760.684.500,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.237.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.237.800,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	645.250.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	645.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23.282.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23.282.200,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	834.328.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	834.328.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	116.677.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	116.677.500,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.662.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.662.800,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	94.337.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	94.337.100,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.327.526.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.327.526.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	45.355.740,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	45.355.740,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.130.570.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.130.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	373.905.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	373.905.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									selaras		
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	24.845.000,00		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	24.845.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	271.470.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	271.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	815.584.000,00	Layanan Administrasi DPRD	-	-	815.584.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	593.456.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	593.456.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
159	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	5.625.470.500,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	5.625.470.500,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	12 Dokumen	1.293.166.300,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	12 Dokumen	1.293.166.300,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	245.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	245.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	242.290.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	242.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.715.000,00		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.715.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	14.450.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	14.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.955.000,00		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.955.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	395.100.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	395.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	62.505.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	62.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	7.965.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	7.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	6.435.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	6.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									selaras		
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	7.965.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	7.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	22.365.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	22.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.324.495.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.324.495.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.177.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.177.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									selaras		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	164.900.000,00		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	164.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.626.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.626.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	209.400.000,00		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	209.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.284.660.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.284.660.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									selaras		
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.628.052.500,00		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.628.052.500,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	111.802.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	111.802.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.985.000,00		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.985.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	53.847.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	53.847.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	3.000.000.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.815.760.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.815.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD			
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			7.461.949.078,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			7.461.949.078,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.461.949.078,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.461.949.078,00				
	5	01				PERENCANAAN			7.461.949.078,00	PERENCANAAN			7.461.949.078,00				
160	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	A nilai	102.478.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	A nilai	102.478.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.256.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.256.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.197.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.197.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	4.550.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	4.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.350.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.300.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	17.450.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	17.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.842.225.478,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.842.225.478,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	140.602.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	140.602.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5					NON URUSAN			7.461.949.078,00	NON URUSAN			7.461.949.078,00				
	5	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.461.949.078,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.461.949.078,00				
161	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.461.949.078,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.461.949.078,00				
	5	01				PERENCANAAN			7.461.949.078,00	PERENCANAAN			7.461.949.078,00				
162	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.711.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.711.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.225.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.520.700,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.520.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	13.152.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	13.152.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	7.935.300,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	7.935.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.320.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100 persen	15.762.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100 persen	15.762.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.643.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.748.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.748.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	520.284.380,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	520.284.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.531.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.531.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.484.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.484.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.743.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.743.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	142.560.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	142.560.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	199.114.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	199.114.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	79.550.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	79.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.124.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.124.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.930.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.930.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	14.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	14.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	72.220.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	72.220.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	49.854.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	49.854.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.930.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.930.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
163	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	95 65 persen persen	525.485.000,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	95 65 persen persen	525.485.000,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	70 persen 95 persen	529.369.000,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	70 persen 95 persen	529.369.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									selaras		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	38.189.000,00		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	38.189.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	61.873.000,00		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	61.873.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	140.061.000,00		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	140.061.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	176.564.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	176.564.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	65 persen	177.062.000,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	65 persen	177.062.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	33.889.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	33.889.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	74.909.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	74.909.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
164	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	1.290.806.500,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	1.290.806.500,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95 persen	562.705.600,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95 persen	562.705.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	33.799.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	33.799.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	31.983.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	31.983.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	39.741.300,00		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	39.741.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	91.583.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	91.583.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	55.020.100,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	55.020.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	27.178.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	27.178.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95 persen	431.289.900,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95 persen	431.289.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	86.342.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	86.342.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	7.302.100,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	7.302.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	18.663.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	18.663.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	474.294.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	474.294.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	61.104.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	61.104.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	10.805.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	10.805.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 persen	498.473.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 persen	498.473.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	46.885.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	46.885.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	140.783.900,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	140.783.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	18.180.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	18.180.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	107.736.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	107.736.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	25.928.400,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	25.928.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	13.475.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	13.475.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			21.728.049.820,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			21.728.049.820,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.728.049.820,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.728.049.820,00				
	5	02				KEUANGAN			21.728.049.820,00	KEUANGAN			21.728.049.820,00				
165	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	15.050.437.947,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	15.050.437.947,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 %	43.650.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 %	43.650.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.799.500,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.799.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.418.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.418.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.566.300,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.566.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.385.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.385.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.057.300,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.057.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.307.500,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.307.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 %%	13.705.502.530,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 %%	13.705.502.530,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.014.411.175,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.014.411.175,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.249.032,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.249.032,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.335.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.335.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	146.710.500,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	146.710.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	19.865.900,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	19.865.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.139.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.139.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	824.976.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	824.976.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.817.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.817.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	327.332.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	327.332.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.676.300,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.676.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.100.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	181.764.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	181.764.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	611.853.300,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	611.853.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	369.267.840,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	369.267.840,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	37.296.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	37.296.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.854.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.854.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.402.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.402.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.128.940,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.128.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130.506.050,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130.506.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	51.271.250,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	51.271.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	44.219.750,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	44.219.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
166	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	100 %	3.877.293.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	100 %	3.877.293.400,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	2 Dokumen	1.402.048.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	2 Dokumen	1.402.048.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	21.610.700,00		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	21.610.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.522.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.522.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	29.335.200,00		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	29.335.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	124.070.500,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	124.070.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	64.432.400,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	64.432.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	101.436.000,00		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	101.436.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	698.956.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	698.956.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	19.674.900,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	19.674.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	34 PD	588.904.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	34 PD	588.904.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	28.739.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	28.739.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	41.052.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	41.052.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									selaras		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	36.280.000,00		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	36.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	63.375.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	63.375.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									selaras		
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	85.669.000,00		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	85.669.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	68.834.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	68.834.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	478.867.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	478.867.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	14.006.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	14.006.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									selaras		
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	11.829.700,00		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	11.829.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	90.809.100,00		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	90.809.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	51.509.400,00		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	51.509.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	103.302.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	103.302.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.849.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.849.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	100 %	2.139.400.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	100 %	2.139.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.077.550.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.077.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	179.068.300,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	179.068.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	113.449.600,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	113.449.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
167	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	83,09 %	1.120.306.409,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	83,09 %	1.120.306.409,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100 %	896.780.376,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100 %	896.780.376,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									selaras		
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	36.307.300,00		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	36.307.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.488.300,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.488.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.565.700,00		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.565.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.362.112,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.362.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	62.267.400,00		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	62.267.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	362.170.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	362.170.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	29.633.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	29.633.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	357.643.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	357.643.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	65.366.097,00		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	65.366.097,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	12.471.500,00		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	12.471.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.032.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.032.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
168	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	6.98 %	1.680.012.064,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	6.98 %	1.680.012.064,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	2.359.480.664,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	2.359.480.664,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	15.573.200,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	15.573.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	39.093.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	39.093.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	115.480.900,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	115.480.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	307.901.600,00		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	307.901.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	119.420.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	119.420.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	101.810.800,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	101.810.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	14.918.600,00		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	14.918.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	34.000.000,00		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	34.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	714.141.964,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	714.141.964,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	63.995.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	63.995.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	82.132.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	82.132.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	71.542.700,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	71.542.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.121.276.855,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.121.276.855,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.121.276.855,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.121.276.855,00				
	5	03				KEPEGAWAIAN			6.359.096.185,00	KEPEGAWAIAN			6.359.096.185,00				
169	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	5.301.462.585,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	5.301.462.585,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	74.698.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	74.698.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.052.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.052.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.459.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.459.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.924.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.924.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.406.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.406.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	31.517.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	31.517.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.582.838.430,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.582.838.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.342.684.585,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.342.684.585,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	133.959.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	133.959.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.547.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.547.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.146.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.146.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.163.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.163.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	58.430.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	58.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	28.430.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	28.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.400.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	459.817.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	459.817.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	22.700.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	22.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	60.285.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	60.285.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	680.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.020.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	70.600.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	70.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	121.600.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	121.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	157.810.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	157.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115.380.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115.380.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	168.970.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	168.970.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	37.190.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	37.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.370.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.810.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	171.230.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	171.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	72.570.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	72.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27.010.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27.010.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.220.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
170	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	undefined 70,01 undefined Indeks	1.057.633.600,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	undefined 70,01 undefined Indeks	1.057.633.600,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	100 Persen	781.441.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	100 Persen	781.441.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	332.035.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	332.035.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	18.065.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	18.065.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	140.835.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	140.835.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	34.631.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	34.631.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	100 Persen	229.122.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	100 Persen	229.122.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	175.811.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	175.811.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									selaras		
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	42.272.000,00		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	42.272.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	58 Persen	198.777.600,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	58 Persen	198.777.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									selaras		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	193.730.600,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	193.730.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	3.092.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	3.092.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	100 Persen	142.362.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	100 Persen	142.362.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	30.613.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	30.613.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									selaras		
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	11.364.000,00		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	11.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									selaras		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	12.745.000,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	12.745.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	52.640.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	52.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.762.180.670,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.762.180.670,00				
171	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	25 Persen	1.762.180.670,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	25 Persen	1.762.180.670,00		selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	5,18 Persen	67.190.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	5,18 Persen	67.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	51.060.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	51.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	6,23 Persen	2.223.511.750,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	6,23 Persen	2.223.511.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	1.711.120.670,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	1.711.120.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
						Badan Riset dan Inovasi Daerah			3.454.866.885,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah			3.454.866.885,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.454.866.885,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.454.866.885,00				

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.454.866.885,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.454.866.885,00				
172	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.684.991.485,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.684.991.485,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.768.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.768.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.533.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.533.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.220.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.220.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.067.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.067.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.006.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.006.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.461.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.461.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.698.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.698.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.783.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.783.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.382.671.457,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.382.671.457,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.050.725.461,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.050.725.461,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	152.624.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	152.624.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.830.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.830.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	15.696.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	15.696.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.892.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.892.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	48.334.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	48.334.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.320.800,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.320.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.320.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.320.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.818.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.818.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	442.890.740,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	442.890.740,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.747.240,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.747.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.333.300,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.333.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.073.880,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.073.880,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.147.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.147.200,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	21.497.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	21.497.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	168.022.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	168.022.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	680.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	680.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.191.950,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.191.950,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.836.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.836.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.853.504,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.853.504,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.559.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.559.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	78.765.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	78.765.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.702.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.702.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	12.820.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	12.820.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.905.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.905.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
173	5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	10 18 Angka Angka	769.875.400,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	10 18 Angka Angka	769.875.400,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	31 Angka	518.469.400,00	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	31 Angka	518.469.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	40.820.000,00		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	40.820.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	33.632.000,00		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	33.632.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	164.322.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	164.322.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	56.051.400,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	56.051.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	44.870.000,00		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	44.870.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	22.900.000,00		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	22.900.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	165 Angka	731.254.000,00	Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	165 Angka	731.254.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	203.320.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	203.320.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	61.097.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	61.097.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	31.233.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	31.233.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	44.710.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	44.710.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	66.920.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	66.920.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	0,00		Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	0,00		Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	0,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	0,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
						Inspektorat			11.812.888.254,00	Inspektorat			11.812.888.254,00				
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.812.888.254,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.812.888.254,00				
	6	01				INSPEKTORAT DAERAH			11.812.888.254,00	INSPEKTORAT DAERAH			11.812.888.254,00				
174	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	10.901.614.554,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	10.901.614.554,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 Persen	33.460.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 Persen	33.460.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.780.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.077.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.077.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.213.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 Persen	9.433.855.794,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 Persen	9.433.855.794,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	8.588.164.754,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	8.588.164.754,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	233.520.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	233.520.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.213.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	14.382.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	14.382.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.213.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	942.793.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	942.793.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	450.662.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	450.662.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.961.837.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.961.837.400,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.825.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.825.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	608.970.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	608.970.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	32.758.500,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	32.758.500,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86.694.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86.694.800,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	42.670.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	42.670.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504.301.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504.301.500,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.385.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.385.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	223.662.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	223.662.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.954.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.954.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.270.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.270.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	109.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	109.500.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	129.770.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	129.770.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	106.620.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	106.620.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.205.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.205.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
175	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	10,36 Persen	676.936.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	10,36 Persen	676.936.700,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	98 Persen	826.350.800,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	98 Persen	826.350.800,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	17.100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	17.100.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	10.800.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	10.800.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	351.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	351.000.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	13.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	13.500.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									selaras		
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	106.080.000,00		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	106.080.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	89.356.700,00		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	89.356.700,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16,22 Persen	99.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16,22 Persen	99.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	89.100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	89.100.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
176	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	3 Level	234.337.000,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	3 Level	234.337.000,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	49 Persen	510.137.000,00	Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	49 Persen	510.137.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	61.200.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	61.200.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	14.580.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	14.580.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	122.136.000,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	122.136.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	36.421.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	36.421.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
						Kecamatan RasanaE Barat			11.605.721.405,00	Kecamatan RasanaE Barat			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				
177	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.278.906.955,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.278.906.955,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	40.356.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	40.356.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.400.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.400.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.022.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.022.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.976.800,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.976.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.562.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.562.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.645.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.645.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.652.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.652.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.831.827,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.831.827,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.319.989.205,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.319.989.205,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	262.790.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	262.790.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.464.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.464.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	203.715.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	203.715.500,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.765.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.765.500,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.735.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.735.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.187.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.187.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.280.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.280.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	613.389.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	613.389.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	249.964.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	249.964.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.361.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.361.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	218.781.300,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	218.781.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	62.751.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	62.751.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	40.691.350,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	40.691.350,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.340.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.340.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.330.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.330.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
178	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 tahun	26.492.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 tahun	26.492.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	33.561.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	33.561.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.492.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.492.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
179	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Kelurahan	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Kelurahan	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.644.200,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.644.200,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	123.223.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	123.223.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	107.761.100,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	107.761.100,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
180	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	100 %	75.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	100 %	75.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	100 %	63.780.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	100 %	63.780.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kelurahan Paruga			11.605.721.405,00	Kelurahan Paruga			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				
181	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	540.760.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	540.760.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kelurahan Dara			11.605.721.405,00	Kelurahan Dara			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				
182	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	552.673.250,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	552.673.250,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kelurahan Sarae			11.605.721.405,00	Kelurahan Sarae			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
183	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.156.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.156.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kelurahan Tanjung			11.605.721.405,00	Kelurahan Tanjung			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				
184	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 %	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 %	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	534.414.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	534.414.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kelurahan Nae			11.605.721.405,00	Kelurahan Nae			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				
185	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	484.638.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	484.638.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kelurahan Pane			11.605.721.405,00	Kelurahan Pane			11.605.721.405,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00				
	7	01				KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			11.605.721.405,00				
186	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.274.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.274.900,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
						Kecamatan RasanaE Timur			13.262.163.030,00	Kecamatan RasanaE Timur			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
187	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7					NON URUSAN			13.262.163.030,00	NON URUSAN			13.262.163.030,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			13.262.163.030,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			13.262.163.030,00				
188	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
189	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7					NON URUSAN			13.262.163.030,00	NON URUSAN			13.262.163.030,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			13.262.163.030,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			13.262.163.030,00				
190	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
191	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.190.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.190.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	1 Tahun	9.531.720.930,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	1 Tahun	9.531.720.930,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.720.826.250,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.720.826.250,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	274.800.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	274.800.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	199.350.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	199.350.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.281.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.281.900,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.910.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.910.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.457.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.457.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	93.182.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	93.182.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.567.980,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.567.980,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	676.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	676.200.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.450.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.450.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
192	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.182.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.182.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	10.182.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	10.182.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.182.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.182.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
193	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.450.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.150.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.150.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	110.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
194	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	69.600.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	69.600.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	69.600.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	69.600.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.600.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.600.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Nungga			13.262.163.030,00	Kelurahan Nungga			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
195	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	389.984.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	389.984.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Lelamase			13.262.163.030,00	Kelurahan Lelamase			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
196	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	426.880.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	426.880.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Dodu			13.262.163.030,00	Kelurahan Dodu			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
197	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	417.330.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	417.330.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Lampe			13.262.163.030,00	Kelurahan Lampe			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
198	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	333.021.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	333.021.700,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Kodo			13.262.163.030,00	Kelurahan Kodo			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
199	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	353.377.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	353.377.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Kumbe			13.262.163.030,00	Kelurahan Kumbe			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
200	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	443.950.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	443.950.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Oi Fo'o			13.262.163.030,00	Kelurahan Oi Fo'o			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
201	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	365.195.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	365.195.500,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kelurahan Oi Mbo			13.262.163.030,00	Kelurahan Oi Mbo			13.262.163.030,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00				
	7	01				KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			13.262.163.030,00				
202	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	340.082.200,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	340.082.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
						Kecamatan Asakota			12.308.928.279,00	Kecamatan Asakota			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
203	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.514.171.079,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.514.171.079,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.561.322.815,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.561.322.815,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.519.551.279,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.519.551.279,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	467.731.800,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	467.731.800,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.050.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.510.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.510.500,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	0,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.185.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.185.400,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.681.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.681.600,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.706.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.706.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30.963.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30.963.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	460.204.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	460.204.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	113.028.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	113.028.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.530.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.530.200,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	207.038.700,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	207.038.700,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	105.066.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	105.066.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	69.530.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	69.530.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.650.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.650.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
204	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.387.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.387.500,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	27.972.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	27.972.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	750.500,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	750.500,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	17.637.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	17.637.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
205	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.198.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.198.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	28.839.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	28.839.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	107.813.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	107.813.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	90.580.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	90.580.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
206	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	37.698.800,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	37.698.800,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	42.240.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	42.240.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.698.800,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.698.800,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
207	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.936.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.936.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.852.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.852.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	1.936.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	1.936.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Kolo			12.308.928.279,00	Kelurahan Kolo			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
208	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	591.158.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	591.158.100,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Melayu			12.308.928.279,00	Kelurahan Melayu			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
209	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	560.811.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	560.811.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Jatiwangi			12.308.928.279,00	Kelurahan Jatiwangi			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
210	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	697.903.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	697.903.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Ule			12.308.928.279,00	Kelurahan Ule			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
211	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	635.314.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	635.314.600,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Jatibaru			12.308.928.279,00	Kelurahan Jatibaru			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
212	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	559.392.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	559.392.100,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Jatibaru Timur			12.308.928.279,00	Kelurahan Jatibaru Timur			12.308.928.279,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00				
	7	01				KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			12.308.928.279,00				
213	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	560.539.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	560.539.100,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kecamatan Mpunda			17.104.240.684,00	Kecamatan Mpunda			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
214	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	undefined undefined	12.912.763.384,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	undefined undefined	12.912.763.384,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined undefined	10.759.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined undefined	10.759.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.802.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.802.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.161.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.161.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.552.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.552.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined undefined	12.403.717.004,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined undefined	12.403.717.004,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.227.652.104,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.227.652.104,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	571.379.400,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	571.379.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.344.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.344.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.130.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.130.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	339.479.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	339.479.600,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.273.680,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.273.680,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.389.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.389.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.903.200,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.903.200,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.416.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.416.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	71.160.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	71.160.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	867.711.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	867.711.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	328.471.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	328.471.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73.296.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73.296.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	417.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	417.200.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	88.151.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	88.151.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	46.675.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	46.675.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.078.500,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.078.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	13.880.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	13.880.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
215	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 Tahun	43.002.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 Tahun	43.002.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	1 Tahun	40.829.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	1 Tahun	40.829.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.879.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.879.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9.675.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9.675.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	undefined undefined	20.640.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	undefined undefined	20.640.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	14.448.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	14.448.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
216	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	undefined undefined	14.329.200,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	undefined undefined	14.329.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.430.800,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.430.800,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	6.060.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	6.060.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	undefined undefined	128.016.300,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	undefined undefined	128.016.300,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.698.300,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.698.300,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
217	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	undefined undefined	21.612.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	undefined undefined	21.612.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined	23.160.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined	23.160.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.612.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.612.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
218	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	undefined undefined	9.030.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	undefined undefined	9.030.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	undefined undefined	12.900.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	undefined undefined	12.900.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	9.030.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	9.030.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Penatoi			17.104.240.684,00	Kelurahan Penatoi			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
219	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	21.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	21.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	420.196.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	420.196.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Lewirato			17.104.240.684,00	Kelurahan Lewirato			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
220	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	332.995.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	332.995.900,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Sadia			17.104.240.684,00	Kelurahan Sadia			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
221	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	393.659.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	393.659.900,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Mande			17.104.240.684,00	Kelurahan Mande			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
222	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	429.121.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	429.121.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Panggi			17.104.240.684,00	Kelurahan Panggi			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
223	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	331.414.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	331.414.700,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Sambinae			17.104.240.684,00	Kelurahan Sambinae			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
224	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	60.800.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	60.800.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	310.491.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	310.491.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Manggemaci			17.104.240.684,00	Kelurahan Manggemaci			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	396.432.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	396.432.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Monggonao			17.104.240.684,00	Kelurahan Monggonao			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.943.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.943.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.461.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.461.900,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Santi			17.104.240.684,00	Kelurahan Santi			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.120.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.120.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	339.686.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	339.686.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kelurahan Matakando			17.104.240.684,00	Kelurahan Matakando			17.104.240.684,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			17.104.240.684,00				
228	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	undefined undefined	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.911.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.911.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	393.110.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	393.110.100,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kecamatan Raba			19.741.171.857,00	Kecamatan Raba			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
229	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	12 Dokumen	14.709.884.582,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	12 Dokumen	14.709.884.582,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	13.678.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	13.678.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.528.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.528.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.780.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.780.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.243.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.243.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.082.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.082.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.475.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.475.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.675.235.432,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.675.235.432,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.461.735.182,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.461.735.182,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	523.281.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	523.281.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	956.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	956.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	237.313.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	237.313.200,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.857.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.857.100,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.823.300,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.823.300,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.476.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.476.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	998.466.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	998.466.940,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70.450.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70.450.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	316.342.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	316.342.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	63.900.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	63.900.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.644.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.644.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	7					NON URUSAN			19.741.171.857,00	NON URUSAN			19.741.171.857,00				
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			19.741.171.857,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			19.741.171.857,00				
230	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.709.884.582,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.709.884.582,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
231	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	100 PERSEN	13.544.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	100 PERSEN	13.544.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	24.426.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	24.426.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	13.544.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	13.544.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
232	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 PERSEN	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 PERSEN	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.607.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.607.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	13.484.400,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	13.484.400,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 PERSEN	135.394.100,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 PERSEN	135.394.100,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	127.875.600,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	127.875.600,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
233	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	92.393.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	92.393.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	75.450.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	75.450.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	92.393.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	92.393.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Rabadompu Barat			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabadompu Barat			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
234	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	465.379.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	465.379.500,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Rabadompu Timur			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabadompu Timur			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
235	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	471.715.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	471.715.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Rabangodu Utara			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabangodu Utara			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
236	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	499.459.200,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	499.459.200,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Rabangodu Selatan			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabangodu Selatan			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
237	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	440.789.525,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	440.789.525,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Rontu			19.741.171.857,00	Kelurahan Rontu			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
238	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.359.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.359.800,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Penaraga			19.741.171.857,00	Kelurahan Penaraga			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
239	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	439.507.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	439.507.300,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Penanae			19.741.171.857,00	Kelurahan Penanae			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
240	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	444.457.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	444.457.600,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Ntobo			19.741.171.857,00	Kelurahan Ntobo			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
241	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	524.518.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	524.518.900,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Kendo			19.741.171.857,00	Kelurahan Kendo			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
242	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	362.382.850,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	362.382.850,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Nitu			19.741.171.857,00	Kelurahan Nitu			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
243	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	345.013.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	345.013.400,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Kelurahan Rite			19.741.171.857,00	Kelurahan Rite			19.741.171.857,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			19.741.171.857,00				
244	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	368.800.200,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	368.800.200,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			8.968.056.919,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			8.968.056.919,00				
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			8.968.056.919,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			8.968.056.919,00				
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.968.056.919,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.968.056.919,00				
245	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	4.111.871.197,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	4.111.871.197,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	75.889.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	75.889.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.393.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.393.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.834.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.834.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.823.100,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.823.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.224.700,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.224.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.491.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.491.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.658.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.658.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.572.655.330,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.572.655.330,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.326.050.086,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.326.050.086,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	206.240.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	206.240.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.820.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.820.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.161.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.161.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.160.100,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.160.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	29.360.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	29.360.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	271.680.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	271.680.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.714.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.714.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.360.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.360.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.997.400,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.997.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.597.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.597.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	86.225.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	86.225.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	141.573.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	141.573.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	30.414.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	30.414.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.780.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.780.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	75.150.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	75.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	227.444.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	227.444.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67.346.311,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67.346.311,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	19.500.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	19.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.930.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.930.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
246	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	88 %	460.752.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	88 %	460.752.000,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	7 dari 8 Klp	652.597.800,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	7 dari 8 Klp	652.597.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	14.975.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	14.975.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	22.035.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	22.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									selaras		
							Jumlah Paskibraka	73 Orang	402.762.000,00		Jumlah Paskibraka	73 Orang	402.762.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0,00		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	0,00		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	20.980.000,00		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	20.980.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
247	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80 %	1.423.955.560,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80 %	1.423.955.560,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masy	1.345.684.800,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masy	1.345.684.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.368.999.160,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.368.999.160,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	54.956.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	54.956.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
248	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91 %	1.307.062.725,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91 %	1.307.062.725,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136 dari 149 Klp	1.387.005.325,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136 dari 149 Klp	1.387.005.325,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.307.062.725,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.307.062.725,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
249	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	69 69 % %	77.456.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	69 69 % %	77.456.000,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 dari 43 Klp	177.652.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 dari 43 Klp	177.652.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	36.963.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	36.963.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	40.493.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	40.493.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
250	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	78 %	1.586.959.437,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	78 %	1.586.959.437,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025				RENCANA KERJA PERUBAHAN				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/ Tdk Selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	35 dari 45 Konflik	1.339.378.975,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	35 dari 45 Konflik	1.339.378.975,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	322.203.337,00		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	322.203.337,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	72.247.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	72.247.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	12.627.700,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	12.627.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.179.881.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.179.881.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
							J U M L A H	**1.086.125.432.816,00**				**1.086.125.432.816,00**				

Lampiran 9

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
DALAM RENJA DAN RKA OPD

KABUPATEN/KOTA: KOTA BIMA

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
					.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			228.361.425.477,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			257.674.727.990,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			225.728.725.477,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			254.316.543.990,00				
	1	01			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			225.728.725.477,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			254.316.543.990,00				
1	1	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	173.006.501.927,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	214.610.977.790,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	378.359.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	129.610.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.992.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	47.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.203.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.876.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	16.090.500,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	86.422.100,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	29.522.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	178.775.500,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	37.869.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	170.813.487.727,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	212.768.051.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	170.632.902.827,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	212.576.540.640,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.597.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	169.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.883.900,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	7.424.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.564.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.838.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.320.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	6.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.220.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.199.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	40.490.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	63.359.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.560.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.199.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.430.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36.999.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.500.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	23.161.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	331.956.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	299.427.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	34.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	244.200.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	238.102.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras	selaras	selaras
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	15.600.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	12.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	38.156.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	18.785.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.146.599.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.017.056.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	285.254.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	16.230.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	17.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.995.700,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	153.036.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114.300.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	122.028.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	430.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	502.520.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	146.820.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	146.880.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	165.958.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	167.204.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	136.058.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.304.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.900.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	129.650.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.268.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	49.800.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	64.788.750,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	8.850.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	13.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	71.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	1	01	02		.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	-	52.722.223.550,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	-	39.705.566.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	20.653.275.000,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-	21.170.319.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.003.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	3.061.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									Tidak selaras		
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	100.000.000,00		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	78.000.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	101.333.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.050.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.740.831.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	20.000.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	128.715.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.863.520.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.874.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	30 Orang	8.700.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	63.540.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	20.375.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	18.600.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	16.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	140.965.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	7.840.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	22.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									Tidak selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	2.091.115.000,00		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	14.186.279.100,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	8.951.263.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	3.718.671.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	1.282.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									Tidak selaras		
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	2.695.000.000,00		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	111.715.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	88.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	473.829.100,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	439.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	82.500.000,00		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	30.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	9.800.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	27.790.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	38.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	13.379.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	6.224.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	20.210.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	26.000.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	37.529.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	23.260.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	10.205.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	15.943.343.450,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	7.044.234.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	10.010.857.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	2.046.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	52.000.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	16.816.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	768.785.500,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	454.627.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	238.180.950,00		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	247.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.594.670.000,00		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.078.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	56.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	56.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	18.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	15.900.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	23.500.000,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	19.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	0,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									selaras		
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	180.650.000,00		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	108.403.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	1.939.326.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.539.749.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	46.300.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	31.738.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	1.761.050.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	2.414.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	8.970.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	12.430.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	11.500.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	5.438.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	12.600.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	8.413.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	86.476.000,00		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	79.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
3	1	01	04		-	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.632.700.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.358.184.000,00				
	2	19			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.632.700.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.358.184.000,00				
4	2	19	02		-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	252.700.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	263.952.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	227.700.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	144.238.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	180.700.000,00		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	117.758.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	32.000.000,00		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	26.480.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	25.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	119.714.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	25.000.000,00		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	119.714.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
5	2	19	03		.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.380.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	3.094.232.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	32.000.000,00		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	248.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	459.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									selaras		
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	198.000.000,00		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	399.232.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									selaras		
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	50.000.000,00		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1.600.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.600.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	500.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional									selaras		
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
					,	Dinas Kesehatan			117.581.333.359,00	Dinas Kesehatan			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
6	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	-	179.566.976,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	-	124.451.900,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	50.965.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	36.458.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	13.818.754,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.911.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.919.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	16.150.572,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	8.359.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.895.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	69.132.650,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	53.909.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	-	70.331.310.738,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	-	78.627.534.627,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 0	70.067.947.238,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 0	78.243.255.327,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	222.964.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	344.580.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.999.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	15.425.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	30.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	24.274.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	-	24.999.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	-	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	9.999.800,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	-	201.786.900,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	-	159.611.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.052.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	134.825.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	102.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	56.462.200,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	46.462.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5.499.700,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	5.497.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	-	472.871.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	-	310.909.100,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.358.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.357.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	75.003.300,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	17.510.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	360.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	280.551.900,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	-	344.849.300,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	-	21.987.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	134.849.300,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	21.687.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	-	604.920.450,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	-	472.553.040,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	604.920.450,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472.553.040,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	141.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	142.260.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	141.550.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	142.260.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
7	1	02	02		-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-	10.464.381.760,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-	7.296.395.837,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	1.745.315.013,00		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 0	1.603.615.013,00		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 0	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	40.000.000,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit	3.102.034.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									Tidak selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	337.076.800,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	36.900.000,00		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1.372.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	4.800.225.934,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	119.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	1.801.386.800,00		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	2.587.362.537,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	84 Paket	74.662.200,00		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	84 Paket	86.176.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3654 Orang	250.754.700,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3654 Orang	130.354.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3485 Orang	26.100.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3485 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3293 Orang	137.625.000,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3293 Orang	78.450.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13108 Orang	15.500.000,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13108 Orang	108.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18510 Orang	25.486.700,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18510 Orang	57.942.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137914 Orang	24.752.600,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137914 Orang	432.923.872,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18772 Orang	15.000.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18772 Orang	100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9975 Orang	92.445.100,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9975 Orang	203.677.440,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3785 Orang	7.000.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3785 Orang	185.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	8.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4069 Orang	216.303.400,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4069 Orang	1.001.079.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	66.555.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	20.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	25.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	29.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	712.972.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	511.333.336,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.126.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.402.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	330.939.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	609.456.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	53.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	51.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									selaras		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22195 Orang	17.272.441,00		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22195 Orang	17.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									Tidak selaras		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	27.450.100,00		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	278.980.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	188.763.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	14.663.600.775,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	14.032.547.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	13 Paket	12.450.000,00		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	13 Paket	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	17.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	31.543.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	27.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	16.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	752 Orang	17.300.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	752 Orang	24.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29 Orang	21.500.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	29 Orang	22.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									selaras		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	48.455.000,00		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang	28.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	-	894.539.700,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	-	727.040.600,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit	149.762.000,00		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	16 Unit	160.109.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	681.027.700,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit	491.931.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	63.750.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
8	1	02	03		.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	-	467.533.050,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	-	728.086.850,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	-	18.500.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	-	18.500.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	3.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	-	47.242.000,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	-	47.241.800,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.918.000,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.917.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	31.324.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	31.324.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	-	401.791.050,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	-	662.345.050,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	401.791.050,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	662.345.050,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
9	1	02	04		.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	-	452.699.100,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	-	459.008.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	-	86.598.100,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	-	110.940.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	86.598.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	110.940.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	-	192.387.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	-	214.380.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	192.387.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	214.380.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	2.500.000,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-	340.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	340.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	171.214.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	133.348.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	171.214.000,00		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit	133.348.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
10	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	-	309.891.600,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	-	358.668.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	309.891.600,00		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	358.668.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	-	76.094.800,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	-	91.543.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	76.094.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	91.543.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	42.995.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	24.420.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	RSUD Kota Bima			33.316.565.179,00	RSUD Kota Bima			226.334.740.884,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.316.565.179,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			226.334.740.884,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			33.316.565.179,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			226.334.740.884,00				
11	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.265.872.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.416.716.411,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	12.265.872.800,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	14.416.716.411,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	12.265.872.800,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	14.416.716.411,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
12	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	21.050.692.379,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	211.918.024.473,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	12.029.196.000,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	201.161.952.798,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	3.983.000.000,00		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.836.608.060,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	104.550.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	57.850.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	6.241.646.000,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	20.349.726.910,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.700.000.000,00		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	169.917.767.828,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	9.021.496.379,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.756.071.675,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										selaras	selaras
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	9.021.496.379,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	10.756.071.675,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					.	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			117.581.333.359,00	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
13	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	-	10.464.381.760,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	-	7.296.395.837,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	25.200.000,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	28.322.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	1.148.199.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10 Dokumen	2.687.276.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					.	Puskesmas Paruga			117.581.333.359,00	Puskesmas Paruga			129.377.817.302,00		selaras	selaras	selaras
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
14	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	3.277.982.849,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
15	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	58.201.300,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	30.336.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Tidak selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	18.294.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	10.800.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	29.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	43.200.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	16.250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Tidak selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	7.000.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	383.098.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	341.858.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	28.850.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 Dokumen	7.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	201.716.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	11.850.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100 Dokumen	11.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	15.850.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100 Dokumen	176.049.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	1.519.128.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	362.611.884,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Dokumen	189.573.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	9.882.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	7.400.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	6.000.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	22.080.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	31.344.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	110.100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.014.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
16	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	19.957.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	15.042.000,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
					,	Puskesmas Mpunda			117.581.333.359,00	Puskesmas Mpunda			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
17	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
18	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	877 Orang	9.480.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	877 Orang	34.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang	30.765.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	838 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7024 Orang	33.250.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7024 Orang	75.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30374 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30374 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4331 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4331 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2360 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2360 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	895 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	121 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	121 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	988 Orang	11.050.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	988 Orang	14.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Tidak selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	15.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	275.444.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	467.395.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	42.900.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	34.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	32.282.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.750.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	96.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	185.002.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	2.412.764.092,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	3.193.155.398,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	208.549.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	100% Dokumen	220.490.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	8.100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.399.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	6.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	9.300.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	6.000.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	4.008.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	29.440.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	187.240.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
19	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	31.974.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	7.873.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Penanae			117.581.333.359,00	Puskesmas Penanae			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
20	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	10.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.787.772.332,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
21	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	31.000.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	58.080.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Tidak selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang	36.309.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	691 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5794 Orang	71.600.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5794 Orang	38.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31313 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31313 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3573 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3573 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2433 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2433 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	923 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	125 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1014 Orang	16.660.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1014 Orang	8.050.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Tidak selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1111 Orang	7.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1111 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	282.849.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	479.790.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	16.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.900.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	18.645.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	8.950.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	147.550.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	226.092.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.977.997.992,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	215.246.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	219.446.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	15.866.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.736.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	60.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
22	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.948.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Rasanae Timur			117.581.333.359,00	Puskesmas Rasanae Timur			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
23	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD											
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	1.160.548.095,00	DINAS KESEHATAN			
24	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	6.000.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156 Orang	33.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	20.610.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	21.493.800,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	421 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1246 Orang	20.000.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1246 Orang	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5388 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5388 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	768 Orang	8.083.800,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	768 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									Tidak selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	4.400.000,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									Tidak selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang	4.400.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	265 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	10.735.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	15.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	13.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	176 Orang	6.450.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	2.500.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	1.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	144.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236.405.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.384.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	3.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	9.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	86.722.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.485.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	10.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	48.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	61.123.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	865.793.348,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	115.064.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	114.230.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	7.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		

No	Kode						RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11			
								Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	120.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
25	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	8.981.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					,	Puskesmas Kolo			117.581.333.359,00	Puskesmas Kolo			129.377.817.302,00					
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
26	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD										selaras		
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	10.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	569.404.737,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
27	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil										selaras		
								Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74 Orang	13.000.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74 Orang	30.060.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin										Tidak selaras		
								Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71 Orang	18.210.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir										selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	267 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 Orang	6.200.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	393 Orang	16.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2570 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2570 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	366 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	2.600.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	10 Orang	12.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	83 Orang	5.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	83 Orang	5.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Tidak selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	2.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	91 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	96.991.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	109.176.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	24.874.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	1.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	11.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	52.238.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	13.782.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	4.150.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	40.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	46.211.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	432.471.815,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	43.547.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	100.421.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	10.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	10.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	4.089.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
28	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	10.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	2.667.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					.	Puskesmas Jatibaru			117.581.333.359,00	Puskesmas Jatibaru			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
29	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	100.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	2.554.563.360,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
30	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	8.100.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	557 Orang	9.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Tidak selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	531 Orang	24.300.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	531 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	506 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2001 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2001 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2230 Orang	25.100.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2230 Orang	55.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									Tidak selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19269 Orang	30.100.000,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19269 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2748 Orang	7.690.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2748 Orang	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									Tidak selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 Orang	6.000.000,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1497 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									Tidak selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	6.000.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	568 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	9.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	8.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	695 Orang	9.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	3.000.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	683 Orang	5.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	207.030.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	344.910.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12.371.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	6.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	175.160.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	22.042.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12.340.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	91.450.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	132.032.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.689.278.950,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	154.453.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	162.963.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	12.473.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	100.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	40.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	8.469.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
31	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	13.899.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					.	Puskesmas Kumbe			117.581.333.359,00	Puskesmas Kumbe			129.377.817.302,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.377.817.302,00				
	1	02			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			117.581.333.359,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.377.817.302,00				
32	1	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	72.302.675.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	-	90.904.382.169,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	820.000,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	-	11.030.075.502,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	500.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	679.804.129,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
33	1	02	02		.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	43.876.792.545,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	-	36.750.380.283,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	32.509.551.085,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	-	28.716.953.846,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	9.072.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang	20.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									Tidak selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	13.150.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	178 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	169 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	169 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	669 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	26.000.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1490 Orang	18.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									Tidak selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6442 Orang	6.150.000,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6442 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	740.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	919 Orang	7.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									Tidak selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	13.000.000,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	501 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									Tidak selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	1.800.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	190 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	8.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	14.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	9.100.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	232 Orang	11.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									Tidak selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	3.100.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	191 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	335 Dokumen	110.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	335 Dokumen	155.368.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	940.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	4.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142 Dokumen	7.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	142 Dokumen	5.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179 Dokumen	14.647.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	179 Dokumen	6.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	438 Dokumen	68.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	438 Dokumen	51.339.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57 Dokumen	113.932.388,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	100.122.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen	82.427.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	300.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	1.782.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	300.000,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	250.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									Tidak selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	2.000.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	9.960.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	1.890.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	8.320.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	-	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	300.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
34	1	02	05		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	481.633.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	-	535.960.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	95.646.800,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	-	85.749.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	1.919.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
					.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			51.595.684.700,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			97.122.986.538,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			51.595.684.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			97.122.986.538,00				
	1	03			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			51.595.684.700,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			97.122.986.538,00				
35	1	03	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	12.370.211.671,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	11.999.073.421,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	104.800.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.041.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.906.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.617.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.341.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.447.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.766.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.159.900,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.498.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.138.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	29.041.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	44.737.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.262.058.613,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.225.957.901,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.653.666.613,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.770.332.901,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	533.810.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	427.107.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.818.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	11.093.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.810.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	18.114.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.153.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	23.840.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	9.492.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	82.188.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.655.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	82.188.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	36.655.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.425.656.191,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.395.893.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.449.950,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	359.717.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	188.534.878,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	119.544.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	21.645.363,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	21.452.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.005.026.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	895.180.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	340.070.417,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	311.228.240,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26.457.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.454.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	263.922.017,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	262.527.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	49.690.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.247.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.155.438.150,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	947.296.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	276.750.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	212.670.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									selaras		
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	507.003.150,00		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit	499.231.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	115.460.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	49.190.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	256.225.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	186.205.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
36	1	03	02		-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	-	1.520.777.100,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	-	1.755.408.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	-	1.265.016.100,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	-	1.362.113.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	126.357.600,00		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	142.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									selaras		
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	222.972.800,00		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1 KM	288.406.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam									Tidak selaras		
							Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	233.200.000,00		Jumlah Check Dam yang Dibangun	1 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									selaras		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	231.458.700,00		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	783.392.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	250.750.000,00		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	1 Unit	828.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	200.277.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	146.927.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	-	255.761.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	-	393.295.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									selaras		
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	255.761.000,00		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 KM	393.295.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
37	1	03	03		.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	-	14.206.203.202,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	-	15.601.314.588,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	-	14.206.203.202,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	-	15.601.314.588,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	345.738.000,00		Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	145.210.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Orang	84.549.200,00		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 Orang	58.585.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	163.028.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	148.804.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	8.618.379.000,00		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	12.234.776.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	849.825.502,00		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.099.582.318,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 SR	4.144.683.500,00		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1 SR	1.914.357.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
38	1	03	05		.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	6.890.723.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	1.028.980.080,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	6.890.723.900,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	-	1.028.980.080,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									selaras		
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	275.164.000,00		Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	509.990.440,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									selaras		
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	6.615.559.900,00		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	518.989.640,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
39	1	03	06		.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	2.342.375.686,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	6.106.366.551,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	2.342.375.686,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	-	6.106.366.551,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									selaras		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	2.342.375.686,00		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	6.106.366.551,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
40	1	03	08		.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	217.085.001,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	279.510.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	217.085.001,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	-	279.510.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan									selaras		
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	217.085.001,00		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	279.510.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
41	1	03	09		.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	3.509.562.430,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	21.664.617.498,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	3.509.562.430,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	-	21.664.617.498,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									selaras		
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	3.509.562.430,00		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	21.664.617.498,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
42	1	03	10		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	9.461.649.864,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	37.723.706.400,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	9.461.649.864,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	-	37.723.706.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan									selaras		
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	125.919.200,00		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	142.640.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	248.751.404,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	251.502.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	6.794.355.000,00		Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	2.752.854.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	140.624.500,00		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1 KM	29.954.060.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	1.235.862.660,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1 KM	3.396.728.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan									selaras		
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	23.460.000,00		Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	274.040.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									selaras		
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	441.377.100,00		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1 KM	441.659.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	451.300.000,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	1 KM	510.223.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
43	1	03	11		.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	-	219.116.800,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	-	175.925.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	-	111.166.800,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	-	89.406.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									selaras		
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	111.166.800,00		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	89.406.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	-	107.950.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	-	86.519.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	107.950.000,00		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	86.519.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
44	1	03	12		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	-	857.979.046,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	-	788.085.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	-	613.195.356,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	-	444.702.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	292.314.716,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	61.408.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	253.921.740,00		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	338.486.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	66.958.900,00		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	44.808.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	77.883.290,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	77.883.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									selaras		
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	77.883.290,00		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	77.883.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	166.900.400,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	-	265.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	166.900.400,00		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	265.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
					,	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			7.423.824.223,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			14.132.619.396,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.361.050.123,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.269.762.027,00				
	1	04			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.361.050.123,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.269.762.027,00				
45	1	04	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.340.350.008,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.780.957.527,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	11.754.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	16.687.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.494.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.479.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.016.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.762.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.624.400,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.601.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.236.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.293.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.383.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.551.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.501.362.908,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.001.889.094,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	4.269.262.108,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.822.903.694,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	215.980.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	171.525.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.700.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.806.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	1.420.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	5.654.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.838.200,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.588.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.838.200,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.588.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	33.600.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	33.600.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	273.932.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.351.433,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.712.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.056.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.220.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.471.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.823.933,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	402.222.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	412.102.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	402.222.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	412.102.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.640.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.340.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	39.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	37.400.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.940.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	11.940.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	64.700.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
46	1	04	02		.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	579.268.980,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	592.278.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	296.283.080,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	301.520.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	54.525.600,00		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	241.757.480,00		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	301.520.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	75.924.600,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									Tidak selaras		
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	75.924.600,00		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	207.061.300,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	290.758.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	207.061.300,00		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	290.758.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
47	1	04	03		.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.399.299.035,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.190.387.500,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	79.903.700,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	79.903.700,00		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	69.525.000,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	146.013.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	19.000.000,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	49.525.000,00		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	146.013.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.249.870.335,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.044.374.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	1.000.000,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	788.842.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	149.495.135,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	255.532.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									Tidak selaras		
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	1.099.375.200,00		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
48	1	04	04		-	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	42.132.100,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	706.139.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	42.132.100,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	706.139.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.000.000,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	706.139.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	1.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									Tidak selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	40.132.100,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			62.774.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.862.857.369,00				
	2	10			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			62.774.100,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			6.862.857.369,00				
49	2	10	05		-	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	62.774.100,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	6.862.857.369,00		selaras	selaras	selaras
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	62.774.100,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.862.857.369,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	62.774.100,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	6.862.857.369,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
					,	Satuan Polisi Pamong Praja			9.556.156.929,00	Satuan Polisi Pamong Praja			12.360.944.952,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.556.156.929,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			12.360.944.952,00				
	1	05			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			9.556.156.929,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			12.360.944.952,00				
50	1	05	01		-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.141.137.329,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.937.707.752,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.571.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.571.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.026.778.629,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.894.659.652,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	4.890.178.629,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	7.712.167.152,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	132.600.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	178.492.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.546.669.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.392.455.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	2.546.669.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	2.392.455.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	321.570.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	389.974.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.044.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.754.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.540.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	63.080.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	275.985.700,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	299.140.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	43.997.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.477.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	24.989.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	31.469.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	188.550.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	196.570.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	140.890.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	149.020.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.560.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
51	1	05	02		.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.415.019.600,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.423.237.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	485.960.100,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	423.237.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	128.115.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49.686.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	116.050.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	161.439.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional									selaras		
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									selaras		
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	241.794.000,00		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	212.111.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	929.059.500,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	247.723.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	221.483.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	681.336.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	778.516.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
					.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			6.646.217.583,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.743.058.358,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.646.217.583,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.743.058.358,00				
	1	05			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			6.646.217.583,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			8.743.058.358,00				
52	1	05	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.819.998.683,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	7.590.040.583,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	33.203.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.320.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.382.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.502.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.135.100,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.186.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.415.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.488.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.218.700,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.245.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.182.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.209.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	24.868.700,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.690.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	-	4.665.312.683,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	-	6.335.750.783,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	4.545.981.943,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	6.184.797.783,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	113.433.450,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	145.005.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	897.290,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	886.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	4.054.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.008.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	21.626.300,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	19.478.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.679.500,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3.612.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	17.946.800,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	15.866.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-	3.464.700,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	-	972.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	964.700,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	972.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	315.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	350.562.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	19.991.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.693.300,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	255.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	287.488.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	415.551.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	414.912.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.977.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.979.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	405.574.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404.933.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	365.840.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	453.045.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.100.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.360.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	286.060.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	376.910.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.680.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	16.900.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13.875.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
53	1	05	04		.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	85 Persen	826.218.900,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	85 Persen	1.153.017.775,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100 % 5 Dokumen	589.084.200,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	100 % 5 Dokumen	872.381.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	7.271.200,00		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	6.410.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	289.719.200,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	272.801.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	180.231.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	144.544.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	26.475.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	27.035.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	22.387.000,00		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	10 Orang	40.915.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	33.000.000,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	35.128.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	30.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	345.548.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	30.998.000,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	20.811.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	20.998.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	20.811.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.467.500,00	Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.458.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	25.467.500,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	25.458.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan	135.906.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan	141.753.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	55.150.000,00		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	550 Orang	53.032.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	80.756.000,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	88.721.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Kegiatan 1 Laporan	44.763.200,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Kegiatan 1 Laporan	92.614.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	62.904.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	16.975.100,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	16.823.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	12.788.100,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	12.177.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	10.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	710.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
					.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			5.833.198.777,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			5.557.810.591,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.833.198.777,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.557.810.591,00				
	1	05			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			5.833.198.777,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA			5.557.810.591,00				
54	1	05	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-	4.940.368.580,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	-	4.688.560.441,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	48.385.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.034.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.034.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.034.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.744.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.744.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.891.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	30.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	16.904.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	-	4.048.118.580,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	-	3.725.184.991,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.897.118.580,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.520.837.991,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	130.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	179.143.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.348.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	4.052.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	16.416.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.388.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	50.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	-	1.181.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.181.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	38.500.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	19.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32 Dokumen	7.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	222.940.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	148.731.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	5.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.582.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	30.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	5.108.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	17.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	13.914.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.440.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	86.806.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	-	15.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	-	25.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	15.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	25.450.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	313.300.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	325.739.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.776.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.363.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.800.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	225.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	177.010.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	386.888.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	147.010.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	186.718.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.170.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
55	1	05	03		.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	-	892.830.197,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	-	869.250.150,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	-	30.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	-	72.773.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	30.000.000,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	0,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	-	72.773.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	-	294.625.250,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	-	282.457.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									Tidak selaras		
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	57.625.250,00		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									Tidak selaras		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	35.000.000,00		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	67.277.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									Tidak selaras		
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	27.000.000,00		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	45.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	149.829.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	75.000.000,00		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	38.149.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	30.000.000,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	50 Kawasan	27.201.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	257.458.947,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	292.912.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	30.507.900,00		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	7.876.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	12.841.500,00		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12000 Orang	4.327.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12000 Orang	214.109.547,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	12000 Orang	280.709.250,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	310.746.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	221.107.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	14.263.200,00		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	17.050.200,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	18.894.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	113.080.300,00		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	52.213.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	166.352.300,00		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
					,	Dinas Sosial			10.115.493.562,00	Dinas Sosial			10.314.346.023,00				
	1				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.115.493.562,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.314.346.023,00				
	1	06			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.115.493.562,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.314.346.023,00				
56	1	06	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.934.219.060,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.743.079.823,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	81.338.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	98.002.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.144.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	48.576.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.816.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.481.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.916.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	17.965.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	20.932.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	21.665.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.605.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.312.695.790,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.233.161.923,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.126.136.590,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	4.046.603.023,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.423.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	41.423.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	122.400.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	122.400.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.063.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	14.063.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	612.774.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	596.424.500,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.530.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.530.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.112.900,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	60.235.900,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.300.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.805.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.805.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.618.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.325.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.936.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL		Tidak selaras	Tidak selaras
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	251.840.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	354.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	30.631.100,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	39.528.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	77.922.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	48.800.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	67.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	36.800.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.922.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	12.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	358.207.270,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	448.761.400,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.228.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	112.262.200,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.697.170,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.834.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	224.282.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	206.664.700,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	491.282.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	317.930.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	233.122.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	259.770.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21.160.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21.160.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	237.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
57	1	06	02		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	-	170.136.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	-	171.936.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-	20.000.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	-	21.800.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	21.800.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	-	150.136.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	-	150.136.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.136.000,00		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	130.136.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	20.000.000,00		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
58	1	06	03		.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	-	0,00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	0,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal									selaras		
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
59	1	06	04		.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	1.031.624.800,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	1.296.116.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	806.552.500,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	941.186.500,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	210.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	225.038.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	335.020.500,00		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	336.280.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	96.153.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	89.489.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	23.280.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	23.280.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	65.340.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	65.340.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.839.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.839.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									selaras		
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000,00		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	7.500.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	7.500.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	4.420.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	129.420.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	225.072.300,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	-	354.930.300,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	10.236.500,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	145.236.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	8.750.000,00		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	11.410.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	10.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	169.897.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	162.095.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA									selaras		
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13.050.000,00		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	13.050.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.178.800,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.178.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.960.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9.960.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
60	1	06	05		.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	2.772.053.702,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	2.731.067.400,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	-	55.200.000,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	-	45.940.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	16.367.000,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	17.247.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	16.922.000,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	17.582.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	21.911.000,00		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	11.111.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	-	2.716.853.702,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	-	2.685.127.400,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	172.162.900,00		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	216.762.900,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	45.000.000,00		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	45.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									selaras		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	2.478.623.302,00		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	2.230.837.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	21.067.500,00		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	192.527.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
61	1	06	06		.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	-	207.460.000,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	-	372.146.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	91.740.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	244.666.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	22.365.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	81.496.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	44.650.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	49.240.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									selaras		
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	4.750.000,00		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	10.850.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	13.175.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	85.220.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.800.000,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	17.860.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	115.720.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	-	127.480.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	6.255.000,00		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	6.255.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	109.465.000,00		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	121.225.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
					.	Dinas Tenaga Kerja			4.134.634.286,00	Dinas Tenaga Kerja			7.534.679.202,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.534.679.202,00				
	2	07			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.534.679.202,00				
62	2	07	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.523.958.886,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.344.939.302,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	58.997.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	54.612.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.882.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.111.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.014.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.438.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.064.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.504.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.824.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	27.224.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.878.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.907.450.660,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.915.332.002,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.801.104.460,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.709.373.002,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	39.799.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	42.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	52.300.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	145.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	7.458.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.892.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.897.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	8.391.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	10.380.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.330.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.722.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	5.658.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.276.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	27.537.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	29.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	27.537.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	29.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	152.743.826,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	197.846.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.856.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.360.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	88.887.026,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	132.370.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	35.116.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	70.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.624.742.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									selaras		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10.000.000,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	20.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	84.142.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.520.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.506.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	DINAS TENAGA KERJA		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	208.175.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	130.020.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	12.240.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.390.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	66.600.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	125.430.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	3.324.000,00	Penataan Organisasi	-	-	12.725.100,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	3.324.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	12.725.100,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
63	2	07	02		.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	-	11.842.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	-	11.854.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	-	11.842.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	-	11.854.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									selaras		
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	11.842.000,00		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	11.854.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
64	2	07	03		.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	-	274.570.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	-	364.168.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	56.227.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	37.024.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									selaras		
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	56.227.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	37.024.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
65	2	07	04		.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	-	189.952.400,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	-	205.344.500,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	98.913.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	109.745.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	54.340.000,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	62.290.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	44.573.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	47.455.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	53.702.400,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	58.275.500,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	53.702.400,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	58.275.500,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	37.337.000,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	37.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									selaras		
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	37.337.000,00		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	37.324.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
66	2	07	05		.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	134.311.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	608.373.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	105.409.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	138.699.600,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									selaras		
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	35.020.000,00		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	54.880.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	70.389.000,00		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	83.819.600,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	28.902.000,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	469.673.800,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	6.969.000,00		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	6.993.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	14.964.000,00		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	22.488.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									selaras		
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	6.969.000,00		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200 Orang	440.192.800,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
					,	UPT Balai Latihan Kerja			4.134.634.286,00	UPT Balai Latihan Kerja			7.534.679.202,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.534.679.202,00				
	2	07			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.134.634.286,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.534.679.202,00				
67	2	07	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.523.958.886,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.344.939.302,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	163.506.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	17.452.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.343.200,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
68	2	07	03		.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	274.570.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	364.168.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	218.343.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	327.144.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	118.323.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	327.144.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									Tidak selaras		
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	100.020.000,00		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA		Tidak selaras	Tidak selaras
					,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7.683.631.215,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			7.513.814.873,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.513.814.873,00				
	2	08			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.513.814.873,00				
69	2	08	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.880.545.473,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	22.253.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.582.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.705.800,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	29.293.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.658.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.258.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.808.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.162.500,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.572.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.578.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.111.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.111.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.784.800,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.006.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.593.751.365,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.960.292.973,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.422.479.465,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.786.488.473,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.933.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.263.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.138.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.341.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	2.192.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Tidak selaras	Tidak selaras
	2				-	NON URUSAN			7.683.631.215,00	NON URUSAN			7.513.814.873,00				
	2	08			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.513.814.873,00				
70	2	08	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.880.545.473,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi											
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.513.814.873,00				
	2	08			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN			7.683.631.215,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			7.513.814.873,00				
71	2	08	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.315.913.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.880.545.473,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	351.126.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	12.990.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	14.923.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.797.300,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.788.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.145.400,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31.200.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.980.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.088.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.040.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	29.535.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.040.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	29.535.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	168.348.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	177.348.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.748.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.748.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	156.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	165.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	178.395.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	356.595.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120.110.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	127.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	44.765.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	210.525.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13.520.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	18.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
72	2	08	02		.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	-	2.111.132.550,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	-	2.208.667.100,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	-	40.787.900,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	-	85.736.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40.787.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	85.736.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	-	989.880.100,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	-	1.289.880.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									selaras		
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	989.880.100,00		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	1.289.880.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	-	1.080.464.550,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	-	833.051.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	134.783.800,00		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	79.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	593.241.350,00		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	495.085.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	352.439.400,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	258.216.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
73	2	08	03		-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	337.460.600,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	-	357.079.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	-	80.287.300,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	-	89.433.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.540.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.135.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	48.747.300,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	51.298.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	-	257.173.300,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	-	267.645.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	168.116.300,00		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	132.275.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	89.057.000,00		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	135.370.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
74	2	08	05		.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	-	73.543.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	-	59.313.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	-	73.543.200,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	-	59.313.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	54.646.100,00		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	45.514.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	18.897.100,00		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	13.799.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
75	2	08	06		.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	-	283.150.000,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	-	265.615.300,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	154.917.250,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	143.040.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	54.456.750,00		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	8.744.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100.460.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	134.296.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	128.232.750,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	-	122.575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	3.780.000,00		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	3.780.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	102.927.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.095.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	21.525.650,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	18.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
76	2	08	07		.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	-	562.431.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	-	742.595.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	-	79.960.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	-	91.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA									Tidak selaras		
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	10.000.000,00		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									selaras		
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	69.960.000,00		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	91.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	-	223.703.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	-	383.273.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	146.423.000,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	231.353.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									selaras		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	77.280.000,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	151.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	-	258.768.200,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	-	267.457.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	162.644.200,00		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	143.038.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/									selaras		
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	96.124.000,00		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	124.419.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
					.	Dinas Ketahanan Pangan			4.873.627.557,00	Dinas Ketahanan Pangan			5.061.381.347,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.873.627.557,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.061.381.347,00				
	2	09			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.873.627.557,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			5.061.381.347,00				
77	2	09	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	4.122.714.857,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	4.138.925.937,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20.125.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	24.162.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.575.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.470.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.655.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.635.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.040.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.385.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	695.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	830.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	576.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	806.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.584.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.036.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.624.784.057,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	-	3.462.796.737,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.496.200.057,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.335.349.737,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	124.940.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	122.965.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.764.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.017.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	880.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.465.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	750.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	2.783.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	750.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	2.783.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	30.251.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	3.471.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	826.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	825.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.645.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.645.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									Tidak selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	6.779.200,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	-	137.512.620,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	-	226.899.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.358.600,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.796.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.821.600,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.557.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.547.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.880.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	50.359.920,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	130.240.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	53.128.980,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	60.209.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	44.140.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	57.930.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									selaras		
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	4.489.200,00		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	2.279.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.499.780,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	141.273.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	151.635.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.904.700,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	87.880.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.531.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.331.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.837.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	14.424.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	114.890.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	206.967.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	66.517.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	14.680.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	14.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	10.270.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	30.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	59.940.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	96.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
78	2	09	03		.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	-	561.725.400,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	-	696.745.710,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	-	175.994.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	-	104.753.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	18.658.200,00		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	12.178.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	52.827.200,00		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	27.747.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	59.437.000,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	52.637.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									selaras		
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	45.071.600,00		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	12.191.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	-	275.651.400,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	-	420.460.910,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal									selaras		
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	2.373.100,00		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	2.373.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	188.890.000,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	358.890.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	48.341.100,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	39.862.010,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	36.047.200,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	19.335.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	-	110.080.000,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	-	171.531.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									selaras		
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	16.800.000,00		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	16.144.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	93.280.000,00		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	155.387.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
79	2	09	04		.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	58.847.700,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	-	146.170.500,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	20.000.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	45.895.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan										selaras	selaras
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	20.000.000,00		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	45.895.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras		
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	38.847.700,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	-	100.275.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.635.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	19.733.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									selaras		
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	3.847.700,00		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	40.731.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.176.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
80	2	09	05		.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	-	130.339.600,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	-	79.539.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	-	130.339.600,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	-	79.539.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.001.300,00		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.201.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	66.204.600,00		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	26.204.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									selaras		
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	42.133.700,00		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	42.133.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
					.	Dinas Lingkungan Hidup			20.485.263.877,00	Dinas Lingkungan Hidup			25.701.538.071,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			20.485.263.877,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.701.538.071,00				
	2	11			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			20.485.263.877,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			25.701.538.071,00				
81	2	11	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	12.580.807.031,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	13.882.693.546,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	118.260.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	96.377.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	12.592.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	8.252.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.110.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.062.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.700.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.471.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.240.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.177.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.150.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.805.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	36.155.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.062.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	29.313.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	54.548.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	11.575.615.932,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	12.273.967.787,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	11.392.923.280,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan	12.077.793.387,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	161.435.052,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	181.407.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.424.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.415.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	12.833.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	8.352.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	310.261.550,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	361.691.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.773.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.587.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.250.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	26.011.250,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	26.573.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250.227.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	203.280.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	332.306.599,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	429.704.009,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	16.641.599,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	26.670.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	51.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.872.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.680.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	26.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	242.985.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	302.221.588,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	244.362.650,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	720.953.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	112.500.900,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	144.297.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	62.540.250,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	135.320.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	21.836.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	26.659.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	35.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.485.500,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	224.676.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
82	2	11	02		.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	-	343.500.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	-	308.502.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	-	143.500.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	-	118.232.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	143.500.000,00		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	118.232.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	-	200.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	-	190.270.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									selaras		
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	91.270.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	99.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
83	2	11	03		.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	419.071.244,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	359.683.500,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	191.193.294,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	206.971.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									selaras		
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	35.174.760,00		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	35.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	75.541.970,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	77.242.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	80.476.564,00		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	94.553.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	69.467.950,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	90.818.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	29.491.900,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	59.751.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									selaras		

No	Kode						RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11			
								Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	39.976.050,00		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	31.066.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	158.410.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	-	61.894.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran										selaras		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.410.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi										Tidak selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	30.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi										Tidak selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	30.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota										selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	37.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	30.294.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi										Tidak selaras		
								jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	30.000.000,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tidak selaras	Tidak selaras
84	2	11	04		.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	-	1.683.430.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	-	4.872.628.201,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	-	1.683.430.400,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	-	4.872.628.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										selaras		
								Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	64.975.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										selaras		
								Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Ha	1.600.000.000,00		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	243 Ha	4.758.213.201,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									Tidak selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	12.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									selaras		
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22,1 Unit	51.430.400,00		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	22,1 Unit	49.440.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
85	2	11	06		.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	-	251.586.660,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	-	78.275.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	-	251.586.660,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	-	78.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									selaras		
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	176.586.660,00		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	55.063.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	75.000.000,00		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	23.212.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
86	2	11	08		.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	-	214.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	-	121.970.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	-	214.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	-	121.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									Tidak selaras		
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	38.000.000,00		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat									selaras		
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	176.000.000,00		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	121.970.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
87	2	11	09		.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	-	53.265.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	-	40.580.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	-	53.265.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	-	40.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	53.265.000,00		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	40.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
88	2	11	10		.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	-	65.000.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	-	22.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	-	65.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	-	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	65.000.000,00		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
89	2	11	11		.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	-	4.874.603.542,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	-	6.015.205.824,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	-	4.859.603.542,00	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	-	6.015.205.824,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									selaras		
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	50.000.000,00		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	42.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	40.586.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	38.030.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	53 Unit	661.270.300,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	53 Unit	440.221.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	14.770.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									selaras		
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	250 Ton	29.526.953,00		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	250 Ton	25.651.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									selaras		
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	4.028.220.089,00		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	5.453.632.424,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	-	15.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									Tidak selaras		
							Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	15.000.000,00		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Tidak selaras	Tidak selaras
					.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.885.392.166,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.928.057.990,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.885.392.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.928.057.990,00				
	2	12			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN			5.885.392.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.928.057.990,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
90	2	12	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.380.758.966,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.511.127.090,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.609.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.148.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.082.800,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.089.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.158.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.150.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.095.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.212.200,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.342.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.236.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.181.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.273.800,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.007.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.549.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	8.392.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.571.200.758,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.588.149.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.307.409.708,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.315.483.625,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	151.865.450,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	176.746.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	105.840.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.078.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.062.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.007.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.007.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	256.769.084,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	259.747.284,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.992.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.304.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.408.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.073.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.600.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.600.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.769.084,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	167.769.084,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	430.586.374,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	397.267.681,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.686.374,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.567.681,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	338.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	295.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.593.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244.815.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	75.258.750,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	75.655.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.160.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	19.160.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.175.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
91	2	12	02		.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	334.870.100,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	231.966.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	61.535.100,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	75.538.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	23.724.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	26.749.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	7.545.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	9.838.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	30.265.800,00		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	38.951.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	273.335.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	156.428.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	273.335.000,00		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	156.428.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
92	2	12	03		.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	76.395.800,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	76.395.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.179.100,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.181.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.451.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	55.711.000,00		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	55.731.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	12.016.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	11.998.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.216.700,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.214.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	7.216.700,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	7.214.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
93	2	12	04		.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	79.744.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	99.296.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	13.547.400,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	12.625.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.894.100,00		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.764.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	8.653.300,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	7.861.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.408.200,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	11.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	4.408.200,00		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	11.987.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	47.773.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	69.709.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	35.810.200,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	53.530.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	7.752.300,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	7.735.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.996.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.925.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	1.214.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	5.519.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	14.015.800,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	14.015.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	4.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
94	2	12	05		.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	13.622.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	9.273.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	13.622.900,00	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	9.273.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	7.473.800,00		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.066.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									selaras		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	6.149.100,00		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	4.207.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
					.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			9.661.247.865,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			7.256.224.340,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.256.224.340,00				
95	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	-	33.290.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	-	37.996.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.350.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.540.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.300.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.684.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.800.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.419.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.950.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.490.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.901.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.390.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.482.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.985.324.969,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	3.598.735.244,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.729.324.969,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.417.401.244,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	235.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	170.324.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.830.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	-	18.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	-	7.494.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.383.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.111.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.662.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2				-	NON URUSAN			9.661.247.865,00	NON URUSAN			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.256.224.340,00				
96	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.256.224.340,00				
97	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	16.302.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	11.982.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	8.640.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	4.320.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	54.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	57.072.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.702.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2				-	NON URUSAN			9.661.247.865,00	NON URUSAN			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.256.224.340,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
98	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.256.224.340,00				
99	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.145.496,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	258.435.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	40.810.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	196.945.496,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	148.551.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	837.600.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	542.184.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	237.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	138.708.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	403.476.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	168.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	140.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	0,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	28.860.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2				-	NON URUSAN			9.661.247.865,00	NON URUSAN			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			7.256.224.340,00				
100	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.256.224.340,00				
	2	14			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			9.661.247.865,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			7.256.224.340,00				
101	2	14	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.502.522.865,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.625.887.340,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	291.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	95.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
102	2	14	02		.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	-	71.000.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	-	83.888.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	71.000.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	83.888.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									selaras		
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.000.000,00		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	42.888.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
103	2	14	03		.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	-	3.283.725.000,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	-	1.730.561.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	-	703.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	-	703.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	148.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	148.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)									selaras		
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	75.000.000,00		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									selaras		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	250.000.000,00		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	248.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	248.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									selaras		
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	123.000.000,00		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	123.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	125.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	-	2.050.241.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	-	497.077.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	477.649.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	469.177.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									Tidak selaras		
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	1.544.692.000,00		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.300.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	15.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	282.484.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	282.484.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	252.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	252.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									selaras		
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	26.734.000,00		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	26.734.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
104	2	14	04		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	804.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	815.888.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	-	804.000.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	-	815.888.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	48.000.000,00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	60.888.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)									selaras		
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	755.000.000,00		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	755.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									Tidak selaras		
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	1.000.000,00		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Tidak selaras	Tidak selaras
					.	Dinas Perhubungan			17.007.153.024,00	Dinas Perhubungan			14.892.574.257,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.007.153.024,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.892.574.257,00				
	2	15			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			17.007.153.024,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			14.892.574.257,00				
105	2	15	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.383.552.638,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.559.719.757,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.192.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.298.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.598.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.616.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	198.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	198.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.648.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	198.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.372.267.663,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.644.592.557,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.180.931.663,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.440.244.857,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	188.050.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	184.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	198.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.890.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8.280.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	198.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	9.997.700,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	320.841.775,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.200.312.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.760.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.599.520,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	542.662.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.044.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	159.044.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	75.628.255,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	156.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	163.810.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	329.856.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	220.831.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	352.777.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	113.742.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	61.495.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	90.307.200,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	45.594.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	204.510.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	460.420.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	338.740.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	270.760.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	297.290.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	36.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	153.660.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	41.450.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
106	2	15	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	-	11.570.140.386,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	-	7.280.144.500,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	-	937.820.000,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	-	1.002.448.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	937.820.000,00		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.002.448.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	-	9.588.791.886,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	-	4.857.177.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	5.058.090.800,00		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	62.180.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	4.530.701.086,00		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	4.794.997.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	163.661.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	175.830.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									selaras		
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	163.661.000,00		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	175.830.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	290.228.500,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	247.547.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	290.228.500,00		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	247.547.500,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	573.679.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	743.342.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	66.228.000,00		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	109.908.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	14.131.000,00		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	77.860.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji									selaras		
							Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	127.320.000,00		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	135.024.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	366.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	420.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	15.960.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	253.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.960.000,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	253.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
107	2	15	03		-	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	53.460.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	52.710.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	53.460.000,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	52.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									selaras		
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	53.460.000,00		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	52.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
					.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			10.431.724.102,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			10.162.581.916,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.431.724.102,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.162.581.916,00				
	2	16			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.977.224.102,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.633.667.916,00				
108	2	16	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	8.315.766.602,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	-	8.063.637.916,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96.300.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	31.941.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.300.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.688.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	55.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	9.537.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	-	5.656.966.602,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	-	4.994.366.916,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.469.166.602,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.782.927.916,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	179.520.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	203.416.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.179.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	453.800.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	611.332.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.291.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	158.030.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.800.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.631.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		selaras
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.380.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	281.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.064.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.210.365.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	155.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	202.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.880.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.926.395.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	37.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	44.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	44.700.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	215.632.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	19.700.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	63.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	152.492.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
109	2	16	02		-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	-	968.882.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	-	1.266.277.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	-	968.882.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	-	1.266.277.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									selaras		
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	703.382.000,00		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	940.697.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	30.000.000,00		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	36.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	20.500.000,00		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	120.630.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									selaras		
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	15.000.000,00		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									selaras		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	200.000.000,00		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	153.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
110	2	16	03		.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	-	692.575.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	-	303.753.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	-	692.575.500,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	-	303.753.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	15.000.000,00		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	16.726.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	50.725.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah									selaras		
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	363.816.200,00		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	72.636.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	52.807.700,00		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	30.974.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									selaras		
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	164.463.200,00		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	121.260.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	46.488.400,00		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	11.432.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			204.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			254.534.000,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
111	2	20	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	204.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	254.534.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	-	204.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	-	254.534.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									selaras		
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	34.000.000,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	61.677.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									selaras		
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	90.000.000,00		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	96.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									selaras		
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	40.000.000,00		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	49.930.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									selaras		
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	36.877.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	9.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			250.500.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			274.380.000,00				
112	2	21	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	-	250.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	-	274.380.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	-	110.500.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	-	169.540.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	65.000.000,00		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	64.330.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	30.000.000,00		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	28.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	57.850.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	7.500.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	19.260.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	-	140.000.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	-	104.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	140.000.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	104.840.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
					,	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			9.733.923.276,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			9.335.165.670,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.912.031.870,00				
	2	17			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.912.031.870,00				
113	2	17	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.566.862.670,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	95.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	91.464.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	21.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.348.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	14.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	22.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.916.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.803.967.776,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.399.952.370,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	5.616.807.776,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	5.189.272.370,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	164.160.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	187.680.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.932.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.932.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	54.757.164,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	15.468.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.000.000,00		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	17	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.468.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	12.757.164,00		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	61.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	13.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	13.000.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	12.475.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	12.475.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	220.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	228.452.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	43.000.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	33.402.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	350.586.503,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	353.626.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	54.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	54.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	221.565.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	215.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	260.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.310.700,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	35.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	31.310.700,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	31.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
114	2	17	04		.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	18.700.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	32.400.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	18.700.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	18.700.000,00		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	32.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
115	2	17	05		.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	103.982.000,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	85.537.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	103.982.000,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.537.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	103.982.000,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	85.537.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
116	2	17	06		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	23.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	16.200.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	23.000.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	16.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	23.000.000,00		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	16.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
117	2	17	07		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	610.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	132.630.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	610.000.000,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	132.630.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	22.000.000,00		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	44.280.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	588.000.000,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	88.350.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
118	2	17	08		.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	85.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	516.209.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	85.000.000,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	516.209.600,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro									selaras		
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	85.000.000,00		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	516.209.600,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3				-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.492.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.423.133.800,00				
	3	30			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			857.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			840.853.800,00				
119	3	30	03		.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	15.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	15.000.000,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									Tidak selaras		
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	15.000.000,00		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
120	3	30	04		.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	242.000.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	266.066.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	32.000.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	168.866.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	32.000.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	168.866.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	189.000.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	64.800.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	105.000.000,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan									selaras		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	69.000.000,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	64.800.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	21.000.000,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									selaras		
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	21.000.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	32.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
121	3	30	06		.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	132.622.933,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	136.980.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	132.622.933,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	136.980.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									selaras		
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	132.622.933,00		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	136.980.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			635.000.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			582.280.000,00				
122	3	31	02		.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	590.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	565.000.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	590.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	565.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	65.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		Tidak selaras	Tidak selaras
123	3	31	04		.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	45.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	17.280.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	45.000.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	17.280.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	45.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	17.280.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
					,	UPT Sarana Distribusi Perdagangan			9.733.923.276,00	UPT Sarana Distribusi Perdagangan			9.335.165.670,00				
	3				-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.492.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.423.133.800,00				
	3	30			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			857.312.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			840.853.800,00				
124	3	30	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.566.862.670,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.500.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.400.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	36.190.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	36.190.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	27.217.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	333.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	315.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
					.	UPT PLUT-KUMKM			9.733.923.276,00	UPT PLUT-KUMKM			9.335.165.670,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.912.031.870,00				
	2	17			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			8.241.610.343,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.912.031.870,00				
125	2	17	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.868.618.343,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	7.566.862.670,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	796.561.503,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	55.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	934.021.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.066.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.144.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.343.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.343.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	94.368.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	89.976.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
					.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.409.312.791,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.534.450.582,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.409.312.791,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.534.450.582,00				
	2	18			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.409.312.791,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.534.450.582,00				
126	2	18	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	3.749.752.091,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.224.926.482,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	96.865.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	77.311.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.802.100,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.348.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.161.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.153.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	9.966.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.611.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.121.700,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.512.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.168.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.028.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	11.170.500,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.679.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	42.475.700,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	30.980.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	-	3.235.884.021,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	-	3.511.582.282,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.113.281.121,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.392.623.282,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.216.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.530.700,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.308.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.856.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.051.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	199.854.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	204.519.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.164.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.508.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.714.400,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	16.858.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.643.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.167.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	161.332.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	164.986.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	-	171.327.970,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	-	387.903.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	130.476.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	188.482.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.851.870,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.421.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	-	45.820.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	-	43.610.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	37.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.820.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
127	2	18	02		.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
128	2	18	03		.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	-	35.023.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	35.023.200,00		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	35.023.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
129	2	18	04		.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.100,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.100,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	-	134.564.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	100.681.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	19.677.100,00		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	19.677.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	14.206.000,00		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	14.206.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
130	2	18	05		.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	459.100.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	84.867.500,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	459.100.000,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	-	84.867.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	459.100.000,00		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	84.867.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
131	2	18	06		.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	30.873.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	55.069.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	30.873.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	55.069.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	30.873.400,00		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	55.069.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
					,	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.918.682.112,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.355.935.412,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.918.682.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.355.935.412,00				
	2	23			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.603.424.151,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.108.142.497,00				
132	2	23	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	-	5.886.955.901,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	-	5.414.144.097,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	-	40.958.639,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	-	19.036.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.972.889,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.020.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.604.250,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.925.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.035.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.588.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.721.300,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.271.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.095.100,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.594.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	28.529.800,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3.638.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.908.463.690,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.189.154.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.768.347.090,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.048.162.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.274.400,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.670.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.476.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.118.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.365.800,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	3.204.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	-	30.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	-	40.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	-	378.278.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	-	383.527.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi										selaras	selaras
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.988.200,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.517.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras	selaras
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.369.700,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.221.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras	selaras
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.665.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41.892.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										selaras	selaras
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.883.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										selaras	selaras
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.580.600,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	18.381.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras	selaras
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	261.005.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	259.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										selaras	selaras
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	10.669.900,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12.232.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras		
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	293.709.622,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	328.716.597,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	129.509.622,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	130.916.597,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	157.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	187.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	235.545.450,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	453.110.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	83.510.250,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	68.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	67.187.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	62.320.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	52.740.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.527.700,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	257.060.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
133	2	23	02		.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	-	716.468.250,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	-	693.998.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	-	620.255.850,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	-	421.302.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	19.540.800,00		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	39.648.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	7.212.500,00		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	23.220.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	24.911.800,00		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	31.469.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	6.228.000,00		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	87.295.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	16.037.550,00		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	42.888.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	18.455.200,00		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	23.154.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	6.582.800,00		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	141.927.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									selaras		
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	521.287.200,00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	31.700.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	-	96.212.400,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	-	272.695.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	17.118.600,00		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	27.630.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	61.586.200,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	217.955.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	17.507.600,00		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	27.109.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			315.257.961,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			247.792.915,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
134	2	24	02		.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	-	292.843.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	-	232.086.015,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	104.917.150,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	170.586.275,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	20.017.200,00		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	31.049.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	4.532.000,00		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	2.463.350,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	80.367.950,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	137.073.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	7.429.100,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	-	19.232.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									selaras		
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	7.429.100,00		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	19.232.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	180.497.650,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	42.267.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									selaras		
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	46.780.000,00		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	9.628.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	133.717.650,00		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	32.639.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
135	2	24	03		.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	-	16.332.700,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	-	12.264.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	12.332.700,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	12.264.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									Tidak selaras		
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	1.000.000,00		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	11.332.700,00		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	12.264.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	4.000.000,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									Tidak selaras		
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	2.000.000,00		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									Tidak selaras		
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	2.000.000,00		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
136	2	24	04		.	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	6.081.361,00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	3.442.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	6.081.361,00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	3.442.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									Tidak selaras		
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	3.081.361,00		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	3.000.000,00		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	3.442.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
					,	Dinas Kelautan dan Perikanan			5.002.933.933,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			5.636.446.875,00				
	3				-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.002.933.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			5.636.446.875,00				
	3	25			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.002.933.933,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			5.636.446.875,00				
137	3	25	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.904.933.933,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.715.888.375,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	35.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	30.831.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.075.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.890.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.895.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.112.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.859.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.180.200.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.656.438.385,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.980.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.466.136.085,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	153.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.472.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	27.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	26.630.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	20.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	20.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	301.523.933,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	250.441.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	8.500.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	10.241.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	10.200.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	10.200.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	282.823.933,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	230.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	40.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	81.805.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.800.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	81.805.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	97.700.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.967.990,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.921.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	45.046.490,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	178.330.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	608.405.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	110.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	171.570.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	22.330.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	23.340.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	413.495.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	51.380.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	25	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	51.380.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		Tidak selaras	Tidak selaras
138	3	25	03		.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	350.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	205.300.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	260.000.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	182.255.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									selaras		
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	130.000.000,00		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	120.147.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									selaras		
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	130.000.000,00		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	62.108.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	70.000.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17.582.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	27.000.000,00		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	4.837.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	23.000.000,00		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	5.702.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	20.000.000,00		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	7.043.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	20.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.463.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT									selaras		
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	5.463.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
139	3	25	04		.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	388.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	229.019.500,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	152.000.000,00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	92.169.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	120.000.000,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	70.790.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	20.000.000,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	9.379.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan									selaras		
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	12.000.000,00		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	236.000.000,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	136.849.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	88.000.000,00		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	59.975.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	18.000.000,00		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	10.559.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	100.000.000,00		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	39.734.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									selaras		
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	18.000.000,00		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	14.580.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
140	3	25	06		-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	360.000.000,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	486.239.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	100.000.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	306.071.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	306.071.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	80.000.000,00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	70.464.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	80.000.000,00		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	70.464.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	180.000.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	109.704.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	90.000.000,00		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	75.075.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	90.000.000,00		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	34.629.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
					.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			9.269.173.801,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			8.329.524.614,00				
	2				-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			665.353.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.977.865.230,00				
	2	22			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			665.353.300,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			5.977.865.230,00				
141	2	22	02		.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	- Persen	550.731.700,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	- Persen	498.187.700,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	100 Persen	94.436.300,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	100 Persen	94.436.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									selaras		
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	94.436.300,00		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	94.436.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	-	456.295.400,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	-	403.751.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400,00		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	218.317.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									selaras		
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	237.978.000,00		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	185.434.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
142	2	22	05		.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Persen	114.621.600,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Persen	110.136.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	6 Objek	94.877.600,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	6 Objek	90.392.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	94.877.600,00		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	90.392.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	-	19.744.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	-	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
143	2	22	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.708.707.117,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.369.540.930,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.597.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	19.580.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.596.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.785.786.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.448.970.390,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Tidak selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	0,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.262.037.890,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.742.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.110.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.486.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.594.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	86.360.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	70.926.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.880.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	171.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	156.130.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	153.780.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3				-	NON URUSAN			8.603.820.501,00	NON URUSAN			2.351.659.384,00				
	3	26			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.603.820.501,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2.351.659.384,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
144	3	26	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.708.707.117,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	-	5.369.540.930,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	-	32.773.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.597.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	19.580.200,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10.596.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.785.786.877,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	-	4.448.970.390,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Tidak selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	4.592.796.877,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	157.200.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.910.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									Tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	16.286.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.594.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-	503.016.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	86.360.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	70.926.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.880.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	32.850.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	-	230.999.940,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	171.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	156.130.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	153.780.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.349.700,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.480.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.300.800,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	37.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3				-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			8.603.820.501,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.351.659.384,00				
	3	26			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			8.603.820.501,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.351.659.384,00				
145	3	26	02		.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	-	1.141.587.841,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	-	920.967.841,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	-	39.250.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	-	27.130.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	39.250.000,00		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	27.130.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	-	621.188.000,00	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	-	588.188.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	64.362.000,00		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	31.362.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	556.826.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	556.826.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi	-	481.149.841,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	-	305.649.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	481.149.841,00		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	305.649.841,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
146	3	26	03		.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	-	1.261.764.464,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	-	977.190.464,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	-	1.261.764.464,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	-	977.190.464,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	69.750.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	1.075.656.464,00		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	407.439.964,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	116.357.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
147	3	26	05		.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	-	491.761.079,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	-	453.501.079,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	-	362.787.600,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	-	336.227.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	169.540.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	169.540.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	108.400.000,00		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	108.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	84.847.600,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	58.287.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	-	128.973.479,00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	-	117.273.479,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	128.973.479,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	117.273.479,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
					,	Dinas Pertanian			19.468.874.438,00	Dinas Pertanian			23.016.695.414,00				
	3				-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			19.468.874.438,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			23.016.695.414,00				
	3	27			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			19.468.874.438,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			23.016.695.414,00				
148	3	27	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	15.076.130.164,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	14.166.944.902,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	95.818.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	41.907.800,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	30.160.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	11.498.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	4.899.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	5.187.800,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	3.320.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	3.320.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.019.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	2.019.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	1.174.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	1.174.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	6.429.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	804.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	47.817.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	17.905.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	124 orang	14.032.779.070,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	124 orang	13.142.327.702,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	13.767.237.770,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	12.893.793.702,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	261.447.200,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	244.440.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.569.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1.569.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	898.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	898.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1.627.100,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	1.627.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	-	5.394.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	-	10.164.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	5.394.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	10.164.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	-	38.187.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	-	21.807.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	38.187.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	21.807.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian	-	328.651.294,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian	-	415.808.400,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	696.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	696.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	119.030.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	22.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	16.908.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	73.235.294,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	86.965.900,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	200.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	189.488.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2.720.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	2.720.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	-	494.730.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	-	452.350.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	100.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	394.730.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	352.350.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	-	80.570.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	-	82.580.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	74.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	76.000.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	6.570.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	6.580.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
149	3	27	02		.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100% Persen	2.629.965.060,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	100% Persen	3.958.653.430,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	14 Laporan	2.540.061.860,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	14 Laporan	2.974.188.080,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									selaras		
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	2.480.061.860,00		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan	2.914.535.080,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									selaras		
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	60.000.000,00		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	59.653.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	2 Laporan	22.506.950,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	2 Laporan	8.004.100,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									selaras		
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	22.506.950,00		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	8.004.100,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	100% Persen	32.879.950,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	100% Persen	948.544.950,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									Tidak selaras		
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 0	20.289.850,00		Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	0 0	939.554.850,00	DINAS PERTANIAN		Tidak selaras	Tidak selaras
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan Laporan	12.590.100,00		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Laporan Laporan	8.990.100,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	85% Persen	34.516.300,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	85% Persen	27.916.300,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									selaras		
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 dokumen Laporan	34.516.300,00		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 dokumen Laporan	27.916.300,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	85% Persen	0,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	85% Persen	0,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									selaras		
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	128 Ekor	0,00		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	128 Ekor	0,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
150	3	27	03		.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	60% Persen	1.001.670.000,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	60% Persen	4.064.357.075,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	25 Unit	1.001.670.000,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	25 Unit	4.064.357.075,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									selaras		
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	1.001.670.000,00		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	4 Laporan	4.064.357.075,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
151	3	27	04		.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0,14% Persen	250.872.394,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	0,14% Persen	232.036.187,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	100% Persen	131.519.664,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	100% Persen	119.823.432,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									selaras		
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah	17.755.450,00		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	2 Wilayah	17.755.387,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 Laporan	113.764.214,00		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	3 Laporan	102.068.045,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50% Persen	35.010.230,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50% Persen	24.534.255,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	35.010.230,00		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	2 Laporan	24.534.255,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	25% Persen	84.342.500,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	25% Persen	87.678.500,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									selaras		
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	52.078.700,00		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	61.714.700,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									selaras		
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	32.263.800,00		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	0 Unit Usaha	25.963.800,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
152	3	27	05		.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	-	30.968.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	-	34.046.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	-	30.968.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	-	34.046.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	10.968.000,00		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	19.960.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	20.000.000,00		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	0 Ha	14.086.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
153	3	27	06		.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	50% Persen	24.639.900,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	50% Persen	43.530.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Ijin Usaha	24.639.900,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Ijin Usaha	43.530.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									selaras		
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	24.639.900,00		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	0 Dokumen	43.530.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
154	3	27	07		.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20% Persen	454.628.920,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	20% Persen	517.127.820,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	62 Unit	454.628.920,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	62 Unit	517.127.820,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	86.999.900,00		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	84.479.700,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	269.394.220,00		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	337.217.120,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	98.234.800,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	95.431.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
					,	Sekretariat Daerah			46.059.135.232,00	Sekretariat Daerah			49.941.811.742,00				
	4				-	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			46.059.135.232,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			49.941.811.742,00				
	4	01			,	SEKRETARIAT DAERAH			46.059.135.232,00	SEKRETARIAT DAERAH			49.941.811.742,00				
155	4	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	30.418.662.832,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	33.546.834.448,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	12.504.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	13.104.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.648.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.889.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.807.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.807.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.793.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.714.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.807.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.001.375.641,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.520.496.407,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.365.803.141,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.884.949.807,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	630.939.500,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	630.939.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.843.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.837.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.790.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.769.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.200,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	15.334.200,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	15.334.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.526.736.376,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.650.576.476,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.889.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.889.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.710.075,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	94.704.975,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.391.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	74.391.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	942.147.050,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.068.757.250,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	351.598.251,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	348.833.251,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	411.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	0,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	411.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		Tidak selaras	Tidak selaras
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	2.773.715.880,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.502.119.980,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	295.564.900,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	295.564.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	769.888.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.412.983.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.708.262.180,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.793.572.780,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.584.473.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.580.257.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	450.630.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	448.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	653.470.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	651.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	201.210.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	201.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.097.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	210.097.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.066.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.182.399.585,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.198.849.985,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	521.399.585,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	537.849.985,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.173.972.900,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.981.514.900,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.010.008.000,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.010.008.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.462.000,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	809.004.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	449.378.250,00	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	399.378.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	197.265.950,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	178.477.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	63.128.300,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	56.513.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	63.065.650,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	53.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	62.904.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	53.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	63.014.350,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	57.023.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	2.698.773.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	3.273.773.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.816.060.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	2.091.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	541.582.500,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	786.512.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									selaras		
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	341.130.500,00		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	396.200.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
156	4	01	02		.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	13.127.018.150,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	14.042.298.150,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.125.476.750,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.910.756.750,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	500.229.550,00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	1.017.006.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	278.515.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	459.549.850,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	346.731.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	434.200.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	9.833.985.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	9.833.985.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	219.139.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	219.139.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	860.833.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	860.833.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.087.583.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.217.583.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									selaras		
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	511.435.000,00		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	547.504.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									selaras		
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	274.232.000,00		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	325.922.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan									selaras		
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	301.916.000,00		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	344.157.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
157	4	01	03		.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	2.513.454.250,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	2.352.679.144,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	448.378.600,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	413.378.600,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	73.726.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	63.726.300,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	249.394.700,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	229.394.700,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	68.815.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	68.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	55.442.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	50.442.600,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.254.984.750,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.204.211.244,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	73.706.250,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	71.938.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	1.034.053.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	984.053.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	147.225.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	148.220.144,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	698.102.600,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	638.101.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	225.814.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	61.919.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	150.096.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	184.486.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	322.192.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	391.696.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	111.988.300,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	96.988.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	33.286.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	29.270.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	1.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	77.701.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	67.718.300,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
					.	Sekretariat DPRD			29.127.825.113,00	Sekretariat DPRD			28.338.851.535,00				
	4				-	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			29.127.825.113,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			28.338.851.535,00				
	4	02			.	SEKRETARIAT DPRD			29.127.825.113,00	SEKRETARIAT DPRD			28.338.851.535,00				
158	4	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.766.825.113,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.867.123.235,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	17.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.758.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.983.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.961.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.258.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.241.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.241.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.289.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.785.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.992.862.113,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.236.098.735,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.765.362.113,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.932.081.735,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	220.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	297.796.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.146.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.075.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	600.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	499.239.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	600.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	499.239.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	805.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	760.684.500,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.174.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	200.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	468.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	75.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	33.260.500,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	100.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									tidak selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	100.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD		tidak selaras	tidak selaras
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.726.213.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	834.328.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	200.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	144.653.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	426.213.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.662.800,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	282.012.200,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	950.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	500.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.327.526.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	395.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	73.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	5.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD		tidak selaras	tidak selaras
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	100.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.253.886.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	525.000.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	373.905.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									selaras		
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	100.000.000,00		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	27.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	350.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	271.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	500.000.000,00	Layanan Administrasi DPRD	-	-	815.584.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	500.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	815.584.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
159	4	02	02		.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	9.361.000.000,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	8.471.728.300,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	12 Dokumen	1.261.000.000,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	12 Dokumen	1.293.166.300,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	700.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	554.891.300,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Dokumen	708.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	2.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	21.675.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	5.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	630.000.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	395.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	128.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	128.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	3.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	150.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	128.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	3.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	3.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	175.000.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	62.505.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	27.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	7.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	6.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									selaras		
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	27.500.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	7.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	5.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	17.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	6.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	17.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	5.670.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	22.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	3.200.000.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.324.495.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	2.000.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									selaras		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	200.000.000,00		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	247.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	500.000.000,00		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	274.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.515.000.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.284.660.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.350.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									selaras		
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.500.000.000,00		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.281.310.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	180.000.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	111.802.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	8.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	175.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	103.252.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	1.400.000.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.400.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			8.419.304.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			8.229.445.783,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.419.304.800,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.229.445.783,00				
	5	01				PERENCANAAN			8.419.304.800,00	PERENCANAAN			8.229.445.783,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
160	5	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.030.546.083,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	-	132.126.620,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	-	102.478.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.714.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.256.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.050.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.752.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	5.405.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	6.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.482.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.265.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	9.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.856.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	98.353.620,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	34.170.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.112.752.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.854.787.100,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.898.734.103,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									tidak selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	141.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
	5				-	NON URUSAN			8.419.304.800,00	NON URUSAN			8.229.445.783,00				
	5	01			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.419.304.800,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			8.229.445.783,00				
161	5	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.030.546.083,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.112.752.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan											
	5				-	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.419.304.800,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.229.445.783,00				
	5	01				PERENCANAAN			8.419.304.800,00	PERENCANAAN			8.229.445.783,00				
162	5	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.051.133.100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	-	6.030.546.083,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.022.188.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-	5.112.752.403,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.140.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.711.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	19.021.700,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	22.299.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.819.400,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	19.922.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	7.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	7.935.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.935.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	-	10.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	-	15.762.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									tidak selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	2.500.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.448.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	2.514.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	525.808.280,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	520.284.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.285.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.167.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									tidak selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.352.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	113.240.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	108.527.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	101.173.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	62.490.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	282.758.080,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	341.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	179.660.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	199.114.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	98.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	121.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.590.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.124.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.320.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.866.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	33.350.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	20.924.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	-	173.850.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	-	72.220.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	112.490.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	63.840.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	11.360.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.380.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									tidak selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
163	5	01	02		.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	98.60 98,6 persen Persen	693.836.500,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	98.60 98,6 persen Persen	706.431.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	98,6 Persen	537.648.600,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	98,6 Persen	529.369.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									selaras		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	23.825.900,00		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	46.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	57.602.400,00		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	51.822.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	285.835.300,00		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	221.691.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	170.385.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	209.036.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	-	156.187.900,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	-	177.062.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	40.932.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	72.651.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	115.255.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	104.411.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
164	5	01	03		.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	-	1.674.335.200,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	-	1.492.468.700,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	573.754.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	562.705.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	75.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	110.951.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	60.303.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	58.303.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	74.633.200,00		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	69.633.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	190.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	160.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	116.015.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	106.015.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	57.803.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	57.803.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	-	544.107.800,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	-	431.289.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	131.076.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	111.076.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	112.265.500,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	49.447.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	21.172.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	21.172.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	135.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	124.569.900,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	114.569.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	20.023.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	20.023.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	556.473.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	498.473.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	190.876.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	94.680.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	100.499.400,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	190.879.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	49.201.400,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	39.451.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	114.714.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	94.714.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	77.473.500,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	55.039.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	23.707.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	23.707.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
					,	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			22.445.088.837,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			23.300.217.960,00				
	5				-	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			22.445.088.837,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			23.300.217.960,00				
	5	02			,	KEUANGAN			22.445.088.837,00	KEUANGAN			23.300.217.960,00				
165	5	02	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	14.085.619.650,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	15.255.668.220,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	78.316.950,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	43.650.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.805.950,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.907.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.118.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.478.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	8.279.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.959.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.039.900,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.039.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.951.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.951.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	16.683.900,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.515.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	14.437.800,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.797.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	12.740.846.166,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	13.705.502.530,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	11.313.036.578,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.278.628.098,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.961.332,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.961.332,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.919.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	18.919.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	169.796.456,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	161.721.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	28.379.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	28.379.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	8.752.800,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.892.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	799.394.759,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	824.976.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.446.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.443.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	353.330.050,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	353.330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	67.113.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	72.003.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	373.504.809,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	394.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	204.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	181.764.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	204.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	181.764.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	334.338.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	369.267.840,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	40.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	53.280.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	143.061.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.327.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.830.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	64.814.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.846.900,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	85.845.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	132.519.675,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	130.506.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	73.298.875,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	73.293.750,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	57.220.800,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	57.212.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									tidak selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
166	5	02	02		.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	-	5.552.386.089,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	-	4.788.288.700,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	-	1.553.438.350,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	-	1.402.048.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.815.250,00		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	30.815.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	36.428.050,00		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	36.428.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	49.589.500,00		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	49.589.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	189.267.200,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	139.267.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	182.840.000,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	107.840.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	159.863.400,00		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	133.485.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	707.670.650,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	707.659.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	196.964.300,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	196.964.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	-	577.052.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	-	588.904.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	49.127.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	49.127.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	87.304.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	87.304.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									selaras		
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	66.846.000,00		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	66.846.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	136.121.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	136.121.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	108.218.000,00		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	108.218.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	129.436.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	141.288.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	-	485.077.062,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	-	478.867.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	24.695.700,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	24.646.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									selaras		
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	26.659.000,00		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	20.214.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	154.119.000,00		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	178.063.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	104.162.481,00		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	89.762.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	163.054.481,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	157.814.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	12.386.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	8.366.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	-	2.757.750.377,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	-	2.139.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.757.750.377,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.139.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	179.068.300,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	179.068.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	179.068.300,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	179.068.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
167	5	02	03		.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	958.926.694,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	896.780.376,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	958.926.694,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	-	896.780.376,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									selaras		
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	74.192.950,00		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	70.965.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	58.149.850,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	58.553.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	9.387.600,00		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	8.315.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	261.258.700,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	255.578.686,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	106.219.894,00		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	118.257.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.383.260,00		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	94.693.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	49.720.400,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	60.715.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	78.958.140,00		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	72.553.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	127.647.950,00		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	124.268.390,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	29.951.450,00		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	23.473.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	10.056.500,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	9.406.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
168	5	02	04		.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	-	1.848.156.404,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	-	2.359.480.664,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	1.848.156.404,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	2.359.480.664,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	22.247.600,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	22.247.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	66.393.650,00		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	66.392.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	41.179.450,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	127.721.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	353.847.800,00		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	637.217.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	197.659.300,00		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	221.147.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	172.336.900,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	187.940.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	19.950.000,00		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	17.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	22.590.000,00		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	51.260.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	682.094.704,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	835.330.364,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	50.368.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	37.383.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	145.409.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	80.768.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	74.080.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	74.079.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
					.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			7.667.995.213,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			9.316.197.780,00				
	5				-	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.667.995.213,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			9.316.197.780,00				
	5	03			,	KEPEGAWAIAN			6.850.442.213,00	KEPEGAWAIAN			7.025.496.030,00				
169	5	03	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	5.788.728.213,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	5.673.793.430,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	47.857.100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	74.698.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.830.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.052.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	8.877.100,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.431.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.459.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.844.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.924.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.134.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.406.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	8.741.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	56.517.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.830.855.113,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	4.582.838.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.673.030.113,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.427.023.430,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	131.527.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	133.959.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.603.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.547.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.695.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.146.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.163.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	57.750.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	58.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	27.750.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	28.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	471.502.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	459.817.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	35.712.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	34.902.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	69.940.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	67.535.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	24.190.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	59.700.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	51.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	77.320.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	77.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	198.640.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	221.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	30.680.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	157.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	30.680.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	157.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	181.444.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168.970.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	44.590.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	43.790.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.244.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	101.610.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	168.640.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	171.230.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	98.300.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	99.660.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	38.340.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	39.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.970.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
170	5	03	02		.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	-	1.061.714.000,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	-	1.351.702.600,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	-	412.670.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	-	781.441.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.220.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	11.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	276.150.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	516.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	25.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	27.675.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	60.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	176.655.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	40.300.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	49.531.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	-	228.208.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	-	229.122.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	169.430.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	170.350.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									selaras		
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	58.778.000,00		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	58.772.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	-	270.471.000,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	-	198.777.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									selaras		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	255.471.000,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	193.730.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	5.047.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	-	150.365.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	-	142.362.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	55.645.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	55.113.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									selaras		
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	25.000.000,00		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	11.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									selaras		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	23.000.000,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	13.245.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	46.720.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	62.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	04			.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			817.553.000,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.290.701.750,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
171	5	04	02		.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	-	817.553.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	-	2.290.701.750,00		selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	-	15.000.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	-	67.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	67.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-	802.553.000,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	-	2.223.511.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	802.553.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	2.223.511.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
					,	Badan Riset dan Inovasi Daerah			4.839.758.784,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah			4.346.025.947,00				
	5				-	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.839.758.784,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			4.346.025.947,00				
	5	05			-	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			4.839.758.784,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			4.346.025.947,00				
172	5	05	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.467.758.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.096.302.547,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	50.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.768.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.533.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.220.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.067.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.006.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.461.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.698.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.783.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.533.946.984,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.382.671.457,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.371.146.984,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.161.125.457,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	127.800.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	191.196.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.830.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	8.928.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.592.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	57.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	48.334.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.196.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.320.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.500.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.818.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	573.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	442.890.740,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.747.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.143.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.959.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	35.217.200,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	30.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	26.190.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	329.634.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	53.311.800,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	680.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	53.311.800,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	680.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.191.950,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.836.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.999.950,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	53.356.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	78.765.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	30.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	37.830.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.000.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	19.230.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	21.705.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
173	5	05	03		.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	-	1.372.000.000,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	-	1.249.723.400,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	-	265.000.000,00	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	-	518.469.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	51.451.200,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	40.000.000,00		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	58.918.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	204.033.100,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	100.644.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	50.000.000,00		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	48.650.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	50.000.000,00		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	54.773.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	-	1.107.000.000,00	Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	-	731.254.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	87.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	43.755.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	400.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	253.622.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	25.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	119.007.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	75.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	55.016.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	168.974.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	200.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	90.880.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	100.000.000,00		Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	50.000.000,00		Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
	5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	70.000.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		tidak selaras	tidak selaras
					,	Inspektorat			11.351.487.142,00	Inspektorat			14.175.247.994,00				
	6				-	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.351.487.142,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			14.175.247.994,00				
	6	01			,	INSPEKTORAT DAERAH			11.351.487.142,00	INSPEKTORAT DAERAH			14.175.247.994,00				
174	6	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	10.529.248.042,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	12.739.760.194,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	13.339.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	-	33.460.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	9.522.205.142,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	-	9.433.855.794,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	9.391.088.342,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	8.910.995.794,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	125.400.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	508.520.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5.716.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	14.382.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.822.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.905.600,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	122.622.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	942.793.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	90.000.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT		tidak selaras	tidak selaras
	6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	INSPEKTORAT		tidak selaras	tidak selaras
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	101.905.600,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	848.013.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	613.412.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.961.837.400,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.750.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.750.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	658.970.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	46.799.400,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									tidak selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.927.800,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	INSPEKTORAT		tidak selaras	tidak selaras
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.828.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	72.110.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	60.970.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.092.888.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1.905.600,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.350.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	INSPEKTORAT	tidak selaras	tidak selaras	tidak selaras
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	INSPEKTORAT		tidak selaras	tidak selaras
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	159.572.300,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	223.662.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.704.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.792.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.416.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.270.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	127.451.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	171.600.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	82.380.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	129.770.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	58.540.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	106.620.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.840.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	23.150.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT		tidak selaras	tidak selaras
175	6	01	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	-	566.108.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	-	925.350.800,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	-	548.108.500,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	-	826.350.800,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	107.115.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	107.115.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	89.475.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	34 Laporan	89.475.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	163.010.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	266.970.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12.600.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	12.600.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									selaras		
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	63.136.300,00		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	183.851.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	112.772.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	166.339.800,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	18.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-	99.000.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	18.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	99.000.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
176	6	01	03		.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	-	256.130.600,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	-	510.137.000,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	-	256.130.600,00	Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	-	510.137.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	133.980.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	168.060.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	27.000.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	29.700.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	43.250.600,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	206.536.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	51.900.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	105.841.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
					,	Kecamatan RasanaE Barat			12.526.588.727,00	Kecamatan RasanaE Barat			12.545.738.327,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
177	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	8.841.808.277,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	8.921.043.327,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	31.903.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	40.356.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.700.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.730.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.760.600,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.360.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	14.390.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.360.600,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.360.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.933.385.777,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.831.827,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.659.395.777,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.726.843.827,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	270.469.400,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	270.468.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.520.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.520.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	198.055.700,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	203.715.500,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.281.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.260.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.900.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.499.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	70.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	71.696.500,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.274.700,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.360.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	601.763.800,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	613.389.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	287.472.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	287.683.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.361.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	264.291.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	275.345.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	76.700.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	62.751.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	55.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	47.855.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.700.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.946.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.950.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
178	7	01	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	50.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	33.561.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	50.000.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	33.561.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.000.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.561.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
179	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	14.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	7.664.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	-	125.921.700,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	-	123.223.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	125.921.700,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	123.223.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
180	7	01	04		.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	-	68.400.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	-	63.780.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	-	68.400.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	-	63.780.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	68.400.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	63.780.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kelurahan Paruga			12.526.588.727,00	Kelurahan Paruga			12.545.738.327,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
181	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	589.506.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	584.505.900,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kelurahan Dara			12.526.588.727,00	Kelurahan Dara			12.545.738.327,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
182	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	601.201.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	596.210.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kelurahan Sarae			12.526.588.727,00	Kelurahan Sarae			12.545.738.327,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
183	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	650.505.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	645.505.900,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kelurahan Tanjung			12.526.588.727,00	Kelurahan Tanjung			12.545.738.327,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
184	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	594.434.550,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	589.434.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kelurahan Nae			12.526.588.727,00	Kelurahan Nae			12.545.738.327,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
185	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	537.163.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	532.163.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kelurahan Pane			12.526.588.727,00	Kelurahan Pane			12.545.738.327,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.526.588.727,00	UNSUR KEWILAYAHAN			12.545.738.327,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.526.588.727,00	KECAMATAN			12.545.738.327,00				
186	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.566.380.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.527.354.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.440.458.750,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	453.647.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	448.647.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
					,	Kecamatan RasanaE Timur			14.063.385.292,00	Kecamatan RasanaE Timur			14.440.386.130,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
187	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.604.417.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7				-	NON URUSAN			14.063.385.292,00	NON URUSAN			14.440.386.130,00				
	7	01			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.063.385.292,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.440.386.130,00				
188	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.604.417.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01														
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
189	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.604.417.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7				-	NON URUSAN			14.063.385.292,00	NON URUSAN			14.440.386.130,00				
	7	01			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.063.385.292,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			14.440.386.130,00				
190	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.604.417.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD											
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01				KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
191	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.232.478.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.604.417.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	48.750.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	40.000.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.190.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	-	9.158.695.092,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	-	9.531.720.930,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.829.695.092,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	9.252.920.930,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	325.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	274.800.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	185.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	199.350.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	130.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	126.350.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.033.100,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.457.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	122.601.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.656.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	745.033.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	676.200.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	25.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	25.000.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
192	7	01	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	15.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.182.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	15.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	10.182.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.182.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
193	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	15.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.150.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	130.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
194	7	01	04		.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	33.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	69.600.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	33.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	69.600.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	33.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.600.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Nungga			14.063.385.292,00	Kelurahan Nungga			14.440.386.130,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
195	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	454.361.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	459.098.600,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Lelamase			14.063.385.292,00	Kelurahan Lelamase			14.440.386.130,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
196	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	509.154.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	514.154.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Dodu			14.063.385.292,00	Kelurahan Dodu			14.440.386.130,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
197	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	505.053.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	500.633.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Lampe			14.063.385.292,00	Kelurahan Lampe			14.440.386.130,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
198	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.033.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	405.950.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Kodo			14.063.385.292,00	Kelurahan Kodo			14.440.386.130,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
199	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	410.655.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.293.100,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Kumbe			14.063.385.292,00	Kelurahan Kumbe			14.440.386.130,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
200	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	529.994.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	520.950.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Oi Fo'o			14.063.385.292,00	Kelurahan Oi Fo'o			14.440.386.130,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
201	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.950.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	405.955.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kelurahan Oi Mbo			14.063.385.292,00	Kelurahan Oi Mbo			14.440.386.130,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			14.063.385.292,00	UNSUR KEWILAYAHAN			14.440.386.130,00				
	7	01			,	KECAMATAN			14.063.385.292,00	KECAMATAN			14.440.386.130,00				
202	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.782.907.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.756.186.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.652.907.100,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	392.703.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	400.550.900,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
					,	Kecamatan Asakota			12.962.840.465,00	Kecamatan Asakota			13.425.854.515,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				
203	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.894.513.464,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.275.778.215,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.300.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.575.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.002.328.290,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.561.322.815,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.522.474.690,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	8.048.741.615,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	473.553.600,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	506.066.200,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.575.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.725.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	5.015.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	36.537.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	KECAMATAN ASAKOTA	tidak selaras	tidak selaras	tidak selaras
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									tidak selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	36.537.500,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	0,00	KECAMATAN ASAKOTA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	251.286.785,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.185.400,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	37.482.185,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.375.400,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	82.098.500,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.706.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3.810.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	127.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	87.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	424.849.900,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	460.204.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	209.073.010,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	158.037.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	61.346.250,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.530.200,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	154.430.640,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	239.636.800,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	173.210.989,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	105.066.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	152.710.989,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	97.766.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	20.500.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	7.300.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
204	7	01	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	39.783.900,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	27.972.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	39.783.900,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	27.972.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.104.600,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	1.062.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	38.679.300,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	26.910.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
205	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.129.600,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.112.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	30.715.600,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	31.245.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	130.281.550,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	107.813.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	130.281.550,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	107.813.500,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
206	7	01	04		.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	46.790.800,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	42.240.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	46.790.800,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	42.240.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	46.790.800,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	42.240.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
207	7	01	05		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	3.150.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	2.852.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	3.150.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.852.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	3.150.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	2.852.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
					.	Kelurahan Kolo			12.962.840.465,00	Kelurahan Kolo			13.425.854.515,00				
	7				-	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			.	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				
208	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	623.642.198,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	644.144.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
					.	Kelurahan Melayu			12.962.840.465,00	Kelurahan Melayu			13.425.854.515,00				
	7				.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			.	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
209	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.656.120,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	614.634.400,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Jatiwangi			12.962.840.465,00	Kelurahan Jatiwangi			13.425.854.515,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				
210	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	728.792.082,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	744.287.300,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Ule			12.962.840.465,00	Kelurahan Ule			13.425.854.515,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				
211	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras	selaras	selaras
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	667.193.625,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	685.622.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras		
					,	Kelurahan Jatibaru			12.962.840.465,00	Kelurahan Jatibaru			13.425.854.515,00			selaras	selaras
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				
212	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.818.030,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	614.788.600,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Jatibaru Timur			12.962.840.465,00	Kelurahan Jatibaru Timur			13.425.854.515,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			12.962.840.465,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.425.854.515,00				
	7	01			,	KECAMATAN			12.962.840.465,00	KECAMATAN			13.425.854.515,00				
213	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.978.602.301,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.077.012.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.848.320.751,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.373.496,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	614.365.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
					,	Kecamatan Mpunda			17.910.868.587,00	Kecamatan Mpunda			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
214	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	-	13.238.587.177,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	-	13.709.817.604,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.602.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	10.759.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.016.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.042.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.005.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.079.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.580.800,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.638.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	11.813.107.477,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	12.403.717.004,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.246.971.377,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.804.820.904,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	556.935.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	589.695.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.295.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.295.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.905.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.905.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	436.321.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	339.479.600,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.491.400,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.822.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.822.200,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.389.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	101.301.400,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.871.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.406.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	64.896.800,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.500.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	216.800.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	142.500.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	877.703.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	867.711.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	338.277.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	364.215.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	58.626.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73.296.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	480.800.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	430.200.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100.852.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	88.151.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	61.282.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	62.982.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	11.149.800,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.078.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	28.420.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	20.090.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
215	7	01	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	65.800.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	-	61.469.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	-	44.920.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	-	40.829.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	31.000.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	26.897.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.920.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	13.932.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	20.880.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	20.640.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.880.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	20.640.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
216	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	-	14.132.300,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	-	14.329.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.132.300,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	14.329.200,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	6.060.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	-	129.423.950,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	-	128.016.300,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	129.423.950,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	128.016.300,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
217	7	01	04		.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	25.488.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	23.160.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	25.488.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	23.160.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	25.488.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	23.160.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
218	7	01	05		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	-	12.930.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	-	12.900.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	12.930.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	12.900.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	12.930.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	12.900.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Penatoi			17.910.868.587,00	Kelurahan Penatoi			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
219	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	76.130.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	402.060.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	452.173.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Lewirato			17.910.868.587,00	Kelurahan Lewirato			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
220	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	378.775.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	378.775.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Sadia			17.910.868.587,00	Kelurahan Sadia			18.372.741.304,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
221	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	19.605.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	414.197.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	433.802.800,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Mande			17.910.868.587,00	Kelurahan Mande			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
222	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	54.888.350,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	415.801.310,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	470.689.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Panggi			17.910.868.587,00	Kelurahan Panggi			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
223	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	364.374.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	364.374.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Sambinae			17.910.868.587,00	Kelurahan Sambinae			18.372.741.304,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
224	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	66.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	66.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	346.900.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	346.900.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Manggemaci			17.910.868.587,00	Kelurahan Manggemaci			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
225	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	58.969.950,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.938.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	432.908.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Monggonao			17.910.868.587,00	Kelurahan Monggonao			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
226	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	73.425.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	73.425.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.692.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.692.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Santi			17.910.868.587,00	Kelurahan Santi			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
227	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	51.600.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	51.600.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	369.011.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	369.011.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Matakando			17.910.868.587,00	Kelurahan Matakando			18.372.741.304,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			17.910.868.587,00	UNSUR KEWILAYAHAN			18.372.741.304,00				
	7	01			,	KECAMATAN			17.910.868.587,00	KECAMATAN			18.372.741.304,00				
228	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.568.063.410,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	4.565.394.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	-	4.424.507.160,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	-	4.423.049.200,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	92.737.150,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	52.730.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	383.600.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	423.607.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
					,	Kecamatan Raba			21.255.804.771,00	Kecamatan Raba			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
229	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	-	15.534.063.872,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	-	16.015.084.472,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	7.475.300,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	-	13.678.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	615.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.114.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.395.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.460.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.220.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.106.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.121.400,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.875.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.030.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.030.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.093.900,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.093.900,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.028.229.609,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.675.235.432,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.564.665.609,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	14.139.813.432,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	459.144.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	532.065.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.420.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.357.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	295.719.963,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	237.313.200,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		

No	Kode						RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11			
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.090.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.454.100,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										selaras		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	66.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	71.038.800,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	218.629.363,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.820.300,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		1.135.448.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	998.466.940,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	203.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	199.800.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										selaras		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	839.861.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	706.479.940,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		67.191.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										selaras		
								Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	57.191.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	80.420.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										tidak selaras		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.970.000,00	KECAMATAN RABA		tidak selaras	tidak selaras
	7				-	NON URUSAN				21.255.804.771,00	NON URUSAN			21.712.818.722,00				
	7	01			-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				21.255.804.771,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			21.712.818.722,00				
230	7	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		15.534.063.872,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	16.015.084.472,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		67.191.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	7					UNSUR KEWILAYAHAN				21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01				KECAMATAN				21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
231	7	01	02		.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	-		47.766.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	-	24.426.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	47.766.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	24.426.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	47.766.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	24.426.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
232	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	31.274.900,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	31.364.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	66.658.300,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	17.378.400,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	135.494.100,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	135.394.100,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	135.494.100,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	135.394.100,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
233	7	01	04		.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	26.825.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	75.450.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	26.825.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	-	75.450.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	26.825.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	75.450.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					.	Kelurahan Rabadompu Barat			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabadompu Barat			21.712.818.722,00				
	7				.	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			.	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
234	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	515.042.050,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	515.042.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Rabadompu Timur			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabadompu Timur			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
235	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	521.232.749,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	521.232.700,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Rabangodu Utara			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabangodu Utara			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
236	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	563.527.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	563.527.600,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Rabangodu Selatan			21.255.804.771,00	Kelurahan Rabangodu Selatan			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
237	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	507.303.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	507.303.750,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Rontu			21.255.804.771,00	Kelurahan Rontu			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
238	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	460.156.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	460.156.500,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Penaraga			21.255.804.771,00	Kelurahan Penaraga			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
239	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	498.202.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	498.202.300,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Penanae			21.255.804.771,00	Kelurahan Penanae			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
240	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	490.294.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	490.294.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Ntobo			21.255.804.771,00	Kelurahan Ntobo			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
241	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.422.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.422.900,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Kendo			21.255.804.771,00	Kelurahan Kendo			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
242	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	422.415.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	422.415.100,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Nitu			21.255.804.771,00	Kelurahan Nitu			21.712.818.722,00				
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
243	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	406.501.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	406.501.300,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					,	Kelurahan Rite			21.255.804.771,00	Kelurahan Rite			21.712.818.722,00				

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	7				,	UNSUR KEWILAYAHAN			21.255.804.771,00	UNSUR KEWILAYAHAN			21.712.818.722,00				
	7	01			,	KECAMATAN			21.255.804.771,00	KECAMATAN			21.712.818.722,00				
244	7	01	03		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.647.149.899,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	5.597.858.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.511.655.799,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	436.623.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	436.623.600,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
					.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.530.871.107,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.220.921.530,00				
	8				,	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.530.871.107,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.220.921.530,00				
	8	01			,	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.530.871.107,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.220.921.530,00				
245	8	01	01		.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	4.557.947.265,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	4.318.602.630,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	20.777.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	75.889.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.358.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	44.865.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.246.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.826.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.283.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.823.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.653.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.224.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.245.900,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.491.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.991.300,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.658.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.942.455.644,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	3.572.655.330,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.738.080.644,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.374.370.830,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	194.640.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	187.143.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.245.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.820.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.245.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.161.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.245.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.160.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	35.700.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	29.360.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	35.700.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	29.360.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	241.453.021,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	-	271.680.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.762.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.714.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	83.554.700,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	81.610.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	11.455.821,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	9.149.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.640.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.597.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	140.040.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	174.610.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	129.801.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	141.573.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	5.865.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	8.037.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.536.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.536.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	107.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	117.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	187.760.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-	227.444.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	77.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	58.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	10.760.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	9.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	159.444.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
246	8	01	02		.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	-	677.045.300,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	-	652.597.800,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	-	677.045.300,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	-	652.597.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/ sub kegiatan	Target program/ kegiatan/ sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	60.650.500,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	47.690.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	50.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	50.189.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									selaras		
							Jumlah Paskibraka	73 Orang	400.000.000,00		Jumlah Paskibraka	73 Orang	399.980.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	45.000.000,00		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	44.999.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	52.000.000,00		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	51.948.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	69.394.800,00		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	57.790.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
247	8	01	03		.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	1.382.896.600,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	-	1.345.684.800,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	-	1.382.896.600,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	-	1.345.684.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.277.792.600,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.246.672.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	105.104.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	99.012.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
248	8	01	04		.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.009.253.850,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.387.005.325,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.009.253.850,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	1.387.005.325,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.009.253.850,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.387.005.325,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras

No	Kode						RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11			
249	8	01	05		.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	176.947.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	177.652.000,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	176.947.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	177.652.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	76.947.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	75.944.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									selaras		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	101.708.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
250	8	01	06		.		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	-	1.726.781.092,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	-	1.339.378.975,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	-	1.726.781.092,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	-	1.339.378.975,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									selaras		

No	Kode					RENJA TAHUN 2025				RKA				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/kegiatan/sub kegiatan	Target program/kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11			
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	485.564.800,00		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	463.826.275,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	114.921.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	119.588.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	33.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	23.760.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
DALAM RENJA-P DAN RKA-P

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			246.902.344.121,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			243.741.365.911,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			243.974.365.221,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			240.713.387.011,00				
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			243.974.365.221,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			240.713.387.011,00				
1	1	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	206.214.569.371,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	202.887.084.161,00				
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	129.610.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	107.204.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	6.919.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	31.274.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.407.400,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.407.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.020.100,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.407.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.407.600,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.407.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	31.948.400,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	18.385.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	31.430.300,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	47.322.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	212.768.051.640,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	201.349.365.261,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	204.592.526.771,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	201.166.488.561,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.214.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	167.214.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.196.800,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.196.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.386.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.386.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.840.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	4.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.239.300,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.239.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	63.359.900,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	39.767.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.239.300,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.239.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.035.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.035.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.493.100,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.493.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	299.427.300,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	246.802.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	15.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	208.071.400,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	211.771.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.882.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.882.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	13.149.300,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	13.149.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.017.056.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	827.505.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	84.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.314.400,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.314.400,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	127.456.200,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.544.200,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.480.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	114.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	267.322.600,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	352.066.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	244.102.300,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	113.302.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	167.204.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.795.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	137.304.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	145.095.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	21.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	166.268.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	149.643.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	53.897.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	56.597.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	24.986.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	31.446.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	61.600.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	61.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
2	1	01	02	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	100 42 47 50 54 60 64 67 75 77 80 87 93 Persen	37.759.795.850,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APS Usia 7-15 Pendidikan Dasar Kemampuan Numerasi SMP Kemapuan Numerasi SD Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B Kemampuan Literasi SD APS Usia 7-18 Pendidikan Kesetaraan Indeks Inklusivitas SD Kemampuan Literasi SMP Indeks Iklim Kebinekaan SMP Indeks Iklim Keamanan SMP Indeks Iklim Kebinekaan SD Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1 APS Usia 5-6 PAUD	100 Persen 42 Persen 47 Persen 50 Persen 54 Persen 60 Persen 64 Persen 67 Persen 75 Persen 77 Persen 80 Persen 87 Persen 93 Persen	37.826.302.850,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-		21.170.319.300,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			20.138.935.550,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	2.224.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	39 Unit	2.745.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah									selaras		
							Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	0,00		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	200 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	75.306.500,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Peserta Didik	81.246.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.600.147.600,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	1.135.900.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	84.509.500,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	82 Satuan Pendidikan	78.509.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar									selaras		
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.874.550.000,00		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	87 Satuan Pendidikan	15.879.905.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	44.478.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	44.478.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	12.750.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	9.750.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	11.865.000,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	4 Komunitas	11.865.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	136.212.650,00		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	136.212.650,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	15.568.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	15.568.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									selaras		
							Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0,00		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	8.951.263.500,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-	8.447.587.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	888.000.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	17 Unit	888.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									selaras		
							Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									selaras		
							Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	66.703.000,00		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2150 Peserta Didik	79.363.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	372.326.000,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	650 Orang	395.766.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	18.370.000,00		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan	18.370.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama									selaras		
							Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	7.001.280.000,00		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan	6.955.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	19.453.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20 Orang	19.453.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	7.853.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	6.553.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	14.146.800,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	8 Komunitas	14.146.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi									selaras		
							Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5 Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	25.213.000,00		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	63.282.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	7.143.500,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	7.143.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	200 Buku	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	7.044.234.400,00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-	6.732.441.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	2.046.840.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	2.046.840.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	11.771.100,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	55 Orang	11.771.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD									selaras		
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	276.640.800,00		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	256.140.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	204.013.600,00		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	162 Satuan Pendidikan	202.513.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD									selaras		
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.078.510.000,00		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	164 Satuan Pendidikan	4.078.510.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	39.200.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170 Orang	39.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									selaras		
							Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	11.130.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen	11.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	13.726.900,00		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	13.726.900,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD									selaras		
							Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket	0,00		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									selaras		
							Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	68.509.300,00		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	162 Satuan Pendidikan	72.609.300,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.539.749.000,00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	2.507.338.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	18.920.600,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	19 Satuan Pendidikan	16.680.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									selaras		
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	2.414.250.000,00		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan	2.414.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan									selaras		
							Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	3.806.500,00		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	3.806.500,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	5.889.100,00		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	40 Orang	5.889.100,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									selaras		
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	66.711.800,00		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	17500 Peserta Didik	66.711.800,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
3	1	01	04	-	-	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.927.978.900,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.027.978.900,00				
	2	19		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.927.978.900,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			3.027.978.900,00				
4	2	19	02	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	194.618.200,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-	-	194.618.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	144.238.000,00	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-	100.583.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota									Tidak selaras			
							Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	1 Dokumen	0,00					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		Tidak selaras	Tidak selaras
	2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	81.910.600,00		Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 Kegiatan	81.910.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabup									selaras		
							Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	18.673.000,00		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	20 Orang	18.673.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	119.714.000,00	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	94.034.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis									selaras		
							Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	94.034.600,00		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	20 Orang	94.034.600,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
5	2	19	03	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.733.360.700,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-	-	2.833.360.700,00		selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,									selaras		
							Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	35.000.000,00		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	20 Unit	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	459.232.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-	378.360.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah									selaras		
							Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	338.360.700,00		Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	50 Orang	318.360.700,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga									selaras		
							Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	60.000.000,00		Jumlah penerima Penghargaan olahraga	30 Orang	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	2.300.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-	1.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.800.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.920.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	300.000.000,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	selaras	selaras	selaras
	2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat									selaras		
							Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00		Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lembaga	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA		selaras	selaras
				.	.	Dinas Kesehatan			129.581.852.631,00	Dinas Kesehatan			108.415.980.549,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG			108.415.980.549,00				
	1	02		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			108.415.980.549,00				
6	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	78.111.088.304,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	100 Persen	124.451.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi tahunan yang disusun sesuai pedoman yang berlaku	100 Persen	117.471.400,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	30.136.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	26.886.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.911.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	5.911.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.808.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.084.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	8.359.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	10.339.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	7.719.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	14.719.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	48.513.100,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	52.531.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	100 Persen	78.627.534.627,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen kegiatan administrasi keuangan	100 Persen	76.003.395.992,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 Orang/bulan	75.537.556.693,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1048 Orang/bulan	75.537.608.992,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	344.580.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	389.820.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	12.011.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.692.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	29.253.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	48.275.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	100 Persen	15.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi barang milik daerah	100 Persen	31.089.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	11.025.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	8.258.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.806.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	100 Persen	159.611.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen administrasi kepegawaian	100 Persen	187.058.900,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.052.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.052.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	116.100.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	136.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	26.864.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	41.910.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	3.446.500,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	3.446.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100 Satuan	310.909.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum yang disusun tepat waktu	100 Satuan	378.392.600,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.625.200,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.621.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.300.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.390.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.063.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.487.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.537.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.940.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.940.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	126.841.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	276.841.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	21.987.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100 Persen	53.323.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	50.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	26.550.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	53.153.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	100 Persen	472.553.040,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kegiatan jas komunikasi sumberdaya air dan listrik	100 Persen	713.279.308,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	472.392.040,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	713.279.308,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	142.260.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	105.555.561,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	150.585.561,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	6.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	387.236.043,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	476.486.043,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
7	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	28.658.811.345,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	59,4 Persen	7.296.395.837,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	59,4 Persen	7.334.944.337,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	50.000,00		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN		tidak selaras	tidak selaras
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 UNIT	60.000,00		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 0	60.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	43 Unit	2.697.164.600,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	43 Unit	2.697.164.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	0,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1.797.211.200,00		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	1.797.211.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	119.800.000,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	138.970.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	2.587.362.537,00		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	70 Paket	2.587.362.537,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke									selaras		
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	86.176.000,00		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	114.176.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting Angka kematian ibu (AKI)	98,60 Persen 98 Persen 23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa	20.262.494.008,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3111 Orang	134.106.400,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3111 Orang	133.256.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	100.000,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3092 Orang	50.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2899 Orang	78.290.000,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2899 Orang	238.699.900,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14343 Orang	108.000,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14343 Orang	17.891.900,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27231 Orang	43.163.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27231 Orang	43.163.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103576 Orang	424.498.524,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	103576 Orang	424.498.524,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16930 Orang	100.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16930 Orang	8.193.300,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10243 Orang	194.176.360,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10243 Orang	201.488.760,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2531 Orang	192.820.000,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2531 Orang	192.820.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	7.480.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	510 Orang	7.480.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2568 Orang	1.159.658.176,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2568 Orang	1.001.079.400,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4941 Orang	36.960.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4941 Orang	36.960.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	29.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	29.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	3.774.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	9.774.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	447.805.936,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	471.995.936,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.402.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	13.402.900,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	535.185.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	534.928.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	57.832.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	67.642.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									selaras		
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22639 Orang	8.840.000,00		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	22639 Orang	32.840.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									selaras		
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	0,00		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	499 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	261.876.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	271.976.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	16.246.136.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	16.250.967.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional									selaras		
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	7.500.000,00		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	7.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	31.243.200,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	39.483.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	12.110.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen	12.110.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	528 Orang	24.000.000,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	528 Orang	69.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	22.200.000,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	30.342.388,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	950 Orang	28.100.000,00		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	950 Orang	65.199.600,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100 Persen	727.040.600,00	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100 Persen	1.061.373.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 Unit	143.006.000,00		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4 Unit	160.009.200,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	476.180.200,00		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 Unit	811.363.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	75.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
8	1	02	03	-	-	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	90 Persen	621.749.400,00	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas	90 Persen	698.047.900,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	100 Persen	18.500.000,00	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin praktik yang sesuai standar	100 Persen	10.291.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	2.191.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	2.191.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	8.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	8.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	95 Persen	47.241.800,00	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang sesuai standar	95 Persen	25.267.800,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	2.700.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	2.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.917.800,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	550 Orang	5.917.800,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	16.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	16.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	662.345.050,00	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	662.489.100,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah									selaras		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	586.190.600,00		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	662.489.100,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	1	02	04	-	-	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	95,5 undefined	459.008.000,00	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Sediaan farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman produk rumah tangga yang sesuai standar	95,5 undefined	481.208.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	40 Sarana	110.940.000,00	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan sarana produksi Umot yang memiliki izin	40 Sarana	110.940.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	110.940.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	110.940.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	110 sarana SPPIRT	214.380.000,00	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	"Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga"	110 sarana SPPIRT	214.380.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	214.380.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	214.380.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	60 sarana PIRT	340.000,00	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	60 sarana PIRT	340.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	340.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	340.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	110 sarana PIRT 36 Produk	133.348.000,00	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumla Produk Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	36 Produk 110 sarana PIRT	155.548.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta									selaras		
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	133.348.000,00		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	155.548.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
10	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	466.825.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	7 Dokumen	358.668.000,00	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pakta Integritas yang disepakati	7 Dokumen	336.720.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	347.370.000,00		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	336.720.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	14 OPD 41 Kelurahan 5 Kecamatan	91.543.000,00	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Germas Jumlah OPD yang melaksanakan Germas Jumlah OPD yang melaksanakan Germas	5 Kecamatan 14 OPD 41 Kelurahan	77.593.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	77.593.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4 Dokumen	77.593.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	174 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	174 Posyandu	52.512.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	12.512.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	52.512.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						RSUD Kota Bima			215.380.970.424,00	RSUD Kota Bima			209.775.805.698,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			215.380.970.424,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			209.775.805.698,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			215.380.970.424,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			209.775.805.698,00				
11	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	19.067.207.047,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	22.279.728.075,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	14.416.716.411,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	22.279.728.075,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	19.067.207.047,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	22.279.728.075,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
12	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	196.313.763.377,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	187.496.077.623,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	201.161.952.798,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	175.802.367.798,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									selaras		
							Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.836.608.060,00		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.836.608.060,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	57.850.000,00		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	57.850.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	20.349.726.910,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	27 Unit	20.349.726.910,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	154.425.868.582,00		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	144.558.182.828,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.756.071.675,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	11.693.709.825,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	10.643.709.825,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	11.693.709.825,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
			,	,		UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			129.581.852.631,00	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Pemeliharaan Alat Kesehatan Kota Bima			2.732.368.500,00				
	1		.	.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.732.368.500,00				
	1	02	.	.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.732.368.500,00				
13	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-Rata skor INM	92 Persen	2.732.368.500,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK	59,4 Persen 82,5 Persen	7.296.395.837,00	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Pengisian SPA pada ASPAK Jumlah Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	82,5 Persen 59,4 Persen	14.799.500,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan									selaras		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	14.799.500,00		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	240 Unit	14.799.500,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka kematian ibu (AKI) Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi stunting Prevalensi Obesitas	2 Jiwa 98 Persen 98,60 Persen 26,40 Persen 23,4 Persen	2.717.569.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.630.677.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	2.717.569.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
			,	,		Puskesmas Paruga			129.581.852.631,00	Puskesmas Paruga			4.156.488.406,00				
	1		.	.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.156.488.406,00				
	1	02	.	.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.156.488.406,00				
14	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	3.297.240.406,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	3.297.240.406,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	3.277.982.849,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Unit Kerja	3.297.240.406,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
15	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	844.206.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Prevalensi Obesitas Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi stunting	98 Persen 2 Jiwa 23,4 Persen 98,60 Persen 26,40 Persen	844.206.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	30.336.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590 Orang	30.336.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	587 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	550 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2241 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2241 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	551 Orang	29.200.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	551 Orang	29.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19647 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19647 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3211 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3211 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1943 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1943 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	480 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	487 Orang	16.250.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	487 Orang	16.250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	872 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	872 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	341.858.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	341.858.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.600.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	7.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	11.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	176.049.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	176.049.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	189.573.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	189.573.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	9.882.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	9.882.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	487 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	31.344.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	2 Dokumen	31.344.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.014.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.014.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
16	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	15.042.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	32 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	32 Posyandu	15.042.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	15.042.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	15.042.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
				,	,	Puskesmas Mpunda			129.581.852.631,00	Puskesmas Mpunda			4.546.510.240,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.546.510.240,00				
	1	02		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.546.510.240,00				
17	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	471.974.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	471.974.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	471.974.000,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	471.974.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
18	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	4.066.663.240,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Persen 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka kematian ibu (AKI) Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi	23,4 Persen 26,40 Persen 98,60 Persen 2 Persen 98 Persen	4.066.663.240,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang	34.400.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang	34.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	648 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	607 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2475 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2475 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	75.700.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	609 Orang	75.700.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21696 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21696 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3546 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3546 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2146 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2146 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	530 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	14.200.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	538 Orang	14.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1077 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	467.395.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	467.395.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	34.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	34.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.750.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	9.750.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	185.002.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	185.002.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	3.193.155.398,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	2.984.287.240,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	220.490.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	220.490.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	10.399.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	10.399.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	538 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	538 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	29.440.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	29.440.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
19	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	7.873.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	100 Persen	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	100 Persen	7.873.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.873.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	7.873.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
				,	,	Puskesmas Penanae			129.581.852.631,00	Puskesmas Penanae			4.079.689.387,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.079.689.387,00				
	1	02		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.079.689.387,00				
20	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	2.794.266.826,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	2.794.266.826,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.787.772.332,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.794.266.826,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
21	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	1.274.474.561,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi stunting Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas	26,40 Persen 98 Persen 2 jiwa 98,60 Persen 23,4 Persen	1.274.474.561,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	58.080.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	775 Orang	58.080.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	771 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	772 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2945 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2945 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	38.200.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	724 Orang	38.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25813 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25813 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4219 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4219 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2553 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2553 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	631 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	107 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	8.050.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	640 Orang	8.050.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1437 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1437 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	678.054.561,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	678.054.561,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.900.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.900.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.950.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	8.950.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	226.092.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	226.092.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	219.446.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	219.446.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	15.866.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	15.866.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	380 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1437 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1437 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.736.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	10.736.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.100.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	0 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	0 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
22	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	10.948.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	40 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	40 Posyandu	10.948.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	10.948.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	10.948.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
				.	.	Puskesmas Rasanae Timur			129.581.852.631,00	Puskesmas Rasanae Timur			1.721.122.933,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.721.122.933,00				
	1	02		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.721.122.933,00				
23	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	1.159.353.933,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	1.159.353.933,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.160.548.095,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.159.353.933,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
24	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	552.788.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkolosisi	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	542.798.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	33.400.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	223 Orang	33.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	222 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	8.000.000,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	849 Orang	8.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	30.000.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	209 Orang	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7438 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7438 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	6.000.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1216 Orang	6.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	736 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	736 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	182 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	15.100.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	15.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	182 Orang	6.450.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	182 Orang	6.450.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	303 Orang	1.400.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	303 Orang	1.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236.405.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	236.405.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	3.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	9.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.650.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	10.650.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	61.123.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	61.123.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	114.230.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	114.230.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	184 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	303 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	303 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.040.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	7.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	250.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	250.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	9.990.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	9.990.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
25	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	8.981.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	20 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	20 Posyandu	8.981.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	8.981.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	8.981.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
				,	,	Puskesmas Kolo			129.581.852.631,00	Puskesmas Kolo			913.078.737,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			913.078.737,00				
	1	02		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			913.078.737,00				

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	569.404.737,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	569.404.737,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	569.404.737,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	569.404.737,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
27	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	341.007.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Prevalensi stunting Angka kematian ibu (AKI) Prevalensi Obesitas Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	98 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 23,4 Persen 98,60 Persen	341.007.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116 Orang	30.060.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	116 Orang	30.060.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	431 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109 Orang	16.800.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109 Orang	16.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3868 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3868 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	632 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	382 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	94 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	12.400.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	16 Orang	12.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	5.300.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	96 Orang	5.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	171 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	171 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	109.176.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	109.176.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.150.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	4.150.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	46.211.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	46.211.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	100.421.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	100.421.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.089.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	4.089.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	600.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
28	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	2.667.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	5 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	5 Posyandu	2.667.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2.667.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	2.667.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
				,	,	Puskesmas Jatibaru			129.581.852.631,00	Puskesmas Jatibaru			3.203.251.019,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.203.251.019,00				
	1	02		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.203.251.019,00				
29	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	2.341.191.019,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	2.341.191.019,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.554.563.360,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.341.191.019,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
30	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	848.137.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi stunting Prevalensi Obesitas Angka kematian ibu (AKI)	98 Persen 98,60 Persen 26,40 Persen 23,4 Persen 2 Jiwa	848.137.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	9.200.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	599 Orang	9.200.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	596 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	596 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	559 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	559 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2276 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	55.800.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	55.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19955 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19955 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3262 Orang	12.000.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3262 Orang	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1973 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1973 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	488 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	42.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	83 Orang	42.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	495 Orang	9.600.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	495 Orang	9.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	869 Orang	5.550.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	869 Orang	5.550.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	344.910.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	344.910.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.600.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	6.600.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.500.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.032.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	132.032.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	162.963.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	162.963.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	12.473.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	12.473.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	590 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	590 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	869 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	869 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	40.040.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	40.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	8.469.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	8.469.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
31	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	13.923.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	30 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	30 Posyandu	13.923.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	13.923.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	13.923.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
						Puskesmas Kumbe			129.581.852.631,00	Puskesmas Kumbe			1.095.784.964,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.095.784.964,00				
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			129.581.852.631,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.095.784.964,00				
32	1	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	88.848.463.539,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentese pelaksanaan penunjang urusan pemerintah	100 Persen	704.859.964,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	11.030.075.502,00	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan administrasi perkantoran	100 Persen	704.859.964,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									selaras		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	679.804.129,00		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	704.859.964,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
33	1	02	02	-	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	39.153.803.692,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	rata-rata skor INM	92 Persen	389.006.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi Obesitas Prevalensi stunting	23,4 Persen 26,40 Persen 2 Jiwa 98,60 Persen 98 Persen	28.716.953.846,00	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Obesitas Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Prevalensi stunting Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Angka kematian ibu (AKI)	23,4 Persen 98,60 Persen 26,40 Persen 98 Persen 2 Jiwa	389.006.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil									selaras		
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	20.040.000,00		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155 Orang	20.040.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin									selaras		
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154 Orang	0,00		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir									selaras		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	0,00		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	144 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita									selaras		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	0,00		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	589 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar									selaras		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	18.400.000,00		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	149 Orang	18.400.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif									selaras		
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5159 Orang	0,00		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5159 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	843 Orang	7.800.000,00		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	843 Orang	7.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi									selaras		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	0,00		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	510 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus									selaras		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	0,00		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	14.000.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	21 Orang	14.000.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128 Orang	11.300.000,00		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	128 Orang	11.300.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV									selaras		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	210 Orang	0,00		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	210 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	155.368.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	155.368.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.100.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	5.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	6.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	6.800.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	51.623.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	51.623.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	82.143.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	82.143.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya									selaras		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.782.000,00		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.782.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis									selaras		
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.960.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen	9.960.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak									selaras		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.890.000,00		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1.890.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	9.990.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase pelaksanaan sistem informasi terintegrasi	90 Persen	0,00	DINAS KESEHATAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
34	1	02	05	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	498.828.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM yang dibina	100 Persen	1.919.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	13 Posyandu	85.749.000,00	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dilakukan supervisi dan pembinaan	13 Posyandu	1.919.000,00	DINAS KESEHATAN	selaras	selaras	selaras
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1.919.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	1.919.000,00	DINAS KESEHATAN		selaras	selaras
				.	.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			74.312.663.668,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			81.536.107.764,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			74.312.663.668,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			81.536.107.764,00				
	1	03		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			74.312.663.668,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			81.536.107.764,00				
35	1	03	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.681.586.346,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10.811.219.372,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	82.041.700,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dakumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	38.554.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.586.100,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.666.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.291.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.386.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.308.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.811.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.195.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.322.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.322.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.390.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.532.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	25.631.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	18.640.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	9.225.957.901,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.896.907.243,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/bulan	8.431.881.969,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	8.489.716.243,97	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	385.471.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	385.167.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	7.878.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.593.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.878.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.030.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.657.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.657.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	8.231.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.744.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	36.655.200,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	18.464.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18.464.400,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	18.464.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.395.893.880,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	958.508.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.305.880,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	308.735.880,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	105.605.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	105.605.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	39.423.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	87.313.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	456.854.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	456.854.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	311.228.240,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	223.137.560,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.653.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.653.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	261.327.080,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	185.551.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	26.025.160,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	28.933.160,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	947.296.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	675.647.388,03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133.479.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133.479.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya									selaras		
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	375.531.957,00		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	375.531.888,03	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	34.433.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	34.433.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.203.500,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.203.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
36	1	03	02	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	41913 Meter	1.470.992.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik	41913 Meter	2.476.632.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	345 Meter	1.362.113.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	345 Meter	2.069.556.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	98.082.000,00		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	98.082.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai									selaras		
							Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,22 KM	231.404.000,00		Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,22 KM	233.054.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam									selaras		
							Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	0,00		Jumlah Check Dam yang Dibangun	0 Unit	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing									selaras		
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,125 KM	601.694.000,00		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,125 KM	1.478.484.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya									selaras		
							Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	575.000,00		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	575.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	119.361.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokumen	259.361.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	1650 Meter	393.295.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	1650 Meter	407.076.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									selaras		
							Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,65 KM	419.876.000,00		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,35 KM	407.076.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
37	1	03	03	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.548.212.891,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.126.526.181,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.601.314.588,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	1175 SR	15.126.526.181,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	7 Lembaga	119.419.000,00		Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	7 Lembaga	119.419.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum									selaras		
							Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	34.139.000,00		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	70 Orang	34.139.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	228.500.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	228.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik	11.997.876.270,00		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	7 Liter/Detik	11.561.841.270,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									selaras		
							Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1.287.057.621,00		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 Unit	1.301.405.911,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan									selaras		
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	350 SR	1.881.221.000,00		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600 SR	1.881.221.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
38	1	03	05	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	38 Rumah Tangga	951.398.880,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	38 Rumah Tangga	951.998.660,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	100 Rumah Tangga	1.028.980.080,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	100 Rumah Tangga	951.998.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									selaras		
							Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	433.403.880,00		Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	434.003.660,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat									selaras		
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	100 Rumah Tangga	517.995.000,00		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	37 Rumah Tangga	517.995.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
39	1	03	06	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	6.609.116.051,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	8.081.156.051,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	6.106.366.551,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	1392 Meter	8.081.156.051,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan									selaras		
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	6.609.116.051,00		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2500 meter Sistem Drainase Perkotaan	8.081.156.051,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
40	1	03	08	-	-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	232.416.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	231.216.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	279.510.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	231.216.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan									selaras		
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	232.416.000,00		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200 Dokumen	231.216.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
41	1	03	09	-	-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	5 2 Kawasan Kawasan	25.603.489.300,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	5 Kawasan 2 Kawasan	27.599.043.300,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani Jumlah Kawasan Strategis yang tertata	2 Kawasan 5 Kawasan	21.664.617.498,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang tertata Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	2 Kawasan 5 Kawasan	27.599.043.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	25.603.489.300,00		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	27.599.043.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
42	1	03	10	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	2.90 KM	12.561.975.100,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	1.8 KM	15.476.440.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	2.90 KM	37.723.706.400,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	1.8 KM	15.476.440.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan									selaras		
							Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	142.278.500,00		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	2 Dokumen	142.278.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	377.177.000,00		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	478.387.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dibangun	3.00 KM	2.943.854.500,00		Panjang Jalan yang Dibangun	4 KM	3.708.137.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.70 KM	4.091.259.500,00		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2,3 KM	5.899.055.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1.20 KM	4.025.815.000,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	1,4 KM	4.254.111.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan									selaras		
							Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	33.410.000,00		Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	33.410.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									selaras		
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	297.099 KM	440.091.000,00		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	297,099 KM	440.091.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan									selaras		
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2.70 KM	508.089.600,00		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2,70 KM	520.969.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
43	1	03	11	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	25.28 5,57 % %	106.515.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	25.28 % 5,57 %	123.514.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	7 Badan Usaha	89.406.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	7 Badan Usaha	75.669.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi									selaras		
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	58.670.000,00		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga	75.669.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen	86.519.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten Kota	1 Dokumen	47.845.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	47.845.000,00		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	47.845.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
44	1	03	12	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	5 Dokumen	546.962.100,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	5 Dokumen	658.362.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	2 Dokumen	444.702.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab Kota	1 Dokumen	415.792.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	52.073.800,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	58.748.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	235.115.000,00		Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	278.198.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	28.845.800,00		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan	78.845.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	77.883.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	65.817.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang									selaras		
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	59.115.000,00		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	65.817.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	265.500.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	176.752.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	selaras	selaras	selaras
	1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	171.812.500,00		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	176.752.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		selaras	selaras
				,	,	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			30.289.840.504,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			28.122.755.045,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.980.376.735,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			28.122.755.045,00				
	1	04		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			7.980.376.735,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			28.122.755.045,00				
45	1	04	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.486.655.935,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.843.659.876,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	16.687.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	20.971.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.192.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.753.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.217.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.615.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	954.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.396.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	736.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.791.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.857.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.416.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.001.889.094,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.151.748.810,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.699.708.269,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.882.198.810,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	171.952.800,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	261.792.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.264.800,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.907.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	2.898.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	5.850.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.588.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.001.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.055.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.001.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		tidak selaras	tidak selaras
	1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.351.433,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	228.496.966,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		tidak selaras	tidak selaras
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.746.500,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.685.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1.729.700,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	7.900.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.411.966,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	141.411.966,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	412.102.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	352.101.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	412.102.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	352.101.700,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	49.340.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	44.340.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	26.180.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	31.310.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	8.650.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	13.030.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
46	1	04	02	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	472.740.500,00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	-	389.592.500,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	301.520.000,00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	180.719.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	246.467.000,00		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	180.719.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana									selaras		
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	0,00		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	15 Unit Rumah	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	290.758.000,00	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-	208.873.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus									selaras		
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	226.273.500,00		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	208.873.500,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
47	1	04	03	-	-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	1.873.930.000,00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	445.570.000,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	0,00	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	-	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi									selaras		
							Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	146.013.500,00	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	100.661.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP									selaras		
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat	100.661.200,00		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat	100.661.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	1.044.374.000,00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-	344.908.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	1.565.607.400,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	32 Unit Rumah	164.047.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	207.661.400,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	180.861.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	0,00		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	6,62 Ha	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
48	1	04	04	-	-	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	1.147.050.300,00	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	212.110.300,00		selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	706.139.000,00	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-	212.110.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di									selaras		
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	1.147.050.300,00		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	25 Unit Rumah	212.110.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	250 Orang	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.309.463.769,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.231.822.369,00				
	2	10		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			22.309.463.769,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			22.231.822.369,00				
49	2	10	05	-	-	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	22.309.463.769,00	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	22.231.822.369,00		selaras	selaras	selaras
	2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	6.862.857.369,00	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.231.822.369,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	selaras	selaras	selaras
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	22.309.463.769,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	22.231.822.369,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		selaras	selaras
				.	.	Satuan Polisi Pamong Praja			10.155.859.314,00	Satuan Polisi Pamong Praja			10.155.859.314,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.155.859.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.155.859.314,00				
	1	05		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.155.859.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.155.859.314,00				
50	1	05	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.078.149.314,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.966.435.114,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	13.571.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	9.759.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.495.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.593.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.359.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.359.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.866.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.401.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.406.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.406.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.894.659.652,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	6.725.974.114,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.545.620.614,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	6.545.620.614,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.110.500,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	177.110.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.243.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.243.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.392.455.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.812.728.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	201.890.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	178 Paket	291.940.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	1.643.788.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	137 Orang	1.520.788.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	389.974.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	216.218.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	55.717.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.138.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	171.280.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	171.280.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	50.477.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	59.935.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	45.675.300,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	40.927.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	19.008.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	196.570.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	141.820.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.180.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.180.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	157.080.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	104.720.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	15.630.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	10.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
51	1	05	02	-	-	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.077.710.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	1.189.424.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	423.237.200,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	426.296.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.066.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	27.066.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	115.467.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6 Dokumen	153.173.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP									selaras		
							Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	6 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas									selaras		
							Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	31 Orang	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan									selaras		
							Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	172.049.000,00		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	6 laporan	246.057.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	1.000.000.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	763.128.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	220.487.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	224.524.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	542.640.500,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	538.603.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	selaras	selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		selaras	selaras
				,	,	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.720.939.873,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			8.707.439.873,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.720.939.873,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.707.439.873,00				
	1	05		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.720.939.873,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			8.707.439.873,00				
52	1	05	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.124.132.098,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	7.276.212.098,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.320.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.960.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.866.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.866.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.577.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.577.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.103.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.103.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	950.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	950.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	871.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	871.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.593.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.593.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	100 Persen	6.335.750.783,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan	100 Persen	6.102.647.638,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.961.739.638,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	5.961.739.638,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	141.478.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	136.298.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	886.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	886.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.989.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	2.989.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	735.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	735.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	19.478.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	13.719.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.592.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.592.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.127.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.127.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 Persen	972.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 Persen	700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	700.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	700.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		tidak selaras	tidak selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	350.562.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	221.902.460,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	14.241.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.123.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.035.460,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	15.035.460,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	14.370.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.468.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.276.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	147.276.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	414.912.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	481.379.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.186.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7.186.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	447.913.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	474.193.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	453.045.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	444.904.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.502.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.502.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	289.337.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	289.337.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.260.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.260.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	9.805.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	109.805.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
53	1	05	04	-	-	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	80 Persen	1.596.807.775,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Luas Wilayah yang terlayani Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	80 Persen	1.431.227.775,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat	1 Dokumen 80 %	872.381.775,00	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Kegiatan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah Laporan Masyarakat Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dan Jumlah Laporan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	80 % 1 Dokumen	1.215.805.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	4.730.000,00		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	4.730.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	200.239.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	189.739.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	117.602.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	114.602.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	15.304.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen	15.304.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran									selaras		
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	11.859.000,00		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4 Orang	69.359.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)									selaras		
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	24.083.775,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	41 Desa/Kelurahan	10.583.775,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	1.018.048.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit	811.488.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	20.811.000,00	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1 Dokumen	10.940.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.940.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	10.940.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	0,00					DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		tidak selaras	tidak selaras
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	25.458.000,00	Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	100 %	13.005.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	13.005.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	13.005.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar) Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	41 Kelurahan 640 orang	141.753.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan Jumlah Kelurahan yang sudah terbentuk dan terbina Relawan Kebakaran (Redkar)	640 orang 41 Kelurahan	78.367.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi									selaras		
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	35.532.000,00		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	31.512.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	28 Desa/Kelurahan	66.355.000,00		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	28 Desa/Kelurahan	46.855.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	92.614.000,00	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Laporan 1 Laporan	113.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	selaras	selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	61.604.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	61.604.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan									selaras		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	6.212.000,00		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1 Dokumen	6.212.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	10.848.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	10.848.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	446.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1 Unit	34.446.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		selaras	selaras
				.	.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			4.850.231.147,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			5.356.866.283,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.850.231.147,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG			5.356.866.283,00				
	1	05		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.850.231.147,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.356.866.283,00				
54	1	05	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB Level	4.286.566.347,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	BB Level	4.683.301.983,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	48.385.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	34.402.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.498.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.025.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.510.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.217.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.510.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.877.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.207.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7.793.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	7.793.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	11.007.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	16.076.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100 Persen	3.725.184.991,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	100 Persen	3.710.842.283,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.493.008.247,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.526.393.583,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	168.094.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	168.094.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.340.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.340.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	2.799.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	2.799.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.259.100,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.259.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	956.600,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	956.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	1.181.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	840.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	27.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	33.058.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	27.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	27.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6.058.900,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30 Dokumen	6.058.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	148.731.100,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	93.635.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.207.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.207.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	19.410.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	29.840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.575.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	3.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.749.700,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.749.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.628.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.256.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	36.008.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	36.008.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	100 %	25.450.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersedian peralatan dan Mesin lainnya	100 %	64.292.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.450.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	64.292.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	325.739.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	203.666.950,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.053.350,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.053.350,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.363.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	84.363.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	108.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	386.888.750,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	542.563.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	126.048.750,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	152.228.750,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	125.985.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	390.334.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
55	1	05	03	-	-	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	66,92 %	563.664.800,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase peningkatan upaya Penanggulangan Bencana	66,92 %	673.564.300,00		selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana undefined	64,34 % undefined undefined	72.773.200,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	undefined Persentase Peningkatan pelayanan informasi rawan bencana	undefined undefined 64,34 %	48.779.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 Orang	0,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	71902 Orang	48.779.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		tidak selaras	tidak selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	71902 Orang	48.779.700,00							tidak selaras	tidak selaras
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	60,81 %	282.457.200,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase peningkatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan	60,81 %	179.533.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	0,00		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1800 Orang	33.605.400,00		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1800 Orang	33.073.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana									selaras		
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	0,00		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	110.750.600,00		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	110.750.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	26.361.000,00		Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan	26.893.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	8.816.600,00		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	8.816.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	292.912.750,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase peningkatan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	305.895.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	5.463.800,00		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	8.158.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	29797 Orang	2.985.900,00		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	29797 Orang	1.613.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	29797 Orang	187.546.000,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	29797 Orang	296.122.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-		221.107.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			139.355.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	selaras	selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	10.678.900,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	10.678.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	28.676.900,00		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	28.676.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
	1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00		Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		selaras	selaras
				,	,	Dinas Sosial			10.796.987.228,00	Dinas Sosial			7.931.532.127,00				
	1			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10.796.987.228,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.931.532.127,00				
	1	06		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			10.796.987.228,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.931.532.127,00				
56	1	06	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.172.229.928,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.216.649.827,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	98.002.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	104.129.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	29.652.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	32.511.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.904.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.481.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.481.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.600.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	37.508.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	43.124.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.605.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	11.605.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.233.161.923,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.156.191.316,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.962.264.717,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	3.998.209.616,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.660.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	19.660.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.726.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	119.726.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.672.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.923.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	9.923.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	596.424.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	408.726.900,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.689.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.689.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.611.600,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.611.600,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.615.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.615.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.359.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	28.359.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	193.200.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	193.200.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	40.252.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	40.252.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	48.800.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	16.490.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.490.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	7.490.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9.000.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	9.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	448.761.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	292.406.300,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.056.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.056.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	122.110.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.110.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	133.739.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.239.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	317.930.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	238.706.311,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	202.726.311,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	198.226.311,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.580.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.580.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.900.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	25.900.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
57	1	06	02	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	50 Persen	147.533.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	50 Persen	147.533.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen 20 Dokumen	21.800.000,00	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Jumlah izin/rekomendasi yang diterbitkan	12 Dokumen 20 Dokumen	15.213.200,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	15.213.200,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen	15.213.200,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	30 persen	150.136.000,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang terlatih	30 persen	132.320.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	112.320.000,00		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	112.320.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20.000.000,00		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
58	1	06	03	-	-	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	5 Persen	0,00	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN yang tertangani	5 Persen	0,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	0,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
59	1	06	04	-	-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	918.590.800,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-	810.800.800,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen	941.186.500,00	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen	670.281.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	85.965.400,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	85.965.400,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	311.263.500,00		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang	311.263.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	45.964.900,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Orang	45.964.900,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	8.080.800,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	8.080.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	40.982.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	41.432.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	12.294.100,00		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	11.844.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak									selaras		
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.514.100,00		Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	4.514.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	714.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	714.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.980.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.980.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	128.800.800,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	128.800.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	17.721.400,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	17.721.400,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	7.000.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	50 persen 60 persen	354.930.300,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang tertangani	60 persen 50 persen	140.519.800,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	152.810.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15.720.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.524.000,00		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	10.524.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	7.500.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	7.500.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial									selaras		
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	61.332.000,00		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	90.632.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban									selaras		
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7.598.700,00		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	7.598.700,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.035.100,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	3.035.100,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.510.000,00		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	5.510.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
60	1	06	05	-	-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 Persen	4.239.762.100,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80 Persen	1.248.562.100,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	30 persen	45.940.000,00	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang ditangani	30 persen	27.190.800,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11.719.000,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	11.719.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	9.847.800,00		Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	9.847.800,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar									selaras		
							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.624.000,00		Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	5.624.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	90 persen	2.685.127.400,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data DTKS yang tervalidasi	90 persen	1.221.371.300,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	115.054.300,00		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	104651 Orang	211.054.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	19.429.200,00		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	33530 Keluarga	19.429.200,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									selaras		
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	3.913.909.300,00		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6800 Keluarga	826.709.300,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	164.178.500,00		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	164.178.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
61	1	06	06	-	-	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	100 Persen	318.871.200,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Kampung Siaga Bencana yang terbentuk	100 Persen	507.986.200,00		selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen	244.666.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen	290.985.000,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	59.720.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	59.720.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	43.540.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	138.630.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									selaras		
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	10.805.000,00		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Unit	10.805.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	37.745.000,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	66.970.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									selaras		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.860.000,00		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	14.860.000,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial	100 persen 4 Kampung	127.480.000,00	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perlindungan Sosial Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	100 persen 4 Kampung	217.001.200,00	DINAS SOSIAL	selaras	selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana									selaras		
							Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	5.972.500,00		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	5.972.500,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	146.228.700,00		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	211.028.700,00	DINAS SOSIAL		selaras	selaras
				.	.	Dinas Tenaga Kerja			7.035.039.166,00	Dinas Tenaga Kerja			4.702.448.254,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.702.448.254,00				
	2	07		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA			4.702.448.254,00				
62	2	07	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.143.791.266,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.876.980.354,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	54.612.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.972.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.064.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.734.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4.734.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	22.878.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	16.218.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.915.332.002,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.887.214.474,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.667.628.386,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	2.692.345.474,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	42.180.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1200 Dokumen	42.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	145.920.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	145.920.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.734.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4.734.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	4.734.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.404.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	8.391.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	631.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	12.330.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	6.570.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.054.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	294.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.276.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	6.276.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	29.920.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	197.846.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	162.730.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.360.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.360.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	132.370.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	132.370.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.624.742.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	230.742.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									selaras		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.642.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.642.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.520.100.000,00		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	170.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	261.129.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	75.054.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.075.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.075.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	195.860.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	287.897.780,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.860.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.860.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.390.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	15.390.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12.180.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	104.777.780,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	217.467.780,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	12.725.100,00	Penataan Organisasi	-	-	12.725.100,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	12.725.100,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	12.725.100,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
63	2	07	02	-	-	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	96 Persen	7.066.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kesesuaian antara rencana tenaga kerja dengan realisasi	96 Persen	77.066.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto	10 % 15 %	11.854.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikto Presentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja Mikro	10 % 15 %	77.066.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro									selaras		
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	7.066.000,00		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	50 Orang	77.066.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
64	2	07	03	-	-	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	35 45uta Persen Rupiah	255.992.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja terlatih Angka produktivitas Tenaga Kerja	35 Persen 45uta Rupiah	3.312.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	37.024.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-	3.312.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									selaras		
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	3.312.000,00		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	3.312.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
65	2	07	04	-	-	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	93 %	95.289.500,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	93 %	94.289.500,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 Orang	109.745.000,00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 Orang	47.545.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	20.581.000,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	20.581.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	26.964.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	120 Orang	26.964.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	58.275.500,00	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	32.832.500,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja									selaras		
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	33.832.500,00		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	200 Orang	32.832.500,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	37.324.000,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	60 Orang	13.912.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									selaras		
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	13.912.000,00		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	100 Orang	13.912.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
66	2	07	05	-	-	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	532.900.400,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	650.800.400,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	138.699.600,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	88.288.600,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									selaras		
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	40.266.000,00		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	50.866.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	37.422.600,00		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	37.422.600,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	469.673.800,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	562.511.800,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak									selaras		
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	3.387.000,00		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	15 Perkara	3.387.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak									selaras		
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	14.872.000,00		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	21.372.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									selaras		
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2000 Orang	436.952.800,00		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2000 Orang	537.752.800,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
				,	,	UPT Balai Latihan Kerja			7.035.039.166,00	UPT Balai Latihan Kerja			278.108.000,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			278.108.000,00				
	2	07		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.035.039.166,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA			278.108.000,00				
67	2	07	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.143.791.266,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	10.728.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	301.572.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	10.728.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.728.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.728.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
68	2	07	03	-	-	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	255.992.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	267.380.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	327.144.000,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-	267.380.000,00	DINAS TENAGA KERJA	selaras	selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi									selaras		
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	252.680.000,00		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	267.380.000,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	0,00		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	12 Unit	0,00	DINAS TENAGA KERJA		selaras	selaras
				,	,	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			6.892.948.168,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			7.625.813.310,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.625.813.310,00				
	2	08		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.892.948.168,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			7.625.813.310,00				
69	2	08	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.961.684.846,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	57.582.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	54.751.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28.153.800,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.713.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.030.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.687.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.687.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.755.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.650.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.456.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	3.456.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6.164.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	7.459.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.960.292.973,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.997.158.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.747.223.907,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.841.089.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	166.610.200,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.760.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.263.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.263.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.046.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.046.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	199.975.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.525.900,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	1.525.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
70	2	08	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00						selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi									selaras		
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.892.948.168,00								
	2	08		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.892.948.168,00								

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	2	08	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.870.859.468,00						selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	299.192.300,00						Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	13.588.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	13.588.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.316.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.316.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	32.978.600,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35.113.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.432.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	118.432.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	29.535.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	66.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	46.910.000,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	66.580.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	177.348.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	172.998.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.748.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	41.748.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.250.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	356.595.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	470.221.161,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	83.266.311,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	93.526.311,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.504.850,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.504.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	20.300.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	26.190.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
72	2	08	02	-	-	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9.59 %	1.887.422.300,00	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	9.59 %	2.523.630.064,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	54.84 %	85.736.000,00	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	54.84 %	52.841.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	49.129.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	52.841.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5250 org	1.289.880.100,00	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5250 org			Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi									selaras		
							Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	1.242.498.000,00		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	1.242.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	39.33 %	833.051.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	39.33 %	1.227.914.064,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan									selaras		
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	46.582.400,00		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 Lembaga	44.832.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan									selaras		
							Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	409.479.900,00		Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 Orang	1.043.348.664,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 0	139.733.000,00		0	0 0	139.733.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
73	2	08	03	-	-	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0.091 %	294.699.200,00	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0.091 %	294.699.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	50 kasus	89.433.800,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	50 kasus	75.127.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.135.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	38.135.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	36.992.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	36.992.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 %	267.645.200,00	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100 %	219.572.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	84.202.200,00		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	84.202.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan									selaras		
							Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	135.370.000,00		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan	135.370.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	2	08	05	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100 %	35.944.800,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100 %	35.944.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	59.313.000,00	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	3 jenis data	35.944.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	27.239.000,00		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dokumen	27.239.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.705.800,00		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8.705.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
75	2	08	06	-	-	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	69.05 %	165.403.600,00	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	69.05 %	168.403.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	143.040.300,00	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 lembaga	52.991.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan									selaras		
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	2.558.000,00		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	2.558.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.956.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.433.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	122.575.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak	38 lembaga	115.412.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	1.800.000,00		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	1.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	104.875.600,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	108.655.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	5.214.000,00		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	4.956.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
76	2	08	07	-	-	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0.107 %	638.618.800,00	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0.107 %	641.450.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	55 kasus	91.865.000,00	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	55 kasus	91.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.01	0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak,									selaras		
							Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	0,00		Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	91.865.000,00		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Orang	91.865.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100 %	383.273.000,00	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100 %	345.261.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah									selaras		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	190.509.400,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	50 Orang	193.341.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK									selaras		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	151.920.000,00		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	55 Layanan	151.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 lembaga	267.457.000,00	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 lembaga	204.324.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	selaras	selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	95.026.800,00		Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	95.026.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah									selaras		
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	109.297.600,00		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	109.297.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		selaras	selaras
				,	,	Dinas Ketahanan Pangan			4.621.382.003,00	Dinas Ketahanan Pangan			4.757.478.810,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.621.382.003,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.757.478.810,00				
	2	09		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.621.383.003,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			4.757.478.810,00				
77	2	09	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.855.107.533,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	3.991.204.640,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	24.162.400,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	12.948.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.951.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.785.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.196.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.650.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1.684.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	994.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	581.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	581.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	580.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	580.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.533.300,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.357.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.462.796.737,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.540.623.440,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.302.509.333,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3.423.606.440,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	127.185.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	113.596.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.413.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.413.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.008.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.008.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	2.783.400,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	1.955.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.955.500,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.955.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	3.471.800,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 Persen	2.374.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	470.100,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	470.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.903.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.903.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	226.899.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	181.801.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.940.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.599.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.024.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.497.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.543.900,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.537.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.985.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	37.048.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	65.120.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	65.120.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	60.209.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	25.864.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	7.905.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	24.269.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud									selaras		
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1.595.700,00		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	1.595.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	151.635.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	114.400.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	48.144.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	54.844.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	48.431.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	39.236.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	11.527.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	20.320.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	206.967.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	111.236.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	37.580.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.511.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	9.800.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	12.225.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.200.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	21.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	67.340.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	37.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
78	2	09	03	-	-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Protein Jumlah Ketersediaan Energi Skor Pola Pangan Harapan	137 3599 88,5 gram/kap/hari kka/kap/hari Persen	598.204.770,00	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	88,5 Persen	597.344.470,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	100 Persen	104.753.700,00	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	100 Persen	95.177.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		
							Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	7.306.300,00		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	7.012.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	17.092.400,00		Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	16.492.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	46.935.500,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	64.225.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)									selaras		
							Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	6.294.500,00		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	7.447.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	75 Persen	420.460.910,00	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan	75 Persen	395.954.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal									selaras		
							Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	1.751.800,00		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	4.483.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	358.890.000,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	11 Ton	337.890.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	39.861.270,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	11 Ton	40.581.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	13.000.000,00		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	11 Ton	13.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	2205,83 Persen 67,6 Gram/kap/ hari	171.531.100,00	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	2205,83 Persen 67,6 Gram/kap/ hari	106.213.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun									selaras		
							Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10.794.000,00		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	9.934.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									selaras		
							Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	96.279.000,00		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	96.279.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
79	2	09	04	-	-	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	24 Persen	104.636.800,00	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	24 Persen	104.636.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	10 Kelurahan	45.895.000,00	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dokumen Laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	26.334.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan									selaras		
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	26.334.100,00		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	26.334.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	100 Kelurahan	100.275.500,00	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	10 Kelurahan	78.302.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup									selaras		
							Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.281.000,00		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.281.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	11.107.200,00		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	11.107.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi									selaras		
							Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	34.142.800,00		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	34.142.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.771.700,00		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	4.771.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	2	09	05	-	-	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	90 Persen	63.432.900,00	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan	90 Persen	64.292.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	80 KomoditiPersen	79.539.200,00	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	80 Komoditi Persen	64.292.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.863.300,00		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.863.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	19.891.900,00		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	19.891.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
	2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									selaras		
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	37.677.700,00		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Laporan	38.537.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN		selaras	selaras
						Dinas Lingkungan Hidup			33.692.252.467,00	Dinas Lingkungan Hidup			34.987.144.981,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			33.692.252.467,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			34.987.144.981,00				
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			33.692.252.467,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			34.987.144.981,00				
81	2	11	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.545.872.469,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.570.811.983,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	96.377.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	70.347.231,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.688.231,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	11.688.231,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.524.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.051.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.211.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.247.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.247.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.780.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.455.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.658.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.658.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	32.870.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	39.564.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12.273.967.787,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	11.585.389.158,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	11.356.349.244,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/bulan	11.395.029.758,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	180.032.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	180.032.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.504.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.504.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.823.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5.823.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	361.691.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	232.006.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.497.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.497.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.250.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.730.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.538.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	18.538.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	102.240.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	102.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	429.704.009,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	491.383.603,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	18.658.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1200 Laporan	18.658.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.872.140,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	217.872.140,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.960.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	28.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	274.643.263,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	225.893.263,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	720.953.150,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	191.685.291,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	57.086.311,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	53 Unit	57.086.311,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	88.635.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	88.635.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.690.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.690.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.273.480,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.273.480,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
82	2	11	02	-	-	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	58 Persen	245.018.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	58 Persen	223.383.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	118.232.000,00	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Bidang Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	105.082.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota									selaras		
							jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	109.462.500,00		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	105.082.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	1 Dokumen	190.270.000,00	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS yang disusun	1 Dokumen	118.300.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									selaras		
							Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	58.833.000,00		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	42.073.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	76.722.500,00		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	76.227.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
83	2	11	03	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	43,50/94 Persen	276.000.448,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	43,50/94 Persen	307.292.560,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	206.971.500,00	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	198.184.360,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media									selaras		
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	28.345.188,00		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	53.136.948,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	61.496.860,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	77.495.412,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	67.552.000,00		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	22 Dokumen	67.552.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	90.818.000,00	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	49.207.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	40.622.260,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	5 Laporan	39.448.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	18.083.340,00		Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 Titik	9.759.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	61.894.000,00	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Nilai Kualitas Air, Udara, dan Tanah	43,50/94 persen	59.900.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.276.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen	31.276.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	28.624.800,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	4 Kegiatan	28.624.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi									selaras		
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0,00		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
84	2	11	04	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	15 Persen	5.073.788.625,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	15 Persen	6.469.543.657,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	78 persen	4.872.628.201,00	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase luas RTH Publik Yang tertangani	78 persen	6.469.543.657,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	36.428.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	38.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									selaras		
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Ha	4.992.380.625,00		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Ha	6.356.613.657,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	20 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									selaras		
							Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha Unit	44.980.000,00		Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha Unit	74.590.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
85	2	11	06	-	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	50 Persen	136.897.400,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	50 Persen	92.522.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	176 izin	78.275.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ijin yang di terbitkan	176 izin	92.522.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH									selaras		
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	124.105.000,00		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150 Dokumen	79.730.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh									selaras		
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	12.792.400,00		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	150 Badan Usaha	12.792.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
86	2	11	08	-	-	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	60 persen	112.139.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	60 persen	160.139.000,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	3 Pokmas	121.970.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidkan dan pelatihan yang dilaksanakan	3 Pokmas	160.139.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan									selaras		
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	112.139.000,00		Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	160.139.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
87	2	11	09	-	-	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	80 persen	25.318.000,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan hidup	80 persen	25.318.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan	3 Entitas 80 persen	40.580.000,00	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Penghargaan di bidang Lingkungan Jumlah Lembaga masyarakat dapat penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup	80 persen 3 Entitas	25.318.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan									selaras		
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	25.318.000,00		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	25.318.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
88	2	11	10	-	-	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	30 Persen	11.944.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	30 Persen	11.944.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	25 usaha 65 persen	22.000.000,00	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65 persen 25 usaha	11.944.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	11.944.000,00		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	25 Pengaduan	11.944.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
89	2	11	11	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	75 70 Persen Persen	15.265.274.525,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Peningkatan Kinerja Pengolahan Sampah Persentase Sampah yang tertangani	75 Persen 70 Persen	15.126.190.381,00		selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah Persentase Sampah yang tertangani Volume Sampah yang terangkut Ke TPA	174.600 M3 70 Persen 7 Persen	6.015.205.824,00	Pengelolaan Sampah	Volume Sampah yang terangkut Ke TPA Persentase Sampah yang tertangani Persentase pengurangan sampah	174.600 M3 70 Persen 7 Persen	15.126.190.381,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									selaras		
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	143.979.000,00		Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	28.466.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	19.645.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	11 Dokumen	19.645.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	9.054.671.800,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	8.753.533.619,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota									selaras		
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	100.220.000,00		Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	16.358.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah									selaras		
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	6.120 Ton	176.936.600,00		Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	6.120 Ton	21.353.384,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									selaras		
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	5.769.822.125,00		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	6.286.834.378,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	260 Izin	0,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah izin lingkungan dan izin PPLH sesuai Ketentuan Yang berlaku	260 Izin	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	selaras	selaras	selaras
	2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah									selaras		
							Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	0,00		Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	8 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		selaras	selaras
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.436.736.843,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.660.564.716,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.436.736.843,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			5.660.564.716,00				
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.436.736.843,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.660.564.716,00				
90	2	12	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.175.901.943,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.411.907.916,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.148.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	10.527.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.109.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.109.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.856.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.856.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	909.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	909.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.638.800,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.638.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.526.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.085.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.364.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.889.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.668.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.040.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.588.149.125,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4.383.489.710,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.120.422.500,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.169.492.410,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	119.975.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	119.975.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	89.550.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	88.541.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.220.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.816.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.104.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.665.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	259.747.284,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	375.774.362,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	89.160.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	218.772.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.965.620,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.965.620,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.175.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.970.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	83.884.542,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	124.066.542,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	397.267.681,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	347.221.344,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.750.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	159.567.681,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127.171.344,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	195.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	218.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	244.815.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	294.895.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	57.415.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	81.455.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.440.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	23.440.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
91	2	12	02	-	-	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	151.150.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	147.469.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	75.538.000,00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	33.773.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	13.249.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	7.249.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	4.914.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	4.914.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	19.291.000,00		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	21.610.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	156.428.000,00	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-	113.696.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai									selaras		
							Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	113.696.000,00		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	113.696.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
92	2	12	03	-	-	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	38.045.900,00	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	32.945.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	69.181.900,00	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	29.621.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.452.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	1.452.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	26.371.900,00		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	26.371.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	6.898.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1 Dokumen	1.798.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	7.214.000,00	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	3.324.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	3.324.000,00		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan	3.324.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
93	2	12	04	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	65.110.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	61.712.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	12.625.000,00	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	7.783.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.224.000,00		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	4.252.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	3.531.000,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	3.531.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	11.987.000,00	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	8.697.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	8.757.000,00		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	8.697.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	69.709.000,00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	41.563.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	34.506.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4 Laporan	31.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan									selaras		
							Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	4.152.000,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	4.152.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.056.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	2.056.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	4.215.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2 Laporan	4.215.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	4.975.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	3.669.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	3.669.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8 Laporan	3.669.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
94	2	12	05	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	6.529.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	6.529.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	9.273.000,00	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	6.529.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	selaras	selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.626.000,00		Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	3.626.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain									selaras		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	2.903.000,00		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	2.903.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		selaras	selaras
				,	,	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			8.000.866.314,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			8.020.866.314,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			8.020.866.314,00				
	2	14		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.020.866.314,00				
95	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.774.842.314,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	100 Persentase	37.996.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran Berbasis Kinerja	100 Persentase	24.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.978.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.844.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.162.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.162.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.911.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.812.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	985.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	985.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.043.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.043.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.101.200,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.060.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.026.200,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.793.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.598.735.244,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	3.530.204.938,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.372.482.638,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.372.482.638,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	146.060.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.220.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.336.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.210.300,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.110.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.182.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.182.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	12 bulan	7.494.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegwaian ASN	12 bulan	5.448.700,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		

No	Kode						PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
							Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.968.500,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	2.968.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.480.200,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.480.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		11.982.400,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	12.960.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										selaras		
								Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.620.400,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.620.400,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
96	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		4.173.975.784,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										Tidajk selaras	Tidajk selaras	Tidajk selaras
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.000.866.314,00								
	2	14		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.000.866.314,00								
97	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		4.173.975.784,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		11.982.400,00						Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2	14	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										selaras		
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2.160.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	11.340.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		258.435.696,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	295.647.696,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	37.986.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	188.034.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										selaras		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.702.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.702.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
98	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		4.173.975.784,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.000.866.314,00								
	2	14		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				8.000.866.314,00								
99	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-		4.173.975.784,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		258.435.696,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.170.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	19.170.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										selaras		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	76.441.496,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	76.441.496,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-		542.184.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	424.557.580,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	52.843.950,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan	87.054.690,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	315.012.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	337.502.890,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	481.323.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	85.394.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	151.803.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	14.520.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	14.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
100	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Tidajk selaras	Tidajk selaras	Tidajk selaras
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.000.866.314,00								
	2	14		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8.000.866.314,00								
101	2	14	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.173.975.784,00						selaras	selaras	selaras
	2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	169.060.000,00						Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	315.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		tidak selaras	tidak selaras
102	2	14	02	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	undefined undefined	103.800.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan angka kelahiran remaja 15-19 tahun atau Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	undefined undefined	123.800.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	83.888.000,00	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	123.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga									selaras		
							Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	41.400.000,00		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	61.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	62.400.000,00		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	2 Dokumen	62.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
103	2	14	03	-	-	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	9,00 Persentase	2.702.190.530,00	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Penurunan Unmet Need	9,00 Persentase	2.101.324.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	100 persentase	703.000.000,00	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase PUS yang menggunakan Alat Kontrasepsie	100 persentase	618.440.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	212.670.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	212.670.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	91.000.000,00		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	91.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang									selaras		
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja									selaras		
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	189.770.000,00		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi	189.770.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persentase	248.000.000,00	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persentase	434.802.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)									selaras		
							Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	246.000.000,00		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	360 Orang	246.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	111.195.130,00		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	188.802.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	100 Persentase	497.077.000,00	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahunnya	100 Persentase	895.802.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan									selaras		
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	12.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	847.825.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	125 Orang	847.825.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB									selaras		
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	689.083.400,00		Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Unit	10.610.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	24.767.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	24.767.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persentase	282.484.000,00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berpartisipasi dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persentase	152.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	68.280.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	16 Laporan	68.280.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas									selaras		
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	84.000.000,00		Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	84.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
104	2	14	04	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	1.020.900.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	1.020.900.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	100 Persentase	815.888.000,00	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Keluarga Yang dibina	100 Persentase	1.020.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	selaras	selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga									selaras		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	181.200.000,00		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	32 Keluarga	181.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR,									selaras		
							Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	839.700.000,00		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	360 Orang	839.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja									selaras		
							Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	0,00		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	6 Kelompok	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		selaras	selaras
				.	.	Dinas Perhubungan			18.369.723.010,00	Dinas Perhubungan			19.472.173.347,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.369.723.010,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			19.472.173.347,00				
	2	15		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			18.369.723.010,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			19.472.173.347,00				
105	2	15	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.639.722.110,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.226.810,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	23.298.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	14.898.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	216.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	216.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.980.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.648.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.648.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	54.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.644.592.557,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.474.061.110,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.277.841.210,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.277.849.410,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	184.330.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	184.330.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	804.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	804.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.680.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.680.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.397.700,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.397.700,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.200.312.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	831.268.500,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	384.887.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	387.582.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.876.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	135.963.500,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	92.381.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	120.101.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	164.928.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	175.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	352.777.200,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	258.497.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57.960.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	57.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.307.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	75.307.200,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	46.980.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	125.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	338.740.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	233.502.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	183.830.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	223.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.522.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	9.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
106	2	15	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	100 Persen	11.702.600.900,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	100 Persen	12.632.546.537,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	100 Persen	1.002.448.000,00	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen rencana induk jaringan LLAJ	100 Persen	718.604.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.604.000,00		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	718.604.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	100 Persen	4.857.177.000,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kota yang telah memiliki kelengkapan jalan	100 Persen	10.845.938.537,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	5.088.400.000,00		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	4.741.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									selaras		
							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	5.449.538.900,00		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2805 Unit	6.104.288.537,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	175.830.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	111.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)									selaras		
							Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	57.000.000,00		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	111.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	247.547.500,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	104.426.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	83.456.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	104.426.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	743.342.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	689.768.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	69.298.000,00		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	69.298.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	13.920.000,00		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	13.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji									selaras		
							Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	49.524.000,00		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	106.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	500.550.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	500.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	253.800.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	162.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	104.310.000,00		Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	162.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
107	2	15	03	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	27.400.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	27.400.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	52.710.000,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	27.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	selaras	selaras	selaras
	2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal									selaras		
							Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	27.400.000,00		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	27.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		selaras	selaras
						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			9.413.440.346,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			9.858.440.346,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.413.440.346,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			9.858.440.346,00				
	2	16		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			8.931.855.546,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			9.858.440.346,00				
108	2	16	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	7.791.105.546,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	7.923.470.546,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	31.941.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persentase	23.746.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.358.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.358.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.844.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.058.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.058.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.514.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	722.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	722.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.250.400,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	7.250.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	12 Bulan	4.994.366.916,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	12 Bulan	4.912.671.346,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.709.403.546,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.709.403.546,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	196.358.800,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	196.358.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.844.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.844.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.065.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.065.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	611.332.500,00		Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	459.369.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.599.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.645.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	68.159.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	156.659.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.794.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.673.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	62.593.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	35.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	138.276.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	145.981.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.210.365.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.368.572.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	174.100.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	170.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.143.295.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.113.190.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.940.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.632.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	47.732.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	215.632.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	159.111.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.473.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.366.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106.745.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	106.745.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	2	16	02	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	77,65 POIN	922.433.900,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Keterbukaan Informasi Publik	77,65 POIN	907.563.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	12 Laporan	1.266.277.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	12 Laporan	907.563.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0014	Relasi Media									selaras		
							Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	671.879.000,00		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 Laporan	670.979.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									selaras		
							Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	24.298.000,00		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	41 Komunitas	29.248.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik									selaras		
							Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permohonan	119.710.000,00		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	60 Permoho nan	101.560.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi									selaras		
							Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	8.072.000,00		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25 Persentase	7.302.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									selaras		
							Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	98.474.900,00		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media	98.474.900,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
110	2	16	03	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	2.5 INDEKS	218.316.100,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	2.5 INDEKS	526.856.100,00		selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	25 Dokumen	303.753.000,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	25 Dokumen	526.856.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	7.331.000,00		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	4 Aplikasi	7.331.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	32.839.000,00		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	1 Dokumen	20.389.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE									selaras		
							Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	60.212.000,00		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2 Aplikasi	60.212.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	16.157.000,00		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Aplikasi	37.157.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas									selaras		
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	95.252.100,00		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	34 unit	95.252.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota									selaras		
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	6.525.000,00		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	306.515.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			276.448.800,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			306.588.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
111	2	20	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3 anka	276.448.800,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3 anka	306.588.800,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	82 Persentase	254.534.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	82 Persentase	306.588.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									selaras		
							Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	38.539.800,00		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	38.539.800,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional									selaras		
							Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	78.683.000,00		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	25 Persentase	178.683.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									selaras		
							Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	127.891.000,00		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	25 Persentase	59.191.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									selaras		
							Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	22.685.000,00		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	22.685.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	20	02	2.01	0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar									selaras		
							Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	8.650.000,00		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	7.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			205.136.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			193.961.000,00	DINAS KOMUNIKASI,			
112	2	21	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	1 POIN	205.136.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks Keamanan Informasi	1 POIN	193.961.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	33 Dokumen	169.540.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerapan pelaksanaan Standar Keamanan Informasi	33 Dokumen	109.803.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	63.540.000,00		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	12 Dokumen	53.040.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	19.234.000,00		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	19.234.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	36.203.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	29.203.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	8.326.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	12 Perangkat Daerah	8.326.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	3 Dokumen	104.840.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perasional Jaring Komunikas Sandi	3 Dokumen	84.158.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	selaras	selaras	selaras
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	77.833.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	6 Perangkat Daerah	84.158.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		selaras	selaras
						Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan			8.372.674.612,00	Dinas Koperasi, Perindustrian dan			7.322.774.620,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.322.774.620,00				
	2	17		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.322.774.620,00				
113	2	17	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.556.438.220,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	91.464.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	37.204.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.348.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.058.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	126.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.200.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	25.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	20.916.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	8.820.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.399.952.370,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.215.165.020,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	4.935.736.276,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 Orang/bulan	5.014.445.020,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	187.680.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen	187.680.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	12.000.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.040.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	8.932.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	4.466.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.932.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.466.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	15.468.000,00	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	15.468.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan	0,00					DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.468.000,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	1 Dokumen	15.468.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	0,00					DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	65.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak selar	Tidak selar	Tidak selara
	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	479.230.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	10.175.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	23 Paket	10.175.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	228.107.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	397 Paket	228.107.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material									selaras		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0,00					DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.734.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.734.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	200.214.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	200.214.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	10.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	47.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	47.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	47.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	520.326.900,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	18.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	54.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.654.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.966.400,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	163.635.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.210.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	182.800.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	287 Laporan	198.150.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	101.200.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	237.577.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.732.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	31.732.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	39.992.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	45.842.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	179.293.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	160.003.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
114	2	17	04	-	-	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	19.440.000,00	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-	-	19.440.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	19.440.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	19.440.000,00		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	114 Unit Usaha	19.440.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
115	2	17	05	-	-	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	48.310.200,00	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	80.367.400,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	85.537.200,00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	80.367.400,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	48.310.200,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	80.367.400,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
116	2	17	06	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	57.200.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	-	98.203.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	16.200.000,00	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	98.203.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	57.200.000,00		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	52 Unit Usaha	98.203.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
117	2	17	07	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	60.872.200,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	29.423.200,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	132.630.200,00	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	29.423.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	14.760.000,00		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1800 Unit Usaha	14.760.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan									selaras		
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	46.112.200,00		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150 Orang	14.663.200,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
118	2	17	08	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	571.069.600,00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	538.902.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	516.209.600,00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-	538.902.800,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro									selaras		
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	571.069.600,00		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	85 Unit Usaha	538.902.800,00			selaras	selaras
	3			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			956.183.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			722.388.000,00				
	3	30		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			487.543.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			313.748.000,00				
119	3	30	03	-	-	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0,00	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0,00	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan									selaras		
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
120	3	30	04	-	-	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	256.226.000,00	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	-	235.556.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	168.866.000,00	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	184.796.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat									selaras		
							Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	205.466.000,00		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	184.796.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	64.800.000,00	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-	-	43.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam									selaras		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam									selaras		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	43.200.000,00		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	336 Laporan	43.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	32.400.000,00	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	7.560.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi									selaras		
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	7.560.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	7.560.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
121	3	30	06	-	-	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	78.192.000,00	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	-	78.192.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	136.980.000,00	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	-	78.192.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang									selaras		
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	78.192.000,00		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	123 Unit	78.192.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31		-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			468.640.000,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			408.640.000,00				
122	3	31	02	-	-	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	460.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	400.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	565.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-	-	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	60.000.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	400.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	0,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
123	3	31	04	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	8.640.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	-	8.640.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	17.280.000,00	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	8.640.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	8.640.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	8.640.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
						UPT Sarana Distribusi Perdagangan			8.372.674.612,00	UPT Sarana Distribusi Perdagangan			293.724.500,00				
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			956.183.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			293.724.500,00				
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			487.543.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			293.724.500,00				
124	3	30	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	293.724.500,00		selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	27.190.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.514.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.514.500,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.476.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	11.476.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.200.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	4.200.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	266.534.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	12.190.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	30.940.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.745.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.494.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	105.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	225.100.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
				,	,	UPT PLUT-KUMKM			8.372.674.612,00	UPT PLUT-KUMKM			134.195.996,00				
	2			-	-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			134.195.996,00				
	2	17		-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			7.416.491.112,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,			134.195.996,00				
125	2	17	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6.812.724.612,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	134.195.996,00		selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	722.355.800,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	15.599.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	692.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	692.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.907.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	4.907.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.152.490.500,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	118.596.996,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	selaras	selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.144.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.144.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.262.036,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.476.996,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	89.976.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	89.976.000,00	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		selaras	selaras
				,	,	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.090.505.149,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan			4.308.005.149,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.090.505.149,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			4.308.005.149,00				
	2	18		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.090.505.149,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.308.005.149,00				
126	2	18	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 persen	3.911.902.349,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 persen	4.119.474.349,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 persen	77.311.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 persen	78.311.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	14.924.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.001.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.573.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.573.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.891.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.512.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.512.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.559.600,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.817.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	23.762.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	40.092.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	17.065.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	13.425.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	70 persen	3.511.582.282,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	70 persen	3.364.063.529,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.286.394.549,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.254.119.629,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.000.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100.674.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.308.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.308.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.051.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.961.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 persen	204.519.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	80 persen	157.129.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.508.300,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.508.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.237.100,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.967.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.167.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.167.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	97.486.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	97.486.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	50 persen	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	50 persen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	50 persen	387.903.700,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	50 persen	304.060.620,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	62.082.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	104.082.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.421.700,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	199.978.620,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	75 persen	43.610.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	75 persen	215.910.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	37.400.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	47.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.210.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	18.510.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
127	2	18	02	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	0,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
128	2	18	03	-	-	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5 persen	17.604.000,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5 persen	19.589.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	1871 pelaku usaha	35.023.200,00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	1871 pelaku usaha	19.589.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	17.604.000,00		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen Dokumen	19.589.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
129	2	18	04	-	-	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	8 persen	85.297.200,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	8 persen	90.225.200,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	2373 pelaku usaha	134.564.000,00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	2373 pelaku usaha	90.225.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	67.159.100,00		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	70.053.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	10.533.900,00		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	11.516.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	7.604.200,00		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	8.655.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
130	2	18	05	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5 persen	43.342.800,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5 persen	46.357.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	170 pelaku usaha	84.867.500,00	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	170 pelaku usaha	46.357.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal									selaras		
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	43.342.800,00		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 Kegiatan Usaha	46.357.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
131	2	18	06	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 persen	32.358.800,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 persen	32.358.800,00		selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	55.069.400,00	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	32.358.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	selaras	selaras	selaras
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	32.358.800,00		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	32.358.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		selaras	selaras
						Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.105.714.598,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			6.223.631.116,00				
	2			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.105.714.598,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK			6.034.254.486,00				
	2	23		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			5.916.337.968,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			6.034.254.486,00				
132	2	23	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	undefined undefined	4.950.755.368,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan kantor	undefined undefined	5.068.671.886,00		selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	100 persen	19.036.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Prencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja	100 persen	12.871.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.847.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.847.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.834.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.834.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.551.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.331.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.331.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	814.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	814.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.494.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.494.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	36 Orang / Bulan	4.189.154.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	36 Orang / Bulan	4.211.343.458,70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	3.988.583.030,70		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	4.073.499.458,70	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.322.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	134.322.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.722.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.722.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.800.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	1 Paket	40.600.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegaweaian perangkat daerah	1 Paket	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	undefined undefined	383.527.300,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Administrasi Umum perangkat daerah	undefined undefined	281.633.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.417.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.417.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.789.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.789.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.243.500,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.243.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.113.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.113.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.532.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.532.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	129.700.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1` Laporan	129.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.838.000,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.838.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	328.716.597,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	233.684.327,30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.134.237,30		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	118.134.327,30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	104.550.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 Laporan	104.550.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	453.110.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined	294.140.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	68.510.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	68.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.800.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	26.400.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	26.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	124.430.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	124.430.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
133	2	23	02	-	-	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	6 Perpustakaan	965.582.600,00	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Perpustakaan yang telah terakreditasi	6 Perpustak aan	965.582.600,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	12 Perpustakaan	421.302.900,00	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya perpustakaan yang dikelola sesuai dengan SNP	12 Perpusta kaan	441.245.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar									selaras		
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	27.981.000,00		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustak aan	27.981.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustakaan	68.636.800,00		Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	3 Perpustak aan	80.456.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	29.751.000,00		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan	29.751.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustakaan	101.468.400,00		Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	3 Perpustak aan	101.468.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	10.164.000,00		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7 Orang	6.444.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	15.082.000,00		Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	15.082.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan									selaras		
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	154.081.900,00		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1250 Eksemplar	154.081.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik									selaras		
							Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan	23.480.800,00		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustak aan	25.980.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	1000 orang	272.695.500,00	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembudayaan gemar membaca	1000 orang	524.336.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									selaras		
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustakaan	1.620.400,00		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2 Perpustak aan	1.620.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca									selaras		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	206.057.900,00		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	206.057.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	327.258.400,00		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	50 Lokus	316.658.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			189.376.630,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			189.376.630,00				
134	2	24	02	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Bertambahnya arsip yang diolah undefined	186 undefined Berkas undefined	178.757.730,00	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	undefined Bertambahnya arsip yang diolah	undefined 186 Berkas	178.757.730,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	170.586.275,00	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	144.131.990,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	19.454.125,00		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	100 Berkas	19.454.125,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis									selaras		
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	11.711.665,00		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	150 Berkas	11.711.665,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	112.966.200,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	112.966.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	19.232.740,00	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Bertambahnya Arsip dinamis Kabupaten/Kota yang diolah	186 Berkas	11.667.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis									selaras		
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	11.667.740,00		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10 Arsip	11.667.740,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	42.267.000,00	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	22.958.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN									selaras		
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	6.444.000,00		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	50 Pengguna	6.444.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	16.514.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	16.514.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
135	2	24	03	-	-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	100 Persen	8.541.900,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentasi perlindungan arsip	100 Persen	8.541.900,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	12.264.900,00	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-	-	8.541.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun									selaras		
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	0,00		Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	50 Berkas	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun									selaras		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	8.541.900,00		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100 Arsip	8.541.900,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	0,00	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	-	-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									selaras		
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	0,00		Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	10 Arsip	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip									selaras		
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0,00		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	10 Arsip	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
136	2	24	04	-	-	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	2.077.000,00	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-	-	2.077.000,00		selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	3.442.000,00	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-	-	2.077.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	selaras	selaras	selaras
	2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	0,00		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	1 SOP	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
	2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	2.077.000,00		Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip	2.077.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		selaras	selaras
				.	.	Dinas Kelautan dan Perikanan			4.739.896.787,00	Dinas Kelautan dan Perikanan			4.774.896.787,00				
	3			.	.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.739.896.787,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			4.774.896.787,00				
	3	25		.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			4.739.896.787,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN			4.774.896.787,00				
137	3	25	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.218.432.487,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	4.250.562.487,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	30.831.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	21.905.700,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.846.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.846.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.768.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.768.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.723.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.723.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.788.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.788.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.878.400,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.878.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.499.800,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.499.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.401.300,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3.401.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.656.438.385,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.555.137.797,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.382.929.797,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.382.314.797,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.115.900,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.115.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.329.100,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.329.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.378.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	15.378.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	20.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tidak selar	Tidak selar	Tidak selara
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	250.441.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	162.736.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.296.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.296.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	7.140.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	7.140.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	148.300.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	148.300.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	81.805.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	6.675.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.675.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.675.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	67.967.990,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	64.540.990,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.119.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	22.119.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.421.490,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.421.490,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	608.405.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	439.567.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134.997.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit	134.997.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.830.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	15.830.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	255.995.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	288.740.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	0,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
138	3	25	03	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	160.225.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	139.535.200,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	182.255.000,00	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	120.007.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									selaras		
							Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	105.822.000,00		Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	250 Unit	105.822.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap									selaras		
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	34.875.000,00		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	125 Unit	14.185.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	17.582.000,00	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	14.948.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	4.121.000,00		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang	4.121.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	4.959.200,00		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	4.959.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha									selaras		
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	5.867.900,00		Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Unit Usaha	5.867.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	5.463.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.580.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT									selaras		
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	4.580.100,00		Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	4.580.100,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
139	3	25	04	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	141.168.500,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	-	176.168.500,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	92.169.900,00	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-	-	50.952.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	37.275.000,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5 Kelompok	37.275.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil									selaras		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5.714.900,00		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5 Kelompok	5.714.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan									selaras		
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	7.963.000,00		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	7.963.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	136.849.600,00	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	125.215.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	6.414.000,00		Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	6.414.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	33.591.000,00		Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	33.591.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	6.328.800,00		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	6.328.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	35.495.800,00		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	70.495.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat									selaras		
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	8.386.000,00		Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	5 Unit	8.386.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	3	25	06	-	-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	220.070.600,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	-	208.630.600,00		selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	306.071.000,00	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	127.942.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah									selaras		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	127.942.500,00		Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	4 Dokumen	127.942.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	70.464.000,00	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	44.394.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil									selaras		
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	44.394.500,00		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	44.394.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	109.704.000,00	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	36.293.600,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	selaras	selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	34.937.200,00		Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	384 Ton	23.497.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	12.796.400,00		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	12.796.400,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		selaras	selaras
						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			7.702.417.007,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			8.000.367.764,00				
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.223.848.984,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.539.584.998,00				
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			5.223.848.984,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			5.539.584.998,00				
141	2	22	02	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	10 %	351.175.410,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kebudayaan	10 %	346.175.410,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	1 Kegiatan	94.436.300,00	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa	1 Kegiatan	92.683.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									selaras		
							Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	92.683.300,00		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	92.683.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	10 %	403.751.400,00	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan	10 %	253.492.110,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	141.335.400,00		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	141.335.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional									selaras		
							Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	117.156.710,00		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	5 Laporan	112.156.710,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
142	2	22	05	-	-	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	50 %	71.636.600,00	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	50 %	76.636.600,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2 Objek	90.392.600,00	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	2 Objek	56.892.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	51.892.600,00		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	56.892.600,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan	19.744.000,00	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengelolaan Cagar Budaya	1 Kegiatan	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									selaras		
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	19.744.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
143	2	22	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 Persen %	4.801.036.974,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen 100 %	5.116.772.988,00		selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	32.773.200,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, anggaran, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas	100 %	18.153.240,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.817.900,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.817.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.466.140,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	10.466.140,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.869.200,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.869.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.448.970.390,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terwujudnya Administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	4.450.140.636,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	3.969.892.584,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	4.267.843.886,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.363.750,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	172.363.750,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.877.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.877.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.840.200,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.840.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.215.800,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	3.215.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	503.016.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi umum perangkat daerah	100 %	385.289.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	60.452.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	80.114.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	75.684.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	86.264.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.016.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	28.880.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.995.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	40.030.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	230.999.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	100 %	126.526.062,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	143.700.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	92.620.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	59.999.940,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.906.062,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	153.780.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemilharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	136.663.350,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.000.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.950.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	31.836.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	31.836.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	19.110.560,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	27.502.350,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	25.900.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	32.375.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
144	3	26	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Tercapainya kelancaran administari pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 100 Persen %	4.801.036.974,00						selaras	selaras	selaras
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									Tidak selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									Tidak selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									Tidak selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									Tidak selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									Tidak selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Tidak selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Tidak selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3	26	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									Tidak selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00							Tidak selaras	Tidak selaras
	3			-	-	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.478.568.023,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.460.782.766,00				
	3	26		-	-	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.478.568.023,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			2.460.782.766,00				
145	3	26	02	-	-	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	10 Persen	887.097.443,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	10 Persen	919.312.461,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	2 Lokasi	27.130.000,00	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	2 Lokasi	20.566.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.566.200,00		Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	20.566.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	2 Kawasan	588.188.000,00	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang di kelola	2 Kawasan	661.087.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.878.200,00		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Dokumen	11.878.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	597.998.200,00		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	25 Unit	649.209.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	100 Persen	305.649.841,00	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	100 Persen	237.658.861,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	256.654.843,00		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	237.658.861,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
146	3	26	03	-	-	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	100 %	1.333.408.025,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	100 %	1.283.407.750,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	8 Kegiatan	977.190.464,00	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan	8 Kegiatan	1.283.407.750,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	35.600.550,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	35.600.550,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri									tdak selaras		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00					DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		tdak selaras	tdak selaras
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	265.975.975,00		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan	265.975.700,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	1.031.831.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	981.831.500,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
147	3	26	05	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	30 %	258.062.555,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang terlibat	30 %	258.062.555,00		selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	80 Orang	336.227.600,00	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	80 Orang	143.791.620,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	73.731.900,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan	73.731.900,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	63.482.400,00		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	60 Orang	63.482.400,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	6.577.320,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	6.577.320,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	2 Orang	117.273.479,00	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang berkembang kapasitasnya	2 Orang	114.270.935,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	selaras	selaras	selaras
	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	114.270.935,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	114.270.935,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		selaras	selaras
	.	.	.	.	.	Dinas Pertanian			22.020.595.491,00	Dinas Pertanian			22.390.597.091,00				
	3	.	.	.	.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.020.595.491,00	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.390.597.091,00				
	3	27	.	.	.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			22.020.595.491,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			22.390.597.091,00				
148	3	27	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	13.805.180.979,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	13.927.009.609,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	41.907.800,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	100 persen	33.888.100,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen Dokumen	8.309.500,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen Dokumen	8.309.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.778.600,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.778.600,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.761.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.118.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.476.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.476.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	844.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.498.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	605.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	605.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.443.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	14.103.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	100 Persen	13.142.327.702,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi dan tatakelola keuangan OPD Dinas Pertanian	100 Persen	13.029.828.826,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	12.782.470.726,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang/bulan	12.782.470.726,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	244.440.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	244.440.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.097.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.097.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	670.100,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	670.100,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.151.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.151.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	100 Persen	10.164.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi Barang Milik Daerah OPD Dinas Pertanian	100 Persen	5.356.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.356.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.356.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	100 Persen	21.807.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan administrasi kepegawaian OPD Dinas Pertanian	100 Persen	11.148.100,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	11.148.100,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	11.148.100,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian	100 Persen	415.808.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penatausahaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa pada OPD Dinas Pertanian	100 Persen	347.498.583,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	531.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	2.221.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.513.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	137.285.800,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.652.500,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	13.142.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	72.276.453,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	100.821.283,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	92.124.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	92.124.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	1.904.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15 Dokumen	1.904.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	452.350.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan layanan jasa penunjang pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	395.020.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.000.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	329.850.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	302.020.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	82.580.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian ketersediaan kualitas pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pada OPD Dinas Pertanian	100 persen	104.270.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	68.200.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	92.940.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	6.580.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	11.330.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
149	3	27	02	-	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	29,46 54,70 8,21 persen persen persen	4.200.509.120,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi KomoditasPerkebunan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	54,70 persen 29,46 persen 8,21 persen	4.251.676.090,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	2 Laporan	2.974.188.080,00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pemanfataan, pengawasan dan pendampingan sesuai anjuran penggunaan sarana pertanian	2 Laporan	3.478.938.690,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi									selaras		
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.130.993.320,00		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	3.337.398.690,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian									selaras		
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	141.540.000,00		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	141.540.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	8.004.100,00	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	4.242.300,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman									selaras		
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	4.242.300,00		Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2 Dokumen	4.242.300,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	6 Laporan	948.544.950,00	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak dan pakan ternak bermutu	6 Laporan	713.569.400,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil									selaras		
							Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 0	810.190.800,00		0	4 0	708.622.400,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak									selaras		
							Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	4.947.000,00		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	2 Laporan	4.947.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	4 Laporan	27.916.300,00	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak memenuhi standar teknis	4 Laporan	54.925.700,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan									selaras		
							Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	108.595.700,00		Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	4 Laporan	54.925.700,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	15 ekor	0,00	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan bibit unggul bermutu	15 ekor	0,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain									selaras		
							Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15 Ekor	0,00		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	15 Ekor	0,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
150	3	27	03	-	-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50% Persen	3.099.678.075,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan ketersediaan prasarana pertanian dalam kondisi baik	50% Persen	3.297.208.075,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	23 Paket	4.064.357.075,00	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian terbangun/ terpelihara	23 Paket	3.297.208.075,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									selaras		
							Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	23 dokumen Laporan	3.099.678.075,00		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	23 dokumen Laporan	3.297.208.075,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
151	3	27	04	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	58,36 Persen	135.692.097,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	58,36 Persen	135.692.097,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2 Laporan	119.823.432,00	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jaminan pelayanan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular	2 Laporan	68.298.842,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan									selaras		
							Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	11.348.747,00		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	5 Wilayah	11.348.747,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 wilayah Laporan	56.950.095,00		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5 wilayah Laporan	56.950.095,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50 Persen	24.534.255,00	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang mampu dilayani	50 Persen	20.692.755,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									selaras		
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	20.692.755,00		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	20.692.755,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	50 persen	87.678.500,00	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaku usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada unit usahanya	50 persen	46.700.500,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan									selaras		
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	32.699.900,00		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	32.699.900,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan									selaras		
							Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	25 Unit Usaha	14.000.600,00		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	25 Unit Usaha	14.000.600,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
152	3	27	05	-	-	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100 100 persen Persen	24.521.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100 persen 100 Persen	24.521.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	68 Ha	34.046.000,00	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas serangan areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	68 Ha	24.521.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
							Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66 Ha	16.794.500,00		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	66 Ha	16.794.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									selaras		
							Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	7.726.500,00		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	7.726.500,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
153	3	27	06	-	-	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100 Persen	36.870.000,00	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	100 Persen	36.346.000,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Dokumen	43.530.000,00	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan proses rekomendasi teknis izin usaha sektor pertanian	20 Dokumen	36.346.000,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian									selaras		
							Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	36.870.000,00		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	20 Dokumen	36.346.000,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	3	27	07	-	-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10 Persen	718.144.220,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	10 Persen	718.144.220,00		selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	1 Laporan	517.127.820,00	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	1 Laporan	718.144.220,00	DINAS PERTANIAN	selaras	selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	366.295.700,00		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	366.295.700,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa									selaras		
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	282.760.720,00		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 Unit	282.760.720,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	69.087.800,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	69.087.800,00	DINAS PERTANIAN		selaras	selaras
				,	,	Sekretariat Daerah			48.542.538.281,00	Sekretariat Daerah			50.142.238.281,00				
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			48.542.538.281,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			50.142.238.281,00				
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH			48.542.538.281,00	SEKRETARIAT DAERAH			50.142.238.281,00				
155	4	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	33.772.739.413,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	34.905.639.413,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	13.104.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9.139.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.322.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.322.300,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.921.500,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.921.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	19.520.496.407,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	18.881.068.640,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.246.842.640,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan	18.246.842.640,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	631.481.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	631.001.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.286.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.286.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.938.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.938.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15.334.100,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	20.844.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	18.644.100,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 Dokumen	20.844.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.650.576.476,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	1.935.246.666,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.721.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.721.260,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.291.190,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	81.291.190,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	88.109.100,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	96.189.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.318.757.250,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.392.150.250,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	287.449.866,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan	295.894.866,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	411.430.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.375.642.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									selaras		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	1.249.130.000,00		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	1.375.642.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.502.119.980,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	3.466.364.470,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	244.511.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	257.127.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.451.849.667,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.336.779.207,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.897.618.263,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.872.458.263,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	1.580.257.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	2.906.502.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	453.920.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	453.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	669.180.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	759.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	171.980.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	211 Unit	202.015.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	946.717.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.445.347.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.040.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	46.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.198.849.985,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 persen	1.258.849.985,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	537.849.985,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	597.849.985,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	81.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.981.514.900,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretarit Daerah	100 persen	1.810.944.252,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	922.750.825,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	922.750.825,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	725.690.527,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	725.690.527,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									selaras		
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	162.502.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	399.378.000,00	Penataan Organisasi	Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi	100 persen	435.951.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	112.045.800,00		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	276.087.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	30.787.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	52.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	28.945.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	48.345.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	28.750.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	28.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30.524.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	30.524.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	3.273.773.000,00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 persen	2.805.086.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.400.166.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	900 Laporan	1.485.806.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	809.817.700,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	10 Laporan	881.727.700,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan									selaras		
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	446.302.400,00		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	437.552.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
156	4	01	02	-	-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	12.818.921.175,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	12.912.521.175,00		selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	1.910.756.750,00	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Tata Pemerintahan	100 persen	2.149.020.175,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	1.552.556.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	7 Dokumen	1.530.251.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	324.967.125,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	339.109.225,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	258.197.050,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	279.659.950,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	10.913.958.400,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	9.841.645.700,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	8.948.264.800,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	13 Dokumen	8.895.264.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	181.817.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	181.817.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	764.563.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	764.563.900,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	1.217.583.000,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 persen	921.855.300,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah									selaras		
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	342.050.800,00		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	690 Dokumen	366.820.800,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum									selaras		
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	208.162.000,00		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2 Kasus	315.552.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum									selaras		
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	238.342.500,00		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	85 Dokumen	239.482.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
157	4	01	03	-	-	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	1.950.877.693,00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	100 Persen	2.324.077.693,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	413.378.600,00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 persen	300.095.420,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	43.487.910,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen	38.578.330,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	129.493.789,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	170.931.590,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	71.120.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	8 Dokumen	52.880.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	35.795.100,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1 Dokumen	28.855.100,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	699.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	8.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.204.211.244,00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-	1.275.759.263,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	42.085.713,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	44.497.713,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	792.488.750,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6 Laporan	1.163.138.550,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	115.784.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	16 Laporan	68.123.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	638.101.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 persen	697.034.400,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	181.030.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	72 Dokumen	161.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	204.600.400,00		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 Dokumen	254.600.400,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	285.904.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	46 Orang	281.404.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	96.988.300,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 persen	51.188.610,00	SEKRETARIAT DAERAH	selaras	selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	18.040.701,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	18.449.732,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	- Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	30.346.130,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	32.738.878,00	SEKRETARIAT DAERAH		selaras	selaras
				,	,	Sekretariat DPRD			24.527.700.598,00	Sekretariat DPRD			25.702.650.598,00				
	4			.	.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			24.527.700.598,00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			25.702.650.598,00				
	4	02				SEKRETARIAT DPRD			24.527.700.598,00	SEKRETARIAT DPRD			25.702.650.598,00				
158	4	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.902.230.098,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	18.894.847.698,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	19.758.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	15.995.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.983.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.983.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.998.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.998.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.439.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.439.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.537.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.716.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1.716.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.785.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	5.785.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	15.236.098.735,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.948.516.158,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.681.671.958,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	14.662.222.158,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	280.413.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	280.413.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.146.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.146.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	735.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	735.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	499.239.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	469.163.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	399.525.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2000 Orang	469.163.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	760.684.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	844.231.800,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.237.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.237.800,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	645.250.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	645.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	23.282.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	42.744.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	834.328.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	597.503.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	116.677.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	134.403.100,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.662.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	197.662.800,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	94.337.100,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	94.337.100,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	144.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	171.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.327.526.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	967.925.740,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	45.355.740,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	45.355.740,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.130.570.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	922.570.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	373.905.000,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-	383.161.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									selaras		
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	24.845.000,00		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 Orang/Bulan	36.691.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	271.470.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	150 Paket	271.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-	815.584.000,00	Layanan Administrasi DPRD	-	-	668.352.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	593.456.000,00		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	668.352.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
159	4	02	02	-	-	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	5.625.470.500,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik	100 Persen	6.807.802.900,00		selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	12 Dokumen	1.293.166.300,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	12 Dokumen	827.755.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	245.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	245.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	242.290.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	562.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.715.000,00		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1.715.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	14.450.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	14.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.955.000,00		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	3.955.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	395.100.000,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-	14.070.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	62.505.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	44.730.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	7.965.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	7.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	6.435.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	6.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	7.965.000,00		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	7.965.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	0,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	4 Dokumen	0,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	22.365.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	4 Dokumen	22.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.324.495.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	1.631.426.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.177.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen	1.247.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									selaras		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	164.900.000,00		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	5 Orang	164.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.626.000,00		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.626.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	209.400.000,00		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	15 Dokumen	217.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.284.660.000,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-	2.329.989.900,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2.345.000,00		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	2.345.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses									selaras		
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.628.052.500,00		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2.327.644.900,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	111.802.000,00	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	59.832.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.985.000,00		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	5.985.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	53.847.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	53.847.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	3.000.000.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	selaras	selaras	selaras
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.815.760.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD		selaras	selaras
				.		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			7.461.949.078,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			7.702.025.460,00				
	5			.		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.461.949.078,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.702.025.460,00				
	5	01		.		PERENCANAAN			7.461.949.078,00	PERENCANAAN			7.702.025.460,00				
160	5	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	6.059.663.688,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	A nilai	102.478.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daeraj yang berkualitas	A nilai	83.823.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	35.256.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	26.796.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.197.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.197.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	4.550.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	4.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.350.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	19.300.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	15.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	17.450.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	16.730.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.185.761.888,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.842.225.478,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.954.540.588,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	140.602.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	140.602.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
161	5	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00						selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tidak selaras	Tidak selaras	Tidak selaras
	5			-	-	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.461.949.078,00								
	5	01				PERENCANAAN			7.461.949.078,00								
162	5	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rerata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan	100 persen	5.645.657.578,00						selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.112.752.403,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.711.600,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.711.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.225.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	14.225.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	25.520.700,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	37.690.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	13.152.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.992.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	7.935.300,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	14.280.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	2.100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	10.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.320.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100 persen	15.762.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian pada perangkat daerah	100 persen	14.031.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.643.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.643.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.400.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.748.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	6.988.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	520.284.380,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	545.633.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.531.800,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.531.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.484.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	148.469.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	43.743.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	73.113.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	142.560.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	317.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	199.114.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	145.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	79.550.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 LAPORAN Laporan	69.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.124.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.930.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	22.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	14.600.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01 Laporan	14.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	72.220.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	70.734.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	49.854.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	62.804.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.930.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	7.930.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
163	5	01	02	-	-	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program) Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti	95 65 persen persen	525.485.000,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase rekomendasi hasil pengendalian dan monev yang ditindaklanjuti Persentase keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD/RPD(Program)	65 persen 95 persen	419.788.000,00		selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD	70 persen 95 persen	529.369.000,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rasio alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian Prioritas Daerah dalam RKPD dan APBD Persentase pemenuhan NSPK dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	70 persen 95 persen	336.910.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									selaras		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	38.189.000,00		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara Berita Acara	27.189.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	61.873.000,00		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara Berita Acara	45.143.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	140.061.000,00		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 LAPORAN Berita Acara	78.319.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	176.564.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	186.259.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	65 persen	177.062.000,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Adanya tindak lanjut atas rekomendasi dan hasil pengendalian evaluasi	65 persen	82.878.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	33.889.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	27.409.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	74.909.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	55.469.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
164	5	01	03	-	-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	1.290.806.500,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan program/kegiatan/Sub kegiatan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	95 persen	1.222.573.772,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95 persen	562.705.600,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95 persen 95 persen	282.346.245,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	33.799.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 Dokumen	32.933.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	31.983.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	29.332.560,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang									selaras		
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	39.741.300,00		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9 Laporan	38.276.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	91.583.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	124.422.423,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	55.020.100,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	43.163.262,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	27.178.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan	14.218.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95 persen	431.289.900,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	95 persen 95 persen	620.982.545,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	86.342.200,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	61.966.257,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	7.302.100,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	19.270.773,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	18.663.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	10.188.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	474.294.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	469.459.825,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	61.104.000,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	51.826.790,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	10.805.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	8.270.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 persen	498.473.200,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan muatan RKA Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan muatan Renja Perangkat Daerah dengan muatan RKPD (Program, kegiatan dan subkegiatan) bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	95 persen 95 persen	319.244.982,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	46.885.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	58.239.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	140.783.900,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	135.203.902,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	18.180.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan	18.180.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	107.736.300,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	72.895.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	25.928.400,00		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	25.584.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	13.475.500,00		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	9.140.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		selaras	selaras
				,	,	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			21.728.049.820,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			26.232.535.458,00				
	5			.	.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			21.728.049.820,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			26.232.535.458,00				
	5	02				KEUANGAN			21.728.049.820,00	KEUANGAN			26.232.535.458,00				
165	5	02	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	15.050.437.947,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	15.652.295.065,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 %	43.650.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 %	24.064.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.799.500,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	12.088.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.241.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.418.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.418.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.566.300,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.566.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.385.700,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.385.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.057.300,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.057.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.307.500,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.307.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 %%	13.705.502.530,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 %%	13.514.996.642,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.014.411.175,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan	12.215.315.210,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.201.249.032,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.030.749.032,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.335.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13.335.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	146.710.500,00		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	251.710.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	19.865.900,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.169.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	11.139.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.717.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	824.976.900,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	799.539.733,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.817.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.817.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	327.332.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	432.509.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.676.300,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	92.389.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197.100.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	267.823.933,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	181.764.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	841.574.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	611.853.300,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	841.574.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	369.267.840,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	327.972.340,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	37.296.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	19.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	155.854.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136.884.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.402.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	65.359.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.128.940,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	106.128.940,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	130.506.050,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	144.147.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	51.271.250,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	53.271.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	44.219.750,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	90.876.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
166	5	02	02	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	100 %	3.877.293.400,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	100 %	7.978.496.240,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	2 Dokumen	1.402.048.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	2 Dokumen	1.128.566.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	21.610.700,00		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	10.649.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	25.522.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	9.722.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	29.335.200,00		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	27.895.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	35 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	124.070.500,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	192.858.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang									selaras		
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	64.432.400,00		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	93.559.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	101.436.000,00		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	115.824.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	698.956.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	667.706.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	19.674.900,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	10.350.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	34 PD	588.904.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	34 PD	323.949.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	28.739.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	6 Dokumen	27.568.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	41.052.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	39.774.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	36.280.000,00		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	33.314.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	63.375.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	60.660.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta									selaras		
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	85.669.000,00		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	98.095.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	68.834.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	64.538.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	478.867.600,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	277.306.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	14.006.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	6 Dokumen	23.958.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran									selaras		
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	11.829.700,00		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	10.429.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	90.809.100,00		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	4 Laporan	90.309.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD									selaras		
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	51.509.400,00		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	47.009.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	103.302.300,00		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	84.432.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.849.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	21.167.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	100 %	2.139.400.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Bantuan Keuangan Dana Tidak Terduga	100 %	6.138.752.840,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.077.550.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	6.138.752.840,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	179.068.300,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	109.921.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	113.449.600,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	109.921.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
167	5	02	03	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	83,09 %	1.120.306.409,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	83,09 %	842.076.089,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100 %	896.780.376,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100 %	842.076.089,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga									selaras		
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	36.307.300,00		Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	48.086.080,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30.488.300,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	18.709.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.565.700,00		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5.565.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.362.112,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	153.362.112,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	62.267.400,00		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	62.267.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	362.170.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	283.940.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	29.633.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	29.633.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	357.643.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	157.643.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	65.366.097,00		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	65.366.097,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	12.471.500,00		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	12.471.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.032.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	5.032.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
168	5	02	04	-	-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	6.98 %	1.680.012.064,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Pendapatan Asli Daerah	6.98 %	1.759.668.064,00		selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	2.359.480.664,00	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 %	1.759.668.064,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	15.573.200,00		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	15.573.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	39.093.900,00		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	39.093.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	115.480.900,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	28.560.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	307.901.600,00		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	534.401.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	119.420.900,00		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	119.420.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	101.810.800,00		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	101.810.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	14.918.600,00		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	645 Layanan	14.918.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	34.000.000,00		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	34.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	714.141.964,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	777.141.964,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	63.995.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	29.435.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	82.132.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	26.168.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	71.542.700,00		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	39.142.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		selaras	selaras
				,	,	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.121.276.855,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan			8.509.008.715,00				
	5			.	.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			8.121.276.855,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.522.025.045,00				
	5	03		.	.	KEPEGAWAIAN			6.359.096.185,00	KEPEGAWAIAN			6.522.025.045,00				
169	5	03	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	5.301.462.585,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	5.449.941.445,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	74.698.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	51.218.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.052.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.024.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.340.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.286.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.459.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.061.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.924.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.924.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.406.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.406.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	31.517.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	31.517.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.582.838.430,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.590.028.445,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.342.684.585,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4.405.716.445,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	133.959.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen	157.206.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.547.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.547.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	8.146.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	13.396.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.163.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.163.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	58.430.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	62.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	28.430.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	28.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	8.400.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	34.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	459.817.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	322.885.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	22.700.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	22.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	60.285.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	60.285.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	680.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40 Paket	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		tidak selaras	tidak selaras
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.020.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	44.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	70.600.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	150000 Paket	71.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	121.600.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	121.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	157.810.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	132.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	115.380.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	132.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	168.970.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	153.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	37.190.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2000 Laporan	37.190.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.370.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.370.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.810.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	86.810.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	171.230.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	137.290.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	72.570.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	88.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27.010.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	27.010.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.220.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22.220.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
170	5	03	02	-	-	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	undefined 70,01 undefined Indeks	1.057.633.600,00	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	undefined Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	undefined undefined 70,01 Indeks	1.072.083.600,00		selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	100 Persen	781.441.000,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi	100 Persen	514.216.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.800.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	9.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	332.035.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	308.785.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	18.065.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	117 Dokumen	18.065.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	140.835.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	3776 Dokumen	142.935.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	34.631.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	34.631.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	100 Persen	229.122.000,00	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	100 Persen	226.083.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	175.811.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	183.811.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									selaras		
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	42.272.000,00		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	42.272.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	58 Persen	198.777.600,00	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	58 Persen	225.922.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									selaras		
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	193.730.600,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	184 Orang	222.830.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	3.092.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	184 Laporan	3.092.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	100 Persen	142.362.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	100 Persen	105.862.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	30.613.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3776 Dokumen	29.113.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									selaras		
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	11.364.000,00		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100 Orang	11.364.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	12.745.000,00		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang	12.745.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	52.640.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 Laporan	52.640.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	04		.	.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.762.180.670,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.986.983.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN			
171	5	04	02	-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	25 Persen	1.762.180.670,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	25 Persen	1.986.983.670,00		selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	5,18 Persen	67.190.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	5,18 Persen	51.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	51.060.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	4 Dokumen	51.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	6,23 Persen	2.223.511.750,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	6,23 Persen	1.935.923.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	selaras	selaras	selaras
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	1.711.120.670,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	315 Laporan	1.935.923.670,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		selaras	selaras
				,	,	Badan Riset dan Inovasi Daerah			3.454.866.885,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah			3.752.277.378,00				
	5			.	.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.454.866.885,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			3.752.277.378,00				
	5	05		.	.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.454.866.885,00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			3.752.277.378,00				
172	5	05	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.684.991.485,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2.951.159.978,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	27.768.600,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	12.347.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.533.600,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.608.600,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.220.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.067.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.464.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.006.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.006.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.461.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.017.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.698.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.698.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	7.783.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	583.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.382.671.457,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.376.282.058,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.050.725.461,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.206.936.058,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	152.624.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	152.624.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.830.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.402.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	15.696.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	8.928.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	9.892.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	392.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	48.334.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	13.446.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.320.800,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.196.800,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.320.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	4.320.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.818.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.430.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	442.890.740,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	303.631.720,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.747.240,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.747.240,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.333.300,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.833.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.073.880,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.559.980,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.147.200,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.147.200,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	21.497.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	21.497.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	168.022.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	180.847.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	680.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Tidak selar	Tidak selar	Tidak selara
	5	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									selaras		
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	115.191.950,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	122.728.900,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.836.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.836.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.853.504,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.474.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	15.559.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	73.418.900,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	78.765.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	122.723.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.702.500,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	57.173.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	12.820.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	16.480.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11.905.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
173	5	05	03	-	-	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	10 18 Angka Angka	769.875.400,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Jumlah Riset yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja Jumlah inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja	10 Angka 18 Angka	801.117.400,00		selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	31 Angka	518.469.400,00	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Riset yang dilaksanakan	31 Angka	386.587.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	40.820.000,00		Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	20.566.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	33.632.000,00		Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	1 Naskah	33.632.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	164.322.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	164.322.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	56.051.400,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan	56.051.400,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	44.870.000,00		Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	2 paket Pelatihan	89.116.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah									selaras		
							Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	22.900.000,00		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen	22.900.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	165 Angka	731.254.000,00	Invensi dan Inovasi	Jumlah Inovasi yang dibina	165 Angka	414.530.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	selaras	selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	0,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	203.320.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	4 Laporan	201.820.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	61.097.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan	61.097.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	31.233.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	4 Laporan	31.233.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	44.710.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan	44.710.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	66.920.000,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan	75.670.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan									selaras		
							Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	0,00		Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	0,00		Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	2 Naskah	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi									selaras		
							Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	0,00		Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
	5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi									selaras		
							Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	0,00		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		selaras	selaras
				.	.	Inspektorat			11.812.888.254,00	Inspektorat			12.055.911.591,00				
	6			.	.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			11.812.888.254,00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN			12.055.911.591,00				
	6	01		.	.	INSPEKTORAT DAERAH			11.812.888.254,00	INSPEKTORAT DAERAH			12.055.911.591,00				

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	6	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	10.901.614.554,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	11.170.632.691,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 Persen	33.460.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100 Persen	25.489.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.780.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.077.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.077.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.213.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 Persen	9.433.855.794,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100 Persen	9.025.914.091,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	8.588.164.754,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/bulan	8.781.188.091,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	233.520.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	233.520.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.213.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	14.382.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	11.206.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									selaras		
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.780.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.780.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.213.000,00		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	942.793.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	405.758.400,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00					INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00					INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									selaras		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.213.000,00		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	3.213.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									selaras		
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	450.662.000,00		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	402.545.400,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.961.837.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1.409.605.900,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.825.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.825.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	608.970.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	626.370.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	32.758.500,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	69.259.500,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	91.694.800,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	86.694.800,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	63.430.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	42.670.000,00					INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	504.301.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	536.641.600,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.385.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.385.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	169.834.300,00	INSPEKTORAT	Tidak selar	Tidak selar	Tidak selara
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	29.436.800,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	223.662.000,00					INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.954.000,00					INSPEKTORAT		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	39.270.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.997.500,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	109.500.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	104.400.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	129.770.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	122.825.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	106.620.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	106.620.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.205.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	16.205.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
175	6	01	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	10,36 Persen	676.936.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentasi Penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Temuan	10,36 Persen	618.946.700,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	98 Persen	826.350.800,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Pengawasan (Materil)	98 Persen	529.846.700,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	17.100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21 Laporan	17.100.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	10.800.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	10.800.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	351.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	34 Laporan	353.550.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	13.500.000,00		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	13.500.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal									selaras		
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	106.080.000,00		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakat an	35.820.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	89.356.700,00		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	99.076.700,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16,22 Persen	99.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	16,22 Persen	89.100.000,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	89.100.000,00		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	7 Laporan	89.100.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
176	6	01	03	-	-	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	3 Level	234.337.000,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Nilai Kapabilitas APIP	3 Level	266.332.200,00		selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	49 Persen	510.137.000,00	Pendampingan dan Asistensi	Presentase OPD yang memperoleh asistensi dan pendampingan guna mendorong tercapainya SPIP level 3	49 Persen	266.332.200,00	INSPEKTORAT	selaras	selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	61.200.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4 perangkat daerah	61.200.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	14.580.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	8 perangkat daerah	14.580.000,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									selaras		
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	122.136.000,00		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	127.449.600,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									selaras		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	36.421.000,00		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	63.102.600,00	INSPEKTORAT		selaras	selaras
				,	,	Kecamatan RasanaE Barat			11.605.721.405,00	Kecamatan RasanaE Barat			8.618.651.086,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			8.618.651.086,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			8.618.651.086,00				
177	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.278.906.955,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesesuaian program antar dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	8.394.753.786,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	40.356.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 dokumen	26.227.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.400.400,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.400.400,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.969.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.022.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.022.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.976.800,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.976.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.562.300,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.562.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.645.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	8.645.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.652.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.652.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.831.827,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	7.641.090.036,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.319.989.205,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	7.375.836.036,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	262.790.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	262.790.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.464.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.464.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	203.715.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	102.968.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.765.500,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.765.500,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.735.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.735.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.187.800,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.187.800,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.280.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	38.280.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	613.389.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	579.106.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	249.964.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	309.964.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.361.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.361.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	218.781.300,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	218.781.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	62.751.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	45.361.350,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	40.691.350,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	40.691.350,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.340.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.340.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.330.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.330.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
178	7	01	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 tahun	26.492.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 tahun	26.492.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	33.561.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-	26.492.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									selaras		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.492.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	26.492.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
179	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 %	122.405.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Kelurahan	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6 Kelurahan	4.644.200,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.644.200,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.644.200,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	123.223.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan	1 kali	117.761.100,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	107.761.100,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarak atan	117.761.100,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
180	7	01	04	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	100 %	75.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman di wilayah Kecamatan Rasanae Barat	100 %	75.000.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	100 %	63.780.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Kegiatan Pembinaan, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Rasanae Barat	100 %	75.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75.000.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Paruga			11.605.721.405,00	Kelurahan Paruga			541.960.700,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			541.960.700,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			541.960.700,00				
181	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	541.960.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	541.960.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	540.760.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	541.960.700,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Dara			11.605.721.405,00	Kelurahan Dara			559.873.250,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			559.873.250,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			559.873.250,00				
182	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	559.873.250,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	559.873.250,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	552.673.250,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	559.873.250,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Sarae			11.605.721.405,00	Kelurahan Sarae			593.356.300,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			593.356.300,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			593.356.300,00				
183	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	593.356.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	593.356.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.156.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	593.356.300,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Tanjung			11.605.721.405,00	Kelurahan Tanjung			535.614.000,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			535.614.000,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			535.614.000,00				
184	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 %	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 %	535.614.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	100 %	535.614.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	534.414.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	535.614.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Nae			11.605.721.405,00	Kelurahan Nae			485.838.000,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			485.838.000,00				

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	.	.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			485.838.000,00				
185	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	485.838.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	485.838.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	484.638.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	485.838.000,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Pane			11.605.721.405,00	Kelurahan Pane			409.474.900,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			11.605.721.405,00	UNSUR KEWILAYAHAN			409.474.900,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			11.605.721.405,00	KECAMATAN			409.474.900,00				
186	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.225.322.450,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	409.474.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.404.131.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	409.474.900,00	KECAMATAN RASANAE BARAT	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	408.274.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	409.474.900,00	KECAMATAN RASANAE BARAT		selaras	selaras
				,	,	Kecamatan RasanaE Timur			13.262.163.030,00	Kecamatan RasanaE Timur			10.164.340.930,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			10.164.340.930,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			10.164.340.930,00				
187	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.950.608.930,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	31.840.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
188	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00						selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00					KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00								
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00								
189	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00						selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00					KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.750.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
190	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00						selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00					KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00								
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00								
191	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	9.971.958.930,00						selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	44.440.000,00					KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	39.190.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	26.590.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	1 Tahun	9.531.720.930,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined	1 Tahun	8.975.386.250,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.720.826.250,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	8.720.826.250,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	274.800.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	251.760.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	199.350.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	129.691.900,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.500.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.281.900,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.281.900,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.910.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	76.910.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	815.457.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	800.240.780,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	93.182.800,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	199.522.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.567.980,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	16.567.980,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	676.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	584.150.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.450.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	13.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.450.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	13.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
192	7	01	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.182.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	10.182.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	10.182.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	10.182.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.182.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	10.182.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
193	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	133.950.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	23.950.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	19.450.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarak atan	19.450.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	11.150.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	4.500.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	110.000.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarak atan	110.000.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
194	7	01	04	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	69.600.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	69.600.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	69.600.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	69.600.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.600.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	69.600.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Nungga			13.262.163.030,00	Kelurahan Nungga			391.184.300,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			391.184.300,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			391.184.300,00				
195	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	391.184.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	391.184.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	389.984.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	391.184.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Lelamase			13.262.163.030,00	Kelurahan Lelamase			428.080.800,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			428.080.800,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			428.080.800,00				
196	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	428.080.800,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	428.080.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	426.880.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	428.080.800,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Dodu			13.262.163.030,00	Kelurahan Dodu			418.530.300,00				

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			418.530.300,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			418.530.300,00				
197	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	418.530.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	418.530.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	417.330.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	418.530.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Lampe			13.262.163.030,00	Kelurahan Lampe			340.221.700,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			340.221.700,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			340.221.700,00				
198	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	340.221.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	340.221.700,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	333.021.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	340.221.700,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Kodo			13.262.163.030,00	Kelurahan Kodo			354.577.300,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			354.577.300,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			354.577.300,00				
199	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	354.577.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	354.577.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	353.377.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	354.577.300,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Kumbe			13.262.163.030,00	Kelurahan Kumbe			442.150.000,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			442.150.000,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			442.150.000,00				
200	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	442.150.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	442.150.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	443.950.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	442.150.000,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Oi Fo'o			13.262.163.030,00	Kelurahan Oi Fo'o			366.395.500,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			366.395.500,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			366.395.500,00				
201	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	366.395.500,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	366.395.500,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	365.195.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	366.395.500,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Oi Mbo			13.262.163.030,00	Kelurahan Oi Mbo			332.282.200,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			13.262.163.030,00	UNSUR KEWILAYAHAN			332.282.200,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			13.262.163.030,00	KECAMATAN			332.282.200,00				
202	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.210.422.100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	332.282.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.646.186.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	332.282.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	340.082.200,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	332.282.200,00	KECAMATAN RASANAE TIMUR		selaras	selaras
				,	,	Kecamatan Asakota			12.308.928.279,00	Kecamatan Asakota			8.753.810.379,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			8.753.810.379,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			8.753.810.379,00				
203	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.514.171.079,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	8.551.171.079,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	6.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.200.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.561.322.815,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	8.000.113.579,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.519.551.279,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	7.519.551.279,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	467.731.800,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen	476.001.800,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.050.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.050.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.510.500,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3.510.500,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00					KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								KECAMATAN ASAKOTA	selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket	0,00							tidak selaras	tidak selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	143.185.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	72.350.600,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.681.600,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.681.600,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.706.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.706.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30.963.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	30.963.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	460.204.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	391.256.900,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	113.028.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	121.688.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.530.200,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	62.530.200,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	207.038.700,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500 Laporan	207.038.700,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	105.066.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	83.250.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	69.530.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	79.600.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.650.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	3.650.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
204	7	01	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.387.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	18.387.500,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	27.972.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	18.387.500,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	750.500,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	750.500,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	17.637.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	17.637.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
205	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	141.617.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	41.037.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12.198.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarak atan	12.198.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	28.839.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	28.839.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	107.813.500,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	100.580.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	90.580.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarak atan	100.580.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
206	7	01	04	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	37.698.800,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	40.698.800,00		selaras	selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	42.240.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	40.698.800,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	37.698.800,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	40.698.800,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
207	7	01	05	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.936.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	1.936.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	2.852.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	1.936.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	1.936.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20 Orang	1.936.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Kolo			12.308.928.279,00	Kelurahan Kolo			592.358.100,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			592.358.100,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			592.358.100,00				
208	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	592.358.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	592.358.100,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	591.158.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	592.358.100,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Melayu			12.308.928.279,00	Kelurahan Melayu			562.011.000,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			562.011.000,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			562.011.000,00				
209	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	562.011.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	562.011.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	560.811.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	562.011.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Jatiwangi			12.308.928.279,00	Kelurahan Jatiwangi			705.103.000,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			705.103.000,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			705.103.000,00				
210	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	705.103.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	705.103.000,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	697.903.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	705.103.000,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Ule			12.308.928.279,00	Kelurahan Ule			636.514.600,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			636.514.600,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			636.514.600,00				
211	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	636.514.600,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	636.514.600,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	635.314.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	636.514.600,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kelurahan Jatibaru			12.308.928.279,00	Kelurahan Jatibaru			566.592.100,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			566.592.100,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			566.592.100,00				
212	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	566.592.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	566.592.100,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	559.392.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	566.592.100,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
						Kelurahan Jatibaru Timur			12.308.928.279,00	Kelurahan Jatibaru Timur			561.739.100,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			12.308.928.279,00	UNSUR KEWILAYAHAN			561.739.100,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			12.308.928.279,00	KECAMATAN			561.739.100,00				
213	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	3.736.734.900,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	561.739.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	3.969.198.800,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	561.739.100,00	KECAMATAN ASAKOTA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	560.539.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	561.739.100,00	KECAMATAN ASAKOTA		selaras	selaras
				,	,	Kecamatan Mpunda			17.104.240.684,00	Kecamatan Mpunda			13.127.235.373,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			13.127.235.373,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			13.127.235.373,00				
214	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	undefined undefined	12.912.763.384,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran	undefined undefined	12.939.302.273,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined undefined	10.759.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	undefined undefined	7.515.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.802.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.802.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.161.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.161.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.552.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.552.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined undefined	12.403.717.004,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	undefined undefined	11.957.634.393,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.227.652.104,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	11.360.790.993,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	571.379.400,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	590.347.400,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.344.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.344.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.130.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.152.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	339.479.600,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhanan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	undefined undefined	219.785.680,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.273.680,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.811.480,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.389.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.903.200,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.398.200,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.416.000,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.416.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									selaras		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.000.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	71.160.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	71.160.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	867.711.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	679.227.500,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	328.471.500,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	273.731.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73.296.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	73.296.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	417.200.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	332.200.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	88.151.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	75.139.700,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	46.675.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.170.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5.078.500,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.429.700,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	13.880.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	17.540.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
215	7	01	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 Tahun	43.002.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat kelurahan terhadap pelayanan publik	1 Tahun	45.582.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	1 Tahun	40.829.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi kegiatan di tingkat kecamatan	1 Tahun	31.134.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi									selaras		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.879.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	18.879.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	9.675.000,00		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	12.255.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	undefined undefined	20.640.000,00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	undefined undefined	14.448.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan									selaras		
							Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	14.448.000,00		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	14.448.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
216	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	109.129.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	undefined undefined	14.329.200,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	undefined undefined	8.430.800,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.430.800,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarak atan	8.430.800,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	0,00	KECAMATAN MPUNDA	Tidak selar	Tidak selar	Tidak selara
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	6.060.000,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	undefined undefined	128.016.300,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	"Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat"	undefined undefined	100.698.300,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									selaras		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	100.698.300,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarak atan	100.698.300,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
217	7	01	04	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	undefined undefined	21.612.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	undefined undefined	24.192.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined	23.160.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined	24.192.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	21.612.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	24.192.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
218	7	01	05	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	undefined undefined	9.030.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat Kecamatan	undefined undefined	9.030.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	undefined undefined	12.900.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	undefined undefined	9.030.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	9.030.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	110 Orang	9.030.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Penatoi			17.104.240.684,00	Kelurahan Penatoi			442.396.000,00				
	7			.	.	UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			442.396.000,00				
	7	01		.	.	KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			442.396.000,00				
219	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	442.396.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penatoi	undefined undefined	442.396.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	21.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	420.196.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	442.396.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Lewirato			17.104.240.684,00	Kelurahan Lewirato			362.245.900,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			362.245.900,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			362.245.900,00				
220	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	362.245.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lewirato	undefined undefined	362.245.900,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	28.050.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	332.995.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	334.195.900,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Sadia			17.104.240.684,00	Kelurahan Sadia			400.859.900,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			400.859.900,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			400.859.900,00				
221	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	400.859.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadia	undefined undefined	400.859.900,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	393.659.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	400.859.900,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Mande			17.104.240.684,00	Kelurahan Mande			430.321.600,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			430.321.600,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			430.321.600,00				
222	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	430.321.600,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mande	undefined undefined	430.321.600,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	429.121.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	430.321.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Panggi			17.104.240.684,00	Kelurahan Panggi			373.864.700,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			373.864.700,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			373.864.700,00				
223	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	373.864.700,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Panggi	undefined undefined	373.864.700,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	41.250.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	331.414.700,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.864.700,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Sambinae			17.104.240.684,00	Kelurahan Sambinae			372.491.000,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			372.491.000,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			372.491.000,00				
224	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	372.491.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambinae	undefined undefined	372.491.000,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	60.800.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	60.800.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	310.491.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	311.691.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Manggemaci			17.104.240.684,00	Kelurahan Manggemaci			397.632.500,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			397.632.500,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			397.632.500,00				
225	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	397.632.500,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggemaci	undefined undefined	397.632.500,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	396.432.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	397.632.500,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Monggonao			17.104.240.684,00	Kelurahan Monggonao			432.604.900,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			432.604.900,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			432.604.900,00				
226	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	432.604.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Monggonao	undefined undefined	432.604.900,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	57.943.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	40.680.000,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	373.461.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	391.924.900,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Santi			17.104.240.684,00	Kelurahan Santi			377.006.600,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			377.006.600,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			377.006.600,00				
227	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	377.006.600,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Santi	undefined undefined	377.006.600,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.120.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	339.686.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	377.006.600,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Matakando			17.104.240.684,00	Kelurahan Matakando			431.221.100,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			17.104.240.684,00	UNSUR KEWILAYAHAN			431.221.100,00				
	7	01				KECAMATAN			17.104.240.684,00	KECAMATAN			431.221.100,00				
228	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	4.117.833.300,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	undefined undefined	431.221.100,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	undefined undefined	4.423.049.200,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Matakando	undefined undefined	431.221.100,00	KECAMATAN MPUNDA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	36.911.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0,00	KECAMATAN MPUNDA		tidak selaras	tidak selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	393.110.100,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	431.221.100,00	KECAMATAN MPUNDA		selaras	selaras
						Kecamatan Raba			19.741.171.857,00	Kecamatan Raba			15.244.388.582,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			15.244.388.582,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			15.244.388.582,00				
229	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	12 Dokumen	14.709.884.582,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran	12 Dokumen	14.989.483.682,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	13.678.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	9.833.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.528.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.528.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.780.000,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.780.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.243.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.243.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.082.000,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.082.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	725.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.475.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.475.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.675.235.432,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	14.016.210.182,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.461.735.182,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	13.457.235.182,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	523.281.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	556.619.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.400.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	956.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	956.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	237.313.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	148.155.500,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.857.100,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.857.100,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.823.300,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	60.822.400,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	56.476.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	76.476.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	998.466.940,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	705.079.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	70.450.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	120.050.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	92.187.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	316.342.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492.842.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	110.206.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									selaras		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	63.900.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	68.562.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.644.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.644.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
230	7	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	14.709.884.582,00						selaras	selaras	selaras
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	90.390.000,00					KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00								
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00								

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
231	7	01	02	-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	100 PERSEN	13.544.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik	100 PERSEN	28.544.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	24.426.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	28.544.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	13.544.000,00		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	28.544.900,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
232	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 PERSEN	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100 PERSEN	166.967.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11 Pokmas / Ormas	29.091.400,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	20.607.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarak atan	20.607.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	13.484.400,00		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	8.484.400,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 PERSEN	135.394.100,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Porsentase Terlaksannya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 PERSEN	137.875.600,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	127.875.600,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarak atan	137.875.600,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
233	7	01	04	-	-	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	92.393.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	59.393.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	75.450.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penurunan Jumlah kasus Ganggunan Kemananan Ketertiban dan Ketentraman	11 Laporan	59.393.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	92.393.000,00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	59.393.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Rabadompu Barat			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabadompu Barat			465.379.500,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			465.379.500,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			465.379.500,00				
234	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	465.379.500,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	465.379.500,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	465.379.500,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	465.379.500,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Rabadompu Timur			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabadompu Timur			471.715.000,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			471.715.000,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			471.715.000,00				
235	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	471.715.000,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	471.715.000,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	471.715.000,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	471.715.000,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Rabangodu Utara			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabangodu Utara			506.659.200,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			506.659.200,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			506.659.200,00				
236	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	506.659.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	506.659.200,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	499.459.200,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	506.659.200,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Rabangodu Selatan			19.741.171.857,00	Kelurahan Rabangodu Selatan			441.989.525,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			441.989.525,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			441.989.525,00				
237	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	441.989.525,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	441.989.525,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	440.789.525,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	441.989.525,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Rontu			19.741.171.857,00	Kelurahan Rontu			402.559.800,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			402.559.800,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			402.559.800,00				
238	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	402.559.800,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	402.559.800,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	401.359.800,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	402.559.800,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Penaraga			19.741.171.857,00	Kelurahan Penaraga			440.707.300,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			440.707.300,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			440.707.300,00				
239	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	440.707.300,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	440.707.300,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	439.507.300,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	440.707.300,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Penanae			19.741.171.857,00	Kelurahan Penanae			445.657.600,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			445.657.600,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			445.657.600,00				
240	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	445.657.600,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	445.657.600,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	444.457.600,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	445.657.600,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Ntobo			19.741.171.857,00	Kelurahan Ntobo			525.718.900,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			525.718.900,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			525.718.900,00				
241	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	525.718.900,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	525.718.900,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	524.518.900,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	525.718.900,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Kendo			19.741.171.857,00	Kelurahan Kendo			363.582.850,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			363.582.850,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			363.582.850,00				
242	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	363.582.850,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	363.582.850,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	362.382.850,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	363.582.850,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Nitu			19.741.171.857,00	Kelurahan Nitu			346.213.400,00				

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			346.213.400,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			346.213.400,00				
243	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	346.213.400,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	346.213.400,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	345.013.400,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	346.213.400,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Kelurahan Rite			19.741.171.857,00	Kelurahan Rite			370.000.200,00				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			19.741.171.857,00	UNSUR KEWILAYAHAN			370.000.200,00				
	7	01				KECAMATAN			19.741.171.857,00	KECAMATAN			370.000.200,00				
244	7	01	03	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	4.925.350.275,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	370.000.200,00		selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	5.462.464.150,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	370.000.200,00	KECAMATAN RABA	selaras	selaras	selaras
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									selaras		
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	368.800.200,00		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	370.000.200,00	KECAMATAN RABA		selaras	selaras
				,	,	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			8.968.056.919,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			9.179.455.576,00				
	8			.	.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			8.968.056.919,00	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			9.179.455.576,00				
	8	01		.	.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			8.968.056.919,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9.179.455.576,00				
245	8	01	01	-	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	4.111.871.197,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan Daerah Kab/Kota	100 Persen	4.202.804.854,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	75.889.900,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	54.015.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	26.393.700,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	22.983.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.834.800,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.833.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.823.100,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.824.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.224.700,00		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.224.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.491.600,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3.491.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									selaras		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	9.658.000,00		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.658.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.572.655.330,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	3.535.639.145,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									selaras		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.326.050.086,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	3.317.810.745,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									selaras		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	206.240.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 Dokumen	206.240.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.820.400,00		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.820.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.161.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.384.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									selaras		
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.160.100,00		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.384.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	29.360.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak selara	Tidak selara	Tidak selara
	8	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									selaras		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	271.680.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen	237.625.499,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.714.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	1.714.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									selaras		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	41.360.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	80.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									selaras		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	18.997.400,00		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	19.093.499,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									selaras		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	4.597.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	13.417.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									selaras		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	86.225.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	123.261.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	141.573.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	133.308.299,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	30.414.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45 Laporan	31.534.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	13.780.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.624.299,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									selaras		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	75.150.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	75.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	227.444.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	242.216.311,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas									selaras		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	67.346.311,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	72.476.311,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									selaras		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	19.500.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	19.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									selaras		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	151.930.000,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.240.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	8	01	02	-	-	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	88 %	460.752.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter Bangsa	88 %	479.967.000,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	7 dari 8 Klp	652.597.800,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kelompok sasaran yang mendapatkan Penguatan ideologi pancasila dan Karakter kebangsaan	7 dari 8 Klp	479.967.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	14.975.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	345 Orang	25.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	22.035.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	32.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka									selaras		
							Jumlah Paskibraka	73 Orang	402.762.000,00		Jumlah Paskibraka	73 Orang	419.282.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0,00		Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	0,00		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Dokumen	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									selaras		
							Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	20.980.000,00		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	70 Orang	2.345.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
247	8	01	03	-	-	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80 %	1.423.955.560,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	80 %	1.418.155.560,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wanita dan Masy	1.345.684.800,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Elemen Masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	4 dari 5 Elemen (Pemilih Pemula,Wa nita dan Masy	1.418.155.560,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.368.999.160,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	1.337.749.160,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	54.956.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	101450 Orang	80.406.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
248	8	01	04	-	-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91 %	1.307.062.725,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Kelompok Sasaran Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	91 %	1.350.212.725,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136 dari 149 Klp	1.387.005.325,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	136 dari 149 Klp	1.350.212.725,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.307.062.725,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	1.350.212.725,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
249	8	01	05	-	-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	69 69 % %	77.456.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kelompok Sasaran Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	69 % 69 %	89.056.000,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 dari 43 Klp	177.652.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kelompok Sasaran yang mendapatkan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	30 dari 43 Klp	89.056.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	36.963.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	36.963.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	40.493.000,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	52.093.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
250	8	01	06	-	-	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	78 %	1.586.959.437,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang tertangani	78 %	1.639.259.437,00		selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	35 dari 45 Konflik	1.339.378.975,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial yang ditangani	35 dari 45 Konflik	1.639.259.437,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	selaras	selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing									selaras		

No	Kode					PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025				RKA-P				Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Selaras/Tidak selaras		
						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dan Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Nama program/ kegiatan/sub kegiatan	Indikator program/ kegiatan/sub kegiatan	Target program/ kegiatan/sub kegiatan
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	322.203.337,00		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3652 Orang	322.203.337,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja									selaras		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	72.247.400,00		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	163 Orang	92.247.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang									selaras		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	12.627.700,00		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	18 Laporan	90.927.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									selaras		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.179.881.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	1.133.881.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		selaras	selaras
								J U M L A H	**1.086.125.432.816,00**				**1.093.534.839.883,00**			

Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Kantor**	**100%**	**91.20%**	**91.20%**
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlaksananya kegiatan Perencanaan dan evaluasi kinerja selama satu tahun**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok.	100,00	100,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok	100,00	100,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	100,00	100,00
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1 Dok	100,00	100,00
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	1 Dok	100,00	100,00
	6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dikerjakan	3 Lap	100,00	100,00
	II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Tersedianyan Administrasi Keuangan**	**100.00**	**88,96**	**88,96**
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	41 OB	88,67	88,67
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bahan yang diverifikasi	12 Dok	99,32	99,32
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dikerjakan	1 Dok	100,00	100,00
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang dikerjakan	2 Lap	100,00	100,00
	III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**99,77**	**99,77**
	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0,00	0,00
	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Kegiatan Pelatihan	32 Org	99,77	99,77
	IV Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tersedianya Administrasi Umum**	**100%**	**99,37**	**99,37**
	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Pkt	0,00	0,00
	2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan	1 Pkt	99,85	99,85
	3 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Persedia Tamu	15 Lap	75,00	75,00
	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi/Konsultasi Keluar Daerah	1 Lap	48,09	48,09
	V Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**77,46**	**77,46**
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	1 Lap	97,34	97,34
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon, TV Satelit (Indovision dan Parabola)	1 Lap	83,78	83,78
	VI Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**98,64**	**98,64**

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unt	98,47	98,47
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15 Unt	98,78	98,78
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yg kerjakan	1 Unt	82,10	82,10
2	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Cakupan ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**49,94%**	**49,94%**
	I	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah**	**Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100.00**	**88.29**	**88.29**
	1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Satpol PP yang melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban serta Linmas	1 Dok	100,00	100,00
	2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satpol PP yang melaksanakan Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Anggota Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan	30 Kasus	92.51	92.51
	3	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Anggota Satpol PP yang melaksanakan Operasi Pengendalian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Gelar Pasukan dan Peningkatan Batas Wilayah	30 Kasus	84.37	84.37
	II	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**100.00**	**28,52**	**28,52**
	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan sosialisasi	1 Lap	17,66	17,66
	2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Anggota Satpol PP yang melaksanakan Penanganan atas Pelanggaran Perda	1 Lap	33,05	33,05

Kota Bima, 10 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima,

ERWIN RAHADI, S.Sos
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19730422 199303 1 001

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu penerapan system yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja OPD.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja diwaktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kota Bima, Januari 2026
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima
Kota Bima,

Arif Roesman Effendy, S.T.M.Sc.,M.T.
NIP. 197108152005011011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.2.1 Susunan Organisasi 3
1.2.2 Struktur Organisasi 3
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 4
1.4 Gambaran Umum Pelayanan 10
1.4.1 Kinerja Pelayanan SKPD 10
1.4.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .. 12
1.4.2.1 Tantangan 12
1.4.2.2 Peluang 13
1.5 Landasan hukum 14
1.6 Sistematika 14
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
2.1 Rencana strategis 15
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 21
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 22
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Cpaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 23
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 23
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 24
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 24
3.1.6 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 26
3.2 Realisasi Anggaran 27
BAB IV PENUTUP 31

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pegawai BRIDA Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2025	2
1.2	Jumlah Pegawai BRIDA Berdasarkan Golongan Ruang Per 31 Desember 2023	2
1.3	Jumlah Pegawai BRIDA Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2023	3
1.4	Jumlah Pegawai BRIDA Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2023	3
2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029	16
2.2	Penjelasan Indikator Kinerja Utama BRIDA Kota Bima	17
2.3	Perjanjian Kinerja BRIDA Kota Bima	18
2.4	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran BRIDA Kota Bima	19
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
3.2	Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja	22
3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	23
3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	23
3.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	25
3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	26
3.7	Pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025	27

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi 4
3.1 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja 20
3.2 Tahapan Pengukuran Kinerja 21

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima sampai akhir tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang pegawai ASN dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Brida Berdasrkan Jabatan Struktural
Per 31 Desember 2025

No	Pangkat	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	1
4	Non Eselon/ Fungsional	2
5	Pelaksana	14
	Total	21

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Brida Berdasarkan Golongan Ruang
Per 31 Desember 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tk.I / IVb	1
2	Pembina / IVa	4
3	Penata Muda Tk.I /IIId	9
4	Penata / IIIc	2
5	Penata Muda Tk.I / IIIb	3
6	Penata Muda / IIIa	2
	Total	21

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Brida Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Jumlah	
1.	SD	-	Orang
2.	SLTP	-	Orang
3.	SLTA	1	Orang
4.	D3	-	Orang
5.	D4	-	Orang
6.	S1	12	Orang
7.	S2	7	Orang
8.	S3	1	Orang
	Total	21	Orang

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Brida Berdasarkan Gender

Per 31 Desember 2025

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
1.	Pria	16	Orang
2.	Wanita	5	Orang
	Total	21	Orang

1.2.1. Susunan Organisasi

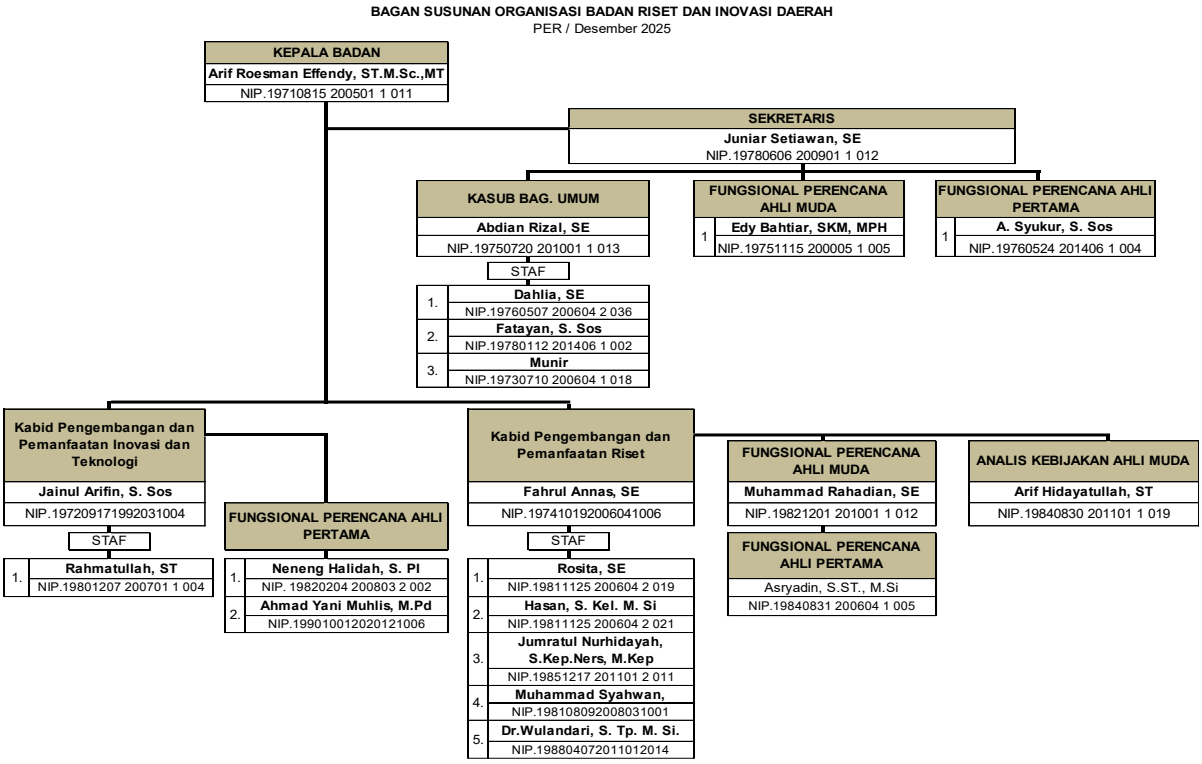
Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian JF-Perencana.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
   a. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:
      (i) Staf
   b. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset, terdiri dari:
      (i) Staf.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
(Berdasarkan Perwali 51 Tahun 2022)



1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima berdasarkan Perwali 51 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi Daerah.

2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila;

c. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembang€rn, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai pancasila;
d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dari inovasi di Daerah;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
f. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dari inovasi di Daerah;
g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
i. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
j. pengoordinasian dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan riset, inovasi dan teknologi tepat guna di Daerah;
k. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada seluruh unsur perangkat Daerah dalam rangka pengembangan inovasi;
l. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta pengelolaan prasarara dan sarana perangkat Daerah; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut:

B. Sekretariat

1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata. usaha,

perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan.

2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
   a. penyusunan program sekretariat;
   b. koordinasi penyusunan program Badan;
   c. koordinasi dan fasilitasi pemmusan kebijakan teknis kesekretariatan;
   d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
   e. penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta elisiensi dan tatalaksana Badan;
   f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
   g. penyelenggaran administrasi barang milik Daerah pada Badan;
   h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sekretariat;
   i. penyelenggaran monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Badan;
   j. pengoordinasian pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi Badan;
   k. evaluasi dan penyusunan laporan Badan;
   l. pembinaan aparatur;
   m. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
   n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
   o. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Badan;
   p. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
   q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
   r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat, membawahi dan mengoordinasikan:
   a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

- ✓ melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dans
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas:

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset

(1) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pelayanan, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan kebijalan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

c. penyiapan bahan pelaksarlaan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

g. fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;

h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil riset;

i. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pelalsanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan;

j. flasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan

k.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

l. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jembatan Fungsional.

m. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Riset membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jembatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi.

D. Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi

(1) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual melalui koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan inovasi dan teknologi tepat guna;f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologi tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil pengembangan dan pemanfaatan invensi, inovasi dan teknologt tepat guna serta pengelolaan kekayaan intelektual;

h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama dan kerjasama antar Daerah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jembatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi.

1.4. Gambaran Umum Pelayanan

1.4.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta inovasi daerah guna mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan hasil riset. Dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima berperan sebagai koordinator kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Bima, sekaligus sebagai fasilitator dalam mendorong lahirnya inovasi daerah yang aplikatif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah.

Perwujudan pembangunan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia tersebut terlihat melalui: (i) Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan; dan (ii) Pengembangan dan Pembinaan Inovasi Daerah. Secara umum, kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi. Melalui penguatan sinergi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan hasil kajian, diharapkan peran strategis lembaga ini semakin signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing.

Kinerja pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan difokuskan pada: penyusunan kajian strategis sebagai bahan rekomendasi kebijakan daerah, pelaksanaan penelitian sektoral sesuai kebutuhan perangkat daerah, penyediaan data dan informasi hasil riset yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta fasilitasi kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi terkait.

Dalam rangka meningkatkan budaya inovasi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima melaksanakan: inventarisasi dan dokumentasi inovasi daerah, pembinaan dan pendampingan perangkat daerah dalam penyusunan proposal inovasi, penyelenggaraan lomba inovasi dan forum berbagi praktik baik, dan fasilitasi pelaporan inovasi daerah ke tingkat provinsi maupun nasional. Upaya ini bertujuan untuk mendorong terciptanya solusi kreatif terhadap permasalahan pelayanan publik serta meningkatkan indeks inovasi daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja pelayanan di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Kendala tersebut meliputi aspek kelembagaan, sumber daya, anggaran, koordinasi, serta pemanfaatan hasil riset.

Secara umum, kendala pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima bersifat struktural dan teknis. Namun demikian, melalui penguatan kapasitas SDM, peningkatan dukungan anggaran, optimalisasi koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan sistem pemanfaatan hasil kajian, diharapkan hambatan tersebut dapat diminimalkan sehingga kinerja pelayanan di bidang riset dan inovasi semakin efektif dan berdampak bagi pembangunan daerah.

1.4.2.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1.4.2.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM yang memiliki latar belakang penelitian dan inovasi. Hal ini berdampak pada terbatasnya cakupan dan kedalaman kajian yang dapat dilaksanakan setiap tahun. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Jumlah tenaga fungsional peneliti dan perekayasa yang masih terbatas.
2. Kompetensi teknis penelitian dan penyusunan kajian yang belum merata.
3. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan.

b. Tantangan Keterbatasan Anggaran.

Dukungan anggaran untuk kegiatan penelitian dan inovasi masih relatif terbatas dibandingkan dengan kebutuhan riil. Kondisi ini menyebabkan beberapa program pengembangan inovasi belum dapat berjalan secara optimal. Dampaknya antara lain:

1. Terbatasnya jumlah penelitian strategis yang dapat dibiayai.
2. Minimnya dukungan untuk pengembangan inovasi hingga tahap implementasi.
3. Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung riset.

c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil Kajian.

Meskipun telah dihasilkan berbagai rekomendasi kebijakan, pemanfaatan hasil kajian dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya integrasi antara hasil penelitian dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.

2. Perubahan prioritas kebijakan yang bersifat dinamis.
3. Terbatasnya mekanisme monitoring terhadap implementasi rekomendasi hasil riset.
1. Keterbatasan sistem informasi terpadu terkait data penelitian dan inovasi.

d. Tantangan pembangunan Sekretariat Dinas.
1. Peningkatan kebutuhan pembangunan indeks inovasi daerah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan kebijakan berbasis riset dan inovasi daerah antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

1.4.2.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

a. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
b. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
c. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
d. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
e. Peningkatan komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan terpadu akan pelaksanaan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (suistainable development)

f. Tuntutan masyarakat akan reformasi dalam pelayanan kecepatan dan ketepatan pelayanan mendapatkan informasi (pelayanan prima).

1.5. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang LjKIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan struktur Fungsi Organisasi, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis dan Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Penjaelasan IKU, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Kota Bima Tahun 2025 – 2029 isu strategis Kota Bima ada 6, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan bermartabat. Berdasarkan tujuan diatas diperoleh indikator sasaran strategis dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya ekositem riset di Kota Bima dengan indikator Persentase hasil riset yang dimanfaatkan;
2. Meningkatnya ekosistem inovasi di Kota Bima dengan indikator Persentase inovasi yang dikembangkan.

Beranjak dari tujuan tersebut maka dirumuskan/ditetapkan Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025-2026, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi Pelayanan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya merealisasikan Tujuan dan Sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Bima, telah melakukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program/kegiatan riset dan inovasi daerah, dengan 2 sasaran utama yaitu; (1) Meningkatnya jumlah inovasi daerah yang mendapat penghargaan tingkat provinsi atau nasional, (2) Meningkatnya jumlah riset dan inovasi yang memberi kontribusi pada peningkatan kinerja.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis
Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui inovasi Pelayanan	Meningkatnya ekositem riset di Kota Bima	Indeks Inovasi Daerah	Kota Sangat Inovatif	Kota Sangat Inovatif	Kota Sangat Inovatif	Kota Sangat Inovatif	Kota Sangat Inovatif
		Meningkatnya ekosistem inovasi di Kota Bima	Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan	3	3	3	3	3
			Jumlah pemanfaatan inovasi	71	71	100	100	100

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi rumusan/perhitungan	Sumber data
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik melalui Inovasi Pelayanan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Ukuran capaian inovasi secara keseluruhan yang dilaporkan melalui penilaian mandiri dan divalidasi oleh pemerintah pusat	$IID = \sum_{i=1}^{n} (SkorParameter_i \times Bobot_i)$	
		Jumlah hasil riset yang dimanfaatkan	Angka	Kuantitas dari produk riset, kajian, atau penelitian yang dilakukan/difasilitasi oleh BRIDA yang secara nyata diadopsi menjadi dasar kebijakan, perbaikan layanan publik, atau pengembangan ekonomi di daerah	$\text{Total Riset Terpakai} = \sum \text{Hasil riset yang terimplementasi dalam 1 tahun}$	
		Jumlah pemanfaatan inovasi	Angka	Frekuensi atau jumlah aplikasi, sistem informasi, atau metode baru hasil inovasi yang digunakan secara operasional oleh unit kerja atau masyarakat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik	$\text{Total Inovasi Operasional} = \sum \text{Inovasi yang aktif digunakan dalam operasiona}$	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima pada awal tahun 2025 terdiri dari 2 (Dua) sasaran strategis dan 2 (Dua) indikator kinerja utama untuk Urusan Riset dan Inovasi Daerah dan 1 indikator Kinerja Utama pada urusan Penunjang. Anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini dilakukan melalui 2 (Dua) program dengan total anggaran sebesar Rp. 3.752.277.378, -

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ekosistem Riset di Kota Bima	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	25%
2.	Meningkatnya ekosistem inovasi di Kota Bima	Persentase inovasi yang dikembangkan	25%

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.951.159.978,00
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	801.117.400,00
	TOTAL	**3.752.277.378,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

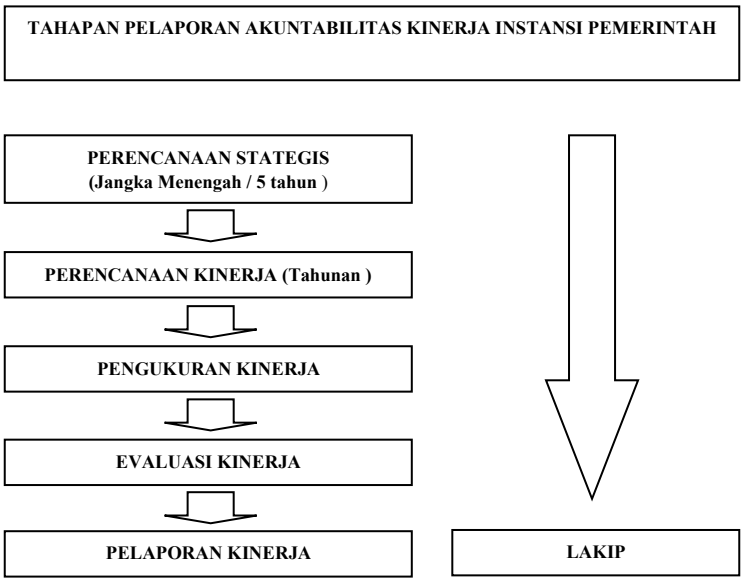
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntablitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan organisasi.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2025 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2026. Rangkaian proses perencanaan strategis tahun 2025-2026, perencanaan kinerja tahun 2025, serta keseluruhan proses pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu sistem akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3.1

Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja



Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan tujuan dan sasaran serta

rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2026, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

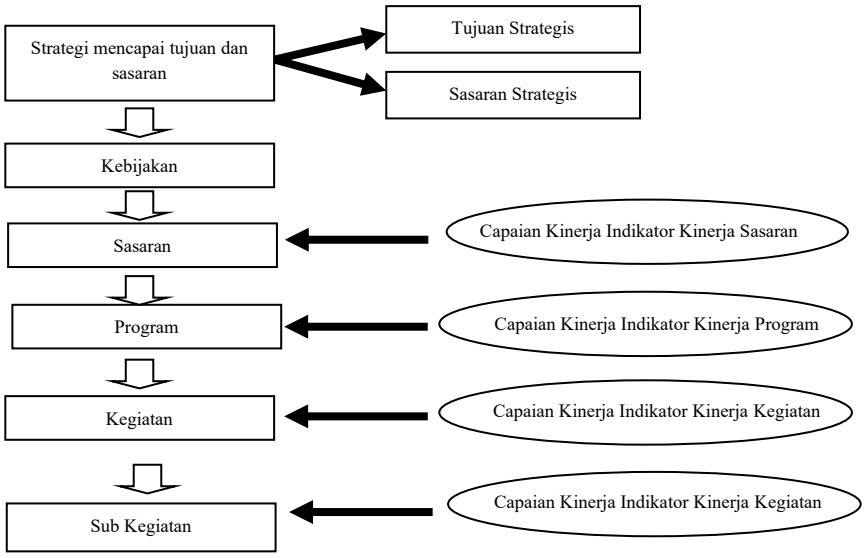
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2025 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2025 sebagai ikhtisar rencana kinerja tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2026. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Gambar 3.2

Tahapan Pengukuran Kinerja



Di dalam pengukuran indikator kinerja dilakukan pemilahan atas produk yang sifatnya fisik lapangan dan terhadap produk non teknis yang berupa piranti lunak yang sifatnya pengaturan/pembinaan/perencanaan/ pengawasan. Adapun Tolak ukur pengukuran kinerja disepakati didasarkan pada indikator output dan outcome.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 < 100	Sangat Baik	
2.	76 < 90	Tinggi	
3.	66 < 75	Sedang	
4.	51 < 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Sumber Data : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

3.1.1.Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya ekosistem Riset di Kota Bima	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan (%)	25	25	100	Sangat Tinggi	Data Policy brief 2025
2.	Meningkatnya ekosistem inovasi di Kota Bima	Persentase inovasi yang dikembangkan (%)	25	27,73	110,92	Sangat Tinggi	Dokumen lomba inovasi daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Persentase pelaksanaan program riset dan inovasi daerah;

1. Target 25% hasikl riset yang dimanfaatkan berasal dari data bahwa tahun ini ada 4 studi yang dilaksanakan jumlah tersebut dikonversi menjadi angka porsen 4/10*100=25%. Realisasi tahun 2025 ada 4 studi dan 4 studi tersebut dibuat policy briefnya dan juga dipublikasi pada jurnal sehingga realisasi sama dengan target
2. Inovasi yang dikembangkan mencapai 27,73 berasal dari angka 66 finalis lomba inovasi daerah dan sdh memiliki HAKI dari total 238 inovasi yang terdaftar pada tahun 2025.

3.1.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (N)		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi				73,02	96,16	131,69
2	Meningkatnya Prestasi masyarakat Kota Bima	Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Nasional dan Regional				45	73	162,22

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Renstra
1.	Meningkatnya ekositem riset di Kota Bima	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	25%	25%	100%

2.	Meningkatnya ekosistem inovasi di Kota Bima	Persentase inovasi yang dikembangkan	25%	15%	110,92%

Secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 – 2029.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah di lakukan.

Dari tampilan indikator Kinerja diatas, ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu:

1) Adanya komitmen dari semua pihak pengambil kebijakan agar memprioritaskan kegiatan – kegiatan untuk mencapai target indikator – indikator capaian kinerja.
2) Ada tidaknya kegiatan survey dan pandataan terhadap indikator – indikator capaian kinerja.
3) Pelaksanaan pekerjaan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
4) Ada tidaknya peralatan atau sumber daya penunjang program riset dan inovasi daerah.
5) Adanya sosialisasi kepada masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan.
6) Adanya koordinasi dengan instansi - instansi yang terkait dalam pembangunan.
7) Kurangnnya anggaran dalam mencapai target terhadap indikator – indikator capaian kinerja.

Untuk menyiasati permasalahan tersebut, beberapa alternatif Solusi yang dilakukan sebagai berikut :

1) Melakukan survey oleh pihak yang berkompeten terhadap indikator – indikator capaian kinerja.
2) Komitmen dari semua pihak pengambil kebijakan agar memprioritaskan anggaran untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya indikator – indikator capaian kinerja.
3) Sosialisasi dan koordinasi dengan Stakeholders sebelum dan sesudah pelaksanaan pembangunan.
4) Mengoptimalkan peralatan penunjang yang ada dan mengusulkan penambahan peralatan penunjang.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Kriteria untuk menentukan efisiensi penggunaan sumber daya mengacu pada formula berikut :

1. Sangat efisien apabila capaian kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran lebih dari 10 %.
2. Efisien apabila capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran sama atau lebih besar sampai dengan 10%.
3. Kurang Efisien apabila capaian kinerja lebih kecil kurang dari 10% dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran.
4. Sangat Kurang efisien apabila capaian kinerja lebih kecil lebih dari 10% dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran.

Capaian kinerja indikator - indikator strategis atau Indikator Kinerja Utama pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas	73.02	96.16	131,69	2.951.159.978	2.734.807.347	93	
2	Meningkatnya ekositem riset di Kota Bima	25	25	100	386.587.400	247.406.519	64	
3	Meningkatnya ekosistem inovasi di Kota Bima	25	27,73	110,92	414.530.000	352.881.920	85	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari dua Indikator Kinerja Utama berdasarkan tingkat efisiensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat satu Indikator Kinerja Utama yang efisien yaitu Persentase peningkatan ekosistem inovasi di Kota Bima mencapai 85%.
2. Terdapat Satu Indikator Kinerja Utama yang kategori sedang, satu Indikator Kinerja Utama yang efisien yaitu Persentase ekosistem riset di Kota Bima mencapai 64 %. Hal ini disebabkan oleh riset belum termanfaatkan dalam pengambilan kebijakan di Kota Bima

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan target sasaran dan indikator kinerja di atas telah dijabarkan dalam capaian program/kegiatan seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6. Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Program	Penunjang Keberhasilan	Penunjang Kegagalan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Komitmen untuk memberikan data dengan akurat dan cepat baik dari sekretariat maupun dari bidang – bidang.	1) Masih kurangnya personil yang mampu merekap dan menganalisis data baik bidang maupun sekretariat serta kesibukan dari personil 2) Barang milik daerah belum rekap secara optimal baik dari segi kuantitas maupun kondisinya.
2	Program Riset dan Inovasi Daerah	1) Adanya dukungan kebijakan, regulasi, dan penganggaran dari kepala daerah dan DPRD menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan program riset dan inovasi. 2) Kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas, dan media memperkuat ekosistem inovasi daerah. 3) Adanya dorongan untuk berpikir kreatif, terbuka terhadap perubahan, serta penghargaan terhadap inovasi meningkatkan partisipasi ASN dan masyarakat.	1) Minimnya pendanaan dapat menghambat pelaksanaan riset secara optimal dan mengurangi kualitas hasil penelitian. 2) Terbatasnya jumlah peneliti atau tenaga analis yang kompeten dapat menyebabkan hasil riset kurang mendalam dan tidak aplikatif. 3) Rendahnya pemanfaatan hasil riset yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam kebijakan publik, maka dampaknya menjadi tidak signifikan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alternatif Solusi yang telah dilakukan adalah:

1. Memberikan kesempatan personal untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan kemampuan untuk menjalankan tugas pada OPD.
2. Melakukan pemuktahiran data baik pada bidang – bidang serta melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, serta implementasi kegiatan .

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dilihat pada teabel berikut ini.

Tabel. 3.7. Pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan/subkegiatan	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**2.951.159.978**	**2.734.807.347**		**93**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.347.000**	**12.347.000**	**BB**	**100**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.608.600	1.608.600	3 Dok	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	970.000	970.000	1 Dok	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.464.400	2.464.400	1 Dok	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.006.000	2.006.000	1 Dok	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.017.000	2.017.000	1 Dok	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.698.000	2.698.000	4 Lap	**100**
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.000	583.000	4 Lap	**100**
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.376.282.058**	**2.270.394.203**	100	**96**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.206.936.058	2.105.448.203	18 orang/bulan	**95**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	152.624.000	150.224.000	12	**98**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.402.000	5.402.000	1 Lap	**73**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.928.000	8.928.000	13 Lap	**100**

No	Nama Program/Kegiatan/subkegiatan	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	392.000	392.000	1 Dok	**100**
3	**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**13.446.800**	**12.446.800**	**100**	**93**
	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daearah SKPD	1.196.800	1.196.800	1 pkt	**100**
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.500.000	4.500.000	1 pkt	**100**
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4.320.000	4.320.000	1 pkt	**100**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.430.000	2.430.000	1 pkt	**71**
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**303.631.720**	**287.168.558**	**100**	**95**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.747.240	6.747.240	1 paket	**100**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.833.300	27.993.300	1 paket	**91**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1 paket	**-**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.559.980	33.759.980	1 paket	**88**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.147.200	25.145.700	1 paket	**100**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.497.000	21.252.000	4 Dok	**99**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.847.000	172.270.338	12 Lap	**95**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**-**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				**-**
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.728.900**	**62.077.300**	**100**	**51**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.836.000	23.726.000	12 Lap	**64**

No	Nama Program/Kegiatan/subkegiatan	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.474.000	12.107.400	12 Lap	**97**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Lap	**-**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.418.900	26.243.900	1 Lap	**36**
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**122.723.500**	**90.373.486**		**74**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.173.500	33.182.222	1 Unit	**58**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.480.000	15.928.000	1 Unit	**97**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.070.000	41.263.264	1 Unit	**84**
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	**801.117.400**	**600.288.439**		**75**
7	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**	**386.587.400**	**247.406.519**		**64**
	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	20.566.000	14.450.000	2 lap	**70**
	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	33.632.000	21.870.000	1 dok	**65**
	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	164.322.000	118.411.700	12 lap	**72**
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	56.051.400	7.510.000	1 lap	**13**
	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	89.116.000	62.940.000	1 keg	**71**
	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	22.900.000	22.224.819	1 dok	**97**
8	**Invensi dan Inovasi**	**414.530.000**	**352.881.920**	50	**85**

No	Nama Program/Kegiatan/subkegiatan	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	0.0	**0.0**	1 lap	-
	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	201.820.000	197.086.000	2 lap	**98**
	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	61.097.000	57.629.920	4 lap	**94**
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	31.233.000	18.741.000	2 lap	**60**
	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	44.710.000	41.710.000	3 lap	**93**
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	75.670.000	**37.715.000**	1 lap	**50**
	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah			3 lap	-
	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi			2 lap	-
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi			2 lap	-
	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi			2 lap	-
		3.752.277.378	3.335.095.786	jumlah	89

Hingga akhir tahun 2025 program/kegiatan yang dilaksanakan, secara Kinerja telah terealisasi 85% dengan realisasi anggaran 93% dari pagu yang tersedia, sehingga dapat disimpulkan capaian sasaran tersebut Kurang Efisien, walaupun kurang efisien diharapkan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal.

BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah SKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima disusun berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggran (DPA) tahun anggaran 2025, serta penetapan kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan Good Governance.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun Pertama dari Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima Tahun 2025-2026. Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu untuk target – target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasaran.
2. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD dirumuskan saran-saran sebagai berikut:
   a. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM tentang System Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), serta kemampuan teknis dalam mengumpulkan data serta Menyusun dokumen – dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
   b. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang

membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Kota Bima, 05 Januari 2026
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Arif Roesman Effendy, S.T.M.Sc.,M.T
NIP. 197108152005011011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2025





DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan perkenan-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Laporan ini juga mencerminkan upaya pencapaian kinerja yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Bima.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, LAKIP ini disusun sebagai instrumen penilaian kinerja guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik (good governance). Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus umpan balik dalam rangka perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025–2029, yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dalam penyusunannya, LAKIP ini telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, disadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Raba-Bima, 2026
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

SYAHRIAL, SH.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670311 199303 2 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Serta Aspek Strategis Organisasi

C. Struktur Organisasi 5

D. Isu – isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi 10

E. Sistematika Penyampaian 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 12

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 12

B. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 13

C. Rencana Kinerja Tahunan 14

D. Penetapan Kinerja Tahun 2025 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

A. Tujuan dan Sasaran DUKCAPIL Kota Bima 17

B. Capaian Kinerja Organisasi 18

C. Akuntabilitas Keuangan 45

BAB IV PENUTUP 51

A. Kesimpulan Umum 51

B. Rekomendasi Langkah Perbaikan 52

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik, serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengemban amanat tersebut di atas,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai salahsatu unit kerja yang diberi amanat sebagai pelayan masyarakat (Public Service) dalam hal pelayanan administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil. Disisi lain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima senantiasa dituntut untuk siap dengan langkah-langkah pembenahan diri serta arah kebijakan secara institusional yang berorientasi ke depan, guna menjawab dan mengakomodir tuntutan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga-lembaga pengawasan, penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan.Selanjutnya disusun dan sajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2023, yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima bagi Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SERTA ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. "Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dan melaksanakan tugas pokok dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi kependudukan" Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kependudukan.

2. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas yang berada di bawah danb ertanggungjawab kepada Walikota Bima melalui Sekretaris Daerah Kota Bima.Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan umum;
b. Pembinaan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
c. Pencatatan, Pendaftaran Pendudukan dalam wilayah Kota Bima;
d. Pencatatan penerbitan kutip akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,dan pengaku anak;
e. Penyimpanan dan pemeliharaan kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengaku anak;
f. Pelaksanaan tata usaha dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas. bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

- **Sekretariat**

a) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;

b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- Penyusunan program kerja Dinas,
- Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi seluruh unit kerja di lingkup Dinas,
- Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan,
- Penyiapan dan koordinasi rencana anggaran dan belanja Dinas,
- Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah,
- Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan seluruh bidang di lingkup Dinas,
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidangtugasnya;

c) Pada Sekretariat terdapat 2 (dua) Sub Bagian yaitu:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin,merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi Dinas;
- Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala sub.bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporanserta perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Dinas.

d) Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota tentang organisasi Perangkat Daerah,dimana salah satu organisasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, memiliki potensi, diantaranya :

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kota Bima yang lebih baik, tertib, mudah, cepat, akurat dan transparan dengan Pelayanan ON LINE;
- Meningkatkan Budaya tertib administrasi kependudukan;
- Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsur wilayah dalam rangka mengawasi dan

mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahannya

- Meningkatkan Sistem jaringan informasi kependudukan yang terpadu;

  Namun semua yang terurai di atas tidak semata-mata dapat mudah terwujud,banyak kendala yang di hadapi dalam proses penerapannya,sehingga dalam mewujudkan pertanggungjawaban kinerja yang baik, tidak hanya dari kesadaran Aparatur Negara dan sumberdaya manusia yang bagus,tetapi harus di dukung pula dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu catatan dokumen atau identitas kependudukan yang benar.

Keberhasilan suatu program/kegiatan tidak hanya diukur dari output (keluaran) akan tetapi juga outcome (hasil) atau bahkan manfaat serta dampak dari program/kegiatan itu harus dirasakan.

- **Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

a) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

b) Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

   - Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
   - Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
   - Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
   - Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
   - Pelaksanaan penerbitan dokumentasi pendaftaran penduduk;
   - Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
   - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan;
   - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdapat 3 (tiga) Seksi , yaitu:

   - Kasi Identitas Penduduk
   - Kasi Pindah Datang Penduduk
   - Kasi Pendataan Penduduk dibantu oleh staf dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- **Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

a) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;
b) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
    - Penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
    - Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
    - Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
    - Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
    - Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
    - Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil, dan;
    - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
c) Pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipilterdapat 3 (tiga)Seksi , yaitu:
    - Kasi Kelahiran.
    - Kasi Perkawinan dan Perceraian.
    - Kasi Perubahan Anak, Status Anak,KewargaNegaraan dan Kematian.

➢ ***Bidang Pengolahan Informasi Administrasi dan Pemanfaatan Data***

a) Bidang Pengolahan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijkan di bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
b) Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengolahan Informasi dan Administrassi Kependudukandan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi:
    - Penyusunan perencanaan pengolahan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
    - Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
    - Pelaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumentasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- Pelaksanaan pengeolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Pada Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdapat 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Kasi PengolahandanPenyajian Data Kependudukan.
- Kasi KerjasamaInovasidanPelayanan;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

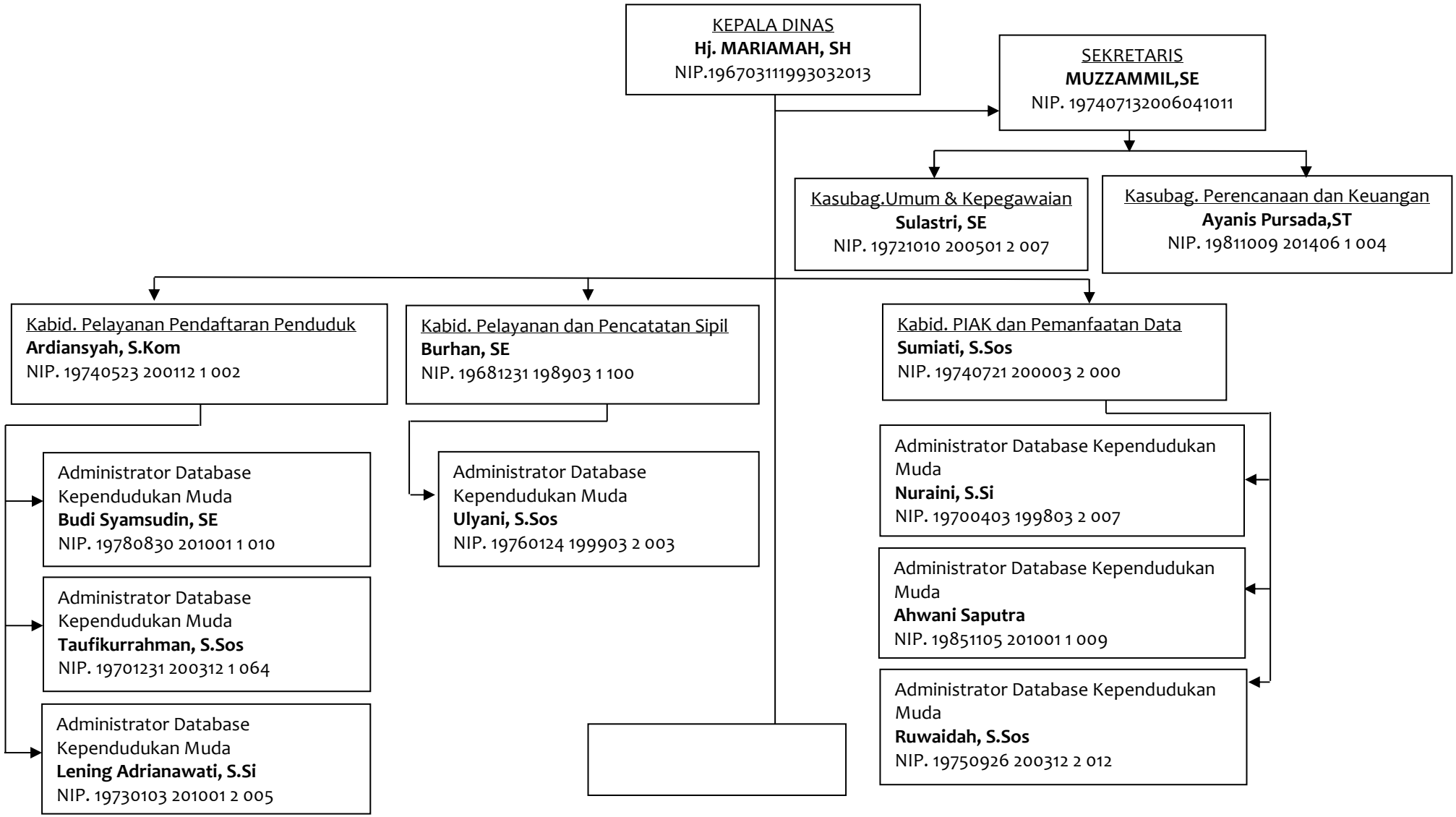
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris, yang terdiri dari:
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - Sub Bagian Perencanan dan Keuangan;
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
    a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
        - Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Identitas Penduduk;
        - Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Pindah Datang penduduk.
        - Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Pendataan Penduduk
    b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
        - Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Kelahiran;
        - Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Perkawinan dan Perceraian;
        - Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Perubahan anak, status anak, kewarganegaraan dan Kematian.
    c. Bidang Pengolahan Informasi dan Pemanfaatan Data Kependudukan, terdiri dari:

- Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Sisitem informasi administrasi kependudukan;
- Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Pengolahandan Penyajian Data Kependudukan;
- Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Sub Koordinasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini ;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA TAHUN 2026



5. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Secara keseluruhan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebanyak 59 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau 45,76%, 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau 25,42%, serta 17 orang pegawai Non ASN/PPPKW atau 28,81% dari total pegawai.

a) Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, dari total 59 orang pegawai, sebanyak 36 orang atau 61,02% merupakan pegawai laki-laki, sedangkan 23 orang atau 38,98% merupakan pegawai perempuan. Komposisi ini menunjukkan keterlibatan pegawai perempuan yang cukup proporsional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

b) Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai didominasi oleh lulusan Strata Satu (S1) sebanyak 46 orang atau 77,97%, sedangkan lulusan SMA sederajat sebanyak 13 orang atau 22,03%. Tidak terdapat pegawai dengan latar belakang pendidikan Diploma Tiga (D3). Komposisi ini mencerminkan bahwa kualitas sumber daya manusia telah memadai dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin PNS		Jenis Kelamin PPPK		Jenis Kelamin PPPK PW		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	SMA Sederajat	2	-	5	2	1	3	13
2	D3	-	-	-	-	-	-	0
3	S1	14	11	5	3	9	4	46
Jumlah		16	11	10	5	10	7	59

c) Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan kepangkatan, jumlah PNS tercatat sebanyak 42 orang, dengan rincian Golongan II sebanyak 2 orang (4,76%), Golongan III sebanyak 21 orang (50,00%), Golongan IV sebanyak 4 orang (9,52%), Golongan V sebanyak 7

orang (16,67%), dan Golongan IX sebanyak 8 orang (19,05%). Dominasi Golongan III menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan didukung oleh pegawai pada level pelaksana dan pengawas yang memadai.

No.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan I	-	-	0
2	Golongan II	2	-	2
3	Golongan III	12	9	21
4	Golongan IV	2	2	4
5	Golongan V	5	2	7
6	Golongan IX	5	3	8
Jumlah		26	16	42

d) Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon dan Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur jabatan, jumlah pejabat struktural dan fungsional sebanyak 14 orang, terdiri dari 1 orang Eselon II (7,14%), 4 orang Eselon III (28,57%), 2 orang Eselon IV (14,29%), serta 7 orang Jabatan Fungsional (50,00%). Komposisi ini menunjukkan adanya penguatan peran jabatan fungsional dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi.

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	3	1	4
3	eselon IV	1	1	2
4	JAFUNG	3	4	7
Jumlah		4	7	14

6. Sarana dan Prasarana (Asset)

Uraian pengantar mengenai kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipiKota Bima.

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di DUKCAPIL Kota Bima Tahun 2025 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Kendaraan Roda Empat	3		3
2	Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor)	4 Unit		4 Unit
3	Meja Biro	21 Buah		21 Buah
4	Meja 1/2 Biro	26 Buah		26 Buah
5	Kursi Putar besar	7 Buah		7 Buah
6	Kursi Putar Kecil	24 Buah		24 Buah
7	Laptop/Note Book	17 Buah		17 Buah
8	Komputer/PC	36 Buah		36 Buah
9	Kursi Kayu	24 Buah		24 Buah
10	Filleng Kabinet	3 Buah		3 Buah
11	Kipas angin tembok	1 Unit	3 Unit	4 Unit
12	Mesin Ketik	1 Buah		1 Buah
13	Papan Kegiatan	2 Buah		2 Buah
14	IT (pralatan jaringan)	1 Unit		1 Unit
15	Scener	5 Unit		5 Unit
16	Printer	27 Buah		27 Buah
17	Sound Sistem	2 Unit		2 Unit
18	CCTV	4 Unit		4 Unit
19	Slaide/Proyector	1 Unit		1 Unit
20	Lemari Arsip Dinamis	8 Unit		8 Unit
21	Televisi	3 Unit	1 Unit	4 Unit
22	AC	8 Unit	2 Unit	8 Unit
23	Camera Elektronik	2 Unit		2 Unit
24	Kursi Pelayanan	8 Unit		8 Unit
25	Mesin Atrean	1 Unit		1 Unit
26	Bangku Tunggu	4 Unit		4 Unit
27	Meja Rapat	2 Set		2 Set
28	Kursi Rapat	56 Unit		56 Unit
29	Meja Compoter	6 Unit	4 Unit	10 Unit
30	Raning Teks	2 Unit		2 Unit
31	Mesin Fex	1 Unit		1 Unit
32	Kursi Tamu	3 Set		3 Set
33	Hardic X ternal	9 Unit		9 Unit

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan. Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas.Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop), PC untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesin tik, dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti, *air conditioner* (AC), kipas angin, dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa roda dua dan roda empat.

D. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Upaya pemecahan masalah yang dilaksanakan dan akan terus dikembangkan adalah sebagi berikut :

1. Meningkatkan kualitas petugas operator atau entry data, verifikator ditingkat Dinas, kelurahan, Puskesmas dengan memberikan pelatihan dalam pelayanan permohonan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya antara lain pendaftaran penduduk, permohonan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.
2. Melakukan pengembangan Aplikasi untuk memudahkan pelayanan yang dilakukan secara on Line (WA, Email, Web Site)maupun secara mandiri melalui Anjungan Dukcapil Mandiri.
3. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan berikut aturan pelaksanaannya secara luas kepada masyarakat, melalui talk show di Radio-radio, media cetak maupun dalam forum rapat-rapat koordinasi tingkat Kecamatan maupun di Kelurahan.
4. Melakukan pengembangan ruangan pelayanan sebagai tempat pelayanan yang representatif, nyaman, aman dan tertib sesuai standar pelayanan (ruangan khusus untuk menyusui, ruangan bermain untuk anak- anak dan fasilitas masyarakat yang berkebutuhan khusus).
5. Pengembangan aplikasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sampai tingkat kelurahan (kampung Adminduk).
6. Melakukan inovasi-inovasi untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan kepada Masyarakat antara lain:
   - Warda Warta (Wara Bidan Wara Akta) yaitu dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan akte Kelahiran anak usia 0 – 18 Tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima bersama dengan Dinas Kesehatan telah melakukan Perjanjian Kerjasama baik dengan RSUD, Puskesmas, Bidan -bidan Polindes di 41 Kelurahan sehingga ketika anak lahir 1 hari maka ybs sdh harus memiliki akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai identitas anak.

- Pelayanan 4 in 1 yaitu Masyarakat mengajukan Permohonan 1 kali untuk mendapatkan 4 dokumen antara lain Kartu Keluarga Baru , KTP el, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran.
- Salam 10 Menit (10 menit waktu pengurusan Pindah datang).
- KIA Masuk Sekolah (Pelayanan langsung di Sekolah- untuk Pemberian Kartu Identitas Anak).
- Difabel Melati (melayani dengan sepeluh hati).
- Mobile di Kelurahan- Kelurahan, di Sekolah- Sekolah, Pondok Pesantren, Panti Jompo, di Rutan, di RSU dan di Rumah- rumah Penduduk bagi Penduduk Rentan.
- Pelayanan dengan sistim mesin antrean.

7. Pengunaan media Webside, Media Sosial Fb, on line maupun media cetak.
8. Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling.
9. Pengadan Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) untuk mempermudah masyarakat untuk mengurus untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri.
10. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima untuk percepatan pencapaian Kepemilikan dokumen dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.

E. SISTIMATIKA PENYAMPAIAN

Untuk sistemmatika penyajian Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ,dengan sistematika sebagai berikut;

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .
B. Kedudukan,Tugas Pokok,Fungsi Dinas Dan Aspek Strategis organisasi
C. Struktur organisasi

D. Isu-isu Strategis dan Permasalahan

E. Sistimatika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

B. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

C. Rencana Kinerja Tahunan

D. Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran
B. Capaian Kinerja Organisasi
C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima tersebut ,Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai salah satu unit kerja pelayanan masyarakat (publicservice) yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima menetapkan Visi.

Visi merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sebagai salah satu unit organisasi penunjang pembangunan daerah, berkewajiban menyusun rencana pembangunan dengan selalu mempertimbangkan pengalaman empiris masalalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

Visi tersebut adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kota Bima yang pada dasarnya pelayanan yang terbaik adalah suatu wujud dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan Misi, yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah:

1. Mengembangkan kebijakan dan system serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menertibkan identitas dan mengesahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan public dan pembangunan.
3. Mengembangkan kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi tersebut di atas akan merumuskan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator kerja utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima,untuk dapat menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, sehingga perlunya dirumuskan tujuan, untuk itu tujuan disusunnya, guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Tujuan yang ingin dicapai adalah:

"Pelayanan Publik Yang Prima "

Sasaran yang ditetapkan akan di capai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dalam memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat adalah ;

"Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Publik"

Indikator Kinerja Utama SKPD lingkup Pemerintah mencerminkan Kinerja Pejabat eselon II (Kepala SKPD), Maka hasil Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima, tersebut adalah sebagai berikut ;

- *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*
- *Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*
- *Presentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanan Kebijakan OPD*

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kota Bima

Sasaran Strategis	IndikatorKinerja Utama	Target Tahun	
		2024	2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	99,72 (A)	90 (A)
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95 %	96 %
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Peresentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	95%	96%

B. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini berpedoman terhadap indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2024-2029 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima 2024-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Formula perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima

Sasaran Strategis	IndikatorKinerja Utama	UraianFormulirPerhitungan	Satuan
Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan Penduduk	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	Total Nilai Presepsi Perunsur ———————— X Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	%
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase Penduduk yang Memiliki Dok ———————— X 100% Total Jumlah Penduduk	%
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD.	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data ———————— X 100% Jumlah PKS	%

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024-2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025.

Berikut table Rencana Kerja Tahunan, yang masih mengacu pada pedoman dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan Penduduk	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	90 (A)
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%
Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD.	96%

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, dalam hal ini penerima amanah adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Pada Bulan Januari 2025, telah diperjanjikan 5 (lima) program utama yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan yang terinci ke dalam 19 (sembilan belas) sub kegiatan prioritas. untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 5.863.457.990,-**

Secara lebih rinci, Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

PERJANJIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BIMA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
I	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarfakat (IKM)	90 (A)
II	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%
III	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Peresentase OPD Yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	96%

No	Program	Anggaran	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.446.527.090	DAU
II	Program Pendaftaran Penduduk	231.966.000	DAU
III	Program Pencatatan Sipil	76.395.900	DAU
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99.296.000	DAU
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	9.273.000	DAU

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Tujuan Dan Sasaran DUKCAPIL Kota Bima

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar mampu menjadi tolak ukur kinerja setiap komponen yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD

Indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, fokus pada tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang telah ditetapkan oleh tim reviu dari Kemenpan RB, dengan sebagian SKPD Kota Bima beserta time reviu OPD Kota Bima, menghasilkan kesimpulan 3 (Tiga) sasaran strategis untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima serta 3 (tiga) Indikator Sasaran seperti tabel diatas:

3 (tiga) Sasaran Strategis

- Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan
- Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil
- Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan

3 (tiga) Indikaror Sasaran

- Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
- Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD

B. Capaian Kinerja Organisasi

NO	Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	91,95 (A)	89.68	97.53%
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,73 %	90.08 %	92%
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	73.16%	60%	82.01%

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan beberapa sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama.

Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 91,95 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi yang dicapai sebesar 89,68, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,53% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai target yang direncanakan.

Sasaran strategis berikutnya adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang diukur melalui indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Target yang ditetapkan sebesar 97,73%, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar 90,08%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 92%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memiliki dokumen administrasi kependudukan, namun masih diperlukan upaya peningkatan melalui berbagai program pelayanan jemput bola, sosialisasi, dan peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Sasaran strategis lainnya adalah meningkatnya pemanfaatan data kependudukan, yang diukur melalui indikator persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan kebijakan OPD. Target yang ditetapkan sebesar 73,16%, dengan realisasi sebesar 60%, sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 82,01%. Hal ini menunjukkan bahwa

pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah mulai meningkat, namun masih perlu didorong melalui penguatan kerja sama pemanfaatan data, integrasi sistem informasi, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu terus ditingkatkan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada tahun-tahun mendatang.

C. Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Analisis capaian sasaran strategis dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara umum sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator sasaran strategis sebagai berikut.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 91,95 dengan kategori A (Sangat Baik). Realisasi yang dicapai sebesar 89,68, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,53% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada masyarakat pengguna layanan.

Selanjutnya pada sasaran strategis meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, indikator yang digunakan adalah persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Target yang ditetapkan sebesar 97,73%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 90,08%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 92%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan melalui berbagai strategi pelayanan, seperti pelayanan jemput bola, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sementara itu pada sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data kependudukan, indikator yang digunakan adalah persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan

dalam perencanaan kebijakan OPD. Target yang ditetapkan sebesar 73,16%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 60%, dengan capaian kinerja sebesar 82,01%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan sudah mulai berjalan, namun masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kerja sama pemanfaatan data, integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, serta peningkatan koordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan atau berada pada kategori kinerja yang baik. Meskipun demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap perlu melakukan berbagai upaya perbaikan dan inovasi pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan di masa yang akan datang.

Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kartu Keluarga dan Perekaman KTP-el.



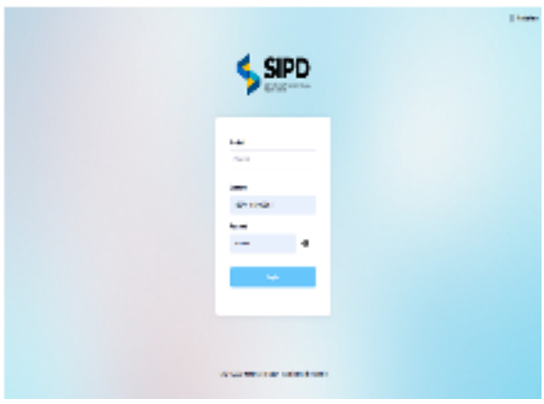


Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Akte Kelahiran, Kematian dan Perkawinan





Halaman Login Akun, User dan Password Aplikasi SIPD dan EBMD





Halaman Login Akun, User dan Password Aplikasi SIAK.



Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Peresentase Pencapaian Rencana / Tingkat Capaian :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Capaian}} \text{ X } 100 = \text{Capaian Kinerja}$$

D. Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Sasaran Strategis I

NO	SASARAN	INDIKATOR	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (5/4)*100
1	2	3	4	5	6
I	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	91,95	89.68	97.53%

Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2025

Sasaran Strategis I yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan dan penctatan sipil.

Pada tahun 2025, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 91,95 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2025, nilai realisasi IKM yang dicapai adalah sebesar 89,68. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja pada indikator ini mencapai 97,53% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat telah berada pada kategori baik hingga sangat baik, meskipun realisasi nilai IKM masih sedikit berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, nilai IKM menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dan tetap berada pada kategori pelayanan yang baik. Hal ini mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target secara optimal, di antaranya masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, tingginya volume permohonan pelayanan administrasi kependudukan, serta keterbatasan sumber daya manusia pada unit pelayanan.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan berbasis digital, memperluas inovasi pelayanan administrasi kependudukan, meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, serta memperkuat sistem pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

Tabel Proses Analisis Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat Per Responden Dan Per Unsur Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025

NO Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
8	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
9	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	3	3	3	4	3	4	4	4	3	
12	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
13	3	3	3	4	4	4	3	3	4	
14	3	2	2	4	3	2	3	3	3	
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
16	4	4	3	4	4	3	2	3	4	
17	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
18	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
19	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
20	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
21	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
22	3	3	4	4	4	3	3	3	3	
23	4	3	3	4	3	3	3	3	3	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	3	3	4	3	4	
26	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
27	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
29	3	3	2	4	3	3	3	2	4	

30	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
31	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
32	3	3	4	4	4	3	4	4	4	
33	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
34	3	3	3	4	4	3	3	4	4	
35	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
36	1	2	4	4	1	3	3	3	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
38	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
39	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
40	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
41	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
42	3	3	3	4	4	3	3	2	4	
43	4	4	3	4	3	3	3	3	4	
44	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
45	3	3	3	4	4	3	3	4	4	
46	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
47	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
48	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
49	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
50	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
51	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
52	4	3	3	4	2	3	3	2	4	
53	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
54	3	4	4	4	3	4	3	2	4	
55	3	3	3	4	4	3	3	2	3	
56	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
57	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
58	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
59	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
60	3	4	3	4	3	3	3	2	4	
61	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
62	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
63	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
64	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
65	3	3	3	4	4	4	3	3	3	
66	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
67	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
68	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
69	3	4	3	4	4	4	3	3	4	

70	3	4	4	4	3	3	3	3	4
71	3	3	3	4	4	3	3	2	4
72	3	3	3	4	4	3	3	3	4
73	3	3	3	4	4	3	3	3	3
74	4	3	3	4	4	3	3	3	3
75	4	4	3	4	3	4	3	3	4
76	3	3	3	4	4	3	3	3	4
77	3	3	4	4	4	3	3	3	3
78	3	4	4	4	4	3	3	3	4
79	3	3	3	4	3	3	3	3	4
80	3	3	3	4	4	3	3	3	4
81	3	3	3	4	3	3	3	3	4
82	3	3	3	4	4	3	3	4	4
83	3	3	2	4	3	3	2	3	4
84	3	3	3	4	4	3	3	3	4
85	3	3	3	4	4	3	3	3	4
86	3	3	3	4	3	3	3	3	4
87	3	3	3	4	4	3	3	3	4
88	3	3	3	4	3	3	3	3	4
89	3	3	2	4	3	2	3	3	3
90	3	3	3	4	4	3	3	3	4
91	3	4	3	4	4	3	3	3	4
92	3	3	3	4	4	3	3	3	4
93	4	3	3	4	4	3	3	2	4
94	3	3	4	4	4	3	3	3	4
95	4	3	3	4	4	3	3	3	4
96	3	3	3	4	4	3	3	4	4
97	4	3	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	3	4	4	4	4	2	4
99	3	3	3	4	4	3	3	3	4
100	3	3	3	4	4	3	3	3	4
101	3	3	3	4	3	3	3	3	4
102	3	3	3	4	4	3	3	2	4
103	3	3	3	4	4	3	3	4	4
104	3	3	3	4	4	3	3	3	4
105	3	3	3	4	4	3	3	3	4
106	3	3	3	4	4	3	3	3	4
107	3	3	3	4	4	3	3	3	4
108	3	3	3	4	4	3	3	3	4
109	3	3		4	4	3	3	3	4

110	3	3	3	4	4	3	3	3	3
111	3	3	3	4	4	3	3	3	4
112	3	3	3	4	4	3	3	3	4
113	3	3	3	4	4	3	3	3	4
114	3	3	3	4	4	3	3	3	4
115	3	3	3	4	4	3	3	3	4
116	3	3	3	4	4	3	3	3	4
117	3	4	3	4	4	3	3	2	4
118	3	3	3	4	4	3	3	3	4
119	3	3	3	4	4	3	3	3	4
120	3	3	3	4	4	3	3	3	4
121	3	3	3	4	4	3	3	3	4
122	3	3	3	4	4	3	3	3	4
123	4	4	4	4	4	4	3	3	4
124	4	4	4	4	4	4	4	3	4
125	4	4	4	4	4	4	4	3	4
126	4	4	4	4	4	4	4	3	4
127	4	4	4	4	4	4	4	3	4
128	4	4	4	4	4	4	4	3	4
129	4	4	4	4	4	4	4	3	4
130	3	3	3	4	3	3	4	3	4
131	4	4	4	4	4	4	4	3	4
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	4	4	4	4	4	4	4	3	4
134	4	4	4	4	4	4	4	3	4
135	4	4	4	4	4	4	4	3	4
136	4	4	4	4	4	3	3	3	4
137	4	4	3	4	4	4	4	3	4
138	4	4	4	4	4	3	3	3	4
139	4	4	4	4	4	4	4	3	4
140	4	4	4	4	4	4	4	3	4
141	4	4	4	4	4	3	3	3	4
142	4	4	4	4	4	3	4	3	4
143	4	4	4	4	4	3	3	3	4
144	4	4	4	4	4	4	4	4	4
145	4	4	4	4	4	4	4	4	4
146	4	4	4	4	4	4	4	4	4
147	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	4	4	4	4	3	4	4	4	4
149	4	4	4	4	4	4	4	4	4

150	4	4	4	4	4	4	4	3	4
151	4	4	4	4	4	4	4	3	4
152	4	3	4	4	4	4	4	4	4
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4
154	4	4	3	4	4	4	4	3	4
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4
156	4	4	4	4	4	4	4	3	4
157	4	4	4	4	4	4	4	3	4
158	4	4	4	4	4	4	4	3	4
159	4	4	4	4	4	4	4	3	4
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4
162	4	4	4	4	4	3	3	3	4
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4
165	4	4	4	4	4	3	3	3	4
166	4	4	3	4	4	3	4	3	4
167	4	4	4	4	4	4	4	3	4
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4
171	4	4	4	4	4	4	4	3	4
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4
174	4	4	4	4	4	3	3	3	4
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4
176	4	4	4	4	4	3	3	3	4
177	4	4	4	4	4	3	3	3	4
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	4	4	4	4	4	4	4	3	4
180	4	4	4	4	4	3	4	3	4
181	4	4	4	4	4	4	4	3	4
182	4	4	4	4	4	4	4	3	4
183	4	4	3	4	4	3	3	3	4
184	4	4	4	4	4	3	3	3	4
185	4	4	4	4	4	3	3	3	4
186	4	4	4	4	4	3	3	3	4
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4
188	4	4	4	4	4	3	3	3	4
189	4	4	3	4	3	3	3	4	4

190	3	3	3	4	4	3	3	3	4
191	3	3	3	4	3	4	4	3	3
192	4	3	3	4	3	3	3	3	4
193	3	3	3	4	3	3	3	3	4
194	4	4	3	4	3	4	3	2	4
195	3	3	3	4	3	3	3	3	4
196	3	4	3	4	3	3	4	3	4
197	4	3	2	4	3	3	4	3	3
198	3	3	3	4	3	3	3	3	4
199	3	4	4	4	4	4	4	4	4
200	3	4	4	4	4	3	4	4	4
201	3	3	2	4	3	3	3	3	3
202	3	3	2	4	3	3	3	2	3
203	3	4	3	4	3	3	3	3	4
204	4	2	3	4	2	3	3	3	4
205	3	3	3	4	3	3	3	3	4
206	4	4	4	4	4	4	4	4	4
207	4	4	4	4	4	4	4	4	4
208	3	4	4	4	4	3	4	4	4
209	3	3	3	4	3	3	3	3	4
210	4	4	4	4	4	4	4	4	4
211	3	3	3	4	3	3	3	3	3
212	4	4	4	4	4	4	4	4	4
213	4	4	4	4	4	4	4	4	4
214	3	3	4	4	3	4	4	4	4
215	3	4	4	4	4	4	4	4	4
216	4	4	4	4	4	4	4	4	4
217	3	4	3	4	3	4	4	4	4
218	4	4	4	4	4	4	4	4	4
219	4	4	4	4	4	4	4	4	4
220	4	4	4	4	4	4	4	4	4
221	4	4	4	4	4	3	3	4	4
222	4	4	3	4	4	4	4	4	4
223	3	3	3	4	3	3	3	4	4
224	4	4	4	4	4	4	4	4	4
225	3	4	4	4	4	3	4	4	4
226	4	4	4	4	4	4	4	4	4
227	4	4	4	4	4	4	4	4	4
228	3	3	3	4	3	3	3	2	4
229	3	3	3	4	3	3	3	4	3

230	3	4	3	4	3	4	4	2	3
231	3	4	3	4	3	4	3	2	4
232	4	4	4	4	4	4	4	4	4
233	4	4	4	4	4	4	4	4	4
234	4	4	4	4	4	4	4	4	4
235	4	4	4	4	4	3	4	4	4
236	4	4	4	4	4	4	4	4	4
237	4	4	4	4	4	4	4	4	4
238	4	4	4	4	4	4	4	4	4
239	3	3	3	4	3	3	3	3	3
240	4	4	4	4	4	4	4	4	4
241	4	4	4	4	4	4	4	4	4
242	4	3	4	4	4	4	4	4	4
243	4	4	4	4	4	3	4	3	3
244	4	4	3	4	4	4	4	4	4
245	4	4	4	4	4	4	4	4	4
246	4	4	4	4	4	4	4	4	4
247	4	3	3	4	3	4	3	3	4
248	4	4	4	4	4	4	4	4	4
249	4	4	4	4	4	4	4	3	4
250	3	4	4	4	3	4	4	4	4
251	4	4	4	4	4	4	4	4	4
252	3	3	2	4	2	2	3	2	4
253	4	4	4	4	4	4	4	4	4
254	4	3	4	4	4	4	4	4	4
255	4	4	4	4	4	4	4	4	4
256	4	4	4	4	4	4	4	4	4
257	4	4	4	4	4	4	4	4	4
258	4	4	4	4	4	4	4	3	4
259	4	4	4	4	4	4	4	4	4
260	4	4	4	4	3	3	3	3	4
261	4	4	4	4	4	4	4	4	4
262	4	4	4	4	4	4	4	4	4
263	3	3	3	4	3	3	3	3	4
264	4	4	4	4	4	4	4	4	4
265	3	3	3	4	3	3	3	2	4
266	3	3	3	4	4	3	3	2	3
267	4	4	4	4	4	4	4	4	4
268	4	4	4	4	4	4	4	4	4
269	3	4	4	4	4	4	4	4	4

270	4	4	4	4	4	4	4	4	4
271	4	4	4	4	4	4	4	4	4
272	4	4	4	4	4	3	3	4	4
273	3	4	4	4	4	4	4	4	4
274	4	4	4	4	4	4	4	4	4
275	3	4	4	4	4	4	4	4	4
276	4	4	4	4	4	4	4	4	4
277	4	4	4	4	4	4	4	4	4
278	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	4	4	4	4	4	4	4	4	4
280	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	4	4	4	4	4	4	4	4	4
282	4	2	3	4	4	4	3	3	2
283	3	4	4	4	4	4	4	4	4
284	4	4	4	4	4	4	4	4	4
285	4	4	4	4	4	4	4	4	4
286	2	3	3	4	3	3	3	3	4
287	4	4	4	4	4	4	4	4	4
288	4	4	4	4	4	4	4	4	4
289	4	4	4	4	3	3	3	3	4
290	4	3	3	4	3	3	3	3	4
291	4	4	4	4	4	3	3	4	4
292	4	4	3	4	4	4	4	4	4
293	4	4	4	4	4	4	4	4	4
294	4	4	4	4	3	3	3	3	4
295	3	4	4	4	4	3	3	3	4
296	4	4	4	4	4	4	4	4	4
297	4	3	4	4	3	3	3	3	4
298	4	4	4	4	4	3	3	3	4
299	4	3	4	4	4	4	4	4	4
300	4	4	4	4	4	4	4	4	4
301	3	3	3	4	3	3	3	3	3
302	3	4	4	4	3	3	4	3	4
303	4	4	3	4	3	3	3	3	4
304	3	3	3	4	3	3	3	3	4
305	3	3	4	4	3	3	3	3	4
306	3	3	4	4	3	4	3	3	4
307	3	3	4	4	3	4	4	3	4
308	3	3	3	4	3	3	3	3	4
309	4	4	4	4	4	4	4	4	4

310	3	3	3	4	4	3	3	3	4
311	4	4	4	4	4	4	4	4	4
312	4	4	4	4	4	4	4	4	4
313	4	4	4	4	4	4	4	4	4
314	3	4	3	4	4	4	4	4	4
315	3	3	3	4	3	4	3	3	4
316	4	4	4	4	4	4	4	4	4
317	4	4	4	4	4	4	4	4	4
318	4	4	4	4	4	4	4	4	4
319	4	3	4	4	3	3	3	3	3
320	4	4	3	4	3	3	4	4	4
321	3	3	3	4	4	4	4	4	4
322	3	3	3	4	4	3	3	4	4
323	4	4	4	4	4	4	4	4	4
324	4	4	4	4	4	4	4	4	4
325	3	3	3	4	3	4	4	3	4
326	3	3	3	4	3	3	3	4	4
327	4	4	4	4	4	4	4	4	4
328	4	4	3	4	4	4	4	4	4
329	3	3	3	4	3	4	3	3	4
330	3	3	3	4	3	4	3	3	4
331	4	3	4	4	4	4	4	4	4
332	3	3	3	4	3	4	3	3	4
333	3	3	3	4	3	4	4	4	3
334	3	3	3	4	4	3	4	3	3
335	3	3	4	4	4	3	4	3	3
336	4	4	3	4	4	3	3	3	4
337	3	3	3	4	3	4	4	4	4
338	4	3	4	4	3	4	4	3	3
339	3	3	4	4	4	3	3	3	3
340	4	3	3	4	4	3	4	4	4
341	4	4	4	4	4	4	4	4	4
342	4	4	4	4	4	4	4	3	4
343	4	4	4	4	4	4	4	4	4
344	3	3	4	4	3	4	3	3	3
345	4	3	3	4	3	3	3	3	3
346	3	3	4	4	4	4	3	4	3
347	3	3	4	4	4	4	4	4	3
348	4	4	3	4	3	4	3	4	4
349	3	3	4	4	4	4	3	4	4

350	3	3	4	4	3	4	3	4	4
351	3	3	3	4	3	3	3	3	3
352	3	3	4	4	3	4	3	3	4
353	4	4	3	4	4	4	4	3	3
354	3	3	3	4	3	4	3	3	3
355	4	4	4	4	4	4	4	4	4
356	4	4	4	4	4	4	4	4	4
357	4	4	4	4	4	4	4	4	4
358	3	3	3	4	3	3	3	3	4
359	3	3	3	4	3	3	3	3	3
360	3	3	3	4	3	3	3	3	4
361	2	4	2	4	4	4	4	4	3
362	3	3	3	4	4	4	4	2	4
363	3	3	3	4	3	3	3	3	3
364	4	4	3	4	4	3	3	2	4
365	3	3	3	4	3	3	3	3	3
366	3	2	2	4	3	3	3	3	3
367	4	4	4	4	4	4	4	4	4
368	4	4	3	4	4	4	4	4	4
369	3	4	3	4	3	3	3	3	4
370	3	3	2	4	2	3	3	4	4
371	4	4	3	4	3	4	3	3	4
372	3	3	3	4	3	4	3	3	4
373	4	4	3	4	3	4	3	3	4
374	4	4	4	4	4	4	4	4	4
375	3	4	3	4	4	4	4	3	4
376	3	4	3	4	3	3	3	4	4
377	4	3	4	4	4	4	4	4	4
378	4	3	4	4	4	4	4	4	4
379	3	3	4	4	4	4	3	4	4
380	4	4	4	4	4	4	4	4	4
381	3	3	3	4	4	3	3	4	4
382	3	3	4	4	3	3	4	4	3
383	3	3	3	4	3	3	4	3	3
384	4	4	4	4	3	4	3	3	3
385	4	4	4	4	4	4	4	3	4
386	3	3	3	4	3	3	3	3	3
387	3	4	3	4	4	3	3	4	4
388	4	3	3	4	3	3	3	3	3
389	4	3	4	4	3	3	4	3	4

390	4	3	3	4	3	3	3	3	4
391	3	3	3	4	3	4	4	3	3
392	3	3	3	4	3	4	4	3	3
393	3	4	4	4	3	3	3	3	3
394	3	3	3	4	3	4	3	3	3
395	4	4	4	4	4	4	4	4	4
396	2	1	4	4	3	4	3	3	2
397	3	4	3	4	4	4	3	4	4
398	3	3	3	4	4	3	4	4	4
399	3	4	3	4	4	4	3	4	4
400	3	4	3	4	3	4	3	3	4
401	3	4	4	4	3	4	3	3	4
402	3	3	2	4	3	4	3	3	4
403	4	4	3	4	3	3	4	3	4
404	4	4	3	4	4	3	4	4	4
405	3	3	3	4	3	4	4	3	4
406	3	3	3	4	3	3	3	3	4
407	3	3	3	4	3	4	3	3	4
408	3	3	3	4	4	3	3	3	4
409	3	3	3	4	4	4	3	3	4
410	3	2	4	4	4	3	3	4	4
411	4	4	4	4	4	4	4	4	4
412	4	4	4	4	4	4	4	4	4
413	4	3	3	4	3	4	4	3	3
414	3	4	4	4	3	3	3	3	4
415	4	4	4	4	4	4	4	4	4
416	3	3	3	4	3	3	3	4	3
417	4	4	4	4	4	4	4	4	4
418	4	4	3	4	3	3	3	3	3
419	3	3	3	4	4	3	4	3	3
420	4	3	3	4	3	3	3	4	4
421	3	3	3	4	3	3	4	4	4
422	3	4	4	4	4	3	4	4	4
423	3	3	4	4	3	3	4	3	3
424	3	3	3	4	3	3	3	4	4
425	3	3	3	4	3	4	3	3	3
426	3	3	3	4	3	3	3	3	3
427	4	3	3	4	3	3	3	3	3
428	4	4	3	4	3	4	4	4	4
429	3	3	4	4	4	4	4	4	4

430	4	4	3	4	4	3	3	3	4
431	4	4	3	4	4	3	3	3	4
432	3	3	3	4	3	4	3	3	3
433	4	3	3	4	3	3	3	3	3
434	3	3	3	4	3	4	3	2	3
435	2	4	3	4	3	3	3	3	3
436	3	4	4	4	3	3	3	3	3
437	4	3	3	4	3	4	3	3	3
438	4	4	3	4	3	3	3	3	3
439	4	3	3	4	3	4	4	4	4
440	4	3	3	4	4	4	4	4	4
441	3	4	4	4	4	3	4	3	4
442	3	3	3	4	3	3	3	3	3
443	4	4	4	4	4	3	4	3	4
444	3	3	4	4	4	4	3	3	4
445	4	4	3	4	4	4	4	4	4
446	4	4	4	4	4	3	4	3	4
447	4	4	4	4	4	4	4	3	4
448	4	4	4	4	4	4	4	3	4
449	4	4	3	4	4	3	3	3	4
450	4	4	4	4	4	4	4	4	4
451	4	4	3	4	4	4	3	4	4
452	3	3	3	4	3	3	4	3	4
453	3	3	3	4	3	3	3	3	4
454	3	4	3	4	3	3	3	3	4
455	3	4	4	4	4	4	4	4	4
456	4	4	4	4	3	3	3	4	4
457	3	4	4	4	4	3	3	4	4
458	4	4	4	4	4	4	4	3	4
459	4	4	4	4	4	4	4	4	4
460	4	4	3	4	4	3	3	3	4
461	4	4	4	4	4	4	4	4	4
462	4	4	4	4	3	4	4	4	4
463	4	4	3	4	4	3	3	3	4
464	4	4	3	4	4	3	3	3	4
465	4	4	3	4	4	4	4	4	4
466	3	4	4	4	4	4	4	3	4
467	4	4	3	4	4	3	4	3	4
468	4	4	3	4	4	3	3	3	4
469	4	4	3	4	4	3	3	3	4

470	4	4	4	4	4	4	4	4	4
471	3	3	3	4	3	3	3	3	3
472	4	4	4	4	4	4	4	4	4
473	3	4	3	4	3	3	3	3	3
474	4	4	3	4	4	3	4	3	4
475	3	3	3	4	3	3	3	3	3
476	4	4	3	4	4	4	4	4	4
477	3	3	3	4	3	3	3	3	3
478	4	4	4	4	4	3	3	3	3
479	4	4	4	4	4	4	4	4	4
480	4	4	4	4	4	4	4	4	4
481	3	3	3	4	3	3	3	3	3
482	4	4	3	4	4	3	3	2	3
483	3	3	3	4	3	3	3	3	3
484	4	3	3	4	4	4	3	3	3
485	4	4	4	4	4	4	4	3	4
486	4	4	3	4	4	3	3	3	4
487	4	4	4	4	4	4	4	4	4
488	3	3	3	4	3	3	4	3	3
489	4	3	3	4	3	3	3	4	3
490	4	4	4	4	3	4	4	4	3
491	3	3	3	4	3	3	3	3	3
492	4	4	4	4	4	4	4	3	4
493	4	4	4	4	4	4	4	4	4
494	3	3	3	4	3	3	3	3	3
495	3	4	3	4	3	4	4	4	3
496	4	4	4	4	3	4	4	3	3
497	3	4	4	4	3	3	3	3	3
498	4	4	4	4	4	4	4	4	4
499	3	3	3	4	3	3	2	3	3
500	3	3	4	4	3	4	3	3	4
501	3	3	3	4	3	4	4	4	4
502	4	4	4	4	4	4	3	4	3
503	3	4	3	4	3	4	3	3	4
504	3	3	3	4	4	3	3	3	3
505	4	3	3	4	4	4	4	3	4
506	4	3	3	4	3	3	3	3	3
507	3	3	3	4	3	4	3	3	3
508	3	4	4	4	3	3	4	4	4
509	3	3	3	4	3	3	3	2	4

510	3	3	3	4	3	3	3	3	3
511	4	4	3	4	3	3	3	3	3
512	4	4	3	4	4	3	3	3	4
513	4	4	3	4	4	3	3	3	4
514	4	4	4	4	4	3	3	3	4
515	3	3	3	4	3	3	3	3	4
516	4	3	3	4	3	3	3	3	4
517	3	3	3	4	4	3	4	3	4
518	3	4	3	4	4	3	4	3	4
519	3	3	3	4	4	3	3	3	4
520	4	4	4	4	4	4	4	3	4
521	4	4	4	4	4	4	4	3	4
522	4	4	4	4	4	4	3	3	4
523	4	4	4	4	4	3	3	3	4
524	4	4	4	4	4	4	4	3	4
525	4	4	3	4	3	3	3	4	4
526	4	3	4	4	4	4	4	3	4
527	4	4	4	4	4	4	4	4	4
528	3	3	3	4	3	3	3	3	4
529	3	3	3	4	4	4	3	3	4
530	3	3	3	4	4	4	3	4	4
531	3	3	3	4	4	3	3	4	4
532	4	3	4	4	4	3	4	4	4
533	3	3	3	4	3	3	3	3	4
534	3	4	3	4	4	4	3	4	4
535	4	4	4	4	4	4	4	4	4
536	4	4	4	4	4	4	4	4	4
537	4	4	4	4	4	4	4	4	4
538	4	4	4	4	4	4	4	4	4
539	4	4	4	4	4	4	4	4	4
540	3	3	3	4	3	3	3	3	4
541	3	3	3	4	3	3	3	3	4
542	3	4	4	4	3	3	4	4	4
543	3	4	3	4	3	4	3	4	4
544	3	4	3	4	3	3	4	4	4
545	3	3	3	4	3	4	3	3	4
546	4	3	4	4	4	4	4	4	4
547	4	4	3	4	4	4	4	3	4
548	3	3	3	4	4	4	4	2	4
549	4	4	3	4	3	4	4	3	4

550	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
551	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
552	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
553	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
554	3	3	3	4	3	3	3	2	4	
555	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
556	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
557	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
558	3	3	4	4	3	3	3	4	3	
559	4	4	4	4	4	3	4	3	4	
560	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
561	3	4	3	4	3	3	3	4	4	
562	3	4	4	4	3	3	4	4	4	
563	4	3	4	4	3	3	3	3	4	
564	4	3	4	4	3	4	3	3	4	
565	4	3	4	4	3	3	4	4	3	
566	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
567	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
568	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
569	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
570	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
571	4	4	3	4	3	3	4	3	4	
572	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
573	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
574	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
575	3	4	4	4	3	3	4	4	3	
576	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
577	4	4	3	4	4	3	3	3	4	
578	3	3	3	4	3	4	4	3	4	
579	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
580	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
Jumlah Nilai tiap Unsur	2048	2061	2007	2320	2101	2026	2018	1943	2220	
NRR tiap Unsur=Jumlah Nilai tiap Unsur/Jumlh kuisioner yang terisi	3.531	3.553	3.460	4.000	3.622	3.493	3.479	3.350	3.828	
NRR Tertimbang tiap Unsur=NRR	0.392	0.394	0.384	0.444	0.402	0.388	0.386	0.372	0.425	3.587

tiap Unsur x 0,111										
IKM UNIT PELAYANAN	***9.799***	***9.861***	***9.602***	***11.100***	***10.052***	***9.693***	***9.655***	***9.296***	***10.622***	**89.68**

Keterangan :

U1-U9	=	Unsur-Unsur Pelayanan
JUM NU	=	Jumlah Nilai per Unsur
NRR/unsur	=	Nilai Rata-Rata per Unsur
IKM	=	Indeks Kepuasan Masyarakat
*)	=	Jumlah NRR IKM tertimbang
**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 150
NRR/unsur	=	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	=	NRR per unsur x 0,111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN
Mutu Pelayanan
A (Sangat Baik) : 88,31-100,00
B (Baik) : 75,61-88,30
C (Kurang Baik) : 65,00-76,60
D (Tidak Baik) : 25,00- 64, 99

Metode pengolahan data pada Indek Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata terimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 aitem pelayanan yang dikaji setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \text{ X } \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu, antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakter yang berbeda, maka setiap unit pelayanan di mumgkinkan untuk :

a. Menambah unsur yang dianggap relevan.
b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk pelayanan yang diberikan kepada publik di Tahun 2024 menunjukakan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima pada kategori "Sangat Baik (A)" dengan nilai mutu IKM 90,95. Hasil survei yang terdiri atas indeks kepuasan masyarakat (IKM) diharapkan dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

E. Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Sasaran Strategis II

NO	SASARAN	INDIKATOR	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (5/4)*100
1	2	3	4	5	6
II	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96 %	97,33 %	101%

Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2025

Sasaran Strategis II yaitu meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat. Tertib administrasi kependudukan merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta penyediaan data kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dokumen administrasi kependudukan yang dimaksud meliputi Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik (KTP-

el), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), serta dokumen pencatatan sipil lainnya.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 96%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang bersumber dari Data Buku Agregat Kependudukan Kota Bima Tahun 2025 Semester I, realisasi yang dicapai adalah sebesar 97,33%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja pada indikator ini mencapai 101% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat Kota Bima telah melampaui target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan semakin meningkat serta pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semakin efektif dan menjangkau masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelaksanaan program pelayanan jemput bola, sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah serta kerja sama dengan berbagai pihak juga turut berkontribusi dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kota Bima. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat dapat terus meningkat sehingga tercipta data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pembangunan daerah.

Analisa pengkuran kinerja pada pencapaian sasaran strategis II ini diperoleh dari beberapa capaian kinerja pada data Buku Agregat Kependudukan Kota Bima Tahun 2025 semester 1 dalam bentuk tabel berikut :

1. Penduduk Kota Bima Berdasarkan Kepemilikan e-KTP

KECAMATAN	WAJIB e-KTP			SUDAH CETAK KTP			BELUM CETAK KTP		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
RASANAE BARAT	10,838	11,337	22,175	10,613	11,204	21,817	225	133	358
RASANAE TIMUR	7,183	7,493	14,676	7046	7,392	14,438	137	101	238
ASAKOTA	13,303	13,387	26,690	13,043	13,177	26,220	260	210	470
RABA	14,475	15,297	29,772	14,203	15,135	29,338	272	162	434
MPUNDA	12,194	12,902	25,096	11,979	12,763	24,742	215	139	354
KOTA BIMA	**57,993**	**60,416**	**118,409**	**56,884**	**59,671**	**116,555**	**1,109**	**745**	**1,854**

2. Penduduk Kota Bima Berdasarkan Kepemilikan Kartu Keluarga

KECAMATAN	JUMLAH KK	SUDAH CETAK KK		BELUM CETAK KK	
		n	%	n	%
RASANAE BARAT	10,143	10,094	99.52	49	0.48
RASANAE TIMUR	6,885	6,857	99.59	28	0.41
ASAKOTA	11,803	11,758	99.62	45	0.38
RABA	13,633	13,599	99.75	34	0.25
MPUNDA	10,980	10,940	99.64	40	0.36
KOTA BIMA	**53,444**	**53,248**	**99.63**	**196**	**0.37**

3. Penduduk Kota Bima Berdasarkan Kelompok Usia 0-17 Tahun Berakta Lahir

KECAMATAN	USIA 0-17 TAHUN			KEPEMILIKAN AKTA LAHIR			
	LK	PR	L+P	MEMILIKI	BLM MEMILIKI	TOTAL	%
RASANAE BARAT	4,950	4,482	9,432	9,332	100	9,432	98.94
RASANAE TIMUR	3,235	3,037	6,272	6,240	32	6,272	99.49
ASAKOTA	6,550	6,102	12,652	12,556	96	12,652	99.24
RABA	6,498	5,878	12,376	12,278	98	12,376	99.21
MPUNDA	5,616	5,169	10,785	10,739	46	10,785	99.57
KOTA BIMA	**26,849**	**24,668**	**51,517**	**51,145**	**372**	**51,517**	**99.28**

Dari 3 tabel diatas yang tertuang dalam buku dokumen agregat kependudukan kota bima tahun 2025, berdasarkan data kepemilikan **e-KTP**, jumlah penduduk wajib e-KTP di Kota Bima tercatat sebanyak 118.409 jiwa, terdiri dari 57.993 laki-laki dan 60.416 perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 116.555 jiwa (98,43%) telah melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP, sedangkan 1.854 jiwa (1,57%) belum mencetak e-KTP. Kecamatan dengan jumlah wajib e-KTP terbanyak adalah Raba (29.772 jiwa), disusul Asakota (26.690 jiwa), Mpunda (25.096 jiwa), Rasanae Barat (22.175 jiwa), dan Rasanae Timur (14.676 jiwa). Secara umum, tingkat kepemilikan e-KTP di seluruh kecamatan sudah sangat tinggi, dengan selisih antara wajib dan sudah cetak relatif kecil, menunjukkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.

Kedua, berdasarkan data kepemilikan Kartu Keluarga (KK), dari total 53.444 Kepala Keluarga di Kota Bima, sebanyak 53.248 KK atau 99,63% telah mencetak Kartu Keluarga, sementara hanya 196 KK atau 0,37% yang belum mencetak. Kecamatan dengan persentase kepemilikan tertinggi adalah Raba (99,75%), diikuti Mpunda (99,64%), Asakota (99,62%), Rasanae Timur (99,59%), dan Rasanae Barat (99,52%). Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh keluarga di Kota Bima telah memiliki dokumen administrasi dasar berupa Kartu Keluarga, yang menjadi fondasi utama dalam pengurusan dokumen kependudukan lainnya.

Ketiga, berdasarkan data kepemilikan Akta Kelahiran usia 0–17 tahun, dari total 51.517 anak di Kota Bima, sebanyak 51.145 anak atau 99,28% telah memiliki akta kelahiran, sedangkan 372 anak atau 0,72% belum memiliki. Persentase kepemilikan tertinggi terdapat di Kecamatan Mpunda (99,57%), disusul Rasanae Timur (99,49%), Asakota (99,24%), Raba (99,21%), dan Rasanae Barat (98,94%). Tingginya cakupan kepemilikan akta kelahiran ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas hukum anak semakin meningkat serta pelayanan pencatatan sipil berjalan dengan sangat baik di seluruh wilayah Kota Bima.

F. Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Sasaran Strategis III

NO	SASARAN	INDIKATOR	2025		
			Target	Realisasi	Capaian (5/4)*100
1	2	3	4	5	6
III	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	73.16%	60%	82.01%

Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2025

Sasaran Strategis III yaitu meningkatnya pemanfaatan data kependudukan yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam mendukung perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan di lingkungan pemerintah daerah. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir sangat penting sebagai dasar dalam menentukan sasaran program, perumusan kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini adalah persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan kebijakan OPD. Pemanfaatan data kependudukan tersebut dapat berupa penggunaan data kependudukan dalam penyusunan program dan kegiatan, perencanaan pembangunan daerah, maupun dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 73,16%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, realisasi yang dicapai adalah sebesar 60%. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini mencapai 82,01% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dalam mendukung penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan, namun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa perangkat daerah yang belum secara optimal memanfaatkan data kependudukan dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah antara lain masih terbatasnya pemahaman OPD terhadap

pentingnya pemanfaatan data kependudukan, belum optimalnya integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, serta masih terbatasnya kerja sama pemanfaatan data kependudukan secara formal melalui perjanjian kerja sama atau mekanisme berbagi pakai data.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan di masa yang akan datang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain meningkatkan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan kepada perangkat daerah, memperkuat kerja sama pemanfaatan data melalui perjanjian kerja sama (PKS), mengembangkan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data kependudukan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah.

TABEL PROSES ANALISIS PENGOLAHAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA TAHUN 2025

PENGOLAHAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Unit Layanan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Alamat : Jln.Soekarno Hatta No.2 Raba Kota Bima
Tlp./Fax : (0374) 6647474

NO	NAMA OPD YANG MENANDATANGANI PKS	OPD YANG MEMANFAATKAN DATA TAHUN 2024	OPD YANG MENDAPATKAN HAK AKSES PEMANFAATKAN DATA TAHUN 2025	KET
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Tenaga Kerja	
2	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Inspektorat	
3	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	
4	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Koperindag	
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Perumahan dan Pemukiman	
6	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Sosial	
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	DPMPTSP	
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Kelautan dan Perikanan	
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	
11	Dinas Statistik Daerah	Dinas Statistik Daerah		
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan		
15	Inspektorat	Inspektorat		

16	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja		
17	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
18	Dinas Pariwisata dan Olahraga	Dinas Pariwisata dan Olahraga		
19	BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan		
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
21	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan		
22	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman		
23	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politikk	Badan Kesatuan Bangsa dan Politikk		
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-		
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-		
27	Badan Riset dan Inovasi	-	-	
	27 OPD	24 OPD	10 OPD	
		Jumlah OPD yang memanfaatkan Data di bagi Jumlah yg menandatangani PKS X 100 =	Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Pemanfaatan Data di bagi Jumlah OPD (tagert 2024) X 100 =	
		22 : 24 x 100 = 91,66 %	10 : 15 x 100 = 66.66 %	

2. Perbandingan Realisasi dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Proses perbandingan pada reliasasi dan pencapain sasaran strategis sangat penting untuk di sajikan, bagi penentuan kebijakan pada setiap program–program yang akan direncanakan serta dapat mengukur seberapa besar dampak pada masing–masing program terhadap tatanan pelaksanaan peningkatkan pelayanan administrasi kependudukan menuju ketersedianya data kependudukan yang benar dan akuntabel serta fungsi dan pemanfaatanya, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.

Realisasi yang diraih pada kedua indikator tersebut adalah hasil kerja keras segenap aparatur yang berkaitan dengan pelayanan dokumen kependudukan serta dukungan pemerintah dan dukungan segenap masyarakat dalam mensukseskan pembangunan pemerintah dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan, serta tidak luput dari peranserta aparatur pengelola sistem administrasi keuangan yang semakin baik pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Berikut tabel perbandingan antara realisasi dan pencapain sasaran strategis tahun 2024 dan 2025 :

2.1. Perbandingan Realisasi dan Pencapain Sasaran Strategis Tahun 2024 dan 2025

NO	Indikator Kinerja Utama	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	3	4	5	6	7	8	9
I	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	90	90,95%	101%	91,95 (A)	89.68	97.53%
II	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96%	97,33%	101%	97,73 %	90.08 %	92%
III	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	96%	66.66%	69.43%	73.16%	60%	82.01%

Perbandingan realisasi dan pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dan tahun 2025 dilakukan untuk melihat perkembangan kinerja organisasi dari tahun ke tahun serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, capaian kinerja pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 menunjukkan target sebesar 90 dengan realisasi sebesar 90,95, sehingga capaian kinerja mencapai 101%. Sementara itu pada tahun 2025 target yang ditetapkan meningkat menjadi 91,95, dengan realisasi sebesar 89,68, sehingga capaian kinerja mencapai 97,53%. Meskipun capaian kinerja pada tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara umum nilai IKM masih berada pada kategori pelayanan yang baik dan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan tetap terjaga.

Pada indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 96% dengan realisasi sebesar 97,33%, sehingga capaian kinerja mencapai 101%. Sedangkan pada tahun 2025 target yang ditetapkan meningkat menjadi 97,73%, dengan realisasi sebesar 90,08% dan capaian kinerja sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan masih cukup tinggi, namun capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga perlu dilakukan berbagai upaya

peningkatan pelayanan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Selanjutnya pada indikator persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan kebijakan OPD, pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 96% dengan realisasi sebesar 66,66%, sehingga capaian kinerja mencapai 69,43%. Pada tahun 2025 target indikator tersebut ditetapkan sebesar 73,16% dengan realisasi sebesar 60%, sehingga capaian kinerja mencapai 82,01%. Meskipun realisasi pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah masih belum mencapai target yang ditetapkan, namun jika dilihat dari tingkat capaian kinerja menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara umum, perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sebagian indikator kinerja masih mampu dipertahankan pada tingkat yang baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan realisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta penguatan pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah agar capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih optimal.

3. Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

Perolehan kategori kinerja yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima. Meskipun demikian, capaian tersebut tidak menjadikan organisasi berpuas diri, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025–2026, berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan sistem pelayanan publik, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima diharapkan mampu mewujudkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, realisasi kinerja yang dicapai pada tahun berjalan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Adapun gambaran realisasi dan capaian kinerja terhadap target jangka menengah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. Realisasi Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah Lima Tahunan Pada Tahun 2021 sampai 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	Meningkatnya Kualiatas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	97,42%	91,13%	96%	98,63%	90,42	91,67%	99,72	88,79	89.03%	90	90,95%	101%	91,95	89.68	97.53%
II	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Presentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	89%	94%	105,62%	91%	110,12%	121%	95%	110,12%	121%	96%	97,33%	101%	97,73 %	90.08 %	92%
III	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Presentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan Dalam Perencanaan Kebijakan OPD	89%	91,66%	102,98%	91%	96,29%	105,81%	95%	96,29%	105,81%	96%	66.66%	69.43%	73.16%	60%	82.01%

Sumber : Hasil Analisis DUKCAPIL 2024

Realisasi capaian kinerja terhadap target jangka menengah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima selama periode lima tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Analisis ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja organisasi dari tahun ke tahun serta tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang telah direncanakan.

Berdasarkan tabel realisasi capaian kinerja terhadap target jangka menengah tahun 2021 sampai dengan 2025, secara umum capaian kinerja pada masing-masing indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun pada beberapa indikator masih terdapat fluktuasi antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang dicapai.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai ukuran dari meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan, capaian kinerja selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2021 capaian kinerja mencapai 96%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 91,67%, dan pada tahun 2023 sebesar 89,03%. Selanjutnya pada tahun 2024 capaian kinerja meningkat hingga 101%, sedangkan pada tahun 2025 capaian kinerja tercatat sebesar 97,53%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan kepada masyarakat tetap terjaga dengan baik dan berada pada kategori pelayanan yang memuaskan.

Pada indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, capaian kinerja selama periode lima tahun menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2021 capaian kinerja mencapai 105,62%, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 121%. Pada tahun 2024 capaian kinerja berada pada angka 101%, sedangkan pada tahun 2025 mencapai 92%. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2025, namun secara umum tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan oleh masyarakat masih berada pada tingkat yang cukup tinggi.

Selanjutnya pada indikator persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan dalam perencanaan kebijakan OPD, capaian kinerja pada tahun 2021 mencapai 102,98%, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 105,81%. Namun pada tahun 2024 capaian kinerja mengalami penurunan menjadi 69,43%, dan pada tahun 2025 meningkat kembali menjadi 82,01%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, tertib administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan, penguatan integrasi data kependudukan, serta peningkatan kerja sama pemanfaatan data dengan perangkat daerah guna mencapai target kinerja yang lebih optimal.

3.1. Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan (Eselon III dan Eselon IV)

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis dengan baik selama Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program atau kegiatan utama yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dijabarkan ke dalam 19 (Sembilan belas) kegiatan pokok, berikut tabel Realisasi Capian Kinerja Program dan Kegiatan yang mengukur kinerja individu untuk Eselon III dan IV

Program/Kegiatan Utama Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk yang telah memiliki KTP-El	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	5.000 Dokumen	4.026 Dok KK 10.092 Dok KTP	21.610.900	100.00	21.610.900
		Cakupan kepemilikan KIA		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dok atas pendaftaran penduduk berupa KIA	10.000 Keping	8.704 Dok (Keping)	4.914.000	100.00	4.914.000
		Rasio penduduk usia 17 thn dan masyarakat berkebutuhan khusus yang belum berKTP-el		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan (KTP-EL yang tercetak) untuk masyarakat usia 17 thn	2.000 keping KTP-el	20.725 dok	7.249.000	99.94	7.249.000
					Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan (KTP-EL yang tercetak)	1333 keping KTP-El	501 dok			

					berkebutuhan khusus					
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	10.000 kpg KIA	8.995 kpg KIA	113.696.000	100	113.696.000
						6 Film KTP Buah	6 Film KTP Buah			
						21 Buah Ribbon KTP	21 Buah Ribbon KTP			
						13 Buah Ribbon KIA	13 Buah Ribbon KIA			
	Program Pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Pelayanan Pendaftaran Pencatatan sipil	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	4.529 Dok Akta	4.529 Dok Akta	26.371.900	99.78	26.371.900
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dok hasil pencatatan,penatausahaan dan penerbitan dok atas pelaporan peristiwa penting	1.781 lbr Akta (dok)	1.781 Dok Akta	1.452.000	100.00	1.452.000
				Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen hasil pengumpulan Analiss dan diseminasi data pencatatan Sipil(Jumlah Akta Kelahiran)yang Di BAKAK kan	1.100 lbr Akta	1.000 lbr Akta	1.798.000	100.00	1.798.000
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam	5 Laporan	5 laporan	3.324.000	100.00	3.324.000

				penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Penertiban Pelayanan					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Survei Kepusan Masyarakat	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	1 Laporan	1 lap dari 5 kec	2.056.000	100.00	2.056.000
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan		Persentase data dan informasi yang mutahir/update		Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dok penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	12 Dokumen	3 Dokumen Hak Akses	4.152.000	99.07	4.152.000
				Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan SDM tambahan dalam rangka memfasilitasi terkait pengelolaan PIAK	32 Orang x 12 Bulan	32 Orang x 12 Bulan	31.140.000	99.26	31.140.000
					Jumlah Laporan alat dan peralatan yang dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Dokumen	1Dokumen			
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dok data kependudukan yang diolah dan disajikan	14 Dokumen	14 Dokumen	4.252.000	99.99	4.252.000
				Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Kerjasama pemanfaatan data kependudukan (Hak Akses)	13 Dokumen	13 Dokumen	3.531.000	100	3.531.000

			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peny. Tata cara perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah 'Peny. Tata cara perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (Laporan mengenai standarisasi palayanan Publik Duk Capil)	2 Dokumen (SOP dan Standar Pelayanan)	2 Dokumen (SOP dan Standar Pelayanan)	8.697.000	100.00	8.697.000
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Adm Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Adm Kependudukan	Jumlah Lap Hasil Pembinaan dan Pengawasan PIAK	4 Dok (Monitoring, IKM, SIPP, dan Ombusmen)	4 Dok (Monitoring, IKM, SIPP, dan Ombusmen)	3.669.000	100.00	3.669.000
	Program Pengelolaan Profile Kependudukan	Dokumen profil kependudukan dan Agregat kota bima	Penyusunan Profil Kependudukan	Proyeksi Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Keb yang lain	Jumlah dokumen profil kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	4.013.600	100.00	4.017.100
				Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota (Dokumen Agregat Kota Bima)	2 Dokumen	2 Dokumen	2.903.000	100.00	2.903.000

Tabel : Yang membandingkan Capaian Tahun 2024 dan Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Indikator	Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	SubKegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2024					Capaian 2025				
						Target	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Jumlah Anggaran (Rp)	Target	Realisasi	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)	Jumlah Anggaran (Rp)
Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Penduduk yang telah memiliki KTP-El	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	5.000 Dok	16.000 Dok KK 17.072 Dok KTP	24,649,200	100	24,899,200	5.000 Dok	4.026 Dok KK 10.092 Dok KTP	21.610.900	100	21.610.900
		Cakupan kepemilikan KIA		Pencatatan Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dok atas pendaftaran penduduk berupa KIA	10.000 Keping	8.995 Dok (Keping)	14,489,800	100	14,489,800	10.000 Keping	8.704 Dok (Keping)	4.914.000	100	4.914.000
		Rasio penduduk usia 17 thn dan masyarakat berkebutuhan khusus yang belum berKTP-el		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan adm KTministrasi kependudukan (KTP-EL yang tercetak) untuk masyarakat usia 17 thn	2.000 keping KTP-el	1.277 dok	24,899,200	99.94	24,649,200	2.000 keping KTP-el	20.725 dok	7.249.000	99.94	7.249.000

					Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan (KTP-EL yang tercetak) berkebutuhan khusus	1.333 keping KTP-El	56 dok				1.333 keping KTP-El	501 dok			
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang	10.000 kpg KIA	8.995 kpg KIA	192,306,900	100,00	192,306,900	10.000 kpg KIA	10.000 kpg KIA	113.696.000	100	113.696.000
						6 Film KTP Buah	6 Film KTP Buah				6 Film KTP Buah	6 Film KTP Buah			
						21 Buah Ribbon KTP	21 Buah Ribbon KTP				21 Buah Ribbon KTP	21 Buah Ribbon KTP			
	Program Pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	Pelayanan Pendaftaran Pencatatan sipil	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan Melalui Kerja sama dengan Bidan	1.000 dok Akta melalui Bidan	1.050 Dok Akta Kelahiran	52,957,100	100,00	52,957,100	4.529 Dok Akta	4.529 Dok Akta	26.371.900	99.78	26.371.900
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan Melalui Pelayanan Umum	3.000 dok playanan reguler	2.700 Dok Kelahiran								

				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa penting	Jumlah Dok hasil pencatatan,penatausahaan dan penerbitan dok atas pelaporan peristiwa penting	840 lbr Akta (dok)	385 Dok Akta	20,000,000	100	20,000,000	1.781 lbr Akta (dok)	1.781 Dok Akta	1.452.000	100	1.452.000
				Pengumpulan, analisa dan desiminasi data pencatatan sipil	Jumlah Dokumen hasil pengumpulan Analiss dan diseminasi data pencatatan Sipil(Jumlah Akta Kelahiran)yang Di BAKAK kan	1.000 lbr Akta	1.000 lbr Akta	14,043,700	100	14,043,700	1.100 lbr Akta	1.000 lbr Akta	1.798.000	100	1.798.000
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan	5 Laporan	5 laporan	17,200,900	100	19,256,000	5 Laporan	5 laporan	3.324.000	100	3.324.000
				Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	5 Lap	5 lap dari 5 kec	15,037,300	99.53	15,108,300	5 Lap				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah Survei Kepusan Masyarakat	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Komunikasi informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Jumlah dokumen (pengaduan) hasil komunikasi,informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	22 Dok (pengaduan)	11 Dokumen Pengaduan	3,250,000	100	3,250,000	22 Dok (pengaduan)				

Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan		Persentase data dan informasi yang mutahir/update		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	5 Laporan	5 lap dari 5 kec	3,898,000	100	3,898,000	1 Laporan	1 lap dari 5 kec	2.056.000	100	2.056.000
				Penyelenggaraan Pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dok penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen Hak Akses	10,230,000	99.07	10,326,000	12 Dokumen	3 Dokumen Hak Akses	4.152.000	99.07	4.152.000
				Fasilitasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan SDM tambahan dalam rangka memfasilitasi terkait pengelolaan PIAK	32 Orang x 12 Bulan	32 Orang x 12 Bulan	307,766,000	99.26	300,466,000	32 Orang x 12 Bulan	32 Orang x 12 Bulan	31.140.000	99.26	31.140.000
					Jumlah Laporan alat dan peralatan yang dalam kondisi baik dan siap pakai	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1Dokumen			
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dok data kependudukan yang diolah dan disajikan	12 Dokumen	12 Dokumen	7,242,000	99.99	7,242,000	14 Dokumen	14 Dokumen	4.252.000	99.99	4.252.000

			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peny. Tata cara perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah 'Peny. Tata cara perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan (Laporan mengenai standarisasi palayanan Publik Duk Capil)	2 Dok (SOP dan Standar Pelayanan)	2 Dokumen (SOP dan Standar Pelayanan)	6,382,000	100	6,382,000	2 Dokumen (SOP dan Standar Pelayanan)	2 Dokumen (SOP dan Standar Pelayanan)	8.697.000	100	8.697.000
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Adm Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Adm Kependudukan	Jumlah Lap Hasil Pembinaan dan Pengawasan PIAK	4 Dok Monitoring, IKM, SIPP, dan Ombusmen	4 Dok Monitoring, IKM, SIPP,dan Ombusmen	15,724,400	100	15,724,400	4 Dok (Monitoring, IKM, SIPP, dan Ombusmen)	4 Dok (Monitoring, IKM, SIPP, dan Ombusmen)	3.669.000	100	3.669.000
	Program Pengelolaan Profile Kependudukan	Dokumen profil kependudukan dan Agregat kota bima	Penyusunan Profil Kependudukan	Proyeksi Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Keb yang lain	Jumlah dokumen profil kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	8,286,000	100	8,286,000	1 Dokumen	1 Dokumen	4.013.600	100	4.017.100

				Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Kab/Kota (Dokumen Agregat Kota Bima)	2 Dokumen	2 Dokumen	7,569,000	100	7,569,000	2 Dokumen	2 Dokumen	2.903.000	100	2.903.000

Jika membandingkan Capaian program Tahun 2024 dengan capaian program Tahun 2023, beberapa indikator menunjukan kerja yang baik/berhasil seperti:

1. Rasio penduduk yang memiliki KTP-el

   Rasio penerbitan KTP-el dapat diperhitungkan berdasarkan prosentase jumlah dokumen KTP-el yang telah diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 dibagi dengan jumlah wajib KTP-el pada tahun 2024, dimana jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP-el sebesar 109.573 orang, jumlah KTP-el yang tercetak 120.661 keping atau sebesar 110,11%. Dimana telah tercetak sebanyak 17.072 keping KTP selama tahun 2024. Terdapat kenaikan dibandingkan dengan penerbitan KTP ditahun 2021 sebanyak 15.362 keping, Sehingga terdapat kenaikan sebesar 20 %.

2. Cakupan Kepemilikan KIA.

   Kegiatan ini pada Tahun 2024 dan 2023 bisa dikatakan indikator kinerjanya sangat baik/ berhasil, dikarenakan oleh beberapa hal :

   a. Pada Tahun 2023 telah ditarget 10.000 keping KIA, Dimana telah tercapai pencetakan KIA sebesar 8.995 kepeing KIA dengan pencapaian target KIA 89,95%.
   b. Telah dianggarakan biaya sosialisasi terhadap kegiatan ini, sehingga masyarakat luas telah mendapatkan informasi tentang penting dan manfaat atas kepemilikan KIA bagi anak-anak.

   Pada tahun 2024 tercetak sebanyak 28.020 keping KIA, terdapat peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercetak sebanyak 8.995 keping. Atau terdapat kenaikan sebesar 300%.

3. Rasio Penduduk usia 17 tahun dan masyarakat berkebutuhan khusus yang belum berKTP-EL.

   Terdapat dua sub indikator untuk mengukur indikator Program ini

   a. Pendataan penduduk rentan Non permanen.

      Pada tahun 2024 tercetak 1.277 Keping KTP EL dari target yang 2000 keping. Terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercetak 1.076 keping KTP EL, atau sebesar 33%.

   b. Pendataan penduduk rentan yang berkebutuhan khusus.

Pada tahun 2024 tercetak 56 Keping KTP EL untuk berkebutuhan khusus dari target 1.333. Terdapat penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercetak 1.500 keping KTP EL, atau sebesar 68.31% penurunan.

4. Cakupan kepemilikan Akta kelahiran 0-18 tahun.

   Pada kegiatan ini melampaui target nasional yang sudah mencapai lebih dari 100% dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

   a. Adanya kemudahan regulasi dan SOP terhadap persyaratan pengurusan akte kelahiran bagi yang tidak memiliki keterangan lahir dari bidan/dokter/rumah sakit berapa SPTJM kelahiran.
   b. Adanya persyaratan pengguna prodak seperti sekolah-sekolah yng mensyaratkan akta kelahiran untuk pendaftaran masuk sekolah , sehingga memicu peningkatan capaian indikator kegiatan tersebut.
   c. Adanya kerjasama dengan bidan-bidan dikelurahan untuk pengurusan akta kelahiran dengan nama inovasi kegiatan warda warta wara bidan wara akta.bidan-bidan mendapatkan insentif dari kerja sama tersebut hingga mendorong capaian yang signifikan.
   d. Adanya pelayanan langsung di Rumas Sakit Umum , Puskesmas, Pustu (begitu lahir langsung bawa akte).

   Pada tahun 2024 tercetak 5.158 Akta Kelahiran melalui kerja sama dengan bidan. Terdapat peningkatan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya tercetak 1.050 Akta kelahiran melalui kerja sama serupa, atau sebesar 8,9%.

5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Pada tahun 2024 Nilai IKM yang diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima adalah 90,95. terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mana nilai IKM nya sebesar 88.79. Atau sebesar, 2,64.

6. Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

   Di tahun 2024 ditetapkan target OPD yang mendapatkan Hak Akses sebanyak 15 OPD hanya mampu mencapai 10 OPD yang mendapatkan hak akses atau sebesar 66.66% dari target 96%.

Dari analisa target dan capaian indikator kegiatan diatas dapat kami tarik kesimpulan bahwa capaian setiap indikator kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024 mampu menterjemahkan Visi, Misi Walikota dalam bentuk program dan kegiatan yang berhasil dilaksanakan dengan baik.

Ini menunjukkaan bahwa komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima mampu mewujudkan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bima untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Indikator program yang menunjukkan kinerja kurang baik adalah indikator cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), dengan capaian yang di dapat jauh dari target yang telah di tetapkan baik pada tahun 2024 dan 2023.

Indikator ini tidak tercapai atau bekerja buruk dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Pada tahun anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA ada belanja barang berupa pengadaan blangko KIA yang sebelumnya masih melalui Kemendagri lewat Dirjen Dukcapil, sehingga membutuhkan waktu yang lama sampai blangko KIA itu dapat digunakan.
b. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) juga yang masih terbatas yaitu alat printer (1 buah), tinta dan alat scanner yang dapat di oprasionalkan.
c. Masih perlunya penambahan anggaran dalam mendukung kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat yang kurang mendapatkan informasi terkait dengan pentingnya kepemilikan (Kartu Identitas Anak) KIA, dapat di tuntaskan.

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan

Adapun keberhasilan dari pelayanan prima tersebut tidak menutup kemungkinan adanya hambatan atau kendala. Untuk mewujudkan pelayanan prima tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melakukan Analisis yang menggunakan faktor lingkungan untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai sasaran atau tujuan yang

diinginkan atau diharapkan, beriku tbeberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian target indikator kinerja Tahun 2024, diantaranya :

Faktor–faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain :

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan.
   - Adanya Penduduk Kota Bima.
   - Adanya Data Kependudukan.
   - Adanya Sistem Pengolahan Data.
   - Adanya Teknologi Informasi.
   - Adanya sumber daya Aparatur.
   - Adanya Budaya Khas Bima.

   b. Kelemahan
   - Data Base Kependudukan masih ditemukan data ganda.
   - Belum optimalnya Sosialisasi kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA).
   - Belum memadainya kesejahteraan petugas pelayanan kependudukan.
2. Faktor Eksternal
   a. Peluang
   - Administrasi Kependudukan yang tertib.
   - Database Kependudukan yang valid.
   - Pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.
   - Tertibnya dokumen kependudukan yang akurat.
   - Terlaksananya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

   b. Ancaman
   - Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
   - Adanya pemalsuan data dokumen kependudukan
   - Pungutan liar dalam proses pelayanan kependudukan
   - Penyalahgunaan hak akses data kependudukan.
   - Merosotnya budaya tertib dalam antrean pelayanan.
   - Apatisnya penduduk dalam memenuhi persyaratan administrasi kependudukan.

C. Akuntabilitas Keuangan

- ***Target dan Realisasi Belanja***

Selama Tahun Anggaran 2025, kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5,660,564,716,- dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 5,072,152,296,- atau sebesar 90%,

Anggaran Tahun 2025 ini terdiri dari belanja operasi dan belanja langsung modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp. 5,451,729,716.- mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 4,864,675,726.- atau sebesar 89%. Adapun terkait belanja modal dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 208,835,000,- telah mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 207,476,570,- atau sebesar 99%.

Dengan demikian, presentase realisasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima terdiri dari 96.60% belanja operasi dan 98.02% belanja modal. Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Rekapitulasi Belanja Dukcapil Tahun Anggaran 2025

No	No	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Operasi	5,451,729,716.00	4,864,675,726.00	89%
2	Belanja Modal	208,835,000.00	207,476,570.00	99%
Jumlah		5,660,564,716.00	5,072,152,296.00	90%

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2025

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan

perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

- ***Pengukuran Kinerja Keuangan***

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima melaksanakan 4 (empat) Program Utama dan 18 (Delapan belas) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis DUKCAPIL Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan Utama	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Rasio Penduduk yang telah memiliki Kartu Keluarga (KK) Cakupan Kepemilikan KIA Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0-17 Tahun	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7,249,000	7,249,000	100%
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	4,914,000	4,914,000	100%
		Rasio Kepemilikan Akte Perkawinan	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21,610,900	21,609,900	100%

			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	113,696,000	113,696,000	100%
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1,452,000	1,452,000	100%
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1,798,000	1,798,000	100%
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3,324,000	3,323,900	100%
2	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatan Sipil	Rasio Penduduk yang telah memiliki KTP-el	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4,252,000	4,252,000	100%
			Kerjasama pemanfaatan data kpendudukan	3,531,000	3,531,000	100%
			Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8,697,000	8,696,800	100%

			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	31,140,000	31,139,800	100%
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4,152,000	4,152,000	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan	Prsentase Data dan informasi yang mutahir up date	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2,056,000	2,055,900	100%
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4,215,000	4,215,000	100%
			Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,669,000	3,669,000	100%
			Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3,626,000	3,625,800	100%
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	2,903,000	2,902,800	100%
Jumlah				222,284,900	222,282,900	100%

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pelaksanaan program / kegiatan utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Rp. 222,284,900,- dan berhasil merealisasikan sebesar Rp. 222,282,900,- atau **100%.** Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Bima,juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin yang mendukung kinerja aparatur sebagaimana tersaji pada tabel berikut

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Kegiatan Rutin	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,109,000	1,109,000	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,856,000	1,856,000	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	909,000	909,000	100%
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,638,800	1,638,800	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1,085,700	1,085,700	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,889,000	1,889,000	100%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,040,000	2,040,000	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan	4,169,492,410	3,585,585,014	86%
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119,975,000	119,975,000	100%

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	88,541,300	88,541,300	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,816,000	2,816,000	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2,665,000	2,664,800	100%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,937,000	9,936,900	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10,965,620	10,965,600	100%
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,970,200	21,970,200	100%
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124,066,542	124,065,340	100%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,750,000	1,750,000	100%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127,171,344	127,169,609	100%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218,300,000	215,625,000	99%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81,455,000	80,988,663	99%

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23,440,000	23,440,000	100%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190000000	190000000	100%
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	7,249,000	7,249,000	100%
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	4,914,000	4,914,000	100%
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21,610,900	21,609,900	100%
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	113,696,000	113,696,000	100%
3	**Program Pencatatan Sipil**	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	1,452,000	1,452,000	100%
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	26,371,900	26,371,900	100%
			Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	1,798,000	1,798,000	100%

		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3,324,000	3,323,900	100%
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	4252000	4252000	100%
			Kerjasama pemanfaatan data kpendudukan	3531000	3531000	100%
		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	8697000	8696800	100%
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	31140000	31139800	100%
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4152000	4152000	100%
			Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2056000	2055900	100%
			Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	4215000	4215000	100%

		Pembinaan dan Pengawasan Penggelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3669000	3669000	100%
5	**Program Pengelolaan Profil Kependudukan**	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3626000	3625800	100%
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	2903000	2902800	100%
Jumlah				248,656,800	248,654,800	100%

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima bertugas untuk mendorong percepatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagai identifikasi awal, rendahnya kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengindikasikan adanya permasalahan baik dari sisi teknis maupun regulasi.

Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga dapat diketahui permasalahannya serta sekaligus mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi. Untuk memberikan pedoman dan standarisasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, ada beberapa upaya untuk mengatasi kendala penyerapan anggaran, diantaranya melaksanakan :

1. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan suatu kegiatan atau mendeteksi kelayakan dari suatu kegiatan;
2. Evaluasi formatif, yaitu penilaian terhadap hasi-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan dilaksanakan secara rutin (per bulan, triwulan, semester atau tahunan)sesuai dengan kebutuhan informasi hasil penilaian.

3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir kegiatan sesuai dengan jangka waktu kegiatan dilaksanakan.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang memiliki jangka waktu enam bulan, maka evaluasi sumatif dilaksanakan menjelang akhir bulan keenam. Untuk evaluasi yang menilai dampak suatu kegiatan, dapat dilaksanakan setelah kegiatan tersebut berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2025 memiliki nilai strategis karena penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama pada Tahun 2025 merupakan tahun ketiga implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024-2026.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama Tahun 2025.

Terhadap 3 (tiga) Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Tahun 2025 semuanya telah direalisasikan dengan baik. Kategori Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 51% sampai1 101% , ,sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabiilitas Keuangan) sebesar 96,62%. Rata-rata capaian sasaran strategis adalah sebesar 84,33% yang terukur melalui 6 (enam) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun 2024 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik.

B. Rekomendasi Langkah Perbaikan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkrit untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui program dan kegiatan secara konsisten

dan optimal. Dengan demikian, LAKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses pelayanan publik yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.

2. Optimalisasi sistem pelayanan publik dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas pelayanan publik.

3. Mengembangkan fungsional pelayanan publik yang telah dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional pelayanan publik yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Bima menjadi institusi pelayanan publik yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelayanan publik melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.

4. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*) serta menyiapkan sarana dan prasarana yang cukup dalam menunjang pelaksanaan pelayanan yang prima.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari semua pihak.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ANGGARAN TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur Renstra dan Renja SKPD mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / kebijakan pada tahun berjalan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dimasa mendatang.

Raba – Bima, Pebruari 2026
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bima,



Syahrial Nuryadin, S. IP,. MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19871226 200701 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHALUAN..... 1

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima..... 1

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan 2

1.3 Dasar Hukum..... 2

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi..... 4

1.5 Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima..... 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 13

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029..... 13

2.2 Penjelasan IKU 16

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

3.1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima..... 19

A. Membandingkan Antara Target Dan Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2025..... 20

B. Membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025..... 40

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah Yang Direncanakan..... 47

3.2 Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif-Solusi yang Telah dan Akan dilakukan..... 49

3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 51

3.4 Analisis Program atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja..... 52

3.5 Realisasi Anggaran..... 56

BAB IV **PENUTUP..... 65**

4.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis..... 65

4.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran..... 66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai DLH Kota Bima Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai DLH Kota Bima Menurut Tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 1.3	Kondisi Pegawai DLH Kota Bima Berdasarkan Jabatan Struktural, Golongan dan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 1.4	Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup 2025.....	10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel 2.2	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025.....	17
Tabel 2.4	Program dan Rencana Anggaran Tahun 2025.....	17
Tabel 3.1	Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	21
Tabel 3.2	Kategori IKLH.....	21
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	22
Tabel 3.4	Pencapaian Program dan Kegiatan 2025.....	23
Tabel 3.5	Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	31
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan 2024 dan 2025.....	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2024 dan 2025.....	41

Tabel 3.8 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Bima (musim kemarau dan musim penghujan)..... 42

Tabel 3.9 Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air..... 43

Tabel 3.10 Formulasi Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air..... 44

Tabel 3.11 Rekap Luas RTH di Kota Bima Tahun 2025..... 45

Tabel 3.12 Pencapaian Target Program dan Kegiatan DLH Kota Bima Tahun 2024 dan Tahun 2025..... 45

Tabel 3.13 Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 dan 2025..... 47

Tabel 3.14 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun Berjalan Terhadap Target RPJMD Tahun 2025-2029..... 48

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 51

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan OPD..... 56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintahn sebagai prasyarat untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini perlu setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan mengatur sumber daya yang ada dengan berpedoman pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi dalam bentuk pelaporan kinerja.

Penyusunan pelaporan kinerja merupakan amanat dari peraturan presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pejabat Eselon II yang menangani lingkungan hidup Pemerintah Kota Bima diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam rangka mempertanggung jawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang lingkungan sebagai instruksi dari Gubernur .

Untuk itu Dinas Lingkungpan Hidup Kota Bima, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025, yang disusun berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Periode Tahun 2025 –

2026. Dokumen LAKIP ini disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Maksud dan tujuan disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah:

A. Maksud

1. Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang berpedoman pada tertib administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahunan yang dilaksanakan telah sesuai visi, misi, tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

B. Tujuan

Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah di capai, juga sebagai bahan pertimbangan dan atau acuan penyempurnaan kebijakan dan strategi indikaotor sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun berikutnya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (good governance) dan tetap mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

   Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilita

   Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

   Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabitas Kinerja Intansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima tahun 2025.

1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.4.1. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima mempunyai struktur organisasi sesuai dengan Surat Keputusan WaliKota Bima Nomor 14 Tahun 2009 adalah Susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.

    Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian.
c. Bidang Tata Lingkungan, yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
    1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
    2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

    Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3), yang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan terdiri dari :
    1. Seksi Sarana Persampahan;
    2. Seksi Pelayanan Persampahan dan Limbah B3;

3. Seksi Pengembangan Tekhnologi dan Kemitraan Pengurangan Sampah.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

f. Bidang Pertamanan dan Pertamanan, yang dipimpin oleh seorang kepalabidang dan terdiri dari :

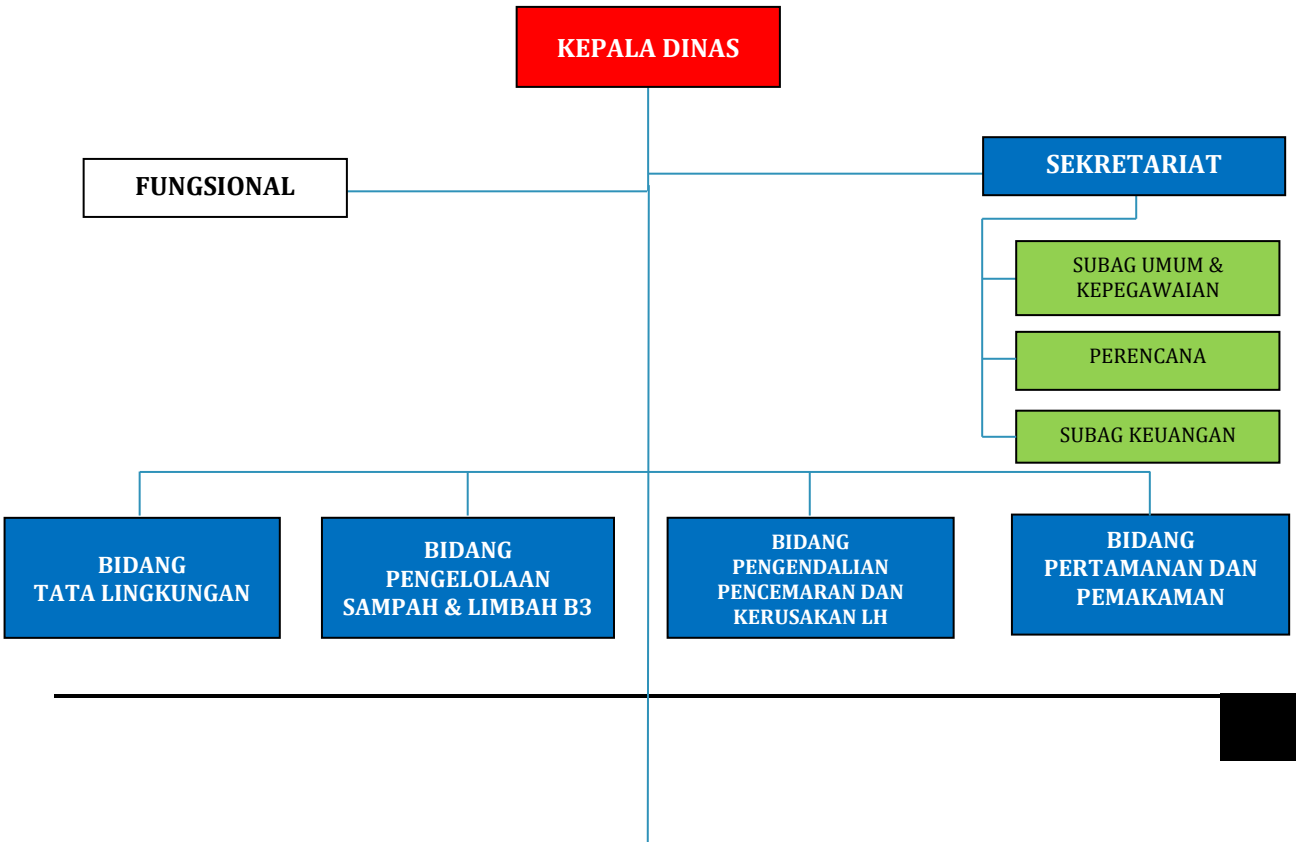
1. Seksi Pemeliharaan Operasional Pertamanan;
2. Seksi Pelayanan Pemakaman;
3. Seksi Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang kepala Seksi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil-personil dengan keahlian khusus antara lain Pejabat Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan dan dan Pejabat Pengawas Lingkungan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:





Kepala Dinas Melaksanakan Fungsi

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Sumber Daya OPD

1. Kepegawaian

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima memiliki 122 orang pegawai (PNS) dengan rincian 113 orang pegawai laki-laki dan 9 orang pegawai perempuan. Berdasarkan pangkat dan golongan, pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berpangkat mulai dari yang tertinggi Pembina Utama Muda (Golongan IV/c)dan terendah Juru Muda Tk. I (Golongan I/b), dan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai DLH Kota Bima berpendidikan terakhir tertinggi S2 dan terendah SD/Paket A

Tabel 1.1.

Jumlah pegawai DLH Kota Bima
Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan/Ruang

NO	KEPANGKATAN GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PERSONIL
	Pembina Utama Muda – IV/c	1 Orang
2.	Pembina Tingkat I – IV/b	1 Orang
3.	Pembina – IV/a	9 Orang
4.	Penata Tingkat I – III/d	14 Orang
5.	Penata – III/c	5 Orang
6.	Penata Muda Tingkat I – III/b	9 Orang
7.	Penata Muda – III/a	11 Orang
8.	Pengatur Tingkat I – II/d	18 Orang
9.	Pengatur – II/c	13 Orang
10.	Pengatur Muda Tingkat I – II/b	16 Orang
11.	Pengatur Muda – II/a	2 Orang

12.	Juru Tingkat I – I/d	20 orang
13.	Juru – I/c	2 Orang
14.	Juru Muda Tingkat I – I/b	3 Orang
	Jumlah	122 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagai beri

Tabel 1.2.
Jumlah pegawai DLH Kota Bima
MenurutTingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S-2)	8 Orang
2.	Pendidikan Sarjana (S-1)	35 Orang
3.	Pendidikan Sarjana Muda (D-3)	0 Orang
4.	Pendidikan SLTA/Paket C	47 Orang
5.	Pendidikan SLTP/Paket B	16 Orang
6.	Pendidikan SD/Paket A	16 Orang
	Jumlah	122 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

Berdasarkan kualifikasi pendidikan tersebut, pegawai yang menduduki jabatan stuktural rata-rata memiliki pendidikan S-1 sampai S-2. Adapun jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural (ecelonering) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan, tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Kondisi Pegawai DLH Kota Bima
Berdasarkan Jabatan Struktural, Golongan dan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN STRUKTURAL	GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN					
		IV	III	II	I	Non Gol.	SD	SMP	SMA	D-3	S1	S2
1.	Ecelon II	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	Ecelon III	4	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1
3.	Ecelon IV	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4.	Staf	0	26	58	25	0	17	18	49	0	25	0
5.	Fungsional	5	8	0	0	0	0	0	0	0	8	5
	Jumlah	9	40	58	25	0	17	18	49	0	38	7

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH Kota Bima

2. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima belum memiliki gedung kantor sendiri, untuk sementara masih menempati Gedung Workshop Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang terletak di Jalan Dam Rontu Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima.

b. Peralatan Kantor

Peralatan mebeleur yang di miliki DLH Kota Bima belum cukup memadai untuk menunjang pelayanan dan operasional, DLH Kota Bima masih membutuhkan tambahan meubeleur seperti kursi dan meja kerja, lemari arsip dan lemari untuk menyimpan barang aset lainnya yang masih dipergunakan. Jumlah komputer sebanyak 4 unit, jumah laptop sebanyak 11 unit (2 Unit rusak berat dan 8

unit dalam kondisi masih bisa dipergunakan dengan baik), jumlah LCD sebanyak 1 unit dalam kondisi baik, dan jumlah AC sebanyak 5 unit dalam kondisi baik.

c. Kendaraan

Pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima memiliki 34 unit kendaraan roda enam yang terdiri dari 24 unit dump truck, 5 unit ambroll, 3 unit mobil tangki air, I unit mobil kompaktor dan 1 unit mobil sedot lumpur (rusak berat). Kemudian terdapat 8 Unit kendaraan roda 4 yang terdiri dari 1 unit mini bus, 1 unit mobil Laboratorium dan 6 unit pick up (1 unit dalam kondisi rusak berat). Selanjutnya terdapat 20 unit motor 3 Roda serta 9 unit kendaraan roda dua (sepeda motor). Dan juga terdapat 4 unit alat berat berupa 2 unit excavator dan 2 unit mini loader. Jenis dan jumlah kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tersaji dalam table tersebut di bawah ini :

Tabel. 1. 4.
Jumlah Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup 2025

No	JENIS SARANA /	JUMLAH	KET
A	**Kendaraan Operasional**		
1	Dump Truk	27 Unit	1 Pinjam Pakai ke UPT Pasar
2	Ambrol Truck	5 Unit	
3	Mobil Tanki Air	3 Unit	
4	Mobil Pick Up	6 Unit	1 Rusak
5	Mobil Penyedot Lumpur	1 Unit	Rusak Penyedot Lumpur
6	Mobil Compactor	1 Unit	
7	Mobil Laboratorium	1 Unit	
8	Excavator	2 Unit	
9	Mini Lodge	2 Unit	
10	Sedan Minibus	1 Unit	

11	Motor Roda 3	20 Unit	
12	Motor Roda 2	9 Unit	
B	**Peralatan**		
1	Mesin Pemotong Romput Gendong	12 Unit	
2	Mesin Pemotong Rumput Dorong	3 Unit	
3	Gergaji Mesin	1 Unit	Rusak
4	Container	45 Buah	4 Rusak Berat

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima masih membutuhkan jumlah kendaraan yang cukup dan layak jalan untuk melakukan kegiatan operasional lainnya seperti untuk pengangkutan sampah, pemantauan kualitas lingkungan, koordinasi ke kecamatan dan kelurahan, pengawasan lingkungan maupun pembinaan ke kecamatan/kelurahan.

1.5. Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Secara administrasi, Kota Bima berada di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi $118^0$41’00”- $118^0$48’00” Bujur Timur dan $8^0$20’00”- $8^0$30’00” Lintang Selatan. Tingkat curah hujan rata-rata 132, 58 mm dengan Hari hujan rata-rata 10.08 hari/bulan. Sementara matahari bersinar terik dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 21^0 C sampai 38^0C. Hal ini menyebabkan Kota Bima Salah satu kota terpanas di indonesia pada. Karena luasan Kota Bima terbatas akan berakibat menahan pertumbuhan tidak berimbang dan penggunaan lahan yang tidak beraturan. Wilayah timur relatif belum berimbang dengan wilayah barat, karena penduduk umumnya masih di pusat kota. Luas lahan terbangun dalam bentuk pertumbuhan permukiman baru di Kota

Bima semakin meningkat dan mengurangi luasan sawah dan ruang terbuka hijau. Suhu udara umumnya meningkat dan kualitasnya menurun.

Ketersedian dan kualitas air tanah menurun, termasuk ketersediaan air bersih. Bahkan di beberapa wilayah pengembangan, kualitas air menurun/sedikit. Namun karena desakan kebutuhan, pada lokasi-lokasi tersebut tetap dibangun permukiman. Pertumbuhan permukiman dan menurunnya luasan daerah terbuka yang tidak di dukung drainase sering menyebabkan banjir atau genangan di berbagai wilayah. Banjir atau genangan ini bahkan terjadi daerah-daerah utama dan merusak berbagai sarana jalan. Sungai yang ada di Kota Bima juga banyak yang tercemar, dengan indikator belum memenuhi baku mutu parameter COD dan BOD serta menjadi pembuangan sampah. Permasalahan fisik alam yang penting untuk diperhatikan juga adalah Kota Bima termasuk daerah rawan bencana alam. Dampak regional adalah penurunan kualitas lingkungan regional akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya berdampak pada kondisi Kota Bima seperti kondisi sungai, lahan kritis, air, udara dan tanah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025 – 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan 5 (Lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas daerah.

Dari Tujuan dan Sasaran Pembanguna tersebut di atas, dinas lingkungan hidup mengacu pada Indekator Sasaran yaitu Mewujudkan Ideks Kualitas Lingkungan Hidup, melalui meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi, meningkatnya indeks Kualitas Air danMeningkatnya Indeks Kualitas Udara serta Peningkatan Pengelolaan Sampah. Selanjutnya dari sasaran tersebut kemudian di elaborasi dengan kebijakan dan program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam rangka mendukung meningkatnya indeks kualitas Lingkungan Hidup.

Berikut tujuan, sasaran, indicator dan target kinerja 5 (Lima) tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Kinerja pada Periode (2024/2025)	Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkanya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	61,83	Meningkatnya Indeks Kualitas air	Indeks Kualitas Air	69,58	41,43	70,00	70,50	71,00	71,50	71,50
			Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	82,41	94	83,50	84,00	85,00	85,50	86,00
			Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Vegatasi	Indeks Kualtas Tutupan Lahan	65,37	52	55	57	60	64	64
			Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	6,93	8,54	11,58	14,57	17,59	220,60	23,62

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komperensif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Penyusunan strategi tersebut didasarkan dengan kondisi internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan, sedangkan dari sisi eksternal terkait peluang dan tantangan. Tabel berikut di bawah ini merupakan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tabel 2.2
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Kebijakan	Strategi
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	- Meningkatkan jumlah sarpras dan SDMpengelolaan sampah - Merangsang pertumbuhan Bank Sampah dalam rangka pengurangan sampah - Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah
	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan LH	- Pembinaan dan pengawasan terhadap industry/usaha yang merusak lingkungan - Peningkatan Pengawasan Kualitas Air dan Udara
		Meningkatkan kualitas informasi SDA dan LH	- Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup - Regulasi dan Aturan Tata Kelola Lingkungan Hidup.
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Meningkatkan area pemakaman yang tertata	- Penataan pemakaman umum - Peningkatan fasilitas pendukung di dalam kawasan makam - Efisiensi dan efektivitas pemeliharaan taman
		Meningkatkan taman yang tertata	- Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara Ruang Terbuka Hijau
		Meningkatkan Konservasi Lahan	- Pembentukan kelompok masyarakat pelindung mata air - Rehabilitasi lahan kritis - Penigkatan peran serta asyarakat dalam adaptasi perubahan

2.2. Penjelasan IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung suatu tujuan Dinas, yaitu untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan, keberhasilan suatu tujuan tergantung pada Kinerja indikator kenerja utama yang merupakan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas, Guna pencapaian tujuan tingkat dinas, maka ditetapkan 4 (empat) Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dalam mendukung sasaran daerah, yaitu :

1. Indeks Kualitas Air;
2. Indeks Kualitas Udara;
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
4. Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

N0	Definis/Penjelasan	Formula Perhitungan
1	Indeks Kualitas Air	**IKA=** ***(Ci/Lij) baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)***
2	Indek Kualitas Udara	***IKU= 100-{50/0.9 x ieu – 0.1}***
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	**IKTL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x 50/54,3)**
4	Persentase Timbulan Sampah terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	**Jumlah Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah** / **Jumlah Timbulan Sampah**

2.3 Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima pada awal tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 4 (Empat) indikator kinerja utama dengan anggaran Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 9 (Sembilan) program dan 4 3 (Empat Puluh Tiga) kegiatan/Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 34.987.144.981,00- (Tiga Puluh Empat miliyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delan Puluh Satu Rupiah).

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	41,43
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	94
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	8,54

Dalam rangka mewujudkan capaian target kinerja pada tabel 2.3 tersebut di atas, maka didukung oleh Program dan Anggaran pada table 2.4 tersebut di bawah ini :

Tabel 2.4. Program dan Rencana Anggaran tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	12.570.811.983
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	223.383.000
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	307.292.560
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kota	6.469.543.657
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	92.522.400
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga	160.139.000
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Tingkat Daerah Kota	25.318.000
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	11.944.000
9	Program Pengelolaan Sampah	15.126.190.381
	JUMLAH	**34.987.144.981**

Dari gambaran table 2.4 tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima akan melaksanakan 9 (Sembilan) program dengan total anggaran sebesar Rp. 34.987.144.981 (Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selaku pengemban amanah masyarakat dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Cara Reviue atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bima. Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024 digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025.

3.1 . Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima merupakan implementasi dari perjanjian kinerja yang telah ditandatangani. Capaian kinerja Organisasi diukur dari setiap Capaian Kinerja Tujuan, sasaran, Program dan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu :

A. Membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2025 dengan mengacu kepada :
   1. Pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025;
   2. Pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025;
   3. Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2025.
B. Membandingkan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dengan berdasarkan pada :
   1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024 dan tahun 2025
   2. Pencapaian target program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024 dan 2025;
   3. Pencapaian realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2024 dan 2025
C. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun ini dengan target Jangka Penengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Pembahasan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sebagaimana tersebut di atas dapat di uraikan berikut ini:

A. Membandingkan antara Target dan Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2025

1. Pencapaian Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2025

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Target dan capaian dari tujuan dimaksud dijelaskan dalam table tersebut di bawah ini:

Tabel 3.1. Pencapaian Tujuan Dinas LIngkungan Hidup Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kualitas lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	62,07	73,86	118,99

Berdsasarkan tabel tersebut di atas, maka capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025 berada pada angka 73,86 dari yang ditargetkan 62,07 atau capaiam kinerja 118,99 melewati target. Pencapain indikator tujuan pada Dinas Lingkungan Hidup melebihi target, kenaikan ini di sebabkan indikator sasaran pada indeks kualitas Air dan tutupan Hutan semakin meningkat kualitasnya. Nilai ini menunjukkan kategori, seperti tabel 3.2 tersebut di bawah ini :=0

Tabel 3.2 Kategori IKLH

Kategori IKLH	Nilai
Unggul	$x > 90$
Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
Baik	$74 < x \leq 82$
Cukup	$66 \leq x \leq 74$
Kurang	$58 \leq x < 66$
Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
Waspada	$x < 50$

2. Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025, dijabarkan dengan Sasaran Strategis berupa Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Meningkatnya Indeks Kualitas Udara, Meningkaynya Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi dan Meningkatnya Pengelolaan Sampah, dengan indikator yaitu:

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara

1. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
2. Persentase Timbulan Sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

Untuk melihat sejauh mana capaian dari 4 (empat) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator sasaran yang disebutkan di atas dapat dilihat pada table 3.3 tersebut di bawah ini :

Tabel 3.3 Pencapaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	41,43	69,58	165,95
2	Meningkatnya Indeks Kualitas	Indeks Kualitas Udara	94	82,41	87,67
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52	65,37	125,71
4	Peningkatnya Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah yang terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	8,54	15	175,64

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, bahwa sasaran Indeks Air, Indek Kualitas Tutupan Vegetasi dn Persentase Timbulan Sampah yang terolah di Fasilitas Pengelohan Sampah menunjukan capaian kinerja yang sangat baik, Masing-masing 165,95%, 125,71% dan 175,64%, sedangkan indeks kualitas Udara capaian menunjukkan capaian kinerja belum memenuhi target 93,2%, dengan capaian kinerja 87,67%. Hal ini terlihat Indeks Kualitas Air yang ditargetkan mutu 41,43, tercapai 69,58 atau memenuhi kriteria cukup dan tidak cemar, dan Indeks kualitas udara di targetkan 94 tercapai 82,44, walaupun belum memenuhi target tapi pada lewel

sangat baik, sementara Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi yang ditargetkan 52, Capaian Kinerja terrealisasikan sebesar 125,71, begitu juga Persentase Timbulan Sampah terolah di Fasilitas Pengelohan Sampah capaian kenerjanya melebihi Taget. Walaupun Indikator sasaran dari empat indikator tersebut pencapaian kenerjanya baik, tapi belum mampu pencapian kategari baik, kedepan perlu peningkatan sosialisasi pencegahan pencemaran air dan perlu peningkatan anggaranrehabilitasi lahan.

3. Pencapaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima tahun 2025

Dalam Mewujudkan pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan dinas lingkungan hidup kota Bima, pada tahun 2025, didukung oleh 9 (sembilan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Pencapaian Program dan Kegiatan 2025

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian Kinerja 2025
I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Kinerja Perangkat Daerah	100%	98%	98%
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Prerencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan. RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
II		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen dan Lap. Keuangan Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**100%**
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang/bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100%
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	4 Laporan	4 Laporan	99,25 %
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pelayanan Administrasi**	**90%**	**98%**	**108%**
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen listrik dalam kondisi baik	1 Paket	1 Paket	100%
2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 paket	1 paket	100%
3			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	0	0	0

4			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan kondultasi SPPD	70 Laporan	67 Laporan	95,96
Iv		**Penyediaan Jasa Penunjang kantor**		**Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang**	**90%**	**100%**	**100%**
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Junlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	98%
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%
3			Penyediaan jasa Peralatan dan perlenkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan kantor	1 Laporan	1 Laporan	95,77 %
4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	
V		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pelayanan pemeliharaan Barang milik Daerah**	**90%**	**89%**	**98%**
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang layak dipakai	50 unit kendaraan	48 unit kendaraan	98%
ersentasa 2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	cakupan layanan perpajakan kendaraan	50 unit kendaraan	38 unit kendaraan	76%
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor lainnya	50 Unit Kendaraan	35 unit	70%
4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung, kantor yang terpelihara	3 unit	3 unit	100%
5			Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainny	2 Unit	2 unit	100%
II	**Perencanaan Lingkungan Hidup**			**Persentase Menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH**	**58%**	**50%**	**86,21 %**

I		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**		Jmlah Dokumen RPPLH Tata Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	Jumlah dokumen RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	100%
II		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS)Kab/Kota**		**Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota di susun**	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH)	Jumlah Dokumen DIKPLH) yang disusun	1 dokumen	1 Dokumen	100%
2			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS	1 Dokumen	1 Dokumen	
III	**Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup Kota**			**Indeks Kualitas air dan Udara**	**43,50 / 94**	**69,57 / 82,41**	**159,93/ 87,67 %**
I		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Bima**		Persentase pencegahan pencemaran terhadap kerusakan Lingkungan Hidup	**43,50 / 94**	**69,57 / 82,41**	**159,93/ 87,67 %**
1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Hasil h, Air, Udara, dan Laut	10 Dokumen	6 Dokumen	60%
2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2	2	100%

3			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	22	22	100%
Ii		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota**		**Persentase Jumlah penanggulangan Pencemaran LH**	**43,50 / 94**	**69,57 / 82,41**	**159,93/ 87,67 %**
1			Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Laporan	3 Laporan	60%
2			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Di hentikan	5 titik	5 titik	100%
Iii		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota**		**Persentase Pemulihan Pencemaran Kerusakan Linhkungan hidup**	**43,50 / 94**	**69,57 / 82,41**	**159,93/ 87,67 %**
1			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2	2	100%
2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur pencemar	4	4	100%
IV	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**			**Persentase Luas RTH Publik**	**15%**	**14,55%**	**97%**
I		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**		**Persentase Luas RTH di Kelola**	**78**	**76%**	**101%**
1			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokemen rencana penetapan pengelolaan kehati	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	2 Ha	2 Ha	100%
3			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan	210 Ha	206,83 ha	98,49 %
IV	**Pembinaan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota**			Persentase Peningkatan Jumlah Izin Lingkungan yang diawasi	**50%**	**48%**	**80%**
I		**Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah**		**Persentase izin yang Patuhi**	**55%**	**52%**	**85%**
1			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan	150	114 izin	76%
2			Pengawasan izin berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan dibidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang di awasi	30 badan usaha	15 izin	30%
V	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota**			Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan/ Masyarakat yang aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup	**60%**	**60%**	**100%**

I		**Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemsyarakatan Kab/Kota**		Jumlah Kelompok Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Lingkungan Hidup	**3 Kelompok**	**3 kelompok**	**100%**
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	3 kelompok	3 kelompok	100%
VI	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota**			**Persentase meningkatnya penghargaan Bidang Lingkungan Hidupn**	**75%**	**75%**	**100%**
I		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidupn Tingkat Kab/Kota**		**Jumlah kategori penghargaan dalam kegiatan lingkungan hidup**	**3 Entitas**	**3 Entitas**	**100%**
1			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	3 Entitas	100 %
VII	**Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**			**Persentase Pengaduan Masyarakat Terkait izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang di tangani**	**30%**	**28%**	**93,33 %**
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pengaduan masyarakat yang diselesaikan	25	20	80%

1			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	25	20	80%
VIII	**Pengelolaan Sampah**			**Persentase Peningkatan Sampah yang dikelolah.**	**75%**	**75%**	**100%**
I		**Pengelolaan Sampah**		- **Volume Sampah Yang tertangani.**	**174.600 M3**	**136.699 M3**	**78%**
				Timbulan Sampah Yang terolah di fasilitas Pengelohan sampah	**8,54**	**15**	**175,64%**
1			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	volume sampah yang terangkut ke TPA	174,600 m3	136,699 m3	78%
2			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pokmas pengelola sampah	6 kelompok	8 Kelompok	133,33%
3			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Koordinasi	11 kali	15 kali	136,37%
4			**Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota**	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	50	50	100%
5			**Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota**	Jumlah Dokumen	1	1	100%
6			**Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah**	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	475 Ton	925	214%

Dari Pencapaian program dan kegiatan diatas, dapat dilihat pagu

anggaran dengan Realisasi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi Anggaran (%)
I	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**12.570.811.983**	**12.004.106.779**	95,49
I		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		70.347.231,00	51.413.000,00	73,08
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	11.688.231,00	5.084.000,00	43,50
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.524.000,00	1.816.000,00	51,53
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.211.000,00	1.211.000,00	100
4			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.211.000,00	1.211.000,00	100
5			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.247.000,00	7.247.000,00	100
6			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.455.000,00	3.455.000,00	100
7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	3.658.000,00	942.000,00	25,75

			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
8			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.564.000,00	31.658.000,00	80,02
Ii		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**11.585.389.158,00**	**11.075.166.685,00**	95,60
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.395.029.758,00	10.884.927.285,00	95,52
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	180.032.000,00	179.912.000,00	99,98
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.504.000,00	4.504.000,00	100
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.823.400,00	5.823.400,00	100
Iii		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**232.006.700**	**229.360.536**	93,04
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.497.800,00	13.259.200,00	99,75
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100
3			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.538.900,00	18.530.000,00	100
4			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.240.000,00	100.641.336,00	99,45

IV		**Penyediaan Jasa Penunjang kantor**		**491.383.603**	**472.219.774**	**91,83**
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.658.200,00	18.657.800,00	96,64
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	217.872.140,00	205.601.474,00	80,16
3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.893.263,00	220.945.500,00	96,97
4			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.960.000	27.015.000	100
V		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**191.685.291,00**	**175.946.784,00**	91,79
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.086.311,00	56.520.500,00	99,01
2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.635.500,00	78.616.284,00	88,70
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.690.000,00	16.545.000,00	99,13
4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	5.000.000,00	0,00	100

			Lainnya			
5			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.273.480,00	24.265.000,00	99,97
II	**Perencanaan Lingkungan Hidup**			**223.383.000,00**	**210.501.007,00**	**91,76**
1		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota**		**105.082.500,00**	**104.327.500,00**	91,76
2			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	105.082.500,00	104.327.500,00	99,35
3		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota**		118.300.500,00	106.173.507,00	89,95
4			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	76.227.500,00	67.601.774,00	72,18
5			Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJJPD/RPJMD	42.073.000,00	38.571.733,00	96,15
III	**Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup Kota**			**307.292.560,00**	**301.953.960,00**	98,59
I		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan**		**198.184.360,00**	**196.699.560,00**	

		Lingkungan Hidup Kota Bima				98,08
1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	53.136.948,00	52.746.000,00	99,77
12			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	77.495.412,00	77.333.000,00	96,55
Ii		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota**		**49.207.400,00**	**45.396.400,00**	98,91
1			Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	39.448.200,00	35.642.200,00	98,92
2			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.759.200,00	9.754.200,00	98,90
Iii		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota**		**59.900.800,00**	59.858.000,00	99,71
1			Koordinasi dan Sikronisasi	31.276.000,00	31.236.000,00	

			Penghentian Sumber Pencemaran			99,86
2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	28.624.800,00	28.622.000,00	99,60
IV	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**			6.469.543.657	6.198.996.440	95,82
I		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota**		6.469.543.657	6.198.996.440	95,82
1			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	38.340.000,00	24.303.500,00	63,39
2			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	74.590.000,00	74.273.500,00	99,58
3			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.356.613.657	6.100.419.440	95,97
IV	**Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota**			**92.522.400,00**	**62.861.601,00**	**67,94**
I		**Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh**		**92.522.400,00**	**62.861.601,00**	67,94

		pemerintah Daerah				
1			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	79.730.000,00	50.219.601,00	62,99
2			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan Hidup, izin PPLH Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah	12.792.400	12.642.000	98,82
V	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan** 98,19% **Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota**			**160.139.000,00**	157.234.000,00	98,19
I		**Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemsyarakatan Kab/Kota**		160.139.000,00	157.234.000,00	98,19
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	160.139.000,00	157.234.000,00	98,19

VI	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota**			25.318.000,00	21.654.149,00	85,53
I		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidupn Tingkat Kab/Kota**		25.318.000,00	21.654.149,00	85,53
1			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.318.000,00	21.654.149,00	85,53
VII	**Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**			**11.944.000,00**	**9.766.000,00**	81,76
I		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota**		**11.944.000,00**	**9.766.000,00**	**81,76**
1			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	11.944.000,00	9.766.000,00	81,76
VIII	**Pengelolaan Sampah**			**15.126.190.381**	**13.426.478.035**	88,76
I		**Pengelolaan Sampah**		15.126.190.381	13.426.478.035	88,76

1			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.806.834.378,00	5.603.192.056,00	99,13
2			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	28.466.000,00	21.800.000,00	76,58
3			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	19.645.000,00	17.229.789,00	87,71
4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	8.753.533.619	7.298.665.030	83,38
5			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	16.358.000,00	5.100.000,00	31,18
6			Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	21.353.384	16.491.160,00	77,23

B. Membandingkan Capaian Kinerja tahun 2024 dan tahun 2025 dengan berdasarkan:

1. Pencapaian Kinerja Tujuan 2024 dan 2025

Setelah disajikan capaian kinerja tujuan dan sasaran tersebut di atas, berikut akan disajikan table perbandingan capaian kinerja tujuan dan sasaran antara tahun 2024 dengan tahun 2025 seperti pada table 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023 dan 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2024	Capaian Kenerja 2024	Realisasi 2025	Capaian Kinerja 2025
1	Meinngkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**64,50**	**104,32**	**73,86**	**118,99**

Bedasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada kenaikan capaian kinerja tujuan dari 104,32% pada tahun 2024 menjadi 118,99% tahun 2025, atau dengan angka Capaian kinerja pada tahun 2024 terealisasi 104,32 dari target 64,50 sementara pada tahun 2025 angka capaian kinerja terrealisasi 73,86,50 dengan target 62,07. Jika Bandingkan dengan pencapaian kinerja tujuan pada tahun 2024 dengan 2025 terjadi kenaikan hampir mendekati 10 angka, hal ini disebabkan kenaikan Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi.

Sementara Indeks Kualitas Udara sedikit mengalami penurunan di bandingkan tahun 2024. Kenaikan indeks kualitas tutupan Vegetasi pada tahun 2025 di sebabkan karena adanya penanaman beberapa titik pada daerah RTH, tapi secara keseluruhan keadaan hutan dan lahan

belum mampu dipulihkan, hal ini sulit bagi pemerintah daerah untuk menjaga, melindugi dan monitoring, karena beralihnya kewenangan pengelolaan hutan dari pemerintah daerah Kab/Kota menjadi kewenangan daerah Provinsi.

2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2024 dan 2025

Dari uraian pencapain kinerja sasaran pada tahun 2025 diatas, maka disajikan perbandingan kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun 2025, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7. Perbandingan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2024		2025		
			Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi %	Capaian %
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	41,43	131,48	41,43	69,58	165,95
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	94,00	106,42	94,00	82,41	87,67
3	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	50	104,17	52	165,37	125,71
4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	% Timbulan Sampah yang terolah di fasilitas Pengelolaan Sampah	6,9	98%	8,54	15	175,64

Berdasarkan pada tabel diatas pencapaian kinerja sasaran pada indeks kualtas air ada kenaikan, capaian kinerja pada tahun 2024 ke 2025, kenaikan indeks kualitas air dari angka capaian kinerja 131,48 naik menjadi angka

165,95 sedangkan pada indeks kualitas udara pencapaian kinerja pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 ada penurunan capaian kineja dari 106,42% menjadi 87,67% sementara Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2025 dibandingkan 2024, yaitu dari 50 menajdi 165,37 pada 2025. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas Pengelolaan Sampah ada kenaikan di bandingkan tahun 2024. Untuk indeks kualitas air, pada tahun 2024 berada pada indeks Pencemaran 41,24 (cemar sedang) sedangkan pada tahun 2025 dari yang ditargetkan sebesar 41,43 terealisai 69,58 (tidak cemar), ini terlihat pada tabel di bawah ini:

Berikut disajikan table hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kota Bima pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai di Kota Bima (musim kemarau dan musim penghujan)

NO	NAMA SUNGAI	KOORDINAT	SUHU (^{0}C)	pH	BOD	COD	TSS	DO	NO_3-N	PHOSPAT	Fecal
1	Sungai Lampe	S-8.513529 E 118.798432	28,2	9	1,74	3	2,5	0,07	5,7	0,15	4600
2	Sungai Oi'Mbo	S-8.47260 E 118.77529	28,5	8,8	2,25	8,73	11	0,66	9,3	0,32	6300
3	Sungai Rabadompu	S-8.478928 E 118.76543	27,8	8,7	2,25	15,3	12	0,61	8,86	0,31	16000
4	Sungai Rabasalo	S-8.460677 E 118.756570	28,2	8,2	3,34	6,81	5	0,59	5,32	0,32	16000
5	Sungai Sadia	S-8.470212 E 118.742001	28,4	8,4	2,35	21,8	7	0,46	13,29	0,18	1700000
6	Sungai Bedi	S-8.463849 E 118.737646	28,5	8,4	2,57	33,7	4	0,89	7,09	0,33	2100
7	Sungai Ranggo	S-8.450825 E 118.732461	27,9	8,2	2,02	29,1	4	0,49	9,3	0,4	3500000
8	Sungai Jatibaru Barat	S-8.439913 E 118.752472	28,5	8	2,9	3	5	0,4	13,29	0,26	1100000

9	Sungai Jatibaru Timur	S-8.434318 E 118.771267	28,5	8,1	3,43			0,4	8,86	0,2	7000
10	Sungai Melayu	S-8.44324 E 118.723378	28,6	8,2	1,7	51,4	14	0,44	9,75	0,96	1600000
11	Sungai Jembatan	S-8.456964 E 118.726281	28,5	8,4	2,8	29,9	23	0,59	19,15	0,24	

Sumber Dokumen IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima 2025

3.9 Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	5	17,94%	70	17,94
Cemar Ringan	16	29,77%	50	29,77
Cemar Sedang	14	22,57%	30	22,57
cemar Berat	0	0%	10	0
Total	35	100%		69,58

Sementara kualitas udara Kota Bima sampai saat ini masih relatif bagus dan alami dengan kata lain masih dibawah standar baku mutu serta belum terganggu oleh polusi yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan belum ada industri-industri besar yang menghasilkan emisi dan gas buang yang menjadi sumber polutan. Selama ini emisi terbesar hanya didominasi oleh industri rumah tangga dan perusahaan BUMN, seperti Pertamina dan PLN. Disisi lain pengujian dan tes emisi kendaraan bermotor belum dilakukan mengingat belum adanya perda yang mengatur serta peralatan yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dengan Metode Pasive Sampler dengan menempatkan alat pemantau pada 4 (empat) titik perwakilan yaitu, pada daerah transportasi, industri, pemukiman dan

perkantoran dengan 2 (dua) kali sampling yaitu bulan Juni dan bulan Agustus. Saat ini data pengambilan sampling menggunakan titik sampling dan pemantauan kualitas udara ambien, sementara untuk data emisi gas buang belum dilakukan. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi. Komposisi campuran gas tersebut tidak selalu konsisten, komponen yang konsentrasinya selalu bervariasi adalah air dalam bentuk uap H2O dan CO2 jumlah uap air yang terdapat di udara bervariasi tergantung dari cuaca dan suhu.

Berikut disajikan table hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara di Kota Bima pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.10 Formulasi Hasil perhitungan Ideks Pencemaran Air

FORMULASI PERHITUNGAN INDEKS PENCEMARAN UDARA

No.	Kota	Lokasi Sampling	SO2(µg/Nm3)			NO2(µg/Nm3)			Rerata Kota	
			Periode		Rata-Rata	Periode		Rata-Rata	SO2	NO2
			I	II		I	II			
1	Bima	Masjid Sultan Salahudin	6,43	5,93	6,18	14,09	8,71	11,4	8,24	11,28
		SMPN 6 Kota Bima	11,01	12,66	11,84	11,21	11,26	11,555		
		Bank Sampah	8,16	8,77	8,465	13,73	12,46	13,095		
		Kantor Walikota	10,14	8,99	9,565	11,06	5,39	8,225		
									8,24	11,28

PERHITUNGAN

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Indeks
NO2	11,28	40	0,28
SO2	8,24	20	0,41
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,35
Indeks Kualitas Udara			82,41

Indikator lainnya yang menjadi indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota bima adalah Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi berada pada angka 50 tahun 2024, sementara tahun 2025 dengan target sebesar 52 dengan capaian sebesar yaitu sebesar 69,58 atau

125,71 % persen. Luasan tutupan vegetasi berupa RTH publik di Kota terdiri dari; taman, lapangan terbuka dan hutan kota dengan total luasan sebesar 271,67 Ha pada tahun 2024 dan pada tahun 2025 menjadi 285,20, mengalami kenaikan pada sepadan sungai 25,67 ha. Berikut disajikan table tentang luasan RTH Publik di Kota Bima berdasarkan jenis dan luasannya sebagai berikut :

Tabel 3.11. Rekap Luas RTH di Kota Bima Tahun 2025

No	Uraian	Luas (Ha)	Keterangan
1	Taman	20,23	
2	Sepadan Sungai	78,47	
3	Hutan Kota	186,60	
TOTAL		**285,20**	

Sumber : Dinas Lingkungan Kota Bima Tahun 2025

Sementara pada Indikator Timbulan Sampah yang terolah di fasilitas pengelolaan sampah mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 hanya 6,9 persen menjadi 15 persen di tahun 2025, kenaikan ini ada peningkatan pengolahan sampah pada fasilitas Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk.

3. Pencapaian Target Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 dan Tahun 2025

a. Pencapaian Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut akan disajikan perbandingan pencapaian target program tahun 2024 dan 2025, dengan Realisasi capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024 dan 2025 seperti tersebut di bawah ini:

Tabel 3.12 Pencapaian target program dan kegiatan DLH Kota Bima tahun 2024 dan tahun 2025.

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Kinerja			% Capaian Kinerja
			Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	
I	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Menurunnya Pelanggaran Terhadap RPPLH	60%	58%	50%	83%
II	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	41,43/ 94,00	41,43/94	69,58/ 82,41	169,58/ 87,67%
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kota	Persentase Luas RTH Publik	14,55%	15%	14,70%	125%
IV	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	48%	50%	65%	118%
V	Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota	Persentase Meningkatnya Jumlah Ormas Sadar Lingkungan	100%	60%	60%	100%
VI	Program Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	Persentase Meningkatnya penghargaan di bidabg lingkungan hidup	75%	80%	80%	100%
VII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase menurunnya pengaduan lingkungan hidup	25,%	30%	28%	93,33%
VII	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Sampah yang tertangani	72%	75%	75%	100%

b. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 dan Tahun 2025

Berikut tersaji table tentang realisasi anggaran tahun 2024 dan 2025 pada masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.13. Pencapaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2024 dan 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN 2024	PAGU ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGRAN 2025	Persentase Capaian
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.451.131.923	12.570.811.983	12.004.106.779	95,49%
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	204.466.350,00	223.383.000	210.501.007	94,24%
III	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	378.274.222	307.292.560	301.953.960	98,26%
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.081.653.639	6.469.543.657	6..198.996.440	95,82%
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	603.234.290	92.522.400	62.861.601	68%
VI	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	95.830.000	160.139.000	157.234.000	98,19%
VII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	43.101.000	25.318.000	21.654.149	85,32%
VIII	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	11.694.000	11.944.000	9.766.000	81,76%
IX	Program Pengelolaan Persampahan	12.030.530.085	15.126.190.381	13.426.478.035	88,76%

	JUMLAH	**17.367.521.501**	**34.987.144.981**	**32.393.551.971**	

C. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Kinerja Sasaran jangka menengah yang direncanakan.

Pencapaian indicator kinerja tahun 2025 dengan target kinerja sasaran jangka menengah daerah yang ditetapkan pada RPJMD Kota Bima tahun 2025-2029, yaitu mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah, melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana.

Untuk mengetahui pencapaian indicator kinerja sasaran tahun berjalan (tahun 2025) terhadap target Rencana Strategis pada tahun 2025 sebagaimana table tersebut di bawah ini :

Tabel 3.14 Pencapaian indikator kinerja sasaran tahun berjalan terhadap target Renstra DLH Kota Bima tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal Kinerja pada Awal Renstra	Target Renstra	Realisasi Renstra	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun 2024/2025	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2030
1	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	69,58	41,43	69,58	71,50
2	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	82,41	94	82,41	86,00
3	Meningkatnya indeks Kualitas tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	55,37	52	65,37	69
4	Peningkatan Pengelolaan Sampah	% Timbulan Samapah yang terolah difasilitas Pengelolaan Sampah	6,9	8,54	15	23,62

3.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan dilakukan.

Berdasarkan uraian dan diskripsi terhadap beberapa hal tersebut di atas, maka dapat diuraikan analisis tentang penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja disertai dengan alternati solusi yang telah dan akan dilakukan.

Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (tempat) indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, hanya satu indikator sasaran yang tidak mencapai target dan tiga indikator memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu Indikator sasaran berupa Indeks Kualitas air dengan capaian sebesar 69,58 dari yang ditargetkan 41,43 atau capaian kinerja 165,95 persen, terjadi peningkatan nilai kualitasnya dari 41,43 menjadi 69,58 hanya cemar ringan. Untuk meningkatkan lagi perlu dilakukan lebih intensif dalam berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas air (air sungai maupun air laut) berupa pengendalian dampak lingkungan. Adapaun progran dan kegiatan perlu di intensif antara lain:

a. Adanya kegiatan kali bersih dan bersih pantai yang perlu pehatian khusus;
b. Dilakukan pencanangan gerakan bersih sungai dan pantai yang dilaksanakan secara terus-menerus.
c. Perlu diperkuat kelompok Komunitas sungai.
d. Perlu diaktifkan kelompok-kelompok menjaga mata air

Selanjutnya untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Udara dari target 94 dengan capai kinerja 82,40, `indikotor ini belum mencapai target kinerja, Hal ini dperlu di lakukan intensitas pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan asap (emisi), menjaga masyarakat yang membakar sampah sembarangan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah untuk indikator sasaran Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi didapatkan nilai capaian meningkat dari

50 pada tahun 2024 menjadi 65,37 pada Tahun 2025. Peningkatan ini terjadi karena adanya RTH pada Sepadam sungai. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan insentif kepada pemilik lahan atas penanaman, penanaman di sepadan jalan.

Sementara pada indikoator sasaran pengelolaan sampah mengalami kenaikan dari 6,9 menjadi 15 persen, walaupu indikator ini mengalami kenaikan secara signifikasn, tetapi masih jauh dari harapan mengurangan timbulan sampah yang terbuang di TPA. Program dan kegiatan yang terus di lakukan berupa, sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan tingkat rumah Tangga, program Mai Kakura Sampah dan Rencana pembentukan-pembetukan bank sampah unit di setiap kelurahan.

Selain dari beberapa faktor pendukung dan penghambat tersebut di atas, juga disajikan beberapa permasalahan lainnya berikut solusi nya sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Masih kurangnya Tempat mengelolaan sampah di masyarakat, berupa bank sampah unit, TPS3R dan TPST.
2. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam memilah sampah di rumah tangga.
3. Belum adanya profil yang menggambarkan secara utuh tentang luas RTH dan kawasan pemukiman.
4. Konsentrasi program dan kegiatan hanya pada revitalisasi taman, makam dan hutan kota yang sudah ada.
5. Adanya tumpang tindih dalam implementasi tugas pokok dan fungsi seperti, pembangunan taman baru dilaksanakan oleh OPD lain.

Solusi yang telah dan akan dilakukan :

1. Mengoptimalisasikan sarana dan prasana yang ada
2. Mendukung biaya operasional bank sampah sehingga bisa beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.

3. Merevisi Perda tentang Pengelolaan Persampahan untuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
4. Menyusun profil Dinas Lingkungan Hidup yang menggambarkan secara detail tentang potensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima.
5. Menyusun Perda tentang Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RPPLH) berikut turunannya.
6. Menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Penambahan luasan RTH public menjadi minimal 20% dari luas Kawasan terbangun sesuai dengan amanat Perda RTRW Kota Bima.

3.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tipe A yang terdiri dari 1 sekretariatan dan 4 (empat) bidang. Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima adalah seperti pada table tersebut di bawah ini :

Tabel 3.15 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Ket
1	Meningkatnya IndeksKualitas Air	Indeks Kualitas Air	165,96	96	75	Efisien
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	87,67	95	9	Inefisien
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	125,71	97	28,71	Efisien

4	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	% Timbulan Sampah yang terolah difasilitas Pengelolaan Sampah	175,64	88	87,64	Efisien

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa tiga indikator sasaran terlihat sangat efisiensi anggaran, yaitu pada indikator sasaran pada indeks kualita air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Persentase Timbulan Sampah yang terolah difasilitas Pengelolaan Sampah, sementara Indeks Kualitas Udara kurang efisiensi, ini sebabkan terjadinya peningkatan pembakaran lahan dan kurangnya anggaran.

3.4 Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian target tujuan dan target sasaran tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, seperti berikut di bawah ini :

A. Sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara diwujudkan dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kualitas Air

Dalam rangka mewujudkan Indeks Kualitas Air yang baik, didukung oleh Program- Program yaitu :

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Program pengendalian dan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini memiliki indikator persentase meningkatnya kualitas air Pada tahun 2025 kualitas air berada pada cemar ringan pada parameter 10- 30, dengan capaian pada tahun 2025 adalah 65,58 dari target 42,43 Program ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan masing-masing sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakam lingkungan hidup pada masyarakat, berupa sosialisasi, dengan indikator dari yang ditargetkan

sebesar 5 lokasi dan terealisasi sebesar 5 lokasi juga atau 100%.

2. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dengan indicator jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi dari target 20 usaha/kegiatan hanya mampu direalisasikan sebanyak 12 usaha/kegiatan atau capaian sebesar 65 %.
3. Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran target 3 kelurahan, direalisasikan 2 kelurahan meter atau 75 % dengan bendungan rontu, jembatan Ranggo dan sungai padolo.
4. Kegiatan penanaman pohon di berbagai lokasi dan lahan kritis sebanyak 500 pohon.

2. Indeks Kualitas Udara

Indikator Indeks Kualitas air didukung oleh program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indicator meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan didukung oleh kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan dengan indicator nilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Idealnya untuk mengukur kinerja dari program dan kegiatan ini adalah adanya peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Sampai tahun 2025 ini Pemerintah Kota Bima belum memiliki perda RPPLH dimaksud, sehingga menyulitkan untuk dilakukan pengukuran atas program dan kegiatan ini.

B. Sasaran ketiga yaitu meningkatnya Indek Kualitas tutupan Vegetasi dengan sasaran Program yaitu :

1. Program dengan kegiatan peningkatan Luas RTH Publik

   Dalam rangka mewujudkan capaian dari indicator persentase luas RTH public ini didukung oleh oleh satu

Program dan 3 (tiga) sub Kegiatan masing-masing sebagai berikut :

a. Kegiatan penyusunan dan penetapan rencana pengellolaan keanekaragaman hayati dengan indikator jumlah dokumen rencana penetapan dan pengelolaan keanekararagaman hayati;
b. Kegiatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan. Pengelolaan taman dengan indikator persentase taman kota yang tertangani dengan formula perhitungan jumlah taman yang tertangani dibagi dengan jumlah seluruh taman dikalikan dengan 100. Pada tahun 2025 ditargetkan 20 taman dengan realisasi sebesar 100% seluruhnya sebanyak 20 taman. Program dimaksud didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :
    1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan dengan indicator jumlah taman yang dipelihara dengan baik dari target 20 taman dan terealisasi sebesar 100 % atau sebanyak 22 taman.
    2. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan dengan indicator luas taman yang dibangun. Pada tahun 2025 terdapat peningkatan luas taman sebesar 30 Ha.
c. Kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan indicator persentase area pemakaman yang tertata dengan formulasi perhitungan jumlah area pemakaman yang tertata dibagi dengan jumlah area pemakaman seluruhnya dan dikalikan dengan 100. Berdasarkan formula tersebut dapat dihitung bahwa pada tahun 2025 terdapat 17 Pemakaman yang ditata dari total jumlah pemakamn sebanyak 12 pemakaman. Dengan demikian didapatkan angka

82%. Namun dalam menunjang kegiatan tersebut pengelolaan tersebut di atas, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dengan indicator Panjang pagar kuburan. Pada tahun 2025 ditargetkan penambahan pagar kuburan sepanjang 560 meter namun mampu direalisasikan sepanjang 480 meter atau 98%. Kegiatan ini dititik beratkan pada pembangunan pagar pemakaman.

C. Sasaran Keempat yaitu meningkatnya Pengelolaan Sampah, dengan sasaran Program yaitu :

2. Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan.

Program pengelolaan sampah memiliki 2 (dua) indikator yaitu persentase sampah yang tertangani dan persentase pengurangan sampah. Nilai capaian pada tahun 2025 ini adalah sebesar 78% dari yang ditargetkan sebesar 75,% atau capaiannya 78%. Nilai ini didapatkan dari rumusan jumlah sampah yang ditangani (angkut dan buang) dibagi dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Berdasarkan data pada neraca sampah bahwa jumlah timbulan sampah secara keseluruhan di Kota Bima adalah sebesar 174.600 M^3 dengan berat jenis sampah sebesar 0,33. Dari formula perhitungan tersebut di atas, maka didapatkan jumlah sampah yang ditangani adalah sebesar 136.699 dari timbulan sampah sebesar dengan kata lain persentase sampah yang terangkut adalah sebesar 78,% % (neraca sampah terlampir). Selanjutnya, untuk indikator persentase pengurangan sampah adalah jumlah sampah yang dikurangi dibagi dengan total timbulan sampah dikalikan dengan 100. Tidak terlepas dari 2 (dua) indikator tersebut di atas, juga didukung oleh 3

(tiga) kegiatan yaitu, kegiatan sosialisasi, kegitan pengurangan melalui bank Sampah, serta kegiatan mengurangan tingkat rumah tangga.

3.5 Realisasi Anggaran 2025

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Kinerja Keuangan OPD

No	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.570.811.983	12.004.106.779	95,49
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		96.746.850	94.388.600	97,56
1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	12.958.200	12.918.600	99,69
2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	10.999.900	10.986.000	99,87
3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.114.700	5.104.500	99,80
4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.905.950	9.865.500	99,59
5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.938.200	7.938.200	100
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900	9.999.800	100

7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.830.000	37.576.000	94,34
Ii		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.795.654.041	10.582.279.407	98,02
1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.620.420.241	10.407.147.907	97,99
2			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156.999.800	156.980.000	99,99
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.234.000	8.234.000	100
4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	9.917.500	99,18
Iii		Administrasi Umum Perangkat Daerah		409.169.133	380.691.577	93,04
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.637.400	27.570.300	99,76
2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.250.000	25.250.000	100
3			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.545.733	307.871.277	99,46
4			Penyed Peralatan dan Perlenkapan Kantoriaan	46.736.000	20.000.000	42,79
IV		Penyediaan Jasa Penunjang kantor		424.140.299	389.513.454	91,84

1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.641.599	16.083.700	96,65
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	68.520.000	54.931.254	80,17
3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.921.500	235.568.500	96,97
4			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.930.000	77.930.000	100
V		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		298.746.000,00	292.503.200	97,91
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.733.750	89.497.000	99,74
2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.540.250	112.970.000	95,30
3			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.470.000	26.470.000	100
4			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.000.000	51.564.200	99,16
5			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.002.200	12.002.000	100

II	Perencanaan Lingkungan Hidup			775.545.584	711.667.278	91,76
1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota		775.545.584	711.667.278	91,76
2			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten	149.416.000	148.450.500	99,35
3		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota		626.129.584	563.216.778	89,95
4			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	162.038.584	116.974.978	72,19
5			Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJJPD/RPJMD	464.091.000	446.241.800	96,15
III	Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Hidup Kota			266.888.474	263.147.136	98,60
I		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Bima		150.927.574	148.034.536	98,08

1			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	23.072.000	23.019.800	99,77
2			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	48.219.520	46.557.520	96,55
3			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	79.636.054	78.457.216	98,52
Ii		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota		64.427.400	63.728.200	98,91
1			Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	30.235.900	29.911.000	98,93
2			Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	34.191.500	33.817.200	98,91
Iii		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota		51.533.500	51.384.400	99,71

1			Koordinasi dan Sikronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	20.455.000	20.427.500	99,87
2			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	31.078.500	30.956.900	99,61
IV	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota			6.469.543.657	6.198.996.440	95,82
i		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota		6.469.543.657	6.198.996.440	95,82
1			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	38.340.000	24.303.500	63,39
2			Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	74.590.000	74.273.500	99,58
3			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.356.613.657	6.100.419.440	95,97
IV	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota			92.522.400	62.861.601	67,94

i		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah		92.522.400	62.861.601	67,94
1			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	79.730.000	50.219.601	62,99
2			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan Hidup, izin PPLH Lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah	12.792.400	12.642.000	98,82
v	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota			160.139.000	157.234.000	98,19
i		Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemsyarakatan Kab/Kota		160.139.000	157.234.000	98,19

			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	160.139.000	157.234.000	98,19
VI	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota			25.318.000	21.654.149	85,53
i		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidupn Tingkat Kab/Kota		25.318.000	21.654.149	85,53
1			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.318.000	21.654.149	85,53
VII	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			11.944.000	9.766.000	81,76
i		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		11.944.000	9.766.000	81,76
1			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	11.944.000	9.766.000	81,76

VIII	Pengelolaan Sampah			15.126.190.381	13.426.478.035	88,76
i		Pengelolaan Sampah		15.126.190.381	13.426.478.035	88,76
1			Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.286.834.378	6.067.192.056	96,51
2			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	28.466.000	21.800.000	76,58
3			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	19.645.000	17.299.789	87,71
4			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	8.753.533.619	7.298.665.030	83,38
5			Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	21.353.384	16.491.160,00	77,23

BAB IV
PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tertuang dalam kebijakan, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup kota Bima Tahun 2025.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berdasarkan standar akuntabilitas yang memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima ini disusun secara periodik, guna menyajikan data dan informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi kepada stakeholder.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian Kinerja pada 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Capaian Kinerja Sasaran strategis; Meningkatnya Indeks Kualitas Air;**

   Pada Sasaran Stategis dengan Indikator indeks kualitas air dari target 41,43 terealisasi sebesar 69,58(cemar Ringan) atau sebesar 169,48.

2. **Capaian Kinerja Sasaran strategis; Meningkatnya Indeks Kualitas Udara;**

   Pada Sasaran dengan indikator indeks kualitas udara dari targetkan sebesar 94 mampu direalisasikan menjadi 82,41 atau 87, walaupun ada penurunan tapi masih dalam kondisi baik.

3. **Capaian Kinerja Sasaran Strategis; Meningkatnya kualitas tutupan Lahan**

Pada sasaran strategis ini, Indikator Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi dari target 52 dengan capaian target 65,37, indikator ini mengalami kenaikan dari dari tahun ke tahun.

4. **Capaian Kinerja Sasaran Strategis; Meningkatnya Penelolaan Sampah.**

Pada sasaran strategis ini, Indikator Timbulan Sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dari target, 8,93 dengan capaian kinerja 15 persen.

Dengan demikian maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima selaras dengan program dan kegiatan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian Kinerja (PK), Baik Capaian Indikator Kinerja Tujuan, Indikator Kinerja Sasaran, Capaian Kinerja Program maupun Capaian Kinerja Kegiatan, secara keseluruhan terpenuhi target yang ditetapkan.

4.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Sasaran.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2025 dapat dicapai dengan target yang telah ditentukan. Namun pada beberapa indikator belum mampu dilaksanakan secara maksimal karena adanya beberapa hambatan dan kendala antara lain :

1. Pemerintah Kota Bima tidak memiliki lahan untuk penaman (konservasi), sehingga konservasi lahan kritis dilakukan pada lahan milik masyarakat sehingga ketika pemilik lahan memiliki kepentingan atas lahan tersebut maka pohon yang telah tertanam akan ikut terganggu. Berdasarkan hambatan dan kendala tersebut di atas, bahwa kunci dalam mendukung pencapaian target dimaksud adalah dengan penyediaan lahan yang representatif sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Masih banyak masyarakat belum membuat IPAL terhadap pengelohan tahu dan tempe serta kandang sapi di sepanjang sepada sungai.
3. Belum adanya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, terutama pemilahan yang di lakukan di rumah tangga.

LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKIP TA. 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN



PEMERINTAH KOTA BIMA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKIP ini.

Kota Bima, 31 Januari 2025

Kepala Dinas,



GUFRAN, S.Pd. M.Si

Nip.19700502 200312 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatanseperti yang telah dirumuskan dalan rencana strategis.

Isu Strategis RPD 2024-2026	Tujuan (untuk menjawab isu strategis (Tujuan RPD Pertama)	Indikator Tujuan	Sektor	Sasaran Ke-4 (empat) RPD 2024-2026	Tujuan PD (Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima	Isu Strategis Renstra PD 2024-2026	Sasaran PD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*
Peningkatan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan bermartabat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, ***Ketahanan Pangan,*** Perpustakaan dan Arsip Daerah, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kopresai, perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja, Sosial, Kebudayaan, Kelautan dan Perikanan.	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Belum optimalnya Ketahanan Pangan	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan

Melalui sinkronisasi Misi dan Sasaran Nasional, Propinsi maupun Kota, Dinas Ketahanan Pangan turut berperan dan memebrikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya **Tujuan Pertama RPD 2024-2026 " Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing" pada Sasaran Daerah Ke Empat yaitu: Tewujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat,** dengan Indikator Kinerja sasaran Daerah: Indeks Ketahanan Pangan.

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima selama 3 (Tiga) tahun anggaran yang dituangkan dalam Renstra Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Ketahanan Pangan dengan Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan Pemanfaatan Pangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
3	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84	85	86
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	CV %	≤ 10	≤ 10	≤ 10
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	82,7	84,2	85,7

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-		
			2024	2025	2026
3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIP PD	Nilai	82	82,5	83

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan kegiatan dengan:

Kode	Uraian	Anggran (Rp)	Persentase
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.762.502.588,00**	**98,21%**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.835.138,00	65,10%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.667.450,00	33,11%
5.2	**BELANJA MODAL**	**86.940.000,00**	**1,79%**
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	86.940.000,00	1,79%
	Jumlah	**4.849.442.588,00**	**100%**

AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Output (%)
1	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84	86,88	103
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10	≤ 10	100
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7	80,8	98
2	kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIB PD	82	80,25 (A)	97,9
				Rata-rata	***100***

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025, Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 dengan realisasi capaian kinerjanya. Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan reviu.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari 4 indikator kinerja Sasaran Strategis, 2 memperoleh predikat tercapai dengan persentase capaian 100% dan 2 mencapai 98% dan 97,9%.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran. Penggunaan

sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan atau penyerapan anggaran.

Sasaran	Kinerja					Program Pendukung	Kinerja	Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84	86,8	103	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Energi	839.044.300	793.571.250	96,54%
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	%	≤ 10	4,6	100	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Ketersediaan Energi	839.044.300	793.571.250	96,54%
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	82,7	80,8	98		Jumlah Ketersediaan Protein			
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	115.963.100	114.273.100	99%
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang lolos uji	130.339.600	124.073.754	95%
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIP PD	Nilai	82	80,25 (A)	97,9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	3.764.095.588	3.634.009.381	97%

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja sasaran strategis seluruhnya dapat tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis dan IKUDinas seluruhnya dapat tercapai secara *EFISIEN.*

REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatanpada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2025 beserta realisasi keuangannya adalah :

Kode	Uraian	Anggran (Rp)	Persentase	Realisasi	Persentase
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.762.502.588,00**	**98,21%**	**4.579.055.485,00**	**98,14%**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.835.138,00	65,10%	3.035.094.433,00	65,05%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.667.450,00	33,11%	1.543.961.052,00	33,09%
5.2	**BELANJA MODAL**	**86.940.000,00**	**1,79%**	**86.872.000,00**	**1,86%**
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	86.940.000,00	1,79%	86.872.000,00	1,86%
	Jumlah	**4.849.442.588,00**	**100%**	**4.665.927.485,00**	**100%**
				Persentase	**96,22%**

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah cadangan pangan daerah secara kontinyu guna menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pasca bencana, instrumen stabilisasi harga beras di pasaran, dan meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
2. Perbaikan pola konsumsi pangan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan.
3. Peningkatan pengawasan terhadap mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di Kota Bima, yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan melalui pembentukan im pemantauan pengawasan mutu pangan lintas instansi.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii
DAFTAR ISI..... vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Isu Strategis..... 2
1.3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi..... 3
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... 6
1.5. Sistematika Penulisan 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 12
2.1. Tujuan, Sasaran dan Idikator Kinerja OPD 22
2.2. Perjanjian Kinerja 2024 16
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 25
3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 27
3.2. Realisasi Anggaran 56

BAB IV PENUTUP 66
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 2024-2026, fokus pembangunan urusan Pangan yang menjadi kewenangan instansi adalah:

1. Meningkatkan/ menguatkan Ketersediaan dan Cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
4. Meningkatnya kualitas pemanfaatan pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman.

Dengan mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap bidang di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu satu tahun maupun lima tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang menginstruksikan kepada setiap Instansi untuk, melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan dasar tersebut maka LKIP juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi Pencapaian Kinerja (PK) Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada.

1.1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mejadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKIP;

4. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 820);
5. Peraturan Walikota Bima Nomor 40 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 915 tanggal 31 Desember 2024).

1.2. Isu Strategis

Berbagai permasalahan Pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan yang mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan selain mengacu pada Badan Pangan Nasional, pemilihan isu strategis memperhatikan kondisi di Kota Bima, dengan mempertimbangnkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima, merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan menjadi bagian dalam pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu: "Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri". Visi tersebut merupakan cita-cita untuk 1) mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA dan 2) menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri. Yang mendukung salah satu misi dari 5 misi RPJMD kota Bima Tahun 2019 –2023. Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke-satu yaitu “Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing”. Untuk memperkuat Pembangunan ketahanan pangan yang bertujuan Meningkatkan Ketahanan Pangan dengan Aspek Strategi:

1. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan;
2. Konsumsi pangan yang cukup, bermutu, bergizi seimbang dan Aman.
3. Peningkatan pengawasan terhadap mutu panga yang baik yang berasal dari Pangan Asal Tumbuhan.

Adapun Isu Startegis Ketahanan Pangan Kota Bima:

a. *Masih adanya desa dengan kategori rentan rawan pangan,* potensi kerawanan pangan di Kota Bima masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam.
b. *Proporsi penduduk dengan Asupan Kalori Minimum masih dibawah standar nasional,* kualitas konsumsi msyarakat Kota Bima sebagian besar masih rendah yang ditunjukan dengan angka Pola Konsumsi Pangan (PPH).
c. *Fluaktuasi harga dan pasokan pangan pokok stretegis,* Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkaitdistribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan Ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan.
d. *Masalah ketersediaan pangan, isu pangan tergantung pada produksi*, perlu mendapat perhatian. Kebutuhan Masyarakat Kota Bima terhadap pangan khususnya beras hanya mampu terpenuhi 70% dari total produksi di tahun 2022 dengan jumlah

konsumsi sebesar 118,8 kg per kapita per tahun. Maka untuk pemenuhan konsumsi masih kekurangan sebesar 30% belum termasuk kebutuhan non rumah tangga.

e. Masih tingginya tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Bima

f. Rendahnya penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar. Masih banyak terdapat kasus gangguan Kesehatan akibat pangan yang tidak aman, tercemar secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihandan masih banyak ditemukanya pangan kadaluarsa yang beredar.

1.3. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

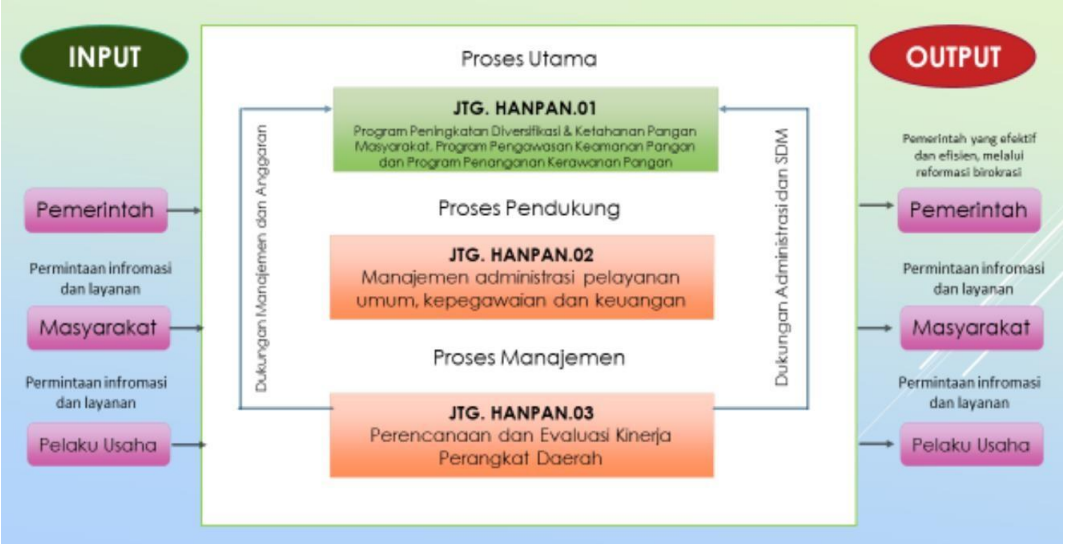
a. Mandat Kinerja

	CASECADING PERUBAHAN 2019-2023 (2023)												
TUJUAN	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN												
INDIKATOR	IKD : INDEKS KETAHANAN PANGAN												
SASARAN 1	Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distribusi Pangan Masyarakat												
SASARAN 2	Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragaman												
	IKU : Persentase Ketersediaan Pangan Utama												
	IKU : Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)												
	IKI: Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan												
PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT										PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
INDIKATOR	IKP : Angka ketersediaan energi				IKP : Angka ketersediaan protein						Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	
KEGIATAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	
INDIKATOR	IK : % ketersediaan pangan pokok dan Pangan Lainnya Terhadap Kebutuhan Daerah				IK: % Cadangan Pangan pemerintah yang tersedia dan dikelola terhadap total kebutuhan daerah				IK: Jumlah konsumsi energi		IK: ∑ kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	IK: Jenis pangan segar yang diawasi	
SUB KEGIATAN	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemantauan Stok, Pasokan Dan Harga Pangan	Pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Registrasi Keamanan Pangan segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan
INDIKATOR	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota yang dibina	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota

b. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima merupakan acuan untuk menggambarkan hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima sesuai dengan Visi dan Misi Pemrintah Kota Bima untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima ditunjukan Gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar.1.1 Peta Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

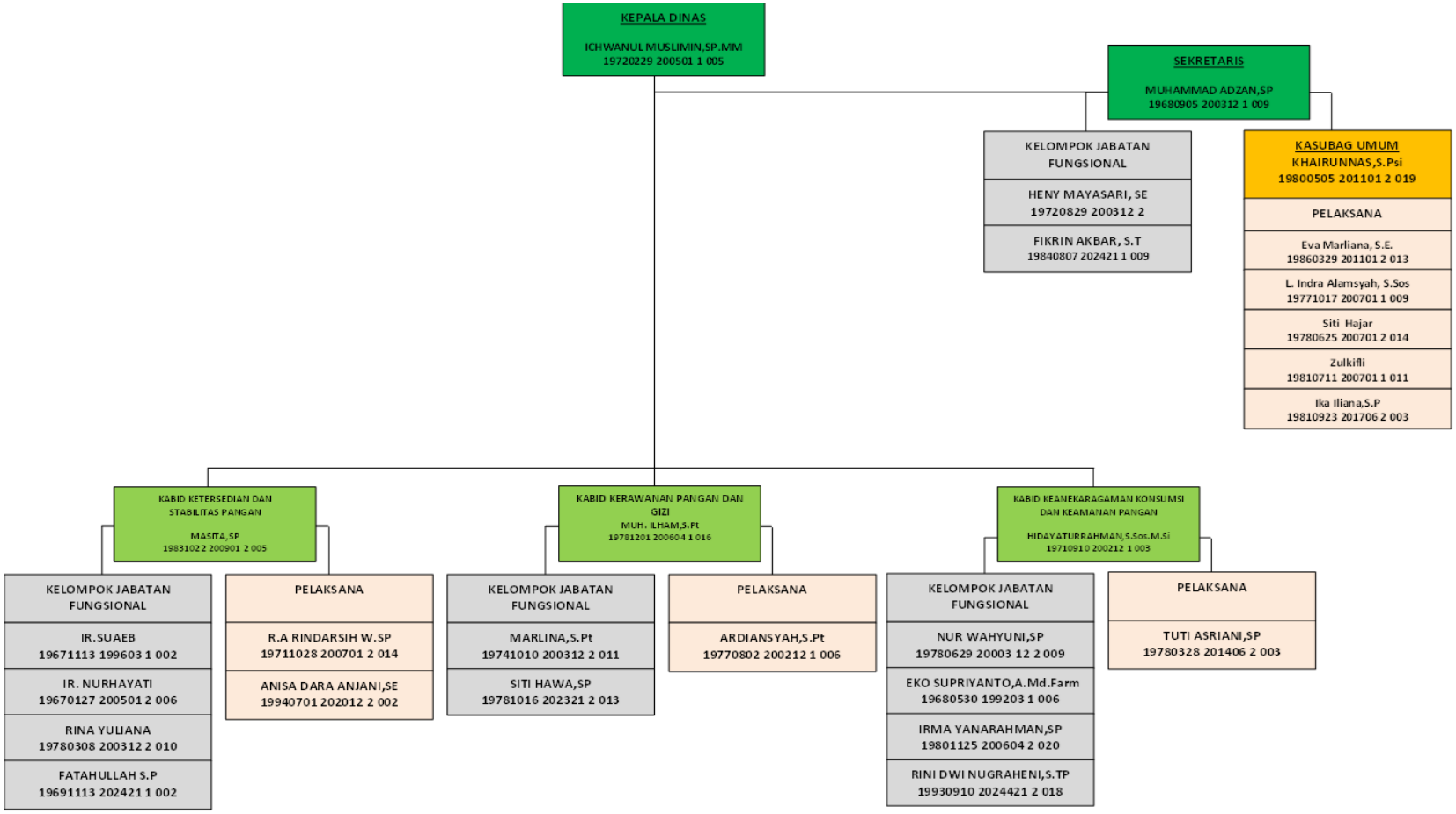


c. Struktur Organisasi

Undang-undang no 23 TAhun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mendorong dilakukanya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan.

Organisasi DISHANPAN Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 5 (lima) Pejabat Administrator sebagaimana pada gambar struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan ditunjukan pada gambar 1.2. dibawah ini:

Gambar. 1.2. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN



1. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota Bima dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi ewenangan Daerah di bidang Ketahanan Pangan. Hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan:

1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang ketahanan Pangan (bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan);
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan pangan (bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan);
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan (bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan);
4. Pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan (bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan);
5. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan (bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan);
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal. Berikut uraian tentang Kondisi Riil Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

4.1.1. Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah

a) Berdasarkan Golongan/ Pangkat

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci dalam suatu organisasi. Ukuran dalam melihat kualitas SDM salah satunya dengan menggunakan data pendidikan formal pegawai. Keadaan pegawai dilingkungan Dinas Ketahanan Pngan kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber Daya Manusia pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima hanya memiliki pegawai struktural tidak memiliki pegawai Fungsional.

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memiliki pegawai sebanyak 24 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 15 orang Pegawai Non PNS.
Berdasarkan golongan/pangkat, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima terdiri dari :

- Pegawai golongan IV sebanyak 3 orang atau 13,64 % ;
- Pegawai golongan III sebanyak 19 orang atau 86,36 % ;
- Pegawai golongan II dan golongan II tidak ada 0 %

Selengkapnya mengenai pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan golongan/pangkat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

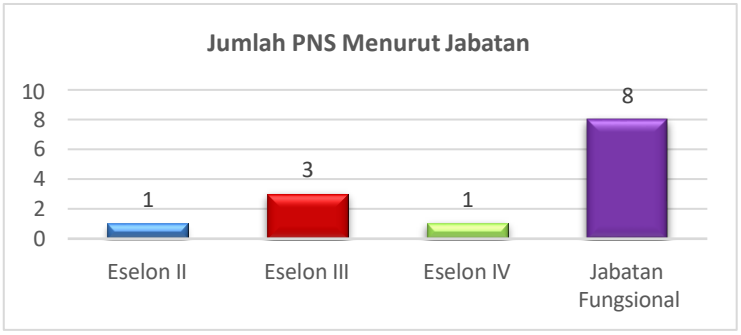
Tabel 1.1. Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
Berdasarkan Golongan/Pangkat

Golongan/ Pangkat	a	b	c	d	IX	Jumlah
IV	4	1	0	0	0	5
III	4	1	3	10	0	19
II	0	0	0	0	0	0
I	0	0	0	0	0	0
PPPK					4	4
JUMLAH	8	2	3	11	4	28

Sumber Data: Sub.Bag Umum & Kepegawaian 31 Desember 2025

b) Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.2. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

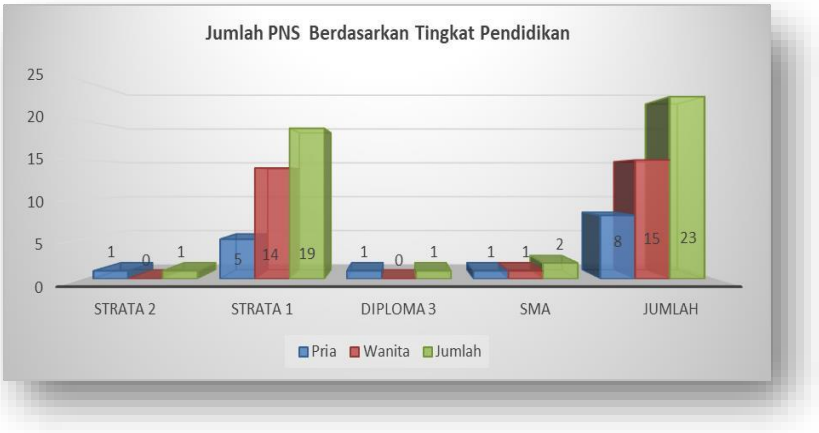


Sumber Data: Sub.Bag Umum & Kepegawaian Desember 2024

Dari tabel pegawai berdasarkan golongan dan pangkat terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima didominasi oleh pegawai bergolongan III sebanyak 86,36 %.

c) Berdasarkan Pendidikan

Gambar. 1.3. Jumlah PNS Dinas Ketahanan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025



Sumber Data: Sub.Bag Umum & Kepegawaian Desember 2025

Dari Gambar 1.4 terlihat bahwa PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tingkat pendidikan Strata-2 berjumlah 1 orang, Strata-1 berjumlah 19 orang, Diploma III berjumlah 1 orang, dan tamat SMU/sederajat berjumlah 2 orang.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah pegawai pria di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebanyak 10 orang atau 42 %, dan jumlah pegawai wanita tercatat sebanyak 14 orang atau 58 % dengan demikian jumlah pegawai wanita di Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melebihi standar/komposisi anjuran pemerintah yaitu sebesar 20 % dari jumlah keseluruhan pegawai.

Selain didukung oleh pegawai PNS, saat ini Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dibantu oleh 16 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.

Dalam lima tahun ke depan masih terdapat kebutuhan pegawai sesuai dengan rincian analisis jabatan yang ada. Jumlah pegawai yang ada saat ini dan kebutuhan berdasarkan usulan Rencana SOTK Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut (Tabel 2.3):

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representatif untuk mendukung

kelancaran operasional tugas Dinas Ketahanan Pangan pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan Internet, dan mesin faksimili;
3. Perangkat komputer (laptop dan PC) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer , dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, air conditioner (AC), kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

Berikut tabel rekapitulasi dukungan sarana dan prasarana perkantoran pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima:

Tabel. 1.4. Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI				JUMLAH
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
					LAYAK PERBAIKAN	TIDAK LAYAK PERBAIKAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	02.06.02.01.48	MEJA 1/2 BIRO	24				24
2	02.06.02.01.49	KURSI TAMU / SOFA	1				1
3	02.06.03.02.02	LAP TOP / NOTEBOOK	9			3	12
4	02.06.03.02.01	PC UNIT	8			1	8
5	02.06.03.04.08	PRINTER	6			6	12
6	02.06.03.01.28	KURSI TUNGGU	1				1
7	02.06.01.01.02	MESIN KETIK	1				1
8	02.04.03.07.10	SCANNER	1				1
9	02.07.01.01.03	PROYEKTOR	2				2
10	02.07.01.01.01	KAMERA	2			2	4
11	02.06.02.04.03	AC	4				4
12	02.06.02.04.06	KIPAS ANGIN	9			2	11
13	02.04.03.01.71	MOBIL	1				1
14	02.04.03.01.03	GPS	1				1
15	02.06.01.04.04	FILLING BESI / METAL	3				3
16	02.06.02.01.31	KURSI KERJA PEGAWAI	26				26
17	02.06.04.03.05	KURSI PUTAR	5			9	14
18	02.06.02.01.04	MEJA KERJA PEGAWAI	26				26
19	02.06.04.03.05	KURSI KERJA ES. III	5				5
20	02.06.04.07.06	LEMARI ARSIP	4				4
21	02.06.04.01.06	MEJA KERJA ES. III	3				0
22	02.06.01.05.17	MESIN ABSENSI	1				1
23	02.06.02.01.10	MEJA RAPAT	6				6
24	02.06.01.04.04	PAPAN VISUIL	4				4
25	02.07.01.01.01	HANDY CAM	1				1
26	02.04.03.09.11	ALAT UKUR	1				1
27	02.06.02.06.12	WIRELESS	1				1
28	02.06.03.05.11	UPS	1				1
29	02.06.04.07.06	LEMARI KACA	4				4
30	02.06.01.05.43	MESIN POMPA AIR	1				1

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH BERDASARKAN KONDISI				JUMLAH
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
					LAYAK PERBAIKAN	TIDAK LAYAK PERBAIKAN	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
31	02.06.01.05.40	SEPIT KAYU	1				1
32	02.07.01.01.03	LAYAR PROYEKTOR	2				2
33		ROUTER WIFI	1				1
34		SOUND SYSTEM	1				1
35		GORDYN	18				18
36		KURSI RAPAT	50				50
37		SCANER EPSON DS310	1				1
	Jumlah		**233**	**0**	**0**	**22**	**255**

Sumber Data: Sub.Bag Umum & Kepegawaian Desember 2025

1.4.3. Keuangan dan Aset

1. Keuangan

   Alokasi anggaran tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan. Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel.1.5. Ringkasan Belanja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Target
5	BELANJA DAERAH	4.762.502.588,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.156.835.138,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.835.138,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.667.450,00
5.2	BELANJA MODAL	86.940.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.940.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedunag & Bangunan	-,00
5.2.05	Belanja Modal Gedunag & Bangunan	-,00

Sumber Data, Laporan Realisasi APBD per 31 Des 2025

2. Aset

   Nilai Aset pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Nilai Aset Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025

Kode Barang	Nama Bidang Barang	Saldo Awal Audited 2023	Mutasi	Berkurang	Saldo Akhir 2024
			Bertambah (+)	Berkurang (-)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.3.1	**Tanah**				
1.1.3.1.01	Tanah				
1.3.1.01.001	Tanah untuk pembangunan tempat kerja	375.500,00			357.500,00
1.3.2	Peralatan dan mesin	1.228.489.533.31	15.200.000,00	165.976.633,00	1.077.712.899,98
1.3.2.01	Alat Besar	7.370.000,00	7.370.000,00		7.370.000,00

Kode Barang	Nama Bidang Barang	Saldo Awal Audited 2023	Mutasi	Berkurang	Saldo Akhir 2024
			Bertambah (+)	Berkurang (-)	
1.3.2.02	Alat alat Angkutan	292.719.899.99		165.976.633,33	126.743.266.66
1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat ukur	28.995.000,00			28.995.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.024.233.32			300.024.233.32
1.3.2.06	Alat studio dan Komunikasi	27.992.000,00			27.992.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	4.455.000,00			4.455.000,00
1.3.2.10	Komputer	566.933.400,00	15.200.000,00		582.133.400,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.757.075.375.90	212.427.347,00		1.969.502.722.90
1.3.3.01	Bangunan Gedung	196.286.333.34			196.286.333.34
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol	201.410.000,00	212.427.347,00		413.837.347,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.500.000,00			11.500.000,00
1.3.4.04	Jaringan	11.500.000,00			11.500.000,00
1.3.2	Aset Tetap Lainnya	188.593.833.33	165.976.633.33	15.976.633.33	338.593.833.33
	Jumlah Total	***4.817.087.109,19***	***628.601.327,33***	***347.929.899.66***	***3.127.500.813,63***

Sumber Data, Data Aset Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **RIGKASAN**
2. **BAB I. PENDAHULUAN**

   Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Selain itu dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis/isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Kota Bima.
3. **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

   Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Kota Bima.
4. **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

   Pada bab ini memuat penjelasan capaian kinerja program dan kegiatan organisasi beserta analisis capaian kinerjanya serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).
5. **BAB IV. PENUTUP**

   Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.
6. **LAMPIRAN**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, dan program Dinas Ketahanan Pangan. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan untuk Tujuan KoTa Bima tahun 2024-2026 yang tertuang dalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2026.

2.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran ke IV (Empat) Rencana Pemerintah Daerah 2024-2026 (RPD) yaitu ***"Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat"*** yang merupakan salah satu penjabaran dari tujuan Pertama RPD ***"Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing"***.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian merupakan penyesuaian dari indeks yang telah ada berdasarkan ketersediaan data tingkat kabupaten/ kota dan provinsi. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.



2.1.2. Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai

Tabel. 2.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan			Angka	72,49	74,74	76,98
		Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84	85	86
			Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	CV %	≤ 10	≤ 10	≤ 10
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	82,7	84,2	85,7

Sumber: RPD Kota Bima Tahun 2024-2026 & Hasil analisis dan Casecading Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 20224-2026

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan mendukung tercapainya sasaran OPD. Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tahun 2024-2026.

Tabel. 2.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	72,49
1.1	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 2025

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	*3*	*4*	*5*	*9*
SASARAN OPD				
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Pangan, Kualitas Pemanfaatan Pangan dan Aksesibilitas Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 2. Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	Rasio antara nilai skor PPH Ketersediaan tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan. Skor PPH Ketersediaan merupakan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan/ NBM. $CV = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$ Definisi: a. Stabilitas Harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga. b. Klasifikasi : Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk Tahun 2020 ditetapkan di bawah 10 (Untuk komoditas beras) c. Std. Deviasi Harga Pangan adalah nilai statistik harga pangan yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data harga pangan dari suatu sampel statistik harga pangan dengan data mean atau rata-rata harga pangan. Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan, adalah nilai rata harga pangan pada tahun berjalan. *d.* Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan adalah: rata-rta harga pangan beras dalam satu tahun.	BPS, Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Distibutor/ Pelaku Usaha, Lembanga distribusi pangan masyarakat (LDPM). Survey harga mingguan Pasar, DISPERINDAG, Pelaku Usaha di pasar strategis (Pasar Raya Amahami, Pasar Lama, Pasar Raba)	Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
	3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Rasio antara nilai skor PPH konumsi tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan Formulasi Perhitungan: **% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan** Definisi: a. Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. b. Klasifikasi : Konsumsi Energi, Konsumsi Protein dan Angka Kecukupan Gizi (AKG).	BPS (Data Sekunder hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional / Susenas)	

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	*3*	*4*	*5*	*9*
SASARAN OPD				
		c. % Angka Kecukupan Gizi (AKG): Jumlah energi dan protein yang harus dikonsumsi oleh setiap orang dalam melakukan kegiatan/aktivitas per hari sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan d. Analisis konsumsi pangan berdasarkan data Susenas tahun 2015-2020 menggunakan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.150 kkal dan Angka Kecukupan Protein 57 gram. e. Total Konsumsi Energi Penduduk (gram/kap/hari) Total konsumsi energi penduduk diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari sembilan kelompok pangan. Konsumsi energy setiap kelompok pangan diperoleh dari penjumlahan konsumsi energi dari jenis pangan pada kelompok tersebut. Penghitungan konsumsi energi masing-masing jenis pangan diperoleh dari perkalian antara jumlah (gram) pangan yang dikonsumsi dengan kandungan energy setiap jenis pangan tersebut.		
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP PD	**Angka** Semakin besar realisasi Nilai Penilaian SAKIP berdasarkan penilaian Inspektorat Kota Bima maka akuntabilitas kinerja instansi Dinas Ketahanan Pangan semakin baik.		Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan

2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja ini, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan kepala Perangkat Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja diantaranya adalah wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
A.	Sasaran Strategis :		
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84 %
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	<10
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7
A.1.	Sasaran Program :		
1.	Meningkatnya divervikasi pangan masyarkat	Jumlah ketersediaan Protein	127 kka/ kap/ hari
		Jumlah ketersediaan Energi	3.444 gram/ kap/ hari
2.	Menurunya daerah rawan/rentan pangan	Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan	1 %
3.	Terjaminya kemanan dan mutu Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT)	Persentase Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	100 %
4.	Tercapaiannya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Persentase Rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.4.431.334.174,-. Dengan rincian Belanja dapat dilihat pada table berikut.

2.3.1. Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.5. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan APBD Perubahan Tahun 2025

Kode	Uraian	Target
5	BELANJA DAERAH	4.762.502.588,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.156.835.138,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.835.138,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.667.450,00
5.2	BELANJA MODAL	86.940.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.940.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedunag & Bangunan	-,00
5.2.05	Belanja Modal Gedunag & Bangunan	-,00

Sumber Data, Laporan Realisasi APBD per 31 Des 2024

2.3.2. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memiliki dua sasaran strategis yaitu ***Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan.*** Sehingga seluruh anggaran pada APBD Perubahan tahun 2025 dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.

Dalam mewujudkan target kinerja sasaran tersebut program kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pada Dinas Ketahanan Pangan kota Bima Tahun Anggaran 2025

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan energi	3.444 kka/ kap/ hari	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan**	113%	174.609.000	Kabid Ketersedian dan Stabilitas Pangan; Kabid Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan
		Jumlah ketersediaan protein	127 gram/ kap/ hari	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	18.078.200	Kabid Ketersedian dan Kerawanan Pangan
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit	52.827.200	Kabid Ketersedian dan Kerawanan Pangan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	1 Laporan	59.212.000	Kabid Ketersedian dan Kerawanan Pangan
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	2 Dokumen	44.491.600	Kabid Ketersedian dan Kerawanan Pangan
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dari Pengelolaan Cadangan Pangan yang menjadi kewenangan**	**Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan**	20	454.355.300	Kabid Ketersedian dan Kerawanan Pangan
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	2	16.623.100	Kabid. Kerawanan Pangan dan Gizi
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25 Ton	374.876.000	Kabid. Kerawanan Pangan dan Gizi

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	25 Ton	26.809.000	Kabid. Kerawanan Pangan dan Gizi
				Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	25 Ton	36.047.200	Kabid. Kerawanan Pangan dan Gizi
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsums	2.067 kka/ kap/ hari	210.080.000	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
						Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	114,21 Gram/kap/ hari		
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 dokumen	16.800.000	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	193.280.000	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunya daerah rawan/rentan pangan	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	1%	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah	Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan	10 kelurahan	115.963.100	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	4 Laporan	115.963.100	Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Terjaminya kemanan dan mutu Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT)	Presentase bahan pangan yang lolos uji	100%	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar yang diawasi	85%	130.339.600	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.001.300	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	66.204.600	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Laporan	42.133.700	Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tercapaiannya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu	Persentase capaian pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terlasananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100%	20.125.000	Sekretaris Dinas
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.575.000	Sekretaris Dinas
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.655.000	Sekretaris Dinas
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1.040.000	Sekretaris Dinas
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	695.000	Sekretaris Dinas

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	576.000	Sekretaris Dinas
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	9.584.000	Sekretaris Dinas
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3.164.799.138	Sekretaris Dinas
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang Bulan	3.056.375.138	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	104.780.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.764.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	880.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tepat waktu**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 Persen**	750.000	Sekretaris Dinas
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	750.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100 Persen**	10.251.100	Sekretaris Dinas
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	826.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.645.900	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	6.779.200	Sekretaris Dinas
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	181.512.700	Sekretaris Dinas
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.425.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.318.600	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.821.600	Sekretaris Dinas
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	32.547.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	90.400.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**	110.495.200	Sekretaris Dinas
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	101.506.300	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	4.489.200	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.499.700	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	161.273.100	Sekretaris Dinas
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	95.904.700	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	50.531.400	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Penanggugjawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.837.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan termanfaatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	114.889.350	Sekretaris Dinas
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	29.999.350	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	14.680.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	10.270.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
				Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	59.940.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dengan Walikota Bima tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dan PMK 214 Tahun 2024 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator dan dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel 3.1 (Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja) dibawah ini.

Kerangka Pengukuran Kinerja

1. **Dalam menghitung kinerja, terdapat 2 komponen perhitungan yang dilaksanakan pada komponen yang diukur**
   a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
   % capaian kinerja = (realisasi kinerja/target kinerja) X 100%
   Indikator Kinerja sasaran dengan pencapaian kinerja yang menggunakan perhitungan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Sasaran dengan Target Meningkat

Indikator Sasaran	Target
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7

   b. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin buruk, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
   % capaian kinerja = (2 X target – realisasi/ target kinerja) X 100 %

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Sasaran dengan Target Menurun

Indikator Sasaran	Target
Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10%

2. **Skala Pengukuran dan Predikat**
   Kinerja sasaran diperoleh dengan menghitung Indikator Kinerja Sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3. Pengukuran Efisiensi

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2025 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variable capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran keluaran kegiatan meliputi: capaian keluaran anggaran, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dengan membandingakan penjulahan (∑) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (∑) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan rumus:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran (Output) yang ke-i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran yang ke-i
Cki : Capaian keluaran I

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih perkalian pagu anggaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggran keluaran dengan capaian keluaran.

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 3.3. Penjelasan Hasil perhitungan Keberhasilan Pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Indikator	Target	Keterangan
A. Indikator sasaran		
1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84 %	Semakin besar nilai persentase capaian ketersediaan pangan, maka capaian kinerja semakin baik (maximize target).

Indikator	Target	Keterangan
2. Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10%)	Semakin kecil angka CV dibawah CV harga pangan yang ditetapkan/harga pasar, maka semakin stabil harga pangan (beras) ditingkat konsumen, sehingga capaian kinerja semakin baik (minimize target).
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7 %	Semakin besar capaian Skor PPH Konsumsi maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan di masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (maximizetarget).
B. Indikator Progran		
1. Jumlah Ketersediaan Energi	3.444 kka/ kap/ hari	Semakin besar jumlah ketersediaan energi, maka semakin terpenuhi ketersediaan energi masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (maximize target). Diharapkan terjadi penurunan konsumsi beras yang diimbangi konsumsi umbi-umbian.
2. Jumlah ketersediaan protein	67,68 gram/ kap/ hari	Semakin besar jumlah ketersediaan protein, maka semakin terpenuhi ketersediaan protein masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (maximize target).
3. Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	100 %	Semakin besar persentase capaian kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani maka capaian kinerja semakin baik (maximize target).
4. Persentase bahan pangan yang lolos uji	100 %	Semakin tinggi Persentase bahan pangan yang lolos uji maka semakin aman pangan segar di masyarakat, sehingga capaian kinerja semakin baik (maximize target).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tujuan RPD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Sasaran RPD : 1. Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang mejadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2024 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2025 yaitu:

Tujuan: Meningkatnya Ketahanan Pangan
Sasaran Strategis I: Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan
Sasaran Strategis II: Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan pangan Kota Bima tahun 2025, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel.3.5. berikut.

Tabel.3.4. Perbandingan Realisasi Capain Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis
Tahun 2023-2024 dan Capain Akhir Rentra 2024-2026
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2026		Sumber Data
			Target	Realisasi	%	Kriteria/ Kategori	Target	Realisasi	%	Kriteria/ Kategori	Target Renstra	Capaian Renstra	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
1.	***Indikator Tujuan:*** Indeks Ketahanan Pangan	Angka	63,65	74,49	117	Sangat Baik	71,25	75,53	106	Sangat Baik	73,25	102,8%	IKU Kota, BAPANAS
2.	***Indikator Sasaran I*** Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan												
a.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen		84,04			84	86,80	103	Sangat Baik	86	101%	Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
b	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	Persen	≤ 10	≤ 10	100	Sangat Baik	≤ 10	≤ 10	100	Sangat Baik	≤ 10	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan
c.	Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Persen	89	79,8	90	Baik	82,7	80,8	98	Baik	85,7	94,3	Dinas Ketahanan Pangan, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
3.	***Indikator Sasaran II*** Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan												
a.	Nilai SAKIP PD	Nilai	-	81,79		A	82	80,25	97,9	Baik	83	96,69	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan

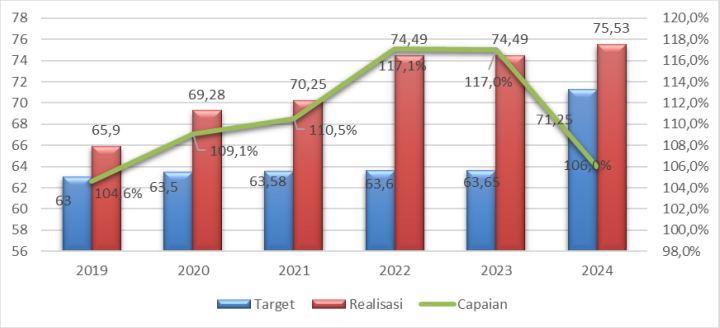
Sumber data: Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025

Analisis Kinerja Tujuan OPD:
Indeks Ketahanan Pangan

Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah (kab/kota). Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota). IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah (kabupaten/kota) dikelompokkan ke dalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan). Berdasarkan hasil Analisi FSVA Kota Bima pada tahun 2024 tidak terdapat Kelurahan Rawan/Rentan Pangan atau masuk pada kategori ***Tahan Pangan*** pada prioritas 6 (enam). Tingginya capaian ini dikarenakan adanya program penanganan kerawanan pangan, koordinasi lintas sektor pada pencapaian target indikator Individu FSVA.

3.1.1. Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Gambar.3.1. Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2019-2025

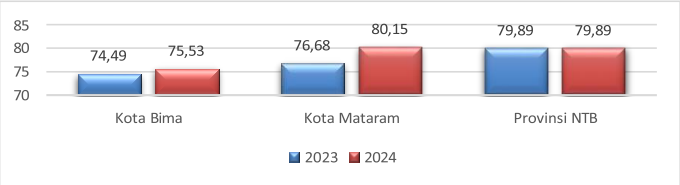


3.1.2. Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2019-2025, target akhir Renstra adalah 117%, Capaian jangka menengah periode pertama Renstra 2024-2026 adalah 102,8% dari target tahun 2025 sebesar 73,25 dan kondisi capaian ini rata-rata diatas target.

3.1.3. Membandingkan terhadap target nasional dan Daerah Lain

Gambar.3.2. Capaian Kinerja Indikator Indeks Ketahanan Pangan
Kota Bima, Provinsi NTB dan Kota Mataram 2024-2025



Dari tabel diatas IKP Kota Bima Tahun 2024-2025 masih dibawah Kota Mataram dan Provinsi NTB.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan Faktor-Fakor penyebab yang mempengaruhi wilayah rentan rawan pangan di Kota Bima antara lain: 1) Rumah tangga tanpa akses air bersih/ terbatas; 2) Luas Lahan, Produksi pangan wilayah lebih kecil dibandingkan kebutuhan (kurang); 3) Sarana dan prasarana perdagangan, sebagai akses pemenuhan pangan; 4) Jumlah tenaga kesehatan; dan 5) Jumlah penduduk tidak sejahtera.

Faktor mempengaruhi keberhasilan tercapaianya target indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan antara: a) Akses jalan yang mendukung ditribusi pangan terpenuhi berada pada prioritas 4, 4 dan 6.

3.1.5. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	71,25	75,53	106%	929.187.653	921.881.983	99%	6,4

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase kinerja tujuan Dinas Ketahanan Pangan terhadap target 2024 sebesar 106% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja kinerja anggaran 99%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian tujuan Meningkatnya Ketahanan Pangan telah tercapai ***EFISIEN*** dengan Tingkat efisiensi sebesar 6,4% (berada pada range -20% s.d 20%).

Berikut aasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dalam medukung pencapaian tujuan *Meningkatnya Ketahanan Pangan* dengan indikator tujuan sasaran *Indeks Ketahanan Pangan.*

Tabel. 3.5. Capaian Kinerja Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Sasaran Strategis Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024-2026	Capaian Pengukuran Indikator Sasaran	Realisasi	Capaian (%)	Capaian terhadap Target Akhir RPD (%)
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,49	Hasil perhitungan FSVA/IKP BAPANAS	75,53	108	(76/72,49)x100 = 119
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persen	84	Rasio antara nilai skor PPH Ketersediaan tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan (100)	86,80	103	(86,80/84)x100 = 103
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	Persen	≤ 10	Koefisien Varian Harga menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk komoditas yang di pantau. Std. Deviasi Harga Pangan yang di pantau CV = ----------X 100 Rata-rata Harga Pangan Tahun Berjalan	≤ 10	100	(609/13.231) x 100 CV = CV 4,6 CV = ≤ 10 CV = 100
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Persen	82,7	Rasio antara nilai skor PPH konumsi tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan (100)	80,8	89,06	(80,8/89,6)x100 = 90
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP PD	Nilai	82	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat	80,25	97,9	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 2024

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari 4 indikator kinerja Sasaran Strategis dua indikator memperoleh predikat ***tercapai*** dengan persentase capaian diatas 100.00%, dan dua indikator dengan capaian 89,06% dan 97,9%. Adapun evaluasi dan analisis capaian dari masing-masing sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya Ketersediaan, Cadangan dan Distrubisi Pangan

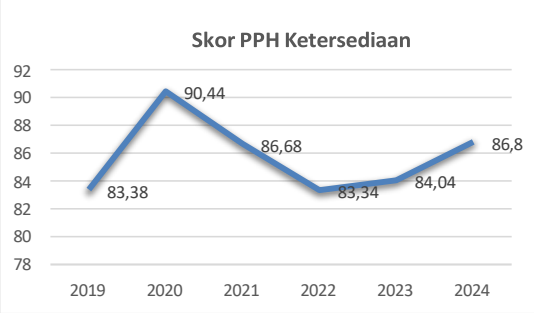
1. ***Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan***

Tabel. 3.6. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran Strategis 1, Indikator Skor Pola

Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Pangan, Kualitas Pemanfaatan Pangan dan Aksesibilitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Rasio antara nilai skor PPH Ketersediaan tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan. Hasil Perhitungan : skor angka konsumsi pangan sebesar 86,80 dari penjumlahan dari skor PPH untuk 9 jenis kelompok bahan makanan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain). Skor PPH Ketersediaan merupakan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan/ NBM.

Target 84 realisasi 86,80 dan capaian 103% yang masuk dalam kategori ***Baik.*** Indikator kinerja *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan* baru digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis pada periode Renstra 2024-2026, dinama pada tahun 2023 (periode Rentra 2018-2023) kinerja ini belum digunakan untuk pengukuran kinerja strategis perangkat daerah. Meskipun demikian Dinas Ketahanan Pangan tetap melakukan pengambilan data secara mandiri Skor PPH Ketersediaan, sehingga perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat terpenuhi.

1.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Dengan Tahun Lalu



1.1.2. Membandingkan *terhadap target capaian jangka menengah*

Jika dilihat pada tabel *Perbandingan Realisasi Capain Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024-2026 dan Capain Akhir Rentra 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima* diatas, maka target akhir Rentra pada tahun 2026 untuk indikator kinerja sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan ditetapkan 86 poin, dengan capaian kinerja tahun 2025 ini telah mencapai 101% terhadap target. Kondisi ini sudah melebihi target akhir Renstra, sehingga kedepan perlu dilakukan perubahan target IKU OPD dengan membuat regulasi Perubahan IKU Tahun 2025. Penetapan

target yang terlalu rendah ini disebabkan masih kuranya SDM pengelola data kinerja terutama p menghitung NBM. Sehingga Tingkat errornya masih cukup tinggi.

1.1.3. Membandingkan terhadap target nasional

Indikator Indikator *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan* dibandingkan dengan target Nasional dalam hal ini Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG X THN 2012) 100% dengan AKE 2.400 Kkal. Sehingga capain kinerja jika dibandingkan dengan standar nasional sebesar 86%, artinya capaian ini berada dalam keadaan yang cukup optimis untuk dapat tercapai.

1.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditetapkan.

Faktor-*faktor yang menunjang keberhasilan* tercapaianya target indikator kinerja sasaran strategis *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, dari hasil perhitungan NBM 2025:* 1) AKE hasil perhitungan NBM tahun 2025 (3.286 kkal/kap/hari) terdapat penurunan dibandingkan tahun 2024 (2.950 kkal/kap/har) namun terdapat 5 kelompok pangan yang mempunyai nilai skor riil lebih tinggi dari skor maksimal; 2) Intevensi pelaksanaan program kegiatan seperti suvey dan pengolahan data bulanan tentang ketersediaan pangan (data pangan stretegis); 3) membangun kerjasama bersama BULOg sebagai mitra dalam pemenuhan kebutuhan beras terutama pada saat terjadi kelangkaan, kenaikan harga, kebencanaa dan pelaksanaan pasar murah; 4) Semakin meningkat dan beragamnya ketersediaan pangan di masyarakat; 5) Informasi pasar yang mendukung distribusi pangan; 6) Kampanye, sosialisasi penganekaragaman pangan dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penganekaragaman ketersedian pangan lewat pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.

Faktor-faktor *yang mempengaruhi kegagalan* tercapaianya target:

Belum dilakukan pencatatan akurat oleh instansi terkait seperti KSOP (Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) Kota Bima khususnya data eksport dari Kota Bima dan data import untuk Kota Bima; Dinas terkait lainnya seperti Dinas Peternakan tidak menyediakan data produksi bulanan seperti daging sapi, telur, daging ayam; Data eksport dan import yang melalui lalulintas darat tidak kami dapatkan dari instansi terkait mis, Dinas Perdagangan sehingga data kami peroleh melalui pelaku usaha, pedagang atau distributor.

Masukan dan saran dalam rangka pencapaian skor ideal sembilan kelompok pangan terutama pada skor pangan yang belum memenuhi standar ideal atau nilai skor riilnya kurang*:* 1) Perlu adanya kebijakan upaya peningkatan penyediaan pangan melalui intensifikasi produksi tanaman pangan maupun mendorong upaya penyediaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta terutama pangan yang belum memenuhi target skor PPH sperti Pangan Umbi-umbian, minyak dan lemak, buah biji berminyak, sayuran dan buah, kelompok pangan lainya; 2) Informasi pasar yang perlu ditingkatkan, sehingga

ditribusi bahan pangan Kota Bima semakin baik dan beragam untuk menunjang pencapaian ta
lokal yang bersumber dari pemanfaatan pekarangan keluarga; 4) Perlu pembenahan sistem in
menangani informasi keluar – masuk bahan pangan dari kabupaten/kota, agar dapat terdeteksi
masuk dan keluar dari Kabupaten/Kota masing- masing; Untuk penguatan kapasitas enumerat
diperoleh hasil pelaporan lebih valid.

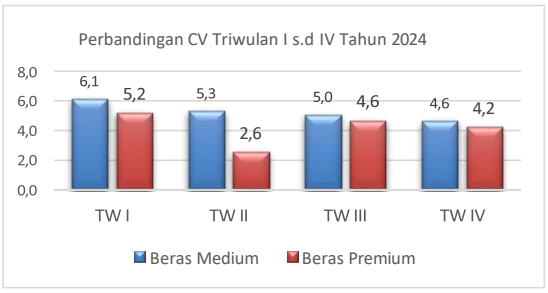
2. *Indikator Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)*

Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Pangan, Kualitas Pemanfaatan Pangan dan Aksesibilitas Pangan	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	$CV = \frac{\text{Std. Deviasi Harga Pangan}}{\text{Rata-rata Harga Pangan tahun Berjalan}} \times 100$

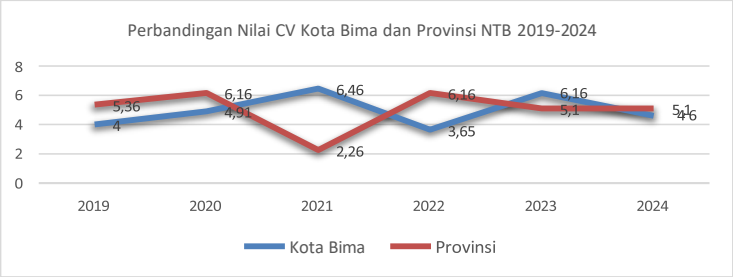
2.1.1. Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu

Dengan realisasi kinerja diatas 100% dan termasuk kategori ***Baik.*** Dalam rangka mempermudah akses masyarakat terhadap informasi harga pangan, dan menjamin stabilitas harga pangan tetap stabil pada angka koefisien varian dibawah 10%, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melakukan updating data harga pangan yang dapat diakses secara nline melalui aplikasi panel harga panga. Berikut nilai CV per Triwulanan tahun 2025.





2.1.2. Membandingkan Dengan Tahun Lalu dan Jangka Menengah



Dari tabel diatas niali CV harga pangan beras dapat dikatakan stabil Dimana nilai koefisien varian harga masih pada ambang batas yaitu CV ≤ 10% periode 2019-2024.

2.1.3. Membandingkan *terhadap target nasional/ Provinsi*

Dibandingkan dengan Provinsi NTB nilai CV harga beras Kota Bima (4,6) berada dibawah Provinsi NTB (5,1).

2.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditetapkan.

Pada tiga gambar perbandingan nilai Koevisien Varian (CV) beras diatas dan berdasarkan analisis data harga komoditas pertanian pada Tingkat harga eceran secara triwulan tahun 2024, maupun selama periode 2019-2024, nilai coefisien variasi harga beras masih dibawah batas maksimum CV 10%, tidak mengalami kenaikan yang signikfikan. *Capain tersebut didukung* beberapa upaya menjaga Stabilisasi Pasokan Harga Pangan beras, antar lain; 1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompoktani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI); 2). Panel Harga Pangan yang telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas harga pangan pokok dan strategis; 3). Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh seluruh stageholder pangan di Kota Bima, Pusat dalam hal ini BAPANAS, Bulog, Provinsi NTB; 4). Bantuan Pangan Beras, realisasi bantuan pangan beras tahun 2024 sebesar 19,67 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah.; 5) Intensitas koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dalam rangka pelasanaan GPM/ Gerakan Pangan Murah.

Masukan dan saran dalam menjaga satabilitas harga pangan di Kota Bima antara lain: 1). Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan antar daerah dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan baik ditingkat produsen maupun ditingkat konsumen, mengawasi pelaku usaha pangan, membangun infrastruktur, melakukan operasi pasar/ GPM, melakukan pengawasan terhadap ketersediaan petani terutama pada panen raya.

Commented [M1]:

3. *Indikator Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan*

Dengan realisasi 80,8 capaian kinerja 98% dan termasuk kategaori ***Baik***. Tingkat capaian belum ideal 100% dikarenakan ada beberapa Skor PPH ideal pada kelompok pangan tertentu yang masih perlu ditingkatakn konsumsi idealnya, seperti pada kelompok pangan umbi-umbian, kacang-kacangan dan sayur dan buah. Upaya untuk meningkatkan angka konsumsi energi yaitu melalui kebijakan peningkatan pola konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Pangan, Kualitas Pemanfaatan Pangan dan Aksesibilitas Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Rasio antara nilai skor PPH konumsi tahun berjalan terhadap nilai yang dianjurkan Formulasi Perhitungan: **% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan**

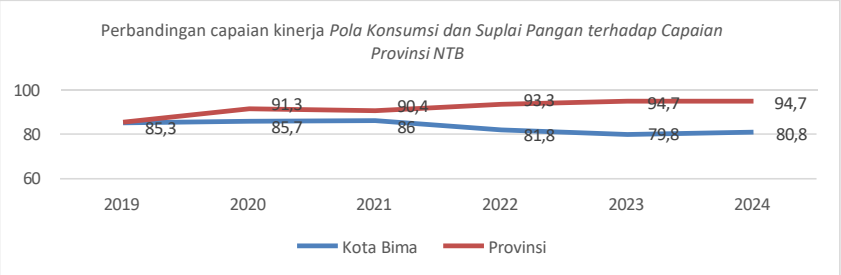
3.1.1. Perbandingan Dengan Tahun Lalu dan capain jangka menengah



Sumber Data: Bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Kaeamanan Pangan

Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan digunakan sebagai indikator kinerja sasaran startegis ke 3 pada periode Renstra 2024-2026, dibandingan pada periode Rentra 2018-2023 capain indikator ini mengalami penurunan. Konsumsi pangan Masyarakat Kota Bima telah mencapai asupan kalori sebesar 2.100 kalori/kap/hari, dan sumber utama dari konsumsi makanan di Kota Bima adalah padi-padian terutama beras, sementara asupan dari sumber pangan lainya seperti daging, sayur-sayura, masih rendah atau belum seimbangnya pola konsumsi pangan Masyarakat.

3.1.2. Membandingkan terhadap target nasional/ Provinsi



Sumber Data: Bidang Dinas Ketahanan Pangan Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Kaeamanan Pangan

3.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditetapkan.

Faktor yang mempengaruhi Capaian kinerja indikator Persentase Pola Konsumsi dan Suplai Pangan ini disebabkan masih kurang sadarnya masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Maraknya makanan siap saji yang standar mutu asupan gizinya belum ideal, belum maksimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan alternatif, masih kuranya koordinasi lintas sektor dalam mengintervensi pola pangan ideal yang B2SA. Selain itu juga keterjangkauan pangan atau akses pangan oleh Masyarakat dipengaruhi berbagai hal antara lain harga pangan, Tingkat pendapatan atau daya beli, anomaly iklim, bencana alam. Permasalahan akses pangan secara fisik masih disebabkan oleh sarana transportasi yang menyebabkan biaya distribusi pangan menjadi mahal.

Masukan *dan saran* dalam mencapai Pola Konsumsi dan Suplai Pangan yang ideal; Membangun koordinasi lintas sektor dalam upaya promosi gerakan makan sehat Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, baik dengan OPD tekhnis, Perguruan tinggi, Sekolah dan kelompok Masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas konsumsi yang beragam.

3.1.4. Analisis Efisiensi Pengunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran. Penggunaan sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan atau penyerapan anggaran. Dari 3 indikator sasaran strategis telah tercapai secara **EFISIEN**.

Tabel. 3.7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Sasaran Stategis 1

Sasran Startegis	Kinerja						Anggaran			Efisiensi	Ket
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target RKPD	Realisasi 2023	% Capaian RKPD 2024 (Realiasai 2024/realisasi 2023)	Target	Realisasi	% Capaian		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84,04	84,04	100%	103%	4.849.442.588	4.665.927.485	96%	7%	Efisien
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	%	6,16	<10%	100%	100%				4%	Efisien
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	79	89	80,8	98%				1%	Efisien

Capaian ini dikarenakan adanya program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.5. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas

Tabel. 3.8. Capain Kinerja Program yang mendukung Sasaran 1 Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggran 2024 dan 2025

Program Pendukung	Kinerja							Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
	Indikator Kinerja	Satuan	Formula Indikator (Oucome)	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Target	Realisasi	% Capaian		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi	Kka/ kap/ hari	Ketersediaan energi = ketersediaan pangan perhari x kandungan energi/100 x BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan %). *Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan/ NBM*	3.286	3.198*)	2.950,21	92	839.044.300	793.571.250	95%	-3	Efisien
	Jumlah Ketersediaan Protein	Gram/ kap/ har	Ketersediaan protein = ketersediaan pangan perhari x kandungan protein/100 x BDD (Bahan Dapat Dimakan dalam satuan %) *Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan/ NBM*	118,28	75,74*	107,23	142				33	Tidak Efisien
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	Persen	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani = (Jumlah Kelurahan Rentan/ Rawan pangan Tahun N / Jumlah Kelurahan Rentan Rawan pangan yang ditangani) X 100%	100	92	100	109	115.963.100	114.273.100	99%	9	Efisien
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase bahan pangan yang lolos uji	**%**	P Y = -------X 100% N Y : Realisasi PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan di peredaran. P : Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persayartan kemanan pangan. N : Jumlah pengawasan dalam bentuk contoh/ sampel yang diambil	100	90	100	111	130.339.600	124.073.754	95%	14	Efisien

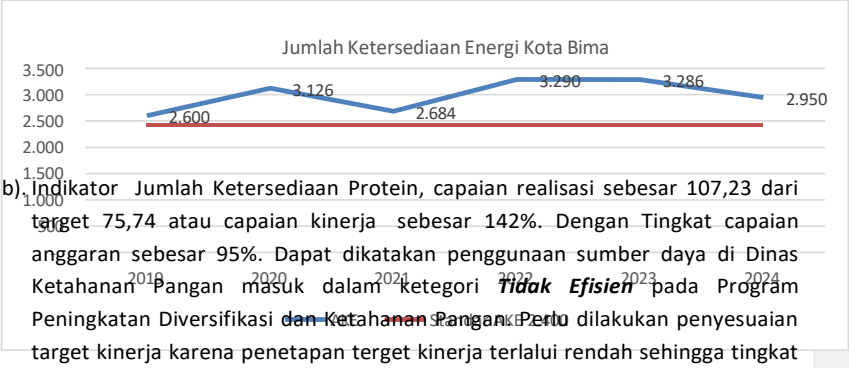
*Catatan: *) Perlu dilakukan revisi target kinerja berdasarkan trend kenaikan*

Dari 3 (Tiga) program yang mendukung tercapaianya Sasaran Meningkatnya Ketersediaan, dapat dua indikator dengan capaian 100%, dan 1 (satu) program yang capaianya 90 % lebih. Sejalan dengan dengan ketentuan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisien adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam ketegori ***Efisien***. Untuk dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2024. Berikut di uraian keberhasilan dan capaian kinerja program.

1. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan**

   Indikator program ini yaitu:

   a). Indikator Jumlah Ketersediaan Energi, tercapai realisasi 2.950,21 Kka/kap/hari dan capain indikator 92% terhadap target 3.198 Kka/kap/hari. Formula hasil perhitungan melalui hasil Analisa rumusan angka perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM). Dengan Tingkat capaian anggaran 95%. Pada gambar di bawah ini terlihat bahwa AKE Kota Bima mengalami fluktuasi namun masih berada diatas tingkat ketersediaan energi yang dianjurkan sesuai standar nasional yaitu 2.400 Kka/kap/hari. Ketersediaan energi ini bersumber dari nabati sebesar 2.495,42 kkal (84,58%) dan hewani 454,79 Kal (15,42%).



   b). Indikator Jumlah Ketersediaan Protein, capaian realisasi sebesar 107,23 dari target 75,74 atau capaian kinerja sebesar 142%. Dengan Tingkat capaian anggaran sebesar 95%. Dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam ketegori ***Tidak Efisien*** pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan. Perlu dilakukan penyesuaian target kinerja karena penetapan terget kinerja terlalui rendah sehingga tingkat efisiensi diatas standar yang dianjurkan yaitu ≥ 20% yaitu sebesar 33 %.

Faktor Pendukung Keberhasilan capaian program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan adalah: a) penguaatn cadangan pangan melalui perhitungan kebutuhan CPP Kota Bima, pengadaan CPP Kota Bima, Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Bima; b) Stabilisasi harga pangan melalui pemantauan dan pengendalian ketersediaan pangan di kota Bima melalui pengawasan ketersediaan dan pengawasan harga pangan untuk menjamin ketersediaan dan fluktasi harga pangan di Kota Bima tarpenuhi sesuai kebutuhan; c) Koordinasi lintas sektor (OPD tekhnis pangan, Bulog, pengusaha pangan, ritel pangan) dan melakukan GPM (Gerakan Pangan Murah); d) Perluasan akses informasi ketersediaan, pasokan dan harga pangan melalui webside dinas Ketahanan Pangan; Updating Data Neraca Pangan Strategis awal tahun, bulanan maupun tahunan, ini dilakukan karena terdapat perubahan data produksi dan impor; . e) penguatan pelaku usaha pangan melalui fasilitasi pengusaha pangan lokal dengan perbankan;
Faktor Penghambat Keberhasilan capain program diantaranya karena pencatatan stok, pasokan dan harga pangan masih secara manual yaitu saat dilapangan menggunakan kertas kemudian input data. Terkadang terjadi keterlambatan input data karena bersamaan dengan kegiatan lain, namun masih dapat teratasi.
Dukungan terhadap capaian kinerja program ini di peroleh dari dari 3 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut:

a. ***Kegiatan*** Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

   Indikator kegiatan Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan dengan target 113%, realisasi 113% atau capaian 100% kategori Sangat Baik. Indikator ini mulai di lakukan perhitungan pada periode Renstra 2024-2026 dan periode sebelumnya belum dilakukan perhitungan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Untuk ketersediaan semua komoditi yang menjadi kewenangan telah melebihi dari angka kebutuhan.

Tabel.3.7. Rasio Ketersediaan Masing-masing Komoditas
Terhadap Kebutuhan Tahun 2025

NO	Komoditi	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Ketersediaan	Rasio Ketersediaan
1	*2*	*3*	*4*	
1	BERAS	24.499,71	17.895,36	137%
2	JAGUNG	13051,26	9953,23	131%
3	DAGING SAPI	879,26	692,05	111%
4	DAGING AYAM RAS	2084,66	1849,00	113%
5	TELUR	1878,86	1739,46	108%
6	MINYAK GORENG	3424,65	3031,28	113%
7	GULA PASIR	1547,17	1346,07	115%
8	CABE RAWIT	184,41	170,57	108%
9	CABE MERAH	77,27	73,83	105%

NO	Komoditi	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Ketersediaan	Rasio Ketersediaan
1	*2*	*3*	*4*	
10	BAWANG MERAH	322,23	316,09	102%
11	BAWANG PUTIH	192,92	189,44	102%
12	KEDELAI	1235,45	1128,30	109%
	Rata-Rata			**113%**

Sumber Data DISHANPAN, Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan

Dalam mengitung data Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan menggunakan data yang bersumber dari pronosa neraca pangan yang disusun pada awal tahun baik bulanan maupun dan dilakukan updating data prognosa neraca pangan setiap bulan, hal ini dikarenakan terdapat perubahan data produksi dan data impor.
Rasio = (Ketersediaan Komoditas Pangan/ Kebutuhan (RT dan Non RT)) x 100%

Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan adalah:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
   Dengan indikator kinerja Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia, dari target 1 laporan terealisasi 1 laporan atau tercapai 100%.
2) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
   Dengan indikator output sub kegiatn ini adalah 1 laporan dengan capaian kinerja 100% atau terealisasi 1 laporan.
   Faktor pendorong tercapaianya kinerja antara lain; Pelaksanaan fasilitasi operasional berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
   Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:
   - Fasilitasi pembelian operasional beras dalam hal ini dilakukan penggilingan gabah kering sebanyak 3 ton; dilakukan penyablonan pada plastik kemasan untuk keperluan pengemasan beras 5 kg dan 10 kg; penyortiran berupa pengayakan dan pembersihan beras dan langsung dikemas dalam kemasan per 5 kg dan beras telah disalurkan ke 2 TTI, dengan total penyaluran 3 ton bera. Intervensi ini dilakukan untuk pemenuhan harga beras murah.
   - Pengumpulan data stok beras dan gabah pada LDPM
   - Pelaksanaan monev pada LDPM.

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Dengan dikator kinerja Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis output dan target kinerja 1 laporan, dan capaian 100%.

Faktor pendorong tercapaianya kinerja antara lain laporan stok, pasokan dan harga pangan dapat tersedia setiap bulan didukung oleh terlaksananya pemantauan stok pasokan dan harga pangan setiap minggu dengan baik. Adapun faktor penghambat tercapaianya kinerja diantaranya adalah kerena pencatatan stok, pasokan dan harga pangan masih secara manual yaitu saat dilapangan meggunakan kertas kemudian diinput.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

- Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pada pedaganga bahan pangan di Kota Bima, dengan metode pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan data yang dilakukan secara rutin setiap hari di pasar tradisional, warung/toko dan distributor di Kota Bima, analisis data stok, pasokan dan harga pangan dan penyusunan laporan. Data di input setiap hari pada aplikasi Panel Harga BAPANAS. Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan disusun dan dilaporkan, laporan sebagai dasar pelaksanaan rapat Inflasi yang hampir setiap minggu dilakukan secara daring di ruang rapat walikota untuk mengetahui situasi pangan di Kota Bima yang menunjukan ada atau tidaknya gejolak harga pangan terhadap 12 komoditas yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabe rawit, cabe besar, bawang putih, bawang merah dan kedelai.

4) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Dengan indikator Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) dan target 2 dokumen tercapai 100%.

Faktor pendorong tercapaianya kinerja diantaranya karena didukung oleh respon yang baik dari instansi terkait. Adapun ***faktor penghambat*** tercapainya kinerja diantaranya adalah karena kadang terjadi keterlambatan input data karena bersamaan dengan kegiatan yang lain.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

- Penyusunan Neraca Bahan Makanan sebanyak 1 laporan dilaksanakan oleh Tim Dinas Ketahanan Pangan dengan metode pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan data dari pasar tradisional, warung/toko dan distributor di Kota Bima, analisis data Nerca Bahan Makanan, penyusunan laporan dan rapat koordinasi.

b. ***Kegiatan*** Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan, dengan terget 20%,

realisasi 461% (Jumlah CPP di kelola tahun 2025 (8,40 ton cpp stok tahun 2023 + 21,94 ton cpp stok atau 30,34 ton) dibagi jumlah CPP hasil perhitungan berdasarkan *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah 2025*, sebesar (27,97).

Saran perbaikan target kinerja: Berdasarkan hasil evaluasi kinerja akhir tahun tersebut agar dapat dilakukan perubahan target bersadarkan regulasi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah 2025.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya: 1) Penentuan target kinerja untuk kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Rentra 2024-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Pertanian nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah; 2) tren pengadaan CPP 2020-2025; 3) rata-rata hasil perhitungan CPP berdasarkan regulasi PERMENTAN 11/2025 rata-rata 90 ton.

2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima dilakukan melalui Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2025 tentang Petunjuk tekhnis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima. Dan Peraturan Badan Pangan Nasional nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerinah Daerah; 3) ***Sub Kegiatan*** yang mendukung pencapaian kinerja antara lain dapat dilihat berikut:

1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
   Memilik indikator kinerja output Rencana Kebutuhan Pangan Lokal target 1 dokumen dan capaian 100%.
   Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:
   - Menyusun tim pelaksana kegiatan
   - pelaksanaan rapat penyusunan rencana kebutuhan pangan lokalKota Bima
   - Pengumpulan data dukung dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pada OPD Tekhnis dan Distributor Pangan
   - Pengolahan dan analisa data oleh tim pelaksana kegiatan
   - Menyusun laporan tahunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal

2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
   Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
   Capain kinerja pada sub kegiatan ini sebesar 110% dari target 20 ton dan realisasi 21,94 ton, ***Faktor pendorong*** tercapainya kinerja, diantaranya 1) koordinasi dan kerjasama dengan mitra penyedia yang berjalan dengan baik, serta jumlah dan kualitas cadangan beras yang diterima sesuai dengan

spesifikasi; 2) Koordinasi kepada TAPD terkait permintaan tambahan anggaran CPP yang masih kurang berdasarkan kebutuhan yang seharusnya, sehingga pengadaan CPP Kota Bima tahun 2025 dilakukan 2 kali pertama pada APBD awal di bulan Maret sebesar 11 ton dan yang ke dua pada APBD Perubahan di bulan Desember sebesar 10,94 ton. Adapun ***faktor penghambat*** tercapainya kinerja diantaranya adalah harga beras sempat mengalami peningkatan, namun bisa diperoleh kesepakatan dengan mitra terkait harga yang sesuai sehingga jumlah beras yang didapatkan sesuai dengan target.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

- Pengadaan beras kualitas medium sebagai cadangan pangan pemerintah Kota Bima sebanyak 21,97 ton yang dilakukan 2 kali pada Maret sebanyak 11 ton dan Desember sebanyak 10,94, dengan metode pengadaan langsung melalui mitra penyedia jasa. Untuk selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan).

3) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah, Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara. Dari target 20 ton realisasi 21,94 ton atau capaian 110%. ***Faktor pendorong*** tercapainya kinerja diantaranya, pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima bekerjasama dengan Bulog yang rutin dilaksanakan secara berkala. ***Faktor penghambat*** tercapainya kinerja diantaranya, tata kelola stock cadangan pangan masih perlu dilakukan pembenahan.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini:

- Pemeliharaan fisik cadangan pangan seperti melakukan Spraying dan Fumigasi beras CPP dari kutu setiap 3 bulan sekali, yang dilakukan oleh tenaga ahli dari Bulog Bima, dan melakukan pemantauan beras CPP

4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

Memiliki Indikator kinerja output Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara. Dengan target 20 ton, realisasi 21,94 dan capaian 110%. *Faktor pendorong* tercapainya kinerja diantaranya: 1) Adanya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dan mitra terkait cadangan pangan kota Bima yang terlaksana dengan baik; 2) Adanya koordinasi pada tim perubahan anggaran 2025 dalam rangka penambahan anggaran untuk pemenuhan jumlah CPP sesuai kebutuhan;

Faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada isntensi terkait untuk mencapai tujuan bersama secara efisien masih belum belum optimal dilaksanakan secara rutin.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah rapat-rapat koordinasi rutin utuk sinkronisasi dan koordinasi pengendalian cadangan pangan pemerintah daerah, serah terima serta monitoring dan evalusi pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini:

- Koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait dan mitra terkait cadangan pangan Kota Bima.
- Monev dan evaluasi dilapangan pada penerima bantuan
- Rapat-rapat koordinasi rutin untuk sinkronisasi dan koordinasi pengendalian cadangan pangan pemerintah daerah, serah terima serta monitoring dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah.

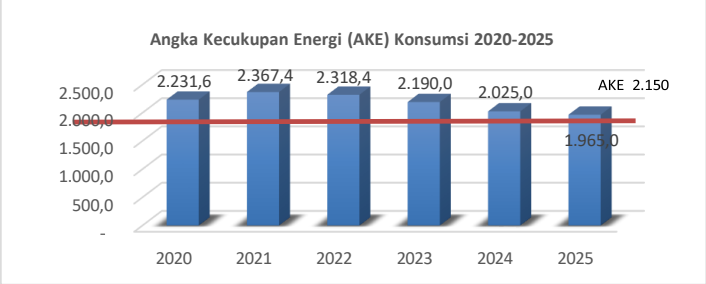
c. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

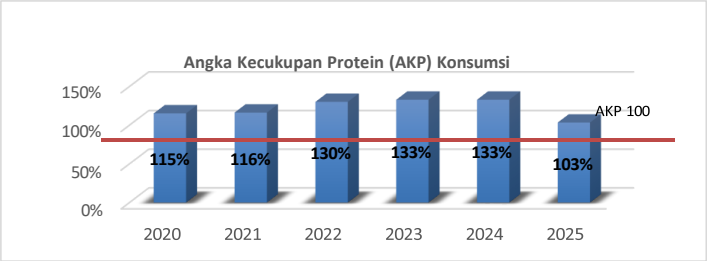
Indikator kinerja kegiatan ke 1: Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi

Indikator kegiatan ke 2: Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi

Indikator Kegiatan	Satuan	2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi	Kka/ kap/ hari	2067,24	1.965	95%
Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	Gram/kap/ har	114,21	103,3	90%

Berikut tabel perbandingan AKE dan AKP tahun 2019-2025, dengan data susenas n-1.





Capain kinerja dari 2 indkator kegiatan ini sebesar 95% untuk capaian kinerja Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi dan 90% untuk capain kinerja Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi. ***Sub Kegiatan*** yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun.
   Memiliki Indikator kierja output Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun, Dengan target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen dan capaian 100%.
   Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) tersusun dengan baik karena koordinasi dan kerjasama dengan mitra berjalan dengan baik, disertai dengan ketersediaan data yang mendukung.
   Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:
   - Pembentukan tim penyusun dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)
   - Koordinasi dan peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti Bimtek penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH).
   - Pengolahan dan analisis data Pola Pangan Harapan (PPH)
   - Pembahasan serta finaliasasi hasil analisis dan penyusunan dokumen final Pola Pangan Harapan (PPH)

2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
   Memiliki Indikator kierja output Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, Dengan target 1 laporan, realisasi 1 laporan dan capaian 100%.
   Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya adanya adalah koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait berjalan dengan lancar disertai dengan partisipasi yang aktif dari Masyarakat.
   Faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah pelaksanaan kehadiran peserta lomba B2SA yang tidak tepat waktu sehingga acara lomba kurang efektif; Cuaca yang kurang mendukung berpengaruh pada efektifitas pembagian Makanan B2SA terlambat.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

- Sosialisasi Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan sasaran sosialisasi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu balita dengan pemberian makanan B2SA pada anak balita selama 2 bulan; Pemberian hasil kebun PLAKAT pada ibu hami, ibu meyusui dan masayarakat umunya yang dilakukan pada saat panen hasil kebuan PLAKAT.
- Lomba Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dengan peserta dari PKK Kota Bima yang diikuti 41 Kelurahan dan dilaksanakan 1 kali.
- Sosialisasi kegiatan PLAKAT arau Pemanfaatan Pekarangan Halaman Kantor, dengan sasaran semua elemen masyarakat terutama dalam memanfaatan halaman kantor sebagai pemenuhan ketersediaan pangan dan gizi keluarga.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator kinerja program ini yaitu Persentase berkurangnya daerah rawan/ rentan pangan, dari target 1% dengan capain 100%. Di tahun 2025 hasil perhitungan FSVA Kota Bima tahun 2025 tidak terdapat wilayah dengan kondisi rawan pangan (0 wilayah dengan kondisi rawan pangan). Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99%. program Penanganan Kerawanan Pangan dapat dikatakan tercapai dengan efisien. *Faktor pendukung keberhasilan* capaian program ini adalah karena adanya Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik sehingga tersedia data yang akurat untuk analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. *Adapun faktor penghambat keberhasilan* capaian program diantaranya karena pengumpulan data dari instansi terkait memerlukan waktu, sehingga proses analisis data harus menunggu data tersebut.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh 1 kegiatan yaitu kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan, dengan capain kinerja 160% dari target 10 kelurahan dan realisasi 16 kelurahan.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kegiatan ini antara lain; Updating data Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) dan adanya koordinasi lintas sektor sebagai sumber data terutama dalam mendukung analisa SKPG dan FSVA sebagai dasar intervensi Dinas Ketahanan Pangan. ***Faktor penghambat keberhasilan*** capaian kegiatan ini antara lain, karena pengumpulan data dari instansi terkait memerlukan waktu, sehingga proses analisis data harus menunggu data tersebut. Dan Sub kegiatan yang mendukung pencapaian kegiatan ini adalah:

1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota

Memiliki Indikator kierja output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota. Dengan realisasi 12 laporan dari target 12 laporan atau capain kinerja 100%.

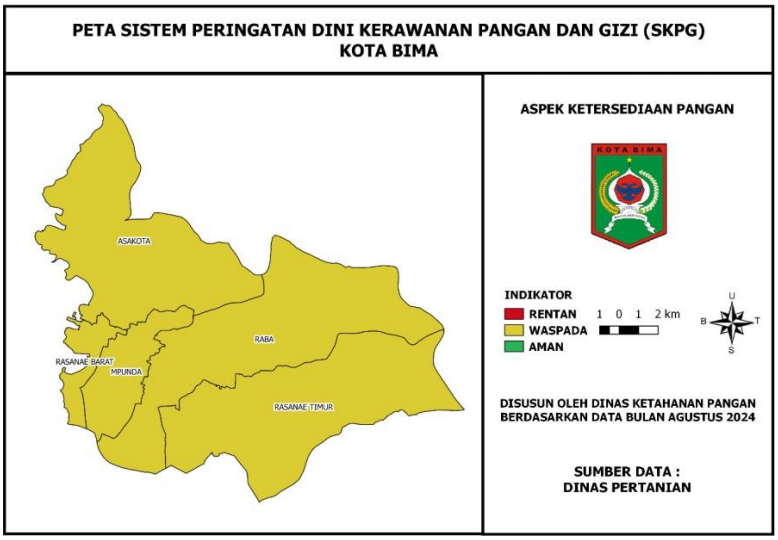
Faktor pendukung keberhasilan capaian sub kegiatan antara lain: 1) penyusunan dokumen dan updating data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 2) Penyusunan dokumen Peta Kerentanan/ Kerawanan Pangan (FSVA); 3) Koordinasi dan rapat tekhnis terkait kerawanan pangan dan gizi; 4) Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi Kurang pada 166 balita yang belokasi di 10 kelurahan di Kota Bima koordinasi antar OPD tekhinis terkait data; 5)Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah pada daerah rawan/rentan pangan di 14 kelurahan di prioritas 4 dengan sasaran masyarakat terdampak bencana banjir.

Faktor penghambat keberhasilan capaian antara lain; Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah sempat kosong di sehingga penyaluran bantuan beras CPP pada daerah yang terdampak banjir yang bertepatan pada lokasi kelurahan rawan rentan pangan tidak bisa segera di realisasikan, namun hal tersebut dapat teratasi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait lainya.

Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

- Membentuk Tim pelaksana kegiatan
- Rapat tekhnis pelaksanaan kegiatan
- Koordinasi penyusunan Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Tahun 2025 pada Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan bulanan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
- Pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penyusunan laporan tahunan dokmen Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Tahun 2025.
- Pemberian Bantuan Makanan Tambahan kepada balita gizi kurang/buruk berupa paket makanan tambahan (susu indomilk, telur ayam, biskuit milna dan gula pasir) yang diserahkan pada anak balita di 10 kelurahan Kota Bima.

Berikut gambar/peta Ketahanan dan kerentanan Pangan Kota Bima berdasarkan analisis SKPG bulan September tahun 2025



Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan Kota Bima

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Produk Pangan Segar Asat Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, dengan realisasi sebesar 100% dan tingkat capaian 100%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 95%, program Pengawasan Keamanan Pangan dapat dikatakan tercapai dengan ***efisien. Faktor pendukung keberhasilan*** capaian program ini adalah karena adanya Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik, kerjasama yang baik dengan pihak ritel, pembinaan dan sosialisasi terkait keamanan PSAT.

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena masih ada pelaku usaha yang kurang kooperatif, metode pengujian masih bersifat kualitatif, kurangnya sarpras untuk mengembangkan metode pengolahan pangan lokal, serta beberapa bahan dasar pangan lokal sulit didapatkan, Rendahnya pelaku usaha PSAT yang melakukan, pengemasan mandiri, rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan registrasi PSAT.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan Jumlah Komoditi Pangan Segar yang diawasi, dari target yang ditetapkan 85% terealisasi 100% atau dengan capaian 118%, dan capaian anggran 118% dengan tingat efisiensi

1) Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dari target 1 dokumen dan capain 100%.

   Faktor pendukung keberhasilan, Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaku usaha baik sarana produksi (penggilingan), Distributor, penilaian tentang sanitasi higien sarana / pegawai untuk mengukur apakah pelaku usaha menerapkan standar kemanan panga segar untuk dievaluasi apakah tracknya meningkat atau tidak dan pelaku usaha pada sarana pasar tradisonal disertai dengan melakukan uji cepat dengan alat uji rapid test kit.

   Faktor penghambat keberhasilan, Masih minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengolahan PSAT menjadi makanan siap di konsumsi; membutuhkan waktu yang panjangn untuk merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pengolahan PSAT menjadi makanan siap di konsumsi; masih ada pelaku usaha yang kurang kooperatif, serta belum adanya format baku dalam pembuatan dokumen pelaporan.

   Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

   - Melakukan pengawasan dan pembinaan mutu keamanan PSAT secara informal/kunjungan sarana ilaksanakan secara periodik setiap 3-4 sekali dalam satu tahun pada 5 (lima) kecamatan di Kota Bima, dengan sasaran 48 pelaku usaha pangan segar pangan (PSA).

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator output sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 1 unit tecapai 100% dengan realisasi 1 unit alat rapit test.

   Faktor pendukung keberhasilan, adanya dukungan SDM cukup baik.

   Faktor penghambat keberhasilan, metode pengujian masih bersifat kualitatif.

   Aktifitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah:

   - Pengadaan alat uji mutu PSAT/ Rapit Tes kit

3) Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan

Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan, dari target 1 laporan dan capain 100%.

Faktor pendukung keberhasilan, adanya Koordinasi upaya pengiatan lembaga pengawasan mutu pangan segar dengan instansi terkait (Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, Balai POM, Pengelola Pasar dan DPMPT; berkoordinasi dan konsultasi baik kepada Dinas Ketahanan Pangan maupun UPT Balai Pengawasan Uji Mutu keamanan pangan segar Propinsi Nusa Tenggara Barat; Pelaksanaan bimbingan tehnik pada pelaku usaha pangan segar dalam merubah perilaku pangan segar dalam melakukan kegiatan produksi, pengemasan dan pendistribusian pangan segar.

Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dilakukan secara intensif, bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Koperindag, Balai POM, Pengelola Pasar dan DPMPT.

Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja:

Inovasi Kebun PLAKAT

Salah satu inovasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima adalah Kebun Plakat (Pemanfaatan Halaman Kantor), dimana inovasi ini merupaka salah satu upaya sosialisasi kepada masyarakat terutama pada pemanfaatan lahan kosong, dengan menanam berbagai tanaman sayur buah-buahan, beternak puyuh dan memelihara ikan lele . Ekosistem dijalin sedemikian rupa agar saling terkait dalam simbiosis mutualisme dimana kotoran unggas dapat dimanfaatkan untuk pakan ikan maupun penyubur tanaman. Tanaman sayur yang ditanam pada Plakat antara lain cabe, tomat, terong, timun, sawi putih, sawi hijau, selada, bayam hijau, bayam merah, kangkung, labu, pare, oyong, ubi jalar, kacang panjang, pohon kelor, tanaman buah seperti anggur dan buah naga serta berbagai tanaman obat.

Tanaman dipilih sesuai dengan tujuan penanganan persoalan seperti tanaman cabe ditanam untuk mengatasi persoalan inflasi karena cabe menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kota Bima. Tanaman lain pun ditargetkan untuk memberikan nilai gizi guna penanganan masalah stunting serta kecukupan gizi Masyarakat Begitu juga tanaman, ikan, ternak dan jamur tiram tersebut akan memberikan nilai ekonomis bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Bibit tanaman, sayur-mayur dimanfaatkan dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bibit tanaman cabe, tanaman terong, tanaman tomat dibagikan kepada pegawai, siswa, mahasiswa dan masyarakat sehingga dapat ditanam pada pekarangan tempat tinggal masing-masing.

Kerjasama dan kolaborasi yang dibangun guna membumikan Kebun PALAKT kepada masyarakat dengan Penndatangan MOU Kerjasama antara lain:

- Penandatanganan MOU Kerja Sama Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperindag dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana) unruk bekerjasama dalam penanganan inflasi, stunting, pola pangan harapan, kecukupan gizi masyarakat serta peningkatan ekonomi masyarakat.
- Universitas Nggusu Waru Bima, melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui KKN tematik.
- Universitas Mbojo Bima, melakukan kerja sama dalam Pendidikan, penelitian dan pengabdian Masyarakat.
- Kelurahan Rite sebagai daerah binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, fokus pada ketahanan pangan dengan penanganan inflasi dan stunting.
- Puskesmas Paruga Kota Bima, melakukan kerja sama dalam mendukung kegiatan replikasi Plakat, penanganan stunting, inovasi Donor buah.
- Puskesmas Mpunda Kota Bima, melakukan kerja sama dalam replikasi Plakat, inovasi Ora Sakit (Obat tradisional Penyembuhan Penyakit, penanganan stunting)
- SDN 11 Manggemaci Kota Bima, melakukan kerja sama dalam memfasilitasi program Sekolah Adiwiyata.

Analisis Kinerja Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang-undangan

Tabel. 3.9. Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan Sasaran Strategis 2, Indikator Nilai SAKIP PD

Sasaran	Indikator	Formula Perhitungan
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIP PD	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat

Tabel. 3.8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi 2025	% Capaian 2025	Capaian Renstra 2025
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIP PD	Nilai	81,79 (A)	82	83	80,25 (A)	97,9	96,69

Target Capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2025 dapat tercapai dengan tingkat capaian sebesar 96,69%. Realisasi capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Inspektorat tahun 2024.

3.1.1. Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP PD pada tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 1,54 % dari realisasi tahun 2024 (81,79) namun masih pada batas nilai SAKIP A (Nilai A = >80-90).

3.1.2. Membandingkan terhadap target capaian Jangka Menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2024-2026, target akhir Renstra adalah 97%. Dengan realisasi capaian terhadap kondisi akhir Renstra meskipun target tetap pada nilai A. namun akan tetap diupayakan adanya peningkatan dalam skor nilai dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspaktorat, diantaranya adalah: Penyusunan Perencanaa Kinerja belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pengukuran Kinerja masih belum melakukan evaluasi atas realisasi kinerja individu; dan Pemberian Reward/ Punisment belum dijadikan sebagai dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan.

3.1.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapaianya target indikator kinerja sasaran strategis 2 ini diantaranya adalah: Adanya Evaluasi Kinerja, Audit Kinerja, dan pendampingan oleh Inspektorat Kota Bima dan Adanya pelatihan dan Bimbingan tekhnis SAKIP dari Bagian Organisasi Sekretariat Kota Bima; Sehingga seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan tatakala pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian kinerja yang seluruhnya dapat tercapai dengan efisien, dengan realisasi capaian keuangan yang cukup baik yaitu 97% dan capaian kinerja 100%;

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 2 adalah adalah Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima belum seluruhnya dilengkapi dengan informasi sumberdaya anggaran yang digunakan, Evaluasi atas realisasi berkala belum maksimal/ belum sepenuhnya dipahami oleh pemangku kegitan; pemberian Reward/ Punisment belum menjadi dasar pemberian/pemotongan penghasilan.

Upaya solusi yang dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspaktorat, diantaranya adalah Penyusunan Perencanaa Kinerja belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Pengukuran Kinerja masih belum melakukan evaluasi atas realisasi kinerja individu; Melakukan pemberian Reward/ Punisment dan dijadikannya sebagai dasar pemberian/ pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan.

3.1.4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel. 3.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	% Capaian 2025	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIP PD	Nilai	81,79 (A)	82	97,9	3.764.095.588	3.634.009.381	97%

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja sasaran strategis 2 terhadap target tahun 2025 sebesar 97,9%% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 97%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 2 ini dapat tercapai secara ***EFISIEN*** dengan tingkat efisiensi 3%**..**

3.1.5. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran 2 didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja program ini yaitu Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tercapai 100%, Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 97%. indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran ini adalah karena adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pejabat dalam upaya meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai tatakal yang telah disusun, tercapainya seluruh indikator kinerja program dan kegiatan dengan capaian kinerja diatas 90%, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi berkala yang dilakukan Inspektorat Kota Bima dan intern Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 8 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Secara umum seluruh capaian kinerja output sub kegiatan tercapai 100% dan capaian keuangan 97%, dengan capaian realisasi keuangan hampir seluruh sub kegiatan memiliki capaian rata-rata 86%. Terdapat 1 sub kegiatan yang memiliki capaian di bawah 50% yaitu Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang capaiannya hanya 44%, disebabkan karena adanya perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan di tahun 2025 namun di pending

pelaksanaanya di tahun 2025, karena kondisi keuangan masih belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan rehab gedung kantor.

.

3.2. Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2025 beserta realisasi keuangannya adalah :

Kode	Uraian	Anggran (Rp)	Persentase	Realisasi	Persentase
5.1	**BELANJA OPERASI**	**4.762.502.588,00**	**98,21%**	**4.579.055.485,00**	**98,14%**
5.1.01	Belanja Pegawai	3.156.835.138,00	65,10%	3.035.094.433,00	65,05%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.605.667.450,00	33,11%	1.543.961.052,00	33,09%
5.2	**BELANJA MODAL**	**86.940.000,00**	**1,79%**	**86.872.000,00**	**1,86%**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.940.000,00	1,79%	86.872.000,00	1,86%
	Jumlah	**4.849.442.588,00**	**100%**	**4.665.927.485,00**	**100%**
				Persentase	**96,22%**

Persentase realisasi keuangan Tahun 2025 secara keseluruhan mencapai 96.22%, menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 98% dengan jumlah anggaran lebih besar dibandingkan tahun 2024. Secara umum seluruh belanja yang telah dianggarkan dapat terlaksana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, imana sisa anggaran belanja sebagian besar disebabkankarena adanya selisih harga satuan barang di pasaran, serta sisa kontrak dengan penyedia jasa.



Adapun realisasi anggaran per program yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Per Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah Tahun Angaran 2025

Sasaran	Kinerja					Anggaran			Program Pendukung	Kinerja	Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	\	*12*	*16*	*17*	*20*
Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	84	86,8	103%	4.849.442.588	4.665.927.485	96%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	3.764.095.588	3.634.009.381	97%
	Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	%	≤ 10	4,6	100				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Energi Jumlah Ketersediaan Protein	839.044.300	793.571.250	96,54%
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	82,7	80,8	98%				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	115.963.100	114.273.100	99%
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang lolos uji	130.339.600	124.073.754	95%

Tabel.3.9. Effisiensi Prog Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Capaian Kinerja 2024	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persen	100%	3.764.095.588	3.634.009.381	100%	97%	100%	3%
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persen	100%	20.125.000	15.130.300	100%	75%	100%	25%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.575.000	6.575.000	2	100%	100%	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1.655.000	1.655.000	2	100%	100%	0%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1.040.000	1.037.300	2	100%	100%	0%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	695.000	594.000	2	85%	100%	15%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	576.000	522.000	2	91%	100%	9%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Capaian Kinerja 2024	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	9.584.000	4.747.000	2	50%	100%	50%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	Persen	100%	3.164.799.138	3.139.651.133	100%	99%	100%	1%
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26	3.056.375.138	3.035.094.433	28	99%	108%	8%
8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	104.780.000	100.912.700	128	96%	85%	-13%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.764.000	2.764.000	1	100%	100%	0%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	880.000	880.000	12	100%	100%	0%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Anggaran 2025	Capaian Kinerja 2025	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**750.000**	**750.000**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	750.000	750.000	12	100%	100%	0%
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	**10.251.100**	**8.418.700**	**100%**	**82%**	**100%**	**18%**
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	826.000	594.000	1	72%	100%	28%
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	2.645.900	2.645.900	1	100%	100%	0%
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	38	6.779.200	5.178.800	45	76%	100%	24%
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	**181.512.700**	**170.525.344**	**100%**	**94%**	**100%**	**6%**
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.425.000	7.415.000	1	100%	100%	0%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Anggaran 2025	Capaian Kinerja 2025	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.318.600	39.122.900	1	100%	100%	0%
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.821.600	6.279.600	1	53%	100%	47%
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	32.547.500	27.513.500	1	85%	100%	15%
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	90.400.000	90.194.344	25	100%	100%	0%
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	100%	110.495.200	102.817.500	100%	93%	100%	7%
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	101.506.300	95.433.300	63	94%	126%	25%
21	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	4.489.200	4.489.200	1	100%	100%	0%
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4.499.700	2.895.000	1	64%	100%	36%
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	100%	161.273.100	127.925.748	100%	79%	100%	21%
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	95.904.700	86.904.700	12	91%	100%	9%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Capaian Kinerja 2024	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	50.531.400	26.193.048	12	52%	100%	48%
25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	14.837.000	14.828.000	1	100%	100%	0%
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100%**	**114.889.350**	**68.790.656**	**100%**	**60%**	**100%**	**40%**
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	29.999.350	20.742.907	1	69%	100%	31%
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	14.680.000	11.641.749	7	79%	100%	21%
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	10.270.000	10.270.000	11	100%	100%	0%
29	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	59.940.000	26.136.000	1	44%	100%	56%
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	**Jumlah Ketersediaan Energi**	**Kka/ kap/ hari**	**3198**	839.044.300	793.571.250	**3179,59**	**94,58%**	92%	-3%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Capaian Kinerja 2024	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Jumlah Ketersediaan Protein**	**Gram/kap/ har**	**75,74**			**104,13**		82%	-15%
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	**Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan**	**%**	**113%**	**174.609.000**	**173.761.150**	**109**	**100%**	**96%**	**-3%**
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	18.078.200	17.531.750	1	97%	100%	3%
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	52.827.200	52.653.800	1	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	2	59.212.000	59.084.000	1	100%	100%	0%
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	2	44.491.600	44.491.600	2	100%	100%	0%
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan**	**%**	20	**454.355.300**	**412.820.100**	108	**91%**	**108%**	**16%**
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	16.623.100	16.623.100	1	100%	100%	0%
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	374.876.000	352.960.000	21,94	94%	110%	14%

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Capaian Kinerja 2024	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	20	26.809.000	7.413.600	21,94	28%	110%	75%
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton	20	36.047.200	35.823.400	21,94	99%	110%	10%
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi**	**Kka/ kap/ hari**	**2067,24**	**210.080.000**	**206.990.000**	**1965**	**99%**	**95%**	**-4%**
		Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	**Gram/kap/ har**	**114,21**			**103,3**		**90%**	**-9%**
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	16.800.000	16.250.000	1	97%	100%	3%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	193.280.000	190.740.000	1	99%	100%	1%
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani**	**Persen**	**92%**	**115.963.100**	**114.273.100**	**100%**	**99%**	**109%**	**10%**
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan**	**kelurahan**	**10**	**115.963.100**	**114.273.100**	**12**	**99%**	**120%**	**18%**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	115.963.100	114.273.100	4	99%	100%	1%
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Persentase bahan pangan yang lolos uji**	**%**	**100%**	**130.339.600**	**124.073.754**	**100%**	**95%**	**100%**	**5%**

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Anggaran Perubahan	Realisasi	Realisasi Kinerja 2024	Capaian Anggaran 2024	Capaian Kinerja 2024	Tingkat efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pengawasan keamanan pangan yang kompeten**	**%**	**90%**	**130.339.600**	**124.073.754**	**100%**	**95%**	**118%**	**19%**
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	22.001.300	21.821.300	1	99%	100%	1%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	66.204.600	60.568.754	1	91%	100%	9%
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Laporan	1	42.133.700	41.683.700	1	99%	100%	1%
	Rata-rata Capaian Kinerja							**96%**	**97%**	**0%**

BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima pada tahun anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2024-2026 yang merupakan masa transisi sebelum ada Kepala Daerah definitif. Keberhasilan yang dicapai berkat Kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota dilakukan memperbandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel.4.1. Capain Kinerja IKU/ Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Output (%)	Predikat Capaian	Anggaran (000.000)	Realisasi Anggaran (000)	Capaian Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi %	Ket.
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84	86,80	103	Baik	4.849,-	4.665.-	96	7	Efisien
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10	≤ 10	100	Baik				4	Efisien
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7	80,8	98	Baik				1	Efisien
2.	Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang - undangan	Nilai SAKIP PD	82	80,25 (A)	97,9	Baik	3.764.-	3.634.-	97%	3	Efisien

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari 4 indikator kinerja Sasaran Strategis 2 indikator memperoleh predikat tercapai dan 2 indikator dengan predikat belum tercapai, namun masih dalam kategori baik. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Data neraca ketersediaan pangan strategis yang selalu surplus, dimana dapat dilihat dari realisasi capaian atas ketersediaan pangan utama maupun pangan strategis yang diatas 100%. Komitmen Kota Bima penyediaan cadangan pangan daerah berupa

pengadaan beras Dari target 20 ton realisasi 21,94 ton atau capaian 110% tahun 2025.

2. Intensitas dalam pemantauan, pencatatan harga pasar pangan pokok terutama pangan utama rutin dilakukan dan pelaksanaan pasar murah. Sehingga stabilitas harga pangan dapat terpantau secara dini.
3. Adanya edukasi B2SA melalui kegiatan PLAKAT Pemanfaatan Pekarang Halaman Kantor sebagai bentuk sosialisasi kepada Masyarakat dalam pemenuhan ketersediaan pangan dan Konsumsi pangan di tingkat keluarga dan masyarakat.
4. Masyarakat dan para pelaku usaha antusias dalam mengikuti pembinaan dan sosialisasi keamanan pangan. an secara mandiri menginginkan pengawasan dan pengujian secara berkala serta mereka juga sangat kooperatif dengan petugas monitoring.
5. Seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan tatakala pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian kinerja yang seluruhnya dapat tercapai dengan ***efisien***, dengan realisasi capaian keuangan yang cukup baik yaitu 97%.

Adapun Langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang baik tersebut dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai keberagaman pangan terutama pangan lokal yang dapat dikonsumsi yang B2SA, serta dengan terus meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait. Peningkatan program PLAKAT sebagai upaya pemenuhan benih dan bibit tanaman serta ternak untuk mendorong penigkatan konsumsi buah, sayur dan pangan hewani melalui optimalisasi pekarangan (PLAKAT), serta melakukan sosialisasi dan edukasi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masarakat.
2. Meningkatkan intervensi harga pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarkat dan Toko Tani Indonesia (TTI). Yang menydiakan dan menjual komoditad strategis dengan harga terjangakau.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan. Selain itu juga dilakukan penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu.
4. Koordinasi lintas sektor dalam untuk mendorong peningkatan ketahanan pangan Kota Bima berdasarkan tugas dan fungsi PD terkait, terutama dalam mancapai target Indeks Ketahanan Pangan yang ideal, Skor Pola Pangan Harapan Ideal, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
5. Optimalisasi digitalisasi informasi dan data ketahanan pangan dan udating informasi digital melalui SIGITAs.

Saran Perbaikan Perencanaan:

Perencanaa OPD adalah bagian dari pencapain kinerja daerah dalam hal ini RPD. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pencapain kinerja OPD pada tahun berjalan terutama yang berkenaan dengan capain target triwulanan ataupun capaian target tahun sebelumnya dapat dilakukan perbaikan dalam hal ini:

1. Terdapat beberapa capaian Efiesiensi kinerja yang ***Tidak Tercapai*** perlu dilakukan perubahan target kinerja;
2. Perubahan target kinerja perlu dilakukan koordinasi dengan Bappeda Kota Bima terutama berhubungan dengan RPD Kota Bima Tahun 2024-2026, perlu dilakukan perubahan Perwali IKU Kota Bima, sebagai dasar OPD melakukan perubahan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
3. Evaluasi triwulanan yang dilakukan belum mampu mengatasi perubahan dokumen perencanaan terutama pada penentuan target kinerja yang terlalu rendah/tinggi, sehingga perlu adanya pola evaluasi yang sistematis yang menghasilkan rekomendasi atas permasalahan yang terjadi.
4. Perlunya membuat regulasi/acuan/perwali atas perubahan-perubahan yang terjadi terutama dokumen perencanaan OPD yang berhubungan langsung dengan dokumen perencanaan induknya (RPD).
5. Optimalisasi perlaksanaan evaluasi kinerja intern Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/kinerja akan datang.

Kota Bima, 31 Januari 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

GUFRAN, S.Pd., M.Si
NIP. 197005022003121013

L A M P I R A N

Lampiran 1 : Casecading/ Pohon Kinerja
Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Lampiran 3 : Matrik Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2025

CASECADING 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

RPD Kota Bima Tahun 2024-2026

Tujuan RPD : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia (IPM))

Sasaran Ke 4 RPD : Terwujudnya ketahanan pangan Masyarakat (Indeks Ketahanan Pangan)

Sasaran RPD 2024-2026 Ke-4 (Empat)	Tujuan OPD	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program Tahun 2025	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Pengampu
											2025	Pagu (000)	
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**4.449.474.748**	
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					**4.849.442.588**	
Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Terwujudnya kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	83	83	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN**	**Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**Jumlah ketersediaan Protein**	**Gram/ kap/ hari**	**75,74**	**839.044.300**	**Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**
									Jumlah ketersediaan Energi	**Kkal/ kap/ hari**	**3198**		
			Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	%	≤10 (6,2 & 8,9)	≤ 10	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan**	**%**	113	174.609.000	**Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan**
							Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	18.078.200	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	79,8	82,7	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	1	52.827.200	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	2	59.212.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	2	44.491.600	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dari Pengelolaan Cadangan Pangan yang menjadi kewenangan**	**Persentase cadangan pangan pemerintah yang tersedia terhadap kebutuhan berdasarkan anjuran yang ditetapkan**	**%**	**20%**	**454.355.300**	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	16.623.100	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	20	374.876.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	20	26.809.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton	20	36.047.200	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
							Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahu n sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat**	**Angka Kecukupan Energi (AKE) Konsumsi**	**Kka/ kap/ hari**	**2.067,2**	**210.080.000**	**Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan**
									Angka Kecukupan Protein (AKP) Konsumsi	**Gram/ kap/ har**	**114,2**		
							Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	16.800.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	193.280.000	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
							PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	**Menurunya daerah rawan/rentan pangan**	**Persentase kelurahan rentan pangan yang ditangani**	**Persen**	92	115.963.100	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran RPD 2024-2026 Ke-4 (Empat)	Tujuan OPD	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program Tahun 2025	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Pengampu
											2025	Pagu (000)	
							Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Daerah**	**Jumlah kelurahan yang mendapat penanganan kerawanan pangan**	**kelurahan**	**10**	**115.963.100**	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	4	115.963.100	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	**Terjaminya kemanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)**	**Persentase bahan pangan yang lolos uji**	**%**	90	130.339.600	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
							Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	**Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase pengawasan keamanan pangan yang kompeten**	**Persen**	90	130.339.600	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
							Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	22.001.300	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Unit	1	66.204.600	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
							Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	1	42.133.700	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	Mewujudkan Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai	Nilai SAKIP PD	Nilai		82	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tercapaiannya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persen**	100%	3.764.095.588	Bidang Sekretariat
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Terlasananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu**	**Persentase jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	100%	20.125.000	**Bidang Sekretariat**
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	6.575.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1.655.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	1.040.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	695.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	576.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	9.584.000	Bidang Sekretariat
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlasananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yangtepat waktu dan akuntabel**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Persen**	100%	3.164.799.138	**Bidang Sekretariat**
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26	3.056.375.138	Bidang Sekretariat
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50	104.780.000	Bidang Sekretariat

Sasaran RPD 2024-2026 Ke-4 (Empat)	Tujuan OPD	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Program Tahun 2024	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Pengampu
											2024	Pagu (000)	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	2.764.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	12	880.000	Bidang Sekretariat
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tepat waktu**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	750.000	**Bidang Sekretariat**
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	750.000	Bidang Sekretariat
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persen**	**100%**	10.251.100	**Bidang Sekretariat**
							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	826.000	Bidang Sekretariat
							Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	2.645.900	Bidang Sekretariat
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	6.779.200	Bidang Sekretariat
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**	181.512.700	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	7.425.000	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	39.318.600	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.821.600	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	32.547.500	Bidang Sekretariat
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25	90.400.000	Bidang Sekretariat
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**	100%	110.495.200	**Bidang Sekretariat**
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	101.506.300	Bidang Sekretariat
							Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1	4.489.200	Bidang Sekretariat
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	4.499.700	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	100%	161.273.100	**Bidang Sekretariat**
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	95.904.700	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	50.531.400	Bidang Sekretariat

Sasaran RPD 2024-2026 Ke-4 (Empat)	Tujuan OPD	Sasaran (Sasaran Strategis OPD)	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja Program Tahun 2025	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Pengampu
											2025	Pagu (000)	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	14.837.000	Bidang Sekretariat
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan termanfaatan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	100%	114.889.350	**Bidang Sekretariat**
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	29.999.350	Bidang Sekretariat
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	14.680.000	Bidang Sekretariat
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	11	10.270.000	Bidang Sekretariat
							Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	59.940.000	Bidang Sekretariat

Mengetahui

Kepala Dinas,

GUFRAN. S.Pd. M.Si,

NIP. 19700502 200312 1 013

PEMERINTAH KOTA BIMA

DINAS KETAHANAN PANGAN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

PENGUKURAN KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA
TAHUN 2025

No.	Sasaran Daerah/ sasaran PD	Indikator Sasaran	Target Tahun 2025	Capaian Kinerja Triwulan IV			Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Capaian Kinerja Triwulan IV			Anggaran Tahun 2025	Capaian Anggaran Triwulan IV			Perangkat Kerja Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1							*2*	*3*	*4*	*5*		*8*	*10*	*6*	*6*	*7*	*9*	
	Terwujudnya ketahanan pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan																
1.	Meningkatnya Ketersediaan, Aksesibilitas dan pemanfaatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	84,04 skor	84	86,88	103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata hasil capaian pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	3.764.095.588	3.764.095.588	3.634.009.381	97%	Dinas Ketahanan Pangan
		Stabilitas Harga Pangan (beras) ditingkat konsumen (CV ≤ 10%)	≤ 10	≤ 10	≤ 10	100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Ketersediaan Energi	Kka/ kap/ hari	3444	3444	3179,59	92%	839.044.300	839.044.300	793.571.250	96,54%	Dinas Ketahanan Pangan
								Jumlah Ketersediaan Protein	Gram/k ap/ har	127	127	104,13	82%					Dinas Ketahanan Pangan
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7	82,7	80,8	98	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	Persen	92%	92%	100%	109%	115.963.100	115.963.100	114.273.100	99%	Dinas Ketahanan Pangan
							PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase bahan pangan yang lolos uji	%	100%	100%	100%	100%	130.339.600	130.339.600	124.073.754	95%	Dinas Ketahanan Pangan
2.	Meningkatnya Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel sesuai peraturan Perundang-undangan	Nilai SAKIP PD	82	82	80,25	97,9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100%	100%	3.764.095.588	3.764.095.588	3.634.009.381	97%	Dinas Ketahanan Pangan

Faktor Pendorong:

1. 1) Intevensi pelaksanaan program kegiatan seperti suvey dan pengolahan data bulanan tentang ketersediaan pangan (data pangan stretegis); 2) membangun kerjasama bersama BULOg sebagai mitra dalam pemenuhan kebutuhan beras terutama pada saat terjadi kelangkaan, kenaikan harga, kebencanaa dan pelaksanaan pasar murah; 3) Semakin meningkat dan beragamnya ketersediaan pangan di masyarakat; 4) Informasi pasar yang mendukung distribusi pangan; 5) Kampanye, sosialisasi penganekaragaman pangan dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan penganekaragaman ketersedian pangan lewat pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
2. 1) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan kegiatan memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat (Gabungan kelompoktani (Gapoktan), kelompok tani (Poktan), lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan) dalam melayani Toko Tani Indonesia (TTI); 2). Panel Harga Pangan yang telah berhasil mendukung terciptanya stabilitas harga pangan pokok dan strategis; 3). Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi oleh seluruh stageholder pangan di Kota Bima, Pusat dalam hal ini BAPANAS, Bulog, Provinsi NTB; 4). Bantuan Pangan Beras, realisasi bantuan pangan beras tahun 2024 sebesar 19,67 ton beras Cadangan Pangan Pemerintah.; 5) Intensitas koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dalam rangka pelasanaan GPM/ Gerakan Pangan Murah.

Uraian Permasalahan:

1. Belum dilakukan pencatatan akurat oleh instansi terkait seperti KSOP (Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan) Kota Bima khususnya data eksport dari Kota Bima dan data import untuk Kota Bima; Dinas terkait lainnya seperti Dinas Peternakan tidak menyediakan data produksi bulanan seperti daging sapi, telur, daging ayam; Data eksport dan import yang melalui lalulintas darat tidak kami dapatkan dari instansi terkait mis, Dinas Perdagangan sehingga data kami peroleh melalui pelaku usaha, pedagang atau distributor.

2. Maraknya makanan siap saji yang standar mutu asupan gizinya belum ideal, belum maksimalnya pemanfaatan pangan lokal sebagai pangan alternatif, masih kuranya koordinasi lintas sektor dalam mengintervensi pola pangan ideal yang B2SA. Selain itu juga keterjangkauan pangan atau akses pangan oleh Masyarakat dipengaruhi berbagai hal antara lain harga pangan, Tingkat pendapatan atau daya beli, anomaly iklim, bencana alam. Permasalahan akses pangan secara fisik masih disebabkan oleh sarana transportasi yang menyebabkan biaya distribusi pangan menjadi mahal.

Rencana Tindak Lanjut:

1. 1) Perlu adanya kebijakan upaya peningkatan penyediaan pangan melalui intensifikasi produksi tanaman pangan maupun mendorong upaya penyediaan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta terutama pangan yang belum memenuhi target skor PPH sperti Pangan Umbi-umbian, minyak dan lemak, buah biji berminyak, sayuran dan buah, kelompok pangan lainya; 2) Informasi pasar yang perlu ditingkatkan, sehingga ditribusi bahan pangan Kota Bima semakin baik dan beragam untuk menunjang pencapaian target PPH ideal; 3) Sosialisasi edukasi penganekaragaman lokal yang bersumber dari pemanfaatan pekarangan keluarga; 4) Perlu pembenahan sistem informasi pelaporan terutama pada instansi yang menangani informasi keluar – masuk bahan pangan dari kabupaten/kota, agar dapat terdeteksi secara tepat berapa ton jumlah komoditas pangan yang masuk dan keluar dari Kabupaten/Kota masing- masing; Untuk penguatan kapasitas enumerator dan data perlu melakukan bimtek tiap tahun agar diperoleh hasil pelaporan lebih valid.
2. 1). Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan antar daerah dalam meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan baik ditingkat produsen maupun ditingkat konsumen, mengawasi pelaku usaha pangan, membangun infrastruktur, melakukan operasi pasar/ GPM, melakukan pengawasan terhadap ketersediaan petani terutama pada panen raya .
3. Membangun koordinasi lintas sektor dalam upaya promosi gerakan makan sehat Beragam Bergizi Seimbang dan Aman, baik dengan OPD tekhnis, Perguruan tinggi, Sekolah dan kelompok Masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas konsumsi yang beragam.

Kota Bima, 31 Januari 2025
Kepala Dinas,

GUFRAN, S.Pd. M. Si
Nip.19720229 200501 1 005

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
oleh Inspekorat Kota Bima pada Dinas Ketahanan Pangan

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Data Dukung
	1	2	3	4	5
1.	**Perencanaan Kinerja**				
a.	Menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Akan dilakukan penyusunan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Sekretaris Dinas	Telah dilakukan penyusunan Renstra sesuai dengan ketentuan yang berlaku (file: 1. Renstra 2024-2026 (Revisi Hsl Asistensi Bappeda 13.03.25))	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
b.	Menyusun target kinerja dan anggaran pada Rencana Aksi per triwulan sesuai dengan target kinerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan	Akan dilakukan penyusunan target kinerja dan anggaran pada Rencana Aksi per triwulan sesuai dengan target kinerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan	Ess II, III,	Telah dilakukan penyusunan target kinerja dan anggaran pada Rencana Aksi per triwulan sesuai dengan target kinerja dan anggaran tahunan yang telah ditetapkan (file: 3. Renaksi DISHANPAN 2024)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
c	Menyelaraskan semua dokumen perencanaan kinerja maupun anggaran yaitu Renstra, Renja, Rencana Aksi, DPA, PK maupun Cascading	Akan dilakukan penyelaraskan semua dokumen perencanaan kinerja maupun anggaran yaitu Renstra, Renja, Rencana Aksi, DPA, PK maupun Cascading	Sekretaris Dinas	***Sudah*** dilakukan penyelaraskan semua dokumen perencanaan kinerja Renstra, Renja, Rencana Aksi, PK maupun Cascading namun ***belum*** dilakukan penyelarasan pada dokumen penganggran/ DPA, karena apikasi SIPD RI hanya bisa di akses dengan jadwal yang sudah ditentukan.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
d	Menggunakan anggaran dengan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Akan Menggunakan anggaran dengan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	Ess II, III,	Telah menggunakan anggaran dengan mengacu pada kinerja yang ingin dicapai (Web Side inas Ketahanan Pangan Kota Bima)	https://dkp.bimakota.go.id/web/detail-berita/354/gerakan-pangan-murah-adalah-langkah-nyata-memastikan-ketersediaan-pasokan-dan-harga-pangan-guna-menekan-laju-inflasi-di-kota-bima
e.	Melakukan aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai	Akan Melakukan aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai	Ess II, III,	Telah melakukan aktivitas yang mendukung kinerja yang ingin dicapai (Web Side inas Ketahanan Pangan Kota Bima)	https://dkp.bimakota.go.id/web/detail-berita/367/monev-harga-jagung
f.	Melakukan evaluasi penetapan target kinerja	Akan dilakukan evaluasi penetapan target kinerja	Ess II, III,	Telah dilakukan evaluasi penetapan target kinerja, namun hasil evaluasi belum ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan tahun berjalan dan akan dilakukan pada dokumen perencanaan tahun berikutnya tahun 2025. (file LKIP 2024)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
g.	Memberikan arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan rencana aksi	Telah memberikan arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan rencana aksi	Ess II, III,	Arahan yang diberikan berupa pelakanaan kegiatan (SK, SOP, KAK Pelaksanaan Kegiatan 2024)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1lpYNgvPSa44zcLqT2ok7p5KP-Rly3SR5
h.	Memberikan rekomendasi /saran perbaikan perencanaan kinerja	Akan Memberikan rekomendasi /saran perbaikan perencanaan kinerja	Sekretaris Dinas	Sudah memberikan rekomendasi/ saran perbaikan perencanaan kinerja	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
2.	**Pengukuran kinerja**				
a.	Melakukan evaluasi atas realisasi kinerja individu	Akan melakukan evaluasi atas realisasi kinerja individu	Ess II, III,	Evaluasi atas realisasi kinerja individu sudah dilakukan dengan melakukan penilain kinerja pada SKP bulanan pegawai (Penilain kinerja pada SKP 2024 bulanan pegawai (SKP))	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
b.	Mengisi realisasi kinerja dan anggaran pada dokumen monev capaian kinerja dan anggaran	Akan melakukan pengisian realisasi kinerja dan anggaran pada dokumen monev capaian kinerja dan anggaran		Pada dokumen monev capaian kinerja dan anggaran, realisasi kinerja dan anggaran akan dilakukan tahun berikutnya (2025) (file Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran TW I s.d. IV TA.2024)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
c	Menetapkan target dan realisasi kinerja kegiatan pada SKP sesuai PK yang telah ditetapkan	Menetapkan target dan realisasi kinerja kegiatan pada SKP sesuai PK yang telah ditetapkan. Dan Akan dilakukan perbaikan RHK (Rencana Hasil kerja) SKP berdasarkan, PK yang ditetapkan		Perbaikan RHK (Rencana Hasil kerja) SKP pada PK/ Perjanjian Kinerja tahun berikutnya (file PK 2025 dan RHK (RHK 2025 P. Ilham)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
d	Memberikan Reward/Punishment dan menjadikannya sebagai dasar pemberian/pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan	Akan dilakukan Pemberian Reward/Punishment sebagai dasar pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan.	Ess II	Akan berkoordinasi dengan OPD tekhnis tentang mekanisme/ regulasi pelaksanaan Pemberian Reward/Punishment dalam pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja atau penghasilan	
e.	Memberikan surat peringatan/teguran terhadap bawahan yang tidak mencapai target kinerja dan melakukan evaluasi atas kinerja pegawai bawahan	Akan memberikan surat peringatan/ teguran terhadap bawahan yang tidak mencapai target kinerja dan melakukan evaluasi atas kinerja pegawai bawahan	Ess II, III,	Belum melakukan pemberian surat peringatan/ teguran terhadap bawahan yang tidak mencapai target kinerja dan melakukan evaluasi atas kinerja pegawai bawahan.	
f.	Menjadikan evaluasi capaian kinerja dan anggaran sebagai dasar perubahan anggaran	Akan menjadikan evaluasi capaian kinerja dan anggaran sebagai dasar perubahan anggaran	Ess II, III,	Hasil evaluasi pada sub kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah TA.2024 terdapat perubahan anggaran dimana output pengadaan awal 11 Ton dan di perubahan naik menjadi 20 Ton. Penambahan anggaran ini mengacu pada Renja, dan kebutuhan CPP Kota Bima. (File DPA TA. 2024 (Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan pemeritah Kabupaten/ Kota)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Data Dukung
	1	2	3	4	5
g.	Evaluasi capaian kinerja dan anggaran tidak disertai dengan perubahan anggaran sebagai bentuk tindak lanjut capaian kinerja tersebut.	Evaluasi capaian kinerja dan anggaran telah dilakukan/ disertai dengan perubahan anggaran sebagai bentuk tindak lanjut capaian kinerja tersebut.		Evaluasi capaian kinerja dan anggaran telah dilakukan/ disertai dengan perubahan anggaran sebagai bentuk tindak lanjut capaian kinerja tersebut. (File DPA Perubahan 2024 (Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota))	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
h.	Melakukan evaluasi kinerja terkait kebijakan dalam pencapaian kinerja yang didukung dengan dokumen yang menjelaskan perubahan kebijakan dalam pencapaian kinerja	Akan melakukan evaluasi kinerja terkait kebijakan dalam pencapaian kinerja yang didukung dengan dokumen yang menjelaskan perubahan kebijakan dalam pencapaian kinerja		Telah dilakukan evaluasi kinerja terkait kebijakan dalam pencapaian kinerja yang didukung dengan dokumen yang menjelaskan perubahan kebijakan dalam pencapaian kinerja (file LKIP BAB IV pada "Saran Perbaikan Perencanaan")	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
i.	Melakukan evaluasi aktifitas/ kegiatan dalam pencapaian kinerja dan dikaitkan dengan perubahan aktivitas dalam Dokumen DPA	Akan melakukan evaluasi aktifitas/ kegiatan dalam pencapaian kinerja dan dikaitkan dengan perubahan aktivitas dalam Dokumen DPA		Telah dilakukan evaluasi aktifitas/ kegiatan dalam pencapaian kinerja dan dikaitkan dengan perubahan aktivitas dalam Dokumen DPA. (file LKIP BAB IV pada "Saran Perbaikan Perencanaan")	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
j.	Melampirkan meta data atau data dukung atas tiap-tiap capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan serta menyampaikan dan menjelaskan informasi nilai efisiensi dari semua capaian kinerja tersebut	Akan melampirkan meta data atau data dukung atas tiap-tiap capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan serta menyampaikan dan menjelaskan informasi nilai efisiensi dari semua capaian kinerja tersebut		Telah melampirkan meta data atau data dukung atas tiap-tiap capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan serta menyampaikan dan menjelaskan informasi nilai efisiensi dari semua capaian kinerja tersebut. (file Meta Data Laporan Kinerja TA 2024, 2025)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
3.	**Pelaporan Kinerja**				
a.	Menyusun Laporan Kinerja secara berkala.	Akan menyusun Laporan Kinerja secara berkala.		Laporan Kinerja sudah dibuat secara berkala.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
b.	Menampilkan semua target dan realisasi indikator kegiatan, melengkapi data dukung yang tepat sebagai dasar penjelasan realisasi kinerja dalam LKIP serta melegalisasi data dukung baik berupa meta data maupun laporan kegiatan.	Akan menampilkan semua target dan realisasi indikator kegiatan, melengkapi data dukung yang tepat sebagai dasar penjelasan realisasi kinerja dalam LKIP serta melegalisasi data dukung baik berupa meta data maupun laporan kegiatan.		Telah menampilkan semua target dan realisasi indikator kegiatan, melengkapi data dukung yang tepat sebagai dasar penjelasan realisasi kinerja dalam LKIP serta melegalisasi data dukung baik berupa meta data maupun laporan kegiatan. (file Meta Data Laporan Kinerja TA 2024, 2025)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
c	Membandingkan realisasi kinerja kegiatan dengan target tahunan.	Akan mmbandingkan realisasi kinerja kegiatan dengan target tahunan.		Telah membandingkan realisasi kinerja kegiatan dengan target tahunan.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
d	Membandingkan realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan dengan target jangka menengah.	Akan membandingkan realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan dengan target jangka menengah.		Telah membandingkan realisasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan dengan target jangka menengah.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
e.	Membandingkan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.	Akan membandingkan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.		Telah membandingkan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
f.	Menginfokan kualitas atas seluruh capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dalam Laporan Kinerja	Akan menginfokan kualitas atas seluruh capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dalam Laporan Kinerja		Telah menginfokan kualitas atas seluruh capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya dalam Laporan Kinerja	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
g.	Menyajikan informasi seluruh capain kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam laporan kinerja	Akan menyajikan informasi seluruh capain kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam laporan kinerja		Telah menyajikan informasi seluruh capain kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam laporan kinerja	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
h.	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Akan menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		Telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
i	Menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Akan menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		Telah menggunakan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
4.	**Evaluasi Akuntabilitas**				
a.	Melengkapi data dukung untuk setiap realisasi kinerja serta tidak ada target dan realisasi kinerja dari beberapa indikator kegiatan	Akan melengkapi data dukung untuk setiap realisasi kinerja serta tidak ada target dan realisasi kinerja dari beberapa indikator kegiatan		Telah melengkapi data dukung untuk setiap realisasi kinerja serta tidak ada target dan realisasi kinerja dari beberapa indikator kegiatan. (file Meta Data Laporan Kinerja TA 2024, 2025)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89
				Aktifitas sebagian besar di upload di Webside Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima pada menu berita	https://dkp.bimakota.go.id/web/halaman/27/berita
b.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Akan Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja		Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ada sebagian yang belum ditindaklanjuti, karena masih dalam proses. (file Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024)	https://drive.google.com/drive/u/6/folders/14SA1b1Q9erBw7dalHpswpRmM3bwaDK89

No.	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Data Dukung
	1	2	3	4	5
c.	Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Akan Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja		Berkoordinasi dengan Bappeda atas capain kinerja yang capain efisiensinya tidak tercapai/ Tidak Efisien, dengan melakukan penyesuaian target maupaun anggaran.	

Raba - Bima , 10 Februari 2025
Kepala Dinas

GUFRAN. SPd. M.Si
Pembina Tk IV.b
NIP. 19700502 200312 1 013

PIAGAM PENGHARGAAN

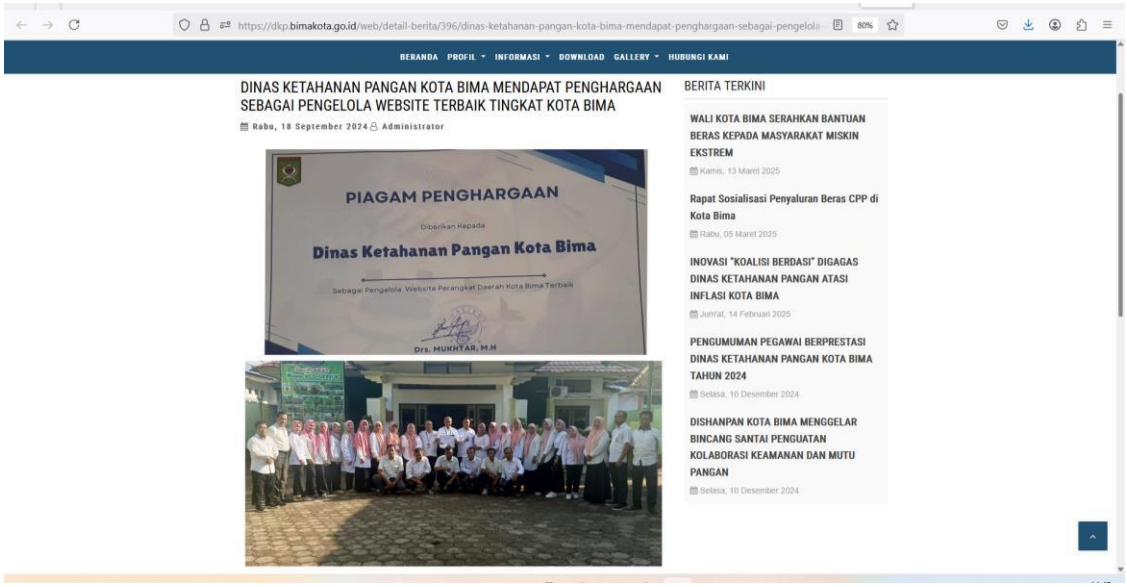




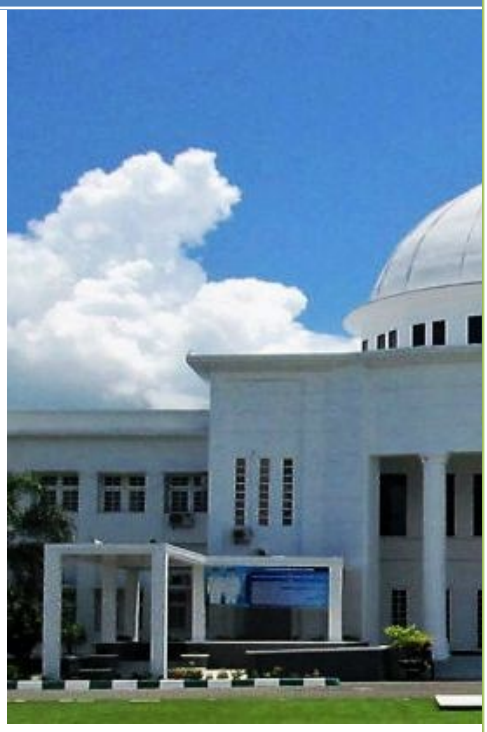




https://dkp.bimakota.go.id/web/detail-berita/396/dinas-ketahanan-pangan-kota-bima-mendapat-penghargaan-sebagai-pengelola-website-terbaik-tingkat-kota-bima



LAPORAN AKUNTABILITA
PEMERINTAH (LKIP)
INFORMATIKA DAN STA



PEMERINTAH KOTA BIMA

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Kata Pengantar *i*

Daftar Isi *ii*

BAB I PENDAHULUAN *1*

1.1. Latar Belakang *1*

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi *3*

1.3. Struktur Organisasi *5*

1.4. Aset *8*

BAB II PERENCANAAN KINERJA *9*

2.1. Rencana Strategis *9*

2.1.1 Visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2025-2029 *9*

2.1.2 Tujuan dan Sasaran *11*

2.2. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025 *13*

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025 *15*

3.1. Pengukuran Kinerja *15*

3.2. Sasaran Strategis 1 *16*

3.2.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU *17*

3.2.2 Penyebab Keberhasilan *18*

3.2.3 Permasalahan yang dihadapi *19*

3.2.4 Solusi atas permasalahan *20*

3.3. Sasaran Strategis 2 *20*

3.3.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU *21*

3.3.2 Penyebab Keberhasilan *23*

3.3.3 Permasalahan yang dihadapi *26*

3.3.4 Solusi atas permasalahan *26*

3.4. Sasaran Strategis 3 *27*

3.4.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU *28*

3.4.2 Penyebab Keberhasilan *29*

3.4.3 Permasalahan yang dihadapi *31*

3.4.4 Solusi atas permasalahan *33*

3.5. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya *33*

3.6. Penghargaan *35*

3.7. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran) *35*

BAB IV PENUTUP *48*

LAMPIRAN

1 Realisasi Anggaran Diskominfotik Kota Bima Tahun 2025

2 *Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025*

3 *Perjanjian Kinerja Tahun 2026*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima dapat di selesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu laporan yang akan digunakan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan mengevaluasi kegiatan yang telah direncanakan selama 1 Tahun Anggaran berjalan. Menyadari hal itu maka penyusunannya senantiasa melibatkan setiap level organisasi/bidang yang ada dan hasilnya telah disosialisasikan kepada masing-masing bidang sebagai penanggung jawab dari kegiatan yang ada maupun unsur organisasi lainnya guna mendapat masukan agar keberhasilan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Tahun 2025 dapat dicapai secara baik

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Tahun 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima di masa mendatang.

Bima, 04 Februari 2026
Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima

Dr. Muhammad Hasyim,S.Sos., SH., M.Ec.Dev
NIP. 19720824 199303 1 003

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Diskominfotik dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bima, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan juga sinergitas dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, profesionalitas, serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LKIP Diskominfotik Kota Bima Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Memperhatikan dari tujuan, sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029, disimpulkan beberapa isu strategis yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai berikut :

1. *Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City di Pemerintah Kota Bima*
2. *Implementasi Data Driven-Government*
3. *Optimalisasi pengelolaan pusat data pemerintah yang terstandar*
4. *Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Bima*
5. *Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kota Bima*
6. *Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM)*
7. *Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses*
8. *Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Bima*
9. *Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik.*

Dalam melaksanakan tugasnya untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menghadapi baik tantangan maupun peluang sebagai berikut :

Tantangan :

1. *Rendahnya pemahaman dan kesadaran mengenai keamanan informasi, serta ancaman siber yang semakin kompleks pada sistem pemerintahan;*
2. *Akses internet dan teknologi yang belum merata, terutama di wilayah dengan geografis sulit, menghambat implementasi E-Government;*
3. *Kurangnya tenaga fungsional yang kompeten di bidang IT, seperti analis keamanan siber, programmer, dan analis data;*
4. *Masih tingginya ego sektoral yang mengakibatkan aplikasi pelayanan publik tidak terintegrasi (berdiri sendiri-sendiri) dan sulitnya sinkronisasi data sektoral;*
5. *Masih rendahnya literasi digital, yang mempersulit diseminasi informasi kebijakan dan pembangunan daerah secara efektif.*

Beberapa kondisi yang menjadi peluang bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai beriikut :

1. *Kebijakan pusat untuk mendorong Smart City di berbagai daerah membuka peluang besar untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis teknologi;*
2. *Kewajiban SPBE memaksa percepatan digitalisasi birokrasi, yang mempercepat efisiensi pelayanan;*
3. *Peluang menggunakan Big Data dan statistik sektoral untuk membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis data (data-driven policy);*
4. *Penggunaan media sosial dan platform digital untuk diseminasi informasi pembangunan secara real-time dan transparan;*
5. *Kolaborasi dengan penyedia teknologi, akademisi, dan startup untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital daerah.*

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan organisasi dan tata kerja yang komperhensif dapat menyampaikan wewenang dan Tanggung Jawab setiap unsur organisasi, rentang kendali, interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi, yaitu :

a) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
b) penyusunan program kerja dan kegiatan komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
c) pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;
e) pembinaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik instansi pemerintah daerah;
f) pembinaan penyelenggaraan sistem informasi elektronik yang aman yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah;

g) *pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektonik (e-Government), Smartcity dan Government Chief Information Office (GCIO) di lingkungan Pemerintah Daerah;*

h) *pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/ telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah;*

i) *pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perizinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan TIK dan Persandian serta tugas pembantuan;*

j) *penyelenggaraan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;*

k) *pengoordinasian pembinaan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;*

l) *pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi serta sistema informasi pemerintah daerah;*

m) *penyelenggaraan ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah;*

n) *penyelenggaraan pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya; dan*

o) *pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.*

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kota Bima bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik, Dinas Informatika dan Statistik Kota Bima dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima terdiri dari:

a. *Kepala Dinas*
b. *Sekretariat, tediri dari*
    1) *Sub Bagian Umum & Kepegawaian*
    2) *Kelompok Jabatan Fungsional*
    3) *Kelompok Jabatan Pelaksana*
c. *Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari*
    1) *Kelompok Jabatan Fungsional*
    2) *Kelompok Jabatan Pelaksana*

d. *Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdiri dari*
    1) *Kelompok Jabatan Fungsional*
    2) *Kelompok Jabatan Pelaksana*

e. Bidang Persandian, terdiri dari

1) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Kelompok Jabatan Pelaksana

f. Bidang Statistik Sektoral, terdiri dari

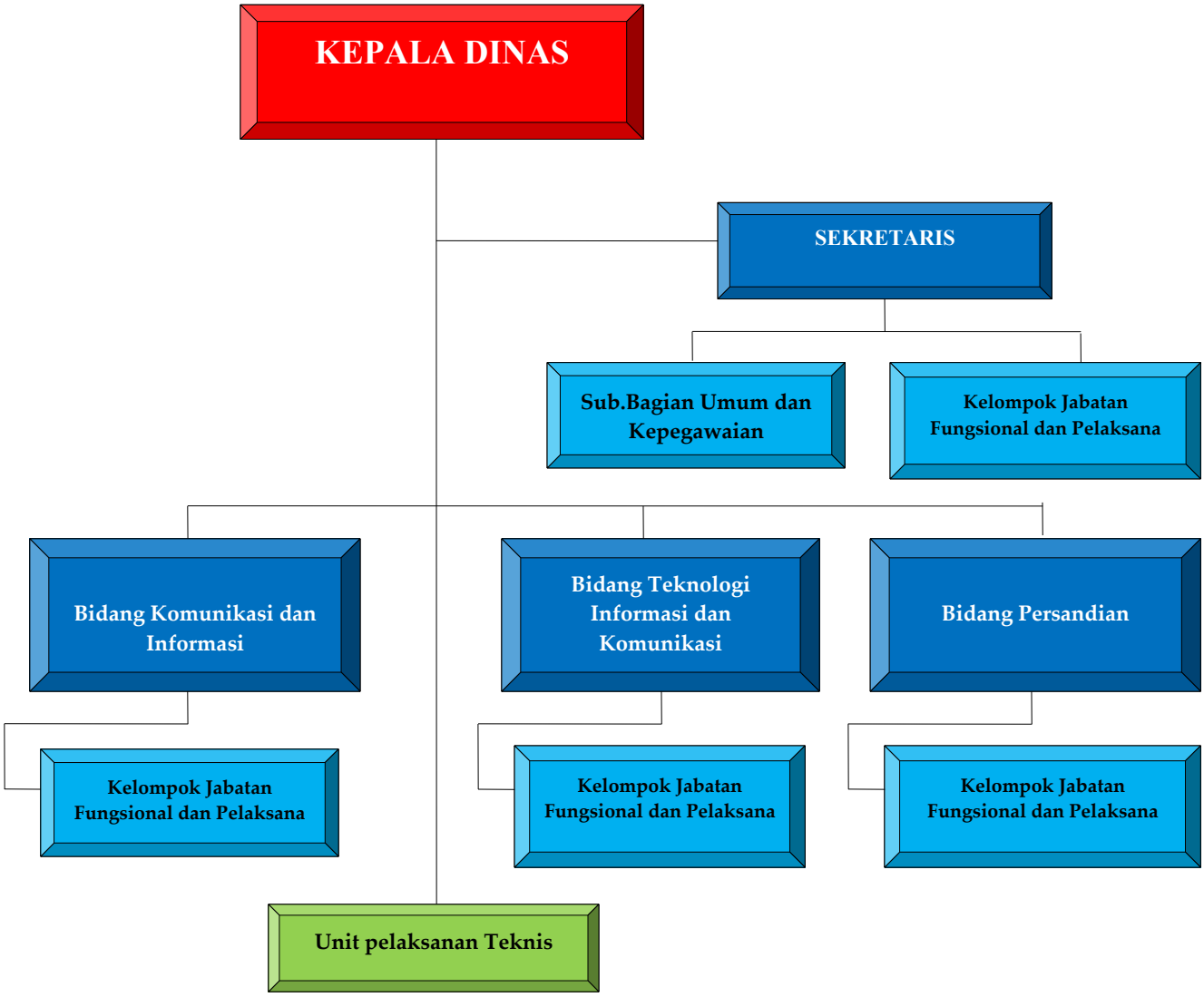
1) Kelompok Jabatan Fungsional

2) Kelompok Jabatan Pelaksana

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempertegas peran dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BIMA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Diskominfotik Kota Bima

Kondisi riil Pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dalam rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima pada tahun 2025 didukung oleh pegawai sebanyak 46 orang ASN (Terdiri dari 33 orang ASN dan 13 orang PPPK. Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
II	*1*
III	*5*
IV	*1*
Non Eselon	*39*

Sumber Data : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Tabel 1.2
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jabatan	Golongan / Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	*Pembina Tingkat I, IV/b*	*1*
Sekretaris	*Pembina, IV/a*	*1*
Kepala Bidang	*Pembina Tingkat I, IV/b*	*1*
	Pembina, IV/a	*2*
	Penata Tk. I, III/d	*1*
Kepala Sub Bagian	*Penata Tk. I, III/d*	*1*
Jabatan Fungsional	*Perencana Ahli Muda*	*1*
	Pranata Humas Ahli Muda	*2*
	Pranata Komputer Ahli Muda	*2*
	Statistisi ahli Muda	*2*
	Manggala Informatika Ahli Muda	*3*
	Sandiman Ahli Pertama	*1*
Jabatan Pelaksana / Staf	*Penata Tk. I , III/d*	*5*
	Penata III/c	*1*
	Penata Muda Tk I, III/b	*5*
	Penata Muda, III/a	*4*
P3K	*Arsiparis Ahli Pertama*	*1*
	Pranata Humas Ahli Pertama	*4*
	Pranata Komputer Ahli Pertama	*4*
	Pengadministrasi Perkantoran	*1*
	Operator Layanan Operasional	*3*

Sumber Data : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah personil
1.	*S3*	*1*
2.	*S2*	*5*
3.	*S1*	*34*
4.	*D.III*	*1*
5.	*SMA*	*5*

Sumber Data : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Tabel 1.4
Tabel 1.4
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	*29*	*63,04%*
Perempuan	*17*	*36,96%*
Jumlah	*46*	*100,00%*

Sumber Data : Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima. Tingkat Pendidikan paling tinggi adalah S3 dengan jumlah pegawai 1 orang, paling rendah adalah lulusan SMA sejumlah 5 orang, sedangkan jumlah lulusan S2 sejumlah 5 orang dan S1 sejumlah 34 orang.

1.4. Aset

Jumlah sumber asset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima sampai pada bulan Desember Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.5
Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Per 31 Desember 2025

No	Jenis Brang	Jumlah
1.	*Kendaraan Roda Empat*	*1*
2.	*Kendaraan Roda Dua*	*7*
3.	*Komputer*	*14*
4.	*Printer*	*13*
5.	*Laptop*	*16*
6.	*Internet*	*4*
7.	*Meja Kerja*	*26*
8.	*Kursi Kerja*	*30*
9.	*Filing Kabinet*	*13*
10.	*Ac*	*15*
11.	*Server*	*4*

Sumber : Data Aset Dinas Kominfo 31 Desember 2025

BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis yang dibuat suatu organisasi selaras dan terkait dengan Perencanaan Strategis Unit Organisasi yang lebih tinggi atau yang menjadi atasan unit organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ini telah diupayakan untuk memiliki keselarasan dan keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima.

Untuk mengaktualisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam program dan mengacu pada Hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, maka keselarasan antara RPJMD Kota Bima dengan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

Visi dan Misi Kota Sebagai Landasan Visi Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Kota Bima Tahun 2025-2029, yaitu :

“Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat Dan Berkelanjutan”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Bima 2025-2029 yaitu :

1. *Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Berketahanan Sosial Yang Religius Dan Berbudaya;*
2. *Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Maju Dan Berdaya Saing;*
3. *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional;*
4. *Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan;*
5. *Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.*

Keterkaitan antara misi Kota Bima dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bima dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD
Misi 3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional	*a) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;* *b) penyusunan program kerja dan kegiatan komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;* *c) pengoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;* *d) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;* *e) pembinaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik instansi pemerintah daerah;* *f) pembinaan penyelenggaraan sistem informasi elektronik yang aman yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah;* *g) pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektonik (e-Government), Smartcity dan Government Chief Information Office (GCIO) di lingkungan Pemerintah Daerah;* *h) pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/ telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah;* *i) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perizinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan TIK dan Persandian serta tugas pembantuan;* *j) penyelenggaraan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;* *k) pengoordinasian pembinaan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika, statisik dan persandian;* *l) pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi serta sistema informasi pemerintah daerah;* *m) penyelenggaraan ketua harian PPID dan mengoordinasikan pembinaan PPID di lingkungan Pemerintah Daerah;* *n) penyelenggaraan pusat data terintegrasi lingkup Pemerintah Daerah dan infrastruktur pendukungnya; dan* *o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.*

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Bima, Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik mendukung di Misi ke 3 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional dengan sasaran Meningkatnya elemen-elemen Reformasi Birokrasi. Adapun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2025-2029 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 2.2

Tabel Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	*Meningkatnya elemen-elemen Reformasi Birokrasi*			*Indeks Reformasi Birokrasi (RB)*	*73*	*75*	*77*	*79*	*81*
		1	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima*	*Nilai SAKIP*	*CC*	*B*	*B*	*B*	*BB*
		2	*Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik*	*Indeks SPBE*	*2,62*	*2,64*	*2,66*	*2,68*	*2,70*
		3	*Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna*	*Indeks penyelenggaraan data sektoral*	*3,00*	*3,2*	*3,40*	*3,60*	*3,80*

Adapun permasalahan yang diperkirakan dapat menghambat ketercapaian misi ke-3 dan juga beberapa pendorong untuk tercapainya misi ke-3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3
Misi, Permasalahan Layanan Dinas Kominfotik dan Faktor Penghambat maupun Pendorong

Misi	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi Ke-3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional	*1. Pelayanan Komunikasi danInformatika Belum Optimal* *2. Pengelolaan dan Pelayanan Data Statistik Belum Memadai dan Optimal* *3. Pendayagunaan Persandian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal*	*1. Terbatasnya sumber daya manusia yang trampil dan professional* *2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD* *3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.* *4. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK* *5. Terbatasnya sarana fisik dan alat persandian yang modern, yang sering kali dilator belakangi oleh anggaran yang terbatas*	*1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo* *2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk di dayagunakan* *3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public* *4. Pengembangan muatan SPBE* *5. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik*

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi misi sebagai Hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa mendatang. Tujuan yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memerlukan indikator untuk mengukur keberhasilannya.

Mengacu pada sasaran kota yang terkait indikator yang ingin dicapai pada awal kinerja pembangunan yaitu pada tahun 2025.

B. Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian dari proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan Hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Pada periode tahun 2025-2029, di dalam RPJMD Kota Bima Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendapat tugas untuk menjalankan program utama :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*
2. *Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*
3. *Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*
4. *Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*
5. *Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*

Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunkasi, Informatika dan Statistik berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat Dan Berkelanjutan			
Misi : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional			
Tujuan	*Sasaran*	*Strategi*	*Sasaran*
Meningkatnya elemen-elemen Reformasi Birokrasi	*1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima*	*Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah berkualitas*	*Peningkatan Pengawasan Dan Evaluasi*
	1.2. Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	*Melakukan digitalisasi pelayanan pemerintah secara terintegrasi guna memudahkan akses dan kecepatan pelayanan*	*Pemantapan Sistem Pendukung Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik berbasis digital*
	1.3. Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna	*Penyelenggaraan statistik sektoral secara akurat transparan dan tepat guna dalam membantu perencanaan daerah dan pengambilan kebijakan pemerintah*	*Penyediaan Standar Baku Data Statistik Sektoral*

C. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas dan fungsi urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian, dimana tugas dan fungsi ini harus diperkuat dan dimilikinya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Pengukuran	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima	Nilai SAKIP	Katagori	Kategori Penilaian SAKIP : AA = 90 - 100 Sangat Memuaskan, A = 80 – 90 Memuaskan, BB = 70 - 80 Sangat Baik, B = 60 - 70 Baik CC = 50 - 60 Cukup C = 30 - 50 Kurang	Hasil Evaluasi Inspektorat
3.2	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	Indeks	Penialain oleh TIM SPBE berdasarkan Kepmen PAN-RB Nomor 962 Tahun 2021	Penilaian Kemenpan RB
3.3	Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna	Indeks penyelenggaraan data sektoral	Indeks	Peraturan BPS nomor: 3 Tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral	Pershitungan Terhadap IKK

2.2. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/Tanggung Jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ Tanggung Jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penyusunan penetapan kinerja ini dimulai dengan merumuskan renstra yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut.

Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu penetapan kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima

mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahuni sejauh mana capaian kinerja yang apat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), untuk lebih jelasnya mengenai Perjanjian Kinerja Dinas Kominfotik adalah sebagaimana tertera dalam Tabel berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	*Sasaran Strategis*	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Target*
3.1	*Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima*	*Nilai SAKIP*	*Katagori*	*CC (Cukup)*
3.2	*Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik*	*Indeks SPBE*	*Indeks*	*2,62*
3.3	*Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna*	*Indeks penyelenggaraan data sektoral*	*Indeks*	*3*

No	*Program*	*Anggaran (Rp.)*
1	*Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*	*7.923.470.546,00*
2	*Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik*	*907.563.900,00*
3	*Program Pengelolaan Aplikasi Informatika*	*526.856.100,00*
4	*Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*	*306.588.800,00*
5	*Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi*	*193.961.000,00*

BAB
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

III

3.1. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan kinerja tahun ke-1 pada periode Renstra 2025-2029 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 98,72% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima	Nilai SAKIP	CC (Cukup)	CC	100%
3.2	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	Indeks SPBE	2,62	2,86	109,16%
3.3	Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna	Indeks penyelenggaraan data sektoral	3	2,61	87,00%

Berdasarkan Hasil pengukuran kinerja tabel diatas dapat diketahui :

1) *Target dengan capaian realisasi diatas 100% sebanyak 1 target;*
2) *Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 1 target;*
3) *Target dengan realisasi dibawah 100% sebanyak 1 target;*
4) *Target yang tidak dapat diperoleh Hasil pengukurannya sebanyak 0 target.*

Secara rinci, capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima adalah sebagai berikut :

3.2. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima

Capain indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima Tahun 2025

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Realisasi*		*2025*			*Target Akhir Renstra (2029)*
			2023	*2024*	*Target*	*Realisasi*	*%*	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima	*Nilai SAKIP*	*Katagori*	*C*	*C*	*CC*	*CC*	*100%*	*BB*

Sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki 1 indikator yaitu nilai SAKIP dengan target CC. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada perangkat daerah adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini perangkat daerah, melaksanakan akuntabilitas kinerja mereka berdasarkan standar dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh perangkat daerah telah sesuai dengan rencana, efisien, efektif, serta memberikan Hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penilaian ini melibatkan pengukuran kinerja melalui indikator-indikator yang mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian Hasil yang dapat dilihat dari aspek keuangan, layanan publik, dan tujuan strategis. Penilaian SAKIP juga mengacu pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mendukung perbaikan sistem pemerintahan yang lebih baik. Secara umum, penilaian ini mencakup hal-hal berikut:

1. *Perencanaan Kinerja: Menilai sejauh mana perangkat daerah merencanakan program dan kegiatan dengan jelas, terukur, dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.*
2. *Pelaksanaan Kinerja: Menilai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan rencana yang telah dibuat.*
3. *Pencapaian Kinerja: Menilai sejauh mana Hasil yang dicapai sesuai dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.*
4. *Akuntabilitas: Menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat mempertanggung Jawabkan kinerjanya kepada publik.*

Dengan demikian, penilaian SAKIP perangkat daerah menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong peningkatan kinerja dalam pemerintah daerah.

3.2.1 Uraian Pencapaian

- **Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3.3
Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	*Indikator*	*Satuan*	*2025*

	Kinerja		*Target*	*Realisasi*	*%*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima	*Nilai SAKIP*	*Katagori*	*CC*	*CC*	*100%*

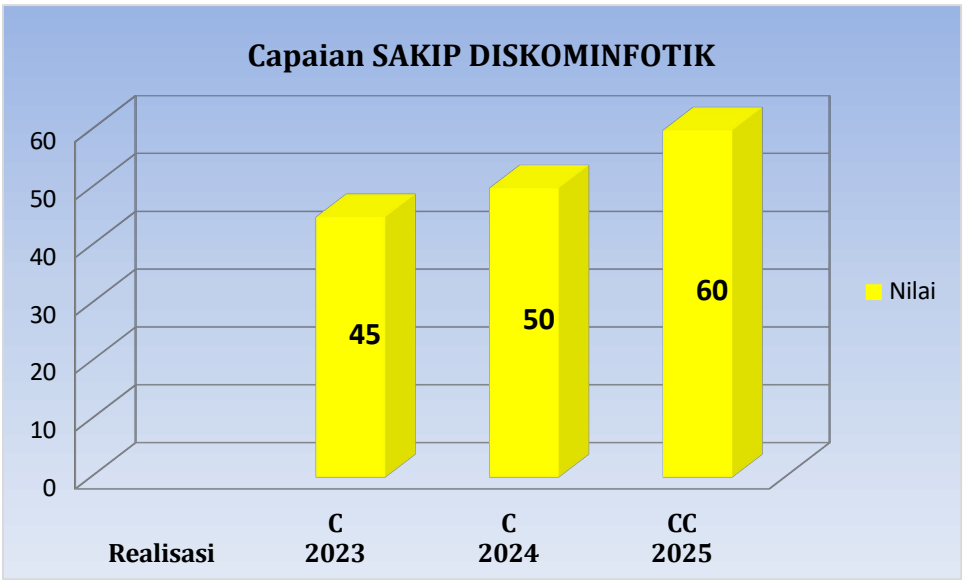
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja yang direncanakan telah tercapai sesuai harapan, maka itu berarti kinerja yang diharapkan telah terwujud sepenuhnya dan tidak ada deviasi yang signifikan antara rencana dan Hasil yang tercapai. Dalam penilaian SAKIP, ini akan mencerminkan bahwa Diskominfotik Kota Bima berhasil melaksanakan perencanaan dengan efektif dan efisien.

- **Analisis perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun - tahun sebelumnya**

Tabel 3.4
Analisis perbandingan kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Realisasi*		
			2023	*2024*	*2025*
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima	*Nilai SAKIP*	*Katagori*	*C*	*C*	*CC*

Berdasarkan pada tabel diatas, Capaian SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 realisasi meraih kategori C atau Katagori Kurang, pada tahun 2025 mengalami peningkatan ralisasi meraih katagori CC atau Katagori Cukup. walaupun pada tahun sebelumnya indikator tersebut belum menjadi salah satu IKU yang ditargetkan. Berikut grafik pencapaian kinerja pada indikator nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3.1 Grafik pencapaan kinerja pada indikator Nilai Sakip Diskominfotik

- **Analisis pencapaian 2025 dibanding target akhir 2029**

Capaian SAKIP perangkat daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya dengan transparan, efisien, dan akuntabel. Selain itu, capaian ini juga menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah suatu daerah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuannya, baik dalam hal pelayanan publik maupun pembangunan daerah.

Dari target tahun 2025 kategori CC atau dengan interpretasi CUKUP, terealisasi CC atau 100% dari target yang hendak dicapai. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 dan akhir Renstra sampai dengan Tahun 2029 dengan kategori B dan BB, akan dipastikan capaian akan terus ditingkatkan agar proses tata kelola pemerintahan berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel.

- **Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan data Provinsi & Nasional.**

Tidak ada target nasional dan provinsi yang diperbandingkan, karena capaian SAKIP Perangkat Daerah merupakan Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh masing-masing Inspektorat kabupaten/kota, sebagai penilaian terhadap kinerja perangkat daerah.

3.2.2 Upaya yang telah dilakukan

Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. *Tersedianya data yang valid dan dukungan aplikasi egovernment yang baik sehingga penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan menjadi lebih mudah.*
2. *Terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam tim dan dengan Perangkat Daerah terkait penilaian SAKIP.*
3. *Komitmen Diskominfotik dalam penyelenggaraan SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi Hasil evaluasi SAKIP.*

Tabel 3.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian IKU

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima						
2.16.01				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		
				Terlaksannya Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
		2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
				Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
			01	**Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	**6.358.000,00**	**6.352.000,00**

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*1 Dok*	*1 Dok*
			06	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	**7.250.400,00**	**7.250.400,00**
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*6 Lap*	*6 Lap*

Kinerja pencapain sasaran meningkatnya Akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima dengan indikator Niali SAKIP, didukung dari 1 (satu) program utama yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui 1 (satu) Kegiatan yakni Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan 2 (dua) sub kegiatan yakni Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3.2.3 Permasalahan

1. *Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian yang besar,*
2. *Belum adanya penetapan sanksi yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas kinerja;*
3. *Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja dilingkungan OPD;*

3.2.4 Solusi atas permasalahan

1. *Sosialisasi sekaligus bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada seluruh pegawai dilingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP;*
2. *Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP;*
3. *Mendorong pengembangan model percontohan Island of Integrity yaitu suatu pemerintah daerah/wilayah yang dijadikan model penerapan prinsip good governance sehingga wilayah tersebut dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta dapat dijadikan model/contoh bagi pemerintah daerah lainnya.*

3.3. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik

Capain indikator sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik Tahun 2025

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Realisasi*		*2025*			*Target Akhir Renstra (2029)*
			2023	*2024*	*Target*	*Realisasi*	*%*	
Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	*Indeks SPBE*	*Indeks*	*2,41*	*2,66*	*2,62*	*2,86*	*109,16%*	*2,70*

Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik memiliki 1 indikator yakni Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrkasi Republik Indonesia Nomor B/76/M.PD.06/2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerntaha Daerah Tahun 2025. Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Berdasarkan dari tabel capaian Indeks SPBE mengalami peningkatan dengan predikat baik, bahkan capaian pada Tahun 2025 telah melebihi target.

3.3.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU

- **Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2025**

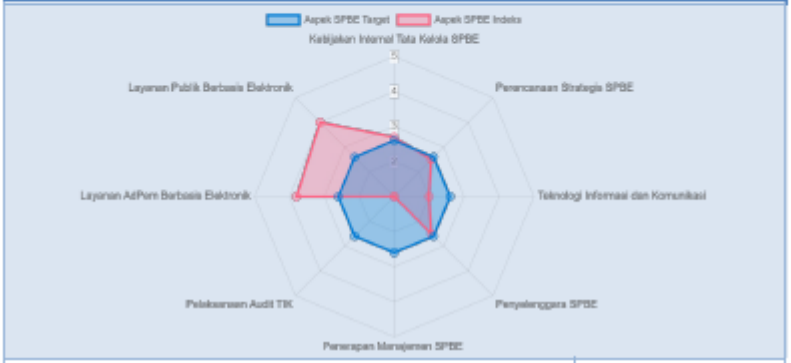
Tabel 3.7
Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*2025*		
			Target	*Realisasi*	*%*
Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	*Indeks SPBE*	*Indeks*	*2,62*	*2,86*	*109,16%*

Untuk mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintahan yang sehat, efektif, dan fleksibel, maka perlu dibuat sistem yang bisa mengatur semuanya dengan cepat dan minim risiko. Salah satu yang bisa dilakukan di era digital sekarang adalah dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Adapun Indeks SPBE dengan target 2,62, pada tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima memperoleh nilai 2,86 dengan capaian 109,16% atau sudah melebihi capaian yang telah ditargetkan sebelumnya.

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BIMA	2,86 (Baik)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**2,86**
Domain Kebijakan SPBE	2,70
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*2,70*
Domain Tata Kelola SPBE	2,30
Perencanaan Strategis SPBE	*2,50*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*2,00*
Penyelenggara SPBE	*2,50*
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	*1,00*
Audit TIK	*1,00*
Domain Layanan SPBE	3,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*3,80*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*4,00*

Gambar 3.2 Capaian SPBE Kota Bima Tahun 2025

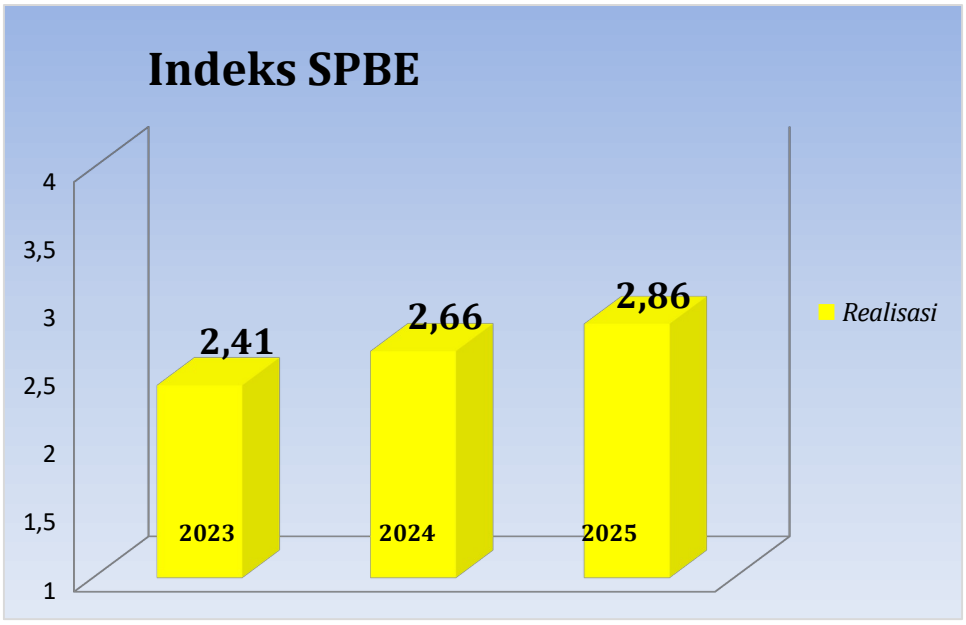
- **Analisis perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya**

Tabel 3.8
Analisis perbandingan kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Realisasi*		
			2023	*2024*	*2025*
Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	*Indeks SPBE*	*Indeks*	*2,41*	*2,66*	*2,86*

Berdasarkan pada tabel diatas, Indeks SPBE pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 realisasi Indeks SPBE meraih predikat Cukup Baik (indeks kurang dari 2,6) dan 2024 realisasi Indeks SPBE meraih predikat Baik (indeks minimal 2,6), sehingga dapat digambarkan bahwa realisasi Indeks SPBE meningkat dari tahun ke tahunnya yaitu 2,41 pada tahun 2023, meningkat menjadi 2.66 pada tahun 2024 dan meningkat lagi menjadi 2,86 pada tahun 2025.

Berikut grafik pencapaan kinerja pada indikator Indeks SPBE Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima tahun ini dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.3 Grafik pencapaan kinerja pada indikator Indeks SPBE

- **Analisis pencapaian 2025 dibanding target akhir 2029**

Capaian Indeks SPBE tahun 2025 dengan predikat baik telah melampaui capaian pada target tahun 2026 bahkan target akhir Renstra 2029. hal ini dikarenakan Indeks SPBE akan berevolusi menjadi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi) mulai tahun 2026. Perubahan ini

bertujuan untuk menggeser fokus dari sekadar implementasi teknis SPBE menuju dampak nyata, keterpaduan layanan publik, dan efektivitas pemerintahan digital

- **Analisis perbandingan realisasi kinerja dengan data Provinsi & Nasional**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrkasi Republik Indonesia Nomor B/76/M.PD.06/2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, bahwa capain rata-rata SPBE tingkat Nasional adalah tidak dirilis dan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi NTB sebesar 4,20 dengan predikat memuaskan, sementara Pemerintah Kota Bima mendapatkan nilai sebesar 2,86 dengan predikat baik.

3.3.2 Upaya yang telah dilakukan

Adapun upaya yang telah dilakukan yang menyebabkan keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. *Melakukan penyusunan, reviu, dan penyesuaian Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE agar selaras dengan target nasional*
2. *Mengintegrasikan aplikasi dan infrastruktur TIK untuk mencegah pemborosan anggaran (menghindari pembangunan aplikasi silo/sendiri-sendiri) serta meningkatkan kolaborasi layanan*
3. *Melakukan evaluasi mandiri yang obyektif untuk mengetahui kelemahan dan melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).*

Tabel 3.9
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian IKU

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik						
2.16.02				**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**	**907.563.900,00**	**895.008.800,00**
				Keterbukaan Informasi Publik	*77,65 Poin*	*96,62 Poin*
		2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**907.563.900,00**	**895.008.800,00**
				Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik	*12 Lap*	*12 Lap*
			14	**Relasi Media**	**670.979.000,00**	**670.780.000,00**
				Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	*12 Lap*	
			15	**Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat**	**29.248.000,00**	**18.941.000,00**
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	*41 Komunitas*	

			17	**Pelayanan Informasi Publik**	**101.560.000,00**	**101.559.500,00**
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	*60 Permohonan*	
			20	**Diseminasi Informasi**	**7.302.000,00**	**5.627.400,00**
				Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	*25%*	
			21	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**	**98.474.900,00**	**98.100.900,00**
				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	*4 Media*	
2.16.03				**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**526.856.100,00**	**477.887.800,00**
				Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE	*2,5 Indeks*	*2,5 Indeks*
		2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**526.856.100,00**	**477.887.800,00**
				Jumlah Dokumen Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE	*25 Dok*	
			13	**Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional**	**7.331.000,00**	**7.313.300,00**
				Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	*4 Aplikasi*	
			18	**Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah**	**20.389.000,00**	**3.887.000,00**
				Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	*1 Dok*	
			20	**Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah**	**60.212.000,00**	**57.785.400,00**
				Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	*2 Aplikasi*	
			21	**Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah**	**37.157.000,00**	**37.132.000,00**
				Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	*1 Aplikasi*	
			23	**Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas**	**95.252.100,00**	**86.242.100,00**
				Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	*34 Unit*	
			24	**Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**306.515.000,00**	**285.528.000,00**
				Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*34 PD*	
2.21.02				**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**193.961.000,00**	**179.776.740,00**
				indeks Keamanan Informasi	*1 Poin*	
		2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**109.803.000,00**	**96.502.500,00**
				Jumlah Dokumen tata kelola pemerintahan	*35 Dok*	

				yang aman dan terpercaya, di mana data pemerintah daerah terlindungi dengan baik		
			01	**Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**53.040.000,00**	**52.910.100,00**
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	*12 Dok*	
			02	**Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**19.234.000,00**	**19.109.000,00**
				Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*4 Lap*	
			03	**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**	**29.203.000,00**	**17.022.900,00**
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*12 Lap*	
			04	**Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**8.326.000,00**	**7.460.500,00**
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	*12 PD*	
		2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota**	**84.158.000,00**	**83.274.240,00**
				Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	*6,98%*	
			01	**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**84.158.000,00**	**83.274.240,00**
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	*6 PD*	

Kinerja pencapain sasaran Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik dengan indikator Indeks SPBE, didukung dari 3 (tiga) program utama yakni Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi melalui 4 (empat) Kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan.

3.3.3 Permasalahan yang dihadapi

Secara keseluruhan penerapan dari aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bima telah mencapai 100%, tidak terdapat kelemahan dari Pemerintah Kota Bima pada penerapan Kebijakan Internal SPBE. Namun ada beberapa penerapan manajemen yang masih menjadi kelemahan bagi Pemerintah Kota Bima diantaranya :

1. *Dikarenakan belum dilakukan oleh seluruh unit kerja, atau cakupannya belum menyeluruh. Antara lain penerapan Manajemen Keamanan Informasi, manajemen pengetahunan, dan manajemen perubahan.*
2. *Pelaksanaan Audit Keamanan yang belum dilakukan oleh BSSN.*

3.3.4 Solusi terhadap permasalahan :

1. Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE.

   Dapat dilakukan review terhadap kebijakan terkait pasal-pasal pada bagian Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, dan Audit TIK. Beberapa review yang sudah dilakukan sebelumnya dapat dilaksanakan perbaikannya berbarengan dengan perbaikan review dari tiga kebijakan diatas.
2. *Aspek Perencanaan Strategis SPBE*

   Dapat dilakukan review untuk dokumen Arsitektur dan Peta Rencana.
3. *Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi*

   Dengan nilai yang sudah maksimal, perlu diperhatikan tanggal dokumen evaluasi yang sudah dilakukan tindak lanjut yang digunakan sebagai data dukung pada tahun ini. Apabila tahun depan sudah berumur lebih dari 2 tahun maka perlu dilakukan evaluasi kembali dan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang sesuai evaluasi tersebut.
4. *Aspek Penyelenggara SPBE*

   Dengan nilai yang sudah maksimal, perlu diperhatikan tanggal dokumen evaluasi yang sudah dilakukan tindak lanjut yang digunakan sebagai data dukung pada tahun ini. Apabila tahun depan sudah berumur lebih dari 2 tahun maka perlu dilakukan evaluasi kembali dan dilanjutkan dengan tindak lanjut yang sesuai evaluasi tersebut.
5. *Aspek Manajemen SPBE*

   Sebelum dilaksanakan, perlu dilakukan pembuatan SOP atau pedoman untuk pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Pengetahunan dan Manajemen Perubahan. Sehingga apa yang dilaksanakan sudah berdasar pada pedoman.
6. *Aspek Audit TIK*

   Perlu segera melakukan pengajuan Audit Keamanan kepada BSSN agar tahun depan Audit Keamanan dapat mencapai nilai standar 3.
7. *Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik*

   Aplikasi pengawasan Internal Pemerintah perlu untuk dilakukan integrasi dengan aplikasi semisal dengan dashboard executive, atau dengan single sign

on. Atau dapat pula memanfaatkan aplikasi berbagi pakai dari BPK atau KPK. Untuk aplikasi umum, dapat dibuat aplikasi kecil yang dapat mendukung operasinal dari pemanfaatan aplikasi umum tersebut. Dengan sebelumnya dilakukan evaluasi untuk perlunya pembuatan aplikasi bantu tersebut.

8. *Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik*

   JDIH juga dapat di integrasikan dengan JDIHN.

3.4. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna

Capain indikator sasaran Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Indikator Sasaran Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat Guna Tahun 2025

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Realisasi*		*2025*			*Target Akhir Renstra (2029)*
			2023	*2024*	*Target*	*Realisasi*	*%*	
Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna	*Indeks penyelenggaraan data sektoral*	*Indeks*		*2,44*	*3*	*2,61*	*87,00%*	*3,80*

Terwujudnya data sektoral yang andal, akurat, dan tepat guna merupakan pilar krusial dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Data sektoral berkualitas tinggi adalah data yang mencakup data administrasi dan statistik lainnya, dikelola oleh instansi pemerintah (selain BPS), dan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

Sasaran strategis Terwujudnya data sektoral yang andal, akurat, dan tepat guna memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks penyelenggaraan data sektoral dengan target 3 dan teralisasi 2,61 dengan capaian 87.00% .

3.4.1 Uraian Pencapaian

- **Pengukuran Target & Capaian Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3.11
Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*2025*		
			Target	*Realisasi*	*%*
Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna	*Indeks penyelenggaraan data sektoral*	*Indeks*	*3*	*2,61*	*87,00%*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja Indeks penyelenggaraan data sektoral dengan target 3 tercapai 2,61 atau sebesar 87,00%, masih dibawah target yang telah di tetapkan

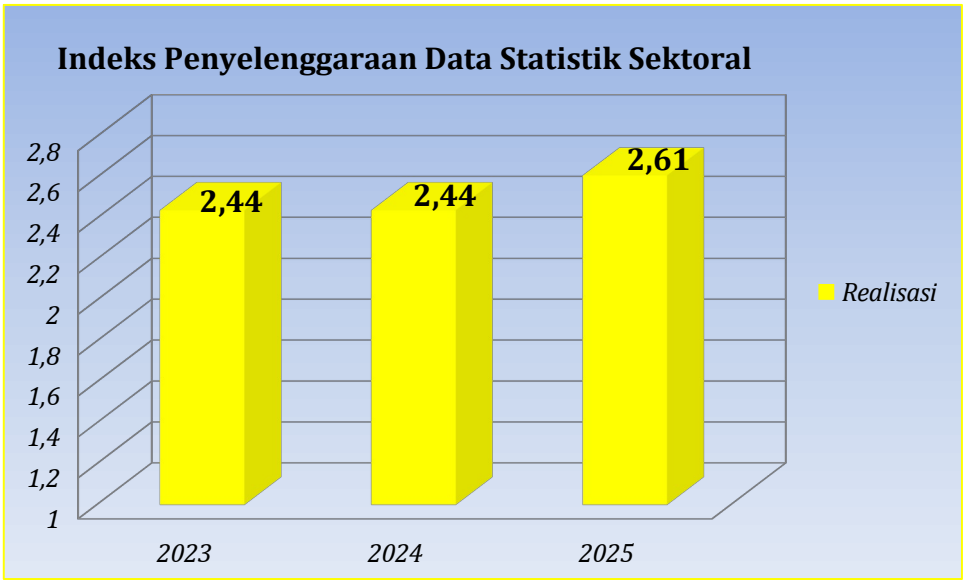
- **Analisis perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun –tahun sebelumnya**

Tabel 3.12
Analisis perbandingan kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	*Indikator Kinerja*	*Satuan*	*Realisasi*		
			2023	*2024*	*2025*
Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna	*Indeks penyelenggaraan data sektoral*	*Indeks*	*2,44*	*2,44*	*2,61*

Berdasarkan pada tabel diatas, Indeks penyelenggaraan data sektoral pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dan 2024 realisasi Indeks penyelenggaraan data sektoral meraih predikat Cukup (indeks kurang dari 2,6) dan, sehingga dapat digambarkan bahwa realisasi Indeks penyelenggaraan data sektoral meningkat menjadi 2,61 atau predikat Baik (indeks kurang dari 2,6 - <3,5) pada tahun 2025.

Berikut grafik pencapaan kinerja pada Indeks penyelenggaraan data sektoral Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima tahun ini dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3.3 Grafik pencapaan kinerja pada indikator Indeks penyelenggaraan data sektoral

- **Analisis pencapaian 2025 dibanding target akhir 2029**

Capaian Indeks penyelenggaraan data sektoral tahun 2025 dengan predikat baik masih dibawah capaian target tahun 2025 bahkan masih jauh dari target akhir Renstra 2029. hal

ini dikarenakan belum seluruh aspek pada domain SDI mencapai predikat memuaskan atau sebagaian indicator belum berada pada tingkat kematangan optimum.

3.4.2 Penyebab Keberhasilan

Adapun Penyebab keberhasilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia
    - *Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kota Bima telah mencapai predikat baik. Sudah ada kebijakan SDI berupa Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bima Nomor tentang Rekomendasi Kegiatan Statistik dan Metadata Kegiatan Statistik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mencakup antara lain standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk. Kebijakan tersebut sudah dilakukan oleh seluruh produsen data di lingkup Pemerintah Kota Bima*
    - *Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Bima.*
2. *Domain Kualitas Data*
    - *Penerapan Aspek Relevansi terkait Proses Identifikasi Kebutuhan Data, Penerapan Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Penjaminan Aktualitas Data dan Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data Untuk Pengguna Data, dan Akses Media Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. Seluruh produsen data sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam dokumen kebijakan berupa SOP dari Walidata*
3. *Domain Proses Bisnis Statistik*
    - *Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. Seluruh produsen data sudah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dalam dokumen kebijakan berupa SOP dari Walidata tentang Penyelenggaraan Kota Bima Satu Data dan SOP tentang Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Bima*
4. Domain Kelembagaan
    - *Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik sudah mencapai predikat baik. Kolaborasi antar dinas di Kota Bima telah dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk secara formal, dibawah arahan Sekretaris Daerah dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima, serta keterlibatan aktif Walidata dan Pembina Data dalam Focus Group Discussion (FGD) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik,*

Pemerintah Kota Bima telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS secara formal.

5. Domain Statistik Nasional

- *Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik sudah mencapai predikat baik. Pemerintah Daerah Kota Bima telah memanfaatkan statistik dasar dan statistik sektoral pada perencanaan, monitoring, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan untuk kepentingan pemerintah*
- *Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh walidata untuk kepentingan pemerintahan daerah. Hal ini tertuang dalam SOP yang dikeluarkan oleh walidata tentang Pengumpulan, Analisis, Pengelolaan dan Diseminasi Data Statistik Sektoral di Pemerintah Kota Bima, serta berdasarkan Portal Satu Data Kota Bima*

Dalam mencapai sasaran strategis Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna ditunjang dengan 1 program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung Capaian IKU

No				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi
Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna						
2.20.02				**Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**	**306.588.800,00**	**286.011.800,00**
				Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	*3 Poin*	*2,61*
		2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota**	**306.588.800,00**	**286.011.800,00**
				Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan	*82%*	
			07	**Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral**	**38.539.800,00**	**29.039.800,00**
				Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	*50 orang*	
			08	**Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional**	**178.683.000,00**	**175.119.000,00**
				Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	*25%*	
			09	**Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral**	**59.191.000,00**	**53.091.000,00**
				Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	*25%*	
			10	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia**	**22.685.000,00**	**22.612.000,00**
				Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	*1 Dok*	
			11	**Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar**	**7.490.000,00**	**6.150.000,00**

				Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	*1 Dok*	

Kinerja pencapain sasaran Terwujudnya data sektortal yang andal, akurat dan tepat guna, didukung dari 1 (satu) program utama yakni Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik melalui 1 (satu) Kegiatan yakni kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota dan 5 (lima) sub kegiatan yakni Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral, Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional, Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral, Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia serta Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar.

3.4.3 Permasalahan yang dihadapi

1. *Belum seluruh aspek pada Domain Prinsip SDI mencapai predikat memuaskan atau belum seluruh indikator berada pada tingkat kematangan optimum*
2. *Penerapan Aspek Relevansi terkait Relevansi Data Terhadap Pengguna, Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data berada pada predikat cukup, sedangkan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi Statistik terkait Konsistensi Statistik masih berada pada predikat kurang.*
3. *Penerapan Aspek Relevansi terkait Relevansi Data Terhadap Pengguna, Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu terkait Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan penerapan indikator-indikator tersebut.*
4. *Penerapan Aspek Perencanaan Data, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Pemeriksaan Data terkait pengolahan data berada pada predikat cukup, sedangkan penerapan Aspek Pemeriksaan Data terkait analisis data masih berada pada predikat kurang.*
5. *Penerapan Aspek Perencanaan Data, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Pemeriksaan Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan penerapan indikator-indikator tersebut.*
6. *Penerapan Aspek Profesionalitas dan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel berada pada predikat Cukup. Penjaminan Transparansi Informasi Statistik dan Penjaminan*

Netralitas, Objektivitas terhadap penggunaan Sumber Data Metodologi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data, Penyelenggaraan Forum Satu Data, dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Wali Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, akan tetapi masih menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda. Belum terdapat analisis kebutuhan pegawai di bidang statistik dan manajemen data, akan tetapi sudah ada pemenuhan kebutuhan pegawai dibidang statistik, serta belum diterapkan berdasarkan SOP yang terperinci mengenai hal diatas, walaupun Penyajian Data telah diupload pada website Satu Data Kota Bima.

7. *Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait Sosialisasi dan Literasi Data Statistik, Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik, dan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik masih berada pada predikat cukup. Penerapan Aspek Penguatan SSN Berkelanjutan terkait Pemanfaatan Big Data dalam kegiatan statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Belum ditemukan bukti dukung yang relevan menunjukkan penerapan indikator tersebut.*

3.4.4 Solusi atas Permasalahan

1. *Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penerapan setiap aspek Domain Prinsip SDI untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.*
2. *Pemerintah Kota Bima perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Penyediaan Format Data, dan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi sebagai pedoman seluruh produsen data untuk melaksanakan penjaminan kualitas data yang dihasilkan.*
3. *Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data Untuk Pengguna Data, dan Akses Media Penyebarluasan Data untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.*
4. *Pemerintah Kota Bima perlu menyusun suatu kebijakan/kaidah baku tentang penerapan Aspek Perencanaan Data, Aspek Pengumpulan Data, dan Aspek Pemeriksaan Data sebagai pedoman seluruh produsen data untuk melaksanakan Proses Bisnis Statistik yang dihasilkan dan diterapkan oleh seluruh produsen data*
5. *Pemerintah Kota Bima perlu melakukan perbaikan/tindak lanjut dari hasil evaluasi pada penerapan Aspek Penyebarluasan Data untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.*

6. *Pemerintah Kota Bima perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Aspek Profesionalitas, pemenuhan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel, dan penguatan Aspek Pengorganisasian Statistik, serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas penerapan aspek tersebut.*
7. *Pemerintah Kota Bima perlu menyusun kebijakan/kaidah baku terkait sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna yang mengikat dan diterapkan oleh seluruh produsen data.*

3.5 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{[\text{Realisasi Biaya}]}{\text{Target biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima adalah Rp 9.299.774.343,00 (Sembilan milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Sementara target biaya untuk semua Kegiatan yaitu sebesar Rp 9.858.440.346,00 (Sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).

Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 5,67% atau sebesar Rp 558.666.003,00,- (Lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga rupiah).

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi

Sasaran	*Indikator*	*% Capaian Kinerja*	*% Capaian Anggaran*	*Efisiensi*
Misi Ke 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Profesional				
Meningkatnya elemen-elemen Reformasi Birokrasi				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima	*Nilai SAKIP*	*100%*	*94,16%*	*5,84%*
Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik	*Indeks SPBE*	*109,16%*	*95,71%*	*12,32%*
Terwujudnya data sektortal	*Indeks penyelenggaraan*	*87,00%*	*93,29%*	*7,32%*

yang andal, akurat dan tepat guna	*data sektoral*			

Selanjutnya Analisis efisiensi didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran

1. *Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Diskominfotik Kota Bima", tercapai melalui kinerja "Nilai SAKIP" sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 5,84%.*
2. *Sasaran "Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik", tercapai melalui kinerja "Indeks SPBE" sebesar 109,16% dan efisiensi anggaran sebesar 12,32%.*

3.6 Penghargaan

Daftar Penghargaan	*Tempat & Waktu*	*Pemberi Penghargaan*	*Dokumentasi*
Kota Bima meraih penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB pada tahun 2025, yaitu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori PPID Utama dengan predikat Informatif	*Kamis (19 /12/2025* *Hotel Lombok Raya*	*KI Provinsi NTB*	

3.7 Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima pada tahun 2025 memiliki 5 program, 10 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. *Belanja Pegawai, pagu sebesar Rp 4.709.403.546,00 - dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.306.530.767,00,- atau 91.45%;*
2. *Belanja Barang dan Jasa pagu sebesar Rp. 4.601.446.800,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.466.261.576,00,- atau 97.06%;*

3. *Belanja Modal pagu sebesar Rp. 447.590.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 426.982.000,00,- atau 95.40%;*
4. *Sehingga pagu keseluruhan pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.858.440.346,00,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.299.774.343,00,- atau 94.33%.*

Tabel 3.15
Akuntabilitas Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima TA 2025

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan		Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
	Kominfotik	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.923.470.546,00**	**7.461.089.203,00**	**94,16%**
			'Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	*%*	*100*	*100*	*100,00%*
			Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan	*Tersedianya Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan*	*Bulan*	*12*	*12*	*100,00%*
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya Anggaran Administrasi Umum PD*	*Bulan*	*12*	*12*	*100,00%*
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Bulan*	*12*	*12*	*100,00%*
			Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik	*Tersediannya Anggaran*	*Bulan*	*12*	*12*	*100,00%*

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**23.746.400,00**	**23.740.400,00**	**99,97%**
		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**(100%) 16 Dok**	**100**	**100%**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			**6.358.000,00**	**6.352.000,00**	**99,91%**
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			**4.844.000,00**	**4.844.000,00**	**100,00%**
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			**3.058.000,00**	**3.058.000,00**	**100,00%**
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			**1.514.000,00**	**1.514.000,00**	**100,00%**
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			**722.000,00**	**722.000,00**	**100,00%**
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*
		6 Koordinasi dan Penyusunan			**7.250.400,00**	**7.250.400,00**	**100,00%**

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			*(100%) 6 Dok*	*100*	*100%*
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4.912.671.346,00**	**4.500.640.367,00**	**91,61%**
		Tersedianya Anggaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Baik yang sesuai dengan Perundang-undangan			**(100%) 12 Bulan**	**100**	**100,00%**
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			**4.709.403.546,00**	**4.306.530.767,00**	**91,45%**
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			*(100%) 52 orang / bulan*	*100*	*100%*
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			**196.358.800,00**	**187.200.600,00**	**95,34%**
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			*(100%) 12 Dok*	*100*	*100%*
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			**4.844.000,00**	**4.844.000,00**	**100,00%**
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			*(100%) 1 Lap*	*100*	*100%*
		4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			**2.065.000,00**	**2.065.000,00**	**100,00%**
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan			Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
		3	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**459.369.300,00**	**428.644.760,00**	**93,31%**
			Tersedianya Anggaran Administrasi Umum PD				**(100%) 12 Bulan**	**100**	**100,00%**
			1	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**			**10.645.300,00**	**10.644.600,00**	**99,99%**
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			*(100%) 1 Paket*	*100*	*100%*
			2	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**156.659.000,00**	**156.276.000,00**	**99,76%**
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			*(100%) 1 Paket*	*100*	*100%*
			3	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**			**38.490.000,00**	**38.479.000,00**	**99,97%**
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			*(100%) 1 Paket*	*100*	*100%*
			4	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**			**62.593.500,00**	**62.592.500,00**	**100,00%**
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			*(100%) 1 Paket*	*100*	*100%*
			5	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**			**45.000.000,00**	**44.600.000,00**	**99,11%**
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			*(100%) 1 Dok*	*100*	*100%*
			6	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**			**145.981.500,00**	**116.052.660,00**	**79,50%**
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			*(100%) 12 Lap*	*100*	*100%*
		4	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2.368.572.500,00**	**2.349.094.279,00**	**99,18%**

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan				Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
				Tersedianya Anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**(100%) 12 Bulan**	**100**	**100,00%**
				1	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**			**170.750.000,00**	**167.850.000,00**	**98,30%**
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			*(100%) 12 Lap*	*100*	*100%*
				2	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**			**2.113.190.500,00**	**2.096.630.279,00**	**99,22%**
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			*(100%) 12 Lap*	*100*	*100%*
				3	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**			**36.900.000,00**	**36.896.000,00**	**99,99%**
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			*(100%) 12 Lap*	*100*	*100%*
				4	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**			**47.732.000,00**	**47.718.000,00**	**99,97%**
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			*(100%) 12 Lap*	*100*	*100%*
			5	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**159.111.000,00**	**158.969.397,00**	**99,91%**
				Tersediannya Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**(100%) 12 Bulan**	**100**	**100,00%**
				1	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**			*52.366.000,00*	*52.242.397,00*	*99,76%*
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan			*(100%) 9 Unit*	*100*	*100%*

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
		dibayarkan Pajaknya					
		2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			**106.745.000,00**	**106.727.000,00**	**99,98%**
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			*(100%) 2 Unit*	*100*	*100%*
	Kominfotik	**2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**			**907.563.900,00**	**895.008.800,00**	**98,62%**
		Keterbukaan Informasi Publik	**Penilaian dari KI Propinsi NTB**	**Nilai**	**77,65**	**96,62**	**124,43%**
		1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**907.563.900,00**	**895.008.800,00**	**98,62%**
		Jumlah laporan kegiatan pengelolaan informasi publik		**Lap**	**12 Lap**	**100**	**100,00%**
		1 Relasi Media			**670.979.000,00**	**670.780.000,00**	**99,97%**
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media			*12 Lap*	*100*	*100,00%*
		2 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			**29.248.000,00**	**18.941.000,00**	**64,76%**
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo			*41 Komunitas*	*100*	*100,00%*
		3 Pelayanan Informasi Publik			**101.560.000,00**	**101.559.500,00**	**100,00%**

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan				Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan			*60 Permohonan*	*5 Permohonan*	*8,33%*
				4	**Diseminasi Informasi**			**7.302.000,00**	**5.627.400,00**	**77,07%**
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik			*25%*	*25%*	*100,00%*
				5	**Pengelolaan Media Komunikasi Publik**			**98.474.900,00**	**98.100.900,00**	**99,62%**
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis			*4 Media*	*4 Media*	*100,00%*
	Kominfotik	**3**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**					**526.856.100,00**	**477.887.800,00**	**90,71%**
			Nilai Indeks Domain Kebijakan dan Tata kelola SPBE							
			1	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**				**526.856.100,00**	**477.887.800,00**	**90,71%**
				'Jumlah Dokumen Penerapan pelaksanaan kebijakan dan tata kelola SPBE						
				1	**Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional**			**7.331.000,00**	**7.313.300,00**	**99,76%**
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		*aplikasi*	*4*	*0*	*0,00%*
				2	**Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah**			**20.389.000,00**	**3.887.000,00**	**19,06%**
					Jumlah dokumen arsitektur SPBE		*Dokumen*	*1*	*1*	*100%*

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan				Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
					Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan					
				3	**Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah**			**60.212.000,00**	**57.785.400,00**	**95,97%**
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		*aplikasi*	*2*	*2*	*100,00%*
				4	**Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah**			**37.157.000,00**	**37.132.000,00**	**99,93%**
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		*aplikasi*	*1*	*1*	*100,00%*
				5	**Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas**			**95.252.100,00**	**86.242.100,00**	**90,54%**
					Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		*Unit*	*34*		
				6	**Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota**			**306.515.000,00**	**285.528.000,00**	**93,15%**
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		*PD*	*34*	*0*	*0,00*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
	Kominfotik	**1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			**306.588.800,00**	**286.011.800,00**	**93,29%**
		Predikat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral		**Poin**	**3 Poin**		
		1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten/Kota			**306.588.800,00**	**286.011.800,00**	**93,29%**
		Persentase data sektoral yang terintegrasi dalam portal data dan dapat di akses oleh pemangku kepentingan		**%**	**82%**		
		1 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			**38.539.800,00**	**29.039.800,00**	**75,35%**
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		*orang*	*50*	*50*	*100,00%*
		2 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			**178.683.000,00**	**175.119.000,00**	**98,01%**
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan		*Persen*	*25*	*25*	*100,00%*
		3 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			**59.191.000,00**	**53.091.000,00**	**89,69%**
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		*Persen*	*25*	*25*	*100,00%*
		4 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			**22.685.000,00**	**22.612.000,00**	**99,68%**
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		*Dokumen*	*1*	*1*	*100,00%*
		5 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			**7.490.000,00**	**6.150.000,00**	**82,11%**

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan	Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
		Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		*Dokumen*	*1*	*1*	*100,00%*
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	Kominfotik	**1 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**			**193.961.000,00**	**179.776.740,00**	**92,69%**
		indeks Keamanan Informasi		**Poin**	**1 Poin**		
		1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**109.803.000,00**	**96.502.500,00**	**87,89%**
		Jumlah Dokumen tata kelola pemerintahan yang aman dan terpercaya, di mana data pemerintah daerah terlindungi dengan baik		**Dok**	**35**	**35**	**100,00%**
		1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**53.040.000,00**	**52.910.100,00**	**99,76%**
		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		*Dokumen*	*12*	*12*	*100,00%*
		2 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			**19.234.000,00**	**19.109.000,00**	**99,35%**
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		*Laporan*	*4*	*4*	*100,00%*

Urusan Pemerintahan	OPD	Program/Kegiatan				Rumusan Indikator	Satuan Indikator	Target	Realiasi	Capaian
					Kabupaten/Kota					
				3	**Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**			**29.203.000,00**	**17.022.900,00**	**58,29%**
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		*Laporan*	*12*	*12*	*100,00%*
				4	**Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**8.326.000,00**	**7.460.500,00**	**89,60%**
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		*PD*	*12*	*12*	*100,00%*
			2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota**				**84.158.000,00**	**83.274.240,00**	**98,95%**
				Persentase PD yang menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi			**%**	**6,98**	**6,98**	**100,00%**
				1	**Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**			**84.158.000,00**	**83.274.240,00**	**98,95%**
					Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		*PD*	*6*	*6*	*100,00%*

Dari penjelasan diatas dapat digambarkan, bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berjalan baik. Adanya sisa anggaran yang tidak terserap dari belanja diluar Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN umumnya dikarenakan adanya sisa dari belanja pengadaan/lelang belanja. Kondisi ini tidak mengurangi dari output maupun outcome yang sudah ditargetkan pada dokumen perjanjian kinerja dan rencana kerja Tahun 2025.

Adapun diagram Laporan Realisasi Anggaran dan Grafik Pola Penyerapan Anggaran Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.4 Grafik Pola Penyerapan Anggaran

Upaya untuk mengatasi kendal penyerapan anggaran di tahun selanjutnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima akan lebih cermat dalam menyusun rencana kerja anggaran dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 dan Renstra Diskominfotik Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama Tahun 2025.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Tahun 2025 sebagaian telah direalisasikan dengan baik kategori dengan rata-rata capaian indikator kinerja 1 dan 2 sasaran strategis rata-rata di atas 90% sedangkan capaian indicator 3 dibawah 90%. sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabiilitas Keuangan) sebesar 94,33%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima Tahun 2025 sebagaian sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Komuniksi dan Informasi pada Tahun 2025 telah belum berjalan dengan baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang

dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Diskominfo melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan Dinas Komunikasi,Informatika dan Statistik Kota Bima yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. *Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.*
2. *Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.*
3. *Mengembangkan serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional perencana yang diharapkan akan dapat membawa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima menjadi institusi Komuniksi dan Informasi daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur perencana melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.*
4. *Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (right man on the right place).*

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima.

Bima, 04 Februari 2026

Kepala Dinas Kominfotik Kota Bima

Dr. Muhammad Hasyim,S.Sos., SH., M.Ec.Dev
NIP. 19720824 199303 1 003

DINAS KOPERINDAG KOTA BIMA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TAHUN ANGGARAN 2025



2026

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/mediapertan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bima serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima untuk mendukung Pemerintah Kota Bima dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Bima.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L-KIP) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Kota Bima, Januari 2026
Plt. Kepala Dinas Koperindag,

ANIK KARTIKA, SE
NIP. 197601242003122008

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 3
1.4 Isu – Isu Strategis Yang Dihadapi 15

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 16
2.1 Perencanaan Jangka Menengah 16
2.1.1 Visi 16
2.1.2 Misi..... 16
2.1.3 Tujan dan Sasaran 17
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama 18
2.3 Rencana Kinerja Tahunan..... 19

BAB III. AKUNTANBILITAS KINERJA 20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 20
3.2 Analisis Capaian Kinerja..... 22
3.3 Realisasi Anggaran 31

BAB IV. PENUTUP..... 37
4.1 Kesimpulan..... 37
4.2 Saran..... 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian anggaran tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai

tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima merupakan dinas yang membidangi tiga Kementerian yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Perdagangan. Sehingga dalam pelaksanaannya mempunyai tugas yang kompleks. Tugas yang diemban oleh Dinas ini antara lain pengaturan, pelayanan, pemberdayaan serta pembangunan.

Bidang Koperasi mempunyai tugas sebagai fungsi pelayanan dan pemberdayaan. Perwujudan fungsi tersebut antara lain sosialisasi undang-undang perkoperasian, penerbitan badan usaha koperasi untuk memperoleh legalitas secara hukum, pendidikan, pelatihan serta pemberian bantuan peralatan untuk membentuk wirausaha baru dan pembinaan koperasi untuk menuju koperasi yang sehat dan berkualitas.

Adapun bidang perindustrian mempunyai tugas sebagai fungsi pemberdayaan. Peningkatan keahlian IKM melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian bantuan peralatan terhadap IKM untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri serta pembinan ikm untuk membenahi manajemen, keuangan, produksi dan pemasaran merupakan perwujudan dari fungsi yang dimiliki oleh bidang perindustrian.

Sedangkan pengaturan, pelayanan dan pembangunan merupakan fungsi yang dimiliki oleh bidang perdagangan. Contoh fungsi yang dimiliki oleh bidang perdagangan antara lain pengawasan terhadap cukai rokok ilegal dan barang kadaluarsa, sosialisasi peredaran barang-barang ilegal, operasi pasar murah untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, penerbitan surat rekomendasi untuk penjualan BBM, gula dan pupuk bersubsidi serta pengembangan sarana dan prasarana seperti pembangunan/revitalisasi pasar tradisional sebagai sarana perdagangan.

Dengan adanya penjabaran dari fungsi terkait pada bidang di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan akan mengarahkan pembangunan yang bermanfaat sehingga menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat

Laporan Kinerja Dinas Koperindag Kota Bima merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga

dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Bagian Kesatu Pasal 4 adalah :

a) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas meliputi bidang Koperasi dan UMKM, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.
b) Dalam melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
    1) Perumusan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Visi dan Misi;
    2) Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung Visi dan Misi daerah serta kebijakan;
    3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintah bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan;
    4) Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
    5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian rekomendasi perizinan bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
    6) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pihak terkait di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

7) Pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi asset Dinas Koperasi, Perinsutrian dan Perdagangan; Perencanaan Program Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
8) Pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
9) Pembangunan sarana dan prasarana di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
10) Pelakasanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya;

1.2.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperindag Kota Bima. Adapun Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
   1) Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :
      a) Seksi Pembinaan dan Kelembagaan Koperasi
      b) Seksi Pemberdayaan UMKM
      c) Seksi Pengawasan KUMKM
   2) Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
      a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
      b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan
      c) Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
d. Kelompok Fungsional

Tabel 1. 1
Keadaan SDM Dinas Koperindag Kota Bima
Per 31 Desember 2023

NO.	JABATAN	JUMLAH (Orang)
1	*2*	*3*
A.	**KEPALA DINAS**	1
B.	**SEKRETARIS**	1
1).	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
	Penyusun Naskah	
	Pengadministrasi Umum	1
2).	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1
	Penyusun Program dan Pelaporan	1
	Bendahara	1
	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1
	Pengadministrasi Keuangan	1
C.	**KEPALA BIDANG KOPERASI DAN UMKM**	1
1).	Pengawas Koperasi Muda	3
2).	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1
3).	Analis Koperasi	1
4).	Penyusun Rencana Saran Pengembangan Usaha	1
5).	Pengawas Koperasi Pertama	4
D.	**KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**	1
1).	Penyuluh Perindustrian Muda	1
2).	Analis Perdagangan	1
3).	Pengawas Kemetrologian Muda	1
4).	Pengawas Industri	1
5).	Fasilitator Perdagangan	1
6).	Analis Perdagangan	1
7).	Pengawas Industri	1
8).	Penilai Mutu Produk	1
9).	Pengelola Sarana Perindustrian	1
10).	Penyusun Rencana Pengawasan	1
11).	Juru Pungut Retribusi	1
E.	**KEPALA UPT PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU**	1
1).	Tata Usaha UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu	1
2).	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1
F.	**KEPALA UPT SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	1
1).	Tata Usaha UPT. Sarana Distribusi Perdagangan	1
2).	Pengadministrasi Umum	
3).	Pengelola Keuangan	1
4).	Tehnik Sarana dan Prasarana	2
jumlah		**46**

Tabel 1.2
Sumber Daya Aparatur
Dinas Koperindag Kota Bima Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S1	30
2	D3/2	2
3	SMA	13
4	SMP	1
JUMLAH TOTAL		***46***

(Sumber Data Dinas Koperindag Kota Bima Tahun 2025)

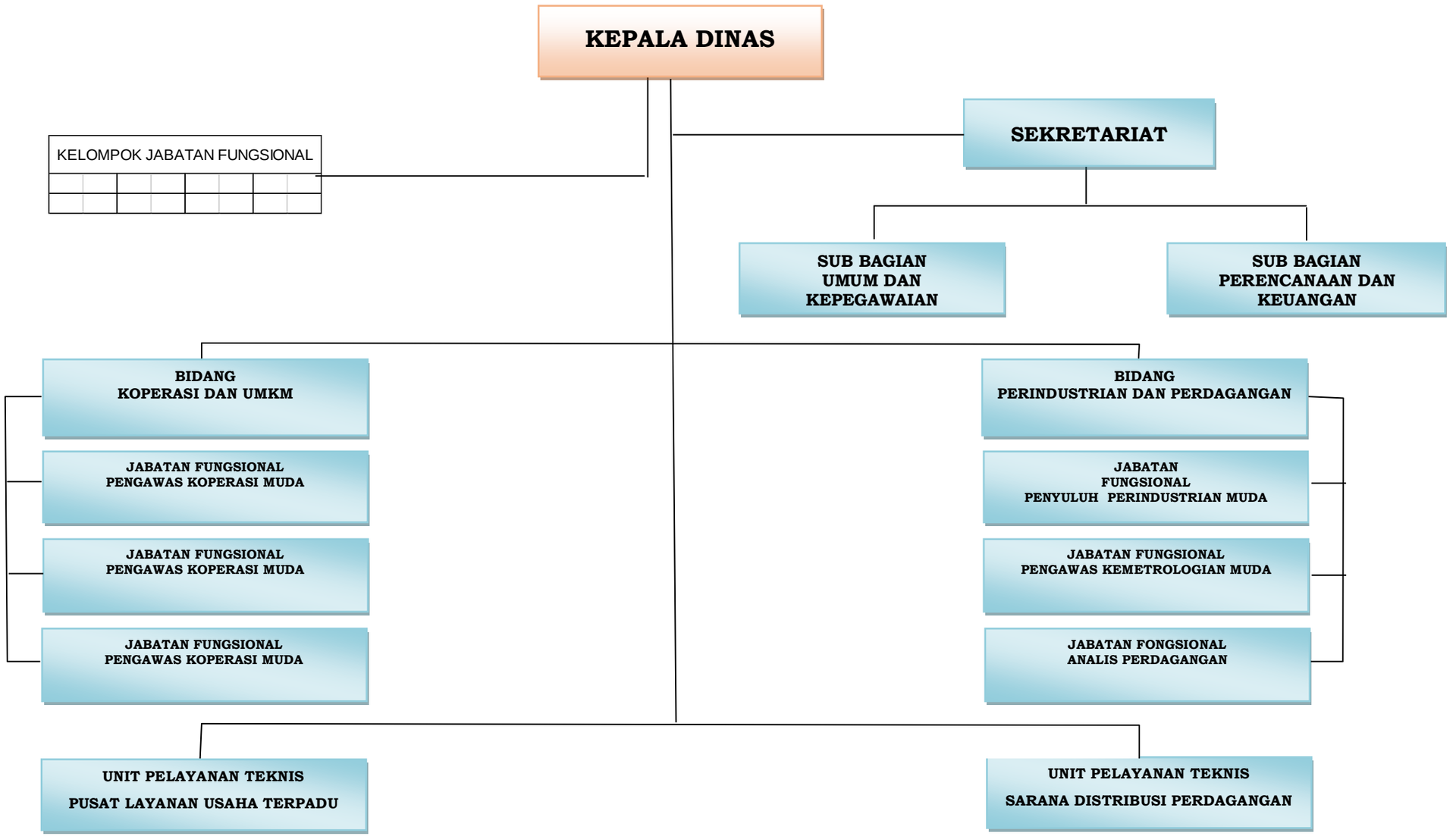
Tabel 1. 2
Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) Dinas Koperindag Kota Bima
Per 31 Desember 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN			TANGGAL LAHIR	AGAMA
			GOL	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	BULAN	TAHUN	JURUSAN	THN LULUS	JENJANG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Anik Kartika, SE	19760124 200312 2 008	IV/a	19 - 08 - 2024	Plt. Kepala Dinasi dan Sekretaris Dinas	19 - 08 - 2024	20	0	PIM Tk. IV	6	2012	Univ. Muhammadiyah Malang	2000	S1	1/24/1976	Islam
2	Muhamad Arif, S.sos		III/d		Kabid Koperasi dan UKM									S1	31/12/1968	Islam
3	H. Sodik, S.Sos	19700802 199303 1 003	IV/a	01 - 04 - 2023	Kabid. Perindustrian dan Perdagangan	01 - 04 - 2023	23	0	PIM Tk. IV	-	2009	STISIP Mbojo	2023	S1	02 - 08 - 1970	Islam
4	Jose Guteres, S.Sos	19750220 199510 1 001	III/d	01 - 04 - 2017	Sub Bagian Tata Usaha UPT. PLUT	23 - 06 - 2021	22	0	-	-	-	STISIP Mbojo	2005	S1	20 - 02 - 1975	Islam
5	Endang Astuti, SE	19740528 200312 2 004	III/d	01 - 10 - 2014	Kasubag Umum dan Kepegawaian	03 - 01 - 2017	24	0	PIM Tk. IV	6	2012	Univ. DR. Soetomo Surabaya	1996	S1	28 - 05 - 1974	Islam
6	Eka Pri Astuti, S.Kom	19800419 200312 2 010	III/d	01 - 10 - 2014	Pengawasan Koperasi Muda	31 - 12 - 2021	20	0	PIM Tk. IV	12	2014	Univ. Gunadarma Jakarta	2003	S1	19 - 04 - 1980	Islam
7	Khairum Fisyahrin, S.Sos	19710828 200604 1 021	III/d	01 - 04 - 2018	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	15 - 05 - 2019	20	0	-	-	-	Universitas Merdeka Malang	1996	S1	28 - 08 - 1971	Islam
8	Thamrin, SE	19760418 200604 1 017	III/d	01 - 04 - 2018	Analis Perdagangan	31 - 12 - 2021	20	0	-	-	-	Universitas Merdeka Malang	2001	S1	18 -04 - 1976	Islam
9	Rubia Minasari, SE	19790510 200604 2 036	III/d	01 - 04 - 2018	Penyuluh Perindustrian Muda	31 - 12 - 2021	16	0	-	-	-	STIE Bima	2005	S1	10 - 05 - 1979	Islam
10	M.Nur Setiawan, SE	19750530 200901 1 007	III/d	01 - 04 - 2021	Pengawas Kemetrologian Muda	31 - 12 - 2021	12	0	-	-	-	IKOPIN Bandung	2000	S1	30 - 05 - 1975	Islam
11	Abdul Anas, ST	19760527 201001 1 005	III/d	01 - 04 - 2018	Tata Usaha Saran Distribusi Perdagangan	16 - 09 - 2019	12	0	-	-	-	Universitas 45 Makasar	2001	S1	27 - 05 - 1976	Islam
12	Sumandari, ST	19810408 201001 2 017	III/d	01 - 04 - 2018	Pengawas Koperasi Muda	31 - 12 - 2021	12	0	-	-	-	UMI Makasar	2005	S1	08 - 04 - 1981	Islam
13	Muhammad Fauzi, SE	19690511 200210 1 001	III/d	01 - 10 - 2014	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	-	20	0	-	-	-	STIE YPUP Makasar	1996	S1	11- 05 - 1969	Islam

14	Arniyati, ST	19810314 200604 2 008	III/d	01 - 04 - 2018	Fasilitator Perdagangan	-	16	0	-	-	-	ITN Malang	2005	S1	14 - 03 1981	Islam
15	Arif Rahman, SE	19831207 200903 1 004	III/d	01 - 04 - 2023	Kepala UPT. Sarana Distribusi Perdagangan	25 - 09 - 2023	13	0	-	-	-	STIE BIMA	2005	S1	07 - 12 - 1983	Islam
16	Lely Nurwidia Ningsih, ST	19840903 201101 2 012	III/d	01 - 04 - 2019	Pengawas Industri	-	12	0	-	-	-	UII YOGYAKARTA	2007	S1	03 - 09 - 1984	Islam
17	Sukri Ramansyah, SH	19880316 201101 1 006	III/d	01 - 04 - 2019	Penyusun Program dan Pelaporan	-	12	0	-	-	-	Universitas Mataram	2009	S1	16 - 03 - 1988	Islam
18	Edy Rahman, SE	19710428 201406 1 002	III/c	01 - 10 - 2020	Pengawas Koperasi Muda	31 - 12 - 2021	18	0	-	-	-	Universitas Muslim Makasar	1997	S1	28 - 04 - 1971	Islam
19	Jauhari Sopiah, SH	19700109 201406 1 002	III/c	01 - 10 - 2018	Kepala UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu	30 - 12 - 2020	18	0	-	-	-	Universitas Merdeka Malang	1994	S1	09 - 01 - 1970	Islam
20	Fery Firmansyah, SE	19711116 200312 1 004	III/c	01 - 04 - 2021	Penyusun Rencana Usaha Mikro, Kecil, Menengah	-	14	0	-	-	-	STIE Bima	2008	S1	16 - 11 - 1971	Islam
21	Ratnasari, SE	19800105 200501 2 016	III/c	01 - 04 - 2022	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	-	12	0	-	-	-	STIE Bima	2013	S1	05 - 01 - 1980	Islam
22	Burhanuddin, SH	19700404 200701 1 031	III/c	01 - 10- 2022	Fasilitator Kewirausahaan	-	12	0	-	-	-	STIH Muhammadyah Bima	2006	S1	04 - 04 - 1970	Islam
23	Eni Nuraini, SE	19800214 201001 2 010	III/c	01 - 10- 2021	Penyusun Naskah	-	10	0	-	-	-	STIE Bima	2013	S1	14 - 02 - 1980	Islam
24	Erlinawati, SE	19731027 201406 1 002	III/c	01 - 10 - 2018	Analis Koperasi	-	20	0	-	-	-	Universitas Muslim Makasar	1998	S1	27 - 10 - 1973	Islam
25	M.Irawan Satria Bima, A. Md	19810210 200604 1 008	III/c	01 - 04 - 2018	Bendahara	-	14	0	-	-	-	Universitas Mataram	2005	D3	02 - 10 - 1981	Islam
26	Muhamad Rhoma Putra, SE	19780107 200901 1 004	III/c	01 - 04 - 2019	Penilai Mutu Produk	-	14	0	-	-	-	STIE Bima	2008	S1	07- 01 - 1978	Islam
27	Muhammad, S.Sos	19691116 201001 1 002	III/b	01 - 10 - 2020	Pengelola Data	-	14	0	-	-	-	STISIP Mbojo	2014	S1	16 - 11 - 1969	Islam
28	Nurul Amaliah, A.Md	19821119 201001 2 002	III/b	01 - 04 - 2018	Pengelola Sarana Perindustrian	-	10	0	-	-	-	Universitas Hasanudin Makassar	2004	D3	19 - 11 - 1982	Islam
29	Sri Guna Sari Dewi, S. Sos	19810124 201406 2 004	III/a	01 - 10 - 2020	Penyusunan Rencana Sarana Pengembangan Usaha	-	12	0	-	-	-	Universitas STISIP	2019	S1	24 - 01 - 1981	Islam
30	Lale Sukmawati, SE	19880327 202012 2 002	III/a	01- 12 - 2020	Pengawas Koperasi Pertama	-	2	0	-	-	-	STIE AMM Mataram	2014	S1	27 - 03 - 1988	Islam

31	Yeni Hastuti, SE	19890807 202012 2 005	III/a	01- 12 - 2020	Pengawas Koperasi Pertama	-	2	0	-	-	-	STIE Bima	2011	S1	07 - 08 - 1989	Islam
32	Surya Ningsih Lestari, SE	19900605 202012 2 005	III/a	01- 12 - 2020	Pengawas Koperasi Pertama	-	6	0	-	-	-	STIE AMM Mataram	2015	S1	06 - 05- 1990	Islam
33	Sudarmin	19720407 200604 2 012	III/a	01 - 04 - 2018	Pengadministrasi Umum	-	14	0	-	-	-	SMUN Tente Woha Bima	1991	SLTA	07 - 04 - 1972	Islam
34	Arabiah, S.Sos	19770421 200701 2 025	III/a	01 - 04 - 2019	Penyusun Rencana Pengawasan	-	13	0	-	-	-	STISIP Mbojo	2020	S1	21 - 04 - 1977	Islam
35	Abdullah	19651231 200701 1 365	III/a	01- 04- 2019	Tehnik Sarana dan Perasarana	-	15	0	-	-	-	SMU Pemuda Bima	1985	SLTA	12- 31 - 1965	Islam
36	Arifuddin	19721012 200604 1 009	III/a	01 - 04 - 2019	Pengadministrasi Umum	-	18	0	-	-	-	SMA SALAHUDDIN	1990	SMA	12 - 10 - 1972	Islam
37	Kusnadi	19790620 200701 1 010	III/a	01 - 04 - 2019	Pengadministrasi Keuangan	-	4	0	-	-	-	SMUN 1 Bolo Bima	1998	SLTA	20 - 06 - 1979	Islam
38	Ruslih	19670723 200501 1 006	II/d	01 -10 - 2018	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	-	19	0	-	-	-	STM	1987	STM	23 - 01 - 1981	Islam
39	Ramli	19830405 200701 1 005	II/b	01 -04 - 2015	Teknih Sarana dan Perasarana	-	14	0	-	-	-	Persamaan SLTA (Paket C)	2010	Paket C	04 - 05 - 1983	Islam
40	Juwaidin	19850706 200701 1 002	I/d	01- 04 - 2015	Juru Pungut Retribusi	-	19	0	-	-	-	SDN Kodo Kota Bima	1999	SDN	06 - 07 - 1985	Islam
41	Sarja, SE	19750420 202321 1 002	IX	01 - 07 - 2023	Ahli Pertama - Arsiuparis	-	0	6	-	-	-	Universitas Muhammadiyah Malang	2002	S1	20 - 04 - 1975	Islam
42	Seba Verawati Siokain, ST	19811019 20232 2 014	IX	01 - 11 - 2023	Ahli Pertama - Penyuluh Perindustian dan Perdagangan	-	0	2	-	-	-	Universitas Muhammadiyah Malang	2005	S1	19 - 10 - 1981	Islam
43	Hermansyah, SE	19830209 202321 1 010	IX	01 - 07 - 2023	Ahli Pertama - Pengawas Koperasi	-	0	6	-	-	-	STIE BIMA	2014	STM	09 - 02 - 1983	Islam
44	Aisyah, ST	19920622 202321 2 037	IX	01 - 07 - 2023	Ahli Pertama - Penguji Mutu Barang	-	0	6	-	-	-	Universitas Mataram	2015	S1	22 - 06 - 1992	Islam
45	Yusrahmansyah	19850209 202321 1 010	V	01 - 07 - 2023	Pemula - Pengamat Tera	-	0	6	-	-	-	SMA I Kota Bima	2003	SMA	09 - 02 - 1985	Islam

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERINDAG KOTA BIMA



1. Data Inventarisasi Aset Ruang Kepala Dinas

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	AC. Unit	Sharp	1	1		
2	Lemari ES	Sharp	1	1		
3	Micro Bus	Toyota Avanza Veloz 1500 cc	1	1		
4	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Kayu Jati Pintu Kaca geser	1	1		
5	Meja Tulis	Olimpic/OGGI / Meja 1 Biro	1	1		
6	Kursi Putar	Frontline / Hidrolik	1	1		
7	Televisi	LG / 32 "	1	1		
8	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Jepara / Jati Jepara 321 Ukiran Madura	1	1		
9	Kursi Tamu	Kursi Kayu Jati/Kursi kayu jati	1	1		
10	Kursi Kerja Eselon II	MERK HIGH PRESSURE TIPE:IMP OC UT-C606	1	1		

2. Data Inventarisasi Aset Ruang Sekertaris Dinas

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	AC Unit	Sharp AH-AP5 MHL	1	1		
2	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Jepara	1	1		
3	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kayu Kaca	1	1		
4	Kursi Tamu	Jepara	1	1		
5	Televisi	Sharp	1	1		
6	Kursi Putar	Brother / Hidrolik	1	1		
7	Kursi Kerja Eselon III	Merk Importa type IMP OC UT-C300	1	1		
JUMLAH BARANG			**7**	**7**	**0**	**0**

3. Data Inventarisasi Aset Ruang Sekretariat Dinas

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kayu	1	1		
2	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kayu	1	1		
3	Meja 1/2 Biro	Kayu Kaca	1	1		
4	Meja 1/2 Biro	Kayu Kaca	1	1		
5	Meja 1/2 Biro	Kayu Kaca	1	1		
6	Meja 1/2 Biro	Kayu Kaca	1	1		
7	Meja 1/2 Biro	Kayu Kaca	1	1		

8	Televisi	Sharp	1	1		
9	Kursi Putar	Frontline/hidrolik	1	1		
10	Lemaris Es	Sharp	1	1		
11	PC Unit	PWR AOC	1	1		
12	Printer	Epson LX 300 II	1	1		
13	AC Unit	Changhong CSC 12j2	1	1		
14	Note Book	Aser / LCD 14"	1	1		
15	Sepeda Motor	SUPRE X 125 CW	1	1		
16	Note Book	Aser / Acer	1	1		
17	Printer	Epson/L 360	1	1		
18	Printer	Epson/L 360	1	1		
19	Pc Unit/Komputer PC	ACER/A10 ACER C20	1	1		
20	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	Brother/B-304	2	2		
21	Pc Unit/Komputer PC	ACER/ASPIRE C20-720	1	1		
22	Lap Top	ASUS X441UV Core i3 6006U RAM 4GB HDD 500GB Layar 14"	1	1		
23	Printer	Merk HP Desjet GT5810 All In One	1	1		
24	Printer	Merk HP Desjet GT5810 All In One	1	1		
25	Lap Top	ASUS X441UV Core i3 6006U RAM 4GB HDD 500GB Layar 14"	1	1		
26	Lap Top	ASUS X441UV Core i3 6006U RAM 4GB HDD 500GB Layar 14"	1	1		
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother / B-304	1	1		
28	Meja Biro	Meubelair / 1/2 Biro	1	1		
29	Televisi	LG / TV LED 22"	1	1		
30	Meja Biro	Meubelair / 1/2 Biro	1	1		
31	Amplifier	Ashley PA12E	1	1		
32	Peti Uang	AZIN	1	1		
33	Sepeda Motor	Yamaha Mio Cw/Tipe MIO M3	1	1		
34	Sepeda Motor	Yamaha Mio Cw/Tipe MIO M3	1	1		
35	Printer (Peralatan personal komputer)	Epson/Printer Epson LX-310.DOT Matrix	1	1		
36	Personal Komputer (Laptop)	Assus 14"	1	1		
37	Personal Komputer (Laptop)	Assus 14"	1	1		

38	Printer	Epson L120	1	1		
39	Printer	Epson L120	1	1		
40	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
41	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
42						
JUMLAH BARANG			**42**	**42**	**0**	**0**

4. Data Inventarisasi Aset Ruang Bidang Koperasi dan UMKM

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja 1/2 Biro	Kayu kaca	8	8		
2	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kaca Nako	1	1		
3	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kaca Nako	1	1		
4	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kaca Nako	1	1		
5	Meja 1/2 Biro	kayu kaca	1	1		
6	Meja Kerja	OGGi/OGGI	1	1		
7	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	Jati	1	1		
8	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	Knocdown	1	1		
9	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	2 Pintu Kaca	1	1		
10	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	2 Pintu Kaca	1	1		
11	Facsimile	Panasonic	1	1		
12	Filling Besi/Metal	Arora	1	1		
13	Filing Besi/Metal	Brother	1	1		
14	Kipas Angin	Maspion	1	1		
15	Kursi Putar	Frontline/hidrolik	1	1		
16	Kursi Putar	Frontline/hidrolik	1	1		
17	Kursi Putar	Brother / Hidrolik	1	1		
18	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo / LCD 18,5 inch	1	1		
19	PC Unit	PWR AOC	1	1		
20	PC Unit	Intel Pentium G3220	1	1		
21	Notebook	Lenovo	1	1		
22	AC Unit	Changhong CSC 12j2	1	1		
23	AC Unit	LG 1,5 PK	1	1		
24	Jaringan lain-lain Netrwork Attached Storage (NAS)	Thecus/N2800	1	1		
25	Proyektor + Attachment	View Sonic/PJD 5153	1	1		

26	Printer	Printer multifungsi	1	1		
27	Pc Unit/Komputer PC	ACER/A10 ACER C20	1	1		
28	Printer	Epson/L 360	1	1		
29	Sepeda Motor	SUPRE X 125 CW	1	1		
30	Lap Top	ASUS X441UV Core i3 6006U RAM 4GB HDD 500GB Layar 14"	1	1		
31	Printer	Merk HP Desjet GT5810 All In One	1	1		
32	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother / B-304	1	1		
33	Kursi Kerja Eseleon IV	Activ Furniture	1	1		
34	Printer (Peralatan personal komputer)	Epson/Printer Epson LX-310.DOT Matrix	1	1		
35	Personal Komputer (Laptop)	Assus 14"	1	1		
36	Printer	Epson L120	1	1		
37	Kursi Kerja Eselon III	Merk Importa type IMP OC UT-C300	1	1		
38	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
39	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
40	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
			47	**47**	**0**	**0**

5. Data Inventarisasi Aset Ruang Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	2	3	4	6	7	8
1	Meja Kerja Pejabat Eselen IV	Kayu	1	1		
2	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	Jati	1	1		
3	AC Split	LG / 0,5 PK	1	1		
4	Kursi Tamu	Sofa / Sofa	1	1		
5	Kursi Kerja Eseleon IV	Activ Furniture	1	1		
6	Personal Komputer (Laptop)	Assus 14"	1	1		
7	Kursi Kerja Eselon III	Merk Importa type IMP OC UT-C300	1	1		
JUMLAH BARANG			**7**	7		

6. Data Inventarisasi Aset Ruang Bidang Perindustrian dan Perdagangan

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meja 1/2 Biro	Kayu kaca	11	11		
2	Meja 1/2 Biro	kayu kaca	1	1		
3	Meja Rapat	Taekwood	2	2		
4	Filling Besi/Metal	Brother	1	1		
5	Filling Besi/Metal	Arora	1	1		
6	Lemari Arsip unutk Arsip Dinamis	2 Pintu Kaca	1	1		
7	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 pintu	1	1		
8	Lemari Buku Untuk perpustakaan	Margo Mulyo	1	1		
9	Bangku Tunggu	Margomulyo	1	1		
10	Bangku Tunggu	Margomulyo	1	1		
11	PC Unit	Intel Pentium G3220	1	1		
12	PC Unit	AMD A4 5300	1	1		
13	AC. Unit	Sharp	1	1		
14	AC. Unit	Sharp	1	1		
15	AC Split	LG / 0,5 PK	1	1		
16	Notebook	Lenovo	1	1		
17	Notebook	Lenovo	1	1		
18	Printer	Epson L210	1	1		
19	Printer	Epson L350	1	1		
20	Kursi Putar	Brother / Hidrolik	1	1		
21	Kursi Putar	Frontline/hidrolik	1	1		
22	Meja Kerja	OGGi/OGGI	1	1		
23	Camera Video	Nikon D3100 Kit VR	1	1		
24	Note Book	Aser / Acer	1	1		
25	Kursi Putar	Brother / Hidrolik	1	1		
26	Tangga Alumunium	7 Pijatan Kaki	1	1		
27	Lap Top	ASUS X441UV Core i3 6006U RAM 4GB HDD 500GB Layar 14"	1	1		
28	Printer	Merk HP Desjet GT5810 All In One	1	1		
29	Printer	Merk HP Desjet GT5810 All In One	1	1		
30	Kursi Kerja Pejabat Lainya		1	1		
28	PC Unit	Intel Core i5-8250u	1	1		
29	Printer (Peralatan personal komputer)	Epson /Printer L120	1	1		
30	Printer	Epson L120	1	1		
31	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
32	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
33	Kursi Kerja Eselon IV	MERK ACTIV TIPE:KENT KD 101	1	1		
JUMLAH BARANG			**47**	**47**	**0**	**0**

7. Data Inventarisasi Aset UPT Sarana Distribusi Perdagangan

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7
1	AC Unit	LG / 1,5 PK	1	1		
2	Kipas Angin	Panasonic / Standing Fan	1	1		
3	Perkakas kantor	Bak Sampah	1	1		
4	Perkakas kantor	Bak Sampah	1	1		
5	Papan Nama Instansi	Alumunium/Plat/Besi/besar	1	1		
6	CCTV	CCTV	1	1		
7	Filling Besi/Metal	Tiger/standar	1	1		
8	Filling Besi/Metal	Tiger/standar	1	1		
9	Filling Besi/Metal	Tiger/standar	1	1		
10	Kursi Rapat	Informa/Standar	50	50		
11	Kursi Tamu	Ligna/Sofa	1	1		
12	Kursi Putar	Tiger/Hidrolik	5	5		
13	Meja Komputer	Informa	2	2		
14	Meja Biro	MALCA/Meja 1 Biro	1	1		
15	Meja Biro	Informa/Meja 1/2 Biro	6	6		
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa	1	1		
17	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Informa/Lemari Arsip 4 Rak	3	3		
18	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Informa/Lemari Arsip 1 Rak	1	1		
19	Laptop	Acer/Aspire E 14	1	1		
20	Bor	Makita/6412-10 mm	1	1		
21	Wireless	Pewie/PW-1268	1	1		
22	Tangga Alumunium	Foldedable	1	1		
23	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	VIAR k ARYA/ Hidrolik	1	1		
24	microphone	TOA/ZH 250	1	1		
25	microphone	TOA Star/ER-66 R	1	1		
26	meja 1/2 biro	kayu	3	3		
27	Televisi	Sharp 21 in	1	1		
28	Amplifier	TOA/ZA 2030	1	1		
29	Printer	Epson/L 360	1	1		
Jumlah			92	92		0

8. Data Inventarisasi Aset UPT Sarana Distribusi Perdagangan

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	Wireless	TP-Link / 3 Antena	1	1		
2	P.C Unit/Komputer PC	Lenovo / LCD 18,5 inch	1	1		
3	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo / LCD 18,5 inch	1	1		
4	Note Book	Asus / 11,6"	1	1		
5	Note Book	Asus / 11,6"	1	1		

6	Note Book	Asus / 11,6"	1	1		
7	Note Book	Asus / 11,6"	1	1		
8	Note Book	Asus / 11,6"	1	1		
9	Printer	Epson L 555 / Inkjet	1	1		
10	Printer	Epson L 555 / Inkjet	1	1		
11	Printer	Epson / Dot Matrix	1	1		
12	Lemari Es	Toshiba / 1 Pintu	1	1		
13	AC Unit	Daikin / 2 PK	1	1		
14	AC Unit	Daikin / 2 PK	1	1		
15	AC Unit	Daikin / 2 PK	1	1		
16	AC Unit	LG / 1 PK	1	1		
17	AC Unit	LG / 1 PK	1	1		
18	Kipas Angin	Panasonic / Standing Fan	1	1		
19	Kipas Angin	Panasonic / Standing Fan	1	1		
20	Kipas Angin	Panasonic / Standing Fan	1	1		
21	Kipas Angin	Panasonic / Standing Fan	1	1		
22	Televisi	LG / 32 "	1	1		
23	Televisi	LG / 32 "	1	1		
24	Amplifier	Lane / 12 Inch Speaker	1	1		
25	Camera Video	Canon / 3 " LCD	1	1		
26	Proyektor + Attachment	Aser / SVGA 800 x 600	1	1		
27	Dispenser	Sanken / Standing Dispenser	1	1		
28	Dispenser	Sanken / Standing Dispenser	1	1		
29	Dispenser	Sanken / Standing Dispenser	1	1		
30	Lemari Kayu	Partikel Board / Rak Galeri susun 5	1	1		
31	Lemari Kayu	Partikel Board / Rak Galeri susun 5	1	1		
32	Lemari Kayu	Partikel Board / Rak Majalah	1	1		
33	Lemari Kayu	Rak MDF Finishing HPL / Rak Galery	1	1		
34	Lemari Kayu	Rak MDF Finishing HPL / Rak Galery	1	1		
35	Lemari Kayu	Rak MDF Finishing HPL / Rak Galery	1	1		
36	Lemari Kayu	Rak MDF Finishing HPL / Rak Galery	1	1		
37	Lemari Kayu	MDF Finising HPL / Rak Dinding Susun 5	1	1		
38	Lemari Kayu	MDF Finising HPL / Rak Dinding Susun 5	1	1		
39	Meja Rapat	Olimpic / Olimpic	1	1		
40	Kursi Tamu	Ligna / model 311	1	1		
41	Kursi Tamu	Ligna / model 311	1	1		
42	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		

43	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
44	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
45	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
46	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
47	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
48	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
49	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
50	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
51	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
52	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
53	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
54	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
55	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
56	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
57	Kursi Putar	Informa / Hidrolik	1	1		
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Sitme / Hidrolik	1	1		
59	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
60	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
61	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
62	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
63	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
64	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
65	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Olimpic / Meja 1/2 Biro	1	1		
66	Meja Kerja	Particle board / bentuk L	1	1		
67	Meja Kerja	Particle board / bentuk L	1	1		
68	Meja Kerja	Particle board / bentuk L	1	1		
69	Meja Kerja	Particle board / bentuk L	1	1		
70	Meja Kerja	Particle board / bentuk L	1	1		
71	Meja Kerja	Particle board / bentuk L	1	1		
72	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Particle board/besi / Meja 1 Biro	1	1		
73	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Tiger / Rak 5	1	1		
74	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Tiger / Rak 5	1	1		
75	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Tiger / Rak 5	1	1		
76	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother / Rak 5	1	1		
77	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother / Rak 5	1	1		
78	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Ligna / Rak 2	1	1		
79	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Ligna / Rak 2	1	1		

80	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Ligna / Rak 2	1	1		
81	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Ligna / Rak 2	1	1		
82	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Ligna / Rak 2	1	1		
83	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Ligna / Rak 2	1	1		
84	Kompor Gas	Quantum	1	1		
85	kitchen Set	Kaca/Rak Susun	1	1		
86	Tabung Gas	Pertamina/PIC	1	1		
87	Sepeda Motor	Honda EA 6071 SA	1	1		
88	Papan Nama Instansi	Alumunium/Plat/Besi/besar	1	1		
89	Alat Dapur Lainnya	G Olimpia	1	1		
90	Tangga Alumunium	Alumunium/Lipat	1	1		
91	Rak-rak penyimpangan	Olimpic/3 susun	1	1		
92	Rak-rak penyimpangan	Olimpic/3 susun	2	2		
93	Rak-rak penyimpanan	Olimpic/Stainles + lampu	1	1		
94	Meja Besi/Metal	Olimpic/Besi + Papan	2	2		
95	Meja Besi/Metal	Olimpic/Besi + Papan	2	2		
96	Lemari Pakaian	Olimpic/3 susun, Pipa Stainless	4	4		
97	Rak-rak penyimpangan	Olimpic/3 susun	3	3		
JUMLAH BARANG			**105**	**105**		

9. Data Inventarisasi Aset Rumah Tenun

NO.	NAMA BARANG/JENIS BARANG	MERK/MODEL	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
				B	KB	RB
1	2	3	4	5	6	7
1	Genset	YAMAHA, EF17000 TE 12.500 Watt	1	1		
2	Kursi Kerja	Chitose/Caesar P	35	35		
3	Meja Biro	Meubelair/1 Biro	4	4		
4	Meja Biro	Meubelair/1/2 Biro	3	3		
5	Alat Pemadam Kebakaran	Global Fire / GF-C23 23KG	1	1		
6	Termohygrometer (Alat Ukur Universal)		1	1		
7	Alat Pemotong Kertas	Pisaumal Pemotong Kardus /20 unit	1	1		
8	Alat Pemotong Kertas	Alat Pemotong Karton/Mesin Pond Rotary Manual	1	1		

9	Alat Pemotong Kertas	Alat Pembuat Kardus/Mesin Pound Rotary Manual	1	1		
10	Alat kantor lainya	Alat Sablon Manual 4 Warna	2	2		
11	Alat kantor lainya	Terop Kedap Air/Rangka Besi	7	7		
12	Alat kantor lainya	Terop Kedap Air/Rangka Besi	1	1		
13	Alat kantor lainya	Mesin sablon cup/gelas	1	1		
14	Alat kantor lainya	Screen, Rakel dan hot gun/alat sablon komplit	1			
15	Alat kantor lainya	Mesin sablon LED sealer cup manual	1	1		
16	Alat kantor lainya	Mesin sablon plastik	1	1		
17	Meja 1/2 biro	Meja 1/2 biro jati	6	6		
18	Kursi Kerja Pejabat lainya		5	5		
19	Lemari BUKU Arsip untuk arsip dinamis	Lemari Arsip	5	5		
20	Mesin Cetak Officel Rol	Digital Printing Konica/Atalas Konica	1	1		
21	Mesin Cetak Officel Rol	Mesin Offiset	1	1		
22	Mesin Kertas	Alat pemotong Kardus/Rotari Slinting Creaser Machine	1	1		
23	Mesin Kertas	Mesin Pembuat Kardus/Rotari Ponds Creasing and cutting press	1	1		
24	Mesin Barcode	Mesin Koding kadarluarsa	4	4		
25	Mesin Pres Kain	Mesin Press Sablon	2	2		
26	Mesin Printing	Mesih Hot Print Emboss	1	1		
27	PC Unit	Intel Core i5-8250u	1	1		
28	PC Unit	Komputer All In One	2	2		
29	Plotter (Peralatan Mainframe)		1	1		
30	Printer (Peralatan personal komputer)	Epson /Printer L120	1	1		
31	Printer (Peralatan personal komputer)	HP/Printer HP 5810	1	1		
32	Printer (Peralatan personal komputer)	HP/Printer HP 315	1	1		
JUMLAH BARANG			**96**	**95**		

1.3 Isu-Isu Strategis Yang Dihadapi

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima menghadapi beberapa permasalahan:

a. Tumbuhnya Wira Usaha Baru (WUB) belum didukung oleh penguatan kapasitas yang memadai baik dari aspek lokasi usaha, permodalan, ketrampilan maupun jaringan dan informasi pemasaran.
b. Masih rendahnya pemanfaatan sumber daya lokal dalam pengembangan IKM (Industri Kecil Menengah) maupun UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
c. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dikelola dan ditata secara optimal.
d. Prasarana dan sarana ekonomi masih terbatas dalam rangka mendukung peran dan fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis nasional dan kawasan strategis Provinsi NTB.
e. Sifat pasif dari pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan hanya menunggu dari bantuan pemerintah.
f. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dari para pelaku usaha.
g. Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi sehingga koperasi sehat dan koperasi yang melakukan RAT (Rapat Akhir Tahun) cenderung tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja Tahunan yang dalam hal ini adalah disusun dan ditetapkan setiap tahun.

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai/diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam dan meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota Bima serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025-2029, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terkahir Rencana Strategis.
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana stategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melaui tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Peningkatan PDRB Pada Sektor Jasa Usaha Keuangan	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
			Meningkatnya Pertumbuhan dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil
		Peningkatan PDRB Pada Sektor Perindustrian dan Perdaganangan	Meningkatnya Investasi Usaha bidang Perindustri dan Perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri
				Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Koperindag Kota Bima

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN									
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1. Meningkatkan Produktifitas Koperasi, UKM, Perindustrian dan	Produktifitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Peningkatan Volume Usaha dan Kualitas kelembagaan Usaha	Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	2,50%	3,00%	3,50%	1,25%	13,25%

Perdagangan	(UMKM)	Koperasi	Meningkatnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	5,00%	7,00%	8,00%	47,39%	3,40%
	Meningkatnya Investasi Usaha Pada Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi PDRB Sektor Perindustrian	Meningkatnya Nilai Investasi Usaha Industri	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Industri	15,62%	17,00%	20,46%	20,36%	35,46%
		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya Nilai Investasi Usaha Perdagangan	Persentase Peningkatan Investasi Sektor Perdagangan	38,00%	35,50%	42,10%	32,37%	39,10%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperindag Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha koperasi (tahun n) dikurangi (tahun n-1) dibagi (tahun n-1) dikali 100%

		Peningkatan Volume Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Jumlah pertumbuhan UMKM (tahun n) dikurangi (tahun n-1) dibagi (tahun n-1) dikali 100%
		Menurunya Tingkat Inflasi Daerah	Nilai InflasiDaerah (tahun n) dikurangi (tahun n-1) dibagi (tahun n-1) dikali 100%

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Untuk mewujudkan misi tersebut di atas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2025 dibawah ini:

Tabel.2.3
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperindag Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	14,90%
2		Peningkatan Volume Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	40,20%
		Menurunya Tingkat Inflasi Daerah	2,61 - 3,44 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima Tahun 2025 diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Dalam tugasnya Dinas Koperindag mempunyai beberapa tujuan yang terdapat pada bidang Koperasi dan UMKM serta Perindustrian dan Perdagangan. Tujuan tersebut dicapai melalui capaian kinerja Dinas Koperindag yang meliputi pencapaian sasaran strategis. Adapun Dinas Koperindag memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang terdapat pada bidang Koperasi dan UMKM serta bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Kota Bima sebagai kota perdagangan dan jasa sangat didukung oleh pelaku UMKM sebagai komponen utama pengerak ekonomi. Untuk itu perlu terus didorong dan ditingkatkan pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama dalam hal SDM, bantuan peralatan dan modal guna meningkatkan kinerja dan kualitas kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Peningkatan kinerja dan kualitas kelembagaan usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pencapaian sasaran strategis I.

1. Pencapaian Sasaran dari Indikator ke I

Sasaran strategis I yang merupakan Sasaran Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah meningkatnya kinerja dan kualitas kelembagaan usaha Koperasi dan UMKM, terdiri 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya pada tahun 2025 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Indikator I Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	14,90%	1,14%	7,65%

	UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal				

2. Pencapaian Sasaran dari Indikator ke II

Sasaran Strategi II adalah Meningkatnya jumlah dan Kualitas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Realisasi pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melebihi dari target yang direncanakan, ini menandakan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas baik berupa kegiatan pelatihan maupun sosialisasi diterapkan dengan baik oleh masyarakat.

sektor perindustrian sangat kecil dibandingkan pertumbuhan sektor perdagangan. Sehingga IKM yang merupakan sektor utama di perindustrian di kota Bima sangat memerlukan pembinaan yang berkelanjutan oleh dinas yang terkait. Pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi usaha industri dan akan berdampak terhadap pertumbuhan sektor perindustrian.

Meningkatnya investasi usaha industri merupakan pencapaian sasaran strategis I.

Tabel.3.2
Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian pada Indikator ke II Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal	Peningkatan Volume Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	40,20%	8,66%	**14,07**%

3. Pencapaian Sasaran dari Indikator III

Pencapaian sasaran strategis dari Indikator III adalah Meningkatnya Investasi Usaha bidang Perindustri dan Perdagangan.

Realisasi pertumbuhan investasi usaha industri melampau dari target yang direncanakan. IKM merupakan sektor utama di perindustrian di kota Bima mendapat perhatian pembinaan yang sangat besar oleh dinas Koperindag kota. Pembinaan ini

meningkatkan investasi usaha industri dan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan sektor perindustrian.

Meningkatnya investasi usaha perdagangan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa masyarakat Kota Bima didukung dengan sarana perdagangan/pasar sebanyak 8 (delapan) pasar sebagai tempat suply/penyediaan barang dan jasa terutama 9 (sembilan) kebutuhan bahan pokok.

Tabel.3.4
Pengukuran Kinerja Pada Pencapaian Indikator ke III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal	Menurunya Tingkat Inflasi Daerah	2,61 - 3,44 %	2,94%	%

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub pelaksana baik setingkat bidang maupun seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

3.2.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, dapat dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima.

Performance kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada

Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperindag
Pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2023				TAHUN 2024			
		TARGET	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIN %	TARGET	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIN %
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8.15%	-	9.59%	**117.67%**	13,25%	-	19,93%	**150,42**
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2.39%	-	3.12%	**130.54%**	3,40%	-	8,66%	**254,71**
3	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri	1.16%	-	0.12%	**10.34%**	35,46%	-	48,23%	**136,01**
4	Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan	75.37%	-	99.73%	**132.32%**	39,10%	-	40,23%	**102,89**

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperindag
Pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024				TAHUN 2025			
		TARGET	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIN %	TARGET	TARGET NASIONAL	REALISASI	CAPAIN %
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	8.15%	-	9.59%	**117.67%**	14,90%	-	1,14%	7,65
2	Peningkatan Volume Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.39%	-	3.12%	**130.54%**	40,20%	-	8,66%	14,07
3	Menurunya Tingkat Inflasi Daerah	1.16%	-	0.12%	**10.34%**	2,61 - 3,44 %	-	2,94%	-

1. **Sasaran ‘‘Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal” dengan indikator :**

Pada Tahun 2025 pencapaian peningkatan volume usaha koperasi dengan target 14,90%, realisasi 1,14% dengan capaian kinerja 7,65 %.

Realisasi capaian melebihi target dikarenakan minat masyarakat untuk

berwirausaha sangat besar yang di dukung dengan peran Pemerintah dalam memberikan bantuan bantuan peralatan maupun pembinaan pelatihan untuk UMKM.

2. **Sasaran " Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal" dengan indikator :**

   Pada tahun ini peningkatan Volume Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat tinggi. Target yang ditetapkan adalah 40,20% dengan realisasi 8,66% dengan capaian 14,07%.

   Tingginya capainya target tahun 2025 ini disebabkan tingginya sumber daya manusia, produksi/operasional, finansial, pemasaran dan kemitraan

3. ***Sasaran "* Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal*" dengan indikator :***

   Pada tahun ini penurunan Tingkat Inflasi Daerah. Target yang ditetapkan adalah 2,61 - 3,44 % dengan realisasi 2,94% dengan capaian %.

   Meningkatnya capaian target tahun 2025 ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan industri kecil dan menengah. dan kembali bergeliatnya masyarakat dalam berdagang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah sangat baik sesuai dengan target dari 3 indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima tahun 2025-2029.

program. Efisiensi dicapai bila pencapaian program sama atau kurang dari penggunaan anggaran. Apabila penggunaan anggaran melebihi dari pencapaian program bisa disimpulkan bahwa efisiensi tidak tercapai.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa sebagian dari kinerja Dinas Koperindag mempunyai efisiensi tinggi dapat dilihat dari capaian Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sangat besar dan sebagian lagi mempunyai efisiensi rendah yaitu Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi, Persentase Peningkatan Investasi Usaha Industri dan Persentase Peningkatan Investasi Usaha Perdagangan

Indikator kinerja yang mempunyai efisiensi tinggi merupakan indikator kinerja yang mempunyai capaian kinerja melebihi capaian keuangan. Indikator kinerja

investasi usaha industri dan investasi usaha perdagangan memiliki efisiensi tertinggi dikarenakan capaian kinerja melebihi capaian keuangan.

Indikator kinerja yang mempunyai efisiensi rendah merupakan indikator kinerja yang mempunyai capaian keuangan melebihi capaian kinerja. Secara garis besar efisiensi di Dinas Koperindag berpredikat cukup. Ini dikarenakan jumlah indikator kinerja yang efisien dengan yang tidak efisien adalah sama.

Tabel 3.6
Perbandingan antara Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan terhadap Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Peningkatan Produktifitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka peningkatan daya saing perekonomian daerah	Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, mengembangkan SDM (keterampilan) serta meningkatkan daya saing produk agar UMKM mampu bersaing dan berkontribusi signifikan pada PDB lokal	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	7,65%	89,95%
			Peningkatan Volume Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM	8,66%	14,07%
			Menurunya Tingkat Inflasi Daerah	2,94%	%

3.2.2. Pencapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub pelaksana baik setingkat bidang maupun seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian sasaran Strategis Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing sub pelaksana program dan kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pada tabel berikut diuraikan Capaian indikator kinerja Program dan kegiatan pada masing masing Bidang dan Seksi:

Tabel.3.7
Program Utama Pendukung Capaian Kinerja
Tahun 2025

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
KOPERASI DAN UKM	**766.336.400,00**	**689.352.350,00**	**89,95**
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	**19.440.000,00**	**19.440.000,00**	**100,00**

KOPERASI			
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.440.000,00	19.440.000,00	100,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	19.440.000,00	19.440.000,00	100,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	**80.367.400,00**	**32.322.400,00**	**40,21**
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	80.367.400,00	32.322.400,00	40,21
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	80.367.400,00	32.322.400,00	40,21
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**98.203.000,00**	**98.200.000,00**	**99,99**
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	98.203.000,00	98.200.000,00	99,99
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	98.203.000,00	98.200.000,00	99,99
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**29.423.200,00**	**23.393.000,00**	**79,50**
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	29.423.200,00	23.393.000,00	79,50
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	14.760.000,00	14.265.000,00	96,64
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	14.663.200,00	8.813.000,00	60,10
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**538.902.800,00**	**515.996.950,00**	**96,60**
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	538.902.800,00	515.996.950,00	96,60
Pengembangan Usaha Mikro	538.902.800,00	515.996.950,00	96,60
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
PERDAGANGAN	**359.648.000,00**	**324.777.700,00**	**90,30**
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**45.900.000,00**	**42.090.200,00**	**91,70**
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	45.900.000,00	42.090.200,00	91,70
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	45.900.000,00	42.090.200,00	91,70
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**235.556.000,00**	**205.761.500,00**	**87,35**
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/	184.796.000,00	157.701.500,00	85,33

Kota			
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	184.796.000,00	157.701.500,00	85,33
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	43.200.000,00	40.500.000,00	93,75
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	43.200.000,00	40.500.000,00	93,75
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	7.560.000,00	7.560.000,00	100,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**78.192.000,00**	**76.926.000,00**	**98,38**
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	78.192.000,00	76.926.000,00	98,38
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	78.192.000,00	76.926.000,00	98,38
PERINDUSTRIAN	**408.640.000,00**	**408.640.000,00**	**100,00**
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100,00**
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**100,00**
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00

Selain capaian kinerja diperlukan juga analisa efisiensi. Analisa efisiensi merupakan analisa terhadap penggunaan anggaran dibandingkan dengan pencapaian

1. **Capaian Indikator Kinerja Program**

   Capaian Indikator Kinerja program 2025 diuraikan pada tabel 3.8 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	*REALISASI*	*CAPAIAN*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP	Pesentase Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi	75,35%	*89,57%*	*118,87*
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Meningkatanya Produktifitas dan Sumber Daya Pengelola Usaha Koperasi	Persentase Peningkatan Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45,51%	*27,66%*	*60,78*
3	Program Pemberdayaan dan perlindungankoperasi	Meningkatanya Produktivitas, Kualitas dan Kelembagaan usaha Koperasi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	100%	*79,61%*	*79,61*
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM	Meningkatnya Kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang memiliki NIB	25,58	*23,58%*	*0,92*
5	Program Pengembangan UMKM	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi Diklat Pendidikan dan pelatihan	10,13	*54,88%*	*5,42*
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkat kan IKM yang berkualitas Kuat dan berdaya Saing	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	100%	*19,60%*	*19,60*
7	Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri Nasional	Tersedianya Dokumen Pendukung Perencanaan Pembangunan Industri Kecil dan Menengah	Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri	100%	*100%*	*100,00*

8	Program Peningkatan Sarana Distribusis Perdagangan	Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Sarana dan Prasarana Pasar yang dibangun/ direvitalisasi/ Direhabilitasi	100%	*100%*	*100,00*
9	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Terkendalinya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Peredaran Barang dan Jasa	Persentase terkendalinya Harga, dan Persediaan/ Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	*100%*	*100,00*
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya pelayanan perlindungan konsumen dan kemetrologian	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan	0,15	*0,14%*	*0,93*

2. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Pengukuran Indikator Kinerja kegiatan 2025 diuraikan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*7*	*8*	*9*
1	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**	**100%**
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi*	*jumlah koperasi yang diperiksa, diawasi dan dinilai kesehatanya*	103 Koperasi	103 Koperasi	100%
	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**	**100 %**	**100 %**	**100%**
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia dalam pengelolaan kelembagaan usaha dan keuangan koperasi	*Jumlah Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian*	60 Pengurus /Anggota Koperasi	60 Pengurus /Anggota Koperasi	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Persentase Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**100 %**	**100 %**	***100%***
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatanya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	82 *Usaha Koperasi*	82 *Usaha Koperasi*	*100%*
2	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah , Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan**	***Meningkatnya Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, dan Penguatan Kelembagaan***	***Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, dan Penguatan Kelembagaan***	**100 %**	**100 %**	**100%**
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan	Jumlah Dokumen/Data Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				Jumlah Usaha Mikro yang di input kedalam Sistim data Online (ODS)	150 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	150 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	100%
				Jumlah Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	100%

				Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120	Pelaku UMKM yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	120	Pelaku UMKM yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	100%
3	**Program Pengembanga UMKM**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Terlaksananya kegiatan Diklat/ Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Usaha Mikro**	**Persentase Tercapainya kegiatan Diklat/ Pendidikan dan Pelatihan Pelaku Usaha Mikro**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Berkembangnya Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah Pelaku Usaha mikro yang diberikan dukungan Pendidikan Pelatihan*	90	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	90	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	100%
4	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	**Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri**	**Persentase terlaksananya Penyusunan data dan Sentra IKM serta Profile IKM dan Provil Sentral IKM**	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terkoordinasi dan tersinkronisasinya Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Kecil dan Menengah	*Jumlah Organisasi yang mendapat Hibah*	*1*	*Organisasi (Degranasda)*	*1*	*Organisasi (Degranasda)*	*100%*
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Sektor Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat bantuan peralatan Usaha	*198*	*Industri Kecil Menengah*	*198*	*Industri Kecil Menengah*	*100%*
5	**Program Pengelolaan Sistim Informasi Industri Nasional**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Tersedianya data dan Rencana Pembangunan Industri**	***Persentase Tersedianya data Rencana Pembangunan Industri***	**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**

		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya Dokumen Informasi Industri	Jumlah Dokumen Data Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
6	**Program Peningkatan Sarana Distribusis Perdagangan**	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Meningkatnya sarana dan Prasaran Distribusi Perdagangan yang memadai*	*Persentase Terlaksananya Revitalisasi/ Pembangunan sarana dan Prasarana Pasar*	1	1	100%
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang memadai	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pasara yang dibangun/ di Revitalisasi / Rehabilitasi*	*1* Unit	*1* Unit	1
7	**Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barng Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Meningkatnya pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar**	**Persentase terlaksananya pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat Pasar**	**100 %**	**100 %**	**1**
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang menjual Barang Kadarluasa*	*Jumlah Pelaku Usaha yang menjual Barang Kadarluasa*	*12 Pelaku Usaha Perdagangan*	*12 Pelaku Usaha Perdagangan*	*100%*
			Jumlah Kios Pasar Milik Pemerintah yang dibina dan diawasi	*Jumlah Kios Pasar Milik Pemerintah yang dibina dan diawasi*	*441 Kios Pasar Milik Pemerintah*	*441 Kios Pasar Milik Pemerintah*	*100%*
			Jumlah Penyalur dan Pangkalan LPG yang di awasi	*Jumlah Penyalur dan Pangkalan LPG yang di awasi*	*348 Pangkalan LPG 3 Kilogram Bersubsidi*	*348 Pangkalan LPG 3 Kilogram Bersubsidi*	*100%*
			Jumlah Penyalu Pupuk Bersubsidi yang di Awasi	*Jumlah Penyalu Pupuk Bersubsidi yang di Awasi*	*48 Agen dan Pengecer*	*48 Agen dan Pengecer*	*100%*
			Ketersediaan informasi Stabilitas Harga Bahan Pokok	*Ketersediaan informasi Stabilitas Harga Bahan Pokok*	*360 Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	*360 Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	*100%*

8	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**100 %**	**100 %**	**100%**
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Niaga dan Jasa serta Terwujudnya Tertib Ukur UTTP yang menjamin adanya kepasian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen	*Jumlah UTTP Bertanda Tera (SPBU)*	*57 Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP)*	*57 Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP)*	*100%*
				Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	*127 Alat Ukur Takar (Timbangan)*	*127 Alat Ukur Takar (Timbangan)*	*100%*
				Jumlah Peralatan Sidang Tera yang dikalibrasi Ulang	*120 Peralatan Sidang Tera*	*120 Peralatan Sidang Tera*	*100%*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja di bidang Koperasi dan UMKM serta Perindustrian dan Perdagangan baik Eselon III dan Eselon IV adalah sangat baik. Dari berbagai program dan kegiatan yaitu rata-rata capaian 100,00%

3.3. Realisasi Anggaran

a. Sekretariat

Anggaran untuk mendukung 1 program, 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan pada Sekretariat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 sebesar Rp. **6.556.438.220,00** sedangkan realisasi sebesar Rp. **5.814.526.561,00** atau **88,68** % seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran Sekretariat
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2025

NO	PROGRAM/	KEGATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***		**Eksistensi Dinas terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100 %**	**6.556.438.220,00**	**5.814.526.561,00**	**88,68**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan keuangan dengan indeks SAKIP**	**100 %**	**100 %**	**37.204.000,00**	**261.095,00**	0,70
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023	2 Dokumen	1 Dokumen	3.058.000,00	0,00	0,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023	1 Dokumen	1 Dokumen	126.000,00	0,00	0,00
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	1 Dokumen	2 Dokumen	25.200.000,00	0,00	0,00
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP dan LPPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.820.000,00	261.095,00	0,00

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Administrasi keuangan Perangkat Daerah***	**100 %**	**100 %**	**5.215.165.020,00**	**4.776.229.208,00**	**91,58**
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang memperoleh Gaji dan Tunjangan	42 Orang	42 Orang	5.014.445.020,00	4.631.339.147,00	92,35
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PPTK / Pejabat Penata usaha Keungan dan Pembantu Administrasi Keuangan	8 Orang	8 Orang	187.680.000,00	134.852.000,00	71,85
		- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	8.952.061,00	81,38
		- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Prognesis	1 Dokumen	1 Dokumen	2.040.000,00	1.086.000,00	53,23
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Capaian Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**4.466.000,00**	**3.768.529,00**	**84,38**
		- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.466.000,00	3.768.529,00	84,34
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**15.468.000,00**	**215.467,00**	**1,39**
		- Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Retribusi Daerah	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	15.468.000,00	215.467,00	1,39
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	**100 %**	**100 %**	**479.230.800,00**	**351.751.581,00**	**73,39**

		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kopenen Instalasi Listrik yang tersedia	67	Komponen Listrik	67	Komponen Listrik	10.175.000,00	10.153.000,00	99,80
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64	Jenis Peralatan Kantor	64	Jenis Peralatan Kantor	-	-	-
		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Julah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan	205.432	lembar	197.025	lembar	228.107.800,00	120.734.581,00	52,92
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	-	-	-
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu	25	Kali	25	Kali	40.734.000,00	23.111.000,00	56,73
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	33	Kali	32	Kali	200.214.000,00	197.753.000,00	98,77
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**47.000.000,00**	**10.000.000,00**	**21,27**
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	27	Unit Kursi Laptop/ Printer	27	Unit Kursi Laptop/ Printer	47.000.000,00	10.000.000,00	21,27
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	520.326.900,00	450.403.481,00	**86,56**
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Tenaga Surat Menyurat (Jasa Tenaga Kontrak)	12	Orang/ Tenaga Sukarela	12	Orang/ Tenaga Sukarela	54.000.000,00	52.600.000,00	97,40
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kantor/ Bangunan	12	Bulan	12	Bulan	101.966.400,00	62.923.481,00	61,71

		- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	19	Unit	19	Unit	166.210.500,00	136.780.000,00	82,29
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor (Jasa Tenaga Kontrak)	70	Orang/ Tenaga Sukarela	70	Orang/ Tenaga Sukarela	198.150.000,00	198.100.000,00	99,97
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**%**	**237.577.500,00**	**221.897.200,00**	**93,39**
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	Unit	31.732.000,00	26.550.000,00	94,43
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	Unit	1	Unit	45.842.500,00	45.743.000,00	99,99
		- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Kantor yang dipelihara	4	Unit	4	Unit	160.003.000,00	149.604.200,00	93,50

b. Bidang Koperasi dan UMKM

Anggaran untuk mendukung 5 program dan 6 kegiatan serta 6 Sub Kegiatan Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sebesar Rp. 766.336.400,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 705.074.950,00 atau 92,00% seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.3.12
Realisasi Anggaran Bidang Koperasi dan UMKM
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2025

NO	PROGRAM/	KEGATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**		**Pesentase Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi**	**75,35 %**	**89,57 %**	**19.440.000,00**	**19.440.000,00**	**100,00**
		- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	19.440.000,00	19.440.000,00	100,00
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan diawasi	103 Usaha Koperasi	103 Usaha Koperasi	19.440.000,00	19.440.000,00	100,00
2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**		**Persentase Peningkatan Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan**	**45,51 %**	**27,66 %**	**80.367.400,00**	**48.045.000,00**	**59,78**
		- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan/ diklat	100 %	100 %	80.367.400,00	48.045.000,00	59,78

		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus/ Keanggotaan Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Pengurus/ Keanggotaan Koperasi	60 Pengurus/ Keanggotaan Koperasi	80.367.400,00	48.045.000,00	59,78
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**		**Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha**	**100 %**	**79,61 %**	**98.203.000,00**	**98.200.000,00**	**99,99**
		- **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha**	**100 %**	**100 %**	98.203.000,00	98.200.000,00	99,00
		- Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha	82 Pelaku Usaha Mikro	82 Unit Koperasi	98.203.000,00	98.200.000,00	99,99
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,**		**Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro yang memiliki NIB**	**25,58 %**	**23,58 %**	**29.423.200,00**	**23.393.000,00**	**79,50**

	USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase tersedianya data Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan**	**100 %**	**100 %**	29.423.200,00	23.393.000,00	79,50
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Dokumen/Data Usaha Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen	14.760.000,00	14.580.000,00	79,50
			Jumlah Usaha Mikro yang di input kedalam Sistim data Online (ODS)	150 Usaha Mikro	150 Usaha Mikro			
			Jumlah Usaha Mikro yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha			
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	120 Pelaku UMKM yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	120 Pelaku UMKM yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	14.663.200,00	8.813.000,00	60,10
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**		**Persentase Peningkatan UMKM yang diberikan dukungan fasilitasi Pemasaran**	**10,13 %**	**10,13 %**	**538.902.800,00**	**515.996.950,00**	**95,74**

		- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pemasaran bagi UMKM**	100	%	100	%	538.902.800,00	515.996.950,00	96,60
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan Fasilitasi Pemasaran	90	Pelaku Usaha Mikro	90	Pelaku Usaha Mikro	538.902.800,00	515.996.950,00	96,60
JUMLAH								***766.336.400,00***	***705.074.950,00***	**92,00**

c. Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Anggaran untuk mendukung 2 Program Perindustrian dan 3 Program Perdagangan yang terdiri dari 2 Kegiatan Bidang Perindustrian dan 4 kegiatan Bidang Perdagangan dan terdiri dari 7 Sub Kegiatan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sebesar Rp.773.917.700,00 sedangkan realisasi sebesar Rp.768.288.000,00 atau 99,27% seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.3.13
Realisasi Anggaran Bidang Perindustrian
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2025

NO	PROGRAM	KEGATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**		**Persentase perkembangan Kelompok Industri Kecil Menengah**	**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**100,00**
		- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	100%	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Organisasi yang mendapat Hibah	1 Organisasi (Degranasda)	1 Organisasi (Degranasda)	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok Industri Kecil Menengah yang mendapat bantuan peralatan Usaha	198 Industri Kecil Menengah	198 Industri Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**		**Persentase Ketersedian Dokumentasi Rencana Pembangunan Industri**	**100 %**	**100%**	**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**100,00**

		- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyusunan data IKM dan Sentra serta Profile IKM dan Provil Sentral IKM	100%	100%	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
		- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Tersedianya data dan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00
JUMLAH						**8.640.000,00**	**8.640.000,00**	**100,00**

Tabel.3.14
Realisasi Anggaran Bidang Perdagangan
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan T.A 2025

1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**Persentase Capaian Program Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan**	**100 %**	**100 %**	**45.900.000,00**	**42.090.200,00**	**91,70**
		- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						
		- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan yang memadai	1 Unit	1 Unit	45.900.000,00	42.090.200,00	91,70

2	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya**	**100 %**	**100 %**	**235.556.000,00**	**205.761.500,00**	**87,35**
		- Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	**Persentase Terkendalinya Barang Kebutuhan Pokok**	***100 %***	***100 %***	**184.796.000,00**	***157.701.500,00***	**85,33**
			Jumlah Pelaku Usaha yang menjual Barang Kadarluasa	*12 Pelaku Usaha Perdagangan*	*12 Pelaku Usaha Perdagangan*	184.796.000,00	*157.701.500,00*	85,33
			Jumlah Kios Pasar Milik Pemerintah yang dibina dan diawasi	*441 Kios Pasar Milik Pemerintah*	*441 Kios Pasar Milik Pemerintah*			
			Jumlah Penyalur dan Pangkalan LPG yang di awasi	*348 Pangkalan LPG 3 Kilogram Bersubsidi*	*348 Pangkalan LPG 3 Kilogram Bersubsidi*			
			Jumlah Penyalu Pupuk Bersubsidi yang di Awasi	*48 Agen dan Pengecer*	*48 Agen dan Pengecer*			
			Ketersediaan informasi Stabilitas Harga Bahan Pokok	*360 Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	*360 Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*			
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	**Persentase Terkendalinya Barang Kebutuhan Pokok**	***100 %***	***100 %***	**43.200.000,00**	**40.500.000,00**	**93,75**

		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	*Ketersediaan informasi Stabilitas Harga Bahan Pokok*	*360*	*Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	*360*	*Informasi Ketersediaan Bahan Pokok*	43.200.000,00	40.500.000,00	93,75
3	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera/tera ulang dalam tahun berjalan**	**100**	**%**	**100**	**%**	**78.192.000,00**	**76.926.000,00**	**98,38**
		- **Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	**Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**100**		**%**	**100**	**%**	**76.926.000,00**	**98,38**
			Jumlah UTTP Bertanda Tera (SPBU)	*57*	*Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP)*	*57*	*Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP)*	78.192.000,00	76.926.000,00	98,38
			Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	*127*	*Alat Ukur Takar (Timbangan)*	*127*	*Alat Ukur Takar (Timbangan)*			
			Jumlah Peralatan Sidang Tera yang dikalibrasi Ulang	*120*	*Peralatan Sidang Tera*	*120*	*Peralatan Sidang Tera*			
JUMLAH								**78.192.000,00**	**76.926.000,00**	**98,38**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2025 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara dministrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima pada Tahun 2025 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima Tahun 2025-2029, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2025 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian sasaran dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima adalah Baik.

4.2 Saran

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam bentuk pendidikan dan pelatihan pengembangan dan peningkatan kemampuan aparatur.
2. Penambahan jumlah aparatur dengan bidang ilmu dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperindag Kota Bima.
3. Meningkatkan BIMTEK dan DIKLAT untuk pelaku UMKM dan IKM
4. Meningkatkan pemberian modal dan peralatan untuk pelaku UMKM dan IKM.

Demikian L-KIP ini dibuat, guna perbaikan dan peningkatan di tahun mendatang.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KOTA BIMA - TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA BIMA

2026

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, akhirnya Dinas Pariwisata Kota Bima dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima selama tahun 2024, sesuai dengan maksud Keppres : No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima ini dimaksudkan sebagai wujud transparansi dan bahan evaluasi kinerja dalam melaksanakan Visi, Misi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima.

Kami menyadari bahwa dengan berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada, laporan ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai bahan evaluasi dan informasi yang sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijaksanaan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan di Kota Bima pada masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya.

Raba – Bima, 5 Januari 2026
Kepala Dinas

SUKARNO. SH
NIP.196812222002101001

DAFTAR ISI

Sampul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi ii
Ringkasan Eksekutif iv

BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2
1.3 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi 13
1.4 Sistematika Penulisan Laporan 14

BAB II Perencanaan Kinerja 16
1.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 16
1.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 17
1.3 Rencana Kinerja Tahunan 19
1.4 Penetapan Kinerja Tahun 2024 19

BAB III Akuntabilitas Kinerja 22
1.1 Capaian Kinerja Organisasi 22
1.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 23
1.1.2 Perbandingan Ralisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 25
1.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah 30
1.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional 30
1.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan 31
1.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31
1.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan 33
1.2 Realisasi Anggaran 39
1.2.1 Target dan Realisasi Belanja 39
1.2.2 Pengkukuran Kinerja Keuangan 39

BAB IV Penutup 43
4.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 43
4.2 Rekomendasi Pemecahan Masalah 44
Lampiran- lampiran 46

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima berisi informasi tentang capaian kinerja selama tahun 2025. Sehubungan dengan realisasi Rencana Kinerja Tahun 2025, terdapat 6 (Enam) Program sasaran strategis yang harus dicapai selama tahun 2025. Program strategis tersebut diwujudkan melalui 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan. Berdasarkan pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang telah dilakukan terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima tahun 2025, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata Kota Bima dari 6 (Enam) program strategis, dimana semua program pada penyusunan DPA/DPPA tersebut diimplementasikan dalam 34 (tiga puluh empat) Sub kegiatan dan telah berhasil dilaksanakan dengan baik atau dengan prosentase keberhasilan 97,06%.
2. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang perlu ditindaklanjuti pada tahun anggaran 2025 diprogramkan dalam bentuk yang lebih implementatif.
3. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang untuk dijadikan standar dalam acuan program/kegiatan yang lebih efisien anggarannya, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Pariwisata Kota Bima.
4. Realisasi anggaran untuk melaksanakan seluruh aktivitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima selama tahun 2025, Belanja Operasi yaitu sebesar; **Rp. 7.542.247.550** atau **94,27%** dari yang dianggarkan yaitu sebesar **Rp. 8.000.367.764**.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pariwisata sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan pilih dalam unsur pelaksana pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pariwisata Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2025 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kota Bima 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2024, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah

Kota Bima.Laporan Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima selama tahun 2023.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima adalah unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Walikota Bima dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis ;
b. Pemberian pelayanan umum ;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pariwisata dan kebudayaan.
2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sslagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaralan fungsi:
   a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
   c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
   d. pelaksanaan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membawahi:
   a. Sekretariat;
   b. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
   c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
   d. Bidang Ekonomi Kreatif;

e. Bidang Kebudayaan; dan
f. Unit Pelaksana Teknis.

B. Sekretariat

2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
   a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
   b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
   c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/ daerah;
   d. pembinaan aparatur;
   e. pengelolaan urusan kepegawaian;
   f. pengelolaan administrasi jabatan; dan
   g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
   Sektetaris mempunya tugas:
   a. Menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas;
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
   c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
   d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh Bidang di lingkungan Dinas;
   e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Dinas;
   f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan Dinas;
   g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
   h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
   i. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Sekretaris membawahi dan mengoordinasikan:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   Mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan kegiatan urusar pemerintahan di bidang kepegawaian;
   b. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
   c. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
   d. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   e. Melaksanakan urusan pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
   f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
   1. Mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

1. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1., Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
   a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
   b. Penyusunan rencana dan program analisis kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
   c. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
   d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;

e. Pelaksanaan kebljakan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipipmpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
   Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas :
   a. Menyusun program kerja dan anggarkan Bidang berdasarkan rencana program Dinas;
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
   c. Melaksanakan kegiatan pengembangan daya tarik wisata;
   d. Melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pariwisata;
   e. Melaksanakan kegiatan pengembangan industri pariwisata;
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
   g. Menyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
   h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.
   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimalsud pada ayat 4. berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata.

C. Bidang Pemasaran Pariwisata

1. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan

di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1., Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
   b. Penyiapan penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
   c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
   d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pemasaran dan brand pariwisata;
   e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang promosi pariwisata;
   f. Penyelenggaraan kegiatan di bidang riset dan analisis data pariwisata;
   g. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
   h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata;
   i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran dan brand pariwisata, promosi pariwisata dan riset serta analisis data pariwisata; dan
   j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

   Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :
   a. Menyusun program ke{a dan anggaran Bidang berdasarkan rencana program Dinas;
   b. Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
   c. Melaksanakan kegiatan pemasaran dan brand pariwisata;
   d. Melaksanakan kegiatan promosi pariwisata;
   e. Melaksanakan kegiatan riset dan analisis data pariwisata;
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
   g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
   h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

   a. melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5. berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

D. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan pernasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah.
2. Untuk menyerenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1., Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
   b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebljakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
   c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
   d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang akses permodalan dan permasalahan;
   e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
   f. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
   g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, akses permodalan dan permasalahan serta fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

   Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
   a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang berdasarkan rencana program Dinas;
   b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
   c. Melaksanakan kegiatan riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
   d. Melaksanakan kegiatan akses permodalan dan permasalahan;
   e. Melaksanakan fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan antar wilayah;
   f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
   g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
   h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4 Bidang Ekonomi Kreatif membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
   1. melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 4. berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

E. Bidang Kebudayaan

1. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan.

2. Untuk menyerenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1., Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
    a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
    b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
    c. Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
    d. Penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
    e. Penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
    f. Penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah;
    g. Penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah;
    h. Penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal daerah;
    i. Penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya tingkat daerah;
    j. Penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah;
    k. Penyusunan bahan pengelolaan museum daerah;
    l. Penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan;
    m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, serta pembinaan tenaga kebudayaan; dan
    n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Kebudayaan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.
   Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas :

a. menyusun program kerja dan anggararan Bidang berdasarkan rencana program Dinas;
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
c. Melaksanakan kegiatan di bidang cagar budaya dan perrnuseuman;
d. Melaksanakan kegiatan di bidang sejarah, tradisi dan kesenian;
e. Melaksanakan pembinaan tenaga kebudayaan;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
g. Menyusun laporan pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kebudayaan membawahi dan mengkoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

2. melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan keterampilan dan keahlian serta kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 4. berada di bawah dan bertanggungjawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

2. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pariwisata;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Perencanaan Ahli Muda;
   c. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

a. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri dari:
   (i) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
   (ii) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

b. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
   (i) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
   (ii) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

(iii)Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

c. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

(i) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

(ii) Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

(iii)Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

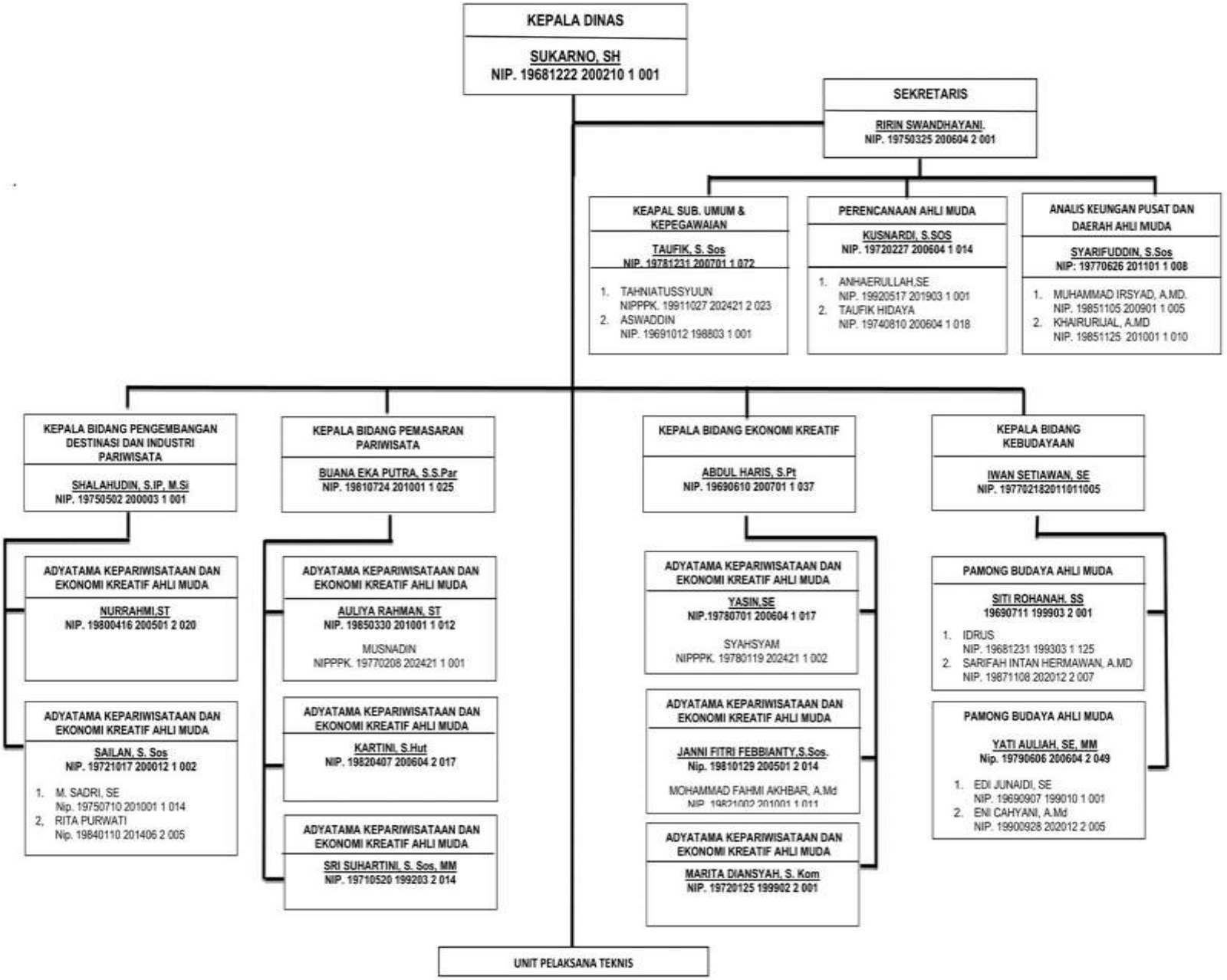
(i) Pamong Budaya Ahli Muda;

(ii) Pamong Budaya Ahli Muda;

(iii)Pamong Budaya Ahli Muda;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA TAHUN 2025



1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis, pemberian pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga daerah dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pengembangan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga;
   Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah, kekurangan dan keterbatasan data dan informasi perencanaan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, *NGO*, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima.
3. Belum optimalnya pelayanan prima di bidang Kepariwisataan, Kepemudaan danOlahraga Kota Bima.
   Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik di bidang Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Bima, maka sudah tentu Dinas Pariwisata Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang tekait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima.
4. Belum optimalnya kapasitas aparatur perencana kegiatan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga Kota Bima.
   Keberadaan aparatur perencana khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Bima merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan kepariwisataan, Kepemudaan dan olahraga, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perencanaan kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga.
5. Belum adanya tenaga fungsional perencana dan peneliti bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I Pendahuluan

2.1 Latar Belakang

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.3 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

2.4 Sistematika Penulisan Laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

3.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

3.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

3.3 Rencana Kinerja Tahunan

3.4 Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III Akuntabilitas Kinerja

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

4.1.2 Perbandingan Ralisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

4.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

4.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

4.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

4.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

4.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

4.2 Realisasi Anggaran

4.2.1 Target dan Realisasi Belanja

4.2.2 Pengkukuran Kinerja Keuangan

BAB IV Penutup

4.3 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

4.4 Rekomendasi Pemecahan Masalah

Lampiran- lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Pariwisata sebagai pelayanan umum dalam daerah dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan pelayanan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang terkait dengan Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2. Menyediakan jasa Pariwisata
3. Menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Tugas dan fungsi tersebut terkait visis misi kepala daerah yang kedua masyarakat sejahtera dan ***Misi Kedua:*** Mewujutkan Masyarakat ***Sejahtera*** melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi Masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan. Serta Visi dan ***Misi Keempat*** yaitu Mewujutkan Lingkungan ysng berkuslitas dan **Ramah,** melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegritas dengan pengurangan resiko bencana.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut. Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Tujuan Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima

Misi	Tujuan(Kota)	Indikator	Target
Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5 %
Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama yang didukung budaya dan tradisi serta kearifan lokal	Persentase pelestarian warisan budaya	50 %

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5%	5%	5%	5%	5%
2.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50%	50%	50%	50%	50%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan yang berkunjung tahun } n - (n-1)}{\text{Jumlah wisatawan yang berkunjung tahun } n-1} \times 100\%$
2.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	$\frac{\text{Jumlah warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya}} \times 100\%$

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2025.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5 %
2.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50 %

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yanglebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima pada awal tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (enam) program dengan total anggaran sebesar Rp. **8.000.367.764**

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5 %
2.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50%

No	Program	Anggara	Keterangan
1	Program Peningkatan Dayatarik Destinasi Pariwisata	919.312.461	APBD
2	Program Pemasaran Pariwisata	1.283.407.750	APBD
3	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	258.062.555	APBD
4	Program Pengembangan Kebudayaan	346.175.410	APBD
5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	76.636.600	APBD
6	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	5.116.772.988	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Evaluasikinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indicator kinerja dan penetapan capaian indicator kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujutkan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima. Untuk memudahkan dalam rangka kinerja dilakukan atribut penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tanel berikut:

Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Jumlah Nilai	Kategori
1	*2*	*3*
1	**91%<100%**	**Sangat Tinggi**
2	**76%<90%**	**Tinggi**
3	**66%<75%**	**Sedang**
4	**51%<65%**	**Rendah**
5	**<50%**	**Saangat Rendah**

Bahwa pada tahun 2025 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 sasaran dimana tedapat 1 (satu) sasaran masuk kategori berhasil dan 1 (satu) lainnya berada di kategori gagal.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian
1	*2*	*3*	*4*
1	Sangat Tinggi	2	50
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	2	50

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Bahawa pada tahun 2025 bahwa jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 sasaran dimana 1 (satu) sasaran masuk kategori berhasil dan 1 (satu) sasaran masuk kategori gagal sebagaimana tersaji pada table berikut ini.

Tabel 3.3. Pencapaian Tujuan Organisasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	Persen	5%	29,47%	589,4%
Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	Persen	50%	84,73%	169.46%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024

Pencapaian Sasaran Strategis I :

Meningkatnya jumlah kunjungan wisata

Peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kota Bima perlu dengan perencanaan pembangunan di sektor kepariwisataan. Dalam hal ini, perencanaan yang terintegrasi terjadi apabila terdapat kesinambungan, keselarasan dan

konsistensi setiap program- program pembangunan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Data jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bima dapat dilihat dari table berikut:

Kujungan wisatawan di Kota Bima

No	Jumlah Wisatawan	Tahun Kunjungan
1	136.545	2024
2	174.045	2025

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis I disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis I Tahun 2023

Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Rumus Perhitungan	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5%	$\frac{174.045 - 136.545}{136.545} \times 100\%$	29,47%	589,4%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

Dari table diatas dijelaskan bahwa capaian dari sasaran strategis 1 tahun 2025 dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan mencapai 29,47% dari target awal 5%.

Pencapaian Sasaran Strategis II :

Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal

Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal pada sektor strategis dibutuhkan untuk memastikan bahwa kegiatan Peningkatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal yang di muat dari setiap dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta dokumen laporan kinerja pada sektor-sektor strategis disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, dokumen-dokumen sektor strategis yang tersedia dimanfaatkan dan menjadikan masukan dalam penyusunan anggaran. Ketersediaan dokumen

perencanaan sektor strategis mutlak diperlukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan sumber anggaran APBN dan APBD Provinsi. Adapun target kinerja dan realisasi untuk pengukuran kinerja sasaran strategis II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Data Warisan Budaya yang DIlestarikan di Kota Bima

No	Warisana Budaya yang Dilestarikan	Warisan Budaya	Tahun
1	111	131	2025

Tabel 3.5.
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis II Tahun 2025

Sasaran Strategis II	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Rumus Perhitungan**	**Realisasi**	**% Capaian**
Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50%	$\frac{111}{131} \times 100\%$	84,73%	169.46%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

Capaian kinerja pada indikator Persentase pelestarian warisan budaya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah baik dan ditetapkan dengan tingkat capaian 84,73% dari target 50%

3.1.2 Perbandingan Ralisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Dengan mendasarkan pada Pencapaian Target sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berikut adalah data-data capaian sasaran kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima sebagaimana tersebut di atas yang diuraikan secara rinci pada table-tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	10%	6.47%	64,76%	5%	29,47%	589,4%
Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50%	74,02%	148,04%	50%	84,73%	169.46%

Diatas menunjukan bahwa capaian kinerja indikator sasaran strategis I menunjukan bahwa pada tahun 2024 memiliki capain 64,76% sedangkan di tahun 2025 menunjukan peningkatan capaian sampai dengan 589,4% atau dengan tingkat Penurunan 524,64%. Kemudian capaian kinerja indikator sasaran strategis II menunjukan bahwa pada tahun 2024 memiliki capain 148,04% sedangkan di tahun 2025 menunjukan peningkatan capaian sampai dengan 169.46% atau dengan tingkat kenaikan 21,42%

Adapun mendasarkan pada Pencapaian Target Program dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2024 dan Tahun 2025 Berikut adalah data-data capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima sebagaimana tersebut di atas yang diuraikan secara rinci pada table-tabel tersebut di bawah ini:

Tabel 3.7.

Perbandingan Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Program, kegiatan, sub kegiatan	IndikatorKinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Tahun ini 2025	Capaian tahun 2024	Anggaran	Realisasi anggaran	Capaian (%)	Efisiensi	kategori
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*%*	*7*	*8*	*9*	*10=9/8*	*11=10/6%*	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**Persentase Pengembangan ODTW**	**10%**	**10%**	**100%**	**100%**	39.250.000	35.288.000,00	89,91		
	Pengelolaan Daya tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola**	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**100%**	**100%**	39.250.000	35.288.000,00	89,91		
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	621.188.000	589.802.443,00	94,95	98,47	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata kabupaten Kota	**Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)**	**2 kawasan**	**2 kawasan**	**100%**	**100%**	64.362.000	53.395.100,00	82,96		
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Kawasan Strategis pariwisata kabupaten/ kota	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	556.826.000	536.407.343,00	96,33		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	25 Unit	25 Unit	100%	100%	517.550.555	499.374.529,00	96,49	95,41	
	Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	**Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	517.550.555	499.374.529,00	96,49		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	100%	100%	39.250.000	35.288.000,00	89,91	99,37	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan**	**100%**	**75%**	**100%**	**100%**	1.479.004.464	1.445.040.783,00	97,70		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasidan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	**Jumlah Kegiatan Pemasaran Kepariwisataan**	**8 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**100%**	**100%**	1.479.004.464	1.445.040.783,00	97,70		
	Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Propinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	100%	307.357.500	303.094.300,00	98,61	87,41	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	2 Laporan	66,66%	100%	1.064.816.464	1.048.723.254,00	98,49	137,69	

	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dDalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	106.830.500	93.223.229,00	87,26	99,48	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**30%**	**30%**	**100%**	**66,66%**	485.061.079	479.064.669,00	98,76		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasa	**Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya**	**80 Orang**	**80 Orang**	**100%**	**66,66%**	362.087.600	356.156.640,00	98,36		
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	169.540.000	166.231.840,00	98,05	99,98	
	"Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang	30 Orang	100%	100%	108.400.000	108.400.000,00	100,00	0	
	Daya Manusia Ekonomi Kreatif"	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	0 Orang	0%	0%	84.147.600	81.524.800,00	96,88	96,03	
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	122.973.479	122.908.029,00	99,95		
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	2 Orang	100%	100%	122.973.479	122.908.029,00	99,95		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Cakupan Pengembangan Kebudayaan**	**10%**	**10%**	**100%**	**100%**	625.731.700	611.858.051,00	97,78		
	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**100%**	94.436.300	91.116.860,00	96,48		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	6 Orang	100%	100%	94.436.300	91.116.860,00	96,48		
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan**	**10%**	**3,33%**	**33,33%**	**100%**	531.295.400	520.741.191,00	98,01		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	2 Objek	50%	60%	218.317.400	217.930.571,00	99,82		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	0 Laporan	0%	100%	312.978.000	302.810.620,00	96,75		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**	**50%**	**25%**	**50%**	**80%**	139.621.600	135.023.860,00	96,71		
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**3 Objek**	**3 Objek**	**100%**	**60%**	119.877.600	115.279.860,00	96,16		
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek	100%	60%	119.877.600	115.279.860,00	96,16		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**100%**	**0%**	**0%**	**100%**	19.744.000	19.744.000,00	100,00		
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	0 Objek	0%	100%	19.744.000	19.744.000,00	100,00		

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2025 dengan target akhir perencanaan jangka menengah Renstra/RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	29,47%	-	-		
2.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	84,73%	-	-		

Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan di tahun 2025 terealisasi di angka 29,47% yaitu masih berada dibawah target sebesar 5% yang direncanakan. Kemudian Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina tahun 2025 terealisasi diangka 84,73% yaitu sudah melampau target sebesar 50% yang direncanakan.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional
Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	29,47%	10,80%
Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	84,73%	-

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Keberhasilan program dan kegiatan selama tahun tahun 2025 dapat dilihat dari persentasi pencapain tahun 2025 meningkat menjadi 29,47% dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,47% dari angka 5% yang ditargetkan. Namun dari segi kunjungan wisatawan mengalami peningkatan jumlah kunjungan dari tahun 2023 sebanya 136.545 orang menjadi 174.045 Orang. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini karena adanya dampak langsung dari pembangunan sarana dan prasarana destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, beberapa destinasi itu adalah destinasi pantai lawata dan pantai kolo. Untuk kedepannya akan dilakukan penambahan destinasi-destinasi baru dan peningkatan sarana dan prasaran destinasi yang sudah ada serta memperbanyak event-event yang berdurasi berhari-hari yang mampu menarik wisatawan sehingga diharuskan untuk menginap atau tinggal sementara di Kota Bima.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut. Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi\ x\ CK\ i) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi\ x\ CK\ i)}\ (x\ 100\ \%)$$

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (CK)	ANGGARAN	
		PAGU (PAK)	REALISASI (RAK)
Angka Harapan Hidup	1,1122	74.831.097.521	65.423.309.531
Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) & Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	1,2121	51.084.180.450	50.641.063.526
Pengeluaran Per Kapita	1,3863	7.919.900.064	7.476.870.604
Indeks Ketahanan Pangan	1,1703	929.187.653	921.802.203
Pertumbuhan PDRB	1,3231	23.993.522.773	23.434.463.197
Angka Kemiskinan	1,0000	25.426.741.314	25.051.580.753
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,9944	725.854.200	709.645.400
Nilai SAKIP, SKOR LPPD, dan Opini BPK	0,9332	37.697.136.622	33.157.629.288
Kontribusi PAD terhadap APBD	1,3132	1.939.526.804	1.694.064.649
Rata-rata skor IKM	1,0298	1.605.308.400	1.586.303.921
Persentase Kesesuaian Tata Ruang	1,0119	66.005.028.354	62.912.915.717
Indeks kualitas lingkungan hidup	0,9563	18.354.818.065	17.480.155.189
Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	0,8125	45.524.642.840	42.966.696.907
Indeks ketahanan daerah	0,8561	13.210.125.000	6.313.833.900
Persentase Penurunan Angka Kriminalitas & Persentase penurunan Angka konflik sosial	1,8444	2.031.121.800	918.173.000
Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	1,6640	9.263.443.200	9.209.732.572
Indeks kerukunan umat beragama	1,1535	24.584.775.390	24.171.423.143

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan Pemerintah Kota Bima adalah sebesar 12,24%. Lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu NE = 50 % + $(\frac{E}{20}\ x\ 50)$, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 74,49%. Artinya, secara umum Pemerintah Kota Bima mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien *(cost-effective).*

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis I tersebut, selama tahun 2024, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/ kegiatan yang dijabarkan ke dalam 34 (tiga puluh empat) kegiatan pokok sebagaimana ditunjukandalam tabel berikut.

Tabel 3.9
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian	Ket.
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	**Program Peningkatan Dayatarik Destinasi**		**Persentase Pengembangan ODTW**	**10%**	**10%**	**100%**	**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
	Pengelolaan Dayatarik Wisata Kabupaten Kota		Jumlah Dayatarik Wisata yang di kelola	**2 Lokasi**	**2 Lokasi**	**100%**	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
		Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dayatarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	**2 kawasan**	**2 kawasan**	**100%**	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah Kawasan strategis yang di kelola)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	25 Unit	25 Unit	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota		Persentase Pengelolaan destinasi pariiwisata kabupaten / kota	**100%**	**100%**	**100%**	Kabid Destinasi dan Industri Pariwisata

		Pengembangan destinasi pariwisata kabuapaten kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	2 Lokasi	2 Lokasi	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	Program Pemasaran Pariwisata		**Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggaraka**	**100%**	**75%**	**100%**	**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dayatarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran KepariwisataanPariwisata Kabupaten/ Kota	**8 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**100%**	Kabid pemasaran pariwisata & ekonomi kreatif
		Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Laporan	2 Laporan	66,66%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		**Persentase SDM Kepariwisataan yang terlibat**	**30%**	**30%**	**100%**	**Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Tingkat Dasar		Jumlah Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar yang ditingkatkan kapasitasnya	**80 Orang**	**80 Orang**	**100%**	Kabid Ekonomi Kreatif

		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	1 Laporan	1 Laporan	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	30 Orang	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Pariwisata
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	10 Orang	0 Orang	0%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Berkembang	**100%**	**100%**	**100%**	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	2 Orang	100%	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda
Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan		**Cakupan Pengembangan Kebudayaan**	**10%**	**10%**	**100%**	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		**Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaa**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	Kabid Kebudayaan
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	6 Orang	6 Orang	100%	Pamong Budaya Ahli Muda

	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan**	**10%**	**3,33%**	**33,33%**	Kabid Kebudayaan
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	2 Objek	50%	Pamong Budaya Ahli Muda
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	0 Laporan	0%	Pamong Budaya Ahli Muda
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya		**Cakupan Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**	**50%**	**25%**	**50%**	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		**Jumlah cagar budaya yang ditetapkan**	**3 Objek**	**3 Objek**	**100%**	Kabid Kebudayaan
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	3 Objek	100%	Pamong Budaya Ahli Muda
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		**Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kot**	**100%**	**0%**	**0%**	Kabid Kebudayaan
		Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	0 Objek	0%	Pamong Budaya Ahli Muda

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian indicator kinerja diantaranya adanya Intruksi Presiden membatasi anggran yang sehingga anggaran dan kegiatannya dibatasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk kedua sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima tersebut diatas, maka dapat diperoleh rata-rata kinerja yang d iperoleh dari rata-rata akumulasi capaian setiap indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis seperti sebagai berikut:

Tabel 3.10
Rata-rata Capaian Kinerja untuk keseluruhan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Persentase peningkatan Kunjungan wisatawan	5%	29,47%	589,4%
2.	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Persentase pelestarian warisan budaya	50%	84,73%	169.46%
Rata-rata Capaian Kinerja					379.37%

Sumber : Hasil Analisis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Pariwisata Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenan terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai tahun 2025.

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain : (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2025, keadaan pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.11.
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
2.	S2	6	19,75%
3.	S1	19	56,25%
4.	Diploma 3	4	12,50%
5.	SMA / sederajat	5	9,37%
6.	SMP	1	3,12%
Total		34	

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024

Tabel 3.12.
Jumlah pegawai berdasarkan golongan

	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	8	22,58%
2.	Golongan III	20	61,29%
3.	Golongan II	6	16,12%
4.	Golongan I	-	-
Total		34	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2024

Tabel 3.12.
Jumlah pegawai berdasarkan eselon

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	3,12%
2.	Eselon III	5	15,62%
3.	Eselon IV	15	46.87%
4.	Non-Eselonering	13	34,37%
Total		34	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 19 orang (56,25%) adalah Sarjana S-1, selanjutnya 6 orang (19,75%) memiliki tingkat pendidikan S-2, dan lainnya berpendidikan D.III dan SMA dan SMP sederajat. Selanjutnya, berdasar kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima (61,19%) atau 20 orang adalah Golongan III, 6 orang (22,58%) adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Pariwisata Kota Bima cukup memadai, namun

mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkat sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 8.000.367.764 dan terealisasi sebesar Rp. 7.542.247.550 atau sebesar 94,27%.

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut .

Tabel 3.13.
Rekapitulasi Belanja Dinas Pariwisata Kota Bima Tahun Anggaran 2022

No	Ura	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	8.000.367.764	7.542.247.550	94,27

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima melaksanakan 6 (enam) Program Utama dan 34 (tiga puluh tiga) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama	Target(Rp.)	Realisasi(Rp.)	%
1.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dayatarik Wisata Kabupaten/ Kota	20.566.200,00	19.266.000,00	93,68
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	11.878.200,00	11.182.000,00	94,14
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan	649.209.200,00	621.433.112,00	95,72
		Pengembangan destinasi pariwisata kabuapaten / kota	237.658.861,00	218.572.963,00	91,97
		Penyedian Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	35.600.550,00	30.315.510,00	85,15
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	265.975.700,00	258.694.090,00	97,26
		Penguatan Promosi Melalui Media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan luar negeri	981.831.500,00	941.785.302,00	95,92
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	73.731.900,00	72.159.400,00	97,87
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	63.482.400,00	51.963.900,00	81,86
		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	6.577.320,00	6.577.200,00	100,00
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	114.270.935,00	113.455.000,00	99,29
2	Meningkatnya pelestarian warisan budaya yang ada di masyarakat	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	92.683.300,00	85.779.960,00	92,55
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	141.335.400,00	104.096.860,00	73,65
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	112.156.710,00	65.606.200,00	58,50
		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	56.892.600,00	51.006.910,00	89,65
		Pemanfaatan Cagar Budaya	19.744.000,00	3.750.000,00	18,99
	TOTAL JUMLAH		8.000.367.764,00	7.542.247.550,00	94,27

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2025, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima adalah sebesar Rp. 8.000.367.764 dan terealisasi sebesar Rp. 7.542.247.550 atau sebesar 94,27%

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pariwisata Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut

tabel 3.15.

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.817.900,00	1.811.600,00	99,65
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.466.140,00	10.465.900,00	100,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.869.200,00	4.470.000,00	76,16
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.267.843.886,00	4.078.578.722,00	95,57
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	172.363.750,00	171.022.500,00	99,22
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.877.000,00	2.820.000,00	98,02
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	3.840.200,00	3.840.200,00	100,00
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.215.800,00	3.215.800,00	100,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.114.000,00	73.672.900,00	91,96
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	86.264.900,00	85.289.900,00	98,87
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.880.000,00	12.750.000,00	44,15
			Penyediaan Makan Minum Kantor	40.030.800,00	35.233.300,00	88,02
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000,00	149.996.000,00	100,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.620.000,00	91.620.000,00	98,92

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.906.062,00	33.617.303,00	99,15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	44.950.000,00	41.899.018,00	93,21
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.836.000,00	29.850.000,00	93,76
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.502.350,00	25.550.000,00	92,90
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.375.000,00	30.900.000,00	95,44

BAB IV
PENUTUP

4.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima tahun 2025 memiliki nilai strategis karena penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025 merupakan tahun kelima RPJMD Kota Bima 2025-2029 dan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2025.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2025 semuanya telah direalisasikan dengan kategori **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 379.37%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Akuntabilitas Keuangan) sebesar 94,27%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 589,4% yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 169.46%. Rata-rata capaian sasaran strategis I dan II terhadap target jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima masing-masing sebesar 589,4% dan 169.46%. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima adalah sebesar 379.37%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2025 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pariwisata sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses pelayanan umum daerah yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses pelayanan umum daerah yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan lebih meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar bidang dalam rangka peningkatan kinerja.
2. Mendorong dan lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan format maupun pendidikan non format kepariwisataan, kepemudaan dan olahraga

3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata secara prioritas.
4. Peningkatan jumlah personil yang profesional dibidang kepariwisataan, kepemudaan olahraga.
5. Peningkatan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepariwisataan dan Kebudayaan.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka pelayanan umum Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Raba – Bima, 5 Januari 2026
Kepala Dinas

SUKARNO. SH
NIP.196812222002101001

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

1.2.1 Kedudukan..... 2

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi..... 3

1.3 Struktur Organisasi..... 3

1.4 Sumber Daya Aparatur..... 14

1.5 Sasaran Strategis..... 15

1.6 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)..... 15

1.7 Sistematika Penyajian Laporan..... 15

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 17

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..... 17

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD..... 17

2.3 Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2025..... 19

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 21

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 21

B. Realisasi Anggaran..... 43

BAB IV. PENUTUP..... 54

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, serta dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas di masa-masa yang akan datang.

Sebagai media akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai sebuah sistem pengukuran kinerja yang efektif bagi masyarakat untuk mengevaluasi tingkat pelayanan pemerintah sesuai dengan modal yang dikeluarkan untuk pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu program yang bersifat berulang-ulang dan merupakan suatu cerminan dari suatu upaya organisasi untuk selalu memperbaiki kinerjanya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi semua pihak.

Kota Bima, 16 Maret 2026
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Junaidin, ST
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700222 200604 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang kepada daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah. Potensi tersebut harus dikelola untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam konstitusi dasar negara. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan urusan pemerintahan daerah dengan berpegang pada asas kepastian hukum; asas tertib penyelenggara negara; asas kepentingan umum; asas keterbukaan; asas proporsionalitas; asas profesionalitas; asas akuntabilitas; asas efisiensi dan asas efektivitas. Berdasarkan Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan terdiri atas 31 urusan, salah satunya adalah urusan kelautan dan perikanan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan TAP. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bima memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*). Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita–cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebagai unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka ditetapkan bahwa

kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian pelayanan umum, pembinaan dan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor : 96 tahun 2022 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kelautan dan Perikanan.

Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

a. Perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi di lingkup dinas;
e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

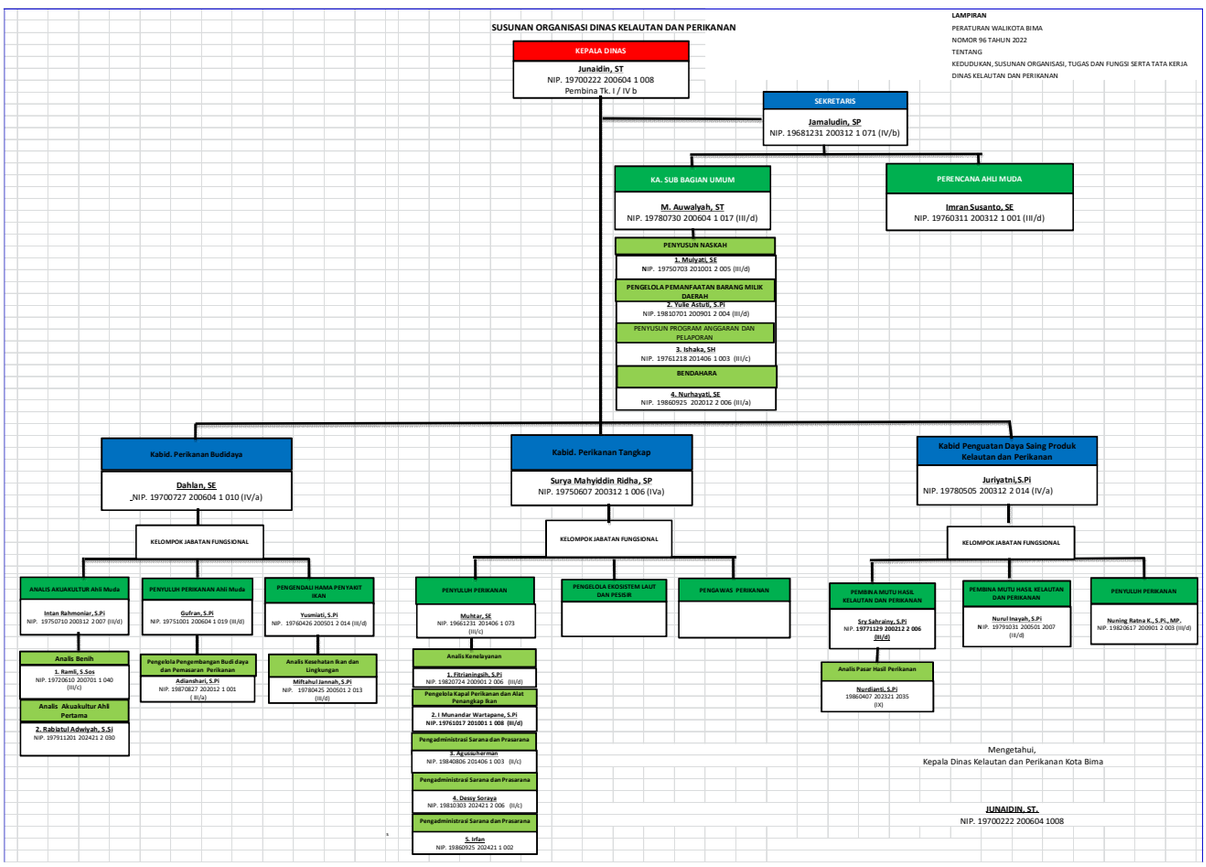
1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 96 Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
   a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
   b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
   c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
   a. Seksi Usaha Penangkapan;
   b. Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan; dan
   c. Seksi Kenelayanan.

5. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
   a. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi;
   b. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
   c. Seksi Sistem Logistik.

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut:



Adapun uraian tugas dan fungsi sekretariat dan tiap-tiap bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan dinas.

   Adapun fungsi sekretariat yaitu :

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pengelolaan barang iventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
d. Pengelolaan urusan ASN;
e. Pelaksanaan fungsi dan yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian dengan tugas dan fungsi:

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/negara. Dengan fungsi sebagai berikut :
   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
   c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
   d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
   f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
   g. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan. Dengan fungsi sebagai berikut :
   a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
   b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;
d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang kelautan dan perikanan;
e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang kelautan dan perikanan;
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan;
g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akutansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya. Adapun fungsi bidang perikanan budidaya yaitu :
   a. Perumusan kebijakan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
   b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan budidaya;
   c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
   d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya;
f. Pelaksanaan pelaporan produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan, kawasan dan lingkungan budidaya; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka pembinaan dalam rangka peningkatan produksi dan usaha budidaya, penerapan teknologi perikanan budidaya serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana perikanan budidaya. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi produksi dan usaha budidaya;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi usaha budidaya, dan peningkatan produksi budidaya perikanan;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan usaha budidaya perikanan;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan produksi, penerapan teknologi, serta peningkatan usaha budidaya perikanan;
e. Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
f. Pengembangan dan pengelolaan data statistik perikanan budidaya;
g. Penertiban rekomendasi perizinan SIUP pembudidaya ikan dan penyiapan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI);
h. Pengelolaan dan pemberdayaan usaha budidaya ikan skala kecil;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang produksi dan usaha budidaya; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Seksi Perbenihan dan Pakan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbenihan dan pakan. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi pembenihan dan pakan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembenihan dan pakan;
c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pembenihan dan pakan;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan teknologi, peningkatan usaha perbenihan dan pakan;
e. Penyusunan bahan rencana pengembangan perbenihan ikan;
f. Pembinaan kelompok usaha pembenihan ikan;
g. Pelaksanaan pola penggunaan pakan alami serta teknologi pakan ikan;
h. Penyelenggaraan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
i. Penyusunan laporan di bidang perbenihan dan pakan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Seksi Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
e. Pelaksanaan eradifikasi dan pengendalian penggunaan obat ikan yang berbahan kimia dan biologi;

f. Pembinaan dan pengembangan dalam rangka penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB);
g. Penyusunan bahan rencana pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar, payau dan laut;
h. Penyusunan pengawasan dan menjalin koordinasi terhadap distribusi induk dan benih ikan;
i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap. Adapun fungsi bidang perikanan tangkap yaitu :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan, dan kenelayaan;
   b. Penyiapan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang perikanan tangkap;
   c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
   d. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
   e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
   f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
   g. Pelaksanaan pelaporan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan, prasarana dan sarana penangkapan dan kenelayanan;
   h. Pelaksanaan penertiban rekomendasi penertiban izin di bidang perikanan tangkap; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

3.1 Seksi Usaha Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi usaha penangkapan ikan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka usaha penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang berkaitan dengan usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka usaha penangkapan, pengelolaan dan pengendalian sumberdaya ikan;
e. Pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan;
f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan;
g. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan secara berkelanjutan;
h. Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan laporan;
i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2Seksi Prasarana dan Sarana Penangkapan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan prasarana dan sarana penangkapan. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi prasarana dan sarana penangkapan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi prasarana dan sarana penangkapan;

c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana penangkapan;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka penerapan prasarana dan sarana penangkapan;
e. Pelaksanaan iventarisasi dan identifikasi pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
f. Pelaksanaan pencatatan, penandaan dan penomoran kapal perikanan;
g. Pelaksanaan kaji terap teknologi penangkapan ikan;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasarana dan sarana penangkapan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Kenelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi kenelayanan. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi kenelayanan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup kenelayanan;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang berkaitan dengan kenelayanan;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup kenelayanan;
e. Iventarisasi dan identifikasi terhadap kebutuhan nelayan;
f. Pemberdayaan kenelayanan;
g. Pengoordinasian informasi kondisi iklim dan cuaca untuk kebutuhan pelayaran;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang kenelayanan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Adapun fungsi bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yaitu :

a. Perumusan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
b. Penyusunan rencana kerja dan program kegiatan di lingkup bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
d. Pelaksanaan kebijakan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
e. Pembinaan dan bimbingan teknis sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi;
g. Pelaporan sistem logistik, bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan, akses pasar, promosi dan investasi; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 3 (tiga) seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

4.1 Seksi Akses Pasar, Promosi dan Investasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan seksi akses pasar, promosi dan investasi. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi akses pasar, promosi dan investasi;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi lingkup akses pasar, promosi dan investasi;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akses pasar, promosi dan investasi;

d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup akses pasar, promosi dan investasi;
e. Penyiapan prasarana dan saranan untuk inventarisasi potensi investasi di bidang kelautan dan perikanan;
f. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi terhadap akses pasar dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor;
g. Pengoordinasian informasi pasar;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang akses pasar, promosi dan investasi; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan . Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
b. Pengoordinasi dan sinkronisasi lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
e. Pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna lingkup bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan;
f. Pengawasan terhadap keamanan produk kelautan dan perikanan;
g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Seksi Sistem Logistik mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan yang berkaitan dengan sistem logistik. Dengan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja di lingkup seksi sistem logistik;
b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan sistem logistik;
c. Penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan sistem logistik;
d. Pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sistem logistik;
e. Menciptakan iklim yang kondusif dalam membangun kemitraan dan kelancaran distribusi logistik perikanan;
f. Pelaksanaan kaji terap dan teknologi tepat guna dalam rangka sistem logistik;
g. Menjalin komunikas dan informasi untuk kebutuhan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN);
h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang logistik; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima pada Tahun 2025 sebanyak 40 orang dengan perincian menurut tingkat pendidikan sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Strata II	2
2	Strata I	26
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	1
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SLTA	11
8	SLTP	0
9	SD	-
Jumlah		**40**

Ditinjau dari segi jumlah, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima yang tersedia masih kurang banyak disamping itu juga dibutuhkan pendidikan dan pelatihan khususnya dalam bidang pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan untuk menjadi SDM yang tangguh.

1.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
c. Persentase Peningkatan Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan

1.6 PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya sumberdaya manusia nelayan yang terampil dalam mengoperasikan alat tangkap sehingga pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap belum bisa berfungsi secara maksimal.
b. Kurangnya alokasi APBD II untuk Dinas Kelautan dan Perikanan yang berakibat pada minimnya program prioritas yang dapat dilaksanakan karena anggaran APBD II sebagian besar digunakan untuk mendukung hal-hal yang bersifat operasional.
c. Kurangnya pendidikan pelatihan tenaga terampil bagi pegawai yang ada khususnya pelatihan yang berkaitan langsung dengan pengembangan kelautan dan perikanan.

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi

serta permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan.
4. Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima selama 5 Tahun adalah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Bima 2025-2029 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima adalah meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima beserta target kinerja sasaran periode tahun 2025–2029 secara lengkap tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Visi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Terwujudnya Kota Bima yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kelautan	Meningkatnya produktivitas perikanan

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan sasarannya. Indikator kinerja merupakan komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja. Penetapan indikator kinerja pada saat perencanaan kinerja akan mampu meningkatkan kualitas perencanaan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029. IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima mendukung pencapaian Misi ke-satu RPJMD selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel. 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Kelauatan dan Perikanan Kota Bima Mendukung Misi Ke-Lima RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)	6 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Pesentase peningkatan produksi perikanan	Meningkatnya produktivitas perikanan	**1. Jumlah Produksi Perikanan**	3.401,86	3.450,16	3.504,10	3.562,30	3.631,20	3.631,20
				'- Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2488,24	2521,47	2559,4	2599,4	2649,4	2649,4
				'- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	913,62	928,69	944,7	962,9	981,8	981,8
				2. Jumlah Produk Olahan Hasil kelautan dan Perikanan	844,65	853,09	861,63	870,24	878,94	878,94
				3. Konsumsi Ikan Msayarakat (KIM)	28,5	29,11	29,51	29,91	30,31	30,31

Adapun formula indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN	Formula Indikator	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produktivitas perikanan	**Jumlah Produksi Perikanan**	Jumlah Produksi Perikanan n – Realisasi produksi Perikanan n-1 x 100 % Produksi Perikanan Tahun n-1	Jumlah ikan dalam ton
		Jumlah Produk Olahan Hasil kelautan dan Perikanan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan Thn n- Realisasi Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan n-1 x 100 % Realisasi Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan n-1	Jumlah Produk Olahan dalam ton
		Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	Konsumi ikan perkapita di rumahtangga (setara utuh segar)x penimbang indifidu jumlah penduduk	Kg/kapita /tahun

2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis dinas, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton) :	3.401,86
		a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	2.488,24
		B. Jumlah Produksi Produksi Perikanan Budidaya (ton)	913,62
		C. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	844,65
		d. Konsumsi Ikan Masyarakat (kg/kapita/pertahun)	28,50

2.4 RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam menentukan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) indikator kinerja dengan target tertentu serta di dukung oleh 8 (Delapan) program yang bersumber dari dana APBD II. Adapun penjabaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diperjanjikan Bulan Januari 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton) :	Ton	3.401,86
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	Ton	2.488,24
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	913,62
		Jumlah Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan	Ton	844,65
		Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	Kg/Kapita/Tahun	28,50

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program pengelolaan Perikanan tangkap	Rp	139.535.200	APBD
2	Program pengelolaan Perikanan budidaya	Rp	176.168.500	APBD
3	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	208.630.600	APBD
	Total Anggaran	**Rp**	**524.334.300**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal, baik data primer maupun sekunder.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025 dengan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun anggaran. Komponen yang diukur kinerjanya adalah kinerja program dan kegiatan serta sasaran strategis. Tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 tersebut berdasarkan hasil pengukurannya dapat disampaikan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima pada RPJMD periode 2025 – 2029 adalah Jumlah Produksi Perikanan sebesar 3.355,85 ton yang terdiri dari Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebesar 2.508,60 Ton dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Sebesar 847,25 Ton.

2. Pencapaian Sasaran Strategis

Jumlah Produksi Perikanan

Capaian kinerja Jumlah Produksi Perikanan Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis I	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	3.367,73	3.302,48	98,06	3.401,86	3.355,,85	98,65	17.549,62	19,12 %

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa capaian Jumlah produksi perikanan mencapai 3.355,,85 ton atau sebesar 98,65 % dari target sebesar 3.401,86 Ton pada Tahun 2025. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 53,37 Ton atau meningkat sebesar 1,62 % dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025-2029 mencapai angka 19,12%.

Capaian kinerja Jumlah Produksi perikanan Kota Bima Tahun 2025 berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya. Dari total produksi perikanan tersebut, perikanan tangkap menyumbang 2.508,60 Ton atau 100,82 % dan perikanan budidaya sebesar 847,25 ton atau 92,74 %. Adapun rincian capaian produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

1. Produksi Perikanan Tangkap

Capaian Jumlah produksi perikanan tangkap Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2025

Sasaran Strategis I	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.468,5	2.468,5	100	2,488,24	2,508,60	100,82	12.817,91	19,57 %

Dari Tabel 3.2 Capaian produksi perikanan tangkap Tahun 2025 adalah sebesar 2,508,60 ton atau mencapai 100,82% dari target sebesar 2.488,24 ton (sudah melampaui target). Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 2.468,5 ton, maka capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 40.10 ton atau sebesar 1,62 % dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025-2029 mencapai angka 19,57 %.

Capaian Produksi Perikanan Tangkap di Kota Bima cenderung meningkat dari tahun ke tahun atau menunjukan trend yang positif. Adanya kecenderungan meningkatnya volume produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun, pada dasarnya didorong oleh semakin tertib dan berkualitasnya pendataan statistik perikanan tangkap serta adanya program/kegiatan yang mendukung peningkatan upaya penangkapan seperti penyediaan sarana prasarana perikanan tangkap, intensitas pembinaan, pernyuluhan dan pendampingan pada nelayan yang semakin rutin dilakukan. Disamping itu faktor pendukung lainnya yaitu jumlah trip kapal dan unit alat tangkap yang melakukan operasi penangkapan meningkat, jumlah nelayan andong (nelayan dari daerah lain) yang mendaratkan hasil tangkapannya di Kota Bima lebih banyak serta produktivitas nelayan meningkat.

Adapun rincian jumlah produksi perikanan tangkap menurut jenis ikan tahun 2024 dapat dilihat pada 3.3.

Tabel 3.3 Produksi Perikanan tangkap Menurut Jenis Ikan Tahun 2025

No	Uraian (Ton)	Target Produksi (Ton)
1.	Produksi Perikanan Tangkap	
	a. Selar	54,2
	b. Ekor kuning/ Pisang-pisang	56,2
	c. Kuwe	51,2
	d. Layang	220,9
	e. Sunglir	8,8
	f. Bawal Hitam	15,4
	g. Kakap Putih	38,9
	h. Tembang	126,3
	i. Lemuru	44,6
	j. Beloso/Buntut Kerbo	18,3
	k. Teri	77,7
	l. Ikan Terbang	9,4
	m. Julung-Julung	18,7
	n. Peperek	48,9
	o. Lencam	53,5
	p. Kakap Merah/Bambangan	56,2
	q. Belanak	30,1
	r. Biji Nangka	25,5
	s. Kurisi	56,4
	t. Tongkol Krai	201,4
	u. Tongkol Komo	236,5
	v. Cakalang	134,8
	w. Kembung	100,9
	x. Tenggiri	48,6
	y. Madidihang	210,2
	z. Kerapu Karang	44,3
	aa. Kerapu Lumpur	46,7
	bb. Kerapu Sunu	27,9
	cc. Ikan Beronang	80,4
	dd. Kerong – Kerong	41,3
	ee. Layur	24,1
	ff. Pari Kembang/Pari Macan	18,3
	gg. Udang Putih/Jerbung	42,4

	hh. Udang Windu	15,9
	ii. Udang Barong/Udang Karang	5,7
	jj. Kepiting	22,9
	kk. Rajungan	58,6
	ll. Kerang Darah	17,2
	mm. Kerang Hijau	21,6
	nn. Cumi-Cumi	87,7
	oo. Gurita	30,0
	pp. Sotong	9,7
Produksi Perikanan Tangkap		**2.508,60**

Adapun perbandingan produksi perikanan tangkap dengan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Target Nasional (Ton)	Target PD (Ton)	Realisasi Nasional (Ton)	Realisasi PD (Ton)	Capaian Nasional (%)	Capaian PD (%)
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	7.800.000	2,488,24	7.850.000	**2.508,60**	100,60	100,82

Ket : Realisasi Nasional menggunakan data Tahun 2024 karena data Tahun 2025 sedang dalam proses validasi

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap berada dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional, maka kontribusi realisasi Jumlah Produksi perikanan Tangkap Kota Bima adalah sebesar 0,03% dari realisasi nasioal.
- Persentase capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 100,82 %.

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Capaian Jumlah Produksi budidaya pada Tahun 2025 adalah sebesar 847,25 ton atau mencapai 92,74 % dari target sebesar 913,62. Capaian ini mengalami peningkatan sebesar 13,27 ton atau sebesar 1,59 % dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024.

Peningkatan produksi perikanan budidaya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima terkait dengan bantuan bibit ikan unggul bagi

kelompok budidaya baik tawar, laut maupun payau, bantuan sarana dan prasarana budidaya serta semakin tingginya kesadaran dari kelompok pembudidaya ikan untuk terus mengembangkan usahanya.

Adapun Capaian Jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2025

Sasaran Strategis I	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	899,23	833,98	92,74 %	913,62	847,25	92,74 %	4.731,71	17,91 %

Dari Tabel 3.5 Capaian Jumlah produksi perikanan budidaya Tahun 2025 adalah sebesar 847,25 ton atau 92,74 % dari target sebesar 913,62 ton (sudah melampaui target). Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 833,98 ton, maka capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,27 ton atau sebesar 1,59 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025-2029 mencapai angka 17,91 %.

Adapun rincian produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan dapat di lihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Tahun 2025

No.	Nama / Jenis Ikan	Jumlah Produksi (Ton)
1.	Bandeng	304,099
2.	Udang	65,505
3.	Bawal	2,870
4.	Baronang	7,277
5.	Kerapu	2,220
6.	Nila	126,306
7.	Karper	334,714
8.	Lele	338,541
Jumlah		**847,25**

Adapun perbandingan produksi perikanan tangkap dengan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Nasional Tahun 2025

No.	Indikator	Target Nasional (Ton)	Target PD (Ton)	Realisasi Nasional (Ton)	Realisasi PD (Ton)	Capaian Nasional (%)	Capaian PD (%)
1	Jumlah Produksi Perikanan budidaya	6.750.000	913,62	6.760.000	847,25	100,10	92,74

Ket : Realisasi Nasional menggunakan data Tahun 2024 karena data Tahun 2025 sedang dalam proses validasi

- Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Jumlah Produksi Perikanan budiday berada dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional, maka kontribusi realisasi Jumlah Produksi perikanan Budidaya Kota Bima adalah sebesar 1,25 % dari realisasi nasioal.
- Persentase capaian indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap berada diatas capaian Nasional yaitu sebesar 92,74 %.

3. Jumlah Produk olahan hasil perikanan

Adapun Capaian jumlah produk olahan hasil perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.8 Capaian Persentase Peningkatan Produk Olahan hasil perikanan Tahun 2025

Sasaran Strategis I	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025terhadap target 2029 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya produktivitas perikanan	Jumlah Produk Olahan hasil kelautan dan perikanan	823,50	810,50	98,72	844,65	845,00	98,72	4.308,55	19,61 %

Dari Tabel 3.8 Capaian Jumlah produk olahan hasil kelautan dan perikanan Tahun 2025 adalah sebesar 845,00 ton atau 98,72 % dari target sebesar 844.65 ton (sudah melampaui target). Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 800,10 ton, maka capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 44,90 ton atau sebesar 5,61 %. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025-2029 mencapai angka 19,61 %.

4. Konsumsi Ikan masyarakat Kg/Kapita/Tahun

Adapun Capaian Konsumsi ikan masyarakat (KIM) Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Capaian Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2025

Sasaran Strategis I	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8		10
Meningkatnya produktivitas perikanan	Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM)	26,25	26,20	99,80	28,50	28,70	100,70	147,34	19,48

Dari Tabel 3.9 Capaian Konsumsi Ikan Masyarakat Tahun 2025 adalah sebesar 28,73 Kg/kapita/tahun atau mencapai 100,70 % dari target sebesar 28,50 (sudah melampaui target). Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 26,20 Kg/kapita/tahun, maka capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,50% atau sebesar 8,71 % dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2025-2029 mencapai angka 19,48 %.

Tingkat Konsumsi Ikan masyarakat di Kota Bima cenderung meningkat atau menunjukan trend yang positif dimana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil. Disamping itu, peningkatan jumlah konsumsi ikan disebabkan karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan terutama ikan segar.

Adapun rincian produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan dapat dilihat pada tabel 3.10.

3.10 Konsumsi Ikan Masyarakat Kg/Kapita/Tahun

No	Kab/Kota	Konsumsi ikan Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	Total
1.	Kota Bima	28,70	28,70
Jumlah		28,70	28,70

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain: (1) tersedianya sumberdaya pegawai yang cukup dan memadai; (2) tersedianya sarana dan prasarana pendukung; dan (3) tersedianya anggaran yang cukup.

6. Analisis atas Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima hingga akhir tahun 2025, digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Formal	Jumlah	Persentase
1	S2	2	5,00
2	S1	30	75,00
3	Diploma 3	1	2,50
4	SMA / sederajat	7	17,50
5	SLTP	0	0
6	SD	0	0
Jumlah		**40**	**100,0**

Tabel 3.12 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	5	12,50
2	Golongan III	27	67,50
3	Golongan II	8	20,00
4	Golongan I	-	0
Jumlah		**40**	**100,0**

Tabel 3.13. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No	Pegawai	Jumlah	Persentase
1	Eselon II	1	2,50
2	Eselon III	4	10,00
3	Eselon IV	1	2,50
4	Pajabat Fungsional	7	17,50
5	Non-Eselonering	27	67,50
Jumlah		**40**	**100,0**

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar, yaitu 30 orang 75,00 % adalah Strata 1, selanjutnya 2 orang 5,00 % memiliki tingkat pendidikan Strata 2, dan lainnya berpendidikan SMA/sederajat DAN SLTP. Selanjutnya, berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima 67,50% atau sebanyak 27 orang adalah Golongan III, 5 orang 12,50 % Golongan IV, dan sisanya 8 orang 20% adalah pegawai golongan II.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang Dinas Kelautan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khususnya perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan. Disamping itu, jumlah pegawai dengan spesifikasi khusus bidang kelautan dan perikanan masih sangat dibutuhkan.

7. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Dalam menunjang pencapaian tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima pada tahun 2025 telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan. Adapun jumlah programnya adalah sebanyak 4 (empat) yang ditunjang oleh kegiatan sebanyak 14 dan 39 sub kegiatan (tiga puluh sembilan). Dan tingkat capaian program dan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pencapaian kinerja kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIN
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	99,86
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	42,34
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	42,93
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perbuhan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	46,01
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	62,93
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	93,44
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yang Memperoleh Gaji dan Tujangan	34 Orang	34 Orang	91,20
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dihasilkan	12 Bulan	12 Bulan	92,63
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	92.06
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	7 Unit	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Bahan Yang Dicetak dan Digandakan	80000 Lembar	80000 Lembar	96,50
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	35 Orang	35 Orang	77,61
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	1 Unit	59.78
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terkirim 1 Tahun	500 Surat	500 Surat	99,99

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Kegiatan	3	Kegiatan	78,53
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Yang Layak	19	Unit	19	Unit	98,43
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yand Diperbaiki	20	Unit	20	Unit	81,13
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Gedung Kantor Yang Direhab/Dipelihara	1	unit	1	Unit	99,990
II.	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	5	Unit	1	Unit	93,31
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1	Unit	0	Unit	82,45
		2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	25	Orang	25	Orang	96,36
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10	Kelmpok	10	Kelmpok	98,05
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	5	Unit usaha	5	Unit usaha	92,22
		1. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	Unit	97,71

		Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
III.	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	5	Klp	5 Klp	86,08
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	5	kelompok	5 Kelompok	71,64
			Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5	Kelompok	5 Kelompok	84,03
		2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Dokumen	4 Dokumen	96,72
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	Unit	5 Unit	91,29
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2	Dok	2 Dok	81,70
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	5	Unit	5 Unit	99,98
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30	Orang	30 Orang	97,93
IV.	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	4	Dokumen	4 Dokumen	97,71
		2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	60	Unit Usaha	60 Unit Usaha	96,23
		3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.500	Ton	1.5000 Ton	90,39

		Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	83,11

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program tersebut dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian penunjang urusan pemerintahan daerah. Dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Dalam program tersebut dilaksanakan 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian dimaksud yang terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan dokumen perencanaan perangkat daerah dinas kelautan dan perikanan kota bima tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan dokumen rencana kerja anggaran dinas kelautan dan perikanan kota bima tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan dokumen perubahan rencana kerja anggaran dinas kelautan dan perikanan kota bima tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

g. Koordinasi penyusunan DPA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan dokumen pelaksanaan anggaran dinas kelautan dan perikanan kota bima tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dinas kelautan dan perikanan kota bima tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan laporan terkait dengan tidak lanjut hasil temuan dari badan pemeriksa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

j. Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Administrasi keuangan perangkat daerah

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan gaji dan tunjangan asn pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan skpd

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan skpd pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan laporan keuangan akhir tahun 2025 sesuai sesuai ketentuan yang berlaku.

k. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan laporan keuangan semesteran tahun 2025 sesuai sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Administrasi umum perangkat daerah

a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran kegiatan kantor.

b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran penyelesaian administrasi kantor secara cepat dan tepat, terutama yang terkait dengan penyediaan kebutuhan blanko SPPD, disposisi, kuitansi serta pembuatan spanduk hari besar nasional dan biaya jasa publikasi/iklan di media masa.

c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya penyediaan anggaran dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK, TP dan Dekonsentrasi) maupun kegiatan-kegiatan lain yang mendukung suksesnya program dan

kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima.

4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penyediaan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung terselenggaranya pelaporan secara cepat dan tepat.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran penyelesaian administrasi kantor secara cepat dan tepat, terutama yang terkait dengan surat menyurat, jasa listrik dan internet untuk mendukung penyelesaian tugas, proposal dan pelaporan yang dilakukan secara online. Adapun target jumlah jasa tersebut adalah sebesar 100 % dan terealisasi 100%.

6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lapangan secara cepat dan tepat, dilakukan perawatan kendaraan dinas seperti

penggatian suku cadang, penggantian pelumas dan kebutuhan bahan bakar selama 1 (satu) tahun.

b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran penyelesaian administrasi kantor secara cepat dan tepat, terutama yang terkait dengan pemeliharaan beberapa peralatan kantor seperti AC, dan laptop. Dari target sebesar 20 unit dan terealisasi sebanyak 35 unit.

c. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

Program tersebut dilaksanakan dalam upaya peningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dari yang di targetkan 2488,24 Ton dan terealisasi sebesar 2508,60 Ton . Dalam program tersebut dilaksanakan 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian dimaksud antara lain :

1. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

a. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Kegiatan dilakukan dalam upaya mendukung pengadaan prasarana usaha perikanan untuk nelayan seperti pengadaan Kapal-kapal untuk nelayan.

b. Penyediaan sarana Usaha Perikanan Tangkap

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung pengadaan sarana pendukung perikanan tangkap,

dengan dilakukannya pengadaan sarana terutama pengadaan mesin.

2. Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota

   a. Pengembangan kapasitas nelayan kecil

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendampingi serta mendukung hal-hal yang dilakukan pada kelompok nelayan.

   b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap, dengan tujuan agar memotivasi nelayan dalam mengembangkan kelompok usaha tersebut.

   c. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan pada nelayan.

3. Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam (satu) daerah kabupaten/kota

   a. Penetepan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Program tersebut dilaksanakan dalam upaya peningkatkan jumlah produksi perikanan budidaya dari yang di targetkan 913,62 Ton dan terealisasi sebesar 847,25 Ton . Dalam program

tersebut dilaksanakan 2 kegiatan dan 9 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian dimaksud meliputi :

1. Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil

   a. Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya dengan tersedianya bibit ikan unggul untuk kelompok pebudidaya ikan.

   b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil

   c. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. Pengelolaan Pembudidaya ikan

   a. Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung prasarana khususnya di bidang kelautan dan perikanan bagi Pokdakan Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

   b. Penjaminan ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota

      Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung ketersediaan sarana khususnya di bidang kelautan dan perikanan bagi Pokdakan Binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

   c. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

d. Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan

e. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung kegiatan Pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan

4. PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Program tersebut dilaksanakan dalam upaya meningkatnya Konsumsi Ikan Masayarakat (KIM)) dan jumlah produk olahan dari target Konsumsi Ikan Masayarakat (KIM) 28,50 kg/kapita/tahun dan terealisasi sebesar 28,70 kg/kapita/tahun sedangkan untuk jumlah produk olahan dari target sebesar 844,65 ton dan terealisasi sebesar 845,00 ton pada tahun 2025. Dalam program tersebut dilaksanakan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain :

1. Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil

a. Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya promosi produk olahan hasil kelautan dan perikanan dan menggalakan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Target kegiatan sebanyak 3 lokasi dan terealisasi sebanyak 3 lokasi yaitu Pemberian Makanan Tambahan berbahan baku ikan.

2. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

a. Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

Kegiatan yang dilakukan meliputi 2 kegiatan yaitu 1. bimtek/pelatihan pengolahan hasil kelautan dan perikan; 2. Pengujian mutu dan pembinaan keamanan produk; 3. Pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

Kegiatan bimtek/pelatihan dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan jumlah peserta yang mengikuti lomba masak serba ikan dan demo masak serba ikan yang ditargetkan sebesar 60 peserta dan terealisasi sebesar 60 peserta.

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya Pengujian Mutu dan Keamanan pangan produk kelautan dan perikanan yang dilakukan pada 2 lokasi yaitu pasar raya amahami dan pesisir lokasipantai Kolo Kota Bima.

Kegiatan lainnya berupa pembinaan SKP pada 3 unit UPI.

3. Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

a. Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya memfasilitasi pemanfaatan sarana prasarana rantai dingin berupa pabrik es, cold storage 20 ton, Single Cold Storage 100 ton serta sarana pendukung lainnya. Target jumlah Prasarana logistik yang di dimanfaatkan 3 unit dan termanfaatkan 3 unit. Kegiatan lainnya berupa pendataan, monitoring dan evaluasi.

b. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dala 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mendukung peningkatan jumlah fasilitas bagi pelaku usaha perikanan yang tersedia dari target 3 kelompok penerima dan terealisasi sebesar 3 kelompok penerima. Yang berupa peraatan pengolahan hasil perikanan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2025.

Pada awal Tahun Anggaran 2025, jumlah anggaran keseluruhan pada DPA adalah sebesar **Rp. 5.378.646.875,00** (Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) .

Adapun rincian pagu awal, pagu revisi dan realisasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

NO	URAIAN BELANJA PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU AWAL (RP.)	PAGU REVISI (RP.)	REALISASI (RP.)	% REALISASI
DANA APBD II					
1	PENDAPATAN	240.100.000	215.100.000	185.750.000	77,36
2	BELANJA DAERAH	5.378.646.875	4.774.896.787	4.381.581.114	91,76

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa realisasi realisasi keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 untuk dana yang bersumber dari APBD II adalah sebesar Rp. 4.381.581.114 atau sebesar 91,76% dari pagu yang tersedia.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Capaian rata-rata kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Pencapaian indikator kinerja 1 : Jumlah Produksi Perikanan adalah sebesar 3.355,86 ton atau (98,65) yang meliputi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap adalah sebesar 2.508,80 ton atau (100,82%) dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah sebesar 847,25 atau (92,74%).
- Pencapaian indikator kinerja 2 : Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan adalah sebesar 845,00 ton atau (100,04%).
- Pencapaian indikator kinerja 3 : Konsumsi Ikan Masyarakat adalah sebesar 28,70 kg/kapita/tahun atau (100,70%)

Adapun langkah kedepan yang tetap dan akan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima untuk meningkatkan kinerjanya antara lain :

- Peningkatan kualitas pendataan statistik baik tangkap, budidaya, pengolahan maupun data-data kelautan dan perikanan lainnya.
- Melakukan sosialisasi pentingnya makan ikan maupun pembinaan kelompok masyarakat pengolah hasil perikanan agar lebih kreatif dan inovatif dalam mengenalkan produksi hasil perikanan melalui pola rantai dingin yang baik terhadap keberlanjutan produksi perikanan baik melalui pengawetan maupun menggunakan es. Serta peningkatan promosi hasil kelautan dan perikanan baik skala lokal maupun nasional.
- Pendekatan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan pembinaan kelompok berkelanjutan sehingga kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan akan terwujud.

- Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat dalam upaya mendatangkan program-program pendukung yang bersumber dari APBD I maupun APBN.
- Mengintensifkan pembinaan pada kelompok-kelompok yang ada baik dari segi kelembagaan maupun kemampuan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada lewat kegiatan pembinaan rutin, pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis.

PEMERINTAH KOTA BIMA

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Gatot Subroto No.01 Telp./Fax. (0374) 646441 Raba-Bima
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu penerapan system yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja OPD.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja diwaktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris	
Kabid SDA, Ck, BM, Taru	
JF. Perencana	

Kota Bima, Februari 2026
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Bima,

DIDI FAHDIANSYAH, ST. MT.
NIP. 19740910 200210 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu penerapan system yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Tahun 2025 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja OPD.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja diwaktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kota Bima, Februari 2026
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Bima,

DIDI FAHDIANSYAH, ST.,MT.
NIP. 19740910 200210 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.2.1 Susunan Organisasi 3
1.2.2 Struktur Organisasi 4
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 5
1.4 Gambaran Umum Pelayanan 11
1.4.1 Kinerja Pelayanan SKPD 11
1.4.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .. 14
1.4.2.1 Tantangan 14
1.4.2.2 Peluang 17
1.5 Landasan hukum 17
1.6 Sistematika 18
BAB II PERENCANAAN KINERJA 19
2.1 Rencana strategis 19
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 39
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 40
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Cpaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 44
3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 50
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 49
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah di lakukan 50
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 51
3.1.7 Analisis Program /Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 52
3.2 Realisasi Anggaran 55
3.2.2 Capaian Kinerja Eselon 64

3.2.2.1 Capaian Kinerja Eselon II 64
3.2.2.2 Capaian Kinerja Eselon III 65
3.2.1.3. Capaian Kinerja Eselon IV 66
3.3 Akuntabilitas Anggaran 70
BAB IV PENUTUP 97

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Jabatan Struktural Per 31 Desember 2025 2
1.2 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang Per 31 Desember 2023 2
1.3 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2023 3
1.4 Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Gender Per 31 Desember 2023 3
2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025 – 2026 21
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima 34
2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 36
2.4 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima 36
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 40
3.A.2.4 Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis tahun 2025 40
3.A.1.1. Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatny Rumah tangga pengguna air bersih/air minum tahun 2025 41
3.A.1.1. Target dan realisasi kinerja sasaran meningkatnya rumah tangga pengguna air bersih/air minum tahun 2025 41
3.A.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase" Tahun 2025 42
3.A.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnyajumlah kawasan strategis perkotaan yang tertata dan meningkatnya jumlah kawasan lingkungan permukiman yang tertangani tahun 2025 43
3.A.2.3. Target dan Realisasi Kinerja sasaran "Meningkatnya kualitas jaringan jalan kota tahun 2025 43
3.A.2.5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran"Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya" Tahun 2023 44
3.A.2.4. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis" tahun 2022 s.d. 2025 45
3.A.2.1. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah Domestik dan air Minum " Tahun 2022 s.d. 2025 45
3.A.2.1. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik " Tahun 2022 s.d. 2025 45

3.A.2.2. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase " Tahun 2021 sampai dengan 2025 46
3.A.2.3. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase" Tahun 2022 s.d. 2025 46
3.A.3.2.4. Realisasi Kinerja Sasaran "Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai Peruntukannya" Tahun 201 s.d. 2025..... 47
3.A.4.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional 49
3.A.6.1. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya 51
3.A.7.1. Pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025 55

DAFTAR GAMBAR

1.1 Struktur Organisasi 4
3.1 Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja..... 38
3.2 Tahapan Pengukuran Kinerja 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima di dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sampai akhir tahun 2025 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) orang pegawai ASN dan 42 (Empat Puluh Dua) tenaga kontrak/Honorer. dengan klasifikasi dan kualifikasi ASN sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Jabatan Struktural

Per 31 Desember 2025

No	Pangkat	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	6
4	Non Eselon/ Fungsional	53
5	PPPK	30
	Total	95

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2025

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Golongan Ruang

Per 31 Desember 2025

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda /IVc	1
2	Pembina Tk.I / IVb	1
3	Pembina / IVa	5
4	Penata Muda Tk.I /IIId	30
5	Penata / IIIc	11
6	Penata Muda Tk.I / IIIb	4
7	Penata Muda / IIIa	9
8	Pengatur Tk.I / IId	1
9	Pengatur / IIc	2
10	Pengatur Muda Tk.I / IIb	-
11	Pengatur Muda / IIa	1
12	Juru Tk.I / Id	-
13	Juru / Ic	-
14	Juru Muda Tk.I / Ib	-
15	Juru Muda / Ia	-

16	PPPK	30
	Total	95

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2025

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2025

No	Pendidikan	Jumlah	
1.	SD	2	Orang
2.	SLTP	1	Orang
3.	SLTA	19	Orang
4.	D3	1	Orang
5.	D4	1	Orang
6.	S1	64	Orang
7.	S2	7	Orang
	Total	95	Orang

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2025

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas PUPR Berdasarkan Gender
Per 31 Desember 2025

sNo	Jenis Kelamin	Jumlah	
1.	Pria	74	Orang
2.	Wanita	21	Orang
	Total	95	Orang

Sumber Data : DUK Dinas PUPR Tahun 2025

1.2.1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan;

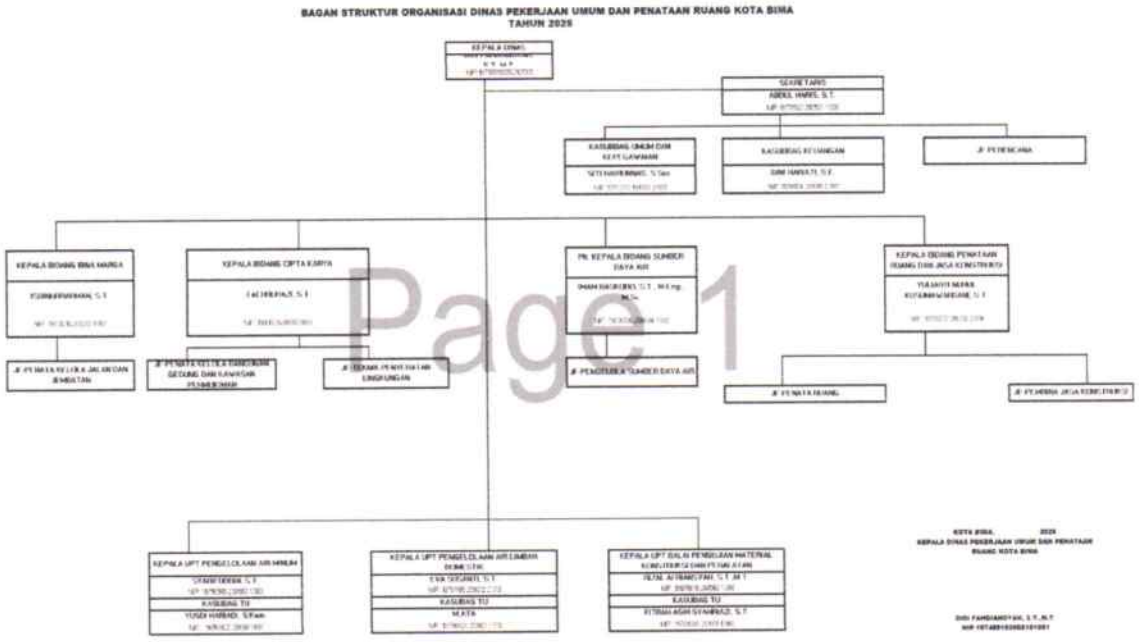
c. Sub Bagian JF-Perencana.

3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
   a. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
      (i) JF- Teknik Jalan Dan Jembatan
   b. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
      (i) JF- Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan;
      (ii) JF- Teknik Penyehatan Lingkungan.
   c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
      (i) JF- Teknik Pengairan
   d. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, terdiri dari:
      (i) JF- Penataan Ruang;
      (ii) JF- Pembina Jasa Konstruksi.
   e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Work Shop, terdiri dari :
      (i) UPT Balai Pengujian Material Konstruksi Dan Peralatan ;
      (ii) UPT Pengelola Air Limbah Domestik.
      (iii) UPT Pengelolaan Air Minum.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



Page 1

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang bina marga;
e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang cipta karya;
f. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air;
g. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut:

B. *Sekretariat*

1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

    a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
    b. Pengelolaan urusan keuangan;

c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
d. Pengelolaan urusan ASN; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat, membawahi dan mengoordinasikan:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- ✓ Melaksanakan kegiatan urusan pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dans
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan Mempunyai Tugas:

- ✓ Melaksanakan perencanaan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Dinas;
- ✓ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- ✓ Melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- ✓ Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;

- ✓ Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Dinas;
- ✓ Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- ✓ Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- ✓ Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas:

- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Bina Marga

(1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencaaan teknis, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang bina marga;

b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pengendalian dan pembinaan serta perizinan dalam bidang bina marga;

c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;

d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian;

e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina marga; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Bina Marga membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.

D. *Bidang Cipta Karya*

(1) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik dan drainase.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan program pembangunan di bidang cipta karya;

b. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;

c. Penyelenggaraan bangunan dan gedung untuk kepentingan strategis;

d. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai;

e. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;

f. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;

h. Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), proses Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung dan izin pembongkaran bangunan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang cipta karya; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Cipta Karya membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jembatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.

E. *Bidang Sumber Daya Air*

(1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, mengatur, membina, pengawasan, pengendalian, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air;

b. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan saluran irigasi, Dam dan bangunan pelengkapnya pada perkuatan tebing sungai;

c. fasilitas kerja sama dalam pengembangan prasarana dan sarana saluran Irigasi dan Dam;

d. Penanggulangan kerusakan sumber daya air yang terdapat pada saluran Irigasi dan Dam;

e. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

f. Pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya air; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Sumber Daya Air membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.

F. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

(1) Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaaatan ruang dan pembinaan tata ruang dan penyelenggaraan jasa konstruksi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perencanaan tata ruang baik rencana umum maupun rencana rinci dan detail tata ruang;

b. Penyusunan rumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

c. Penyusunan rumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;

d. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan jasa konstruksi;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi, membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi.

G. *Unit Pelaksana Teknis*

(1) Dalam penyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan;

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

1.4. Gambaran Umum Pelayanan

1.4.1. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima merupakan salah satu lembaga yang memiliki fungsi organisasi yang bersifat *teknis*, oleh karena itu lembaga ini berperan penting dalam Pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing nasional. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi tekanan urbanisasi yang secara keseluruhan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, Infrastruktur Pekerjaan Umum juga berperan sebagai pendukung kelancaran kegiatan sektor pembangunan lainnya antara lain sektor pertanian, industri, kelautan dan perikanan. Pembangunan

infrastruktur Pekerjaan Umum karenanya berperan sebagai stimulan dalam mendukung perkembangan ekonomi wilayah yang signifikan.

Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tersebut terlihat melalui: (i) Infrastuktur sumber daya air yang berperan dalam penyimpanan dan pendistribusian air untuk keperluan domestik (rumah tangga), industri, dan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, dan pelaksanaan konservasi sumber daya air, serta pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air; dan (ii) Infrastruktur permukiman yang berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan dan revitalisasi kawasan serta pengembangan kawasan agropolitan. Selain Itu (iii) Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berperan untuk mendukung distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun pembentuk struktur ruang wilayah; (iv) Seluruh penyediaan infrastruktur tersebut diselenggarakan berbasiskan penataan ruang.

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum secara keseluruhan. Menurunnya fungsi jaringan irigasi disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan di samping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

Pengelolaan irigasi juga melibatkan masyarakat melalui Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) ataupun Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan irigasi khususnya di jaringan tersier. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bima adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) DI.

Berkembangnya daerah permukiman telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Keandalan penyediaan air baku juga berkurang akibat menurunnya fungsi dan kapasitas tampungan air (seperti Dam, Embung/telaga, Bendungan). Kondisi ini juga diperparah oleh kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah. Akses terhadap air baku untuk rumah tangga dan industri (termasuk perhotelan) yang masih rendah memicu eksplorasi air tanah yang cenderung meningkat yang kalau tidak dikendalikan bisa menyebabkan land subsidence.

Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya.

Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan (seperti banjir diwilayah-wilayah permukiman tepi sungai). Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat abrasi yang mengancam keberadaan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya.

Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir dalam rangka pemeliharaan sungai dan bantaran sungai. Setiap terjadi banjir, tebing sungai mengalami gerusan yang mengakibatkan longsoran tebing sungai. Untuk penanganan hal tersebut diperlukan konstruksi penahan tebing yang aman dan ramah lingkungan berupa konstruksi bronjong.

Infrastruktur bidang Cipta Karya yang mencakup sub bidang air minum, air limbah, drainase dan penataan bangunan dan lingkungan menunjukkan pula kondisi yang beragam.

Untuk sub bidang air minum, dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas.

Secara total target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Adapun pada sisi manajemen, yang juga tidak kalah penting perannya dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, kondisi saat ini yang masih dirasakan adalah belum fokus dan

berjalannya fungsi-fungsi manajerial secara optimal. Kondisi mencolok yang paling terasa adalah implementasi fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang/sub bidang yang menjadikewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih lemah termasuk dengan sektor pembangunan lainnya. Selain itu dimensi penyelenggaraan infrastruktur yang berkelanjutan termasuk aspek pemanfaatan teknologi dan aspek pengelolaan yang memperhitungkan risiko kegagalan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan prima bagi masyarakat juga belum cukup mendapat perhatian. Kondisi manajerial tersebut diperlemah pula oleh sistem pengendalian internal dan belum sepenuhnya aparat pelaksana patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mencerminkan belum cukup besarnya kemajuan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Sedangkan untuk mewadahi kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi, maka disusun program baru yaitu Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi. Program ini bertujuan untuk implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas.

1.4.2.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1.4.2.1. Tantangan

Beberapa faktor penghambat yang diharapkan menjadi tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tantangan pembangunan Bidang Sumber Daya Air (SDA).
    1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air asin/laut.
    2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang

menetapkan bahwa pada tahun 2017 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.

3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

b. Tantangan pembangunan Bidang ke Bina Marga-an.

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
2. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.
3. Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan kawasan terisolir.
4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
5. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah Kota Bima.
6. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

c. Tantangan pembangunan Bidang ke Cipta Karyaan.

1. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas.

2. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
3. Memperluas akses pelayanan dan peningkatan kualitas fasilitas masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
4. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.
5. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

d. Tantangan pembangunan Bidang Penataan Ruang.
   1. Dalam prosesnya kerap meninggalkan dimensi kemanusiaan, karena lebih fokus pada konektivitas infrastruktur, dan sering disebut sebut sebagai dehumanisasi perencanaan, yang apabila dibiarkan akan menghasilkan ruang-ruang yang tidak layak huni karena menerobos daya dukung lingkungan (*carrying capacity*), delineasi ekoregion, dan optimasi ruang.
   2. Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal

e. Tantangan pembangunan Sekretariat Dinas.
   1. Peningkatan kebutuhan pembangunan infrastruktur berbagai wilayah dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat membutuhkan SDM yang handal.
   2. Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) strategic goals yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
   3. Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastuktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
   4. Penyelenggaraan good governance yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.

5. Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula lebih dominan sebagai operator-regulator menjadi dominan regulator-fasilitator.

1.4.2.2. Peluang

Adapun beberapa faktor pendukung yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

a. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program.
b. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik itu yang bersifat partisipatif/ swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan.
c. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kota Bima
d. Adanya kemungkinan keterbukaan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya.
e. Peningkatan komitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan terpadu akan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (suistainable development)
f. Adanya kerja sama dengan instansi lain untuk memenuhi Permintaan Personil yang bertugas sebagai Pengawas teknis proyek (PTP);
g. Meningkatnya kesadaran pelaku jasa konstruksi (rekanan) terhadap pentingnya Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi (K3);
h. Tuntutan masyarakat akan reformasi dalam pelayanan kecepatan dan ketepatan pelayanan mendapatkan informasi (pelayanan prima).

1.5. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
8. Peraturan Walikota Bima Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
9. Peraturan Walikota Bima Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima;
10. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan struktur Fungsi Organisasi, Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, Isu Strategis dan Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Penjaelasan IKU, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Kota Bima Tahun 2025 – 2029 isu strategis Kota Bima ada 6, salah satunya yaitu Mengembangkan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Berkualitas serta Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan, Sektor yang menangani adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Lingkungan Hidup dan dan Dinas Koninfotik

Dari tujuan diatas didapatkan Sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotta Bima yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah dengan indikator:
    1) Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik
    2) Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan
    3) Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak
    4) Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik
    5) Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata
    6) Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Indikator Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya
    1) Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik

Pelayanan infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase drainase dalam kondisi baik, Persentase panjang jalan Kondisi baik.

Berpedoman pada Rencana Pembangunana Jangka Menengah Kota Bima Tahun 2025 – 2029 fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat maka ditetapkan Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima yakni: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan (Pekerjaan Umum).

Makna dari infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang ditingkatkan, merupakan perwujudan dari tingkat ketersediaan dan pelayanan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang yang penjabarannya meliputi:

a. Kondisi dan fungsi sarana dan prasarana sumber daya air yang dapat memberikan pelayanan yang mendukung terwujudnya kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan;
b. Pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yaitu penyediaan air minum yang memenuhi standar baku mutu dan kesehatan manusia dan dalam jumlah yang memadai;
c. Pelayanan prasarana dan sarana air limbah domestik yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
d. Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;
e. Pelayananan prasarana dan sarana pemukiman skala lingkungan yang memadai dan tertata dengan baik.
f. Pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimum yang mencakup aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan dan kecepatan tempuh rata - rata;
g. Jasa konstruksi nasional yang berdaya saing dan mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif dan efisien.
h. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan semua infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang andal tersebut berbasis penataan ruang;

Beranjak dari Tujuan tersebut maka dirumuskan/ditetapkan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025-2026, yaitu Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya merealisasikan Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dalam mendukung Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Bima, telah melakukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan Program/kegiatan pembangunan sesuai standar pelayanan minimal SPM, dengan cara memperketat pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan sarana/prasarana dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

Tahun 2025 – 2029

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Nilai SAKIP OPD	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	10.901.496.160,80	100%	11.446.570.968,84	100%	11.446.570.968,84
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.144.270	100%	88.351.483,50	100%	88.351.483,50
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	32.009.700	2 Dokumen	32.110.185	2 Dokumen	32.110.185
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	32.806.650	1 Dokumen	32.946.983	1 Dokumen	32.946.983
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	32.577.960	1 Dokumen	32.706.858	1 Dokumen	32.706.858
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.432.200	1 Dokumen	11.503.810	1 Dokumen	11.503.810
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.376.760	1 Dokumen	11.445.598	1 Dokumen	11.445.598
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.027.760	4 Laporan	12.129.148	4 Laporan	12.129.148

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	71.913.240	1 Laporan	75.508.902	1 Laporan	75.508.902
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Sistem PeLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	7.924.680.638	100%	8.320.914.670	100%	8.320.914.670
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 org/Bulan	7.532.213.410.05	74 org/Bulan	7.908.824.081	74 org/Bulan	7.908.824.081
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	358.723.378	12 Dokumen	376.659.546	12 Dokumen	376.659.546
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	623.700	12 Dokumen	654.885	12 Dokumen	654.885
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.593.900	1 Laporan	1.673.595	1 Laporan	1.673.595
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	16.288.650	1 Dokumen	17.103.083	1 Dokumen	17.103.083
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.237.600	12 Laporan	16.999.480	12 Laporan	17.500.000
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	28.350.000	100%	29.767.500	100%	29.767.500
				Sub Kegiatan Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasi Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	28.350.000	4 Laporan	29.767.500	4 Laporan	29.767.500
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	84.234.150	100%	88.445.857.50	100%	88.445.857.50

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya	74 org	84.234.150	75 org	88.445.858	76 org	90.445.858
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	100%	1.592.107.392	100%	1.671.712.761	100%	1.671.712.761
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	695.170.092	21 Paket	729.928.596	22 Paket	749.928.596
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	250 Paket	90.505.800	255 Paket	95.031.090	360 Paket	95.031.090
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan yang disediakan	29 Buah	132.216.000	30 Buah	138.826.800	31 Buah	138.826.800
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	16.411.500	12 Laporan	17.232.075	12 Laporan	17.232.075
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	957.804.000	105 Laporan	1.000.694.200	110 Laporan	1.090.694.200
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	162.148.950.60	100%	170.256.398	100%	170.256.398
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	33.309.075	1 Laporan	35.474.529	1 Laporan	37.474.529
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139.717.696	12 Laporan	146.703.580	12 Laporan	146.703.580
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	19.122.180	4 Laporan	20.078.289	4 Laporan	20.078.289
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.025.830.761	100%	1.077.122.299	100%	1.077.122.299

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Laporanangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	193.443.495	23 Unit	203.115.670	23 Unit	203.115.670
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	593.383.116	8 Unit	623.052.272	8 Unit	850.000.000
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	25.329.150	12 Unit	26.595.608	12 Unit	26.595.608
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	213.675.000	2 unit	224.358.750	2 unit	254.358.750
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Luas wilayah Pertanian yang terlayani irigasi Teknis	1,60%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	• Panjang Saluran Irigasi • Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir • Bertambahnya infrastruktur penampung air dan pegendali banjir	3000 m 600 m 7 titik lokasi	9.500.000.000 3.000.000.000 19.000.000.000	4.000 m 650m 8 titik lokasi	10.300.000.000 4.000.000.000 22.000,000,000	5.000 m 700m 9 titik lokasi	11.700.000.000 5.000.000.000 25.000,000,000
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir	600 m	3.000.000.000	650 m	4.000.000.000	700 m	5.000.000.000

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan. Embung. dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan. Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.100.000.000	2 Dokumen	1.200.000.000
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir. Lahar. Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai yang Disusun	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	700. 000.000	2 Dokumen	900. 000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	600 m	3.000.000.000	650 m	4.000.000.000	700 m	5.000.000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	jumlah pintu air baru yang terbangun	15 titik	375.000.000	15 titik	400.000.000	15 titik	425.000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan Check Dam	jumlah unit cek dam baru yang terbangun	3 titik	3.000.000.000	4 titik	4.000.000.000	5 titik	5.000.000.000
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	4 titik	16.000.000.000	4 titik	18.000.000.000	4 titik	20.000.000.000
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	jumlah unit pintu air yang dilakukan perbaikan	5 titik	50.000.000	5 titik	75.000.000	5 titik	100.000.000

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	1.000 m	600.000.000	1.000 m	650.000.000	1.000 m	700.000.000
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Dibercayakan	1 Lembaga	450.000.000	1 Lembaga	450.000.000	1 Lembaga	450.000.000
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Panjang irigasi primer dan sekunder	2050 m	4.000.000.000	2050 m	4.900.000.000	2050 m	5.800.000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	800 m	3.000.000.000	800 m	3.000.000.000	800 m	3.000.000.000
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	500 m	2.500.000.000	500 m	2.500.000.000	500 m	2.500.000.000
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	750 m	2.500.000.000	750 m	2.500.000.000	750 m	2.500.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna air bersih/ air minum layak	1,92	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah SR yang terpasang	1035 SR	9.500.000.000	1085 SR	9.900.000.000	1135 SR	10.320.000.000
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR yang terpasang	1035 SR	9.500.000.000	1085 SR	9.900.000.000	1135 SR	10.320.000.000

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Lembaga	400.000.000	1 Lembaga	400.000.000	1 Lembaga	400.000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	1 Liter/ Detik (50 SR)	1.500.000.000	1 Liter/ Detik (50 SR)	1.500.000.000	1 Liter/ Detik (50 SR)	1.500.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 Liter/ Detik (185 SR)	2.000.000.000	3 Liter/ Detik (185 SR)	2.000.000.000	3 Liter/ Detik (185 SR)	2.000.000.000
				Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	800 SR	3.000.000.000	850 SR	3.400.000.000	900 SR	3.800.000.000
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi oleh pemerintah	1 Kelompok Masyarakat	45.000.000	1 Kelompok Masyarakat	50.000.000	1 Kelompok Masyarakat	60.000.000
				Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yangmeningkat kinerjanya	1 Penyelenggara SPAM	75.000.000	1 Penyelenggara SPAM	80.000.000	1 Penyelenggara SPAM	90.000.000
				Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2 Unit	400.000.000	3 Unit	420.000.000	3 Unit	450.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik	1,25%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	500 SR	9.350.000.000	550 SR	10.000.000.000	600 SR	10.750.000.000

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program. kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang	500 SR	9.350.000.000	550 SR	10.000.000.000	600 SR	10.750.000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 SR	9.000.000.000	550 SR	9.600.000.000	600 SR	10.300.000.000
				Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	350.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	450.000.000
				Sub Kegiatan Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	1 m3/hari	350.000.000	1 m3/hari	400.000.000	1 m3/hari	450.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	3,00%	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	5000 meter	9.000.000.000	5500 meter	9.450.000.000	6000 meter	10.000.000.000
				Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan drainase dalam kondisi baik	5000 meter	9.000.000.000	5500 meter	9.450.000.000	6000 meter	10.000.000.000
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2000 meter	4.000.000.000	2100 meter	4.100.000.000	2200 meter	4.200.000.000
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3000 meter	4.000.000.000	3400 meter	4.100.000.000	3800 meter	4.200.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Bangunan ber PBG	0,425%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	300.000.000	200 Bangunan	320.000.000	200 Bangunan	340.000.000

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Bangunan	300.000.000	200 Bangunan	320.000.000	200 Dokumen	340.000.000
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli	200 Dokumen	300.000.000	200 Dokumen	320.000.000	200 Dokumen	340.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Jumlah Kawasan Strategis yang tertata Persentase Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	71,43% 100%	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Kawasan Strategis yang tertata Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.000.000.000 24.500.000.000	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.250.000.000 25.000.000.000	3 Kawasan 5 Kecamatan	10.500.000.000 25.000.000.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang tertata Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.000.000.000 14.500.000.000	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.250.000.000 15.000.000.000	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.500.000.000 15.500.000.000
				Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.000.000.000 14.500.000.000	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.250.000.000 15.000.000.000	1 Kawasan 5 Kecamatan	10.500.000.000 15.500.000.000

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah. Kawasan Pariwisata. Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	16.000.000.000	1 Kawasan	16.200.000.000	1 Kawasan	16.700.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	1,03%	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	31,5 Km	47.908.791.643	32,35 Km	50.304.231.225	33,2 Km	52.819.442.786
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap	31,5 Km	47.908.791.643	32,35 Km	50.304.231.225	33,2 Km	52.819.442.786
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis. Kajian Kebijakan. Bantuan Teknis. Bimbingan Teknis. Pengelolaan Pengendalian	5 Dokumen	721.212.438	5 Dokumen	757.273.059	5 Dokumen	795.136.712
				Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	4 Dokumen	141.585.718	4 Dokumen	141.585.718	4 Dokumen	322.752.796
				Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	6 Dokumen	594.841.275	4 Dokumen	624.583.339	4 Dokumen	562.031.237
				Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	7.00 Km	8.303.720.519	7.1 Km	8.718.906.545	7.2 Km	9.154.851.872
				Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Ruas Jalan memenuhi standar	1.60 Km	1.679.096.527	1.65Km	1.763.051.353	1.70 Km	1.763.051.353
				Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	8.40 Km	25.043.947.	8.50 Km	26.296.145.204	8.60 Km	27.610.952.464
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	5 Km	11.060.753.241	5.1 Km	11.613.790.903	5.20 Km	12.194.480.

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Mempertahankan Kondisi Mantap Jalan	9.50 Km	1.976.632.432	10.00Km	2.075.464.054	10.50 Km	2.179.237.257
				Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Terbangunannya jembatan baru	1 Unit	25.861.500.000	2 Unit	27.154.575.000	3 Unit	27.154.575.000
				Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Jumlah Paket Pekerjaan Penggantian Jembatan	1 Unit	2.710.000.000	1 Unit	3.245.500.000	1 Unit	3.445.500.000
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipertahankan kondisinya	1 Unit	1.000.000.000	2 Unit	1.100.000.000	2 Unit	1.200.000.000
Meningkatnya kemantapan infrastruktur	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Persentase Tukang yang terlatih	6,5%	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah Badan Usaha Konstruksi Sesuai Standart Jumlah Tukang yang terlatih	15 Badan dan 40 Orang	223.079.430	15 Badan dan 40 Orang	234.233.000	15 Badan dan 40 Orang	244.233.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	20 Badan dan 40 Orang	148.378.230	20 Badan dan 40 Orang	155.797.141	20 Badan dan 40 Orang	155.797.141
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Bersertifikat	40 Orang	120.883.560	40 org	126.927.738	40 org	126.927.738
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	75.000.000	15 Lembaga	85.000.000	15 Lembaga	100.000.000
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	74.701.200	1 Dokumen	78.436.260	1 Dokumen	82.436.260
				Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	104.701.200	1 Dokumen	108.436.260	1 Dokumen	112.436.260

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	3,20%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang	7 Dokumen	1.200.000.000	7 Dokumen	1.350.000.000	7 Dokumen	1.500.000.000
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	10 Dokumen	1.200.000.000	10 Dokumen	1.350.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Ranperda Revisi RTRW	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	310.000.000	1 Dokumen	315.000.000
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi. Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah persetujuan substansi RDTRK	2 Dokumen	312.378.469	2 Dokumen	347.997.393	2 Dokumen	347.997.393
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Perwali Tentang Tata Ruang	2 Dokumen	135.685.022	2 Dokumen	142.469.273	2 Dokumen	142.469.273
				Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan	2 Kali	90.897.395	2 kali	96.942.265	2 kali	102.942.265
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	220.232.229	12 Dokumen	231.243.840	12 Dokumen	243.243.840
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi TKPRD untuk izin investasi	12 Dokumen	141.135.556	12 Dokumen	143.192.334	12 Dokumen	147.192.334
				Sub Kegiatan Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	umlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	179.096.673	1 Dokumen	188.051.507	1 Dokumen	188.051.507

Sasaran Kota	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Target	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran					
						2024		2025		2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	20 Dokumen	394.060.270	25 Dokumen	448.763.283	28 Dokumen	460.763.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Insentif dan Disinsentif	10 Dokumen	50.820.000	13 Dokumen	58.361.000	15 Dokumen	63.361.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus Penertiban Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen	170.000.000	6 Dokumen	175.000.000	7 Dokumen	180.000.000
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rapat koordinasi penataan ruang daerah	6 Dokumen	292.512.570	6 Dokumen	307.138.199	6 Dokumen	307.138.199

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018-2023 serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dina Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja (Outcome)	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik	$\frac{\textbf{Jumlah infrastruktur Sumber Daya Air dalam kondisi baik tahun n}}{\textbf{Jumlah infrastruktur Sumber Daya Air tahun n}} \times 100$
	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan	$\frac{\textbf{Jumlah rumah tangga} \text{ pengguna aie bersih jaringan perpipaan } \textbf{tahun n}}{\textbf{Jumlah rumah tangga} \text{ sampai } \textbf{tahun n}} \times 100$
	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	$\frac{\textbf{Jumlah rumah tangga dapat mengakses Sanitasi Layak tahun n}}{\textbf{Jumlah rumah tangga} \text{ sampai } \textbf{tahun n}} \times 100$
	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	$\frac{\text{Panjang saluran drainase dalam kondisi baik samppai tahun n}}{\text{Total panjang Saluran Drainase sampai tahun n}} \times 100$
	Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap tahun n}}{\text{Panjang Jalan Kota Bima tahun n}} \times 100$

No.	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja (Outcome)	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai Peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah luas ruang sesuai peruntukannya tahun n}}{\text{Jumlah Luas Ruang Kota Bima tahun n}} \times 100$

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima pada awal tahun 2025 terdiri dari 2 (Dua) sasaran strategis dan 6 (Sebelas) indikator kinerja utama untuk Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan 1 ndikator Kinerja Utama pada urusan Penunjang. Anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini dilakukan melalui 10 (Sepuluh) program dengan total anggaran sebesar Rp. 81.536.107.764,00 -

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik	71,28
2.	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan	34,28
3.	Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	98,77
4.	Meningkatnya kelancaran Saluran Drainase	Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	64,21
5.	Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	62.85
6.	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai Peruntukannya	99,92

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima

No	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Anggaran 2025**
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.811.219.372,00
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.476.632.000,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.126.526.181,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	951.998.660,00
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	8.081.156.051,00

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran 2025
6	Program Penataan Bangunan Gedung	231.216.000,00
7	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	27.599.043.300,00
8	Program Penyelenggaraan Jalan	15.476.440.100,00
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	123.514.000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	658.362.100,00
	TOTAL	**81.536.107.764,00**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem akuntabilitas kinerja dimaksud merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntablitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan organisasi.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari penetapan kinerja tahun 2025 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2026. Rangkaian proses perencanaan strategis tahun 2025-2026, perencanaan kinerja tahun 2025, serta keseluruhan proses pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagai suatu sistem akuntabilitas kinerja, dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3.1

Proses Pengukuran dan Pelaporan Kinerja



Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, siklus kinerja dimulai dari perencanaan strategis, meliputi proses penetapan tujuan dan sasaran serta rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2026, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pada tahap selanjutnya dilaksanakan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang dimuat dalam penetapan kinerja.

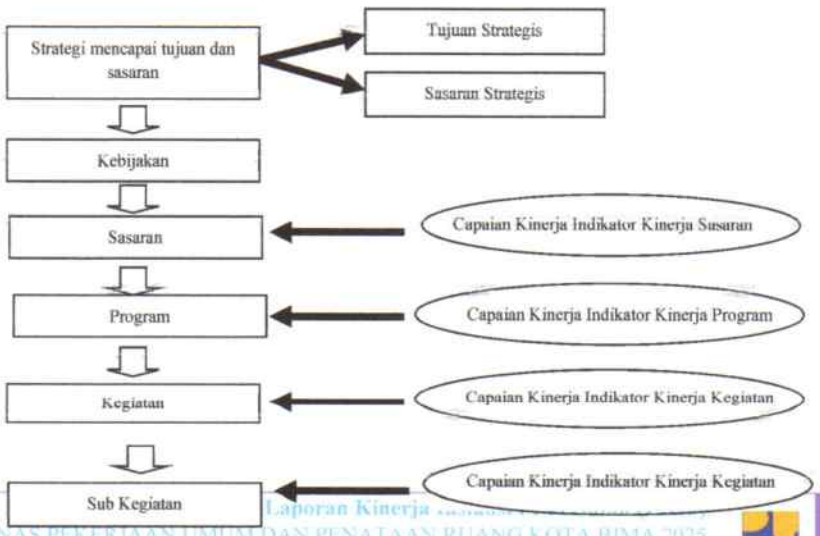
3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan tujuan dan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematik dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja tahunan. Pengukuran kinerja tahun 2025 dilaksanakan terhadap kinerja realisasi aktual penetapan kinerja tahun 2025 sebagai ikhtisar rencana kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025-2026. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian terhadap kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator keluaran (output), dan indikator hasil (outcome), sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya.

Gambar 3.2

Tahapan Pengukuran Kinerja



Di dalam pengukuran indikator kinerja dilakukan pemilahan atas produk yang sifatnya fisik lapangan dan terhadap produk non teknis yang berupa piranti lunak yang sifatnya pengaturan/pembinaan/perencanaan/ pengawasan. Adapun Tolak ukur pengukuran kinerja disepakati didasarkan pada indikator output dan outcome.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 < 100	Sangat Baik	
2.	76 < 90	Tinggi	
3.	66 < 75	Sedang	
4.	51 < 65	Rendah	
5.	< 50	Sangat Rendah	

Sumber Data : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan untuk membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

3.1.1.Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

1) Capaian Kinerja Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik

   Tolak Ukur Capaian Kinerja **"Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik"** melalui indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik.

Tabel 3.A.2.4 Target dan Realisasi Kinerja
"Meningkatnya luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis"
Tahun 2025

No	Indikator strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik	71,28 %	71,35%	100,10%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik teknis melalui

indikator Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik ditargetkan capaian kinerja mencapai 71,28 % atau peningkatan sebesar 0,27% sedangkan terealisasi sebesar 71,35% atau peningkatan sebesar 0,34%. Untuk capaian Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik melebihi targer yang ditetapkan mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase mencapai 100,10%. Har ini dikarenakan adanya paket dana Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di 3 lokasi yaitu DI Lela, DI Keci Ntobo, DI Sangga.

2) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kemantapan Infrastruktur Pekerjaan Umum.

1. Tolak ukur capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan"** indikator sasaran strategis yaitu Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan.

Tabel 3.A.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan Tahun 2025

No	Indikator Sasaran strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan	34,28 %	36,15 %	105,45%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Penanganan rumah tangga yang belum dapat mengakses air bersih Jaringan Perpipaan yang diwujudkan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Target untuk Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna air bersih/air minum sebesar 34,28% atau peningkatan sebesar 0,38%, sedangkan realisasi sebesar 36,15% atau peningkatan sebesar 2,25% sehingga persentase capaian sebesar 105,45%.

3) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak.

Tolak ukur capaian kinerja sasaran **"Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak"** indikator sasaran strategis yaitu Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak.

Tabel 3.A.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak Tahun 2025

No	Indikator Sasaran strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak.	98,77%	98,73 %	99,96%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Penanganan rumah tangga yang belum dapat mengakses Tangki Septik yang diwujudkan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Target untuk Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik sebesar 98,77% atau peningkatan sebesar 0,10%, sedangkan realisasi sebesar 08,73% atau peningkatan sebesar 0,06% sehingga Persentase capaian sebesar 99,96%.

4) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase

Tolak ukur capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase**" dengan indikator sasaran strategis Persentase Peningkatan Saluran drainase dalam kondisi baik.

Tabel 3.A.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase" Tahun 2025

No	Indikator strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Peningkatan Saluran Drainase dalam kondisi baik	64,21%	65,85%	102,56%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 meningkatnya kelancaran Saluran Drainase yang diwujudkan melalui "Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase" dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah dengan rincian sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan. Capaian kinerja Peningkatan Saluran Drainase dalam kondisi baik ditargetkan sebesar 64,21% atau Peningkatan sebesar 1,13% melalui indikator kinerja sasaran dan terealisasi sebesar 65,85% atau peningkatan sebesar 2,78%. Untuk capaian Persentase Peningkatan Saluran Drainase dalam kondisi baik telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan Persentase capaian 102,56%.

5) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Jumlah Kawasan Strategis Perkotaan yang tertata dan Meningkatnya Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang tertangani.

Tolak ukur capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang tertangani."** dengan indikator sasaran strategis Persentase Jumlah kawasan lingkungan permukinan yang tertangani.

Tabel 3.A.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Jumlah Kawasan Strategis Perkotaan yang tertata dan Meningkatnya Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang tertangani" Tahun 2025

No	Indikator strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Jumlah kawasan lingkungan permukinan yang tertangani	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Meningkatnya Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang tertangani ditargetkan sebesar 5 kawasan dibagi per Kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat,Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba, dan Kecamatan Rasane Timur, realisasisnya telah dilaksanakan tersebar di semua kawasan atau Kecamatan pada Kota Bima sehingga capaianya 100%.

6) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota

Tolak ukur capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota**" dengan indikator sasaran strategis Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap.

Tabel 3.A.2.3. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota" Tahun 2025

No	Indikator strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	62,85%	62,86%	100,01%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota terwujud melalui indikator Persentase peningkatan panjang jalan kota dalam kondisi mantap ditargetkan capaian kinerja mencapai 62,85% atau peningkatan sebesar 1,00% sedangkan realisasi menjadi sebesar 62,86% atau kenaikan sebesar 1,01% sehingga Persentase Capaian Tahun 2025 menjadi 100,01 %.

7) Capaian Kinerja Sasaran : Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya.

Tolak ukur capaian kinerja sasaran **Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya** melalui indikator sasaran strategis Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya.

Tabel 3.A.2.5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya" Tahun 2025

No	Indikator strategis	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai Peruntukannya	99,92%	99,86%	99,94%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2025 Meningkatnya ruang kota sesuai peruntukannnya melalui indikator sasaran startegis Persentase Peningkatan Luas Ruang sesuai peruntukannya ditargetkan capaian kinerja mencapai 99,92% atau peningkatan sebesar dan terealisasi sebesar 99,86% atau peningkatan sebesar 0,01% untuk peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya. Untuk Capaian Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya Kurang dari target porsentase capaian 99,86%, akan tetapi ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukannnya hanya tersisa 0,14%.

3.1.2.Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

1) Capaian Kinerja Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik.

Tolak ukur capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik"** dengan indikator strategis Persentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik.

Tabel 3.A.2.4. Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya luas area pertanian yang terlayani irigasi teknis Tahun 2023 s.d. 2025

No	Indikator strategis	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
1	Persentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik	70,55%	71,01%	71,35%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pesentase Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik terjadi peningkatan tiap tahunnya, capaian tahun 2025 juga terjadi peningkatan sebesar 71,35% dan mencapainya melebihi target.

2) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan

Tabel 3.A.2.1. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan" Tahun 2023 s.d. 2025

No	Indikator strategis	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
1	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan	- %	33,90%	36,15%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga Pengguna air bersih tiap tahun. Pada tahun 2023 persentase rumah tangga Pengguna air bersih sebesar -%, persentase rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan pada tahun 2024 menjadi sebesar 33,90%, sedangkan pada tahun 2025 ada kenaikan persentase rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan yaitu 2,25% atau Realisasi tahun 2025 sebesar 36,15%.

3) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak

Tabel 3.A.2.1. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak" Tahun 2023 s.d. 2025

No	Indikator strategis	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
1	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	93,56%	98,67%	98,73%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan persentase Persentase Peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik tiap tahun. Pada tahun 2023 Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 93,56%, Persentase Rumah Tangga dengan

akses sanitasi layak tahun 2024 mengalami kenaikan yang sifnifikan yaitu 5,114 % atau menjadi sebesar 98,67%, sedangkan pada tahun 2025 ada kenaikan persentase rumah tangga yang dapat mengakses Tangki Septik mengalami kenaikan tetapi tidak mencapai target yaitu 0,06 % atau Realisasi tahun 2025 sebesar 98,73%.

4) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase.
Tolak ukur capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase**" dengan indikator strategis Persentase Peningkatan Saluran Drainase dalam kondisi baik.

Tabel 3.A.2.2. Realisasi Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase" Tahun 2023 sampai dengan 2025

No	Indikator strategis	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2024
1	Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik	61,003%	63,079%	65,85%

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa ada kenaikan persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik tiap tahun. Pada tahun 2023 Persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik sebesar 61,003%, persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik pada tahun 2024 menjadi sebesar 63,079% sedangkan pada tahun 2025 ada kenaikan persentase Saluran Drainase dalam kondisi baik dan sifnifikan mencapai target yaitu sebesar 2,78% atau realisasi tahun 2025 sebesar 65,85%.

5) Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota
Tolak ukur capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota**" dengan indikator strategis Persentase Peningkatan Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap.

Tabel 3.A.2.3. Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas jaringan jalan Kota" Tahun 2023 s.d. 2025

No	Indikator strategis	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
1	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap	76,53%	61,85%	63,53%

Dari tabel di atas bahwa Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap terjadi capaian tahun 2023 sebesar 76,534%, pada tahun 2024 terjadi Penurunan menjadi 61,847%, sedangkan pada tahun 2025 terjadi

peningkatan sebesar 1,01% sehingga persentase panjang jalan dalamkondisi mantap sebesar 62,86%.

6) Capaian Kinerja Sasaran : Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya.

Tolak ukur capaian kinerja sasaran "**Meningkatnya ruang kota yang sesuai peruntukannya**" dengan indikator strategis Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya.

Tabel 3.A.2.4. Realisasi Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya Tahun 2023 s.d. 2025

No	Indikator strategis	Realisasi Kinerja		
		2023	2024	2025
1	Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya	96,887%	99,981 %	99,860 %

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya terjadi Kenaikan capaian dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3,09% atau capaian luas ruang yang sesuai peruntukannya sebesar 99,981%, pada tahun 2025

3.1.3.Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

No.	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Renstra
1.	Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum	Persentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	71,28 %	71,35%	100,10%
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih jaringan perpipaan	34,28 %	36,15 %	105,45%
		Persentase peningkatan rumah tangga yang dapat mengakses tangki septik	98,77%	98,73 %	99,96%
		Persentase peningkatan saluran drainase dalam kondisi baik	64,21%	65,85%	102,56%
		Persentase peningkatan panjang jalan kota dalam kondisi mantap	62,85%	63,53%	101,08%
2.	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	96,887%	99,981 %	99,860 %

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025 – 2029. Indikator – indikator sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indikator sasaran strategis Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum melalui indikator Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik ditargetkan capaian kinerja mencapai 71,28 % atau peningkatan sebesar 0,27% sedangkan terealisasi sebesar 71,35% atau peningkatan sebesar 0,34%. Untuk capaian Persentase Peningkatan Infrastruktur Sumber daya Air dalam Kondisi Baik melebihi targer yang ditetapkan mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase mencapai 100,10%. Har ini dikarenakan adanya paket dana Inpres Nomor 2 Tahun 2025 di 3 lokasi yaitu DI Lela, DI Keci Ntobo, DI Sangga.
2) Indikator sasaran strategis Meningkatnya kemantapan infrastruktur Pekerjaan Umum melalui Persentase rumah tangga pengguna air bersih jaringan perpipaan, berdasarkan data 2025 data rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan sejumlah 18.249 rumah tangga, sedangkan jumlah total rumah tangga kota bimas sebanyak 50.485 rumah tangga maka kenaikan persentase rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan yaitu 2,25% atau Realisasi tahun 2025 sebesar 36,15%. Sehingga Persentase Capaian sebesar 105,45%.
3) Indikator sasaran strategis Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak, berdasarkan data 2025 data rumah tangga pengguna air bersih Jaringan Perpipaan sejumlah 49.846 rumah tangga, sedangkan jumlah total rumah tangga kota bimas sebanyak 50.485 rumah tangga maka Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak awalnya sebesar 98,67% mengalami kenaikan hanya sebesar 0,06% atau Realisasi tahun 2025 sebesar 98,73%. Sehingga Persentase Capaian sebesar 99,96 %.
4) Indikator sasaran strategis Persentase Peningkatan Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Terjadi peningkatan sebesar 2,78%, nilai ini sudah diatas target yang ditetapkan untuk tahun 2025 yaitu 65,85%, sedangkan target yang ditetapkan untuk capaian Renstra 2025 sebesar 64,21 %. Sehingga Persentase Capaian Rentra 2025 – 2029 hanya mencapai 102,56%.
5) Tolak ukur capaian indikator sasaran strategis Jumlah kawasan lingkungan permukiman yang tertangani, Jika diukur dengan target Renstra 2025 - 2029 kegiatannya tersebar di lima Kecamatan Kota Bima, semua kegiatan dlikasanakan untuk penataan lingkungan yang lebih baik, sedangkan target

No	Program	Penunjang Keberhasilan	Penunjang Kegagalan
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1) Survey dan perencanaan yang matang menjadikan kegiatan berjalan lebih baik dan lancar 2) Sosialisasi yang terus dilakukan, sehingga tidak adanya miskomunikasi dimasyarakat tentang kegiatan yang dilakukan 3) Kerja tim yang baik serta terus berkoordinasi antara semua pihak yang terlibat	1) Masih kurangnya kemampuan teknis dari pelaksana menyebabkan terjadinya kesalahan 2) Masih kurang optimalnya pengelolaan Air Bersih sehingga apa yang direncanakan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Masyarakat
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1) Agar di rekrut kembali anggota yang sudah terus pengabdi selama 1-2 tahun karena di perlukan keahlian dan kecpaian jalan operasional IPLT & Armada Truk Tinja. 2) Komitmen untuk memberikan titik sumur baru dalam lingkup IPLT Oimbo 3) Komitmen untuk anggarkan dana tim revisi perwali No. 2 tahun 2024 tentang retribusi umum. 4) Komitmen untuk anggaran SPPD dalam daerah dan anggaran promosi kemasyarakat tentang kegiatan Layanan Lumpur Tinja Terdajwal (LLTT).	1) Kurang personil yang profesional dan ahli dalam pengoperasian armada & truk tinja dan IPLT. 2) Tidak adanya Anggaran revisi Perwali Nomor 2 Tahun 2024 dan promosi kemasyarakat tentang kegiatan Layanan Lumpur Tinja Terdajwal (LLTT)
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1) Dana pembangunan drainase selalu tersedia setiap tahun berdasarkan ususlan masyarakat. 2) Bentuk drainase beton lebih sering digunakan untuk umur pakai yang lebih lama.	1) Jiwa gotong royong di masyarakat yang telah hilang 2) Komitmen pemerintah mengatasi dampak banjir.
6	Program Penataan Bangunan Gedung	1) Pemahaman yang mapan terhadap aturan aturan terkait penyelenggaraan bangunan Gedung 2) Komitmen memberikan pelayanan yang tepat dan sesuai prosedur 3) Kerja sama tim (teamwork) yang baik.	1) Kurangnya kemampuan dan pengetahuan terhadap peraturan penyelenggaraan bangunan gedung

2. Melakukan pemuktahiran data baik pada bidang – bidang maupun UPT
3. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, terutama paket – paket pekerjaan yang memerlukan proses tender.
4. Memperketat pengawasan dan pendampingan dalam melaksanakan pekerjaan untuk menjaga agar kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknik dan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Komitmen manajemen, koordinasi antar unit atau satuan kerja berkaitan dengan masih terdapatnya bangunan gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SIF) bangunan Gedung.

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dapat dilihat pada teabel berikut ini.

Tabel. 3.A.7.1. Pagu anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
	URUSAN PEKERJAAN UMUM		81.536.107.764,00	69.662.232.696,00	85,44%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**10.811.219.372,00**	**9.923.430.396,00**	**91,79%**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**38.554.300,00**	**36.043.760,00**	**93,49%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.666.100,00	6.592.200,00	98,89%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.386.000,00	2.276.000,00	95,39%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.811.100,00	1.627.000,00	89,83%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.195.000,00	2.180.900,00	99,36%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.322.700,00	1.322.700,00	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.532.900,00	5.362.900,00	96,93%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.640.500,00	16.682.060,00	89,49%
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**8.896.907.244,00**	**8.207.570.311,00**	**92,25%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.489.716.244,00	7.827.696.311,00	92,20%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	385.167.000,00	361.093.000,00	93,75%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.593.000,00	7.460.000,00	77,77%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.030.000,00	1.025.000,00	50,49%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan	2.657.000,00	2.657.000,00	100,00%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
	Pemeriksaan	Tindak Lanjut Pemeriksaan			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.744.000,00	7.639.000,00	98,64%
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**18.464.400,00**	**18.464.400,00**	**100,00%**
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	18.464.400,00	18.464.400,00	100,00%
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**958.508.480,00**	**839.558.461,00**	**87,59%**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	308.735.880,00	279.039.400,00	90,38%
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105.605.600,00	100.109.600,00	94,80%
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	87.313.000,00	53.476.600,00	61,25%
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	456.854.000,00	406.932.861,00	89,07%
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**223.137.560,00**	**177.969.586,00**	**79,76%**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.653.000,00	8.259.000,00	95,45%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	185.551.400,00	149.255.586,00	80,44%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28.933.160,00	20.455.000,00	70,70%
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**675.647.388,00**	**643.823.878,00**	**95,29%**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	133.479.000,00	114.108.338,00	85,49%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	375.531.888,00	373.731.040,00	99,52%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34.433.000,00	34.265.000,00	99,51%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132.203.500,00	121.719.500,00	92,07%
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik** **Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjiR** **Bertambahnya infrastruktur penampung air dan pegendali banjir**	**2.476.632.000,00**	**1.898.094.074,00**	**76,64%**
7	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**• Panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir** **• Infrastruktur**	**2.069.556.000,00**	**1.496.651.124,00**	**72,32%**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
		penampung air dan pegendali banjir			
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	259.361.000,00	255.690.152,00	98,58%
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1.478.484.000,00	922.560.072,00	62,40%
5	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	233.054.000,00	227.598.900,00	97,66%
	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	575.000,00	575.000,00	100,00%
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	98.082.000,00	90.227.000,00	91,99%
8	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penambahan Pengembangan dan Pengelolaan serta Pemeliharaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi**	**407.076.000,00**	**401.442.950,00**	**98,62%**
1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	407.076.000,00	401.442.950,00	98,62%
III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Jumlah SR yang terpasang**	**15.126.526.181,00**	**13.023.004.058,00**	**86,09%**
9	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SR yang terpasang**	**15.126.526.181,00**	**13.023.004.058,00**	**86,09%**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	228.500.000,00	207.132.500,00	90,65%
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	11.561.841.270,00	10.263.547.553,00	88,77%
3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.881.221.000,00	1.561.278.902,00	82,99%
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	34.139.000,00	4.837.000,00	14,17%
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	119.419.000,00	103.869.000,00	86,98%
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1.301.405.911,00	882.339.103,00	67,80%
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang**	**951.998.660,00**	**874.667.028,00**	**91,88%**
10	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang**	**951.998.660,00**	**874.667.028,00**	**91,88%**
1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi	434.003.660,00	408.152.722,00	90,00%
2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	517.995.000,00	466.514.306,00	90,06%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Panjang jaringan drainase lingkungan dalam kondisi baik**	**8.081.156.051,00**	**7.363.125.592,00**	**91,11%**
11	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun**	**8.081.156.051,00**	**7.363.125.592,00**	**91,11%**
1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	8.081.156.051,00	7.363.125.592,00	91,11%
VI	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG**	**231.216.000,00**	**174.962.000,00**	**75,67%**
13	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG**	**231.216.000,00**	**174.962.000,00**	**75,67%**
1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	231.216.000,00	174.962.000,00	75,67%
VII	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Kawasan Strategis yang tertata** **Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani**	**27.599.043.300,00**	**22.913.769.989,00**	**83,02%**
14	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah**	**Jumlah Kawasan Strategis yang tertata**	**27.599.043.300,00**	**22.913.769.989,00**	**83,02%**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025
	Kabupaten/Kota	**Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani**			
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	27.599.043.300,00	22.913.769.989,00	83,02%
VIII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap**	**15.476.440.100,00**	**12.841.627.576,00**	**82,98%**
15	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap**	**15.476.440.100,00**	**12.841.627.576,00**	**82,98%**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	478.387.000,00	467.770.400,00	97,78%
2	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	142.278.500,00	141.942.000,00	99,76%
3	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	440.091.000,00	439.045.000,00	99,76%
4	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	3.708.137.500,00	2.857.312.295,00	77,06%
5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang DiRekonstruksi	5.899.055.500,00	4.948.730.959,00	83,89%
6	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	33.410.000,00	33.273.000,00	99,59%
7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4.254.111.000,00	3.444.176.654,00	80,96%

No.	Sasaran	Indikator Sasaran Strategis	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Persentase Capaian Renstra
		Persentase peningkatan saluran drainase dalam kondisi baik	64,21%	65,85%	102,56%
		Persentase peningkatan panjang jalan kota dalam kondisi mantap	62,85%	63,53%	101,08%
2.	Meningkatnya ruang kota yang sesuai Peruntukannya	Persentase peningkatan luas ruang yang sesuai peruntukannya	96,887%	99,981 %	99,860 %

3.2.2.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Capaian Kinerja Sekretaris

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%

b. Capaian Kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	Persentase infrastruktur sumber daya air dalam kondisi baik	71,28 %	71,35%	100,10%

d. Capaian Kinerja Kepala Bidang Cipta Karya

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Penduduk yang memperoleh akses air minum layak	Persentase rumah tangga pengguna air bersih jaringan perpipaan	34,28 %	36,15 %	105,45%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak	98,77%	98,73 %	99,96%

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatannya Kelancaran Saluran Drainase	Persentase peningkatan saluran drainase dalam kondisi baik	64,21%	65,85%	102,56%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatannya Bangunan yang diterbitkan PBG	Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG	200 Dokumen	167 Dokumen	83,50%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatkan kualitas infrastruktur skala lingkungan	Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani	5 Kawasan	5 Kawasan	100,00%

c. Capaian Kinerja Kepala Bidang Bina Marga

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Peningkatan Kondisi Mantap Jalan Kota	Persentase Peningkatan Kondisi Mantap Jalan Kota	62,85%	63,53%	101,08%

e. Capaian Kinerja Kepala Bidang Penataan Ruang

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Badan Usaha Konstruksi sesuai standar	Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi Komponen Jasa Konstruksi Sesuai Standar	7 Lembaga/ 28 Tenaga Konstruksi	15 Lembaga/ 20 Tenaga Konstruksi	142,86%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Persentase luas ruang yang sesuai peruntukannya	99,920%	99,860%	99,94%

3.2.1.3. Capaian Kinerja Eselon IV

a. Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	20 buah	20 buah	100%

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Kantor	yang terealisasi	Kantor yang Disediakan"			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"	250 Paket	250 Paket	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersediannya Kegiatan makan minum dalam satu tahun	Jumlah Laporan Kegiatan makan minum	12 Laporan	12 Laporan	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	Jumlah laporan konsultasi dan koordinasi luar daerah	100 Laporan	100 Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Realisasi Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Jumlah laporan surat yang terkirim selama 1 tahun	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terealisasi	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terealisasi	Jumlahlaporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	23 Unit	23 Unit	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara dengan baik	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89 Unit	89 Unit	100,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terealisasinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	2 Unit	2 Unit	100,00%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

b. Capaian Kinerja Kasubbag Perencanaan

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen RKA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00%

c. Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya Pembayaran Gaji	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang	74 Orang/	76 Orang/	100,00%

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
ASN	dan Tunjangan ASN pada satuan perangkat daerah	dibayarkan pada perangkat daerah	Bulan	Bulan	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifiJF Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifiJF Keuangan SKPD Bidang sekretariatan	Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/VerifiJF Keuangan SKPD Bidang sekretariatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersusunnya Laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

d. Capaian Kinerja Kepala UPT BPMKP

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Alat berat yang beroperasi dan berfungsi baik	Jumlah Alat berat yang beroperasi dan berfungsi baik	8 Unit	8 Unit	100%

e. Capaian Kinerja Sekretaris UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	100,00%

f. Capaian Kinerja Sekretaris UPT Pengelolaan Air Minum

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)

Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Terdatanya Jumlah kegiatan pemeliharaan SPAM Perkotaan	Jumlah kegiatan pemeliharaan SPAM Perkotaan	7 Unit	7 Unit	100,00%

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima sebesar Rp. 81.536.107.764, Penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sebesar 84,94% dari total anggaran yang dialokasikan dan terbagi dalam belanja Operasi dimana Pegawai terealisasi sebesar 92,20%, Belanja Barang/Jasa sebesar 92,05% dan belanja Modal 93,12%. Dengan rinci dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.B.2. Rekap Realisasi Belanja Dinas PUPR Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%
1	**Belanja Operasi**	**22.777.703.026**	**20.980.803.984**	**92,11%**
	1.1. Belanja Pegawai	8.489.716.243,97	7.827.696.311	92,20%
	1.2. Belanja Barang dan Jasa	14.287.986.782,03	13.153.107.673	92,05%
2	**Belanja Modal**	**58.758.404.738**	**48.267.249.092**	93,12%
	2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	450.652.000	429.805.350	95,37%
	2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.079.040.000	7.427.833.684	67,04%
	2.3 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	47.228.712.738	40.409.610.058	85,56%
Jumlah		**81.536.107.764**	**69.248.053.076**	**84,94%**

Tabel 3.B.3. Realisasi Kinerja dan Anggaran Per Sub Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEKERJAAN UMUM			81.536.107.764,00		69.662.232.696,00	85,44%		
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**10.811.219.372,00**	**100,000%**	**9.923.430.396,00**	**91,79%**	**100,00%**	**Efisien**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dakumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12 Dokumen**	**38.554.300,00**	**12 Dokumen**	**36.043.760,00**	**93,49%**	**100,00%**	**Efisien**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.666.100,00	2 Dokumen	6.592.200,00	98,89%	100,00%	Efisien
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.386.000,00	1 Dokumen	2.276.000,00	95,39%	100,00%	Efisien
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.811.100,00	1 Dokumen	1.627.000,00	89,83%	100,00%	Sangat Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.195.000,00	1 Dokumen	2.180.900,00	99,36%	100,00%	Efisien
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.322.700,00	1 Dokumen	1.322.700,00	100,00%	100,00%	Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	5.532.900,00	4 Laporan	5.362.900,00	96,93%	100,00%	Efisien
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	18.640.500,00	2 Laporan	16.682.060,00	89,49%	100,00%	Sangat Efisien
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**12 Dokumen**	**8.896.907.244,00**	**12 Dokumen**	**8.207.570.311,00**	**92,25%**	**100,00%**	**Efisien**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/ Bulan	8.489.716.244,00	76 Orang/ Bulan	7.827.696.311,00	92,20%	100,00%	Efisien
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	385.167.000,00	12 Dokumen	361.093.000,00	93,75%	100,00%	Efisien
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.593.000,00	12 Dokumen	7.460.000,00	77,77%	100,00%	Sangat Efisien
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.030.000,00	1 Laporan	1.025.000,00	50,49%	100,00%	Sangat Efisien
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.657.000,00	1 Dokumen	2.657.000,00	100,00%	100,00%	Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	7.744.000,00	12 Laporan	7.639.000,00	98,64%	100,00%	Efisien
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**12 Laporan**	**18.464.400,00**	**12 Laporan**	**18.464.400,00**	**100,00%**	**100,00%**	**Efisien**
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.464.400,00	12 Laporan	18.464.400,00	100,00%	100,00%	Efisien
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**112 Laporan**	**958.508.480,00**	**121 Laporan**	**839.558.461,00**	**87,59%**	**50,00%**	**Sangat Kurang Efisien**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	308.735.880,00	1 Paket	279.039.400,00	90,38%	100,00%	Sangat Efisien
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	105.605.600,00	1 Paket	100.109.600,00	94,80%	100,00%	Efisien
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	87.313.000,00	4 Laporan	53.476.600,00	61,25%	100,00%	Sangat Efisien
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	456.854.000,00	115 Laporan	406.932.861,00	89,07%	100,00%	Sangat Efisien
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20 Laporan**	**223.137.560,00**	**18 Laporan**	**177.969.586,00**	**79,76%**	**100,00%**	**Sangat Efisien**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	8.653.000,00	4 Laporan	8.259.000,00	95,45%	100,00%	Efisien
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	185.551.400,00	12 Laporan	149.255.586,00	80,44%	100,00%	Sangat Efisien
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	28.933.160,00	4 Laporan	20.455.000,00	70,70%	100,00%	Sangat Efisien
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**99 Unit**	**675.647.388,00**	**56 Unit**	**643.823.878,00**	**95,29%**	**100,00%**	**Efisien**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	133.479.000,00	16 Unit	114.108.338,00	85,49%	100,00%	Sangat Efisien
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	8 Unit	375.531.888,00	8 Unit	373.731.040,00	99,52%	100,00%	Efisien
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71 Unit	34.433.000,00	70 Unit	34.265.000,00	99,51%	100,00%	Efisien
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	132.203.500,00	2 Unit	121.719.500,00	92,07%	100,00%	Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Panjang Saluran Irigasi dalam kondisi baik** **Penambahan panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjiR** **Bertambahnya infrastruktur penampung air dan pegendali banjir**	**41.913 Meter** **250 Meter** **0 Unit**	**2.476.632.000,00**	**42,947 Km** **0,387 Km** **0 Unit**	**1.898.094.074,00**	**76,64%**	**120,62%**	**Sangat Efisien**
7	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**• Panjang tebing sungai/saluran pembuang yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir** **• Infrastruktur penampung air dan pegendali banjir**	**0,125 Km** **0 Titik lokasi**	**2.069.556.000,00**	**0,387 Km** **0 Titik lokasi**	**1.496.651.124,00**	**72,32%**	**132,21%**	**Sangat Efisien**
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 dokumen	259.361.000,00	5 dokumen	255.690.152,00	98,58%	100,00%	Efisien
2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,125 Km	1.478.484.000,00	0,387 Km	922.560.072,00	62,40%	309,60%	Sangat Efisien
5	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,350 Km	233.054.000,00	0,180 Km	227.598.900,00	97,66%	51,43%	Sangat Kurang Efisien
	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit	575.000,00	0 Unit	575.000,00	100,00%	100,00%	Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	98.082.000,00	1 Lembaga	90.227.000,00	91,99%	100,00%	Efisien
8	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Penambahan Pengembangan dan Pengelolaan serta Pemeliharaan Sistem Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi**	**1,350 Km**	**407.076.000,00**	**1,4702 Km**	**401.442.950,00**	**98,62%**	**109,04%**	**Sangat Efisien**
1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,350 Km	407.076.000,00	1,4702 Km	401.442.950,00	98,62%	109,037%	Sangat Efisien
III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Jumlah SR yang terpasang**	**1175 SR**	**15.126.526.181,00**	**1135 SR**	**13.023.004.058,00**	**86,09%**	**96,60%**	**Sangat Efisien**
9	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah SR yang terpasang**	**1175 SR**	**15.126.526.181,00**	**1135 SR**	**13.023.004.058,00**	**86,09%**	**96,60%**	**Sangat Efisien**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	228.500.000,00	1 Dokumen	207.132.500,00	90,65%	100,00%	Sangat Efisien
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	7 Liter/ Detik (575 SR)	11.561.841.270,00	24 Liter/ Detik (779 SR)	10.263.547.553,00	88,77%	342,86%	Sangat Efisien
3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem	600 SR	1.881.221.000,00	356 SR	1.561.278.902,00	82,99%	59,33%	Sangat Kurang Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan							
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	70 Orang	34.139.000,00	35 Orang	4.837.000,00	14,17%	50,00%	Sangat Efisien
5	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	7 Lembaga	119.419.000,00	7 Lembaga	103.869.000,00	86,98%	100,00%	Sangat Efisien
6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	8 Unit	1.301.405.911,00	8 Unit	882.339.103,00	67,80%	100,00%	Sangat Efisien
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang**	**37 Rumah Tangga**	**951.998.660,00**	**31 Rumah Tangga**	**874.667.028,00**	**91,88%**	**83,78%**	**Kurang Efisien**
10	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tangki Septik Individual yang terpasang**	**37 Rumah Tangga**	**951.998.660,00**	**31 Rumah Tangga**	**874.667.028,00**	**91,88%**	**83,78%**	**Kurang Efisien**
1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Dioptimalisasi	1 Unit	434.003.660,00	1 Unit	408.152.722,00	90,00%	100,00%	Sangat Efisien
2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	37 Rumah Tangga	517.995.000,00	31 Rumah Tangga	466.514.306,00	90,06%	83,78%	Kurang Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	*PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE*	*Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik*	*64,21%*				*#DIV/0!*		Sangat Efisien
V	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Panjang jaringan drainase lingkungan dalam kondisi baik**	**2500 meter**	**8.081.156.051,00**	**6879 Meter**	**7.363.125.592,00**	**91,11%**	**275,16%**	**Sangat Efisien**
11	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun**	**2500 meter**	**8.081.156.051,00**	**6879 Meter**	**7.363.125.592,00**	**91,11%**	**275,16%**	**Sangat Efisien**
1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	2500 meter	8.081.156.051,00	6879 Meter	7.363.125.592,00	91,11%	275,16%	Sangat Efisien
VI	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG**	**200 Bangunan**	**231.216.000,00**	**167 Dokumen**	**174.962.000,00**	**75,67%**	**83,50%**	**Sangat Efisien**
13	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Bangunan yang diterbitkan PBG**	**200 Bangunan**	**231.216.000,00**	**167 Dokumen**	**174.962.000,00**	**75,67%**	**83,50%**	**Sangat Efisien**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli(TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200 Dokumen	231.216.000,00	167 Dokumen	174.962.000,00	75,67%	83,50%	Sangat Efisien
VII	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Kawasan Strategis yang tertata** **Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani**	**2 Kawasan** **5 Kawasan (Kecamatan)**	**27.599.043.300,00**	**2 Kawasan** **5 Kawasan (Kecamatan)**	**22.913.769.989,00**	**83,02%**	**100,00 %** **100,00 %**	**Sangat Efisien**
14	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kawasan Strategis yang tertata** **Jumlah kawasan lingkungan yang tertangani**	**2 Kawasan** **5 Kawasan (Kecamatan)**	**27.599.043.300,00**	**2 Kawasan** **5 Kawasan (Kecamatan)**	**22.913.769.989,00**	**83,02%**	**100,00 %** **100,00 %**	**Sangat Efisien**
1	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan 5 Kawasan (Kecamatan)	27.599.043.300,00	2 Kawasan 5 Kawasan (Kecamatan)	22.913.769.989,00	83,02%	100,00 % 100,00 %	Sangat Efisien
VIII	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap**	**2,00 km**	**15.476.440.100,00**	**5,00 Km**	**12.841.627.576,00**	**82,98%**	**172,41%**	**Sangat Efisien**

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Penambahan Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap**	**2,00 km**	**15.476.440.100,00**	**5,00 Km**	**12.841.627.576,00**	**82,98%**	**172,41%**	**Sangat Efisien**
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	4 Dokumen	478.387.000,00	4 Dokumen	467.770.400,00	97,78%	100,00%	Efisien
2	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	2 Dokumen	142.278.500,00	2 Dokumen	141.942.000,00	99,76%	100,00%	Efisien
3	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	297,099 Km	440.091.000,00	297,099 Km	439.045.000,00	99,76%	100,00%	Efisien
4	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	4,00 Km	3.708.137.500,00	4,43 Km	2.857.312.295,00	77,06%	110,75%	Sangat Efisien
5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang DiRekonstruksi	2,3 km	5.899.055.500,00	3,1 Km	4.948.730.959,00	83,89%	134,78%	Sangat Efisien
6	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	0 Jembatan	33.410.000,00	0 Jembatan	33.273.000,00	99,59%	0,00%	Sangat Kurang Efisien
7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1,40 km	4.254.111.000,00	1,67 Km	3.444.176.654,00	80,96%	119,29%	Sangat Efisien
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,70 km	520.969.600,00	2,7 km	509.377.268,00	97,77%	25,93%	Sangat Kurang Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Jumlah Pembinaan Jasa Konstruksi Komponen Jasa Konstruksi Sesuai Standar**	**7 Lembaga/ 28 Tenaga Konstruksi**	**123.514.000,00**	**15 Lembaga/ 20 Tenaga Konstruksi**	**115.260.125,00**	**93,32%**	**142,86%**	**Sangat Efisien**
16	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Badan Usaha/Tenaga Konstruksi sesuai standar**	**7 Lembaga/ 28 Tenaga Konstruksi**	**75.669.000,00**	**15 Lembaga/ 20 Tenaga Konstruksi**	**72.862.125,00**	**96,29%**	**142,86%**	**Sangat Efisien**
1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga/ 28 Tenaga Konstruksi	75.669.000,00	15 Lembaga/ 20 Tenaga Konstruksi	72.862.125,00	96,29%	142,86%	Sangat Efisien
17	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota**	**1 Dokumen**	**47.845.000,00**	**1 Dokumen**	**42.398.000,00**	**88,62%**	**100,00%**	**Sangat Efisien**
1	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	47.845.000,00	1 Dokumen	42.398.000,00	88,62%	100,00%	Sangat Efisien
X	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang**	**5 Dokumen**	**658.362.100,00**	**5 Dokumen**	**534.291.858,00**	**81,15%**	**100,00%**	**Sangat Efisien**
18	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Peyelenggaraan Penataan Ruang**	**5 Dokumen**	**415.792.600,00**	**5 Dokumen**	**319.849.643,00**	**76,93%**	**100,00%**	**Sangat Efisien**
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	278.198.000,00	3 Dokumen	207.278.143,00	74,51%	100,00%	Sangat Efisien
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Perwali Tentang Sepadan Jalan)	1 Dokumen	58.748.800,00	1 Dokumen	35.129.700,00	59,80%	100,00%	Sangat Efisien

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2025	Anggaran 2025	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran (%) 2025	Capaian Kinerja (%) 2025	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Sosialisasi Peraturan Perundangundangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	1 Laporan	78.845.800,00	1 Laporan	77.441.800,00	98,22%	100,00%	Efisien
19	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**65.817.000,00**	**1 Dokumen**	**59.045.215,00**	**89,71%**	**100,00%**	**Sangat Efisien**
1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	65.817.000,00	1 Dokumen	59.045.215,00	89,71%	100,00%	Sangat Efisien
20	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**6 Dokumen**	**176.752.500,00**	**15 Dokumen**	**155.397.000,00**	**87,92%**	**250,00%**	**Sangat Efisien**
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	176.752.500,00	15 Dokumen	155.397.000,00	87,92%	250,00%	Sangat Efisien
	TOTAL			**81.536.107.764,00**		**69.662.232.696,00**	**84,94%**	**131,79%**	Sangat Efisien

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K I P)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur Renstra dan Renja PD mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program / kegiatan / kebijakan pada tahun berjalan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP BPKAD Kota Bima dimasa mendatang.

Kota Bima, Februari 2026
Kepala BPKAD Kota Bima,

Siswadi, S.Si., M.Ak
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810925 200604 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

Bab I Pendahuluan..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi 3

1.3 Aspek Strategis Organisasi dan Isu-Isu Strategis 11

1.4 Sistematika Penulisan 12

Bab II Perencanaan Kinerja 14

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kota Bima 14

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 23

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024 26

Bab III Akuntabilitas Kinerja 31

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31

3.2 Realisasi Anggaran..... 45

Bab IV Penutup 56

4.1 Kesimpulan 56

4.2 Saran 58

Daftar Tabel

		Hal.
Tabel 1.1	Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kota Bima Berdasarkan Eselon, Golongan dan Jenjang Pendidikan	9
Tabel 1.2	Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bima	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target	16
Tabel 2.2	Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima	18
Tabel 2.3	Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima	19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	24
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja (Perubahan)Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima	25
Tabel 2.6	Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025	27
Tabel 2.7	Anggaran Belanja Barang dan Jasa per Sasaran Strategis	28
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Tahun 2025	28
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2025	32
Tabel 3.2	Perbandingan Data Tahun 2023, 2024, dan 2025	33
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TA 2025	38
Tabel 3.4	Kegiatan yang Efektif	42
Tabel 3.5	Kegiatan yang Kurang Efektif	44
Tabel 3.6	Rekapitulasi Belanja BPKAD Kota Bima Tahun 2025	45
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2024 dan 2025	46
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima Tahun 2025	52

Daftar Gambar

		Hal.
Gambar 2.1	Struktur Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima	6

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang diatur dalam pasal 3 mengatur asas umum penyelenggaraan negara/daerah meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Amanah yang terkandung dalam Undang-undang tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk perwujudan dari Kinerja dinas sesuai dengan kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan menggunakan pengukuran kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) selanjutnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja (TAPKIN) dipergunakan sebagai manivestasi pengukuran pencapaian kinerja tahunan yang tergambar dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah (PD). Dalam rencana kinerja tersebut disusun Rencana Kinerja Tahunan (Renja) yang merupakan kompilasi keseluruhan program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kesemua ini sebagai langkah awal dalam pengukuran capaian visi dan misi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhadap pencapaian sasaran visi dan misi akhir atau target pencapaian 5 (lima) tahun dan sebagai penjabaran dan operasionalisasi dari Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam laporan tersebut digambarkan mengenai peranan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun penyelenggaraaan urusan pemerintahan di daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima terbentuk pada tahun 2016 dengan dasar hukum yaitu

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88 Tahun 2016);

4. Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 318);

I. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima adalah :

I. Struktur Organisasi

a. Kepala Badan.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendataan;
2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penagihan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penagihan;
2. Sub Bidang Pelayanan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran.

f. Bidang Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian;
2. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Akuntansi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi; dan
2. Sub Bidang Pelaporan.

h. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

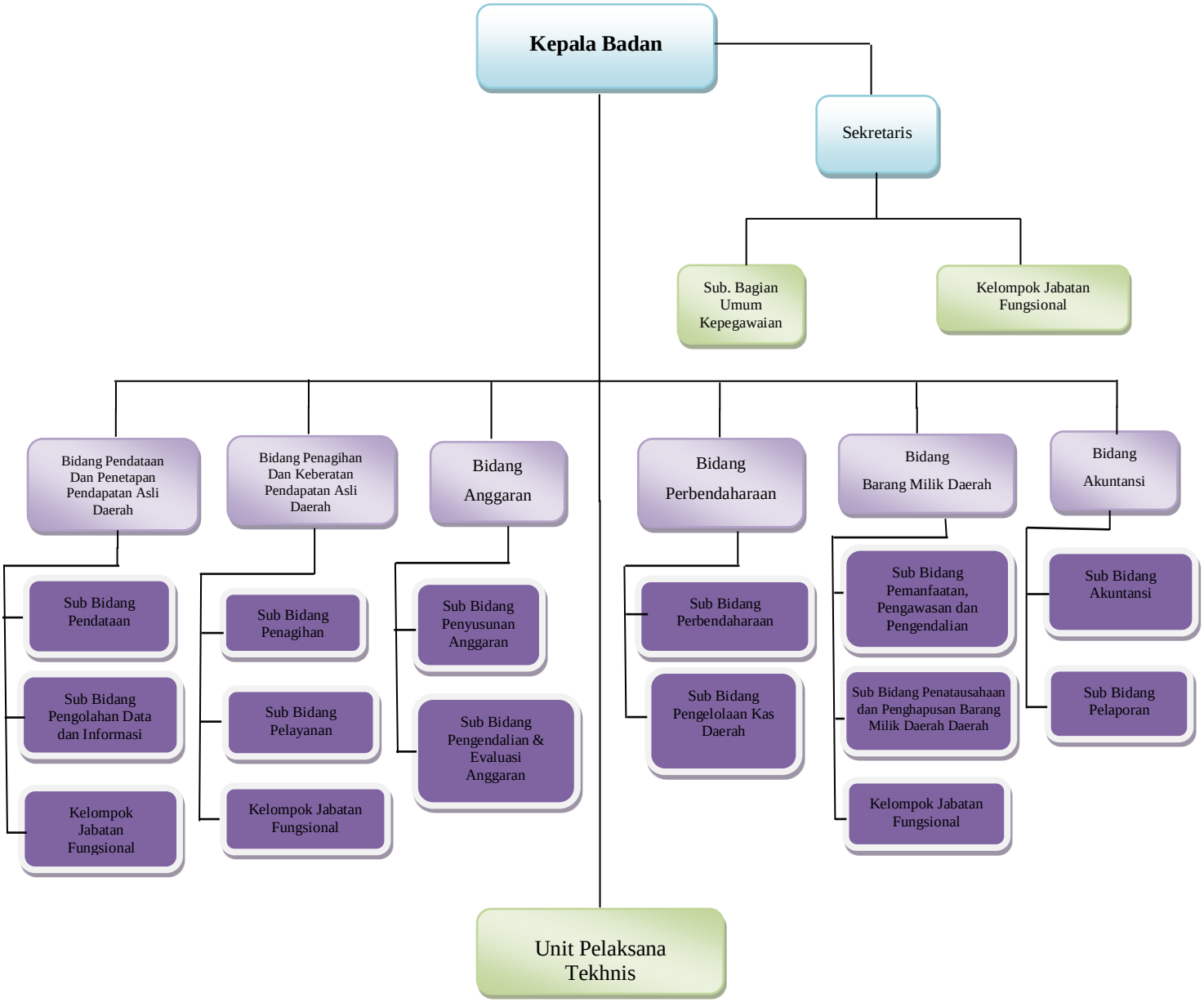
1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

i. Unit Pelaksana Teknis; dan

(Struktur Organisasi terlampir)

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BIMA



II. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Republik Indonesia Nomor : Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai tindak lanjut Undang-Undang tersebut diatas ditetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terahir dengan perwali nomor 92 Tahun 2021 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 Tugas Pokok Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan daerah.

b. Fungsi :

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2016 tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
2. Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi daerah serta kebijakan Walikota;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan;
5. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang keuangan daerah;
6. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
8. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di bidang keuangan daerah;
9. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta Pengelolaan sarana dan prasarana perangkat Daerah;
10. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
11. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
12. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT);
13. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan daerah;
14. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia pada BPKAD Kota Bima tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 1.1

Rekapitulasi Pegawai BPKAD Kota Bima Berdasarkan Eselon, Golongan dan Jenjang Pendidikan

NO	JABATAN/GOLONGAN	JMLH	PENDIDIKAN TERAKHIR				JMLH
			SMA SEDERAJAT	D- III	S- 1/D-IV	S- 2	
A	**STRUKTUR (ESELON)**						
	I A						
	II A						
	II B	1			1	1	1
	III A	1			1		1
	III B	6			4	2	6
	IV A	13			8	5	13
	IV B						
		21			14	7	21
B	**FUNGSIONAL KHUSUS**						
	GOL. I						
	GOL. II						
	GOL. III	6			6		6
	GOL. IV						
	GOL. IV/a s.d IV/c						
	GOL. IV/d s.d IV/e						
		6			6		6
C	**FUNGSIONAL UMUM**						
	GOL. I						
	GOL. II	3	1	2			3
	GOL. III	48	2	5	39	1	47
	GOL. IV	2				2	2
		53	3	7	39	3	52
D	**PPPK**						
	GREAT IX	12			12		12
	GREAT VII	2		2			2
	GREAT V	5	5				5
		19	5	2	12		19
	TOTAL	**98**	**8**	**9**	**71**	**10**	**98**

IV. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bima memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung, dan saat ini BPKAD Kota Bima telah memiliki gedung kantor sendiri. Sehingga koordinasi antar ke-6 bidang yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang barang milik daerah (BMD), bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan serta Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan semakin mudah dan lancar.

V. Penganggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bima tahun 2025, BPKAD Kota Bima pada tahun anggaran 2025 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp 22.232.535.458,- (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 19.113.896.553,- atau sebesar 85,97%.

Tabel 1.2
Pagu dan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Bima

No	Uraian	Pagu	Realisasi
1	**Belanja Operasi**	**19.286.611.618,00**	**17.400.979.625,00**
	a. Belanja Pegawai	11.052.275.210,00	10.050.523.723,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.234.336.408,00	7.350.455.902,00
2	**Belanja Modal**	**898.221.000,00**	**836.916.928,00**
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	798.221.000,00	737.180.000,00
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	99.736.928,00
3	**Belanja Tidak Terduga**	**2.047.702.840,00**	**876.000.000,00**
	a. Belanja Tidak Terduga	2.047.702.840,00	876.000.000,00

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah kepada masyarakat tiga tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kota Bima. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bima dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang dimasyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

Isu-isu strategis/isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah:

a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029, sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi pembangunan Kota Bima.

   Berdasarkan analisis kondisi PD, analisis potensi dan permasalahan/isu strategis yang dihadapi BPKAD Kota Bima, hal ini dibuktikan dengan hal-hal yang terurai yaitu sebagai berikut:

   1) Regulasi dari Pemerintah Pusat yang cepat berubah sehingga mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang begitu dinamis, misalnya pengalihan PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2019, Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 71 Tahun 2021 Tentang Penatausahaan BMD;

2) Beberapa PD melaksanakan pengajuan penghapusan BMD menjelang triwulan ke III/IV sehingga berdampak pada proses usulan tindak lanjut Penghapusan BMD;
3) Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan SIMDA BPKP, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
4) Belum stabilnya iklim ekonomi, sehingga mempengaruhi pemanfaatan asset Pemerintah Daerah Kota Bima, dan pastinya akan mempengaruhi PAD Pemerintah Kota Bima;
5) Masih banyaknya temuan dari hasil LHP yang belum terselesaikan tindaklanjutnya.

b. Adanya Pembentukan Regional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Peraturan Keuangan yang baru secara terpusat sehingga butuh waktu melakukan penyesuaian dengan Sistem Informasi Keuangan yang baru.
c. Belum Efektifnya Operasional Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang masih terkendala Pada Modul Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah.
d. Penyederhanaan Struktur Organisasi beberapa Jabatan Struktural disederhanakan menjadi jabatan fungsional tertentu, namun belum diiringi dengan persiapan payung hukum pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dimaksud selaku Koordinator, Sub Koordinator yang diampu sebelumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Gambaran Umum Organisasi
1.3. Aspek Strategis Organisasi dan Isu-Isu Strategis
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kota Bima

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah BPKAD Kota Bima

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2025 – 2029 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RKPD Kota Bima Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran periode kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 yang memiliki visi ***Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri Pada Tahun 2028*** Dalam tahap kelima ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang maju dan mandiri, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan

seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut :

Kota Bima diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Sejahtera artinya suatu kondisi dimana taraf hidup massyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadailan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Upaya pembangunan ekonomi Kota Bima kedepan harus berbasis pada sector potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis pada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian

masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bima. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung antar daerah, kebutuhan infrastruktur pendukung perdagarangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Bima. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan. Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Berkaitan dengan Tujuan dan program kerja Walikota tahun 2025- 2029, untuk lima tahun ke depan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Tujuan Walikota ke 3 (tiga) yaitu **"Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima*".***

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang terkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan;
2. Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Tujuan :	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2. Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah		
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja Utama**	**Target**	**Program**
1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	8,15 %	3.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sumber : Hasil Review oleh tim Sakip

2.1.1 Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu Tahun 2025–2029 yakni ***Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima serta Meningkatkan Kemandirian keuangan Daerah.***

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota masa transisi yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045

	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2029
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan reformasi birokrasi.	1.1. Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 1.2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani 1.3. Penataan dan penyederhanaan birokrasi berbasis outcome 1.4. Penguatan kinerja perencanaan pembangunan 1.5. Penguatan kinerja penganggaran dan pengelolaan
	2. Meningkatnya Penerimaan PAD	1.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD 2.Peningkatan kualitas SDM	1.1.Penguatan pemungutan pajak dan retribusi daerah 1.2.Peningkatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis,

Visi : Mewujudkan Kota Bima Maju, Berkelanjutan dan Religius Tahun 2045

	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Tahun 2025-2029
			fungsional, serta sertifikasi di bidang pengelolaan Pendapatan
		3. Peningkatan koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan	1.3. Sinergi pengelolaan pendapatan antar perangkat daerah

2.1.2. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya Penerimaan PAD.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Tahunan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	4	4	4	4	4	4
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	%	8,15	8,48	8,48	9,30	9,71	9,81

i. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap PD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima seperti terlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel. 2.4
Indikator Kinerja Utama BPKAD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Opini BPK terhadap LKPD	WTP	-	-
		Keterangan : Cara Pengukuran % Target = *(Jumlah PD yang menyajikan laporan keuangan secara wajar)/(Jumlah PD yang menyajikan Laporan Keuangan) x 100%*			
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	2 Rasio PAD .	8,15%	9,11%	1,12%
		Keterangan : Cara Pengukuran Rasio PAD = *(Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Total Pendapatan Daerah) x 100%* Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar 9,11%, Artinya PAD hanya menyumbang **9,11%** dari total pendapatan daerah → tingkat kemandirian **sangat rendah** (masih sangat tergantung dana transfer pusat)			

Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebesar 9,11%. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong sangat rendah, karena sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat maupun sumber lainnya di luar PAD. Dengan demikian, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Namun demikian, Rasio Efektifitas PAD $\frac{48.319.351.907,16}{52.341.139.965,00}$ X 100 %

realisasi PAD mencapai 92,32% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini termasuk dalam kategori efektif karena berada pada rentang 90–100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu merealisasikan target PAD dengan baik, meskipun secara nominal kontribusinya terhadap total pendapatan masih kecil. Selain itu, efektivitas total pendapatan daerah juga mencapai 93,54%, yang berarti realisasi pendapatan secara keseluruhan telah berjalan efektif sesuai dengan perencanaan anggaran.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemungutan PAD sudah efektif dari sisi pencapaian target, namun tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah sehingga diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan formula indikator tujuan dihitung dengan presentase kinerja suatu perangkat daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) PD.
3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan 2 indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh 2 indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

No	Sasaran Strategis /Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
A.	**Sasaran Strategis**		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
2.	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	8,15 %
B.	**Sasaran Program**		
1.1	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan SKPD	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	100%
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset PD	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100%
2.1	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	8,15%

Pada tahun 2025 BPKAD melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan indikator kinerja pada sasaran pendapatan pajak daerah meningkat, karena ada

peningkatan pendapatan dari beberapa objek pajak yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun ini capaian pendapatan pajak daerah ada yang melebihi target yang telah ditetapkan, Adapun objek pajak yang mencapai lebih dari 100 % adalah Pajak Air Tanah, dan PBJT. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2025
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima

No	Sasaran Strategis /Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
A.	**Sasaran Strategis**		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
2.	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	8,15 %
B.	**Sasaran Program**		
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD	Meningkatnya Pengendalian Tata Kelola Keuangan PD	100%
1.2	Meningkatnya Sistem Manajemen Aset	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100%
2.1	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	100%
2.2	Meningkatnya Efektifitas Penagihan Pajak Daerah	Persentase Objek Pajak Daerah Yang Bisa di Tagih tiap tahunnya	81%
	Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pajak Daerah	35.665.034.478,00

Program	Anggaran		Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.652.295.065		
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.930.793.400		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	842.076.089		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.759.668.064		
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.047.702.840		

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima mempunyai 3 program dan 6 kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sesuai yang tercantum pada tabel 2.7

Tabel 2.7
Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** 1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 8. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/

			Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengelolaan Dana Darurat dan

			Mendesak
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Pengelolaan Barang Milik Daerah** 1. Penyusunan Standar Harga 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Inventarisasi Barang Milik Daerah 6. Pengamanan Barang Milik Daerah 7. Penilaian Barang Milik Daerah 8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
4.	Meningkatnya Penerimaan PAD	Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah** 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan

			Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 6. Penetapan Wajib Pajak Daerah 7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 9. Penagihan Pajak Daerah 10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Bima melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.8

Target Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2025

Uraian	Target	Prosentase
Belanja Operasi	19.286.611.618,00	86,75%
Belanja Modal	898.221.000,00	4,04%
Belanja Tidak terduga	6.047.702.840,00	9,21%
Jumlah	26.232.535.458,00	100%

Sumber : DPPA BPKAD Tahun 2025

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2025 BPKAD yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut

Tabel 2.9
Anggaran Belanja Barang dan Jasa per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5.632.592.255,00	68,40%	Total belanja barang dan jasa sebesar Rp. 8.234.336.408,00
2.	Meningkatnya sistem manajemen asset	842.076.089,00	10,23%	
3.	Meningkatnya Penerimaan PAD	1.759.668.064,00	21,37%	

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima menampung 4 (empat) program dan 13 (tiga belas) kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.8
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Nama Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Ket.
I	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.179.250	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.692.777.585	
		3. Administrasi Umum	535.420.079	

		Perangkat Daerah		
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah	100.758.900	
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.136.950	
		6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.719.000	
II	Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	645.184.700	
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	264.517.000	
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	173.836.350	
		4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.074.150.000	
		5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	7.330.000	
III	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	350.857.350	

IV	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	978.269.250	

Berdasarkan tabel di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima tahun 2025 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur RENSTRA mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA) berupa: *input, output, dan outcome.* Pengukuran tingkat capaian kinerja BPKAD tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya dan juga mengukur seberapa efektifnya kegiatan – kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Perbandingan antar target dan realisasi kinerja tahun ini.

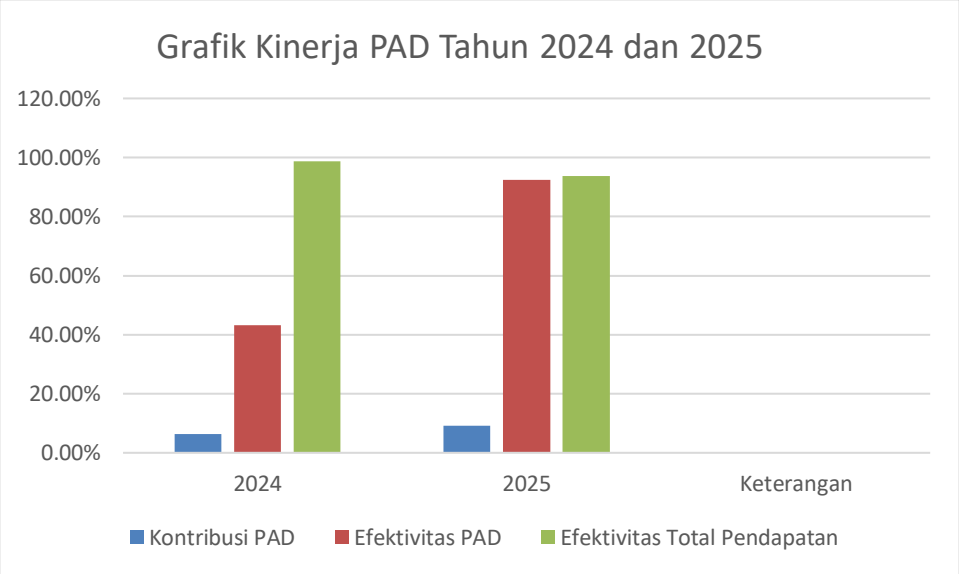
Perbandingan antara target dan realisasi dimaksudkan untuk melihat target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) dengan realisasi yang dihasilkan pada tahun tersebut seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI		% CAPAIAN TARGET
				2024	2025	
1	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	1 Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP		
2	Meningkatnya Penerimaan PAD	2 Rasio PAD	8,15%	6,34%	9,11%	111,78%

Perbandingan 2024 dan 2025

Indikator	2024	2025	Keterangan
Kontribusi PAD	6,34%	9,11%	Meningkat
Efektivitas PAD	43,20%	92,32%	Meningkat signifikan
Efektivitas Total Pendapatan	98,70%	93,64%	Sedikit menurun



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada kinerja PAD tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Rasio kontribusi PAD mengalami kenaikan dari 6,34% pada tahun 2024 menjadi 9,11% pada tahun 2025. Meskipun masih tergolong sangat rendah, peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah.

Dari sisi efektivitas PAD, terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, efektivitas PAD hanya sebesar 43,20% yang tergolong tidak efektif. Namun pada tahun 2025 meningkat menjadi 92,32% dan masuk dalam kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memperbaiki strategi pemungutan dan pengelolaan PAD sehingga realisasi lebih mendekati target yang ditetapkan.

Sementara itu, efektivitas total pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan dari 98,70% pada tahun 2024 menjadi 93,64% pada tahun 2025. Meskipun menurun, capaian tersebut masih berada dalam kategori efektif.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, khususnya dalam aspek efektivitas PAD. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil.

2. Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya bisa digambarkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Perbandingan data tahun 2023, 2024 dan 2025

NO	Indikator Kinerja	Sasaran Kinerja								
		Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2	Rasio PAD	6,1%	6,65%	109,02%	6,4%	6,34%	99,06%	8,15%	9,11%	111,78%

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang sangat baik dengan ditandai terjadinya capaian target PAD yang terus meningkat serta tata kelola keuangan yang baik sehingga 10 tahun berturut-turut mendapatkan Opini WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan NTB diperoleh sampai tahun anggaran 2024, sedangkan tahun 2025 laporan keuangan pemerintah kota bima dalam proses pemeriksaan oleh Tim BPK.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Terhadap realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, BPKAD tidak dapat memuatnya karena tidak menemukan standar nasional yang berhubungan dengan Kinerja BPKAD.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Berikut ini adalah analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja BPKAD Kota Bima pada tahun 2025 :

1. <u>Indikator Kinerja Utama 1 : Opini BPK terhadap LKPD</u>

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang sesuai SAP, Kepala BPKAD sebagai kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Menyusun Laporan Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keungan Daerah.

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis 1 harus dilakukan Rekonsiliasi bersama seluruh perangkat daerah sehingga Laporan Keuangan bisa disusun sesuai standar yang ada dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- Faktor Pendukung:
  - Kinerja ASN Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Bidang BMD serta perangkat daerah yang semakin membaik;
  - Sarana dan prasarana memadai;
  - Penggunaan Aplikasi SIPD dalam penatausahaan keuangan;
  - Adanya Juklak dan Juknis baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi;
  - Tahapan Penyusunan APBD sesuai dengan regulasi yang berlaku;
  - Sistem Aplikasi yang berbasis Website mempercepat penyajian data laporan keuangan;
  - Adanya kegiatan bimbingan teknis tentang SIMDA BMD oleh Tim BPKP perwakilan NTB;
  - Sosialisasi langsung yang dilakukan oleh admin SIMDA BMD pada bagian asset BPKAD Kota Bima pada saat melakukan rekon asset;
  - Adanya sosialisasi langsung oleh Bidang BMD BPKAD Kota Bima terkait proses penatausahaan dan Pemanfaatan BMD;

- Adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penyelesaian penyerahan asset P3D dari Pemerintah Kabupaten Bima serta koordinasi terkait percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian asset bermasalah;
- Adanya Aplikasi SIMPERS yang digunakan untuk mempermudah dalam hal penatausahaan barang pakai habis sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan Aplikasi SIMPERS diinisiasi oleh ASN Bidang BMD BPKAD Kota Bima;
- Tahun 2021 sampai dengan sekarang ada lagi Aplikasi Sion yang juga diinisiasi oleh ASN Bidang BMD BPKAD Kota Bima, mempermudah dalam kegiatan Rekonsiliasi BMD. Dimana aplikasi tersebut merupakan tools tambahan yang terintegrasi dengan SIMDA BMD yang memungkinkan proses copy data dari SIMDA BMD ke Sion dan mengolah menjadi report yang dibutuhkan sebagai pelaporan kegiatan yang dimaksud sehingga kegiatan rekon bisa berjalan secara efektif dan efisien.

❖ Faktor Hambatan:

- Adanya masa kontrak pekerjaan fisik sampai dengan 31 Desember;
- Pihak ke-tiga mengajukan pencairan belanja modal secara serentak pada akhir bulan desember;
- Terlambatnya pekerjaan pihak ke-tiga sehingga pencairannya dilakukan pada bulan desember;
- Terbatasnya waktu penyusunan APBD terkait penyusunan RKA/DPA perangkat daerah;
- Adanya perubahan informasi terkait petunjuk teknis tentang program pemerintah pusat sehingga terjadi perubahan jadwal pembahasan APBD;
- Perubahan regulasi yang tidak didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga mengganggu proses penyediaan data koordinasi penyusunan laporan keuangan;
- Fasilitas sarana pekerjaan berupa PC, Kursi, Meja dan Printer masih belum memadai;

- Tidak adanya Reward atau penghargaan bagi pegawai;
- Masih ada beberapa bendahara barang PD yang kurang memahami tentang aplikasi SIMDA BMD terutama bendahara barang kelurahan.
- Lamanya rekon asset yang dilakukan PD pada bidang asset BPKAD Kota Bima.
- Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah terkait prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Tidak adanya gudang untuk penyimpanan Barang Milik Daerah kondisi rusak berat;
- Minimnya Bimtek IT bidang pengelolaan keuangan daerah;

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis 1 harus dilakukan bimbingan teknis kepada pihak ke tiga dan dinas – dinas terkait untuk memulai pekerjaan fisik lebih awal dan pencairan tidak perlu dilakukan pada akhir bulan desember. Selain itu ASN yang ada di bidang BMD dan bendahara pengurus barang yang ada di OPD perlu dilakukan BIMTEK terkait penatausahaan BMD, Pengamanan BMD dan Inventarisasi BMD sehingga pada saat melakukan rekonsiliasi BMD dengan bidang BMD tidak menemukan kesulitan lagi dalam membuat laporan Neraca BMD. Terdapat 2 program dan 6 kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran strategis 1 pada tahun 2025.

2. Indikator Kinerja Utama 2 : Rasio PAD

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya merupakan keberhasilan dari suatu pemerintahan daerah dalam membangun dan mensejahterakan daerah yang dipimpinnya. pada tahun 2025 realisasi PAD yaitu sebesar 93,64% menandakan bahwa Tujuan dan Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bima yaitu " *Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah* " telah tercapai.

Sementara itu, efektivitas total pendapatan daerah mengalami sedikit penurunan dari 98,70% pada tahun 2024 menjadi 93,64% pada tahun

2025. Meskipun menurun, capaian tersebut masih berada dalam kategori efektif.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, khususnya dalam aspek efektivitas PAD. Namun demikian, tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil

Ada beberapa sumber PAD Kota Bima yaitu :

a. Penerimaan Pajak
b. Penerimaan Retribusi
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tiap Tahunnya
d. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Untuk menunjang sasaran strategis ke-2 ini, disusun 1 Program dan 1 Kegiatan yang dapat dilihat perencanaan dan realisasinya pada tabel 3.3. Secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai 100%.

❖ Faktor Pendukung:
  - ➢ Kinerja ASN penagih/juru pungut Pajak Daerah cukup memadai
  - ➢ Adanya pemberian penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi Pajak Daerah memenuhi target.
  - ➢ Sarana dan prasarana cukup memadai.

❖ Faktor Hambatan:
  - ➢ Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah;
  - ➢ Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omzet yang mereka miliki;
  - ➢ Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli. Karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli;

- Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal sehingga mempengaruhi hasil penagihan;
- Masih kesulitan dalam validasi data terkait perubahan/alih fungsi lahan sebagai dasar penetapan PBB-P2.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan TA 2025

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	%	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah				
		1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
		4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%
		5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	34 PD	34 PD	100%	100%
		2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				
		1. Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Penerimaan PAD	3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				
		1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.052.122.152.250,14	95.845.491.856,14	9,11%	111,78%

Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, faktor pendorong dan penghambat yang dijumpai atau sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Faktor pendorong dan penghambat capaian kinerja organisasi

Faktor pendorong :

a) Anggaran yang tersedia sudah cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
b) Kinerja staf penagih/juru pungut PAD sudah cukup baik;

c) Adanya penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi PAD memenuhi target;
d) Sarana dan prasarana cukup memadai.

Faktor penghambat :

a) Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
b) Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki.
c) Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak Wajib Pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.
d) Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mngetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran update peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010.
e) Ketetapan mengenai Zona Nilai Tanah sudah ada, tetapi peta tentang Zona tersebut belum disediakan.
f) Data Piutang yang diserahkan pada saat pengalihan, terdapat perbedaan nilai antara hard copy dan soft copy, sehingga membingungkan dalam upaya penentuan wajib pajak penanggung utang.
g) Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mempengaruhi hasil penagihan.
h) Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli, karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli.

Dengan adanya permasalahan diatas telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu :

a) Dilakukan komunikasi awal dengan BPKP Perwakilan NTB untuk persiapan penggunaan SIMDA Pendapatan pada tahun 2021.

b) Dilakukan sosialisasi secara langsung (personal) kepada wajib pajak pada saat penagihan PAD.
c) Dilakukan kegiatan pendampingan dan penyederhanaan tata kelola administrasi pada petugas pajak kelurahan.
d) Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan tehadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan.
e) Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak sekota bima dapat menjadi target PBB.
f) Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah pada wilayah tertentu pada triwulan II tahun 2025 sehingga dapat menjadi dasar penyesuaian NJOP bumi pada wilayah tersebut.
g) Melakukan sosialisasi secara intens pada 42 kelurahan.

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis *efisiensi* dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian output yang lebih besar dari realisasi keuangan dan atau capaian input mencapai di atas 100% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efisien.* Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil daripada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *inefisien.* Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *sesuai harapan.*

Analisis *efektivitas* dilakukan dengan membandingkan antara outcome dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 90% menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *efektif.* Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian outcome lebih kecil daripada realisasi keuangan

menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *inefektif.* Sedangkan apabila terjadi capaian outcome sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan *sesuai harapan.*

Efektifitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator *outcome, benefit dan impact* dari kegiatan yang bersangkutan. Efektifitas kegiatan dibagi atas dua macam, yaitu : (a) efektifitas individual kegiatan; (b) efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran.

Efektifitas individual kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan mencapai target outcome/benefit/impact yang telah ditetapkan. Sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran merupakan kemampuan suatu kegiatan bersama-sama dengan kegiatan lain untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategisnya. Dalam sub bab ini disajikan efektifitas individual kegiatan, sedangkan efektifitas terkait dengan pencapaian sasaran strategis dibahas dalam sub bab analisis akuntabilitas kinerja.

Selama tahun 2025, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima melaksanakan 6 (enam) kegiatan strategis dan 45 (empat puluh lima) Sub kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerjanya diperoleh gambaran bahwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan telah dilaksanakan secara efektif.

a. Sub Kegiatan yang Efektif

Dalam laporan ini, suatu kegiatan dikategorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata *output* 90% atau lebih. Selama tahun 2025, sub kegiatan strategis yang telah dilaksanakan secara efektif adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Sub Kegiatan yang efektif

No	Program / Kegiatan		Efektifitas	
			Input (%)	Output (%)
1	1	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**95,80**	**100**
		1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	95,80	100
		1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	94,09	100
		2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	95,81	100
		3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	99,55	100
		4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	97,30	100
		5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	94,90	100
		6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	90,46	100
		7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	98,51	100
		8. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	98,51	100
		2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	99,90	100
		1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	99,81	100
		2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	99,82	100
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	99,99	100
		4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	99,87	100
		5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	99,98	100
		6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99,91	100
		3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	98,33	100
		1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	96,07	100
		2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	98,37	100
		3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	99,73	100
		4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	99,30	100

		Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran		
		5. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	97,81	100
		6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	98,74	100
	2	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**97,7626**	**100**
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
		1. Penyusunan Standar Harga	99,96	100
		2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	99,84	100
		3. Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00	100
		4. Inventarisasi Barang Milik Daerah	96,51	100
		5. Pengamanan Barang Milik Daerah	98,29	100
		6. Penilaian Barang Milik Daerah	99,98	100
		7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	92,23	100
		8. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	93,42	100
		9. Penyusunan Lapopran Barang Milik Daerah	99,62	100
	3.	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**97,08**	**100**
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	97,08	100
		1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	96,18	100
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	97,60	100
		3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	98,90	100
		4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	93,29	100
		5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	94,26	100
		6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	98,25	100
		7. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	98,87	100
		8. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99,28	100

b. Sub Kegiatan yang kurang efektif

Dalam laporan ini, kegiatan dikatagorikan kurang efektif apabila hanya mampu mencapai rata-rata indikator outcome/benefit/impact <90%. Selama tahun 2025 terdapat 4 (empat) sub Kegiatan yang kurang efektif dan tidak terlaksana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5

Sub Kegiatan yang kurang efektif

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Efektifitas	
			Input (%)	Output(%)
	1	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**70,60**	**66,67**
		1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah a. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	84.92	80
		2. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	43,92	42
		3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informaasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah a. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	82,97	80
	2	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**60,80**	**57,5**
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**60,80**	**57,5**
		a. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**86,44**	**83**
		b. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**35,15**	**32**
	3	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**69,96**	**64,5**
		1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	69,96	64,5
		a. Perencanaan pengelolaan pajak daera	47,25	43
		b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	89,36	82
		c. Penagihan Pajak Daerah	79,02	73
		d. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	64,21	60

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.3.1. Target dan Realisasi Anggaran

Pagu anggaran pada BPKAD Kota Bima Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 26.232.535.458,00 dan terealisasi sebesar Rp. 19.113.896.553,00 atau sebesar 72,86%.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan tahun angaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rekapitulasi Belanja BPKAD Kota Bima Tahun 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	19.286.611.618,00	17.400.979.625,00	90,22
2	Belanja Modal	898.221.000,00	836.916.928,00	93,17
3	Belanja Tidak Terduga	6.047.702.840,00	876.000.000,00	14,48

1.3.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama tahun anggaran 2025, BPKAD Kota Bima melaksanakan 3 (tiga) program utama dan 6 (enam) kegiatan utama. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2025 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima
Tahun 2024 dan 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase tingkat kepatuhan rasio penganggaran**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran dan Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi, Penyusunan dan	34 PD	34 PD	100%	34 PD	34 PD	100%

				Verifikasi RKA-SKPD						
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
2	Meningkatnya efektifitas penatausahaan pelayanan pengelolaan keuangan daerah	Persentase PD yang mengelola keuangan daerah dengan baik	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan**	Jumlah PD yang melakukan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	34 PD	34 PD	100%	34 PD	34 PD	100%
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
			Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
			Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

			Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kot a dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungj awaban Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
			1. Pengelolaa n Dana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

			Darurat dan Mendesak	Dana Darurat dan Mendesak						
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup KeuanganDaerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	100%
3	Meningkatnya sistem manajemen aset	Persentase aset yang tertib	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate**	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Menyelesaikan Rekon Aset Tepat Waktu dan Terupdate	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

			Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	5 Laporan	83,33%	6 Laporan	6 Laporan	100%
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 orang	40 orang	80%	50 orang	50 orang	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan PAD	Rasio PAD	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Persentase Realisasi PAD dan Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah yang disusun	6,4%	6,34%	99,06%	8,15%	9,11%	111,78%
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	100%
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pelayanan dan Konsultasi	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	525 Layanan	525 Layanan	100%	525 Layanan	525 Layanan	100%

			Pajak Daerah							
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Penagihan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	**1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.908.881.100**	**1.537.891.271**	80,57
			I Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**1.128.566.000**	**956.268.374**	84,73
			1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	10.649.500	10.590.000	99,44
			2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	9.722.000	8.658.000	89,06
			3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	27.895.200	27.262.000	97,73
			4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	192.858.500	154.330.507	80,02
			5. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	93.559.600	66.809.300	71,41
			6. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	115.824.000	99.124.567	85,58
			7. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	667.706.300	581.244.000	87,05
			8. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10.350.900	.8.250.000	79,70
			II Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**323.949.000**	**282.465.129**	**87,19**
			1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	27.568.000	22.372.000	81,15
			2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	39.774.000	39.773.690	100,00
			3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	33.314.000	28.362.550	85,14

				4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60.660.000	56.451.838	93,06
				5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	98.095.000	72.988.051	74,41
				6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	64.538.000	62.517.000	96,87
			III	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**277.297.800**	**224.307.416**	**80,89**
				1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	23.958.900	12.072.060	50,39
				2. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	10.429.700	5.947.000	57,02
				3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	90.309.100	88.095.679	97,55
				4. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	47.000.400	31.937.677	67,95
				5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	84.432.300	80.629.000	95,50
				6. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	21.167.400	5.626.000	26,58
			IV	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**6.047.702.840**	**806.500.000**	**13,34**
				1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesaki	6.047.702.840	806.500.000	13,34
			V	**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah**	**179.068.300**	**74.850.352**	**41,80**

				Daerah Lingkup Keuangan Daerah **1.** Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	179.068.300	74.850.352	41,80
			2 **I**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah** **Pengelolaan Barang Milik Daerah** 1. Penyusunan Standar Harga 2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Inventarissi Barang Milik Daerah 6. Pengamanan Barang Milik Daerah 7. Penilaian Barang Milik Daerah 8. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 9. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 10. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	**851.976.089** **851.976.089** 48.086.080 18.709.200 5.565.700 153.362.112 62.267.400 283.940.000 29.633.000 157.643.000 65.366.097 22.371.500 5.032.000	**708.367.239** **708.367.239** 38.896.760 18.650.900 4.868.000 122.891.888 59.908.141 217.045.000 24.868.000 148.188.500 62.681.050 5.353.000 5.016.000	**83,14** **83,14** 80,89 99,69 87,46 80,13 96,21 76,44 83,92 94,00 95,89 23,93 99,68
2	Meningkatnya Penerimaa PAD	Rasio PAD	**3** **I**	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah** **Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** 1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 6. Penetapan Wajib	**1.759.868.064** **1.759.868.064** 15.573.200 39.093.900 28.760.900 534.401.600 119.420.900 101.810.800	**1.567.218.488** **1.567.218.488** 15.516.500 38.219.500 25.930.000 516.932.920 98.312.509 91.220.300	**89,05** **89,05** 99,64 97,76 90,16 96,73 82,32 89,60

				Pajak Daerah			
				7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	14.918.600	13.679.000	90,69
				8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	34.000.000	30.914.500	90,93
				9. Penagihan Pajak Daerah	777.141.964	647.670.259	83,34
				10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	29.435.000	26.552.000	90,21
				11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	26.168.500	26.075.000	99,64
				12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.142.700	36.196.000	92,47

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun anggaran 2025, pagu anggaran pelaksanaan program utama pada BPKAD Kota Bima adalah sebesar Rp. 4.520.725.253,- dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 3.813.476.998,- atau sebesar 84,36% posisi sementara sebelum hasil audit.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima tahun 2025 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah. Setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kota Bima telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik Belanja Operasi, Belanja Modal maupun Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 93,54 %.
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 (sepuluh)
3. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 92,03% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.
4. SDM pengelola keuangan (PPK dan Bendahara Pengeluaran) mendapatkan bimtek tiap tahun tentang pengelolaan keuangan daerah.

5. Telah dilakukan inventarisasi asset secara menyeluruh pada seluruh SKPD oleh TIM inventarisasi dari KPKNL dan bidang asset BPKAD Kota Bima.
6. Anggaran yang tersedia sudah cukup memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Kinerja staf penagih/juru pungut PAD sudah cukup baik.
8. Adanya penghargaan berupa insentif yang diberikan apabila realisasi PAD mencapai target.
9. Sarana dan prasarana cukup memadai.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima dilihat dari nilai capaian di atas sehingga termasuk dalam kategori berhasil. Sementara hal-hal yang masih menjadi hambatan adalah:

1. Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
2. Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki.
3. Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak Wajib Pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.
4. Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran update peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010.
5. Ketetapan mengenai Zona Nilai Tanah sudah ada, tetapi peta tentang Zona tersebut belum disediakan.
6. Data Piutang yang diserahkan pada saat pengalihan, terdapat perbedaan nilai antara hard copy dan soft copy, sehingga membingungkan dalam upaya penentuan wajib pajak penanggung utang.
7. Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mempengaruhi hasil penagihan.
8. Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli, karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli.

4.2.Saran

Strategi pemecahan atau langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan kedepannya adalah :

1. Melaksanakan bimtek khusus penggunaan aplikasi SIPD untuk penyusunan laporan keuangan daerah;
2. Melaksanakan bimtek E- BMD pada seluruh bendahara barang Perangkat Daerah (PD).
3. Menggunakan aplikasi SIMDA Pendapatan pada tahun 2025
4. Melakukan sosialisasi secara intens terhadap perwali yang sudah disusun pada tahun 2025.
5. Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan tehadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan.
6. Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak sekota bima dapat menjadi target PBB.
7. Melakukan sosialisasi secara intens pada 42 kelurahan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kota Bima ini disusun agar dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kota Bima, Februari 2026
Kepala BPKAD Kota Bima,

Siswadi,S.Si., M.Ak
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19810925 200604 1 007

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH

LKIP

TAHUN 2025



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Jalan Soekarno – Hatta Nomor.54 Kota Bima NTB Kode Pos 84113
Telepon (0374) 43663,43366 Fax. (0374) 646823

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bima dapat tersusun.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dalam mewujudkan Rencana Strategik yang sudah ditetapkan.

Dengan tersusunnya LKIP ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada Pimpinan serta semua unsur yang terdapat dalam bagian-bagian lingkup Sekretariat DPRD Kota Bima yang telah bekerja secara maksimal guna penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2025 ini.

LKIP Sekretariat DPRD Kota Bima tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, terutama bila dikaitkan dengan tujuan kita untuk menjadikan LKIP sebagai media dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, oleh karena itu substansi dan mekanisme penyusunan LKIP kedepan akan terus ditingkatkan, sehingga dapat menjadi suatu alat ukur bagi pencapaian tujuan organisasi Sekretariat DPRD kota Bima.

Mudah-mudahan LKIP Sekretariat DPRD Kota Bima ini dapat dijadikan sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2025 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Raba, Bima, Februari 2026

Sekretaris DPRD Kota Bima,

(HIYA GHAZALI, S. Sos,. MM)

Nip. 19720902 200604 1 017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bima 1

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP 1

2. Dasar Hukum 2

3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD 2

4. Tupoksi Organisasi 3

B. Sumber Daya Manusia..... 9

1. Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan..... 10

2. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 10

3. Jumlah PNS Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural 10

C. Sarana dan Prasarana Pendukung 1

D. Aspek dan Strategis 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029..... 17

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 20

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 27

A. Capaian Kinerja 27

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini..... 29

A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja serta capaian tahun 2025 32

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menegah 35

A.4. Analisa Kinerja Peningkatan/penurunan Kinerja Tahun 2025 dan Alternatif Solusi yang dilakukan 36

A.5. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian penetapan kinerja..... 37

B. Realisasi Anggaran 37

BAB IV PENUTUP..... 40

A. Kesimpulan …… .. 40

B. Saran – saran ……... 41

Lampiran-lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Bima

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, dan lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah,serta dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance),dan pemerintah yang bersih (clean government) sebagaimana yang diamanatkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kota Bima atas penggunaaan anggaran maka setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen berupa Laporan Kinerja.Instansi Pemerintah.

Sekretariat DPRD Kota Bima merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesekretariatan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Bima. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 33 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kota.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKIP

Maksud dan tujuan disusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah:

a. Maksud

1. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dan pembangunan SKPD Sekretariat DPRD Kota Bima, telah dilaksanakan secara transparan dan *akuntable* berpedoman pada tertib

administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib sasaran fisik dan fungsional.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi apakah pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pemerintahan dan pembangunan tahunan yang dilaksanakan telah sesuai visi, misi, tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

b. Tujuan

Dokumen LKIP 2025 disusun dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dan atau acuan penyempurnaan kebijakan dan strategi pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*) dan tetap mengacu pada Renstra yang telah ditetapkan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kota Bima
8. Peraturan Walikota Bima Nomor 79 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD.

3. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Sekretariat DPRD Kota Bima didukung oleh para pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kabag, Kasubag, Fungsional dan Jajaran komponen beserta unit satuan kerja tersebut dapat diuraikan di bawah ini :

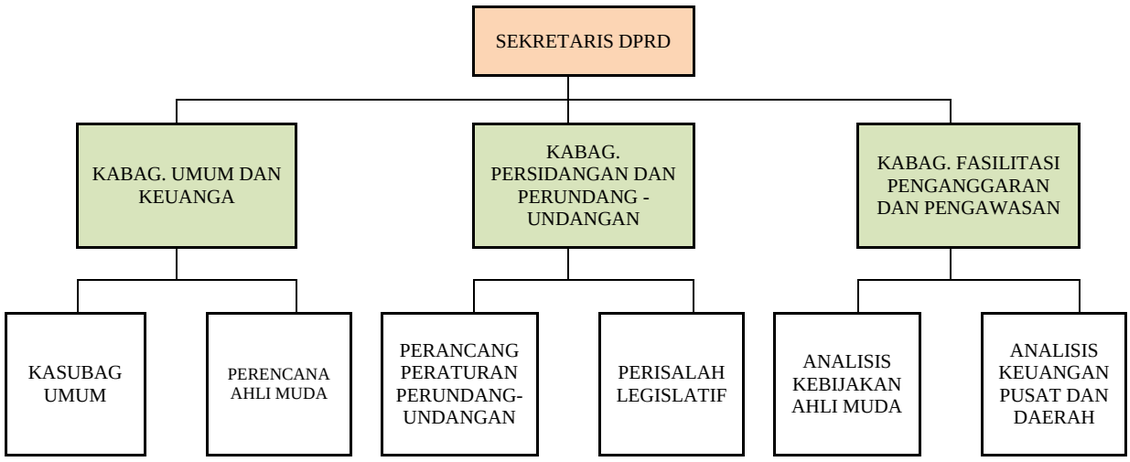
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD.
b. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bagian Persidangan dan Perundang – undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bima



4. Tupoksi Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 05 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD. Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bima adalah Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Sekretaris

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;
b. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD;
c. Fasilitasi Penyelenggara rapat-rapat DPRD;
d. Penyedia dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bima mempunyai rincian tugas :

a. Mengatur, membina, mengendalikan dan mengkoordinasikan tugas Sekretariat Dewan;
b. Menyusun anngaran kegiatan DPRD dan Sekretariat;
c. Mengoreksi, menganalisa dan memaraf konsep produk hukum yang menjadi garapan Sekretariat DPRD;
d. Menunjangpenyelenggaraan pelaksanaan program kerja tahunan DPRD;
e. Merencanakan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia berkaitan deagan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
f. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kepegawaian dan ketatausahaan DPRD;
g. Memimpin, mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala bagian sesuai bidang tugasnya;
h. Membina dan memotivasi bawahan dilingkungan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin pegawai;
i. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
j. Mengoreksi dan memaraf konsep surat di lingkup Sekretariat DPRD;
k. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga lain dalam rangka kelancaran kegiatan DPRD;
l. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai dilingkup Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah yang berkaitan dengan tugas-tugas administrasi DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku;
n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD, yang berkaitan dengan kegiatan kesekretariatan DPRD, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat DPRD, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
b. Mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
c. Mengelola administrasi keanggotaan DPRD;

d. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
e. Mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
f. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
g. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
i. Menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab DPRD;
j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD; dan
v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya

Bagian Umum dan Keuangan membawahi dan mengoordinasikan:

a. SubbagianUmum;dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ **Sub Bagian Umum**

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a. Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
b. melaksanakan urusan program, pelaporan dan kearsipan
c. menyusun administrasi kepegawaian;
d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian

f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli
g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai
h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD
i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD
j. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD
k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan
l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan
n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan
o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD
q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umumdan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang – undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang persidangan dan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
e. mengumpulkan bahan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
f. memfasilitasi penyelengaraan persidangan;
g. menyusun risalah rapat;
h. mengoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
l. menyelenggarakan publikasi;
m. menyelenggarakan keprotokolan; dan
n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan fungsi:

a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) / Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS);

b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan;
c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban kepala daerah;
f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;dan
n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

B. Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD merupakan satuan perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan tugas pelayanan administrasi terhadap Kebutuhan DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangt Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan tersebut Sekretariat DPRD menjadi lembaga pendukung kelancaran tugas dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD Kota Bima dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD Kota Bima.

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bima perlu didukung oleh aparatur Sekretariat serta sarana dan prasarana yang memadai. Untuk bidang aparatur di Sekretariat DPRD Kota Bima didukung oleh jumlah ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, golongan dan pejabat struktural sesuai dengan tabel dibawah ini:

a. Jumlah ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	D-III	SMA	SMP	SD	
1	Sekretaris	1		-	-	-	-	1
2	Bagian Umum & Keuangan							
3	Bagian Persidangan dan Perundang - undangan							
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan							
	Jumlah							

b. Jumlah ASN berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris					
2	Bagian Umum & Keuangan					
3	Bagian Persidangan dan Perundang - undangan					
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan					
	Jumlah					

c. Jumlah PNS berdasarkan jumlah Pejabat Struktural

a. Sekretaris DPRD Kota Bima

Kualifikasi pendidikan : S2

Pangkat dan Golongan : Pembina Utama Muda (IVc)

b. Kabag. Umum & Keuangan

Kualifikasi pendidikan : S1

Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/b)

b.1. Kasubag Umum

Kualifikasi pendidikan : S1

Pangkat dan Golongan : Penata (III/d)

b.2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Kualifikasi pendidikan : -

Pangkat dan Golongan : -

c. Kabag. Bagian Persidangan dan Perundang - undangan

Kualifikasi pendidikan : S1

Pangkat dan Golongan : Pembina (IV/a)

c.1. Perisalah Legislatif

Kualifikasi pendidikan : S1

Pangkat dan Golongan : Penata Tk I (III/d)

c.3. Perancang Peraturan Perundang - undangan

Kualifikasi pendidikan : S2

Pangkat dan Golongan : Penata Tk I (III/d)

d. Kabag Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kualifikasi pendidikan : S2

Pangkat dan Golongan : Pembina Tk I (IV/b)

d.1. Anaslis Keuangan Pusat dan Daerah

Kualifikasi pendidikan : S1

Pangkat dan Golongan : Penata (III/d)

d.2. Anaslis Keuangan Pusat dan Daerah

Kualifikasi pendidikan : S1

Pangkat dan Golongan : Penata (III/d)

C. Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat DPRD Kota Bima serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bima, maka dapat diuraikan data asset sebagai berikut :

Tabel Asset

No	Nama Barang	Merk - Type	Ukuran	Bahan	Banyak Barang		Tgl. Perolehan
1	Sepeda Motor	Supra XX -	125	Besi dan Fiber	1	Unit	29/07/2003
2	Meja Podium	Jati -	BESAR	Mika	1	Buah	31/12/2003
3	Meja Panjang	Jati -	3 M	Kayu	7	Buah	31/12/2003
4	Meja 1/2 Biro	Jati -	1/2 BIRO	Kayu	20	Buah	31/12/2003
5	Kursi Rapat	Cheetos -	KECIL	Besi	2	BUah	31/12/2003
6	Kursi Putar	RAKUDA -	BESAR	Wol	20	BUah	31/12/2003
7	Lemari Es	Sharp -	1 Pintu	Mika	3	BUah	31/12/2003
8	Televisi	Toshiba -	21 Inch	Mika	6	Unit	31/12/2003
9	Wireless	Nasional Tens -	500 V	Mika	1	Buah	31/12/2003
10	Meja Kerja Eselon IV	Jati -	Biro	Kayu	6	Buah	31/12/2003
11	Alat Kantor Lainnya	Aereo - Mesin Blower	220 V	Besi/Mika	8	Unit	31/12/2004
12	Kursi Putar	RAKUDA -	BESAR	Wol	4	BUah	31/12/2004
13	Alat Kantor Lainnya	Aereo -	ABC300	Besi/Mika	1	Unit	31/12/2005
14	Kursi Putar	RAKUDA -	BESAR	Wol	4	BUah	31/12/2005
15	Filing Cabinet Besi	Brother -	4 SUSUN	Alumunium	11	Unit	21/11/2006
16	Station Wagon	TOYOTA - AVANZA	1300 cc	Besi	1	Unit	31/12/2006
17	Kursi Tamu	Sofa -	BIASA	Wol	2	Set	31/12/2006
18	Dispenser	Sanyo -	SEDANG	Mika	4	Buah	31/12/2006
19	Filing Cabinet Besi	Brother -		Alumunium	1	Unit	31/12/2007
20	Sofa	-	BIASA	Busa	1	Set	31/12/2007
21	Lemari Es	Sharp -	1 Pintu	Mika	3	BUah	31/12/2007

22	Sepeda Motor	HONDA -	125 CC	Besi dan Fiber	3	Unit	08/09/2008
23	Station Wagon	Honda CRV 2000 MT - CRV 2000 MT	2000 CC	Besi	1	Unit	15/06/2009
24	Televisi	LG -	20 Inch	Mika	3	Unit	31/12/2009
25	Sound System	Orgen Band/Lengkap -	5000 V	Besi	1	Buah	31/12/2009
26	Audio Cassette Recorder	Tape Recorder -	Standar		1	Buah	31/12/2009
27	Lemari Besi/Metal	-	2 PINTU	Besi	1	BUah	10/08/2010
28	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	DONGPENG - Mesin Diesel	Standar	Besi	1	Buah	31/12/2010
29	Filing Cabinet Besi	-	4 SUSUN	Besi	4	Unit	31/12/2010
30	Sofa	-	BIASA	Wol	3	Set	31/12/2010
31	A.C. Window	LG -	1 PK	Mika	2	Unit	31/12/2010
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu/Jati -	2 PINTU	Kayu/Jati	5	BUah	31/12/2010
33	Facsimile	NASIONAL -	SEDANG	Mika	2	Unit	31/12/2010
34	Lap Top	Toshiba -	14 Inch	Mika	2	Unit	31/12/2010
35	Station Wagon	CHEVROLET -	1500	Besi	1	Unit	15/03/2011
36	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Olympia -	14-16	Besi	2	Buah	21/11/2011
37	Alat Kantor Lainnya	Onna -	3 M	Besi	1	Unit	31/12/2011
38	Meja Rapat	Kayu/Jati -	1/2 BIRO	Kayu/Jati	24	Buah	31/12/2011
39	Kursi Rapat	Kayu/Jati -	BESAR	Kayu/Jati	27	Buah	31/12/2011
40	A.C. Split	LG -	1 pk	Besi	2	Unit	31/12/2011
41	Handy Cam	Sony -	350 GB	Mika	1	Buah	31/12/2011
42	Lap Top	Acer -	14	Mika	1	Unit	31/12/2011
43	Printer (Peralatan Personal Komputer)	CANON -	2770	Mika	3	Buah	31/12/2011
44	Sepeda Motor	Honda Revo 110 DX -	110	Besi,Plastik Baja	1	Unit	03/05/2012
45	Lemari Kayu	Lemari Ukir Bufet	2 PINTU	Jati	2	Buah	31/12/2012
46	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Dragon A1 -	A1	Besi/Baja	1	Unit	31/12/2012
47	White Board	white board + Papan Struktur	50X50	Kayu Triplek	2	Buah	31/12/2012
48	Meja Kerja Kayu	Meja Tanda Tangan	KECIL	Kayu	1	Buah	31/12/2012
49	Bangku Tunggu	Stainles	SEDANG	Stainles	4	Buah	31/12/2012
50	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Maspion -	15 V	Besi	4	Buah	31/12/2012
51	A.C. Window	DAIKIN -	5 PK	Mika	1	Unit	31/12/2012
52	A.C. Window	Panasonik -	1 PK	Mika	4	Unit	31/12/2012
53	Kipas Angin	Maspion -	Standar	Plastik	1	Buah	31/12/2012
54	Wireless	Micropon	25 V	Mika	1	Buah	31/12/2012
55	Microphone	Bouch (Berdiri) -	25 V	Mika	50	Buah	31/12/2012
56	Dispenser	Dispenser Berdiri	Standar	Plastik	2	Buah	31/12/2012
57	P.C Unit	Acer -	14	Mika	2	Unit	31/12/2012
58	Note Book	Acer -	14	Mika	3	Unit	31/12/2012
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon -	MP 287	Mika	5	Buah	31/12/2012
60	Mesin Pemotong Rumput	Mesin Potong Rumput		Mika	1	Buah	31/12/2013
61	A.C. Window	Panasonic -	5 PK	Besi / Mika	3	Unit	31/12/2013
62	P.C Unit	LG -		Mika	3	Unit	31/12/2013
63	Lap Top	Axioo -		Mika	6	Unit	31/12/2013
64	Gordyin/Kray	vertical blind -	m2		1	Paket	31/01/2014
65	Gordyin/Kray	Slimlane blind -	m2		1	Paket	31/01/2014
66	Meja 1/2 Biro	kayu jati -		Kayu	13	Buah	05/02/2014
67	Focusing Screen/Layar LCD Projector	inficus -			1	Unit	26/05/2014
68	Kursi Rapat	Indachi -			10	Buah	26/05/2014
69	Kursi Tamu	SOFA -			3	Set	26/05/2014
70	Handy Cam	SONY -			1	Buah	26/05/2014
71	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu jati -		Kayu/Jati	4	Buah	26/05/2014
72	Audio Cassette Recorder	-			1	Buah	26/05/2014
73	Camera Electronic	NIKON -			1	Buah	26/05/2014
74	Papan Pengumuman	PAPAN INFORMASI HUMAS -			1	Buah	22/09/2014
75	Papan Visual/Papan Nama	-			1	Buah	30/10/2014
76	A.C. Window	PANASONIC -	1 PK		2	Unit	30/10/2014
77	Lemari Es	SAMSUNG - 1 PINTU			1	Buah	20/11/2014
78	Televisi	SAMSUNG -	32 Ins		1	Unit	20/11/2014
79	Televisi	SAMSUNG -	24 Inc		1	Unit	20/11/2014
80	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	MEJA BIRO -			3	Buah	20/11/2014
81	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	KURSI PUTAR -			3	Buah	20/11/2014
82	Tempat Tidur Kayu	jati - melamin			1	Buah	25/05/2015
83	Kursi Tamu	Oscar - sofa 321			2	Set	25/05/2015
84	Meubeleur lainnya	Lemari 3 pintu - melamin	Standar	Kayu	1	Buah	25/05/2015
85	Lemari Es	LG - OPTIFRESH	standar	Mika	1	Buah	25/05/2015
86	Station Wagon	Toyota -	1300 CC	Besi	2	Unit	09/07/2015
87	Camera Video	DVR / NVR KIT -			1	Buah	14/09/2015
88	P.C Unit	LENOVO C260 -	19,5 INCH		2	Unit	14/09/2015

89	Lap Top	TOSHIBA - SATELLITE C55-B5302	19,5 INCH		1	Unit	14/09/2015
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON - L.210	5,760 X 1440 DPI		5	Buah	14/09/2015
91	Lemari Kayu	JATI - LEMARI 2 PINTU	200 X 122 X 463		6	Buah	18/09/2015
92	Brandkas	TOTAL SAVE -	720 X		1	Buah	18/09/2015
93	Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	KURSI KANTOR - KURSI DIREKTUR	55 X57 X 111		25	Buah	18/09/2015
94	Monitor	Monitor LED TV LG - Layar Monitor CCTV	22"	Mika	1	Unit	02/11/2015
95	Sepeda Motor	Viar - Cross X 200	200	BESI	3	Unit	01/04/2016
96	Camera Electronic	NIKON L 340 -	20 MP		2	Buah	26/07/2016
97	Sound System	DIGITAL CONFERENCE SYSTEM - CONFERENCE SYSTEM	SET	Mika	1	Buah	16/08/2016
98	P.C Unit	ASUS ALL IN ONE ET 2030(INTEL CORE I3) -	19,5 INCH		5	Unit	16/08/2016
99	Lap Top	HP INTEL CORE I3 5005U -	14 INCH		5	Unit	16/08/2016
100	Sepeda Motor	honda - new vario	150 cc	Besi	5	Unit	30/12/2016
101	Meja Kerja Kayu	Meja Tanda tangan		Kayu	1	Buah	20/06/2017
102	Meja 1/2 Biro	jati - 1/2 Biro		Kayu	2	Buah	20/06/2017
103	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Rak Buku		Kayu	4	Buah	20/06/2017
104	Camera Electronic	Nikon - D 700		Mika	1	Buah	24/07/2017
105	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON - L.210		Mika	1	Buah	24/07/2017
106	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson - L360		Mika	4	Buah	24/07/2017
107	Sepeda Motor	Trail Viar 200T - Trail	150 cc	Besi/Fibber	2	Unit	11/08/2017
108	CCTV - Camera Control Television System	- -		Mika	1	Unit	27/11/2017
109	Lemari Es	Polytron - PRN 180 PC		Mika	3	Buah	27/11/2017
110	Televisi	Sharp -	LED 24 Inch	Mika	4	Unit	27/11/2017
111	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Philips - Compaq Go		Mika	2	Buah	15/10/2018
112	Televisi	Samsung - LED	42	Mika	3	Unit	24/10/2018
113	A.C. Split	Polytron -	2PK	Mika	1	Unit	07/11/2018
114	Lap Top	Acer - Core I3	14	Mika	3	Unit	15/11/2018
115	Microphone Floor Stand	BOSCH - CCS		MIKA	1	Unit	25/06/2019
116	Papan Pengumuman	Billboarrd -		BESI	2	Buah	05/08/2019
117	Rak Besi	Emporta - Standart		-	5	Buah	07/11/2019
118	Filing Cabinet Kayu	Jati - Standart		-	6	Unit	07/11/2019
119	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Jati - Standart		Kayu/Jati	1	Buah	07/11/2019
120	Lemari Buku Arsip Untuk	Jati - Standart		-	5	Buah	07/11/2019
121	Station Wagon	TOYOTA - INNOVA 2.0 V	2000	Besi dan Fiber	3	Unit	16/03/2020
122	Scanner (Universal Tester)	Plustek - Smart office PS 186 Sensoe		-	2	Buah	26/03/2020
123	Televisi	LG - 43LM55		-	2	Unit	26/03/2020
124	P.C Unit	Asus - All In One V241FFK-BA541T		-	3	Unit	26/03/2020
125	Lap Top	Acer - Core i3 A514-52KG314P		-	4	Unit	26/03/2020
126	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson - L3110		-	3	Buah	26/03/2020
127	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon - LBP 6030W Printer Laserjet		-	1	Buah	26/03/2020
128	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Tripod Screen Le Tea -		-	2	Unit	27/03/2020
129	Loudspeaker	Aubem - BE-15CX		-	1	Buah	27/03/2020
130	Microphone Table Stand	BOSCH - CCS 900		-	1	Unit	27/03/2020
131	Camera Electronic	Canon EOS 90D - CMOS sensor		-	1	Buah	27/03/2020
132	Layar Film/Projector	Epson - EB 970		-	1	Buah	27/03/2020
133	A.C. Split	AC Daikin Split - FTC50NV14	2PK	Mika	3	Unit	17/06/2020
134	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Papan Nama Anggota DPRD - Standart		-	30	Buah	02/11/2020
135	Lap Top	ACER - ASPIRE A514		-	2	Unit	27/07/2021
136	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON - L3110		-	2	Buah	27/07/2021
137	Kursi Kerja Pejabat lainnya	ACTIVE KENT - KURSI MANAGER		-	10	Buah	16/08/2021
138	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	MEUBLAIR - KURSI RAPAT DEWAN		-	34	Buah	07/09/2021
139	Rak Kayu	RAK - STANDAR		-	1	Buah	17/11/2021

140	Meja Kerja Kayu	MEJA NASKAH - STANDART		-	1	Buah	17/11/2021
141	Meja Rapat	MEJA RAPAT BANGGAR - STANDART		-	2	Buah	17/11/2021
142	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	MEJA RAPAT - STANDART		-	1	Buah	17/11/2021
143	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Horden - STANDART		-	1	Unit	16/12/2021
144	Peralatan Komputer lainnya	Amplifier Bosh - CCS-CU 900		-	1	Unit	16/12/2021
145	Peralatan Komputer lainnya	Microphone Bosh - CC900c		-	1	Unit	16/12/2021
146	Hard Disk	hardisk -	1 TB		8	Buah	01/04/2022
147	A.C. Split	SHARP - 2PK		-	4	Unit	10/05/2022
148	Gordyin/Kray	GORDEN - STANDART		-	16	Paket	10/05/2022
149	P.C Unit	ACER - AIO Aspire 1650		-	4	Unit	10/05/2022
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother - DCP-T720		-	1	Buah	10/05/2022
151	Printer (Peralatan Personal	Brother - DCP-T720		-	3	Buah	10/05/2022

D. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekrtariat DPRD sebagai unsur pendukung kelancaran tugas dan fungsi serta wewenangan DPRD, dengan posisi Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung tersebut, Sekretaris DPRD dalam melaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab secara opresional kepada Pimpinan DPRD dan secara adminitrastif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan demikian dalam hal penyelenggaraan oprasional administrasi kesekretariatan tentunya berupaya untuk menciptakan kondisi penyelenggaraan tugas dan fungsiny yang dapat memeberikan dampak bagi peningkatan kinerja DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD`Kota Bima telah menetapkan kebijakan strategis yang saling terkait sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan lembaga DPRD
b. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif
c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
d. Meningkatkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan control yang optimal

Untuk mewjudkan optimalisasi pelaksanaan tugas sebagaimana kebijakan strategis tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bima dihadapkan dengan beberapa permasalahan yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Sumber Daya yang tersedia pada Sekretariat DPRD Kota Bima masih ada yang belum memahami secara maksimal tugas pokok dan fungsi.
3. Belum tersedianya staf ahli dan fungsional yang memiliki keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan DPRD Kota Bima;

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bima adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bima yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bima yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bima tersebut disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Bima diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bima. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bima telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029, sehingga Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bima merupakan hasil rumusan bersama seluruh komponen Sekretariat DPRD Kota Bima.

Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bima tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bima yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bima dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan strategik, Sekretariat DPRD Kota Bima diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bima diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029. dituangkan dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang berisi penjabaran visi, misi, dan program pembangunan yang direncanakan dalam kurun waktu lima Tahun 2025-2029 Renstra tersebut berisi strategi pokok dalam penjabaran agenda pembangunan jangka menengah, serta acuan kerja bagi Sekretariat DPRD Kota Bima. Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima tahun 2025-2029 serta dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun kedepan. Penjabaran dari Rencana Strategik Kota Bima tersebut dituangkan dalam Rencana strategik pada masing-

masing Perangkat Daerah Kota Bima sehingga Rencana Startegik Sekretariat DPRD Kota Bima merupakan bagian rencana pencapaian target Pembangunan Kota Bima.

Berdasarkan visi misi Pemerintah Kota Bima yang dituangkan daam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, maka Sekretariat DPRD Kota Bima berkewajiban untuk mewujudkan visi misi tersebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Bima, dimana visi pemerintah Kota Bima adalah **"TERWUJUDNYA KOTA BIMA YANG MAJU, BERMARTABAT, DAN BERKELANJUTAN"**

Visi tersebut, telah dijabarkan dalam 5 (lima) misi utama yang terdiri dari :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
4. Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bima pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategik Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dilakukan reviu pada tahun 2022 telah menetapkan Visi dan misi sebagai berikut :

a. VISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan menyangkut kemana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Pernyataan visi merupakan gambaran/pernyataan bersama mengenai cita-cita yang ingin dinyatakan melalui komitmen bersama dan murni tanpa adanya paksaan.

Visi Sekretariat DPRD Kota Bima adalah:

"TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA SEBAGAI FASILLITATOR DAN MEDIATOR PELAKSANAAN KEGIATAN DPRD KOTA BIMA"

Untuk menyamakan presepsi tentang pemahaman Visi Sekretariat DPRD Kota Bima dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dderah Kota Bima bahwa Sekretariat DPRD adalah Unsur pendukungpelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang memiliki fungsi pelaksana pelayanan administratif DPRD.

b. Misi

Dengan memperhatikan visi yang telah ditetapkan dari uraian diatas, maka dapat dijabarkan MISI Sekretariat DPRD Kota Bima sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaraan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan Fugsi Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran dan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan wewenangn DPRD
2. Mengoptimalkan pelayanan adminsitrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.

c. Tujuan Dan Sasaran

Yang dimaksud tujuan adalah sesuatu yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi arah perjalanan pemerintah berdasarkan kriteria yang mudah dipahami seluruh masyarakat.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua sasaran, program dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun.

Table. 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bima

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Taget				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya pelayanan yang optimal untuk kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Bima	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1. Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.					
			a. Jumlah Pembahasan Perda	6	6			
			b. Jumlah Pembahasan Anggaran	4	4			
			c. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13	13			
			d. Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	2	1			
			e. Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3	2			
			2. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	150	150			

B. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan RPJMD Kota Bima 2025-2029.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bima juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Formulasi Penjelasan Indikator Kerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	
			Target	(Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		
		a Jumlah Pembahasan Perda	100%	$\frac{Target\ Pembahasan\ Perda}{Realisasi\ Pembahasan\ Perda}\ x\ 100\%$
		b Jumlah Pembahasan Anggaran	100%	$\frac{Target\ Pembahasan\ Perda}{Realisasi\ Pembahasan\ Perda}\ x\ 100\%$
		c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	100%	$\frac{Target\ Pembahasan\ Perda}{Realisasi\ Pembahasan\ Perda}\ x\ 100\%$
		d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	100%	$\frac{Target\ Pembahasan\ Perda}{Realisasi\ Pembahasan\ Perda}\ x\ 100\%$
		e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	100%	$\frac{Target\ Pembahasan\ Perda}{Realisasi\ Pembahasan\ Perda}\ x\ 100\%$
		2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	100%	$\frac{Target\ Rapat-rapat\ DPRD}{Realisasi\ RApat-rapat\ DPRD}\ x\ 100\%$

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima 2025-2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima.

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.	
		a Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali
		b Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali
		c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali
		d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	2 Kali / 300 Aspirasi
		e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3 Kali
		2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	150 Kali

2.2. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja DPRD tahun 2025 yang disusun berdasarkan pada rencana Strategis 2025-2029 (Restra) dan Dokumen pelaksana Anggaran tahun 2025 Kota Bima. Penetapan Rencana Kerja dengan mengacu pada sasaran strategis Pemerintah Daerah, sesuai dengan misi ketiga Pemerintah Kota Bima yaitu Mewujudkan masyarakat yang adil melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima dengan tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada sasaran meningkatnya pelayanan publik yang prima, berdasarkan misi dan sasaran pembangunan pemerintah kota bima tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bima telah menetapkan Sasaran Strategis yaitu ***Meningkatnya Pelayanan Terhadap Kegiatan DPRD*** dengan indikator kinerja utama :

1. Jumlah Pembahasan Raperda yang difasilitasi
2. Jumlah Pembahasan Anggaran yang difasilitasi.
3. Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yang difasilitasi.
4. Jumlah Reses Dewan yang difasilitasi
5. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan kapasitas anggota dewan
6. Jumlah Rapat-rapat yang difasilitasi

Untuk menunjang terwujudnya sasaran strategis daerah tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bima telah menetapkan program kegiatan yang menunjang terwujudnya sasaran startegis

Sekretariat DPRD yaitu 1 (satu) program Utama yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan yang mendukung sasaran strategis Sekeretariat DPRD Kota Bima Yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagan DPRD dan ditunjang oleh 1 (satu) program pendukung yang dijabarkan dalam 9 (Sembilan) Kegiatan.

Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bima yang telah ditetapkan pada tahun 2025 tentu dibutuhkan sumber dana sebagai salah satu syarat keberhasilan suatu rencana. Dengan demikian dalm penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja tahunan tidak terlepas dari sistim perencanaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bima.

Pada prinsipnya Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini akan menguraikan target kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bima selama tahun 2025, target kinerja menggambarkan nilai kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada setiap program dan kegiatan maupun tingkat sasaran yang dijadikan tolok ukur keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misinya.

Adapun sasaran strategis, indikator kinerja dan kuantitas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima yang hendak dilaksanakan pada tahun 2025 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat DPRD 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1 Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.	
		a Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali
		b Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali
		c Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali
		d Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	2 Kali / 300 Aspirasi
		e Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3 Kali
		2 Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	150 Kali

Untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut Sekretariat DPRD Kota Bima melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Anggaran yang ditetapkan Rp. 25.702.650.598,00 (Dua puluh lima miryar tujuh ratus dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan delapan rupiah) maka dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan sasaran strategis Sekretariat DPRD didukung oleh 1 (satu) program utama yaitu **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** dengan pagu Anggaran Rp. 6.807.802.900,00 dan beberapa kegiatan dijabarkan dalam 7 (tujuh) kegiatan yang terdiri dari :

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
7. Fasilitasi Tugas DPRD

Sedangkan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut Sekretariat DPRD Kota Bima menetapkan 1 (satu) program Pendukung yang dijabarakan dalam 9 kegiatan, yang masing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagi berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 15.995.000,00**

   Dari program ini, ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah **Terlaksananya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Selama Satu Tahun**, dengan indikator kinerja, melalui kegiatan :

   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 14.948.516.158,00**

   Dari program ini, ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah **Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja, melalui kegiatan

   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 469.163.000,00**

   Dari program ini, ditetaapkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**, dengan indikator kinerja, melalui kegiatan:

   a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 844.231.800,00**

   Dari program ini, ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan adalah **Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan indikator kinerja, melalui kegiatan:

   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 597.503.000,00**

   Dari program ini, ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan **adalah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan indikator kinerja, melalui kegiatan:

   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 967.925.740,00**

   Dari program ini, ditetapkan sasaran yang ingin diwujudkan **adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan indikator kinerja, melalui kegiatan:

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

7. **Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Rp. 383.161.000,00**

   a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

   b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

   c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

8. **Layanan Administrasi DPRD Rp. 668.352.000,00**

   a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alats pertanggungjawaban secara periodik. Tujuan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasayarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekeretariat DPRD Kota Bima yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 sebagaimana teah dilakukan reviuw pada tahun 2024. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara Penetapan Kinerja (PK) dengan capaian.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2025 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebabkan keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

LKIP 2025 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara Rencana Kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Untuk mengetahui tingkat persentase pencapaian masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang mencakup pengukuran pencapaian indikator sasaran. Pengukuran Kinerja dalam rangka untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan pencapaian sasaran dilakukandengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yangtelah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam :

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Taget}} \times 100\ \%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus panjang.

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi-Target})}{\text{Taget}} \times 100\ \%$$

Urutan	Rentang capaian	Kategori capaian
I	>100%	Sangat berhasil
II	91% - 100%	Berhasil
III	81% - 90%	Cukup Berhasil
IV	< 81%	Kurang Berhasil

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Sekretariat DPRD Kota Bima memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, hasil pengukuran/ realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi capaian kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Target		Realisasi %		Capaian %
1	2	3			4		4		4
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	1	Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		100,00		105,42		105,42
			a	Jumlah Pembahasan Perda	6	Kali	3	Kali	50,00
			b	Jumlah Pembahasan Anggaran	5	Kali	5	Kali	100,00
			c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13	Kali	13	Kali	100,00
			d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	450	Kali/ Aspirasi	450	Kali/ Aspirasi	100,00
			e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3	Kali	3	Kali	100,00
		2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD		150	Kali	187	Kali	124,67

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bima yaitu Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD dengan

indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan program utama adalah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD. sebagai berikut :

b. Indikator kinerja yang ditetapakan adalah Meningkatntya pelayanan terhadap kegiatan DPRD.

Terkait dengan tingkat pelayanan terhadap kegiatan DPRD dapat dijelaskan dibawah ini yaitu :

1. Pembahasan RAPERDA yang difasilitasi

Pembahasan RAPERDA dengan target 6 (Enam) kali dalam setahun dan terealisasi 4 (empat) kali yang terbagi pada tiga masa persidangan :

URAIAN KEGIATAN	TANGGAL PENETAPAN	NOMOR SK	RAPERDA YANG DITETAPKAN		KET
Raperda yang ditetapkan	03 Juli 2025	5 tahun 2025	1	Penetapan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2024	SK Penetapan terlapmpir
	08 Agustus 2025	7 Tahun 2025	2	Penetapan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025 - 2029	
	22 Agustus 2025	8 Tahun 2025	3	Penetapan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2025	
	28 Nopember 2025	13 Tahun 2025	4	Penetapan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2026	

2. Pembahasan Anggaran yang difasilitasi

a. Pada masa Persidangan Ketiga DPRD Kota Bima Pembahasan Raperda Anggaran ditargetkan 5 kali yang terdiri dari pengajuan anggaran perubahan sesuai dengan kebutuhan kebijakan daerah, dan pengajuan Raperda tentang APBD Tahun berikutnya.

b. Dalam perjalanan kegiatan pembahasan Anggaran pada DPRD Kota Bima Tahun 2025, realisasinya sebanyak 5 kali sesuai dengan targetyang terdiri dari

<u>Masa Sidang III yaitu :</u>

1. Pembahasan KUA dan PPAS APBD 2026 pada bulan Juli,
2. Pembahasan Perda LPJ APBD 2024 Bulan Juli 2025 dan
3. Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan 2025 pada Bulan Agustus 2026.

<u>Masa Sidang I yaitu :</u>

1. Pembahasan Perubahan APBD 2025 Bulan September – Oktober 2025 dan
2. Pembahasan APB Tahun 2026 Bulan Nopember 2025

3. Pelaksanaan Pengawasan yang difasilitasi

Untuk pelaksanaan pengawasan ini dari target 13 kali terealisasi 12 atau 69,23%, dimana pada kegiatan terdiri Pengawasan oleh 3 Komisi sebanyak 6 kali, rapat kerja dengan OPD 4 kali dan rapat untuk meminta pertanggungjawaban walikota atas pelaksanaan APBD sebanyak 2 kali.

4. Pelaksanaan Kegiatan Reses

Pelaksanaan Kegiatan Reses DPRD ditargetkan sebanyak 3 kali dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat 450 aspirasi dengan realisasi 3 kali dengan aspirasi yang disampaikan sebanyak 450 aspirasi atau 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.327.644.900,00 dari target sebesar Rp 2.322.844.900,00 atau capaian 99,79% peningkatan jumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat pada saat reses DPRD disebabkan karena antusias masyarakat yang menyampaikan aspirasi semakin baik dan anggota DPRD betul-betul mengunjungi semua wilayah di Kelurahan sesuai Daerah Pemilihannya masing-masing.

Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Bima Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	PELAKSANA KEGIATAN	KET
1	RESES ANGGOTA DPRD KOTA BIMA	19 sd 24 April 2025	KOTA BIMA (SESUAI DAERAH PEMILIHAN)	25 ANGGOTA DPRD	Laporan Kegiatan Terlampir
2		23 sd 28 Maret 2025	KOTA BIMA (SESUAI DAERAH PEMILIHAN)	25 ANGGOTA DPRD	
3		1 sd 6 Desember 2025	KOTA BIMA (SESUAI DAERAH PEMILIHAN)	25 ANGGOTA DPRD	

5. Peningkatan kapasitas anggota DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD melalui Bimtek di targetkan sebanyak 2 kali kegiatan dan terealisasi 2 kali kegiatan dari target 50 Orang teralisasi 50 atau 100,00% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 747.000.000,00,- dari target anggaran sebesar Rp. 740.872.696,00,- pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam menyikapi berbagai kebutuhan masyarakat dan meresponsif perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terjadi di tingkat Pemerintahan Pusat.

No	Uraian kegiatan	Waktu pelaksanaan	Tempat pelaksanaan	Pelaksana kegiatan	Materi kegiatan	Narasumber	Ket
1	Bintek DPRD Kota Bima						Lap Keg. Terlampir
2							

6. Fasilitasi Atas rapat-rapat DPRD

Rapat-rapat DPRD ditargetkan sebanyak 150 Kali sedangankan realisasinya 187 Kali atau 124,67% adapun rincian sebagai berikut :

a. Rapat Paripurna DPRD Kota Bima.

Pelaksanaan Rapat Paripurna ditargetkan sebanyak 50 kali dengan realisasi sebanyak 65 kali atau Kenaikan pencapaian dari target kegiatan ini disebabkan karena agenda rapat paripurna DPRD yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan berdasarkan surat masuk dari Pemerintah Daerah dan agenda-agenda internal DPRD.

b. Rapat Alat Kelengkapan.

Pelaksanaan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DPRD dengan target sebanyak 150 kali dengan realisasi kegiatan sebanyak 187 kali dengan anggaran Rp. 7.710.891.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.647.851.314,00,- atau capaian 99,18% pencapaian realisasi rapat alat kelengkapan DPRD ini sesuai dengan target yang direncanakan, karena dalam hal ini Komisi-Komisi DPRD lebih intens dan tepat waktu dalam melakukan rapat baik rapat internal maupun rapat membahas dokumen APBD dan Badan Legislasi Daerah Kota Bima melakukan pembahasan yang terkait dengan Raperda yang diajukan diluar Prolegda, Penyusunan Prolegda Tahun 2025 serta rapat-rapat harmonisasi terhadap Raperda usulan DPRD dan usulan Eksekutif, juga alat-alat kelengkapan DPRD menerima unsur masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui rapat dengar pendapat dengan masyarakat sebanyak 33 kali serta melakukan rapat dengan SKPD terkait dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

c. Peningkatan jumlah Risalah Sidang diselesaikan tepat waktu.

Kegiatan penyusunan Risalah Sidang sesuai dengan jumlah kegiatan DPRD berdasarkan keputusan DPRD Kota Bima tentang penetapan program kerja tahunan DPRD, sehingga untuk tahun 2025 capaiannya sesuai dengan target, dalam penyusunan risalah sidang DPRD Kota Bima harus mengacu pada hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan disampaikan serta ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sehingga setiap hasil rapat paripurna DPRD akan di dokumentasikan dalam dokumen risalah sidang DPRD oleh sekretariat DPRD sehingga telah didokumetasi 8 Risalah dalan tahun 2025.

d. Pelaksanaan kegiatan Hearing DPRD

Kegiatan Hearing DPRD pencapaian melebihi dari target, hal ini karena terjadinya dinamika yang cukup tinggi di Kota Bima sehingga beberapa elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD untuk merespon beberapa kebijakan Dearah. Dari pelaksanaan hearing sekretariat DPRD Kota Bima setelah selesai kegiatan hearing dilakukan langsung menyusun notulen berdasarkan catatan pada saat kegiatan untuk disampaikan ke pimpinan hearing sehingga kegiatan tersebut disampaikan pimpinan hearing ke pimpinan DPRD untuk bahan pertimbangan dan analisa. Pelaksanaan hearing sebanyak 32 kali baik oleh pimpinan maupun hearing dengan komisi dan unsur Alat-alat kelengkapan DPRD Kota Bima dalam tahun 2025.

No	Nomor Surat	Hari / Tanggal	Tujuan Surat	Kegiatan	Jenis Rapat
1	172/057/DPRD/2/2025	25 Feb 2025	1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bima 2. Walikota Bima 3. Asosiasi Guru PAI	RDP dengan Asosiasi Guru PAI	RDP
2	100.1.6/70/DPRD/III/2025	18 Maret 2025	1. Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) Indonesia Dewan Pengurus	Audiensi bersama Ikatan Penyuluh Keluarga	RDP

			Cabang Bima 2. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bima	Berencana (IPeKB) Indonesia Dewan Pengurus Cabang Bima	
3	100.1.6/72/DPRD/III/2025	18 Maret 2025	1. Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bima 2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima	RDP dengan Pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas	RDP
4	100.1.6/85/DPRD/IV/2025	09 April 2025	1. Lembaga Keadilan Poros Muda (LKPM) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2. Pimpinan dan Anggota Komis II DPRD Kota Bima	Rdp dengan Lembaga Keadilan Poros Muda (LKPM) Nusa Tenggara Barat (NTB)	RDP
5	100.1.6/86/DPRD/IV/2025	11 April 2025	1. Ikatan Mahasiswa Kota Bima IMKOBI-Mataram 2. Pimpinan BEM-UMBIMA 3. BARDAM NTB	RDP dengan Ikatan Mahasiswa Kota Bima IMKOBI-MATARAM	RDP
6	100.1.6/129/DPRD/V/2025	05 Mei 2025	Walikota Bima	RDP Walikota Bima	RDP
7	100.1.6/130/DPRD/V/2025	05 Mei 2025	1. Walikota Bima 2. Pimpinan PT. Hutama Karya (Persero) Pelaksana Proyek Pembangunan RSUD Kota Bima	RDP dengan Walikota Bima	RDP
8	100.1.6/131/DPRD/V/2025	06 Mei 2025	1. Forum Umat Islam Bima Raya 2. Komisi I	RDP dengan Forum Umat Islam Bima Raya	RDP
9	100.1.6/436/DPRD/V/2025	06 Mei 2025	1. KP45 2. Komisi I	RDP KP45	RDP
10	100.1.6/199/DPRD/VI/2025	11 Juni 2025	1. Bayu Purwadi, SH. 2. Komisi I	RDP dengan Bayu Purwadi, SH.	RDP
11	100.1.6/206/DPRD/VI/2025	24 Juni 2025	1. BAZNAS 2. Komisi I	RDP dengan Ketua Pimpinan Seleksi BAZNAS	RDP
12	100.1.6/211/DPRD/VII/2025	1 Juli 2025	1. Dewan Pengurus Daerah Aliansi R4 Indonesia 3. Komisi I	RDP dengan Dewan Pengurus Daerah Aliansi R4 Indonesia	RDP
13	100.1.6/212/DPRD/X/2025	02 Juli 2025	1. Aliansi Honorer Non-Database BKN 2. Komisi I	RDP dengan Aliansi Honorer Non-Database BKN	RDP
14	100.1.6/234/DPRD/VII/2025	28 Juli 2025	1. Pemuda pemerhati hukum dan kebijakan 2. Pimpinan DPRD	RDP dengan Pemuda pemerhati hukum dan kebijakan	RDP
15	100.1.6/240/DPRD/VII/2025	29 Juli 2025	1. Komisi II 2. PT kecubung jaya	RDP dengan PT kecubung jaya	RDP
16	100.1.6/414/DPRD/IX/2025	08 Sep 2025	1. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima 2. PT Bimatama Migas Bersinar 3. Kepala PT Pertamina (Persero) 4. Kapolres Kota Bima 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bima	Rdp dengan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima	RDP
17	100.1.6/415/DPRD/IX/2025	08 Sep 2025	1. Sdr. Muslim 2. H.Yasin , H. Syairil H. 3. Bunyamin, Robertus Soeraya 4. Ety Aryati, SE. 5. Diana Indah, SE. 6. Muhammad Arifin H. Adnan 7. Ang Anwar Hidayat dan Turino Wijaya 8. Hj. Martina 9. Komalawati 10. Tan Hendrik Mulyadi	RDP dengan Sdr. Muslim H.Yasin , H. Syairil H. Bunyamin, Robertus Soeraya	RDP
18	100.1.6/417/DPRD/IX/2025	08 Sept 2025	1.Kepala Diskoperindag Kota Bima 2.Kepala Sat Pol PP Kota Bima 3.Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Setda Kota Bima 4. Pimpinan DPRD dan Komisi II DPRD Kota Bima	RDP dengan EK-LMND	RDP
19	100.1.6/422/DPRD/IX/2025	10 Sept 2025	1. Guru SDN 69 Kabanta 2. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bima	RDP dengan SDN 69 Kabanta	RDP
20	100.1.6/435/DPRD/IX/2025	29 Sept 2025	1. Asisten I Setda Kota Bima 2. Kepala Bidang BMD BPKAD Kota Bima 3. Kepala Dinas PUPR Kota Bima 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima . 5. Pimpinan dan Anggota Komisi III	RDP dengan kantor advokat dan konsultasi hukum No. 32/23.09/SK/VIII/2025 sebagai kuasa hukum Sdr. Bobby Candra	RDP
21	100.1.6/436/DPRD/X/2025	29 Sept 2025	1. Kepala Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhamad Haikal, SH. MH.	RDP Lintas Komisi DPRD Kota Bima dengan pertanahan	RDP

22	100.1.6/437/DPRD/X/2025	2 Okt 2025	2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bima 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima Beserta Kepala Bidang Penetapan dan Kepala Bidang BMD 4. Kepala Dinas PUPR 5. Kepala Dinas Perkimtan Kota Bima 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima 6. Camat RasanaE Barat Kota Bima 7. Camat Asakota Kota Bima 8. Lurah Dara Kota Bima 9. Lurah Ule Kota Bima	RDP dengan Sulaiman, S.Sos., S.H Partners No. 03/Permo/IX/2025 sebagai Kuasa Hukum Sdr. Muslim H. Yasin.	RDP
23	100.1.6/438/DPRD/X/2025	3 Okt 2025	1. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bima 2. Kepala Disparbud Kota Bima 3. Kepala Diskanlut Kota Bima 4. Camat Asakota Kota Bima 5. Lurah Ule Kota Bima 6. CV. Bima Permata Seafood	RDP dengan CV. Bima Permata Seafood (Komisi III)	RDP
24	100.1.6/439/DPRD/X/2025	06 Okt 2025	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bima	RDP dengan Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Bima Nusantara (BARDAM)	RDP
25	100.1.6/441/DPRD/X/2025	10 Okt 2025	1. Ksatria Muda dan Pemuda Kota Bima Nusa Tenggara Barat 2. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bima	Undangan Audiensi tentang Dasar Hukum untuk Tambang Galian C di beberapa wilayah Kota Bima.	RDP
26	100.1.6/444/DPRD/X/2025	16 Okt 2025	1. Walikota Bima 2. Masyarakat Kolo 3. Komisi III	RDP dengan Masyarakat Kolo	RDP
27	172.1.6/445/DPRD/X/2025	16 Okt 2025	1. Walikota Bima 2. Pimpinan BPJS Kesehatan Kota Bima 3. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bima	Hak - hak tenaga kesehatan	R. Koordinasi
28	100.1.6/446/DPRD/X/2025	17 Okt 2025	1. Dinas PUPR 2. Dinas PERKIM 3. Dinas KOPERINDAG 4. Inspektorat 5. BPKAD 6. DPMPTSP 7. Lurah Raba Ngodu Selatan 8. Lintas Komisi	RDP Masyarakat Rontu	RDP
29	100.1.6/451/DPRD/X/2025	27 Okt 2025	1. Walikota Bima 2. Lurah Lampe 3. Lurah PenaNa'e 4. Lurah Lelamase 5. Kepala Dusun Ndano Na'e 6. Maria donggomasa 7. Aliansi Masyarakat Sipil 8. Lintas Komisi	RDP Aliansi Masyarakat Sipil	RDP
30	100.1.6/464/DPRD/X/2025	10 Nov 2025	1. Walikota Bima 2. Dinas KOPERINDAG 3. Komisi II	RDP dengan Kelompok PKL Taman Amahami Kota Bima	RDP
31	100.1.6/465/DPRD/X/2025	10 Nov 2025	1. F-MAKI-NTB 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima 3. Kepala Dinas Dikpora Kota Bima 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima 5. Pimpinan dan Anggota Komisi I Kota Bima 6. Koordinator MBG Wilayah Kota Bima 7. Supplier Pangan Bergizi (SPPG) Kota Bima 8. Ketua Satgas BGN (Sekda) Kota Bima	RDP dengan Front Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat (F-MAKI-NTB)	RDP
32	100.1.6/466/DPRD/XI/2025	14 Nov 2025	1. Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia *(Indonesian Student of University Association)* Nusa Tenggara Barat 2. Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Kota Bima 3. Kepala Dinas PUPR Kota Bima 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima 5. Camat Kecamatan Mpunda	Aktivitas penimbunan material pasir di Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima	RDP

			6. Lurah Kelurahan Monggonao (Lurah Monggonao diperintahkan untuk memanggil pemilik pasir)		
33	100.1.2/473/DPRD/XI/2025	25 Nov 2025	1. Sekretaris Daerah Kota Bima Bersama Asisten Terkait 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima Bersama Pejabat Terkait 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima Bersama Pejabat Terkait 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima Bersama Pejabat Terkait 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bima Bersama Pejabat Terkait 6. Camat Kecamatan Rasana'E Barat Kota Bima Bersama Lurah Kelurahan Dara	Memastikan perkembangan pembebasan lahan guna mendukung pembangunan NUFReP tahun 2025	R. Koordinasi

A.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2025

Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima sesuai dengan dokumen rencana Strategis, maka program/kegiatan dan sasaran stategis pada Tahun 2025 sama dengan program kegiatan serta sasaran pada Tahun 2024, namun dari sisi pencapaian target dapat digambarkan pencapaian pada tahun 2024 dan pencapaian pada tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel sesuai dengan sasaran strategis yang dicapai sebagai berikut :

Indikator Kinerja		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	4	4
1	Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.	100,00	109,01	109,01	100,00	105,42	105,42
a	Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali	5 Kali	83,33	6 Kali	3 Kali	50,00
b	Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali	4 Kali	100,00	5 Kali	5 Kali	100,00
c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali	13 Kali	100,00	13 Kali	13 Kali	100,00
d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	300 Kali/ Aspirasi	300 Kali/ Aspirasi	100,00	450 Kali/ Aspirasi	450 Kali/ Aspirasi	100,00
e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali	100,00	3 Kali	3 Kali	100,00
2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	140 Kali	183 Kali	130,71	150 Kali	187 Kali	124,67
Rata-rata capaian kinerja				109,01			105,42

1. Indikator kinerja Porsentase Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan

a. Indikator kinerja Pembahasan Perda.

Dari indikator ini dapat dijelaskan perbandingan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Program Kegiatan Th. 2024			Program Kegiatan Th. 2025			Ket
	Target	Realisasi	Cap.%	Target	Realisasi	Cap.%	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali	5 Kali	83,33%	6 Kali	3 Kali	50,00	Kurang Berhasil

Dari tabel tersebut diatas bahwa untuk capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami penurunan hal tersebut dilihat dari capai taget tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024, dimana pada tahun 2024 target 6 Kali, terealisasi 5 kali atau 83,33%, sedangkan tahun 2025 dari taget 6 kali teralisasi 3 kali atau 50,00%

sehingga mengalami penurunan realisasi 33,33%, realiasi kinerja 50,00% masuk pada kategori “Kurang Berhasil”

b. Indikator kinerja Pembahasan Anggaran.

Dari indikator ini dapat dijelaskan perbandingan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Program Kegiatan Th. 2024			Program Kegiatan Th. 2025			Ket
	Target	Reliasasi	Cap.%	Target	Reliasasi	Cap.%	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali	4 Kali	100%	5 Kali	5 Kali	100%	Sama

Dari tabel tersebut diatas bahwa untuk capaian kinerja untuk indicator Fasilitasi Pembahasan anggaran tidak terjadi peningkatan atau penurunan dimana yang di targetkan pada tahun 2024 dan 2025 sama-sama terealisasi 100%. Capaian realisasi 100% masuk pada katogori **“Berhasil”**

c. Indikator kinerja Pelaksanaan Pengawasan.

Dari indikator ini dapat dijelaskan perbandingan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Program Kegiatan Th. 2024			Program Kegiatan Th. 2025			Ket
	Target	Reliasasi	Cap.%	Target	Reliasasi	Cap.%	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali	13 Kali	100,00%	13 Kali	13 Kali	100,00%	Sama

Dari tabel tersebut diatas bahwa untuk capaian kinerja dewan untuk fasilitasi Pengawasan DPRD pada tahun 2025 tidak terjadi peningkatan atau penurunan dimana yang ditargetkan pada tahun 2024 dan tahun 2025, sama – sama terealisasi 100%. Capaian realisasi 100% masuk pada katogori **“Berhasil”**

d. Indikator kinerja Pelaksanaan Reses DPRD.

Dari indikator ini dapat dijelaskan perbandingan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Program Kegiatan Th. 2021			Program Kegiatan Th. 2022			Ket
	Target	Reliasasi	Cap.%	Target	Reliasasi	Cap.%	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD	2 Kali /300 Aspirasi	2 Kali /300 Aspirasi	100%	3 Kali /450 Aspirasi	3 Kali /450 Aspirasi	100%	Sama

Dari tabel tersebut diatas bahwa untuk capaian kinerja untuk indicator Fasilitasi Pelaksanaan Reses DPRD tidak terjadi peningkatan atau penurunan dimana yang di targetkan pada tahun 2024 dan 2025 sama-sama terealisasi 100%. Capaian realisasi 100% masuk pada katogori **“Berhasil”**

e. Indikator kinerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD.

Dari indikator ini dapat dijelaskan perbandingan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Program Kegiatan Th. 2024			Program Kegiatan Th. 2024			Ket
	Target	Reliasasi	Cap. %	Target	Reliasasi	Cap. %	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	100%	Sama

Dari tabel tersebut diatas bahwa untuk capaian kinerja untuk indicator Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD tidak terjadi peningkatan atau penurunan dimana yang di targetkan pada tahun 2024 dan 2025 sama-sama terealisasi 100%. Capaian realisasi 100% masuk pada katogori **"Berhasil"**

2. Indikator kinerja Porsentase Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD

Dari indikator ini dapat dijelaskan perbandingan dengan tahun sebelumnya melalui tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Program Kegiatan Th. 2023			Program Kegiatan Th. 2024			Ket
	Target	Realisasi	Cap.%	Target	Realisasi	Cap.%	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*
Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	140 Kali	183 Kali	130,71%	150 Kali	187 Kali	124,67%	Sangat Berhasil

Dari tabel tersebut diatas bahwa untuk capaian kinerja untuk pelaksanaan Rapat-rapat pada tahun 2024 mengalami peningkatan hal tersebut dilihat dari capai taget tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024, dimana pada tahun 2024 target 144 Kali, terealisasi 183 kali atau 130,71%, sedangkan tahun 2025 dari taget 150 kali teralisasi 187 kali atau 124,67% sehingga mengalami penurunan realisasi 6,05%, realiasi kinerja 124,67% masuk pada kategori "Sangat Berhasil"

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Taget Jangka Menengah

Program/kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima sesuai dengan dokumen rencana Strategis, maka program/kegiatan dan sasaran stategis pada Tahun 2025 mengalami perubahan sesuai dengan Rentra Sekretariat DPRD Kota Bima tahun 2025-2029, namun dari sisi pencapaian target dapat digambarakan pencapaiannya sesuai dengan tabel sasaran strategis yang dicapai, sebagai berikut :

Indikator Kinerja			2024			2025				
			Target	Realisasi	Cap	Target		Realisasi		Cap
1			2	3	4	5		4		4
1	Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		100,00	109,01	109,01	100,00		105,42		105,42
	a	Jumlah Pembahasan Perda	6 Kali	5 Kali	83,33	6	Kali	3	Kali	50,00
	b	Jumlah Pembahasan Anggaran	4 Kali	4 Kali	100,00	5	Kali	5	Kali	100,00
	c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13 Kali	13 Kali	100,00	13	Kali	13	Kali	100,00
	d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	300 Kali/ Aspirasi	300 Kali/ Aspirasi	100,00	450	Kali/ Aspirasi	450	Kali/ Aspirasi	100,00
	e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3 Kali	3 Kali	100,00	3	Kali	3	Kali	100,00
2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD		140 Kali	183 Kali	130,71	150	Kali	187	Kali	124,67

A.4. Analisa Kinerja Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 dan Alternatif solusi yang telah dilakukan

a. Analisa Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja dapat diukur melalui perbandingan antara targert dengan realisasi berdasarkan indikator kinerja utama dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perbandingan sebagaimana dimaksud adalah apabila realisasi kegiatan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bima sesuai dengan sasaran strategis, maka peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima dapat digambarkan melalui **PROGRAM PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI** yang dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja			Target		Rea %		Cap %	Ket.
3			4		4		4	5
1	Jumlah Fasilitasi Penyele nggaraan Administrasi Kesekretariatan Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan.		100,00		105,42		105,42	Meningkat
	a	Jumlah Pembahasan Perda	6	Kali	3	Kali	50,00	Menurun
	b	Jumlah Pembahasan Anggaran	5	Kali	5	Kali	100,00	Sesuai
	c	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan	13	Kali	13	Kali	100,00	Sesuai
	d	Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang difasilitasi	450	Kali/ Aspirasi	450	Kali/ Aspirasi	100,00	Sesuai
	e	Jumlah Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota DPRD	3	Kali	3	Kali	100,00	Sesuai
2	Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD		150	Kali	187	Kali	124,67	Meningkat

Dari penyajian data tersebut diatas, menunjukan bahwa setiap indicator yang telah ditetapkan pencapaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal ini sangat dipengaruhi oleh program kegiatan tahunan DPRD yang telah ditetapkan oleh DPRD itu sendiri, sehingga target yang ditetapkan akan sedikit terjadi fluktuatif dari kegiatan yang dilaksanakan baik pada sisi peningkatan maupun pada penurunan, karena pada dasarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa fungsi Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan adminsitratif pada DPRD.

b. Analisa Hambatan Kinerja

Hambatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima dapat terjadi apabila kondisi pelaksanaan tugas, fungsi serta wewenang DPRD tidak berjalan sebagaimana yang telah dituangkan dalam agenda kegiatan DPRD. Pada tahun 2025 tidak terjadi hambatan yang signifikan terhadap target yang ditetapkan. Karena hambatan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan target akan bergantung sungguh pada pelaksanaan kegiatan DPRD itu sendiri.

c. Alternatif Solusi

Solusi yang dapat dilaksanakan untuk permasalahan penurunan kinerja, adalah melalui optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, apabila pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dapat terlaksana semua sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan, maka kinerja Sekretariat DPRD akan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

A.5. Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

Secara umum dari program – program kegiatan yang telah di tetapkan telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang telah di tetapkan. Ini dapat dilihat dari target masing – masing program realisasinya 100% demikian juga dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan dari masing – masing kegiatan realisasinya juga diatas 90%.

TABEL ; Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian penetapan kinerja.

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja program(outcome) / Kegiatan (output)	Target 2025	Realisasi capaian	Cap %
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah kegiatan Pembahasan Rancangan peraturan Daerah yang dilaksanakan tepat waktu, Jumlah kegiatan Pembahasan Anggaran yang dilaksanakan tepat waktu, Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan, Jumlah Kegiatan Bintek DPRD yang dilaksanakan, dan Jumlah Aspirasi yang diserap pada Pelaksanaan Reses			
1	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Pembahasan Perda**	**5 Kali**	**5 Kali**	**100,00**
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penetapan Program Pembentukan Perda 2025	**5 Kali**	**5 Kali**	**100,00**
2	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Pembahasan Anggaran**	**5 Kali**	**5 Kali**	**100,00**
	Pembahasan KUA dan PPAS	Penandatangan Nota Kesepahaman KUA dan PPAS	1 Kali	1 Kali	100,00
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Penandatangan Nota Kesepahaman Perubahan KUA dan PPAS	1 Kali	1 Kali	100,00
	Pembahasan APBD	Penetapan Persetujuan APBD	1 Kali	1 Kali	100,00
	Pembahasan APBD Perubahan	Penetapan Persetujuan Perubahan APBD	1 Kali	1 Kali	100,00
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Penetapan Perda LPJ APBD Tahun 2024	1 Kali	1 Kali	100,00
3	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan**	**13 Kali**	**13 Kali**	**100,00**
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi I	2 Kali	2 Kali	100,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 3	2 Kali	2 Kali	100,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi I	2 Kali	2 Kali	100,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 2	2 Kali	2 Kali	100,00
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 3	2 Kali	2 Kali	100,00
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi 2	2 Kali	2 Kali	100,00
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi - komisi	1 Kali	1 Kali	100,00
4	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD**	**3 Kali**	**3 Kali**	**100,00**
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Berkualiatas	3 Kali	3 Kali	100,00
5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Pelaksanaan Reses DPRD yang di fasilitasi**	**3 Kali**	**3 Kali**	**100,00**
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	3 Kali	100,00
II	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Rapat - rapat yang difasilitasi tepat waktu**	**150 Kali**	**187 Kali**	**124,67**
1	**Layanan Administrasi DPRD**	**Penyelenggaraan Rapat - rapat DPRD**	**150 Kali**	**187 Kali**	**124,67**
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Paripurna dan lainnya	150 Kali	187 Kali	124,67

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung terlaksannya program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima, untuk tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 25.702.630.598,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Sembi;an Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 24.155.033.026,00 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 93,98%.

Berikut ini akan disajikan besaran anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adala sebagai berikut :

Rekapitulasi Belanja Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Operasional	25.131.150.598,00	23.683.533.156,00	94,24
2.	Belanja Modal	571.500.000,00	471.99.870,00	82,50
Jumlah		**25.02.650.598,00**	**4.155.033.026,00**	**93,98**

Hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**6.363.544.900,00**	**6.302.70.234,00**	**99,03**
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	827.755.000,00	791.610.138,00	95,63
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	14.070.000,00	14.062.500,00	99,95
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	44.730.000,00	30.555.000,00	68,31
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.247.000.000,00	1.240.672.696,00	99,49
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.329.989.900,00	2.325.169.900,00	99,79
	Fasilitasi Tugas DPRD	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	668.352.000,00	668.342.000,00	100,00
	Layanan Administrasi DPRD	668.352.000,00	668.342.000,00	100,00

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Sekretariat DPRD Kota Bima juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel : Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2025 :

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**15.995.000,00**	**15.950.000,00**	**99,72**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.983.000,00	1.983.000,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.998.000,00	1.994.000,00	99,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.439.000,00	1.429.000,00	99,31
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.537.000,00	1.532.000,00	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.537.000,00	1.532.000,00	99,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.716.000,00	1.700.000,00	99,07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.785.000,00	5.780.000,00	99,91
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**14.948.516.158,00**	**13.633.471.583,00**	**91,20**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.662.222.158,00	13.359.417.583,00	91,11
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	280.413.000,00	268.183.000,00	95,64
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.146.000,00	5.136.000,00	99,81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	735.000,00	735.000,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**469.163.000,00**	**467.646.860,00**	**99,68**
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	469.163.000,00	467.646.860,00	99,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**844.231.800,00**	**744.160.691,00**	**88,15**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.237.800,00	6.237.800,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	645.250.000,00	545.184.870,00	84,49
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.744.000,00	42.738.100,00	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	149.999.921,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**597.503.000,00**	**544.912.006,00**	**91,20**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	134.403.100,00	127.658.100,00	94,98
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	197.662.800,00	171.411.806,00	86,72
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.337.100,00	94.337.100,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.100.000,00	151.505.000,00	88,55
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**967.925.740,00**	**964.242.853,00**	**99,62**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.355.740,00	45.309.690,00	99,90
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	922.570.000,00	918.933.163,00	99,61
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	**383.161.000,00**	**374.096.000,00**	**97,63**
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	36.691.000,00	32.626.000,00	88,92
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	271.470.000,00	266.470.000,00	98,16
Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
Layanan Administrasi DPRD	**668.352.000,00**	**668.342.000,00**	**100,00**
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	668.352.000,00	668.342.000,00	100,00
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**827.755.000,00**	**791.610.138,00**	**95,63**
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	245.345.000,00	221.217.638,00	90,17
Pembahasan Rancangan Perda	562.290.000,00	562.287.500,00	100,00
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.715.000,00	1.712.500,00	99,85
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	14.450.000,00	2.437.500,00	16,87
Penyusunan Tata Tertib DPRD	3.955.000,00	3.955.000,00	100,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	**14.070.000,00**	**14.062.500,00**	**99,95**
Pembahasan KUA dan PPAS	2.345.000,00	2.342.500,00	99,89
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2.345.000,00	2.340.000,00	99,79
Pembahasan APBD	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00
Pembahasan APBD Perubahan	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00
Pembahasan Laporan Semester	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.345.000,00	2.345.000,00	100,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**44.730.000,00**	**30.555.000,00**	**68,31**
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	7.965.000,00	7.965.000,00	100,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.435.000,00	-	-
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7.965.000,00	5.670.000,00	71,19
Pengawasan Penggunaan Anggaran	22.365.000,00	16.920.000,00	75,65
Peningkatan Kapasitas DPRD	**1.631.426.000,00**	**1.624.871.696,00**	**99,60**
Pendalaman Tugas DPRD	1.247.000.000,00	1.240.672.696,00	99,49
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	217.900.000,00	217.674.000,00	99,90
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	164.900.000,00	164.900.000,00	100,00
Penyusunan Program Kerja	1.626.000,00	1.625.000,00	99,94
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	**2.329.989.900,00**	**2.325.169.900,00**	**99,79**
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.345.000,00	2.325.000,00	99,15
Pelaksanaan Reses	2.327.644.900,00	2.322.844.900,00	99,79

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	**59.832.000,00**	**59.792.299,00**	**99,93**
Penyusunan Kode Etik DPRD	5.985.000,00	5.980.000,00	99,92
Pengawasan Kode Etik DPRD	53.847.000,00	53.812.299,00	99,94
Fasilitasi Tugas DPRD	**1.900.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	**100,00**
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	100,00
JUMLAH	**25.702.650.598,00**	**24.158.883.526,00**	93,99

B.1. Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Dengan adanya Perda Susunan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, telah memiliki fungsi secara rentang kendali organisasi, beban tugas dan pemanfaatan sumber daya semakin efisien. Efisiensi tersebut berupa.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD Kota Bima dan sekertariat DPRD Kota Bima perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dari sisi sumber aparatur secara kuantitas jumlah aparatur pendukung di sekertariat DPRD Kota Bima sudah mencukupi. karena didukung oleh 29 (Dua Puluh Sembilan) aparat PNS dan 38 (Tiga puluh Delapan) orang aparat non PNS, tetapi dari sisi kualitas sumber daya yang ada, masih mangalami kendala terutama untuk tenaga – tenaga tehnis penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, tenaga operasional komputer, serta tenaga pendamping rapat-rapat DPRD yang mampu memahami penyusunan notulen Rapat, untuk lebih mengoptimalkan kinerja fraksi – fraksi dewan diperlukan tenaga ahli terutama untuk membantu fraksi – fraksi dewan dalam menetapkan berbagai kebijakan yang bersifat politis sehingga kebijakan – kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana dalm mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan serta sarana dan prasarana yang dapat memberikan rasa nyaman bagi aparat dalam bekerja secara umum sudah dapat terpenuhi tetapi untuk mendukung pelaksanaan jasa surat menyurat masih terkendala dengan kurangnya sarana transportasi terutama kendaraan roda dua.

Tabel : **Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No		Program /Kegiatan	Capaian Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Anggaran	Efiensi
1	**Program Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD**		**Baik**	**98,33**	**Efisien**
	a	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	**83,33%**	97,53%	**Efisien**
	b	Pembahasan Kebijakan Anggaran	**100,00%**	99,44%	**Efisien**
	c	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	**100,00%**	**80,82%**	**Efisien**
	d	Peningkatan Kapasitas DPRD	**100,00%**	98,70%	**Efisien**
	e	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Kegiatan Reses)	**100,00%**	**99,70%**	**Efisien**
2	**Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				
	a	Fasilitasi Tugas DPRD (Rapat - rapat DPRD)	**98,11%**	99,50%	**Efisien**

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap tujuan reformasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Kota Bima yang merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah menyusun LKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang memberikan gambaran tentang perkembangan capaian kinerja, dan diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali sekaligus pendorong atau pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bima telah melakukan banyak hal dan cukup berhasil. Namun dalam implementasinya masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan kontekstualisasi persoalan maupun komitmen terhadap upaya menata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, maka Sekretariat DPRD Kota Bima pada tahun anggaran 2025 mempunyai 16 kegiatan yang dituangkan dalam 2 program, yang terdiri dari 1 (satu) program Utama yaitu Program Dukungan Pelasksanaan Tugas dan Fungsi DPRD didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan penunjang, dengan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Kota Bima yaitu Meningkatnya Pelayanan kepada DPRD, dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebanyak 6 (enam) Indikator yaitu :

a. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah dilaksanakan
b. Jumlah Pembahasan Anggaran yang dilaksanakan
c. Jumlah Pelaksanaan Kontrol/Pengawasan DPRD
d. Jumlah pelaksanaan Reses DPRD yang dilaksanakan
e. Jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas DPRD yang diselesaikan
f. Jumlah Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD yang diselesaikan tepat waktu

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Bima menetapkan 1 Program pendukung yang terdiri dari 9 kegiatan. Pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan tersebut capaiannya rata-rata diatas 90% sehingga kinerja Sekretariat DPRD Kota Bima dapat dikategorikan pada kinerja yang meningkat atau baik, untuk pengukuran Indikator Kinerja Utama DPRD mencapai rata-rata indakator kinerja pada capaian kinerja 105,85%, untuk capaian ini dikategorigan kinerja DPRD pada Kategori **“Sangat Berhasil”.**

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bima telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian di dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala :

- Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- Belum tersedianya tenaga ahli yang dapat menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Bima sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. Saran-Saran

Rencana Straregis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya perlu diambil upaya-upaya sebagai berikut:

- Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bima perlu melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada setiap triwulan untuk mendeteksi kelemahan dan kekuatan pada Sekretariat DPRD Kota Bima sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan.
- Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kegiatan Sekretariat perlu meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) pada masing-masing Bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bima.
- Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bima, maka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional.
- Untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi fraksi – fraksi dan alat kelengkapan DPRD Kota Bima diperlukan tenaga ahli fraksi dan tim pakar untuk alat kelengkapan guna membantu fraksi – fraksi dan alat kelengkapan dalam merumuskan berbagai kebijakan publik sehingga di harapkan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan dapat bermanfaat dan berpihak untuk kepentingan dan kemajuaan masyarakat Kota Bima.

Demikian LKIP ini di susun dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas Sekretariat DPRD Kota Bima yang tertuang dalam program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kota Bima, Februari 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA BIMA,

INYA GHAZALI, S. Sos,. MM
NIP. 19720902 200604 1 017

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2025 telah dapat terselesaikan. LKIP Dinas Perhubungan sebagai hasil akhir proses penyusunan laporan kinerja yang memuat akuntabilitas kinerja dan keuangan serta hasil akhir kegiatan dan capaian program yang dapat dicapai oleh satu atau lebih kegiatan yang bermuara pada sasaran program yang telah direncanakan.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas laporan kinerja. LKIP ini dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2025-2029 sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin. Walaupun demikian, disadari bahwa laporan yang telah disusun tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga masih terus memerlukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi evaluasi kinerja Dinas Perhubungan khususnya dan kegiatan pembangunan di Kota Bima pada umumnya.

Kota Bima, 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

Drs. Is Fahmin, M.Ap

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19731110 199211 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **3**

DAFTAR TABEL **4**

BAB I PENDAHULUAN **5**

1.1 Umum 5

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 5

1.3 Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bima 7

1.4 Kondisi Umum Dinas Perhubungan Kota Bima 7

1.4.1 Struktur Organisasi 7

1.4.2 Tugas dan Fungsi 8

1.4.3 Sarana dan Prasarana Pendukung: 18

1.4.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA **22**

2.1 Isu-Isu Strategis 22

2.1 Visi & Misi 23

2.2 Tujuan & Sasaran 23

2.3 Program dan kegiatan 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **27**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 27

3.2 Standar Penilaian Capaian 27

3.3 Pengukur Capaian Sasaran 28

3.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 28

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja 50

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 50

3.7 REALISASI ANGGARAN 62

BAB IV P E N U T U P **67**

DAFTAR TABEL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Penyusunan LKIP pada Dinas Perhubungan dilakukan sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui laporan ini, Dinas Perhubungan menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lalu lintas, angkutan, keselamatan transportasi, serta pengembangan sarana dan prasarana transportasi guna menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui penyusunan LKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya serta sebagai bentuk akuntabilitas kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2025 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan SAKIP;
10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu SAKIP;
11) PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP;

12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan LKIP;
13) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima;
14) Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

1.3 Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bima

Terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah.

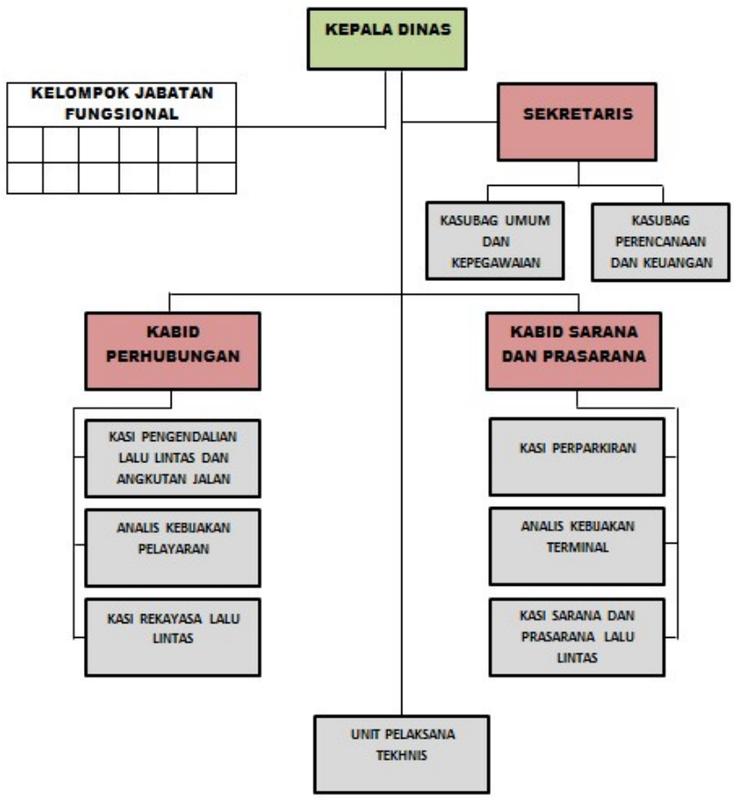
Keberadaan Dinas Perhubungan Kota Bima sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2016. Rincian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Bima diatur melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.4 Kondisi Umum Dinas Perhubungan Kota Bima

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bima ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. Sesuai Peraturan tersebut, Dinas Perhubungan terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 2 (dua) orang Kepala Bidang (Eselon III), 2 (dua) orang Kepala Sub. Bagian (Eselon IV) dan 6 (enam) Kepala Seksi (Eselon IV).

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 50 TAHUN 2017



B. Tugas dan Fungsi

Rincian uraian tugas Dinas Perhubungan Kota Bima adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagaian urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas meliputi bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan visi dan misi;
2. Penetapan Rencana Strategis Dinas Perhubungan untuk mendukung visi dan misi Kota Bima serta kebijakan;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis di bidang perhubungan;

5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pemberian perizinan bidang perhubungan;
6. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait di bidang perhubungan;
7. Pembinaan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana yang menjadi aset dinas perhubungan;
8. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
11. Penyelenggaraan administrasi di bidang perhubungan;
12. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan;
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik / kekayaan daerah dan negara di lingkungan badan;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
3. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai ;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
5. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik aerah/negara;
6. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
7. Penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan dibidang perhubungan;
4. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perhubungan;
5. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
6. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang perhubungan;
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perhubungan;

8. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
9. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji, perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Perhubungan

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan rencana umum jaringan transportasi dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
2. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas seksi pengendalian lalu lintas angkutan jalan, seksi perhubungan laut dan seksi rekayasa lalu lintas;
4. Pelaksanaan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas transportasi daerah;
5. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya Kota Bima;
7. Penyusunan perumusan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Kota Bima;
8. Pemrosesan rekomendasi izin Angkutan kota Dalam Provinsi (AKDP);
9. Pemprosesan rekomendasi izin usaha angkutan umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek;
10. Penyusunan dan perumusan jaringan jalan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima;
11. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kota Bima;
12. Pemrosesan rekomendasi operasi angkutan sewa izin usaha angkutan pariwisata dan izin usaha angkutan barang;
13. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan umum dalam daerah;

14. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan daerah;
15. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan data statistik terkait tugas bidang perhubungan dalam daerah;
16. Pemrosesan rekomendasi izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
17. Penyusunan dan merumuskan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengamanan dan pengawasan lalu lintas;
18. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketertiban lalu lintas;
19. Pelaksanaan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perhubungan;
20. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan membawahi:

a) Kasi Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kasi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan, merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pembinaan teknis operasi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kasi pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan lingkup tugasnya;
2. Penyusunan rencana kerja seksi pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan visi misi bidang;
4. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran kegiatan pada lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait berdasarkan ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penujang pelaksanaan tugas;

6. Koordinasi, sinkronisasi dalam operasi dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
7. Penyusunan rencana dan penetapan jadwal kegiatan operasi dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kota Bima;
8. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima;
9. Pelaksanaan penertiban kelebihan muatan angkutan orang dan angkutan barang;
10. Penyusunan dan penetapan batas maksimum buatan barang dan berat kendaraaan yang akan lewat pada jalur jalan yang di tetapkan;
11. Penyiapan bahan penyusunan rancangan kebijakan penertiban kendaraan bongkar muat barang;
12. Pembinaan pengembangan karir dan kesejahteraan staf serta memberikan penghargaan dan/atau fasilitas mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan karier bagi staf/bawahan yang berprestasi dan berpotensi;
13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kota Bima;
14. Perencanaan studi kajian analisis dampak lalu lintas (Andalalin) di Kota Bima;
15. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan;
16. Pemeriksaan kendaraaan di jalan sesuai kewenangannya;
17. Pelaksanaan penyelidikan pelanggaraan, kelebihan muatan barang di jembatan timbang dan terminal dan;
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Analis Kebijakan Pelayaran

Analis kebijakan pelayaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan jasa pelayaran dan pengelolaan pelabuhan serta penunjang dan fasilitas pelabuhan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Analis Kebijakan Pelayaran mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja di bidang pelayaran;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang pelayaran;
3. Pelaksanaan anggaran kegiatan;
4. Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait;
5. Pelaksanaan pengawasan atau pemantauan atas pengoperasian kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT7 (GT<7) yang berlayar dilaut;
6. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional dalam bidang pelayaran;
7. Penatapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan rakyat;
8. Penetapan besaran tariff jasa kepelabuhan lokal yang di selenggarakan pemerintahan daerah;
9. Penyusunan dan penetapan tarif angkutan kota untuk angkutan umum kelas ekonomi di jalan Kota Bima;
10. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah;
11. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur bag : perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas wilayah pelabuhan kota dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kasi Rekayasa Lalu Lintas

Kasi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perhubungan dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan rekayasa lalu lintas yaitu manajemen dan perlengkapan jalan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kasi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang rekayasa lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis di bidang rekayasa lalu lintas;

3. Pelaksanaan anggaran kegiatan;Pelaksanaan koordinasi tugas dengan seksi terkait;
4. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, singkronisasi kegiatan, data dan penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan rekayasa lalu lintas;
5. Penyusunan dan perumusan rencana kebijakan dan kebijakan operasional pengaturan, perekayasaaan pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas;
6. Pelaksanaan indentifikasi masalah lalu lintas;
7. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
8. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C;
9. Pengesahan rancangan bangunan terminal tipe C;
10. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
12. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
13. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan;
14. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
15. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota dan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan program pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan, dokumentasi, informasi dan publikasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis rencana umum sarana dan prasarana perhubungan Kota Bima;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;

3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang sarana dan prasarana perhubungan membawahi:

a) Analis Kebijakan Terminal

Analis Kebijakan Terminal mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen pengelolaan terminal di Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Analis Kebijakan Terminal mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja/ SOP pengelolaan terminal;
2. Pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknis operasional pengaturan lalu lintas kendaraaan pada petugas terminal;
3. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir dalam terminal;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan penumpang oleh para sopir dan pengusaha angkutan;
5. Penyiapan data dan statistik, informasi/pengumuman kedatanganan dan keberangkatan bus dan angkutan penumpang dalam terminal kota;
6. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
7. Penyiapan data statistik terminal barang dan data mengenai pemilik, pengemudi angkutan penumpang, angkutan barang dalam wilayah terminal barang kota;
8. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Kasi Perpakiran

Kasi Perpakiran mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional manajemen parkir Kota Bima.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kasi Perpakiran mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan dan penyiapan, perumusan kebijakan, penyusunan pedoman kerja / SOP pengelolaan parkir;
2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring atas pelayanan parkir oleh juru parkir pada titik-titik parkir di wilayah kota;
4. Penyusunan program dan rencana kegiatan seksi;
5. Penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan anggaran kegiatan seksi dan;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Kasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan, mengatur mengawasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis serta kebijakan operasional sarana dan prasarana lalu lintas Kota Bima, dan melaksanakan tugas dibidang Penerangan Jalan Umum (PJU).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kasi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
3. Pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sarana dan prasarana lalu lintas;
4. Pelaksanaan laporan secara berkala kepada atasan dan;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penerangan Jalan meliputi perencanaan, dekorasi dan penerangan jalan, pemeliharaan dan pengawasan lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;

7. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan terhadap lampu penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
8. Penyusunan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang penerangan jalan;
9. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas penerangan jalan, lampu hias, dekorasi dan pengadaan lampu jalan serta peralatan lainnya;
10. Penyiapan dan pengoordinasian pembayaran pajak penerangan jalan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

e. Unit Pelaksanaan Tekhnis

UPT adalah Unit Pelaksanaan Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagaian tugas teknis Dinas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas Fungsional dengan keahlian seperti: menilai kelayakan kendaraan yang akan diterbitkan surat kelayakan operasionalnya.

Jabatan fungsional pada OPD Dinas Perhubungan terdapat pada Balai Pengujian Kendaraan bermotor, Bidang Sarpras dan Bidang Perhubungan.

1.5 Sarana dan Prasarana Pendukung:

Sebagai sumber daya pendukung kegiatan operasional Dinas Perhubungan Kota Bima, di bawah ini disajikan data-data yang berkaitan dengan SDM, Sarana dan Prasarana serta ruang lingkup kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, jumlah sumber daya aparatur yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bima sebanyak 168 orang, yang terdiri dari 29 orang PNS, 52 orang PPPK dan 87 PPPK Paruh Waktu dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/b	-
3	IV/a	1
4	III/d	10
5	III/c	4
6	III/b	1
7	III/a	9
8	II/d	1
9	II/c	2
10	II/b	-
11	IX	4
12	V	47
13	I	1
	Jumlah	81

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	S2	3	6.06
2	S1	22	57.57
3	D3	0	0
4	SLTA	7	33.33
5	SMP	0	0
6	SD	0	0
	Jumlah	**32**	**99.99**

Tabel 1.3 Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	29
2	Perempuan	3
	Jumlah	32

Tabel 1.4 Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan Berdasarkan Kualifikasi Teknis

Kualifikasi	Yang Ada	Ideal	Kurang
Penguji	2	5	3
S1/D4 Transportasi Darat	1	2	1
S1/DIII Ahli LLAJ	-	4	4
PPNS	0	4	4

Jika diperhatikan sumber daya manusia sesuai dengan kenyataan di atas, jelaslah bahwa berdasarkan atas kualifikasi pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan teknologi perhubungan, komunikasi dan informatika masih belum mendukung. Untuk itu, usaha untuk mendapat tambahan aparatur SDM yang secara teknis mampu dan terampil sudah dilakukan, namun sampai saat ini masih belum terpenuhi.

Tabel 1.5 Sarana Pendukung

No.	U r a i a n	Jumlah	Ket.
1	Mobil Operasional	1	
2	Mobil Operasional/Patwal	2	
3	Bus	2	
4	Sepeda Motor Patwal	4	
5	Sepeda Motor	9	
6	Kamera	1	
7	Handycame	1	
8	Laptop	19	
9	HT	9	
10	Komputer	4	
11	Printer	11	
12	Alat Uji Kendaraan (KIR)	5	
13	Terminal Type A (AKAP)	-	
14	Terminal Type B	-	
15	Terminal Type C	2	
16	Terminal Dump Truck/Bongkar Muat/Gudang	1	

Mencermati beberapa data yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, kiranya dapat diketahui bahwa masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi, baik itu sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Dinas.

1.6 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan senantiasa menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan pelayanan sektor transportasi. Dinamika perkembangan wilayah, pertumbuhan penduduk, serta meningkatnya mobilitas masyarakat menuntut penyelenggaraan transportasi yang semakin efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan.

Peluang pengembangan pelayanan di sektor perhubungan antara lain didukung oleh adanya kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen transportasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, perkembangan pembangunan wilayah dan pertumbuhan kegiatan ekonomi juga membuka peluang bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi serta pengembangan sistem transportasi yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya volume kendaraan yang tidak selalu diimbangi dengan kapasitas infrastruktur jalan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi yang semakin pesat juga menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi dalam pengelolaan pelayanan transportasi.

Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu terus melakukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi dengan berbagai pihak, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan peluang yang ada serta mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, diharapkan pelayanan perhubungan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima pada prinsipnya merupakan turunan dari hal-hal yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2024-2026. Pada hakekatnya, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima Tahun 2024-2026.

2.1 Isu-Isu Strategis

Berikut ini adalah isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas.

1. Kemacetan lalu lintas di Kota Bima yang semakin memprihatinkan terutama pada ruas-ruas jalan tertentu yang sudah mencapai indeks tingkat pelayanan (ITP) E yang menunjukan bahwa kinerja ruas jalan mendekati macet total;
2. Penataan dan pengembangan Terminal Induk Kota Bima sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang refresentatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
3. Komputerisasi system perpakiran dalam wilayah Kota Bima dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perparkiran;
4. Peremajaan Traffic Light dalam wilayah Kota Bima dengan menggunakan system *Area Traffic Control System (ATCS)*;
5. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kodisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor;
6. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan laut yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kota Bima dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi laut;
7. Mengoperasikan angkutan missal dengan wilayah operasi Kota Bima dan sekitarnya;

8. Melakukan peremajaan terhadap angkutan kota tahun pembuatan 1989 kebawah dan/atau yang sudah tidak laik jalan;
9. Membuka rute angkutan kota yang baru pada jalan-jalan arteri atau kawasan pemukiman yang belum dilayani angkutan kota seperti Jalan Lingkar Dalam, Lingkar Selatan, dan Jalan HKSN (perumahan) serta lokasi lain dalam wilayah Kota Bima;
10. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan kota termasuk angkutan liar, uji kendaraan bermotor, sertifikat dan dokumen kapal serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;
11. Pemeliharaan fasilitas perhubungan baik dijalan maupun di Laut;
12. Pembangunan terminal angkutan barang yang melayani bongkar muat dari dan ke wilayah Bima sehingga untuk pelayanan masuk kota Bima hanya dengan menggunakan mobil barang kecil.

2.1 Visi & Misi

Visi jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: ***"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"***

Guna mewujudkan visi tersebut di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi Dinas Perhubungan dirumuskan dalam RPJMD sebagai berikut : ***"Mewujudkan lingkungan yang berkualitas dan ramah melalui penyediaan infrastruktur pendukung perkotaan yang terintegrasi dengan pengurangan resiko bencana".***

2.2 Tujuan & Sasaran

Untuk mendukung tercapaianya misi maka telah ditentukan tujuan untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai selama waktu 5 (lima) tahun. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bima adalah **"Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi daerah".**

Tabel 2.1 Tujuan & Sasaran Straregis Dinas Perhubungan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	2024	2025	2026	2022	2023
Meningkatnya kualitas infrastruktur transportasi daerah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Angkutan Jalan	• Persentase panjang jalan yang sesuai standar • Persentase terminal yang sesuai standar	90,00 %	95,00 %	100,00%	77.40 %	82.35%

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan sasaran-sasaran strategis yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2025, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

2.3 Program dan kegiatan

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
   1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota
      a) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota
   2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kota
      a) Penyediaan Perlengkapan Jalan
      b) Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
   3. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      b) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      c) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
      d) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
      e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   4. Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota

a) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

b. Program pengelolaan pelayaran

1. Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

a) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

b) Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal

c. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

2. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota

d. Program penunjang urusan pemerintah daerah

1. Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat

a) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

b) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

c) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

2. Administrasi keuangan

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

d) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

e) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3. Administrasi umum

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

h) Penyediaan Alat Tulis Kantor

i) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

j) Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
k) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
l) Penyediaan Makan dan Minuman
m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
n) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
o) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

4. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur
   a) Pendidikan dan pelatihan formal

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target Kinerja sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Bima dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat dalam tabel Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Angkutan Jalan	• Persentase panjang jalan yang sesuai standar • Persentase terminal yang sesuai standar	-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

3.2 Standar Penilaian Capaian

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2 Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian

No	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

3.3 Pengukur Capaian Sasaran

Kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2025, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No.	Kategori	Sasaran
1	Berhasil	4
2	Cukup Berhasil	0
3	Kurang Berhasil	0
4	Tidak Berhasil	0
	Jumlah	4

3.4 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Adapun pengukuran capaian kinerja utama pada setiap sasaran strategis adalah:

Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur angkutan jalan, diukur dengan menggunakan indikator kinerja yaitu 1. Persentase panjang jalan yang sesuai standar dan 2. Persentase terminal yang sesuai standar. Realisasi ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan pada tahun 2025 sebesar 90% lebih tinggi dari target 53%. Atas penilaian tersebut dikategorikan berhasil.

Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas infrastruktur angkutan jalan	Persentase panjang jalan yang sesuai standar	53,45 %	98,18%	100%
	Persentase terminal yang sesuai standar	23,44 %	99,26%	100%
	Persentase Parkir yang sesuai standar	75%	93,87%	100%

Sasaran berkurangnya pelanggaran lalu lintas di jalan meliputi program peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi dengan kegiatan peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, pemeliharaan sarana

dan prasarana perlengkapan jalan, dan pengadaan sarana prasrana perlengkapan jalan.

Berikut data kendaraan bermotor yang telah di uji kir Tahun 2025 dan data sarana prasarana perlengkapan jalan:

Data jumlah kendaraan yang telah melaksanakan uji berkala pada tahun 2025

NO	BULAN	JUMLAH KENDARAAN	JUMLAH BUKU UJI	RETRIBUSI	KET
1	Januari	403	403		
2	Februari	520	520		
3	Maret	553	553		
4	April	661	661		
5	Mei	680	680		
6	Juni	601	601		
7	Juli	759	759		
8	Agustus	646	646		
9	September	689	689		
10	Oktober	757	757		
11	November	701	701		
12	Desember	96	96		
	Jumlah	7066	7066		
	Porsentase				

Unit Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin kelayakan teknis kendaraan yang beroperasi di jalan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta memastikan kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.5 Data jumlah sarana prasarana keselamatan transportasi tahun 2025 Rambu-rambu lalu lintas

No	Alamat/Jalan	Jumlah yang masih ada	Ket
1	JLN Ir. SOETAMI	16	
2	JLN BELIMBING	3	
3	JALAN ANGUR	1	
4	JALAN LANGSAT	3	
5	JALAN PEPAYA	8	
6	JALAN ISHAKA ABDULLAH	26	
7	JLN SOEKARNO HATTA	20	
8	JLN SURAU	1	
9	JLN PENDIDIKAN	5	
10	JLN GARUDA	3	
11	JLN KESATRIA	7	
12	JLN SULTAN HASANUDDIN	1	
13	JLN GAJAH MADA	6	
14	JLN ADI PUTRA	2	
15	JLN GATOT SUBROTO		
16	JLN SUDIRMAN		
17	JLN IMAM BONJOL	6	
18	JLN SAROJA		
19	JLN ANGGREK		
20	JLN MONGINSIDI	2	
21	JLN LINTAS PELABUHAN	1	
22	JLN PADOLO 3		
23	JLN DATUK DIBANTA	2	
	Jumlah	113	

Tabel 3.6 Data jumlah Traffic Light

NO	NAMA BARANG	PEMEGANG/ALAMAT	KETERANGAN
1	Traffic light	Cab pasar raya bima (At Taqwa)	
2	Traffic light	Jl. Soekarno Hatta – Raba (cab Gunung dua)	
3	Traffic light	Rehap Traffic Light cab peternakan kel lewirato	
4	Traffic light	Masjid raya al muwahiddin	
5	Traffic light	Cab ranggo (pos lama)	
6	Traffic light	Cab santi	
7	Traffic light	Revitalisasi lamp merah J. gatot subrotoo	

Tabel 3.7 Lampu Jalan dan Lampu Perumahan/Lampu Taman

NO	LOKASI	JUMLAH LAMPU
1	Pintu masuk Batas Kota s/d tikungan jenamawa	92
2	Tikungan Jenamawa s/d Wadu Mbolo	59
3	Lawata s/d Cabang Pasar Ama Hami/depan kuburan cina	32
4	Padolo III s/d Padolo II	34
5	Jalur terminal/padolo I s/d cbg. Lampu merah pasar lama	36
6	Dantraha/rade raja	9
7	Sonco Tengge s/d depan kel. Sambinae	27
8	Sambinae s/d kel panggi	23
9	Kompleks pasar raya lama	8
10	Duta ban s/d pelabuhan	21
11	Jalur masjid uswatun / kompleks SMK I kel melayu	30
12	Jalur ule s/d kedo	22
13	Oi'mbo s/d cbg nungga	11
14	Nungga	7
15	Cbg nungga s/d kodo I	22
16	Dodu I s/d dodu II	13
17	Depan gasut pramuka	9
18	Lampe timur s/d lampe barat	11
19	Jembatan sambinae s/d cbg. Lampu merah sadia	3
20	Lampu jalan kel rontu	8
21	Lampu jalan depan SDN rabangodu s/d rutan	10
22	Lampu jalan kel mande I.II.III s/d rabangodu selatan	30
23	Lampu jalan jln sudirman rabangodu	34
24	Lampu jalan depan lap pu raba	2
25	Lampu jalan kel rabangodu utara	34
26	Lampu jalan cbg pm s/d rutan raba	10

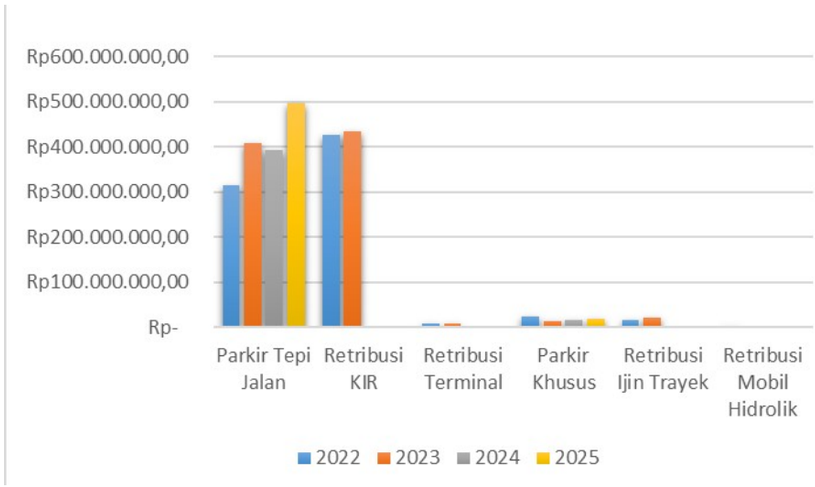
27	Lampu jalan kompleks lap pahlawan raba	31
28	Lampu jalan protocol depan SMA 3 s/d rabadompu timur	21
29	Lampu jln protocol rabadompu timur s/d kumbe	8
30	Lampu jalan lingkup rabadompu timur	7
31	Lampu jalan lingkup rabadompu barat	11
32	Lampu jalan kompleks pasar raba / koni	10
33	Lampu jalan jln gajah mada mulai cbg bolly s/d pandopo	84
34	Lampu jalan jalur SMA 2 s/d cbg SMP 1	16
35	Lampu jalan belakang pemkot	7
36	Lampu jalan cbg tata kota s/d cbg santi	13
37	Lampu jalan jalur manggemaci, bedi, waki, sadia	17
38	Lampu jalan lapangan koni s/d paruga nae	22
39	Lampu jalan cbg penatoi	6
40	Lampu jalan jalur sebelah barat pln	5
41	Lampu jalan cbg johan photo s/d cbg bolly	9
42	Lampu jalan cbg bolly s/d cbg pos lama	4
43	Lampu jalan cbg yasin harapan s/d kompleks masjid raya	12
44	Lampu jalan cbg malake s/d jembatan ranggo	7
45	Lampu jalan depan puskesmas ranggo s/d jatibaru	57
46	Lampu jalan jln diponegoro depan KLK	18
47	Lampu jalan jln kampong baru (kel melayu)	3
48	Lampu jalan jln wonggosidi (kel melayu)	6
49	Lampu jalan jln seruni (kel melayu)	3
50	Lampu jalan jln anggrek (kel sarae)	11
51	Lampu jalan jln mawar (kel sarae)	4
52	Lampu jalan jln saroja (kel nae)	8
53	Lampu jalan jln imam bonjol salama s/d cbg pertigaan santi	16
54	Lampu jalan kel santi	10
55	Lampu jalan cbg tolo tando s/d sonco lela	5

56	Lampu jalan cbg rite s/d ntobo	7
57	Lampu jalan kel pena nae	9
58	Lampu jalan jalur depan masjid baitul hamid penaraga	7
59	Lampu jalan jalur duta ban kompleks pertokoan	20
60	Lampu jalan kompleks lapangan serasuba	10
61	Lampu jalan depan hotel sanggia s/d pos lama	10
62	Lampu jalan jln soekarno hatta	90
63	Lampu PJU (Jl. Melayu Kolo)	70
	JUMLAH LAMPU	1254

Tabel 3.8 Lampu Perumahan

NO	LOKASI	JUMLAH LAMPU
1	Perumahan gindi	34
2	Perumahan tambana	37
3	Perumahan tolotongga	37
4	Perumahan bimantara	16
5	Perumahan sadia	24
6	Perumahan panggi	26
7	Perumahan santi	9
8	Perumahan tolobali	12
9	Perumahan sarata	17
10	Perumahan sambinae	59
	JUMLAH LAMPU	271

Berikut data Pendapatn Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2025 :



Gambar 3.1 Grafik Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel 3.8 Uraian Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

Nama	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Rp. 315.880.000	Rp. 407.254.000	Rp. 393.264.000	Rp. 495.180.000
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Rp. 425.810.000	Rp. 434.860.000	-	-
Retribusi terminal	Rp. 8.730.000	Rp. 7.340.000	-	-
Retribusi tempat khusus parkir	Rp. 24.078.000	Rp. 14.258.000	Rp. 15.686.000	Rp. 19.262.000
Retribusi ijin trayek	Rp. 15.050.000	Rp. 22.550.000	-	-
Retribusi pemakaian kendaraan bermotor-Mobil Hidrolik	Rp. 4.000.000	-	-	-
Jumlah	**Rp. 793.548.000**	**Rp. 886.262.000**	**Rp. 408.950.000**	**Rp. 514.442.000**

Sumber : Data Dinas Perhubungan Kota Bima

Penerimaan retribusi PAD Dinas Perhubungan Kota Bima, pada tahun 2023 lebih besar dari dua tahun sebelumnya. Pencapaian indikator kinerja tersebut,

didukung oleh sejumlah program dan kegiatan yang sekaligus perwujudan kinerja eselon III dan eselon IV. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 3.4.2

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA		
			TARGET	REALISASI	%
A.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	90%	90%	98,53%
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99,11%
-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99,11%
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan prasarna fasilitas jalan yang sesuai standar	1 Paket	1 Paket	98,55%
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	2805 Unit	99,88%
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi	2805 Unit	2805 Unit	97,52%
3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang sesuai dengan standar	2 Unit	2 Unit	99,26%
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	2 Unit	99,26%

	dan Penunjang)				
4.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah rekomendasi izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir secara elektronik	1 Laporan	1 Laporan	93,87%
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	93,87%
5.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan	3000 Unit	3000 Unit	99,21%
-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 Dokumen	3000 Dokumen	99,51%
-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	92,39%
-	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	1 Laporan	99,53%
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	99,32%
6.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rekayasa lalulintas yang diterbitkan	50 Izin	50 Izin	94,67%
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rekayasa lalulintas yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	94,67%

B.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar	25%	25%	96,66%
1.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	persentase pelabuhan rakyat yang telah berizin	50%	50%	96,66%
-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	96,66%
C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	84,67%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100%	100%	79,07%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	98,33%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	0,00%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	84,42%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	84,07%
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD bidang sekertariat	1 Dokumen	1 Dokumen	99,46%

-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	23,08%
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	53,85%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen kelistrikan perkantoran	1 Paket	1 Paket	20,70%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	95,98%
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	1 Paket	1 Paket	81,06%
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	1 Paket	98,28%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	1 Laporan	1 Laporan	77,28%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	82,86%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teregister serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai (K2	1 Laporan	1 Laporan	98,98%

		dan tenaga kontrak)			
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan operasional kantor	1 Laporan	1 Laporan	43,58%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	1 Laporan	1 Laporan	99,02%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	85,24%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	86,21%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan AC, PC, dan Lpaptop	5 Unit	5 Unit	62,40%

Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.4.3

Perbandingan Realisasi Kinerja

Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase panjang jalan yang sesuai standar	90%	80%	88%	90%	88,68%	98,53%
Persentase terminal yang sesuai standar	80%	75%	93,75%	85%	84,37%	99,26%
Persentase Parkir yang sesuai standar	65%	60%	92,30%	70%	65,71%	93,87%

Mencermati beberapa data yang tersaji dalam tabel tersebut diatas, kiranya dapat diketahui bahwa sudah terpenuhinya sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern dinas.

Tabel 3.4.4

Realisasi Angggaran Setiap Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			REALISASI KEUANGAN		
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	90%	90%	98,53%	12.482.546.537	12.298.944.737	98,53%
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99,11%	718.604.000	712.180.000	99,11%
-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99,11%	718.604.000	712.180.000	99,11%
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah kelengkapan prasarna fasilitas jalan	1 Paket	1 Paket	98,55%	10.845.938.537	10.688.928.137	98,55%

	Kabupaten/Kota	yang sesuai standar						
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	2805 Unit	99,88%	4.741.650.000	4.735.730.199	99,88%
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi	2805 Unit	2805 Unit	97,52%	6.104.288.537	5.953.197.938	97,52%
3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang sesuai dengan standar	2 Unit	2 Unit	99,26%	111.000.000	110.183.300	99,26%
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 Unit	2 Unit	99,26%	111.000.000	110.183.300	99,26%
4.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah rekomendasi izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir secara elektronik	1 Laporan	1 Laporan	93,87%	104.426.000	98.029.000	93,87%

-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	93,87%	104.426.000	98.029.000	93,87%
5.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan	3000 Unit	3000 Unit	99,21%	539.768.000	535.489.300	99,21%
-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3000 Dokumen	3000 Dokumen	99,51%	69.298.000	68.960.000	99,51%
-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	92,39%	13.920.000	12.860.000	92,39%
-	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah	1 Laporan	1 Laporan	99,53%	106.000.000	105.500.000	99,53%

	Bermotor Wajib Uji	Kendaraan Bermotor Wajib Uji						
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	99,32%	350.550.000	348.169.300	99,32%
6.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rekayasa lalulintas yang diterbitkan	50 Izin	50 Izin	94,67%	162.810.000	154.135.000	94,67%
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rekayasa lalulintas yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	94,67%	162.810.000	154.135.000	94,67%
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar	25%	25%	96,66%	27.400.000	26.485.000	96,66%
1.	Pembangunan, Penerbitan	persentase pelabuhan	50%	50%	96,66%	27.400.000	26.485.000	96,66%

	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	rakyat yang telah berizin						
-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	96,66%	27.400.000	26.485.000	96,66%
C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	84,67%	6.812.226.810	5.767.937.789	84,67%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100%	100%	79,07%	14.898.000	11.780.000	79,07%
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	216.000	0	0,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA	1 Dokumen	1 Dokumen	98,33%	11.980.000	11.780.000	98,33%

		Satuan Kerja						
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	0,00%	2.648.000	0	0,00%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00%	54.000	0	0,00%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	84,42%	5.474.061.110	4.621.367.477	84,42%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan pada perangkat daerah	34 Orang/Bulan	34 Orang/Bulan	84,07%	5.277.849.410	4.436.947.477	84,07%
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD bidang sekertariat	1 Dokumen	1 Dokumen	99,46%	184.330.000	183.340.000	99,46%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	0,00%	804.000	0	0,00%

	Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD						
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	23,08%	4.680.000	1.080.000	23,08%
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	6.397.700	0	0,00%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	53,85%	540.308.500	290.960.000	53,85%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen kelistrikan perkantoran	1 Paket	1 Paket	20,70%	12.100.000	2.505.000	20,70%
-	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	1 Paket	95,98%	96.622.000	92.736.000	95,98%

	Perlengkapan Kantor	yang disediakan						
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	1 Paket	1 Paket	81,06%	135.963.500	110.206.000	81,06%
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	1 Paket	98,28%	120.101.000	118.031.100	98,28%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	1 Laporan	1 Laporan	77,28%	175.522.000	135.649.464	77,28%
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	82,86%	258.497.200	214.185.010	82,86%
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teregister serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai (K2	1 Laporan	1 Laporan	98,98%	57.960.000	57.370.000	98,98%

		dan tenaga kontrak)						
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan operasional kantor	1 Laporan	1 Laporan	43,58%	75.307.200	32.817.010	43,58%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	1 Laporan	1 Laporan	99,02%	125.230.000	123.998.000	99,02%
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	85,24%	233.502.000	199.027.018	85,24%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	86,21%	223.980.000	193.085.018	86,21%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan AC, PC, dan Lpaptop	5 Unit	5 Unit	62,40%	9.522.000	5.942.000	62,40%

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja dari program kegiatan yang telah dijalankan yaitu kinerja tim yang bagus dan profesional walau secara bertahap untuk mencapai target bisa terlaksana, faktor kecukupan dana yang mendukung.

Penyebab kegagalan/penurunan kinerja dari program kegiatan yang telah dijalankan yaitu karena musim hujan yang berkepanjangan sehingga menyulitkan untuk merealisasikan belanja modal.

Dari penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja tersebut terdapat solusi yang telah dilakukan perlu adanya sumber daya manusia yang mampu dan siap bekerja sehingga tercapainya target kinerja yang telah ditentukan.

3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Penggunaan Sumber Daya yang relatif efisien tentunya menjadi prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan lain yang membutuhkan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara input dengan output baik untuk rencana maupun realisasi. Capaian outcome yang lebih besar dari pada realisasi keuangan dan atau capaian output mencapai diatas 100% menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja dikategorikan efisien. Apabila terjadi sebaliknya yaitu capaian output lebih kecil dari pada realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja diklasifikasikan tidak efisien. Sedangkan apabila terjadi capaian output sama dengan realisasi keuangan menunjukkan bahwa program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja diklasifikasikan ***sesuai harapan.***

Efisiensi kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Pengukuran efisiensi kegiatan difokuskan pada capaian indikator output/outcome, benefit dan impact dari kegiatan yang bersangkutan. Adapun gambaran analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.4.5

Analisa Efisiensi Capaian Kinerja Program/Kegiatan terhadap Realisasi Keuangan Tahun 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA			REALISASI KEUANGAN			EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	
A.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana yang telah sesuai standar	90%	90%	98,53%	12.482.546.537	12.298.944.737	98,53%	Efisien
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99,11%	718.604.000	712.180.000	99,11%	Efisien
-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	99,11%	718.604.000	712.180.000	99,11%	Efisien

2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kelengkapan prasarna fasilitas jalan yang sesuai standar	1 Paket	1 Paket	98,55%	10.845.938.537	10.688.928.137	98,55%	Efisien
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2805 Unit	2805 Unit	99,88%	4.741.650.000	4.735.730.199	99,88%	Efisien
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi	2805 Unit	2805 Unit	97,52%	6.104.288.537	5.953.197.938	97,52%	Efisien
3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal tipe C yang sesuai dengan standar	2 Unit	2 Unit	99,26%	111.000.000	110.183.300	99,26%	Efisien
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan	2 Unit	2 Unit	99,26%	111.000.000	110.183.300	99,26%	Efisien

		Pengembangan							
4.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah rekomendasi izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir secara elektronik	1 Laporan	1 Laporan	93,87%	104.426.000	98.029.000	93,87%	Efisien
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	93,87%	104.426.000	98.029.000	93,87%	Efisien
5.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang laik jalan	3000 Unit	3000 Unit	99,21%	539.768.000	535.489.300	99,21%	Efisien
-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan	3000 Dokumen	3000 Dokumen	99,51%	69.298.000	68.960.000	99,51%	Efisien

		Bermotor							
-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	92,39%	13.920.000	12.860.000	92,39%	Efisien
-	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	1 Laporan	99,53%	106.000.000	105.500.000	99,53%	Efisien
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	99,32%	350.550.000	348.169.300	99,32%	Efisien
6.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rekayasa lalulintas yang diterbitkan	50 Izin	50 Izin	94,67%	162.810.000	154.135.000	94,67%	Efisien

	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin rekayasa lalulintas yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen	94,67%	162.810.000	154.135.000	94,67%	Efisien
B.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan rakyat yang telah sesuai standar	25%	25%	96,66%	27.400.000	26.485.000	96,66%	Efisien
1.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	persentase pelabuhan rakyat yang telah berizin	50%	50%	96,66%	27.400.000	26.485.000	96,66%	Efisien
-	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit	96,66%	27.400.000	26.485.000	96,66%	Efisien
C.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	84,67%	6.812.226.810	5.767.937.789	84,67%	Efisien

1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan evaluasi kinerja sesuai ketentuan	100%	100%	79,07%	14.898.000	11.780.000	79,07%	Cukup Efisien
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00 %	216.000	0	0,00%	-
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	98,33%	11.980.000	11.780.000	98,33%	Efisien
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	0,00 %	2.648.000	0	0,00%	-
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00 %	54.000	0	0,00%	-
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	84,42%	5.474.061.110	4.621.367.477	84,42%	Efisien
-	Penyediaan Gaji dan	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/Bu	34 Orang/Bula	84,0	5.277.849.	4.436.947.4	84,07%	Efisien

	Tunjangan ASN	yang dibayarkan pada perangkat daerah	lan	n	7%	410	77		
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD bidang sekertariat	1 Dokumen	1 Dokumen	99,46%	184.330.000	183.340.000	99,46%	Efisien
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00%	804.000	0	0,00%	-
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan	23,08%	4.680.000	1.080.000	23,08%	Sangat Efisien
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	6.397.700	0	0,00%	-

		realisasi anggaran							
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	53,85%	540.308.500	290.960.000	53,85%	Cukup Efisien
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen kelistrikan perkantoran	1 Paket	1 Paket	20,70%	12.100.000	2.505.000	20,70%	Sangat Efisien
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	95,98%	96.622.000	92.736.000	95,98%	Efisien
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	1 Paket	1 Paket	81,06%	135.963.500	110.206.000	81,06%	Efisien
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Paket	1 Paket	98,28%	120.101.000	118.031.100	98,28%	Efisien

-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antara bidang dan SKPD terkait serta pelayanan terhadap tamu	1 Laporan	1 Laporan	77,28%	175.522.000	135.649.464	77,28%	Cukup Efisien
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	82,86%	258.497.200	214.185.010	82,86%	Efisien
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang teregister serta terbayarnya honor untuk jasa non pegawai (K2 dan tenaga kontrak)	1 Laporan	1 Laporan	98,98%	57.960.000	57.370.000	98,98%	Efisien
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya pelayanan operasional kantor	1 Laporan	1 Laporan	43,58%	75.307.200	32.817.010	43,58%	Sangat Efisien
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya honor untuk jasa non pegawai	1 Laporan	1 Laporan	99,02%	125.230.000	123.998.000	99,02%	Efisien

5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	85,24%	233.502.000	199.027.018	85,24%	Efisien
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	86,21%	223.980.000	193.085.018	86,21%	Efisien
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan AC, PC, dan Lpaptop	5 Unit	5 Unit	62,40%	9.522.000	5.942.000	62,40%	Cukup Efisien
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	72.92%	460.420.000	383.506.477	72.92%	Cukup Efisien
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	14 Unit	14 Unit	76.26%	270.760.000	194.289.099	76.26%	Cukup Efisien

	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 Unit	14 Unit	100.00%	36.000.000	36.000.000	100.00%	Sesuai Harapan
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan AC, PC, dan Laptop	1 Paket	1 Paket	99.66%	153.660.000	153.217.378	99.66%	Efisien

3.7 REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan pemakaian Sumber Daya Keuangan yang dikelola guna menjalankan program kegiatan yang telah ditargetkan. Berikut uraian dari realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi :

Tabel 3.4.6

Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.482.546.537	12.298.944.737	98,53%
1.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	718.604.000	712.180.000	99,11%
-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	718.604.000	712.180.000	99,11%
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.845.938.537	10.688.928.137	98,55%
-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4.741.650.000	4.735.730.199	99,88%
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	6.104.288.537	5.953.197.938	97,52%
3.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	111.000.000	110.183.300	99,26%
-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	111.000.000	110.183.300	99,26%

4.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	104.426.000	98.029.000	93,87%
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	104.426.000	98.029.000	93,87%
5.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	539.768.000	535.489.300	99,21%
-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	69.298.000	68.960.000	99,51%
-	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.920.000	12.860.000	92,39%
-	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	106.000.000	105.500.000	99,53%
-	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	350.550.000	348.169.300	99,32%
-	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	162.810.000	154.135.000	94,67%
6.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	162.810.000	154.135.000	94,67%

	Kabupaten/Kota			
-	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	27.400.000	26.485.000	96,66%
B.	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	27.400.000	26.485.000	96,66%
1.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	27.400.000	26.485.000	96,66%
-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.812.226.810	5.767.937.789	84,67%
C.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.898.000	11.780.000	79,07%
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	216.000	0	0,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.980.000	11.780.000	98,33%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.648.000	0	0,00%
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000	0	0,00%
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.474.061.110	4.621.367.477	84,42%

2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.277.849.410	4.436.947.477	84,07%
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	184.330.000	183.340.000	99,46%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	804.000	0	0,00%
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4.680.000	1.080.000	23,08%
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	6.397.700	0	0,00%
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	540.308.500	290.960.000	53,85%
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.100.000	2.505.000	20,70%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.622.000	92.736.000	95,98%
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.963.500	110.206.000	81,06%
-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	120.101.000	118.031.100	98,28%
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.522.000	135.649.464	77,28%
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.497.200	214.185.010	82,86%
-	Penyediaan Jasa Surat	57.960.000	57.370.000	98,98%

	Menyurat			
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.307.200	32.817.010	43,58%
5.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.230.000	123.998.000	99,02%
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.502.000	199.027.018	85,24%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	223.980.000	193.085.018	86,21%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.522.000	5.942.000	62,40%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.420.000	383.506.477	72.92%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.760.000	194.289.099	76.26%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000	36.000.000	100.00%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.660.000	153.217.378	99.66%

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Tahun 2025

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang tersusun ini merupakan media pertanggung jawaban atas pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langka-langka perbaikan dimasa-masa mendatang.

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima disusun sesuai dengaN pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No 29 Tahun 2013. Dari Lembaga administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima Tahun 2025 termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai realisasi atas rencana kinerja Tahun 2025. Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2025 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja yaitu suatu sistim anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Pengendalian belanja ditetapkan menjadi 3 target yaitu :

1. Alokasi Belanja yang tepat sasaran
2. Alokasi belanja yang berkeadilan sosial
3. Efisiensi pengadaan barang dan jasa

LKIP Dinas Perhubungan Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bima. Media ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dinas Perhubungan Kota Bima senantiasa terbuka untuk menerima masukan dan menjalin kerjasama dengan semua pihak yang beritikad baik untuk

penyempurnaan program/kegiatan mendatang sehingga dapat memajukan taraf hidup masyarakat.

Kota Bima, 2025

KEPALA DINAS

PERHUBUNGAN KOTA BIMA,

Drs. Is Fahmin, M.Ap

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP: 19731110 199211 1 001

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA BIMA

TAHUN ANGGARAN 2025





dpmptsp Kota Bima

Jl. Gajah Mada No.10 Kel Pane Kec. Rasane Barat Kota Bima - NTB

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, segala puji bagi Allah S.W.T . Kami sampaikan karena atas ijin Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2025 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk dari pengangkatan Status Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Bima yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Fungsi serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima, dengan melaksanakan 1 (Satu) Kinerja Utama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi, berdasarkan SK Kepala DPMPTSP Nomor : 500.16 / 05.a /DPMPTSP/I/2025 Tentang Penetapan Hasil Reviuw Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bima.

Segala Upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi-misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dan LKIP 2025 adalah wujud dari pertanggung jawabkan kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima Tahun 2025 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Kota Bima, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas

Ichwanul Muslimin, S.P, M.M
Pembina TK.I (IV/b)
Nip.197202292005011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

1. MAKSUD DAN TUJUAN..... 2

2. KONDISI ORGANISASI 2

B. TUGAS POKOK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA 3

1. TUGAS 4

2. FUNGSI 4

C. ASPEK STRATEGIS ORGASASI 9

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC YANG DIHADAPI 9

E. SUMBER DAYA 10

F. STRUKTUR ORGANISASI 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

A. PERENCANAA KINERJA JANGKA MENENGHA (RENCANA STRATEGIS).... 14

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 24

C. PERJANJIAN KINERJA 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERAJA 31

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 31

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TERGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI 32

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR 37

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STARTEGIS NASIONAL 43

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL 44

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TE;AH DILAKUKAN 46
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 47
7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN CAPAIAN PERNYATAAN KINERJA 54
B. REALISASI ANGGARAN 58
BAB IV PENUTUP 66

DAFTAR TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Bima 12
Tabel. 1 data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselonering 12
Tabel. 2 Data Menurut Golongan/Ruang 13
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah DPMPTSP 14
Tabel 2.2 Tujuan, sasara, strategis, dan kebijakan 15
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Renstra 24
Table 2.3 Perjanjian Kinerja 26
Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Kinerja 31
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2025 32
Table 3.1.1 tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja sasaran dari Hasil capaian indicator kinerja 32
Table 3.1.1.2. tingkat pencapaian masing-masing indicator kinerja berdasarkan Program dan kegiatan tahun 2025 33
Tabel.3.1.2 Evaluasi Keselarasan Dokumen Perencanaan & Penganggaran... 37
Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM 41
Grafik 3.1.3.1.Realisasi IKM 42
Table 3.1.3.2 rekapitulasi pencapaian indicator kinerja utama untuk IKM 43
Tabel 3.1.3.4. Pengukuran Kinerja Porsentase Nilai Investasi 44
Tabel. 3.1.3.5 Rekapitulasi Nilai Investasi Pelaku usaha dikota bima 46
Grafik 3.1.3.6 Realisasi Nilai Investasi 46
Grafik 3.3.1.7 Rekapan Sebaran NIB Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko.....47
Grafik 3.3.1.8 Rekapan Realisai Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) kota bima 47
Tabel jumlah target dan realisasi LKPM standard nasional 48
Tabel 6.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sunber daya 49
Tabel 6.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya atas program dan Kegiatan 50
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Eselon 53
Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Eselon II 54
Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III 56
Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Eseloan IV 58
Table 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025 58

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), yang mempunyai Tugas kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sebagaimana pada visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pada Renstra 2018-2023.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah menerapkan dan melaksanakan RPJM, RKPD serta Renja sesuai dengan Perubahan Renstra 2014-2018 (Renstra Tahun kedua), termasuk kinerja yang berkaitan dengan SPM yang telah dilaporkan sesuai target BKPM atau Kementrian Investasi.

Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan investasi dan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modan dan PTSP terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan. Untuk kinerja kegiatn capaian program harus terjabarkan dalam LKIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan

realisasi terhadap pengelolaan keuangan perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan terevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaiakan laporan akuntabilitas keuangan kepada pemerintah daerah (Walikota).

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dibuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai Sebagai salah satu pertanggung jawaban Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh setiap perangkat Daerah (PD).

Adapun tujuan dari laporan kinerja instansi pemerintah ini adalah melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksankan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam rangka mengimplementasikan kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian dan kekuranganya untuk dievaluasi.sehingga menjadi dasar bagi penigkatan kegiatan untuk tahun yang akan datang disamping untuk informasi bagi masyarakat yang memerlukan.

2. Kondisi organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);

serta Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu .

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat peraturan walikota bima nomor 76 tahun 2021 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota bima.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA BIMA.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 81 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 713), Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.;

Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;

b. pengelolaan urusan keuangan;

c. pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;

d. pengelolaan urusan ASN; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat membawahi dan mengoordinasikan:

a. Subbagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
b. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
c. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
d. melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
e. melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;

i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;

j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;

k. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha; dan

l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang berjenjang tertinggi dan senioritas.

Kelompok Jabatan Fungsional

Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;

c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi danpengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;

e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;

f. pelaksanaan analisis dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan; dan

h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang berjenjang tertinggi dan senioritas.

Unit Pelaksana Teknis

a. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

b. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi promosi dan penggalian potensi, pengendalian, perizinan dan melakukan kajian untuk regulasi-regulasi yang berkaitan dengan paket insentif dan kemudahan berusaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila dimulai dengan perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang diperhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran yang berupa Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

D. PERMASALAHAN UTAMA/ISSUE STRATEGIC YANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA), Peluang investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Bima.
2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), Kurang optimalnya pengawasan kegiatan penanaman modal karena belum semua investor membuat laporan LKPM Melalui Kepala DPMPTSP dan LKPM secara online.
3. Rasio daya serap tenaga kerja yang ada dikota Bima
4. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah).
5. Online single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
6. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan sistem pelayanan perizinan secara online.
7. Implementasi terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) kota bima.
8. Berlakunya Implementasi PP 28 Tahun 2025 yang lebih menyesuaikan dengan Rencana Detail Tata ruang untuk setiap kegiatan berusaha sehingga menitik beratkan terpenuhinya untuk Perda RDTR kota bima.

E. SUMBER DAYA

Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kota Bima terletak di Jalan Gajah Mada No.10,Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan, ruang pelayaan dan ruang kantor yang memadai dan representatif untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota bima.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

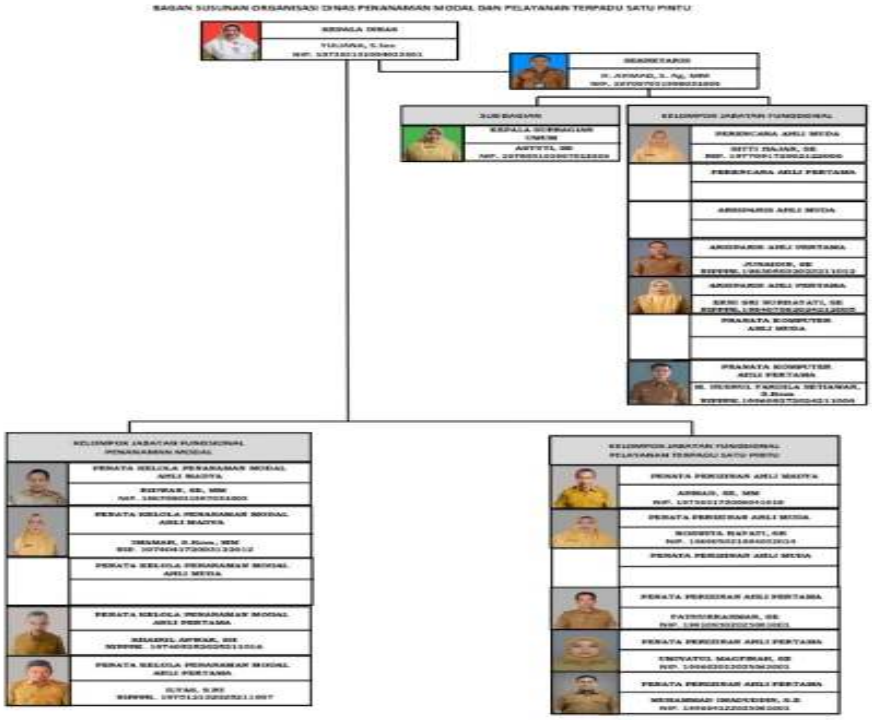
1. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
2. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan I nternet, dan mesin faksimili;
3. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis perencanaan, dilengkapi dengan ketersediaan printer, plotter, dan server;
4. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, GPS, mesin tik, dan LCD proyektor;
5. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemari es, air conditioner (AC), dispenser, kipas angin, dan televisi;
6. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal.
d. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
e. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 1. Struktur Organisasi DPMPTSP KOTA BIMA.



Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Data Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima

Jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Bulan Desember 2023 adalah sebanyak 25 Orang Pegawai dan 10 Orang tenaga Kontrak.

Pegawai berdasarkan kedudukan dalam organisasi

1. Menurut Jabatan/Eselon

Tabel 1. Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No	Eselon	Jenjang Pendidikan				Jumlah Pegawai
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	3	0	1	0	3
2	Eselon III	0	0	18	0	18
3	Eselon IV	0	0	0	4	4
4	Non Eselon	3	0	0	0	0
	Jumlah					**25**

2. Menurut Golongan/Ruang

Tabel.2 Data Menurut Golongan/Ruang

No	Pendidikan	Golongan				Jumlah Pegawai
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	0	3	**3**
2	S1	0	0	18	0	**18**
3	D3/D2/D1	0	0	0	0	**0**
4	SMA	0	4	0	0	**4**
5	SMP	0	0	0	0	**0**
6	SD	0	0	0	0	**0**
	Jumlah	**0**	**4**	**18**	**3**	**25**

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH (RENCANA STRATEGIS)

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD, dengan VISI Pemerintah Kota Bima : Misi ke 5 : Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan dengan Tujuan Meningkatnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat. Berikut keterkaitan antara RPJMD dan Indikator kinerja pemerintah dengan Indikator Dpmptsp Kota Bima, dengan tabel berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Bima
sesuai KEPMENdagri 050_5889 tahun 2021 telah disesuaikan dengan Kepmendagri baru_Nomor_900.1.15.5-1317_Tahun_2023

NO	Tujuan	Indikator kinerja tujuan dan sasaran	Kondisi awal kinerja	Target capaian					Kondisi akhir
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Investasi	Indeks Kepuasaaan Masyarakat (IKM)	90,05	91,62	90,05	90,05	91,00	91,00	91,50
		Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	131.011.714.482	200M	131.011.714.482	131.011.714.482	135M	140M	145M

Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Bima juga mengacu kepada hasil meningkatnyakualitas pelayanan public serta meningkatnya nilai investasi kota bima, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. rencana dan program pembangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima terhadap berbagai aspek dan komponen Pelayanan Publik untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala daerah.

Tabel. 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Misi	Sasaran	Strategis	Kebijakan				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	"Misi V : Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan"	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha				
		Meningkatnya Skor Setiap Elemen Indeks Reformasi	Skor Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan IKM.				

Program/Kegiatan

Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Penanaman modal dan PTSP Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	1.674.000,00	1.671.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.951.000,00	1.951.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.376.000,00	4.375.500,00
	Belanja Lembur	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**8.001.000,00**	**7.998.000,00**
2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	168.000,00	168.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.405.000,00	1.405.000,00
	Belanja Lembur	3.640.000,00	3.640.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**5.573.000,00**	**5.573.000,00**
3	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	700.000,00	700.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.331.000,00	1.331.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.860.000,00	1.860.000,00
	Belanja Lembur	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**3.891.000,00**	**3.891.000,00**
4	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	652.000,00	652.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	700.000,00	700.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**2.512.000,00**	**2.512.000,00**
5	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	716.000,00	716.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.331.000,00	1.330.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.770.000,00	2.770.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**4.817.000,00**	**4.816.000,00**
6	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.213.000,00	3.213.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.192.000,00	2.192.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.660.000,00	2.659.800,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.462.000,00	9.732.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.981.000,00	7.466.000,00
	Belanja Lembur	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.584.000,00	10.560.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**40.092.000,00**	**35.822.800,00**
7	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	1.172.000,00	1.172.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	713.000,00	713.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.206.000,00	2.100.000,00
	Belanja Lembur	3.330.000,00	3.330.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.004.000,00	5.300.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**13.425.000,00**	**12.615.000,00**
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.416.138.375,00	1.374.002.060,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Belanja Gaji Pokok PPPK	210.356.373,00	207.355.866,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.152.898,00	119.107.430,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22.740.844,00	18.205.784,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117.390.000,00	101.510.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.740.000,00	15.400.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.600.000,00	22.031.666,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.300.000,00	39.300.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.975.708,00	4.410.000,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.471.780,00	64.888.320,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.077.240,00	13.874.465,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	43.960.305,00	19.531.611,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	288.934,00	262.271,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.041,00	17.249,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.036,00	2.997,00
	Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan PNS	127.791.406,00	85.708.380,00
	Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan PPPK	19.365.881,00	11.746.254,00
	Belanja Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.486.266,00	2.831.046,00
	Belanja Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	497.508,00	452.826,00
	Belanja Iuaran Jaminan Kematian PNS	10.458.868,00	8.493.189,00
	Belanja Iuaran Jaminan Kematian PPPK	1.492.458,00	1.358.418,00
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	449.462.453,00	399.534.127,00
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	38.749.464,00	35.893.429,00
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	121.384.510,00	108.876.745,00
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	9.973.392,00	9.615.371,00
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	314.408.913,00	281.900.914,00
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.832.976,00	24.905.637,00
	Jumlah Perkegiatan	**3.254.119.629,00**	**2.971.216.055,00**
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	324.000,00	324.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	720.000,00	720.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	630.000,00	630.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.000.000,00	81.480.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**100.674.000,00**	**83.154.000,00**
10	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	503.000,00	503.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	765.000,00	765.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	710.000,00	710.000,00
	Belanja Lembur	3.330.000,00	3.330.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**5.308.000,00**	**5.308.000,00**
11	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	702.000,00	680.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.440.000,00	1.440.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.819.900,00	1.819.900,00
	Belanja Lembur	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**3.961.900,00**	**3.939.900,00**
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	2.508.300,00	2.508.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**2.508.300,00**	**2.508.000,00**
13	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	6.986.000,00	6.985.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	8.476.000,00	8.476.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.802.600,00	6.802.500,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.503.200,00	3.503.000,00
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**31.967.800,00**	**31.967.000,00**
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	10.190.000,00	10.190.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14.977.100,00	14.977.100,00
	Jumlah Perkegiatan	**25.167.100,00**	**25.167.100,00**
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.786.000,00	67.784.420,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.700.000,00	29.700.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**97.486.000,00**	**97.484.420,00**
16	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	144.000,00	144.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	378.000,00	378.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	103.200.000,00	96.500.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**104.082.000,00**	**97.382.000,00**
17	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.394.700,00	1.394.700,00
	Belanja Tagihan Listrik	59.501.520,00	56.408.735,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	139.082.400,00	131.129.060,00
	Jumlah Perkegiatan	**199.978.620,00**	**188.932.495,00**
18	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	10.000.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.400.000,00	37.399.739,00
	Jumlah Perkegiatan	**47.400.000,00**	**47.399.739,00**
19	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
	Belanja Pemeliharaan Alat kantor - Sarana Kantor (AC Split)	6.100.000,00	5.990.000,00
	Belanja Pemeliharaan Komputer, - Komputer Unit - Personal Computer	12.410.000,00	11.901.200,00
	Jumlah Perkegiatan	**18.510.000,00**	**17.891.200,00**
20	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.690.000,00	1.690.000,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	116.258.000,00	115.616.000,00
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.552.000,00	17.500.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**150.000.000,00**	**149.306.000,00**
21	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	565.000,00	565.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas Cover	408.000,00	342.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	800.000,00	799.900,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	536.000,00	536.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.400.000,00	14.305.800,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000,00	2.880.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**19.589.000,00**	**19.428.700,00**
21	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**		

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	5.693.000,00	5.692.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.938.000,00	18.936.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	33.720.100,00	33.709.800,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	240.000,00	240.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.168.000,00	396.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.294.000,00	8.280.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**70.053.100,00**	**67.253.800,00**
22	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	706.000,00	706.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	720.000,00	682.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.990.900,00	1.950.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**11.516.900,00**	**11.438.000,00**
23	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**		
	Pemantauan, Analis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	625.000,00	625.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	936.000,00	930.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.694.200,00	1.634.200,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**8.655.200,00**	**8.589.200,00**
24	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengawasan Penanaman Modal		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.279.000,00	2.278.500,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	***2***	***3***	***4***
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.434.000,00	1.431.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.049.800,00	3.049.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	6.600.000,00	6.600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.695.000,00	4.920.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	8.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**46.357.800,00**	**41.879.100,00**
25	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.421.000,00	3.421.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.741.000,00	3.705.900,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.786.800,00	3.786.700,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	2.200.000,00	2.200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.020.000,00	3.888.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	4.950.000,00	4.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	5.240.000,00	4.890.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah Perkegiatan	**32.358.800,00**	**30.891.600,00**
	Jumlah Total	**4.308.005.149,00**	**3.974.364.109,00**

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP . Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2030.

Tabel 2.2. Penetapan Indikator Kinerja Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Bima Nomor 500.16 / 21 /Dpmptsp/I/2023 TentangPenetapan Hasil Reviuw Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kota Bima

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	URAIAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Laporan Realisasi Investasi	untuk memperoleh porsentase peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA sebagai berikut : = Jumlah Realisasi Investasi thn N - Jumlah Ralisasi Investasi thn N-1 / Jumlah Realisasi Investasi tahun N-1 X 100 %	Kepala Dinas
		IKM (Indeks Kepuasaaan Masyarakat)	(Laporan indeks kepuasaan Masyarakat	untuk memperoleh porsentase laporan Indeks Kepuasaan Masyarakat sebagai berikut : IKM = Total dari Nilai persepsi per unsur X Nilai Penimbang / al Unsur yang terisi	Kepala Dinas

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan menajemen pemerintah yang efektif, transparant dan akuntabilitas dan beroreantasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai tahun 2025.

Penetapan Kinerja ini merupakan perjanjiaan kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi dalam akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2025 Sebagai wujud penilain kinerja antara Kepala PD dengan Kepala Daerah, Penetapan Kinerja Merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan seluruh apartur DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelolah program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2025 mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2030. Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah (RKPD) tahun 2024, dokumen rencana strategis tahun 2025-2030, dokumen Rencana kerja (RENJA) DPMPTSP tahun 2025 dan DPA DPMPTSP Tahun 2025. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan sumber daya yang ada.

1. Kepala Dinas

Sasaran Program		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha	1.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91,62
		2.	Peningkatan Realisasi Investasi Darah	Rp. 200.000.000.000 (10%)

2. Sekretaris

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 %
	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	2.	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	70 %
3.	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Umum	3.	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	80%
4.	Meningkatnya kualitas Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4.	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	50%
5.	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	5.	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	50%
6.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	6.	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	75%

a. Perencana

No	Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen

3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan

b. Kasubag Umum

N0	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.	Jumlah Paket Komponen Instalasi	2 Paket

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
7.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan
10.	Terlaksannya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok
11.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit
12.	terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit
15.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit
16.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

3. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	1	2	3
1.	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	1. Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2%
2.	Meningkatnya penerima fasilitas insentif	2. Porsentase peningkatan nilai investasi	persen

3.	Meningkatnya kerjasama investasi	3.	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5%
4.	Meningkatnya Realisasi Investasi	4.	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5%

a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen

b. Plt Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota"	1. Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen
2.	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 kegiatan usaha

4. Penata Perizinan Ahli Madya

No	Sasaran Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1. 2.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 2 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8% 1000 pelaku usaha

a. Penata Perizinan Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1. 2	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha Tersedianya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Kegiatan Usaha 25 Pelaku Usaha

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pada pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara priodik.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
(1)	*(2)*	*(3)*
1.	91% ≤100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Bahwa pada Tahun 2022 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2(Dua) sasaran dengan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan rata-rata pencapaian diatas 100%, dimana dari sasaran masuk kategori Sangat Tinggi (Berhasil).

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : *Rencana Tingkat Capaian = Realsasi capaian / Target x 100%*

Tabel 3.2. Rekapitulasi Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	Realisasi Investasi	(Rp. 200.000.000.000)	(Rp. 131.011.714.482)	66%
		IKM(Indeks kepuasan Masyarakat)	91,62	90,05	98 %

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TERGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Bahwa pada Tahun 2025 jumlah sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 2 (Dua) sasaran dimana sasaran tersebut masuk kategori berhasil sebagimana tersaji pada Tabel 3.3.

Tabel 3.1.1. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja Tahun 2025

No	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil Program)	Indikator Kinerja	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	Realisasi Investasi	(Rp. 200.000.000.000)	(Rp. 131.011.714.482)	66%
		IKM(Indeks kepuasan Masyarakat)	91,62	90,05	98 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan lebih rinci terkait pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran dari capaian indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2025, berikut disajikan dalam tabel :

Tabel. 3.1.1.2. Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	SKPD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	Realisasi	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	SUB.KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BIMA	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	1 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91,62	90,05	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	8%	147	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	2.373 Pelaku Usaha	1417	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik (Berdasarkan NIB)	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 Pelaku Usaha	1417	142 %

															Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko (berdasarkan KBLI)	Jumlah Kegiatan Usahayangmendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan usaha	3820	153%
															Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	1	4 %
															Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Dokumen	0	0

			2	Realisasi Investasi	Rp. 200 M	Rp 131.011.714.482	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5%	202	penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi (yang memiliki NIB)	1871 pelaku usaha	1417	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0
															Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1	100 %
							ROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	prsentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5%	198	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang telah Melaporkan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	170 pelaku usaha	237	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (yang melaksanakan Bimtek)	231 Kegiatan Usaha	60	26 %

						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	100%	100	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	8	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dok	8 Dokumen	100 %

Dari Tingkat Pencapaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dari hasil capaian indikator kinerja berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2025, ada beberapa program/ kegiatan yang tidak mencapai target 100% yakni pada kegiatan sebagai berikut :

1. *Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu dari target 25 Pelaku Usaha tetapi yang terealisasi hanya 1 Pelaku Usaha dengan capaian kinerja sebesar 4 %, hal ini terjadi karna Tidak mencapai target karena sudah banyak pelaku usaha yang tidak mengalami kendala dalam pengurusan izin usaha.*
2. *Pengawasan Penanaman Modal dari target 231 Pelaku usaha,tetapi yang terealisasi hanya 60 Pelaku Usaha dengan capaian sebesar 26 % karena Bimtek kegiatan dilakukan tgl 2 Juli 2025 sebanyak 30 pelaku usaha dan tgl 18 sep 30 pelaku usaha.*

1. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang dicerminkan dalam Capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Investas investasi dan Jumlah Pelaku usaha (Realisasi Investasi)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran "Meningkatnya pertumbuhan investasi "dengan indikator sasaran : Meningkatnya investasi dan jumlah pelaku usaha (realisasi Investasi) :

$$= \frac{\textit{Jumlah Realisasi Inves PMDN/PMA tahun N - Jumlah Realisasi NIlai Inv tahun N-1 X 100\%}}{\textit{Jumlah Realisasi Invest tahun N-1}}$$

Tabel. 3.1.3.4 Pengukuran Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5/4*100*	*7*	*8*	*9=8/7*100*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	Realiasi Investasi	Rp.200.000.000.000,-	Rp. 205.568.696.946,-	103%	Rp.200.000.000.000,-	Rp. 131.011.714.482	66 %

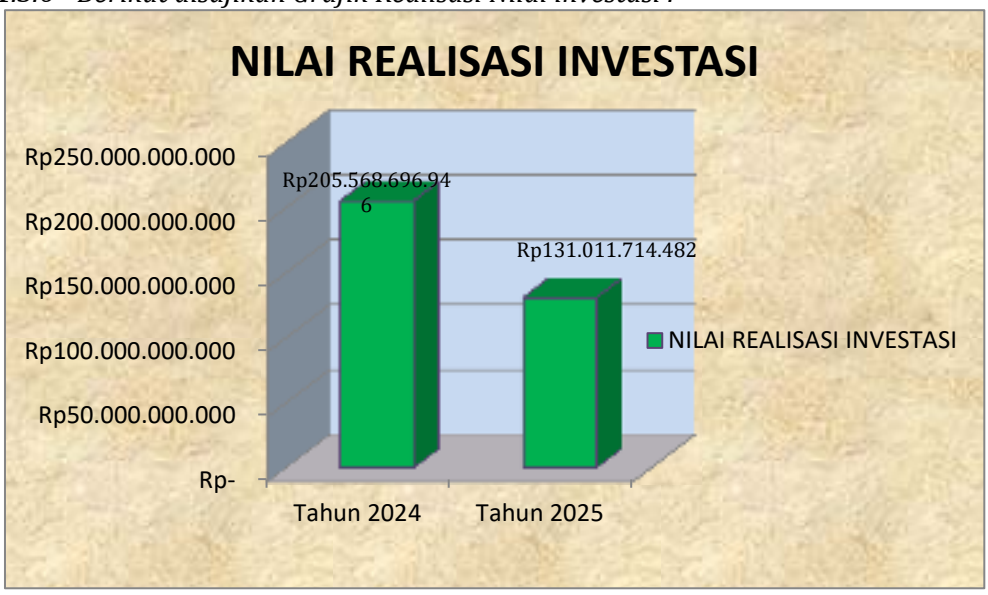
BERIKUT DATA NILAI INVESTASI TAHUN 2024 dan 2025
BERDASARKAN NILAI REALISASI INVESTASI PERTRIWULAN
PELAKU USAHA YANG ADA DIKOTA BIMA

Tabel. 3.1.3.5. Rekapitulasi nilai Realisasi Investasi Pelaku usaha dikota Bima

No	Jumlah Nilai Investasi tiap Triwulan	Tahun 2024 Dalam (Rp)	Tahun 2025 Dalm (Rp)
1	Triwulan I	64.532.803.948	14.179.989.207
2	Triwulan II	73.638.682.49	53.576.698.929
3	Triwulan III	19.221.053.668	36.349.525.500
4	Triwulan IV	24.547.209.413	26.905.500.846
	Jumlah Total Investasi	Rp. 205.568.696.946	131.011.714.482

Sumber data laporan perizinan DPMPTSP

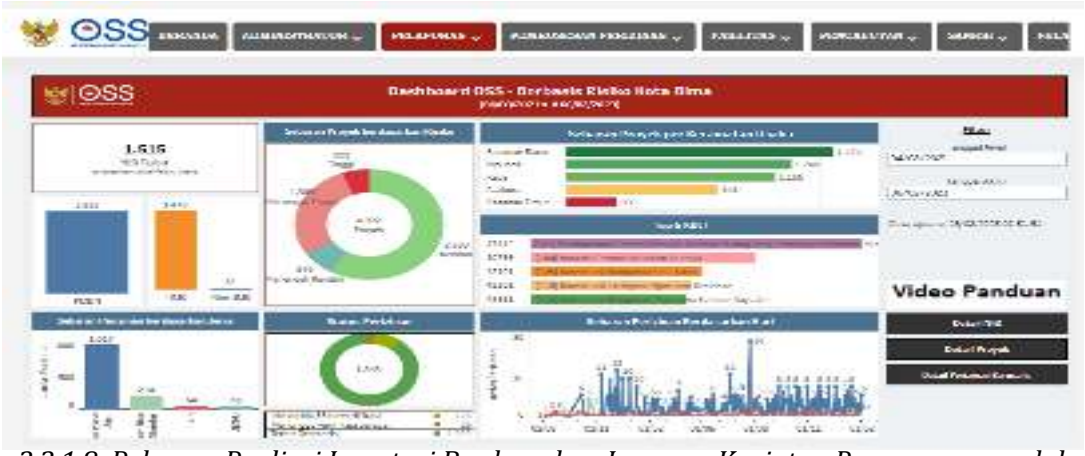
1.1.3.6 Berikut disajikan Grafik Realisasi Nilai investasi :



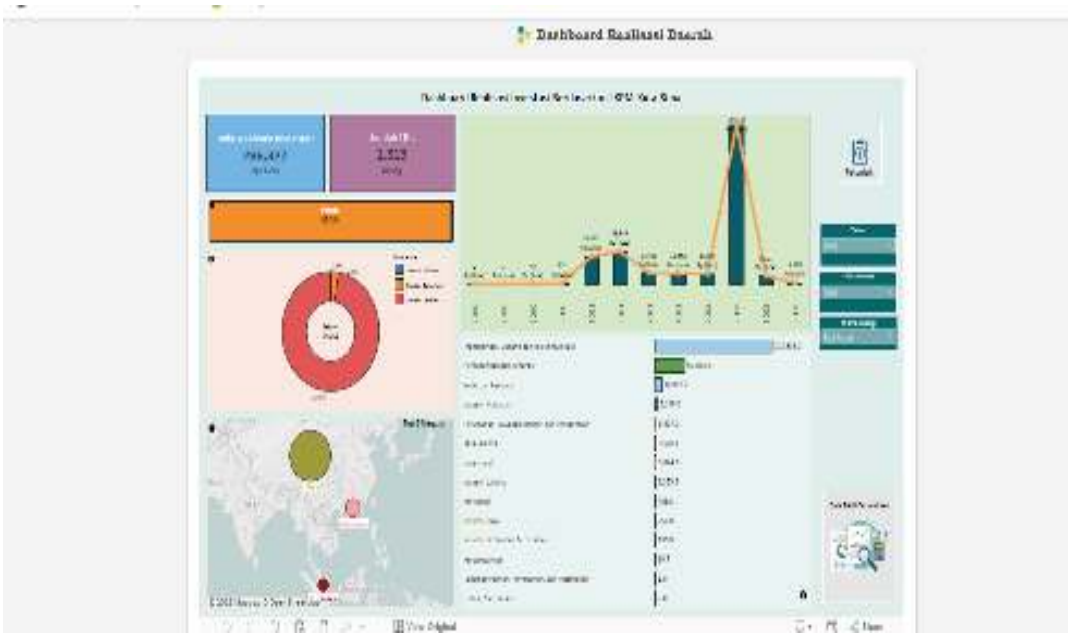
Indikator Kinerja Meningkatnya Nilai investasi selalu berbarengan dengan jumlah investor yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan dengan hasil pelaporan Kegiatan Penanamn Modal tersebut, berbagai macam jenis usaha yang telah terangkum dalam database aplikasi OSS, beserta lokasi usaha tersebut , lebih jelasnya akan ditampilkan dalam gambar dibawah ini :

Data yang ditampilan pada apliasi OSS Veris 1.1 dan Aplikasi Onlines Single submission mengikuti perubahan versi yakni dari versi 1.1 menjadi OSS-RBA (Berbasis resiko) mulai agustus 2021 sesuai dengan UU No.10 tentang Cipta Kerja , jadi data yang kami tampilkan dari Agustus 2021 sebagai berikut :

2.3.1.7 Rekapan Sebaran NIB , Sertifikat standar terbit otomatis, Sertifikat standar diverifikasi dan Izin yang diverifikasi oeh OPD teknis Pada Aplikasi OSS Versi Berbasis Resiko sebagai berikut :



3.3.1.8 Rekapan Realisai Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman modal (LKPM) kota bima :



Sumber : https://nswi.bkpm.go.id/Dpmptsp Kotabima

Realisasi tersebut dicapai melalui 5 program dan 6 kegiatan antara lain :

1. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL dengan indikator kinerja program Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi

dengan target 5% Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi 1 dokumen dengan capaian 100%

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pengawasan penanaman modal dengan target 231 realisasi 60 kegiatan usaha dengan capaian 26%

3. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan target sebesar 8% , terdiri dari :

a. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan target 1000 pelaku usaha realisasi sebanyak 1417 Pelaku usaha dengan capain sebesar 142 %.

b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dengan target 2500 realisasi sebanyak 3820 jenis kegiatan usaha/Non Usaha dengan capaian 153 %.

c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan dengan target 25 Pelaku Usaha realisai 1 Pelaku Usaha terselesainya semua masalah pengaduan masyarakat dengan capaian 4 % karena Tidak mencapai target karena sudah banyak pelaku usaha yang tidak mengalami kendala dan masalah dalam pengurusan izin usaha.

4. Program Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman Modal

a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan realisasi sebanyak 8 dokumen realisasi Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan.

b. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tolok ukur capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan IKM " dengan indikator sasaran :

Skor Indeks Kepuasan Masyarkat (IKM)

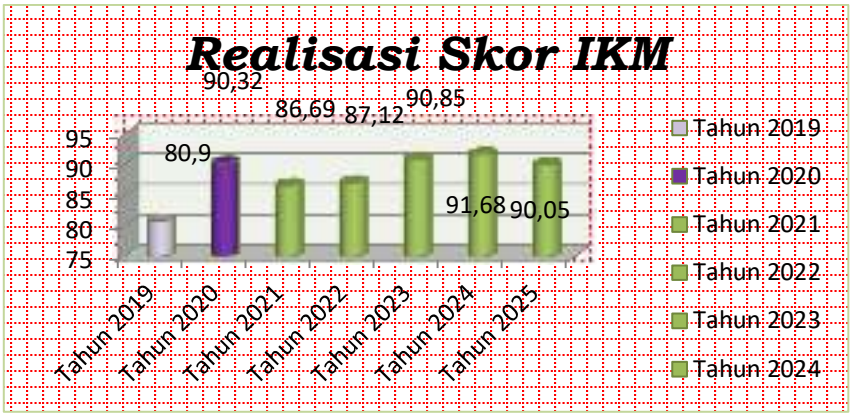
$$\text{IKM} = \frac{\textit{Total dari nilai persepsi per unsur X Nilai Penimbang}}{\textit{Total Unsur yang terisi}}$$

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Porsentase	Target	Realisasi	Porsentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = 5/4*100*	*7*	*8*	*9=8/7* 100*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Pelayanan)	92,86	91,68	99 %	91,62	90,05	98%

Tabel. 3.1.3 Pengukuran Kinerja IKM

Capaian kinerja IKM ditahun 2025 ditargetkan dengan Skor 91,62 dan terealisasi dengan Skor 90,05 atau sebesar 98 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2024 ternilai Tinggi karena mencapai angka 99 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP. Untuk dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

3.1.3.1 Dapat digambarkan dengan Grafik Realisasi IKM sebagai berikut :



Untuk mengetahui skala pencapaian Nilai IKM, berikut ditampilkan skala Nilai persepsi, Interval IKM, Intervasl Konvesri IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit PTSP.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BIMA
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025



NILAI IKM	
90,05 SANGAT BAIK	

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,50
U2	Prosedur	3,51
U3	Waktu Pelayanan	3,43
U4	Biaya/Tarif	3,95
U5	Produk Layanan	3,48
U6	Kompetensi Pelaksana	3,51
U7	Perilaku Pelakasana	3,65
U8	Sarana dan Prasarana	3,72
U9	Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan	3,99

Pelayanan pada tabel. 3.1.3.2 berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	**3,5324-4,00**	**88,31-100,00**	**A**	**Sangat Baik**

Jika dilihat dengan Pencapaian IKM Dpmptsp tahun 2024 bahwa **" SANGAT BAIK "** Yakni dengan Skor 91,68 , atau dapat disajikan dengan tabel berikut ini.

Tabel 3.1.2.3. Rekapitulasi pencapaian Indikator Utama Untuk IKM

No	Nilai Interval IKM (NI)	Nilai Interval Konversi IKM (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	**39,50**	**91,86**	**A**	**SANGAT BAIK**

Selain dari IKM , faktor pendukung yang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi adalah perizinan dan investasi, yang akan membahas penyebaran data pelaku usaha yang sudah mendaftarkan perusahaannya pada aplikasi Online single submission, dapat dilihat dari data NIB serta nilai investasi usaha tersebut.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS NASIONAL.

Adapun data pendukung terkait evaluasi keselarasan dokumen perencanaa dan penggangaran capaian kinerja pada indikator persentase perencanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel. 3.12. Evaluasi Keselaraan Dokumen Perencanan dan Penganggaran

No	Sasaran	Indokator	Target RPJMD						Realisasi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91,62	90,05	90,05	91,00	91,00	91,50	90,05					
		Realisasi Investasi	200 M	131.011.714.482 (10%)	131.011.714.482 (10%)	135M (10%)	140M (10%)	145M (10%)	131.011.714.482					

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL.

Dinas Penanaman modal dan PTSP, memilki realisasi kinerja berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan BKPM No.5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Yang akrab kita dengar yaitu LKPM (Laporan Kegiatan penanaman Moda). Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya

terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan dan badan usaha secara daring melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS.

Periode Pelaporan LKPM adalah sebagai berikut :

- Bagi Pelaku Usaha kecil, LKPM disampaikan setiap 6 bulan (semester) :
  Semester I : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
  Semester II : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya
- Bagi Pelaku Usaha menengah dan besar, LKPM disampaikan setiap 3 bulan (triwulan) :
  - Triwulan I : Pelaporan tanggal 1-10 April
  - Triwulan II : Pelaporan tanggal 1-10 Juli
  - Triwulan IV : Pelaporan tanggal 1-10 Januari tahun berikutnya

Dari hasil pelaporan yang dilakukan para pelaku usaha atau investor, memilik realisasi investasi, dan Nilai realisasi investasi tersebut memiliki target dari BKPM / Kementrian Investasi untuk mengukur realisasi Kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP terkait pengawasan, pemantaun pada pelaku usaha/investor.Triwulan III : Pelaporan tanggal 1-10 Oktober

Berikut target dan realisasi capaian LKPM DPMPTSP kota bima, berdasarkan target dari BKPM

Jumlah Target Dan Realisasi Investasi Kota Bima Tahun 2025-2030 Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Target/Realisasi	Tahun												Ket
	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%	2029	%	2030	%	
Target	200M	66 %	131.011.714.482		131.011.714.482M		135M		140M		145M		
Realisasi	131.011.714.482		-		-		-		-		-		

5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Dari Sasaran strategis dan indikator kinerja utama DPMPTSP kota bima, berikut penjelasan terkait keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Indikator IKM (Indeks Kepuasaan Masyarakat)

   Kegagalan :

   Capaian kinerja IKM ditahun 2025 ditargetkan dengan Skor 91,62 dan terealisasi dengan Skor 90,05 atau sebesar 98 % Jika dilihat dari data tersebut capain kinerja pada tahun 2024 ternilai Tinggi karena mencapai angka 99 %, Jika dilihat dari capaian IKM dari dua tahun yang lalu, dapat dilihat memiliki variasi nilai yang berbeda-beda, karena tergantung dari penilain yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelayanan pada PTSP.

Alternative /solusi yang dilakukan :

Lebih ditingkatkan lagi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang dapat nilai dari sembilan unsur pelayanan yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelakasana, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan.

2. Meningkatnya Investasi Daerah (realisasi Investasi)

Keberhasilan :

Capaian kinerja untuk meningkatnya investasi Daerah (Realisasi Investasi) dari tahun 2024 sampai tahun 2025 selalu mencapai target 100% dari yang ditentukan, hal ini berpengaruh banyak pelaku usaha yang memiliki usaha baru serta memperpanjang izin usaha yang sebelumnya.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator kinerja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan bahwa Capaian Kinerja dikatakan efisien apabila realisasi program lebih kecil dibanding realisasi kinerja.

Untuk mencapai target tiga indikator yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima menganggarkan belanja langsung tahun 2025 sebesar Rp 4.308.005.149,00-. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 3.977.435.775,00- atau 92,33 %. Dengan tingkat capaian rata-rata indikator Sasaran Strategis Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima sebesar 1,31 % hal tersebut menunjukan bahwa Dinas Penanaman modal dan PTSP Kota Bima

telah melakukan capaian kinerja secara efisien sangat baik (berhasil) dengan capaian dibawah 100%.

Adapun perhitungan efisiensi anggaran disajikan seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 6.1
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran			% Capaian Kinerja	% Capaian Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
1	*2*			*3*	*4*	*5= (3+4) ÷2*
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	Indeks Kepuasaan Masyarakat	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	142 %	96%	119
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	153 %	99 %	126
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	4 %	99%	51,5
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	95 %	97,5
		Realisasi Investasi	Pengawasan penanaman modal	26 %	90%	58
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99%	99,5

Tabel 6.2 . Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya beserta program/kegiatannya

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa	
			Rp	%	Rp	%
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	1.674.000,00	1.671.500,00	99,85%	2.500,00	0,15%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.951.000,00	1.951.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.376.000,00	4.375.500,00	99,99%	500,00	0,01%
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**8.001.000,00**	**7.998.000,00**		**3.000,00**	
2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	168.000,00	168.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.405.000,00	1.405.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Lembur	3.640.000,00	3.640.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**5.573.000,00**	**5.573.000,00**		**0,00**	
3	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.331.000,00	1.331.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.860.000,00	1.860.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**3.891.000,00**	**3.891.000,00**		**0,00**	
4	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	652.000,00	652.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	700.000,00	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**2.512.000,00**	**2.512.000,00**		**0,00**	
5	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	716.000,00	716.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.331.000,00	1.330.000,00	99,92%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**4.817.000,00**	**4.816.000,00**		**0,00**	
6	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.192.000,00	2.192.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.660.000,00	2.659.800,00	99,99%	200,00	0,01%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.462.000,00	9.732.000,00	78,09%	2.730.000,00	21,91%
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.981.000,00	7.466.000,00	83,13%	1.515.000,00	16,87%
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.584.000,00	10.560.000,00	99,77%	24.000,00	0,23%

	Jumlah Perkegiatan	**40.092.000,00**	**35.822.800,00**		**4.269.200,00**	
7	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	713.000,00	713.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.206.000,00	2.100.000,00	95,19%	106.000,00	4,81%
	Belanja Lembur	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.004.000,00	5.300.000,00	88,27%	704.000,00	11,73%
	Jumlah Perkegiatan	**13.425.000,00**	**12.615.000,00**		**810.000,00**	
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.416.138.375,00	1.374.002.060,00	97,02%	42.136.315,00	2,98%
	Belanja Gaji Pokok PPPK	210.356.373,00	207.355.866,00	98,57%	3.000.507,00	1,43%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.152.898,00	119.107.430,00	92,22%	10.045.468,00	7,78%
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22.740.844,00	18.205.784,00	80,06%	4.535.060,00	19,94%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117.390.000,00	101.510.000,00	86,47%	15.880.000,00	13,53%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.740.000,00	15.400.000,00	57,59%	11.340.000,00	42,41%
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.600.000,00	22.031.666,00	77,03%	6.568.334,00	22,97%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.300.000,00	39.300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.975.708,00	7.481.666,00	125,20%	-1.505.958,00	-25,20%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.471.780,00	64.888.320,00	87,13%	9.583.460,00	12,87%
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.077.240,00	13.874.465,00	86,30%	2.202.775,00	13,70%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	43.960.305,00	19.531.611,00	44,43%	24.428.694,00	55,57%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	288.934,00	262.271,00	90,77%	26.663,00	9,23%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.041,00	17.249,00	86,07%	2.792,00	13,93%
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.036,00	2.997,00	98,72%	39,00	1,28%
	Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan PNS	127.791.406,00	85.708.380,00	67,07%	42.083.026,00	32,93%
	Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan PPPK	19.365.881,00	11.746.254,00	60,65%	7.619.627,00	39,35%
	Belanja Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.486.266,00	2.831.046,00	81,21%	655.220,00	18,79%
	Belanja Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	497.508,00	452.826,00	91,02%	44.682,00	8,98%
	Belanja Iuaran Jaminan Kematian PNS	10.458.868,00	8.493.189,00	81,21%	1.965.679,00	18,79%
	Belanja Iuaran Jaminan Kematian PPPK	1.492.458,00	1.358.418,00	91,02%	134.040,00	8,98%
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	449.462.453,00	399.534.127,00	88,89%	49.928.326,00	11,11%
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	38.749.464,00	35.893.429,00	92,63%	2.856.035,00	7,37%
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	121.384.510,00	108.876.745,00	89,70%	12.507.765,00	10,30%
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	9.973.392,00	9.615.371,00	96,41%	358.021,00	3,59%
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	314.408.913,00	281.900.914,00	89,66%	32.507.999,00	10,34%
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.832.976,00	24.905.637,00	96,41%	927.339,00	3,59%
	Jumlah Perkegiatan	**3.254.119.629,00**	**2.974.287.721,00**		**279.831.908,00**	
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	324.000,00	324.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	720.000,00	720.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	630.000,00	630.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.000.000,00	81.480.000,00	82,30%	17.520.000,00	17,70%
	Jumlah Perkegiatan	**100.674.000,00**	**83.154.000,00**		**17.520.000,00**	
10	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	503.000,00	503.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	765.000,00	765.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	710.000,00	710.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Lembur	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**5.308.000,00**	**5.308.000,00**		**0,00**	
11	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	702.000,00	680.000,00	96,87%	22.000,00	3,13%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.819.900,00	1.819.900,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**3.961.900,00**	**3.939.900,00**		**22.000,00**	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	2.508.300,00	2.508.000,00	99,99%	300,00	0,01%
	Jumlah Perkegiatan	**2.508.300,00**	**2.508.000,00**		**300,00**	
13	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	6.986.000,00	6.985.500,00	99,99%	500,00	0,01%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	8.476.000,00	8.476.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.802.600,00	6.802.500,00	100,00%	100,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.503.200,00	3.503.000,00	99,99%	200,00	0,01%
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**31.967.800,00**	**31.967.000,00**		**800,00**	
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	10.190.000,00	10.190.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14.977.100,00	14.977.100,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**25.167.100,00**	**25.167.100,00**		**0,00**	
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.786.000,00	67.784.420,00	100,00%	1.580,00	0,00%

	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**97.486.000,00**	**97.484.420,00**		**1.580,00**	
16	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	144.000,00	144.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	378.000,00	378.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	103.200.000,00	96.500.000,00	93,51%	6.700.000,00	6,49%
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**104.082.000,00**	**97.382.000,00**		**6.700.000,00**	
17	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.394.700,00	1.394.700,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Tagihan Listrik	59.501.520,00	56.408.735,00	94,80%	3.092.785,00	5,20%
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	139.082.400,00	131.129.060,00	94,28%	7.953.340,00	5,72%
	Jumlah Perkegiatan	**199.978.620,00**	**188.932.495,00**		**11.046.125,00**	
18	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor	37.400.000,00	37.399.739,00	100,00%	261,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**47.400.000,00**	**47.399.739,00**		**261,00**	
19	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Belanja Pemeliharaan Alat kantor - Sarana Kantor (AC Split)	6.100.000,00	5.990.000,00	98,20%	110.000,00	1,80%
	Belanja Pemeliharaan Komputer, - Komputer Unit - Personal Computer	12.410.000,00	11.901.200,00	95,90%	508.800,00	4,10%
	Jumlah Perkegiatan	**18.510.000,00**	**17.891.200,00**		**618.800,00**	
20	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan	116.258.000,00	115.616.000,00	99,45%	642.000,00	0,55%
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Modal Kursi Tamu	17.552.000,00	17.500.000,00	99,70%	52.000,00	0,30%
	Honorarium	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**150.000.000,00**	**149.306.000,00**		**694.000,00**	
21	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	565.000,00	565.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas Cover	408.000,00	342.000,00	83,82%	66.000,00	16,18%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	800.000,00	799.900,00	99,99%	100,00	0,01%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	536.000,00	536.000,00	100,00%	0,00	0,00%

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.400.000,00	14.305.800,00	99,35%	94.200,00	0,65%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**19.589.000,00**	**19.428.700,00**		**160.300,00**	
22	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**					
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	5.693.000,00	5.692.000,00	99,98%	1.000,00	0,02%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.938.000,00	18.936.000,00	99,99%	2.000,00	0,01%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	33.720.100,00	33.709.800,00	99,97%	10.300,00	0,03%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	240.000,00	240.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.168.000,00	396.000,00	12,50%	2.772.000,00	87,50%
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.294.000,00	8.280.000,00	99,83%	14.000,00	0,17%
	Jumlah Perkegiatan	**70.053.100,00**	**67.253.800,00**		**2.799.300,00**	
23	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	706.000,00	706.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	720.000,00	682.000,00	94,72%	38.000,00	5,28%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.990.900,00	1.950.000,00	97,95%	40.900,00	2,05%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**11.516.900,00**	**11.438.000,00**		**78.900,00**	
24	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**					
	Pemantauan, Analis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	625.000,00	625.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	936.000,00	930.000,00	99,36%	6.000,00	0,64%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.694.200,00	1.634.200,00	96,46%	60.000,00	3,54%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**8.655.200,00**	**8.589.200,00**		**66.000,00**	
25	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pengawasan Penanaman Modal					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.279.000,00	2.278.500,00	99,98%	500,00	0,02%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.434.000,00	1.431.000,00	99,79%	3.000,00	0,21%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.049.800,00	3.049.600,00	99,99%	200,00	0,01%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.695.000,00	4.920.000,00	86,39%	775.000,00	13,61%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	8.600.000,00	69,92%	3.700.000,00	30,08%
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**46.357.800,00**	**41.879.100,00**		**4.478.700,00**	
26	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.421.000,00	3.421.000,00	100,00%	0,00	0,00%

	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.741.000,00	3.705.900,00	99,06%	35.100,00	0,94%
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.786.800,00	3.786.700,00	100,00%	100,00	0,00%
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.020.000,00	3.888.000,00	96,72%	132.000,00	3,28%
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	4.950.000,00	4.000.000,00	80,81%	950.000,00	19,19%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	5.240.000,00	4.890.000,00	93,32%	350.000,00	6,68%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Jumlah Perkegiatan	**32.358.800,00**	**30.891.600,00**		**1.467.200,00**	
	Jumlah Total	**4.308.005.149,00**	**3.977.435.775,00**	**92,33%**	**330.568.374,00**	**0,00**

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN CAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Dapat disajikan dalam tabel Capaian Kinerja Eselon II, III dan IV :

Tabel 3.2.1. Capain Kinerja Eselon II

N0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)		(4)	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Investasi	1.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91,62	90,05	98 %	Berhasil
		2.	Peningkatan Realisasi Investasi Darah	Rp. 200.000.000.000 (10%)	Rp. 131.011.714.482	66 %	Berhasil

3.2.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretris

N0	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaim	Ket
(1)	(2)	(3)		(4)	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Persentase peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80 %	80 %	100 %	Berhasil
2.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	2.	Persentase peningkatan Administrasi Keuangan	70 %	70 %	100 %	Berhasil
3.	Meningkatnya Capaian Pelayanan Administrasi Umum	3.	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Umum	80%	80%	100%	Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	4.	Persentase Peningkatan Pengadaan peralatan dan Perlengkapan kantor	50%	50%	100%	Berhasil
5.	Meningkatnya penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	5.	Persentase peningkatan penyediaan jasa dalam menunjang kebutuhan kantor	50%	50%	100%	Berhasil
6.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Barang milik daerah	6.	Persentase peningkatan pemeliharaan Barang milik daerah	75%	75%	100%	Berhasil

b.. koordinator jabatan fungsional Penanaman Modal

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capain	Ket
1	1	2	3			
1.	Meningkatnya Realisasi Usaha yang berizin	1 Persentase Peningkatan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 %	100	2 %	Berhasil
2.	Meningkatnya penerima fasilitas insentif	2 Porsentase peningkatan nilai investasi	5 %	-		Tidak ada anggaran
3.	Meningkatnya kerjasama investasi	3 Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	5%	202	10,1	Berhasil
4.	Meningkatnya Realisasi Investasi	4 Persentase Pelaku Usaha yang Telah Melaporan Kegiatan Penamanan Modal (LKPM)	5%	198	9,9 %	Berhasil

c. Koordinator Jabatan Fungsional PTSP

No	Sasaran Program/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4			
1.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Penanaman Modal	1. Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)	8%	147	11,76%	Berhasil
2.	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 pelaku usaha	1417	142 %	Berhasil

3.2.3. Capaian Kinerja Jabatan Fungsional

a. Perencana

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Berhasil
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil

3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	4.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Berhasil
6.	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100 %	Berhasil
7.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%	Berhasil

b. Kasubag Umum dan Kepegawaian

N0	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3		4			
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang/ bulan	32 orang/ bulan	100%	Berhasil
2.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Berhasil
3.	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	Berhasil
4.	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%	Berhasil
5.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	Berhasil
6.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Berhasil
7.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	7.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%	Berhasil
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Dokumen	100%	Berhasil

9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	25 Laporan	100%	Berhasil
10.	Terlaksannya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dok	1 Dok	100%	Berhasil
11.	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	10.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%	Berhasil
12.	terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	Berhasil
14.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	4 unit	100%	Berhasil
15.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	100%	Berhasil
16.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%	Berhasil

d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target
1	2	3			
1 Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	Berhasil

e. Plt Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4			
1.	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota"	1 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Berhasil
2.	Terlaksananya Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2. Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	231 kegiatan usaha	60 kegiatan usaha	26 %	Kurang berhasil

f. Penata Perizinan Ahli Muda

No	Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2		3		4			
1.		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500 Kegiatan Usaha	3820 kegiatan usaha	153%	Berhasil
2		Tersedianya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	25 Pelaku Usaha	1 Pelaku usaha	4%	Kurang Berhasil

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2025, kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 4.308.005.149,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.974.364.109,00, - atau 92,33 %.

Adapun realisasi Belanja Langsung tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*
1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	1.674.000,00	1.671.500,00	2.500,00	99,85
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.951.000,00	1.951.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	4.376.000,00	4.375.500,00	500,00	99,99
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**8.001.000,00**	**7.998.000,00**	**3.000,00**	**99,96**
2	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	***2***	***3***	***4***	***6***	***7***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	100,00
	Belanja Lembur	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**5.573.000,00**	**5.573.000,00**	**0,00**	**100,00**
3	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.331.000,00	1.331.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	100,00
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**3.891.000,00**	**3.891.000,00**	**0,00**	**100,00**
4	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	652.000,00	652.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**2.512.000,00**	**2.512.000,00**	**0,00**	**100,00**
5	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	716.000,00	716.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.331.000,00	1.330.000,00	1.000,00	99,92
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**4.817.000,00**	**4.816.000,00**	**1.000,00**	**99,98**
6	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.660.000,00	2.659.800,00	200,00	99,99
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.462.000,00	9.732.000,00	2.730.000,00	78,09
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.981.000,00	7.466.000,00	1.515.000,00	83,13
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.584.000,00	10.560.000,00	24.000,00	99,77
	Jumlah Perkegiatan	**40.092.000,00**	**35.822.800,00**	**4.269.200,00**	**89,35**
7	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	713.000,00	713.000,00	0,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	***2***	***3***	***4***	***6***	***7***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.206.000,00	2.100.000,00	106.000,00	**95,19**
	Belanja Lembur	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.004.000,00	5.300.000,00	704.000,00	88,27
	Jumlah Perkegiatan	**13.425.000,00**	**12.615.000,00**	**810.000,00**	**93,97**
8	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
	Belanja Gaji Pokok PNS	1.416.138.375,00	1.374.002.060,00	42.136.315,00	97,02
	Belanja Gaji Pokok PPPK	210.356.373,00	207.355.866,00	3.000.507,00	98,57
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.152.898,00	119.107.430,00	10.045.468,00	92,22
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	22.740.844,00	18.205.784,00	4.535.060,00	80,06
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117.390.000,00	101.510.000,00	15.880.000,00	86,47
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	26.740.000,00	15.400.000,00	11.340.000,00	57,59
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	28.600.000,00	22.031.666,00	6.568.334,00	77,03
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	100,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.975.708,00	4.410.000,00	1.565.708,00	73,80
	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.471.780,00	64.888.320,00	9.583.460,00	87,13
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16.077.240,00	13.874.465,00	2.202.775,00	86,30
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	43.960.305,00	19.531.611,00	24.428.694,00	44,43
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	288.934,00	262.271,00	26.663,00	90,77
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.041,00	17.249,00	2.792,00	86,07
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.036,00	2.997,00	39,00	98,72
	Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan PNS	127.791.406,00	85.708.380,00	42.083.026,00	67,07
	Belanja Iuaran Jaminan Kesehatan PPPK	19.365.881,00	11.746.254,00	7.619.627,00	60,65
	Belanja Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.486.266,00	2.831.046,00	655.220,00	81,21
	Belanja Iuaran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	497.508,00	452.826,00	44.682,00	91,02
	Belanja Iuaran Jaminan Kematian PNS	10.458.868,00	8.493.189,00	1.965.679,00	81,21
	Belanja Iuaran Jaminan Kematian PPPK	1.492.458,00	1.358.418,00	134.040,00	91,02
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	449.462.453,00	399.534.127,00	49.928.326,00	88,89
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	38.749.464,00	35.893.429,00	2.856.035,00	92,63
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	121.384.510,00	108.876.745,00	12.507.765,00	89,70
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	9.973.392,00	9.615.371,00	358.021,00	96,41
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	314.408.913,00	281.900.914,00	32.507.999,00	89,66
	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	25.832.976,00	24.905.637,00	927.339,00	96,41
	Jumlah Perkegiatan	**3.254.119.629,00**	**2.971.216.055,00**	**282.903.574,00**	**91,31**
9	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	***2***	***3***	***4***	***6***	***7***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	324.000,00	324.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	720.000,00	720.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.000.000,00	81.480.000,00	17.520.000,00	82,30
	Jumlah Perkegiatan	**100.674.000,00**	**83.154.000,00**	**17.520.000,00**	**82,60**
10	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	503.000,00	503.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	710.000,00	710.000,00	0,00	100,00
	Belanja Lembur	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**5.308.000,00**	**5.308.000,00**	**0,00**	**100,00**
11	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	702.000,00	680.000,00	22.000,00	96,87
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.819.900,00	1.819.900,00	0,00	100,00
	Belanja Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**3.961.900,00**	**3.939.900,00**	**22.000,00**	**99,44**
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	2.508.300,00	2.508.000,00	300,00	99,99
	Jumlah Perkegiatan	**2.508.300,00**	**2.508.000,00**	**300,00**	**99,99**
13	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	6.986.000,00	6.985.500,00	500,00	99,99
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	8.476.000,00	8.476.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	6.802.600,00	6.802.500,00	100,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Perabot Kantor	3.503.200,00	3.503.000,00	200,00	99,99
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**31.967.800,00**	**31.967.000,00**	**800,00**	**100,00**
14	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	10.190.000,00	10.190.000,00	0,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	***2***	***3***	***4***	***6***	***7***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	14.977.100,00	14.977.100,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**25.167.100,00**	**25.167.100,00**	**0,00**	**100,00**
15	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67.786.000,00	67.784.420,00	1.580,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**97.486.000,00**	**97.484.420,00**	**1.580,00**	**100,00**
16	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	144.000,00	144.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	378.000,00	378.000,00	0,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	103.200.000,00	96.500.000,00	6.700.000,00	93,51
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Perkegiatan	**104.082.000,00**	**97.382.000,00**	**6.700.000,00**	**93,56**
17	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.394.700,00	1.394.700,00	0,00	100,00
	Belanja Tagihan Listrik	59.501.520,00	56.408.735,00	3.092.785,00	94,80
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	139.082.400,00	131.129.060,00	7.953.340,00	94,28
	Jumlah Perkegiatan	**199.978.620,00**	**188.932.495,00**	**11.046.125,00**	**94,48**
18	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.400.000,00	37.399.739,00	261,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**47.400.000,00**	**47.399.739,00**	**261,00**	**100,00**
19	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	Belanja Pemeliharaan Alat kantor - Sarana Kantor (AC Split)	6.100.000,00	5.990.000,00	110.000,00	98,20
	Belanja Pemeliharaan Komputer, - Komputer Unit - Personal Computer	12.410.000,00	11.901.200,00	508.800,00	95,90
	Jumlah Perkegiatan	**18.510.000,00**	**17.891.200,00**	**618.800,00**	**96,66**
20	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	***2***	***3***	***4***	***6***	***7***
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	100,00
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	116.258.000,00	115.616.000,00	642.000,00	99,45
	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	17.552.000,00	17.500.000,00	52.000,00	99,70
	Jumlah Perkegiatan	**150.000.000,00**	**149.306.000,00**	**694.000,00**	**99,54**
21	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	565.000,00	565.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas Cover	408.000,00	342.000,00	66.000,00	83,82
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	800.000,00	799.900,00	100,00	99,99
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	536.000,00	536.000,00	0,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.400.000,00	14.305.800,00	94.200,00	99,35
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**19.589.000,00**	**19.428.700,00**	**160.300,00**	**99,18**
21	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**				
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	5.693.000,00	5.692.000,00	1.000,00	99,98
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	18.938.000,00	18.936.000,00	2.000,00	99,99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	33.720.100,00	33.709.800,00	10.300,00	99,97
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.168.000,00	396.000,00	2.772.000,00	12,50
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.294.000,00	8.280.000,00	14.000,00	99,83
	Jumlah Perkegiatan	**70.053.100,00**	**67.253.800,00**	**2.799.300,00**	**96,00**
22	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultansi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	706.000,00	706.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	720.000,00	682.000,00	38.000,00	94,72
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.990.900,00	1.950.000,00	40.900,00	97,95
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**11.516.900,00**	**11.438.000,00**	**78.900,00**	**99,31**
23	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**				
	Pemantauan, Analis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	***2***	***3***	***4***	***6***	***7***
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	936.000,00	930.000,00	6.000,00	99,36
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	1.694.200,00	1.634.200,00	60.000,00	96,46
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**8.655.200,00**	**8.589.200,00**	**66.000,00**	**99,24**
24	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pengawasan Penanaman Modal				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	2.279.000,00	2.278.500,00	500,00	99,98
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1.434.000,00	1.431.000,00	3.000,00	99,79
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.049.800,00	3.049.600,00	200,00	99,99
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.695.000,00	4.920.000,00	775.000,00	86,39
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	12.300.000,00	8.600.000,00	3.700.000,00	69,92
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**46.357.800,00**	**41.879.100,00**	**4.478.700,00**	**90,34**
25	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis kantor	3.421.000,00	3.421.000,00	0,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	3.741.000,00	3.705.900,00	35.100,00	99,06
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.786.800,00	3.786.700,00	100,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.020.000,00	3.888.000,00	132.000,00	96,72
	Honorarium Narasumber atau Pembahas,Moderator,Pembawa Acara, dan Panitia	4.950.000,00	4.000.000,00	950.000,00	80,81
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	5.240.000,00	4.890.000,00	350.000,00	93,32
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Perkegiatan	**32.358.800,00**	**30.891.600,00**	**1.467.200,00**	**95,47**
	Jumlah Total	**4.308.005.149,00**	**3.974.364.109,00**	**333.641.040,00**	**92,26**

Dari tabel tersebut sebagaimana tertera di atas dapat dijelaskan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi atau program prioritas DPMPTSP adalah sebesar Rp. 188.530.800,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL dengan Pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dan sub kegiatann terbagi tiga sebagai berikut :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 70.053.100,00
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal total anggaran Rp. 8.655.200,00,-
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Rp. 11.516.900,00,-

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan ada dua yang hanya memiliki anggaran hanya satu yaitu :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman dengan anggaran sebesar Rp. 19.589.000.00,-

c. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL dengan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/Kota, dan sub kegiatan terbagi tiga sebagai berikut :

- Pengawasan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 46.357.800,00

d. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Periinan dan Non Perizinan terintegrasi pada Tingkat Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik total anggaran Rp. 32.358.800,00

BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik

LKIP bagi Dinas PMPTSP Kota Bima juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima, dalam masa-masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima, LKIP juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Kota Bima baik terhadap Walikota maupun kepada seluruh masyarakat Kota Bima.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2025), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas PMPTSP Kota Bima pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat Baik .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas PMPTSP Kota Bima untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja 2025, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar

pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. dan berharap dengan adanya aplikasi Online Single Submission berbasis Resiko bisa lebih mengeratkan hubungan antar OPD teknis.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kota Bima, Maret 2026

Plt. Kepala Dinas

ICHWANUL MUSLIMIN, S.P.,M.M
Pembina TK.I (IV/b)
Nip. 197202292005011005

PEMERINTAH KOTA BIMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K I P)

BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA
TAHUN 2025



BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka kepala perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati/Wali kota selaku kepala daerah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tersebut, merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagai salah satu pengguna anggaran dalam pelaksanaan APBD Kota Bima tahun anggaran 2025, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas penggunaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagai salah satu pengguna anggaran menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja SKPD kepada Walikota Bima.

Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima Tahun 2025 didasarkan pada rencana kerja BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 dengan mengacu kepada petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Selanjutnya, LKIP BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian kinerja BKPSDM Kota Bima kepada Walikota, dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam kesempatan ini tidak lupa kami menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LKIP Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima di masa mendatang.

Bima, 12 Maret 2026.
Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan SDM Kota Bima,

MUHAMMAD MAHDUM, SH
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19700210 199803 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Penjelasan Umum Organisasi 1

1.2. Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 7

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 9

2.3. Rencana Kinerja Tahunan 10

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 14

3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis 19

3.1.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 32

3.1.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Program 52

3.1.1.3.

3.2. Realisasi Anggaran 56

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja 56

3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan 57

BAB IV PENUTUP 62

4.1. Kesimpulan 62

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah 63

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

1.1.1 Pembentukan Organisasi

Dengan berlakunya Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah telah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bima, Walikota Bima selaku kepala daerah dan kepala pemerintahan daerah bersama DPRD menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima. Untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kota Bima tersebut, Walikota dibantu oleh perangkat daerah kota bima sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Salah satu perangkat daerah kota bima adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagai unsur pendukung tugas Walikota Bima di bidang kepegawaian daerah. Organisasi dan kelembagaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima.

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagai salah satu unsur pendukung tugas Walikota, dimana sesuai Peraturan Walikota Bima Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang merupakanurusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

a. penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. pemberdayaan Sumber Daya aparatur serta pengelolaan prasarana dan sarana perangkat Daerah;
d. Pelaksanaan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3.Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kota Bima tahun 2025 mengacu pada beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunan seperti sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 69 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 263);
16. Peraturan Wali Kota Bima Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 955);

1.1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Kota Bima adalah sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelesan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB. II Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

   Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran organisasi.

B. Realisasi Anggaran

   Pada sub Kegiatan ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB. IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1.5 Susunan Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima merupakan salah satu pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah diangkat oleh Walikota Bima sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 800.13.3/52/BKPSDM/I/2026 Tanggal 12 Januari 2026 tentang Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang, serta 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yang pengangkatan dan pengisian formasi jabatannya ditetapkan oleh Walikota Bima dengan mengacu pada susunan organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Bima Nomor 61 Tahun 2016.

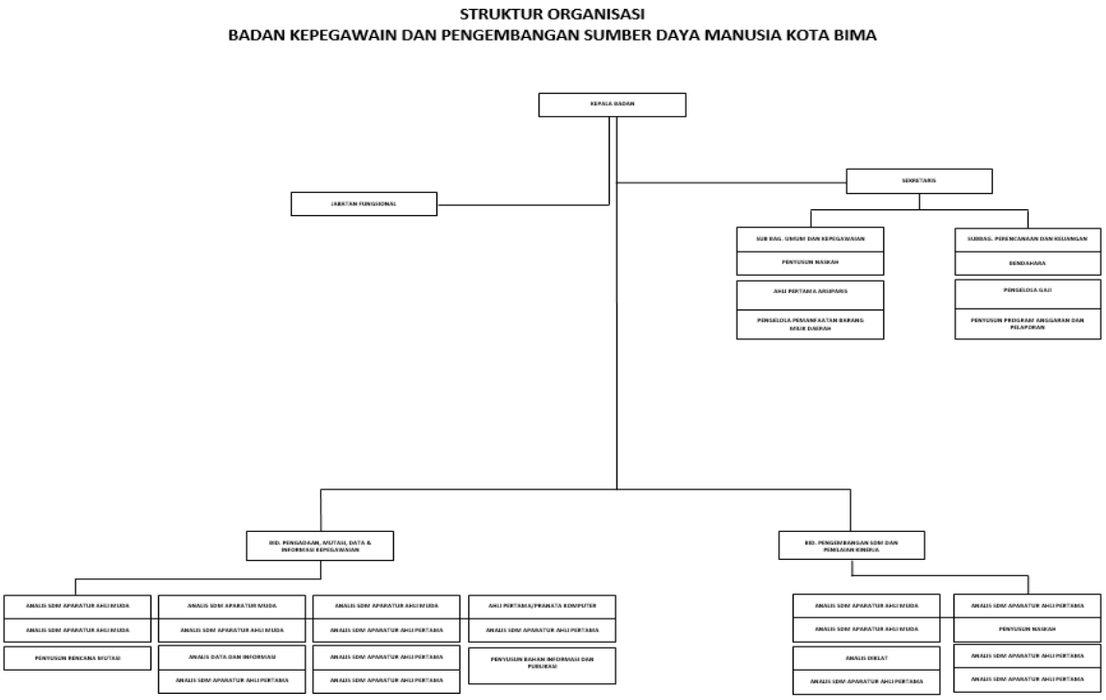
Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Sekretariat
   a. Sub. Bagian Umum Dan Kepegawain
   b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi Kepegawaian
4. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja

Sekretariat Badan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan mempunyai tugas memberikan dukungan/pelayanan administratif serta mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan, penatausahaan keuangan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang selaku unsur teknis. Sekretaris badan dibantu oleh 2 (dua) orang kepala sub bagian sebagai unsur pelaksana tugas kesekretariatan.

Bidang merupakan unsur lini atau pelaksana teknis kegiatan Badan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, dan dibantu oleh beberapa Jabatan Fungsional..

Adapun Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dapat disajikan sebagai berikut:



1.1.6 Keadaan Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dan pencapaian target program dan kegiatannya di tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya aparatur yang memadai dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Keadaan sumber daya aparatur tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonering:

No.	Eselon	Jenjang Pendidikan				**Jumlah Pegawai**
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	1	0	**1**
2	Eselon III	0	0	0	3	**3**
3	Eselon IV	0	0	1	1	**2**

4	Non Eselon	0	1	25	1	**28**
	Jumlah	**0**	**1**	**28**	**5**	**34**

Tabel 1.2

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Eselonering:

No.	Eselon	Jenjang Pendidikan				**Jumlah Pegawai**
		SMA	D3/D2/D1	S1	S2	
1	Eselon II	0	0	0	0	**0**
2	Eselon III	0	0	0	0	**0**
3	Eselon IV	0	0	0	0	**0**
4	Non Eselon	5	0	10	0	**15**
	Jumlah	**5**	**0**	**10**	**0**	**15**

Tabel 1.3.

Data Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pendidikan:

No.	Pendidikan	Golongan				**Jumlah Pegawai**
		I	II	III	IV	
1	S2	0	0	1	2	**5**
2	S1/D4	0	0	24	4	**28**
3	D3/D2/D1	0	0	1	0	**1**
4	SMA	0	0	0	0	**0**
5	SMP	0	0	0	0	**0**
6	SD	0	0	0	0	**0**
	Jumlah	**0**	**0**	**26**	**8**	**34**

Tabel 1.4.

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Pendidikan:

No.	Pendidikan	Kelas				**Jumlah Pegawai**
		V	VI	VII	IX	
1	S2	0	0	0	0	**0**
2	S1	0	0	0	10	**10**
3	D3/D2/D1	0	0	0	0	**0**
4	SMA	5	0	0	0	**0**
5	SMP	0	0	0	0	**0**
6	SD	0	0	0	0	**0**
	Jumlah	**5**	**0**	**0**	**0**	**15**

1.1.7 ASPEK PELAYANAN ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM memberikan pelayanan kepegawaian kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Bima yang pada tahun 2025 berjumlah 8.105, yang terdiri dari PNS sebanyak 3259 orang, PPPK sebanyak 4.846 orang dan tersebar di 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pelayanan kepegawaian tersebut meliputi pelayanan mutasi kenaikan pangkat dan gaji berkala, usulan penempatan dan perpindahan tugas PNS, rekomendasi ijin belajar dan tugas belajar PNS, usulan diklat PNS, pemberhentian PNS/Pensiun, fasilitasi penerbitan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen, Pelaporan LHKPN, Usulan Satya Lencana, pembinaan dan penegakan hukum disiplin PNS, pembinaan pelaksanaan sasaran kerja PNS, serta penyelesaian masalah disharmonisasi rumah tangga dan perceraian PNS. Disamping itu, BKPSDM juga melaksanakan pelayanan di bidang pengembangan kompetensi ASN yang antara lain meliputi pemetaan kompetensi ASN, seleksi pengadaan CPNS, penyusunan formasi ASN, seleksi terbuka pengisian jabatan ASN, monitoring dan evaluasi kinerja ASN, penyusunan dan pemutakhiran data base ASN tingkat kota bima, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN.

1.1. Isu Strategis dan Permasalahan yang di hadapi

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara, maka peran aparatur sipil negara menjadi sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, maka seluruh aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi dan integritas dalam melaksanakan tugas jabatan guna mewujudkan tujuan nasional tersebut. Oleh karena itu, salah satu isu strategis nasional adalah bagaimana menempatkan aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan. Sejalan dengan isu strategis nasional tersebut, terdapat isu strategis daerah, yaitu bagaimana meningkatkan Kinerja ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan mencapai target kinerja organisasi sebagaimana yang diharapkan. terdapat beberapa isu strategis dalam penataan dan manajemen aparatur sipil negara di kota bima yaitu mengisi formasi jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu kepala dinas dan staf ahli melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isu strategis tersebut, terdapat beberapa permasalahan dalam penataan dan manajemen ASN di Kota Bima, yang antara lain:

1. Bagaimana melakukan penataan dan penempatan PNS dalam jabatan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi jabatan sehingga pencapaian sasaran kerja dan kinerja pegawai dapat lebih optimal;
2. Masih adanya ketidakjelasan dan duplikasi beberapa uraian tugas jabatan pelaksana karena masih adanya PNS yang memiliki nomenklatur jabatan staf atau jabatan fungsional umum;
3. Masih rendahnya target dan realisasi sasaran kerja jabatan fungsional dan pelaksana yang disebabkan oleh pelaksanaan tugas PNS belum didukung dengan pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional;

4. Masih tingginya jumlah pejabat pengawas, administrator dan jabatan pimpinan tinggi yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sebagaimana dipersyaratkan untuk jabatan tersebut.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan Daerah Kota Bima kota bima 2025-2026**"**, maka selaras dengan itu, telah ditetapkan Tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima 2025 - 2029, yaitu **"*Meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN*".**

Tujuan tersebut di atas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima sebagai suatu lembaga yang dituntut untuk menangani manajemen kepegawaian daerah kota bima secara professional dan berkelanjutan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, maka telah ditetapkan pula Indikator Tujuan serta Sasaran dan beberapa Indikator Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi, yaitu "***Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN".***

Selanjutnya, untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai beserta indikator kinerja setiap tahunnya yang disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPSDM Kota Bima

TUJUAN	INDIKATOR	Target			SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		
		2025	2026	2027			2025	2026	2026
Meningkatkan Profesinalitas ASN	Indeks Profesinalitas ASN	78,00	79,00	80,00	Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	257,00	258,00	259,00

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

BKPSDM Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2025-2026 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2026. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Bima.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	257,00

Prinsip sistem merit adalah kebijakan dan manajemen yang berdasarkan pada kompetensi, kinerja, dan kualifikasi secara adil dan wajar. Berikut adalah beberapa prinsip sistem merit:

- Perencanaan tenaga kerja berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja
- Perekrutan dilakukan secara terbuka dan obyektif
- Penilaian kerja dilakukan secara berkelanjutan
- Promosi dilakukan secara dinamis
- Penghargaan diberikan berdasarkan kinerja yang objektif dan transparan
- Sanksi diberikan berdasarkan penilaian kinerja yang objektif dan transparan
- Pengembangan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja
- Perlindungan kepada pegawai dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan
- Perlindungan kepada pegawai dari tindakan balasan atas pengungkapan informasi yang sah

Standar penilaian sistem merit ASN diukur dengan Indeks Sistem Merit. Indeks ini didasarkan pada penilaian terhadap 8 aspek sistem merit.

Aspek penilaian sistem merit

- Perencanaan kebutuhan: 10%
- Pengadaan: 10%
- Pengembangan karier: 30%
- Promosi dan mutasi: 10%
- Manajemen kinerja: 20%
- Penggajian, penghargaan dan disiplin: 10%
- Perlindungan dan pelayanan: 4%
- Sistem informasi: 6%

Kategori penilaian

- Kategori IV: Nilai 325-400 (Sangat Baik)

- Kategori III: Nilai 250-324 (Baik)
- Kategori II: Nilai 175-249 (Kurang)
- Kategori I: Nilai 100-174 (Buruk)

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2026 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) BKPSDM tahun 2025.

Tabel 2.3.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPSDM Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2025
1.	Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	257,00

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala BKPSDM Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala BKPSDM Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja yang dimaksud dalam Laporan Kinerja ini adalah lembar/dokumen Penetapan Kinerja BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 yang format penyusunannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam upaya mencapai target kinerja sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja BKPSDM yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2026 yang mengacu pada penyelarasan dan perbaikan indikator kinerja sasaran kegiatan, program dan sasaran strategis, maka pada tahun 2025, BKPSDM Kota Bima diharuskan menetapkan kinerja sasaran strategis sebagaimana tersebut dalam rencana kinerja BKPSDM Tahun 2025 yang mana harus didukung oleh 2 Program teknis dan 6 kegiatan Teknis dan 1 Program pendukung serta 7 Kegiatan Pendukung., sehingga pada bulan januari tahun 2025, Penetapan Kinerja BKPSDM Kota Bima tahun 2025 dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, dimana hanya didukung oleh 2 program dan 6 kegiatan. Adanya pengurangan Sebagian program dan kegiatan ini sangat berpengaruh besar terhadap pengukuran target kinerja dan arah pencapaian target kinerja sasaran strategis BKPSDM Kota Bima pada awal periode Renstra, yaitu tahun 2025. Hal ini juga berdampak besar karena dari hasil penyelarasan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daaerah oleh Kementerian PAN dan RB, maka program dan kegiatan baru untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis BKPSDM Kota Bima tersebut hanya direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga bila tidak dilaksanakan akan mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis khususnya pada indikator “Nilai System Merit”, karena program dan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah diarahkan pada tersedianya pedoman Manajemen ASN pada masing-masing perangkat daerah dan Manajemen ASN di tingkat Kota Bima.

Selanjutnya, pada penetapan kinerja BKPSDM Kota Bima tahun 2025, telah diperjanjikan 2 program utama yang terinci ke dalam 6 kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BKPSDM Kota Bima, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.993.682.270,00.

Secara lebih rinci, Penetapan Kinerja BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel.2.4

Penetapan Kinerja BKPSDM Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	257,00	Meningkatnya Penerapan NSPK dalam manajemen kepegawaian	Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN	78,00	1. Program Kepegawaian Daerah			1.006.698.600
							1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN berbasis aplikasi.	70,01%	514.216.000
							1.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen	9.800.000
							1.1.2 Evaluasi Pengadaan ASN		600	308.785.000
							1.1.3 Evaluasi Pemberhentian ASN		117 Dokumen	18.065.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Anggaran (Rp)
							1.1.4 Pengelolaan Data Kepegawaian		4224 Dokumen	142.935.000
							1.1.5 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		12 Laporan	34.631.000
							1.2 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN yang berbasis aplikasi i-mutasi	100 %	226.083.000
							1.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN		200 Dokumen	183.811.000
							1.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		231 Dokumen	42.272.000
							1.3 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	58 %	225.922.600
							1.3.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		184 Orang	222.830.600
							1.3.2 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		184 Laporan	3.092.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Anggaran (Rp)
							1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja, Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, Pembinaan Disiplin ASN, dan ijin perceraian yang ditangani.	100 %	40.477.000
							1.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		4224	29.113.000
							1.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		100 Orang	11.364.000
							1.4.3 Pembinaan Disiplin ASN		50 Orang	12.745.000
							1.4.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		5 Laporan	52.640.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Anggaran (Rp)
				Meningkatnya pejabat yang memenuhi syarat kompetensi	Persentase ASN yang telah memiliki sertifikat pengembangan kompetensi sesuai ketentuan 20 JP bagi PNS dan 24 JP bagi PPPK	25,00	2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			1.986.983.670
							2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti Uji Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6,23%	1.986.983.670
							2.2.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1332 Laporan	1.935.923.670

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Anggaran (Rp)
							2.2.2 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		4 Dokumen	51.060.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja BKPSDM Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Selanjutnya, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2029, maka penting untuk dilakukan pengukuran capaian kinerja indikator tujuan perangkat daerah.

Dalam mengukur capaian organisasi berdasarkan indikator strategis BKPSDM yaitu hasil perhitungan Indeks Profesional ASN yang didasari oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks professional ASN itu diukur dari 4 komponen penunjang yaitu :

- Indeks kualifikasi yang mengukur rata-rata tingkat Pendidikan ASN di sebuah instansi jika rata-rata Pendidikan ASN semakin tinggi maka nilai komposit mencapai 25.
- Indeks Kompetensi yaitu ukuran nilai rata-rata pengembangan kompetensi per individu di sebuah Lembaga/pemerintah daerah. Hal ini akan menambah nilai komposit maksimum 40 jika seluruh pegawai yang menduduki jabatan pengawas, administrasi sampai jabatan tinggi telah mengikuti dan mendapat sertifikat Diklat PIM, sedangkan Pendidikan pelatihan teknis dan fungsional lainnya memberikan nilai komposit 30.
- Indeks kedisiplinan, jika semakin rendah nilai atau jumlah hukuman disiplin pada ASN dalam suatu populasi seluruh pegawai maka akan menyebabkan nilai maksimum 5 sedangkan jika nilai hukuman disiplin mencapai 20 kasus dalam populasi akan bernilai nol.
- Indeks kinerja yaitu nilai ukuran rata-rata dari nilai SKP yang dicapai ASN per individu sebagai hasil penilaian dari atasan langsungnya. Indeks kinerja akan memberikan nilai maksimum sebesar 100.

Pada Tahun 2025, BKPSDM mencapai nilai IP ASN sebesar 80,29 atau bernilai “Tinggi” berdasarkan akumulasi perhitungan dari SIMASN terhadap seluruh pegawai. Adapun kategori Tingkat IP ASN Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Kategori Tingkat IP ASN

Nilai	Kategori
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Sumber : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara Nomor 28 Tahun 2021

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah yang diukur menggunakan elemen dan indikator sebagaimana disebut diatas dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dokumen yang dipersyaratkan. Selain menggunakan elemen dan indikator tersebut, penilaian juga dilengkapi dengan:

1 . Hasil pengawasan dan pengendalian di Instansi Pemerintah; dan

2. Evaluasi terhadap komitmen dari PPK Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian.

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan sekali dalam satu tahun dengan menggunakan sistem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan BKN untuk pengolahan hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Dalam hal Instansi tidak dapat menggunakan sistem aplikasi, penilaian indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dapat dilakukan secara manual.

Dalam penyelenggaraan penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN, Instansi Pemerintah wajib melakukan:

1. Pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil; penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;

2. Perbaikan terhadap dokumen yang telah diunggah dalam sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN; dan pemantauan internal terhadap Implementasi NSPK Manajemen ASN.

Tabel 3.2

Kategori NSPK Manajemen ASN

Nilai	Kategori
85,01 sampai 100	Unggul
70,01 sampai 85,00	Baik
55,01 sampai 70,01	Cukup
40,01 sampai 55,00	Kurang
25,00 sampai 40,00	Buruk

Sumber : Peraturan BKN Nomor 12 Tahun 2022

3.1.1. Pencapaian Sasaran Strategis :

"Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN"

Salah satu tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah sebagai salah satu bagian dari manajemen aparatur sipil Negara (ASN) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan daerah melalui peningkatan kompetensi ASN daerah secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi motor penggerak roda pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam upaya memenuhi tujuan dan sasaran tersebut di atas, Pemerintah Kota Bima melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan salah satu sasaran strategis utama dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM, yaitu "Meningkatnya Manajemen ASN". Untuk mencapai sasaran strategis ini, pada tahun 2025 telah ditetapkan 2 (dua) Program, yaitu Program Program Kepegawaian Daerah dan Program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 6 (enam) Kegiatan utama untuk mendukung pencapaian targetnya, yang terdiri atas:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2. Mutasi dan Promosi ASN
3. Pengembangan Kompetensi ASN
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5. Pengembangan Kompetensi Teknis
6. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

3.1.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian kinerja sasaran strategis diukur melalui indikator "Nilai Norma Standar Prosedur (NSPK) Manajemen ASN" dan "Indeks Profesionalisme ASN", dan telah ditetapkan target sesuai perjanjian kinerja pada tahun 2025 dengan predikat Sedang (Nilai 71-80) dan mendapatkan 80,01%. Pencapaian kinerja sasaran strategis ini dalam Renstra BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2029 didukung oleh Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia . Selanjutnya, dengan berdasarkan capaian kinerja Program Kepegawaian Daerah, dimana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa capaian kinerja program tersebut dicapai sebesar 170%, maka apabila realisasi ini diakumulasikan dengan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun sebelumnya (2024) maka terdapat peningkatan Capaian Kinerja sebanyak 78,41% dan melalui program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki indikator

kinerja sasaran strategis yang sama, maka capaian kinerja sasaran strategis adalah sebesar 80% atau dengan tingkat capaian 10,66%.

Selanjutnya, penjabaran lebih rinci komponen pencapaian indikator kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025

Indikator Kinerja Sasaran StrategisI	Target	Capaian	% Capaian
Nilai Merit Sistem	(257,00) Baik	(257,00) Baik	100 %

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis tersebut, pada awal tahun 2025, BKPSDM Kota Bima telah merencanakan 2 program dan 6 kegiatan Teknis serta 7 kegiatan penunjang dengan dukungan anggaran sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran StrategisI	Jumlah Anggaran Perubahan (Rp.)
Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	1. Program Kepegawaian Daerah	1.006.698.600
	2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.986.983.670

Sumber : Dokumen Penetapan Kinerja BKPSDM 2025

Adapun perbandingan capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 dengan tahun 2025 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja BKPSDM dalam Pencapaian Sasaran Strategis

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Merit Sistem	(257,00)	(256,50)	100	(257,00)	(257,00)	100

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target kinerja sampai akhir tahun perencanaan Renstra BKPSDM (5 Tahun), maka capaian kinerjanya sudah mencapai 100% untuk tiap-tiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Realisasi Kinerja Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		2025	2026	2027	2025	2026	2027
Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai Merit Sistem	257,00	258,00	259,00	257,00	-	-

3.1.1.2. Pengukuran Capaian Kinerja Program

Untuk mencapai dan memenuhi target kinerja sasaran strategis , pada tahun 2025 BKPSDM Kota Bima telah menggulirkan 2 (dua) program, yaitu Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu 4 (empat) kegiatan pada Program Kepegawaian Daerah dan 2 (dua) kegiatan pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Program Kepegawaian Daerah merupakan program yang sesuai Rencana Strategis BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2026 hanya dilaksanakan pada tahun 2025, dimana pengukuran capaian kinerja program didasarkan pada capaian 6 (enam) kegiatan, yaitu Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dimana besaran capaian kinerja Program Kepegawaian Daerah 170 % dan atau dengan kata lain, apabila capaian kinerja kedua program 100 % maka realisasi capaian kinerja kedua Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mencapai 80%. Tidak tercapainya realisasi kinerja 100 % dari program Program Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan Diklat Kompetensi ASN sehingga pengukuran capaian kinerja programnya didasarkan pada pendekatan bahwa salah satu pemenuhan kompetensi manajerial PNS dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan struktural sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2002 tentang pendidikan dan pelatihan PNS. Selanjutnya, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia juga

berkontribusi dalam mendukung terpenuhinya kompetensi ASN, dimana pemenuhan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial ASN harus diawali oleh pemenuhan kompetensi dasar melalui Diklat Prajabatan atau Orientasi PPPK.

3.1.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan

Dalam upaya untuk mencapai target kinerja pelaksanaan program dan pencapaian sasaran strategis pada BKPSDM Kota Bima Tahun 2025, telah dilaksanakan 6 (enam) kegiatan untuk menunjang pencapaian target dimaksud, dengan realisasi capaian rata-rata mencapai 100%, dengan hampir semua realisasi kegiatan mencapai 95%. Adanya kegiatan yang realisasinya mencapai 100% disebabkan oleh optimalnya peran dan fungsi perangkat organisasi pada BKPSDM Kota Bima serta intensitas pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja pencapaian kinerja kegiatan tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Pencapaian Sasaran Program Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Program Kepegawaian daerah				
1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan Pengadaan, Pemberhentian Kepegawaian yang ditangani.	79,50 %	79,50%	100,00%
1.2. Mutasi dan Promosi ASN				
Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	Persentase dokumen mutasi dan kenaikan pangkat yg ditangani	100 %	100%	100%
1.3. Pengembangan Kompetensi ASN				
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki Kompetensi sesuai ketentuan	58,00%	58,00 %	100%
1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja,Pemberian Penghargaan bagi Pegawai, pelanggaran disiplin dan ijin perceraian yang ditangani	100%	100%	100%
2. Program Pengembangan Sumber daya Manusia				
2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis				
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah mengikuti uji pengembangan kompetensi teknis	5,18%	5,18%	5,18%
2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifiksi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang diLaksanakan	6,23%	6,23%	100%

Pencapaian kinerja sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas didukung oleh capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana diuraikan berikut ini.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Kegiatan
Tahun 2025

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
1.1 Sub.Keg. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN				
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dok	1 Dok	100
1.2 Sub.Keg. Evaluasi Pengadaan dan Pengadaan ASN				
Terlaksananya Evaluasi Pengadaan dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	600 Laporan	3919 Laporan	653
1.3 Sub Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN				
Terlaksannya Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Pemberhentian ASN	120 Dokumen	124 Dokumen	103
1.4 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				
Terlaksananya Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4224 Lap	6942 Lap	164
1.5 Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi				
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi	12 laporan	12 laporan	100
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				
2.1 Sub Pengelolaan Mutasi ASN				
Terlaksananya Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	442 Dokumen	221
2.2 Sub Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	231 Dokumen	651 Dokumen	115
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN				
3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Yang Menerima Bantuan Tugas Belajar	185 Orang	55 Orang	29,72
3.2 Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				
Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Tenaga Fungsional yang mengikuti Diklat Jafung	85 Dokumen	25 Dokumen	29,41
4 Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
4.1 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian	Jumlah ASN yang melakukan Pelanggaran Displin yang ditangani	5 Laporan	2 laporan	40

Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Pelanggaran Disiplin ASN				
4.2 Pelaksanaan Penilaian dan Kinerja Aparatur				
Terlaksananya Pelaksanaan Pelayanan dan Kinerja Aparatur	Jumlah Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4224 Orang	5306 Orang	125
4.3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				
Terlaksananya Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100 Orang	84 Orang	84
4.4. Pembinaan Disiplin ASN				
Terlaksananya Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Pembinaan Disiplin ASN	50 Orang	7 Orang	14
5 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
5.1 Pembinaan, Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembagnan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum				
Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian	4 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100
5.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
Terlaksananya Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan , Seleksi Jabatan Pemmpinan Tinggi dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1132 laporan	756 Laporan	66,78

Tabel 3.8
Data Realisasi Kenaikan Pangkat PNS tahun 2025

Jumlah PNS Yang Mengajukan Kenaikan Pangkat	Jumlah SK Kenaikan Pangkat Yang Diterbitkan	Ket.
652 Dokumen	651 Dokumen	

Tabel 3.9
Data Realisasi Penetapan Pensiun PNS tahun 2025

JUMLAH PNS YANG MENGAJUKAN PENSIUN BUP	JUMLAH PENETAPAN SK PENSIUN	KET.
113 Orang	124 Orang	1. Pensiun Tewas 1 Orang 2. Pensiun Janda Duda 8 Orang 3. Pensiun Atas Permintaan Sendiri 2 orang

Tabel 3.10
Data Realisasi Kenaikan Gaji Berkala PNS tahun 2025

Jumlah PNS Yang Mengajukan Usul Kenaikan Gaji Berkala	Jumlah SK Gaji Berkala Yang diterbitkan	Ket
234 Orang	234 Orang	

Tabel 3.11
Data Realisasi Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah

JUMLAH PNS YANG MENGAJUKAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH	JUMLAH PNS YANG LULUS	KET.
Ujian Dinas 24 Orang	Ujian Dinas 24 Orang	
Penyesuaian Ijazah 17 Orang	Penyesuaian Ijazah 17 Orang	

Tabel 3.12
Data Realisasi Pengadaan ASN tahun 2025

JUMLAH PENGADAAN ASN	JUMLAH PENGADAAN ASN YANG TELAH DITETAPKAN NIP	KET.
3923 Orang	3919 Orang	

Tabel 3.13
Data Realisasi Pelayanan Informasi Kepegawaian ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG dilayani	JUMLAH ASN YANG TERDATA	KET.
8009 Orang	8009 Orang	

Tabel 3.14
Data Realisasi Peninjauan Masa Kerja tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MENGAJUKAN PENINJAUAN MASA KERJA	JUMLAH ASN YANG TELAH DITINJAU MASA KERJANYA	KET.
4 Orang	1 Orang	

Tabel 3.15
Data Realisasi Mutasi dan Promosi ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG DIAJUKAN MUTASI DAN PROMOSI	JUMLAH ASN YANG TELAH DIMUTASI DAN DIPROMOSI	KET.
Mutasi 442 Orang	Mutasi 442 Orang	

Tabel 3.16
Data Realisasi Digitalisasi Arsip Kepegawaian tahun 2025

JUMLAH ARSIP KEPEGAWAIAN	JUMLAH DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN	KET.
Dokumen	Dokumen	

Tabel 3.17
Data Realisasi Taspen dan Tapera ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MEMILIKI TASPEN DAN TAPERA	JUMLAH ASN YANG MEMILIKI TASPEN DAN TAPERA	KET.
Taspen 111 Orang	Taspen 111 Orang	
Tapera 899 Orang	Tapera 899 Orang	

Tabel 3.18
Data Realisasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar ASN tahun 2025

JUMLAH PNS YANG MENGAJUKAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR	JUMLAH PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR	KET.
Tugas Belajar 6 Orang	Tugas Belajar 6 Orang	
Ijin Belajar 22 Orang	Ijin Belajar 22 Orang	

Tabel 3.19
Data Realisasi Pengembangan Kompetensi ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MENGAJUKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	JUMLAH ASN YANG MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI	KET.
425 Orang	425 Orang	

Tabel 3.20
Data Realisasi Pendidikan dan Pelatihan ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MELAKSANAKAN DIKLAT	JUMLAH ASN YANG MELAKSANAKAN DIKLAT	KET.
729 Orang	729 Orang	1. Diklat PKA 2 orang 2. Orientasi PPPK TA 2025 608 orang 3. LATSAR CPNS Gel. 1 (IPDN) 2025 1 orang 4. LATSAR CPNS Gel. 2 2025 118 orang

Tabel 3.21
Data Realisasi Pembinaan Disiplin ASN tahun 2025

JUMLAH PEMBINAAN DISIPLIN ASN	JUMLAH ASN YANG DIBINA	KET.
5 Orang	2 Orang	

Tabel 3.22
Data Realisasi Layanan eKinerja ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG DILAYANI	JUMLAH ASN YANG dilayani e kinerja	KET.
5306 Orang	5306 Orang	

Tabel 3.23
Data Realisasi Cuti ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MENGAJUKAN CUTI	JUMLAH ASN YANG MELAKUKAN CUTI	KET.
51 Orang	51 Orang	

Tabel 3.24
Data Realisasi Pengusulan Satya Lencana Karya Satya ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MENGUSULKAN SATYA LENCANA KARYA SATYA	JUMLAH ASN YANG DIFASILITASI UNTUK USULAN SATYA LENCANA KARYA SATYA	KET.
84 Orang	84 Orang	

Tabel 3.25
Data Realisasi Ijin Perceraian dan Poligami ASN tahun 2025

JUMLAH ASN YANG MENGAJUKAN PERCERAIAN DAN POLIGAMI	JUMLAH PENYELESAIAN PERCERAIAN DAN POLIGAMI	KET.
Cerai 13 Orang	Cerai 7 Orang	

Tabel 3.26
Data Realisasi Pencatuman Gelar PNS tahun 2025

JUMLAH PNS YANG MENGAJUKAN PENCATUMAN GELAR	JUMLAH PNS PENYELESAIAN PENCATUMAN GELAR	KET.
Pencantuman Gelar Akademik PNS Usulan : 172 Orang Pencantuman Gelar Profesi Usulan : 2 Orang	Pencantuman Gelar Akademik PNS Diterima : 172 Orang Pencantuman Gelar Profesi Diterima : 2 Orang	

Tabel 3.27
Data Realisasi PNS Yang telah Menyampaikan LHKPN Tahun Lapor Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JML PN/WL YANG MENYAMPAIKAN LHKPN	KET
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5	
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7	
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5	
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10	
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4	
6	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	5	
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5	
9	DINAS KESEHATAN	7	
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK	6	
12	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	8	
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	
16	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5	
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2	
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	
20	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	
21	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	
22	DINAS PERHUBUNGAN	5	

23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	6	
24	DINAS PERTANIAN	8	
25	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	6	
26	DINAS SOSIAL	5	
27	DINAS TENAGA KERJA	4	
28	INSPEKTORAT	49	
30	KECAMATAN	12	
31	PIMPINAN TERTINGGI	1	
31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	
32	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	
33	SEKRETARIAT DAERAH	26	
34	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4	
35	STAF AHLI	2	
JUMLAH		251	

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Selama Tahun Anggaran 2025, kegiatan pada BKPSDM Kota Bima dibiayai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.429.008.715 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 7.720.962.932 atau sebesar 91,59 %. Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung/Belanja Pegawai dan belanja langsung. Dari target belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan kinerja daerah PNS sebesar Rp. 4.405.716.445 BKPSDM Kota Bima telah mampu merealisasikan sebesar Rp. 4.405.716.445 atau sebesar 93,31 %. Selanjutnya, pada belanja langsung/Barang dan Jasa, yang meliputi belanja program dan kegiatan, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.895.052.270 telah mampu direalisasikan sebesar Rp. 3.482.639.715 atau sebesar 92,06 %. Dengan demikian, persentase realisasi anggaran belanja BKPSDM Kota Bima tahun 2025 terdiri atas 87,20 % belanja tidak langsung dan 92,06 % belanja langsung.

Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Rekapitulasi Belanja BKPSDM Kota Bima Tahun Anggaran 2025

No.	Komponen	Tahun 2025 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Pegawai	4.405.716.445	4.111.137.837	93,31

2	Belanja Barang dan Jasa	3.895.052.270	3.482.639.715	89,41
3	Belanja Modal	128.240.000	127.185.380	99,17
Jumlah Belanja		8.429.008.715	7.720.962.932	91,59

3.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2025, BKPSDM Kota Bima melaksanakan 2 (dua) Program Utama dengan 6 (enam) kegiatan pokok dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Utama yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis BKPSDM Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Utama	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN	Nilai System Merit	**1. Program Kepegawaian Daerah**	**1.737.979.000**	**1.416.935.338**	**81,52**
			1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**514.216.000**	**477.356.213**	**92,83**
			1.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN	9.800.000	9.530.000	97,24
			1.1.2 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	308.785.000	292.536.478	94,74
			1.1.3.Evaluasi Pemberhentian ASN	18.065.000	12.012.000	66,49
			1.1.4.Pengelolaan Data Kepegawain	142.935.000	132.724.535	92,86
			1.1.5 .Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	34.631.000	30.553.200	88,23
			2.1 Mutasi dan Promosi ASN	**226.083.000**	**179.484.558**	**79,39**
			2.1.1 Pengelolaan Mutasi ASN	183.811.000	137.220.958	74,65
			2.1.2 Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN	42.272.000	42.263.600	99,98
			3.1 Pengembangan Kompetensi ASN	**225.922.600**	**207.527.600**	**91,86**
			3.1.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	222.830.600	206.302.600	92,58
			3.1.2 Evaliasi Pengembangan Jabatan Fungsioanal	3.092.000	1.225.000	39,62
			4.1 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**105.862.000**	**71.820.720**	**67,84**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program/Kegiatan Utama	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			4.1.1 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	52.640.000	33.998.720	64,59
			4.1.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	29.113.000	19.113.000	65,65
			4.1.3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	11.364.000	7.764.000	68,32
			4.1.4. Pembinaan Disiplin	12.745.000	10.945.000	85,88
			4.1.5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			
			2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	**1.986.983.670**	**1.751.152.276**	**88,13**
			2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis	**51.060.000**	**26.277.000**	**51,46**
			2.1.1 Pembinaan, Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembagnan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	51.060.000	26.277.000	51,46
			2.2 Sertifiksi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**1.935.923.670**	**1.724.875.276**	**89,10**
			2.2.1 Penyelenggaraan Pengembanagan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.935.923.670	1.724.875.276	89,10
Total				**3.059.067.270**	**2.687.341.367**	**87,85**

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan utama pada BKPSDM Kota Bima adalah sebesar Rp. 3.059.067.270 dan berhasil terealisasi sebesar Rp. 2.687.341.367 atau sebesar 87,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian masing-masing program dan kegiatan serta sub kegiatan utama dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKPSDM Kota Bima yang rata-rata mencapai 87,85%, maka terdapat nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang ada khususnya ketersediaan anggaran yang digunakan dengan prinsip efektif dan efisien. Efisiensi anggaran yang dilaksanakan cukup baik, yaitu sebesar 12,15% terutama pada 3 kegiatan, yaitu Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Hal ini ditandai dengan adanya efisiensi penggunaan dan rendahnya anggaran, terhadap belanja barang dan jasa pada 3 kegiatan tersebut.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan utama, BKPSDM Kota Bima juga menyelenggarakan program/kegiatan/sub kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.30

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin BKPSDM Kota Bima Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
I.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota**	5.449.941.445	5.113.621.565	93,83
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**51.218.000**	**51.180.060**	99,93
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.024.000	4.024.000	100,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.286.000	3.286.000	100,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.061.000	5.061.000	100,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.924.000	3.924.000	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.406.000	3.406.000	100,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.517.000	31.479.060	99,88
1.2	**Adminisrasi Keuangan Pemerintah daerah**	**4.590.028.445**	**4.287.574.837**	93,41
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.716.445	4.111.137.837	93,31
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	157.206.000	149.331.000	94,99
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.547.000	10.547.000	100,00
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.396.000	13.396.000	100,00
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.163.000	3.163.000	100
1.3	**Adminisrasi Kepegawaian Pemerintah daerah**	**62.830.000**	**60.351.900**	**96,06**
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.430.000	27.516.900	96,79
1.3.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34.400.000	32.835.000	95,45
1.4	**Adminisrasi Umum Pemerintah daerah**	**82.985.000**	**82.985.000**	100,00
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.700.000	22.700.000	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.285.000	60.285.000	100,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.020.000	39.200.000	89,05
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	71.280.000	71.180.000	99,86
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.600.000	115.954.409	95,36
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**132.320.000**	**129.905.380**	**98,18**
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	132.320.000	129.905.380	98,18

No	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**153.370.000**	**143.017.200**	**93,25**
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	37.190.000	36.190.000	97,31
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.370.000	27.136.200	92,39
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.810.000	79.691.000	91,80
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**137.290.000**	**129.272.779**	**94,16**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.060.000	81.574.779	92,64
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.010.000	27.010.000	100,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.220.000	20.688.000	93,11

Program dan kegiatan pendukung sebagaimana tersebut di atas merupakan program dan kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Adapun analisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Terhadap Tingkat Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Utama BKPSDM Kota Bima Tahun 2025

Program/Kegiatan Utama	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	Kategori Efisiensi
1.Program Kepegawaian Daerah		**1.737.979.000**	**1.416.935.338**	**81,52**	Sangat Efisien
1.2 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		**514.216.000**	**477.356.213**	**92,83**	Sangat Efisien
2.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan ASN		9.800.000	9.530.000	97,24	Sangat Efisien
2.1.2 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		308.785.000	292.536.478	94,74	Sangat Efisien
2.1.3 Evaluasi Pemberhentian ASN		18.065.000	12.012.000	66,49	Sangat Efisien
1.1.4.Pengelolaan Data Kepegawain		142.935.000	132.724.535	92,86	Sangat Efisien
1.1.5 .Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		34.631.000	30.553.200	88,23	Sangat Efisien
2.1 Mutasi dan Promosi ASN		**226.083.000**	**179.484.558**	**79,39**	Sangat Efisien
2.1.1 Pengelolaan Mutasi ASN		183.811.000	137.220.958	74,65	Sangat Efisien
2.1.2 Pengelolan Kenaikan Pangkat ASN		42.272.000	42.263.600	99,98	Sangat Efisien
3.1 Pengembangan Kompetensi ASN		**225.922.600**	**207.527.600**	**91,86**	Sangat Efisien
3.1.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		222.830.600	206.302.600	92,58	Sangat Efisien

3.1.2 Evaliasi Pengembangan Jabatan Fungsioanal		3.092.000	1.225.000	39,62	Sangat Efisien
4.1 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		**105.862.000**	**71.820.720**	**67,84**	Sangat Efisien
4.1.1 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		52.640.000	33.998.720	64,59	Sangat Efisien
4.1.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		29.113.000	19.113.000	65,65	Sangat Efisien
4.1.3 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		11.364.000	7.764.000	68,32	Sangat Efisien
4.1.4 Pembinaan Disiplin ASN		12.745.000	10.945.000	85,88	Efisien
4.1.5 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai					
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.986.983.670	1.751.152.276	88,13	Sangat Efisien
2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis		**51.060.000**	**26.277.000**	**51,46**	Sangat Efisien
2.1.1 Pembinaan, Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembagnan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum		51.060.000	26.277.000	51,46	Sangat Efisien
2.2 Sertifiksi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		**1.935.923.670**	**1.724.875.276**	**89,10**	Efisien
2.2.2 Penyelenggaraan Pengembanagan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1.935.923.670	1.724.875.276	89,10	Efisien

Catatan :

- Sangat Efisien = Tk. capaian kinerja ≥ 100% dan Tk. Real. Anggaran ≤100%

- Efisien = Tk. capaian kinerja ≥ 100% dan Tk. Real. Anggaran ≥ 100%.

- Kurang Efisien = Tk. capaian kinerja ≤100% dan Tk. Real. Anggaran ≥ 100%.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPSDM Kota Bima tahun 2025 memiliki nilai strategis karena penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi RPD Kota Bima Tahun 2025-2029 dan Renstra BKPSDM Kota Bima Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2025.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2025 semuanya telah direalisasikan dengan baik dan dengan kategori Sangat Berhasil dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 95,00%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (akuntabiilitas keuangan) untuk program dan kegiatan utama dapat diserap sebesar 86,50%, namun secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran program dan kegiatan terealisasi sebesar 87,85%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja BKPSDM Kota Bima Tahun 2025 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, dan pelaksanaan program dan kegiatan serta kepegawaian pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja BKPSDM Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi BKPSDM sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih

dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BKPSDM melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah permasalahan dan kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini merupakan tantangan bagi BKPSDM Kota Bima dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk itu, secara umum organisasi BKPSDM Kota Bima perlu memperkuat peran kelembagaan BKPSDM Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses perencanaan kepegawaian daerah yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diupayakan diantaranya:

1. Optimalisasi mekanisme kerja dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal. Secara internal dapat dimulai dengan sinergitas antar bidang dan evaluasi mekanisme kerja masing-masing bidang serta penataan koordinasi dan administrasi yang baik.
2. Optimalisasi sistem perencanaan dan pengendalian daerah yang berbasis teknologi informasi yang telah dikembangkan sebagai upaya tersedianya data dan informasi kepegawaian yang cepat, akurat dan aktual serta kualitas analisa pengembangan SDM untuk mendukung kualitas perencanaan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian daerah.
3. Mengembangkan fungsional analis kepegawaian yang telah dimiliki oleh BKPSDM serta mendorong tumbuhnya kader-kader fungsional analis kepegawaian yang diharapkan akan dapat membawa BKPSDM Kota Bima menjadi institusi pengelola kepegawaian daerah yang kredibel dan professional. Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengupayakan peningkatan dan pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pelaksana pengelolaan kepegawaian melalui pendidikan formal dan jalur pelatihan.
4. Pelaksanaan koordinasi dalam upaya mendorong ketersediaan sumber data informasi jabatan dan beban kerja sebagai hasil dari pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta mendorong tersusunnya standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis Pegawai ASN, sehingga pelaksanaan manajemen ASN berbasis system merit dapat terlaksana dengan baik.

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaiana Daerah (BKPSDM) Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga

hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan Kota Bima BISA di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bima dan “Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional, Kompeten Dan Berintegritas Melalui Pengembangan Kompetensi ASN Yang Terencana, Terpadu Dan Berkesinambungan”. yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Bima, 12 Maret 2026.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BIMA

MUHAMMAD MAHDUM, SH
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19700210 199803 1 015

LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025)

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Ridho-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dikpora Kota Bima ini telah selesai disusun. Sebagai Bahan Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 (LKIP SKPD) Pemerintah Kota Bima.

LKIP ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui capaian kinerja dari Dinas Dikpora Kota Bima dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2025. Dalam penyusunan LKIP ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dikarenakan adanya keterbatasan dari penyusun, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan LKIP selanjutnya.

Semoga LKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dimasa yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER 1
KATA PENGANTAR..... 2
DAFTAR ISI ……..... 3
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan dan Sasaran 6
1.3 Landasan Penyusunan 6
1.4 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Kedudukan, dan Fungsi Dinas Dikpora Kota Bima 8
1.4.1 Struktur Organisasi 8
1.4.2 Tugas Pokok, Kedudukan dan Fungsi 8
1.5 Sistematika Penulisan 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Kinerja 17
2.1.1 Tujuan dan Indikator Tujuan 17
2.1.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 18
2.1.3 Program Kegiatan 20
2.1.4 Indikator Kegiatan 21
2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 26
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja 27
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 30
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Jangka Menengah 33
3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Propinsi dan Standar Nasional .34
3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan serta Alternatif solusi yang dilakukan 36
3.1.6 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Atas Sumber Daya 36
3.1.7 Analisa Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Penyertaan Kinerja 37
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 42

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 47
4.2 Saran/Rekomendasi 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai dokumen perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima (Renstra) merupakan dokumen strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, serta merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima. Dalam renstra terdapat empat sasaran prioritas pembangunan pendidikan Kota Bima yaitu peningkatan angka partisipasi, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan serta peningkatan pemahaman budaya bima.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas, juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan pendidikan yang dihadapi serta program-program prioritas untuk menjawab dinamika dan perubahan yang dilakukan maka Renstra merupakan perencanaan terukur sebagai bagian dari akuntabilitas Pemerintah Kota Bima untuk menyiapkan layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing sehingga mutu pendidikan di Kota Bima meningkat secara berkesinambungan, hal ini sejalan dengan perubahan /pergeseran paradigma kebijakan pembangunan pendidikan.

Dokumen ini juga berfungsi untuk mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan. Dalam upaya pencapaian Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima yaitu Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi PTK, pada Tahun 2025 ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima melaksanakan 17 (tujuh belas) Program yang terdiri 7 (tujuh) program pada Kesekretariatan 5 (lima) program bidang pendidikan dan 6 (Enam) program bidang Kepemudaan dan Olahraga yang diwujudkan dalam 83 (delapan puluh tiga) kegiatan. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif trasnparansi dan akuntabilitas publik.

Sebagai SKPD yang bertanggung jawab di bidang Pendidikan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dituntut untuk dapat menyelenggarakan Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik. ditandai dengan tiga pilar sebagai elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya yaitu: Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Ketiga pilar tersebut telah menjadi agenda penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan perlunya informasi yang yang dapat dipertanggungjawabkan menuju reformasi birokrasi khusus di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima. Oleh karenan itu untuk mendukung efektifitas tujuan organisasi diatas, setiap organisasi publik diharapkan dapat menyusun dokumen laporan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan capaian kinerja organisasi

1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima selama tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima tahun 2025-2029.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan LKIP adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*

b. Terwujudnya azas transparansi dan akuntabilitas dibidang keuangan daerah.

c. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing dengan pemanfaatan potensi sumberdaya yang dimiliki berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1.3. LANDASAN PENYUSUNAN

Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKIP) Dinas Dikpora Kota Bima tahun 2025, adalah sebagai berikut :

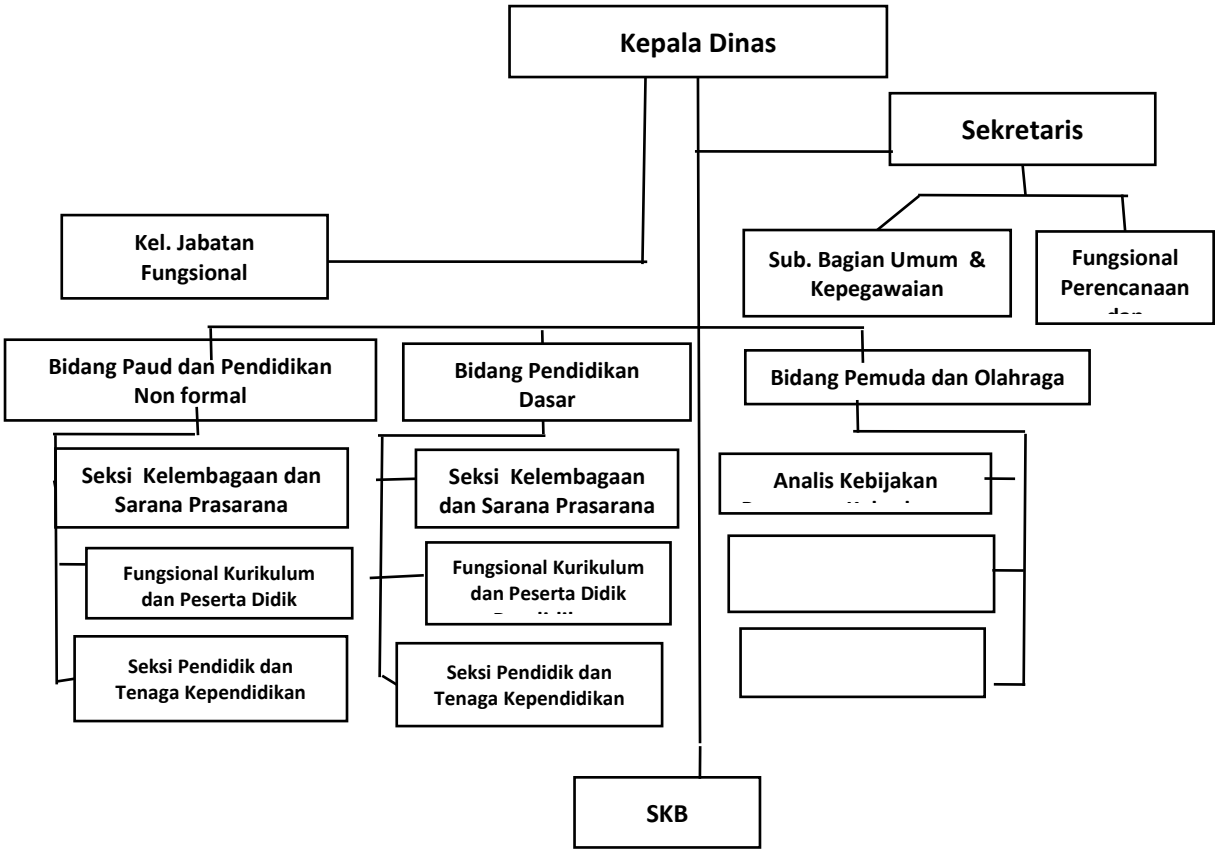
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangnan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangnan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2025-2029;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS POKOK, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI DINAS DIKPORA KOTA BIMA

1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI



1.4.2. TUGAS POKOK, KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri atas :

A. Bagian Kesatu Kepala Dinas

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah biang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan keolahragaan serta tugas pembantuan di bidang Pendidikan, pemudan dan olahraga;
   b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kepemudaan dan keolahragaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga;

c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan keolahragaan serta tugas pembantuan di bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga;
d. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan keolahragaan;
e. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima;
f. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan keolahragaan;
g. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan, pemuda dan olahraga yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengeloaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas – tugas pembantuan lainnya;
h. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan keolahragaan ;
i. Koordinasi pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, kepemudaan dan keolahragaan;
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
k. Pelaksanaan admiistrasi Dinas; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bagian Kedua Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
   b. Pengelolaan urusan keuangan;
   c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
   d. Pengelolaan urusan ASN; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat, membawahi dan mengoordinasikan :
   a. Sub Bagian Umum; dan
   b. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Sub Bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
b. Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
c. Melaksanakan kegaiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
d. Melaksanakan kegaiatan urusan pemerintahan di bidang , rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
e. Melaksanakan kegaiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.

1. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris.:

2. Bagian Ketiga Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan nonformal mempunyai fungsi:
   a. Penyiapan perumusan kebijakan bidang kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
   c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, Kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
   d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
   e. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidkan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam Daerah;
g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
h. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
i. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya,

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal membawahi dan mengoordinasikan :
   a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;;
   b. Seksi Pendidik dan Tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

1. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;.
2. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Menyusun laporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

4. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal melaksanakan tugas :

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
b. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
c. Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
e. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

1 Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

1. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
2. Untuk menyenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangun karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   c. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   d. Pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   e. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   f. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   g. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
   h. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

i. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
j. Pelaksanaan monitoring , evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi dan mengoordinasikan ::
   a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
   b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

K. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas:

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
b. Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
c. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
e. Menyusun laporan di bidang kelembagaan, dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

L. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pendidikan Dasar melaksanakan tugas:

a. Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
b. Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
c. Menyusun bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
d. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

e. Menyusun laporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Kelompok Jabatan fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

M. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Bidang Pemuda dan Olahraga membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
   a. Penyiapan dan perumusan kebijakan bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang layanan kepemudaan;
   d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
   e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
   f. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga,
   h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan kepemudaan, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
   i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya
4. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:
   a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang berdasarkan rencana program Dinas;

b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
c. Melaksanakan kegiatan di bidang layanan kepemudaan;
d. Melaksanakan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga;
e. Melaksanakan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Bidang; dan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

5. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahi dan mengoordinasikan Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tugas :

N. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Unit Pelaksana Teknis

1. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas, Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
2. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

TATA KERJA

1. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing.
2. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengn ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
4. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
6. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
7. Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya masing-masing.

I.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan kinerja pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar LKIP Tahun 2025 berupa pengantar; Maksud dan Tujuan; Data Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 53 Tahun 2022 meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis yang menjabarkan Tujuan, Sasaran Kebijakan dan program instansi 2025; Serta Perjanjian Kinerja yang menyajikan target-target penting yang sudah ditetapkan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menitik beratkan pada pencapaian Kinerja organisasi, menyajikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk di dalamnya menguraiakan secara sistematis Keberhasilan dan Kegagalan, Hambatan/Kendala, dan pemasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi tahun 2025 Serta pengungkapan akuntabilitas keuangan, dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian sasaran.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Laporan Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. Dokumen Penetapan Kinerja.
II. Dokumen Indikator Kinerja
III. Lampiran-lainnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima mencakup VISI, MISI, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Kebijakan Pokok, Program Jangka Menengah, dan Indikator Kinerja. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2025- sampai dengan tahun 2029.

Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kota Bima serta mengevaluasi hasilnya.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025–2029 diharapkan dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Bappenas dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasar konsepsi Visi Misi Walikota Bima 2025-2030 yaitu ***"Terwujudnya Kota Bima yang maju, bermartabat dan berkelanjutan".*** Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah telah menetapkan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berketahanan sosial, religius, dan berbudaya;
- Meningkatkan kualitas SDM yang maju, terampil, dan berdaya saing;
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inklusif, dan profesional (good and smart government);
- Meningkatkan ketahanan ekologi yang terintegrasi, bersih, dan berkelanjutan; serta
- Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkeadilan.

2.1.1 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN

Tujuan ini diambil dari acuan Berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, menentukan tujuannya yaitu :

(1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata dan Terjangkau
(2) Meningkatnya Prestasi Masyarakat Kota Bima

Sementara untuk mencapai tujuan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, maka perlu ditetapkan Indikator Tujuan sebagai berikut, yaitu:

(1) Indeks SPM Pendidikan
(2) Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun
(3) Harapan Lama Sekolah
(4) Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima

Kota Bima Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi 2025	Target 2026
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata dan Terjangkau	Indeks SPM Pendidikan	77,8	82
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun	10,96	11,34
	Harapan Lama Sekolah	15,08	15,43
Meningkatnya Prestasi Masyarakat Kota Bima	Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	136	151

2.1.2 SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima menentukan Sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga

Sementara untuk mencapai Sasaran dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, maka perlu ditetapkan Indikator Sasaran sebagai berikut, yaitu:

a. Angka Partisipasi PAUD
b. Angka Partisipasi Kesetaraan
c. Angka Partisipasi SD, MI
d. Angka Partisipasi SMP, MTS
e. Nilai Literasi dan Numerasi SD dan SMP
f. Persentase Pemuda dan Atlit yang dibina Mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional

Sasaran beserta indikator kinerja untuk masing-masing indikator Sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima
Tahun 2025

No	Sasaran (Indikator Kinerja Utama)		Kondisi Awal 2025	Target					Rasio Capaian Tahun 2025
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya aksebilias dan Kualitas Pendidikan								
	a.	APS PAUD	78,73	80	82	84	86	88	104,15%
	b.	APS SD, MI	97,61	100	100	100	100	100	97,61%
	c	APS SMP, MTs	106,55	100	100	100	100	100	106,55%
	d	APS Kesetaraan	39,44	39	38,5	38	37,5	37	152,13%
	e	Nilai Literasi SD	79,39	81	83	85	87	89	103,29%
	f	Nilai Numerasi SD	79,29	80	81	82	83	85	104,68%
	g	Nilai Literasi SMP	57	60	70	73	75	78	117,54%
	h	Nilai Numerasi SMP	58,32	60	63	68	69	72	102,88%
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga								
	a	Presentase Pemuda yang dibina Mendapatkan Prestasi Tingkat Regional dan Nasional	50	50%	60%	70%	80%	90%	100%
	b	Presentase Atlit yang dibina Mendapatkan Prestasi Tingkat Regional dan Nasional	75	77%	79%	81%	83%	83%	100%

Tabel diatas pada Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan , Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan pada seluruh jenjang serta meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik. Perencanaan kinerja dilakukan melalui delapan indikator utama sebagai berikut :

a. APS PAUD
   Kondisi awal tahun 2025 sebesar 78,73 dengan target meningkat secara bertahap menjadi 80 pada Tahun 2026 dan mencapai 88 pada Tahun 2030. Perencanaan ini menunjukkan komitmen peningkatan akses layanan pendidikan anak usia dini secara berkelanjutan

a. APS SD/MI
   Kondisi awal tahun 2025 sebesar 97,61 dengan target 100 pada Tahun 2026 dan dipertahankan hingga Tahun 2030. Perencanaan ini mencerminkan upaya mencapai dan menjaga partisipasi pendidikan dasar secara penuh

b. APS SMP/MTs
   Kondisi awal tahun 2025 sebesar 106,55 dengan target stabil pada angka 100 mulai Tahun 2026 hingga 2030. Perencanaan ini diarahkan untuk mempertahankan tingkat partisipasi yang telah melampaui standar minimal.

c. APS Pendidikan Kesetaraan
   Kondisi awal tahun 2025 sebesar 39,44 dengan target 39 pada Tahun 2026 dan menurun secara bertahap hingga 37 pada Tahun 2030. Perencanaan ini menunjukkan strategi pengurangan ketergantungan terhadap pendidikan kesetaraan seiring meningkatnya partisipasi pendidikan formal.

d. Nilai Literasi SD

Kondisi awal tahun 2025 sebesar 79,39 dengan target meningkat menjadi 81 pada Tahun 2026 dan bertahap hingga 89 pada Tahun 2030. Perencanaan ini berfokus pada penguatan kompetensi dasar membaca dan memahami teks pada jenjang sekolah dasar.

e. Nilai Numerasi SD

Kondisi awal tahun 2025 sebesar 79,29 dengan target 80 pada Tahun 2026 dan meningkat hingga 85 pada Tahun 2030. Perencanaan ini menitikberatkan pada peningkatan kemampuan berpikir logis dan matematis peserta didik.

f. Nilai Literasi SMP

Kondisi awal tahun 2025 sebesar 57 dengan target 60 pada Tahun 2026, meningkat signifikan hingga 78 pada Tahun 2030. Perencanaan ini menunjukkan strategi akseleratif (bersifat mempercepat *atau* mendorong percepatan terhadap suatu proses atau pencapaian) dalam peningkatan mutu literasi pada jenjang pendidikan menengah pertama.

g. Nilai Numerasi SMP

Kondisi awal tahun 2025 sebesar 58,32 dengan target 60 pada Tahun 2026 dan meningkat hingga 72 pada Tahun 2030. Perencanaan ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi numerasi sebagai bagian dari peningkatan mutu pembelajaran berbasis kompetensi

Pada sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga, Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemuda dan atlet sehingga mampu berprestasi di tingkat regional maupun nasional.

a. Persentase Pemuda yang Dibina Mendapatkan Prestasi Tingkat Regional dan Nasional

Kondisi awal tahun 2025 sebesar 50%, dengan target 50% pada Tahun 2026 dan meningkat secara bertahap hingga 90% pada Tahun 2030. Rasio capaian Tahun 2025 direncanakan sebesar 100%, yang menunjukkan target tahunan dapat dicapai sesuai perencanaan. Perencanaan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelatihan, fasilitasi kompetisi, serta penguatan organisasi kepemudaan.

b. Persentase Atlet yang Dibina Mendapatkan Prestasi Tingkat Regional dan Nasional

Kondisi awal tahun 2025 sebesar 75%, dengan target 77% pada Tahun 2026 dan meningkat hingga 83% pada Tahun 2030. Rasio capaian Tahun 2025 direncanakan sebesar 100%. Perencanaan ini diarahkan pada optimalisasi program pembinaan, peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta partisipasi aktif dalam berbagai kejuaraan

2.1.3 PROGRAM KEGIATAN

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 243.741.365.911 yang terbagi dalam 5 (lima) program yang dilaksanakan oleh 3 bidang utama di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program, Anggaran dan Bidang Pelaksana
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN 2025 (Rp.)	BIDANG PELAKSANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	202.887.084.161	Sekretariat
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.826.302.850	Bidang Dikdas dan PNFI
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	194.618.200	Bidang PORA
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.833.360.700	Bidang PORA
JUMLAH		**243.741.365.911**	

2.1.4 INDIKATOR KEGIATAN

Untuk mendukung pencapaian kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima tahun 2025 diperlukanya penetapan indikator program kegiatan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Indikator Program/Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Bima Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**%**	100%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	100%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya Administrasi keuangan perangkat daerah	Dok	100%
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dok	100%
4	adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Tersedianya adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Dok	100%
5	administrasi umum perangkat daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Dok	100%
6	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dok	100%
7	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Dok	100%
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	Dok	100%
B.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**%**	100%
1	Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan sekolah Dasar	Dok	100%
2	Pengelolaan pendidikan sekolah menegah pertama	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan sekolah menegah pertama	Dok	100%
3	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Dok	100%

4	Pengelolaan pendidikan Non formal/kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan Non formal/kesetaraan	Dok	100%
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**CAKUPAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**%**	100%
1	Penyadaran, Pemberdayaaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Dok	100%
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dok	100%
E	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**CAKUPAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		100%
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Dok	100%
2	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat daerah propinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat daerah propinsi	Dok	100%
3	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Dok	100%
4	Pembinaan dan Pengambangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengambangan Olahraga Rekreasi	Dok	100%

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN 2025	TARGET 2026	Program Kegiatan	Angaran
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas Pendidikan yang Merata dan Terjangkau	1. Indeks SPM Pendidikan	82	1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1 Angka Partisipasi PAUD	78,73	80	Program Pengelolaan Pendidikan	37.826.302.850
		2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun	11,34		2 Angka Partisipasi SD, MI	97,61	100		
		3. Harapan Lama Sekolah	15,43		3 Angka Partisipasi SMP, MTS	106,55	100		
					4 Angka Partisipasi Kesetaraan	39,44	39		
					5 Nilai Literasi SD	79,39	81		
					6 Nilai Numerasi SD	79,25	80		
					7 Nilai Literasi SMP	57	67		
					8 Nilai Numerasi SMP	58,32	60		
2	Meningkatkan prestasi masyarakat kota bima	Jumlah orang Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	151	2. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	9 Persentase Pemuda Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	50	50%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.027.978.900
					10 Persentase Atlit Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	75	77%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	

2.2 PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BIMA

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2025-2029 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dan sumber daya anggaran yang ada, Dinas Pendidikan Kota Bima telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Bima Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET 2025
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional SD	76,54
		2.	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional SD	69,64
		3.	Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional SMP	85,43
		4.	Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional SMP	91,67
2	Meningkatnya Aksesbilitas Pendidikan	1.	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	85,87
		2.	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	48,50
		3.	Angka Partisipasi Sekolah SD	100
		4.	Angka Partisipasi Sekolah SMP	100
3	Meningkatnya Indeks Kapasitas Pemuda dan Olahraga	1.	Indeks Kapasitas Pemuda dan Olahraga	88

No	Program	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 202.887.084.161
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 37.826.302.850
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 194.618.200
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 2.833.360.700
	TOTAL	**Rp 243.741.365.911**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 dan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran Negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Untuk menentukan tingkat keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, maka ditentukan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2025-2029, ditetapkan 2 Tujuan dan 4 indikator tujuan. Dapat dilihat pada table berikut ini :

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Merata dan Terjangkau	Indeks SPM Pendidikan	82	77,8	94,87%
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun	10,95	10,96	100,09%
		Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	100,07%
2	Meningkatnya Prestasi Masyarakat Kota Bima	Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	139	136	97,84%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas capaian Tujuan strategis yang merupakan indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima yang terdiri 2 Tujuan Sebagai Berikut:

1. Tujuan Meningkatnya kualitas Pendidikan yang Merata dan Terjangkau dengan 3 indikator tujuan yaitu

a. Indeks SPM Pendidikan dengan target 82 realisasi 77,8 sehingga capaian tahun 2025 yaitu 94,87% menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian komponen Standar Pelayanan Minimal masih memerlukan penguatan, baik dari sisi pemenuhan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pendidik, maupun mutu layanan pembelajaran.

b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun, Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 10,95, dengan realisasi sebesar 10,96. Dengan demikian, capaian kinerja ini mencerminkan keberhasilan program pemerataan akses pendidikan pada periode sebelumnya.

c. Harapan Lama Sekolah, hal ini menunjukkan Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 15,07, dengan realisasi sebesar 15,08. Persentase capaian sebesar 100,07%, yang berarti target telah terlampaui. Capaian ini menunjukkan optimisme masyarakat terhadap keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah, sekaligus mencerminkan akses pendidikan yang semakin terbuka dan merata

2. Tujuan Meningkatnya Prestasi Masyarakat Kota Bima, dengan indikator Jumlah Orang berprestasi tingkat regional dan nasional, dengan target 139 realisasi 136 sehingga capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, dengan selisih 3 orang dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, tingkat capaian berada pada kategori tinggi dan menunjukkan bahwa program pembinaan prestasi masyarakat berjalan dengan baik

3.1.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan awal tahun 2025. Secara umum capaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima memuaskan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan dan Olahraga lainnya yang dicapai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima
Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TAHUN 2025		CAPAIAN 2025
				TARGET	REALISASI	
1	2	3		4	5	7
1	Meningkatkan Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	a	APS PAUD	82	78,73	96,01
		b	APS SD/MI	100	97,61	97,61
		c	APS SMP/MTs	100	106,55	106,55
		d	APS Kesetaraan	60	39,44	65,73
		e	Nilai Literasi SD	82	79,39	96,81
		f	Nilai Numerasi SD	83	79,25	95,48
		g	Nilai Literasi SMP	67	57	85,07
		h	Nilai Numerasi SMP	60	58,32	97,2
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	i	Persentase Pemuda yang dibina Mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional	50	50	100
		j	Persentase Atlet yang dibina Mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional	75	75	100

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas capaian sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima Tahun 2025 yang terdiri 10 indikator kinerja sasaran. Berikut penyajian hasil pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kegiatan Kota Bima Tahun 2025 seperti dalam grafik berikut ini:

1. Target Renstra APS Anak usia Dini pada tahun 2025 sebesar 82 Porsen, sedangkan Realisasi Renstra Tahun 2025 yaitu 78,73 porsen lebih tinggi target dari realisasi. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan namun berada dalam kategori baik, dengan selisih sebesar 3,27 persen, perlu peningkatan intervensi pada layanan pendidikan anak usia dini untuk memperluas partisipasi.
2. Target Renstra Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang pendidikan pada jenjang SD/MI pada Tahun 2025 sebesar 100 Porsen, sedangkan Realisasi renstra tahun 2025 yaitu 97,61 Porsen. Dengan capaian kinerja sebesar 97,61% target lebih tinggi daripada capaian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi capaian APS SD diantaranya, sasaran wajib belajar belum optimal, faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, akses sekolah, mobilitas penduduk, anak bekerja, atau putus sekolah dapat memengaruhi belum tercapainya target 100%.
3. Target renstra Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs tahun 2025 sebesar 100 porsen, sedangkan Realisasi renstra jenjang SMP/MTs tahun 2025 sebesar 106,55 porsen, dengan capaian kinerja sebesar 106,55%. capaiant lebih besar dari target. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs tahun 2025 berada dalam kondisi sangat baik dan menunjukkan adanya peningkatan akses serta keberhasilan program dalam mendorong anak usia sekolah untuk bersekolah

4. Target renstra Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang Kesetaraan tahun 2025 sebesar 60 porsen, sedangkan Realisasi renstra jenjang kesetaraan tahun 2025 sebesar 39,44 porsen, dengan capaian kinerja sebesar 65,73% sehingga Target lebih tinggi dari capaian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya rendahnya minat masyarakat, kondisi sosial ekonomi peserta didik (keterbatasan ekonomi, tuntutan bekerja, serta pernikahan usia dini), keterbatasan sosialisasi (nformasi mengenai program Paket A, B, dan C belum menjangkau seluruh sasaran ditambah keterbatasan PKBM, tutor, dan sarana prasarana), serta jangkauan layanan pendidikan kesetaraan (Perpindahan domisili, peserta didik tidak aktif).
5. Target renstra Nilai Literasi untuk SD/MI tahun 2025 sebesar 82 sedangkan Realisasi renstra tahun 2025 yaitu 79,39. Dengan capaian kinerja 96,81 porsen. adanya capaian kinerja telah mencapai 96,81%, dipengaruhi oleh variasi kemampuan literasi peserta didik, kualitas pelaksanaan pembelajaran literasi (implementasi metode pembelajaran literasi yang belum merata di seluruh satuan pendidikan SD/MI) serta ketersediaan sarana pendukung literasi
6. Belum tercapainya target renstra Nilai Numerasi untuk SD/MI tahun 2025 sebesar 83 sedangkan Realisasi renstra tahun 2025 yaitu 79,25. Dengan capaian kinerja sebesar 95,48 Persen dimana target lebih tinggi daripada capaian dipengaruhi oleh variasi kemampuan numerasi peserta didik (perbedaan kemampuan dasar berhitung tiap peserta didik), kualitas proses pembelajaran numerasi, serta keterbatasan media/alat peraga dan dukungan lingkungan belajar
7. Target renstra Nilai Literasi untuk SMP/MTS tahun 2025 sebesar 67 sedangkan Realisasi renstra tahun 2025 yaitu 57 dengan capaian kinerja 85,07 porsen sehingga capaian lebih rendah dari target dipengaruhi oleh variasi kemampuan dasar literasi peserta didik (perbedaan kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis teks sejak jenjang sebelumnya), belum optimalnya budaya literasi (pembiasaan membaca kritis dan kegiatan literasi di satuan pendidikan belum berjalan secara konsisten dan terintegrasi di semua mata pelajaran), kualitas pembelajaran, serta keterbatasan sarana pendukung literasi (Keterbatasan koleksi bahan bacaan yang relevan, optimalisasi perpustakaan, serta akses literasi digital).
8. Target renstra Nilai Numerasi untuk SMP/MTS tahun 2025 sebesar 60 sedangkan Realisasi renstra tahun 2025 yaitu 58,32. Dengan capaian kinerja 97,2 porsen dipengaruhi oleh variasi kemampuan dasar peserta didik (perbedaan penguasaan konsep matematika dasar, kemampuan berhitung, dan pemahaman logika matematika antar siswa), kualitas pembelajaran numerasi, kompetensi guru, serta keterbatasan sarana/alat peraga dan dukungan lingkungan belajar.
9. Target Renstra Persentase Pemuda yang dibina Mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional di tahun 2025 sebesar 50 porsen dan realisasinya sebesar 50 persen, dengan capaian kinerja 100 persen, target tercapai sepenuhnya. Hal ini menunjukkan efektivitas program pembinaan pemuda dalam mendorong prestasi pada tingkat regional dan nasional.
10. Target Renstra Persentase Atlet yang dibina Mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional di tahun 2025 sebesar 75 porsen dan realisasinya sebesar 75 persen, dengan capaian kinerja 100 persen, target

tercapai sepenuhnya sesuai perencanaan. Program pembinaan atlet berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dengan cara membandingkan antara capaian tahunan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran. Berikut ini disajikan perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2024 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Tujuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian Realisasi	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks SPM Pendidikan	77,8	77,8
2	Meningkatnya Prestasi Masyarkat Kota Bima	Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	127	136

Berdasarkan tabel di atas untuk mencapai Tujuan dan indikator tujuan Kinerja Dinas Dikpora Kota Bima dapat disimpulkan bahwa Nilai Indeks SPM Pendidikan tidak mengalami perubahan antara 2024 dan 2025, hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pendidikan relatif stabil, namun belum mengalami peningkatan**.** Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan pendidikan sudah terjaga pada level yang sama, tetapi masih perlu inovasi dan peningkatan program agar indeks dapat meningkat pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tujuan meningkatnya prestasi masyarakat kota bima terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang meraih prestasi sebesar 9 orang dari tahun 2024 ke 2025, hal ini menunjukkan bahwa program pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat berjalan cukup efektif dalam meningkatkan capaian prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima
Kota Bima Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	APS PAUD	54.77	94,53	48,34	69,90	80,76	78,73
		APS SD/MI	92.68	90,77	102,46	96,52	98,39	97,61
		APS SMP/MTS	91.75	124,01	109,18	106,74	108,33	106,55
		APS Kesetaraan	0	0	0	28,91	29,97	39,44
		Nilai Literasi SD	0	0	51,53	59.83	74,04	79,39
		Nilai Numerasi SD	0	0	33,81	53,38	74,93	79,25
		Nilai Literasi SMP	0	0	35,30	58,28	50,35	57
		Nilai Numerasi SMP	0	0	23,22	56,92	53,99	58,32
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda yang dibina mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional	0	0	0	0	60	50
		Persentase Atlit yang dibina mendapat Prestasi Tingkat Regional dan Nasional	0	0	0	0	60	75

Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat disimpulkan Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Aksebilitas pendidikan dengan 10 indikator sasaran kinerja, yaitu:
   a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD

      Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Angka Partisipasi PAUD (5-6 tahun) Capaian naik signifikan dari 54,77% (2020) ke 78,73% (2025). Capaian menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari Tahun 2020–2025. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2022 (48,34), capaian meningkat secara bertahap hingga Tahun 2024 (80,76), dan sedikit menurun pada Tahun 2025 menjadi 78,73. Secara umum, dibandingkan Tahun 2020 (54,77), capaian Tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan
   b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI

      Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Angka Partisipasi SD/MI (7-12 tahun) Fluktuatif, dari 92,68% (2020) → 102,46% (2022) → turun menjadi 97,61% (2025). Hal ini dapat dsimpulkan bahwa partisipasi SD/MI relatif tinggi dan stabil, meskipun beberapa tahun melebihi 100% (indikasi pencapaian lebih dari target). Perlu perhatian untuk mempertahankan 100% partisipasi.
   c. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS

      Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Angka Partisipasi SMP/MTs (13-15 tahun) Capaian tinggi dan fluktuatif, tertinggi 124,01% (2021), menurun menjadi 106,55% (2025). Hal ini

dapat disimpulakan bahwa partisipasi SMP/MTs baik, namun target 100% belum konsisten tercapai pada 2025. Faktor transisi dari SD ke SMP kemungkinan memengaruhi penurunan

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Angka Partisipasi Kesetaraan (7-18 tahun) dimulai dari 2023 (28,91%) → 39,44% (2025). Hal ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi kesetaraan meningkat namun masih jauh dari target 60%, menunjukkan perlu peningkatan sosialisasi dan akses untuk peserta didik dewasa/putus sekolah

e. Nilai Literasi dan Numerasi SD

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan tahun 2025, SD Literasi dan Numerasi : 51,53% (2022) → 79,39% (2025), SD Numerasi: 33,81% (2022) → 79,25% (2025) hal ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan signifikan literasi dan numerasi SD dalam 3 tahun terakhir menunjukkan efektivitas pembelajaran dan program literasi-numerasi. Nilai mendekati target, tetapi literasi numerasi masih bisa ditingkatkan untuk mencapai standar optimal.

f. Nilai Literasi dan Numerasi SMP

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tujuan Nilai Literasi dan Numerasi SMP tahun 2025,SMP literasi: 35,30% (2022) → 57% (2025) SMP Numerasi: 23,22% (2022) → 58,32% (2025) hal ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan literasi dan numerasi SMP terjadi, namun capaian masih relatif lebih rendah dibanding SD, menunjukkan perlunya intervensi lebih intensif untuk jenjang menengah. Fluktuasi (literasi 2024 turun 50,35%) menandakan beberapa hambatan pada tahun tersebut.

2. Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga

a. Persentase Pemuda yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional

Indikator ini mulai menunjukkan capaian pada Tahun 2024 sebesar 60%, dan pada Tahun 2025 tercatat sebesar 50%. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian ini menunjukkan keberlanjutan program pembinaan pemuda.

b. Persentase Atlet yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional

Capaian meningkat dari 60% pada Tahun 2024 menjadi 75% pada Tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas pembinaan atlet yang semakin baik dan berdampak pada peningkatan prestasi

1. program dan kegiatan yang mendukung yang meliputi:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN	Capaian 2024	Capaian 2025
A	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**CAKUPAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**54.785.647.699**	**8.076.287.705**
1	Pengelolaan pendidikan sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan sekolah Dasar	28.954.910.028	4.159.794.480
2	Pengelolaan pendidikan sekolah menegah pertama	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan sekolah menegah pertama	16.772.978.241	1.402.329.906
3	Pengelolaan pendidikan anak usia dini	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan anak usia dini	7.113.665.330	2.439.193.019
4	Pengelolaan pendidikan Non formal/kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan pendidikan Non formal/kesetaraan	1.944.094.100	74.970.300
B	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**343.939.280**	**176.752.596**
C	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**2.813.476.498**	**2.806.677.630**

3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN JANGKA MENENGAH

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dan tahun Jangka Menengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Sasaran	Indikator Sasaran	Perbandingan capaian Kinerja		Persentase capain kinerja
		Target akhir Renstra (2029)	2025	
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	APS PAUD	86	78,73	91,54
	APS SD/MI	100	97,61	97,61
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	100	106,55	106,55
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	37,5	39,44	105,17
	Nilai Literasi SD	87	79,39	91,25
	Nilai Numerasi SD	83	79,25	95,48
	Nilai Literasi SMP	75	57	76
	Nilai Numerasi SMP	69	58,32	84,52
Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional	80	50	62,5
	Persentase Atlit yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional	83	75	90,36

Perbandingkan hasil pengukuran kinerja atas capaian sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima yang terdiri 10 indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pencapaiannya.

1. APS PAUD mencapai 78,73 dari target diakhir renstra sebesar 86 dengan persentase capaian 91,54%, yang menunjukkan bahwa akses pendidikan anak usia dini sudah cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target jangka menengah

2. APS SD/MI mencapai 97,61 dari target diakhir renstra sebesar 100 dengan capaian 97,61%**,** yang menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar hampir mencapai target yang ditetapkan
3. APS SMP mencapai 106,55 dari target diakhir renstra sebesar 100 atau 106,55%**,** yang berarti capaian telah melampaui target Renstra
4. APS Kesetaraan mencapai 39,44 dari target diakhir renstra 37,5 dengan capaian 105,17%**,** yang juga menunjukkan bahwa indikator ini telah melampaui target jangka menengah
5. Nilai Literasi SD mencapai 79,39 dari target diakhir renstra sebesar 87 atau 91,25%**,** menunjukkan peningkatan yang cukup baik namun masih perlu peningkatan kualitas pembelajaran
6. Nilai Numerasi SD mencapai 79,25 dari target diakhir renstra 83 dengan capaian 95,48%**,** yang menunjukkan bahwa indikator ini hampir mencapai target Renstra.
7. Nilai Literasi SMP mencapai 57 dari target diakhir renstra 75 atau 76%, yang menunjukkan bahwa capaian masih perlu ditingkatkan
8. Nilai Numerasi SMP mencapai 58,32 dari target diakhir renstra sebesar 69 dengan capaian 84,52%**,** yang menunjukkan progres yang cukup baik meskipun masih di bawah target akhir.
9. Persentase pemuda yang dibina memperoleh prestasi tingkat regional dan nasional mencapai 50% dari target diakhir Renstra sebesar 80%, dengan persentase capaian 62,5%**.** Hal ini menunjukkan bahwa capaian masih perlu ditingkatkan melalui penguatan pembinaan pemuda.
10. Persentase atlet yang dibina memperoleh prestasi tingkat regional dan nasional mencapai 75% dari target diakhir renstra sebesar 83%**,** dengan capaian 90,36%**,** yang menunjukkan kinerja pembinaan olahraga cukup baik dan mendekati target jangka menengah

3.1.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN PROPINSI DAN STANDAR NASIONAL.

Perbandingan capaian keinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima propinsi serta dengan standar nasional dapat di lihat pada table berikut ini:

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2025		
			Kota Bima	Propinsi NTB	Nasional
1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	APS PAUD	78,73	40,86	34,15
		APS SD/MI	97,61	99,38	93,94
		APS SMP/MTS	106,55	79,21	89,61
		APK Kesetaraan	39,44	28,88	74,6
		Nilai Literasi SD	79,39	94,15	97,01
		Nilai Numerasi SD	79,25		
		Nilai Literasi SMP	57	26,24	
		Nilai Numerasi SMP	58,32		
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Persentase Pemuda yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional	50		
		Persentase Atlit yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional	75		

Perbandingkan hasil pengukuran kinerja atas capaian sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima dengan dinas pendidikan propinsi dan standar nasional yang terdiri 10 indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pencapaiannya.

1. Capaian renstra APS Anak usia Dini Kota Bima pada tahun 2025 sebesar 78,73%, sedangkan Capaian Propinsi NTB yaitu 40,86% dan capaian Nasional 34,15% maka posisi kota bima masih tertinggi dari propinsi ntb dan lebih tinggi dari nasional.
2. Capaian renstra angka partisipasi Sekolah (APS) Kota Bima jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2025 sebesar 97,61%, sedangkan Target Propinsi NTB yaitu 99,38% dan capaian nasional 93,94 maka capaian Propinsi Lebih tinggi daripada Kota Bima dan Nasional.
3. Capaian angka partisipasi Sekolah (APS) renstra Kota Bima jenjang SMP/MTs tahun 2025 sebesar 106,55%, sedangkan Capaian Propinsi NTB yaitu 79,21% dan nasional 89,61% maka capaian kota bima lebih tinggi dari capaian Propinsi dan nasional.
4. Capaian angka partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan tahun 2025 sebesar 39,44%, sedangkan Capaian Propinsi NTB yaitu 28,88% dan nasional 74,6% maka capaian regional lebih rendah dari capaian kota bima dan nasional.
5. Capaian renstra Nilai Literasi untuk SD tahun 2025 sebesar 79,39 porsen, sedangkan Capaian Propinsi Yaitu 94,15% dan nasional 97,01%.
6. Capaian renstra Nilai Numerasi untuk SD tahun 2025 sebesar 79,25 porsen, sedangkan Capaian Propinsi Yaitu 0% dan nasional 40,27%
7. Capaian renstra Nilai Literasi untuk SMP/MTs tahun 2025 sebesar 57%, sedangkan Capaian Propinsi yaitu 0% dan nasional 63,12%
8. Capaian renstra Nilai Numerasi untuk SMP/MTs tahun 2025 sebesar 58,32 porsen,

9. Capaian Renstra Porsentase Pemuda yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional pada Tahun 2025 sebesar 50%,
10. Capaian Renstra Porsentase Atlit yang dibina mendapat prestasi tingkat regional dan nasional pada Tahun 2025 sebesar 75%,

3.1.5 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Berikut akan disajikan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan dalam mencaipainya kinerja tahun 2025

A. Sasaran 1 Meningkatnya angka Partisipasi

Dari hasil analisa beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan olah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima sebagai berikut :

1. Dari hasil pengamatan dari indikator APS Pendidikan Anak Usia Dini mengalami Kenaikan karena jumlah penduduk yang bersekolah semakin banyak.
2. Dari hasil pengamatan dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS). SD mengalami Kenaikan di karena nilai target lebih tinggi dari capaan,
3. Dari hasil pengamatan dari indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP mengalami kenaikan di karenakan nilai target lebih rendah dari capaan,.

B. Sasaran 2 Meningkatnya Mutu Pendidikan dan tenaga kependidikan

1. Dari hasil pengamatan dari indikator Nilai Literasi dan Numerasi SD mengalami Peningkatan di karena adanya pendidik yang kompeten dibidangnya dan lebih siapnya siswa menghadapi ujian, Dari hasil pengamatan dari indikator Literasi dan Numerasi SMP mengalami Penurunan di karenakan Kurang Kompeten Guru dibidangnya dan kurang siapnya siswa menghadapi ujian,

C. Sasaran 3 Meningkatnya Apresiasi terhadap pemuda dan atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kota Bima di kacah Propinsi dan Nasional.

3.1.6 ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN ATAS SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota bima sangat di dukung oleh sumber daya yang yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun dari segi sarana dan prasarana pendukung.

Sumber daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima melakukan inovasi dalam menyelasaikan tugas dan kewajiban seperti diklat-diklat yang diikuti baik di tingkat propinsi mapun tingkat pusat, itu merupakan salah satu upaya didalam pencapaian indikator kinerja

3.1.7 ANALISA PROGRAM KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PENYERTAAN KINERJA

Program kegiatan yang menunjang untuk pencapaian indikator kinerja adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Seperti tertera pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Capaian Tahun 2025	SUB KEGIATAN	Tahun 2025			PENANGGUNG JAWAB
										Target	Capaian	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas Pendidikan yang merata dan terjangkau	Indeks SPM Pendidikan	82	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Nilai Akreditasi Sekolah Se-Kota Bima	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Porsentase PAUD yang berakreditasi Minimal B	35,78	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas PAUD	6	100%	6	PNFI
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia 25 Tahun	11,34						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	55	100%	55	
		Harapan Lama Sekolah	15,43						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	200	95%	184	
									Pembinaaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	162	55%	35	
									Pengelolaan Dana BOP PAUD				
									Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	170	55%	88	
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3	90%	3	
									Sosialisasi dan Advokasi kebijakan Bidang Pendidikan	2	92%	2	
									Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	162	90%	137	
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Porsentase Kesetaraan yang berakreditasi Minimal B	42,10	Pembinaaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	19	45%	7	PNFI
									Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				
									Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	100%	1	
									Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	17.500	98,78%	17.286	

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Capaian Tahun 2025	SUB KEGIATAN	Tahun 2025			PENANGGUNG JAWAB
										Target	Capaian	Realisasi	
						Pengelolaan pendidikan sekolah menegah pertama	Porsentase SMP yang berakreditasi Minimal B	88,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Sekolah	17	100%	17	DIKDAS
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2150	80%	1623	
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	650	98%	615	
									Pembinaaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	23	45%	7	
									Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	20	100%	20	
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	100%	4	
									Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	8	100%	8	
									Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	162	65%	86	
									Bimbingan Tehnis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50	100%	50	
						Pengelolaan pendidikan anak Sekolah Dasar	Porsentase SD yang berakreditasi Minimal B	87,95	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5	100%	5	DIKDAS
									Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Sekolah	80	83%	66	
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350	98%	335	

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Capaian Tahun 2025	SUB KEGIATAN	Tahun 2025			PENANGGUNG JAWAB
										Target	Capaian	Realisasi	
									Pembinaaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	82	80%	61	
									Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	87			
									Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30	93,33%	28	
									Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2	90%	2	
									Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4	100%	4	
									Pembangunan Ruang Kelas Baru	2	100%	2	
									Bimbingan Tehnis Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30	100%	30	
2	Meningkatnya Prestasi Masyarakat Kota Bima	Jumlah Orang Berprestasi Tingkat Regional dan Nasional	136	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Pemuda yang di bina mendapat Prestasi di Tingkat Regional dan Nasional	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda Pelopor yang dibina	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	6	100%	6	PORA
									Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tk. Kab/Kota	20	85%	16	

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Capaian Tahun 2025	SUB KEGIATAN	Tahun 2025			PENANGGUNG JAWAB
										Target	Capaian	Realisasi	
						Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Organisasi kepemudaan yang dibina	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan Berbasis Peneguhan Kemandirian Ekonomi Pemuda Tingkat Kab/Kota	20	90%	18	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabor yang mendapatkan prestasi tingkat regional/Nasional	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Siswa yang Mengikuti O2Sn dan GSI yang dibina	8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	20	100%	20	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	39	Seleksi Atlet Daerah	50	95%	46	
									Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	30	100%	30	
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	41	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan dengan Lembaga Terkait	1	100%	1	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina	1	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional,dan internasional	1	100%	1	

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima pada Tahun 2025 dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 243.741.365.911 dan terealisasi sebesar Rp. 145.913.388.997 atau 59,86%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 97.827.976.814

Adapun rincian realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Porsentase Realisasi
1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						243.741.365.911	145.913.389.097	59,86%
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	240.713.387.011	142.929.985.771	59,37%
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	240.713.387.011	142.929.985.771	59,37%
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**202.887.084.161**	**134.853.671.066**	66,47%
1	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	107.204.800	67.117.300	63%
1	01	01	2	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	31.274.000	19.731.000	63%
1	01	01	2	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3.407.400	3.240.000	95%
1	01	01	2	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	3.407.600	3.407.600	100%
1	01	01	2	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	3.407.600	3.239.000	95%
1	01	01	2	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.385.400	16.175.400	88%
1	01	01	2	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.322.800	21.324.300	45%
1	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	201.349.365.261	133.446.338..722	66%
1	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	201.166.488.561	133.263.501.322	66%
1	01	01	2	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	167.214.000	167.180.700	100%
1	01	01	2	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.196.800	5.196.800	100%
1	01	01	2	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.386.600	3.386.600	100%
1	01	01	2	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.840.000	4.834.000	100%
1	01	01	2	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.239.300	2.239.300	100%
1	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.767.400	38.404.100	97%
1	01	01	2	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.239.300	2.132.000	95%
1	01	01	2	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.035.000	24.511.000	98%
1	01	01	2	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.493.100	11.761.100	94%
1	01	01	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	246.802.700	222.693.200	98%
1	01	01	2	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	14.852.500	99%
1	01	01	2	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	211.771.400	189.571.400	90%

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Porsentase Realisasi
1	01	01	2	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.882.000	6.720.000	98%
1	01	01	2	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.149.300	11.549.300	88%
1	01	01	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	827.505.500	796.189.228	96%
1	01	01	2	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.750.000	83.800.000	99%
1	01	01	2	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.314.400	12.259.000	100%
1	01	01	2	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.937.300	181.806.400	99,93%
1	01	01	2	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	114.528.000	114.527.500	100%
1	01	01	2	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352.066.600	321.766.428	91%
1	01	01	2	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	113.302.300	113.301.300	100%
1	01	01	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.795.000	158.777.211	95%
1	01	01	2	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.095.000	137.482.211	95%
1	01	01	2	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.700.000	21.295.000	985
1	01	01	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.643.500	124.151.305	83%
1	01	01	2	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.597.500	46.702.805	83%
1	01	01	2	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.446.000	31.322.500	100%
1	01	01	2	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.600.000	46.126.000	75%
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	37.826.302.850	8.076.287.705	21%
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	20.128.935.550	4.159.794.480	21%
1	01	02	2	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.745.500.000	2.734.048.830	100%
1	01	02	2	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	81.246.500	66.000.500	81%
1	01	02	2	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.135.900.500	1.088.690.000	96%
1	01	02	2	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	78.509.500	58.733.500	75%
1	01	02	2	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.879.905.100		0%
1	01	02	2	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	44.478.000	41.400.000	93%
1	01	02	2	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9.750.300	8.400.000	86%
1	01	02	2	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11.865.000	11.864.800	100%
1	01	02	2	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	136.212.650	135.091.850	99%
1	01	02	2	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	16.568.000	15.565.000	100%
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	8.447.587.600	1.402.329.906	17%
1	01	02	2	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	888.000.000	883.200.000	99%

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Porsentase Realisasi
1	01	02	2	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	79.363.000	60.038.000	76%
1	01	02	2	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	395.766.000	372.704.806	94%
1	01	02	2	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	18.370.000	5.860.000	32%
1	01	02	2	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.955.510.000		0%
1	01	02	2	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	19.453.000	19.453.000	100%
1	01	02	2	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	6.553.300	6.103.300	93%
1	01	02	2	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.146.800	14.146.800	100%
1	01	02	2	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	63.282.000	33.685.000	53%
1	01	02	2	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	7.143.500	7.138.000	100%
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD	6.732.441.700	2.439.193.019	36%
1	01	02	2	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.046.840.000	2.045.415.719	100%
1	01	02	2	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	72.609.300	61.204900	84%
1	01	02	2	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	11.771.100	11.760.000	100%
1	01	02	2	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	256.140.800	235.732.000	92%
1	01	02	2	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	202.513.600	44.209.000	22%
1	01	02	2	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.078.510.000		0%
1	01	02	2	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	39.200.000	20.400.000	52%
1	01	02	2	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11.130.000	9.180.000	82%
1	01	02	2	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	13.726.900	11.471.400	84%
1	01	02	2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.507.338.000	74.970.000	3%
1	01	02	2	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	16.680.600	6.080.000	36%
1	01	02	2	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.414.250.000		0%
1	01	02	2	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.806.500	3.202.000	84%
1	01	02	2	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	5.889.100		0%
1	01	02	2	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	66.711.800	65.688.300	98%
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.027.978.900	2.983.403.326	98,52%
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	194.618.200	176.752.596	91%
2	19	02	2	01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100.583.600	92.746.596	92%

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	Porsentase Realisasi
2	19	02	2	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda tingkat Kabupaten /Kota	81.910.600	78.060.596	95%
2	19	02	2	0008	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kab/kota	18.673.000	14.686.000	79%
2	19	02	2	02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.034.600	84.006.000	89%
2	19	02	2	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kab/kota	94.034.600	84.006.000	89%
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.833.360.700	2.806.677.730	99%
2	19	03	2	01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	34.700.000	100%
2	19	03	2	0005	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penagawasan prasarana olahraga tingkat Kabupaten/Kota	35.000.000	34.700.000	99%
2	19	03	2	03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	378.360.700	351.977.630	93%
2	19	03	2	0006	Seleksi Atlit Daerah	318.360.700	291.977.630	92%
2	19	03	2	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	60.000.000	60.000.000	100%
2	19	03	2	04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.920.000.000	1.920.000.000	100%
2	19	03	2	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	1.920.000.000	1.920.000.000	100%
2	19	03	2	05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	500.000.000	500.000.000	100%
2	19	03	2	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional,dan internasional	500.000.000	500.000.000	100%

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pendidikan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pada tahun 2025, jumlah anggaran pada program pengelolaan pendidikan yaitu 37.826.302.850, dengan realisasi 8.076.287.705 atau sebesar 21%.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pada tahun anggaran 2025, jumlah dana yang dianggarkan sebesar 194.618.200 dengan realisasi Rp. 176.752.596 atau sebesar 91%.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tahun anggaran 2025, jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp. 2.833.360.700 dengan realisasi Rp. 2.806.670.730 atau sebesar 99%. Adapun kegiatannya yaitu :

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp. 35.000.000
b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota Rp. 378.360.700
c. Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Rp. 1.920.000.000
d. Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional,dan internasional

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini merupakan salah satu dokumen dalam siklus kinerja yang diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKIP merupakan bagian dari Sistem Kinerja Instansi Pemerintah memiliki 3 fungsi*:*

1. Sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. *S*ebagai bahan pengambilan keputusan dan sarana evaluasi atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima.
3. Dimaksudkan untuk memperoleh saran-saran guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran tujuan terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata dengan indikator kinerja tujuan yang terbagi atas 3 indikator tujuan yaitu : indeks SPM Pendidikan diperoleh hasil sebesar 77,8% dari target 82 atau dengan persentase capaian sebesar 94,87%. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun diperoleh hasil sebesar 10,96% dari target 10,95% atau dengan persentase capaian sebesar 100,09%. Harapan lama sekolah diperoleh hasil sebesar 15,08% dari target 15,07% atau dengan persentase capaian sebesar 100,07%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas capaian sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja utama pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima yang terdiri 10 indikator kinerja sasaran diperoleh hasil pencapaiannya yaitu 8 indikator atau 75**%** memperoleh nilai sangat tinggi, 2 indikator atau 25% memperoleh nilai kurang.

Rata-rata hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima Kota Bima Tahun 2025 mencapai **70,08%** atau berada dalam kategori **tinggi**.

Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima secara komulatif adalah sebesar 243.741.365.911 atau 59,86%. Secara umum, meskipun pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan akuntabiltas keuangan telah mendorong capaian kinerja tujuan dan sasaran komulatif, sehingga kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima dapat dikatagorikan tercapai dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang terukur, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan penganggaran, proses pelaksanaan dan pemahaman dari seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang penerapan manajemen akuntabilitas kinerja dan keuangan yang dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik, bertanggungjawab dan berkapabilitas tinggi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan adalah:

a. Lebih meningkatkan komitmen seluruh unit sistem pengelola pendidikan untuk dapat memahami dan menerapkan sistem manajemen kinerja dan keuangan agar pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta berhasil guna.
b. Meningkatkan kualitas pemberian bimbingan teknis kepada seluruh unit sistem pengelola pendidikan tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan praktis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja.

4.2 SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKIP Tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bima 2025 ini dapat terwujud.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BIMA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kami sampaikan karena atas ijin-Nya jualah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 selesai disusun. LKIP disusun sebagai langkah Pemerintah dari tatakelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota Bima melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bima melalui Peraturan Walikota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima, dengan melaksanakan Urusan Wajib yaitu Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam kurun waktu tahun 2025.

Segala upaya dan pengerahan sumber daya telah dilakukan dalam mewujukan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LKIP 2025 adalah wujud dari pertanggungjawaban kami tentang semua itu.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini, dan tidak lupa pula kami meminta maaf atas berbagai kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan. Semoga laporan ini bermafaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk mendukung pencapaian kinerja pada tahun-tahun yang akan datang dalam pembangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Raba-Bima, Februari 2025

Kepala Dinas,

Syahruddin, SH
NIP. 19690707 198903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi
Ringkasan Eksekutif vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
1.2. Tugas, fungsi dan Strukur Organisasi 2
1.2.1. Tugas, fungsi 2
1.2.2. Struktus Organisasi 7
1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana 9
1.3.1. Sumber Daya 9
1.3.2. Sarana dan Prasarana 10
1.4. Isu Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi 11
1.5. Landasan Hukum 12
1.6. Sistimatika 13
BAB.II. PERENCANAAN KINERJA 14
2.1 Perencanan Strategis 14
2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama tahun 2025 17
2.3 Rencana Kinerja Tahunan 29
2.4 Penetapan kinerja Tahun 2025 36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 42
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 42
3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 43
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 serta Target Kinerja Renstra 2025-2029 Serta standar Nasional 57
3.2. Realisasi Anggaran 82
BAB.IV PENUTUP 88
4.1. Kesimpulan 88
4.2. Rekomendasi pemecahan masalah 89

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
Tabel1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan PendidikanDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota BimaTahun 2025	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota BimaTahun 2025	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	10
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	15
Tabel 2.2	Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	18
Tabel 2.3	Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima	20
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	39
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	30
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	37
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran	43
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Indikator Kinejar Utama (IKU) Tahun 2025	44
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2025	45
Tabel 3.4	Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempujan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	51
Tabel 3.5	Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempujan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025	51
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025	58
Tabel 3.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran I Tahun 2025	60
Tabel 3.8	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2025	65
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2025	65

Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran II Tahun 2025 68
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi CapaianKinerja Indikator Sasaran II Dinbandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2025 71
Tabel 3.12 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2025 72
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran III Tahun 2025 73
Tabel 3.14 Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran III Tahun 2025 75
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran III Dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2027 81
Tabel 3.18 Analisis Atas Efisinsi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kenerja Sasaran III Tahun 2025 81
Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 83
Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin dan Wajib Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 84

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1:	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2022 s/d 2025	59
Gambar 2:	Realisasi Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Kota Bima Dengan Provinsi dan Pusat Tahun 2025	64
Gambar 3:	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 10.000 pdd Perempuan usia 18 Tahun ke atas Tahun 2022 s/d 2025	66

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Bima melaksanakan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima berdasarkan Perda Kota Bima No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bima No. 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh 31 pegawai baik yang berada di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima maupun di Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan anak.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dari pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak selama 2025 dialokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF). Oleh karena itu, penetapan kinerja yang telah diputuskan diawal tahun diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima "***Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan***" dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional
4. Meningkatkan tata kelola ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Mewujudkan bangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menunjukan arah yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dalam Periode 2025-2029. Sasaran

yang ingin dicapai pada Tahun 2025 ditetapkan dengan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Dalam Penetapan kinerja tersebut menguraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 sasaran strategis dengan menggunakan 4 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Dari 4 indikator sasaran yang diukur, 3 indikator mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target.

Adapun indikator sasaran yang mencapai target antara lain 1) Sumbangan pendapatan perempuan (persen) sebesar 38,02% (target 37,50%), 2) Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) sebesar 4,05 (target 4,98), serta 3) Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 70,50% (target 70,50%), sedangkan indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu 1) Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) sebesar 6,59% (target 5,41%).

Jika dilihat kesesuaian dan relevansi antara rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2025 dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, terlihat sangat logis dan relevan. Hanya saja pencapaian sasaran dan penentuan angka sasaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : *Pendahuluan*, berisi penjelasan hal umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima baik Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi serta aspek strategis antara lain sumber daya baik tenaga dan sarana dan prasarana serta peluang dan tantangan.

BAB II : *Perencanaan Kinerja*, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025.

BAB III : *Akuntabilitas Kinerja*, menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima selama tahun 2025.

BAB IV : *Penutup*, menguraikan penjelasan umum keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran tahun 2025 dan rencana antisipasi yang akan dilakukan di masa mendatang untuk mengatasi permasalahan.

Keberhasilan pembangunan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya dan diperlukan pemahaman bersama dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari pemerintah Kota Bima, melainkan harus dilaksanakan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.
2. Menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima sebagai instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
3. Mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai instansi Pemerintah Kota Bima untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tatakelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima 2025–2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota selama Tahun 2025.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 menyelenggarakan fungsi. Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas PP dan PA Kota Bima.

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah;
2. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
3. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
4. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah;

5. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
8. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris Dinas PP dan PA mempunyai tugas memberikan pelayana administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara di lingkungan dinas;
4. Pengelolaan urusan ASN; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:
    a. Kasubag Umum

        Subbagian Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

        - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
        - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang barang milik daerah;
        - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan;
        - Melaksanakan kegiatan urusan pemerintahan di bidang rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
        - Melaksanakan kegiatan urusan pengelolaan keuangan lingkup Dinas; dan
        - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Kualitas Hidup Perempuan:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
3. kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
4. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
5. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
6. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
    a. Kelompok Jabatan Fungsional

       Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Permpuan.

D. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas:

   Mempunyai tugas melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemenuhan Hak Anak.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

   1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
   2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
   3. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
   4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
   5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak;
   6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh :
    a. Kelompok Jabatan Fungsional

       Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

E. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, mempunyai tugas:

Melaksanakan penyiapkan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahankekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
4. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
5. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan

khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. di bantu oleh:
   a. Kelompok Jabatan Fungsional

      Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, seta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Permpuan.

F. Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas:

   Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

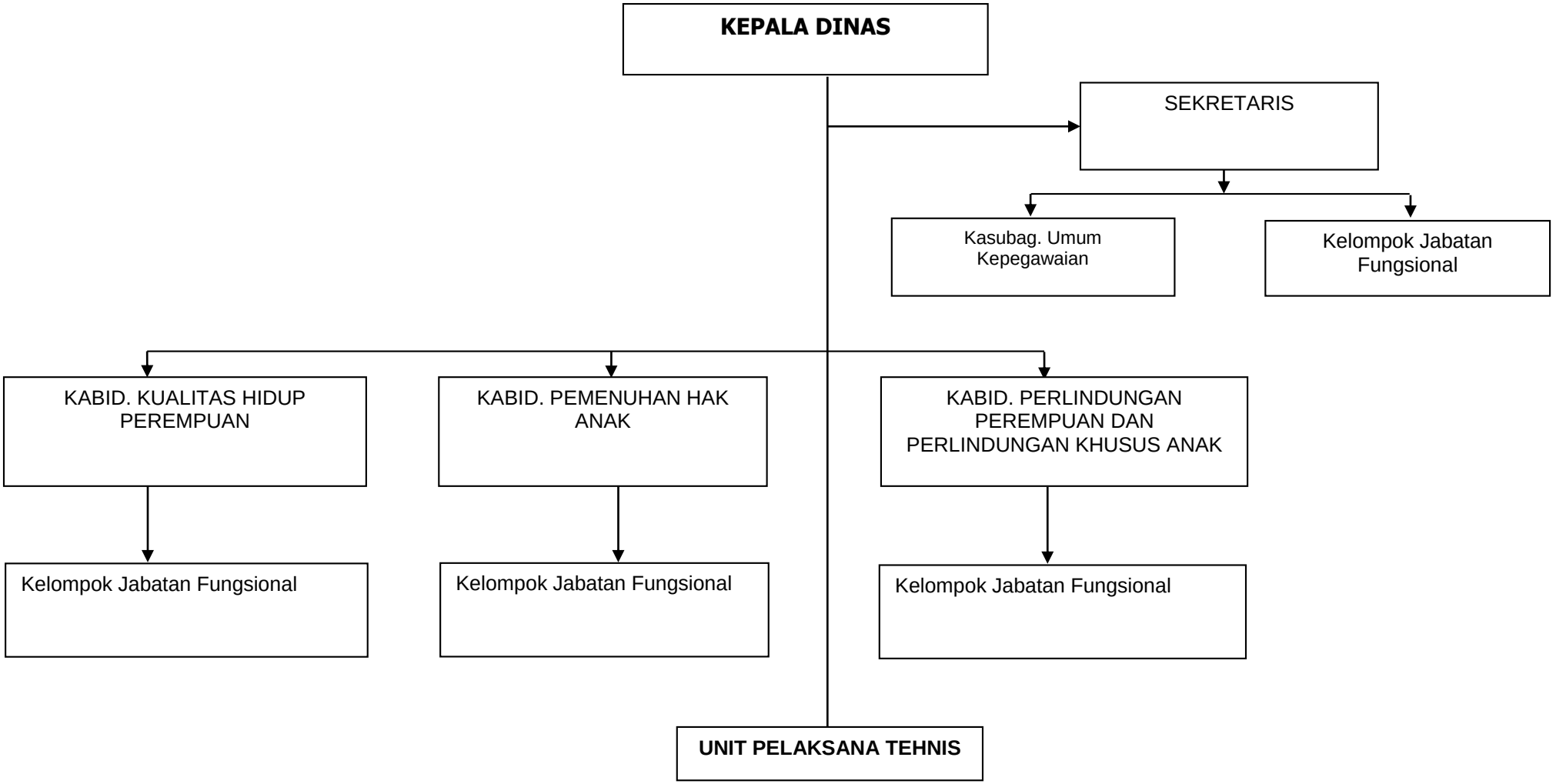
1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima;
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum; dan
   b. Kelompok Jabatana Fungsional.
3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima



1.3. Sumber Daya, Sarana dan Prasarana

1.3.1. Sumber Daya

Dalam melaksanakan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima harus di dukung oleh sumber daya yang berkualitas baik dari segi sarana dan prasarana pendukung. dari sisi sumber daya manusia, masih belum memadai baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas, tetapi dengan memanfaatkan pola tanggungjawab dan jalur koordinasi yang semakin baik, maka dapat mendukung pencapaian kinerja dengan baik pula.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan organisasi. Berikut informasi terkait dengan SDM Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima per 31 Desember 2025.

a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan pendidikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

No.	Pegawai	Jumlah
1.	S2	2
2.	S1	19
3.	Diploma 3	2
4.	SMA / sederajat	7
5.	SMP	1
	Jumlah	**31**

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan belum terpenuhi.

b. Jumlah pegawai berdasarkan eselonering

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan eselonering Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

No.	Pegawai	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	1
4.	Eselonering	26
	Total	**31**

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	3	4	7
3	Golongan III	4	14	18
4	Golongan IV	3	2	5
	Jumlah	**11**	**20**	**31**

1.3.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	AC	9		9
2	Dispenser	3		3
3	Filling Besi/Metal	5		5
4	Hardisk External	1	1	2
5	Komputer PC	9		9
6	Kursi Kerja	38		38
7	Kursi Rapat Plastik	49		49
8	Kursi Tamu	1		1
9	Laptop	15	5	20
10	Lemari Arsip	5		5
11	Lemari Besi/Metal	1		1
12	Lemari Es (Kulkas)	1		1
13	Lemari Kayu	3		3
14	Meja 1/2 Biro	14		14
15	Meja Biro	15		15
16	Meja Kerja	26		26
17	Mesin Ketik Manual Portable		1	1
18	Printer	12	4	16
19	Rak Kayu	2	1	3
20	LCD Projektor	2	1	3
21	Sound System		1	1
22	Tape Recorder		1	1
23	Televisi	4		4
24	UPS	3		3
	Jumlah	**224**	**14**	**238**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Kebutuhan ruangan kerja masih belum memadai sesuai tuntutan dan kompleksitas permasalahan Uraian analisis kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan perempuan Dan yang dihadapi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas. Selain itu, ruang pertemuan yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional tugas Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima pun belum tersedia.

Fasilitas perkantoran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DPP dan PA) Kota Bima sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Mebelair, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet, dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis, dilengkapi dengan ketersediaan printer, dan server Internet;
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital, mesintik, dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti Kulkas, *air conditioner* (AC), kipasangin, dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

1.4. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

1.4. Geografi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;
   Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.

3. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima.
4. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.
   Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

1.5. Landasan Hukum

1.5. Landasan Hukum

LKIP Kota Bima ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kota Bima Tahun 2025 Nomor 261);

8. Peraturan Walikota Bima Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 717).

1.6. Sistimatika

1.6. Sistimatika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bima Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai Dinas teknis dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbagai kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima. Berkaitan dengan hal tersebut telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai sebagai bagian dari perwujudan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah merumuskan tujuan dan sasaran untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna mewujudkan Visi Kota Bima "***Terwujudnya Kota Bima Yang Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan***" dan untuk mewujudkan Visi Kota Bima tersebut maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima sebagai berikut::

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat berketahanan sosial yang religius dan berbudaya
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang maju dan berdaya saing.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional
4. Meningkatkan tata kelola ekologi yang terintegrasi dan berkelanjutan
5. Mewujudkan bangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan, merata dan berkelanjutan.

Visi dan misi yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan tujuan, sasaran serta indikator kinerja untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari visi dan misi tersebut.

Dalam rangka mewujutkan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bima, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengarustamaan gender, pemberdayaan, serta perlindungan perempuan dan anak.

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   a. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
   b. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan
   c. Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini:

Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	70,77	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,50	37,60	37,70	37,80	37,90	38,00
			Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98	4,81	4,63	4,46	4,29	4,12
	Nilai Penghargaan Kota Layak Anak	705	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41	5,21	5,01	4,81	4,61	4,41
				Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	72,5%	74,5%	76,5%	78,5%	80,5%	82,5%

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bima, maka harus di dukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
   a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
      1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
      1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
   c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
      3. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten

3. Program Perlindungan Perempuan
   a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
      1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
      2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
   a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
      1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
      2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
   a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Perlindungan Khusus Anak

a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA

b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
2. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima telah menetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) tahun 2025 sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU ini telah mempedomani indikator kinerja daerah pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025-2029 serta dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang berfokus pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima.

Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak Kota Bima

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Porsentase Sumbangan pendapatan perempuan	Sumbangan pendapatan perempuan adalah kontribusi pendapatan yang dihasilkan oleh perempuan, baik secara langsung melalui pekerjaan mereka maupun tidak langsung melalui aktivitas ekonomi lainnya, terhadap pendapatan rumah tangga dan perekonomian secara keseluruhan. Sumbangan ini merupakan indikator penting dalam mengukur pemberdayaan perempuan dan kemandirian ekonomi mereka. Semakin tinggi nilai hasil perhitungan, maka semakin besar pula sumbangan pendapatan perempuan Total pendapatan keluarga adalah pendapatan perempuan ditambah pendapatan anggota keluarga lainnya (suami, anak, anggota lainnya)	%	Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP): (Pendapatan Perempuan / Total Pendapatan Keluarga) x 100% = ...%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia >18 thn ke atas)	Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termaksud ancaman untuk malakukan perbuatan, pemaksaan atau pemerasan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan. Sedangkan korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan. Maka rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia > 18 thn keatas) adalah perbandingan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah penduduk perempuan usia > 18 thn ke atas dikalikan dengan 10.000	per 10.000 pdd	(Jumlah korban kekerasan perempuan yang ada / Jumlah pdd Perempuan > 18 thn Yang Ada) .x 10.000 pdd =....% Kriteria: • Perempuan yang dimaksud adalah penduduk usia > 18 thn • Kekerasan terhadap perempuan adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Perda Kota Bima No. 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan
Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka rasio anak korban kekerasan (per 10.000 pdd <18 thn) adalah perbandingan jumlah korban kekerasan terhadap anak dengan jumlah penduduk usia < 18 tahun dikalikan dengan 10.000	per 10.000 pdd	(Jumlah korban kekerasan anak yang ada / Jumlah anak <18 thn...Org) ..x10.000 pdd=...% Kriteria: • Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (rermasuk anak dalam kandungan) • Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	FORMULASI PENGHITUNGAN
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang memenuhi hak-hak anak melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga. Adapun kriteria Kecamatan Layak Anak antara lain: 1) Memiliki Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak, 2) Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam setahun, 3) Memiliki Rencana Aksi Kecamatan Layak Anak, 4) Lebih dari 50% desa/kelurahan di wilayah kecamatan merupakan desa/kelurahan layak anak, 5) Memiliki anggaran belanja langsung untuk program dan kegiatan, 6) Memiliki Profil Anak atau data dasar pemenuhan hak dan perlindungan anak, 7) Mendorong peran aktif masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, 8) Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan 9) Melakukan kegiatan inovasi dalam pemenuhan hak anak	%	Jumlah Kecamatan Layak Anak ..... x 100 % = ...% Jumlah Kecamatan yang Ada .....

Tabel 2.3.
Penjelasan Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	(Jumlah perempuan yang ikut aktif dalam berorganisasi / Jumlah perempuan ≥ 18 yang ada) x100%=...% Kriteria: Organisasi yang dimaksud adalah semua organisasi yang melibatkan perempuan baik keanggotaan maupun kegiatannya dalam pembelaan hak-hak perempuan dan anak	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	(Jumlah SKPD yang melaksanakan PPRG / Jumlah SKPD yang ada) x 100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)
			Meningkatnya kapasitas pemberdayaan perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	(Jml perempuan pd lembaga pemerintah & swasta.... / Jumlah pekerja perempuan yang ada..... Org) x100%=...% Kriteria: - Lembaga pemerintah adalah legislatif dan eksekutif - Lembaga swasta adalah semua lembaga diluar dari unsur pemerintah	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Komulatif Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	(Jumlah kelompok usaha perempuan penerima bantuan / Jumlah kelompok usaha perempuan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	(Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina / Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang ad) x 100%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an	Komulatif Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an
									Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Komulatif Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
									Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Komulatif Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Meningkanya Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	(Jumlah kekerasan Perempuan terlapor / Jumlah perempuan > 18 Tahun yang ada) x 100%=...%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Komulatif Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
									Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendamping an Layanan Perlindungan Perempuan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	(Jumlah kekerasan Perempuan terlapor yang tertangani / Jumlah Pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Perempuan yang dimaksud adalah pdd berjenis kelamin perempuan > 18 thn - Kekerasan perempuan adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 thn 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	(Jumlah kasus rujukan lanjutan yang dilanyani / jumlah kasus rujukan lanjutan yang ada) x 100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Komulatif Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya pemenuhan data gender dan anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	(Jumlah data gender dan anak yang terpenuhi / jenis data gender dan anak yang harus ada) x 100%=...% Kriteria: - Data Kekerasan terhadap Anak - Data Kekerasan terhadap Perempuan - Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak yang dihasilkan	Komulatif Jumlah data kekerasan gender dan anak yang dihasilkan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia
									Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data
	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkanya Pencegahan dan Penanganann tindak kekerasan terhadap Anak dan TPPO	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	(Jumlah kekerasan anak terlapor / Jumlah anak yang ada) x 100%=...%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Komulatif Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Komulatif kegiatan pencegahan KtA terpadu

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
				Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	(Jumlah pengaduan korban kekerasan Anak yang tertangani / Jumlah pengaduan yang ada) x 100%=...% Kriteria: - Anak yang dimaksud adalah penduduk usia 0-17 thn (rermasuk anak dalam kandungan) - Kekerasan terhadap anak adalah jenis-jenis kekerasan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	(Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah yang dilanyani / jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah yang ada) x 100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Komulatif Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Mendapatkan Layanan Pengaduan
									Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Komulatif Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Komulatif Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Komulatif Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK
									Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Komulatif Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Meningktnya pemenuhan hak anak	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	(Jumlah lembaga yang yang memenuhi kriteria layak anak / lembaga yang ada) x 100%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Komulatif Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Komulatif Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pemenuhan Hak Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULA INDIKATOR SUB KEGIATAN
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	Komulatif lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
									Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Komulatif Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025.

Tabel 2.4.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,50%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41%
	Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	72,50%

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Indikator Kinerja Sasaran Eselon II, III & IV
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2025
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	11,75%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	% SKPD yang melaksanakan PPRG	54,84%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintaha n dan swasta	8,11%	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan	5250 org	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisa si
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	13%	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina	39,33%	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2025
								Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan	0,050%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	29 kasus	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah
			Persentase tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	29 Org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2025
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Layanan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase pemenuhan data gender dan anak	100%	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah data kekerasan gender dan anak	4 jenis data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 dok
								Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
	Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak	0,054%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak	27 kasus	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	50 org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2025
			Persentase tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	100%	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	100%	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	27 Layanan
								Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	27 Orang
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan	41 Lembaga	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg
								Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2025
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	69,05%	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak	46 Lembaga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan pennguatan dan pengembangan	38 lembaga	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2025	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET 2025
								Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun 2025, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut:

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dan Walikota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama. Anggaran yang mendukung dalam Pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 6 (enam) program, 17 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 7.625.813.310 Berikut tabel perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025.

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,50
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	72,50%

	Program :	**Anggaran**	**Ket.**
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 2.523.630.064	
2	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 294.699.200	
3	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 35.944.800	
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 168.403.600	
5	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 641.450.800	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 3.961.684.846	

Adapun perjanjian kinerja Eselon II, III dan IV yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET
1	**Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	11,75%
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,11%
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	13%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84%**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5250 org**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39,33%**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat PeningkatanKapasitas	35 org
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen
2	**Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	0,050%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilayani	**100%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	29 kasus
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	2 dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET
			Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	29 Org
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Layanan
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah data kekerasan gender dan anak**	**3 jenis data**
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen
3	**Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	0,054%
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	**100%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**27 kasus**
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50 Org

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100%**
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	27 Orang
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	27 Orang
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan**	**41 Lembaga**
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**% meningkatnya lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	69,05%
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**38 lembaga**
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	80 Orang

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET
			Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan kinerja pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program, hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan guna mewujutkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja.

Kerangka Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan peraturan yang ada, *pertama,* untuk melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja menggunakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, yaitu membandingkan antara target kinerja, indikator, sasaran strategis dan/atau indikator kinerja utama (IKU) yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Berikutnya, *kedua,* dalam melakukan penarikan simpulan terhadap kategori capaian kinerja dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Interval Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No	Interval Nilai Capaian KInerja	Kategori Penilaian Capaian Kinerja
I	> 90 %	Sangat Tinggi
II	75% s/d 90%	Tinggi
III	65% s/d 75%	Sedang
IV	50% s/d 65%	Rendah
V	< 50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri 54 tahun 2010

3.1.1 Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima seperti yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,50	38,02*	101,39%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98	4,05	118,72%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41	6,59	78,16%
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	72,50%	72,50%	100,00%

Dari Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari empat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tahun 2025, ke 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut telah mencapai target. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum pencapaian kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil.

Untuk realisasi pada Sumbangan Pendapatan Perempuan masih diberi tanda bintang dimana angka realisasinya masih mencantumkan angka tahun sebelumnya. Angka realisasi Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2025 akan di rilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar pertengahan Tahun 2026.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang menghasilkan outcome dan output program dan kegiatan Tahun 2025. Berikut gambaran capain indikator program dan kegiatan eselon II, III, IV dan Fungsional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025, seperti pada table di bawah ini:

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Fungsional Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	**Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	**11,75%**	**11,65%**	**99,21%**
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	**8,11%**	**8,48%**	**104,53%**
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	**13%**	**25%**	**194,00%**
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84%**	**78,95%**	**143,96%**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5250 org**	**6914 org**	**131%**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39,33%**	**41,57%**	**105,71%**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga	35 Lembaga	100%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 org	37 org	106%
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	**Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**0,050%**	**0,040%**	**119%**
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	**100%**	**100%**	**100%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	29 kasus	**23 kasus**	**121%**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	15 Perangkat daerah	50%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	29 Org	24 org	83%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Layanan	24 layanan	83%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**	100%	**100%**
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah data kekerasan yang dihasilkan**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**100%**
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3	**Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**0,054%**	**0,066%**	**78%**
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	**100%**	**100%**	**100%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**27 kasus**	**33 kasus**	78%
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	50 Org	50 org	100%
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	34 layanan	126%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	34 orng	126%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan**	**41 Lembaga**	**41 Lembaga**	**100%**
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	100%
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	35 org	117%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	69,05%	64,29%	**93%**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	**46 lembaga**	**100%**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	35 Organisasi	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**38 lembaga**	**28 lembaga**	**74%**
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	60%
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	0	0%

Adapun interval capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4: Interval Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempujan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	Interval Capaian Kinerja (%)				
					≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,50	38,02	101,39%					101,39%
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98	4,05	118,72%					118,72%
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41	6,59	78,16%				78,16%	
	Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	72,50%	72,50%	100,00%					100,00%

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, 4 indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 memperoleh kategori sangat tinggi.

Berikut Interval capaian indicator kinerja eselon II, III dan Sub Koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025.

Tabel 3.5: Interval Capaian Indikator Kinerja Eselon II, III dan Fungsional
Dinas Pemberdayaan Perempujan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
1	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	11,75%	11,65%	99,21%					99,21 %
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	8,11%	8,48%	104,53%					104,53%
			Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	13%	25%	194,00%					194,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84%**	**78,95%**	**143,96%**					**143,96%**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%					100,00%
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5250 org**	**6914 org**	**131%**					**130,51%**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%					100,00%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39,33%**	**41,57%**	**105,71%**					**105,71%**
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	35 lembaga	35 Lembaga	100%					100,00%
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 org	37 org	106%					105,71%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1 Dokumen	50%					50,00 %
2	**Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**0,050%**	**0,040%**	**119%**					**118,72%**
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	**100%**	**100%**	**100%**					**100,00%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	29 kasus	**23 kasus**	**121%**					**120,69%**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%					100,00%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	15 Perangkat daerah	50%		50%			
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Porsentase kasus rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**					**100,00%**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	29 Org	24 org	83%				83%	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Layanan	24 layanan	83%				83%	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**	100%	**100%**					**100,00%**
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah data kekerasan yang dihasilkan**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**100%**					**100,00%**
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	100%					100,00%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%					100,00%
3	**Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**0,054%**	**0,066%**	**78%**				**78%**	
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang dilayani	**100%**	**100%**	**100%**					**100,00%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**27 kasus**	**33 kasus**	78%				**77,78%**	
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	50 Org	50 org	100%					100,00%

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100%**	**100%**	**100%**					**100,00%**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	34 layanan	126%					125,93%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	34 orng	126%					125,93%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan**	**41 Lembaga**	**41 Lembaga**	**100%**					**100,00%**
		Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	100%					100,00%
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	35 org	117%					116,67%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	**% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	69,05%	64,29%	**93%**					**93,10 %**
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	**46 lembaga**	**100%**					**100,00%**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	INTERVAL CAPAIAN KINERJA (%)				
							≤ 50	50,1 - 65	65,1 -75	75,1 -90	≥ 90
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	35 Organisasi	100%					100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%					100,00%
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**38 lembaga**	**28 lembaga**	**74%**			**74%**		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	100%					100,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	60%		60%			
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	0	0%	0%				

Mencermati tabel diatas diketahui bahwa, 9 (sembilan) indikator kinerja program atau indikator eselon II yang diperjanjikan, sebanyak 8 indikator memiliki

interval > 90 (sangat baik) sedangkan 1 (satu) indikator memiliki interval 75,1-90 (tinggi). Untuk indikator kinerja kegiatan atau indikator eselon III, dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, sebanyak 9 (sembilan) indikator memiliki interval > 90 (sangat baik), 1 (satu) indikator memiliki interval 75,1-90 (tinggi) dan 1 (satu) indikator memiliki interval 65,1-75 (sedang). Sedangkan Untuk indicator kinerja sub kegiatan atau indicator Sub Koordinator, dari 21 (dua puluh satu) indikator kinerja sub kegiatan yang diperjanjikan, sebanyak 16 (sembilan belas) indikator memiliki interval > 90 (sangat baik), 2 (dua) indikator memiliki interval 75,1-90 (tinggi), 2 (dua) indikator memiliki interval 50,1-65 (Rendah) dan 1 (satu) indikator memiliki interval ≤50,1 (sangat rendah).

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun 2024, Target Kinerja Renstra 2025-2029, Serta Standar Nasional

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator tahun 2025 dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Strategis I :
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

Ketidaksetaraan gender masih menjadi isu besar meskipun sudah mengalami perubahan yang signifkan dalam dekade terakhir. Ketidaksetaraan gender ini ditandai dengan adanya ketimpangan relasi/kondisi (perbedaan, akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan) bagi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan.

Gender dibedakan sebagai perbedaan fungsi dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh masyarakat. Perbedaan tersebut pada praktiknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan baik di lingkungan rumah tangga, pekerjaan masyarakat kultur, maupun negara. Oleh sebab itu untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut diperlukan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam proses bermasyarakat dan bernegara.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Gana mewujudkan kesetaraan gender dimasyarakat, maka harus dilakukan pemberdayaan gender.

Pemberdayaan gender adalah upaya untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan tujuan antara lain: meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki, Meningkatkan peran perempuan dalam masyarakat, meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menetapkan faktor ekonomi sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan pemberdayaan gender di suatu negara. Aspek ekonomi dalam IDG diukur melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial. Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom. Oleh karena itu, urgensi mengukur sumbangan pendapatan perempuan dinilai tepat karena indikator ini merefleksikan tingkat pembangunan pemberdayaan gender.

Adapun capaian indikator sasaran I yaitu sumbangan pendapatan perempuan (persen), perbandingan realisasi tahun lalu dan perbandingan dengan target akhir renstra 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA 2029	CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET 2029
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)		38,02		37,50	38,02*	101,39 %	37,90	100,32%

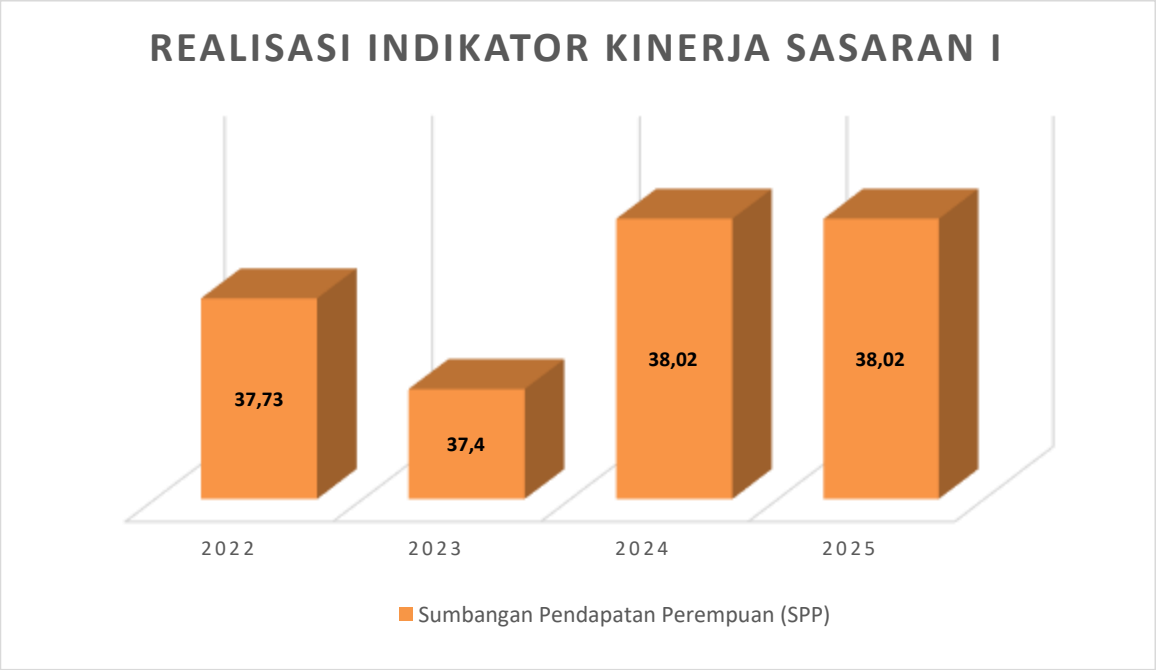
Dari tabel di atas dapat dilakukan analisis ketercapaian sasaran I: Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangaunan adalah sebagai berikut:

- Realisasi Tahun 2025 sebesar 38,02, dengan demikian capaian tahun 2025 sebesar 101,39% (terlampaui).
- Dibandingkat realisasi tahun lalu sebesar 38,02 sumbangan pendapatan perempuan (persen) sama dengan tahun 2025 yaitu sebesar 38,02.

- Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target renstra 2029 sebesar 100,32%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sasaran I pada indicator sumbangan pendapatan perempuan (persen) dari tahun 2022 s/d tahun 2025 dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran I
Sumbangan Pendapatan Perempuan (persen)
Tahun 2022 s/d 2025



Untuk sasaran I yaitu Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangaunan diketahui bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 mengalami fluktuatif dan cenderung trus meningkat, namun pada tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan yaitu sebesar 38,02% dan paling rendah bila dibandingkan dengan tahun 2022 samai dengan tahun 2024.

Keberhasilan capaian sasaran I Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangaunan didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7: Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran I Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	**Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan**	**Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)**	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi**	**11,75%**	**11,65%**	**99,21%**
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan dan swasta	**8,11%**	**9,83%**	**121,16%**
				Persentase peningkatan bidang usaha ekonomi perempuan	**13%**	**25%**	**194,00%**
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**% SKPD yang melaksanakan PPRG**	**54,84%**	**78,95%**	**143,96%**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah keanggotaan perempuan dalam organisasi kemasyarakatan**	**5250 org**	**6914 org**	**131%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pesentase Lembaga Penyedia Layanan Perempuan yang dibina**	**39,33%**	**41,57%**	**105,71%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	35 lembaga	35 Lembaga	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
			Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan			
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	35 org	37 org	106%
			Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 memiliki capaian sebesar 138,17%, untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2025 memiliki capaian rata-rata sebesar 126,73%, sedangkan untuk indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2025 memiliki capaian rata-rata sebesar 91,14%.

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam mencapai target kinerja program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan yaitu antara lain:

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
   a) Sub Kegiatan Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan PUG kewenangan PUG termasuk PPRG.

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Rapat koordinasi pokja PUG Kota Bima.
2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
   a) Sub Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi.
3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
   a) Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupate/Kota.

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Musrembang perempua dan Pembinaan Sekolah Perempuan Bidang Hukum, Politik, Sosial, Ekonomi LA-Timasa (Layanan Pelatihan Masyarakat).
   b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten serta.

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Kegiatan Pendistribusian Kewirausahaan, Sosialisasi Penguatan Lembaga Penyedia Layanaan Pemberdayaaan Perempuan dan Pelatihan Kewirausahaan Dan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Bagi Perempuan Kota Bima.

c) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten.

Aktifitas yang dilakukan antara lain: Rapat Koordinasi Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan (RAPP) Kota Bima.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran I adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen pimpinan baik dari pusat maupun daerah terkait upaya peningkatan pemberdayaan perempuan.
2. Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan.
3. Adanya Pelatihan Kewirausahaan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
4. Adanya kerja sama dengan berbagai lintas sector terkait pembinaan dan pelatihan pada kelompok-kelompok usaha perempuan.
5. Pemberian bantuan berupa peralatan produksi jajanan baik kering maupun basah, alat pengemasan minuman, pengadaan benang, perlengkapan catering, alat penggiling tepung, dan pengadaan alat boga pada kelompok-kelompok usaha perempuan.

Kualitas pemberdayaan perempuan di Kota Bima selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, meski masih belum menyamai laki-laki. Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai dimensi kehidupan teritama di bidang ekonomi, terdapat **beberapa faktor yang menghambat antara lain:**

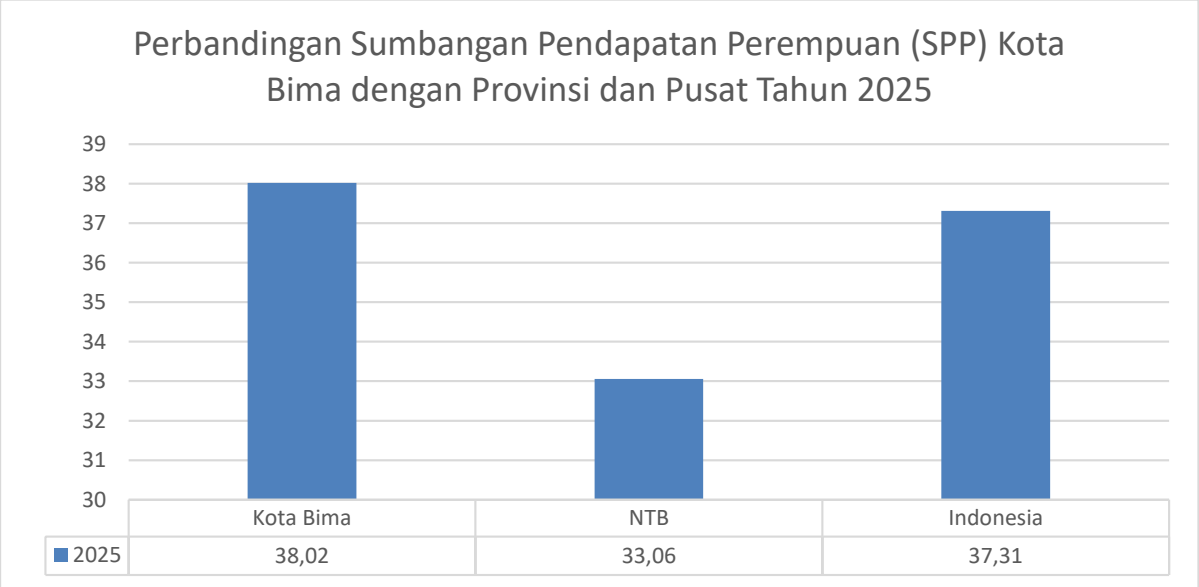
1. Belum meratanya pemahaman tentang kesetaraan gender dan konsep strategi pengarustamaan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama.
2. Masih adanya diskriminasi bermasis gender pada dunia kerja, dimana beban budaya di masyarakat yang mengkonstruksi perempuan harus bertanggung jawab penuh di ranah domestik mengakibatkan kebanyakan pekerja perempuan lebih memilih bekerja dengan status pekerjaan informal dari pada formal.
3. Upah/pendapatan pekerja perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki
4. Motivasi dari para perempuan untuk terlibat aktif dalam usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera masih rendah.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka **langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima** adalah (1) Mendorong setiap Perangkat Daerah (PD) untuk memahami bahwa

isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, (2) Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi kelompok usaha perempua (3) Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan, (4) selain itu diupayakan terbentuknya sekolah perempuan pada masing-masing kelurahan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi kaum perempuan, (5) serta mendorong pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam mendudukin jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah.

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2: Perbandingan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Kota Bima dengan Provinsi dan Pusat Tahun 2025



Dari gambar di atas menunjukan bahwa Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Kota Bima Tahun 2025 menunjukan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) Provinsi NTB dan Nasiaonal. Pencapaian target kinerja Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) merupakan kemajuan dalam hal kesetaraan gender.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran I, dibutuhkan dukungan 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa

pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8: Analisis Atas Efisinsi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP)	37,50	38,02	101,39%	2.523.630.064	2.395.297.060	94,91%	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indicator kinerja Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) pada sasaran strategis I yaitu sebesar Rp. 128.333.004 (5,09%).

Pencapaian Sasaran Strategis II :

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan

Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Adapun capaian indikator sasaran II yaitu rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas), perbandingan realisasi tahun lalu dan perbandingan dengan target akhir renstra 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran II Tahun 2025

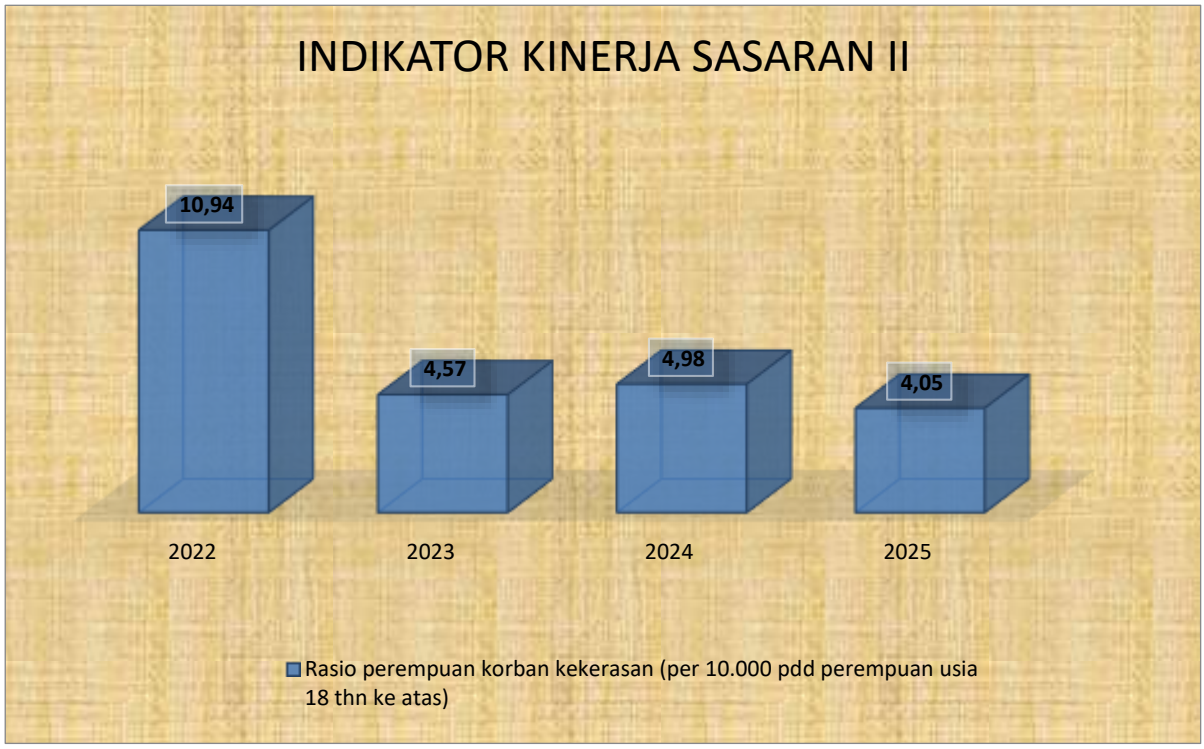
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA 2029	CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET 2029
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	9,68	4,98	148,58 %	4,98	4,05	118,72 %	4,29	105,72%

Dari tabel di atas dapat dilakukan analisis ketercapaian sasaran II: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan adalah sebagai berikut:

- Realisasi Tahun 2025 sebesar 4,05, dengan demikian capaian tahun 2025 sebesar 118,72% (terlampaui).
- Dibandingkat realisasi tahun lalu sebesar 4,98 Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) mengalami penurunan yaitu sebesar (0,93), sedangkan dari tingkat capaian (% realisasi) mengalami penurunan sebesar (29,86%) dimna capaian tahun lalu sebesar 148,58%, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 118,72%. Hal ini disebabkan pada Indikator sasaran ini mengalami penyesuaian target dari dokumen renstra 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dengan dokumen renstra Tahun 2025-2029, mengingat dalam penyusunan target pada Renstra 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menggunakan baseline data tahun 2024.
- Capaian target indikator pada tahun 2025terhadap target renstra 2029 sebesar 105,72%.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sasaran II pada indicator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) dari tahun 2022 s/d tahun 2025 dapat di lihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3: Realisasi Indikator Kinerja Sasaran II Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)
Tahun 2022 s/d 2025



Untuk sasaran II yaitu Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dengan indikator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) diketahui bahwa dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 mengalami fluktuatif dan cenderung trus meningkat, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,05% dan paling rendah bila dibandingkan dengan tahun 2022 samai dengan tahun 2024.

Keberhasilan capaian sasaran II Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dengan indikator Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10. Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran II Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	**Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan**	**Program Perlindungan Perempuan**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan**	**0,050%**	**0,040%**	**119%**
			Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	**100%**	**100%**	**100%**
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	29 kasus	**23 kasus**	**121%**
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat daerah	15 Perangkat daerah	50%
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Porsentase kasus rujukan lanjutan pagi perempuan korban kekerasan yang dilayani**	**100%**	**100%**	**100%**
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	29 Org	24 org	83%
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Layanan	24 layanan	83%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	**Persentase pemenuhan data gender dan anak**	**100%**	**100%**	**100%**
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**Jumlah data kekerasan yang dihasilkan**	**3 jenis data**	**3 jenis data**	**100%**
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis II Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 memiliki capaian sebesar 106,24%, untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2025 memiliki capaian rata-rata sebesar 106,90%, sedangkan untuk indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2025 memiliki capaian rata-rata sebesar 85,92%. Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Perlindungan Perempuan

Dalam mencapai target kinerja program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan serta 4 (empat) sub kegiatan yaitu antara lain:

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
   a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan, Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
   b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak di lingkungan pendidikan, kegiatan rapat koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak dan bimbingan teknis inovasi gerakan cepat pencegahan perkawinan pada usia anak (Gercep Uma Ruka).
2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
   a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Kegiatan rapat koordinasi dengan satgas PPA. Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi forum satgas perlindungan perempuan dan anak (PPA) yang merupakan wadah yang berjejaring yang di bentuk untuk mendekatkan pelayanan dimasyarakat terutama pengaduan korban kekerasan, memantau dan mengevaluasi perkembangan perlindungan korban di lingkungan masyarakat (kelurahan).
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Kegiatan pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan, pendampingan oleh tenaga ahli baik tenaga ahli psikolog maupun tenaga ahli advokad, perlindungan korban di rumah aman, serta pelayanan medikolegal.

b. Capain Program Pengelolaan Data Gender dan Anak

Dalam mencapai target kinerja program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu antara lain:

a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
   a) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Kegiatan penyusunan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, kegiatan penyusunan data perkawinan usia anak.
   b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Pengelolaan aplikasi Simfoni PPA dan pengelolaan aplikasi SIMEP PA-KPAI.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran II adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan
   a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
   b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
   c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
2. Adanya kegiatan Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan/TPPO di Kota Bima.
3. Adanya kegiatan Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan/TPPO di Kota Bima.
4. Adanya Pembentukan dan pembinaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kelurahan.
5. Penyusunan buku pedoman pencegahan kekerasan terhadap perempuan

Walaupun pada tahun 2025 capaian indikator kinerja sasaran II yaitu Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) masih dibawah target kinerja, namun kejadian kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individu dimana pengetahuan korban maupun keluarga yang masih kurang tentang pencegahan kekerasan.
2. Faktor Ekonomi dimana terdapat orang tua yang menjadi TKW sehingga anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Serta perceraian orang tua dimana anak dititpkan dan diasuh oleh orang lain.
3. Faktor Sosial Budaya, dampak buruk dari sosial media dimana ada tontonan yang tidak mendidik bahkan berbau pornografi, yang banyak memicu terjadinya kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak.

Selain faktor-faktor di atas, tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Bima adalah sudah terbentuknya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa kelurahan sehingga akses masyarakat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan semakin terjangkau, serta masyarakat semakin sadar akan hak-hak korban kekerasan. Dimana sebelumnya terdapat persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan harus ditutup rapat karena dianggap merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka **langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima** adalah meningkatkan sosialisasi berkelanjutan terkait penghapusan kekerasan terhadapa perempuan, pembentukan dan bimbingan teknis satgas PPA dan aktivis PATBM, perbaikan sistim pencatatan dan pelaporan kasus, mengoptimalkan Puspaga dan pembentukan KPAD Kota Bima. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan.

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran II Dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025				Ket
			Satuan	Realisasi Kota Bima	Realisasi Provinsi NTB	Realisasi Nasional	
1	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	Angka	4,05	1,52	-	

Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) Kota Bima Tahun 2025 menunjukan angka yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) Provinsi NTB.

Adapun akibat dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan yaitu dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan pun sedemikian kompleks serta penderitaan yang dialami korban akan membekas sepanjang hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin terjangkau oleh masyarakat mempercepat tingginya kejadian kasus kekerasan, hal ini menjadi salah satu factor

pemicu meningkatnya kasus pelecehan, sehingga memerlukan langkah-langkah preventif dan antisipasif.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat untuk ikut serta berperan aktif mendukung pemerintah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan ini.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Lima jenis layanan yang merupakan hak korban yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Semua kasus kekerasan kepada perempuan di Kota Bima Tahun 2025, 100% telah mendapatkan pelayanan yang optimal.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran II, dibutuhkan dukungan 2 (dua) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.12: Analisis Atas Efisinsi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kenerja Sasaran II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas)	4,98	4,05	118,72%	330.664.000	217.706.200	65,84%	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) pada sasaran strategis III yaitu sebesar 112.957.800 (34,16%).

Pencapaian Sasaran Strategis III :

Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Isu hak dan perlindungan anak, bukan hanya isu daerah tertentu, melainkan menjadi isu nasional dan internasional. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak

adalah manusia muda yang rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Sehingga Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun capaian indikator sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) dan Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak perbandingan realisasi tahun lalu dan perbandingan dengan target akhir renstra 2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2024			2025			TARGET AKHIR RENSTRA 2029	CAPAIAN S/D 2025 TERHADAP TARGET 2029
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak dan Pemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	11,29	5,41	152,11%	5,41	6,59	78,16 %	4,61	56,97%
	Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	70,50 %	70,50%	100,00%	72,50%	72,50 %	100,00%	80,50%	90,06%

Dari tabel di atas dapat dilakukan analisis ketercapaian sasaran III: Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak, dimana terdapat dua indikator kinerja yang menjadi ukuran yaitu sebagai berikut:

1. Rasio anak korban kekerasan (per 10.000 pdd<18 thn)
   - Realisasi Tahun 2025 sebesar 6,59, dengan demikian capaian tahun 2025 sebesar 78,16% (belum terlampaui).
   - Dibandingkat realisasi tahun lalu sebesar 5,41 Rasio anak korban kekerasan (per 10.000 pdd<18 thn) mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,18, sedangkan dari tingkat capaian (% realisasi) mengalami penurunan sebesar (73,95%) dimana capaian tahun lalu sebesar 152,11%, sedangkan capaian tahun 2025 sebesar 78,16%. Hal ini disebabkan pada Indikator sasaran ini mengalami penyesuaian target dari dokumen renstra 2024-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima dengan dokumen renstra Tahun 2025-2029, mengingat dalam penyusunan target pada Renstra 2025-2029 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima menggunakan baseline data tahun 2024.
   - Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target renstra 2029 sebesar 56,97%.

2. Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak
    - Realisasi Tahun 2025 sebesar 72,50, dengan demikian capaian tahun 2025 sebesar 100,00% (terpenuhi).
    - Dibandingkat realisasi tahun lalu sebesar 70,50% Nilai Kecamatan yang memenihu kriteria layak anak mengalami kenaikan yaitu sebesar 2,00%.
    - Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target renstra 2029 sebesar 90,06%.

Keberhasilan capaian sasaran III Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak dengan indikator Rasio anak korban kekerasan (per 10.000 pdd<18 thn) dan Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak didukung oleh keberhasilan progran, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.14: Kontribusi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terhadap Sasaran III Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
1	**Meningkatnya perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	**Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)**	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**Persentase penurunan tindak kekerasan terhadap anak**	**0,054%**	**0,066%**	**78%**
				Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	**100%**	**100%**	**100%**
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak**	**27 kasus**	**33 kasus**	78%
			Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	50 Org	50 org	100%
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pelayanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi**	**100%**	**100%**	**100%**
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	34 layanan	126%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang	34 orng	126%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilakukan penguatan dan pengembangan**	**41 Lembaga**	**41 Lembaga**	**100%**
			Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 keg	2 keg	100%
			Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten//kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 org	35 org	117%
		Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**% lembaga yang memenuhi kriteria layak anak**	**69,05%**	**64,29%**	**93%**

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**46 lembaga**	**46 lembaga**	**100%**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	35 Organisasi	35 Organisasi	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah PKM & Sekolah yang menyediakan fasilitas ramah anak**	**38 lembaga**	**28 lembaga**	**74%**
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	100%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	60%
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Dokumen	0	0%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata indikator Program yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis III Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 memiliki capaian sebesar 92,82%, untuk Indikator Kegiatan pada tahun 2025 memiliki capaian rata-rata sebesar 90,29%, sedangkan untuk indikator Sub Kegiatan yang mendukung atas pencapaian kinerja sasaran strategis I Tahun 2025 memiliki capaian rata-rata sebesar 89,87%.

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Perlindungan Khusus Anak

Dalam mencapai target kinerja program ini didukung 3 (tiga) kegiatan serta 6 (enam) sub kegiatan yaitu antara lain:

1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
   a) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan kekerasan/TPPO dan Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO.
   b) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan terhadap anak.
2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Penyediaan Kebutuhan Spesifik, Penyediaan rumah perlindungan korban kekerasan, pendampingan tenaga ahli (psikolog dan advokat).
   b) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

      Aktifitas yang dilakukan antara lain: Pendampingan dan penjangkauan korban kekerasan terhadap anak.
3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
   a) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota.

Aktifitas yang dilakukan antara lain: Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aktivis PATBM.

b) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota.

Aktifitas yang dilakukan antara lain: Kegiatan Rapat Koordinasi Dengan PATBM Kelurahan, Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

b. Capaian Program Pemenuhan Hak Anak

Dalam mencapai target kinerja program ini didukung 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan yaitu antara lain

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
   a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
   a) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
   b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dan
   c) Pengembangan Komunikasi, Informasidan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan regulasi pencegahan kekerasan terhadap anak
   a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
   b. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
   c. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Adanya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Lingkungan Pendidikan.
3. Adanya Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Inovasi Gerakan Cepat Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Gercep Uma Ruka).
5. Adanya pembentukan Forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
6. Adanya pelatihan kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan.
7. Adanya Pembentukan dan pembinaan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kelurahan.
8. Penyusunan buku pedoman pencegahan kekerasan terhadap anak.

Pada tahun 2025 capaian indikator kinerja sasaran III yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) masih diatas target kinerja, Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Individu dimana pengetahuan korban maupun keluarga yang masih kurang tentang pencegahan kekerasan.
2. Faktor Ekonomi dimana terdapat orang tua yang menjadi TKW sehingga anak kurang mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua. Serta perceraian orang tua dimana anak dititpkan dan diasuh oleh orang lain.
3. Faktor Sosial Budaya, dampak buruk dari sosial media dimana ada tontonan yang tidak mendidik bahkan berbau pornografi, yang banyak memicu terjadinya kekerasan seksual baik pada perempuan maupun anak.

Selain faktor-faktor di atas, tingginya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di Kota Bima adalah sudah terbentuknya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak di beberapa kelurahan sehingga akses masyarakat untuk melapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak semakin terjangkau, serta masyarakat semakin sadar akan hak-hak korban kekerasan. Dimana sebelumnya terdapat persepsi masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak harus ditutup rapat karena dianggap merupakan masalah keluarga dan bukan masalah social.

Untuk peningkatan kinerja kedepan, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima anatara lain: meningkatkan sosialisasi berkelanjutan terkait penghapusan kekerasan terhadapa anak, pembentukan dan bimbingan teknis

satgas PPA dan aktivis PATBM, perbaikan sistim pencatatan dan pelaporan kasus, mengoptimalkan Puspaga dan pembentukan KPAD Kota Bima. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kelurahan.

Sedangkan Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja indikator sasaran III yaitu Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak antara lain: (1) Adanya regulasi berupa Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak (2) Adanya dukungan pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (3) Kelembagaan Forum Anak di level Kota, kecamatan dan kelurahan cukup aktif, (4) Adanya Gugus Tugas KLA di level Kota, Kecamatan dan Kelurahan walaupun belum berjalan secara maksimal, serta (5) Adanya program yang relevan oleh pihak eksternal terkait anak.

Walaupun pada Tahun 2025 telah memenuhi dari taget kinerja yang di perjanjikan, namun masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak.
2. Masih kurangnya komitmen dari beberapa lintas sector sebagai mitra terkait pemenuhan kebutuhan dari Kota Layak Anak.
3. Kurangnya sosialisasi terkait Kota Layak Anak pada instansi pemerintah maupun swasta.
4. Kurangnya pendokumentasian atas kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak baik di instansi pemerintah maupun swasta.
5. Terbatasnya SDM yang memahami terkait Kota Layak Anak, baik di internal maupun di eksternal.
6. Anggaran program anak di level Kecamatan dan Kelurahan masih belum memadai, terutama untuk kegiatan forum anak di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 Kota Bima telah berhasil memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak dengan kategori tingkat nindya. Peringkat ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 dengan predikat tingkat madya dan predikat tingkat pratama pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan peringkat menjadi kategori madya. Namun demikian dalam rangka

mempertahankan dan meningkatkatkan predikat Kota Bima sebagai Kota Layak Anak tersebut guna peningkatan kinerja kedepan, maka **langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah (1) Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan, serta lembaga pendididkan dan kesehatan, (2) Bimtek Indikator Kota Layak Anak (KLA) pada stakeholder terkait, mengingat setiap tahunnya indikator yang dinilai selalu mengalami perubahan, (3) Melaksanakan kegiatan Konferensi Hak Anak (KHA) guna membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak-hak anak, (4) Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada forum-forum dan kelembagaan anak yang ada di Kota Bima, serta (5) Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA).

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun nasional, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran III Dibandingkan dengan Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2025				Ket
			Satuan	Realisasi Kota Bima	Realisasi Provinsi NTB	Realisasi Nasional	
1	Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	Angka	6,59	3,95	-	
		Persentase Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	%	72,50%	-	-	Indikator dikhususkan di Kota Bima

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) dan Persentase Kecamatan Layak Anak di Kota Bima dapat dikatan berhasil menjadi Kota Layak Anak kategori Madya, dengan diperolehnya Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkat kinerja Kota Bima atas keberhasilan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak Tahun 2025.

Untuk keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran III, dibutuhkan dukungan 2 (dua) program dengan 5 (lima) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukan persentase keberhasilan yang lebih tinggi dari pada persentase realisasi penggunaan dana. Adapun gambaran penggunaan anggaran untuk pencapaian indicator sasaran tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.18. Analisis Atas Efisinsi Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Indikator Kenerja Sasaran III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN 2025	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYERAPAN	EFISIENSI
Meningkatnya perlindungan terhadap Anak danPemenuhan hak anak	Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn)	5,41	6,59	78,16%	641.450.800	440.858.400	68,73%	Efisien
	Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak	72,50%	72,50%	100,00%	168.403.600	113.850.600	67,61%	Efisien

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) pada sasaran strategis III yaitu sebesar 200.592.400 (31,27%). Demikian juga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan dalam pencapaian Indikator kinerja Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak pada sasaran strategis III yaitu sebesar Rp. 54.553.000 (32,39%).

3.2. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun 2025 telah melaksanakan serangkaian program kegiatan yang telah menghasilkan berbagai macam tingkat capaian yang didasari dari berbagai macam indikator sasaran, baik itu sasaran strategik, sasaran program, sasaran kegiatan maupun sasaran sub kegiatan. Secara umum sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Penggunaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada Tahun 2025 mendapat alokasi sebesar Rp. 7.625.813.310,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.746.378.827,- dan capaian porsentase sebesar 88,47%. Adapun rincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19.
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

No.	Komponen	Tahun 2025 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Belanja Daerah**	**7.625.813.310,00**	**6.746.378.827,00**	**88,47**
1.1	**Belanja Operasi**	**7.559.233.310,00**	**6.685.640.827,00**	**88,44**
1.1.1	Belanja Pegawai	2.841.089.285,00	2.565.785.550,00	90,31
1.1.2	Belanja Barang Jasa	3.383.144.025,00	2.784.855.277,00	82,32
1.1.3	Belanja Hibah	1.335.000.000,00	1.335.000.000,00	100,00
1.2	**Belanja Modal**	**66.580.000,00**	**60.738.000,00**	**91,23**
1.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	66.580.000,00	60.738.000,00	91,23
1.2.2	Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja		**7.625.813.310,00**	**6.746.378.827,00**	**88,47**

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima melaksanakan 6 (Enam) Program, 17 (Tujuh belas) Kegiatan, 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan. Adapun hasil pengukuran kinerja keuangan terhadap pelaksanaan program/kegiatan utama sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Bima pada tahun

2025 juga menyelenggarakan program dan kegiatan rutin sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.20.
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rutin dan Wajib
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima
Tahun 2025

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**3.961.684.846**	**3.605.677.367**	**91,01%**
	A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**54.751.200**	**44.139.300**	**80,62%**
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.713.800	27.620.000	87,09%
	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.030.000	-	0,00%
	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.687.400	2.243.700	60,85%
	04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.755.000	1.755.000	100,00%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.650.000	2.080.700	57,01%
	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.456.000	3.370.000	97,51%
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.459.000	7.069.900	94,78%
	B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2.997.158.985**	**2.717.021.250**	**90,65%**
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.841.089.285	2.565.785.550	90,31%
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.760.200	145.926.200	96,79%
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.263.500	3.263.500	100,00%
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.046.000	2.046.000	100,00%
	C Administrasi Umum Perangkat Daerah	**199.975.500**	**167.371.000**	**83,70%**
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.525.900	1.200.000	78,64%
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.588.000	10.823.000	79,65%
	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.316.000	28.827.000	92,05%
	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.113.600	14.244.700	40,57%
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.432.000	112.276.300	94,80%
	D Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**66.580.000**	**60.738.000**	**91,23%**
	10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.580.000	60.738.000	91,23%
	E Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**172.998.000**	**162.376.692**	**93,86%**
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.748.000	31.876.692	76,36%

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.250.000	130.500.000	99,43%
	F Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**470.221.161**	**454.031.125**	**96,56%**
	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.526.311	81.501.525	87,14%
	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.504.850	347.865.700	99,25%
	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.190.000	24.663.900	94,17%
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**2.523.630.064**	**2.395.297.060**	**94,91%**
	A Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**52.841.000**	**30.122.000**	**57,00%**
	02 Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	52.841.000	30.122.000	57,00%
	B Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1.242.875.000**	**1.232.036.000**	**99,13%**
	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1.242.875.000	1.232.036.000	99,13%
	C Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**1.227.914.064**	**1.133.139.060**	**92,28%**
	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44.832.400	34.882.400	77,81%
	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.043.348.664	1.022.636.660	98,01%
	03 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayan Perempuan Kewenangan Kota/Kabupaten	139.733.000	75.620.000	54,12%
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**294.699.200**	**191.048.200**	**64,83%**
	A Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**75.127.000**	**57.964.000**	**77,15%**
	01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	38.135.000	24.290.000	63,69%
	02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.992.000	33.674.000	91,03%
	B Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**219.572.200**	**133.084.200**	**60,61%**

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	84.202.200	37.639.200	44,70%
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	135.370.000	95.445.000	70,51%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**35.944.800**	**26.658.000**	**74,16%**
	A Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	**35.944.800**	**26.658.000**	**74,16%**
	01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	27.239.000	23.418.000	85,97%
	02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.705.800	3.240.000	37,22%
5	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**168.403.600**	**113.850.600**	**67,61%**
	A Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**52.991.600**	**38.205.600**	**72,10%**
	01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.558.000	1.952.000	76,31%
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.433.600	36.253.600	71,88%
	B Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**115.412.000**	**75.645.000**	**65,54%**
	01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.800.000	1.800.000	100,00%
	02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.655.600	73.845.000	67,96%
	03 Pengembangan Komunikasi, Informasidan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.956.400	-	0,00%
6	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**641.450.800**	**440.858.400**	**68,73%**
	A Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**91.865.000**	**90.489.000**	**98,50%**
	04 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	91.865.000	90.489.000	98,50%
	B Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**345.261.400**	**298.363.300**	**86,42%**
	05 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	193.341.400	181.375.500	93,81%

NO	PRGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	06 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	151.920.000	116.987.800	77,01%
	C Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**204.324.400**	**52.006.100**	**25,45%**
	05 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	95.026.800	32.517.500	34,22%
	06 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	109.297.600	19.488.600	17,83%
	Total	**7.625.813.310**	**6.773.389.627**	**88,82%**

Sehubungan dengan pengelolaan Anggaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan dan pengelolaan keuangan telah sesuai dengan aturan dan prosedur administrasi keuangan yang berlaku, dengan sistim pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu hemat, efisien dan efektif serta mengusahakan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima tahun 2025 memiliki nilai strategis karena penyelenggaran tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025 merupakan tahun pertama Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima 2025-2029 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik atas sasaran-sasaran strategisnya yang terukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan pokok maupun pendukung yang telah dilaksanakan dengan baik selama tahun 2025.

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2025 semuanya telah direalisasikan dengan kategori sangat tinggi sebanyak 3 (tiga) indicator dari 4 indikator, dan 1 (satu) indikator dengan kategori tinggi. Adapun realisasi penyerapan anggaran (Keuangan) sebesar 74,27%.

Rata-rata capaian indikator sasaran strategis adalah sebesar 99,57% yang terukur melalui 4 (empat) indikator kinerja utama. Capaian sasaran strategis I yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen) sebesar 101,39% dan capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu Rasio perempuan korban kekerasan (per 10.000 pdd perempuan usia 18 thn ke atas) sebesar 118,72%, Serta capaian sasaran strategis III yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) sebesar 78,16% dan nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak sebesar 100%.

Rata-rata capaian sasaran strategis I, II, dan III terhadap target jangka menengah Dinas Pemberdayaan perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima yaitu sebesar 88,27%. Adapun capain kinerja indicator yang belum memenuhi target bila dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029, terdapat pada capain kinerja

sasaran strategis III yaitu pada indikator Rasio Anak Korban Kekerasan (per 10.000 pdd < 18 thn) sebesar 56,97% dan Nilai Kecamatan yang memenuhi kriteria layak anak baru mencapai 90,06%. Sehingga perlu ditingkatkan capain kinerja, agar dapat mencapai target yang sudah di tetapkan pada akhir periode renstra.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima Tahun 2025 dapat terpenuhi dengan baik, namun perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kotra Bima perlu dioptimalkan lagi agar lebih efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bima.

4.2. Rekomendasi Pemecahan Masalah

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting bagi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bahan dan masukan yang baik untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal. Dengan demikian, LKIP dapat menjadi instrumen yang efektif bagi sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana tehnis pembangunan daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindaklanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman setiap Perangkat Daerah (PD) bahwa isu gender sudah menjadi isu bersama dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan dalam rangka pengkaderan caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki.

3. Menyelenggarakan sekolah perempuan di setiap kecamatan maupun kelurahan sebagai wadah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan pagi perempuan.
4. Mendorong dimudahkannya pemberian bantuan modal/kredit usaha pada kelompok-kelompok usaha perempuan hasil kerjasama dengan berbagai lintas sector, terutama dengan pihak perbankan, guna menumbuhkan minat usaha dalam rangka meningkatkan nilai pendapatan bagi perempuan.
5. Meningkatkan sosialisasi terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).
7. Pemantapan dan penguatan kelembagaan yang menangani bidang perlindungan perempuan dan anak, koordinasi berkelanjutan dan membangun komitmen dengan pihak-pihak terkait.
8. Meningkatkan sosialisasi terhadap regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah terkait Kota Layak Anak tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan.
9. Membangun komitmen dengan berbagai stakeholder untuk mendorong sejumlah kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.
10. Pentingnya mendorong program Kota Layak Anak untuk dianggarkan di level Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Layak Anak (KLA)
11. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).

Akhirnya, besar harapan kami Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima ini dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntabel serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bima dalam rangka merencanakan Pembangunan Daerah dan menciptakan *Good Governance* di lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima yang tentunya tak mungkin berhasil tanpa bantuan dari segala pihak.

Raba Bima, Februari 2026

Kepala DPP – PA

Syahruddin, SH, M.M
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19690707 198903 1 004



2025

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami khaturkan kepada Allah SWT yang dengan Rahman dan Rahimnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan potret pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu selama tahun 2025 yang menggambarkan kinierja SKPD baik keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai maupun kegiatan-kegiatan yang kurang efektif dilaksanakan.

Laporan LKIP ini kami susun dengan maksimal dengan mengarahkan sumber daya yang ada, namun demikian karena keterbatasan yang dimiliki kami menyadari bahwa masih dijumpai kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan penyusunan pada masa-masa mendatang.

Demikian LKIP ini disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaa sebagai alat ukur kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dan pihak lain yang berkepentingan, terimakasih.

Raba - Bima, Maret 2026

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Bima,

A. RAFIK, ST.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820609 200604 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tugas Pokok, Funsi Dan Struktur Organisasi 2

1.2.1 Tugas dan Pokok 2

1.2.2 Struktur Organisasi 6

1.3 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9

2.1 Perencanaan Kinerja Jangka Menengah 9

2.2 Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 10

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 11

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2025 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 14

3.2 Realisasi Anggaran 23

3.3 Perbandingan Kinerja 2024 dan 2025 23

3.4 Perbandingan Kinerja 2025 dengan RPJMD 27

3.5 Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Renstra 29

3.5 Perbandingan Kinerja 2025 dengan Indikator Nasional 30

3.6 Analisis Efisiensi Kinerja Anggaran 31

BAB IV PENUTUP 39

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah serta penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan lebihlanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Wali Kota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima selama Tahun 2025.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima adalah sebagai berikut : .

1. Tugas Pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksana fungsi Penunjang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenanagan Daerah bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima adalah sebagai berikut :
    a. Perumusan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan Fungsinya;

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :
   a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
   b. Pengelolaan urusan keuangan;
   c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan Badan;
   d. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Pada sekretariat terdapat 2 (dua) sub bagian yaitu :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi bidang;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan, selain itu juga melakukan tugas perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggung jawaban keuangan Dinas.

B. Bidang Pencegahan

1. Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan program kerja dibidang pencegahan.

2. Dalam melaksanakan tugas bidang penegakan pencegahan mempunyai fungsi :
   a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
   b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sub bidang dibawahnya;
   c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang pencegahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait, dalam rangka tim yustisia dan keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang pencegahan;
   e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis kerjasama pembinaan dan pencegahan;
   f. Pelaksana koordinasi dan Kerjasama/kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau swasta dalam rangka Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
   g. Pelaksana koordinasi dan Kerjasama dengan instansi terkait terkait terhadap ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan;
   h. Peaksana Pembina dan pengawas teknis Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan
   j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada bidang Pencegahan terdapat 2 Seksi yaitu :
   a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan,

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pencegahan.

C. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

1. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka, penyelenggaraan program kerja bidang Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
   a. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang;
   b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) dan program kerja seksi dibawahnya;
   c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang sumber daya manusia, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. Pengkoordinasian, konsultasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/Instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
   e. Pengkoordinasian dengan instansi terkait, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima;
   f. Pengkoordinasian kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; dan

h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pada bidang Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdapat 2 Seksi yaitu :

a. Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan perencanaan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.

1.2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bima nomor 88 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima terdiri atas :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pencegahan, terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

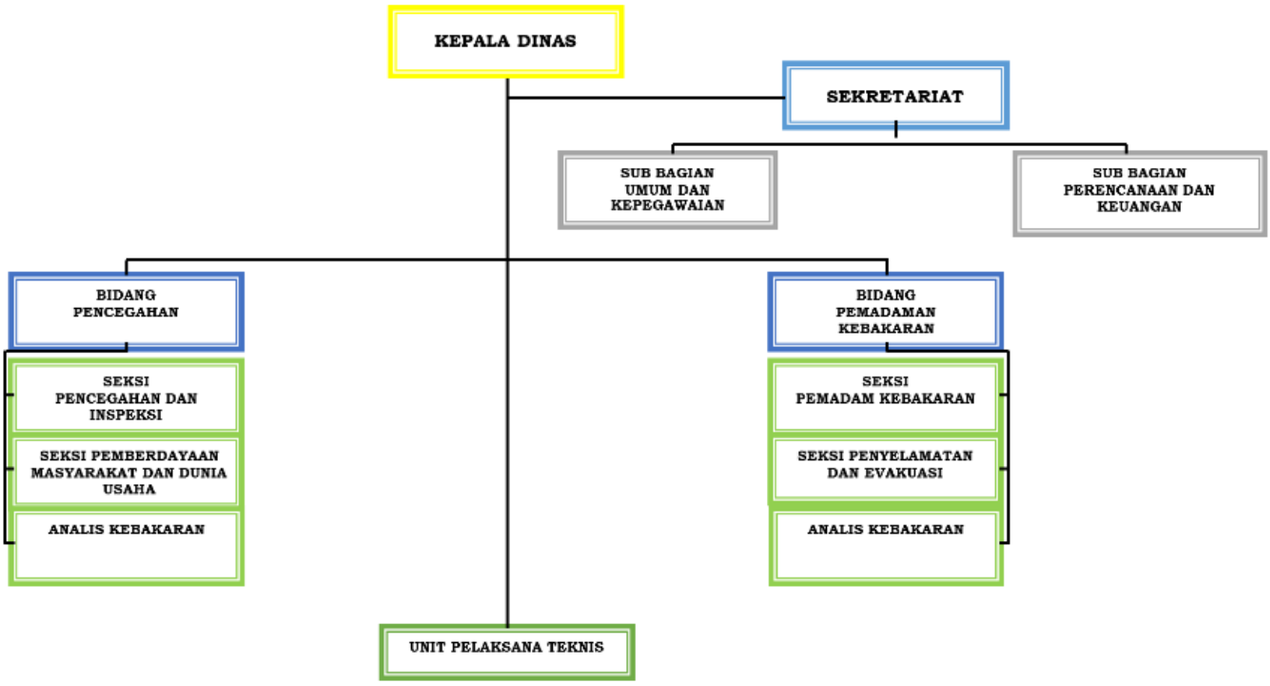
d. Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Sarana Prasana, terdiri dari :

1. Seksi Pemadam Kebakaran;
2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan

e. Unit Pelaksana Teknis :

.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima



1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Sebagaimana diketahui bahwa isu strategis merupakan permasalahan yang berkaiatan dengan fenomena atau akumuasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan yang perlu diatasi secara bertahap. Oleh karena itu, kemampuan menentukan isu dan dampak-dampaknya secara tepat akan sangat membantu sebuah organisasi dalam pencapaian program sesuai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis :

Setelah dilakukan kajian-kajian diatas, dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dalam rentang waktu 2025-2029 sebagai berikut:

1. Isu internal dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain :

a. Jumlah SDM aparatur Dinas Pemadam Kebakaran masih dan kurang;
b. Keterbatasan anggaran Operasional dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
c. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai dalam kegiatan pelaksanaan penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
d. Sistem kerja Aparatur Pemadam yang melebihi jam kerja normal namun belum ada tunjangan dalam membayar kelebihan jam kerja dari Aparatur Pemadam Kebakaran tersebut;
e. Belum adanya Pos Sektor Damkar yang tersedia pada masing-masing Kecamatan sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2028 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran;
f. Masih banyak Aparatur Pemadam Kebakaran yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran.

2. Isu-isu strategis eksternal antara lain :
   a. Masih banyak Bangunan Perkantoran atau Fasilitas Umum di Kota Bima yang belum mempunyai sarana dan prasarana standar dalam mencegah Kebakaran (proteksi Kebakaran);
   b. Masih kurangnya keterampilan dan keahlian dari pelaku dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
   c. Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar OPD di Kota Bima dalam kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran dan bahaya non kebakaran.
   d. Belum adanya Peraturan dari Pemerintah Daerah Kota Bima dalam mengatur system kerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait kelebihan jam kerja Aparatur Pemadam Kebakaran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima sebagai koordinator keamanan dan ketertiban daerah dituntut untuk selalu tanggap dan responsive terhadap dinamika serta perubahan-perubahan yang terjadi baik secara internal wilayah maupun secara eksternal. Disamping itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima juga dituntut untuk mampu menerapkan berbagai pendekatan peraturan dan penegakan perda dalam konteks dan waktu yang tepat untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan kebutuhan berbaga kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima sebagai perangkat daerah di Kota Bima.

Dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029 yang merupakan produk Perencanaan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah periode 2025-2030 maka telah dimuat arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Bima yaitu terdiri dari beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa aman yang berkeadilan bagi Masyarakat
2. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang produktif dan kompetitif
3. Terwujudnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan Kota Bima
4. Menurunnya risiko bencana
5. Terwujudnya Kota Layak Huni
6. Terwujudnya penciptaan lapangan kerja dan angkatan kerja terampil
7. Terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif, merata dan berkeadilan

Berdasarkan tujuan pembangunan Kota Bima Tahun 2025-2029 tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima telah merumuskan Tujuan dan Sasaran Strategis sampai tahun 2025 sebagaimana yang telah tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Strategis yang sudah dirumuskan perlu dilengkapi dengan indikator kinerja serta target indikator untuk memudahkan langkah pelaksanaannya maupun pengukuran hasil atau tingkat capaian dari Sasaran Strategis tersebut.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Kota Bima beserta indikator kinerja setiap tahunnya disajikan sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	80,49%	85,37%	92,68%	97,56%	100,00%

2.2. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 bisa dilihat pada tabel 2.2, pada tabel tersebut disajikan jenis indikator program yang mengacu pada bidang urusan

pemerintah dan program prioritas pembangunan yang tertuang pada RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029, kondisi awal (tahun 2024), serta target pertahunnya hingga akhir periode.

Indikator kinerja utama (IKU) dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu dokumen perencanaan. IKU Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima menunjukkan indikator terhadap kinerja kegiatan utama yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima. Ada 1 (Satu) kinerja utama yang dijadikan sebagai indikator kinerja Utama dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025-2029, seperti yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Pengukuran dan Tipe Penghitungan)
1	2	3	4
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	Jumlah Kelurahan yang masuk dalam Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time ———————————X 100% Jumlah Kelurahan di Kota Bima

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025 dijabarkan berdasarkan Indikator Kinerja utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025-2029 dan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025.

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	80,49%

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahunan sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahunan sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja ini, antara lain sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dan Wali Kota Bima untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan

d. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima pada awal Tahun 2025 terdiri dari 1 (Satu) sasaran strategis dan 1 (Satu) indikator kinerja utama dengan anggaran sebesar pencapaian indikator kinerja ini dilakukan melalui 2 (Program) program dengan total anggaran sebesar sebesar **Rp. 8.660.719.873,00,-** ***(Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)***

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	80,49%

Tabel 2.5.

Jumlah Program dan Anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	*2*	*3*
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.276.212.098,00	APBDP
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.431.227.775,00	APBDP

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pengukuran kinerja tersebut membandingkan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya serta membandingkan dengan target renstra dan standar nasional. Pembahasan berikut menunjukkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerjanya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

Pencapaian Tujuan :

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025-2029, terdapat 1 (Satu) tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima

No	Tujuan	Indikator	Target
1	*2*	*3*	*4*
1.	Penurunan Ganggunan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman	Persentase Penurunan Ganggunan Keamanan Ketertiban dan Ketenteraman	93%

Capaian tersebut tidak terlepas dari pencapaian sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima yang selanjutnya diuraikan pada bagian berikutnya dari pembahasan Bab III ini.

Pencapaian Sasaran Strategis
Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran

Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan merupakan sektor strategis dalam menjalankan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dalam hal ini sangat dibutuhkan pengertian pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Meningkatnya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan akan mendukung lancarnya investasi, kesempatan berusaha maupun pembangunan disegala bidang akan tercapai dengan baik. Adapun target kinerja dan realisasi untuk pengukuran kinerja sasaran strategis Tahun 2025 dapat dilihat pada data berikut :

1. Jumlah Kelurahan di Kota Bima Tahun 2025 : 41 Kelurahan
2. Jumlah Kelurahan yang masuk dalam Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time : 33 Kelurahan

   Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Bima :

$$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang masuk dalam Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time}}{\text{Jumlah Kelurahan di Kota Bima}} \text{ X } 100\%$$

$$= \frac{\text{33 Kelurahan}}{\text{41 Kelurahan}} \text{ X } 100\%$$

$$= 0{,}8049 \text{ X } 100\%$$

$$= 80{,}49\%$$

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja pada Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	80,49%	80,49%	100%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis tersebut, selama Tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) program pokok sebagaimana ditunjuk dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Program/Kegiatan Utama yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program/Kegiatan Utama yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis	Jumlah Anggaran
1	*2*	*3*	*4*
1.	**Peningkatan Kualitas Penanganan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran**	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kab/Kota	Rp. 7.276.212.098,00
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 1.431.227.775,00

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima 2025

Pengukuran kinerja tersebut diatas merupakan bagian dari proses penilaian akuntabilitas jangka menengah maupun tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima. Hal ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun berkenaan terhadap target jangka menengah yang telah

ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima sehingga tergambar capaian target jangka menengah sampai Tahun 2025.

Disamping itu juga dilakukan pengukuran kinerja untuk eselon III dan IV yang diukur melalui pencapaian kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja Program dan Kegiatan untuk eselon III dan IV

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsen	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsen	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanDokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Porsen	100	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65	65	100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	72	128	177%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	14	14	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Porsen	100	100%	100%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Terdata	Porsen	100	100%	100%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Porsen	100	100%	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsen	100	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsen	100	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100%
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Tingkat Respon Time Dalam Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (15 Menit)	Persen	80,49	80,49	100%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kejadian pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota terhadap jumlah laporan Masyarakat	Persen	80,49	96,77	120%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan PemadamanKebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	12	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	1	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	1	1	100%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Kelurahan	41	41	100%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM dan RISPKP yang berkaitan dengan pencegahan Kebakaran	Dokumen	1	1	100%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1	100%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang dilakukan pembinaan dan Peningkatan kapasitasnya	Orang	4	4	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
	dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan AnalisDalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	4	4	100%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	100%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi	Persen	100	100	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan InvestigasiLanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	1	1	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) yang dilakukan Pembinaan	Orang	640	4.239	662%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	500	4.099	819%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaranpada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan	41	41	100%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Kegiatan Operasi Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membayakan Manusia	Kegiatan	1	1	100%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	1	1	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Dokumen	1	1	100%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
		Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap KondisiMembahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	1	1	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	1	1	100%

Keberhasilan kinerja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung sehingga kegiatan tersebut berjalan cukup efektif, antara lain :

1. Leadership atau kememimpinan yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Koordinasi dan kerjasama antar Bidang yang baik;
3. Sistem evaluasi kinerja yang rutin dilakukan oleh Pimpinan;
4. Penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan dengan secepat mungkin sehingga meminimalisir dampak dari hambatan-hambatan tersebut.

Secara lebih terperinci, hingga akhir Tahun 2025, keadaan pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
1.	S2	2	2,78%
2.	S1	21	29,17%
3.	Diploma 3	-	-
4.	SMA / sederajat	49	68,06%
5.	SLTP	-	-
Total		**72**	**100%**

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

Tabel 3.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
1.	Golongan IV	6	8,33%
2.	Golongan III	24	33,33%
3.	Golongan II	42	58,33%
Total		**72**	**100%**

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

Tabel 3.7

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1	*2*	*3*	*4*
1.	Eselon II	1	1,39%
2.	Eselon III	3	4,17%
3.	Eselon IV	6	8,33%
4.	Non-Eselonering	39	54,17%
5.	Fungsional	23	31,94%
Total		**72**	**100%**

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

Berdasarkan profil SDM aparatur diatas diketahui bahwa pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar yaitu dengan tingkat Pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 49 orang (68,06%), selanjutnya 21 orang (29,17%) adalah S-1, dan 2 orang (2,78%) dengan tingkat pendidikan Sarjana S-2,. Berdasarkan kualifikasi golongan, maka diketahui bahwa sebagian besar pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima (58,33%) atau 42 orang adalah Golongan II, 24 orang (33,33%) Golongan III, dan sisanya 6 orang (8,33%) adalah pegawai golongan IV.

Walaupun berdasarkan jenjang pendidikan, golongan dan pangkat, sebagian besar aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima cukup memadai, namun mengingat tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan cenderung kompleks, maka masih dibutuhkan peningkatan keterampilan khusus perencana guna meningkatkan sumber daya aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak yang relevan.

3.2. Realisasi Anggaran

1. Target dan Realisasi Belanja

Anggaran seluruh kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 8.707.439.873,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.924.979.234,-** atau sebesar **79,53%.** Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp. **8.660.719.873,-** Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima merealisasikan sebesar **Rp. 6.878.459.234,-** atau sebesar **79,42%.** Adapun belanja modal dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 46.720.000,-** direalisasikan sebesar **Rp 46.520.000,-** atau sebesar **99,57%.**

Lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rekapitulasi Belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Belanja Operasi	8.660.719.873,-	6.878.459.234	79,42
2	Belanja Modal	46.720.000,-	46.520.000,-	99,57
Jumlah		**8.707.439.873,-**	**6.924.979.234,-**	**79,53**

Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

3.3. Perbandingan Kinerja 2023, 2024 dan 2025

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2023, 2024, dengan 2025 adalah untuk melihat bagaiamana proses peningkatan progress capaian kinerja dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya.

Data capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2023, 2024, dan 2025 dapat dilihat pada table capaian Sasaran Strategis berikut ini :

Tabel 3.9
Data Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2023, 2024, dan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	80,49%	80,49%	100%
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Tahun 2024**		
			Target	**Realisasi**	**% Capaian**
1.	Peningkatan Kualitas Penanganan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK)	100%	100%	100%
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target 2023**		
			Target	**Realisasi**	**% Capaian**
	Peningkatan Kualitas Penanganan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Non Kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK)	92%	97,87%	100%

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2023 adalah sebesar 100% dengan target 92% dan terealisasi 97,87%. Untuk 2024 adalah sebesar 100% dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Sedangkan untuk Tahun 2025 capaian kinerja sasaran strategis yaitu sebesar 80,49% dengan target 80,49% dan terealisasi sebesar 100%.

Tabel 3.10
Data Capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2023, 2024, dan 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	REALISASI KINERJA		
			2023	2024	2025
1	2		3	4	5
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100%	100%	100%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100%	100%	100%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	12
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	12	12
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	1	1	1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Unit	14	1	1
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kelurahan	41	41	41
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	-	100%	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	-	1	1
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kegiatan	100%	100%	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	2	1	1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	1	1	1

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	5	20	20
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dokumen	100%	100%	100%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	2	1	1
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kelurahan	3415%	321%	858%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang	2.758	1.694	4.396
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kelurahan	21	41	14
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Laporan	100%	100%	100%
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan	1	1	1

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2023, 2024, dan 2025 terjadi kenaikan dan penurunan dibeberapa Sub Kegiatan.

Terjadi penurunan pada sub kegiatan pengadaan sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dari capaian 2023 sebesar 14 unit turun ditahun 2024 dan 2025 menjadi 1 unit.

Kemudian terjadi penurunan pada sub kegiatan standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia/Penyelamatan dan evakuasi dari capaian 2023 sebanyak 2 Dokumen turun ditahun 2024 dan 2025 menjadi 1 Dokumen.

Kemudian terjadi peningkatan pada sub kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran, dari capaian 2023 sebanyak 5 orang naik ditahun 2024 dan 2025 menjadi masing-masing sebanyak 20 orang pertahun 2024 – 2025.

Kemudian terjadi penurunan pada sub kegiatan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran dari capaian 2023 sebanyak 2 dokumen turun ditahun 2024 dan 2025 menjadi 1 dokumen pertahun 2024 dan 2025.

Kemudian terjadi penurunan dan peningkatan pada sub kegiatan pemberdayaan masyrakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, dari capaian 2023 sebanyak 2.758 orang turun ditahun 2024 menjadi 1.694 orang, dan terjadi kenaikan ditahun 2025 menjadi 4.396 orang.

Kemudian terjadi peningkatan dan penurunan pada sub kegiatan pembentukan aparatur pemadam kebakaran, dari capaian 2023 sebanyak 21 kelurahan naik ditahun 2024 menjadi 41 kelurahan, kemudian turun ditahun 2025 menjadi 14 kelurahan.

3.4. Perbandingan Kinerja 2025 dangan RPJMD

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dengan Target RPJMD Kota Bima adalah untuk melihat bagaimana capaian progress Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima apakah sudah mempu menjawab target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029.

Adapun data capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025 dan target RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.11
Data Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 dan target RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target RPJMD Tahun 2025
1	2	3	5	7
1.	Peningkatan jangkauan layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time	80,49%	80,49%

Berdasarkan data 28dala diatas, dapat dijelaskan bahwa target Indikator Sasaran Strategis **"Cakupan layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran dengan Mutu Layanan sesuai Respon time"** dalam RPJMD Kota Bima 2025-2029 untuk tahun 2025 adalah sebesar 100%, sedangkan realisasi capaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025 adalah sebesar 100%. Dari perbandingan data capaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian 28dalah28or sasaran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bima sudah mampu memenuhi dari target RPD Kota Bima Tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan.

3.5. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima dengan Target RPJMD Kota Bima 29dalah untuk melihat bagaimana capaian progress Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima apakah sudah mempu menjawab target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2025-2029.

Adapun data capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima tahun 2025 dan target RPJMD 2025-2029 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.12

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja Renstra
1	2	3	4	5
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	80,49%	100%	80,49%
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	80,49%	100%	80,49%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	2 Unit	1 Unit	200%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK	41 Kelurahan	41 Kelurahan	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	10 Unit	1 Unit	1000%

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	19 Orang	20 Orang	95%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	100%	100%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	805	858%	100%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	600 Orang	4.396 Orang	13,64%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	41 Kelurahan	14 Kelurahan	292,85%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Laporan	1 Laporan	100%

3.6. Perbandingan Kinerja 2025 dengan Indikator Nasional

Sesuai dengan Permendagri No 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Target Nasional capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah **100% (seratus persen)** hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara. Adapun perbandingan target Nasional dan capaian kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Bima adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Data Capaian Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 dan target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Target Nasional (Bersarkan Permendagri 114 Tahun 2018)
1	3	4	5
1.	Tingkat Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran WMK)	100%	100%

Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Capain kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025 telah mampu memenuhi Target yang ditetapkan secara Nasional.

3.7. Analisis Efisiensi Kinerja Anggaran

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan input/output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Analisis efisiensi Kinerja anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima adalah membandingkan Realisasi penggunaan anggaran dengan realisasi output yang telah dihasilkan. Adapun analisis realisasi kinerja anggaran dan realisasi output dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Data Kinerja Anggaran dan Kinerja Output Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			RASIO	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN		
1	2	3	4			5	6			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Porsen	100%	100%	100%	7.276.212.098	5.518.045.498	75,83%	75,83%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Porsen	100%	100%	100%	10.960.000,00	10.956.000,00	99,96%	99,96%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100%	1.866.000,00	1.866.000,00	100%	100%	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100%	1.577.000,00	1.577.000,00	100%	100%	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100%	1.103.000,00	1.103.000,00	100%	100%	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100%	950.000,00	950.000,00	100%	100%	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dokumen	2	2	100%	871.000,00	871.000,00	100%	100%	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	4	4	100%	4.593.000,00	4.589.000,00	100,08%	100,08%	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			RASIO	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN		
1	2	3	4			5	6			
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Porsen	100	138%	138%	6.102.647.638,00	4.355.277.275,00	71,36%%	51,71%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	65	65	100%	5.961.739.638,00	4.216.876.375,00	70,73%	70,73%	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	70	128	182,85%	136.298.000,00	133.897.900,00	98,23%	53,72%	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100%	886.000,00	886.000,00	100%	100%	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	14	100%	2.989.000,00	2.954.000,00	98,82%	98,82%	
1.2.5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	1	100%	735.000,00	663.000,00	90,20%	90,20%	
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Porsen	100	100%	100%	13.719.000,00	13.716.800,00	99,98%	99,98%	
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	100%	2.592.000,00	2.592.000,00	100%	100%	
1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100%	11.127.000,00	11.124.800,00	99,98%	99,98%	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Porsen	100	100%	100%	700.000,00	700.000,00	100%	100%	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			RASIO	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN		
1	2	3	4			5	6			
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100%	700.000,00	700.000,00	100%	100%	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Porsen	100	100%	100%	221.902.460,00	217.594.511,00	98,05%	98,05%	
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	12	12	100%	41.123.000,00	40.923.000,00	99,51%	99,51%	
1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	12	12	100%	15.035.460,00	15.025.000,00	99,93%	99,93%	
1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	12	100%	18.468.000,00	18.468.000,00	100%	100%	
1.5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	147.276.000,00	143.178.511,00	97,21%	97,21%	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsen	100	100%	100%	481.379.000,00	476.488.706,00	98,98%	98,98%	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%	7.186.000,00	7.186.000,00	100%	100%	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	100%	474.193.000,00	469.302.706,00	106,96%	106,96%	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Porsen	100	100%	100%	444.904.000,00	443.312.206,00	98,96%	98,96%	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	1	1	100%	32.502.000,00	31.666.875,00	97,43%	97,43%	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			RASIO	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN		
1	2	3	4			5	6			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	7	100%	289.337.000,00	288.916.500,00	99,85%	99,85%	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	20	20	100%	13.260.000,00	13.259.000,00	99,99%	99,99%	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Unit	1	1	100%	109.805.000,00	109.469.831,00	99,69%	99,69%	
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	80	100%	125%	1.254.826.775	1.236.426.839	98,53%	78,82%	
2.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Porsen	100	100%	100%	1.141.716.775,00	1.123.914.839,00	98,44%	98,44%	
2.1.1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	100%	189.739.000,00	189.732.000,00	99,99%	99,99%	
2.1.2	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12	12	100%	114.602.000,00	114.602.000,00	100%	100%	
2.1.3	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	1	1	100%	15.304.000,00	15.304.000,00	100%	100%	
2.1.4	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kelurahan	41	41	100%	10.583.775,00	10.212.000,00	96,48%	96,48%	
2.1.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Unit	1	1	100%	811.488.000,00	794.064.839,00	97,85%	97,85%	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			RASIO	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN		
1	2	3	4			5	6			
2.2	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	100%	100%	4.730.000,00	4.723.000,00	99,85%	99,85%	
2.2.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	4.730.000,00	4.723.000,00	99,85%	99,85%	
2.3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Orang	20	100%	5%	448.697.000,00	435.780.797,00	97,12%	19,42%	
2.3.1	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Orang	20	20	100%	69.359.000,00	69.304.997,00	99,92%	99,92%	
2.4	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persen	100	100%	100%	13.005.000,00	12.721.000,00	97,81%	97,81%	
2.4.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen	1	1	100%	13.005.000,00	12.721.000,00	97,81%	97,81%	
2.5	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	100%	100%	10.940.000,00	10.891.000,00	99,55%	99,55%	
2.5.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	1	100%	10.940.000,00	10.891.000,00	99,55%	99,55%	
2.6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kelurahan	41	858%	20,92%	78.367.000,00	72.866.900,00	92,98%	44,44%	
2.6.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang	500	4.396	879,2%	31.512.000,00	27.651.900,00	87,75%	99.80%	

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA			KEUANGAN			RASIO	KATEGORI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI ANGGARAN 2025	CAPAIAN		
1	2	3	4			5	6			
2.6.2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kelurahan	14	14	100%	46.855.000,00	45.215.000,00	96,49%	96,49%	
2.7	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kegiatan	1	100%	100%	113.110.000,00	112.512.000,00	99,47%	99,47%	
2.7.1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	1	1	100%	61.604.000,00	61.006.000,00	99,02%	99,02%	
2.7.2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	1	1	100%	6.212.000,00	6.212.000,00	100%	100%	
2.7.3	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan	1	1	100%	10.848.000,00	10.848.000,00	100%	100%	
2.7.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit	1	1	100%	34.446.000,00	34.446.000,00	100%	100%	

Berdasarkan data Realisasi Kinerja Anggaran dan Realisasi Kinerja Output diatas, ada beberapa Sub Kegiatan yang dilakukan efisiensi untuk kinerja anggaran, antara lain sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) dengan anggaran Rp. 10.583.775,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.212.000,00 (96,49%), dengan anggaran yang minim tersebut dan uraian belanja hanya untuk penyediaan beberapa unit alat Komunikasi serta perlengkapannya, mampu menghasilkan Output yaitu ***41 Kelurahan yang yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Kelurahan Setiap Tahunnya***. Realisasi Output Sub Kegiatan ini diperoleh dengan Optimal dikarenakan adanya Sinergi/Kolaborasi Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah (*Cross Cutting*) yaitu dengan Dinas KOMINFO Kota Bima yang telah menyediakan Aplikasi SANINU (E-LAPOR) yang mampu membantu setiap Kelurahan yang ada di Kota Bima sehingga bisa mengakses dan melaporkan setiap kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima. Selain itu, *Cross Cutting* juga dilakukan dengan Perangkat Daerah lainnya seperti Kelurahan, RT, RW yang ada di Kota Bima, dimana Perangkat-Perangkat Daerah tersebut memiliki Program Pengadaan *Handphone* (HP) Android yang membantu mempercepat proses Pelaporan/pengaduan terkait adanya kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran.
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dengan Anggaran Rp. 31.512.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.651.900,00 (87,75%). Dengan anggaran yang ada, dalam Target Output yang ditetapkan hanya 500 Orang, namun dalam pelaksanaannya tercapai realisasi output sebanyak 4.396 Orang. Hal ini dikarenakan sedianya kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima sebanyak 2 Kali, akan tetapi realisasi pemberdayaan masyarakat sebanyak 34 Kali. Realisasi yang jauh melebihi target tersebut karena adanya Undangan dan Permintaan secara mandiri oleh Kantor-kantor BUMN, Lembaga Pendidikan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Sehingga jumlah target orang yang mendapatkan pemberdayaan dan sosialisasi tentang Pencegahan dan penanggulangan kebakaran melebihi dari target yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan instrumen akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, instrumen ini juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Kinerja (Perfomance) dapat dianalisis melalui dua aspek yaitu proses bekerja dan hasil prestasi kerja, dimana kinerja juga merupakan perpaduan antara motivasi yang terdapat dalam diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan. Pengelolaan kinerja merupakan proses yang dirancang untuk menghubungkan satuan-satuan organisasi sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dan tujuan individu tertentu.

Manajemen kinerja didasarkan pada informasi yang diperoleh dari laporan atau sistem laporan kerja, tujuannya untuk membantu meningkatkan prestasi dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan serta melakukan hal-hal yang akan mengembangkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan. Tujuan lainnya juga adalah untuk mengetahui karyawan yang berprestasi dalam menerima tanggung jawab lebih besar, dan untuk memutuskan kenaikan gaji secara seimbang.

Secara garis besar, pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima Tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengukuran dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan selama Tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima melaksanakan 12 (Dua Belas) kegiatan strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa sebanyak 12 (Dua Belas) kegiatan telah dilaksanakan secara efektif atau 100%, Atau pelaksanaan keseluruhan kegiatan strategis adalah 100%.

2. Begitupun sasaran strategis yang ingin diwujudkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bima, telah dicapai sebesar 100%, dengan kategori sangat memuaskan.

Raba - Bima, Maret 2026
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Kota Bima,

A. RAFIK, ST.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19820609 200604 1 010